MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129/PMK.07/2021

TENTANG

PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR

DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, rincian kurang bayar dana bagi hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, alokasi kurang bayar dana bagi hasil dan lebih bayar dana bagi hasil menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

www.jdih.kemenkeu.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

www.jdih.kemenkeu.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
3. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.

Pasal 2

Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2018;
b. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2019;
c. Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020;
d. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
e. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2020.

www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan royalti sebesar Rp18.262.394.790,00 (delapan belas miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 4

Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar Rp56.420.913.668,00 (lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:

a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp54.589.081,00 (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah);
b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp27.016.576.354,00 (dua puluh tujuh miliar enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah); dan
c. Dana Reboisasi sebesar Rp29.349.748.233,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebesar Rp35.598.811.300.736,00 (tiga puluh lima triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:

a. Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp13.520.201.285.588,00 (tiga belas triliun lima ratus dua puluh miliar dua ratus satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
   1. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp12.003.997.064.738,00 (dua belas triliun tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah); dan

www.jdih.kemenkeu.go.id

2. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp1.516.204.220.850,00 (satu triliun lima ratus enam belas miliar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

b. Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp10.441.496.846.947,00 (sepuluh triliun empat ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
   1. Bagi Rata sebesar Rp1.020.441.106.982,00 (satu triliun dua puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
   2. Bagian Daerah sebesar Rp9.097.656.134.622,00 (sembilan triliun sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah); dan
   3. Biaya Pemungutan sebesar Rp323.399.605.343,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

c. Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp366.036.214.211,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar tiga puluh enam juta dua ratus empat belas ribu dua ratus sebelas rupiah);

d. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp5.382.032.708.273,00 (lima triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:
   1. Minyak Bumi sebesar Rp2.147.305.288.893,00 (dua triliun seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
   2. Gas Bumi sebesar Rp3.234.727.419.380,00 (tiga triliun dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

www.jdih.kemenkeu.go.id

e. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp4.593.847.952.925,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
   1. Iuran Tetap (*landrent*) sebesar Rp62.069.317.530,00 (enam puluh dua miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah); dan
   2. Royalti sebesar Rp4.531.778.635.395,00 (empat triliun lima ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

f. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp734.486.435.211,00 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
   1. Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp718.035.709.406,00 (tujuh ratus delapan belas miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus enam rupiah);
   2. Iuran Tetap sebesar Rp6.849.853.178,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
   3. Iuran Produksi sebesar Rp9.600.872.627,00 (sembilan miliar enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

g. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp478.384.902.841,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
   1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp43.146.469.320,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

www.jdih.kemenkeu.go.id

2. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp293.859.731.964,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); dan
3. Dana Reboisasi sebesar Rp141.378.701.557,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah); dan

h. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp82.325.154.740,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 6

Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebesar Rp7.652.864.361.849,00 (tujuh triliun enam ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

a. Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp1.264.319.072.730,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
   1. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp890.436.897.525,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); dan
   2. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp373.882.175.205,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima rupiah);

www.jdih.kemenkeu.go.id

b. Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp633.758.828.779,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
   1. Bagian Rata sebesar Rp665.572.598,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
   2. Bagian Daerah sebesar Rp599.525.712.896,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
   3. Biaya Pemungutan sebesar Rp33.567.543.285,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
c. Lebih Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp3.337.065.903,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah);
d. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.446.877.851.667,00 (satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
   1. Minyak Bumi sebesar Rp895.853.832.407,00 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh rupiah); dan
   2. Gas Bumi sebesar Rp551.024.019.260,00 (lima ratus lima puluh satu miliar dua puluh empat juta sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
e. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp3.939.517.131.257,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

www.jdih.kemenkeu.go.id

1. Iuran Tetap (Rp552.546.042.009,00 (lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus empat puluh enam juta empat puluh dua ribu sembilan rupiah); dan
2. Royalti sebesar Rp3.386.971.089.248,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

f. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp1.371.094.907,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah), terdiri atas:
   1. Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp 418.293.193,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
   2. Iuran Tetap sebesar Rp917.881.922,00 (sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah); dan
   3. Iuran Produksi sebesar Rp34.919.792,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

g. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp361.138.572.304,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah), terdiri atas:
   1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp116.857.661.760,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
   2. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp48.335.065.305,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan
   3. Dana Reboisasi sebesar Rp195.945.845.239,00 (seratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan

www.jdih.kemenkeu.go.id

h. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp2.544.744.302,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 7

Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp2.193.467.005.338,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:

a. Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp12.080.209.119,00 (dua belas miliar delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah), terdiri atas:
   1. Bagian Daerah sebesar Rp11.656.908.789,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
   2. Biaya Pemungutan sebesar Rp423.300.330,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
b. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.665.228.625.964,00 (satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:
   1. Minyak Bumi sebesar Rp1.590.196.412.195,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah); dan
   2. Gas Bumi sebesar Rp75.032.213.769,00 (tujuh puluh lima miliar tiga puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

www.jdih.kemenkeu.go.id

c. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp742.858.992.185,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
   1. Iuran Tetap (*landrent*) sebesar Rp79.930.082.687,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
   2. Royalti sebesar Rp662.928.909.498,00 (enam ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

d. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp9.889.543.331,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
   1. Iuran Tetap sebesar Rp1.056.565.963,00 (satu miliar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
   2. Iuran Produksi sebesar Rp8.832.977.368,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

e. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp63.030.238.399,00 (enam puluh tiga miliar tiga puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
   1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp40.054.829.050,00 (empat puluh miliar lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
   2. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp18.437.789.790,00 (delapan belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah); dan

www.jdih.kemenkeu.go.id

3. Dana Reboisasi sebesar Rp4.637.619.559,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah); dan

f. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp379.396.340,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pasal 8

(1) Penyaluran Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

(2) Penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhitungkan penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021.

(3) Penyaluran Kurang Bayar DBH kepada daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Penyelesaian Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar DBH dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.jdih.kemenkeu.go.id

(2) Penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memperhitungkan penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021.

(3) Penyelesaian Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai:

a. rincian Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5; dan

b. rincian Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7,

menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1055

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

www.jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 /PMK.07/2021
TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR
DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2021

RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2021

Nasional

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	LB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak			1.301.[illegible].967.412	1.026.659.223.066	274.755.744.346
PPh			1.264.010.072.730	727.702.565.140	536.[illegible]6.507.590
PPh Pasal 21			690.[illegible]96.897.525	5[illegible]5.[illegible]6.611.738	375.[illegible]8.286.787
PPh Pasal 25/29			573.882.173.205	2[illegible]0.589.953.402	161.298.221.803
PBB			633.738.828.770	295.[illegible]0.999.090	338.[illegible]09.736.756
Bagi Rata			666.372.398	666.372.398	
Bagian Daerah Migas			89.569.632.271	39.361.771.493	[illegible]1.207.866.778
Bagian Daerah Non Migas			223.926.263.496	[illegible]31.599.891.040	92.326.372.456
Bagian Daerah Panas Bumi			16.605.129.245	4.223.223.057	12.381.906.188
Bagian Daerah Perhutanan			109.706.190.046	42.754.607.034	66.951.583.012
Bagian Daerah Pertambangan			[illegible]59.280.168.829	89.506.110.068	69.774.058.861
Bagian Daerah Sektor Lainnya			[illegible]39.394.019	306.[illegible]81.777	[illegible]12.887.758
Biaya Pemungutan Migas			5.870.860.270	[illegible]898.162.898	3.972.697.[illegible]72
Biaya Pemungutan Non Migas			13.277.014.426	2.996.020.643	10.080.993.783
Biaya Pemungutan Panas Bumi			663.682.163	[illegible]4.700.487	638.961.676
Biaya Pemungutan Perhutanan			5.[illegible]22.014.657	[illegible]1.498.844.083	3.724.170.574
Biaya Pemungutan Pertambangan			8.508.749.267	2.[illegible]67.376.167	6.3[illegible]4.373.100
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			[illegible]9.999.309	[illegible]8.[illegible]0.808	[illegible]1.701.661
CHT			3.007.065.903	3.007.065.903	

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL
PADA TAHUN 2021

Nasional

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semula TA 2020 (KMK No. 8/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Pajak	24.327.734.346.716	2.080.209.119	7.897.248.455.500	16.478.061.990.596	80.556.311.379
PPh	9.520.201.285.533		5.9[illegible]3.890.3[illegible]1.800	7.503.870.891.973	9.569.8[illegible]7.485
PPh Pasal 21	12.003.997.061.730	-	5.31[illegible]360.241.300	6.508.89[illegible]881.3[illegible]8	19.178.038.310
PPh Pasal 25/29	1.5[illegible]6.204.220.850	-	591.310.070.300	1.084.078.909.725	8[illegible]789.175
PBB	10.44[illegible]90.646.947	12.080.209.119	1.088.133.367.500	8.782.276.[illegible]24.222	40.993.[illegible]60.694
Pajak Rokok	1.920.441.109.982	-	124.419.873.500	886.021.733.162	-
Bagian Daerah Migas	4.749.268.641.085	3.871.480.100	687.295.577.900	4.066.186.620.243	17.085.041.563
Bagian Daerah Non Migas	2.058.969.572.040	3.211.807.056	288.665.601.400	1.775.084.314.431	7.992.050.633
Bagian Daerah Panas Bumi	159.091.701.403	252.872.099	21.513.791.100	137.6[illegible]5.718.[illegible]39	330.568.635
Bagian Daerah Pertambangan	382.807.958.67[illegible]	2.757.681.130	127.030.423.200	241.15[illegible].7[illegible]7.586	8.641.896.915
Bagian Daerah Perkebunan	1.840.419.183.890	960.61[illegible]866	367.652.431.900	1.276.620.781.273	1.795.639.149
Bagian Daerah Sektor Lainnya	135.979.071.037	600.795.341	6.822.067.300	122.920.480.327	1.264.271.841
Biaya Pemungutan Migas	137.89[illegible].431.990	126.176.411	22.654.537.400	130.306.621.662	591.864.397
Biaya Pemungutan Non Migas	98.044.666.378	119.867.069	9.622.196.400	89.19[illegible].283.264	292.207.975
Biaya Pemungutan Panas Bumi	5.305.992.176	8.868.292	719.623.100	4.688.866.667	10.362.884
Biaya Pemungutan Pertambangan	14.[illegible]66.989.127	161.521.116	4.940.072.100	9.069.[illegible]72.523	303.889.612
Biaya Pemungutan Perkebunan	72.913.905.870	17.835.950	16.340.109.000	56.[illegible]65.958.389	339.997.480
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	4.539.630.896	20.021.491	927.402.200	[illegible]397.240.896	[illegible]2.133.59[illegible]
OPT	356.036.214.2[illegible]	-	269.224.776.200	102.811.438.011	-

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL
PADA TAHUN 2021

Nasional (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	LB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
SDA	18,262,394,790	56,420,913,668	5,751,[illegible]9,391,437	[illegible],369,771,696,741	1,561,677,697,696
Migas			1,116,877,851,667	433,869,[illegible]58,050	1,016,994,303,617
Minyak Bumi 15%			711,774,030,906	593,122,810,[illegible]70	418,651,[illegible]20,436
Minyak Bumi 0,5%			23,639,179,120	2,620,973,277	21,032,282,731
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			[illegible]60,419,996,870	6,471,480,[illegible]50	153,948,516,820
Gas Bumi 30%			497,831,668,709	130,827,468,949	367,004,214,460
Gas Bumi 0,5%			9,322,221,760	834,787,701	8,387,487,086
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			13,070,129,061		13,070,129,061
Minerba	18,262,394,790		3,939,017,191,237	886,210,8[illegible]0,203	3,053,276,291,054
Landrent			982,0[illegible]6,042,009	26,390,9[illegible]8,250	[illegible]56,255,893,759
Royalti	18,262,394,790		3,386,971,089,246	759,9[illegible]0,891,953	2,627,02[illegible],197,293
Panas Bumi			1,371,094,907	45,047,217	1,326,0[illegible]7,690
Iuran Produksi			34,919,792		34,919,792
Iuran Tetap			917,881,923	45,047,217	872,834,706
Setoran Bagian Pemerintah			418,293,193		418,293,193
Kehutanan		56,420,913,668	361,186,872,804	49,682,[illegible]61,271	311,536,221,023
DR		29,349,718,233	195,0[illegible]5,[illegible]5,389	31,[illegible]97,550,675	164,748,294,564
IIUPH		54,530,081	116,857,661,760	[illegible]4,[illegible]77,[illegible]00,[illegible]44	102,780,261,316
PSDH		27,016,976,354	[illegible]8,305,065,905	4,037,[illegible]00,152	14,037,865,153
Perikanan			2,0[illegible]4,744,302		2,541,[illegible]4,302
Grand Total	18,262,394,790	56,420,913,668	7,052,864,361,849	2,[illegible]96,430,919,807	5,[illegible]56,433,[illegible]2,042

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL
PADA TAHUN 2021

Nasional

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesta TA 2020 (KMK No. 3/PM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SDA	11.271.077.132.990	2.461.356.790.219	2.010.502.119.760	10.275.295.324.041	3.496.167.377.029
Migas	5.392.032.708.276	1.665.228.625.964	244.474.285.725	5.283.382.324.272	1.811.032.527.088
Minyak Bumi 15%	2.078.037.370.391	1.339.192.029.842	204.856.955.725	3.009.719.869.572	1.468.731.164.815
Minyak Bumi 0,5%	69.267.912.569	19.856.342.450	6.735.447.900	66.750.771.220	17.080.143.001
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	208.147.569.693	10.764.472.300	-	218.912.012.203
Gas Bumi 30%	2.730.487.190.448	55.029.069.947	17.752.830.100	2.712.391.614.348	60.496.324.947
Gas Bumi 0,5%	39.530.996.122	966.440.022	249.946.800	39.404.092.732	1.002.391.022
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	464.703.378.800	14.404.733.200	4.117.035.300	460.990.776.400	14.809.771.100
Minerba	4.595.847.952.925	742.858.992.185	1.191.506.055.700	4.069.891.728.296	1.413.411.393.256
Landrent	62.069.317.530	79.930.082.687	19.709.049.600	51.125.820.500	118.695.635.257
Royalti	1.531.778.635.395	662.928.909.498	1.111.797.006.100	1.018.758.607.795	1.287.716.187.999
Panas Bumi	731.486.435.211	9.880.543.331	114.740.580.525	620.939.921.193	10.080.609.836
Iuran Produksi	9.600.872.697	9.803.977.368	4.601.848.250	7.930.443.302	11.090.396.493
Iuran Tetap	6.849.850.178	1.036.563.963	2.386.942.275	5.699.336.265	2.293.213.345
Setoran Bagian Pemerintah	718.033.709.466	-	107.731.790.000	610.283.919.466	-
Kehutanan	-78.964.002.841	63.030.236.399	29.920.147.370	208.798.830.660	179.364.244.013
DR	141.376.701.007	4.527.619.339	101.206.966.270	69.707.662.262	84.072.218.539
IHPH	42.146.409.320	40.034.829.050	19.706.163.950	40.694.697.745	57.310.241.425
PSDH	293.859.731.964	18.437.789.790	175.006.295.350	188.297.520.853	87.981.871.029
Perikanan	8.732.754.771	370.396.310	160.921.041.425		78.975.283.425
Grand Total	35.598.811.500.706	2.490.167.003.338	6.907.810.366.250	26.781.937.818.147	3.556.790.868.999

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Aceh

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar DBH Tahun 2019	Kurang Bayar DBH Tahun 2020	Lebih Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Tarif Transfer Tahun 2021 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Kurang Bayar DBH Tahun 2021 (Kolom (4)-(5))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			5.970.926.685	5.050.490.650	920.436.035
PPh	-	-	5.970.926.685	5.050.490.650	920.436.035
PPh Pasal 21	-	-	5.970.926.685	5.050.490.650	920.436.035
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB					
Bea Perolehan					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas					-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bunga Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bunga Pertambangan Pertambangan					
Bunga Pertambangan Perikanan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					-
DPT	-	-	-	-	-
Cukai	-	77.815.437	42.093.205.048	-	42.093.820.048
Migas			43.970.129.901		43.970.129.901
Migas Pasal 22					
Migas Pasal 0,5%					
Migas Pasal Dalam Rangka Otsus	-		-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	43.970.129.901	-	43.970.129.901
Minerba			63.000.367		63.000.367
Perikanan			53.000.000		53.000.000
Pajak					-
Pajak Lainnya			-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-	-
Bantuan Pemerintah					
Kekurangan		5.048.114			
DR	-	2.982.109.7	-	-	-
TUPS	-	-	-	-	-
PSLH		6.024.764			
Perikanan					
Grand Total		5.048.114	50.033.202.634	5.050.490.650	44.982.711.984

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Aceh (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH sementara TA 2020 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	81.743.7[illegible]3.859	-	26.[illegible]5.287.164	55.49[illegible].[illegible]26.715	-
PPh	29.584.017.53[illegible]	-	19.586.449.353	9.997.567.781	-
PPh Pasal 21	23.2[illegible].466.443	-	19.33[illegible].[illegible]52.353	3.956.553.91[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	1.351.151.116		23[illegible]	1.121.[illegible]51.116	
PBB	27.[illegible]30.292.217		6.931.955.990	18.205.29[illegible].227	
[illegible]					
Bagian Daerah Migas	15.340.559.700		4.1[illegible].161.330	11.[illegible].[illegible]70	
Bagian Daerah Non Migas	509.[illegible].451	-	[illegible]	[illegible].553	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	158.[illegible]	-	51.410.400	1[illegible].596	-
Bagian Daerah Perhutanan	6.201.686.341		[illegible].580.021.700	1.019.[illegible]	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	1.235.550.[illegible]		69.[illegible]	1.[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	637.554.[illegible]	-	171.[illegible].800	465.[illegible]	-
Biaya Pemungutan Non Migas	2.[illegible].565	-	1.4[illegible].5.700	[illegible].584.360	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perkebunan	6.507.412		1.574.900	[illegible].412	
Biaya Pemungutan Perhutanan	[illegible]		67.967.650	3[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	5[illegible].606.561	-	2.0[illegible].830	4[illegible]	-
CHT	614.454.061	-	443.0[illegible].564	171.[illegible].497	-
SDA	[illegible]	117.876.708.[illegible]	[illegible].474.095	5.[illegible]	128.[illegible]
Migas	58.[illegible]	11[illegible]	5.[illegible]	15.[illegible]	122.[illegible]
Minyak Bumi 15%		6.[illegible]	21[illegible].130		6.[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	97.826.9[illegible]	4.[illegible].457.[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi 30%	58.297.[illegible]	-	40.670.[illegible]	1[illegible]	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		14.[illegible]	[illegible]		14.[illegible].771.190
Minerba	5.[illegible]	1[illegible]	[illegible]	5.[illegible]	2[illegible]
Landrent		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Royalti	5.[illegible]		[illegible]	5.[illegible]	
Panas Bumi	[illegible].155	86.[illegible]	32.[illegible]	[illegible].109.460	97.[illegible]
Setoran Produksi	-	86.[illegible]	1.[illegible]	-	97.[illegible]
Iuran Tetap	1[illegible].153		[illegible]	1[illegible].109.460	-
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	6[illegible]	-	21.[illegible]	[illegible]	
DR	55[illegible]	-	-	55[illegible]	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	[illegible]	-	21.[illegible]	[illegible]	
Perikanan					
Grand Total	[illegible]	117.[illegible]	[illegible]	[illegible]	128.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab/Kota di [illegible]

(Rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
[illegible]	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					-
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	
[illegible]	-				
[illegible]	-				
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		-	-		
[illegible]	-	-	-		
[illegible]					
[illegible]					-
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-				-
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-				
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]					-
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]				-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-
[illegible]	-	-			
[illegible]					
[illegible]		[illegible]	-	-	-
[illegible]		-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Barat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Oktober TA 2020	LB Oktober TA 2020	Penyaluran DBH Bulan Oktober TA 2020 (SMK No. S-[illegible]/2021)	KB TA 2020 yang telah dilakukan penyelesaian	LB TA 2020 yang telah dilakukan penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29 Badan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reg. Baru	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Atas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah dari Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah dari Panas Bumi					-
Bagian Daerah dari Pajak		-			-
Bagian Daerah dari Pajak Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Pemerintah Pusat dari Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Pemerintah dari Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pemerintah dari Pajak	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah dari Pertambangan	-	-	-	-	-
Jasa Pemanfaatan Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Jasa Pemanfaatan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PBH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Alokasi Dasar 1%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Alokasi Dasar 2,5%					
Adendo Dana Bagian Daerah Migas					
Dana Otsus (Migas)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Dana Otsus (Migas)	-		-	-	-
Dana Otsus (Migas) Dana Penyesuaian	-		-	-	-
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Landrent	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Panas Bumi		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Pajak Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah dari Pajak	-		-	-	
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
IHP					
PSDH	-	-	-	-	-
DR/PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Besar

(dalam rupiah)

JENIS DBH	ALOKASI	REALISASI	LEBIH/(KURANG) BAYAR DBH TAHUN 2019 (PMK No. 205/PMK.07/2020)	Penyesuaian LEBIH/(KURANG) BAYAR DBH TAHUN 2020 (PMK No. 71/PMK.07/2021)	ALOKASI LEBIH/(KURANG) BAYAR DBH TAHUN 2021 (PMK No. 91/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			1,040,160,451	606,760,106	433,400,345
PPh	-	-	537,352,805	955,332,950	-417,980,145
PPh Pasal 21	-	-	537,352,805	955,332,950	-417,980,145
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB			742,207,646	332,978,846	409,228,800
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Sebesar 16,2%					
Bagian Daerah Penerimaan Tahun Lalu		-	229,111,580	229,111,580	-
Bagian Daerah Penerimaan Tahun Berjalan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Tahun Berjalan	-	-	148,955,066	-	367,707,466
Bagian Daerah Penerimaan Tahun Berjalan					
Bagian Daerah Sebesar 64,8%					
Bagian Daerah Penerimaan Tahun Lalu			-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Tahun Berjalan	-	-	93,847,054	93,847,054	-
Bagian Daerah Penerimaan Tahun Berjalan	-	-	-		
Bagian Pemerintah Penerimaan			52,114,670		61,810,270
Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota					
Bagian Daerah Penerimaan Tahun Berjalan Penerimaan	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
SDA	-	330,023	430,570,814		430,570,814
Migas			422,092,331		422,092,331
Bagian Daerah 15%					
Bagian Pemerintah 85%				-	-
Bagian Pemerintah Daerah Penerimaan Tahun Berjalan	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	402,312.55	-	402,707,351
Dana Reboisasi 60%	-	-	-	-	
Dana Reboisasi 40%	-	-	-		
Minerba			8,087,133		8,230,764
Landrent			8,087,133		8,230,764
Panas Bumi					
Bagian Pemerintah			-	-	-
Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Bagian Desa					
Saldo Dana Perimbangan					
Kekurangan		330,023			
PPh	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Jumlah		660,023			
Kelebihan					
Total Transfer		330,023	2,470,730,250	978,761,105	912,409,168

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Besar [illegible]

Jenis DBH	KB Sesuai PMK TA 2020	LB Sesuai PMK TA 2020	Penyelesaian KB DBH Sampai dengan TA 2020 (KMK No. .../KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(2)-(5)	(7)
Pajak	6.751.792.773	73.218.400	2.690.732.742	4.062.258.891	127.149.070
PPh	2.382.383.004		1.707.116.905	676.151.107	
PPh Pasal 21	2.405.560.681		1.696.870.205	709.633.881	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		10.247.000	[illegible]	
PBB	3.538.965.172	73.218.400	536.128.503	3.339.833.341	127.455.170
Cukai Hasil Tembakau	1.591.959.953		[illegible]	1.306.373.093	-
Bagian Daerah Migas	159.456.24	-	40.102.900	-	4.117.670
Bagian Daerah Non Migas	1.293.450.556	-	35.231.030	1.060.219.525	
Bagian Daerah Panas Bumi	-				
Bagian Daerah Perkebunan		16.721.500	38.510.000		116.759.700
Bagian Daerah Perhutanan		1.015.900	[illegible]	-	781.900
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]	-	7.404.300	636.394.707	-
Biaya Pemungutan Migas	4.319.680	-	1.003.000		149.210
Biaya Pemungutan Non Migas	40.177.870		1.320.250	30.379.000	
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perkebunan		2.132.600	1.594.500	-	4.157.400
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	43.400	31.300	-	74.200
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.737.33	-	205.800	6.168.781	
CHT	59.030.306		42.894.092	16.136.213	
SDA	902.144.617	615.015.135	419.566.675	931.391.972	896.298.196
Migas	3.330.245	499.290.565	25.910.500	1.666.075	511.446.560
Minyak Bumi 15%	-	499.290.565	21.045.600	-	511.446.560
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Otonomi Khusus	-	-			
Gas Bumi 30%	3.330.245		3.499.200	1.666.075	
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Otonomi Khusus					
Minerba	484.830.216	14.315.504	37.929.175	456.747.383	19.097.154
Landrent	-	14.315.504	5.376.550	-	19.097.154
Royalti	484.830.216	-	37.532.405	456.747.383	
Panas Bumi	313.639.737	70.062.530	54.201.850	402.065.312	195.832.025
Iuran Produksi		70.062.530	23.029.775		195.832.025
Iuran tetap	313.639.737		11.181.075	302.585.312	
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan	444.366	-	13.787.050	-	2.813.785
DR	-	-			
IIUPH					
PSDH	444.366		1.138.950	-	2.845.885
Perikanan	159.136.580	-	16.481.650	-	167.604.520
Grand Total	7.635.686.590	746.736.515	3.670.296.357	4.753.650.563	1.012.027.153

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Selatan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang 2018	Kurang 2019	Lebih s.d. TA 2019 (PMK No. 137/PMK.07/2017)	Penyesuaian 10 s.d. TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)	Sisa Lebih s.d. TA 2021 (PMK No. 137/PMK.07/2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	647.077.506	188.053.747	835.131.253
PPh	-	-	647.077.506	188.053.747	835.131.253
PPh Pasal 21	-	-	647.077.506	188.053.747	835.131.253
PPh Pasal 25/29	-				
PBB					
Bea Materai					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Pertambangan		-			
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi		-			
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Daerah Pajak Lainnya					
Bagian Pemerintah dari Pajak		-			
Bagian Pemerintah dari Pajak Migas		-			
Bagian Pemerintah dari Pajak Panas Bumi					
Bagian Pemerintah dari Perikanan					
Bagian Pemerintah dari Kehutanan					
Bagian Pemerintah dari Pajak Lainnya		-			
PPh		-			
SDA		670.000	514.940.000		514.940.000
Migas			422.292.301		422.292.301
Minyak Bumi					
Gas Bumi		-			
Pungutan Hasil Migas dari Pengusahaan Migas		-			
Gas Bumi 70,5%		-	422.292.301		422.292.301
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka DMO					
Minerba			92.647.699		92.647.699
Landrent			92.647.699	-	92.647.699
Royalti		-			
Pungutan Hasil		-			
Iuran Tetap (Landrent)		-			
Iuran Produksi (Royalti)					
Pungutan Lainnya Pertambangan					
Kehutanan		670.000			
PSDH		-			
DR		-			
PSDH		670.000			
Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau		2.160	1.365.151.572	188.053.747	735.361.825

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Selatan

(Dalam rupiah)

Uraian	PB Dana DBH TA 2020	PB Dana DBH TA 2020	Pengaturan PB TA 2020 Sumber Dana TA 2020 (ASN dr. PBH + PBN)	PB TA 2020 yang telah disalurkan	PB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	1,218,000,000	-	1,071,122,727	1,018,007,735	4,977,106
PPh	1,361,210,000	-	1,089,227,300	192,594,115	-
PPh Pasal 21	1,007,970,619	-	1,098,151,700	140,917,973	-
PPh Pasal 25/29	48,977,340	-	67,481,300	42,911,142	-
PBB	1,962,215,000	-	315,138,900	3,167,474,943	4,977,106
Bagi Rata	1,201,050,078	-	765,087,700	1,771,170,208	-
Bagian Daerah Migas	197,726,300		1,854,151,100		4,095,708
Dalam Daerah Bea Migas	3,120,000		1,201,100	21,205,100	
Luar Daerah Bea Migas					-
Bagian Daerah Pertambangan			-		-
Bagian Pusat PPh Pasal 21	15,335,955	-	37,453,900	1,470,701,100	
Bagian Pusat PPh Pasal 25/29	21,700,000	-	5,601,300	100,701,700	
Dana Perimbangan Migas	4,130,000		1,348,000		108,900
Dana Perimbangan Pas Bidas	1,200,000		101,000	576,145	-
Bagi Pertimbangan Pasal 21	-		-	-	-
Bagi Pertimbangan Pasal 25/29	-		-	-	
Bagi Pertimbangan Pasal 21	65,084,034		3,042,000	30,112,000	
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	6,707,000		208,000	6,198,193	
Cukai	20,720,000		21,299,900	6,526,762	-
CHA	1,940,000,000	430,015,000	995,300,000	31,594,345	970,035,750
Migas	3,565,196	270,702,305	95,563,200	1,648,377	371,470,500
Migas Bagi Rata (35%)	-	270,702,305	92,243,000		371,470,500
Migas Bagi Rata (10%)			-		-
Migas Dana Cadangan Kegiatan Khusus					-
Dana Migas DPR	3,565,196		3,320,200	1,648,377	-
Dana Migas (0,25%)			-	-	-
Dana Migas Dana Cadangan Kegiatan Khusus		-	-	-	-
Minerba	548,996,13	-	31,702,200	317,711,351	
Panas Bumi	1,410,400	-	7,102,000	4,500,313	
Royalti	395,240,577		21,049,222	312,007,018	
Pajak Daerah	1,040,211	7,019,000	2,000,100	12,000,200	8,980,975
Pajak Kendaraan		7,019,000	1,200,200	-	8,820,975
Pajak Rokok	15,626,219	-	871,075	12,555,255	-
Pajak Bagi Hasil (Provinsi)	-	-	-	-	
Pajak Rokok	2,035,500		3,472,075		1,234,172
DAK					
Fisik		-	-	-	-
Non Fisik	2,736,500	-	7,222,975	-	1,234,172
Pajak Hasil	20,780,380	-	210,851,000		10,000,000
Grand Total	3,077,015,215	407,019,215	1,941,000,000	2,170,782,201	250,000,000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Singkil

(dalam rupiah)

URAIAN	TH TH 2018	KB TA 2019	Realisasi DBH TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2020)	Realisasi DBH TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Selisih Realisasi DBH TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2020 - PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	313,442,903	158,165,367	154,276,735
Sub			313,442,903	158,165,367	154,276,735
PPh Pasal 21			313,442,903	158,165,367	154,276,735
PPh Pasal 25/29					
PPh					
Pajak Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Perimbangan					
Bagian Daerah Perimbangan Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah				-	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya			-		
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan		-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
SDA		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas			[illegible]		[illegible]
Migas Bagian 15%	-				
Migas Bagian 0,5%	-	-	-	-	-
Migas Bagian dari 0,5% Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Gas Bumi 69%		-	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Negeri					
Pertambangan			[illegible]		[illegible]
Pertambangan	-	-	[illegible]		[illegible]
Kehutanan					
Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Perikanan					
Pertambangan Minyak					
Pertambangan Gas Bumi					
Kelautan	-	[illegible]	-		
Migas	-	-	-	-	-
Panas Bumi					
PPh Pasal 21		[illegible]			
Pajak Lainnya	-				
Jumlah Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Singkil

(dalam rupiah)

Uraian	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)
Pajak	8.256.861.614	-	3.418.035.814	3.038.637.806	111.137.806
PPh	607.275.477	-	768.782.900	[illegible]	107.025.771
PPh Pasal 21	607.275.477	-	768.782.900	[illegible]	107.025.771
PPh Pasal 22/23	42.268.167		5.230.700	[illegible]	
PPN	3.471.050.461		1.021.134.050	[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau	1.181.067.936		221.123.700	[illegible]	
Bagian Daerah Negara	253.019.010		110.306.350	-	5.615.790
Bagian Daerah Pajak Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	-		-		
Bagian Daerah Pajak Pertambahan Nilai	1.078.228.476		1.142.121.420	[illegible]	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	211.009.007		8.564.050	[illegible]	
Bagian Pemerintah Pusat	33.636.091	-	1.451.650	-	146.100
Bagian Pemerintah Pusat Pajak	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Bumi dan Bangunan	-				
Bagian Pemerintah Perkebunan					
Bagian Pemerintah Perkebunan	38.[illegible]		9.[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	6.[illegible]	-	268.800	[illegible]	-
DPT	30.725.676	-	92.156.024	[illegible]	-
SDA	867.[illegible]	417.[illegible]	252.871.020	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	426.[illegible]	85.[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%		189.[illegible]	32.[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka DMO		-	-	-	-
Gas Bumi 30%	5.[illegible]	-	3.[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi 70%	-	-	-		
Gas Bumi dari Wilayah Otsus					
Minerba	[illegible]		23.[illegible]	[illegible]	
Kehutanan					
Panas Bumi	180.[illegible]		25.[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	63.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Perikanan	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Iuran Hasil Perikanan	[illegible]		971.077	[illegible]	
Bagian Daerah Perikanan					
Kehutanan	0.[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH	0.[illegible]		[illegible]		[illegible]
Perkebunan	[illegible]		110.[illegible]		[illegible]
Grand Total	9.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Tengah

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar Tahun 2020	Alokasi DBH Tahun 2021	Lebih Bayar DBH Tahun 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyesuaian Lebih Bayar DBH Tahun 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Sisa Lebih Bayar DBH Tahun 2020 (Lebih Bayar DBH Tahun 2020 - Penyesuaian Lebih Bayar DBH Tahun 2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	1.002.515.401	267.519.744	734.995.657
Total	-	-	756.367.001	267.519.744	488.847.257
PPh Pasal 21	-	-	185.358.000	267.519.744	472.737.744
PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	1.000.000	-	1.000.000
PBB	-	-	305.000.000	-	15.000.000
BPHTB	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Negara					
Alokasi Daerah Penghasil			-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	143.554.400	-	110.281.100
Bagian Daerah Penghasil			6.987.200	-	6.987.200
Bagian Daerah Selain Lainnya					
Alokasi Penghasil Lainnya				-	-
Bagian Penghasil Pajak Migas	-	-	-	-	-
Bagian Penghasil Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Alokasi Penghasil Pajak Bumi			3.000.000		2.000.000
Alokasi Penghasil Pajak Bumi			250.000		250.000
Bagian Penghasil Pajak Selain Migas				-	-
PPh	-	-	-	-	-
PBB	-	4.454.125	642.652.000		167.652.000
Migas			531.113.401		481.113.401
Alokasi Dana PBB			77.000.000		77.000.000
Alokasi Dana PBB			-	-	-
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil			-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	479.549.604	-	479.549.604
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau Kategori Lain	-	-	-		
Minyak Bumi			1.091.587.887		1.091.587.887
Lainnya			1.000.000.000		1.000.000.000
Daerah			91.587.887		91.587.887
Dana Bagi Hasil			-	-	-
Luas Perairan	-	-	-	-	
Luas Wilayah	-	-	-	-	
Seluruh Belanja Pemerintah					
Kehutanan		1.121.125			
DR		-	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
PSDH		1.121.125			
Pertambangan					
Alokasi Total		1.121.125	2.825.367.772	267.519.744	2.557.848.028

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Tengah

(dalam rupiah)

URAIAN	LB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran TA 2021 s.d. Desember TA 2020 (KMK No. 13/KM.7/2021)	PPKB TA 2020 yang belum Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)=(3)-(5)
Pajak	3.374.568.844	920.515.852	702.268.677	3.592.675.014	474.291.160
Pbb	1.034.424.447	-	1.034.141.000	283.282.447	-
PBB Pasal 21	1.350.023.035		1.350.023.035	283.282.447	-
PBB Pasal 25/29	77.270.895		13.077.830	64.193.065	-
PDB	2.086.585.921	209.373.317	291.064.035	1.991.364.174	111.691.160
Pbb Sektor	1.991.315.026		200.089.790	1.791.225.236	
Bagian Daerah Migas	17.236.165		121.211.000		9.252.311
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		219.944.000	159.778.000	-	306.847.000
Bagian Daerah Perkebunan	77.270.895			64.193.065	
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	119.595.201		8.921.000	205.094.707	
Bagian Pemerintah Migas	4.192.782	-	3.980.100	-	211.976
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Panas Bumi				-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan		7.170.320	6.076.100		1.247.020
Bagian Pemerintah Perikanan	5.913.274			2.010.271	
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	8.757.581	-	268.201	9.488.153	-
PPh	18.018.178	-	18.592.177	- 574.000	-
DAK	631.119.705	710.129.520	417.351.105	160.760.731	97.388.735
Migas	5.760.272	143.250.000	22.978.800	1.681.472	313.470.000
Migas PPh Pasal 22	-	143.250.000	22.978.800		313.470.000
Migas PPh Pasal 25	-	-	-	-	-
Migas PPh Pasal 21 - Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Gas Bumi PPh	5.303.277	-	5.607.201	1.665.076	-
Gas Bumi PPh				-	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah				-	-
Minerba	140.300.515	261.139.520	10.031.000	413.911.115	25.147.920
Tambang	-	261.139.520	10.031.000	39.258.920	25.147.920
Royalti	140.300.515		4.745.745	460.911.115	
Pbb Migas	3.575.814	7.818.000	9.236.160	2.158.736	3.850.078
Bonus Produksi	-	7.818.000	641.205	-	3.850.078
Bonus Migas	13.733.217		671.073	12.733.217	
Bonus Tanah Pemerintah					
Perikanan	62.460.602		13.505.272	28.021.182	
CHT	-	-	-	-	-
DR PSDH			-	-	-
PNBP	34.460.602		12.115.272	28.021.182	
Pbb Sektor	154.193.990		116.981.200		37.212.790
Jumlah Total	4.765.685.147	1.911.426.815	2.119.753.400	2.956.370.928	1.709.060.135

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Sub. Aceh Tenggara

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2016	KB TA 2018	Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 98/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)	Sisa KB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(5)
DAU	-	-	680.553.053	90.231.174	590.321.879
PBH	-	-	680.553.053	90.231.174	590.321.879
PPh Pasal 21			680.553.053	90.231.174	590.321.879
PPh Pasal 26/26					
PBB					-
Sektor Migas		-	-	-	-
Penerimaan Migas	-	-	-	-	
Penerimaan Non Migas	-	-	-	-	
Sektor Panas Bumi					
Sektor Kehutanan				-	-
Penerimaan Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Penerimaan Non Migas	-	-	-		-
Dana Perimbangan Daerah Lain					
Penerimaan Pertambangan Umum			-	-	-
Penerimaan Sektor Kehutanan	-	-	-	-	-
PBH	-	-			
DAK		608.136	312.000.779		312.000.779
Migas			312.000.779		312.000.779
Migas Tahap I				-	-
Migas Tahap II	-	-	-	-	-
Migas Non Fisik dan Pengawasan	-	-	-	-	-
Gas Bumi PSO	-	-	312.000.779		312.000.779
Gas Bumi Non PSO					
Gas Bumi dalam Negeri Non PSO					
Kehutanan					
Tahap I			-	-	-
Tahap II	-		-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-		-
Dana Setoran					
Kehutanan Lainnya					
Sektor Lainnya		500.000	-	-	-
Tahap I	-	-	-	-	-
Tahap II					
Pasal 21		108.136			-
Pertambangan					
Total Transfer	-	908.136	992.553.832	90.231.174	902.322.658

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Tenggara

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH Bulan ... TA 2020 (KMK No. ...)	KB DBH yang belum diselesaikan	LB DBH yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Rata	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Penghasil	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Tambang		-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Perikanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Penghasil Pertanian					
PPh Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Alokasi Kurang Bayar	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Alokasi Lebih Bayar					
Alokasi Dana Bagi Hasil Migas					
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau		-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Opsen					
Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Rokok	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Earmarking	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DR					
PHT	-	-	-	-	-
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Reklamasi	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Timur

(dalam rupiah)

Jenis DBH	TA 2018	TA 2019	PMK 226/PMK.07/2021	Penyesuaian PMK 226/PMK.07/2021	Selisih PMK 226/PMK.07/2021 dan PMK 8/PMK.07/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB					
BPHTB					
Pajak Rokok					
Pajak Hotel					
Pajak Restoran					
Pajak Hiburan					
Pajak Reklame					
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Parkir					
Pajak Sarang Burung Walet					
Pajak Air Permukaan					
Pajak Rokok					
SDA		4,739,845	7,726,753,124	768,756,953	6,957,996,171
Migas			7,726,753,124	768,756,953	6,957,996,171
Minyak Bumi					
Minyak Bumi (Lapangan)					
Minyak Bumi (Bukan Lapangan)					
Gas Bumi			7,726,753,124	768,756,953	6,957,996,171
Gas Bumi (Lapangan)					
Gas Bumi (Bukan Lapangan)					
Minerba					
Batubara					
Panas Bumi					
Kehutanan		2,735,293			
PSDH					
DR					
Perikanan					
Pungutan Perikanan					
Pungutan Hasil Perikanan					
Pungutan Pengusahaan Perikanan					
Pungutan Perikanan Asing					
Pertambangan Minyak Bumi					
Pertambangan Gas Bumi					
Pertambangan Panas Bumi					
Pertambangan Umum					
Iuran Tetap					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi					
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Kehutanan		2,735,293			
PSDH		1,784,193			
DR					
BHTB					
Perikanan					
Total		2,739,820	7,726,753,124	768,756,953	6,957,996,171

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Timur (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH s.d. TA 2020	LB DBH s.d. TA 2020	Penyelesaian KB DBH Semester I TA 2020 (PMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	21.977.276.820	-	4.232.173.614	17.741.702.307	
PPh	2.711.206.212		1.025.290.500	1.685.915.712	
PPh Pasal 21	2.658.317.637		1.013.530.050	1.641.426.587	
PPh Pasal 25/29	53.945.575		11.760.450	41.738.975	
PBB	19.083.016.221		3.157.458.270	15.936.557.031	-
Bagi Rata	1.931.959.598	-	195.559.790	1.736.399.808	-
Bagian Daerah Migas	3.569.921.534	-	733.181.200	12.836.740.334	-
Bagian Daerah Non Migas		-			
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Perhutanan	3.058.153.335		1.751.907.700	2.346.251.315	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	315.559.207	-	8.604.530	106.954.707	-
Biaya Pemungutan Migas	475.237.510	-	34.013.400	360.273.110	-
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perkebunan	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	27.430.177	-	43.303.700	81.609.476	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.737.581	-	208.400	6.108.772	-
CHT	39.547.500		23.500.271	15.753.062	
SDA	799.177.911	501.107.114	353.028.675	539.105.726	1.125.191.309
Migas		527.915.198	97.721.530	-	956.526.364
Minyak Bumi 15%	-	306.451.765	59.843.700	-	436.795.465
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus		-			
Gas Bumi 30%		221.363.433	7.402.530		522.231.429
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus					
Minerba	420.650.325		54.749.325	455.911.410	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	420.650.323	-	54.749.325	455.911.410	-
Panas Bumi	14.530.371	7.318.050	3.033.750	12.553.039	6.552.777
Setoran Penerimaan		7.318.050	1.062.025		6.552.977
Iuran Tetap	15.120.317		3.103.040	12.553.239	
Setoran Bagian Pemerintah	-		-	-	-
Kehutanan	76.103.387	-	4.963.750	71.143.137	-
IIUPH	-	-		-	
PSDH					
DR	76.103.387		4.963.750	71.140.137	-
Perikanan	153.183.473	-	115.841.000	-	157.824.331
Grand Total	21.898.987.163	181.884.144	4.583.756.510	18.581.805.127	1.127.101.680

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Utara (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. …/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. …/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. …/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak		-	4.371.808.241	2.581.564.265	1.790.243.976
PPh			4.371.808.241	2.581.564.265	1.790.243.976
PPh Pasal 21			4.371.808.241	2.581.564.265	1.790.243.976
PPh Pasal 25/29					
PBB					
Bagi Rata	-				
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Perhutanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT					
SDA		5.454.897	2.092.102.421		2.092.102.421
Migas			2.092.102.421		2.092.102.421
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%			2.092.102.421		2.092.102.421
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam rangka Otsus					
Minerba	-				
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Produksi					-
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	5.454.897	-	-	-
DR	-	[illegible]	-	-	-
IIUPH					
PSDH		[illegible]			
Perikanan	-	-	-	-	
Grand Total	-	5.454.897	[illegible]	2.581.564.265	3.882.346.397

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Utara

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran Kel DBH Semester I TA 2021 (PMK No.139/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum Dialokasikan	LB TA 2020 yang belum Dialokasikan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)-(d)	(f)
Pajak	19.936.83[illegible].364	-	7.262.000.[illegible]46	27.[illegible].314.067	[illegible].462.137
PPh	1.[illegible].487.161	-	1.[illegible].736.700	83.[illegible].428	[illegible].782.[illegible]72
PPh Pasal 21	1.[illegible].554.[illegible]08		1.[illegible].827.[illegible]05		[illegible].882.[illegible]37
PPh Pasal 25/29	94.[illegible].243		[illegible].[illegible].[illegible]65	[illegible].[illegible].[illegible]45	
PBB	2[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]54		[illegible].[illegible].[illegible]07	22.[illegible].[illegible].[illegible]91	-
Bea Meterai	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]94		[illegible].[illegible].[illegible]07	[illegible].[illegible].[illegible]98	-
Pajak Daerah Bagian	[illegible].[illegible].[illegible].220	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]05	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]05	-
Pajak Hotel (Pasal 24)	-	-	-	-	
Pajak Restoran (Pasal 25)	-	-	-		
Pajak Hiburan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]30		[illegible].[illegible].[illegible]00	[illegible].[illegible].[illegible]05	
Pajak Reklame	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]30		[illegible].[illegible].[illegible]00	[illegible].[illegible].[illegible]45	-
Pajak Penerangan Jalan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]07		[illegible].[illegible].[illegible]07	[illegible].[illegible].[illegible]07	-
Pajak Parkir	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]80	-	[illegible].[illegible].[illegible]07	[illegible].[illegible].[illegible]07	-
Pajak Air Tanah	-	-	-		
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-		
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]34	-	[illegible].[illegible].[illegible]00	[illegible].[illegible].[illegible]34	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]27	-	[illegible].[illegible].[illegible]50	[illegible].[illegible].[illegible]27	-
Tarif Pajak Progresif Kepemilikan Kendaraan Bermotor	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]66	-	[illegible].[illegible].[illegible]80	[illegible].[illegible].[illegible]86	
Cukai	42.[illegible].[illegible]50	-	[illegible].[illegible].[illegible]40	[illegible].[illegible].[illegible]10	
SDA	10.[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]58	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]78	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]20	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]38	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]18
Migas	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]34	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]43	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]00	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]34	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]05
Kelebihan Migas 10%		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]25	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]00	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]05
Minyak Bumi 15 %		-	-	-	-
Minyak Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu	-	-	-	-	
Gas Bumi (85%)	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]54	-	[illegible].[illegible].[illegible]00	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]51	
Gas Bumi (15%)	-				
Gas Bumi dari Kegiatan Hulu	-				
Panas Bumi	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]07		[illegible].[illegible].[illegible]22	[illegible].[illegible].[illegible]10	-
Kehutanan	-			-	-
Iuran Tetap	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]30		[illegible].[illegible].[illegible]40	[illegible].[illegible].[illegible]10	-
Iuran Eksploitasi (Royalti)	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]50	[illegible].[illegible].[illegible]50	[illegible].[illegible].[illegible]07	[illegible].[illegible].[illegible]43	[illegible].[illegible].[illegible]79
Iuran Tetap	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]14		[illegible].[illegible].[illegible]77	[illegible].[illegible].[illegible]37	[illegible].[illegible].[illegible]72
Iuran Eksploitasi (Royalti)					-
Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]76		[illegible].[illegible].[illegible]65	[illegible].[illegible].[illegible]11	-
Cukai	-	-	-	-	
Pungut	-	-			
Pajak Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]43		[illegible].[illegible].[illegible]25	[illegible].[illegible].[illegible]50	-
Pertambangan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]80		[illegible].[illegible].[illegible]00	-	[illegible].[illegible].[illegible]16
Dana Bagi Hasil	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]51	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]43	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]95	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]51	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]41

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bireuen (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA [illegible]	KB TA [illegible]	[illegible] s.d. TA [illegible] (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA [illegible] (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA [illegible] (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak		-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	
PBB					
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Pertambangan Minerba			-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas				-	-
Biaya Pemungutan Minerba	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-		
Biaya Pemungutan Perhutanan		-			
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Minerba					
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-			
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		[illegible]			
DR	-	-	-	-	-
IHPH	-	-	-	-	-
PSDH		[illegible]			
Perikanan					
Jumlah Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bla...

dalam rupiah

JENIS DBH	KB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran DBH Semester I TA 2020 (KMK No. 474/KM.7/2021)	LB TA 2020 yang belum Diperhitungkan	LB TA 2020 yang telah Diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
Pajak	4.714.896.568		2.692.413.020	2.022.483.548	-
PPh	1.280.612.867		1.176.496.730	104.116.137	-
PPh Pasal 21	1.120.012.309		1.101.200.120	18.812.189	-
PPh Pasal 25/29	160.600.558		75.296.610	85.303.948	-
PPN	3.136.860.776	-	850.674.103	2.286.186.673	4.045.036
PBB Perkebunan	68.152.968	-	265.650.730	798.210.206	-
PBB Pertambangan Migas	96.547.845	-	954.757.620	-	7.713.065
PBB Pertambangan Non Migas					
PBB Kehutanan					
PBB Perdesaan dan Perkotaan					
BPHTB	609.461.892		130.870.503	139.090.592	-
Cukai Hasil Tembakau	716.503.024	-	8.614.500	208.014.707	-
Pajak Penerangan Jalan	6.172.720	-	6.460.500	-	287.780
Pajak Parkir					
Pajak Sarang Burung Walet					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Pajak Air Permukaan	97.656.745	-	4.514.500	93.142.245	-
Pajak Rokok	6.747.783	-	286.995	6.460.788	
Cukai	609.753.057		211.711.000	398.042.057	
PNBP	191.317.017	497.010.810	61.330.320	127.986.697	979.011.810
SDA	5.363.210	799.210.000	38.900.500	1.963.000	51.144.000
Minyak Bumi (PA)	-	350.000.000	38.745.500	-	61.454.500
Minyak Bumi (PNBP)	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah dari Hasil Kerja Sama					
Gas Bumi (PA)	4.963.211		4.615.200	1.06.011	
Gas Bumi (PNBP)					
Panas Bumi (Setoran Bagian Pemerintah)					
Mineral	40.563.010		14.745.125	525.91.410	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Royalti	40.970.635	-	14.745.125	525.91.410	-
Kehutanan	9.309.414	9.418.810	2.975.240	2.785.296	5.962.025
Iuran Eksploitasi		9.418.810	2.975.240		5.962.025
Iuran Hasil Hutan	13.926.011		9.000.000	13.926.011	
Setoran Bagian Pemerintah	-		-		-
Perikanan	6.307.355	-	1.500.000	4.868.678	-
DR	-				
PNBP	6.307.355	-	1.500.000	4.868.678	-
Pertambangan	130.174.930	-	3.485.000	-	57.960.010
Grand Total	5.378.046.727	497.010.810	2.410.000.000	3.127.971.535	986.042.305

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Buru [illegible] (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 95/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			2.055.234.306	427.512.631	1.627.722.297
PPh			1.925.964.674	427.512.631	1.498.151.043
PPh Pasal 21			1.925.964.674	427.512.631	1.498.151.043
PPh Pasal 25/29					
PBB			129.269.627		129.269.627
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Pusat Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			123.352.002	-	123.352.002
Bagian Daerah Pedesaan					
Bagian Daerah Perkotaan					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			5.917.825		5.917.825
Biaya Pemungutan Pusat [illegible]					
Biaya Pemungutan Daerah [illegible]	-	-			-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT					
SDA		673.867	82.326.654		82.326.654
Migas			25.910.536		25.910.536
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus		-		-	-
Gas Bumi 30%			25.910.536		25.910.536
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus					
Minerba	-	-	56.416.118	-	56.416.118
Landrent	-	-	56.416.118	-	56.416.118
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi					
Setoran Penerimaan					
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah	-				-
Kehutanan	-	673.867	-	-	-
IIUPH				-	
DR					
PSDH	-	673.867		-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	673.867	2.137.560.960	427.512.631	1.710.048.329

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
TAHUN 2021

Kab. Pidie

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2020	Lebih Bayar TA 2020	Penyaluran DBH DBHCHT Desember TA 2020 (PMK No. 6/PMK.07/2021)	PBH TA 2021 yang belum disalurkan	KB TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)=(3)-(5)
Pajak	3.772.110.701		1.361.430.118	2.410.680.583	2.410.680.583
PPh	1.116.041.815	-	1.452.215.700	36.748.111	2.410.680.583
PPh Pasal 21	1.017.533.305	-	1.433.538.840	-	2.410.680.583
PPh Pasal 25/29	17.455.111	-	3.677.200	167.908.111	-
PBB	2.656.013.281		1.128.020.103	1.528.777.581	1.528.777
BPHTB	1.001.777.109		203.000.700	1.798.776.409	
Bagian Daerah Negara	13.327.851		13.327.851		1.272.952
Bagian Daerah Non Migas	201.905.905		10.012.997	191.892.908	-
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29	-	-	-	-	-
Bagian Daerah PBB	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	215.905.000		2.001.000	203.904.000	
Bagian Pemerintah Pusat	1.008.000		1.220.000		28.000
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	1.760.991	-	1.558.800	202.191	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat PBB					
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	1.760.991		216.000	1.760.991	-
DBHT	65.760.000	-	41.300.000	8.570.000	-
SDA	105.580.000	65.010.015	365.015.005	805.966.000	677.971.700
Migas	5.903.000	62.000.000	70.000.200	1.000.000	511.000.000
Bagian Daerah Migas		50.000.000	20.000.000		511.000.000
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Daerah Penghasil Sektor Lainnya				-	-
Non Migas (Gas)	5.903.200	-	3.000.000	1.665.000	-
Non Migas (Geo)	-	-	-	-	-
Non Migas Sektor Lainnya Penghasil Others	-	-	-	-	-
Minerba	201.000.000	-	100.000.000	101.000.000	
Kehutanan	1.000.000.000		15.000.000	985.000.000	
Perikanan	300.000.000		100.000.000	200.000.000	
Bagian Daerah	1.000.000	1.010.000	2.000.000	1.000.000	1.010.000
Bagian Pemerintah	-	1.010.000	1.000.000	-	1.010.000
Pemerintah	1.000.000		1.000.000	1.000.000	-
Kelebihan Bagian Pemerintah Pusat	-				
Kekurangan	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
PE					-
PPh	-	-	-	-	-
PBB	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
Perikanan	1.000.000		1.000.000		1.000.000
Grand Total	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Simeulue

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]		[illegible]
PPh Pasal 21			[illegible]		[illegible]
PPh Pasal 25 / 29					
PPN			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dept Pajak					
Bagian Pajak Migas					
Bagian Pajak Non Migas					
Badan Usaha Pajak Daerah					
Usaha Daerah Perhotelan					
Bagian Pajak Restoran			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Pajak Hiburan					
Bagian Pajak Penerangan Migas					
Usaha Penerangan Non Migas					
Usaha Penerangan Pajak Daerah					
Bagian Pajak Reklame					
Bagian Pajak Penerangan Perkotaan					
Bagian Pajak Penerangan Perdesaan			17.900.850		17.900.850
Cukai					
SDA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas			[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi (85%)					
Minyak Bumi (15%)					
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Blok [illegible]					
Gas Alam (30%)			[illegible]		[illegible]
Gas Alam (70%)					
Gas Alam dari Wilayah Kerja Blok [illegible]					
Pertambangan					
Pertambangan					
Royalti					
Pertambangan Panas Bumi					
Pertambangan Umum					
Sumber Daya Alam Kehutanan					
Perikanan		[illegible]			
PNBP					
DAK Fisik					
Tambahan					
Jumlah Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Simeulue

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH Berdasarkan PMK Nomor 5/PMK.07/2021	KB DBH 2020 yang telah diselesaikan	LB DBH 2020 yang telah diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah	2,910,850,167		1,268,799,021	1,897,357,499	91,950,043
PPh	912,821,224		784,277,690	80,460,554	47,808,534
PPh Pasal 21	912,821,224		784,277,690		47,808,534
PPh Pasal 25/29	39,401,361		5,076,492	34,324,869	
PBB	1,997,028,943		479,521,331	1,817,034,945	91,950,043
Bagian Pusat	1,997,028,943		479,521,331	1,817,034,945	91,950,043
Bagian Daerah Penghasil	799,211,577		191,808,532		
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Migas Umum					
Bagian Daerah Migas Khusus					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Penghasil Sektor Tambang	715,390,927		8,024,390	206,974,797	
Bagian Pemerintah Migas	3,360,112		2,476,390		1,000,000
Bagian Pemerintah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Batubara	6,134,181		255,927	3,458,741	
Cukai	30,425,616		22,136,921	7,603,165	
Migas	563,453,413	497,019,916	378,784,888	578,678,524	681,013,365
Pajak	5,363,875	487,269,063	75,045,501	1,463,075	511,748,363
Pajak Bumi dan Bangunan		487,269,063	29,015,000		511,748,363
Pajak Penghasilan					
Pajak Penghasilan Pasal 21					
Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor	5,363,875		3,053,501	1,463,075	
Pajak Penghasilan Pasal 23					
Pajak Penghasilan Pasal 26					
Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Dalam Negeri					
Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan					
Pajak Penghasilan Pasal 26					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bunga, Dividen dan Hadiah					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bunga Obligasi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Dividen					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Hadiah dan Penghargaan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bunga Simpanan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bunga Pinjaman					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Bukan Perseroan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Pendiri					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Bukan Penjamin Emisi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Bukan Penjamin Emisi Pelaksana					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana Penjamin Pelaksana					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana Penjamin Pelaksana Penjamin Utama					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penjualan Saham Perusahaan Perseroan Pembukaan Perdagangan Bursa Bukan Pendiri Penjamin Emisi Penjamin Emisi Pelaksana Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana Penjamin Utama Penjamin Pelaksana

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Banda Aceh (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	LB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyaluran LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PAJAK	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 25/29			[illegible]	-	[illegible]
PBB					
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perhutanan					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Perhutanan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT			-		
SDA		[illegible]			
Migas					
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam rangka Otsus					
Minerba					
Landrent			-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Setoran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap			-		
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	[illegible]	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH					
IIUPH		[illegible]			
Perikanan					-
Grand Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi: [illegible]

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
[illegible]	10.752.704.978	-	8.864.199.834	1.888.505.144	2.914.681
PPh	14.252.709.620	-	5.508.713.201	8.743.996.419	-
PPh Pasal 21	10.784.703.070		3.415.974.201	7.368.728.869	-
PPh Pasal 25/29	341.307.079		92.661.200	248.645.879	
PPN	2.749.041.094		2.302.360.000	446.681.094	2.914.681
Pajak Lain	1.941.959.936		210.038.000	1.731.921.936	
Bagian Pemerintah Pusat	2.210.849		76.498.000		2.914.681
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Lainnya					
Bagian Daerah Penerimaan Hibah					
Bagian Daerah Penerimaan Hibah	2.210.849.037		9.000.000	2.201.849.037	
Biaya Pemungutan Pajak	2.914.681	-	2.914.681	-	2.914.681
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Penerimaan Hibah					
Biaya Pemungutan Penerimaan Hibah					
Biaya Pemungutan Penerimaan Hibah	6.731.681	-	784.894	5.946.787	-
[illegible]	50.733.870	-	27.168.036	8.692.752	-
[illegible]	699.417.837	497.013.913	392.302.021	328.731.037	474.097.693
Belanja	2.933.271	499.200.961	21.913.809	1.476.073	513.176.361
Belanja Barang (50)		499.200.961	21.213.809		513.176.361
Belanja Barang (538)	-	-	-	-	-
Belanja Barang Belum Belanja Operasional	-	-	-	-	-
Belanja Modal (30)	2.933.271	-	2.933.260	1.946.073	-
Belanja Modal (538)			-		-
Belanja Modal Belum Belanja Operasional					
Belanja	[illegible]		25.213.809	1.476.073	
Pendapatan					
Belanja	410.026.805		25.213.809	449.772.940	
Pajak Barang	15.526.2[illegible]	7.616.951	2.353.170	12.655.270	8.690.327
Pajak Penghasilan	-	7.616.951	1.702.033	-	8.690.328
Pajak Lainnya	15.526.2[illegible]		971.073	12.515.980	
Pendapatan Belanja Operasional					
Pendapatan	6.291.151	-	1.379.050	4.912.350	
DR	-	-	-	-	-
Lainnya	-		-	-	-
[illegible]	6.291.151		1.379.050	4.912.350	
Transfer	179.186.595		719.691.000		207.061.021
[illegible]	7.010.935.158	497.013.913	6.165.041.189	2.913.604.704	991.916.761

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Cirebong

(dalam rupiah)

PEMDA TUJU	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	KURANG BAYAR DBH (PMK No. 15/PMK.07/2021)	PENYESUAIAN (PMK No. 8/PMK.07/2021)	SISA KURANG BAYAR DBH (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Provinsi	-	-	679,847,697	99,616,730	579,231,767
Pajak	-	-	679,847,697	99,616,730	579,231,767
Pajak Rokok			679,847,697	99,616,730	579,231,767
PPh Pasal 25/29 Badan			1,346,741		1,346,741
DAU					-
Dana Desa					-
Daerah Provinsi Nias	-	-	-	-	-
Daerah Provinsi Nias Selatan	-	-	-	-	-
Daerah Provinsi Nias Utara					
Daerah Provinsi Nias Barat					
Daerah Provinsi Sumatera Utara			-	-	-
Daerah Provinsi Sibolga	-	-	-	-	-
Daerah Provinsi Tapanuli Tengah	-	-	-	-	-
Daerah Provinsi Tapanuli Utara					
Daerah Provinsi Toba	-	-	-	-	-
Daerah Provinsi Labuhanbatu	-	-	-	-	-
DAK					
DBHCHT		60,xxx,xxx	-xxx,xxx,xxx		-xxx,xxx,xxx
Kabupaten			-xxx,xxx,xxx		-xxx,xxx,xxx
Kabupaten Aceh Barat			-	-	-
Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-
Kabupaten Aceh Besar	-	-	-	-	-
Kabupaten Aceh Jaya	-	-	-	-	-
Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-xxx,xxx,xxx		-xxx,xxx,xxx
Kabupaten Aceh Singkil					
Kabupaten Aceh Tamiang					
Kabupaten Aceh Tengah					
Kabupaten Aceh Tenggara	-	-	-	-	-
Kabupaten Aceh Timur	-	-	-	-	-
Kabupaten Aceh Utara	-	-	-	-	-
Kabupaten Agam	-	-	-	-	-
Kabupaten Alor					
Kabupaten Ambon					
Kabupaten Asahan	-	60,xxx,xxx	-	-	-
Kabupaten Badung	-	-	-	-	-
Kabupaten Balangan					
Kabupaten Bandung		600,xxx,xxx			
Kabupaten Bandung Barat				-	-
Kabupaten Banggai	-	60,xxx,xxx	-xxx,xxx,xxx	-xxx,xxx,xxx	-xxx,xxx,xxx

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Sabang

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPHTB Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPHTB Pasal 22/26	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Cukai	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Penghasil Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Pertambangan Minyak	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Pajak Bumi dan Bangunan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Penyesuaian 1,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas Pasal 4 ayat (3)	-	-	-	-	-
Migas Pasal 4 ayat (3) Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi (0,3%)	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Lain	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Iuran Eksplorasi	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Iuran Eksploitasi	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Denda Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Langsa (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (PMK No. .../PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. .../PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	2.417.021.753	235.787.903	2.181.233.850
PPh	-	-	2.417.021.753	235.787.903	2.181.233.850
PPh Pasal 21	-	-	2.399.122.926	235.787.903	2.136.124.385
PPh Pasal 25/29	-	-	17.898.826	-	45.109.465
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	720.735	149.557.209	-	149.557.209
Migas	-	-	149.557.209	-	149.557.209
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Tambahan Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	149.557.209	-	149.557.209
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Tambahan Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	720.735	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	720.735	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	720.735	2.566.578.962	235.787.903	2.330.791.059

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Lampung

(Dalam rupiah)

Jenis DBH	Alokasi Definitif TA 2021	Alokasi Definitif TA 2020	Pagu Penyaluran DBH Semester II TA 2021 (PMK No. 57/PMK.07/2021)	DBH TA 2021 yang seharusnya dialokasikan	DBH TA 2020 yang telah dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	5.131.500.362	-	2.913.646.354	2.447.854.008	683.916.701
PPh	933.945.279	-	1.501.100.100	43.665.591	89.819.543
PPh Pasal 21	932.876.453	-	1.454.460.200	-	89.819.543
PPh Pasal 25/29	70.317.826	-	46.639.900	43.665.591	-
PBB	2.977.832.797		720.071.391	2.134.016.276	3.187.379
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.291.223.096		691.668.763	599.554.333	
Cukai Hasil Tembakau	3.129.979		2.501.263		3.187.379
Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan		-			-
Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bunga	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pengusahaan Perikanan	41.747.927		17.100.650	24.647.277	
Dana Bagi Hasil Sektor Lainnya	2.131.000.017		1.065.500.009	200.051.707	
Bagi Hasil Penerimaan Negara Migas	2.499.979		2.121.979		1.999.999
Bagi Hasil Penerimaan Negara Migas	-	-	-	-	-
Dana Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Penerimaan Pertambangan Perikanan					
Bagi Hasil Penerimaan Perikanan	20.747.029		7.100.750	13.646.279	
Bagi Hasil Penerimaan Kehutanan	5.737.581	-	999.900	5.496.781	-
CHT	30.729.676	-	23.105.904	8.508.772	-
SDA	870.076.017	477.010.715	371.509.077	775.430.707	478.021.592
Migas	1.343.279	790.230.908	25.043.487	1.665.071	713.410.508
Minyak Bumi 15%		790.230.901	22.214.930		713.410.501
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Hasil Pengolahan	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	5.845.398	-	5.502.950	1.665.071	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Hasil Pengolahan	-		-	-	-
Panas Bumi	490.000.045		214.142.227	150.011.218	
Lainnya					
Royalti	190.610.000		21.142.250	190.011.218	
Pajak Rokok	10.826.241	7.810.552	5.263.150	12.010.758	8.810.525
Dana Perimbangan	-	7.810.552	362.025	-	8.810.525
Pajak lainnya	18.567.814	-	4.901.477	5.263.150	-
Sebelum Daerah Pemekaran					
Kelurahan	7.270.001		1.991.802	5.279.199	
DP	-	-	-	-	-
PHTB	-	-	-	-	-
PBB	7.270.001		1.991.802	5.279.199	
Perikanan	120.120.000		110.801.300		10.681.000
Total	9.871.500.000	487.010.015	2.440.041.149	3.000.011.708	1.000.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Lhokseumawe (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	15.01[illegible]	1.501.652.045	13.51[illegible].405
PPh			4.575.997.[illegible]	1.5[illegible]	2.8[illegible].169
PPh Pasal 21			4.575.9[illegible]	1.5[illegible]	2.8[illegible].169
PPh Pasal 25/29					
PBB	-	-	10.8[illegible]	-	10.[illegible]
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	10.353.9[illegible]	-	9.353.913.834
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perhutanan					
Bagian Daerah Perkebunan	-	-			
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	323.760.093	-	323.560.562
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya				-	-
Cukai					
SDA		303.153			
Migas	-	-			
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	-	-	-	-	-
Iuran tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi					-
Iuran Produksi					
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah	-	-			
Kehutanan	-	303.156	-	-	-
IIUPH			-	-	-
PSDH					
DR	-	303.156	-		
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	303.156	13.01[illegible].820.450	1.501.652.045	13.514.038.405

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Lhokseumawe (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Sebelumnya TA 2021 (PMK No .../PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	7.230.101.857	-	4.344.158.334	2.785.670.213	1.252.621.581
PPh	2.802.424.016		2.623.733.203	179.334.895	1.252.621.881
PPh Pasal 21	2.599.173.020		2.600.397.700	-	1.233.621.881
PPh Pasal 25/29	203.876.390		23.301.503	170.334.695	-
PBB	4.357.226.956		1.790.170.254	2.021.050.703	-
Bagi Rata	291.950.696		216.635.783	1.725.271.206	
Bagian Daerah Migas	3.300.310.434	-	1.291.509.300	2.010.731.134	
Bagian Daerah Non Migas		-	-		
Bagian Daerah Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan			-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan				-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.595.207		9.104.000	206.591.407	
Biaya Pemungutan Migas	102.710.575	-	43.069.200	59.641.375	
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi				-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan					-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.737.581	-	258.800	6.469.781	
CHT	39.729.170	-	32.104.924	6.523.753	-
SDA	910.549.181	497.210.913	371.350.795	475.504.377	628.131.560
Migas	6.797.276	509.203.965	25.011.500	1.504.073	511.146.505
Minyak Bumi 15%	-	498.203.965	23.290.000		511.146.505
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	3.360.275	-	3.458.700	1.565.075	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba	432.962.525		27.799.225	355.911.410	-
Landrent	-				
Royalti	432.962.425	-	27.799.225	355.911.410	
Panas Bumi	13.556.315	7.318.050	2.035.100	17.565.219	6.632.915
Iuran Tetap		7.318.050	1.063.025	-	6.632.915
Iuran Produksi	33.221.017		973.075	12.353.331	-
Setoran Bagian Pemerintah					-
Kehutanan	6.251.563	-	1.999.046	4.252.056	
IIUPH	-	-	-	-	
PSDH			-	-	-
DR	6.951.563		1.976.507	1.975.056	-
Perikanan	153.183.960		315.891.347		137.097.020
Grand Total	7.775.903.474	497.210.913	4.815.512.043	4.697.977.590	1.905.810.290

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gayo Lues

(dalam rupiah)

Uraian	PMK No. 28/PMK.07/2016	PMK No. 50/PMK.07/2019	PMK No. 28/PMK.07/2021	Penyesuaian berdasarkan PMK No. 226/PMK.07/2021	Selisih PMK No. 28/PMK.07/2021 dan PMK No. 50/PMK.07/2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(3)
Pajak			50.015.350	50.533.228	517.878.564
PPh	-	-	55.015.350	55.533.228	517.878.564
PPh Pasal 21	-	-	55.015.350	55.533.228	517.878.564
PPh Pasal 23/26	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	
Obat Keras					
Jasa Boga					
Jasa Perhotelan					
Jasa Parkir	-	-	-	-	-
Jasa Kesenian dan Hiburan	-	-	-	-	-
Jasa Penyelenggaraan Pameran					
Jasa Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	-	-	-	-	-
Jasa Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	-	-	-	-	-
Jasa Penyelenggaraan Pesta dan Hiburan					
Jasa Penyelenggaraan Olahraga					
PPN	-	-	-	-	-
PPN	-	2.430.000	379.019.035	-	376.589.035
Migas			339.378.435		336.402.703
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Kontrak Kerja					-
Gas Bumi 30%			339.438.435	-	336.402.703
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Kontrak Kerja	-	-	-	-	-
Mineral			21.453.730		21.453.730
Landrent			21.453.730		21.453.730
Digeluti					
Panas Bumi					
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		2.430.000			
PSDH	-	-	-	-	-
DBHDR	-	2.430.000	-	-	
Perikanan					
Jumlah Kurang		2.430.000	961.083.220	50.533.228	1.017.901.267

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Daerah :

(dalam rupiah)

URAIAN	PB Tahun 2020	LPD Tahun 2020	Penyesuaian PB DBH Tahun 2020 (KMK No. 577/KM.7/2021)	DBH TA 2021 yang belum disalurkan	DBH TA 2020 masih harus disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3-4)	(6)
Pajak	3,070,857,773	-	1,354,671,472	2,077,379,718	1,044,743,000
PPh	491,339,241	-	413,096,100	1,078,338	149,254,461
PPh Pasal 21	17,207,131	-	103,630,800	-	149,254,461
PPh Pasal 25/29	29,719,109	-	2,047,200	27,671,909	-
PPN	2,772,130,663	-	719,026,572	2,050,299,275	1,190,000
Pajak Pusat	1,091,356,849	-	268,029,100	1,126,470,249	-
Bagian Daerah Migas	1,091,356,849	-	148,933,500	-	1,960,794
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 21			-		
Bagian Daerah Pasal 25/29	34,708,367		10,001,200	24,779,341	
Bagian Daerah PPN					
Bagian Daerah PBB	15,500,074	-	8,636,300	306,934,701	-
Bagian Daerah BPHTB	1,335,979	-	4,847,100	-	512,492
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas					
Bagian Pemerintah Pusat PPh	27,147,715		287,000	12,070,075	
Bagian Pemerintah Pusat Cukai	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Bea Masuk dan Lainnya	6,459,787	-	749,300	6,466,781	-
PBH	905,183,737		415,173,459	140,811,539	
DAU	401,901,031	207,226,700	414,132,200	420,811,100	1,010,200,962
Migas	1,360,815	788,200,995	26,842,900	1,010,375	1,119,196,535
Migas Pasal 22	-	488,200,995	26,742,900	-	1,119,496,535
Migas Pasal 23	-	-	-	-	-
Kekurangan Pembayaran Migas Tahun Lalu	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	1,360,815		2,099,900	1,010,375	
Cukai Hasil Olahan					
Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Hasil Pengusahaan Migas					
Minerba	491,360,010	7,408,650	15,422,900	190,911,113	8,192,925
Panas Bumi	-	2,200,650	577,275	-	2,192,925
Pajak	491,489,035	-	24,745,275	84,911,413	-
Kurang Bayar	1,370,514	5,618,000	2,033,150	12,353,238	8,870,975
Kurang Penerimaan		5,618,000	1,202,625		8,870,975
Pajak Migas	1,370,514		971,975	12,353,238	
Kekurangan Pembayaran Migas Tahun Lalu					
Kelebihan Bayar	97,324,530	-	2,991,350	43,953,582	-
DBH	-	-	-	-	-
Migas					
Pajak	97,324,530		2,991,350	43,953,582	
Penerimaan	150,776,500	-	316,661,000	-	167,884,500
Grand Total	7,884,037,330	1,028,735	1,835,594,150	7,971,468,797	860,408,486

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Barat Daya

(dalam rupiah)

[illegible] DBH	Kurang Bayar TA 2018	Kurang Bayar TA 2019	Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyesuaian Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 97/PMK.07/2021)	Sisa Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
Pajak	-	-	636.791.320	110.709.003	747.500.323
PPh	-	-	461.830.751	-	461.830.751
PPh Pasal 21	-	-	461.830.751	-	461.830.751
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	174.960.569	110.709.003	285.669.572
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	73.203.241	-	73.203.241
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pendidikan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	1.145.490	1.279.036	2.424.526
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Hasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	2.921.777	-	2.921.777
Bagian Pemerintah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pendidikan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Kehutanan	-	-	5.930.569	-	5.930.569
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	-
Cukai	-	-	-	-	-
SDA	-	876.075	48.706.351	-	48.706.351
Migas	-	-	459.767.351	-	459.767.351
Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Migas	-	-	122.392.161	-	122.392.161
Dana Alokasi Migas	-	-	-	-	-
Dana Otsus Tambahan Migas	-	-	-	-	-
Minyak	-	-	26.705.900	-	26.705.900
Pusat	-	-	26.705.900	-	26.705.900
Bagi	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Panas Bumi	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	580.775	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH	-	580.775	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	580.775	1.101.202.372	110.709.003	1.211.911.375

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Keb. Aceh Barat Daya

(Rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar DBH 2020	Lebih Bayar DBH 2020	Penyaluran DBH Berdasarkan PMK No. 8/PMK.07/2021	DBH TA 2020 yang Telah Disalurkan	DBH TA 2020 yang Harus Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	1.230.879.963		1.127.965.727	2.979.230.021	3.271.304
PPh	1.217.701.327		991.944.703	2.913.715.728	
PPh Pasal 21	1.24.047.919	-	58.600.203	58.047.939	-
PPh Pasal 25/29	93.653.408	-	7.496.803	85.965.603	-
PPh Pasal 26	5.327.148.903	-	300.837.103	2.744.018.795	3.274.384
Dari Kota	1.791.171.003		283.049.703	1.778.670.209	
Dividen Daerah Kaya	41.112.121		10.735.000		3.142.800
Dividen Daerah Dari Kaya	19.027.329		3.681.903	7.411.852	
Bagian Daerah Penerimaan	-		-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan	705.451.185		123.731.303	564.039.283	-
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	223.209.007		4.601.303	488.791.707	
Dana Kompensasi Bagi Hasil	1.041.071		2.971.100		12.742
Bagi Hasil Migas	963.910		112.203	761.720	-
Bagi Hasil Migas dari Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Migas dari Pertambangan	-	-	-	-	
Bagi Hasil Migas dari Pertambangan	28.704.731		5.171.003	23.611.731	
Bagi Hasil Migas dari Pertambangan	2.237.081		208.303	2.179.181	
PPN	97.720.010		22.196.903	75.523.752	-
PBB	383.964.235	-37.619.119	375.890.575	411.275.523	276.291.584
Migas	3.383.775	-83.030.038	23.743.903	1.048.373	31.464.367
Minyak Bumi 15%	-	-80.030.042	20.245.691		31.176.343
Minyak Bumi 3,5%					
Minyak Bumi dari Pertambangan Lainnya					
Gas Bumi 15%	3.383.819		3.498.203	1.048.373	
Gas Bumi 6,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dari Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Migas	701.599.59	-	28.795.471	475.795.104	-
Pertambangan	222.779.216		5.925.815	324.843.871	
Perikanan	478.819.281		22.869.656	150.951.233	
Pertambangan	3.078.314	7.519.819	2.203.103	12.005.203	6.847.973
Pertambangan		7.519.819	1.301.929		6.847.973
Pertambangan	3.556.614	-	901.175	2.656.939	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Kehutanan	6.527.358		1.268.350	4.538.152	
PPh					
PPh	-	-	-	-	-
PPh	6.317.578		1.043.550	4.596.258	-
Pertambangan	103.720.790		17.091.707		157.041.019
Jumlah Total	2.172.547.310	-79.719.811	1.580.541.310	3.771.570.103	691.291.804

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Jaya (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Pengembalian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			93.712.039	52.105.492	41.606.547
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	[illegible]	52.105.492	[illegible]
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Perdesaan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkotaan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-		[illegible]	52.105.492	[illegible]
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perdesaan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkotaan					
Biaya Pemungutan Perkebunan			[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	1.451.038	422.395.351	-	422.395.351
Migas			422.395.351		422.395.351
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	-	-	122.395.351	-	[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba					
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi					
Setoran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		1.751.996			
IHPH		-			
PSDH	-	-	-	-	-
Reboisasi	-	1.451.038	-	-	-
Perikanan					
Grand Total		1.751.996	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh ...gya

(dalam rupiah)

...PROVINSI	...Definitif TA 2020	...Definitif TA 2020	Penyaluran KE I ...Semester I TA 2021 (PMK No. ...PMK.07/202...)	...TA 2020 yang belum disalurkan	...TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.019.400.961	-	1.436.956.034	2.019.396.926	-...43.9...
PBB	542.159.450	-	6...3.427.502	220.735.452	-
PPh Pasal 21	90...966.768		637.507.602	179.... 87.362	-
PPh Pasal 25/29	32.7...487		4.9...1.900	28.5...1.587	-
BPHTB	2.219.241.033		...1.241.100	2.1...2.791.933	4.1...1.091
Bagi Hasil	1.991.468.960		2...69.103	1.7...2.79...98	
Bagian Dari SDA Migas	1...384.02...		1...769.192		0...0.179
...asil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
...alam Daerah Hasil Pajak Pusat	-	-	-	-	-
...alam Daerah Pemerintahan			-	-	-
Bagian Dana Perimbangan	950.326.214		129.092.102	821.... 6.112	
Bagian Dana Otonomi Khusus dan Tambahan	2...0.0...190		9.2...030	230.0...0.160	
Bagian Pemerintah Atas Pajak Penghasilan Migas	3.536.688	-	1.700.800	-	197.132
Bagian Pemerintah Atas Pajak Penghasilan Sektor Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Atas Pajak Penghasilan Pasal 21				-	-
Bagian Pemerintah Atas Pajak Penghasilan Perkebunan					
Bagian Pemerintah Atas Pajak Penghasilan Pertambangan Umum	78.960.850		1...00.000	23.7...2.850	
Bagian Pemerintah Atas Pajak Penghasilan Pertambangan Panas Bumi	6.737.655	-	768.870	6...6.809	-
Cukai	20.725.677	-	2...156.024	8.6...752	-
DAK	6...227.042	497.618.713	272.280.750	47...39.077	6...72.362
Migas	2...5.271	189.200.902	2...13....0	1.0...073	7...4.0...
Migas Bagi 1,5%		189.200.902	22.213.670		1...4.0...
Migas Bagi 2,5%	-				
Migas Bagi Hasil dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%	3.262.775	-	1.462.220	662.075	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba	180.030....		2...7.0...27	17...1.4...0	
Panas Bumi					
Royalti	420.630.932		2...719.226	13...1.4...0	
Jenis PPh	15.926.3...	7...0....	2.0...3...	1...1....	8.630....
Jenis Pendidikan	-	7...1....	1.062.025	-	8.630....
Jenis Lainnya	15.926.3...		97...071	12.8...3....	-
Subsektor Bagian Pemerintah					
Kehutanan	10.1...6...		3.0...0.0	9.80...250	
SDA	-	-	-	-	
Lainnya	-	-	-	-	-
Panas Bumi	15.0...8...		3.0...771	0.9...253	-
Pertambangan	...6.1...9...		1...1....		197.0...1...
Grand Total	4.69...889.763	497....	1.7...6...7.14	2.9...1...0	9...1...1

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nagan Raya

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2019	Alokasi Lebih Bayar DBH Tahun 2019	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2020 (PMK No. 67/PMK.07/2021)	Penyesuaian Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2020 (KMA No. 91/KM.7/2021)	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2020 (KMA No. 91/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak	-	-	1.020.216.592	216.906.816	1.020.216.592
PPh	-	-	1.027.164.864	216.906.816	1.027.164.864
PPh Pasal 21	-	-	1.027.164.864	216.906.816	1.027.164.864
PPh Pasal 22/26	-	-	-	-	-
PBB	-	-	2.364.852	-	2.364.852
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Cukai					
Cukai Hasil Tembakau			2.322.007		2.322.007
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
Pajak Alat Berat					
Pajak Hiburan					
Pajak Reklame			42.759		42.759
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Pajak Parkir					
Pajak Air Tanah					
Pajak Sarang Burung Walet					
BPHTB	-	-	-	-	-
SDA	-	451.955	3.483.647.749	-	516.451.769
Migas	-	-	3.483.647.749	-	516.451.769
Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Gas Bumi					
Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja Tertentu					
Pertambangan Panas Bumi			32.803.792		316.451.769
Pertambangan Minerba	-	-	-	-	-
Pertambangan Minerba dari Wilayah Kerja Tertentu	-	-	-	-	-
Kehutanan					-
Perikanan					
Pungutan Cukai					
Cukai Produksi	-				
Cukai Ritel	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Mengenai Cukai			-	-	-
Kebutuhan		907.056			
PE					
PDPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	383.064	-	-	-
Perikanan					-
Jumlah Total		907.056	1.023.001.132	216.906.816	1.539.781.209

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Bab : Negara Biaya

(dalam ribuan rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)
[illegible]	17.501.77-.843	-	0.018.535.954	70.307.857.403	3.278.170.-
PPh	2.227.241.257		8.2.745.790	1.304.208.324	
Pph Pasal 21	1.367.000.107		5.7.10..790	1.7.7.902.710	
Pph Pasal 2.2/25	270.172.110		13.079.000	220.202.102	
PPN	15.7.1.607.910		.222.7.2.700	0.920.107.5.5	30.706.105
Dpp Emas	1.941.959.990		2.5.586.700	1.736.[illegible].253	-
Bagian Daerah Migas	53.348.016	-	86.[illegible].990	-	37.[illegible].782
Bagian Daerah Non Migas	1.-.372.855	-	1.1.7.4.000	34.[illegible].103	
Bagian Daerah Pph Pasal Bumi	-				
Dearah Daerah Pertambangan					
Dearah Daerah Perkebunan	1.1.1.777.0.2		913.102.000	0.00[illegible].345.372	
Bagian Daerah Sektor Kehutanan	2.5.039.037	-	2.5[illegible].120	536.[illegible].709	-
Biaya Pungutan Dana Migas	1.030.078	-	2.36[illegible].500	-	1.044.307
Biaya Pungutan Dana Non Migas	5.778.307		9.[illegible].000	5.278.292	
Biaya Pemungutan Pajak (Bumi)					
Biaya Pemungutan Perkebunan					-
Biaya Pungutan Perkebunan	3.3.0.9.5.0.5	-	16.[illegible].950	5[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Biaya Pungutan Pph Pasal 21	4.7.7.681	-	9[illegible].820	[illegible].[illegible].781	-
CHT	20.725.[illegible].[illegible]		22.1[illegible].[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible].[illegible]	
SDA	2.1.0.0.7.2.9	-[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible].[illegible]
Iuran	0.[illegible].[illegible]	-[illegible].[illegible].[illegible]	25.[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible]	51.[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 15%		-[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 2,5%	5.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Mineral	1.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Dendrat		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Royal	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Bumi	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Pasal Pajak	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Pasal lainnya	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Sekolah Dasar Pemerintah					
Pph Pasal 21	[illegible]	-	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
DP	-	-	-	-	-
LUPA					
PASAL	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Tambahan	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Grand Total	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Aceh Tamiang (dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019	Kurang Bayar TA 2019 yang Belum Disalurkan (PMK No. 187/PMK.07/2020)	Penyesuaian Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2019 yang Disalurkan TA 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	(1.494.413)	1.494.413	-
PBB	-	-	(1.494.413)	1.494.413	-
PBB Sektor (1)			(518.705.247)	518.705.247	-
PBB Sektor (2)/(3)			(975.708)	975.708	-
PPh					
Pasal 21					
Pasal 25/29 Badan					
Pasal 25/29 OP					
PPh Final					
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan					
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					
Bagian Daerah Penghasil Perikanan					
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Kehutanan					
Biaya Pemungutan Perikanan					
Biaya Pemungutan Pertambangan Lainnya	-	-	-	-	-
PPN	-	-	-	-	-
DBH	-	1.532.928	3.070.141.197	-	3.070.141.197
Migas		1.532.928	3.070.141.197	-	3.070.141.197
Minyak Bumi (85%)			3.070.141.197	-	3.070.141.197
Minyak Bumi (15%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Alam (70%)	-	-	-	-	-
Gas Alam (30%)					
Gas Alam Dalam Rangka Otsus					
Pertambangan					
Pertambangan Umum					
Iuran Tetap					
Royalti					
Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	1.532.928			
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IHPH		1.532.928			
Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau	-	1.537.926	3.071.675.344	519.181.704	3.591.065.801

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 202 :

Kota Aceh Tamiang

(dalam rupiah)

URAIAN	PMK No. 5 Tahun 2021	PMK No. 5 Tahun 2021	Perubahan atas PMK No. 5 Tahun 2021	APBN 2020 yang Telah Ditetapkan	APBN 2020 yang Telah Dilakukan Penyesuaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	37.230.075.005		6.760.062.327	23.170.012.678	-
PPh	1.977.077.175		1.205.873.003	772.795.172	-
PPh Pasal 21	1.798.081.000		1.034.905.000	603.150.000	-
PPh Pasal 25/29	178.996.175		171.973.003	68.845.172	-
PBB	33.227.997.830	-	5.687.489.500	24.190.483.674	
Pajak Rokok	1.951.059.000	-	548.569.500	1.790.377.078	
Bagian Daerah Migas	3.114.415.117	-	2.177.949.000	20.747.179.017	
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					-
Bagian Daerah Perikanan				-	-
Bagian Daerah Kehutanan	3.021.690.165	-	1.111.465.650	1.910.224.159	-
Bagian Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara	92.925.952	-	1.864.850	90.979.027	
Bagian Dana Reboisasi Migas	759.913.079	-	127.714.000	632.199.079	
Bagian Pertambangan Non Migas					-
Bagian Pertambangan Panas Bumi				-	-
Bagian Pertambangan Perikanan	-	-	-	-	
Bagian Pertambangan Pertambangan	125.615.993	-	46.913.750	78.606.773	
Bagian Pertambangan Kehutanan	6.636.281		971.050	6.229.051	
PPh	30.727.079		21.393.921	9.133.712	-
SDA	221.196.825	2.630.049.112	490.960.850	94.597.125	3.034.161.960
Migas	6.979.271	2.693.192.165	104.954.000	668.075	2.787.836.161
Minyak Bumi (15%)	-	2.693.192.165	104.954.000	-	2.787.836.161
Minyak Bumi (0,5%)	-				
Minyak Bumi Hasil Pengolahan Dalam Negeri Oleh Badan Usaha (0%)	6.979.271		1.568.270	1.568.270	-
Gas Bumi (0%)				-	-
Gas Bumi dalam Negeri Oleh Badan Usaha			-	-	-
Mineral	97.695.695	-	94.749.935	319.346.871	-
Panas Bumi	57.035.261	-	-	57.035.261	
Royalti	430.640.635	-	94.749.935	435.890.700	
Pajak Rokok	15.596.217	7.918.973	2.350.170	12.350.259	5.890.973
Dana Reboisasi		7.918.973	1.968.000		5.890.973
Jasa Giro	10.020.217		382.170	15.555.259	-
Sumber Daya Perikanan	-	-	-	-	-
Kehutanan	18.948.635	-	2.206.027	17.160.730	
IUP					
IUPHA			-	-	-
IPHHK	18.036.635	-	2.206.027	15.460.730	-
Tambang	33.736.180	-	210.981.069		157.004.050
Dana Bagi	33.070.217.165	2.070.130.173	3.201.300.827	21.010.270.124	2.091.101.160

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bona Merlan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	TA 2018	TA 2019	Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyelesaian TA s.d. TA 2019 (Lamp. Kep. Menkeu No. 518/KM.7/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 25/29		-	-	-	-
PPN		-	-	-	-
Bagi Hasil		-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak					
Bagian Daerah dari Cukai					
Bagian Daerah dari Pajak Lainnya					-
Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan					-
Bagian Daerah dari Pajak Pertambahan Nilai		-	-	-	-
Bagian Daerah dari Cukai Tembakau		-	-		
Bagian Daerah dari Pajak Lainnya					-
Bagian Daerah dari Cukai Hasil Tembakau					-
Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan		-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Pertambahan Nilai		-			
Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan Pasal 21					-
Cukai		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas		-	[illegible]	-	[illegible]
Migas Bagian 15%		-	-	-	
Migas Bagian 0,5%		-			
Migas Bagian dari Minyak Bumi					
Gas Alam 70%			[illegible]		[illegible]
Gas Alam 30%				-	-
Gas Alam dalam Negeri		-	-	-	-
Minerba		-	-	-	-
Iuran Tetap		-	-	-	
Royalti		-			
Pajak Migas					
Pajak Penghasilan					-
Pajak Migas		-	-	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 21		-	-	-	-
Kehutanan		[illegible]			
DR					
PSDH				-	-
IHPH		[illegible]	-	-	-
Perikanan		-	-	-	
Pajak Ikan		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bener Meriah

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2020	Lebih Bayar TA 2020	Penyaluran TA 2021 Sesuai PMK No. 216/PMK.07/2021	TA 2020 yang Belum Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Total	9.692.971.911		1.280.649.302	1.775.092.705	1.610.103
PPh	75.101.959		910.267.702	99.010.709	1.146.682
PPh Pasal 21	71.302.078	-	910.246.702	-	1.146.682
PPh Pasal 25/29	3.799.878	-	21.000	99.010.709	-
PBB	7.961.703.886	-	371.047.300	1.353.050.641	5.564.102
Bag. Bene	1.901.979.078		765.187.700	1.136.170.209	
Bagian Daerah Minas	91.287.811		91.859.600		2.859.789
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Dana Prioritas		-		-	
Bagian Daerah Otonomi Khusus	457.450.030	-	-	216.460.030	-
Bagian Daerah Penyesuaian	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2.513.729.007		5.856.300	220.020.000	
Jasa Pertambangan Migas	1.962.139		2.812.750		101.261
Bagian Pemerintah Pusat Migas				-	
Bagian Pemerintah Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Migas	1.946.675	-	-	153.675	-
Jasa Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi	8.727.181		208.450	6.155.161	
PPh	15.111.594	-	45.384.650	14.111.109	-
PBB	485.945.135	435.619.315	595.764.920	270.373.104	476.752.104
Migas	7.865.775	450.727.745	25.243.850	1.065.271	31.440.968
Bagian Daerah Migas	-	450.720.745	92.215.600	-	31.170.593
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Minyak Bumi					
Gas Bumi (PPh)	6.870.775		2.296.200	1.065.271	
Gas Bumi (PBB)	-	-	-	-	-
Gas Bumi Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Pertambangan	490.060.035	-	24.743.275	457.611.175	-
Landrent					
Deposit	480.060.035		21.770.225	458.011.175	
Panas Bumi	10.010.211	7.915.967	2.362.150	12.000.350	5.868.075
Dana Produksi	-	7.010.567	1.362.030	-	5.868.075
Dana Lainnya	10.526.214	-	971.075	12.000.350	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Kehutanan	6.220.021		7.167.373		731.354
PSDH					
PSDH	-	-	-	-	-
Bagian Daerah	6.220.021	-	7.167.373	-	731.354
Perikanan	50.170.587		274.617.021		157.010.000
Grand Total	7.010.010.141	497.019.373	1.607.007.000	2.013.721.114	66.263.861

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
TAHUN 2021

Kab. Pidie Jaya

(Rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	Alokasi Kurang Bayar DBH (PMK No. 55/PMK.07/2021)	Penyaluran Kurang Bayar DBH (PMK No. 57/PMK.07/2021)	Sisa Kurang Bayar DBH (PMK No. 57/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	3.446.095	3.446.095	-
PBB	-	-	3.446.095	3.446.095	-
PBB Pasal 21			3.446.095	3.446.095	
PBB Pasal 23/26					
BPHTB					
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil		-	-		
Bagian Daerah Penghasil Lainnya					
Bagian Daerah Bukan Penghasil					-
Bagi Pemerintah Migas		-	-	-	-
Bagi Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	
Bagi Pemerintah Pusat Bumi	-	-			
Bagi Pemerintah Penghasil					
Bagi Pemerintah Penghasil Lainnya					-
Bagi Pemerintah Bukan Penghasil		-	-	-	-
DBH	-	-	-	-	-
PPh	-	81.429	364.065.911	107.076.911	271.152.936
Migas			364.065.911	107.076.911	271.152.936
Minyak Bumi					
Minyak Bumi (PPh)			-	-	-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Gas Bumi	-	-	364.065.911	107.076.911	271.152.936
Gas Bumi (PPh)	-	-	-		
Gas Bumi dalam Negeri (PPh)	-	-			
Kondensat					
Landaian					
Panas Bumi					-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Tarif Pertambangan	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-			
Royalti					
Sebelum Bagian Pemerintah					
Kehutanan		1.143			-
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	
PSDH		1.143			
Perikanan					
Cukai Hasil		1.143	36.679.995	10.382.959	26.155.936

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pidie Jaya (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB s.d. TA 2020	LB s.d. TA 2020	Kurang Bayar DBH Sampai dengan TA 2020 sesuai KMK No. 6/KM.7/2021	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	2.343.530.982	-	369.647.70[illegible]	1.974.876.654	3.170.272
Bagi Rata	[illegible]	-	265.630.700	[illegible]	
Bagian Daerah Migas	27.291.767		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pedesaan					-
Bagian Daerah Perkotaan				-	-
Bagian Daerah Perkebunan	37.497.995	-	1.860.590	35.637.405	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]	-	8.604.300	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]		127.209
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pedesaan	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Perkotaan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]		76.300	[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		265.800	[illegible]	
CHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		-			
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Landrent	-	-	-	-	
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Produksi		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Iuran Tetap	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Setoran Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DR					
IIUPH	-			-	-
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Sukabumi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KP Th 2018	YD Th 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 75/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KEP-[illegible]/KT.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 8/KT.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pertambangan			0.727.291	0.727.291	
PPh			0.727.291	0.727.291	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			0.727.291	0.727.291	
PBB					
Eks PBB					
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 21					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pasal 21					
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
PPN					
PDRI		702.931	150.129.274	32.139.429	97.989.845
Migas			949.201.274	32.139.429	917.061.845
Minyak Bumi (PPN)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (PPh)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Negeri		-	-	-	-
Gas Bumi (PPN)			949.201.274	32.139.429	917.061.845
Gas Bumi (PPh)					
Gas Bumi Dalam Negeri Lainnya					
Non Migas			16.128.000		16.128.000
Non Migas	-	-	16.128.000	-	16.128.000
Royalti	-	-	-	-	-
Pasal 21			-	-	-
Jasa Produksi					
PPh Migas					
Setoran Pajak Penghasilan					
Kehutanan	-	702.804	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DR					
PBHT		702.931			
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	702.804	415.536.455	586.650	376.070.745

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kurun Waktu Triwulan [illegible] (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Sebelum PA 2020	LB Sebelum PA 2020	Penyaluran KB DBH Sebelum PA 2020 (PMK No. [illegible])	PBH PA 2020 yang belum dialokasikan	LB PA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
PPh Ps 21	2.644.550.459	-	1.019.959.134	1.624.591.325	2.630.765
PPh Ps 25/29 Orang Pribadi	1.268.748.166	-	412.454.610	856.293.556	-
PPh Pasal 26	61.511.113	-	467.794.162	87.717.015	-
PPh Pasal 25/29 Badan	87.270.331	-	5.856.705	81.413.626	-
PPh Pasal 15	1.161.370.177	-	624.317.760	2.803.175.447	2.630.765
PPh Migas	1.891.333.092	-	21.564.797	1.726.170.295	-
Pajak Bumi dan Bangunan	77.302.953	-	6.876.761	-	2.317.761
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.253.764	-	1.029.302	3.011.107	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	1.126.170.707	-	933.173.453	87.103.207	-
Pajak Daerah Selain Pajak Rokok	215.250.000	-	9.110.780	253.934.707	-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 22 Impor	1.861.741	-	2.076.750	-	107.009
Biaya Pemungutan PPh Pasal 22 Non Migas	2.198.876	-	477.961	1.720.915	-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 23	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Cukai Hasil Tembakau	41.013.676	-	35.[illegible].850	35.[illegible].018	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	5.727.061	-	1.[illegible].910	6.[illegible].151	-
CHT	90.935.676	-	21.[illegible].914	8.[illegible].762	-
SDA	849.070.053	457.610.715	37.[illegible].135	486.316.778	676.02[illegible].660
Nafas	1.313.277	750.730.708	28.[illegible].809	1.685.277	31[illegible].446.803
Minyak Bumi 15%	-	750.270.962	22.241.301	-	31[illegible].176.303
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Alam 30%	1.313.277	-	1.990.200	1.685.277	-
Gas Alam 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Alam Setara Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Mineral	770.060.676	-	24.749.225	1.[illegible].[illegible].451	-
Batubara	-	-	-	-	-
Panas Bumi	780.[illegible].[illegible]	-	21.[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible].[illegible]	-
Perikanan	50.[illegible].314	7.819.[illegible]	2.[illegible].[illegible]	12.[illegible].[illegible]	8.[illegible].[illegible]
Pungutan Perikanan	-	7.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	8.[illegible].[illegible]
Bunga Bank	13.[illegible].314	-	871.[illegible]	13.[illegible].[illegible]	-
Denda Keterlambatan Pemeriksaan	-	-	-	-	-
Kehutanan	36.[illegible].[illegible]	-	1.[illegible].[illegible]	26.[illegible].[illegible]	-
IHPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
PNBP	26.[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	26.[illegible].[illegible]	-
Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Grand Total	6.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	6.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sumatera Utara

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Lebih Bayar DBH Tahun 2018	Kurang Bayar DBH Tahun 2019	Lebih Bayar DBH Tahun 2020 [PMK No. 20/PMK.07/2021]	Penyesuaian Lebih Bayar DBH Tahun 2020 [PMK No. 8/PMK.07/2021]	Sisa Lebih Bayar DBH Tahun 2020 [PMK No. 8/PMK.07/2021]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PPh	-	-	1.079.435.535	1.079.435.535	-
PPh	-	-	1.079.435.535	1.079.435.535	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	1.079.435.535	1.079.435.535	-
PBB					
PBB Migas					
Bagian Pemerintah Pusat (85%)	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah (15%)	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbatasan					
Bagian Daerah Sekitar Lainnya					
Biaya Pemungutan PBB				-	-
Biaya Pemungutan PBB Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perbatasan					
Biaya Pemungutan Lainnya					
Biaya Pemungutan PPh Pasal 25/29			-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	120.725.730	6.89[illegible]	1.088.870.207	4.[illegible]
Migas			1.[illegible]		1.[illegible]
Minyak Bumi 10%			1.[illegible]		1.[illegible]
Minyak Bumi 15%			36.[illegible]		36.[illegible]
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Gas Bumi 10%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Pertambangan					
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi		-	37.[illegible]	-	37.[illegible]
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Eksplorasi		-	37.502.775	-	37.502.775
Iuran Eksploitasi					
Kehutanan		120.725.730	6.[illegible]	1.088.870.207	3.[illegible]
IHPH		37.910.650	3.[illegible]	1.088.870.207	3.[illegible]
PSDH	-	-	443.960.501	-	443.960.501
DBHR		82.815.080			
Perikanan					
Grand Total		120.725.730	2.[illegible]	2.168.[illegible]	4.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sumatera Utara

(dalam rupiah)

Uraian	KB Defisit TA 2020	LB Defisit TA 2020	Proyeksi PK DBH Semesteran TA 2020 (ADIA No. 2/PK.7/2020)	PB TA 2020 yang Telah Disalurkan	LB TA 2020 yang Telah Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	315.5[illegible].787.917		[illegible]	1[illegible].[illegible].[illegible]	
PPh	3.[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPN	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dari Pusat					
Bagian Daerah Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Non Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Dana Alokasi Pertambangan Umum	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dana Alokasi Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Pertambangan Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Pertambangan Non Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Dana Pertambangan Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dana Perimbangan Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Dana Perimbangan Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Dana Perimbangan Pajak Daerah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Cukai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 85%		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 10%		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 70%	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 30%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Rokok	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bunga Pinjaman	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Jenis Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Hibah Dalam Perjanjian					
Pendapatan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
BPHTB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Cukai	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Lainnya					
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Asumsi

(rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak	-	-	2.259.218.782	677.260.121	1.933.138.379
PPh	-	-	2.259.218.782	677.260.121	1.933.138.379
PPh Pasal 21	-	-	1.617.272.272	677.260.121	1.330.262.393
PPh Pasal 22/26	-	-	426.210.010	-	426.210.010
PBB	-	-	-	-	-
Bea Meterai	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Penghasilan Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Penghasilan Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
DBH	-	1.166.110	71.342.120	-	71.342.120
Migas	-	-	19.136.192	-	19.136.192
Minyak Bumi 15%	-	-	16.839.200	-	16.839.200
Minyak Bumi 2,5%	-	-	2.296.992	-	2.296.992
Minyak Bumi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pungutan	-	-	-	-	-
Pungutan	-	-	-	-	-
Pungutan Bumi	-	-	5.313.879	-	5.313.879
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap	-	-	5.313.879	-	5.313.879
Pungutan Lainnya Pertambangan	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	5.367.110	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Lainnya	-	5.367.110	-	-	-
Pungutan Lainnya	-	-	-	-	-
Grand Total	-	5.367.110	2.524.710.412	677.260.424	1.926.010.385

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Asahan

(dalam ribuan)

URAIAN	TA Definitif TA 2020	TA Definitif TA 2020	Penyaluran KP 2021 Sumatera TA 2021 (SMA No. 21/KM.7/2021)	PB TA 2020 yang [illegible] dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2] - [4]	[6]
Pajak	30.702.204.250	6.270.916	11.270.328.302	22.622.049.249	2.917.165
PPh	3.307.708.102		2.650.798.700	774.275.702	-
Pasal 21	2.923.502.091		2.493.147.300	360.354.791	-
PPh Pasal 25/29	806.494.011	-	430.551.400	374.942.611	-
PBB	36.459.603.300	2.527.956	9.696.581.700	26.015.119.756	24.017.165
Pajak Rokok	301.339.608	-	765.681.700	[illegible]	
Pajak Daerah Lainnya	187.551.427		96.372.140		65.179.287
Dengan Daerah Non Migas					
Dengan Daerah Pesisir Laut				-	-
Dengan Daerah Perbatasan		3.067.695	15.421.600	-	25.605.484
Dengan Daerah Penghasil	31.365.887.093	-	9.697.733.400	29.036.477.652	-
Dengan Daerah Sekitar Penghasil	2.357.709.017		7.607.000	[illegible]	
Dengan Perbandingan Migas	7.743.024		7.743.024	-	215.772
Dengan Perbandingan Non Migas			-	-	-
Dengan Perbandingan Pajak Daerah		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-	420.668	332.200	-	1.594.306
Biaya Pemungutan PBB	1.868.940.610		170.157.028	1.210.507.110	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.707.213		3.101.450	3.192.713	-
DAU	12.424.647		12.906.192	1.508.545	-
DBHCHT	2.049.250.012	19.215.236	4.468.867.875	3.074.794.107	35.470.356
Migas	-	54.870.836	1.357.830	-	50.711.486
Migas PPh Pasal 22	-	78.068.700	1.206.250	-	20.718.300
Migas PPh Pasal 25/29	-	970.800	30.000	-	922.200
Migas Dana Bagi Hasil Migas (DBH)					
Dana Otsus Gol		21.521.045	201.750		15.027.795
Dana Otsus Aceh		115.551	2.300	-	416.751
Dana Otsus Papua Barat	-	-	-	-	-
Minerba	3.036.072.534	-	1.356.750	3.034.567.784	-
Iuran Tetap	-	-	-		
Royalti	2.076.072.284		61.076.250	3.037.397.834	
Panas Bumi	14.089.072	21.139.070	18.314.072	16.914.070	22.639.827
Dana Reklamasi		21.139.070	16.104.350	-	22.639.827
Pajak Alat	13.669.092	-	2.181.013	6.535.267	-
Retribusi Jasa Pelayanan Hutan	-	-	-	-	-
Kehutanan	79.079.656		45.447.450	24.490.776	
PSDH					
DR	126.714	-	-	36.442	-
PNBP	79.029.456	-	45.447.450	23.590.209	-
Dana Desa	190.795.000	-	510.281.000		17.094.000
Grand Total	42.414.497.707	53.630.702	1.730.161.317	25.698.277.003	296.390.271

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Deli:

(dalam rupiah)

Jenis DBH	TA 2018	TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 50/PMK.07/2021)	Penyesuaian s.d. TA 2019 (PMK No. 9/PMK.07/2021)	K-LB s.d TA 2019 (PMK No. 17/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak					-
PPh		-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB		-	-		
Hasil Rokok					
Bagian Provinsi Sisa					
Bagian Provinsi Dari Migas					-
Bagian Provinsi Dari Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Provinsi Dari Pertambangan Minerba	-	-	-	-	-
Bagian Provinsi Dari Pertambangan Minerba	-	-			
Bagian Daerah Penghasil Dari Migas					
Bagian Daerah Penghasil Dari Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Dari Pertambangan Minerba	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Minerba					
Bagian Pemerataan Migas					-
PPh 21	-	-	-	-	-
PBHTB	-	5.637.291	351.58[illegible]623	23.[illegible]770	[illegible]5.800.291
Migas	-	-	47.[illegible]358.559		[illegible]0.076.770
Alokasi Bagi. 1%			46.[illegible]1.400		[illegible]0.511.800
Alokasi Bagi. 0,5%			2.[illegible]6.959		2.226.970
Adendum Bagi. Bagian Daerah Penghasil Migas					-
PPh Pasal 26(4)			-	-	-
PPh Pasal 4(2)	-	-	-	-	-
PPh Pasal 4(2) Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	[illegible]87.[illegible]500.074	120.[illegible]948.770	[illegible]1.062.[illegible]515.047
Batubara			[illegible]7.[illegible]48.[illegible]500.074	120.[illegible]948.770	[illegible]1.062.[illegible]515.047
Panas Bumi					
Pajak Daerah			2.[illegible]13.[illegible]4.9		2.[illegible]3.[illegible]4.979
Pajak Rokok		-	-	-	-
Pajak Lainnya	-	-	[illegible]343.870	-	[illegible]5.[illegible]5.870
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-			
Kehutanan		5.[illegible]7.[illegible]5			
PSDH					-
ITTO	-	-	-	-	-
DR	-	5.637.291	-		
Perikanan					
Jumlah Total		5.637.729	[illegible]268.[illegible]7.[illegible]750	143.[illegible]948.770	[illegible]1.[illegible]124.[illegible]0.[illegible]980

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bairi

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Alokasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Pagu dan Alokasi DBH berdasarkan PMK No. 222/PMK.07/2020	Alokasi Tahun 2020 yang seharusnya dialokasikan	Kurang/(Lebih) Bayar DBH Tahun 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	6.084.732.132		6.132.564.636	6.461.478.778	376.836
PBB	2.646.032.472	-	2.694.287.402	1.380.060.417	-
PPh Pasal 21	2.646.132.953	-	1.289.075.402	1.289.150.792	-
PPh Pasal 25/29	650.598.159	-	103.036.300	241.867.139	-
BPHTB	8.210.278.378	-	338.773.700	2.673.410.027	1.010.361
Reg. Retri	1.091.170.958		368.089.700	1.723.270.208	-
Bagian Daerah Migas	196.270.217		129.197.407		1.068.795
Bagian Daerah Non Migas	621.895.019		76.891.695	549.361.645	-
Bagian Daerah Pasal Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal Lainnya	95.564.31	-	53.060.800	70.817.791	-
Bagian Daerah Pasal Lainnya	21.543.429		27.597.000	63.014.809	
Bagian Daerah Kab. Tertinggi	215.390.067		8.621.201	200.094.707	
Biaya Pemungutan Migas	1.210.029		1.271.602	-	2.764.67
Biaya Pemungutan Non Migas	29.192.240	-	2.937.800	31.736.892	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	4.789.727		1.727.200	3.281.208	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	5.761.771		1.261.200	7.491.215	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	9.207.250		918.800	9.138.45	-
PBB	1.206.924	-	9.81 .795	1.546.633	
DBH	5.753.271.0	382.176. 76	864.793.898	7.188.829.705	103.420.926
Migas	-	1.872.020	1.392.800		30.211.176
Migas Kurang Bayar	-	22.364.030	1.096.200		22.764.230
Kurang Bayar PPh		91.320	36.800		912.870
Kurang Bayar Bagian Pemerintah Pusat			-	-	-
Pertambangan Minyak		24.89 .080	928.760	-	28.927.935
Pertambangan Gas	-	2.155	8.201	-	1.954
Pertambangan Panas Bumi	-	-	-		
Migas	5.206.27 .894	271.823.020	168.794.870	3.2 .497.941	348.911.450
Migas Lainnya		271.823.020	12.117.530		257.911.450
Pertambangan	5.206.271.28		61.6 6.8 9	3.204.297.961	-
Pertambangan Umum	19.258.092	21.720.6 0	1.8 7.1 5	19.505.097	87.373.020
Pertambangan Umum		21.729.6 0	9.124.7 2	-	87.373.020
Pertambangan	19.863.053	-	9.155.795	11.307.067	
Pertambangan	-				
Kehutanan	63.021.784		60.894.036	1.023.951	-
PPh			-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PPh	46.921.864	-	60.894.036	1.023.951	
Pertambangan	171.188.080		31.1 8 .020		1 .8 4.020
Jumlah Total	9.2 9.6 3.1 0	3 8 .1 5.1 0	2 .1 .090.0 6	7.8 .1 0.0 6	6 6 .6 6.0 6

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Dki Bandung (dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB					
Dbg Bea					
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan					
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi					
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perkebunan					-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 25	-	-	-	-	-
Cukai	-	-	-	-	-
SDA		5,796,274	41,972,351	30,090,132	11,882,219
Migas			42,028,701	30,090,132	12,034,969
Minyak Bumi DR			40,031,201	28,092,632	11,938,569
Minyak Bumi PHB		-	1,535,350	-	1,535,350
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 69%	-	-	705,151	705,151	-
Gas Bumi 31%	-	-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Panas Bumi					
Landrent					-
Royalti					-
Panas Bumi	-	-	5,842,975	-	2,345,870
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap			2,213,079		2,213,079
Dividen Deviden Perseroan					
Kehutanan		5,796,274			-
DR	-	-	-	-	-
DHPH	-	-			
PSDH		5,796,274			
Perikanan					
Grand Total	-	5,796,274	41,972,351	30,090,132	11,882,219

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Tebo Sidebang

(rupiah)

URAIAN DBH	TA Definitif TA 2020	TA Definitif TA 2020	Penyesuaian APBN Tahun TA 2020 (Alokasi dan PMK 139/2021)	TA TA 2020 yang telah dibayarkan	TA TA 2020 yang telah dibayarkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (9)	(11)
Pertambangan	30.232.960.727		10.779.080.660	19.453.880.067	130.197
PPh	15.369.280.292		5.842.726.050	9.526.554.242	
PPh Pasal 21	13.912.990.772		5.139.827.050	8.773.163.722	
PPh Pasal 25/29	1.372.615.518	-	197.211.150	1.175.404.368	-
PPN	49.580.210.016	-	4.693.561.950	44.886.648.066	96.197
Bagi Rata	301.959.938	-	28.568.920	273.391.018	-
Bagian Pemerintah Migas	278.620.180	-	62.920.350	215.699.830	
Bagian Daerah dari Migas					
Bagian Daerah Penghasil	11.270.670		11.270.670		96.197
Bagian Daerah Pengimbang					
Bagian Pemerintah PPh Pasal	35.775.865.64-	-	3.751.349.430	32.024.516.211	-
Bagian Pemerintah Selain Migas	2.770.000.007	-	262.450.000	2.507.550.007	-
Bagian Pemerintah Migas	41.454.795		10.363.699	31.091.096	
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Daerah Penghasil	153.695		38.424	115.271	
Bagian Daerah Pengimbang	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	1.371.038.678	-	107.510.000	1.263.528.678	
Bagian Pemerintah Pusat Migas	8.104.243		930.000	7.174.243	
PPN	53.389.335		12.263.250	41.126.085	
Cukai	3.391.070.262	30.592.128	411.012.550	2.949.649.840	9.814.196.457
Migas	-	1.464.167	179.920	-	15.847.987
Pajak Bumi 15%	-	30.540.960	1.148.720	-	3.180.500
Kewajiban Bumi 0,5%	-	1.060.160	38.650	-	1.021.510
Kewajiban Daerah dalam Rangka Otsus					
Dana Otsus 2%		49.170.700	12.263.250		49.908.207
Dana Otsus 1,25%		1.321.167	8.720		1.312.447
Dana Bagi Hasil Sawit Kurang Salur		-		-	-
Minerba	3.036.074.334	-	61.676.330	3.034.397.804	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pajak	3.036.074.334	-	61.676.330	3.034.397.804	
Pajak Daerah	14.026.872	21.138.877	38.137.077	10.505.667	37.673.520
Pajak Kendaraan		21.138.877	38.137.077		37.673.520
Pajak Rokok	10.669.792		2.150.020	10.505.667	-
Retribusi Pengelolaan Kepariwisataan	-	-	-	-	-
Kehutanan	20.870.706	-	43.218.693	20.130.721	-
DR					
PSDH					
PNBP	20.870.706	-	43.218.693	20.130.721	-
Perikanan	50.386.382	-	3.685.020	-	37.691.202
Jumlah DBH	53.567.130.977	53.592.779	11.206.221.010	42.414.502.597	60.020.714

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Karo

(dalam rupiah)

Uraian	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak			692.613.617	49.731.422	697.372.394
PPh			692.613.617	49.731.422	697.372.394
PPh Pasal 21			685.952.951	49.731.422	635.455.187
PPh Pasal 23/26	-	-	6.305.666	-	61.706.665
PPN	-	-	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah					
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Milik Masyarakat					
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Pajak Air Permukaan			-	-	-
Pajak Rokok Hasil Cukai Tembakau					
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Milik Pemerintah Daerah					
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Milik Masyarakat					
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Milik Masyarakat Hasil Pengolahan Pemerintah Daerah					
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Milik Masyarakat Hasil Pengolahan Masyarakat					
Cukai					
PNBP	-	14.304.755	71.042.635	-	71.561.598
Migas	-	-	69.018.750	-	69.487.950
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	66.811.800	-	67.271.000
Kenaikan Bumi (0,5%)	-	-	2.206.950	-	2.216.950
Kenaikan Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi (0,5%)					
Gas Bumi (0,5%)					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Batubara	-	-	-	-	-
Royalti					
Panas Bumi			2.023.885		2.073.648
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	-	-	2.363.885	-	2.073.648
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		11.190.755			
IHH					
PSDH					
PSDH	-	14.304.755	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total		11.190.755	491.172.242	49.731.422	768.778.021

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
TAHUN 2021

Kab. Karo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB/LB TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran TA 2021 sebelum Desember (TA 2020 PMK No. 39/2020)	KB TA 2021 yang belum disalurkan	LB TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dana Bagi Hasil	3.840.010.000		2.204.982.000	3.204.982.000	4.194.795
PPh	1.077.694.715		1.584.100.000	1.657.943.810	-
PPh Pasal 21	2.805.546.455	-	558.450.000	968.940.455	-
PPh Pasal 25/29	512.573.553	-	105.670.000	386.703.000	-
PBB	2.516.080.000	-	301.010.000	1.202.136.000	1.193.205
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.017.038.000	-	203.000.000	1.021.270.000	-
Bagian Daerah Bagian	110.041.000		110.000.000		2.221.000
Bagian Daerah Bagian Khusus					-
Bagian Daerah Penerimaan Bagian	56.130.400	-	62.917.400	-	66.047
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak	90.005.000	-	16.125.000	143.071.000	-
Bagian Daerah Pertambangan Gas	210.070.000		8.004.000	200.004.000	
Bagian Pertambangan Panas Bumi	6.000.000		2.070.000		161.000
Bagian Pertambangan Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Iuran Eksploitasi	1.007.070	-	9.575.400	55.000	-
Bagian Pertambangan Iuran Eksplorasi	-	-			
Bagian Pertambangan Pertambangan	7.000.000		2.411.000	7.000.000	
Bagian Pertambangan Pertambangan Lainnya	6.000.000		2.070.000	6.000.000	-
CHT	61.869.000	-	41.780.000	2.145.814	-
DAK	8.179.349.000	177.591.143	5.240.026.000	3.000.000.000	31.253.000
Fisik	-	3.372.000	1.326.000		16.011.000
Dukungan Kegiatan Prioritas		28.668.000	1.000.000		12.000.000
Afirmasi Pendidikan		20.000	20.000		992.000
Dukungan Pendanaan Kegiatan Khusus					-
Non Fisik		24.000.000	2.000.000	-	3.027.000
Dana Alokasi Umum	-	3.000	5.000	-	1.000
Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Daerah		-		-	-
Minerba	2.000.000.000	-	61.000.000	2.000.000.000	
Kehutanan					
Sawit	2.000.000.000		61.000.000	2.000.000.000	
Dana Desa	18.998.000	21.000.000	18.000.000	18.000.000	21.000.000
Dana Insentif Fiskal	-	21.000.000	6.000.000	-	21.000.000
Dana Otsus	18.998.000	-	12.000.000	18.000.000	-
Tambahan Dana Otsus	-				
Kabupaten		9.000.000	10.000.000		200.000.000
Dana Keistimewaan					-
Provinsi	-	-	-	-	-
Kabupaten	-	9.000.000	10.000.000		200.000.000
Perangsang	170.000.000		170.000.000		1.000.000
Grand Total	9.200.000.000	177.000.000	2.700.000.000	5.000.000.000	500.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lebakbersama

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2019 (SP2D No. 3/SP2D/2021)	Sisa Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2019 (Kolom (c) - Kolom (d))
(a)	(b)	(c)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)
Pajak			1.356.957.037	969.748.945	387.208.092
PBB	-	-	1.356.957.037	969.748.945	387.208.092
65% Pasal 21	-	-	1.356.130.037	969.748.945	386.381.092
65% Pasal 25/29	-	-	827.000	-	827.000
Rokok	-		387.270.000		387.270.000
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Sebesar					
Bagian Provinsi dari Bagian Daerah					-
Bagian Provinsi dari Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	310.520.432	-	310.520.432
Bagian Daerah Penghasil	-				
Bagian Daerah Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat					-
Bagian Pemerintah Kota Malang	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Kota Batu			14.750.608		14.750.608
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya			-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	3.590.000	93.793.232	-	90.203.232
Migas			69.038.772		69.038.772
Bagian Daerah Penghasil			16.511.800		16.511.800
Bagian Daerah Lainnya			52.526.972		52.526.972
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya			-	-	-
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil (Dalam Rangka Otsus ...)	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	27.520.500		27.520.500
Landreform			27.520.500		27.520.500
Kayu					
Panas Bumi			2.754.460		2.754.460
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	2.754.460	-	2.754.460
Beberapa Jenis Pajak Provinsi					
Kekurangan	3.590.000				
PBB			-		-
BPHTB	-		-	-	-
PBKB	-	3.590.000			
Pemotongan					
Grand Total	3.590.000		1.356.957.037	969.748.945	387.208.092

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Lokus/Nama Lokus (dalam rupiah)

Jenis DBH	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)
PPh					
Pasal 21					
Pasal 25/29					
PBB					
Dana Bagi					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan					
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Kehutanan					
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan					
CHT					
SDA					
Migas					
Minyak Bumi (85%)					
Minyak Bumi (0,5%)					
Minyak Bumi Hasil Pengolahan					
Gas Bumi (70%)					
Gas Bumi (30%)					
Gas Bumi Hasil Pengolahan					
Pertambangan Umum					
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Tetap					
Iuran Eksploitasi					
Kehutanan					
Iuran Hasil Hutan					
Dana Reboisasi					
PSDH					
Perikanan					
Pungutan Perikanan					
Pungutan Hasil Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau					
Total					

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Langkat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 65/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB TA 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			1.055.405.720	536.219.058	519.186.662
PPh	-	-	1.055.405.720	536.219.058	519.186.662
PPh Pasal 21	-	-	955.986.720	968.219.058	486.967.662
PPh Pasal 22/26	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau					
Sumber Daya Alam Pertambangan Umum					
Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Sumber Daya Alam Kehutanan	-	-	-	-	-
Sumber Daya Alam Perikanan	-	-	-	-	-
Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	-
Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Minyak Bumi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Gas Bumi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Panas Bumi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara					
Sumber Daya Alam Kehutanan Iuran Hasil Hutan					
Sumber Daya Alam Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan					
Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi					
Sumber Daya Alam Perikanan Perikanan Tangkap					
Sumber Daya Alam Perikanan Perikanan Budidaya					
Sumber Daya Alam Perikanan Pungutan Hasil Perikanan					
Sumber Daya Alam Perikanan Pungutan Hasil Perikanan Perikanan Tangkap					
Sumber Daya Alam Perikanan Pungutan Hasil Perikanan Perikanan Budidaya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Tetap (Landrent)					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Batubara					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Mineral Logam					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Mineral Bukan Logam					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Mineral Bukan Logam Jenis Lainnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Batuan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Batuan Jenis Tertentu					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Batuan Jenis Lainnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) Pertambangan Mineral Logam					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) Pertambangan Batubara					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pertambangan Mineral Logam					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pertambangan Batubara					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara Pertambangan Mineral Logam					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara Pertambangan Batubara					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Batubara Penjualan Batubara					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Mineral Logam Penjualan Mineral Logam					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Penjualan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Mineral Bukan Logam Jenis Lainnya Penjualan Mineral Bukan Logam Jenis Lainnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Batuan Penjualan Batuan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Batuan Jenis Tertentu Penjualan Batuan Jenis Tertentu					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Penjualan Hasil Tambang Penjualan Hasil Tambang Batuan Jenis Lainnya Penjualan Batuan Jenis Lainnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) Pertambangan Mineral Logam Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) Pertambangan Mineral Logam Tahun Berjalan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) Pertambangan Mineral Logam Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) Pertambangan Mineral Logam Tahun Sebelumnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) Pertambangan Batubara Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) Pertambangan Batubara Tahun Berjalan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) Pertambangan Batubara Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) Pertambangan Batubara Tahun Sebelumnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pertambangan Mineral Logam Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pertambangan Mineral Logam Tahun Berjalan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pertambangan Mineral Logam Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pertambangan Mineral Logam Tahun Sebelumnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pertambangan Batubara Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pertambangan Batubara Tahun Berjalan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pertambangan Batubara Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pertambangan Batubara Tahun Sebelumnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara Pertambangan Mineral Logam Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara Pertambangan Mineral Logam Tahun Berjalan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara Pertambangan Mineral Logam Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara Pertambangan Mineral Logam Tahun Sebelumnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara Pertambangan Batubara Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara Pertambangan Batubara Tahun Berjalan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara Pertambangan Batubara Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan Data Informasi Mineral dan Batubara Pertambangan Batubara Tahun Sebelumnya					
Cukai			2.093.814		2.093.814
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	2.343.879	-	2.343.879
Sanksi Cukai Hasil Tembakau			-	-	-
Anggaran		6.982.021			
PPh					
PBDH	-	-	-	-	-
PBDH	-	6.982.021	-	-	-
Pertambangan					
Grand Total		6.982.021	2.097.093.414	536.219.058	2.721.174.277

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Langkat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2021	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan TA 2021 (SMA No [illegible])	DBH TA 2020 yang [illegible] dialokasikan	LB DBH TA 2021 yang [illegible] dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)	(6)
Pajak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPN	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reg. Baru	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Atas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Dari Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Dari Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Dari Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Dari Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Dari Pertambangan Minyak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dana Perimbangan Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dana Perimbangan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dana Perimbangan Pertambangan	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Pertambangan Minyak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Cukai	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
DBH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah 16%	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Alokasi Dasar 3,5%	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Alokasi Dasar Dasar Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil (DBH)	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Dana Bagi Hasil (DBH)	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Dana Bagi Hasil Dari Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dana Reboisasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Pajak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
DAK	-	-	-	-	-
DAU	-	-	-	-	-
Pajak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Hibah	-	-	-	-	-
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mandailing Natal

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyaluran LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 71/PMK.07/2021)	SISA LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 71/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	5,685,771,559	5,065,436,251	620,335,308
PPh	-	-	303,565,243	-	303,565,243
PPh Pasal 21	-	-	7,306,351	-	7,306,351
PPh Pasal 25/29	-	-	408,035,972	-	408,035,972
PPN			25,047,496,367	5,065,436,251	19,982,060,116
Dagi Hasil					
Pajak Daerah Kabu			22,941,830,311	6,778,430,709	16,163,399,602
Pajak Daerah Kendaraan		-	1,424,572	-	1,424,572
Pajak Daerah Bahan Bakar	-	-	849,181,694	-	849,181,694
Pajak Daerah Pengambilan	-	-	291,431,866	-	291,431,866
Pajak Daerah Pengabutan					
Pajak Daerah Sektor Lainnya					
Pajak Penerangan Jalan Kabu			1,941,805,899	-	1,941,805,899
Pajak Penerangan Jalan Non Kabu	-	-	681,931	-	681,931
Pajak Penerangan Jalan Provinsi	-	-	31,116,071	-	31,116,071
Pajak Pengambilan Pertambangan			11,361,135		11,361,135
Pajak Pengambilan Perkebunan					
Pajak Pengambilan Sektor Lainnya				-	-
PPh	-	-	-	-	-
BPHTB	-	18,907,207	7,502,357,319	-	7,502,357,319
Kabu			251,006,510		251,006,510
Kabupaten Dalam DAS			105,787,938		105,787,938
Pajak Hasil Laut			4,525,010		4,525,010
Pajak Hasil Laut Perairan Umum		-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	105,787,938	-	105,787,938
Cukai Hasil Tembakau	-	-	1,262,572	-	1,262,572
Cukai Hasil Tembakau Lainnya	-	-	-		
Kabupaten			4,139,321,510		4,139,321,510
Landdrent			3,041,913,720		3,041,913,720
Royalti			897,407,790		897,407,790
Panas Bumi			97,155,159	-	97,155,159
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Panas Bumi		-	97,155,159	-	97,155,159
Sebesar Bagian Pemerintah					
Kehutanan		18,907,207	1,173,470,070		1,173,470,070
DR		-	-	-	-
PSDH	-	-	779,843,050	-	779,843,050
Pajak		18,907,207			
Perikanan					
Cukai Hasil		18,907,207	34,449,129,937	6,778,430,709	27,670,699,228

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Mata Uang Nilai: [illegible] (Rupiah)

URAIAN DBH	PPh Pasal 25/29 OP TA 2020	PPh Pasal 26 TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 8/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	SB TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	24,814,406,902		1,477,328,236	18,849,014,345	4,430,779
Sektor	2,853,295,347		1,334,774,500	1,320,618,947	
PPh Pasal 21	2,770,302,302		1,451,389,100	1,318,913,202	
PPh Pasal 25/29	330,372,511		170,585,700	222,050,811	
PPN	21,314,779,197		2,970,942,307	18,343,916,771	6,836,726
Pajak Daerah	59,368,960	-	26,585,400	174,740,398	-
Bagian Daerah Hasil Migas	87,981,200	-	34,891,500	-	6,010,425
Bagian Daerah Hasil Migas	13,141,978	-	13,691,100	111,442,622	-
Bagian Daerah Panas Bumi	3,316,372,457		14,979,200	3,301,393,257	-
Bagian Daerah Pertambangan	998,731,714		44,805,300	954,137,314	-
Bagian Daerah Perikanan	19,575,102,751		2,216,271,500	21,358,831,251	-
Bagian Daerah Kehutanan	715,799,007	-	8,514,300	224,304,707	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	7,378,115	-	7,704,500	-	326,385
Bagian Pemerintah Pusat Migas	5,150,179		611,700	4,538,479	-
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi	1,112,284,490		101,300	120,037,490	-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan	45,154,629		2,179,100	94,076,529	-
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan	781,913,145	-	13,165,200	668,507,351	-
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan	9,734,048	-	342,500	8,702,748	-
Cukai	76,386,084		17,819,331	4,610,424	-
Cukai	5,824,200,000	-	1,207,582,200	1,934,038,326	1,416,242,000
Pajak Lainnya		97,312,600	1,339,900		59,211,700
Pajak Lainnya	-	93,683,600	396,300	-	59,794,300
Pajak Lainnya	-	955,600	38,500	-	917,100
Pajak Lainnya	-	-	-		-
Cukai		97,437,445	202,700		27,077,345
Cukai		7,135,155	3,300		116,301
Cukai					
Pajak Lainnya	1,219,897,095		316,991,775	3,963,094,310	-
Pajak Lainnya	9,459,267,834	-	1,457,127,150	9,371,470,984	-
Pajak Lainnya	2,781,619,984	-	33,667,675	2,668,952,309	-
Pajak Lainnya	119,009,731	666,058,207	336,732,803	328,737,135	1,120,577,799
Pajak Lainnya		663,083,202	610,211,123		1,052,872,079
Pajak Lainnya	498,060,711		35,538,100	426,111,351	
Pajak Lainnya					
Pajak Lainnya	2,318,150,454	-	36,715,150	172,994,304	-
Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Pajak Lainnya	17,920			17,920	
Pajak Lainnya	219,072,221		30,215,150	124,797,371	
Pajak Lainnya	159,166,930	-	516,600	-	158,650,330
Pajak Lainnya	52,759,020,853	941,065,837	8,744,000,166	37,476,713,683	12,410,940

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nias

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB - KB TA 2020 (PMK No. 97/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB dan LB 2020 (KMK No. 678/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (KMK No. 678/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			52.366.869	10.317.866	42.049.003
PPh			52.366.869	10.317.866	42.049.003
PPh Pasal 21	-		52.366.869	10.317.869	42.049.000
PPh Pasal 25/29 OP	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
Reg. Baru	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Minyak					
Bagian Daerah Gas Migas					
Bagian Daerah Pajak Migas					-
Bagian Daerah PPh Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah PPh Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Panas Bumi					
Iuran Pengusahaan Migas					
Iuran Produksi Batubara					-
Bagian Pemerintah Pusat Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pajak Migas	-	-	-	-	-
Iuran Pengusahaan Perikanan					
Iuran Pengusahaan Perikanan					
Iuran Pengusahaan Sektor Lainnya					
PPN					-
PBB		3.790.745	71.381.959	-	71.381.959
Migas	-	-	60.237.760	-	60.237.760
Alokasi Dana 15%	-	-	60.211.800	-	60.211.800
Alokasi Dana 0,5%			2.025.960		2.025.960
Alokasi Dana dukungan Kegiatan Khusus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti					
Panas Bumi			2.343.879		2.343.879
Pajak Perikanan					
Iuran Tetap	-	-	2.343.879	-	2.343.879
Iuran Hasil Perikanan	-	-	-	-	-
Kehutanan		3.790.745			
DR					
PSDH	-		-	-	-
Pajak	-	3.790.745	-	-	-
Perikanan	-		-		-
Jumlah Total		3.790.745	123.949.569	10.317.866	113.631.703

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Area

(dalam rupiah)

Uraian	LB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran SKB DBH Semesteran TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Alokasi yang seharusnya	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(4)	(6)	(8)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	4.078.367.537	-	927.353.952	3.650.545.179	2.150.937
Cukai	1.571.727.204	-	921.922.720	704.909.616	-
Cukai Hasil Tembakau	1.427.064.868	-	921.922.720	567.170.068	
Cukai Hasil Tembakau (2020)	144.662.336		0	137.739.548	
PNBP	2.253.419.211		343.000.000	1.941.154.774	2.150.937
Pengelola Barang	1.991.999.894		250.000.000	1.726.149.268	
Pengelola Barang (Migas)	64.735.556		61.111.000		1.935.112
Pengelola Barang (Non Migas)	-	-	-	-	-
Pengelola Barang (Pajak Bumi dan Bangunan)	-	-	-	-	-
Pengelola Barang (Pajak Bumi dan Bangunan Migas)					
Pengelola Barang (Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas)					
Pengelola Barang (Pajak Penghasilan)	810.595.207		0.000.000	202.064.707	
Pengelola Barang (Pajak Penghasilan Migas)	2.938.375	-	2.644.538	-	107.975
Pengelola Barang (Pajak Penghasilan Non Migas)	-	-	-	-	-
Pengelola Barang (Pajak Bumi dan Bangunan)					
Pengelola Barang (Pajak Bumi dan Bangunan Migas)					
Pengelola Barang (Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas)					
Pengelola Barang (Pajak Penghasilan)	6.554.043	-	3.000.000	3.133.543	-
DHE	10.481.977	-	1.850.737	- 185.075	-
DJA	337.126.602	76.370.000	4.000.000.000	4.078.284.072	2.017.000
Migas		27.870.000	1.000.000		21.211.430
Minyak Bumi (85%)		25.000.000	1.000.000		25.000.000
Minyak Bumi (0,5%)	-	900.000	30.000	-	900.000
Gas Bumi (70%)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (30%)	-	2.870.000	0.000.000	-	25.000.000
Gas Bumi 0,5%		270.000	8.000		270.000
Gas Bumi dalam rangka Ultra Vires					
Pertambangan	337.126.602		0.000.000	3.077.284.072	
Panas Bumi					
Pajak	3.046.274.364		0.000.000	3.036.067.014	-
Kehutanan	15.668.092	31.439.070	0.517.078	16.306.097	37.573.620
Iuran Provinsi	-	31.439.070	0.134.070	-	37.573.620
Iuran Hasil	15.668.092		0.383.008	16.306.097	
Reboisasi Dana Perimbangan					
Pertambangan	23.377.136		15.000.000	22.301.021	
Migas	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Total	10.077.196.1		46.000.000	22.301.721	
Perikanan	108.130.990		0.000.000		0.000.000
Grand Total	7.992.150.56-	99.3.2.926	0.000.000.000	0.721.798.784	52.1.0.0

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lampiran Simulasi [illegible]

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
PPh	-	-	2.645.343.274	2.645.343.274	-
PPh	-	-	2.645.343.274	2.645.343.274	-
PPh Pasal 21	-	-	737.333.434	737.333.434	-
PPh Pasal 21 (Migas)	-	-	737.333.434	737.333.434	-
PPh 22					-
Dep Data					
Bagian Pemerintah (Migas)					
Bagian Pemerintah (Non Migas)	-	-			
Dasbo Daerah Penghasil Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Dasbo Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil					-
Bagian Daerah Penghasil Dua Tahunan					
Bagian Pemerintah (Migas)	-				
Bagian Pemerintah Pusat (Migas)	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat (Non Migas)		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah (Migas)					
Bagian Pemerintah Daerah (Non Migas)					
Bagian Pemerintah Setelah Tahun Ke-5	-	-			
DLH	-	-	-	-	-
SDA		17.661.373	71.540.862	-	71.389.626
Migas			69.028.772		69.028.772
Migas Bagi Hasil 85%			66.611.892		66.611.892
Migas Bagi Hasil 0,5%			2.416.880		2.416.880
Migas Bagi Hasil Dana Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Gas Bagi Hasil 70%	-	-	-	-	-
Gas Bagi Hasil 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bagi Hasil Dana Bagian Daerah		-	-	-	-
Minyak					-
Tambang					
Panas Bumi					
Panas Bumi	-		2.511.978		2.511.978
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi		-	2.343.829	-	2.343.829
Bagian Daerah Penghasil					-
Minerba		1.361.544			
DR	-	-	-		
PHT	-	-	-	-	-
PHT		17.661.373		-	-
Pajak Lainnya					
Grand Total	-	1.361.544	2.819.030.910	1.118.362.041	1.700.668.869

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Simalungun

(dalam ribuan rupiah)

Jenis DBH	Alokasi DBH TA 2021	Alokasi DBH TA 2021	Penyaluran DBH sampai dengan TA 2020 (PMK No. 93/PMK.07/2021)	Alokasi DBH TA 2020 yang belum disalurkan	Alokasi DBH TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	37.756.959.813	-	30.794.264.340	7.962.695.473	7.271.923
PPh	5.805.613.516	-	4.517.587.820	1.287.025.696	-
PPh Pasal 21	3.147.690.096	-	3.414.203.820	(266.513.724)	-
PPh Pasal 25/29	645.997.420	-	103.384.000	542.613.420	-
PBB	25.307.707.981	-	23.676.179.520	1.631.528.461	7.271.923
BPHTB	1.951.650.796	-	581.315.000	1.370.335.796	-
Pajak Rokok	26.270.009	-	26.101.700	-	6.591.069
Pajak Hiburan	-	-	-	-	
Pajak Reklame	610.648	-	-	610.648	
Pajak Penerangan Jalan	7.020.800	-	101.013.000	906.987.800	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.974.424.000	-	6.972.273.000	14.982.150.000	-
Pajak Parkir	211.680.000	-	8.064.000	548.256.000	-
Pajak Air Permukaan	2.940.136	-	3.150.430	-	382.281
Pajak Rokok	-	-	-	-	
Pajak Sarang Burung Walet	30.037	-	-	30.037	
Cukai Hasil Tembakau	314.113.248	-	5.040.000	27.241.248	-
Cukai Hasil Tembakau Earmarked	1.048.020.923	-	301.170.130	916.430.272	-
Pajak Penerangan Jalan Sektor Pertambangan	6.034.140	-	340.630	5.193.243	-
DBH	88.536.307	-	45.941.405	17.946.102	
SDA	33.928.705.200	76.812.206	279.321.094	33.726.196.312	317.311.702
Migas		54.572.000	1.236.630		36.211.439
Kehutanan Dana DR		26.036.200	1.096.220	-	25.764.851
Kehutanan Dana PSDH		196.906	55.630	-	302.466
Minerba Panas Bumi Sektor Pertama Otsus	-	-	-	-	-
Perikanan	-	24.634.686	279.720		25.111.965
Pertambangan Minerba	-	413.531	3.356		410.851
Pertambangan Panas Bumi	-				
Migas	3.050.071.284		61.276.330	3.001.394.954	
Kehutanan				-	-
Perikanan	3.050.071.284		61.276.330	3.034.297.384	-
Tarif Otsus	10.809.291	2.436.510	9.317.075	16.905.007	37.973.420
Dana Reboisasi	-	21.433.952	6.135.050	-	37.973.420
Dana Migas	18.688.300	-	2.183.025	16.505.007	
Selisih Bagian Pemerintah					
Kehutanan	276.072.804		177.110.650	-	96.634.710
DR	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
PSDH	126.072.804		177.110.650		96.634.710
Perikanan	150.000.000		228.491.070		57.894.360
Jumlah Total	34.079.187.122	79.212.206	70.948.567.71	33.760.648.262	824.784.118

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tapanuli Selatan

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	15.754.317.606	5.417.313.341	7.836.995.265
PPh	-	-	1.854.907.359	-	1.854.907.359
PPh Pasal 21			1.371.340.307		1.371.340.307
PPh Pasal 25/29			142.661.074		483.567.052
PPN			13.899.410.247	5.417.313.341	8.481.530.906
Dapil Data					
Bagian Daerah Migas	-				-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	6.731.207.341	5.417.313.341	895.541.255
Bagian Daerah Pajak Rokok	-	-	4.536.105.203	-	4.536.105.203
Bagian Daerah Pertambangan			67.168.031		67.168.031
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	322.061.033	-	826.541.033
Bagian Pemerintah Pajak Rokok			179.787.215		179.787.215
Bagian Pemerintah Pertambangan			3.113.716		3.113.716
Bagian Pemerintah Perkebunan					
Bagian Pemerintah Kehutanan	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
DAK		8.000.875	1.903.783.864		4.845.109.864
Migas			201.000.000		201.000.000
Migas Bagi 15%			138.787.920		138.787.920
Migas Bagi 0,5%	-	-	4.855.080	-	4.926.216
Migas Bagi Tambahan Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Gas Bagi 70%	-	-	105.867.828	-	26.697.828
Gas Bagi 0,5%			1.707.972		1.707.972
Gas Bagi dalam Rangka Otsus					
Minerba			2.211.412.217		4.211.112.217
Panas Bumi			261.732.932		910.732.932
Regsi	-		2.551.732.280		3.951.732.280
Pajak Alat	-	-	2.863.197	-	2.863.197
Jasa Perantara	-	-	-	-	-
Jasa tetap			2.411.117		2.411.117
Kehutanan Dana Reboisasi					
Cukai Hasil		8.000.875			
CHT	-	-	-	-	-
DBH		-	-	-	-
DAK		8.000.875			
Perikanan					
Total Dana	-	8.000.875	19.398.[illegible]	5.417.313.341	13.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tapanuli Selatan

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi Tahun 2021		Penyaluran DBH TKDD Berdasarkan PMK 226/PMK.07/2020	DBH Tahun 2020 yang Belum Disalurkan	DBH Tahun 2021 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Total	76.137.962.019		3.850.642.402	69.250.645.646	6.736.668
PPh	4.563.269.303	-	2.670.593.300	2.238.776.284	-
PPh Pasal 21	4.563.267.960	-	2.827.613.800	1.859.045.160	-
PPh Pasal 25/29	803.401.378	-	42.701.550	845.699.928	
PBB	61.347.704.227	-	1.738.201.960	58.070.208.163	10.728.304
Pasal Mana	1.891.162.094		242.146.729	1.626.271.208	
Bagian Daerah Minas	1.58.452.017		171.201.130		1.892.160
Bagian Daerah Dari Migas	5.102.777.119		2.051.782.800	16.050.994.319	-
Bagian Daerah Dari Pertambangan Panas Bumi	59.259.470	-	15.291.950	-	5.791.201
Bagian Daerah Dari Pertambangan	556.247.430	-	95.780.950	459.966.500	-
Bagian Daerah Dari Kehutanan	1.703.320.860		1.290.628.350	412.692.510	
Bagian Daerah Dari Perikanan	211.499.027		5.107.250	206.391.797	
Dana Reboisasi	3.129.000		1.260.000		1.869.000
Bagian Daerah dari Pajak Migas	7.060.403.135		1.054.857.000	1.005.546.135	-
Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan	1.55.026	-	38.650	-	16.376
Iuran Pengusahaan Perikanan	2.1.50.613		1.233.700	21.916.913	
Iuran Pengusahaan Perikanan	214.1.11.0.0		32.300.250	1.6.100.150	
Bagian Daerah dari Pajak Lainnya	6.031.240		1.1.1.570	5.191.740	-
PPh	6.924.634	-	1.1.9.259	6.686.475	-
PBB	101.029.835.006	76.611.206	3.736.888.325	97.334.670.941	950.372.370
Migas		14.2.2.2.2	1.1.1.1.1		30.21.1.1.1
Minerba Bagian DBH		2.1.1.1.1	1.1.1.1.1		29.731.803
Panas Bumi Bagian DBH		1.1.1.1.1	1.1.1.1.1		592.1.1
Bagian Dana Reboisasi Pengelolaan Hutan				-	-
Cukai Rokok (10%)		14.1.1.1.1	1.1.1.1.1	-	15.037.388
Cukai Rokok (2%)		411.1.1.1	1.1.1.1	-	410.1.1
Cukai Rokok Bagian Daerah Penghasil				-	
Migas	1.1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	
Landdent	1.1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	
Royalti	1.1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	
Dana Bagi Hasil	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1
Dana Perimbangan	-	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	-	1.1.1.1.1.1.1.1
Dana Desa	1.1.1.1.1.1.1.1	-	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	-
Bagian Dana Perimbangan					
Kehutanan	1.1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1
DAK				-	-
PPh Pasal 21	1.1.1.1.1.1.1.1	-	-	1.1.1.1.1.1.1.1	-
PBB	1.1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1.1
Pertambangan	1.1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1.1
Jumlah (1+2)	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 202 :

Kab. Kepulauan Anambas

(Dalam ribuan rupiah)

JENIS DBH	REALISASI	REALISASI	Tahun Anggaran 2019 (PMK No. 193/PMK.07/2019)	Penyesuaian TA 2019 (KEP No. 175/KM.7/2021)	Tahun Anggaran 2019 (Setelah Penyesuaian)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Migas	-	-	170.371.234	230.176.407	297.611.717
Pajak			200.092.772	240.176.407	146.115.000
Dana Bagi Hasil			210.08.8.705	249.908.750	
PPh Pasal 25/29			105.050.912	240.044	105.191.360
PBB	-	-	54.269.589	-	54.269.589
Bea Perolehan	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Migas	-	-	-	-	
Cukai Daerah Hasil Migas			7.751.745		7.751.745
Dukungan Anggaran Pusat Lainnya			3.020.133		58.020.000
Program Peningkatan Infrastruktur			2.194....		2.432.152
Program Pemerintah Pusat Lainnya	-	-		-	-
Program Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Migas			-		
Dana Penyesuaian Non Migas			307.911		307.911
Program Pemerintah Pusat Lainnya			1.080.746		1.080.746
Program Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	207.349	-	207.349
Program Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	
Dana Penyesuaian Bidang Lainnya			-		
DBH					
SDA		1.802....	79.181.891		79.181.891
Migas	-	-	19.0.0....	-	120.0.0....
Migas Bagi Hasil		-	14.334.607	-	02.887.027
Migas Bagi Hasil	-	-	3.0.0....	-	3.0.0....
Migas Dana Bagi Hasil Penyerahan Daerah					
Gas Bumi PPh			21.01....		21.01....
Gas Bumi PBB			1.0.1.32		1.0.1.32
Gas Bumi Pajak Penerangan Migas					-
Pertambangan	-	-	64.8.2....	-	64.8.2....
Pertambangan	-	-	64.8.2....	-	64.8.2....
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pertambangan			1.1.1....		2.242....
Dana Reboisasi			22.0....		2.0.0....
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	5.802....	-	-	-
Kehutanan					
PSDH	-	5.802....	-	-	-
Pajak Kehutanan	-	-	-	-	-
Kehutanan Lain	-	3.802....	1.0.1....	2.0.1....	2.0.0....

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Status: Diperiksa/Belum Diperiksa (Audited/Unaudited)

(dalam rupiah)

Jenis DBH	LKPD Audited TA 2020	LKPD Unaudited TA 2020	Penetapan PMK Nomor ... Tentang ... (PMK No. ... /PMK.07/2021)	Alokasi TA 2021 yang belum disalurkan	Alokasi TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)-(4)	(6)
Pajak	8.643.214.814	-	2.511.225.382	6.131.989.432	4.702.058
PBB	5.211.169.470	-	1.355.787.220	3.855.382.250	-
PBB Pasal 21	2.363.170.064		1.047.268.830	1.315.901.234	-
PBB Pasal 25/29	838.875.280		108.768.332	730.106.948	-
BPHTB	1.231.001.137		1.199.152.020	1.201.102.018	1.422.038
Cukai Tembakau	1.961.050.998		265.369.770	1.695.680.228	
Bagian Daerah dari Migas	178.971.505	-	142.751.130	-	4.479.697
Bagian Daerah dari Non Migas	50.575.402	-	3.763.830	38.911.572	-
Bagian Daerah dari Pajak Panas Bumi	14.074.581	-	-	16.971.279	-
Dana Bagi Hasil Pertambangan	61.835.547		47.170.630	13.174.717	
Dana Bagi Hasil Perkebunan	1.704.127.269		1.10.070.700	1.101.110.669	
Dana Bagi Hasil Kehutanan	210.048.104		9.901.000	200.897.207	-
Bagian Daerah dari Migas	5.415.162	-	5.167.830	-	247.332
Bagian Pemerintah dari Migas	178.782	-	144.000	1.171.180	-
Bagian Pemerintah Pusat Lain	2.023.309			2.023.309	
Bagian dari Kegiatan Perbatasan	2.787.301		2.196.000	591.001	
Bagian dari Kegiatan Perkebunan	2.439.201	-	33.915.120	1.723.962	-
Bagian dari Kegiatan Rokok Tembakau	6.534.241	-	340.500	5.193.741	-
DBH	15.154.977	-	11.870.772	383.073	-
DAU	3.413.875.321	76.317.250	334.654.245	3.278.126.307	27.731.020
DAK		21.872.000	1.736.900		20.211.100
Fisik (PK)		20.102.000	1.090.200		20.760.800
Fisik (Non PK)	-	405.000	36.600	-	932.400
Fisik Bersifat Tambahan Ruang Fiskal	-	-	-	-	-
Dana Otsus 2%	-	24.937.000	910.700	-	28.026.300
Dana Otsus 0,5%		1.931	5.438		1.493
Dana Otsus dalam rangka Otsus					
Dana Otsus	3.131.805.854		153.720.146	2.977.997.641	1.111.067
Tambahan	20.171.210		12.070.200	-	22.222.030
Migas	3.096.274.384	-	61.676.500	3.034.597.884	-
Dana Bagi	15.682.092	31.453.570	8.317.775	5.505.097	32.573.630
Dana Alokasi	-	31.453.570	16.734.070	-	32.573.630
Dana Tetap	15.682.092		11.416.295	11.265.797	
Dana Transfer Pemerintah					
Dana Desa	70.514.646		18.086.700	52.427.946	-
DR	-	-	-	-	-
DBH					
DAU	70.514.646		18.086.700	52.427.946	
Dana Insentif	36.181.990		3.620.000		32.561.990
Dana Total	13.658.272.816	98.317.926	3.079.674.977	9.180.054.587	76.850.644

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tapanuli Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.[illegible]/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.[illegible]/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			137.331.854		137.331.854
PPh					
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29				-	-
PBB			137.331.854	-	137.331.854
Tiap Data	-	-	-	-	
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas	-	-	132.102.214		132.102.214
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Perhutanan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas			5.229.640		5.229.640
Biaya Pemungutan Panas Bumi					-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-			
CHT					-
SDA		9.550.967	1.[illegible]	357.[illegible]	1.[illegible]
Migas			6[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	-	6[illegible]	-	6[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	-	2.[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam rangka Otsus				-	-
Minerba			1.[illegible]	357.[illegible]	9[illegible]
Landrent	-	-	1.[illegible]	357.[illegible]	9[illegible]
Royalti	-	-	-		
Panas Bumi	-	-	[illegible]		[illegible]
Iuran Produksi	-				
Iuran tetap			[illegible]	-	[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan	-	9.550.967	[illegible]	-	[illegible]
DR	-	-			
IIUPH					-
PSDH		9.550.967	[illegible]	-	[illegible]
Perikanan		-	-	-	-
Grand Total	-	9.550.967	1.[illegible]	357.[illegible]	1.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tapanuli Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	DBH yang telah disalurkan TA 2020	DBH yang telah disalurkan TA 2021	Pencadangan DBH yang disalurkan TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	DBH TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(3)-(4)	(6)
PPh	95.102.381.153		3.021.982.067	92.080.399.086	1.010.000
PPN	2.768.762.010		1.232.792.420	735.969.590	
PPh Pasal 21	2.032.796.191		1.296.827.101	735.969.090	
PPh Pasal 25/29	735.965.819		735.965.319	500	
CHT	38.527.635.095		200.000.000	38.327.635.095	61.680.000
Sagu Batu	1.961.959.046		368.679.530	1.593.279.516	
Bagian Pemerintah Pusat	177.120.586		181.370.850		4.250.264
Bagian Daerah Penghasil	70.848.234		1.045.050	69.803.184	
Dana Bagi Hasil Pajak	21.070.208.819		241.416.700	20.828.792.119	
Dana Bagi Hasil Perkebunan	917.619.119		211.191.100	706.427.019	
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	915.895.707		8.424.500	906.471.207	
Dana Penyeimbang PPh Migas	4.078.171		3.077.680		200.491
Dana Penyeimbang Non Migas	675.971		77.139	598.832	
Dana Perimbangan Pajak Bumi	1.220.000.705		21.089.730	1.198.910.975	
Dana Perimbangan Pajak Bumi	29.751.845		3.995.430	25.756.415	
Dana Perimbangan Pajak Bumi					
Dana Perimbangan Pajak Lainnya	8.334.249		316.500	7.107.713	
Cukai	314.211.272		92.980.581	221.230.691	
PNBP	3.129.020.807	21.389.312	369.010.956	3.038.392.951	581.127.268
Migas		24.972.797	1.036.630		58.211.466
Migas Bunga (15%)		23.867.901	1.036.700		24.704.820
Migas Bunga (0,5%)		1.104.896	35.930		1.092.150
Migas sebagai pelunasan Bonus Produksi					
Dari Bunga DHB		11.834.063	277.730		12.111.793
Dari Bunga Lain		210.101	9.350		219.451
Dari Pihak dalam Negeri Lainnya					
Minerba	3.016.071.384	1.307.109	1.3.150.976	3.004.197.86-	98.431.94
Iuran Tetap		1.977.109	59.476.976		74.431.981
Royalti	3.016.074.384		61.676.950	5.734.397.864	
Pokok Lelang	12.997.000	21.430.000	5.317.076	19.909.000	37.372.020
Bunga Pinjaman		21.139.000	5.136.000		37.372.020
Denda Lelang	15.629.000		2.180.000	19.909.000	
Pendapatan Bagian Pemerintah					
Kehutanan	8.687.376		14.356.000		8.687.376
Iuran					
IUPHH					
PSDH	30.871.377		17.318.600		8.687.376
Tambahan	57.135.383		3.187.000		57.604.153
Grand Total	4.618.787.383	64.269.312	5.603.578.81	58.421.471	330.107.153

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tebo

(Rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	Alokasi TA 2021 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Pagu Alokasi TA 2021 (KMK No. 1/KM.7/2021)	Alokasi TA 2021 (KMK No. 1/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
PBB			[illegible]		[illegible]
[illegible]					
Bagian Daerah Penerimaan					
Bagian Daerah Penerimaan Masa					
Bagian Daerah Penerimaan Pasal Tertentu					
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Pusat Penerimaan			[illegible]		[illegible]
Bagian Pemerintah Pusat Penerimaan					
Biaya Pemungutan Pemerintah Masa					
Biaya Pemungutan Pemerintah Non Migas					
Biaya Pemungutan Pemerintah Pusat					
Biaya Pemungutan Pemerintah Daerah					
Biaya Pemungutan Pemerintah Pusat			[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Pemerintah Daerah					
PPh		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas			[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
Pertanian			[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]					
Pasal [illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]					
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]					
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]					
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Tidak

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran s.d. DJPK Sampai dengan TA 2020 (KMK No. 530/KM.7/2021)	PB TA 2020 yang Telah Dapat Disalurkan	LB TA 2020 yang Telah Dapat Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6) = (3)-(4)
Pajak	7.703.005.172	-	2.128.127.172	5.574.878.000	322.000
PPh	4.966.071.111	-	1.177.089.000	3.788.982.111	-
PPh Pasal 21	4.136.072.282	-	1.242.087.926	2.893.984.356	-
PPh Pasal 25/29	511.931.917	-	105.001.000	406.930.917	-
PPh	2.625.299.853	-	-68.998.926	2.762.678.779	322.000
Reg. Pajak	60.351.963	-	205.676.705	1.776.670.705	-
Bagian Daerah Migas	106.214.267	-	38.076.750	-	3.022.000
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal Lain					
Bagian Daerah Pertambangan	217.300.250		40.210.000	177.090.198	
Bagian Daerah Panas Bumi	39.958.679	-	16.034.500	23.925.251	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.500.077	-	8.914.700	206.094.707	
Iuran Pertambangan Migas	3.771.111		3.590.160		180.951
Iuran Pertambangan Non Migas					-
Iuran Pertambangan Panas Bumi	37.353.514	-	8.035.700	4.53 .751	-
Iuran Pertambangan Pertahanan	4.488.716	-	20 .700	3.870.016	
Iuran Pertambangan Sektor Lainnya	8.337.013		470.500	4.703.443	
Cukai	10.724.421		11.539.152	7.000.000	-
PBHA	9.223.379.051	76.312.926	633.146.921	7.050.979.651	627.264.453
Migas	-	64.813.636	638.000	-	64.813.636
Minyak Bumi 15%	-	13.668.800	746.000	-	10.774.800
Minyak Bumi 0,5%	-	951.836	30.000		951.836
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat					
Gas Bumi 30%		27.421.000	202.000		27.017.000
Gas Bumi 0,5%		456.800	3.200		453.600
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat				-	-
Minerba	1.369.071.394	-	97.875.500	1.095.937.894	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Kehutanan	2.726.074.594	-	31.676.500	2.694.397.961	
Provisi Hasil	78.693.915	21.439.070	16.417.000	62.276.915	5.022.070
Dana Reboisasi		21.439.070	16.417.000		5.022.070
Iuran Izin Usaha	78.693.915		16.417.000	62.276.915	-
Setoran Sisa Lelang Kehutanan	-	-	-	-	-
Perikanan	40.130.015	-	28.338.270		11.791.745
DR					
PNBP					
PSDH	40.130.015	-	28.338.270	-	11.791.745
Pertambangan	199.172.690	-	316.83 .602	-	157.69 .020
Grand Total	11.923.087.735	76.312.926	2.987.773.777	9.701.126.174	348.274.684

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Daerah | (dalam rupiah)

[illegible]	KURANG BAYAR	KURANG BAYAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
Pajak	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan					
Pajak Daerah Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pajak Hiburan	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pajak Reklame					
Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Parkir	-	-	-	-	-
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Pajak Pengambilan Air Permukaan	-	-	-	-	-
Pajak Rokok					
Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Opsen Pajak Air Permukaan					
Pajak Opsen Pajak Rokok					
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	3,789,067	44,709,971	6,472,697	38,237,274
Migas			31,784,971	6,472,697	25,312,274
Minyak Bumi 15%			31,784,971	6,472,697	25,312,274
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Minerba					
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi	-		-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah					
PNBP Lainnya		3,789,067			
DR	-	-	-	-	-
PNBP	-	-	-	-	-
PBNBL		3,789,067			
Perikanan					
Grand Total		3,789,067	44,709,971	6,472,697	38,237,274

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lampiran Angka

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	TKD Pagu Tahun 2020	DBH Ditetapkan TA 2020	Perpaduan DBH Semester I TA 2020 (PMK-17/PMK.07/2021)	DBH 2020 yang belum disalurkan	DBH TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(6)	(8)	(13)=(7)-(9)	(14)
PBB-P2	9.261.153.106	-	1.521.290.353	6.751.961.754	-
BPHTB	1.917.716.337	-	1.339.055.120	3.124.963.453	-
PPh Pasal 21	3.197.073.079		883.160.206	884.439.843	-
PPh Pasal 25/29	430.869.219		203.774.000	61.373.610	-
PPN	2.200.635.711		123.416.730	1.511.712.017	
Pajak Rokok	1.961.828.999		302.080.000	1.461.270.236	
Bagian Pemerintah Migas	938.486.936		287.051.700	465.950.649	
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas			-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	2.317.961.101		107.013.100	2.210.750.236	
Bagian Pemerintah Pertambangan	210.545.201		5.454.000	205.091.201	
Bagian Pemerintah Pertambangan	28.992.463	-	1.810.403	27.110.059	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan				-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Bagian Pemerintah Pertambangan	1.749.341.511		59.610.100	193.060.111	
Bagian Pemerintah Pertambangan	7.553.343	-	3.400.500	6.120.743	-
PPh	17.551.377	-	17.551.377	- 515.675	-
SDA	9.317.129.677	102.170.650	4.730.303.132	3.973.034.279	278.7 7.77
Migas		91.137.033	12.973.103		53.120.796
Minyak Bumi		67.050.570	12.955.107		20.113.905
Minyak Bumi	-	1.300.000	59.300		1.340.700
Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Gas Bumi	-	7.824.475	17.700	-	15.037.385
Gas Bumi		15.75	3.300	-	415.451
Gas Bumi					-
Pertambangan	3.070.077.084		1.107.500	3.004.347.581	
Kehutanan					
Perikanan	3.299.07 .084		1.107.500	3.022.347.581	
Panas Bumi	19.908.013	11.439.570	18.5 1.375	15.0 0.007	27.0 0.825
Panas Bumi	-	11.439.570	16.384.351	-	27.575.695
Panas Bumi	19.058.093		2.183.208	16.5 5.647	-
Setoran Panas Bumi					
Pertambangan	3.3 7.7.30		73.373.777	22.0 1.721	
DR	-	-	-	-	-
DR		-	-	-	-
PNBP	70.0 7.130		73.3 .729	24.3 1.72	
Pertambangan	199.199.999		110.861.300		11.7.03.525
Pertambangan	17.999.713.748	113.6 6.626	11.918.981.502	9.977.030.116	2 3.7 7.779

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Medan (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB TA 2019 (KMK No. .../KM.7/2021)	Sisa LB TA 2019 (KMK No. .../KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			5.880.372.275	2.975.177.553	2.904.795.722
PPh			5.880.372.275	2.975.177.553	2.904.795.722
PPh Pasal 21				-	
PPh Pasal 25/29	-	-	5.880.372.275	2.975.177.553	2.904.795.722
PBB	-	-	-	-	-
Bag. Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perhutanan				-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-		-		
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Panas Bumi				-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT					
SDA		6.131.773	71.062.029	-	71.331.558
Migas	-	-	48.022.750	-	39.038.731
Minyak Bumi 15%	-	-	46.811.800	-	36.811.807
Minyak Bumi 0,5%			2.210.950		2.226.924
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti					
Panas Bumi			2.711.849		2.393.970
Iuran Tetap					
Iuran Produksi	-	-	2.393.319	-	525.959
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		6.131.773			
DR					
IIUPH					
PSDH	-	6.131.773	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total		6.131.773	5.952.158.304	2.976.177.852	2.976.177.852

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Medan

(rupiah)

Uraian	PB Tahun Ini (TA 2021)	PB Tahun Lalu (TA 2020)	Penyaluran APBD 2021 (Sesuai Lamp. PA TKDD) (PMK No. 7/PMK.7/2021)	APBD TA 2020 yang lalu (Disesuaikan)	DBH TA 2020 yang lalu (Disesuaikan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	25.128.706.070		28.283.231.770	49.155.135.203	
PPh	23.001.454.296		27.175.300.709	[illegible]	
PPh Pasal 21	9.673.983.277		11.000.171.000	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	13.327.471.019		16.175.129.709	23.024.929.389	
PBB	1.910.896.032		891.301.103	2.029.811.732	
Bea BPHTB	1.291.969.026	-	291.386.709	1.736.359.258	-
Cukai Tembakau (Cukai)	987.870.035	-	806.153.159	58.432.143	-
Cukai Tembakau Non Migas			-	-	
Pungutan Daerah Atas Minuman Beralkohol					
Pungutan Daerah Perkotaan					
Pungutan Daerah Pertambangan					
Pungutan Jasa Hiburan Tahun Lalu	3.138.051.807	-	1.126.[illegible].110	400.189.307	-
Biaya Pemungutan Migas	20.[illegible].541	-	22.089.430	6.336.[illegible]41	-
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-				
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perbendaharaan	8.208.242	-	447.810	7.742.043	-
DLH	35.[illegible].261		21.[illegible].070	9.[illegible].[illegible]2	
PPN	337.[illegible].[illegible]62	[illegible].[illegible]2	47.[illegible].930	[illegible].[illegible]2	2.[illegible].[illegible]2
Migas		1.[illegible].[illegible]5	1.[illegible].930		[illegible].[illegible]5
Migas Bumi (15%)	-	28.[illegible].[illegible]1	1.[illegible].930	-	28.[illegible].[illegible]1
Migas Gas (0,5%)	-	[illegible].[illegible]4	[illegible].[illegible]0	-	[illegible].[illegible]4
Migas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi (50%)		21.[illegible].[illegible]7	[illegible].[illegible]0		21.[illegible].[illegible]7
Gas Bumi (0,5%)		[illegible].[illegible]1	[illegible].[illegible]0		[illegible].[illegible]1
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	3.[illegible].[illegible].384		61.[illegible].[illegible]0	[illegible].[illegible].[illegible]4	
Minerba	-	-	-	-	-
Kehutanan	3.[illegible].[illegible].384	-	61.[illegible].[illegible]0	3.[illegible].[illegible].384	-
Pajak Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]2	2.[illegible].[illegible]0	18.[illegible].[illegible]3	[illegible].[illegible].[illegible]2	37.[illegible].[illegible]0
Jumlah Perolehan		2.[illegible].[illegible]0	1.[illegible].[illegible]0		37.[illegible].[illegible]0
Tarif Efektif	19.[illegible].[illegible]2		[illegible].[illegible]1	[illegible].[illegible].[illegible]7	
Kelebihan Bagi Hasil Migas					
Kelebihan Bagi Hasil Migas	[illegible].[illegible].[illegible]6	-	49.[illegible].[illegible]5	[illegible].[illegible]7	-
Lain-lain		-	-	-	-
TOTAL					
TOTAL	[illegible].[illegible].[illegible]5		19.[illegible].[illegible]0	[illegible].[illegible].[illegible]1	
Kurang Bayar	[illegible].[illegible].[illegible]1	-	[illegible].[illegible].[illegible]0	-	[illegible].[illegible].[illegible]2
Grand Total	[illegible].[illegible].[illegible]1	[illegible].[illegible].[illegible]6	[illegible].[illegible].[illegible]0	[illegible].[illegible].[illegible]2	[illegible].[illegible].[illegible]9

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pematang Siantar

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Alokasi	Realisasi	PMK No. 226/PMK.07/2021	PMK No. 215/PMK.07/2021	PMK No. 205/PMK.07/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak			3.470.[illegible].410	319.[illegible].832	3.790.[illegible].242
PPh			3.470.[illegible].410	319.[illegible].832	3.790.[illegible].242
PPh Pasal 21			3.[illegible].[illegible].317	349.[illegible].424	3.[illegible].[illegible].741
PPh Pasal 23/26			26.[illegible].[illegible]	-	26.[illegible].[illegible]
PBB			-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			-	-	-
Pajak Rokok					
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Air Permukaan			-	-	-
Pajak Alat Berat			-	-	-
Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Opsen Pajak Rokok					
Cukai					
DAU		5.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Migas			[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 15%			[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 0,5%			2.[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Kontrak					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak			-	-	-
Minerba			-	-	-
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi			2.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Dana Reboisasi					
Barang Milik Negara			[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Kekurangan Pembayaran Angsuran PBB			-	-	-
Kompensasi		[illegible].[illegible]			
DR					
BLPH		-	-	-	-
PNBP		[illegible].[illegible]	-	-	-
Kehutanan					
Total		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lotus Perancang Sistem (Rupiah)

URAIAN DBH	DBH Tahun Berjalan	DBH Tahun Sebelumnya	Penyaluran DBH Tahun Berjalan (PMK 134/PMK.07/2020)	DBH Tahun Sebelumnya yang Belum Disalurkan	DBH Tahun Berjalan yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	20.[illegible].578	-	5.703.153.178	4.[illegible].940	2.186.830
PPh	8.178.787.940		5.178.787.940	[illegible]	
PPh Pasal 21	3.277.313.060		3.201.160.000	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	1.29[illegible]		205.[illegible]	[illegible]	
PPN	2.[illegible]		361.[illegible]	[illegible]	2.[illegible]
Bagi Pata	1.96[illegible]		200.[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Migas	6.[illegible]	-	69.646.830	-	[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pendapatan					
Bagian Daerah Perkebunan	27.[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pemerintah Migas	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Pemerintah Non Migas		-	-	-	
Bagian Pemerintah Pajak Pusat					
Bagian Pemerintah Perkebunan					
Bagian Pemerintah Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Cukai	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PNBP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas Bagian 85%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas Bagian 15%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas Bagian Daerah Penghasil Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi 30%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Ekspor					
Minerba	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	-		-		-
Royalti	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Provinsi	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Jumlah Desa	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Provinsi Bagian Pemerintah					
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PSDH	-	-	-	-	-
DR					
PHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Jumlah Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Surabaya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PPh Pasal 21	Rokok	Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 193/PMK.07/2014)	Penyaluran Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2019 (kolom (4) - kolom (5))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pokok			302.495.716	78.759.541	243.735.875
Sanksi			370.665.716	78.759.541	243.735.875
Dana Bagi Hasil			370.665.716	78.759.541	243.735.875
Dana Alokasi Umum					
DBH					
Bagi Rata					
Bagian Daerah Provinsi					
Bagian Daerah Kabupaten/Kota					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Pemerataan					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Non Migas					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					
Biaya Pemungutan Pajak Rokok					
Biaya Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Lain-lain					
DAK		1.790.877	71.352.820		71.352.820
Migas			69.132.754		69.132.754
Minyak Bumi 15%			66.813.800		66.813.800
Gas Bumi 0,3%			2.261.950		2.261.950
Migas Non Operator Bagian Daerah					
Pajak Daerah 70%					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau Bagian Daerah					
Minerba					
Iuran Tetap					
Royalti					
Pokok Sanksi			1.940.879		1.940.879
Pokok Produksi					
Sanksi Iuran			1.940.879		1.940.879
Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor					
Kehutanan		8.732.758			
Iuran					
PSDH					
DR		8.732.758			
Sanksi					
Perikanan					
Pokok		1.790.877	371.977.004	78.759.541	293.217.463
Sanksi			370.665.716	78.759.541	291.906.175
Jumlah		1.790.877	742.642.720	157.519.082	585.123.638

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Sibolga (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH sementara TA 2020 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang telah diselesaikan	KB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]	-	1.621.053.582	2.935.901.792	2.355.375
PPh	2.582.627.749	-	581.743.400	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]	-	385.390.320	704.[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	155.[illegible]	306.272.438	-
PBB	3.203.139.219		947.250.830	[illegible]	2.357.353
Bagi Rata	1.981.[illegible]		205.689.759	[illegible]	
Bagian Daerah Migas	[illegible]		[illegible]		1.238.147
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan				-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	201.[illegible]		17.216.209	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Perhutanan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
SDA	[illegible]	75.312.236	[illegible]	[illegible]	251.479.076
Migas		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15%		29.[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		955.370	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Iuran Tetap					
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Produksi	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Iuran Tetap	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Setoran Bagian Pemerintah					-
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DR	-	-			
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Grand Total	[illegible]	75.312.236	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Tanjung Balai (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	LB TA 2019	LB s.d. TA 2019 ([illegible])	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 ([illegible])	Sisa LB s.d. TA 2019 ([illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	-	-	-	-	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas				-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan		-			
Bagian Daerah Perkebunan			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perkebunan			[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	
SDA		[illegible]	71.382.629		71.382.629
Migas			68.038.750		68.038.750
Minyak Bumi 15%			65.611.800		65.611.800
Minyak Bumi 0,5%	-		2.426.950	-	2.426.950
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba					
Landrent					
Royalti					-
Panas Bumi	-	-	3.343.879	-	3.343.879
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap		-	3.343.879		3.343.879
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		[illegible]			-
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	
PSDH		[illegible]			
Perikanan					
Grand Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tanjung Balai

(Dalam rupiah)

Uraian DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran LB DBH Pada TA 2020 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	LB TA 2020 yang Belum Dapat Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Dapat Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Dana Bagi Hasil	1.290.870.828		1.077.717.232	213.153.596	213.153.596
PPh	309.636.174		129.482.938	180.153.236	
PPh Pasal 21	211.690.691		109.122.259	102.568.432	
PPh Pasal 25/29	936.245.794		207.497.340	728.748.454	-
PBB	2.144.838.049	-	387.210.202	1.757.627.847	2.240.693
BPHTB	1.091.551.305	-	365.445.712	726.105.593	-
Cukai Hasil Tembakau	87.196.703	-	83.630.770	-	3.565.933
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam					
Dana Bagi Hasil Kehutanan					
Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum					
Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak	-		-	-	-
Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas	98.193.207	-	32.436.900	161.972.407	-
Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	2.171.153	-	2.056.200	-	114.953
Dana Bagi Hasil Perikanan					
Dana Perimbangan Lainnya					
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Lainnya	7.275.613	-	1.285.700	5.989.913	
DBH	14.727.687		11.304.102	3.423.585	
Pajak	2.199.291.912	21.422.203	176.509.807	2.044.204.308	261.104.776
Migas	-	21.422.203	1.536.900	-	19.885.303
Minyak Bumi (15%)	-	19.888.420	286.900	-	19.601.520
Gas Bumi (30%)	-	1.533.783	1.250.000	-	283.783
Pajak Penghasilan Pasal 22/Impor (15%)					
Cukai Hasil Tembakau		21.422.203	202.400		21.219.803
Cukai Hasil Tembakau		7.200.000	3.300		7.196.700
Cukai Hasil Tembakau Dengan Pita Cukai					-
Minerba	2.196.074.396	-	5.876.900	2.190.197.496	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Kehutanan	2.196.074.396	-	5.876.900	2.190.197.496	-
Pajak Lainnya	2.116.000	21.422.203	18.317.078	5.220.847	37.220.828
Opsen Pajak Rokok		21.422.203	16.117.828		37.220.828
Pajak Alat Berat	2.116.000		2.199.250	15.920.597	
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Kehutanan	73.477.100	-	6.275.775	67.201.325	-
Cukai					
Pajak					
PBB	73.477.100	-	48.075.475	25.401.625	-
Perikanan	139.154.000	-	116.83[illegible]00	-	122.962.020
Grand Total	2.412.129.000	78.312.000	3.124.236.102	6.787.424.050	232.717.778

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Tebing Tinggi

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 26/PMK.07/2020)	Penyaluran LB TA 2019 (PMK No. 31/PMK.07/2021)	Sisa LB TA 2019 (PMK No. 31/PMK.07/2021)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
DBH	-	-	900.000.000	91.287.[illegible]	808.[illegible]
PPh		-	402.058.015	94.[illegible]	308.[illegible]
PPh Pasal 21		-	402.058.015	94.[illegible]	308.[illegible]
PPh Pasal 25/29			-	-	-
PBB			-	-	-
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Pasca Tambang	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	
Bagian Daerah Pasca Tambang			-	-	
Bagian Daerah Kehutanan					
Dibagi Pemerintah Migas		-			
Dibagi Pemerintah Non Migas	-	-	-		
Dibagi Pemerintah Pertambangan		-	-	-	
Dibagi Pemerintah Kehutanan				-	-
Dibagi Pemerintah Perikanan					
Dibagi Pemerintah Panas Bumi	-	-			
OPSI		-	-		
SDA		3.799.069	1.387.[illegible]	-	1.[illegible]
Migas			65.039.[illegible]	-	65.[illegible]
Minyak Bumi 15%			60.811.[illegible]	-	60.[illegible]
Gas Bumi 15%			4.226.[illegible]	-	4.[illegible]
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 70%		-	-		
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	
Gas Bumi Dalam Wilayah Kerja		-	-	-	-
Minerba				-	-
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi		-	2.[illegible]		2.[illegible]
Iuran Eksploitasi			-	-	-
Iuran Tetap			[illegible]	-	2.[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan		0.[illegible]			
DR	-	-			
PSDH		-	-	-	-
DBHP		0.[illegible]	-	-	-
Perikanan					-
Jumlah Total	-	0.[illegible]	171.[illegible]	94.[illegible]	77.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tebing Tinggi

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2021	Lebih Bayar TA 2021	Penyaluran APBN Berdasarkan PMK 226/PMK.07/2021	PFK TA 2020 yang belum disalurkan	LPF TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	3.111.085.092		1.041.032.032	2.070.053.061	2.882.114
PPh	2.944.940.858		1.039.891.300	1.904.949.558	-
PPh Pasal 21	671.975.251		1.039.891.300	917.111.051	-
PPh Pasal 25/29	272.965.607	-	241.360.900	436.369.407	-
PPh	2.000.000.000	-	340.539.000	551.468.948	1.882.348
Pajak Bumi dan Bangunan	1.901.050.098	-	345.580.500	726.270.253	-
Bagian Daerah Kurang Bayar	61.176.274		62.750.000		2.902.784
Bagian Daerah Lebih Bayar					
Bagian Daerah Penyaluran					
Bagian Daerah Penyaluran	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penyaluran	215.890.397	-	9.634.500	208.955.727	-
Bagian Pemerintah Pusat	2.116.106	-	2.726.700		1.116.784
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Pusat	545.241.243		510.239	8.131.273	
CHT	29.921.927		11.029.132	4.050.515	
DAU	33.944.836.852	76.112.229	493.095.850	1.970.204.672	201.478.019
Migas	-	52.372.686	1.536.600	-	68.211.436
Minyak Bumi DBH	-	47.865.450	1.035.300	-	22.776.830
Minyak Bumi PPh		365.400	301.200		902.400
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi DBH		21.892.086	200.100		20.331.081
Gas Bumi PPh		249.751	0.000		211.051
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus		-	-		-
Minerba	2.096.274.384	-	61.676.950	2.102.337.884	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	2.096.274.384		61.676.950	2.102.337.884	-
Panas Bumi	15.958.364	21.739.140	14.317.075	1.010.007	47.373.020
Bunga Panas Bumi		21.739.140	10.111.040		47.373.020
Sumber Daya	15.958.364	-	4.206.035	1.010.007	
Kehutanan Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	78.372.168		48.575.475	92.301.737	-
PSDH					
DBHDR					
PSDH	61.372.168	-	48.575.475	92.301.737	-
Reboisasi	17.000.000	-	3.000.000	-	47.373.020
Jumlah Total	8.344.611.217	74.372.036	2.998.777.909	6.966.926.068	272.709.734

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Padang Sidempuan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2020	Alokasi Lebih Bayar DBH Tahun 2020	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Realisasi Penyaluran DBH Tahun 2021 (PMK No. 37/PMK.07/2021)	Sisa Kurang Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 37/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			102.050.429		102.050.429
SDA	-				-
SDA Pasal 21	-	-	-	-	-
SDA Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	102.050.429	-	102.050.429
Cukai Hasil Tembakau					-
Cukai Hasil Tembakau Sebesar 2%					-
Bagian Daerah Penghasil Cukai			27.112.800		27.112.800
Bagian Daerah Lainnya Sebesar 3%	-		109.937.543	-	109.937.543
Bagian Daerah Penghasil Cukai	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Cukai	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Lainnya Sebesar 2%					-
Bagian Penerimaan Pertambangan					-
Bagian Penerimaan Pertambangan	-	-	1.075.960	-	1.075.960
Bagian Penerimaan Pertambangan	-	-	5.137.683	-	5.137.683
Bagian Penerimaan Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Penerimaan Perkebunan					-
Bagian Penerimaan Sektor Lainnya					-
DBH	-	-	-	-	-
Migas	-	5.750.000	280.095.510	8.272.705	565.572.805
Migas	-	-	90.030.750	-	90.030.750
Migas Bagian 15%			69.511.200		69.511.200
Migas Bagian 3,5%			8.230.950		8.230.950
Migas Bagian Daerah Penghasil			-		-
Gas Bumi 15%			-	-	-
Gas Bumi 6,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	608.970.791	91.272.705	517.430.796
Landrent			608.970.791	91.272.705	517.430.796
Royalti					-
Panas Bumi			2.341.879		2.341.879
Iuran Tetap (Landrent)			-	-	-
Iuran Tetap	-	-	2.341.879	-	2.341.879
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Kehutanan		5.750.000	-		
IHPH					
PSDH	-	-	-	-	-
Perikanan	-	5.750.000	-	-	-
Jumlah Total			812.259.810	91.272.705	720.987.105

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PPh Pasal 21 TA 2020	PPh Pasal 25/29 OP TA 2020	Alokasi DBH Berdasarkan PMK No. 226/PMK.07/2021	KB DBH 2020 yang telah disalurkan	KB DBH 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
Pajak	1,068,717,487	-	2,470,643,441	2,451,019,939	19,623,502
PBB	1,738,306,617		1,033,615,402	756,430,514	-
BPHTB	2,111,271,018		1,854,570,202	305,078,816	-
PPh Pasal 25/29 OP	439,242,034		196,270,200	242,971,834	-
PBB	2,139,251,984		412,969,847	2,057,071,314	81,817,470
BHT BHP	1,581,326,929		230,049,102	1,351,277,827	
Bagian Daerah Migas	37,384,968	-	30,603,207		6,781,762
Bagian Daerah Gas Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 4(2)	2,303,757	-	2,294,302	-	9,455
Bagian Daerah Perhutanan				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	102,104,092		46,073,103	112,031,989	
Bagian Daerah Perikanan	111,599,017		8,003,362	203,595,655	
Biaya Pemungutan Migas	3,013,019	-	2,534,300	-	478,719
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Gas Migas	5,317		42,707	617	-
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perikanan	3,043,616		2,117,200	3,020,619	
Biaya pemungutan Sektor Lainnya	3,124,035	-	342,503	8,481,532	-
PBB	1,427,427	-	1,251,159	4,385,879	-
BPHTB	2,197,020,036	470,153,036	189,057,153	3,078,034,072	628,618,779
Pilkada		17,672,000	1,238,800		30,217,114
Pilkada Provinsi	-	20,000,000	1,750,200		29,749,800
Pilkada Kota	-	950,870	57,330		942,907
Pilkada Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-
Dak Fisik 2021		24,834,035	202,500	-	24,631,535
Dak Fisik 2020		415,831	5,000	-	410,831
Dak Fisik Reboisasi					-
PPh Pasal 21	3,099,011,261	14,071,000	201,277,850	4,034,377,554	837,107,065
Pasal 22	-	911,071,000	42,798,250		911,071,000
Pasal 23	3,034,074,534		2,777,600	3,031,297,934	
Pasal 26	18,896,727	2,430,870	19,327,075	16,030,652	37,674,020
Pasal 4(2)	-	27,430,870	19,134,050	-	37,674,020
Pasal 15	14,080,202		2,193,025	16,273,227	-
Pasal 21 Pajak Penghasilan					
Kehutanan	49,677,196		49,377,419	32,021,721	
DR	-	-	-	-	-
PSDH			-	-	-
DBHCT	10,677,204		49,377,419	22,021,721	
Perikanan	39,000,000		338,000,000		117,000,000
Pertambangan Umum	8,613,734,291	550,969,209	5,916,554,504	9,784,241,995	911,970,502

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Nama Provinsi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KPP TA 2016	KPP TA 2017	Alokasi TA 2019 (PMK No. 49/PMK.07/2019)	Penyaluran (LRA s.d. TA 2019) (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa Alokasi TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak [illegible]	-	-	97.465.870	-	97.465.870
[illegible]			-	-	-
[illegible]					
PPh Pasal 25/29					
PBB			21.710.420		21.710.420
Bagi Hasil					
Kabupaten/Kota Penghasil Migas	-	-	-		-
Kabupaten/Kota Non Migas	-	-	-	-	-
Kabupaten/Kota Penerima Migas	-	-	-	-	-
Kabupaten/Kota Penerima Pertambangan					
Kabupaten/Kota Penghasil Pertambangan			20.098.100		20.098.100
Kabupaten/Kota Penghasil Kehutanan	-	-			
Kabupaten/Kota Non Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Kabupaten/Kota Penerima Migas		-	-	-	-
Kabupaten/Kota Penerima Pertambangan					
Kabupaten/Kota Penerima Kehutanan					
Kabupaten/Kota Penerima Perikanan	-	-	1.367.770		1.367.770
Kabupaten/Kota Penerima Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
DBH			-		-
SDA		7.118.731	1.012.792.716	105.050.796	912.875.051
Migas			68.058.730		68.058.730
Minyak Bumi (PPh)			50.611.530		50.611.530
Minyak Bumi (PPh Migas)	-	-	3.536.950	-	3.536.950
Minyak Bumi (Setoran Bagian Pemerintah)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (PPh)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (PPh Migas)					-
Gas Bumi (Setoran Bagian Pemerintah)					
Pertambangan			43.247.190		43.247.190
Pertambangan Umum	-		43.247.190		43.247.190
Iuran Tetap	-	-			
Royalti	-	-	6.840.107	-	6.840.107
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi			6.840.107		6.840.107
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	7.118.731	911.746.749	105.050.796	806.695.953
PSDH	-	-	-	-	-
DR			-	-	-
Perikanan	-	7.118.731	911.746.749	105.050.796	806.695.953
Pertambangan Panas Bumi					
Grand Total	-	7.118.731	1.080.551.586	105.050.796	975.500.790

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pakpak Bharat (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH s.d TA 2020	LB DBH s.d TA 2020	Penyelesaian KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. .../PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]	25.087.700	[illegible]	[illegible]	65.010.143
PPh	1.[illegible].052.073		1.303.243.780	[illegible]	
PPh Pasal 21	1.[illegible]		902.221.750	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	251.091.280	
PBB	2.[illegible]	25.087.700	[illegible]	2.051.[illegible]	65.010.143
Bagi Rata	1.951.959.998	-	201.[illegible]	1.726.[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	103.[illegible]	-	107.953.900	-	5.[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	78.727.300	-	[illegible]	76.[illegible]	
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perhutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Perkebunan		[illegible]	26.[illegible]		56.[illegible]
Bagian Daerah Sektor Lainnya	315.[illegible]	-	[illegible]	306.[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	4.[illegible]	-	[illegible]	-	185.[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]		[illegible]	2.[illegible]	
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perhutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
CHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	[illegible]	[illegible]	61.[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Tetap	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Royalti	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Produksi		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Iuran Tetap	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]					
[illegible]	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	7.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Akun Sebelum

satuan rupiah

[illegible]	KD TA 2018	KMK 2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6
Migas			1.686.711.084	1.486.862.162	199.848.922
PPh	-	-	622.871.763	577.777.780	45.093.983
PPh Pasal 21	-	-	221.795.067	221.795.067	-
PPh Pasal 22/26	-	-	455.175.667	409.981.913	45.193.754
PBB	-	-	1.063.839.321	908.684.382	155.154.939
Dana Bagi Hasil Migas	-	-	96.933.934	96.933.934	-
Pajak Penghasilan Migas			966.905.387	811.750.448	155.154.939
Pajak Penghasilan Non Migas					
Pajak Penghasilan Pasal 21 - Pusat	-				
Pajak Penghasilan Pasal 22	-	-	901.269.112	769.302.912	131.966.200
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Dalam Negeri			-	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan			7.490.672	7.390.672	100.000
Pajak Penghasilan Pasal 26	-				
Pajak Penghasilan Pasal 26 Final	-	-			
Pajak Penghasilan Pasal 26 Non Final		-	53.870.535	34.940.535	18.930.000
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bunga Obligasi				-	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bunga Obligasi Syariah					
PPN	-		8.059.002	8.059.002	
Cukai	-	34.374.168	1.565.034.530		69.340.694.018
Migas	-	-	979.430.527	-	771.490.340
Minyak Bumi Hasil Produksi	-	-	105.987.738	-	65.211.793
Minyak Bumi Hasil Produksi Dalam Negeri			4.020.015	-	1.613.015
Minyak Bumi Hasil Produksi Dalam Negeri Pasal 22 Impor					
Gas Bumi Hasil Produksi	-		100.387.809		105.857.646
Gas Bumi Hasil Produksi Dalam Negeri	-		1.771.793		1.797.732
Gas Bumi Hasil Produksi Dalam Negeri Pasal 22 Impor	-	-	-		
Nonmigas	-	-	771.726.775	-	771.726.775
Pertambangan Umum		-	-	-	-
Panas Bumi			771.726.775	-	771.726.775
Pertambangan Panas Bumi			2.880.019		2.880.019
Pertambangan Panas Bumi	-				
Pertambangan Panas Bumi Pasal 22 Impor	-	-	2.880.019		2.880.019
Pertambangan Panas Bumi Pasal 26	-	-	-	-	-
Sektor Lainnya		34.374.168	3.213.369.772	-	4.213.305.930
PPh			3.213.369.772		3.213.369.772
PPh Pasal 21	-				
PPh Pasal 22	-	34.374.168	956.574.590	-	999.935.930
Cukai	-		231.491.590	-	231.491.834
Grand Total		34.374.168	5.419.010.591	1.486.862.162	6.038.978.417

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nias Selatan

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB Tahun Lalu TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penetapan KB 2021 (Lampiran TA 2020) (PMK No. 93/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	1.102.573.770	-	728.797.452	4.460.556.256	5.877.769
PBB	1.961.571.190	-	1.049.186.930	912.384.260	
PPh Pasal 21	1.020.480.481		824.702.000	791.049.781	
PPh Pasal 25/29	39.010.000		102.747.000	237.902.812	
BPHTB	1.991.394.347		631.701.000	3.029.761.353	5.877.769
Cukai Tembakau	1.991.959.996		201.568.770	1.726.277.250	
Bagian Daerah Penghasil Migas	15.758.045	-	193.208.770	-	5.081.472
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas			-		
Bagian Daerah Penghasil Migas	1.775.276.241		1.581.977.000	1.511.901.481	
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi	2.369.010	-	6.850.000	98.394.707	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	6.033.775	-	7.513.750	-	206.371
Dana Kehutanan			-		
Dana Kehutanan					
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan	10.719.125		6.920.250	70.799.926	
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan	8.334.742	-	340.350	9.193.743	-
PPh	10.184.897	-	1.482.775	1.383.677	
PPN	2.612.115.109	10.312.206	1.220.390.139	13.21 .07.029	2.21.779.076
Migas		1.972.203	1.025.630		98.211.429
Minyak Bumi 85%	-	26.669.700	1.069.630	-	93.764.370
Minyak Bumi 0,5%	-	155.601	26.630	-	300.220
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Offshore	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%		24.734.683	970.750	-	98.771.389
Gas Bumi 0,5%		113.331	4.330		16.453
Gas Bumi dari Wilayah Kerja Offshore					
Minerba	3.869.971.197		61.693.630	3.931.394.697	
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	3.796.174.384	-	61.676.630	3.934.797.984	-
Pajak Lainnya	16.637.202	2.433.970	13.317.076	16.305.089	37.572.630
Jumlah Pendistribusian		27.438.970	14.134.056		37.572.630
Jumlah Setoran	35.158.894		2.118.020	16.305.089	
Kekurangan Bagian Pemerintah Pusat					
Pajak Lainnya	678.466.700	-	77.087.020	600.901.510	-
BLU	-	-	-	-	-
Lainnya					
TOTAL	2.078.438.100		77.087.020	2.078.901.578	
Pajak Lainnya	35.169.892		2.118.020		37.696.552
Jumlah Total	1.752.347.978	96.312.206	2.206.407.643	610.787.865	337.157.1

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Urusan/Bidang Pemerintahan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	[illegible]	[illegible]	PB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyesuaian PB s.d. TA 2019 (SAS No. [illegible]/KM.[illegible]/2021)	Sisa PB s.d. TA 2019 (SAS No. [illegible]/KM.7/2021)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB Pasal 21	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB Pasal 25/29	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPHTB	-	-	145.014.4[illegible]	145.014.4[illegible]	-
Pajak Rokok			-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas - Bunga		-			
Bagian Daerah Penghasil Migas - Denda		-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Penghasil Migas - Kompensasi		-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas - Sektor Lainnya					-
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat - Bunga			[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pemerintah Pusat - Denda					
CHT	-	-	[illegible]	[illegible]	
DBH	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas		-	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 15%			[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%			[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-		[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	-	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi Dalam Rangka Kompensasi Otsus	-	-	-	-	-
Pertanahan	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Pertambangan			-	-	-
Kehutanan			[illegible]		[illegible]
Perikanan			[illegible]		[illegible]
Pertambangan Panas Bumi	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Dana Reboisasi	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Dana Bagi Hasil Kehutanan			-	-	-
PPh Pasal 21		[illegible]	[illegible]		[illegible]
PPh Pasal 25/29		[illegible]	[illegible]		[illegible]
PPN	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
PPnBM		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Tembakau			-	-	-
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Kewenangan Pemerintah Daerah

(Dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	4.938.601.935		1.570.691.191	3.112.211.313	-489.539
PBB	3.526.155.862	-	2.456.556.900	1.069.636.954	-
Pph Pasal 21	894.767.734	-	1.050.477.300	934.685.154	-
Pph Pasal 25/29	272.095.191	-	165.273.600	269.015.552	-
PBB	3.472.671.939	-	626.737.700	3.067.430.173	4.909.534
Pajak Bea	1.951.313.958		245.246.760	1.720.270.209	
Pajak Daerah Lainnya	115.250.770		119.370.000		4.240.130
Pajak Daerah [illegible]	-				
Pajak Daerah [illegible]		-	-	-	-
Pajak Daerah [illegible]	901.905.150	-	971.185.197	30.419.953	-
Pajak Daerah [illegible]					
Pajak Daerah [illegible]	215.450.077		8.107.230	226.791.107	
Biaya Pengganti Hak Migas	4.511.975		1.160.550		221.194
Biaya Pengganti Hak Migas	-		-	-	-
Biaya Pengganti Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pengganti Pertambangan	14.976.780		8.303.000	6.592.686	
Biaya Pengganti [illegible]					
Biaya Pengganti [illegible]	8.814.545		990.000	9.192.110	-
CHT	69.473.410	-	28.553.952	1.335.140	-
DAU	3.975.010.630	737.709.212	647.555.023	3.050.300.961	414.863.858
Migas		31.972.638	1.958.820	-	30.013.818
Migas [illegible]		26.626.640	1.958.820		24.667.820
Migas [illegible]		5.345.998	99.870		5.245.998
Migas Pajak Dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 70%	-	94.134.985	202.193		93.931.985
Gas Bumi 30%	-	413.551	3.560	-	416.851
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	4.090.014.251		67.476.726	3.934.907.987	-
Tambahan					-
Royalti	3.950.014.251		61.676.220	3.911.390.031	
Pajak Bea	13.698.394	2.756.172	18.211.010	16.305.556	20.672.120
Iuran Produksi	-	2.406.573	5.135.010	-	22.670.583	
Iuran Tetap	16.702.207	-	2.153.023	16.505.597	-
Kekurangan Dalam Pembentukan					-
Kehutanan		103.961.706	103.422.260		539.446.446
DR					
PSDH	-	-	-	-	-
PSDH		103.961.706	103.422.260		539.446.446
Tambahan	111.190.948		21.483.020		89.707.928
Grand Total	8.742.852.941	867.670.212	2.704.727.217	5.138.111.712	980.282.184

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sambung Lestari

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2019	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB TA 2019 (Kep. Dirjen Perimbangan Keuangan No. 8/PK.07/2021)	LB TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021 + Kep. Dirjen Perimbangan Keuangan No. 8/PK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak			770.647.751	169.610.572	940.258.323
PPh			770.647.751	169.610.572	940.258.323
- PPh Pasal 21			770.647.751	169.610.572	940.258.323
PPh Pasal 22/26					
PPN					
Bea Balik Nama					
Bagian Daerah dari Migas					
Bagian Daerah dari Minyak Bumi					
Bagian Daerah dari Pertambangan Umum					
Bagian Daerah dari Perikanan					
Bagian Daerah dari Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah dari Kehutanan					
Bagian Daerah dari Pertambangan Minyak Bumi					
Bagian Daerah dari Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Daerah dari Pertambangan Minyak Bumi dari Wilayah Kerja					
Bagian Daerah dari Pertambangan Gas Bumi dari Wilayah Kerja					
Cukai					
PDV		3.786.369	71.842.980		71.842.980
Migas			99.008.760		99.008.760
Minyak Bumi 85%			66.613.803		66.613.803
Minyak Bumi 0,5%			3.026.082		3.026.082
Alokasi Dana Kelola Migas Oleh [illegible]					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 30%					
Dana Kontribusi Migas Lapangan Abadi					
Panas Bumi					
Dividen					
Royalti					
Pajak Migas			7.347.370		9.347.370
Dana Produksi					
Dana Migas			2.303.847		2.303.847
Bagian Dana Pengembangan					
Kehutanan		5.795.963			
PSDH					
DR					
PSDH		3.786.369			
Pertambangan					
Jumlah Total		3.786.369	849.764.369	169.610.572	993.448.437

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bandung Dagaci

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Pengalokasian TA 2021 (Kurang Salur TA 2020) (sesuai SK. 433/KMK.07/2021)	KB TA 2020 yang Telah Disalurkan	LB TA 2020 yang Telah Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PBB	36.[illegible]2.3.[illegible]	-	6.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
BPHTB	3.[illegible].[illegible].[illegible]	-	2.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
PPh Pasal 21	2.[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
PBBKB	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	8.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Cukai Rokok	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Penerangan Migas	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Pajak Penerangan Non Migas					
Bagian Daerah Pajak Sawit	-				
Bagian Daerah Pertambangan	-	-			
Bagian Daerah Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Penerangan Migas	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Pajak Penerangan Non Migas	-				
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-			
Bagian Pemerintah Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
CHT	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
DAU	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Reboisasi	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Migas Hulu 15%		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Migas Hulu 2,5%		[illegible].[illegible]	[illegible]		[illegible].[illegible]
Migas Pertambangan Panas Bumi					
Gas Bumi 70%		[illegible].[illegible]	[illegible]		[illegible].[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi pelaksanaan kontrak 0%	-	-	-	-	
Minerba	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Perikanan		-	-	-	-
Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
PPh Pasal 25/29	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
PBB	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
PPN	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
PPnBM					
PPh Orang Pribadi	-	-			
PPh Badan	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Pajak Lainnya	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Cukai Hasil	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Samosir (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB ... TA 2018 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB ... TA 2019 KMK No. [illegible]/KM.7/2021	Sisa LB ... TA 2019 KMK No. [illegible]/KM.7/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[illegible]
Pajak					
PPh	-				
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata			-	-	
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan			-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	9.740.653	137.584.958	12.764.434	14.861.483
Migas		-	48.053.750	-	48.053.750
Minyak Bumi 15%			46.211.800	-	46.211.800
Minyak Bumi 0,5%			2.226.950		2.226.950
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Iuran Tetap					-
Royalti					
Panas Bumi			3.343.879		2.313.879
Iuran Tetap	-				
Iuran Produksi	-	-	2.343.879	-	1.313.879
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan		9.740.653	36.262.835	12.764.434	23.497.399
DR					
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	9.740.653	36.262.833	12.764.434	23.497.399
Perikanan					
Grand Total		9.740.653	124.817.321	12.764.434	111.940.778

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Samosir (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB s.d. TA 2020	LB s.d. TA 2020	Penyelesaian KB/LB s.d. TA 2020 [PMK No. .../2021]	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Rata	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Perhutanan					-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Iuran Tetap	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Setoran Bagian Pusat	-	-	-	-	-
Kehutanan		[illegible]	[illegible]		[illegible]
IHPH					
PSDH					
DR	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Banjar Baru

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2021)	Perubahan LB TA 2019 (PMK No. 136/PMK.07/2021)	Sisa LB TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	1.270.420.085	272.920.185	997.499.900
PPh	-	-	19.214.140	-	19.214.140
PPh Pasal 21	-	-	19.214.140	-	19.214.140
PPh Pasal 25/29					
PBB	-	-	1.251.205.945	272.920.185	978.285.760
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan Minyak					
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi	-	-	1.251.205.945	272.920.185	978.285.760
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan Minyak					
Bagian Pemerintah Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-		-
Bagian Pemerintah Atas Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	62.293.533	-	62.293.533
Bagian Pemerintah Atas Cukai Hasil Tembakau			-		-
PPN					
PBB		1.760.059	1.760.059		1.760.059
Migas	-	-	69.068.703		69.068.703
Migas Bagian 15%	-	-	66.871.803	-	66.871.803
Migas Bagian 3,5%	-	-	2.196.900	-	2.196.900
Migas Bagian Wilayah Kerja/Blok Khusus				-	-
Pajak Bumi					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Ditjen Bea dan Cukai					
Minerba	-	-	-		-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Pajak Lainnya			7.882.107	-	7.882.107
Pajak Hotel					
Pajak Rokok	-	-	2.980.107		2.980.107
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-		-
Kehutanan	-	5.760.060	-	-	-
DR				-	-
PSDH					
IHPH	-	5.760.060	-		
Air Tanah	-	-	-	-	-
Grand Total		5.760.060	1.329.656.849	272.920.185	1.056.736.664

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Batu Bara (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA s.d. TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (PMK [illegible]/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	15.010.634.717	-	4.4[illegible].763.392	10.5[illegible].220.596	3.529.6[illegible]
PPh	5.4[illegible].[illegible]	-	1.284.253.600	4.2[illegible].[illegible]	
PPh Pasal 21	5.0[illegible].[illegible].648	-	1.1[illegible].753.830	3.860.128.[illegible]	
PPh Pasal 25/29	535.[illegible].281	-	187.545.800	348.[illegible]	
PBB	9.595.[illegible]		3.1[illegible].[illegible]	6.377.[illegible]	3.529.644
Asal Bara	1.990.[illegible].959		2[illegible]	1.7[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]		10[illegible]		3.[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan		-	-		
Bagian Daerah Pertambangan	5.[illegible].000		1.6[illegible].315.305	[illegible]	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		1.[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-		
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	3[illegible].039		90.[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	3.[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
CHT	4.424.[illegible]	-	1[illegible].152	[illegible]	
SDA	[illegible]	[illegible]	4[illegible]	3.[illegible]	[illegible]
Minyak		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 15%		2[illegible]	[illegible]	-	29.764.300
Minyak Bumi 0,5%	-	955.[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Bumi 30%	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%		415.551	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	
Minerba	3.096.[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Landrent				-	-
Royalti	3.096.[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	16.[illegible]	[illegible]	1[illegible]	[illegible]	37.[illegible]
Iuran Produksi	-	[illegible]	[illegible]		37.[illegible]
Iuran Tetap	16.[illegible]	-	[illegible]	1[illegible]	
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan	[illegible]		4[illegible]	[illegible]	-
IHPH	-	-			-
PSDH		-	-		
DR	[illegible]		4[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]		[illegible]	-	57.[illegible]
Grand Total	18.[illegible]	[illegible]	[illegible]	1[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Padang Lawas

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	PENYALURAN LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 37/PMK.07/2021)	SISA LEBIH BAYAR TA 2019 PMK No. 37/PMK.07/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-			
PPh		-	-	-	-
PPh Pasal 21		-	-	-	-
PPh Pasal 25/29				-	-
PBB				-	-
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Pemerintah Migas		-			
Dimuat Kembali (Pasal 24A)		-	-	-	-
Bagian Tambahan Perhitungan			-	-	-
Bagian Tambahan Pembayaran				-	-
Bagian Tambahan Bukan Pajak					
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Tambahan Pasal 24A			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat					-
Bagian Pemerintah Daerah					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya		-	-	-	-
PDH			-	-	-
PBH		78.61[illegible].079	673.673.076	202.057.795	471.[illegible].281
Migas			673.673.076	202.057.795	471.[illegible].281
Minyak Bumi 15%			673.673.076	202.057.795	471.[illegible].281
Minyak Bumi 0,5%	-				
Alokasi Dasar dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam rangka Otsus			-	-	-
Non Migas				-	-
Pertanian					
Kehutanan					
Pertambangan Umum	-	-			
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap			-	-	-
Penerimaan Negara Lainnya				-	-
Perikanan		[illegible].[illegible].[illegible]			
Lain	-	-			
Pajak	-	-	-	-	-
Panas Bumi		[illegible].[illegible].079			-
Pertambangan					
Grand Total	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	471.[illegible].281

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Padang Lawas

(dalam ribuan)

URAIAN	ALT Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penetapan KB DBH Sementara TA 2021 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	Kurang Bayar yang Telah Disalurkan	DBH TA 2021 yang Telah Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PPh	18.613.537.763	-	7.820.027.512	17.976.530.210	
PBB	6.746.787.503		3.184.887.338	1.470.893.208	
PBB Perkebunan	6.422.103.357		3.097.226.329	1.324.301.357	-
PBB Migas 2020	324.684.146		87.661.009	146.591.851	-
Pasal	10.920.750.260		3.024.021.193	12.359.436.996	-
Pajak Daerah	1.041.368.950		956.689.100	1.916.870.796	
Pajak Rokok Tahun Migas	772.463.750	-	2.636.600	350.858.750	
Pajak Rokok Non Migas	-	-			
Pajak Daerah Non Migas	1.360.313.073		221.100.900	1.029.078.175	-
Pajak Daerah Perkebunan	10.909.742.286		3.016.070.993	2.956.646.496	-
Pajak Rokok Tahun Migas	218.264.077	-	8.626.900	27.809.707	
Pajak Rokok Non Migas	82.452.068	-	2.216.700	30.020.375	
Pajak Penerangan Jalan Migas	-	-			-
Pajak Penerangan Jalan Non Migas					-
Pajak Pertambangan Perkebunan	62.892.010		14.648.900	47.697.617	-
Pajak Pertambangan Non Perkebunan	102.135.085	-	28.619.500	69.033.744	
Pajak Pertambangan Non Migas Tahun	5.556.943	-	3.700.900	4.193.743	
CHT	20.078.574		10.097.512	32.810.012	
SDA	1.200.751.479	313.089.400	672.150.200	3.912.617.995	591.999.775
Migas		297.751.026	10.071.200	-	367.001.630
Pajak Rokok 10%		30.569.020	9.985.500	-	270.091.010
Pajak Rokok 2,5%	-	2.385.600	585.700	-	9.017.900
Pajak Rokok Migas Tahun Migas	-	-			
Gas Bumi 70%	-	52.552.071	585.700		20.027.585
Gas Bumi 0,5%		413.051	4.500		416.50
Gas Bumi Tahun Migas					-
Minerba	1.098.210.200		61.610.200	1.502.525.730	-
Geothermal	2.110.019	-	-	2.140.850	
Panas Bumi	2.698.074.064	-	61.476.500	2.105.307.894	
Pajak Bumi	11.688.002	81.450.770	18.317.070	10.303.067	91.070.020
Bea Perolehan	-	81.139.770	18.137.020		91.070.020
Cukai Hasil	28.982.012		2.180.020	22.910.067	-
Dividen Badan Pemerintah			-	-	-
PNBP	181.161.174	-	185.075.075	582.85-.050	
DR	-	-			
DMO	-				-
PNBP	181.161.174		185.027.010	582.85-.069	-
PNBP	186.161.980		3.955.000		137.800.020
Grand Total	27.978.289.267	313.089.400	4.341 - 0.860	18.010.202.173	591.999.775

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Padang Lawas Utara (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2017	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	2.365.[illegible]	243.[illegible].653	2.12[illegible]
PPh	-				
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB			2.[illegible]	243.[illegible]	2.[illegible]
Bagi Rata					-
Bagian Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	2.[illegible]	243.[illegible]	2.020.[illegible]
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Perhutanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Panas Bumi			136.929.497		136.929.497
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Perhutanan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-		
SDA		20.721.609	71.342.029		71.342.029
Migas			59.[illegible]		59.[illegible]
Minyak Bumi 15%			56.[illegible]	-	56.[illegible]
Minyak Bumi 0.5%	-	-	[illegible].953	-	2.[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0.5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba					
Iuran Tetap			-	-	-
Royalti		-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	[illegible]	-	2.[illegible]
Iuran Produksi	-	-			
Iuran Tetap			2.[illegible]		2.[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		20.721.609	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IIUPH					
PSDH		20.721.609			
Perikanan					
Grand Total	-	20.721.609	2.436.[illegible].533	243.[illegible].653	2.1[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2023

Kab. Padang Lawas Utara

(dalam rupiah)

URAIAN	LB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2019	Penyaluran TA 2021 s.d. PMK No. 8/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang belum dapat Penyaluran	LB TA 2020 yang dapat Penyaluran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	2.919.63[illegible]	-	4.996.071.[illegible]	10.[illegible]	5.[illegible]
PBB	2.112.526.[illegible]	-	1.[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	1.776.[illegible]	-	1.[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21/22	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
BBN	[illegible]	-	2.[illegible]	[illegible]	5.[illegible]
Cukai Hasil	1.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Retribusi Perizinan Tertentu	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Pelayanan Terhadap Izin Tertentu	-	-	-		-
Pelayanan Terhadap Barang Milik	28.[illegible]	-	41.[illegible]		[illegible]
Pelayanan Terhadap Perizinan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Retribusi Daerah Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Laba Perusahaan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Laba Perusahaan Milik Negara	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	-	-	-		-
Bagian Laba Perusahaan Milik Badan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Laba Perusahaan Milik Masyarakat	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Laba Perusahaan Milik Perseorangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Laba Investasi Pemerintah	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
DPT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
DAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas Jenis [illegible]		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas Jenis [illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas Jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26	-	-	-		-
Jenis Pajak [illegible]	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Jenis Pajak [illegible]	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Jenis Pajak [illegible]					-
Minerba	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Kehutanan			-	-	-
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jenis Pajak [illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jenis Pajak [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Jenis Pajak					-
Belanja Bagian Pemerintah					-
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh	-	-	-	-	-
PBDH	-				
PSDH	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pendanaan	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tabalong

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2021	KB TA 2019	Realisasi DBH TA 2019 (PMK No. 28/PMK.07/2021)	Realisasi DBH TA 2019 (PMK No. 137/PMK.07/2020)	Kurang/(Lebih) Bayar DBH TA 2019 (PMK No. 28/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	1.134.436.853	329.601.213	1.175.695.920
Jasa		-	83.047.654	-	83.047.654
PPh Pasal 21		-	817.048.654	-	83.047.654
PPh Pasal 25/29					-
PPN			604.545.343	302.303.213	302.242.130
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Tertentu	-				
Bagian Lainnya Pajak Bumi	-	-	-	-	
Bagian Lainnya Pajak Bumi		-	-	-	-
Bagian Penerimaan Pertambangan			370.127.370	222.303.213	147.236.348
Bagian Penerimaan Perikanan					
Bagian Penerimaan Kehutanan	-				
Bagian Pertambangan Minyak	-	-	-		
Bagian Pertambangan Gas Bumi		-	-	-	-
Bagian Penerimaan Pajak Daerah				-	-
Bagian Penerimaan Pajak Daerah			31.275.611		31.275.611
Bagian Penerimaan Pajak Daerah	-				
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
PPh		31.542.727	17.717.929	-	17.717.929
Migas			69.048.750		69.048.750
Migas Pasal 22			66.811.650		66.811.650
Migas Pasal 22			2.237.100		2.237.100
Migas Pasal 4 ayat 3 Kepada Orang		-	-	-	-
Gas Bumi		-	-	-	-
Gas Bumi			-	-	-
Gas Bumi Pasal 4 ayat 3					-
Pertambangan					-
Batubara					
Royalti					
Panas Bumi	-	-	1.960.107		1.960.107
Jasa Produksi		-	-	-	-
Royalti			2.381.137	-	1.920.107
Pertambangan Panas Bumi					
Pertambangan	-	31.542.727	45.240.000		77.282.727
Lainnya	-	-	-		
Lainnya		-	-	-	-
PPh 21		31.542.727	45.240.000	-	76.782.727
Pertambangan					
Jumlah	-	31.542.727	1.649.485.603	329.601.213	1.320.883.390

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Labuhanbatu Selatan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH Berdasarkan PMK 226/PMK.07/2020 Jo. PMK 205/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang telah dialokasikan	LB TA 2020 yang telah dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPN	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
BPHTB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Rokok	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Air Permukaan					
Pajak Alat Berat					
Pajak Hiburan					
Pajak Reklame					
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Parkir					
Pajak Air Tanah					
Pajak Sarang Burung Walet					
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Pajak Opsen MBLB					
Pajak Opsen Pajak Rokok					
Cukai Hasil Tembakau					
DBH SDA					
Kehutanan					
Iuran Hasil Hutan					
Dana Reboisasi					
Pertambangan Umum					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Pertambangan Minyak Bumi					
Pertambangan Gas Bumi					
Pertambangan Panas Bumi					
Perikanan					
Pungutan Perikanan					
Pertambangan Minyak Bumi					
Pertambangan Gas Bumi					
Pertambangan Panas Bumi					
Pertambangan Mineral dan Batubara					
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara					
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kelautan dan Perikanan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pertambangan Minyak Bumi					
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pertambangan Gas Bumi					
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pertambangan Panas Bumi					
DBH CHT					
DAU					
Nigor					
Kabupaten Kota Lain					
Daerah Otsus Lain					
Alokasi Dana Desa Setara Daerah Otsus					
Dana Alokasi Khusus					
Dana Alokasi Khusus Fisik					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan					
Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Perbatasan Antar Negara					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Tertinggal					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Transmigrasi					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Kepulauan					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Pesisir					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Rawan Bencana					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Perbatasan Antar Negara					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Tertinggal					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Transmigrasi					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Kepulauan					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Pesisir					
Dana Alokasi Khusus Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Rawan Bencana					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Reguler					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Penugasan					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Afirmasi					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Perbatasan Antar Negara					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Tertinggal					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Transmigrasi					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Kepulauan					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Pesisir					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Rawan Bencana					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Perbatasan Antar Negara					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Tertinggal					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Transmigrasi					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Kepulauan					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Pesisir					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kewenangan Daerah di Daerah Rawan Bencana					
DID					
Dana Insentif Daerah					
Dana Otonomi Khusus					
Dana Keistimewaan					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Rokok					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Air Permukaan					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Alat Berat					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Opsen MBLB					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Opsen Pajak Rokok					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Hiburan					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Reklame					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Penerangan Jalan					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Parkir					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Air Tanah					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Sarang Burung Walet					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Opsen Pajak Rokok					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Cukai Hasil Tembakau

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Lokasi Provinsi Daerah :

(dalam rupiah)

URAIAN	KODE 2018	KODE 2019	KB s.d TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Pengalokasian LB s.d TA 2020 (PMK No. 7/PMK.07/2021)	Sisa KB s.d TA 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			227.156.000	-	283.560.870
PBB			-	-	-
PPh Pasal 21			-	-	
PPh Pasal 25/29			-		
PPnBM	-	-	281.183.830		2[illegible]
Bagian Pusat	-	-			
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas			-	-	
Dana Alokasi Umum		-	268.213.830	-	278.[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Penghasil Migas	-				
Dana Alokasi Khusus				-	-
Dana Perimbangan Jenis Lain		-	-	-	
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	12.970.000		12.[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Penghasil Migas				-	-
DBH			-	-	-
PNBP		17.644.797	784.055.385	415.[illegible]	1.278.[illegible]
Migas	-	-	69.058.550		69.[illegible]
Migas Bagi Hasil 15%	-	-	68.841.800		68.[illegible]
Migas Bagi Hasil 0,5%			2.229.750		2.[illegible]
Migas Bagian 4 Sektor Pengelolaan Migas				-	-
Dari Bagian 85%				-	-
Dari Bagian 0,5%			-	-	-
Dari Bagian dalam Rangka Otsus			-		
Pertambangan	-	-	-	-	
Batubara	-	-			
Royalti					
Pajak Lain			2.[illegible]		1.[illegible]
Bagian Pemerintah			-	-	-
Bagian Daerah			2.[illegible]	-	2.[illegible]
Pertambangan Panas Bumi	-		-		
Pertambangan	-	17.644.797	1.[illegible]	415.[illegible]	1.[illegible]
Iuran Tetap			-	-	-
Royalti			-	-	-
Pertambangan Minyak Bumi	-	17.644.797	717.[illegible]	415.[illegible]	1.[illegible]
Bagian Pemerintah	-		-		
Bagian Daerah		17.644.797	717.[illegible]	415.[illegible]	1.[illegible]
Pertambangan Gas Bumi	-		-		
Bagian Pusat		17.644.797	2.[illegible]	415.[illegible]	1.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Labuhanbatu Utara

(Dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR 2020	LEBIH BAYAR 2020	PENGALOKASIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH TAHUN 2020 [(3)=(1)-(2)]	REALISASI PENYALURAN DBH TAHUN 2021	SISA KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH TAHUN 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	22.08.2.9.37		2.7.812.12.20	19.82.33.02	
PBB	3.20.1.11.07		1.301.021.070	1.979.993.179	
PPh Pasal 21	2.83.415.54	-	1.171.561.10	1.08.702.84	
PPh Pasal 25/29	4.0.97 .5	-	129.649.930	1.3.967.2.0	-
PBJT	15.05.2.7.13	-	5.14.913.030	12.32.970 .0	-
Dana Alok.	1.2.1.2.0.708	-	263.470.730	1.726.273.716	-
Dana Alokasi Khusus	317.7.2.1.2		104.720.130	179.78.7.97	
Dana Otonomi Khusus	1.32.2.2			1.2.2.3.2	
Dana Otonomi Tertentu					
Dana Otonomi Kabupaten	-	-	-		
Dana Desa Kabupaten	13.09.5.2.14	-	-59.82.0.30	1.25.7.. 2.9	-
Dana Desa Setiap Kabupaten	21.0.1.2.7		9.7.4.2.0	2.2.0.4.7.7	-
Dana Penerimaan Pajak	12.3.7.2.1		2.0.1.1.2	1.2.7.2.1	
Dana Penerimaan Bukan Pajak	2.7.2.9			1.2.7.19	
Dana Penerimaan Spesifik Hibah	-	-	-		
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Pelayanan	2.2.1.7.1.2.1		2.7.1.7.2.1	2.7.7.9.2.7	
Dana Penyesuaian Daerah Lainnya	1.2.2.1.2.1.1		3.7.2.1.2	1.7.9.1.7.1	
PNBP	1.1.1.4.1.6.4		1.1.7.1.2.1.2	2.1.2.6.1.5	
SDA	1.2.2.2.2.2.3..	7.7.7.2.8.5.4	4.5.1.2.6.7.1.5	2.1.5.1.2.9.2.5..	1.1.7.1.2.7.6
Migas	-	5.8.7.9.5.3.6	5.5.7.1.2.	-	5.6.2.1.4.2.6
Minerba Bagian 13,5%		1.2.6.3.1.2.0	1.2.1.6.2..	-	1.2.7.2.1.8.2.0
Minerba Bagian 0,5%		2.1.1.5.0	8.1.6.0.2		2.2.1.4.1.0
Minerba Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Dana Bagi Hasil Kehutanan		2.1.2.1.1.6.9	2.2.1.1.0.2		2.1.2.1.1.6.9
Dana Bagi Hasil Perikanan	-	1.1.5.1..	2.7.9.0	-	1.1.5.1..
Dana Bagi Hasil Kelautan dan Perikanan Pajak	-	-	-	-	-
PANAS BUMI	2.1.1.6.1.7.1.3..	2.8.5.5.6.5.0	9.9.1.6.1.2.5	3.1.7.1.5.4.7.8.4	2.7.1.9.3.3.5
Landreo		2.3.7.1.0.3.0	2.2.1.6.7.8	-	2.7.1.9.3.3.5
Panas Bumi	3.1.0.1.3.7.4.2.8.4		6.7.1.9.6.2.5.6	2.1.1.7.7.1.8.4.1	-
Pajak Panas Bumi	2.8.5.9.8.0.9.2	2.1.1.3.9.5.7.0	1.6.3.1.4.7.7.8	1.1.2.6.1.1.3.7	2.7.2.7.3.7.0.2.0
Iuran Tetap		2.1.7.9.5.7.0	1.6.3.1.1.2.2		2.1.7.9.5.7.0
Iuran Eksploitasi	2.1.6.8.8.0.3.3	-	2.1.3.5.0.3.6	1.5.6.6.0.3.7	
Setoran Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Kehutanan	2.1.1.2.1.4.7.8		7.9.5.9.1.2.9.5		4.1.2.7.5.3.4.7
PSDH					
DR	-	-			
Pajak	7.9.1.2.8.7.8	-	7.9.5.1.1.2.9.5	-	4.1.2.7.5.3.4.7
Pertambangan	1.9.7.1.5.2.0.5.0	-	3.1.6.8.9.1.2.0.2	-	1.3.7.9.6.2.0.2.0
Grand Total	1.1.6.7.1.1.3.1.4.1.6	7.1.7.7.7.3.6.2.0	6.0.2.7.3.1.5.1.8	1.2.7.1.6.2.6.8.7.4	2.0.2.2.7.7.3.8

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Nias Utara

(dalam rupiah)

Uraian	PMK No. 205/PMK.07/2019	PMK No. 226/PMK.07/2020	PMK No. 33/PMK.07/2021	Penyesuaian PMK No. 33/PMK.07/2021	Alokasi TA 2021 PMK No. 33/PMK.07/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
Pajak					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penerimaan					
Bagian Daerah Penambahan					
Bagian Daerah Penambahan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Bagi Pertambangan Migas					
Bagi Pertambangan Panas Bumi					
Bagi Pertambangan Panas Bumi					
Bagi Pertambangan Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagi Pertambangan Pertambangan					
Bagi Pertambangan Sektor Lainnya					
Cukai					
BPHTB		5.099.199	64.726.971	6.475.897	58.094.074
Migas	-	-	64.726.971	6.647.897	58.094.074
Minyak Bumi 15%	-	-	64.726.971	6.647.897	58.094.074
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Gross					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Gross	-	-	-	-	-
Mineral	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Pajak Daerah					
Pajak Provinsi					
Pajak Kabupaten					
Kehutanan	-	-	-	-	-
Kehutanan		1.799.047			
PSDH					
DR					
PSDH	-	5.793.766	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah Total		1.799.047	64.726.971	6.647.897	58.094.074

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nias Utara

(dalam rupiah)

Jenis DBH	a.d Desember TA 2020	s.d Oktober TA 2021	Penyaluran Kurang Bayar TA 2020 [KEP-[illegible]/PK/2021]	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPHTB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Cukai Hasil Hutan	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah dari Pungutan Hasil Perikanan	-			-	-
Bagian Daerah dari Pungutan Hasil Pertambangan Minyak Bumi				-	
Bagian Daerah dari Pungutan Hasil Pertambangan Gas Bumi				-	
Bagian Daerah dari Pungutan Hasil Pertambangan Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah dari Pungutan Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah dari Pungutan Hasil Pertambangan Batubara	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PDRD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Rokok	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen PKB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen BBNKB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen MBLB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen PBBKB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Air Permukaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Rokok	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Air Tanah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Sarang Burung Walet	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perdesaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perkotaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pertambangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perkebunan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Peternakan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perikanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pertanian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kehutanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pertambangan Minyak Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pertambangan Gas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pertambangan Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pertambangan Mineral dan Batubara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pertambangan Batubara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen Cukai Hasil Tembakau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DAK	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas Bidang [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas Bidang [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minerba Bidang [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Panas Bumi Bidang [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Otsus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Otsus Bidang [illegible]

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nias Barat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kas th 2019	RK th 2019	LS s.d. tri IV 2019 (PMK No. 173/PMK.07/2021)	Penyesuaian LS s.d. tri IV 2019 (KEP-[illegible]/PK.07/2021)	Stlh LS s.d. tri IV 2019 (KEP-[illegible]/PK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak					
PBB					
BPHTB					
Pph Pasal 25/29					
Cukai					
Cukai Hasil Tembakau					
Bagian Daerah Penghasil Cukai					
Bagian Daerah Penerima Dana Cukai					
Bagian Daerah Penerima Alokasi Cukai					
Bagian Daerah Penghasil Minerba					
Bagian Daerah Penerima Dana Minerba					
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Penerima Dana Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					
Bagian Daerah Penerima Dana Kehutanan					
Bagian Daerah Penghasil Perikanan					
Bagian Daerah Penerima Dana Perikanan					
Pajak					
SDA		3,796,479,000	31,120,971,971	6,173,539,397	56,294,972,971
Migas			31,120,971,971	6,173,539,397	56,294,972,971
Minyak Bumi SDA			24,748,971,971	6,173,539,397	50,294,972,971
Minyak Bumi (Lain)					
Minyak Bumi Hulu Migas Bagian Daerah					
Gas Bumi SDA					
Gas Bumi (Lain)					
Gas Bumi Hulu Migas Bagian Daerah					
Pertambangan					
Batubara					
Panas Bumi					
Pajak Daerah					
Hasil Perikanan					
Hasil Hutan					
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					
Kehutanan		3,796,479,000			
PSDH					
DR		3,796,479,000			
Perikanan					
Grand Total		3,796,479,000	44,120,971,971	6,173,539,397	56,294,972,971

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pulau Barat

Dalam rupiah

Jenis DBH	PE Tahun TA 2020	DT Tahun TA 2020	Penyaluran KL DBH Triwulan IV TA 2020 (PMK No. 174/PMK.07/2020)	LB Tahun 2020 yang Belum Dialokasikan	KB TA 2020 yang Belum Dialokasikan
	(7)	(8)	(9)	(10) = (6)-(9)	(11)
PPh	7.450.758.016		1.931.775.052	5.518.982.964	1.037.642
PPN	2.011.430.002		304.412.850	1.707.017.152	
PPh Pasal 21	1.735.077.685		864.038.250	870.039.435	
PPh Pasal 25/29	972.017.697		94.324.620	877.693.077	
PBB	2.290.185.496	-	370.912.030	1.941.416.466	1.956.532
Cukai Hasil Tembakau	1.401.650.606	-	265.629.720	1.136.020.886	-
Pungutan Dari Cukai Hasil Tembakau	6.635.664	-	63.770.730	-	1.864.936
Pungutan Dari Cukai Hasil Tembakau yang Dikembalikan					
Pungutan Dari Cukai Hasil Tembakau yang Dialokasikan					
Pungutan Dari Cukai Hasil Tembakau yang Belum Dialokasikan					
Pungutan Dari Cukai Hasil Tembakau yang Dialokasikan Kembali	1.401.650.606	-	265.629.720	1.136.020.886	-
Pungutan Dari Cukai Hasil Tembakau yang Belum Dialokasikan Kembali	6.635.664	-	63.770.730	-	1.864.936
Bagian Pemerintah Pusat Atas Pajak Penghasilan Pasal 21	1.045.695.707	-	8.434.530	974.694.707	-
Bagian Pemerintah Pusat Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dikembalikan	2.420.271	-	2.107.860	-	137.949
Bagian Pemerintah Pusat Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dialokasikan					
Bagian Pemerintah Pusat Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Belum Dialokasikan					
Bagian Pemerintah Pusat Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dialokasikan Kembali	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Belum Dialokasikan Kembali	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Atas Pajak Penghasilan Pasal 21	8.231.742	-	5.326.670	8.779.712	
PUT	16.121.820		11.380.102	4.741.718	
SDA	2.911.626.102	70.012.820	110.025.850	3.010.261.072	25.113.078
Migas	81.272.076	1.348.830			90.261.936
Bagian Bunga Migas	33.668.820	1.096.750	-	-	10.756.700
Bagian Bunga Migas yang Dikembalikan	965.820	97.700	-	-	930.600
Migas yang Dialokasikan Kembali Sebagian Bunga					
Gas Bumi	47.637.436	155.380			78.573.636
Gas Bumi yang Dikembalikan	1.000.000	0.000			110.000
Gas Bumi yang Dialokasikan Kembali Sebagian Bunga					
Pertambangan	3.792.974.394	-	61.676.630	3.731.297.764	-
Pertambangan yang Dikembalikan	-	-	-	-	-
Pertambangan yang Dialokasikan Kembali	7.206.274.364	-	61.676.630	3.934.597.734	-
Panas Bumi	37.687.997	61.730.770	18.317.778	81.218.987	11.753.742
Panas Bumi yang Dikembalikan		61.730.770	16.734.030		37.736.040
Panas Bumi yang Dialokasikan Kembali Sebagian Bunga	39.368.202		8.180.660	16.030.037	
Kehutanan					
Kehutanan yang Dikembalikan	97.699.169	-	48.275.476	79.81 .72	-
Perikanan	-		-		
Pertambangan Panas Bumi					
PBB P2	76.574.120		18.0 6.178	2.0 1.721	
Pajak Rokok	150.185.881	-	3.189.030	-	137.654.030
Kurang Bayar	7.681.388.197	76.312.820	1.078. 72.501	6.070.817.2 7	2.3 -76.6

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Gunungsitoli (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	LB TA 2019	KB s.d. TA 2018 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Tunggakan KB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa KB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	-	-			
PPh	-	-	-		
PPh Pasal 21		-	-	-	-
PPh Pasal 25/29		-	-	-	-
PBB			-	-	-
Bagi Rata					-
Bagian Pusat Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-		
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas	-				
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Perhutanan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Lainnya	-				
CHT	-	-	-		
SDA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-				
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 30%	-	-			
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba			-	-	-
Iuran Tetap			-	-	-
Royalti					
Panas Bumi	-				-
Iuran Produksi	-	-	-		-
Iuran Tetap		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan		[illegible]			-
DR	-	-			
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH		[illegible]	-	-	-
Perikanan					-
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Nota Gabungan-nya

(dalam rupiah)

Uraian Data	KB DBH TA 2021 yang Belum Disalurkan	LB DBH TA 2021	Penyaluran DBH Periode s.d. TA 2020 yang Belum Disalurkan	KB TA 2021 yang Belum Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(6)	(8)	(9)	(10)=(6)-(9)	(11)
PPh	3.716.000.000		1.705.968.752	2.010.031.248	1.850.250
PPN	11.150.000.000		1.370.127.000	1.779.872.000	-
PPh Pasal 21	23.921.000.000		1.311.000.000	1.610.000.000	-
PPh Pasal 25/29	447.000.000		150.000.000	297.000.000	-
PBB	2.340.000.000	-	340.000.000	1.611.000.000	1.000.000
Cukai	1.000.000.000	-	965.699.000	729.999.000	-
Bagian Daerah Hasil Migas	6.000.000	-	68.794.000	-	1.000.000
Bagian Daerah Hasil Migas					-
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Hasil Migas	-	-			
Bagian Daerah Hasil Migas	315.000.000	-	8.834.000	300.834.000	-
Bagian Pertambangan Minyak	2.000.000	-	2.000.000	-	10.000
Bagian Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Batubara	5.000.000		1.000.000	4.000.000	-
PPh	16.000.000		11.000.000	5.000.000	
DBH	3.000.000.000	10.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	20.000.000
Pajak	-	60.000.000	1.000.000		50.000.000
Bagian Pajak	-	30.000.000	1.000.000	-	10.000.000
Bagian Pajak	-	10.000.000	50.000	-	10.000.000
Bagian Pajak Sesuai Bagian Daerah				-	
Pajak Penghasilan		20.000.000	200.000		20.000.000
Pajak Penghasilan		2.000.000	3.000		10.000
Pajak Penghasilan Pasal 21					
Migas	2.000.000.000	-	1.000.000	2.000.000.000	
Bagian	-	-	-	-	-
Bagian	2.000.000.000	-	61.000.000	3.000.000.000	-
Bagian Pajak	10.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000
Pajak Penghasilan		20.000.000	10.000.000		20.000.000
Pajak Penghasilan	20.000.000		2.000.000	10.000.000	
Bagian Pajak Sesuai Bagian Daerah	-	-	-		
Kehutanan	70.000.000	-	8.000.000	10.000.000	-
PPh				-	-
PPh					
PPh	50.000.000	-	40.000.000	10.000.000	
Pajak Bagian	100.000.000	-	30.000.000	-	150.000.000
Pajak Pajak	3.000.000.000	70.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	350.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sumatera Barat

(dalam rupiah)

[illegible] DBH	[illegible] TA [illegible]	[illegible] TA 2019	[illegible] (PMK No. 99/PMK.07/2019)	Penyelesaian [illegible] TA [illegible] (KMK No. [illegible]/KMK.7/2021)	[illegible] TA [illegible] (KMK No. [illegible]/KMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Jumlah			[illegible]	[illegible]	
DAU			[illegible]	[illegible]	
DAU Dasar 25/26			[illegible]	[illegible]	
DAU Dasar 75/74					
DBH	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Daerah Lainnya dalam Provinsi		-	-	-	-
Provinsi Lainnya dalam Negeri					
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Sektor [illegible]					
DBH					
DAK		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fisik	-	-	-	-	-
[illegible] Fisik 75%	-	-	-	-	-
[illegible] Fisik 0,5%	-	-	-	-	-
Provinsi Lainnya dalam Negeri [illegible]					
[illegible] 30%					
[illegible] 2,5%					
[illegible] Provinsi dalam Negeri [illegible]					
Non Fisik	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Pajak Daerah					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	-	-	-	-
Kurang Bayar	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DAK		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fisik					
DBHCHT	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
Jumlah Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sumatera Barat

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar DBH Tahun 2020	Lebih Bayar DBH Tahun 2020	Penyaluran DBH Tahun 2020 (Sebelum Pemotongan)	Kurang Bayar DBH Tahun 2020 yang Belum Dapat Disalurkan	Lebih Bayar DBH Tahun 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total					
TPD					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB					
Jasa Kota					
Jasa Layanan Listrik Negara					
Jasa Layanan Perusahaan Gas Negara					
Bagian Pemerintah Pusat dari PBB					
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					
Bagian Pemerintah Desa/Kelurahan					
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					
Bagian Pemerintah Desa/Kelurahan					
Jasa Layanan Jasa Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					
Bagian Pemerintah Desa/Kelurahan					
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					
Bagian Pemerintah Desa/Kelurahan					
BPHTB					
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					
Bagian Pemerintah Desa/Kelurahan					
Cukai					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau Sebagaimana Dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Sebagaimana Dimaksud Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Sebagaimana Dimaksud Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai					
Pajak Rokok					
Pajak Rokok Sebagaimana Dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai					
Pajak Rokok Sebagaimana Dimaksud Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai					
Pajak Rokok Sebagaimana Dimaksud Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai					
Kehutanan					
Iuran Hasil Hutan					
Provisi Sumber Daya Hutan					
Dana Reboisasi					
Pungutan Hasil Perikanan					
Pungutan Hasil Perikanan Sebagaimana Dimaksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan					
Pungutan Hasil Perikanan Sebagaimana Dimaksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan					
Pertambangan Mineral dan Batubara					
Iuran Tetap					
Iuran Eksploitasi/Royalti					
Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pertambangan Panas Bumi					
Iuran Tetap					
Iuran Eksploitasi/Royalti					
Perimbangan					
DBH					
DBH					
Perimbangan					
Jumlah Total					

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tanjung Jabung Barat (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PPN					
Pajak Bumi dan Bangunan					
Bagian Daerah dari Migas					
Bagian Daerah dari Pertambangan Panas Bumi					
Dana Bagi Hasil Pajak Dalam Negeri					
Alokasi Daerah Pertambangan Minyak					
Bagian Daerah dari Pertambangan Gas					
Bagian Daerah dari Pertambangan Minyak					
Bagian Pemerintah dari Migas					
Dana Penerimaan Negara Migas					
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Minyak					
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Gas					
Dana Penerimaan Pertambangan Panas Bumi					
Cukai					
Hibah		1.931.228	121.250.070	12.809.024	108.440.046
Migas					
Migas Bumi (PPh)					
Migas Bumi (PPN)					
Minyak Bumi dalam Negeri (PPh)					
Gas Bumi (PPh)					
Gas Bumi (PPN)					
Gas Bumi dalam Negeri (PPh)					
Migas			95.115.221		95.115.221
Pertambangan			95.115.221		95.115.221
Royalti					
Pajak Lainnya			779.577		779.577
Pajak Penghasilan					
Pajak Reklame			721.577		721.577
Pajak Penerangan Jalan					
Kehutanan		4.694.293	31.209.847	17.309.824	13.900.023
PSDH					
DR					
PSDH		1.931.228	32.250.272	12.809.024	19.441.248
Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau		4.694.293	31.209.847	17.309.824	13.900.023

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Lampiran UU APBN:

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi DBH TA 2020	Alokasi DBH TA 2020	Penyaluran DBH Sementara TA 2020 (UU APBN 2020)	DBH TA 2020 yang Telah Disalurkan	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	4.786.2[illegible].600	-	[illegible].719.465.564	[illegible].569.476.236	-618.[illegible]
PPh	[illegible].332.947.870	-	[illegible].136.347.101	344.600.[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible].071.176.025	-	[illegible].045.237.403	[illegible].425.[illegible]	-
PPh Pasal 22/26	777.120.214	-	47.[illegible].698	730.[illegible].516	-
PPN	[illegible].931.[illegible].010	-	[illegible].[illegible].[illegible].788	[illegible].[illegible].[illegible].773	4.015.241
PBB	[illegible].861.959.995	-	2[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Barang Mewah	20.[illegible].[illegible].010	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Pajak Penerangan Jalan	953.[illegible].[illegible].61	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Cukai	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Provinsi Bukan Rokok	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Kabupaten/Kota	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Daerah Provinsi Bukan Rokok	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Rokok	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Pajak Penerangan Jalan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
SDA	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Migas	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Migas Bagi Hasil 15%	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Migas Bagi Hasil 0,5%	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Migas Bagi Hasil Dalam Rangka Otsus	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi 30%	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi 0,5%	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Pertambangan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Panas Bumi	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Pertambangan Umum	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Iuran Tetap	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Penerimaan Negara Pertambangan Minerba	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
PSDH	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
DR	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Pungutan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Penerimaan Negara Bukan Pajak	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Kekayaan Negara Dipisahkan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Jasa Layanan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Pendapatan Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Jumlah	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Agung

(dalam rupiah)

URAIAN	Kurang Bayar DBH Tahun 2018	Kurang Bayar DBH Tahun 2019	Lebih Bayar DBH Tahun 2019 (PMK No. 93/PMK.07/2021)	Penyesuaian Lebih Bayar DBH Tahun 2019 (PMK No. 93/PMK.07/2021)	Sisa Lebih Bayar DBH Tahun 2019 (PMK No. 93/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 4(2)					
PBB					
Pajak Rokok					
Pajak Penerangan Jalan	-				-
Bagian Daerah dari Pajak Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Perikanan					
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Mineral dan Batubara					
Bagian Daerah Penerimaan Kehutanan					
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					
Biaya Pemungutan Perhutanan					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
Biaya Pemungutan Bukan Pajak		-	-	-	-
CHT		-	-	-	-
DBH		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas					
Minyak Bumi (PPh 22)					
Minyak Bumi (PNBP)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (PPh 22)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (PNBP)					
Gas Bumi (Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi)					
Kehutanan		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Provisi		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Royalti		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Eksplorasi	-	-	[illegible]	[illegible]	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Jumlah setoran			[illegible]	[illegible]	
Pertambangan Umum dan Perikanan					
Pertambangan		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
PBB	-	-	-	-	-
BPHTB		-	-	-	-
Jumlah		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Pertambangan					
Total Transfer	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Keb. Agam

(Dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Setelah TA 2020	LB Setelah TA 2020	Penyaluran TA 2021 s.d. Bulan ke TA 2020 (Kepres No. 1/KM/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	2.131.731.954		2.032.421.715	0.048.421.427	98.824.691
PPh	3.298.502.872		1.987.719.150	105.107.722	
PPh Pasal 21	2.120.954.715	-	1.948.138.200	67.555.515	
PPh Pasal 25/29	177.378.057	-	42.793.950	37.569.147	-
PBB	1.000.170.027	-	796.786.000	0.037.913.841	98.824.854
Alat Berat	1.291.050.036	-	208.640.750	1.770.970.978	-
Pajak Daerah Migas	0.236.010	-	106.310.250	-	98.176.760
Pajak Daerah Non Migas					
Pajak Daerah Panas Bumi	-				
Pajak Daerah Pertambangan	-	-	-		
Sektor Daerah Perkotaan	2.757.078.101	-	903.338.030	1.909.819.510	
Sektor Daerah Selain Kehutanan	215.799.707		9.827.350	206.074.707	
Pajak Penerangan Jalan	3.949.245		2.811.150		1.094.731
Pajak Penerangan Non Migas	-				
Pajak Penerangan Panas Bumi	-	-	-	-	
Pajak Kendaraan Perorangan	-	-	-	-	-
Pajak Kendaraan Perusahaan	11.427.268		33.177.460	79.763.078	
Pajak Penerangan Selain Operasi	0.849.109		226.630	0.722.479	
CHT	09.276.121	-	37.910.910	2.432.877	
DR	470.599.705	35.497.341	4.919.450	300.949.440	232.227.056
Migas	-	73.494.501	316.000	-	0.178.501
Minyak Bumi (0,5%)		10.042.860	100.280	-	3.792.630
Minyak Bumi (0,1%)		1.141.03	19.850		1.321.030
Minyak Bumi Bukan Pajak/Migas					
Gas Bumi (1,5%)					
Gas Bumi (0,5%)	-	-	-	-	
Gas Bumi Bukan Pajak/Migas	-	-	-	-	-
Minerba	94.017.549	-	33.814.730	40.153.45	-
Operasi	7.536.913		1.017.075	6.52.838	-
Royalti	77.342.393		32.797.185	33.78.4.4.8	
Panas Bumi	205.271.152		50.297.0.5	155.974.177	
Iuran Tetap (Ihl)	97.775.277		19.052.050	118.190.0.7	
Iuran Eksploitasi	38.536.705	-	7.5.675	64.93.030	-
Setoran Bunga Pertambangan	-	-	-	-	-
Kehutanan		12.203.370	38.430.375		10.603.715
PSDH	-	-			
DBHH	-	-			
PSDH	-	2.203.340	58.410.975	-	51.50.715
Perikanan	1.0.1.00		7.0.5.050	-	132.95.020
Grand Total	7.7.2.107.2.3	23.0.7.10	3.107.0.0.0.6	1.3.1.7.0.2	201.182.020

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Keb. Kepulauan Seribu

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	Kurang/(Lebih) Salur DBH (PMK No. 222/PMK.07/2021)	Penyelesaian Salur DBH (PMK No. 91/PMK.07/2021)	Kurang/(Lebih) Salur DBH (PMK No. 91/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak			(15.067.206)	2.[illegible]	[illegible]
PPh					
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-			
PBB	-	-	469.302.994	[illegible]	[illegible]
Bagi Rata					
Bagian Daerah Atas					
Bagian Daerah Dua Bagian					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Penghasil Provinsi	-	-	450.[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Penghasil Kabupaten	-	-	-		
Bagian Daerah Bukan Penghasil					
Biaya Pemungutan Bagian Provinsi					
Biaya Pemungutan Bagian Kabupaten					
BPHTB	-	-	17.[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Bagian Pemerintah					
Biaya Pemungutan Bagian Kabupaten					
Cukai	-		-	-	-
SDA	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas	-	-			
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dengan Tambahan Migas					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dengan Tambahan Migas	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Landrent					
Royalti			[illegible]		[illegible]
Panas Bumi			[illegible]		[illegible]
Iuran Tetap				-	
Iuran Eksploitasi	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Pemerintah Pusan [illegible]	-	-			
Kehutanan		[illegible]	[illegible]		[illegible]
PSDH	-	-	[illegible]	-	[illegible]
DR	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Perikanan					
Jumlah Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Meranti

(dalam ribuan rupiah)

Jenis DBH	Alokasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Penyaluran PB TKDD Kurang/(Lebih) Tahun 2020 (PMK No. 71/PMK.07/2021)	Kurang/(Lebih) Salur Tahun 2020 (Laporan)	Kurang/(Lebih) Salur Tahun 2020 yang Belum Disalurkan (Laporan)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)	(f) = (e) - (a)
Pajak	3.916.303.304		1.671.476.778	2.180.477.301	(2.138.913)
PPh	1.304.573.304		730.695.603	573.877.701	
PPh Pasal 21	1.391.503	-	695.751.603	695.751.603	
PPh Pasal 25/29	13.185.801	-	37.708.603	23.522.802	-
PBB	2.754.207.053	-	836.703.603	1.036.015.801	1.638.913
Pbb Rate	1.791.304.092		785.787.795	1.179.022.693	-
Pbb Rate Dampak Kinerja	162.719.273		17.206.260		18.272
Bagian Pemerintah Dari Migas					
Bagian Pemerintah Dari Migas	-	-			
Bagian Pemerintah Dari Migas	340.778.379	-	297.791.401	-	36.247.909
Bagian Pemerintah Dari Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Migas	210.390.007		9.691.207	778.797.927	
Bagian Pemerintah dari Migas	1.778.372		1.691.150		107.494
Bagian Pemerintah dari Migas	-			-	-
Bagian Pemerintah dari Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	6.774.729	-	11.773.107	-	1.064.378
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Pertambangan Panas Bumi	3.758.139		98.400	1.102.000	
PPh	3.959.111		6.297.203	2.709.273	
PDRI	279.841.855	164.734.611	149.094.713	98.537.575	515.160.369
Hutan	-	13.474.097	1.600	-	14.151.870
Provisi Hasil Hutan		13.092.697	36.600	-	12.362.460
Iuran Hasil Hutan		381.400	13.400		1.789.410
Pajak Bumi dan Bangunan Migas					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Minerba	7.439.575	-	50.759.193	43.563.468	-
Lancaran					
Perikanan	77.685.033		1.779.123	42.363.764	
Panas Bumi	219.241.442		93.297.611	142.977.387	
Iuran Perikanan	122.555.977		42.602.000	249.150.000	
Iuran Tetap	58.696.705	-	4.205.473	34.794.750	-
Sertifikat Tanah Wakaf					
Kehutanan		38.270.613	100.313.023		9.812.792
DR					
PHPB	-	-	-	-	
PSDH	-	178.170.613	641.5 5.925	-	79.756.503
Perikanan	130.790.888		212.993.000	-	137.194.479
Grand Total	7.731.011.123	196.731.113	2.171.564.491	2.021.703.476	877.947.169

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Padang Pariaman

(dalam rupiah)

ITEMS DBH	KET TA 2019	ZONA 2019	Lebih TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Pagu Tambah Lebih TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Status Lebih TA 2019 (PMK No. 81/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5-3)
PPh 21	-	-	968.605.411	211.625.105	1.180.230.516
PPh	-	-	968.605.411	211.625.105	1.180.230.516
PPh Pasal 21	-	-	968.605.411	211.625.105	1.180.230.516
PPh Pasal 26/26					
PPh					
Dari Pusat					
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Bagian Pemerintah Perkebunan					
Bagian Pemerintah Kehutanan					
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	-				
Bagian Pemerintah Pertambangan Pertambangan					
Bagian Pemerintah Pertambangan Pertambangan					
Bagian Pemerintah Pertambangan Pertambangan	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Batubara					
Minyak Bumi (15%)					
Minyak Bumi (3,5%)					
Minyak Bumi (Bagian Pemerintah Daerah Penghasil)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (70%)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (30%)	-	-	-		
Gas Bumi (Bagian Pemerintah Daerah Penghasil)					
Pertambangan			[illegible]		[illegible]
Kehutanan					
Perikanan			[illegible]		[illegible]
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi					
Dana Alokasi Khusus Kehutanan					
Kelautan		[illegible]	[illegible]		[illegible]
PBB	-	-	-	-	-
BPHTB	-	-	-	-	-
PDDE		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Pertambangan					
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Padang Pariaman

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar DBH TA 2020	SiLPA DBH TA 2020	Alokasi Kurang Bayar DBH TA 2020 (Lampiran PMK No. 215/KMK.07/2021)	DBH TA 2020 yang telah disalurkan	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	6.810.639.672		1.117.370.275	1.044.074.136	73.296.139
PPh	3.489.221.191		775.087.040	775.087.040	
PPh Pasal 21	3.333.498.303		710.210.630	710.210.630	
PPh Pasal 25/29	33.795.911	-	22.811.600	22.811.600	-
PPh	6.348.827.947	-	864.641.330	1.973.334.501	3.173.456
Pajak Bumi	1.321.411.756	-	265.036.730	1.056.330.795	-
Bagian Daerah Atas	15.002.757		110.795.500		3.173.456
Bagian Pemerintah Pusat Migas	324.715.362			32.110.072	
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Penghasil Lainnya					
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	218.309.027		8.024.302	990.594.702	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	3.177.114		3.313.047		139.142
Bagian Pemerintah Pusat Migas	80.210			820.031	
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-				
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas				-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	2.050.320		2.5.80	6.770.159	
CHT	6.950.511		6.296.878	2.008.011	
DBH	64.975.555	15.494.107	442.454.107	249.601.389	270.007.101
Migas	-	15.494.700	516.300	-	15.010.300
Bagian Daerah 16%	-	13.087.200	500.200	-	13.587.700
Bagian Daerah 2,5%		411.900	15.200		427.200
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 6,5%	-				
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-		
Minerba	77.775.630	-	34.793.135	47.196.261	-
Landrent	3.105.615	-	-	347.313	-
Royalti	17.425.200		31.797.175	29.842.779	-
Iuran Tetap	256.241.742		33.297.423	42.871.197	
Pasal 22 Impor	197.6.3.167		46.202.202	176.182.671	
Iuran Tetap	78.995.175	-	8.205.575	34.191.202	
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Kehutanan	6.021.720		37.702.395	-	3.359.111
PBB					
Tarif					
PBB	6.021.739	-	37.342.307	-	3.359.111
Perikanan	350.750.380	-	316.781.500	-	15.604.202
Pusat Total	1.0.5.434.053	15.494.200	1.021.572.272	4.022.778.24	320.835.547

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pasaman

(dalam rupiah)

URAIAN	PBH Migas	PBH SDA	PBH Migas dan PBH SDA	Penyaluran sesuai KMK No. 211/KM.7/2021	Penyaluran sesuai hasil rekonsiliasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	-	-	22.008.020	22.008.020	
PPh	-	-	22.008.020	22.008.020	
PPh Pasal 21	-	-	34.037	34.037	
PPh Pasal 25/29	-	-	21.983.983	21.983.983	
PBB			-	-	
Hasil Sala				-	
Dalam Daerah Migas	-			-	
Dalam Daerah Non Migas	-			-	
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-			-	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-			-	
Bagian Daerah Penghasil Migas				-	
Bagian Daerah Penghasil Non Migas				-	
Dana Kompensasi Migas	-			-	
Dana Kompensasi Non Migas	-			-	
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-			-	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-			-	
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-			-	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-			-	
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-			-	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-			-	
DMF			-		
PDA		1.771.494	920.215.185	153.092.516	153.092.516
Migas				-	
Minyak Bumi (PPh)				-	
Minyak Bumi (PBH)	-			-	
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-			-	
Gas Bumi (PPh)	-			-	
Gas Bumi (PBH)	-			-	
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-			-	
Pertambangan			728.171.908	124.084.216	963.694.362
Landrent			720.752.178	124.084.216	840.836.362
Royalti			282.711.048	-	322.857.800
Panas Bumi	-				
Iuran Tetap	-			-	
Iuran Eksploitasi	-			-	
Bagian Pemerintah Pusat	-			-	
Kehutanan	-	1.771.494	191.943.277	-	10.657.954
PSDH	-			-	
DR	-			-	
Iuran IUPHHK	-	1.771.494	19.300.870	-	10.657.954
Pungutan				-	
Grand Total	-	1.771.494	942.223.205	153.092.516	298.940.187

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pasaman

(Dalam rupiah)

URAIAN	KB DBH TA 2021	LB DBH TA 2021	Penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2020 (Kep. Menkeu No. 74/KMK.07/2021)	DBH TA 2020 yang telah dialokasikan	DBH TA 2020 yang belum dialokasikan
	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) - (7)	(9)
Total	2.070.181.042		1.441.153.275	2.068.203.125	91.758.717
PPh	1.552.950.139		1.241.160.600	1.241.160.600	
PPh Pasal 21	1.386.811.019		1.241.160.600	329.113.019	
PPh Pasal 25/29	166.139.120		90.047.120	92.047.120	
PBB	3.975.036.915		282.741.130	1.898.136.648	91.758.717
Cukai HT	1.097.030.708		265.629.730	708.970.092	
Bagian Daerah Bagi Hasil	20.945.707		91.571.850		91.758.717
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Migas (26%)					
Bagian Daerah Pail Lama					
Bagian Daerah Pail Baru	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas (70%)	215.896.207	-	8.404.530	206.964.707	-
Bagian Kontribusi Migas	1.641.130		8.404.530		1.641.130
Bagian Pengelolaan Pail Migas					
Bagian Pengelolaan Panas Bumi					
Bagian Pengelolaan Pail Baru	-	-	-	-	-
Bagian Pemotongan Pemerintah					
Bagian Pemotongan Pajak Lainnya	1.849.109		229.300	1.950.039	
DTT	9.901.101		1.296.570	1.606.270	
PPN	401.641.301	121.121.515	419.910.525	220.017.575	201.091.141
Cukai	-	13.494.050	616.000	-	13.010.050
Bagian Cukai Tembakau	-	13.382.050	370.000	-	13.012.050
Bagian Cukai Etil Alkohol		112.000	16.000		427.000
Bagian Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau Pengalihan Pemerintah	-				
Migas	77.382.503	104.364.515	45.901.695	42.503.439	1.898.256
Panas Bumi	-	104.364.515	14.467.759	-	1.898.256
Migas	77.382.503		31.433.936	42.503.439	
Kelas Usaha	24.271.782		5.297.025	18.974.757	
Kelas Usaha Hulu	104.276.277		36.696.802	118.034.677	
Kelas Hilir	58.895.994		42.570.675	57.791.500	
Bagian Migas Pail Baru	-	-	-	-	-
Kehutanan		5.462.050	30.747.375	-	45.130.436
PSDH					
DBHI	-	5.462.050	19.695.525	-	45.130.436
Perikanan	177.188.050	-	316.85 .500	-	189.611.020
Total Pusat	1.171.123.247	199.870.179	1.490.161.702	2.708.475.763	372.470.657

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 28/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Dasar LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB Migas			[illegible]	[illegible]	
PBB Non Migas					
BPHTB					
Cukai Hasil Tembakau					
Pajak Rokok					
SDA					
Kehutanan	-	-	-	-	-
Iuran Hasil Hutan (IHH)	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi (DR)	-	-	-	-	-
Pungutan Hasil Perikanan					
Pungutan Hasil Perikanan Migas					
Pungutan Hasil Perikanan Non Migas					
Pertambangan	-	-	-	-	-
Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	-
Pertambangan Panas Bumi					
Iuran Tetap (Landrent)	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-	-	-
Pertambangan Batubara					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Pertambangan Minyak Bumi					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Pertambangan Gas Bumi					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Pertambangan Panas Bumi					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Pertambangan Batubara					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Kehutanan					
Iuran Hasil Hutan (IHH)					
Dana Reboisasi (DR)					
Pungutan Hasil Perikanan					
Pungutan Hasil Perikanan Migas					
Pungutan Hasil Perikanan Non Migas					
Pertambangan	-	-	-	-	-
Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	-
Pertambangan Panas Bumi					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Pertambangan Batubara					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Perikanan					
Kehutanan	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
PPh	-	-	-	-	-
PBB					
PNBP		997.094	[illegible]	[illegible]	
Pertambangan					
Grand Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Polewali Mandar

(dalam ribuan rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Alokasi atas KB DBH Semester I TA 2020 (KMK No. 8/PK.07/2021)	KB DBH TA 2020 yang belum diselesaikan	LB DBH TA 2020 yang belum diselesaikan
1	2	3	4	5	6
Pajak	1.174.210.208	-	183.277.960	8.195.132.270	36.471.283
PPh	1.611.210.208	-	183.451.550	1.695.197.760	-
PPh Pasal 21	1.224.049.347	-	142.291.930	564.785.140	-
PPh Pasal 22/23	210.195.824	-	33.250.550	126.253.524	-
PBB	3.353.992.776	-	1.304.727.130	7.791.960.220	694.898
Cukai Hasil Tembakau	162.695.294	-	20.680.730	1.706.970.706	-
Cukai Hasil Hasil Tembakau	10.487.1	-	117.010.200	-	1.329.096
Pajak Penerangan Jalan	90.685.27	-	29.150.700	6.492.211	-
Pajak Hiburan	1.262.850	-	1.020.100	962.000	-
Pajak Reklame	57.807.302	-	-	67.830.556	-
Pajak Parkir	3.990.554.301	-	1.044.287.500	1.275.666.56	-
Pajak Sarang Burung Walet	718.693.000	-	5.671.300	966.074.707	-
Pajak Air Permukaan	7.506.151	-	1.136.025	-	1.070.000
Pajak Rokok	2.312.052	-	600.132	1.512.732	-
Pajak Penerangan Jalan Hasil Migas	12.079	-	11.200	13.108	-
Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah	1.384.150	-	-	1.834.195	-
Pajak Pengambilan Air Permukaan	282.949.425	-	70.000.200	137.736.902	-
Pajak Pemanfaatan Jasa Perikanan	5.960.150	-	339.900	9.720.048	-
CHT	8.011.954	-	6.231.380	2.698.277	-
BHP	710.923.070	17.050.891	437.350.300	923.487.906	210.975.565
Jasa	-	13.491.050	516.500	-	11.010.000
Minyak Bumi 15%	-	10.092.000	500.200	-	3.330.000
Minyak Bumi 30%	-	41.400	21.850	-	137.700
Minyak Bumi Hasil Pengolahan Lainnya	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Hasil Pengolahan Lainnya	-	-	-	-	-
Mineral	1.408.712	77.196.872	41.923.950	36.509.263	80.095.532
Landreat	-	77.196.872	9.870.850	-	80.095.532
Panas Bumi	74.33 .743	-	32.753.100	36.509.263	-
Perikanan	556.277.782	-	69.291.500	282.977.107	-
Kehutanan	397.245.077	-	3.553.050	6.183.077	-
Pertambangan	20.696.705	-	3.206.875	34.791.050	-
Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Perkebunan	-	6.256.121	11.421.120	-	6.183.045
PDP	-	-	-	-	-
PPMP	-	-	-	-	-
PB BP	-	6.256.121	11.421.120	-	6.183.045
Perikanan	96.46.382	-	41.807.125	-	50.38.848
Sektor Lainnya	-	-	311.851.050	-	27.694.231
Jumlah Total	11.068.30.302	57.630.36	2.211.566.780	5.147.070.670	433.780.36

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Ogan Ilir

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Tahun 2019	PPh Pasal 21	Tahun 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Tahun sebelumnya Tahun 2019 (KMK No. 53/KM.7/2021)	Selisih Tahun 2019 (KMK No. 53/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			1.219.014.515	228.126.137	990.888.378
PBB			108.610.076		108.610.076
PBB Pasal 25/29			5.070.076		5.070.076
PBB Pasal 25/29			103.540.000		103.540.000
Pasal			910.536.191	228.126.137	682.410.054
Dua Data					
Dugaan Kelebihan Bagian					
Bagian Daerah Penghasil Utama					
Bagian Daerah Penghasil Penting					
Bagian Daerah Penghasil Lainnya			428.705.511	228.126.137	200.579.374
Bagian Daerah Penghasil			427.126.793		427.126.793
Bagian Daerah Penghasil Lainnya					
Bagian Daerah Penghasil Penting					
Bagian Daerah Penghasil Penting			1.578.718		1.578.718
Bagian Daerah Penghasil Penting					
Jasa Perantara			15.747.903		15.747.903
Jasa Perantara			17.817.507		17.817.507
Bagian Daerah Penghasil Penting					
Cukai					
SDA		5.260.943	1.240.657.050		1.240.657.050
Kayu					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 69%					
Minyak Bumi Bagian Daerah					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 30% Bagian Daerah					
Mineral			815.283.584		1.043.933.584
Landrent			232.201.229		232.201.229
Royalti			736.950.173		736.950.173
Panas Bumi			722.577		722.577
Dua Persen					
Luas Kayu			722.577		722.577
Bagian Bagian Pajak					
Kehutanan		5.260.943	226.824.357		226.824.357
IHP					
PHPB					
PSDH		5.260.943	226.824.357		226.824.357
Perikanan					
Jumlah		5.260.943	2.241.211.911	228.126.137	2.055.175.717

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumedang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PMK 205/PMK.07/2020	PMK 226/PMK.07/2020	Penyaluran DBH Desember s.d. 2020 (KEP-1143/PK/2020)	Kurang/(Lebih) Bayar DBH	DBH 2021 yang Dapat Disalurkan
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)
Total	1,828,313,005	1,071,691,135	835,621,178	236,069,957	237,442,818
PPh	1,224,116,735		784,876,850	439,239,885	-
PPh Pasal 21	1,224,116,735		784,876,850	439,239,885	-
PPh Pasal 25/29	210,008,691		43,133,841	166,874,850	-
PBB	393,287,579	276,691,902	267,870,130	8,821,772	237,442,818
Cukai	196,899,996		200,000,000	3,100,004	
Bagian Daerah Migas	196,899,996	-	196,899,996	3,100,004	
Bagian Daerah Sektor Mineral		7,691,906	3,100,004	-	4,591,902
Bagian Daerah Perikanan				-	
Bagian Daerah Pertambangan		268,999,996	267,870,126	-	237,442,916
Bagian Daerah Kehutanan	196,387,583		67,870,126	129,517,457	
Bagian Daerah Kehutanan Iuran	196,387,583		67,870,126	129,517,457	
Bagian Pemerintah Minyak	14,749,232	-	3,100,004	11,649,228	
Bagian Pemerintah Gas Bumi		999,996	999,996	-	999,996
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi				-	
Bagian Pemerintah Pertambangan		7,691,906	2,100,008		5,591,898
Bagian Pemerintah Pertambangan Lainnya	52,351,351	-	27,027,027	25,324,324	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	5,787,139	-	2,702,702	3,084,437	-
Cukai	5,405,151	-	2,702,702	2,702,449	-
PPN	203,115,990	203,217,213	217,567,567	14,350,354	202,866,859
Migas		212,991,070	9,297,297		202,170,500
Bagian Migas 15%	-	196,891,070	9,001,000		187,490,070
Bagian Migas 0,5%	-	7,600,000	296,297		7,680,000
Bagian Migas Sektor Lainnya	-	-	-	-	
Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				-	
Pajak Penghasilan	1,053,053,017	65,000,000	1,118,053,017		99,997,983
Perdesaan	-	65,000,000	1,037,772		73,962,228
Perkotaan	1,053,053,017	-	37,015,245		25,035,755
Bagian Daerah	966,971,770	-	55,197,771	192,644,701	
Pasal 21	194,273,077	-	46,297,201	148,175,877	-
Pasal 25/29	38,698,693		4,205,675	34,711,082	-
Bagian Pajak Penghasilan Pasal 21					
Kabupaten	71,367,139	-	97,809,982	26,442,843	71,367,139
Cukai	-	-	-	-	
PBB	3,480,139		-	3,846,467	-
DBH	49,821,999		89,604,782		113,217,218
Pajak Rokok	199,784,936		116,981,702		82,803,234
Grand Total	3,218,278,817	1,644,691,020	2,155,187,977	1,597,110,154	776,010,703

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Solok

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2016	TA 2019	Realisasi 2020 (Audited)	Realisasi 2020 (Unaudited)	Kurang/(Lebih) Bayar DBH TA 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			567.545		567.545
PPh			-	-	-
PPh Pasal 21			-	-	-
PPh Pasal 25/29 OP			-	-	-
PBB			567.545		567.545
BPHTB	-		-		
Cukai Hasil Tembakau	-	-			
Pungutan Lainnya Pajak Lainnya		-	553.750		553.750
Pungutan Pajak Pertambangan Umum		-	-	-	-
Pungutan Pajak Perikanan		-	-	-	-
Pungutan Pajak Panas Bumi		-			-
Pungutan Cukai Hasil Tembakau	-	-			
Pungutan Pajak Lainnya		-	-		-
Pungutan Pajak Sarang Burung Walet		-	13.795	-	13.795
Pungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				-	-
Pungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Baru)					-
Pungutan Pajak Air Permukaan		-			
Pungutan Pajak Rokok		-	-		-
SDA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas					-
Penerimaan Minyak Bumi	-				
Penerimaan Gas Bumi	-	-	-		
Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Migas		-	-	-	-
Pajak Migas (PBB)			-	-	-
Cukai Migas (DMO)				-	-
Cukai Migas (Bukan Pungutan Daerah)				-	-
Minerba	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Landrent	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Royalti	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Daerah		-	-		
Pajak Air Tanah		-	-	-	-
Pajak Rokok				-	-
Kehutanan	-				
Iuran Hasil Hutan	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
DR		-	-	-	-
PSDH		-	-	-	-
Perikanan	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Pungutan Hasil Perikanan	-	-			
Panas Bumi					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi					
Pertambangan Panas Bumi					
Pertambangan		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Tetap		-	-	-	-
Iuran Eksplorasi		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Iuran Eksploitasi		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Penerimaan	-				
Grand Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Siak (dalam rupiah)

URAIAN DBH	LB Dicicil TA 2021	LB Dicicil TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (LKPP No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]		1.635.318.337	[illegible]	[illegible].164.253
PPh	2.653.155.640	-	1.157.575.039	[illegible]	
PPh Pasal 21	2.495.910.835	-	134.151.536	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	157.074.807	-	52.363.500	54.391.307	-
PBB	2.431.[illegible].112	-	[illegible]	1.657.352.437	40.164.253
Bagi Rata	1.097.[illegible]		263.480.736	1.730.271.278	-
Bagian Daerah Migas	55.610.465		107.250.231		47.045.015
Bagian Daerah Non Migas	630.305			1.290.070	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan	153.[illegible]	-	54.029.155	107.3[illegible]35	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.035.30[illegible]		8.034.305	206.0[illegible].727	
Biaya Pemungutan Migas	791.561		2.915.305		1.127.213
Biaya Pemungutan Non Migas	41.535	-		52.525	
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	5.977.[illegible]		1.[illegible].20[illegible]	1.471.477	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	5.535.[illegible]		205.597	2.710.3[illegible]	
CHT	27.6[illegible].345	-	19.532.407	2.057.136	
SDA	[illegible].095.330.041	73.299.410	466.994.70[illegible]	[illegible].342.436	257.505.955
Migas		13.457.060	516.000	-	[illegible].010
Minyak Bumi 15%		13.052.600	505.000	-	13.593.836
Minyak Bumi 0,5%		411.300	11.000		427.030
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	1.548.[illegible].480	16.423.079	4.092.133	[illegible].095	55.053.934
Iuran Tetap		16.423.079	3.639.323	-	55.052.934
Royalti	[illegible].639		3.472.260	[illegible].095	
Panas Bumi	[illegible].959.7[illegible]		31.259.523	[illegible]	
Iuran Eksplorasi	197.275.077	-	49.59[illegible].30[illegible]	118.[illegible]	
Iuran Tetap	180.383.[illegible]	-	15.747.[illegible]	155.[illegible].635	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan		12.07[illegible]	12.5[illegible]		[illegible].840.0[illegible]
DR					
IIUPH	-	-	-		
PSDH		18.[illegible]	47.549.630	-	60.349.6[illegible]
Perikanan	156.152.080		316.54[illegible].300	-	157.47[illegible].020
Grand Total	[illegible].190.09[illegible].225	73.236.119	2.041.70[illegible]	[illegible]	[illegible].771.7[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tanah Datar

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2019	Kurang Bayar TA 2020	LO s.d. TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2020)	Perkiraan LO s.d. TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Selisih LO s.d. TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)
(1)	(4)	(7)	(8)	(9)	(9)=(9)-(8)
Pajak			44.075.530	66.013.530	-
PBB				-	-
PBB Pasal 2					
PBB Pasal 2(2)2					
Pasir			16.240.530	38.178.530	
Orang Utan			-		
Bagian Daerah Bagi Hasil			-		
Bagian Daerah Bagi Hasil Migas			6.835.530	6.835.530	-
Bagian Daerah Panas Bumi				-	-
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Bagi Hasil Lainnya			25.239.000	25.239.000	
Bagian Daerah Bagi Hasil Pajak			-	-	
Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota			-	-	-
Bagian Pemerintah Dari Bagi Migas			191.400	191.400	-
Bagian Pemerintah Dari Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Dari Pertambangan			-		
Bagian Pemerintah Dari Pertambangan			45.360	45.360	-
Bagian Pemerintah Dari Pertambangan			-	-	-
PPh					-
SDA		4.717.307	9.103.000	11.903.015	2.800.015
Kayu					
Kayu dari Luar		-	-		
Kayu dari Dalam		-	-	-	
Minyak Bumi (Sesuai Lokasi Sumur)				-	-
Gas Bumi (PSC)				-	-
Gas Bumi (Non PSC)					-
Gas Bumi (Sesuai Lokasi Sumur)					
Perikanan			202.401.000		202.401.000
Landrent		-	-		
Geothermal		-	205.431.483	-	205.431.483
Pungut Pusat			202.377	202.377	-
Pungut Pusat (Sesuai Lokasi Sumur)				-	-
Pungut Daerah			22.377	22.377	-
Pungut Daerah (Sesuai Lokasi Sumur)					
Kehutanan		4.717.307	6.933.450	11.911.950	2.978.500
DR			-	-	-
PSDH					-
Pajak		4.717.307	6.933.450	11.911.950	2.978.500
Pertambangan			-		
Panas Bumi		4.717.307	236.327.173	5.797.565	205.029.415

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tanah Datar

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB DBH Tahun 2020	LB DBH Tahun 2020	Penyaluran KB DBH sebelum Tahun 2021 (PMK 17/PMK.07/2021)	Alokasi Tahun 2020 yang telah disalurkan	LB DBH Tahun 2020 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	4.454.378.676	-	3.686.450.794	2.759.135.382	320.113.10
PPh	2.803.192.794	-	1.984.152.800	819.039.994	-
Pasal 21	1.000.000.015		1.004.745.452	615.507.543	
Pasal 23/26	803.489.781		979.407.348	95.341.361	
PPN	1.651.185.729		701.297.992	1.939.097.140	8.701.361
Pajak Bumi dan Bangunan	1.651.185.729		701.297.992	1.939.097.140	-
Bagian Pemerintah Pusat	99.052.990		102.211.302		3.158.312
Bagian Pemerintah Provinsi	-		-		
Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-		
Bagian Pemerintah Desa	-		-		
Bagian Pemerintah Perhitungan	1.552.132.739		1.600.933.690	1.939.097.140	-
Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota	1.552.132.739		1.600.933.690	1.939.097.140	121.120
Bagian Pemerintah Pusat	4.731.280	-	2.810.290		
Bagian Pemerintah Provinsi	-	-	-		
Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-		
Bagian Pemerintah Perhitungan					-
Bagian Pemerintah Perhitungan	94.321.710		93.000	299.170	
Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota	3.581.153	-	278.530	1.703.139	
PDRI	4.967.042	-	92.498.634	93.999.139	
PBHTB	10.277.178	16.302.348	247.875.000	186.452.458	19.294.916
Pajak		18.707.000	110.000	-	14.703.020
Bagian Pemerintah Pusat		12.705.200	60.230		12.789.820
Bagian Pemerintah Provinsi	-	5.141.02	10.330		427.200
Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-		
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau					
Pajak Rokok	21.818.952		27.036.775	3.830.719	-
Pajak Rokok					
Bagian Pemerintah Provinsi	41.2 .9.050		17.068.772	3.420.715	
Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota	286.271.992		5.264.603	19.179.1.037	
Dana Perimbangan	197.373.077	-	69.763.000	149.183.077	-
Dana Alokasi Umum	85.00 .773	-	4.713.878	5.73 .732	-
Bagian Pemerintah Pusat				-	
Bagian Pemerintah Provinsi		2.603.078	3.061.000		41.780.858
DBH	-	-			
DBH Pajak		-		-	
DBH SDA		2.603.078	28.681.878	-	41.780.858
Dana Alokasi Khusus	268.183.990		110.981.000		137.402.020
Jumlah Transfer	2.401.30 .30 .	21.963.078	2.1 .0.9 .3.20	2.0 .0.0 .0.07	2 .1.10.38

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bukit Tinggi

(dalam rupiah)

URAIAN	TW IV 2018	KPPN [illegible]	[illegible] (PMK No. [illegible])	Perubahan (KEP No. [illegible])	[illegible] (PMK No. [illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
[illegible]			303.[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			303.[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
PBB	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]					
[illegible]	-	-		-	-
[illegible]	-	-		-	-
[illegible]	-	-		-	-
[illegible]					
BPHTB					
PPh		1.701.515	[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	-			-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	-			
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Kediri Tinggi

(Dalam rupiah)

URAIAN	Kas Daerah TA 2020	Kas Daerah TA 2020	Penyaluran QI s.d. I Periode TA 2020 (PMK No. 37/PMK.07/2021)	PP TA 2020 yang belum Disalurkan	LO Tahun 2020 yang belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	4.950.969.891		21.115.224.680	2.792.399.178	31.958.997
PBH	2.953.163.601		1.992.126.130	540.973.107	
PPh Pasal 21	2.097.913.935		1.150.723.250	130.964.420	
PPh Pasal 25/29	856.836.757	-	741.403.130	317.993.913	
PBB	2.033.410.753	-	200.261.930	1.351.426.071	31.958.997
Cukai Hasil	1.997.805.902	-	948.689.700	788.243.446	-
Bagian Daerah Migas	10.343.208		35.464.050	-	31.958.997
Bagian Daerah Pertambangan Minyak					
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					
Dana Reboisasi	210.033.397		3.424.500	206.934.397	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	128.313		460.607	-	372.915
Bagian Pemerintah Pusat Minerba					
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi					
Dana Kompensasi Pertambangan					
Dana Perimbangan Sektor Kehutanan	3.868.129		326.800	3.750.836	-
CHT	9.347.855		53.293.062	3.070.273	
DAU	497.941.355	4.969.421	440.917.107	225.007.171	20.687.041
Migas	-	3.454.020	416.201		2.010.307
Minyak Bumi 15%		3.042.020	330.307	-	3.063.610
Minyak Bumi 0,5%		411.400	85.894	-	405.702
Minyak Bumi dan Gas Bumi Sektor Kehutanan				-	-
Gas Bumi 15%					
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Pertambangan	77.982.196	-	34.796.195	42.035.109	
Perikanan		-	-	-	-
Pungutan	77.982.196		34.796.195	42.035.447	-
Pertambangan Panas Bumi	33.271.782		5.207.173	169.054.707	-
Pertambangan Umum	44.710.414		29.589.022	126.980.740	
Kehutanan	33.954.936	-	1.205.379	30.981.202	
Dekonsentrasi	-	-	-	-	
Tugas Pembantuan		1.161.491	37.662.391	-	59.326.191
PPh				-	-
PBNBP	-				
PBHTL	-	1.161.491	37.662.391		59.326.191
Otsus	140.190.080	-	316.88 .991	-	357.934.180
Total	5.068.519.002	14.620.911	2.058.780.991	3.018.736.803	979.836.252

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Padang Panjang (dalam rupiah)

JENIS DBH	LB TA 2017	KB TA 2019	KB s.d. TA 2018 (PMK No. 26/PMK.07/2021)	Tahap kesatu KB s.d. TA 2018 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Sisa KB s.d. TA 2018 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-				
PBB	-	-			
PPh Pasal 21	-	-	-		
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
CHT		-	-	-	-
Bagi Rata				-	-
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-		
Bagian Daerah Pengolah	-	-	-		
Bagian Daerah Penghasil			-	-	-
Bagian Daerah Berdasarkan Kinerja					-
Biaya Pemungutan Migas	-				
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perbatasan				-	-
Biaya Pemungutan Pada Sektor					
Biaya Pemungutan di Sisi Tahunan	-				
CHT	-	-	-		
SDA		4.7[illegible].848	2[illegible]	2[illegible]	19[illegible]
Migas			-	-	-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-	-			
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba			20[illegible]	4.[illegible].044	19[illegible]
Iuran Tetap				-	-
Royalti			202.45[illegible]	[illegible]	19[illegible]
Panas Bumi	-		732.5[illegible]	732.5[illegible]	
Iuran Produksi	-	-	-		
Iuran tetap	-	-	732.5[illegible]	732.5[illegible]	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan		4.701.[illegible]	17.255.[illegible]	17.255.[illegible]	-
IHPH	-				
IIUPH	-	-	-	-	
PSDH		4.70[illegible].848	17.255.[illegible]	17.255.[illegible]	-
Perikanan				-	-
Jumlah Total		4.701.[illegible]	220.[illegible]	22[illegible].727	19[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kabupaten/Kota Penerima

(dalam rupiah)

PPKD Prov	KB DBH TA 2021	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH TA 2020 sesuai PMK No. 67/PMK.07/2021	KB TA 2021 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3.81.536.865	-	1.194.278.918	2.617.257.947	12.900.000
Sumut	1.270.246.875	-	972.753.620	297.493.255	
DKI Jakarta	1.407.347.037	-	958.074.500	449.272.537	-
Jawa Barat	173.594.242	-	38.756.000	134.838.242	-
DIY	2.436.271.875		317.771.500	2.118.500.375	15.000.000
Jawa Tengah	1.791.356.998		263.080.730	1.528.276.268	
Kab. Kepulauan Seribu	22.695.201		10.070.200		12.625.001
Kab. Bantul	-				
Kab. Gunung Kidul	-	-	-		
Kab. Sleman	-	-	-	-	-
Kab. Kulon Progo				-	-
Kab. Purbalingga	219.194.007		6.631.500	202.562.507	
Kab. Banjarnegara	90.585		102.500		387.915
Kab. Kebumen	-	-	-	-	
Kab. Purworejo		-	-	-	-
Kab. Wonosobo					-
Kab. Magelang					
Kab. Boyolali	4.264.179		205.000	3.750.309	
Kab. Klaten	5.501.151	-	6.196.650	2.628.251	-
Kab. Sukoharjo	172.841.557	1.890.42	4.454.161	215.581.958	2.020.144
Kab. Wonogiri		12.197.000	516.250	-	14.010.000
Kab. Karanganyar		13.982.000	500.200		16.787.500
Kab. Boyolali		1.11.170	15.800		127.200
Kab. Klaten	-	-		-	
Kab. Sukoharjo	-	-	-	-	-
Kab. Wonogiri		-	-	-	-
Kab. Karanganyar			-	-	-
Kab. Sragen	77.862.756		31.795.131	12.547.788	-
Kab. Grobogan					
Kab. Blora	1.362.650		31.029.122	12.263.728	
Kab. Rembang	265.201.595	-	51.291.500	192.871.100	
Kab. Pati	137.973.027	-	6.691.300	145.691.977	
Kab. Kudus	38.091.735	-	4.205.675	12.791.561	-
Kab. Jepara				-	
Kab. Demak		1.110.42	37.302.362		2.125.291
Kab. Semarang	-	-			
Kab. Temanggung	-	-	-	-	-
Kab. Kendal		1.102.42	37.762.391	-	30.125.791
Kab. Batang	25.191.192		316.861.362		12.701.000
Kab. Pekalongan	- 25.104.120	2.015.12	1.867.279.278	230.000.271	22.721.272

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Dumai

(Rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyesuaian [illegible] (PMK No. [illegible]/KMK.07/2021)	[illegible] (PMK No. [illegible]/KMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-		-
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					-
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			-	-	-
[illegible]					
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					-
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-		
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]		[illegible]	-	-	-
[illegible]		-		-	
[illegible]					
[illegible]		[illegible]			
[illegible]			-	-	-
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Padang

(Rupiah)

Uraian	KB DBH TA 2021	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 104/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang Telah Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	22.360.027.329	-	13.054.349.176	9.305.678.153	80.772.924
PPh	21.470.271.340	-	12.756.797.303	8.713.474.037	
PPh Pasal 21	18.812.840.992	-	11.182.481.602	7.630.359.390	
PPh Pasal 25/29	2.657.430.348		1.574.315.701	1.083.114.647	
PBB	889.755.989		297.551.873	591.204.116	80.772.924
Bea Perolehan	1.001.999.996		299.999.999	701.999.997	
Pajak Daerah Lainnya	17.997.405		17.997.405		
Pajak Daerah Non Migas	6.171.160.276	-	799.201.190	5.371.959.086	
Pajak Daerah Pemda Lain		-	-		
Pajak Daerah Pemda Lain		-	-		
Pajak Daerah Pemda Lain			-		
Pajak Daerah Pemda Lain	313.561.307		8.687.200	304.874.107	
Pajak Pemanfaatan Air	1.295.307	-	3.000.230		77.692.923
Pajak Pemanfaatan Non Migas	1.705.002.09	-	3.746.530	10.459.007	
Pajak Pemanfaatan Pemda Lain			-		
Pajak Pemanfaatan Pemda Lain					
Pajak Pemanfaatan Pemda Lain					
Pajak Pemanfaatan Pemda Lain	5.060.139	-	3.000.530	2.059.609	
DBH	5.966.151	-	4.956.875	1.009.276	
DAU	93.211.000	1.078.827	448.697.400	215.957.505	229.068.127
Migas		13.487.070	516.000	-	18.270.070
Pemda Lain	-	12.062.070	500.200	-	11.562.870
Pemda Lain	-	1.425	15.800		7.200
Pemda Lain			-		
Pemda Lain			-		
Pemda Lain			-		
Kehutanan	77.362.000		24.737.100	49.535.421	
Landasan	-		-	-	-
Royalti	77.362.396		31.058.100	46.304.296	
Pemda Lain	246.977.780	-	59.991.111	186.987.110	
Pemda Lain	10.013.007	-	26.031.200	116.982.007	
Pemda Lain	56.990.013	-	4.706.675	54.283.338	
Pemda Lain				-	
Perikanan	-	3.991.041	35.777.800		49.564.49
Pemda Lain	-	-	-		
Pemda Lain		-	-		
Pemda Lain		3.991.041	35.777.800	-	44.076.121
Pertambangan	199.96.000		316.961.300	-	137.644.700
Pemda Lain	30.832.863.964	19.078.941	10.145.769.278	11.706.216.187	263.030.145

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Payakumbuh (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB s.d. TA 2018	KB TA 2019	[illegible] (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyelesaian [illegible] (KMK No. [illegible]/2021)	[illegible] (KMK No. [illegible]/202[illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-		[illegible]	256.770.035	[illegible]
PPh	-		[illegible]	256.770.035	[illegible]
PPh Pasal 21	-	-	[illegible]	256.770.035	[illegible]
PPh Pasal 25/29	-	-	[illegible]		[illegible]
PBB		-	-	-	
Bagi Rata			-	-	
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-				-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-			
Bagian Daerah Perhutanan		-	-		
Bagian Daerah Lainnya			-	-	-
Biaya Pemungutan Migas				-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-			
Biaya Pemungutan Perkebunan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Perhutanan			-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-			-	-
CHT	-	-			-
SDA	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas		-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 30%	-				-
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba		-	[illegible]	-	[illegible]
Landrent			-	-	-
Royalti			[illegible]	-	[illegible]
Panas Bumi	-				-
Iuran Produksi	-				-
Iuran Tetap	-	-	-		
Setoran Bagian Pemerintah		-	-		
Kehutanan		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
IIUPH	-				-
PSDH	-	-			
DR		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Perikanan			-	-	
Grand Total		[illegible]	[illegible]	256.770.035	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Payakumbuh

(Dalam Rupiah)

URAIAN	KB Tahun 2020	LB Tahun 2020	Penyaluran DBH Tahun 2020 Sesuai PMK No. 5/PMK.07/2021	KB Tahun 2020 yang Telah Diselesaikan	LB Tahun 2020 yang Telah Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6) = (3)-(4)
Pajak	3.910.769.602		1.712.082.080	2.198.687.522	
PPh	1.580.646.147		1.112.124.608	468.521.539	
PPh Pasal 21	1.051.802.544		1.051.802.544		
PPh Pasal 22/23	8.043.603		60.321.964	(52.278.361)	
PBB	2.050.805.907		372.418.107	1.678.387.800	
BPHTB	1.071.038.708		204.039.708	867.000.000	
Cukai Hasil Tembakau	251.084.811		15.789.500	235.295.311	
Pajak Daerah Provinsi					
Pajak Rokok Provinsi					
Pajak Bahan Bakar Kendaraan					
Pajak Rokok Kabupaten/Kota					
Pajak Daerah Kabupaten/Kota	211.079.307		8.054.307	203.025.000	
Pajak Penerangan Jalan	1.208.423		1.297.302		88.879
Pajak Penerangan Jalan Migas					
Pajak Penerangan Jalan Non Migas					
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan					
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Migas					
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Non Migas					
Pajak Penerangan Jalan Sektor Lainnya	1.869.320		2.057.300	2.057.300	
CHT	8.497.650		6.039.393	2.458.257	
DBH	493.841.365	(1.969.72)	445.495.961	215.847.504	2.045.691
Migas		3.454.030	616.305		(1.010.705)
Minyak Bumi (PPh)		3.969.030	506.305		(3.337.705)
Minyak Bumi Migas		(1.120)	15.200		427.200
Minyak Bumi Migas Non Migas					
Gas Bumi (PPh)					
Gas Bumi (PPh)					
Gas Bumi Migas Non Migas					
Minerba	77.972.318		34.791.158	43.181.160	
Landrent					
Royalti	71.052.958		31.791.123	39.261.835	
Panas Bumi	93.271.732		33.297.172	59.974.560	
Iuran Tetap Panas Bumi	93.210.017		19.692.302	113.517.715	
Iuran Tetap	58.956.735		1.705.572	57.251.163	
Reboisasi Sesuai Peraturan					
Kehutanan		1.969.72	37.997.153		39.966.871
PSDH					
Provisi					
PSDH		1.969.72	37.997.153		39.966.871
Perikanan	153.150.090		810.581.301		657.431.211
Jumlah Total	4.404.611.077	(1.969.72)	3.891.168.732	2.717.072.663	2.714.613.719

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Sawahlunto

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar DBH Tahun 2018	Kurang Bayar DBH Tahun 2019	Lebih Bayar DBH Tahun 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2020)	Penyesuaian Lebih Bayar DBH Tahun 2020 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Total Lebih Bayar DBH Tahun 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2020)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=c+d+e)
Pajak					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi					
PBB					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Bagian Daerah Hasil Pengelolaan Migas					
Bagian Daerah Hasil Pengelolaan Non Migas					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Minyak Bumi					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi					
Dana Reboisasi					
Dana Perimbangan Migas					
Dana Perimbangan Non Migas					
Dana Perimbangan Pertambangan Minyak Bumi					
Dana Perimbangan Pertambangan Gas Bumi					
Dana Perimbangan Pertambangan Panas Bumi					
Dana Perimbangan Kehutanan					
Dana Perimbangan Pelabuhan Laut/Asy.					
CHT					
DBH		4.737.244	13.109.000	(13.109.000)	(4.737.244)
Migas					
Minyak Bumi (0,3)					
Minyak Bumi (3,13)					
Subsidi Untuk Daerah Penghasil Migas					
Gas Bumi (0,5)					
Gas Bumi (2,5)					
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat					
Minerba			13.109.000	(13.109.000)	(4.737.244)
Landrent					
Jangka			13.109.000	(13.109.000)	(4.737.244)
Panas Bumi					
Iuran Tetap					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi (Produksi)					
Kehutanan		1.737.244			
Oil					
PSDH					
DR		4.737.244			
Perikanan					
Grand Total		1.737.244	13.109.000	(13.109.000)	(4.737.244)

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

(Dalam rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	6.670.147.063		3.091.997.722	3.197.020.122	10.613.586
PPh	138.800.021		211.823.902	- 211.076.681	-
PPh Pasal 21	1.235.317.211		980.266.260	376.676.541	-
PPh Pasal 22	119.930.760	-	34.265.106	85.859.242	-
PPh Pasal 23	6.214.113.084	-	41.651.000	2.768.758.553	13.013.267
PPh Pasal 25	10.060.018	-	283.587.760	1.794.170.203	-
PPh Pasal 26	82.364.164	-	28.242.160	-	10.121.996
PPh Pasal 29 Migas	2.205.926.427		143.215.000	2.062.711.427	-
PPh Pasal 29 Non Migas					-
PPh Pasal 4 ayat (2)					-
PPh Pasal 15					-
PPh Pasal 21 Migas	2.553.019.017	-	8.601.330	877.091.707	-
PPh Pasal 21 Non Migas	413.360		1.279.080	-	100.000
PPh Pasal 26 Migas	20.433.287		1.960.160	19.151.967	-
PPh Pasal 26 Non Migas			-	-	-
PPh Pasal 4 ayat (2) Migas	-	-	-	-	-
PPh Pasal 4 ayat (2) Non Migas	-	-			
PPh Pasal 4 ayat (2) Bea Meterai Migas	5.050.136		2.118.000	2.931.936	
Cukai	2.450.220		19.120.122	7.716.284	-
PBB	104.021.110	113.212.091	90.615.513	102.628.102	561.050.126
Pajak	-	3.464.620	5.567	-	12.018.620
Pajak Bumi (PBB)	-	3.259.530	300.350	-	11.282.900
Pajak Bumi (PBB)	-	417.470	13.450	-	421.200
Pajak Bumi dan Bangunan Migas					
Gas Alam (PDG)				-	-
Gas Alam (PDG)				-	-
Gas Alam Migas			-	-	-
PPh Migas	240.412.645	39.018.035	401.593.575	-	543.024.050
Pertambangan	-	69.013.035	90.711.850		119.720.650
Migas	243.476.645	-	171.317.727		228.021.027
Panas Bumi	233.071.730		139.274.000	186.794.130	
Minyak Mentah	10.404.915		76.293.302	116.183.871	-
Gas Alam	36.996.730		4.206.515	5.799.281	-
Sumber Daya Alam Pertambangan	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	5.630.61	98.501.175		11.251.170
PPh	-				
Migas				-	-
Migas		7.690.05	38.591.175	-	41.251.175
Pertambangan	199.766.666	-	310.781.501		1.07.[illegible].020
Total	72.[illegible].47	1.[illegible].034	1.[illegible].797	1.[illegible].[illegible]	57.[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Solok

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar	PP No. 55/2018	LKPP No. 35/LHP/DJPK/2020	Perpres No. 123/2019	Kurang Bayar TA. 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=(4)-(5))
Pajak					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB					
PBB Kota					
Bagian Daerah Lainnya					
Bagian Daerah Kota Lain					
Bagian Daerah Penerimaan					
Bagian Daerah Pusat					
Bagian Daerah Perhitungan					
Bagian Daerah Kabupaten Lain					
Biaya Pemungutan Kota					
Biaya Pemungutan Dari Pusat					
Biaya Pemungutan Daerah Induk					
Biaya Pemungutan Daerah Lainnya					
Biaya Pemungutan Kabupaten Lain					
BPHTB					
BPHTB		4,723,670	220,838,911	70,038,381	138,800,421
Migas					
Minyak Bumi PPh					
Minyak Bumi PBB					
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja					
Gas Bumi PPh					
Gas Bumi PBB					
Gas Bumi dari Wilayah Kerja					
Pertambangan			202,114,984	61,913,159	140,201,825
Landrent					
Royalti			18,723,927	8,101,160	10,622,767
Panas Bumi			18,723,927	8,101,160	10,622,767	
Panas Bumi PPh					
Panas Bumi PBB			18,723,927	8,101,160	10,622,767
Setoran sebagai Pemotong					
Kehutanan		4,723,670	17,191,319	17,191,319	
PSDH					
DR					
PSDH		1,723,670	17,191,319	17,191,319	
Perikanan					
Pertambangan		4,723,670	202,114,984	61,913,159	140,201,825

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Solok

(Rupiah)

Uraian	(1) Tahun TA 2020	(2) Tahun TA 2020	Perpres ttg APBN TA 2021	TA 2020 yang belum	TA 2020 yang belum
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PPh	1.[illegible]		3.381.051.073	2.003.177.196	16.795.787
PPN	2.[illegible]		1.[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]		919.[illegible]	1.979.[illegible]	16.795.787
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]		955.881.763	1.994.[illegible]	-
Dana Reboisasi	97.192.776		-8.427.901	-	16.238.302
Pajak Daerah					
Pajak Daerah					
Pajak Daerah					
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Dana Bagi Hasil Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam					
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam					
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam					
Dana Alokasi Umum	[illegible]		232.[illegible]	[illegible]	-
DTI	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DBH	-92.04[illegible]	14.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	13.434.[illegible]	[illegible]		[illegible]
Kurang Bayar DBH	-	13.087.[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Kurang Bayar DAK		41[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Kurang Bayar Dana Otonomi Khusus					-
Dana Otsus [illegible]					
Dana Bagi Hasil [illegible]					
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-			
Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Langsung	-	-	-	-	-
Minyak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Penghasilan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kehutanan		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
DR					-
PHT					
PSDH	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Pajak Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pariaman

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak	-	-	956.713.763	98.142.961	1.054.856.724
DBH	-	-	956.713.763	98.142.961	1.054.856.724
80% Pasal 21	-	-	917.695.409	98.142.961	1.015.838.370
20% Pasal 25/29	-	-	39.018.354	-	39.018.354
PBBKB	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Induk	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kota Induk	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbatasan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Provinsi Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kota Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Induk	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pos Kasda	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Provinsi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perbatasan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Provinsi Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Kota Lainnya	-	-	-	-	-
Opsen	-	-	-	-	-
BBNKB	-	1.791.548	200.431.736	-	202.223.284
Induk	-	-	-	-	-
Induk Bagi Hasil 70%	-	-	-	-	-
Induk Bagi Hasil 0,5%	-	-	-	-	-
Kabupaten Dalam Kawasan Otorita	-	-	-	-	-
Opsen Induk 30%	-	-	-	-	-
Opsen Induk 3,5%	-	-	-	-	-
Opsen Induk Bagi Hasil 0,5%	-	-	-	-	-
Kota Induk	-	-	200.431.736	-	200.431.736
Kota Induk	-	-	-	-	-
Bagi Hasi	-	-	200.431.736	-	200.431.736
Kota Lainnya	-	-	-	-	-
Kawasan Pariwisata	-	-	-	-	-
Provinsi Induk	-	-	-	-	-
Provinsi Bagian Perbatasan	-	-	-	-	-
Kota Lainnya	-	1.791.548	1.791.548	-	3.583.096
DKB	-	-	-	-	-
PKB/BBNKB	-	1.791.548	1.791.548	-	3.583.096
Perhitungan	-	-	-	-	-
Kurang/(Lebih)	-	1.791.548	1.159.016.996	98.142.961	1.258.951.505

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Perkiraan : (Dalam Rupiah)

URAIAN DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB DBH 2020 yang belum Dipenuhi	LB DBH 2020 yang belum Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Migas	2.066.834.736	-	1.679.378.693	387.376.043	387.376.043
PBH	667.217.7	-	1.261.815.206	87.877.707	87.877.707
PPh Pasal 21	1.111.778.8		1.227.778.8		
PPh Pasal 25/29	1.5		3.5		
PBB	2.221.669.2		1.2	1.368.010.2	2.009.7
Pajak Rokok	1.761.365.6		2.5	1.123.2	-
Pajak Daerah Migas	76.416.3	-	77.2	-	3.5
Pajak Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pasal 2	-	-	-	-	
Pajak Daerah Perkebunan					
Pajak Daerah Perkebunan Lainnya	1.1		3.6	2.9	-
Pajak Penerangan Migas	7	-	3.6	-	3.6
Pajak Penerangan Non Migas	-	-	-		
Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah					
Pajak Pengambilan Mata Air					
Pajak Penerangan Jalan Perdesaan	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan Selain Perdesaan	6.483.1	-	7.2	5.7	-
DMH	7.1	-	6.2	2.9	
DAK	1.2	1.2	4.1	2.3	1.2
Migas		1.2	3.3		1.2
Minyak Bumi 15%		1.0	3.3	-	3.6
Minyak Bumi 0,5%	-	- 1.2	1.3	-	-
Migas Bumi Dalam Tahun Berjalan	-	-	-	-	-
Gas Alam 30%	-	-	-		
Gas Alam 0,5%					
Gas Alam dalam Tahun Berjalan					
Minyak	7.1		1.3	1.0	
Panas Bumi	-		-	-	-
Pertambangan	1.3	-	4.7	4.5	-
Perikanan	58.271.5	-	58.7	1.0	-
Kehutanan	107.271.0	-	9.2	14.1	
Iuran tetap	1.3		1.2	1.0	
Reklamasi dan Pascatambang					
Pertambangan	-	1.1	2.3	-	5.1
DR	-	-	-	-	-
DBH					
DAU		1.1	2.7		5.1
Dana Desa	1.1		3.1		3.7
Grand Total	3.1	2.3	2.1	1.2	1.4

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pekerman Barat (dalam rupiah)

URAIAN DBH	KPPN [illegible]	SBN [illegible]	[illegible] (PMK No. [illegible])	Tanggal Salur (Kep. [illegible])	Realisasi (Kep. [illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
Pusat			2,099,180,810	701,142,856	1,397,038,554
PPh			-	-	-
PPh Pasal 21			-	-	-
PPh Pasal 25/29		-	-	-	-
PBB		-	2,070,[illegible]	681,[illegible]	1,389,[illegible]
BPHTB		-	-		
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21/26				-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29				-	-
Bagian Daerah Migas		-	2,026,[illegible]	681,[illegible]	1,344,[illegible]
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-			
Migas Pemerintah Pusat					
Migas Pemerintah Non Migas				-	-
Migas Pemerintah Pusat Pasal 22			-	-	-
Migas Pemerintah Pusat Lainnya		-	-		
Migas Pemerintah Daerah			67,[illegible]		[illegible]
Migas Pemerintah Daerah Lainnya					
Cukai				-	-
Minerba		5,[illegible]	93,[illegible]	-	[illegible]
Migas	-	-	-	-	
Migas Pasal 22	-	-	-		-
Migas Pasal 25/29	-	-			
Migas Bagian Pemerintah Pusat					
Migas Bagian Daerah					-
Migas Bagian Daerah Penghasil			-	-	-
Migas Bagian Daerah Bukan Penghasil		-	-	-	-
Minerba	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Pasal 22	-	-	4,[illegible]		[illegible]
Pasal 25/29	-	-	[illegible]		[illegible]
Pasal 4 Ayat 2			[illegible]		[illegible]
Minerba Produksi					-
Minerba Ekspor			[illegible]	-	[illegible]
Minerba Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	
Kehutanan	-	5,[illegible]			
PSDH					-
DR				-	-
Provisi	-	[illegible]	-	-	-
Perikanan	-	-	-		
Jumlah	-	5,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pesawaran Barat

(rupiah)

| Uraian | PPh Ps. 21 | PPh Ps. 25/29 | PPh Ps. 26 | PPh Ps. 4 (2) | PPh Ps. 15 | PPh Ps. 22 Impor | PPh Ps. 22 Bendahara Pemerintah | PPh Ps. 22 Lainnya | PPh Ps. 23 | PPh Ps. 26 | PPh Ps. 4 (2) Final | PPh Ps. 15 Final | PPh Ps. 22 Final | PPh Ps. 23 Final | PPh Ps. 26 Final | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Sederhana | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Sangat Sederhana | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank Syariah | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank Syariah Dengan Akad Murabahah | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank Syariah Dengan Akad Murabahah Atau Istishna | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank Syariah Dengan Akad Murabahah Atau Istishna Dalam Negeri | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank Syariah Dengan Akad Murabahah Atau Istishna Dalam Negeri Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank Syariah Dengan Akad Murabahah Atau Istishna Dalam Negeri Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain Yang Memenuhi Kriteria | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank Syariah Dengan Akad Murabahah Atau Istishna Dalam Negeri Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain Yang Memenuhi Kriteria Dan Dengan Harga Jual Tertentu | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank Syariah Dengan Akad Murabahah Atau Istishna Dalam Negeri Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain Yang Memenuhi Kriteria Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank Syariah | PPh Ps. 4 (2) Final Atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Susun Sederhana Milik Badan Usaha Yang Melakukan Pembangunan Perumahan Untuk Dijual Dengan Luas Tertentu Dan Dengan Harga Jual Tertentu Yang Dibiayai Oleh Kredit/Pembiayaan Bank Syariah Dengan Akad Murabahah Atau Istishna Dalam Negeri Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain Yang Memenuhi Kriteria

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bintan Utara (dalam rupiah)

URAIAN	KAB. PULAU [illegible]	KOTA BATAM	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
[illegible]			24,[illegible]82,563	592,649,618	592,377,481
[illegible]			1,455,060	-	1,455,060
[illegible]			1,455,060	-	1,455,060
[illegible]			-		-
[illegible]			2,[illegible]3,947,490	592,091,701	1,[illegible]2,855,789
[illegible]					-
[illegible]					-
[illegible]			2,360,[illegible]7	-	2,360,[illegible]7
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]			2,307,771,057	592,091,701	1,715,[illegible],357
[illegible]					-
[illegible]				-	-
[illegible]			3,859,011	-	3,859,011
[illegible]			-	-	-
[illegible]			102,[illegible],091		-[illegible]2,054
[illegible]				-	-
[illegible]			-	-	-
PPh		6,[illegible]7,385	106,[illegible],010		[illegible],711,089
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]				-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]			105,[illegible],010		105,[illegible],010
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]		96,[illegible]6
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			-	-	-
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]		6,[illegible]7,385	[illegible]		[illegible]
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-	-	-
PBBKB		6,[illegible]7,385	[illegible]		[illegible]
[illegible]					
Grand Total		6,[illegible]7,385	2,[illegible],[illegible],567	592,[illegible],[illegible]	2,[illegible],[illegible],[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Sub. Dharmasraya

(dalam rupiah)

URAIAN	PB Per 31 Des 2021	PB Des 2021 yang belum Tersalurkan	Alokasi Kurang Bayar Per 31 Des 2021 (Lebih Bayar/Des 2021)	PB Tahun 2020 yang belum Tersalurkan	DBH Tahun 2020 yang belum Tersalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB Pasal 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB Pasal 25/29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPHTB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Daerah Bagian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Pajak [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Pajak Lain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Pajak Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Pajak [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Pajak [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kehutanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Mineral Iuran Tetap	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Mineral Iuran Royalti	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi (PSC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi (PSC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi Minyak Bumi Pertambangan Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Landrent	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Royalti	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Penghasilan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Penghasilan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Setoran Lebih Bayar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kehutanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPHTB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pasal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Perusahaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Solok Selatan

(satuan rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	PP 45/2020 s.t.d.d. PMK No. 97/PMK.07/2021	Penyelesaian PB s.d. TA 2020 KMA No. 31/KMA/2021	PP 45/2020 s.t.d.d. PMK No. 33/PMK.07/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kurang			-		
Bagian Daerah Lebih Bagus			[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Lebih Kurang					
Bagian Daerah Pemerintah					
Bagian Daerah Pemerintah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pemerintah	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah			[illegible]		[illegible]
Bagian Pemerintah Daerah					
Bagian Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah					
Bagian Pemerintah Daerah					
BPHTB					
PDN		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas	-	-	-	-	-
Alokasi Dasar 15%		-	-	-	-
Alokasi Dasar 0,5%					
Alokasi Dasar dalam Kondisi Tertentu					
Cadangan 30%					
Cadangan 0,5%					
Cadangan Bagian Daerah		-	-	-	-
Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Langsung	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Lainnya			[illegible]		[illegible]
Pajak Daerah					
Opsen PKB/BBNKB					
Opsen PKB		-	-	-	-
Opsen BBNKB	-	-	-	-	-
Kekurangan		[illegible]	[illegible]		[illegible]
PBB					
PBB-P2					
PBDP	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Kehutanan	-	-	-	-	-
Gambut (DBH)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Solok Selatan

Satuan: rupiah

Jenis Dan	Kurang Bayar DBH TA 2020	Lebih Bayar DBH TA 2020	Penyaluran DBH Sampai dengan Bulan Desember TA 2020 (Berdasarkan SAU No. 2/KPA/2021)	Kurang Bayar DBH TA 2020 yang Belum Dapat Dialokasikan	Lebih Bayar DBH TA 2020 yang Belum Dapat Dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PAJAK	2.611.112.137		2.107.410.275	503.701.862	503.701.862
PPh	1.971.010.962		1.467.309.100	503.701.862	
PPh Pasal 21	1.935.032.295		1.431.330.433	503.701.862	
PPh Pasal 22/23	36.978.667	-	35.978.667	1.000.000	-
PBB	2.453.031.975	-	2.203.109.902	17.597.653.048	65.719.550
BPHTB	1.051.051.202	-	965.889.704	1.208.370.706	-
Bagian Daerah Bagi	10.702.202		70.777.700		20.860.650
Bagian Daerah non Migas					
Bagian Pemerintah Pusat	1.286.071.173		10.079.307	1.223.712.749	
Bagian Pemerintah Pusat Migas	30.131.497		110.776.902		24.910.302
Bagian Daerah Penghasil	3.657.251.811	-	1.534.698.208	4.085.465.02	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	715.591.037	-	8.904.307	970.074.707	-
Biaya Pemungutan Kasus	1.202.400		2.202.100		837.531
Biaya Pemungutan Kasus Migas					
Biaya Pemungutan Sektor Pusat	35.366.977		1.838.592	1.270.455.475	
Biaya Pemungutan Sektor Migas	1.393.538	-	5.267.700	-	676.192
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	238.742.979		67.437.807	178.017.702	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	5.050.139		238.900	5.036.039	
PBB	9.302.311		6.200.879	2.093.772	
BPHTB	4.134.384.327	180.050.979	1.070.451.351	1.220.000.029	414.504.347
Migas	-	3.438.600	6.450.001	-	14.010.102
Panas Bumi	-	3.070.700	60.269	-	15.387.365
Cukai Hasil Tembakau		411.400	15.800		427.300
Kompensasi Dana Bagi Hasil Lainnya					
Dana Reboisasi					
Dana Reboisasi					
Dana Reboisasi Hasil Pengolahan Pabrik	-	-	-	-	-
Minerba	77.213.043	63.574.59	17.791.135	42.415.161	63.457.196
Penjualan	-	63.574.59	17.781.171	-	63.457.196
Royalti	77.213.043		34.972.950	42.415.161	-
Panas Bumi	1.171.492.324		976.291.290	3.104.211.001	
Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Dalam Negeri	2.727.613.639		943.566.972	2.067.201.192	
Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan	393.857.915		51.624.418	490.920.542	
Sumber Daya Alam Perikanan	-	-	-	-	-
Kehutanan		72.010.775	37.305.775		36.378.287
DR					
PSDH					
DR	-	72.010.775	35.105.775	-	36.378.287
Pertambangan Umum	130.176.630	-	816.781.369	-	57.634.021
Grand Total	12.909.370.857	159.053.772	4.191.255.379	1.770.519.201	430.130.201

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Riau (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. .../PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. .../PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. .../PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			4.261.865.826	4.261.865.826	
PPh			4.261.865.826	4.261.865.826	
PPh Pasal 21			4.158.842.923	4.158.842.923	
PPh Pasal 25/29			103.022.903	103.022.903	
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas		-			-
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perhutanan					
Bagian Daerah Perkebunan	-				
Bagian Daerah Pertambangan Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-		-	
CHT					
SDA		1.107.264.827	8.164.633.533	694.715.272	7.469.871.617
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0.5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Otonomi Khusus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0.5%					
Gas Bumi Otonomi Khusus					
Minerba	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-		
Kehutanan	-	1.206.329.027	8.164.633.533	694.715.272	7.469.871.617
DR		227.420.042	8.164.633.533	694.715.272	7.469.871.617
IIUPH		525.320			
PSDH	-	978.383.665			
Perikanan	-	-	-	-	
Grand Total	-	1.206.329.027	12.426.499.359	4.956.581.098	7.469.871.617

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Riau

(dalam rupiah)

Uraian DBH	DBH Definitif TA 2022	DBH Definitif TA 2021	Penyaluran DBH TA 2021 Sampai dengan PMK 81/PMK.07/2021	DBH TA 2021 yang Telah Disalurkan	DBH TA 2021 yang Telah Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	1[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Cukai Hasil Tembakau					
Dana Bagi Hasil Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Dana Bagi Hasil Non Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kurang/Lebih Salur DBH					
Kurang/Lebih Salur DBH Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kurang/Lebih Salur DBH Non Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kurang/Lebih Salur DBH Migas Tahun [illegible]					
Kurang/Lebih Salur DBH Non Migas Tahun [illegible]					
Kurang/Lebih Salur DBH Migas Tahun [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kurang/Lebih Salur DBH Non Migas Tahun [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kurang/Lebih Salur DBH Sektor Lain [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (SDA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (PPh)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi dalam Bentuk Lainnya					
Gas Bumi (SDA)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi (PPh)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi dalam Bentuk Lainnya					
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Tetap		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi					
Sumber Daya Alam					
Tarif Khusus (SDA)					
Tarif Khusus Bagi Hasil (PPh)					
Kehutanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DR		[illegible]	[illegible]		[illegible]
PSDH	[illegible]		[illegible]		
Perikanan					
Jumlah Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bengkalis (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB TA 2019 (KMK No. .../KM.7/2021)	Sisa LB TA 2019 (KMK No. .../KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			19.703.475.726	19.703.475.726	
PPh			19.703.475.726	19.703.475.726	
PPh Pasal 21			19.267.226.189	19.267.226.189	
PPh Pasal 25/29	-	-	436.249.537	436.249.537	
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Perkebunan		-			
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan			-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT					
SDA		394.387.956	45.394.095.332	13.351.905.426	32.042.189.906
Migas	-	-	45.314.094.332	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	-	37.330.750.881	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%			7.631.394.331	-	7.631.394.331
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	-	-	-	-	
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti			-	-	-
Panas Bumi					
Setoran Bagian Pemerintah					
Iuran Tetap	-	-			
Setoran Bagian Pusat	-	-	-	-	-
Kehutanan		394.387.956	-	-	-
IIUPH					
PSDH					
DR	-	394.387.956	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total		394.387.956	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi/Kabupaten/Kota

(Rupiah)

Jenis DBH	TA 2021	TA 2020	Penyesuaian KB TA 2021 (PMK No. 226/KMK.07/2021)	APBN TA 2020 yang belum dibayarkan	KB TA 2020 yang belum dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	477.024.796.877	-	97.315.736.780	701.596.634.097	2.470.875.102
PBB	10.521.351.436		12.402.281.300	630.672.246	2.470.875.102
BPHTB	9.725.101.634		12.402.281.300		2.470.875.102
Pajak Rokok	901.750.198		84.913.455	329.672.354	
PPh	547.017.213.038		79.828.591.900	80.217.217.397	
Pajak Parsel	191.969.956		250.836.750	1.716.270.299	
Bagian Daerah Migas	83.344.756.967	-	10.198.718.550	761.594.018.267	-
Bagian Daerah Migas Tambahan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan	1.111.111.111		1.005.000.750	3.877.020.717	
Bagian Daerah Pertambangan Tambahan	9.100.000.000		2.115.111.750	7.984.888.250	
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	2.159.009	-	2.150.300	8.708.907	-
Pajak Penghasilan Migas	27.707.473.005	-	2.257.153.150	15.589.810.850	-
Pajak Penghasilan Non Migas					
Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi					
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.123.416.620		52.301.770	149.107.329	
Pajak Penghasilan Pasal 25/29	12.885.505	-	96.326.610	808.561.604	-
Pajak Penghasilan Pasal 26	9.197.647	-	263.250	6.593.347	-
Cukai	7.105			7.105	
CHT	2.617.201.134	10.410.139.977.972	21.688.300.000	7.720.501.720	170.020.438.050
Vitamin	512.503.721	157.119.977.972	19.799.150.000	61.306.811.179	170.020.438.050
Vitamin Pasal 15%	-	157.960.617.151	18.792.300.420	-	170.020.847.971
Vitamin Pasal 0,3%	-	5.070.551.703	995.483.630	-	407.790.350
Vitamin Pasal 25/29 Badan Orang Pribadi	-	-	-	-	-
Cukai Pasal 30%	661.020.286		1.272.000	661.326.453	
Cukai Pasal 0,3%	13.072.721		170.000	19.611.726	
Cukai Pasal 25/29 Badan/PPh Final					
Minyak	310.756.102		96.967.110	311.191.361	
Tembakau	-	-	-	-	-
Pajak Lainnya	870.755.153	-	21.587.475	83.187.641	-
Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Pajak Kendaraan					
Bea Balik Nama					
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
Kendaraan	3.644.380.604	-	601.154.975	675.438.654	-
DR	-	-	-	-	-
Hasil					
PNBP	8.001.980.280		1.402.174.910	5.772.701.324	
Perikanan	159.136.580	-	218.961.020	-	59.824.440
Grand Total	837.842.071.782	187.450.177.972	21.860.170.760	830.095.485.124	179.616.794.147

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Indragiri Hilir

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB TA 2018	PB TA 2019	LO s.d. TA 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2021)	Penyesuaian PB s.d. TA 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2021)	Sisa LO s.d. TA 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			3.209.467.019	3.209.467.019	-
PBB			3.209.467.019	3.209.467.019	-
PPh Pasal 21			2.936.496.453	2.936.496.453	-
PPh Pasal 25/29			272.970.566	272.970.566	-
CHT	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Migas					-
Bagian Daerah Pasca Tambang					
Bagian Daerah Perikanan					-
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas					
Bagian Pemerintah Pasca Tambang			-	-	-
Bagian Pemerintah Perikanan			-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya			-	-	-
PPh					
Migas		307.972.830	3.086.901.291	1.062.771.125	2.024.130.166
Migas			3.086.901.291	1.062.771.125	2.024.130.166
Migas Pasal 22	-	-	5.51 .515.45	4.51 .37 .725	1.015.144.725
Migas Pasal 23	-	-	557.765.137	-	557.765.137
Migas Pasal 15	-	-			
Gas Alam 30%					
Gas Alam 70%					
Gas Alam Dalam Rangka Ekspor					
Minyak	-		-	-	-
Minyak	-	-	-	-	-
Migas	-	-	-	-	-
Pasal 22 Impor					
Migas Produksi					
Migas Lainnya					
Bagian Daerah Penghasil Migas	-		-	-	-
Minerba	-	365.679.830	-	-	-
BH	-	-	-	-	-
BHAT		11.113.277			
Royalti		353.566.553			
Penerimaan	-	-	-	-	-
Total	-	673.652.660	8.977.848.113	3.333.736.744	5.644.111.369

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Indragiri Hilir

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH di TA 2020 (Surat Menkeu No. S-[illegible]/MK.07/2021)	KB DBH TA 2020 yang belum dapat disalurkan	LB DBH TA 2020 yang belum dapat disalurkan
[illegible]	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	97.220.275.291		37.[illegible].270.630	21.[illegible].004.670	98.011.939
PPh	4.000.772.103		2.[illegible].972.709	1.[illegible].799.394	
PPh Pasal 21	3.614.798.581		2.[illegible].630	1.[illegible].[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	418.976.581	-	159.[illegible].630	259.359.951	-
PBB	89.405.949.687	-	34.[illegible].630	55.[illegible].016	98.011.939
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.[illegible].[illegible].[illegible]	-	26.[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Atas Tanah	137.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		98.[illegible].[illegible]
Bagian Daerah atas Bumi	1.[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible]	
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Daerah	[illegible].[illegible].[illegible]		1.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Atas Tanah	28.[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Atas Bumi	[illegible].[illegible].[illegible]		8.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Bagian Pemerintah Pusat	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible]
Bagian Pemerintah Daerah	21.[illegible].[illegible]		11.[illegible].[illegible]	10.[illegible].[illegible]	
Bagian Pemerintah Pusat Sektor Tertentu	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Sektor Tertentu	75.[illegible].[illegible]	-	45.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Bagian Pemerintah Pusat Sektor Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Bagian Pemerintah Daerah Sektor Lainnya	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
PPh	[illegible]			[illegible]	
PPN	10.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Migas	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Subsidi Migas Kurang Salur					
Gas Bumi 12%	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Gas Bumi 7,5%	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Gas Bumi Selain Pangsa Pasar	-	-	-	-	-
Minerba	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Landrent	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Jasa Pengelolaan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Pajak Lainnya					
Pajak Sarang Burung Walet					
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Sumber Daya Alam Perikanan	-	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
IHPH					
PSDH	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
DBHT	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Perikanan	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Grand Total	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Indragiri Hilir

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyaluran Lebih Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Sisa Lebih Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	3.013.593.134	3.013.106.657	5.034.484.477
PPh		-	2.827.707.177	-	2.827.707.177
PPh Pasal 21			2.815.667.508	-	2.815.667.508
PPh Pasal 25/29			8.165.669	-	8.165.669
PPN			6.071.121.862	3.013.106.657	3.058.015.310
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Bagian Pemerintah Pusat	-	-			
Bagian Daerah Hasil Migas	-	-	4.157.847.315	3.618.036.567	539.811.258
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Umum		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			736.372.813	-	736.372.813
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi			916.777.237		916.777.237
Bagian Pemerintah Pusat atas Penerimaan Negara Bukan Pajak	-				
Bagian Pemerintah Pusat atas Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat atas Pertambangan Panas Bumi			185.831.124	-	85.831.124
Bagian Pemerintah Daerah atas Pertambangan Minyak Bumi			228.672.240	-	228.672.240
Bagian Pemerintah Daerah atas Pertambangan Panas Bumi	-		12.000.000	-	12.000.000
Bagian Pemerintah Daerah atas Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	-		-	-	-
Cukai			-	-	-
PDRA		12.920.000.000	3.811.133.478		3.811.133.478
Migas					
Migas Sub-sektor ESDM					
Migas Sub-sektor Keuangan	-	-		-	
Migas Sub-sektor Kebijakan Khusus Otonomi	-	-	-	-	-
Gas Bumi PPh		-	-	-	-
Gas Bumi PPN			-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Cukai					-
Pertambangan			3.811.133.478		3.811.133.478
Panas Bumi	-		3.811.133.478		3.811.133.478
Royalti	-				
Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Iuran Produksi		-	-	-	-
Iuran Tetap				-	-
Pertambangan Minyak Bumi					
Kehutanan	-	12.920.000.000			
PSDH	-	-	-	-	-
DR			-	-	-
PHT		12.920.000.000			
Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau	-	99.026.358	7.400.793.845	6.819.201.657	3.809.140.188

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Indragiri Hulu (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran LB 2021 [illegible] (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	1.707.[illegible]		[illegible]	1.[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Pusat	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Non Migas	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Pemkab/Pemkot					
Bagian Daerah Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	446.414.539	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Non Migas		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Pusat					
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
CHT	7.105			7.105	
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi 0,5%	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Tetap	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Royalti	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	-	-	-	-	
Iuran Produksi					
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
IIUPH	-	-	-	-	-
DR					
PSDH	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Kemenkeu

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi 2018	Alokasi 2019	Alokasi 2020 (PMK No. 226/PMK.07/2020)	Penyelesaian 2020 (KMS No. 218/KT/2021)	Kurang (Lebih) Bayar (4)-(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
Migas			3.307.587.000	3.936.226.153	628.639.153
PPh			3.307.587.000	3.936.226.153	628.639.153
PPh Pasal 21	-		3.581.100.000	3.441.800.000	
PPh Pasal 22/26	-		3.516.000.000	3.516.000.000	
PPN	-	-			
Cukai Hasil Tembakau					
Bagian Daerah Penghasil Migas		-			
Bagian Daerah Penghasil Non Migas		-			
Bagian Daerah Penerima Alokasi Formula					
Bagian Daerah Penghasil Perikanan	-				
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan	-	-			
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-				
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi	-				
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan		-			
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan		-			
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan					
PPh 21	-				
PPh 22	-	97.172.512	-219.050.021		316.222.533
Migas	-	97.172.512	-248.810.651		345.983.163
Migas Bumi (85%)	-	-	5.178.435.729		5.178.435.729
Migas Bumi (15%)	-	-	-		
Migas Bumi Dalam Rangka Otsus Papua					
Gas Bumi (70%)			1.036.000.000		1.036.000.000
Gas Bumi (30%)	-		30.975.120		30.975.120
Gas Bumi dalam Rangka Otsus Papua	-				
Pertambangan Minyak Bumi	-	-			
Pertambangan Gas Bumi	-	-			
Pertambangan Panas Bumi	-	-			
Pertambangan Mineral					
Pertambangan Batubara					
Pertambangan Batubara Dalam Rangka Otsus Papua					
Kehutanan	-	-			
Perikanan	-	-			
Pertambangan Panas Bumi	-	-			
PPh 23		297.172.512			
PPh 26	-				
PPh 4(2)	-	297.172.512			
PPh Lainnya					
Total		97.172.512	-219.050.021	3.936.226.153	316.222.533

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bangkalan

(dalam rupiah)

Uraian	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak	26.732.344.470	-	28.436.831.101	(3.703.786.631)	-
PPh	4.903.031.048	-	5.777.302.701	(874.271.653)	-
PPh Pasal 21	4.418.945.456	-	5.094.179.800	(675.234.344)	-
PPh Pasal 25/29	484.085.592	-	683.122.901	(199.037.309)	-
PPN	19.740.413.417	-	20.921.236.760	(1.180.823.343)	-
PPh Final	1.891.899.005	-	2.737.291.640	(845.392.635)	-
Pajak Lainnya	29.027.910.210	-	31.192.206.730	(2.164.296.520)	-
Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan Umum	3.448.908.717	-	794.939.300	2.653.969.417	-
Pajak Daerah Perkotaan	25.578.901.493	-	30.397.267.430	(4.818.365.937)	-
Pajak Daerah Lainnya	101.099.067	-	0.307.070	90.791.997	-
Bagi Hasil dari Pajak	2.940.079.983	-	796.970.030	2.143.109.953	-
Bagi Hasil dari Pajak Migas	-	-	-	-	-
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pemanfaatan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.402.134	-	47.667.000	(29.264.866)	-
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	1.087.510.717	-	272.877.700	814.632.017	-
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21	7.668	-	344.500	7.323.349	-
DAK	7.105	-	-	7.105	-
DAU	6.075.895.004	99.842.020.012	3.103.020.727	4.603.833.290	90.210.971.099
Hibah	915.419.142	7.107.038.879	3.194.067.420	3.915.452.147	96.107.938.454
Pemprov Jatim 15%		92.071.969.109	7.894.720.430		77.017.900.079
Pemprov Jatim 0,5%		2.020.936.300	260.050.720		2.830.026.020
Pemprov Jatim Dana Bagi Hasi Cukai	-	-	-	-	-
Cukai Rokok 30%	326.435.774	-	92.311.430	404.124.344	-
Cukai Rokok 10%	8.793.367	-	704.020	9.265.467	-
Cukai Rokok 20% Dana Sehat	-	-	-	-	-
Materai	980.715.748	-	70.000.000	900.715.748	-
Lainnya	307.702	-	-	307.702	-
Pajak	324.826.206	-	92.826.000	231.900.206	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bunga Perbankan	-	-	-	-	-
Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Sanksi Bagian Pemerintah					
Retribusi	9.229.975.301		1.319.806.720	7.910.168.581	
DTP	-	-	-	-	-
BOKB	-	-	-	-	-
Lainnya	7.109.975.301		1.349.807.720	5.870.167.581	
Perikanan	1.119.000.000		311.998.000		1.111.002.020
Total	27.000.871.307	92.842.020.012	33.211.000.000	101.000.313.319	90.210.971.099

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Sangihe

(dalam rupiah)

Uraian	TB TA 2018	TB TA 2019	Lebih Salur TA 2020 (PMK No. 96/PMK.07/2021)	Alokasi Lebih Salur TA 2020 (SMS No. S-1055/PK.7/2021)	Jumlah Lebih Salur TA 2020 (PMK No. 96/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pph 21			3,037,306,384	3,037,306,384	-
PPh			3,037,306,384	3,037,306,384	-
PPh Pasal 21			1,002,111,701	1,002,111,701	-
PPh Pasal 25/29			2,035,194,683	2,035,194,683	-
PPh 4			82,317,000		82,317,000
Cukai Hasil Tembakau					
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakan					
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau			67,074,450		67,074,450
Bagian Daerah Penghasil Dana Reboisasi					
Bagian Daerah Penghasil Provisi Sumber Daya Hutan					
Bagian Daerah Penghasil Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan					
Bagian Daerah Penghasil Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu					
Bagian Daerah Penghasil Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Bukan Kayu					
Bagian Daerah Penghasil Dana Reboisasi					
Bagian Pemerintah Pusat dari Provisi Sumber Daya Hutan			8,607,650		8,607,650
Bagian Pemerintah Pusat dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan					
Bagian Pemerintah Pusat dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu					
Bagian Pemerintah Pusat dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Bukan Kayu					
Bagian Pemerintah Pusat dari Dana Reboisasi					
Bagian Pemerintah Pusat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
PPN					
PBB		271,301,161	13,018,613,140	2,918,015,108	12,099,159,597
Migas			2,918,015,108	2,918,015,108	7,261,014,973
Migas Bagian 15%			8,204,626,259	2,918,015,108	6,201,490,130
Migas Bagian 6%			7,962,813,697		1,197,191,973
Migas Bagian Untuk Kabupaten Utara					
Bagi Rata 20%					
Bagi Rata 0,5%					
Bagi Rata Faktor Pengali Utara					
Minerba			3,031,197,211		3,031,197,211
Panas Bumi			2,429,960,960		2,429,960,960
Kehutanan			3,853,861,901		3,853,861,901
Faktor Utara					
Bagian Pajak					
Bagian Retribusi					
Bagian Penerimaan Dari Pemerintah					
Kehutanan		242,355,164			
Lain					
PDPH					
PBHB		212,353,196			
Perikanan					
Jumlah Total		242,355,164	3,448,894,134	5,955,947,852	12,701,994,247

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Seribu

(Dalam rupiah)

URAIAN DBH	PPh Pasal 21 TA 2020	PPh Pasal 21 TA 2020	Penyaluran DBH Desember TA 2020 (KMK No. 535/KMK.07/2021)	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	6.971.261.135		6.388.117.830	6.388.034.730	83.156.216
PBB	11.270.530.177		2.797.000.000	2.693.163.000	81.837.000
PBB Pasal 21	3.037.164.822		2.476.000.000	2.476.000.000	-
BPHTB	234.035.231		228.280.000	228.280.000	-
Cukai	14.261.131.861		1.894.919.830	1.894.919.830	-
Retribusi	1.381.586.896	-	265.609.000	265.609.000	-
Bagian Daerah dari Migas	98.121.703	-	17.435.905	-	17.435.905
Bagian Daerah dari Pertambangan Minyak Bumi	654.401.234			654.401.234	-
Bagian Daerah dari Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Daerah dari Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah dari Kehutanan	2.720.122.707		2.720.122.707	1.720.000.000	-
Bagian Daerah dari Pertambangan Umum	7.607.431.199		2.771.111.111	5.279.079.535	-
Bagian Daerah dari Perikanan	15.296.307	-	8.624.700	206.934.707	-
Bagian Daerah dari Pertambangan Migas	8.776.263	-	3.034.695	-	5.741.568
Bagian Pertambangan Panas Bumi	31.148.709			31.148.709	-
Bagian Pertambangan Minyak Bumi					
Bagian Pertambangan Gas Bumi	31.301.497		14.165.000	47.431.497	-
Bagian Pertambangan Umum	341.807.417	-	156.850.000	29.656.417	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	2.126.567	-	1.045.400	3.080.967	-
Cukai	3.103			3.103	
DAU	6.278.241.717	31.847.900.000	3.774.160.200	1.912.081.885	38.399.219.032
Migas	273.361.730	35.981.000.017	3.641.031.000	561.938.110	34.492.453.637
Migas Pasal 22	-	35.962.262.016	3.527.519.500	-	32.372.742.516
Migas Pasal 25/29	-	18.737.001	13.150.500	-	5.779.059.121
Migas Pasal 26 (Dividen) Bagian Pemerintah	-	-		-	
Gas Bumi PPh	60.279.953		10.212.000	50.067.953	
Gas Bumi PPh	213.081.777		113.731	511.026.157	
Gas Bumi dalam Rangka Ubah					
Migas		706.999.000	246.649.500	-	343.763.500
Tambang	-	185.351.000	53.316.479	-	2.119.034.521
Panas Bumi	-	532.341.000	415.517.000	-	787.983.000
Pajak Bumi dan Bangunan					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Jumlah Setoran					
Setoran Pajak Penghasilan					
Selisih Lebih	5.482.709.054	-	1.086.331.775	4.380.174.279	-
Pasal 21	-	-	-	-	
Pasal 22					
Pasal 23	1.111.100.000		1.000.000.000	1.000.000.000	-
Pasal 25/29	1.000.000.000		316.331.775	-	683.668.225
Pasal 26 (Dividen)	1.371.608.054	-	1.771.000.000	14.307.308.240	36.491.375.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pemalang

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]		-			
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]			-	-	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]		-			
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]					
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]					
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]		[illegible]			
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-
[illegible]		[illegible]			
[illegible]					
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pelalawan

(dalam rupiah)

Jenis PPh	PPh Tahun TA 2020	DBH Dialokasikan TA 2020	Penyaluran PPh DBH Berdasarkan PMK No. 84/PMK.07/2021	PPh Tahun yang belum Dialokasikan	DBH yang belum Dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	60.773.389.259		18.010.000.000	42.763.389.259	-
PPh	6.592.800.285	-	1.760.000.000	4.832.800.285	-
PPh Pasal 21	6.016.821.307	-	1.601.200.000	4.415.621.307	-
PPh Pasal 23/26	575.978.978	-	158.800.000	417.178.978	-
PPh	51.227.300.332	-	13.434.887.500	37.792.412.832	-
Jasa Raya	1.991.958.968		265.681.700	1.726.277.268	
Usaha Daerah Migas	15.345.791.982		4.341.809.100	11.003.982.882	
Usaha Daerah Non Migas	-			-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan	13.097.035.036		4.000.000.000	9.097.035.036	
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan	22.990.013.047		3.424.447.500	19.565.565.547	
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan	2.100.000.000		1.500.000	2.098.500.000	
Bagian Pemerintah Pusat Migas	5.010.830.450		1.121.921.200	3.888.909.250	-
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi	-				-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Umum					
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan	940.800.000		136.200.000	804.600.000	
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan	2.100.000.000		241.050.000	1.858.950.000	
Bagian Pemerintah Pusat Pajak Penghasilan	7.186.847		2.500.000	4.686.847	-
PPN	7.101	-		7.101	-
PPh	2.031.279.362	34.016.697.975	7.302.350.000	12.000.000.000	36.045.627.337
Migas	9.265.000.979	24.561.186.173	3.775.370.000	9.000.000.000	26.050.816.152
Migas Pasal 15%		35.123.000.000	3.304.350.000	-	31.818.650.000
Migas Pasal 0,5%	-	1.119.061.000	117.020.000	-	1.001.941.000
Migas Pasal 4(2) Bunga Deposito Migas	-				-
Non Migas 30%	8.727.965.079	-	93.021.000	8.634.944.079	-
Non Migas 0,5%	15.221.000	-	1.410.000	13.811.000	-
Non Migas Pasal 4(2) Bunga Deposito		-	-		
Migas	277.100.000	32.180.000	74.010.000	203.090.000	32.180.000
Non Migas		32.180.000	7.650.000	-	32.180.000
Jumlah	70.805.189		21.044.237.500	49.760.951.689	
Bunga Migas					
Bunga Non Migas					
Bunga Pasal 23					
Kelebihan Bagian Pemerintah Pusat					
Kekurangan	11.401.351.997		3.793.200.000	7.608.151.997	
Migas	-			-	-
Non Migas	-				-
Jumlah	11.401.351.997		3.793.200.000	7.608.151.997	-
Kekurangan	164.210.990		31.678.500	-	132.532.490
Grand Total	83.369.993.016	67.616.877.975	25.072.208.921	62.148.317.170	36.468.660.827

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Rokan Hilir

(rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	PENETAPAN (PMK No. 57/PMK.07/2021)	PENYESUAIAN (PMK No. 8/PMK.07/2021)	SISA LEBIH (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(5)
PPh	-	-	783.241.179	0.783.241.179	-
PBH	-	-	783.241.179	0.783.241.179	-
PPh Pasal 21	-	-	855.775.027	1.668.132.027	-
PPh Pasal 25/29			927.466.152	927.466.152	
PBB					-
Pajak Bumi					-
Dikelola Langsung Negara				-	-
Dikelola Langsung Non Migas		-	-	-	
Kurang Bayar Tahun Anggaran Berjalan	-	-	-		
Kurang Bayar Tahun Sebelumnya	-	-			
Kurang Bayar Penyelesaian					-
Kurang Bayar Tahun Anggaran Berjalan				-	-
Kurang Penyelesaian Non Migas	-	-	-		
Kurang Bayar Tahun Anggaran Berjalan	-	-			
Kurang Bayar Tahun Anggaran Sebelumnya					
Kurang Bayar Penyelesaian				-	-
Kurang Penyelesaian Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
Cukai	-	-	-		
Cukai	-	78.731.903	1.807.490.002	2.028.741.050	7.372.054.750
Migas			9.201.230.002	2.028.741.050	7.372.054.750
Minyak Bumi			8.892.247.129	2.028.741.050	6.564.357.049
Kurang Bayar Tahun Berjalan			307.982.874	-	807.982.874
Kurang Bayar Tahun Sebelumnya			-	-	-
Gas Bumi		-	-		
Gas Bumi	-	-			
Gas Bumi Kurang Bayar Tahun Berjalan	-	-			
Minerba					
Iuran Tetap				-	-
Royalti				-	-
Panas Bumi		-	-	-	-
Kurang Bayar Tahun Berjalan	-	-			
Kurang Bayar Tahun Sebelumnya					
Kehutanan		-		-	-
PSDH		-	-	-	-
DBHDR	-	-	-		
PSDH	-	78.731.903			
Perikanan					-
Jumlah Total	-	78.731.903	2.590.731.181	4.811.982.229	7.372.054.750

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Rokan Hilir

(dalam rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PPh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Rokok	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Alat Berat	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Air Permukaan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Sarang Burung Walet	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Parkir	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Reklame	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Air Tanah	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perdesaan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perkotaan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (15%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas Bumi (69,5%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas Bumi Bagian Pemerintah - Penerimaan Negara	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi (30%)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi (0,5%)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Ketahanan Energi	-	-	-	-	-
Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Royalti	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Mineral	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Provisi Sumber Daya Hutan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Perikanan	-	-	-	-	-
Cukai	-	-	-	-	-
Pungutan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Gas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Mineral dan Batubara	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan dan Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Panas Bumi dan Mineral dan Batubara dan Kehutanan dan Perikanan dan Cukai dan Pungutan dan Pertambang

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2022

Kode Satuan Mata Uang

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2016	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 21/PMK.07/2021)	Penyesuaian Lebih Bayar TA 2019 (KMK No. 376/KM.7/2021)	Sisa Lebih Bayar TA 2019 (KMK No. 376/KM.7/2021)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
Pusat	-	-	3.936.626.210	-1.917.295.010	1.019.331.200
Daerah	-	-	3.936.626.210	-1.917.295.010	1.019.331.200
PPh Pasal 21			493.279.556	493.279.556	
PPh Pasal 25/29			3.793.350.654	-422.279.446	1.635.630.100
PPN					
PPnBM					
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan					
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					
Bagian Daerah Penghasil Perikanan					
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Minyak Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan					
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan					
Cukai					
Minyak Bumi		187.113.137	3.644.166.206		3.644.166.206
Migas			3.714.716.706		3.714.716.706
Minyak Bumi (PPh)			3.693.205.067		3.693.205.067
Minyak Bumi (PPN)			21.511.639		21.511.639
Minyak Bumi dan Gas Bumi (Bagian Pemerintah)					
Gas Bumi (PPh)					
Gas Bumi (PPN)					
Gas Bumi (Bagian Pemerintah)					
Pertambangan					
Iuran Tetap					
Royalti					
Pertambangan Umum					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi					
Iuran Pertambangan Panas Bumi					
Kehutanan		187.113.137	70.459.500		70.459.500
PSDH					
DR					
DBHTI			-5.447.201		-5.447.201
PSDHT		187.113.137			
Perikanan					
Jumlah Pusat		187.113.137	3.740.966.429	-1.917.295.010	1.823.671.419

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kaur Prov. Bengkulu

(dalam rupiah)

URAIAN	Kurang Bayar TA 2020	Lebih Bayar TA 2020	Penyaluran DBH Triwulan IV TA 2021 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Alokasi DBH yang Diterima	DBH yang Harus Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)-(4)	(6)=(3)+(4)-(5)
Pajak	47.226.179.834	-	11.806.544.959	59.032.724.793	-
Cukai	1.107.141.057	-	276.785.264	1.383.926.321	-
Cukai Hasil Tembakau	1.107.141.057	-	276.785.264	1.383.926.321	-
Cukai Hasil Pengolahan Etil Alkohol	-	-	-	-	-
PNBP	48.333.320.891	-	12.083.330.223	60.416.651.114	-
PNBP Sumber Daya Alam	1.991.919.999	-	497.979.999	2.489.899.998	-
PNBP Sumber Daya Alam Migas	1.991.919.999	-	497.979.999	2.489.899.998	-
PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan	46.341.400.892	-	11.585.350.224	57.926.751.116	-
PNBP Sumber Daya Alam Perikanan	-	-	-	-	-
PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-	-	-	-
PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
PNBP Sumber Daya Alam Lainnya	-	-	-	-	-
PNBP Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara	7.105	-	1.776	8.881	-
PNBP Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara Lainnya	7.105	-	1.776	8.881	-
Hibah	3.732.741.079	37.277.362.675	8.933.525.956	8.418.903.514	28.173.443.846
Hibah	3.732.741.079	37.277.362.675	8.933.525.956	8.418.903.514	28.173.443.846
Hibah Barang	-	31.106.393.393	7.776.598.348	-	31.772.991.741
Hibah Uang	-	6.170.969.282	1.156.926.608	-	7.327.895.890
Hibah yang Dikelola di Rangka Proyek	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil	141.205.291	-	35.263.909	176.469.200	-
Dana Bagi Hasil Pajak	1.702.173	-	170.750	1.871.923	-
Dana Bagi Hasil dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Migas	140.503.118	-	35.093.159	175.596.277	-
Sumber Daya Alam	69.107.062	-	17.276.766	86.383.828	-
Kehutanan	140.755.193	-	35.188.798	175.943.991	-
Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Perikanan				-	-
Subsektor Pajak Penghasilan					
Pajak Lainnya	4.498.165.353	91.125.870	998.072.806	3.597.974.415	73.760.259
DBH	-	-	-	-	-
DBH Migas	-	91.125.870	22.781.468	-	91.125.870
PPh Pasal 21	1.091.103.033	-	272.775.758	1.363.878.791	-
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	205.187.990	-	51.296.998	256.484.988	-
PPh Pasal 25/29 Badan	2.797.564.953	91.125.870	699.391.238	1.977.611.636	73.760.259

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Siak (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	Lebih Bayar TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)	Penyelesaian LB TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	[illegible]	[illegible]	
PPh		-	[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21		-	[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29		-	315.738.408	315.738.408	
PBB					-
Bagi Rata				-	-
Bagian Daerah Migas	-			-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-			-
Bagian Daerah Panas Bumi		-			-
Bagian Daerah Perhutanan			-		
Bagian Daerah Perkebunan			-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-			-	
Biaya Pemungutan Migas	-				-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-		-
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-		
Biaya Pemungutan Perhutanan				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-				-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-			-
CHT		-	-		-
SDA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	-	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 30%		-	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%		-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	
Minerba				-	-
Landrent	-			-	-
Royalti	-				-
Panas Bumi	-	-			
Iuran Tetap		-			
Iuran Produksi			-	-	
Setoran Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan	-	[illegible]		-	-
DR	-	-			
IIUPH		-	-		
PSDH		[illegible]	-	-	-
Perikanan	-			-	-
Grand Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Siak

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PE Tahun TA 2020	LO Tahun TA 2020	Penyaluran PE DBH Semester I TA 2021 (Pasal 44 ayat (2) huruf a)	PE TA 2020 yang telah disalurkan	PE TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPHTB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bea Meterai	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Pajak Rokok	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Air Permukaan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Alat Berat	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Hiburan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Reklame	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penerangan Jalan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Parkir	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Air Tanah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Sarang Burung Walet	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Tertentu Golongan C Jenis Tanah Liat Jenis Tanah Liat Tertentu Jenis Tanah Liat Tertentu Golongan C

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Dumai

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 36/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Sisa LB TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	1.128.084.395	1.128.084.395	
PPh	-	-	1.128.084.395	1.128.084.395	
PPh Pasal 21		-	598.959.545	598.959.545	
PPh Pasal 25/29		-	529.125.851	529.125.851	-
PBB			-		-
Bagi Rata				-	-
Bagian Pusat Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Pemda Prov	-	-	-		
Bagian Daerah Perkebunan		-	-	-	
Bagian Daerah Perhutanan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas	-	-			
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pemda Prov		-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-				-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-			
CHT	-	-	-		
SDA		302.465.289	5.255.803.124	617.156.670	4.638.646.454
Migas			5.255.803.124	617.156.670	4.638.646.454
Minyak Bumi 15%			[illegible]	617.156.670	4.217.773.084
Minyak Bumi 0,5%	-		[illegible]		420.873.370
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba			-	-	-
Iuran Tetap		-			-
Royalti	-		-		-
Panas Bumi	-		-		
Iuran Produksi	-	-	-		
Iuran Tetap		-	-	-	
Setoran Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan	-	302.465.289			-
IIUPH	-	-			
PSDH		-	-		
DR		302.465.289	-	-	-
Perikanan				-	-
Grand Total	-	302.465.289	[illegible]	1.745.241.065	4.638.646.454

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Dumai (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH s.d. TA 2019	LB Definitif TA 2020	Penyaluran LB DBH Sementara TA 2020 (PMK ... /PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang akan diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Pajak	12.244.130.735	-	6.593.421.880	10.145.???.518	1.305.355.556
PPh	?.?0?.?97.?96	-	6.457.869.930	654.153.659	1.305.355.556
PPh Pasal 21	?.?07.29?.807	-	6.262.377.600	-	105.355.556
PPh Pasal 25/29	1.0??.??4.?8?		195.472.330	77? 15?.?19	-
PBB	11.??7.1?7.???		2.041.761.090	?.??3.??5.074	-
Bagi Hasil	1.??1.?5? ?99		2??.???.??8	?.?2?.?70.?5?	-
Bagian Daerah Migas	7.77? 795.?91		1.1??.?3?.2??	?.??5.?0?.09?	
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan	1.??5.81? ???	-	5?0.4?? ???	77?.47?.4??	-
Bagian Daerah Perhutanan	12.??1.???		?.???.???	??.??5.??0	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	??? ??? ??7		?.??1.???	2??.??5.7?7	
Biaya Pemungutan Migas	1?? ??? ???	-	??.???.???	22?.???.???	
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Panas Bumi			-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	?1 ??4.???		2?.???.???	??.??8.???	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	??? ???		???.???	1.?.?.???	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7 1?? ???	-	??? ???	?.???.???	
CHT	?.???	-	-	? ???	-
SDA	?.??? ??? ???	??.??1.??3.??7	?.?1?.??? ???	?.??0.??? ???	??.??? ??? ???
Migas	??? ??? ???	??.??1.??? ???	?.??? ??? ???	??1.??8.???	??.??? ??? ???
Minyak Bumi 15%		??.??2.2??.016	?.?9?.??? ???		??.??0.??4.???
Minyak Bumi 0,5%	-	999.??? ???	1??.??? ???		1.??2.??? ???
Minyak Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 30%	??1.??0.???	-	1? ??? ???	??1.??? ???	
Gas Bumi 0,5%	11.??2.???	-	??? ???	? ??? ???	-
Gas Bumi dalam rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba	??? ??? ???		??.??? ???	??1.??? ???	-
Landrent					
Royalti	??? ??? ???		??.??? ???	??1.??? ???	
Panas Bumi	-	-			
Setoran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan	?.??? ??? ???		?.??0.??? ???	?.???.??? ???	
IIUPH	-	-	-		
PSDH		-	-	-	-
DR	?.???.??? ???		?.?10.??? ???	?.???.??? ???	-
Perikanan	1??.???.???		???.???.???		???.???.???
Grand Total	??.??? ??? ???	??.??? ??? ???	??.??? ??? ???	??.???.??? ???	??.???.??? ???

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kantor Pelaporan: (illegible rupiah)

URAIAN	ALOKASI	REALISASI	LB s.d TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2020 (KMK No. 378/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 378/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Migas			7.765.133.016	0.715.797.928	0.715.797.087
PPh	-	-	7.765.133.016	0.715.797.928	0.715.797.087
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 22/29	-	-	7.765.133.875	6.715.359.928	6.715.364.487
PBB			-	-	-
Cukai					
Sumber Daya Alam Migas					
Sumber Daya Alam Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Dana Bagi Hasil					
Bagian Daerah Penghasil Dana Alokasi Khusus					
Bagian Daerah Penghasil Dana Otonomi Khusus					
Bagian Daerah Penghasil Dana Keistimewaan					
Bagian Daerah Penghasil Dana Bagi Hasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Dana Bagi Hasil Non Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Penghasil Dana Bagi Hasil					
Bagian Pemerintah Pusat Penghasil Dana Alokasi Khusus					
Bagian Pemerintah Pusat Penghasil Dana Otonomi Khusus					
Bagian Pemerintah Pusat Penghasil Dana Keistimewaan					
DBH	-	-	-	-	-
DAU	-	1.827.1.1.875	-	-	-
Migas		-	-	-	-
Minerba (Batubara)					
Migas (Tanah Air)					
Migas (Tanah Air Laut Daerah Otonom)					
Pajak Bumi dan Bangunan	-				
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Kehutanan			-	-	-
Perikanan					-
Pertambangan					
Panas Bumi					
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Reboisasi					
Sub Total		1.827.1.1.875			
PPh					
PPh 21	-	-	-		
PPh 22/29	-	130.7.1.775	-	-	-
Pendapatan					-
Total Pusat		1.957.1.1.875	7.765.133.016	7.715.797.928	7.715.797.087

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pekanbaru

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	Alokasi Tahun 2021	Realisasi DBH Tahun 2020	Penyaluran DBH 2021 Sampai dengan PMK 70/2020 (s.d. Tgl 6/12/2021)	Alokasi DBH 2021 yang belum disalurkan	Alokasi DBH 2020 yang belum disalurkan
1	2	3	4	5	6
Pajak	81.063.000.000		61.949.331.000	20.043.978.000	-
PPh	43.749.210.410		33.001.000.000	23.873.309.000	
PPh Pasal 21	39.459.000.000		29.213.000.000	19.846.290.000	
PPh Pasal 25/29	5.290.210.410		1.788.000.000	4.027.019.000	
PBB	9.250.000.000	-	1.936.000.000	6.664.000.000	
BPHTB	1.063.000.000	-	265.000.000	798.000.000	
Cukai Hasil Tembakau	4.751.000.000	-	950.000.000	751.429.594	-
Pajak Daerah Non Migas				-	-
Pajak Daerah Lainnya					
Pajak Rokok	50.594.000		8.000.000	11.791.177	
Cukai Hasil Tembakau	107.000.000	-	25.000.000	8.000.000	
Pajak Rokok	21.000.000	-	3.000.000	205.000.000	-
Pajak Penerangan Jalan	280.000.000		42.000.000	31.000.000	-
Pajak Penerangan Jalan Migas					
Pajak Penerangan Jalan Non Migas					
Pajak Penerangan Jalan Non Migas	765.000		300.000	1.000.000	
Pajak Penerangan Jalan Migas	17.000.000	-	11.000.000	25.000.000	-
Pajak Penerangan Jalan Non Migas	7.000.000		200.000	6.800.000	-
DPH	10.000			10.000	
DBH	4.488.266.000	31.881.963.000	4.000.000.000	24.170.000.000	31.881.963.000
Migas	642.351.000	32.781.483.000	3.000.000.000	901.000.000	32.781.483.000
Minyak Bumi 15%	-	27.782.000.000	3.000.000.000	-	27.782.000.000
Minyak Bumi 0,5%		1.000.000	150.000	-	1.000.000
Minyak Bumi Hasil Pengolahan Blok					
Gas Bumi 15%	501.000.000		10.000.000	651.000.000	
Gas Bumi 0,5%	1.000.000			1.000.000	
Gas Bumi Hasil Pengolahan Blok	-	-			
Panas Bumi	140.351.000	-	90.000.000	251.000.000	
Pertambangan	-	-	-	-	-
Pertambangan	140.351.000	-	90.000.000	251.000.000	-
Pertambangan Umum					
Pertambangan Minyak	-	-			
Pertambangan Gas Bumi	-	-			
Pertambangan Panas Bumi	1.305.772.000	-	700.000.000	2.000.000.000	-
PPh				-	-
PPh 21	-				
PPh	3.202.772.000	-	700.000.000	2.000.000.000	
Perikanan	170.000.000	-	80.000.000	-	107.000.000
Cukai Tembakau	20.000.000.000	32.081.963.000	20.000.000.000	33.000.000.000	32.881.963.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Meranti

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR	KURANG BAYAR	TRANSFER KE DAERAH (PMK No. 65/PMK.07/2021)	Penyesuaian TRANSFER KE DAERAH (KEP.KEP-[illegible])	Setelah Penyesuaian TRANSFER KE DAERAH (PMK No. 226/PMK.07/2021)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) + (d)
Pajak			[illegible]	[illegible]	
PPh			[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21			[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 26 (2)			431.250.736	[illegible]	
PBB					
BPHTB					
Pajak Daerah Lainnya					
Bagian Daerah Perimbangan					
Bagian Daerah Pemerintah Daerah Lainnya					
Biaya Pemungutan Pajak					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
CHT					
SDA		242.511.636	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (OR)			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (OR)			[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi Hasil Pengolahan Kondensat					
Gas Bumi (OR)					
Gas Bumi (OR)					
Gas Bumi (OR)					
Panas Bumi			54.707.360		54.707.360
Pertambangan Umum			54.707.360		54.707.360
Kehutanan					
Perikanan					
Iuran Hak Pengusahaan Hutan					
Iuran Hasil Hutan					
Dana Reboisasi					
Pajak Penghasilan Pasal 21		61.614.636			
PPh					
PPh Pasal 26					
PPh Pasal 21		242.511.636			
Perikanan					
Pajak Penghasilan		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Meranti

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Sebelum DA 2020	LB Sebelum DA 2020	Penyaluran KB DBH Sebelum DA 2020 (PMK No. 67/PMK.07/2021)	KB DA 2020 yang belum disalurkan	LB DA 2020 yang belum disalurkan
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)-(c)	(e)=(b)-(c)
Total	33.971.108.763		9.858.999.000	17.712.259.963	10.948.430
PPh	3.303.444.357	-	2.713.634.907	589.809.451	-
PPh Pasal 21	2.888.748.741	-	2.544.884.907	343.863.834	-
PPh Pasal 25/29	414.695.616	-	168.750.000	245.945.617	-
PBB	30.667.664.406	-	7.137.365.000	16.948.035.205	10.881.630
Cukai Hasil Tembakau	1.791.113.998		267.089.700	1.524.024.298	
Pajak Penghasilan Migas	1.876.550.408		2.870.275.300	(1.110.724.892)	
Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor	3.108.475.961		309.443.000	1.799.032.961	-
Bagian Pemerintah Pusat - Pajak	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasilan	2.788.788.454	-	333.744.800	1.354.220.636	-
Bagian Daerah Sebelum Undang-Undang	51.823.830		95.280.000		(43.456.170)
Bagian Daerah Sebelum Undang-Undang	211.371.087		6.000.000	205.094.107	
Bagian Pemerintah Pusat - Migas	961.471.981		81.352.500	864.179.481	
Bagian Pemerintah Pusat - Pertambangan Panas Bumi	65.969.945	-	10.061.271	59.936.795	-
Bagian Pemerintah Pusat - Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat - Pertambangan	81.183.476		26.683.000	54.500.576	
Bagian Pemerintah Pusat - Perikanan	979.450		1.101.900		(122.450)
Bagian Pemerintah Pusat - Pertambangan Gas Bumi	1.195.697		136.900	1.058.797	-
DBH	2.125	-	-	2.125	-
DAU	33.971.874.455	52.300.110.026	8.038.611.300	3.736.018.275	58.970.755.700
Alokasi		31.679.999.814	8.711.119.200		8.480.120.114
Alokasi Dasar DAU		20.279.999.814	2.567.271.200		7.713.120.614
Alokasi Formula DAU		11.399.999.991	15.905.000		1.359.211.500
Alokasi Tambahan Belanja Pegawai			-	-	-
Dana Bagi Hasil	-	72.350.486	16.087.700	-	56.262.786
Dana Bagi Hasil	-	1.304.736	728.961	-	1.575.775
Dana Bagi Hasil Sebelum Undang-Undang	-	-	-	-	-
Alokasi	341.458.037	691.017.712	192.275.033	266.733.042	732.026.674
Alokasi		691.017.712	191.901.300		732.026.674
Alokasi	341.458.037		80.467.122	260.990.032	
Dana Desa					-
Dana Desa	-	-	-	-	-
Dana Desa	-	-	-	-	-
Belanja Daerah Penyesuaian					
Kebutuhan	4.801.190.186		1.026.901.372	2.760.274.013	
DAK					-
DAK	-	-	-	-	-
DBH	7.804.195.738	-	1.336.091.372	2.760.274.013	-
Perbedaan	173.190.080		310.561.700		2.697.020
Grand Total	29.044.000.817	52.300.110.026	12.010.000.000	21.190.259.951	58.981.998.370

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Jambi

(dalam rupiah)

URAIAN	Kurang Bayar TA 2019	Kurang Bayar TA 2019	Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 28/PMK.07/2021)	Penyesuaian Kurang Bayar TA 2020 (KEP-[illegible]/PK/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2020 ([illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 25/29	-	-	[illegible]		[illegible]
PBB		-	[illegible]	[illegible]	-
Bea Balik Nama		-	-	-	-
Pajak Daerah					-
Pajak Kendaraan Bermotor			[illegible]	[illegible]	
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			-	-	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			-	-	-
Pajak Rokok			-	-	-
Pajak Air Permukaan			-	-	-
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	-		[illegible]	[illegible]	
Pajak Sarang Burung Walet	-		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-		-	-	-
Pajak Opsen					-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-		-	-	-
Opsen Pajak Air Permukaan dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	-		-	-	-
Opsen Pajak Rokok	-		-	-	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-		-	-	-
Opsen Pajak Air Permukaan dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	-		-	-	-
Opsen Pajak Sarang Burung Walet	-		-	-	-
Opsen Pajak Opsen	-		-	-	-
Opsen Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-		-	-	-
Opsen Pajak Opsen Pajak Air Permukaan dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	-		-	-	-
Opsen Pajak Opsen Pajak Sarang Burung Walet	-		-	-	-
PBB	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
SDA	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (UU 7/2020)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (UU 4/2009)				-	-
Minyak Bumi Hasil Kegiatan Eksplorasi					
Gas Bumi (UU 7/2020)					
Gas Bumi (UU 4/2009)					
Gas Bumi Hasil Kegiatan Eksplorasi	-	-	-		
Pertambangan Umum	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Landrent		-	[illegible]	-	[illegible]
Royalti			-	-	-
Pertambangan Panas Bumi					
Landrent Pertambangan Panas Bumi					
Royalti Pertambangan Panas Bumi					
Kehutanan	-	-	-	-	-
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan		-	-	-	-
Perikanan		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
PNBP		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Pungutan Perikanan	-	[illegible]	[illegible]	-	-
Pertambangan		-	-	-	-
Jumlah		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Jambi

(Rupiah)

Jenis DBH	PB Tahun 2020	PB Sebelum Tahun 2020	Penyaluran DBH Sebelumnya (PMK No. 57/PMK.07/2021)	PB Tahun 2020 yang Belum Disalurkan	PB Tahun 2020 yang Telah Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	91.003.278.000	-	72.544.102.000	18.459.176.000	-
PPh	27.011.278.000	-	2.547.361.000	24.463.917.000	-
PPh Pasal 21	11.034.178.000	-	1.938.845.000	9.095.333.000	-
PPh Pasal 25/29	2.938.879.000	-	230.016.000	2.708.863.000	-
PPN	54.117.221.000	-	376.500.000	53.740.721.000	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sesuai Undang-Undang	33.536.668.000	-	3.760.231.000	29.776.437.000	-
Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan	9.811.668.000	-	961.661.000	8.850.007.000	-
Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan	23.724.000	-	19.956.000	3.768.000	-
Bagian Daerah dari Cukai Hasil Tembakau	3.702.421.000	-	878.807.000	2.823.614.000	-
Bagian Daerah dari Pajak Rokok	19.196.853.000	-	2.059.805.000	17.136.948.000	-
Dana Reboisasi Sesuai Undang-Undang	560.827.000	-	31.000.000	529.827.000	-
Dana Perimbangan Migas	1.783.571.000	-	589.777.000	1.193.794.000	-
Bagi Hasil Migas dari Sumber Daya Alam Migas	1.783.571.000	-	589.777.000	1.193.794.000	-
Bagi Hasil Migas dari Pajak Penghasilan	1.783.571.000	-	589.777.000	1.193.794.000	-
Bagi Hasil Migas dari Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Migas dari Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Pajak Sumber Daya Alam	4.546.416.000	-	1.248.000.000	3.298.416.000	-
Dana Perimbangan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi	4.546.416.000	-	1.248.000.000	3.298.416.000	-
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	700.915.000	-	668.000.000	32.915.000	-
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	700.915.000	-	668.000.000	32.915.000	-
CHT	2.010.738.000	-	50.345.000	1.960.393.000	-
DBH	72.762.010.000	-	4.758.787.000	67.003.223.000	-
Migas	63.280.023.000	-	1.631.240.000	61.648.783.000	-
Minyak Bumi (85%)	5.937.937.000	-	1.131.979.000	4.805.958.000	-
Minyak Bumi (0,5%)	11.097.000	-	2.000.000	9.097.000	-
Minyak Bumi dalam Wilayah Laut	-	-	-	-	-
Gas Bumi (70%)	57.331.089.000	-	499.261.000	56.831.828.000	-
Gas Bumi (0,5%)	974.000.000	-	3.240.000	970.760.000	-
Gas Bumi dalam Wilayah Laut	-	-	-	-	-
Minerba	1.620.046.000	-	1.308.781.000	311.265.000	311.265.000
Iuran Tetap	72.000.000	-	102.320.000	-	13.546.000
Royalti	1.548.046.000	-	1.206.461.000	311.265.000	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	1.068.772.000	-	1.000.000.000	68.772.000	-
PSDH	968.772.000	-	761.000.000	207.772.000	-
DBHDR	-	-	-	-	-
PSDH	6.772.171.000	-	1.041.628.000	5.730.543.000	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah DBH	38.762.501.000	-	2.041.270.000	36.721.231.000	324.811.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Barang/Jasa

(Dalam ribuan)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak			107.902.270	107.902.270	
PPh	-		31.956.721	31.956.721	
PPh Pasal 21	-	-	31.956.721	31.956.721	
PPh Pasal 22/26	-	-	-	-	
PBB		-	25.145.549	25.145.549	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]				-	-
[illegible]			10.471.223	10.813.020	
[illegible]	-				
[illegible]	-	-			
[illegible]		-	-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]	-		-229.126	-229.126	
[illegible]	-	-			
[illegible]		-	-	-	-
[illegible]				-	-
[illegible]					
[illegible]	-				
[illegible]	-	-2.705.344	999.426.047	999.426.047	1.249.709.050
[illegible]	-	-	362.845.070	362.845.070	540.749.850
[illegible]			139.014.717	201.164.024	339.703.435
[illegible]			41.020.262	-	41.020.262
[illegible]					
[illegible]	-				
[illegible]	-	-			
[illegible]	-	-			
[illegible]	-	-	709.040.406	-	709.960.438
[illegible]				-	-
[illegible]			708.080.708	-	709.960.438
[illegible]					
[illegible]	-				
[illegible]	-	-	-		
[illegible]		-	-	-	-
[illegible]		143.793.014		-	-
[illegible]					
[illegible]	-	914			
[illegible]	-	143.792.730	-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]		112.790.024	1.803.727.047	537.078.794	1.309.709.585

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bintang Hari

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	KB DBH TA 2021	(-) Penyaluran DBH TA 2021	Penyaluran DBH Desember s.d 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	DBH TA 2020 yang telah disalurkan	KB DBH TA 2020 yang belum disalurkan
1	2	3	4	5 (4-3)	6
Pajak	327.804.822.770	-	6.402.780.250	11.649.133.020	(11.813.716)
PPh	1.776.727.815	-	603.950.000	1.206.204.615	-
PPh Pasal 21	1.336.744.519	-	749.1 – 550	294.502.070	-
PPh Pasal 25/29	279.111.291	-	47.877.350	0 504.955	-
PBB	50.016.870.070	-	6.307.048.400	28.03 285.334	(11.813.716)
BPHTB	195 655 395	-	300.000.000	1.790 270.278	-
Cukai Hasil Tembakau	16.776.69 781	-	5.215.1 [illegible]	11.[illegible] 270.189	-
Pungutan Hasil Perikanan	37.[illegible] 785	-	153.111.000	-	98.014.414
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Pajak Parkir	27.1.200.161	-	700.026.602	565 279 [illegible]	-
Pajak Air Permukaan	7.[illegible] 108 [illegible]	-	1.[illegible] 587.701	5.[illegible] 079.334	-
Pajak Rokok	18 [illegible] 267	-	5.[illegible]	200.[illegible]	-
Pajak Hotel	487 174 243	-	110.125.[illegible]	200.[illegible]	-
Pajak Penerangan Jalan Non Migas	1.[illegible]	-	4 [illegible]	-	[illegible]
Pajak Penerangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Perkotaan	97 [illegible]	-	20.[illegible]	[illegible]	-
Pajak Pengambilan Bahan Galian C	387.236.1 [illegible]	-	50.[illegible]	[illegible]	-
Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
CHT	[illegible]	-	5.[illegible]	2.[illegible]	-
DBH	27.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DBH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Minyak Bumi 15%	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Minyak Bumi 0,5%	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Alat Berat	-	-	-	-	-
Gas Bumi (84%)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi (0,5%)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Landrent	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Royalti	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Sebagian Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PSDH	-	-	-	-	-
DBHPDH	-	-	-	-	-
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Buleleng

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KETERANGAN	PENETAPAN	Kurang Bayar (PMK 73/PMK.07/2021)	Penyesuaian (PMK 134/PMK.07/2021)	Lebih Bayar (PMK 73/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)
Pajak			135.347.373	893.833.067	1.029.180.440
PPh			62.787.116	218.018.721	280.805.837
PPh Pasal 21			62.787.116	218.018.721	280.805.837
PPh Pasal 25/29					
PBB			72.560.257	675.814.346	748.374.603
Reg. Kota					
Bagian Daerah Lainnya					3.141.930.717
Bagian Daerah Non Migas			10.745.858	181.078.948	
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan			121.018.473	712.754.119	
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					
Bagian Daerah Penghasil Perikanan					
Bagian Daerah Penghasil Pertanian					
Bagian Daerah Penghasil Migas			91.841.153		3.141.930.717
Bagian Daerah Penghasil Non Migas			20.035.273	20.035.273	
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan					
Bagian Daerah Penghasil Perikanan			19.441.040	19.441.040	
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					
Bagian Daerah Penghasil Pertanian					
PPh					
PBB		52.929.215	152.568.736		100.639.521
Migas					
Migas: Dana 15%					
Migas: Dana 3,1%					
Migas: Dana Bagian Daerah Penghasil					
Gas Bumi 20%					
Gas Bumi 7,5%					
Gas Bumi Bagian Daerah Penghasil					
Minyak Bumi			97.362.779		194.658.168
Minyak Bumi			97.362.779		194.658.168
Panas Bumi					
Panas Bumi					
Pertambangan					
Pertambangan Umum					
Kehutanan		50.605.215			
IHPH					
PSDH		50.605.215			
Perikanan					
Kekurangan		50.605.215	6.[illegible].514	895.900.261	3.535.709.143

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bontang

(Dalam rupiah)

Uraian DBH	KB DBH TA 2021	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH TA 2020 (Kepmenkeu 420/2020)	KB DBH TA 2020 yang Belum Dapat Disalurkan	LB DBH TA 2020 yang Belum Dapat Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	9.999.767.669	2.110.000.801	2.127.750.000	6.762.767.669	2.892.417.669
PBB	3.307.000.769		1.308.000.000	1.999.000.769	
PBB Migas	2.972.000.969		1.302.750.000	1.669.250.969	
PBB Panas Bumi	335.000.800		5.250.000	329.750.800	
PDD	6.343.666.584	2.499.882.801	2.104.500.000	4.740.166.584	2.892.417.669
Cukai Hasil	1.997.000.000	-	265.000.000	1.732.000.000	-
Pungutan Lainnya Migas		2.499.882.801	120.000.000	-	2.379.882.801
Bagian Daerah Penghasil Migas	1.811.000.000		1.717.500.000	93.500.000	
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Batubara	-	91.882.801	97.000.000		189.882.801
Bagian Daerah Perikanan	3.497.666.584	-	1.107.000.000	2.390.666.584	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.000.000	-	8.000.000	207.000.000	-
Biaya Pemungutan Migas		98.000.000	12.000.000	-	86.000.000
Biaya Pemungutan Non Migas	19.000.000		3.000.000	16.000.000	
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-			-	
Biaya Pengawasan Perikanan	-	1.772.800	5.000.000	-	3.227.200
Biaya Pengawasan Kehutanan	105.647.000		15.000.000	90.647.000	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	9.368.000		2.000.000	7.368.000	-
DBH	4.599.000		3.000.000	1.599.000	
SDA	20.597.213.485	91.212.979	2.000.000.000	18.688.000.000	222.212.979
Migas	10.872.708.000	-	838.000.000	10.034.000.000	-
Minyak Bumi (15%)	1.140.000.000	-	256.000.000	884.000.000	-
Gas Bumi (30%)	9.732.000		2.000.000	98.000.000	-
Dana Bagi Hasil Migas Sebelum Dipotong Otsus					
Dana Bagi (69,5%)	5.727.791.000		760.000.000	4.967.791.000	
Dana Bagi (0,5%)	196.276.000		78.000	196.000.000	
Dana Bagi Tambahan Bagian Migas (50%)	-	-	-		
Minerba	9.724.505.485	91.212.979	1.162.000.000	8.562.505.485	91.212.979
Landrent	91.212.979	91.212.979	20.000.000	-	91.212.979
Royalti	9.633.292.506		1.142.000.000	8.491.292.506	-
Panas Bumi					
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	
Dana Tambahan Bagian Panas Bumi	-	-	-	-	
Kehutanan	1.287.453.728		315.713.000	1.021.740.728	-
PSDH	-				
DR	1.287.453.728	-	315.713.000	1.021.740.728	
Perikanan	150.156.000	-	810.000.000	-	187.844.000
Total	21.227.024.402	2.202.213.780	6.170.963.000	21.227.024.402	3.157.950.780

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kerinci

(dalam rupiah)

Uraian DBH	KB T - 1(2)	KB T-2019	PMK No. 82/PMK.07/2021	Penyelesaian PMK No. 7/PMK.7/2021	Selisih KB T-2019 dengan PMK No. 82/PMK.07/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-3)
Pajak			72.161.720	21.631.679	50.529.960
PPh			72.161.720	21.631.679	50.529.960
PPh Pasal 21			72.161.720	21.631.679	50.529.960
PPh Pasal 25/29					
PBB					
Cukai Hasil Tembakau					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Daerah Kehutanan (PSDH)					
Bagian Pertambangan Minerba					
Bagian Pertambangan Non Migas					
Bagian Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Perikanan					
Bagian Pertambangan Minyak Bumi					
Bagian Pertambangan Gas Bumi					
Cukai					
DBH Sawit		61.446.115			
Migas					
Bagian Dana 15%					
Bagian Dana 30%					
Bagian Dana Migas Tambahan Earning					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi Bagian Dana Migas					
Kehutanan					
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi					
Dana Provinsi					
Dana Kabupaten					
Bagian Kabupaten/Kota Penghasil					
Pertambangan		21.061.115			
DAK					
DTPH					
PSDH		21.186.113			
Perikanan					
Jumlah Total		21.061.115	72.161.720	21.631.679	50.529.960

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kas Kolom

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	KB DBH TA 2021	Penyaluran KB DBH Sesuai PMK No. 134/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang belum Direkonsiliasi	LB TA 2020 yang belum Direkonsiliasi
1	2	3	4	5=2-4	6
Pajak	4.717.074.730		949.179.654	3.767.895.076	68.189.730
Cukai	1.710.342.782		691.175.320	1.019.167.462	
Sumber Daya Alam	1.990.186.189		601.314.309	1.388.871.880	
Dana Reboisasi	132.016.760		48.900.530	83.116.230	
DBH	2.864.935.796		397.301.120	2.467.634.676	72.132.790
Migas	1.647.656.196		205.999.720	1.441.656.476	
Kurang Salur Migas	15.495.729		69.455.530		71.076.479
Kurang Salur Kurang Bayar Migas					
Kurang Salur Lebih Bayar Migas	171.116.841		73.205.190	97.911.651	
Kurang Salur Kurang Bayar PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi/Badan					
Kurang Salur Pemotongan PPh Pasal 21	454.657.224		117.621.205	337.036.019	
Kurang Salur Pemotongan PPh Pasal 23	276.690.209		8.654.530	268.035.679	
Kurang Salur Lainnya Migas	98.182		8.321.530		8.174.348
Kurang Salur Kurang Bayar Pasal Migas					
Kurang Salur Pemotongan Pasal Migas	3.703.191		12.276.207	8.573.016	
Kurang Salur Pemotongan PPh Pasal 21					
Kurang Salur Pemotongan PPh Pasal 23	17.651.333		5.625.603	12.025.730	
Kurang Salur Pemotongan Sektor Lainnya	6.282.173		1.156.551	5.125.622	
PPh	111.913.103		90.000.271	21.912.832	
PPN	11.706.211.476		1.470.032.588	10.236.178.888	32.084.029
Migas	10.550.105.125		320.733.607	10.229.371.518	
Kurang Salur Migas	145.467.609		268.136.516	86.670.093	
Kurang Salur Lainnya Migas	89.258.979		9.479.707	79.779.272	
Kurang Salur Kurang Bayar Migas					
Kurang Salur Lebih Bayar Migas					
Pajak Daerah	9.010.121.826		1.170.000.000	7.840.121.826	
Opsen Pajak	101.229.650		70.000.000	31.229.650	
Opsen Pajak Dalam Rangka Otsus					
Otsus	309.490.050		309.490.050	1.917.197.045	
Kurang Salur					
Jumlah	7.207.140.050		315.135.495	1.917.197.045	
Dana Otsus					
Otsus Provinsi					
Otsus Kab/Kota					
Dana Bagian Dari Pemerintah Daerah Lainnya					
Kehutanan	123.309.470		309.490.050	1.917.197.045	
Lainnya					
Tertentu					
Jumlah	1.254.062.471		279.130.000	1.974.932.471	
Kurang Salur	153.173.960		315.60 .010		162.826.040
Grand Total	3.003.[illegible].684		2.545.[illegible].955	3.731.[illegible].931	162.826.040

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Merangin

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	ALOKASI	REALISASI	KURANG BAYAR (PMK Nomor 65/PMK.07/2021)	PENYESUAIAN (PMK Nomor 9/PMK.07/2021)	LEBIH BAYAR (PMK Nomor 71/PMK.07/2021)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
Pajak			269.874.404	723.743.859	453.257.455
PPh			917.471.830	293.763.970	723.237.860
PPh Pasal 21	-	-	316.420.020	293.764.060	122.656.040
PPh Pasal 25/29	-	-	201.051.774		201.051.774
PBB	-	-	101.121.010		101.121.010
Pajak Rokok	-	-			
Pajak Daerah (Pajak)	-	-	-		
Pajak Daerah (Pajak Pusat)	-	-	-	-	-
Pajak Daerah (Pajak Provinsi)	-	-	-	-	-
Pajak Daerah (Pajak Kabupaten)	-	-	256.021.105		153.012.795
Pajak Daerah (Pajak Lainnya)	-	-	-		
Pajak Penerangan (Pajak)	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan (Pajak Pusat)	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan (Pajak Provinsi)	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan (Pajak Kabupaten)	-	-	6.031.405	-	6.031.405
Pajak Penerangan (Pajak Lainnya)	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	6.320.847	110.701.756		410.025.907
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi (15%)	-	-	-		
Minyak Bumi (3,5%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (Tambahan Bagian Pusat)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (30%)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (DAK)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (Tambahan Bagian Pusat)	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	-	610.303.456		410.293.198
Pertambangan	-	-	510.000.156		110.000.198
Pajak			-		
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Tambahan Bagian Pusat)	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	64.920.572	-		
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH	-	56.920.572	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-		
Total	-	64.920.572	1.138.647	723.743.859	905.255.052

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Keb. Merangin

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Pengalokasian DBH Semester II Tahun 2020 (Perpres 123/2020)	PB TA 2020 yang Telah Dialokasikan	LB TA 2020 yang Belum Dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	4.951.284.779	-	1.862.054.850	3.089.229.929	108.014.774
Bea	2.178.908.490	-	1.289.050.600	889.857.890	-
PPh Pasal 21	1.822.886.061	-	1.213.479.702	592.177.302	-
PPh Pasal 25/29	356.022.429	-	58.803.698	112.430.681	-
BPHTB	2.165.062.012	-	665.710.800	2.915.294.136	215.924.076
Jasa Mara	391.954.953	-	161.038.700	1.796.170.365	-
Dasar Lelang Negara	167.809.535	-	2....	-	125.903.965
Tarif Dasar Pajak Mineral	22.975.070	-	7.245.500	16.015.100	-
Pajak Rokok Pasal Dalam	-	-	-	-	-
Pajak Rokok Pasal Perusahaan	-	-	-	-	-
Pajak Rokok Pasal Perusahaan	351.05....	-	95.772.900	256....	-
Dana Bagi Hasil Sektor Jalan ya	2....	-	5....	700....	-
Dana Kompensasi Khusus	4.833.407	-	5....	-	5....
Pajak Penerangan Jalan Umum	678.574	-	1....	668....	-
Pajak Penerangan Perusahaan	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Perusahaan	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Perkebunan	8.916.604	-	3....	10....	-
Pajak Pertambahan Nilai Barang	62....	-	5....	6....	-
DBH	1....	-	1....	1....	-
Total	10....	-	261.573.575	14....	347....
Migas	10....	-	2....	10....	-
Migas Jenis I	1....	-	2....	2....	-
Migas Jenis II	36....	-	8....	28....	-
Migas Dari Kegiatan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pajak Bumi	1....	-	45....	1....	-
Bea Perolehan	2....	-	9....	12....	-
Bea Perolehan Pengalihan	-	-	-	-	-
Minerba	1....	-	177....	2....	-
Royalti	638....	-	33....	90....	-
Iuran	2....	-	144....	1....	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Kehutanan	771....	-	228....	1....	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Provisi	-	-	-	-	-
Total	1....	-	228....	1....	-
Perikanan	154....	-	4....	-	157....
Total	22....	-	3....	1....	2....

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mamberamo Tengah

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
[illegible]		-	-	-	-
PPh			-	-	-
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB					
Bagi Rata	-				
Bagian Daerah Hasil	-	-			
[illegible]		-	-		-
[illegible]		-	-		-
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	-	-		
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]					
[illegible]	-		-		
[illegible]	-		-	-	-
[illegible]					-
BHA		21.2xx.210	3.874.404.122	1.748.899.787	2.125.504.335
Migas			2.713.482.885	1.748.899.787	964.583.098
Migas Bagian Pusat	-	-	1.356.741.217	1.748.899.787	(392.158.570)
Migas Bagian Daerah	-	-	1.356.741.668	-	1.356.741.668
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]				-	-
[illegible]					
[illegible]			127.570.892		127.570.892
[illegible]	-	-	127.570.892		127.570.892
[illegible]	-	-	-		
Panas Bumi		-	-	-	-
[illegible]				-	-
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	0x,xxx,xxx	-		
[illegible]		-	-		-
[illegible]		[illegible]			
[illegible]		[illegible]			
[illegible]					
Grand Total	-	0x,xxx,xxx	3,87x,xxx,xxx	1,74x,xxx,xxx	2,12x,xxx,xxx

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Muara Jambi

(Dalam rupiah)

Jenis DBH	PB Definitif TA 2020	LO Definitif TA 2021	Penyaluran PB DBH Semester II TA 2020 (PMK No. 57/PMK.07/2021)	PB TA 2020 yang telah disalurkan	PB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	87.016.270.946	-	5.445.105.162	29.010.090.315	
PBB	1.087.090.663	-	1.361.636.530	105.362.135	
BPHTB Gross	3.045.611.161	-	1.324.612.752	1.503.969.105	
BPHTB Kota/Kab	1.015.121.907		50.020.502	101.965.104	
PBB	30.571.791.102		1.080.505.102	27.063.21.486	
Cukai Rokok	34.356.650		21.064.752	1.716.020.797	
Dagang Dalam Negeri	17.797.373.553		6.015.116.003	12.783.430.798	
Dagang Dalam Negeri Migas	177.252.561	-	16.642.902	161.980.734	
Dagang Dalam Negeri Gross		-			
Dagang Dalam Negeri Non Migas	17.617.120.992	-	53.867.901	283.975.099	
Dagang Dalam Negeri Migas	2.452.668.271		6.106.186.102	7.275.45[illegible]	
Dagang Luar Negeri Gross	2.458.639.072		5.005.802	6.033.994.007	
Biaya Pemungutan Migas	317.343.450	-	140.264.762	491.681.723	
Biaya Pemungutan Non Migas	3.921.003	-	-87.000	1.795.260	
Biaya Pemungutan Luar Negeri					
Biaya Pemungutan Perpajakan	6.089.961		5.750.702	6.656.951	
Biaya Pemungutan Non Migas	304.856.[illegible]		78.01[illegible]	000.000.[illegible]	
Biaya Pemungutan Cukai	4.098.710	-	81.710	6.000.010	
PTT	7.641.015	-	-87.000	2.000.722	
SDA	1.727.414.102	-37.000.102	1.302.478.575	9.75[illegible]	1.011.101.102
Migas	9.081.000.000	-37.000.102	1.000.000	0.0[illegible]	1.[illegible]
Minyak Bumi (35%)	-	110.9[illegible]	3[illegible]	-	1.66[illegible]
Gas Bumi (30%)	-	37.000.[illegible]	1.000.000		38.[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi (30%)	6.[illegible]	-	40.261.000	3.[illegible]	
Gas Bumi (6%)	[illegible]	-	824.000	-0.[illegible]	
Gas Bumi (6%) dalam Rangka Otsus					
Mineral	3.021.[illegible]		[illegible]	547.[illegible]	
Kehutanan	457.[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	2.[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Daerah					
Pajak Rokok					
Retribusi					
Kehutanan	2.[illegible]		[illegible]	[illegible]	
IUP					
IIUPH					
PSDH	2.[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Reforestasi	.[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Jumlah Total	47.756.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lamp. Sandingan

(dalam rupiah)

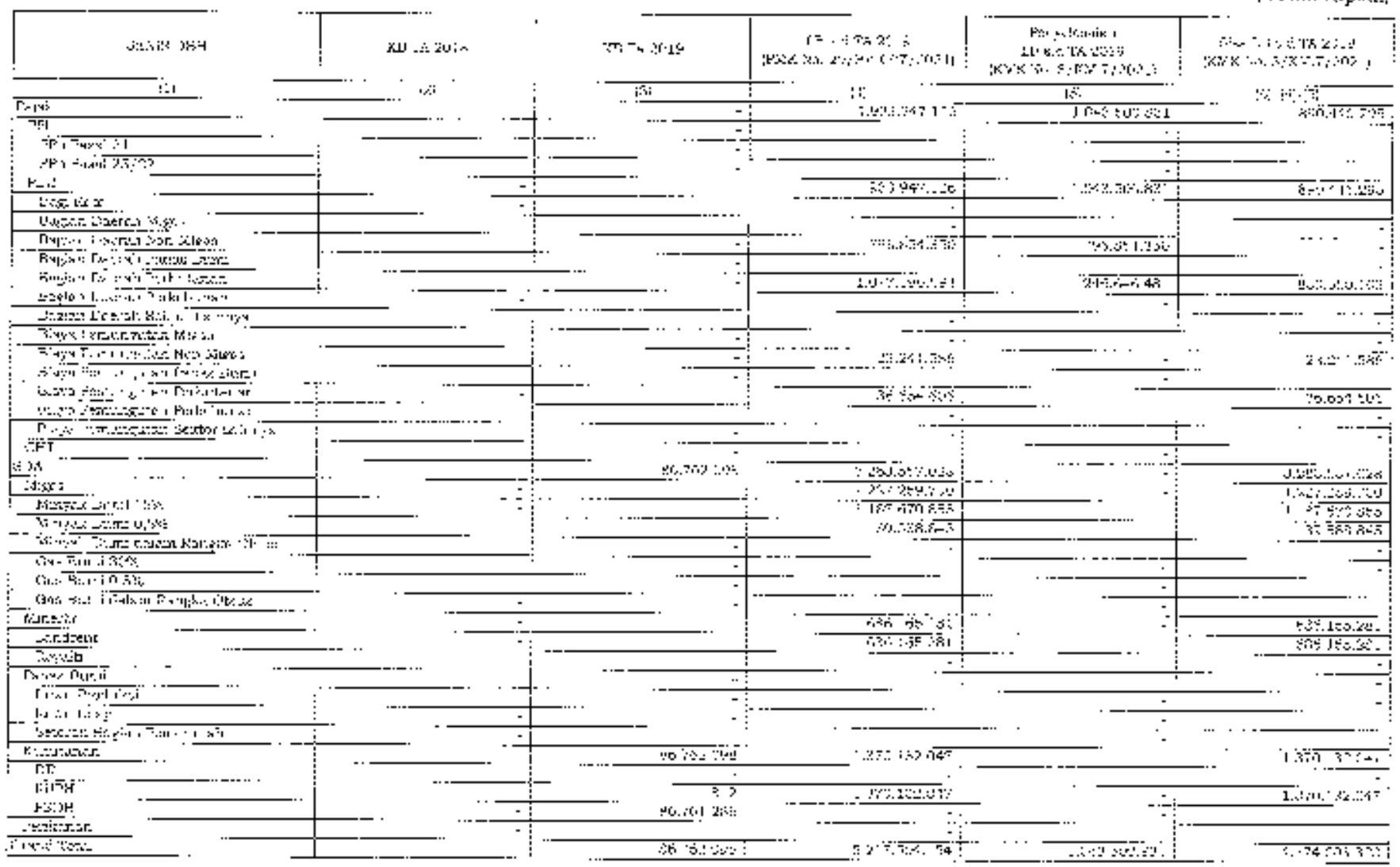

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Seribu

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Pagu Alokasi DBH Berdasarkan PMK 226/PMK.07/2021	PB TA 2020 yang Belum Dibayarkan	LB TA 2020 yang Belum Dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6) = (3)-(4)
Pajak	20.547.877.137		3.960.191.630	16.587.685.507	-
PPh	3.078.200.013	-	3.099.670.847	1.082.021.313	-
PPh Pasal 21	1.933.979.487	-	1.962.344.107	970.635.380	-
PPh Pasal 25/29	197.428.010	-	43.795.960	153.632.050	-
PPN	20.781.709.639		4.640.731.501	16.140.978.138	
Cukai Hasil Tembakau	891.959.958		183.281.709	1.708.678.249	
Pungutan Progresif Tembakau	7.831.579.630		1.611.721.108	6.219.858.522	-
Pungutan Progresif Pertambangan Minyak Bumi	9.677.256.669		1.625.701.101	8.051.555.568	-
Pungutan Progresif Pertambangan Gas Bumi					-
Pajak Penghasilan Pasal 21 Perorangan	1.730.110.121		43.796.960	1.686.313.161	-
Pajak Penghasilan Pasal 21 Perusahaan	5.070.025.995		407.293.960	4.634.804.960	-
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi	3.165.685.700		2.60[illegible]	707.[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan	938.[illegible]5.700		[illegible]	148.[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26	60.[illegible]	-	39.[illegible]	20.[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Final					-
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final	46.699.501		15.747.030	30.951.[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 15	246.486.506		37.[illegible]	191.[illegible]	-
Pajak Penghasilan Selain Lainnya	6.[illegible]		2[illegible]	3.[illegible]	-
PPTS	7.[illegible]	-	2.[illegible]	3.[illegible]	-
BPHTB	15.[illegible].[illegible].[illegible]	2[illegible].[illegible].[illegible]	3.[illegible].[illegible].[illegible]	21.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Cukai	9.[illegible].[illegible].[illegible]	149.[illegible].[illegible]	200.[illegible].[illegible]	3.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Minyak Bumi		1.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Minyak Bumi PPh 22	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Pungutan Daerah	-	-	-	-	-
Gas Bumi PPh	6.[illegible].[illegible].[illegible]	-	15.[illegible].[illegible]	3.[illegible].[illegible]	-
Gas Bumi PBG	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Gas Bumi Pajak Penghasilan Pasal 22		-	-		
Minerba	5.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Panas Bumi	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Perikanan	-		-	-	-
Pajak Tambang Lainnya	-		-	-	-
Setoran Kekurangan Pembayaran					
Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
PNBP	-			-	-
Migas	-		-	-	-
PNBP	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Pertambangan	159.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Jumlah Total	42.387.516.797	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tanjung Jabung Barat

(dalam rupiah)

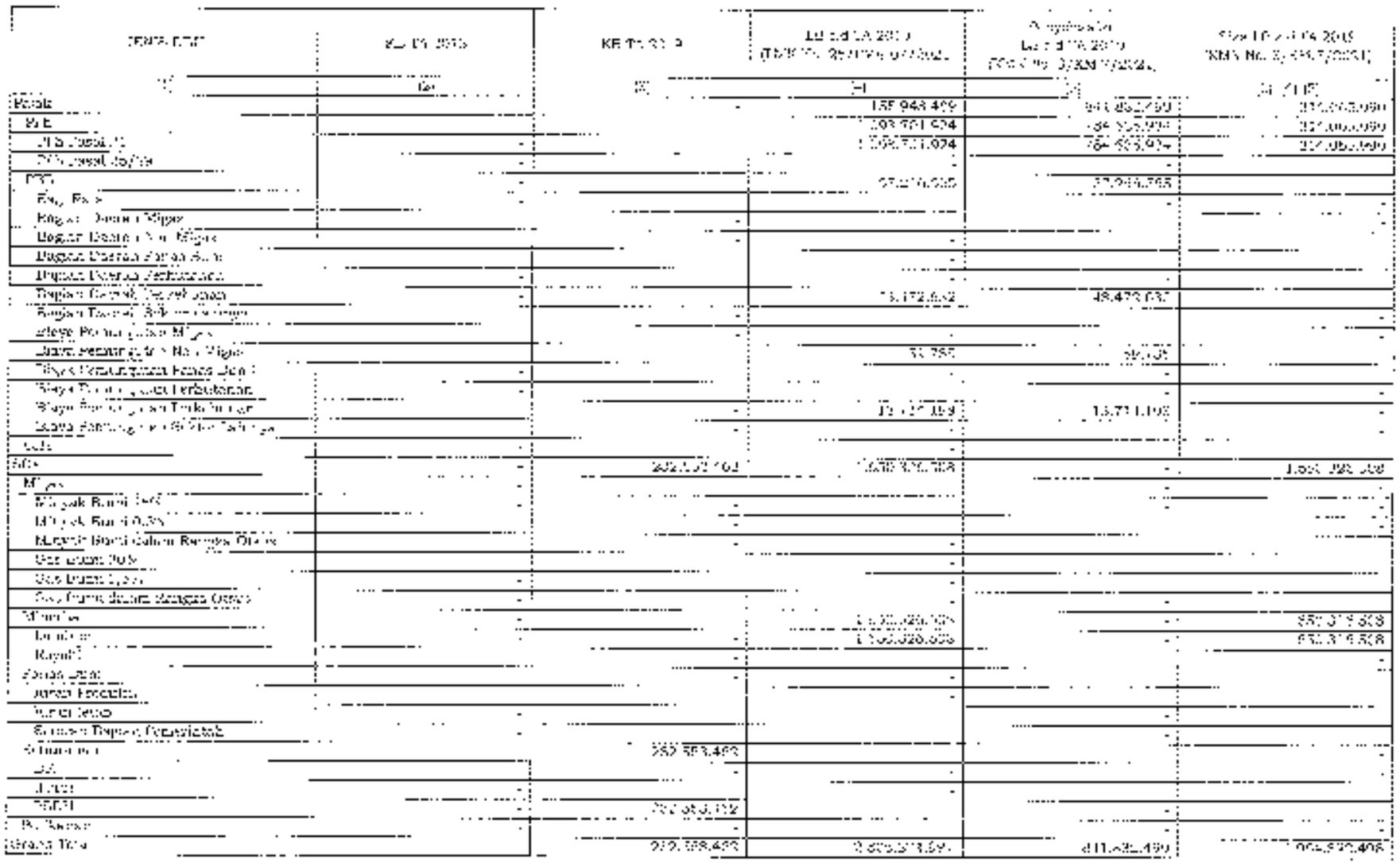

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tanjung Jabung Barat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2020	LB Sebelum TA 2020	Penyaluran DBH Bln Januari s.d. Desember TA 2021 (PMK No. 226/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum dikembalikan	LB TA 2021 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bea Hasil	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Daerah Penghasil Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Daerah Penghasil Non Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Daerah Penghasil Panas Bumi	-		-	-	-
Daerah Penghasil Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Daerah Penghasil Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Daerah Penghasil Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Daerah Penghasil Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Daerah Penghasil Pertanian	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi	-		-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Daerah Penghasil Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Daerah Penghasil Pertambangan Mineral dan Batubara	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DBH	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pagu	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kategori Daerah TA	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kategori Daerah TA	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kategori Daerah Daerah Lainnya Tertentu	-		-	-	-
Alokasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kekurangan		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Lebihan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Tahun Pajak	-		-	-	-
Tahun Pajak	-		-	-	-
Tahun Pajak	-		-	-	-
Kekurangan Penyaluran TA [illegible]					
Kekurangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Tahun	-		-	-	-
Tahun	-		-	-	-
Lebihan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Perubahan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tanjung Jabung Timur

(dalam ribuan rupiah)

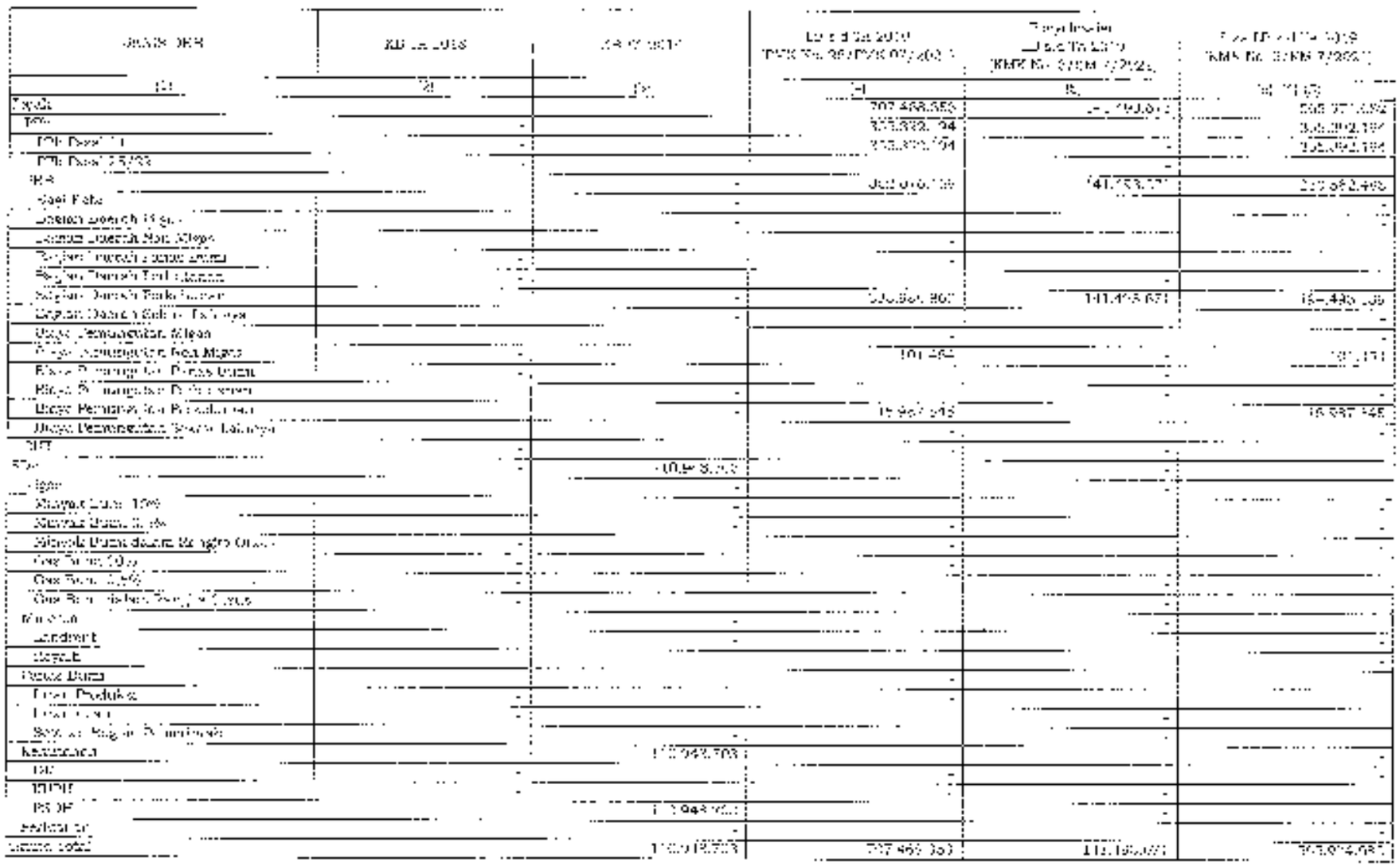

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tanjung Jabung Timur

(dalam rupiah)

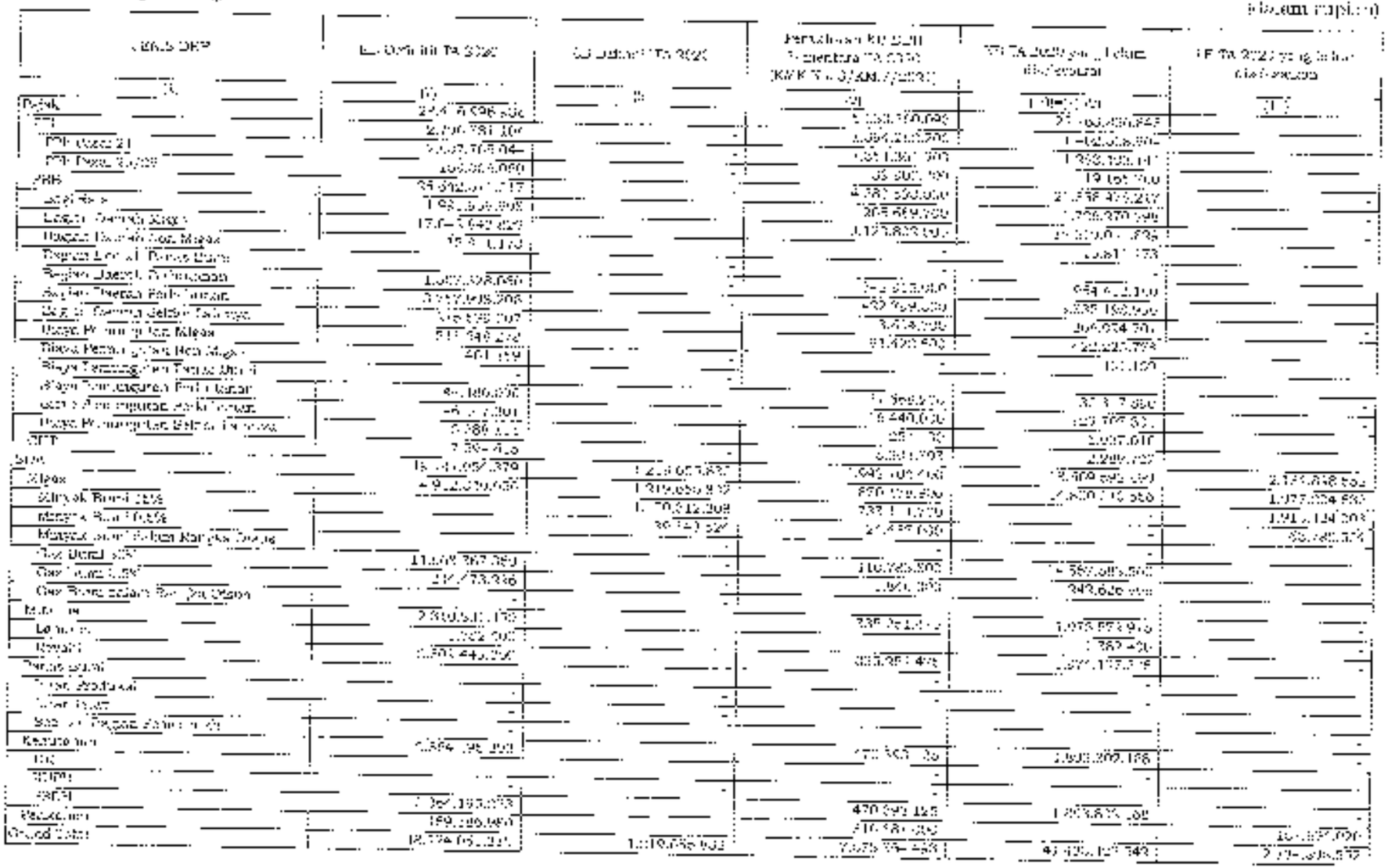

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lab. Tabel

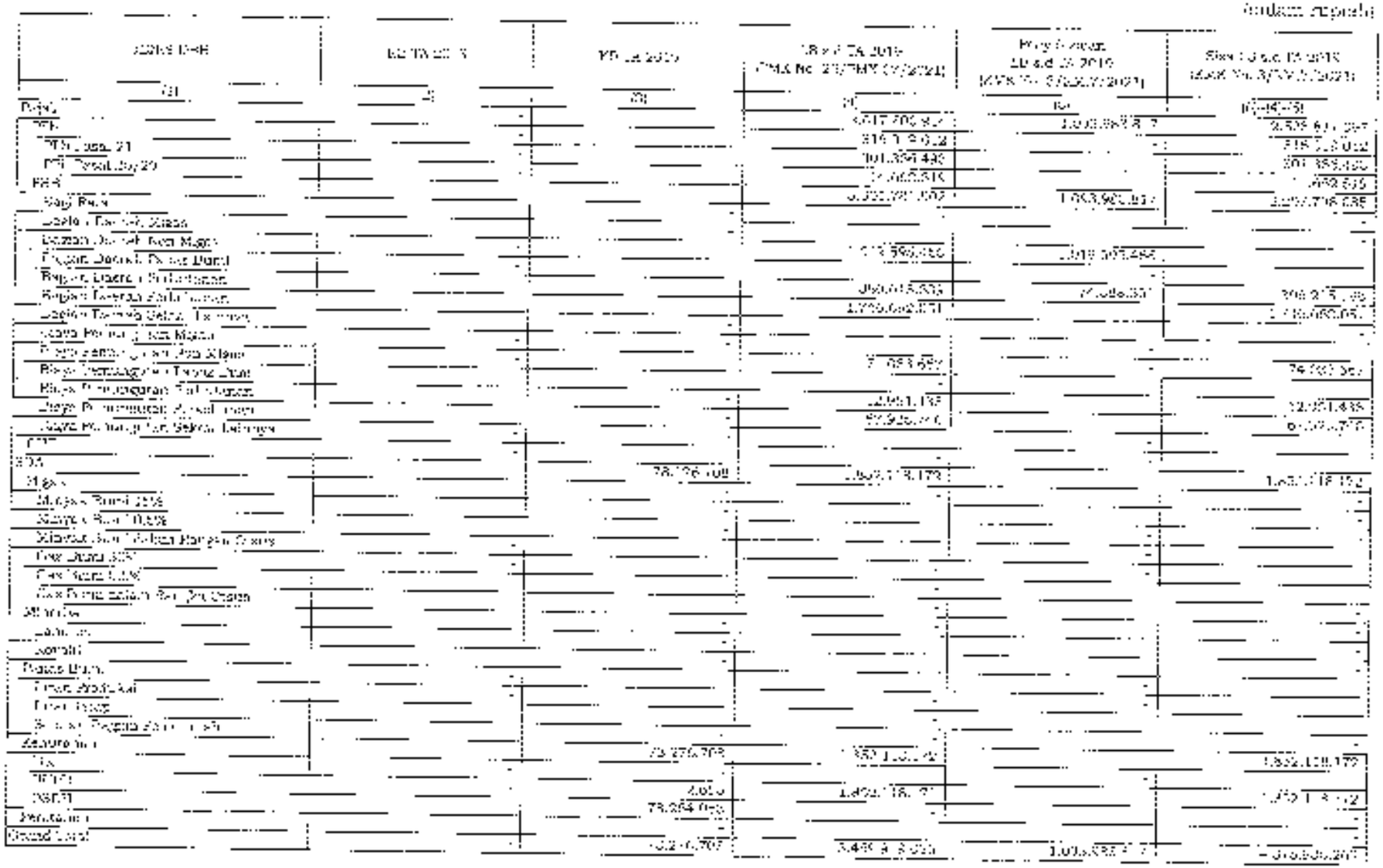

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tebo

(dalam rupiah)

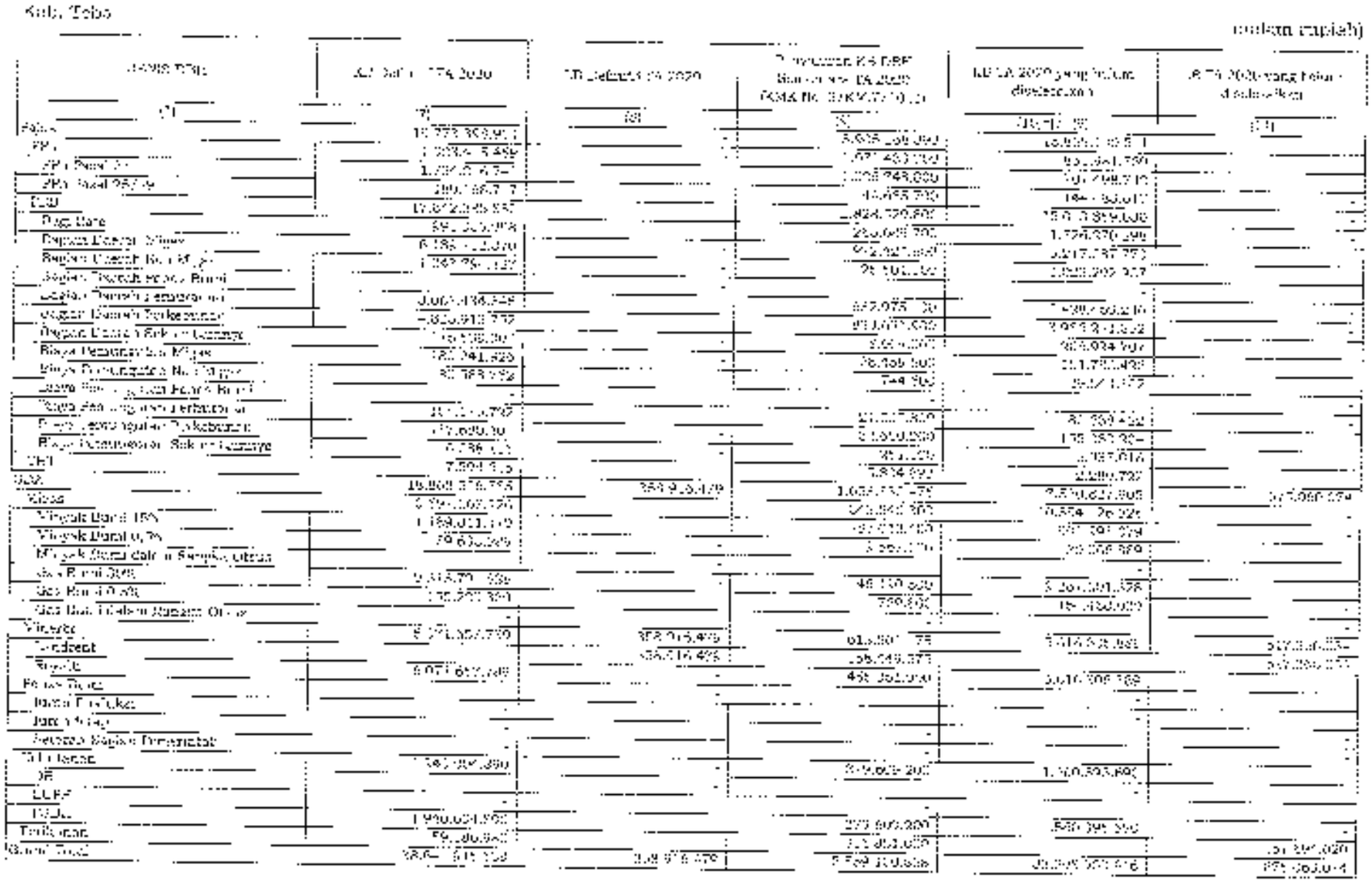

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

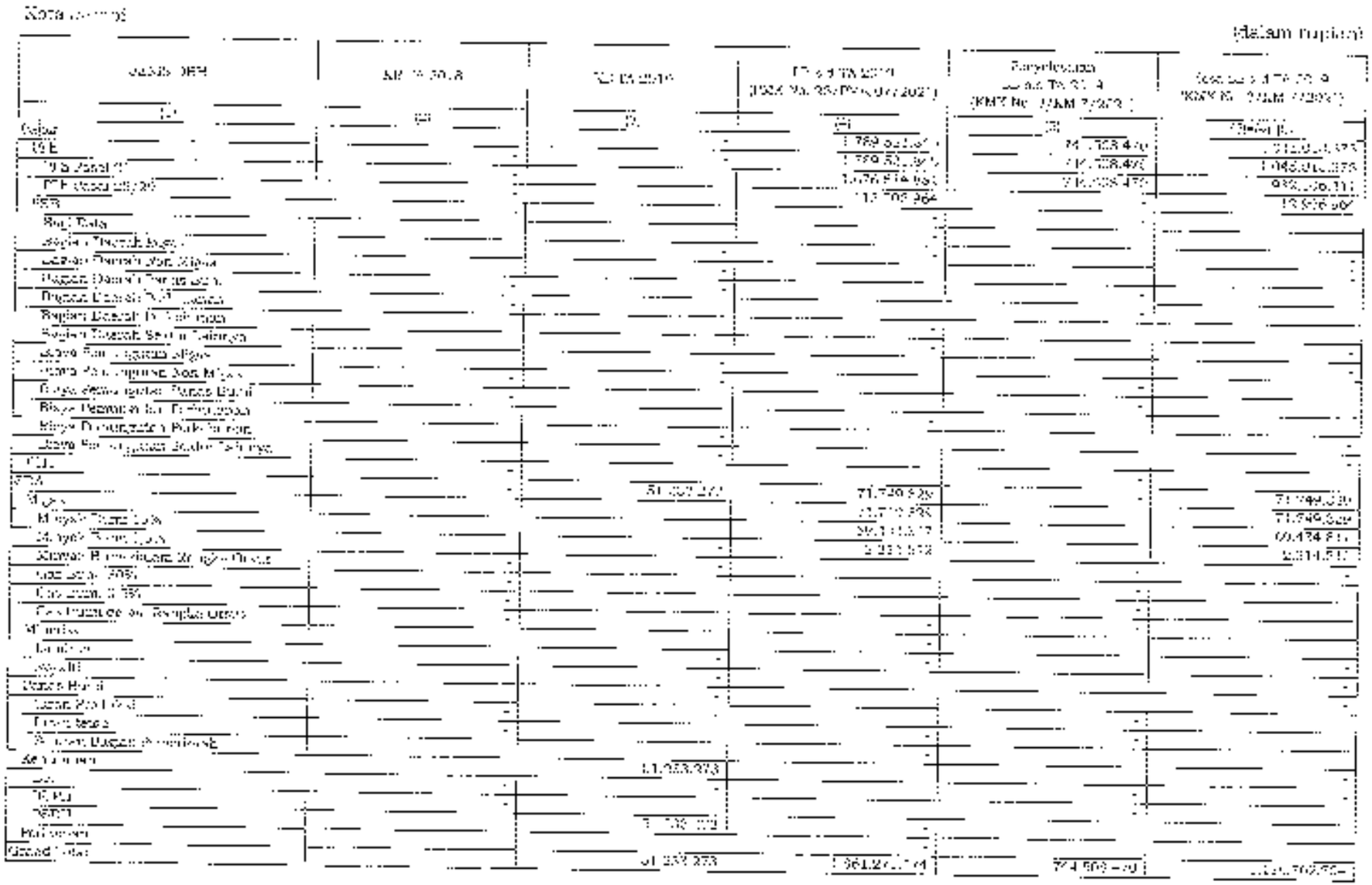

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Jambi

(Dalam rupiah)

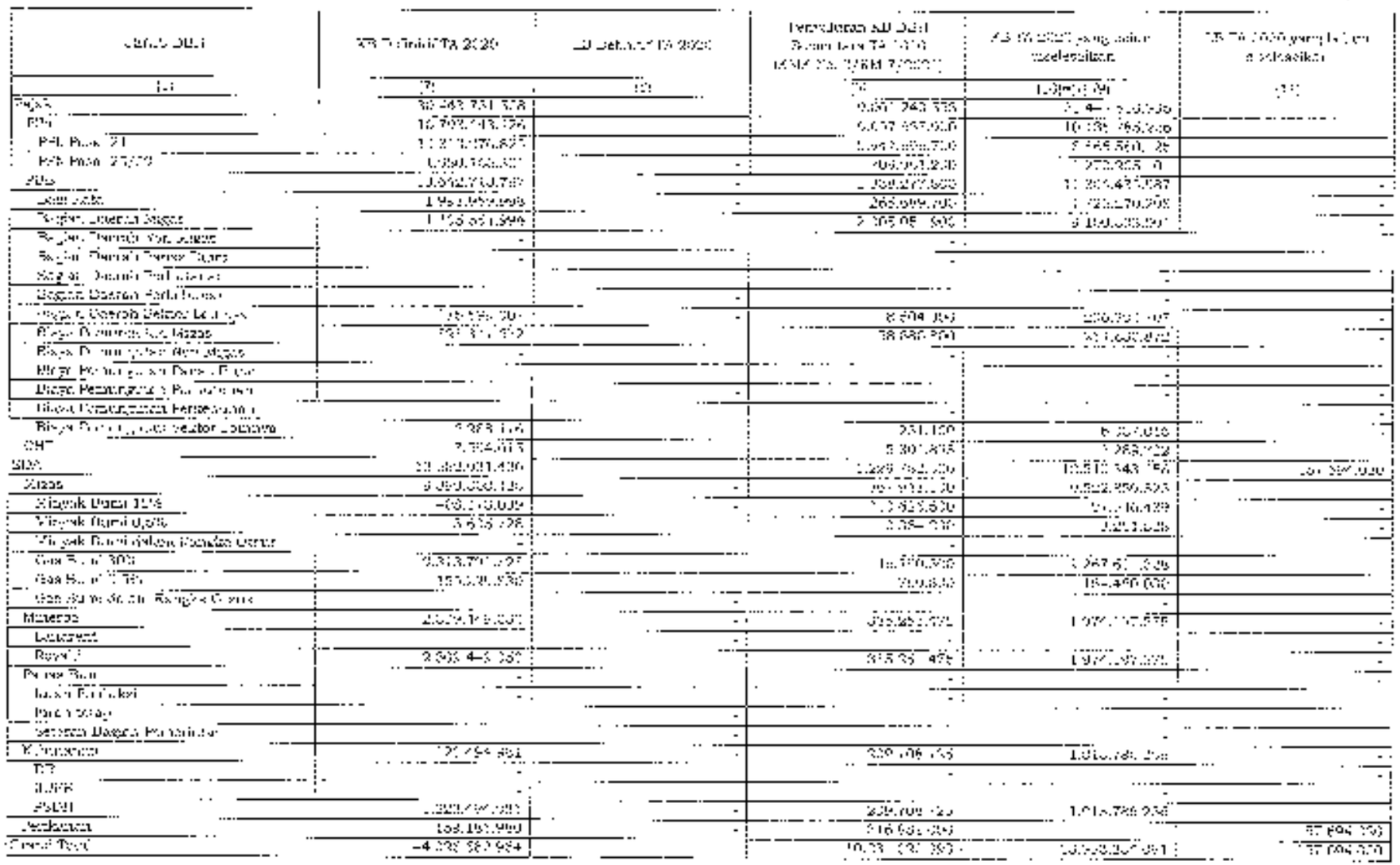

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

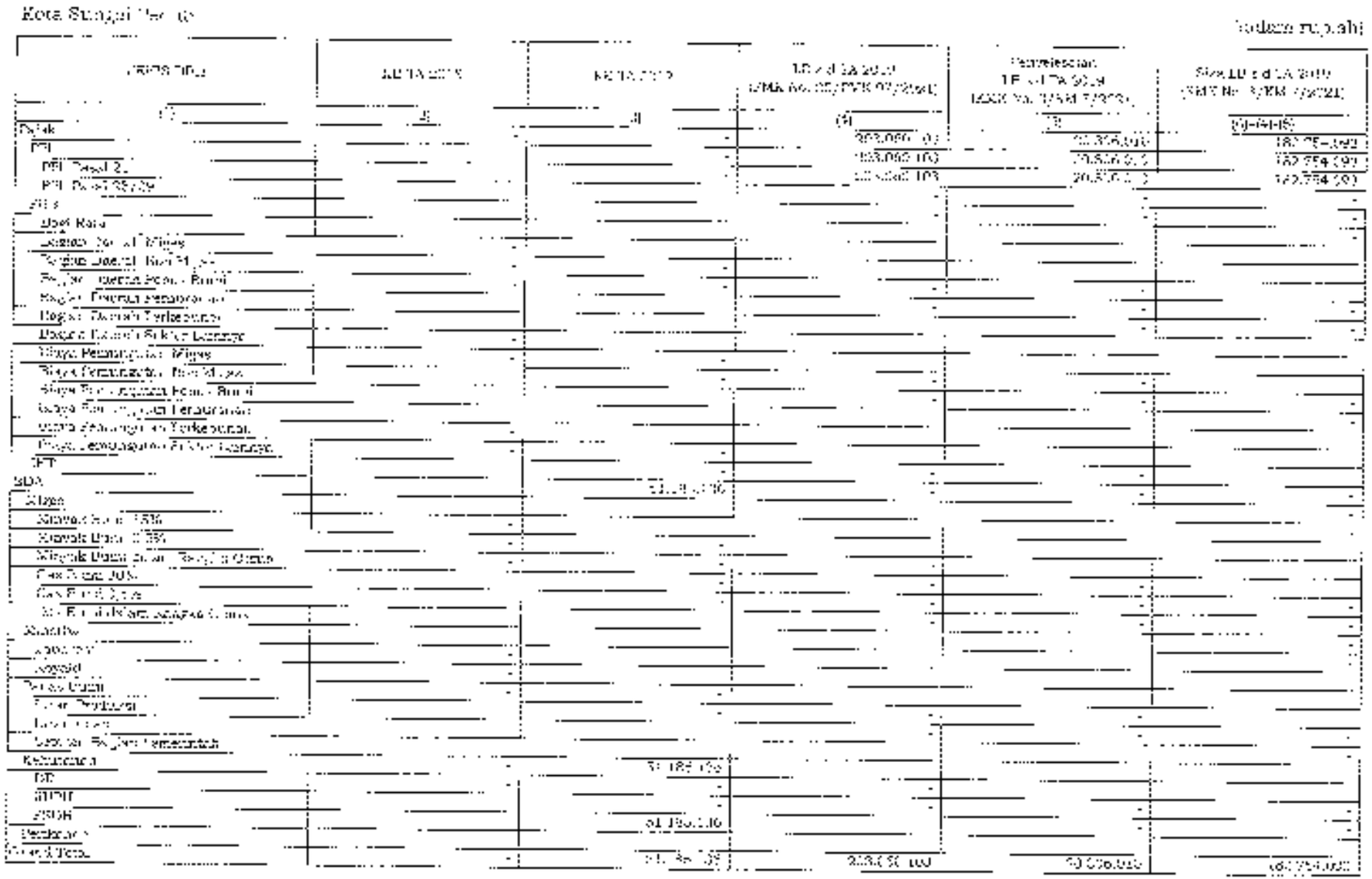

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

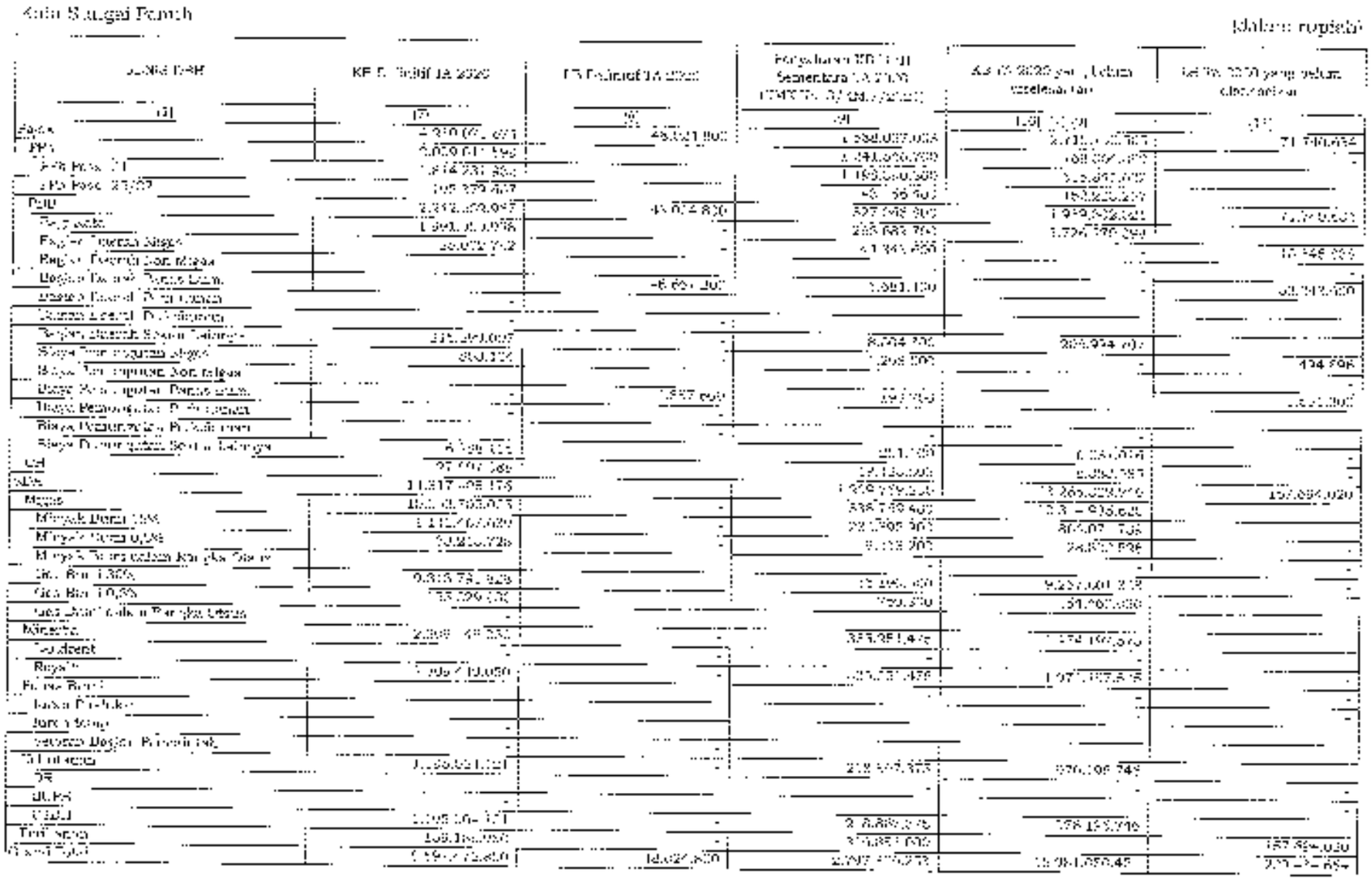

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sumatera Selatan

(dalam rupiah)

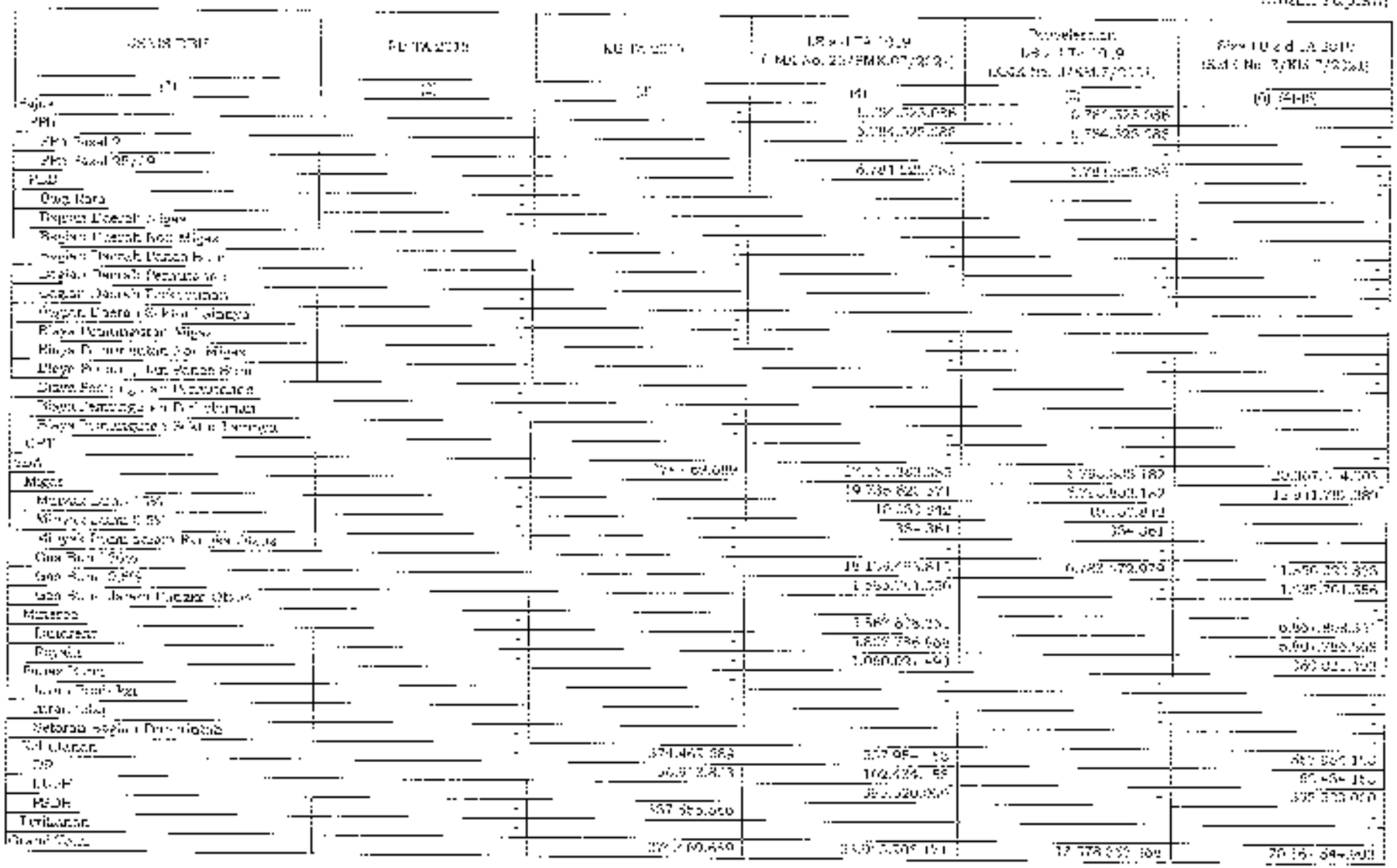

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Sumatera Selatan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	DBH Tahun 2020	Penyaluran DBH Tahun 2020	Penyaluran DBH Tahun 2021	Kurang/(Lebih) Bayar DBH Tahun 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak	387.529.194.949	90.936.581.326	277.211.142.379	-
PPh	79.937.595.611	37.991.268.900	41.971.326.711	-
PPh Pasal 21	74.427.410.485	37.991.268.900	36.076.911.585	-
PPh Pasal 25/29	4.690.093.726	1.294.303.650	3.395.790.076	-
PPh Pasal 26	820.091.400	652.994.750	167.096.650	-
PPh Pasal 4 ayat (2)	1.000.000	1.000.000	-	-
PPh Pasal 15	1.000.000	1.000.000	-	-
PPN	286.120.791.035	52.944.853.700	233.175.937.335	-
PPN Dalam Negeri	286.120.791.035	52.944.853.700	233.175.937.335	-
PPN Luar Negeri	-	-	-	-
PBB	20.806.878.777	10.111.959.450	10.694.919.327	-
PBB Perkebunan	17.861.328.796	9.309.408.720	8.551.920.076	-
PBB Pertambangan Migas	2.707.371.384	602.906.630	2.104.464.754	-
PBB Pertambangan Panas Bumi	237.178.645	199.644.100	37.534.545	-
PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	22.248.617.856	3.071.958.400	19.176.659.456	-
PBB Kehutanan	2.000.000	2.000.000	-	-
PBB Perikanan	2.000.000	2.000.000	-	-
Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.451	2.000.000	8.998.000.451	-
Pajak Penerangan Jalan Sumber Pembangkit Sendiri	5.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	-
Pajak Penerangan Jalan Sumber Pembangkit Non Sendiri	4.000.000.451	1.000.000.000	3.000.000.451	-
BPHTB	69.554.[illegible]	2.[illegible]	36.[illegible]	-
Cukai	183.455.495.607	9.[illegible]	29.[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau	183.455.495.607	9.[illegible]	29.[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Golongan I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Golongan II	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Golongan III	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Golongan III-a	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Golongan III-b	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Rokok	3.126.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Rokok 10,0%	3.126.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Rokok Dalam Rangka Opsen	-	-	-	-
Retribusi	40.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Landaran	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Daya Tarik	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Denda Retribusi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hasil Pajak Daerah	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hasil Retribusi Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sebagian Hasil Pungutan Tertentu	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
DR	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Pertambangan	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lebak

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	TA TA 2016	TA TA 2015	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Migas	-	-	1.512.652.350	641.177.057	871.475.293
PPh	-	-	326.519.312	-	326.519.312
PPh Pasal 21	-	-	4.405.-	-	4.405.-
PPh Pasal 25/29	-	-	157.179.25	-	157.179.25
PBB	-	-	734.145.60	641.177.057	92.968.603
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	903.346.596	941.457.534	38.110.938
Sanksi Administrasi Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil	-	-	3.830.121	-	3.830.121
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	50.000.912	-	50.000.912
Dana Alokasi Khusus Fisik Lainnya	-	-	-	-	-
DAU	-	92.701.000	819.797.-	-	819.797.-
Migas	-	-	1.295.655	-	1.295.655
Minyak Bumi 15%	-	-	1.293.293	-	1.293.293
Minyak Bumi 0,5%	-	-	41.-	-	41.-
Minyak Bumi Hasil Pengolahan	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Hasil Pengolahan	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	792.317.750	-	792.317.750
Panas Bumi	-	-	639.272.043	-	639.272.043
PPh 21	-	-	153.402.607	-	153.402.607
Pajak Rokok	-	-	25.577.025	-	25.577.025
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Total Bagi	-	-	25.577.025	-	25.577.025
Pendapatan Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	51.551.550	-	-	-
PT	-	-	-	-	-
IUPHH	-	-	-	-	-
PSDH	-	92.701.000	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	51.551.550	2.331.950.375	641.177.057	1.690.773.318

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

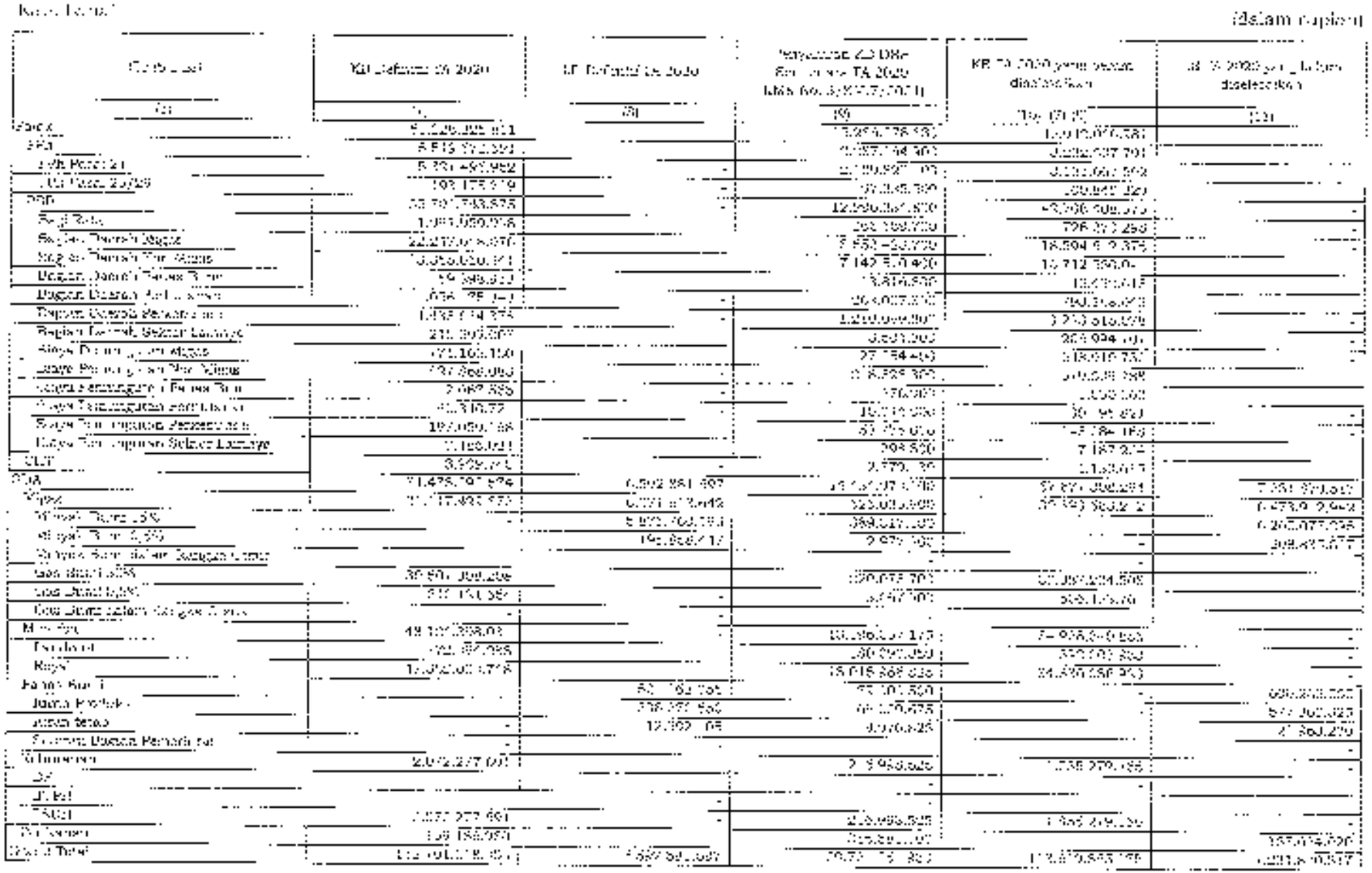

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 202 '

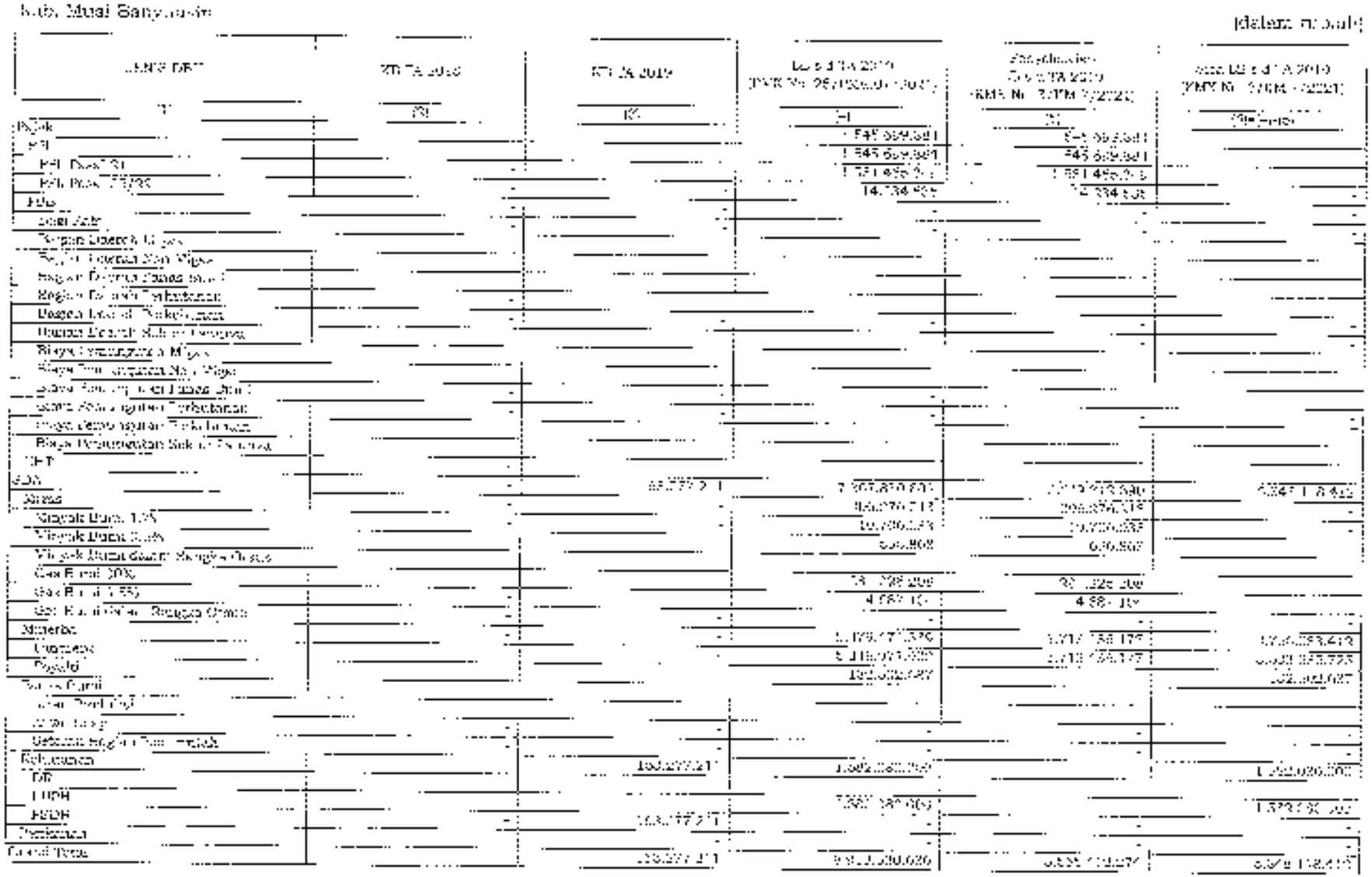

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Musi Banyuasin (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH s.d. TA 2020	LB DBH s.d. TA 2019	Penyelesaian KB DBH Berdasarkan TA 2020 (KMK No. [illegible])	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum Diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagi Rata	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Non Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Panas Bumi		-	-		-
Bagian Daerah Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Perhutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi			-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Perhutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
CHT	[illegible]	-	-	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus		-			-
Gas Bumi 30%	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi 0,5%	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus			-		
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Tetap	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Iuran Produksi		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Iuran Tetap	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah	-			-	
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DR		-			-
IUPHH		-	-		-
PSDH	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Musi Rawas

(rupiah)

Jenis DBH	PBH Tahun 2020	APBN Tahun 2019	PBH Tahun 2021 (KMK No. 347/KM.7/2021)	Penyesuaian PBH Tahun 2021 (KMK No. 432/KM.7/2021)	Total PBH Tahun 2021 (KMK No. 347/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak			289.501.382	289.501.382	
Cukai			1.501.847.258	1.501.847.258	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			57.591.458	110.091.458	
PBB			36.902.204	36.902.204	
Bea Materai					
Cukai Hasil Tembakau					
Pajak Daerah Provinsi Non Migas					
Pajak Daerah Provinsi Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas			5.502.134	20.000.000	
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					
Bagian Pemerataan Kab/Kota					
Bagian Pemerataan Non Migas			73.074.702	73.074.702	
Bagian Pemerataan Panas Bumi					
Bagian Pemerataan Kehutanan			5.417.685	5.417.685	
Bagian Pemerataan Perkebunan					
Bagian Pemerataan Sektor Lainnya					
PPh					
SDA		87.505.735	92.975.237.142	7.458.061.211	12.397.772.937
Migas			1.875.734.421	1.960.623.121	6.007.011.250
Bagian Daerah Penghasil Migas			1.687.800.979	1.864.637.3	
Bagian Daerah Penghasil Migas			82.734.301	82.026.307	
Bagian Daerah Penghasil Migas dari Bagian Pemerintah					
Gas Bumi (PSO)			4.140.998.859	4.204.439.097	8.345.438.456
Gas Bumi (Non PSO)			1.096.351.795		1.096.351.795
Gas Bumi - Bagian Pemerintah Pusat					
Pertambangan			5.029.501.371		5.029.501.371
Landrent			3.197.378.387		3.197.378.387
Royalti			132.502.287		132.502.287
Panas Bumi			17.117		17.117
Dana Provisi					
Landrent			17.117		17.117
Bagian Bonus Produksi					
Kehutanan		87.505.735			
IHH					
PSDH					
PSDH		87.505.735			
Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau		87.505.735	30.701.132.220	5.718.303.202	2.597.744.937

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Nama Model Rawas

(dalam rupiah)

Uraian DBH	(1)	AD Definitif TA 2020	(2)	LD Definitif TA 2020	(3)	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (KMK No. 647/KM.7/2021)	(4)	KB DBH yang belum Ditetapkan	(5)	LB TA 2020 yang belum Ditetapkan	(6)
Migas		11.229.201.103				1.950.038.606		07.754.567.344			10.840
PPh		2.562.060.850				1.[illegible].25.602		1.01[illegible].027.989			
PPh Pasal 21		3.306.760.719				1.465.841.403		1.[illegible].[illegible].470			
PPh Pasal 25/29		193.318.610				26.711.200		[illegible].[illegible].471			
PBB		[illegible].[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		55.[illegible].[illegible].[illegible].710			2.019
Cukai Hasil Tembakau		9.177.[illegible].398				-42.[illegible].[illegible].[illegible]		539.[illegible].[illegible]			
Pajak Penghasilan Migas		91.[illegible].17.026				1.[illegible].[illegible].[illegible]		9.[illegible].[illegible].[illegible]			
Bagian Pemerintah dari Minyak Bumi		1.001.[illegible].[illegible]				135.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]			
Bagian Pemerintah dari Gas Bumi		941.[illegible]				[illegible].[illegible]		-			0.840
Bagian Pemerintah dari Panas Bumi		2.[illegible].[illegible].[illegible]				815.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]			
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Mineral dan Batubara		[illegible].[illegible].[illegible]				1.[illegible].[illegible].[illegible]		5.[illegible].[illegible].[illegible]			
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		215.[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]			
Migas Pertambangan Minyak Bumi		3.201.[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]			
Migas Pertambangan Gas Bumi		91.[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]			
Cukai Hasil Tembakau		31.[illegible]				[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]			0.[illegible]
Pajak Rokok		123.[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]			
Pajak Penerangan Jalan Daerah		[illegible].[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]			
Bagian Pemerintah Daerah dari Minyak Bumi		[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]			
CHT		[illegible].[illegible]				-		[illegible].[illegible]			
PBB		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	
Migas		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	
Minyak Bumi PPh		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible].[illegible]	
Minyak Bumi PBB		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		-		[illegible].[illegible].[illegible]	
Minyak Bumi Pasal 22 Impor		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		-		[illegible].[illegible]	
Gas Bumi PPh		[illegible].[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]			
Gas Bumi PBB		[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]			
Gas Bumi Pasal 22 Impor		-				-		-			
Mineral		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	
Landrent		-		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]					
Royalti		[illegible].[illegible].[illegible]				[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]			
Panas Bumi		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		-		[illegible].[illegible]	
Iuran Produksi		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		-		[illegible].[illegible]	
Iuran Tetap		[illegible].[illegible]		-		[illegible].[illegible]		-		[illegible].[illegible].[illegible]	
Pemerintah Daerah dari Pertambangan Mineral dan Batubara		-		-		-		-		-	
Pertambangan		[illegible].[illegible].[illegible]		-		[illegible].[illegible]		-		[illegible].[illegible]	
PPh		-		-		-		-		-	
PBB		-		-		-		-		-	
Pasal 21		[illegible].[illegible].[illegible]		-		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		-	
Pertambangan		[illegible].[illegible].[illegible]		-		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	
Total		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kutai Barat

(dalam rupiah)

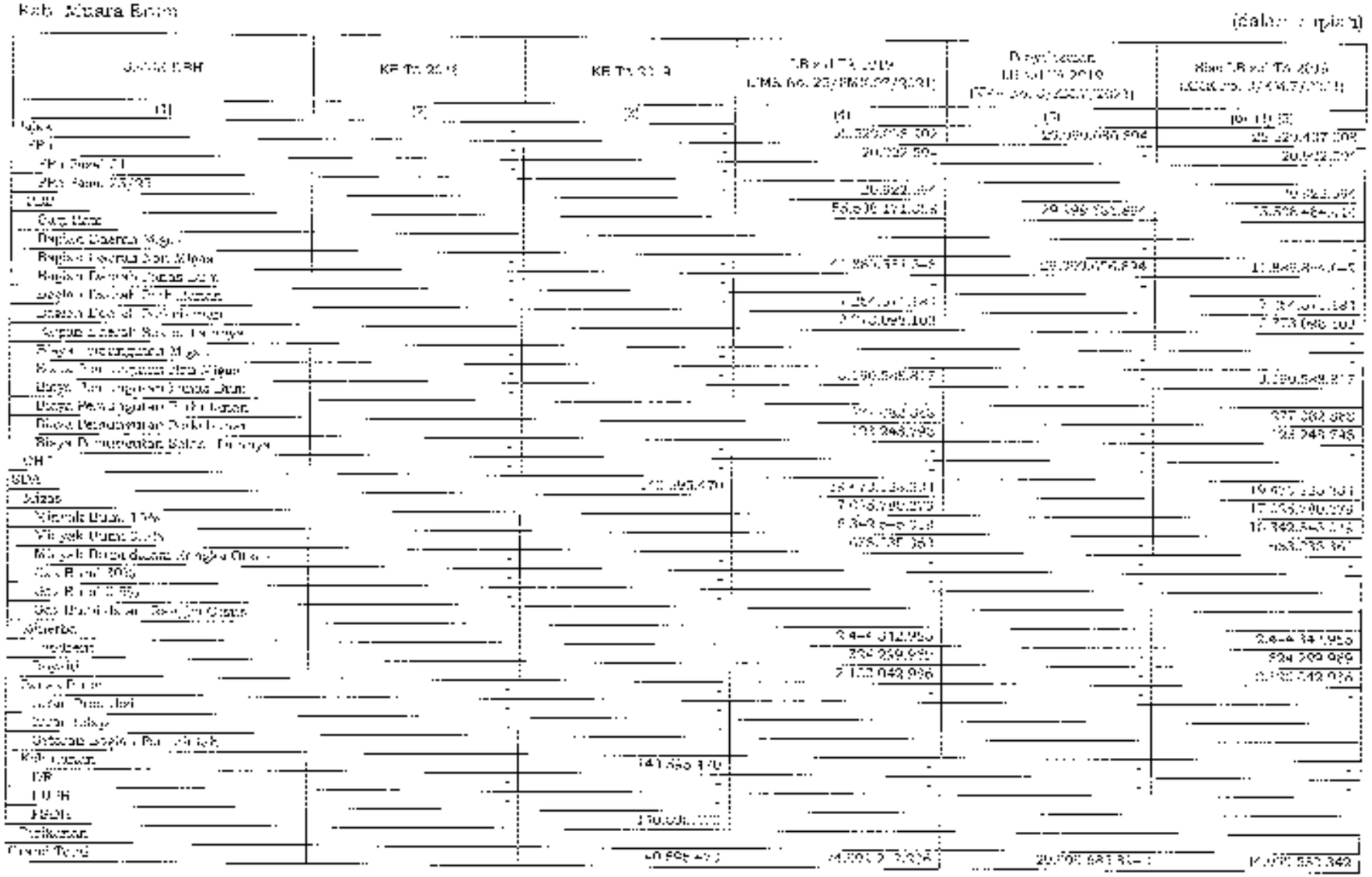

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Musara Enim

(dalam ribuan rupiah)

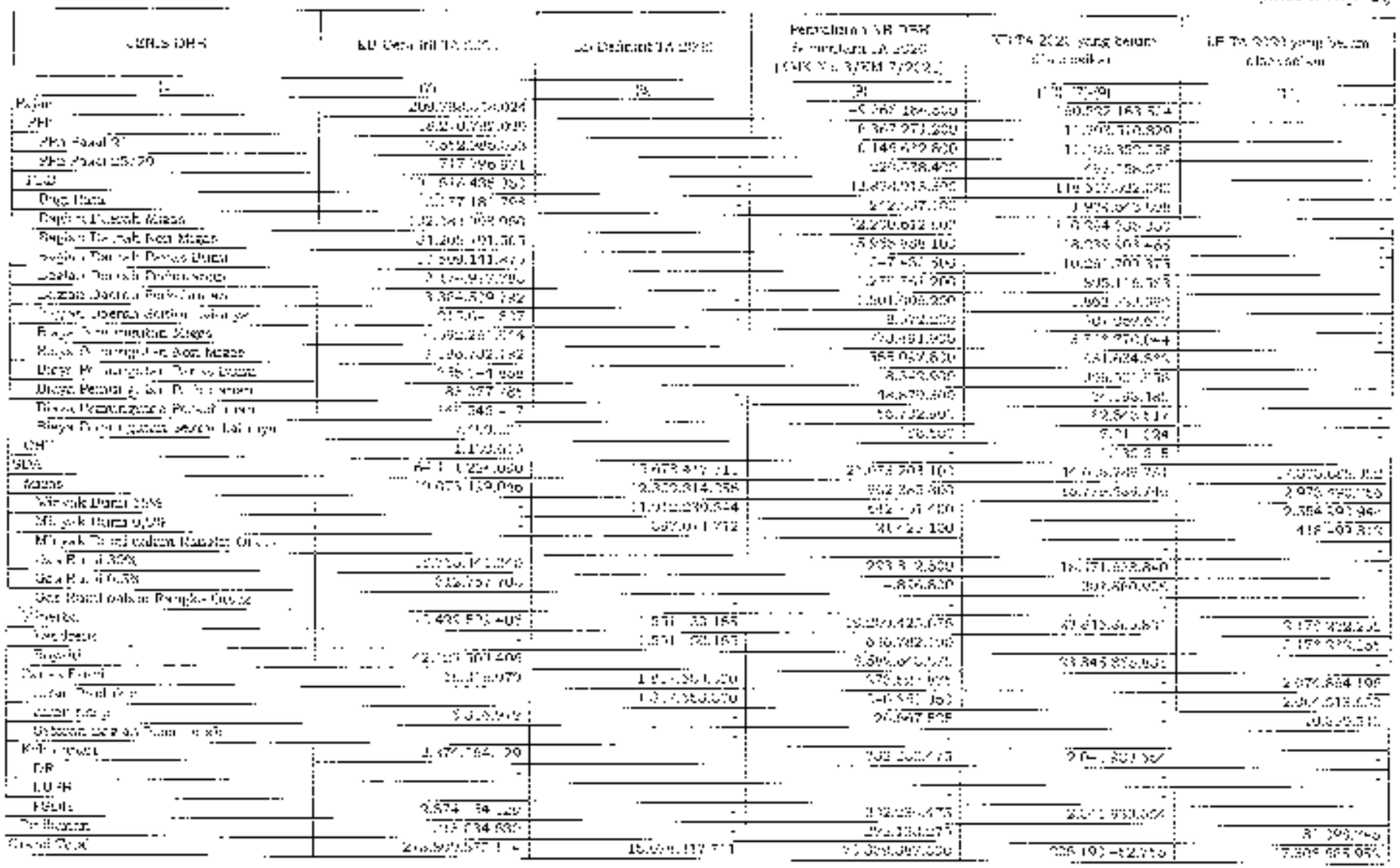

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Ogan Komering Ilir

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2020	ALBA 2020	KB ALBA 2020 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyesuaian KB TA 2020 (KMK No. 420/KM.7/2021)	Sisa KB ALBA TA 2020 (KB TA 2020 - KB ALBA 2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Sub Jenis - Bagian Pemerintah Pusat atas BPHTB					
Sub Jenis - Bagian Pemerintah Daerah atas BPHTB					
Sub Jenis - Bagian Pemerintah Daerah Lainnya atas BPHTB					
Sub Jenis - Bagian Pemerintah Daerah Penerima atas BPHTB					
Cukai Hasil Tembakau					
Sub Jenis - Bagian Pemerintah Pusat atas Cukai Hasil Tembakau					
Sub Jenis - Bagian Pemerintah Daerah atas Cukai Hasil Tembakau					
Sub Jenis - Bagian Pemerintah Daerah Penerima atas Cukai Hasil Tembakau					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Khusus					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Umum					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Umum Provinsi					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Umum Kabupaten/Kota					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Umum Kabupaten/Kota Penghasil					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Umum Kabupaten/Kota Lainnya					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Khusus					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Khusus Provinsi					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Khusus Kabupaten/Kota					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Penghasil					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Lainnya					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Penerima					
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tambahan Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Penerima Lainnya					
Cukai					
SDA		242.310.000	3.145.496.454	1.507.010.000	1.638.486.454
Migas			1.749.020.454	1.284.010.000	465.010.454
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penghasil			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Kabupaten/Kota Penerima Lainnya Provinsi			1.748.956	1.284.956	
Sub Jenis - Dana Bagi Hasil Migas Penerima Lainnya Kabupaten/Kota

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Objek Kementerian Lain

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2020	Lebih Bayar TA 2020	Penyaluran KB DBH Tahun Anggaran 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum Disalurkan	LB TA 2020 yang belum Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
BPHTB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Daerah Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah dari Pajak Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Penerangan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
Jasa Pengembangan Pariwisata	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Jasa Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Jasa Pengembangan Kawasan Agribisnis	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
CHT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kehutanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (PSDH)	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi (PNBP)	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi Hasil Pengolahan	-	-	-	-	-
Gas Bumi (PSDH)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi (PNBP)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi Hasil Pengolahan	-	-	-	-	-
Mineral	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Iuran Perikanan	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Iuran Hasil	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Pengelolaan Dasar Penerimaan	-	-	-	-	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
DR	-	-	-	-	-
IUHP	-	-	-	-	-
PNBP	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Ogan Komering Ulu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible])	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible])	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	73.270.315	73.270.315	-
PPh	-	-	73.270.315	73.270.315	-
PPh Pasal 21	-	-	31.579.750	31.579.750	-
PPh Pasal 25/29	-	-	41.690.565	41.690.565	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	44.315.053	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	-	[illegible]	[illegible]	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	1.072.570.775	[illegible]	[illegible]
Landrent	-	-	920.063.088	[illegible]	[illegible]
Royalti	-	-	152.507.687	-	[illegible]
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	44.315.053	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	44.315.053	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	44.315.053	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab/Kota/Provinsi

(dalam rupiah)

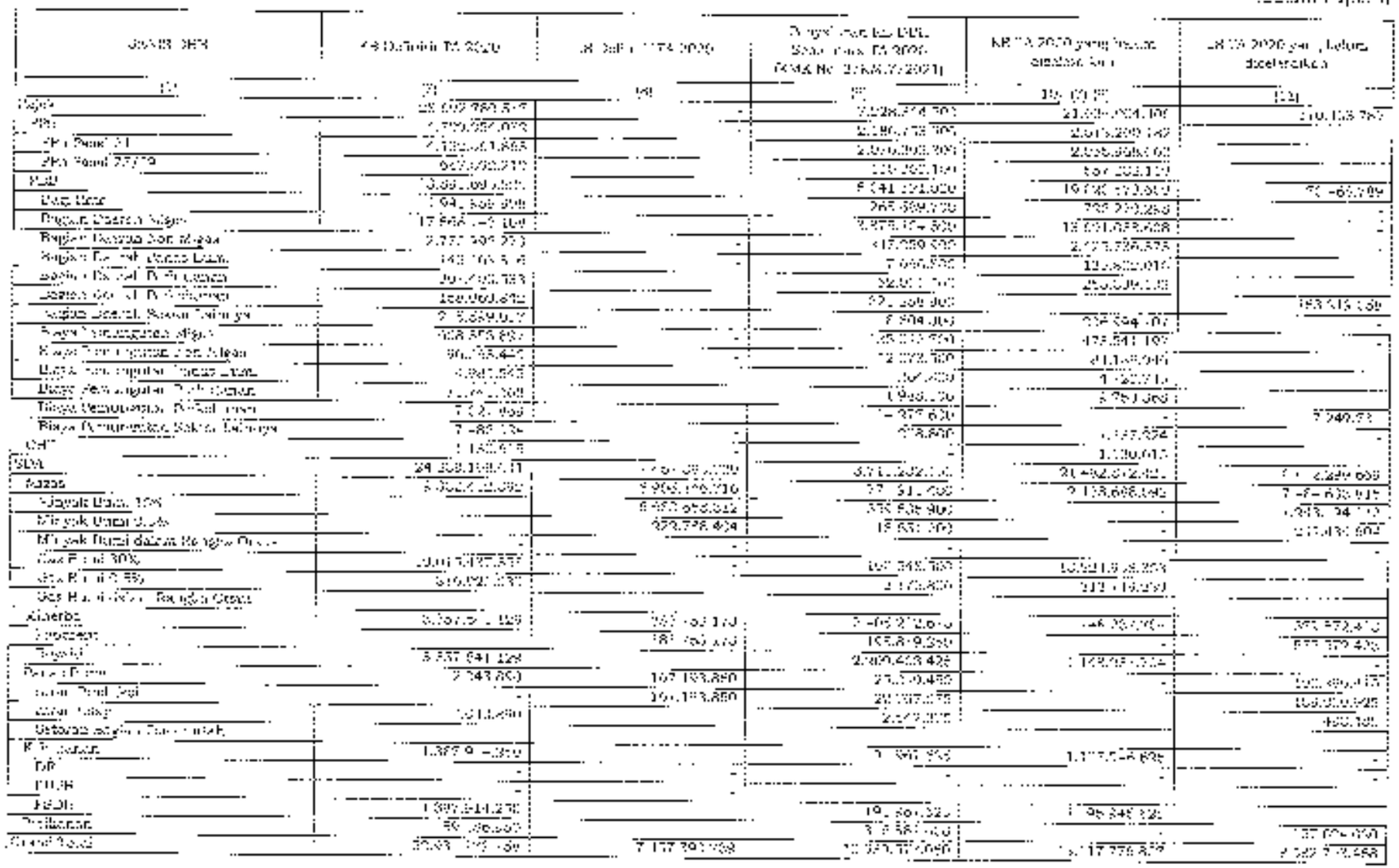

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tangerang

(dalam rupiah)

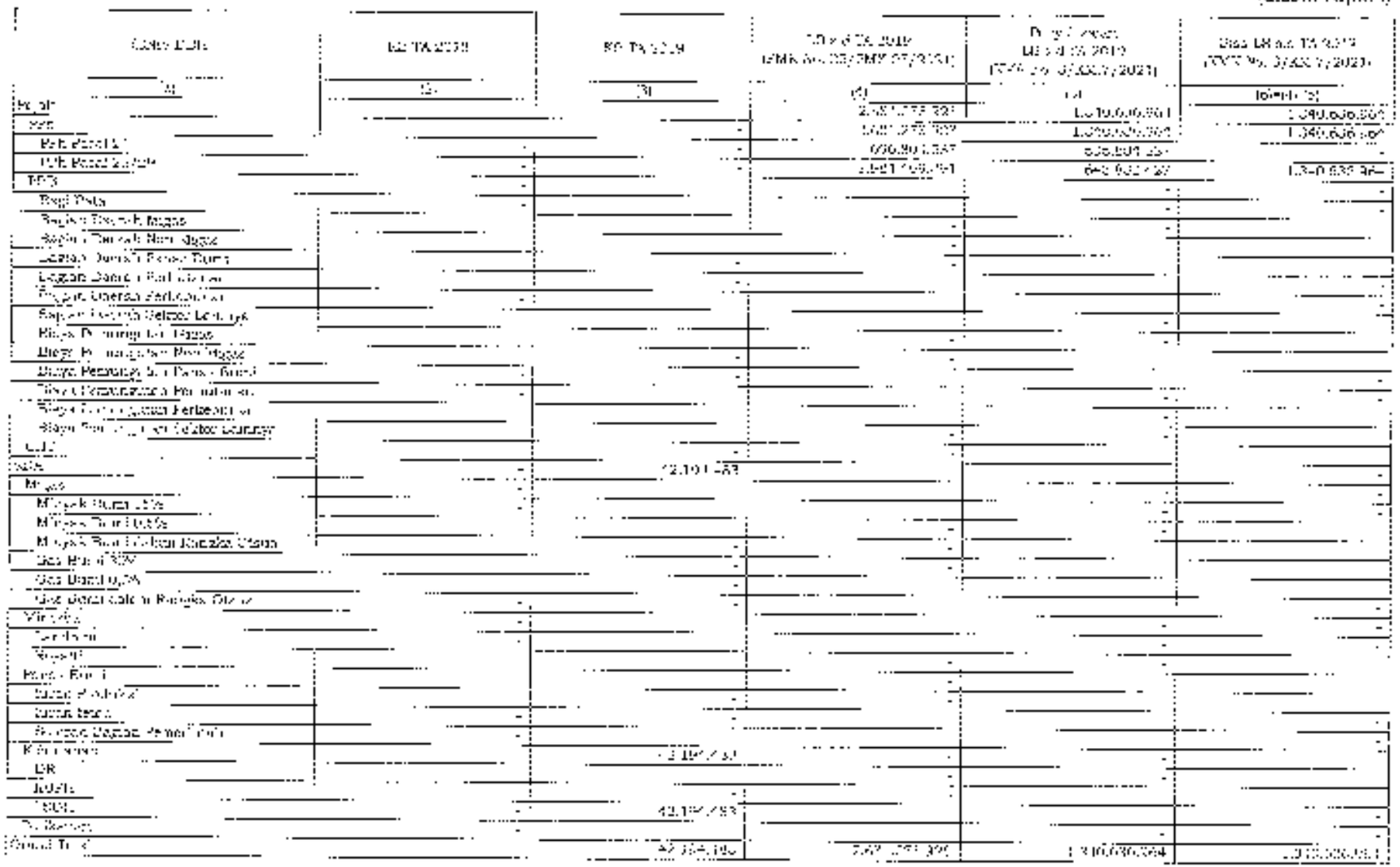

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Palembang

(dalam ribuan rupiah)

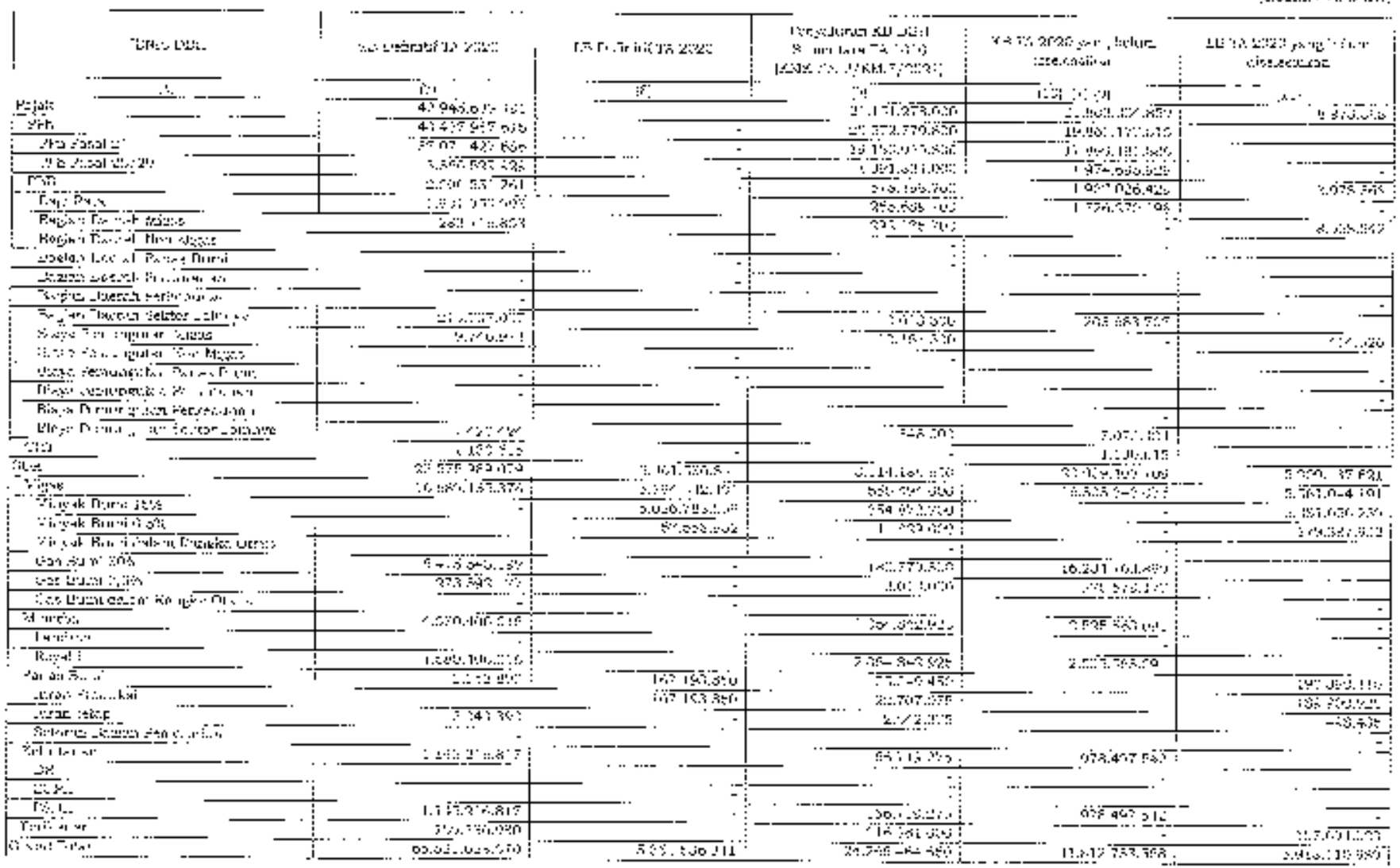

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pekanbaru

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi DBH	Realisasi DBH	Kurang/(Lebih) Bayar DBH	Kurang/(Lebih) Bayar DBH (PMK No. 220/PMK.07/2021)	Penyaluran Kurang/(Lebih) Bayar DBH (KEP-[illegible]/PK/2021)	Sisa Kurang/(Lebih) Bayar DBH (PMK No. [illegible]/PK/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(5)
Pajak						
PBH						
PPh Pasal 21						
PPh Pasal 25/29						
PBB						
Bagi Rata						
Bagian Daerah Hasil						
Bagian Daerah Penghasil						
Bagian Daerah Penerima Dana						
Bagian Daerah Pemerata						
Bagian Daerah Pemerata Kinerja						
Daerah Penerima Alokasi DBH Tahun						
Tidak Kekurangan Bulan						
Bagi Rata Luas Daerah						
Bagi Rata Jumlah Penduduk						
Bobot Kemiskinan						
Bobot Kemiskinan						
Bagi Rata Kurang Bayar Lebih Bayar						
BPHTB						
DBH		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 3,1%					
Migas Bumi dibagi dengan Imbangan Daerah					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 6,5%					
Gas Bumi dibagi dengan Imbangan Daerah					
Alokasi					
Dipotong					
Kurang					
Tidak Kurang					
Bagi Rata					
Bagi Rata					
Kekurangan Bagi Rata					
Kekurangan		[illegible]			
PPh					
PBB					
Migas		[illegible]			
Pertambangan					
Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pematangsiantar

(Dalam rupiah)

Uraian	Alokasi Tahun 2020	Penyaluran DBH (TA 2020)	Penyaluran DBH Berdasarkan PP 2020 (PMK No. 57/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang Telah Disalurkan	KB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Rokok	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penerangan Jalan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Parkir	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Air Permukaan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Sarang Burung Walet	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Alat Berat dan Alat Berat Perkeretaapian	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Opsen Pajak Rokok	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (15%)	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi (0,5%)	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi (30%)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi (0,5%)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Pertambangan Umum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Pertambangan Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kehutanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Hasil Hutan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dana Reboisasi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pungutan Hasil Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pertambangan Mineral dan Batubara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Penerimaan Iuran Tetap (Landrent)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Biaya Pemanfaatan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral dan Batubara	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Batubara	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Logam	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Bentonit)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Tras)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Obsidian)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perlit)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir Kuarsa)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Zeolit)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Kaolin)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Apung)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Marmer)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Tulis)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Setengah Mulia)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Semen)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Bahan Bangunan/Konstruksi)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Keperluan Industri)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Pertanian)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Farmasi)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Kosmetik)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Makanan)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Pakan Ternak)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Kertas)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Karet)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Plastik)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Cat)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Tinta)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Lem)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Pupuk)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Pestisida)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Pewarna)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Pengawet)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Pelumas)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Pelapis)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Hasil Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur/Gamping untuk Pelarut

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

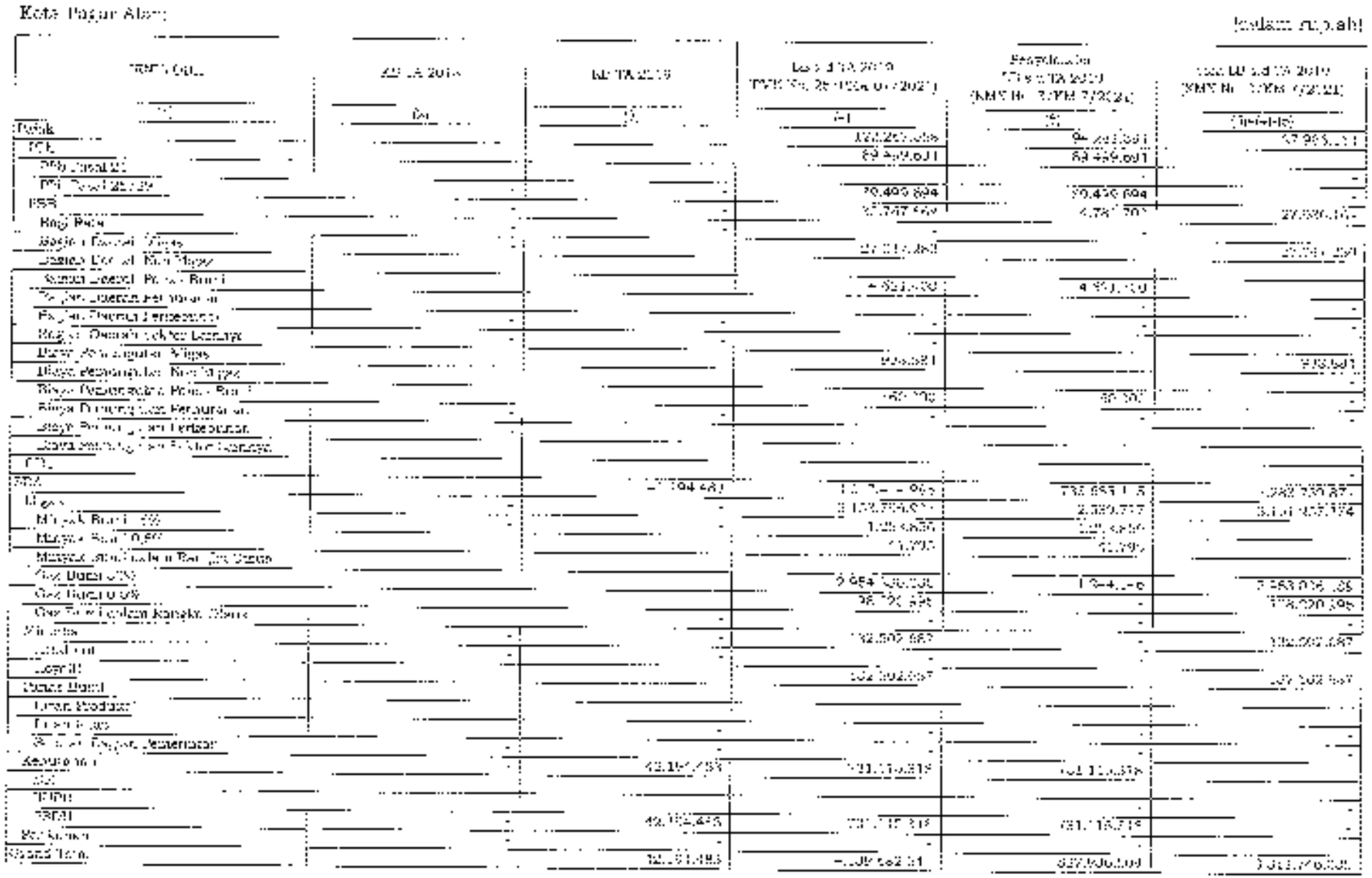

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Payo Alam

(Rakyat rupiah)

Uraian	DBH Tahun TA 2020	DBH Tahun TA 2020	Realisasi DBH Tahun TA 2020	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	5.430.124.552	5.019.119	1.774.535.000	3.775.701.752	150.837.919
PPh	2.451.184.079		1.773.103.000	1.447.154.079	-
PPh Pasal 21	2.447.558.536		1.218.403.420	1.229.155.116	-
PPh Pasal 26	158.330.000		96.454.420	61.875.580	-
PPh	2.793.835.000	5.019.119	555.699.000	2.239.017.000	150.837.919
Bagian Daerah	2.793.835.000		202.000.000	2.591.835.000	-
Bagian Daerah Migas		5.019.119	120.000.000		125.019.119
Bagian Daerah Pertambangan	216.289.000		8.699.500	207.589.500	-
Bagian Daerah Perikanan					-
Bagian Daerah Kehutanan	637.546.715		47.245.780	590.300.935	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	216.289.000		9.100.000	207.189.000	-
Bagian Pemerintah Migas		205.102	6.300.000		6.437.102
Bagian Pertambangan Minyak Bumi	7.485.691		354.555	7.131.136	-
Bagian Pertambangan Gas Bumi					-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	35.108.341		3.030.105	32.077.236	-
Bagian Pertambangan Umum	7.485.691		456.555	7.029.136	-
PPh	1.153.500			1.153.500	-
PBB	92.361.127.543	5.277.012.639	1.101.304.575	96.536.835.607	5.240.150.211
Migas	1.000.013.576	5.194.370.040	200.000.000	6.194.383.616	5.394.370.040
Minyak Bumi 15%		5.020.783.017	221.872.478		5.394.370.040
Gas Bumi 30%		173.587.023	1.929.030		179.587.023
Pertambangan Umum	7.415.540.196		182.219.630	10.734.743.589	-
Pertambangan	705.691.380		3.013.030	27.370.777	-
Kehutanan	1.540.467.116		2.274.410.928	2.120.056.188	-
Perikanan					-
Pertambangan	1.582.700.016		2.014.274.922	3.545.830.101	-
Panas Bumi	20.110.224	480.000.000	20.604.624	5.665.600	774.000.000
Panas Bumi		493.574.730	41.637.300		774.412.730
Pajak Penghasilan	75.442.934		7.700.155	110.731.959	-
Pajak Penghasilan Pasal 21					-
Kehutanan	1.135.201.717		539.301.824	595.899.893	-
PBB					-
Migas					-
PBB	1.198.295.577		170.057.855	998.237.722	-
Pajak Penghasilan	128.246.982		3.353.869		131.600.851
Pajak Penghasilan	28.032.201.223	5.922.304.010	4.864.384.324	28.709.952.280	6.396.384.330

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Lubuk Linggau

(dalam rupiah)

URAIAN	DBH TA 2020	ADBH TA 2020	PB atas PPh 21 TA 2021 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyesuaian PB atas PPh 21 TA 2015 (KMK No. ...K/7.../2021)	Selisih Lebih/(Kurang) Bayar DBH TA 2021 (Kol 5 - Kol 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
PBB			[illegible]	[illegible]	
BPHTB					
Bagi Rata					
Bagi Rata Luas Wilayah					
Bagi Rata Jumlah Penduduk					
Bagi Rata Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk					
Bagi Rata Realisasi Penerimaan					
Bagi Rata Realisasi Penerimaan Tahun Lalu					
Bagi Rata Realisasi Penerimaan Tahun Lalu					
Bagi Rata Realisasi Penerimaan Tahun Lalu					
Bagi Rata Realisasi Penerimaan Tahun Lalu					
Bagi Rata Realisasi Penerimaan Tahun Lalu					
PBB		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas Bagian 0,5%			[illegible]	[illegible]	
Migas Bagian 0,5%			[illegible]	[illegible]	
Migas Bagian Kabupaten/Kota Penghasil					
Gas Bumi 0,5%			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Dalam Negeri					
Panas Bumi					
[illegible]					
[illegible]					
Pajak Daerah					
Cukai Hasil Tembakau					
Opsen Pajak					
Kekurangan Bagian Daerah Hasil					
Kehutanan		[illegible]			
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]		[illegible]			
Pertambangan					
Jumlah Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Basis Kabupaten/Kota Penggabungan

(Dalam rupiah)

URAIAN	Kurang Bayar DBH TA 2020	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan	Perkiraan Kurang Bayar DBH Berdasarkan TA 2020 (PMK No. 226/PMK.07/2020)	DBH TA 2020 yang Telah Disalurkan	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	5.838.300.250		2.460.642.360	3.021.130.228	356.527.662
PPh	2.799.993.281		2.079.449.464	1.664.662.784	
PPh Pasal 21	2.779.105.000		1.969.783.600	1.346.537.760	
PPh Pasal 25/29	20.888.281		109.665.864	318.124.984	
PBB	2.838.175.719		381.015.380	1.040.457.229	356.527.662
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.911.059.016		210.440.780	1.700.372.958	
Bagian Daerah Hasil Migas	93.731.184		131.994.170		37.262.986
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Hasil Pengelolaan Perikanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	11.539.207		8.507.630	200.994.207	
Bagian Pemerintah Pusat Migas	9.810.108		3.876.630		170.412
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan					
Bagian Pemerintah Pusat Sektor Lainnya	2.691.221		983.610	2.197.221	
Cukai	1.107.512			1.130.015	
DBHCHT	21.599.386.079	5.201.286.412	3.114.130.670	21.699.428.733	5.201.286.412
Pajak	16.598.193.579	5.197.912.191	350.494.200	16.361.830.079	5.551.041.191
Bagian Pusat (50%)		5.201.286.412	311.130.200		5.371.456.158
Bagian Provinsi (2%)		167.558.935	12.026.000		179.812.000
Bagian Provinsi Dalam Rangka Dekonsentrasi					
Cukai Hasil Tembakau	16.598.193.579		38.591.200	16.361.830.079	
Cukai Hasil Tembakau	3.373.192.500		2.015.200	3.020.979.200	
Cukai Hasil Tembakau Sebagai Kompensasi DBH					
Bagian Pusat	337.429.016		2.004.320.000	2.707.848.281	
Bagian Provinsi					
Bagian Kabupaten/Kota	1.686.248.016		3.014.976.920	2.020.000.291	
Pajak Rokok	1.013.490	167.558.930	20.145.600		190.709.173
Bagian Pusat		167.558.930	21.707.375		190.909.925
Bagian Provinsi	2.145.830		3.547.375		199.925
Bagian Kabupaten/Kota Penerimaan					
PPh Pasal 21	1.143.470.817		156.159.270	976.407.542	
DBH					
DAU					
DBH CHT	1.143.470.817		156.159.270	976.407.542	
Tambahan	180.736.080		210.861.030		57.494.101
Grand Total	28.760.330.975	5.369.138.341	3.979.972.950	27.979.503.007	5.615.311.366

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

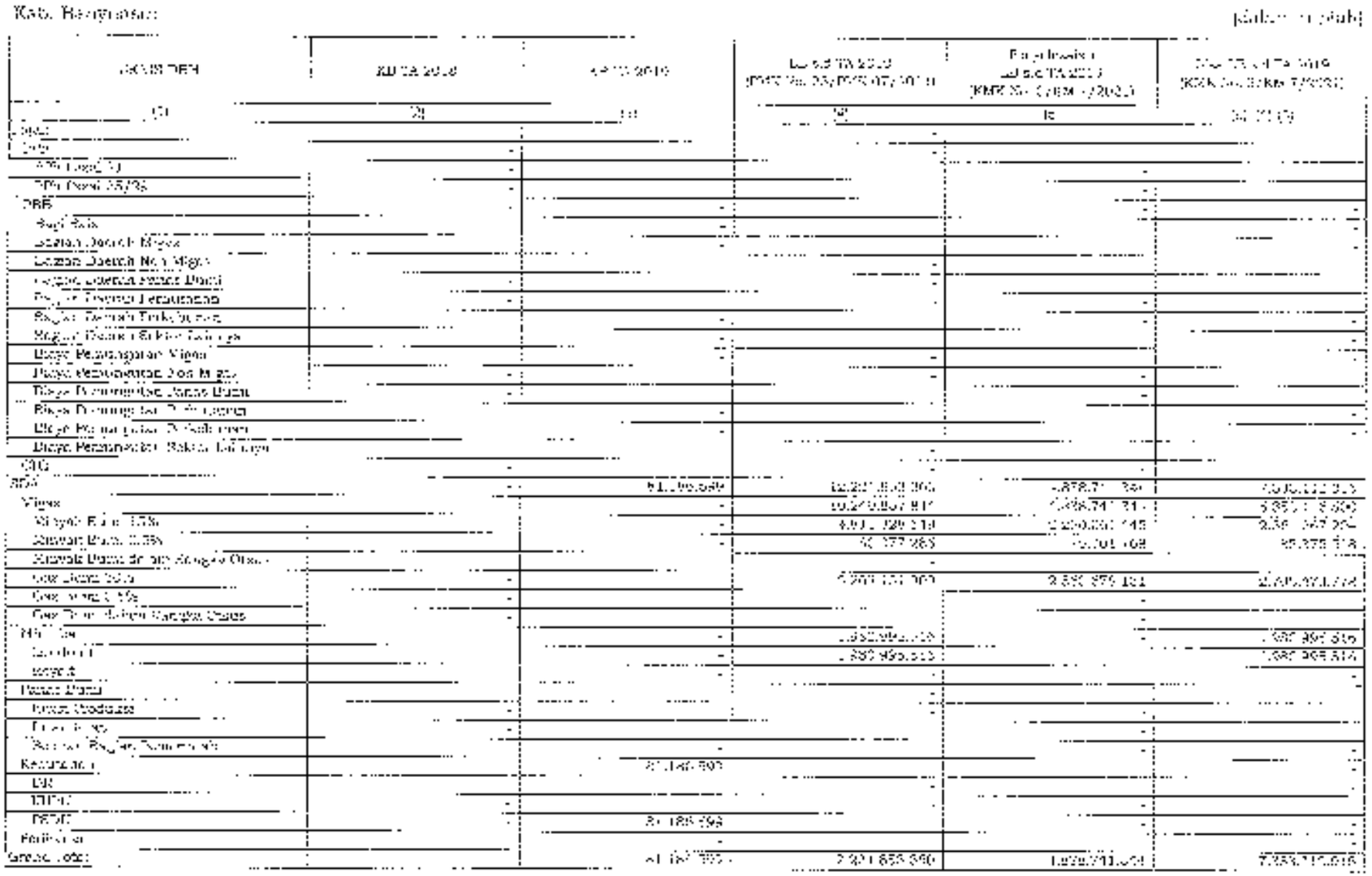

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Satuan: Rupiah

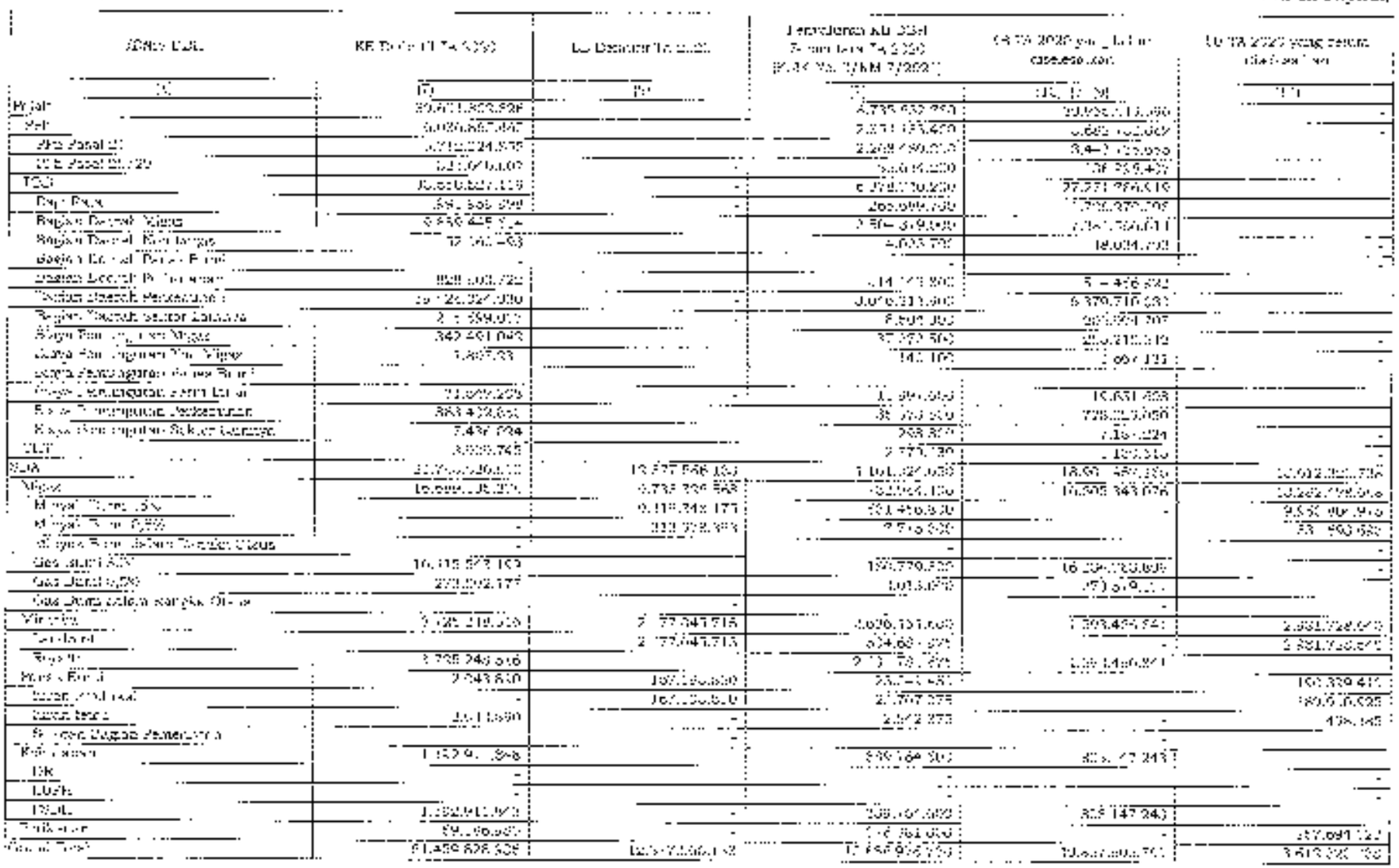

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Ogan Ilir

(dalam rupiah)

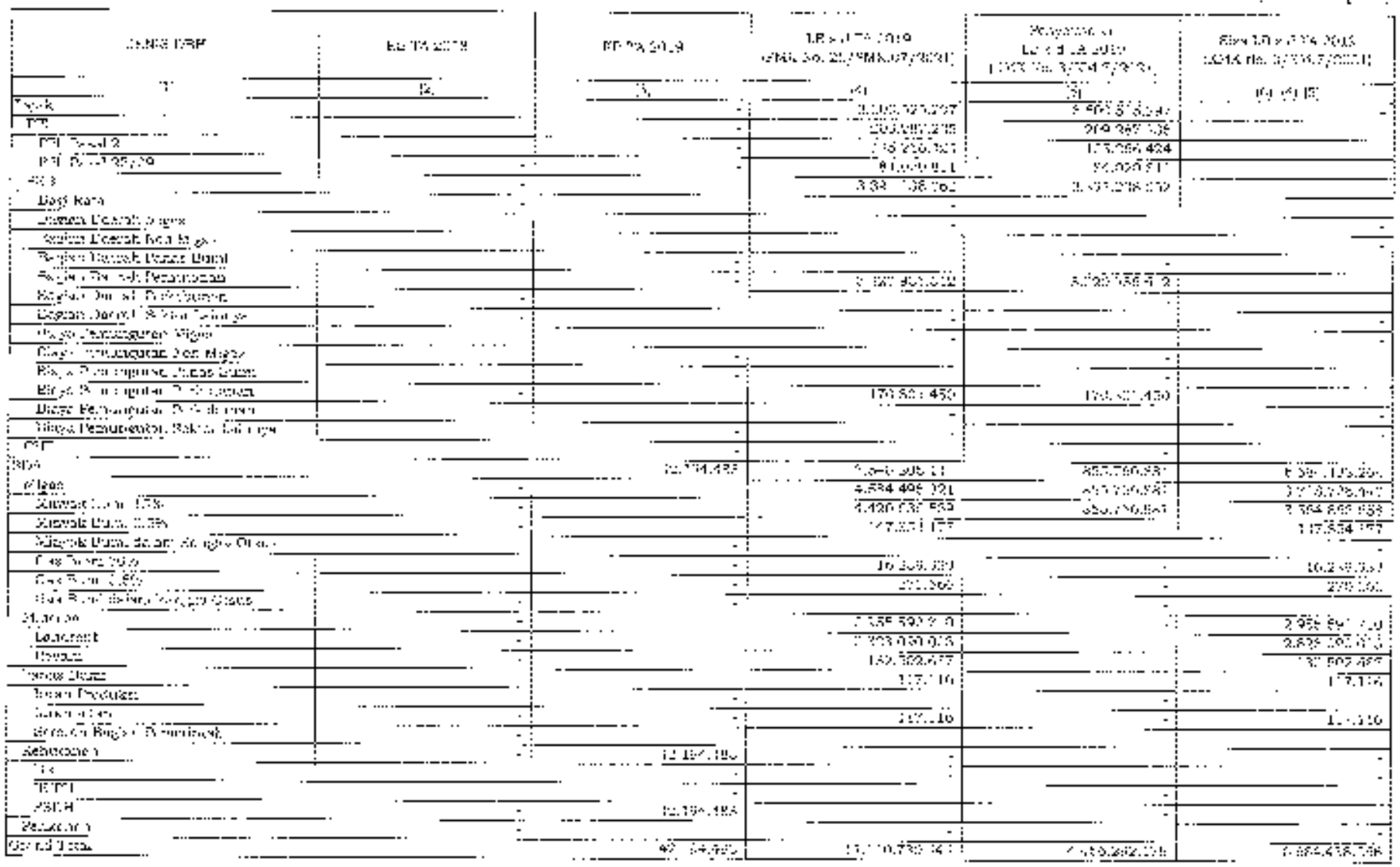

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Prov. Ogan Ilir

(dalam ribuan rupiah)

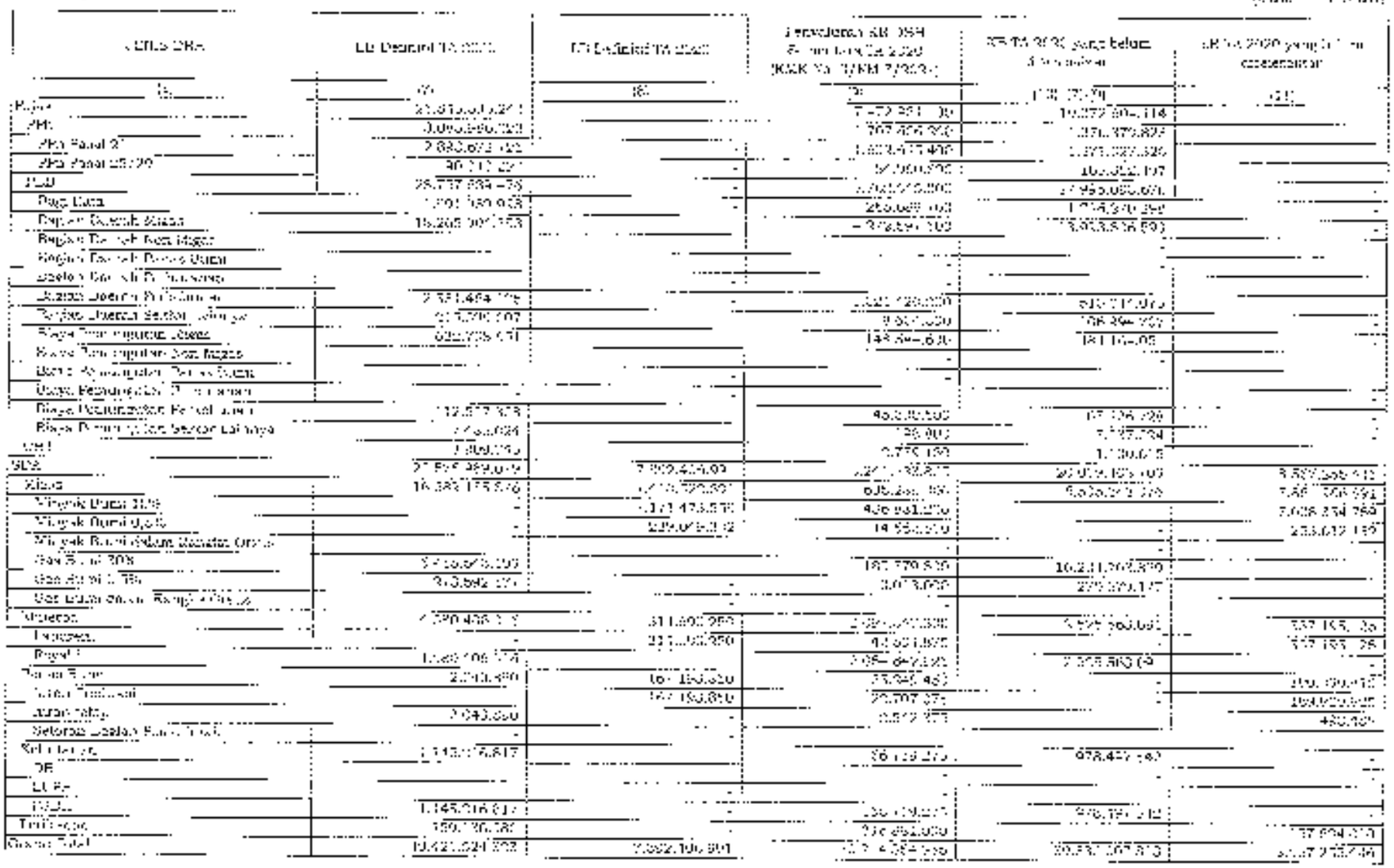

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. OKU Timur

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PPh Pasal 21	KUP Tahun 2020	TP tahun 2015 (PMK No. 212/PMK.07/2020)	Penyesuaian TP tahun 2015 (PMK No. 6/PMK.07/2021)	Jumlah KB/LB Tahun 2020 (PMK No. 212/PMK.07/2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	3.410.612.632	1.815.897.905	192.684.737
PPh	-	-	30.791.747	5.972.151	-
PPh Pasal 21		-			
PPh Pasal 25/29		-	30.791.747	30.791.747	
PBB		-	1.430.777.796	1.276.215.979	192.684.737
Bagi Rata					
Daerah Provinsi Induk					
Daerah Provinsi Pemekaran			1.079.111.961	968.058.837	9.884.178
Provinsi Induk untuk Daerah Induk		-			-
Provinsi Induk untuk Daerah Pemekaran		-			
Bagian Daerah Penghasil			38.286.877	108.381.977	
Alokasi Dasar					
Daerah Pemanfaatan Migas		-			-
Daerah Pemanfaatan Non Migas		-	162.807.907	98.811.484	41.215.620
Bagian Pemerataan Provinsi		-			
Bagian Pemerataan Kabupaten/Kota		-			
Bagian Pemerataan Kabupaten/Kota			2.017.028	2.934.016	
Bagian Pemerataan Daerah Tertentu		-			-
Cukai		-			-
PPN		5.104.283	7.584.072.998	1.967.007.116	6.147.068.472
Migas			5.858.771.537	1.899.619.416	1.041.122.121
Migas Bagian 15%			1.053.856	1.387.856	
Migas Bagian 0,5%			13.736	21.796	-
Migas Bagian dalam Rangka Otsus					-
Non Migas 20%			2.012.250.021	1.866.615.736	241.871.020
Non Migas 0,5%			163.920.946		101.290.736
Non Migas dalam Rangka Otsus					
Minerba			2.724.130.136		1.104.130.136
Panas Bumi			4.771.070.479		4.571.070.179
Kehutanan			1.811.705.647		1.811.705.647
Perikanan			17.116		17.116
Pertambangan Umum					
Pertambangan			17.116		17.116
Bagian Daerah Penghasil					
Reboisasi		42.194.493			
Lain					
PPh 21					
PPh 25/29		42.194.493			
Pajak Lain					
Grand Total		42.194.780	8.478.305.171	2.070.007.241	6.249.938.922

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. OKU Timur

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2020	LB Tersalur s.d 2020	Penyaluran DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB TA 2021 yang belum Direkonsiliasi	LB TA 2020 yang belum Direkonsiliasi
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PPh 21	3.481.127.142		7.510.071.005	8.815.830.778	-
PPh 25/29 Orang Pribadi dan Pemotongan Pasal 21	2.329.191.254	-	15.230.090.636	14.240.613.854	-
PPh 25/29 Badan dan Pemotongan Pasal 22	2.481.127.142	-	1.592.576.600	3.010.319.017	-
PPh Pasal 23/26	370.956.152	-	85.87 .600	192.191.152	-
PBB	9.619.128.190		1.034.730.600	9.314.308.290	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.506.506.562		333.000.700	1.914.970.259	
Pajak Daerah Provinsi	427.798.945		210.0 .000	923.747.243	
Pajak Daerah Kab/Kota	121.574.317		10.072.300	10.0 .5	-
Pajak Rokok					-
Cukai Hasil Tembakau	3.211.364.472		97.394.500	120.1 .272	-
Dana Reboisasi	171.56 .077		410.900.700	2.756.975.317	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	218.599,00		5.60 .85	908.96 .7	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara	777.070		7.1 .410	7.551.970	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi	1.126.718		971.100	3.215. 14	-
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi					
Dana Alokasi Umum	9.842.210		2.2 .8.80	1.5 .8.10	
Dana Alokasi Khusus Fisik	56.57 .4 0		12.8 .7.70	99.259.4 0	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	7.171.334		2 0.670	7.1 .1.5	-
DBHT	2.020.811			2.020.811	-
DAK	22.020.2 1.209	7.1 .7.719.341	1.385.4 .7.0	20.011.2 0.20	5.011.1 2.29
Jumlah	5.099.1 6.77	11.3 2. 91	339.4 4.030	16.101.2 .0.0	2.1 1.4 1.121
Minyak Bumi (0,5%)	-	6.0 0.7 1.6	25.4 7.700	-	6.0 1.3 0.29
Minyak Bumi (0,5%)	-	7.3 9.90	1.420.000	-	76.3 7.00
Minyak Bumi Bagian Daerah Otsus	-	-		-	-
Gas Bumi (0,5%)	10.1 .5 3.10	-	199.7 9.0	11.2 .1.3	-
Gas Bumi (0,5%)	2 .2 .17	-	3 0.0 0	27 .1 .17	-
Gas Bumi Bagian Daerah Otsus		-	-		-
Kehutanan	4.97 .91 .92	1.3 2.1 .3.0	2.3 3.7 9.90	9 .1 .1	2.10 .1 .00
Perikanan	-	1.5 1 .0.2	1 1.7 .00	-	2.10 .1 .00
Pertambangan Mineral dan Batubara	4.997.90 .76		2.0 7.0 .300	2.7 2.7 .4	
Panas Bumi	5.142.50	16 .19 .0	2.2 9.1	-	19 .3 .4)
Total Dana Bagi Hasil		17 .19 .60	9 .1 .7		19 .0 .34
Dana Otsus	2.2 1.4	-	1 .1 .7		4 .1
Dana Keistimewaan DIY			-		
Dana Tambahan Infrastruktur	7 .7 .17		197.9 .1	1 .1 .1	
Dana Desa			-	-	-
Jumlah					
Pajak Rokok	1.2 1.1 2.7		97.99 .1	1 1.1 .1	
Denda Pajak	1 .1 .4		1 .7 .2	-	1 .7 .1
Total Dana	31 .1 .4 .4	7 .1 .2	6.0 1 .1 .47	9 .1 .4	9 .1 .1

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

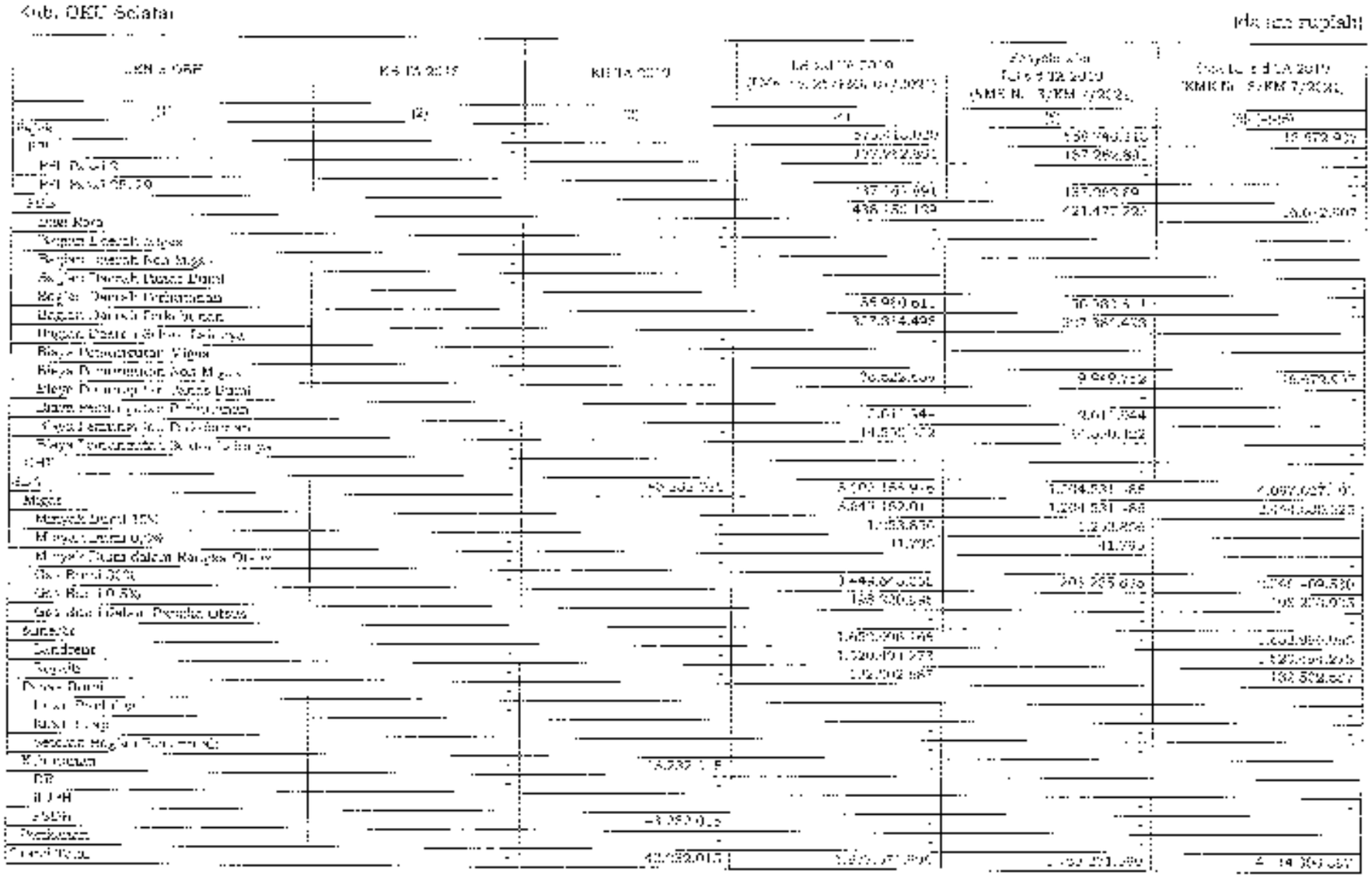

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. OKU Selatan

(dalam [illegible])

[illegible]	KB [illegible]	[illegible]	Perpres No. 104 [illegible] (PMK No. 8/PMK.7/2021)	KB [illegible] yang [illegible]	LB [illegible] yang [illegible]
(1)	(6)	(8)	(9)	(10) = (6) - (9)	(11)
PPh	3,384,972,120	124,511,760	3,636,777,356	-251,805,236	176,804,372
PBB	3,720,085,030		2,242,646,450	1,477,441,950	
PBB Pasal 21	3,950,236,094		2,361,534,400	1,588,701,312	
PBB Pasal 25/29	179,848,936		119,112,000	60,736,936	-
BPHTB	3,450,788,450	321,150,700	2,446,462,200	2,725,476,950	716,824,450
Cukai Hasil [illegible]	1,097,098,391	-	232,099,700	1,321,270,091	-
[illegible]	1,242,936,079	-	1,241,707,000		2,361,132
Bagian Daerah Pajak Migas	17,273,424		3,189,900	18,483,524	
Bagian Daerah Pajak Bumi		122,208,000	3,046,000	-	125,254,000
Bagian Daerah Perikanan	597,746,304		78,420,900	201,325,404	
Bagian Daerah Pertambangan	681,992,918		100,081,200	182,912,718	
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	210,801,607	-	6,521,100	204,280,507	
Biaya Pemungutan Migas	6,406,974	-	5,837,100		569,874
Biaya Pemungutan Bumi [illegible]	1,126,824		33,300	537,494	
Biaya Pemanfaatan Bumi Bagian		7,160,100	526,800	-	6,633,300
Biaya Pemanfaatan Perikanan	13,966,349		2,521,100	11,445,249	
Biaya Pemungutan Kehutanan	27,001,787	-	1,341,500	25,660,287	
Biaya Pemungutan [illegible]	1,753,024	-	797,903	1,047,121	
DHT	78,000,000		53,057,538	24,942,462	
SDA	97,366,345,000	5,011,030,341	4,113,227,921	88,264,147,420	5,923,829,262
Kopas	14,940,193,576	5,134,845,291	3,000,000,000	11,941,193,576	5,193,844,291
Minyak Bumi 15%	-	5,016,798,545	651,672,750		4,365,125,795
Minyak Bumi 3,5%		117,858,733	1,126,000		1,010,872,732
Minyak Bumi Sektor Panas Bumi		-	-		
Gas Bumi 30%	12,430,000,000		16,771,300	6,813,228,700	
Gas Bumi 6%	200,000,000		3,107,000	370,892,700	
[illegible]	-			-	-
Mineral	2,941,027,716	-	2,001,812,000	2,450,211,291	-
Landrent	370,000,000	-		220,001,200	-
Royalti	2,780,430,000	-	2,054,942,930	2,030,500,000	
Iuran Tetap	20,115,000	-	25,662,450	10,452,550	16,000,000
Iuran Eksploitasi		-	27,207,000	-	27,207,000
Iuran Izin	9,416,000	-	2,851,871	16,536,705	-
Sekolah Kedinasan Pemerintah	-				-
PPh [illegible]	1,170,685,671	-	95,892,000	1,010,000,000	
BP		-	-		
BP-B					
[illegible]	1,700,685,671		131,020,000	1,010,000,000	-
[illegible]	70,780,000	-	7,051,000		77,831,000
[illegible]	202,000,000,000	5,438,279,941	[illegible]	91,000,000,000	6,000,000,000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Simbar Lawang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2016	LB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 01/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB TA 2019 KMA No. 01/KMA/2021	Nota LB s.d TA 2021 (PMK No. 177/PMK.07/2021)
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	201.190.517	197.190.517	-
PBB	-	-	197.190.517	197.190.517	-
PBB Pasal 21					
PBB Pasal 25/29			197.190.517	197.190.517	
BPHTB			-	-	
Cukai Hasil Tembakau			-	-	
Bagian Daerah dari Cukai Hasil Tembakau			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Rokok			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Penerangan Jalan			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Air Permukaan			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Alat Berat			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Hotel			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Restoran			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Hiburan			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Reklame			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Penerangan Jalan			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Parkir			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Air Tanah			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Sarang Burung Walet			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			-	-	
Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			-	-	
PPh			-	-	
SDA		49.194.495	4.934.156.551	995.119.119	3.939.037.432
Migas			3.939.838.591	665.717.119	3.273.121.472
Bagian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi			1.216.958	157.958	
Bagian Dana Bagi Hasil Gas Bumi			41.793	27.797	
Bagian Dana Bagi Hasil Sektor Panas Bumi					
Pertambangan Minyak Bumi			3.616.259.819	665.717.119	2.950.542.700
Pertambangan Gas Bumi					
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja Eksplorasi					
Kehutanan			282.784.960		282.784.960
Iuran Eksploitasi (Royalti)			282.784.960		282.784.960
Iuran Tetap (Landrent)					
Pertambangan Umum					
Iuran Eksploitasi					
Iuran Tetap					
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya					
Perikanan		12.191.760			
CHT					
PNBP		12.191.760			
Perikanan					
Pertambangan Minyak Bumi					
Pertambangan Gas Bumi					
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja Eksplorasi					
Pertambangan Panas Bumi					
Pertambangan Mineral dan Batubara					
Kehutanan					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Iuran Tetap (Landrent)					
Pungutan Pengusahaan Perikanan					
Pungutan Hasil Perikanan					
Pungutan Perikanan dari Kapal Asing					
Pungutan Perikanan dari Kapal Eks Asing					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Laut Lepas					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia					
Pungutan Perikanan dari Kapal Perikanan Indonesia Hasil Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas dan Perairan Indonesia dan Laut Lepas

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Empat Lawang

(rupiah)

URAIAN	PT Triwulan IV TA 2020	Lebih Salur TA 2020	Penyaluran DBH TA 2021 s.d. Triwulan III	TOTAL ALOKASI yang seharusnya diterima	KURANG/LEBIH SALUR DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PPh	5.977.258.818		2.272.778.000	2.049.851.114	5.201.705
PPh	2.078.173.095	-	1.641.462.000	1.179.790.482	
PPh Pasal 21	1.056.110.097	-	575.963.000	503.159.067	
PPh Pasal 25/29	342.911.301	-	71.853.000	91.840.941	
PBB	3.901.016.111		683.376.000	1.191.000.941	5.201.705
Bea. BPHTB	1.951.949.999		203.649.778	208.870.196	
Cukai Hasil Tembakau	11.946.824		123.213.778	-	7.372.456
Cukai Hasil Tembakau	-				-
Pajak Rokok	-	-			-
Pajak Rokok Hasil Pungutan	1.956.110.762	-	-	104.000.102	
Pajak Rokok Hasil Pungutan	1.942.153.938		223.847.800	93.878.144	
Pajak Rokok Hasil Pungutan	476.962.307		6.004.000	270.034.207	-
Dana Perimbangan Lainnya	7.927.261		2.190.000		207.143
Dana Perimbangan Lainnya	-	-			-
Dana Perimbangan Lainnya	-	-	-		
Dana Perimbangan Lainnya	1.913.000		-	7.982.000	
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	58.307.078		9.025.200	14.405.178	-
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.468.074		209.800	2.147.217	-
DAU	1.156.617	-	-	1.156.617	
DBH	22.271.080.000	3.707.120.6	3.715.536.301	2.210.300.709	1.922.120.270
Migas	16.356.120.000	3.197.3 .349	550.404.500	3.525.343.078	3.361.0 1.191
Alokasi Dana 10%	-	3.020.7 .9.9	334.872.700	-	5.361.666.798
Alokasi Dana 2,5%	-	197.0 8.842	11.029.201	-	173.837.960
Alokasi Dana Bagian Daerah	-				-
Cukai Hasil 30%	16.715.715.799	-	130.795.302	13.201.101.492	-
Cukai Hasil 2%	2.1 .892.777	-	5.1 .903	270.579.177	
Cukai Hasil Tembakau Penerimaan Cukai	-		-		
Minuman	7.990.478.010	1.0 6.900	2.140.597.275	3.505.963.052	48.311.900
Sementara	-	92.080.800	5.749.350	-	48.311.900
Minuman	- 591.426.016		2.5 1.912.025	1.925.503.051	-
Cukai Hasil	2.0 5.890	9 .96.600	25.219.750		150.391.1 0
Cukai Hasil		87.40 .750	2 .1 .3 0		150.096.079
Cukai Hasil	2.0 .509	-	1.540.375		1.0 .157
Bea. Bagi Hasil Cukai Hasil			-		
Kekurangan	1.145.916.61		166.7 .027	199.257.543	-
DAK	-			-	-
PNBP			-		
PNBP	1.1 .210.817		1.6 7.375	578.457.042	
Pendapatan	219.1 6.50		2.6 .000	-	257.89 .020
Jumlah Total	8.455.947.997	6.9 1.10 .211	1.3 .1 .000	2.1 .1 .875	5.966.74 .98

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tercakup Anak Perusahaan DBH

(dalam rupiah)

URAIAN	KETERANGAN	KODE	LEBIH BAYAR DBH TA 2019 (PMK No. 93/PMK.07/2020)	PENYESUAIAN LEBIH BAYAR DBH TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	KURANG BAYAR DBH TA 2019 (KEP-35/PK/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak			701.074.727	701.074.727	
PPh			31.071.875	31.071.875	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			31.071.875	31.071.875	
PPN			670.002.852	670.002.852	
PPN Barang Tertentu					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pertambangan Umum					
Bagian Daerah Perkebunan			142.396.178	142.396.178	
Bagian Daerah Kehutanan			526.456.674	527.656.674	
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas			2.707.999	1.607.999	
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan			19.513.174	19.513.174	
Bagian Pemerintah Pusat Perkebunan			158.967.000	158.967.000	
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Umum					
Cukai					
PDH		42.263.613	3.150.000.000	3.107.736.387	8.999.474.000
Migas			3.150.000.000	3.107.736.387	8.999.338.513
Minyak Bumi 15%			3.063.000.000	3.063.000.000	8.999.000.000
Minyak Bumi 0,5%			87.000.000	44.736.387	338.513
Kelebihan Bagi Hasil Migas Otsus					
Gas Bumi 30%			1.020.000		135.474.000
Gas Bumi 0,5%			170.000		22.500
Gas Bumi Dalam Negeri Otsus					
Minerba			132.972.000		137.973.087
Iuran Tetap					
Royalti			132.972.000		137.973.087
Panas Bumi			17.016		113.913
Jasa Produksi					
Pungut Ulang			17.016		113.913
Kelebihan Bagi Hasil Pertambangan					
Cukai Hasil Tembakau		42.263.613			
PPh					
Pasal 21					
Pasal 25/29		42.263.613			
PPh Migas					
Jumlah Total		42.263.613	3.851.092.727	1.371.811.101	9.699.474.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

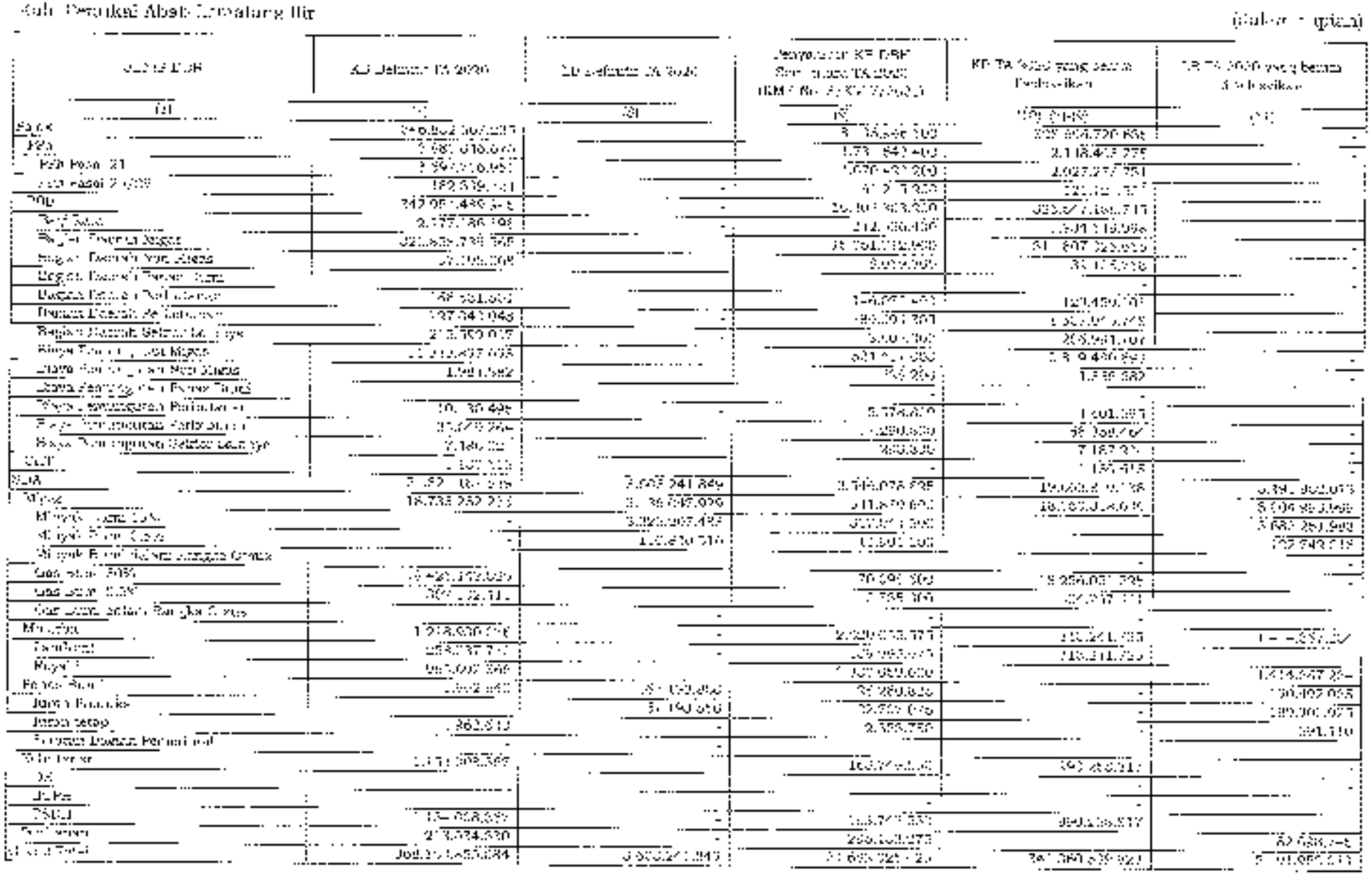

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Musi Rawas Utara

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak					
PBB					
PBB Pasal 21					
PBB Pasal 25/29					
BPHTB					
Cukai Hasil Tembakau					
Pungutan Daerah Migas					
Pajak Daerah Non Migas					
Pajak Daerah Pemungut Pusat					
Pajak Daerah Pemungut Provinsi					
Pajak Daerah Pemungut Kabupaten/Kota					
Pajak Daerah Pemungut Desa/Kelurahan					
Pajak Penerangan Jalan Non Migas					
Pajak Penerangan Jalan Migas					
Pajak Penerangan Jalan Pemungut Pusat					
Pajak Penerangan Jalan Pemungut Provinsi					
Pajak Penerangan Jalan Pemungut Kabupaten/Kota					
Pajak Penerangan Jalan Pemungut Desa/Kelurahan					
PAJAK					
SDA		47.171.674	1.569.418.696	2.176.792.107	(607.373.411)
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Daerah					
Gas Bumi 15%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah					
Mineral			1.522.535.206	3.970.735.483	(2.448.200.277)
Landrent			(47.535.171)	3.970.735.483	(4.018.270.654)
Royalti			1.570.070.147		1.570.070.147
Panas Bumi					
Dana Provisi					
Iuran Tetap					
Setoran Sebagai Kontraktor					
Kehutanan		1.107.020			
DR					
PSDH					
PSDH		1.107.020			
Perikanan					
Pajak Lain		48.278.694	1.571.953.902	6.147.527.590	(4.575.573.688)

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Misi Rewas Unaa

Dalam rupiah

Jenis DBH	PK Tahun TATA 2020	TD Desember TA 2020	Penyaluran TA 2021 sampai dengan Desember TA 2020 (PMK No. 81/PMK.07/2021)	PK TA 2021 sampai dengan Januari	TA TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
PPh	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Pemerintah dari Hasil Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pemerintah dari Hasil Pertambangan Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pemerintah dari Hasil Pertambangan Minyak Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Pemerintah dari Hasil Pertambangan Gas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Rokok	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Dana Reboisasi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Dana Bagi Hasil Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Dana Bagi Hasil Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Dana Bagi Hasil Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
DBH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-		-		-
Gas Bumi 30%	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi 0,5%	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Tetap	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Royalti	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Bunga Pinjaman		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Iuran Eksplorasi	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Sebesar Dasar Penyaluran			-	-	
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PSDH	-				-
DBHI			-		
PSDH	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Bengkulu

(Dalam Rupiah)

Jenis DBH	PP No. 2/2017	Lebih Bayar 2019	Kurang Bayar 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyesuaian (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa Lebih s.d. 05.2019 (SMS No. 3/PK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
Pajak	-	-	2.224.059.140	(1.110.299.241)	1.113.759.899
PPh	-	-	1.979.524.140		1.979.524.140
PPh Pasal 21	-	-	1.248.536.714		1.248.536.714
PPh Pasal 25/29	-	-	731.055.997		731.055.997
PBB	-	-	244.535.000	1.960.034.148	2.204.569.148
BPHTB	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	244.535.000	261.078.148	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	1.979.524.140	1.699.034.148	3.678.558.288
Bagian Daerah PPh Migas	-	-	526.146.667	51.139.333	126.015.201
Bagian Daerah PPh Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau Migas	-	-	15.701.711		15.697.747
Cukai Hasil Tembakau Non Migas	-	-	36.842.293		30.511.035
Bagian Pemerintah Daerah (Migas)	-	-	21.979.482		5.637.288
Bagian Pemerintah Daerah (Non Migas)	-	-	7.237.987		7.238.988
Dana Perimbangan Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
DAU	-	-	-	-	-
DAK	-	27.794.974	17.599.463.915		17.571.669.941
Migas	-	-	-	-	-
Subsidi Dana ISN	-	-	-	-	-
Subsidi Dana 0,3%	-	-	-	-	-
Subsidi Dana Tambahan Migas Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Tahap Pertama dan Tahap Kedua	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	12.757.463.915	-	12.757.463.915
Landrent	-	-	2.132.700.028	-	2.132.700.028
Royalti	-	-	10.624.763.887	-	10.624.763.887
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Perikanan	-	27.794.974	-	-	-
PHT	-	24.693.715	-	-	-
BHTPS	-	-	-	-	-
PSDH	-	3.101.259	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah DBH	-	27.794.974	19.823.522.195	1.960.034.148	21.783.557.343

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Bengkulu

(dalam rupiah)

Uraian	(1) DBH Definitif Tahun 2021	(2) Definitif TA 2020	Proyeksi Alokasi KF DBH Semesteran TA 2021 (PMK No. 33/PMK.07/2020)	(3) TA 2020 yang [illegible] disalurkan	(4) TA 2020 yang [illegible] dialokasikan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)-(d)	(f)
Total	18.203.103.000	-	8.435.115.000	10.500.000.127	932.012.127
PPh	13.351.[illegible]	-	4.819.221.000	8.587.034.050	-
PPh Pasal 21	3.734.892.[illegible]	-	3.034.550.000	6.040.705.177	-
PPh Pasal 25/29	700.[illegible]	-	184.[illegible]	515.887.85[illegible]	-
PBH	9.[illegible]	-	1.082.[illegible]	3.[illegible]	93.[illegible]
Opel Kota	-				-
Uraian [illegible]	189.[illegible]	-	[illegible]		70.[illegible]
Uraian [illegible]	1.[illegible]	-	58.[illegible]	[illegible]	
Uraian [illegible]	326.[illegible]	-	37.[illegible]	[illegible]	
Uraian [illegible]	3.[illegible]	-	1.[illegible]	[illegible]	-
Uraian [illegible]	358.[illegible]	-	21.[illegible]	[illegible]	-
Uraian [illegible]	4.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	2.[illegible]
Uraian [illegible]	30.[illegible]	-	2.[illegible]	[illegible]	
Uraian [illegible]	1.[illegible]	-	1.[illegible]	[illegible]	-
Uraian [illegible]	[illegible]	-	1.[illegible]	[illegible]	-
Uraian [illegible]	96.[illegible]	-	13.[illegible]	[illegible]	
Uraian [illegible]	17.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
DPT	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-				-
Migas [illegible]	-	-			-
Migas [illegible]	-	-			
Migas [illegible]		-			
PPh Pasal 22		-	-	-	
PPh Pasal 25/29		-	-	-	
PPh Pasal [illegible]					-
Pertambangan	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]		-	-	-	
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-				-
Kehutanan	342.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		-	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-				-
Jumlah Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bengkulu Selatan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar	Lebih Bayar	Alokasi Kurang Bayar DBH (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyesuaian Lebih Bayar DBH (PMK No. 143/PMK.07/2021)	Sisa Lebih Bayar DBH (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			[illegible]	[illegible]	-
PPh			[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	-		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	-		[illegible]	[illegible]	
PBB	-		[illegible]	[illegible]	
Cukai Hasil Tembakau	-		-	-	
Pajak Rokok	-		7.687.892	7.687.892	-
Bagian Dana Alokasi Khusus					-
Bagian Dana Alokasi Umum					-
Bagian Dana Bagi Hasil Pajak					
Bagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-				
Bagian Dana Bagi Hasil Pajak	-		[illegible]	[illegible]	
Bagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-		-	-	
Bagian Dana Alokasi Khusus			5.276.701	5.276.701	-
Bagian Dana Alokasi Umum					-
Bagian Dana Otonomi Khusus	-				
Bagian Dana Keistimewaan	-		-	-	
Bagian Dana Keistimewaan Yogyakarta					
Bagian Dana Keistimewaan Aceh	-		-	-	
Bagian Dana Keistimewaan Papua			7.607.943	7.607.943	-
Bagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat					-
Dana Perimbangan	-	737.182	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-		-		
Bantuan Dana Migas	-		-	-	
Bagi Hasil Migas	-		-	-	-
Bagi Hasil Migas Pertambangan Panas Bumi				-	-
Pajak Penghasilan Pasal 21	-				
Pajak Penghasilan Pasal 25					
Pajak Penghasilan Pasal 26					
Minerba	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Landrent		-	[illegible]	[illegible]	
Royalti		-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dana Reboisasi					-
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	-				
Pendapatan Bunga Dana Reboisasi	-		-	-	
Kehutanan		737.182	-	-	
PSDH				-	-
DBHDR				-	
Perikanan	-	737.182			
Cukai Ikan	-		-	-	
Dana Alokasi Umum		737.182	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bengkalis Selatan

(dalam rupiah)

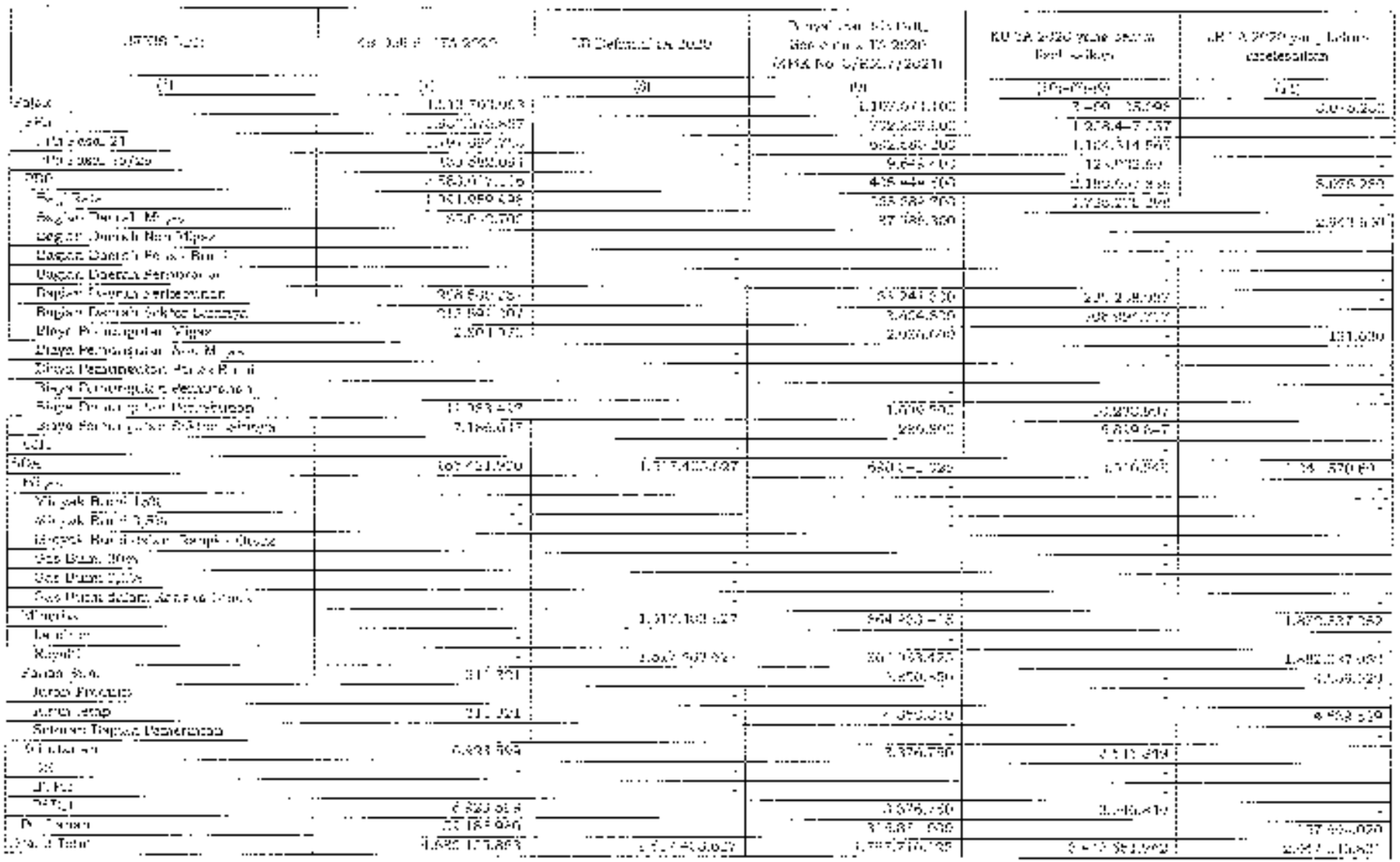

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sangkulirang Utara

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	TA 2021 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian TA 2021 (KEP No. 1/KM.7/2021)	KURANG BAYAR TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PBB			20,120,702,773	2,540,703,103	4,670,363,614
BPHTB			731,000,720		787,300,420
PPh Pasal 21			607,787,710		708,178,710
PPh Pasal 25/29			78,850,719		79,850,719
DBH			3,888,164,946	2,540,703,103	3,084,933,985
Migas					
Sektor Panas Bumi					
Bagian Daerah dari Migas			3,124,613,957	2,540,613,957	
Bagian Daerah dari PPh Migas			2,062,187,843	940,513,052	1,178,870,691
Bagian Daerah dari Pertambangan			1,062,426,114		1,062,426,114
Bagian Daerah dari Kehutanan			695,557,065		695,557,065
Bagian Daerah dari Pertambangan Panas Bumi					
Dana Alokasi Khusus Migas			6,714,527		3,118,691
Dana Perimbangan dari Migas			1,190,131,000		175,413,809
Dana Perimbangan dari Panas Bumi			77,830,536		77,830,536
Dana Perimbangan dari Pertambangan			16,677,132		16,677,132
Dana Perimbangan dari Kehutanan			4,167,795		4,167,795
Dana Perimbangan Sektor Lainnya					
Cukai					
SDA		3,170,384	30,050,645,715		22,000,611,215
Migas					
Minyak Bumi					
Gas Bumi					
Gas Bumi dari Blok Sebagian Daerah					
Pertambangan			30,050,645,715		22,000,611,215
Kehutanan			218,206,807		171,620,807
Perikanan			24,672,214,918		19,842,214,918
Pertambangan Panas Bumi					
Dana Reboisasi					
Pertambangan Umum					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		3,170,384			
DR					
PSDH					
Perikanan					
Jumlah Total			50,171,348,688	2,540,703,103	26,671,275,599

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bengkulu Utara

(Rupiah)

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak	12.230.000.527	-13.717.305	3.113.094.270	9.103.174.548	785.153.904
PBB	1.356.054.245		1.201.101.239	154.953.006	-
PBB Pasal 21	1.318.797.736		892.607.708	426.190.028	
PBB Pasal 21/29	58.797.181	-	58.797.181	77.955.621	
BPHTB	8.820.707.424	13.717.305	2.160.913.350	8.549.031.226	268.115.874
Cukai Hasil	1.017.477.902	-	265.645.401	729.210.299	
Pajak Penerangan Hiburan	17.295.724		107.498.401	-	42.156.097
Pajak Parkir Non Migas	2.120.010.350		715.207.960	1.559.015.793	-
Pajak Reklame Non Migas	75.150.317		12.003.200	63.147.117	-
Pajak Barang Jasa Tertentu	-	10.661.420	139.167.302		231.070.700
Pajak Barang Perkebunan	4.035.281.313	-	1.474.492.300	2.560.788.013	
Pajak Barang Jasa Lainnya	211.370.017		5.605.309	205.764.707	
Pajak Penerangan Migas	2.203.721		5.597.592	-	1.393.871
Pajak Reklame Non Migas	71.307.960		17.803.360	53.504.600	-
Pajak Pengambilan Bukan Bahan Galian	1.345.209	-	511.000	833.709	-
Pajak Pengambilan Bahan Galian	-	4.824.630	5.335.630		511.000
Pajak Barang Jasa Perdesaan	141.180.227		30.549.420	110.630.807	
Pajak Barang Jasa Perkotaan	1.191.677		286.207	5.690.347	
CHT	-				-
SDA	141.179.837	4.413.609.09	2.281.213.050		2.273.078.21
Kelapa	-	-	-		
Minyak Bumi 15%		-	-	-	
Minyak Bumi 85%			-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka OTSUS					-
Gas Alam 30%					-
Gas Alam 70%					-
Gas Alam dalam Rangka OTSUS	-				
Kehutanan	624.032	5.458.990.59	141.253.035		1.603.230.13
Perikanan	624.032	-	11.125.020	-	1.130.160.19
Panas Bumi		7.068.220.891	2.251.478.025	-	7.458.219.1
Pajak Air Tanah	91.211		250.630	-	4.836.492
Pungutan Air Permukaan	-			-	-
Iuran Hasil	31.421	-	1.250.320		4.836.021
Pungutan Hasil Perikanan		-	-		
Kehutanan		10.719.201	65.677.135	-	26.709.212
DR				-	-
DBHR	-				-
PSDH	-	10.719.201	51.933.170		26.305.172
Dana Reboisasi	532.790.843	-	13.821.030		532.691.342
Jumlah Total	12.486.000.000	4.730.826.201	7.706.650.730	9.084.561.375	9.036.541.215

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Rejang Lebong

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar	Lebih Bayar	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2019 (PMK Nomor 05/PMK.07/2020)	Penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2019 (SAKTI Nomor S-3234/PK/2020)	Alokasi Lebih Bayar DBH Tahun 2020 (KEPMK Nomor 270/KM.7/2021)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)
Pajak			1.213.068.000	603.455.000	609.613.000
PBB			152.370.000	-	152.370.000
BPHTB			97.000.000	-	97.000.000
PPh Pasal 21/26	-		64.698.000	-	48.263.000
PDRD	-		1.001.000.000	603.455.000	397.000.000
Cukai Hasil Tembakau	-	-	53.253.000	53.253.000	-
Bagian Daerah Penghasil Migas		-	183.567.000	183.567.000	
Bagian Daerah Penghasil Non Migas			-	-	
Bagian Daerah Penghasil Pajak Bumi dan Bangunan			77.382.000	371.454.000	(294.072.000)
Bagian Daerah Penghasil Cukai Hasil Tembakau			-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Pajak Rokok			-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Sektor Lainnya		-	-		
Biaya Pemungutan Migas		-	3.456.000		3.456.000
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26			25.317.000	-	25.317.000
Biaya Pemungutan Pajak Daerah			-		
Biaya Pemungutan Cukai Hasil Tembakau			-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok			-	-	-
DAU	-	-	-	-	-
SDA	-	666.146	1.063.218.000	-	1.063.218.000
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (85%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (0,5%)		-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi (70%)			-	-	-
Gas Bumi (0,5%)			-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus			-	-	-
Minerba	-	-	1.001.000.000		1.001.000.000
Landrent		-	-		
Royalti	-	-	61.218.000		61.218.000
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Eksplorasi			-	-	-
Iuran Eksploitasi	-			-	-
Kehutanan	-				-
Provisi Sumber Daya Hutan	-	666.146	1.000.000		1.000.000
DR		-	-	-	-
IHPH				-	-
PSDH	-	666.146	1.000.000		1.000.000
Perikanan	-	-	-		-
Pungutan Hasil Perikanan		666.146	61.218.000	603.455.000	(542.237.000)

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Rejang Lebong (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. [illegible]/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.742.766.127	-	1.271.634.200	[illegible]	5.598.1[illegible]
PPh	1.329.073.377	-	865.424.200	463.646.177	-
PPh Pasal 21	1.197.210.310		846.736.000	350.607.310	-
PPh Pasal 25/29	131.[illegible]		18.687.200	163.638.[illegible]	-
PBB	1.907.765.659		406.1[illegible]	2.001.[illegible]	5.598.[illegible]
Bagi Rata	1.361.969.998		225.[illegible]	1.1[illegible]	
Bagian Daerah Migas	92.[illegible]	-	102.591.806		5.5[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	3.689.035	-	-	3.689.035	
Bagian Daerah Panas Bumi	1[illegible]	-	7.2[illegible]	37.[illegible]	-
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	[illegible]		1[illegible]	10[illegible]	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	25[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	7.437.[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]	-	-	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	1.616.26[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-				
Biaya Pemungutan Perhutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
CHT		-	-	-	-
SDA	[illegible]	1.917.[illegible]	70[illegible]	3.5[illegible]	[illegible]
Migas					
Minyak Bumi 15,5%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Landrent	-				
Royalti	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Kehutanan	747.778	-	[illegible]		[illegible]
Iuran [illegible]		-	-	-	-
[illegible]	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah					
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	-	-	-		
[illegible]			-	-	-
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Bengkulu

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	PENYALURAN DBH TAHUN 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2019)	PENYALURAN DBH TAHUN 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	SELISIH PENYALURAN DBH TAHUN 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
PPh			490.141.418	490.141.418	
PPN			490.141.418	490.141.418	
DBH Pasal 21			20.413.060	20.413.060	
DBH Pasal 25/29			469.728.358	469.728.358	
PBB					
Bagi Rata					
Bagian Daerah Provinsi					
Bagian Daerah Kabupaten/Kota					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Pemerataan					
Bagian Daerah Kabupaten/Kota					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Pemerataan Kabupaten/Kota					
Bagian Pemerataan Kabupaten/Kota					
Bagian Pemerataan Kabupaten/Kota					
BPHTB					
Cukai		690.145	1.367.603.623	77.383.958	1.705.949.935
Migas					
Migas Bagian 0,5%					
Migas Bagian 15%					
Migas Bagian Dalam Rangka Otsus					
Gas Bagian 70%					
Gas Bagian 30%					
Gas Bagian dalam Rangka Otsus					
Minerba			1.367.603.623	77.383.958	1.705.949.935
Panas Bumi					
Royalti			1.367.603.623	77.383.958	1.290.219.665
Jenis Pajak					
Jenis Pajak					
Jenis Setoran					
Pemotong Pajak Penghasilan					
Pemotong Pajak Penghasilan		690.145			
Pasal 21					
Pasal 22					
Pasal 23		690.145			
Pasal 26					
Pemotong Pajak Penghasilan		690.145	1.771.657.541	567.525.376	1.204.822.600

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Bengkulu

(dalam ribuan)

URAIAN	KB TAHUN BERJALAN	LB TAHUN BERJALAN	Perubahan KB TA 2021 (PMK No. 9/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)	(6)
DBH	1.214.181.076		4.281.770.300	5.495.951.376	21.870.000
PBH	6.650.990.870		5.778.557.900	872.432.970	
PBH Pasal 21	791.010.276		647.870.400	1.438.880.676	
PBH Pasal 26(2)	387.835.870		218.038.000	605.873.870	
DAU	5.261.134.724		910.332.000	4.350.802.724	27.372.000
Pajak	1.071.039.709		250.000.000	1.321.039.709	
Bagian Daerah Penerimaan	93.040.276		72.120.000		21.080.276
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Migas Bruto					
Bagian Daerah Penerimaan					
Bagian Daerah Perhitungan					
Bagian Daerah Kurang Salur Lainnya	977.999.433		177.880.000	800.119.433	
Biaya Pemungutan Migas	1.178.201		2.412.000		234.000
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Atas Bunga					
Biaya Pemungutan Perhitungan					
Biaya Pemungutan Kurang Salur					
Biaya Pemungutan Kurang Salur Lainnya	(1.000)		37.470	3.998.470	
DAK					
DBHCHT	485.471.900	1.517.403.827	600.472.000	1.402.403.727	1.118.570.000
Sektor					
Migas Pajak PBH					
Migas Pajak PPh					
Migas Pajak PPh Pasal 22					
Gas Bumi PBH					
Gas Bumi PPh					
Gas Bumi PPh Pasal 22					
Minerba		1.517.403.827	531.923.000		985.480.827
Perikanan					
Pajak		1.517.403.827	399.923.000		1.917.403.827
Pajak Bumi	21.021		4.132.000		2.889.000
Pajak Penghasilan					
Bunga Migas	21.021		10.021.000		4.836.926
Bagian Daerah Penerimaan					
Kehutanan	4.978.979		3.978.000	8.956.979	
PSDH					
DR					
Iuran IUPHH					
PNBP	4.978.979		3.978.000	8.956.979	
Perikanan	4.626.999		2.812.000	6.814.999	
Pajak	352.980		1.166.000	2.141.980	
PNBP					
Jumlah	1.710.603.476	1.517.403.827	4.718.242.300	3.449.828.104	2.049.252.827

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Rata Kiri

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LP TA 2015 (PMK No. 212/PMK.07/2021)	Penyelesaian LP TA 2015 (KMK No. 1/KM.7/2021)	Sisa KB TA 2019 (KMK No. 8/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	3.[illegible]	[illegible]	30.[illegible]
PPh	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Proporsional Migas	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Dana Bagi Hasil Pajak Dalam	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Penghasil Pajak	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Migas	-	-	[illegible]	[illegible]	-
Dana Perimbangan Dari Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagi Hasil Migas Dari Dana	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Pajak	-	-	[illegible]	[illegible]	-
Dana Perimbangan Dari Pajak	-	-	-	-	-
DAU	-	-	-	-	-
DBH	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	-	-	-	-
Migas Bagian 15%	-	-	-	-	-
Migas Bagian 0,5%	-	-	-	-	-
Migas Dana Bagi Hasil Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Dari Pajak PPh	-	-	-	-	-
Dari Pajak PBB	-	-	-	-	-
Dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Panas Bumi	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kehutanan	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	[illegible]	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
PPh Pasal 22 Impor	-	[illegible]	-	-	-
Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Jumlah Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kaur

(dalam rupiah)

URAIAN	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Dokumen PMK 81/2021 (Kurang/Lebih TA 2021) (SMK No. 0303/...2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
DBH	4.785.752.128		359.528.390	3.926.784.828	3.478.742
PPh	687.154.068		173.214.864	513.939.204	-
PPh Pasal 21	636.948.677	-	151.297.260	485.651.417	-
PPh Pasal 25/29	42.254.788	-	9.453.344	32.801.444	-
PBB	3.048.892.310	-	849.168.730	3.032.105.310	4.078.730
Bagi Rata	1.941.213.996	-	746.468.970	1.720.211.256	
Bagian Daerah Migas	120.000....		12.700.810	-	3.221.320
Dasar Perhitungan Bagi Hasil	32.912....		1.750.0	30.512....	-
Jumlah Luas Wilayah Kab/Kota	2.017....		7.050....	-	42.550
Bagian Daerah Penghasil	-	-			-
Bagian Daerah Perimbangan	1.100.181....	-	59.957.530	1.071....	
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	210....		9....	198....	
Dana Perimbangan Migas	3....		1....	-	193....
Dana Perimbangan Dan Alokasi	....		60....	1....	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	....	-	130....	1....	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya		-	-		
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya	1....		2....	47....	
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya	7....		280....	1....	-
DLH	-				-
PNBP	7....	551.945....	364....	28....	1....
Migas		-	-		
Minyak Bumi (15%)		-	-		
Minyak Bumi (0,5%)				-	
Bagian Daerah Penghasil Migas	-			-	-
Gas Bumi (70%)	-				-
Gas Bumi (0,5%)		-			-
Gas Bumi Dalam Rangka Pengusahaan Panas Bumi		-			-
Pertambangan		1....	3....		1....
Kehutanan		....	21....	-	2....
Perikanan		1....	3....	-	1....
Bagian Laut	3....		1....	-	1....
Bagian Pemerintah				-	-
Pertambangan	3....	-	4....		1....
Kehutanan Reguler Penyeimbang		-	-		
Perikanan	21....		7....	28....	
DAU	-			-	-
DAK	-				-
Pajak	21....	-	3....	21....	
Bukan Pajak	1....		11....		1....
Grand Total	4....	1....	1....	3....	1....

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

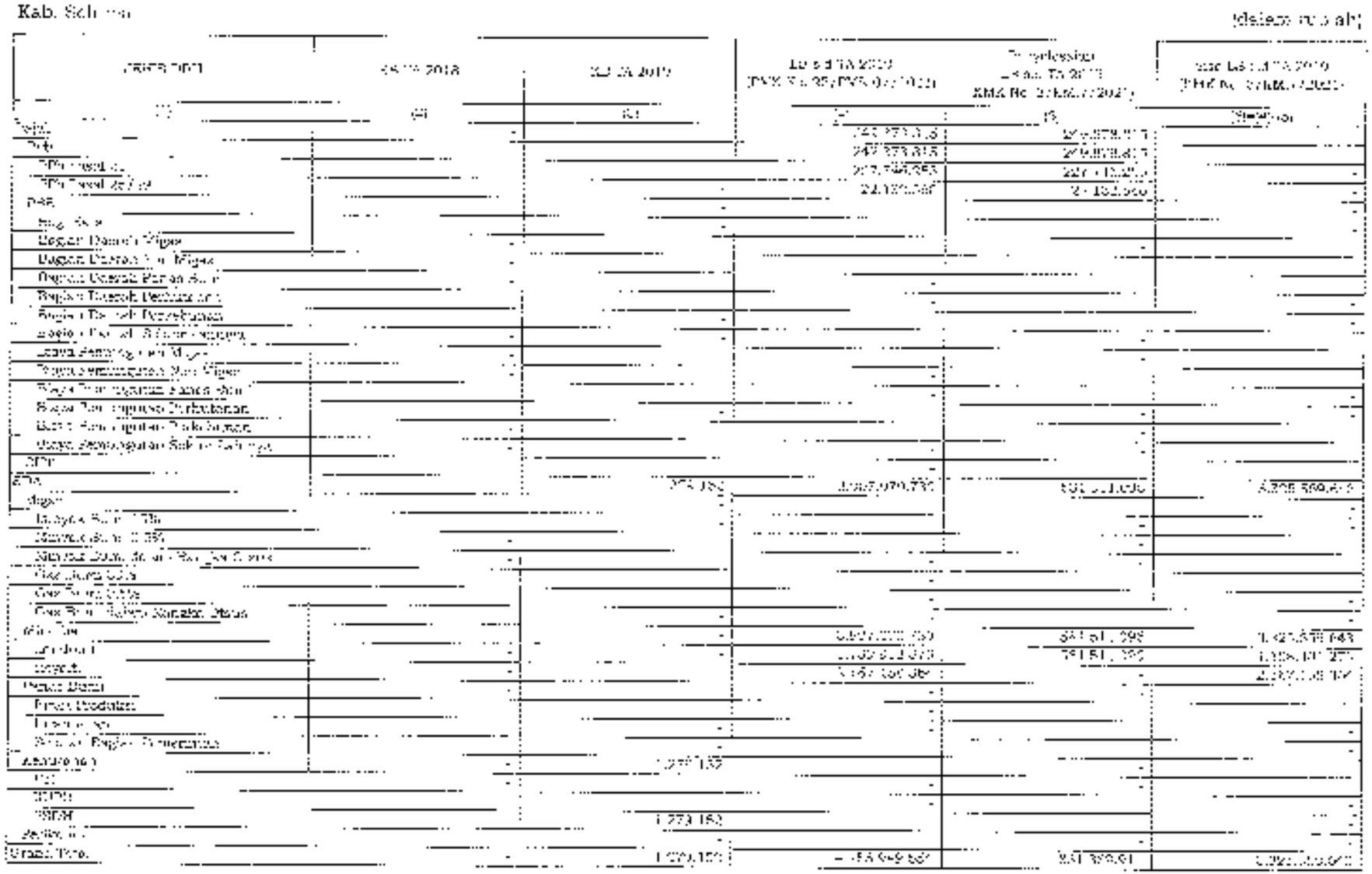

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sekota

(dalam rupiah)

Uraian DBH	KB Dalam PMK 205/...	KB Dalam PMK 205/...	Perubahan KB DBH Sesuai PMK No. 205/PMK.07/2021	KB DBH yang belum dibayarkan	KB DBH yang telah dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6)
DBH	1.317.712.000		1.470.778.000	1.466.187.363	4.590.637
PPh	864.177.000		964.249.000	959.658.363	4.590.637
PPh Pasal 21	80.170.000		105.301.000	100.779.000	4.522.000
PPh Pasal 25/29	94....		9....	32.749.000	68.637
PBB	1.153....		1....	1.311....	4....
BPHTB	1.011....		1....	1.726....	1....
Dana Bagi Hasil Migas	120....		134....	134....	1....
Dana Bagi Hasil Non Migas	120....		1....	26....	1....
Kurang Salur Dana Bagi Hasil Migas Tahun Anggaran 2020					
Kurang Salur Dana Bagi Hasil Non Migas Tahun Anggaran 2020					
Kurang Salur Dana Bagi Hasil Migas Tahun Anggaran 2019	2....		3....	3....	
Kurang Salur Dana Bagi Hasil Non Migas Tahun Anggaran 2019	5....		5....	20....	
Kurang Penyaluran Dana Bagi Hasil Migas	3....		1....		1....
Kurang Penyaluran Dana Bagi Hasil Non Migas	1....		1....	1....	
Kurang Penyaluran Dana Otsus Tahun Anggaran 2020					
Kurang Penyaluran Dana Otsus Tahun Anggaran 2019	-				
Kurang Penyaluran Dana Otsus Tahun Anggaran 2018	15....		5....	14....	
Kurang Penyaluran Dana Otsus Tahun Anggaran 2017	7....		2....	2....	
DTH					
DAK	277....	2....	3....	1....	6....
Migas					
Migas (1%)	-				
Migas (0,5%)	-		-	-	
Migas Untuk Kabupaten Kepulauan Seribu			-	-	
Pajak Bumi 20%					
Pajak Bumi 0,5%					
Pajak Bumi Untuk Pengelola Kawasan					
Minerba	9....	2....	1....	1....	1....
Landrent	9....	-	1....	1....	
Royalti	-	1....	4....	-	2....
Panas Bumi	1....		4....	-	5....
Cukai Hasil Tembakau					
Pajak Rokok	1....		4....		2....
Otsus Papua					
Otsus Papua Provinsi					
Otsus Papua Kabupaten/Kota					
Otsus Papua Tambahan	1....		3....	3....	
Otsus Papua Tambahan Provinsi					
Otsus Papua Tambahan Kabupaten/Kota			-	-	
Otsus Papua Infrastruktur					
Otsus Papua Infrastruktur Provinsi	2....		6....	6....	
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten/Kota	13....	-	3....	4....	1....
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Pemekaran					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Pemekaran Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Pemekaran Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya					
Otsus Papua Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Seribu Pemekaran Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu Lainnya Tertentu

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mukomuko

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PPh Ps. 25/29	PBB	BPHTB	Pengenaan PPh Ps. 25/29 (KMK No. 378/KM.7/2021)	Sisa Lebih Salur (PMK No. 226/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tarak	-	-	105.970.010	105.970.010	5.321.302
PPh	-	-	100.967.690	100.967.690	-
PPh Pasal 21	-	-	33.506.696	33.506.696	-
PPh Pasal 25/29	-	-	67.060.997	67.060.997	-
PBB	-	-	5.321.302	-	5.321.302
Hasil Hutan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Minerba	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Panas Bumi	-	-	5.144.636	-	5.144.636
Bagian Daerah dari Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Perikanan	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Dana Kehutanan Migas	-	-	-	-	-
Dana Kehutanan Minerba	-	-	-	-	-
Dana Kehutanan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Kehutanan Pertambangan	-	-	-	-	-
Dana Kehutanan Perikanan	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
CHT	-	1.230.170	1.836.717.329	39.651.482	1.798.065.847
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (85%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Wilayah Daerah	-	-	-	-	-
Gas Bumi (30%)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (0,5%)	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Wilayah Daerah	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	1.831.395.797	39.651.482	1.798.065.847
Royalti	-	-	1.831.395.797	39.651.482	1.798.065.847
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Bunga Pinjaman	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	-	-
PPN	-	1.230.170	12.321.302	12.321.302	-
PPnBM	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	12.321.302	12.321.302	-
PPh Pasal 26	-	1.230.170	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah Total	-	1.230.170	1.954.184.327	151.972.784	1.803.387.149

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mukomuko (dalam rupiah)

URAIAN	KB Sebelum TA 2020	KB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Sampai dengan TA 2020 KMK No. 3/KM.7/2021	KB s.d. 2020 yang belum disalurkan	LB s.d. 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)	(6)
Pajak	11.679.213.013		2.635.281.303	9.043.820.726	4.880.113
PPh	484.304.579		660.345.383	825.058.776	-
PPh Pasal 21	432.902.541		647.548.203	773.354.341	-
PPh Pasal 25/29	51.402.038	-	12.797.180	51.704.435	-
PBB	11.194.908.434	-	2.271.095.303	8.220.575.251	4.880.113
Bagi Rata	1.771.850.958	-	155.589.760	1.726.273.299	-
Bagian Daerah Migas	531.096.071		36.277.000	-	1.657.769
Bagian Daerah Non Migas				-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	36.194		54.150	-	173
Bagian Daerah Perkebunan	1.365.074.093		61.250.570	1.303.823.523	-
Bagian Daerah Perhutanan	8.321.330.747	-	1.671.318.700	6.650.012.047	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	211.708.507	-	5.460.330	206.248.177	
Biaya Pemungutan Migas	4.039.591		1.745.410	-	209.556
Biaya Pemungutan Non Migas	-			-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	786		1.200	38	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	55.786.158	-	3.364.030	52.422.128	
Biaya Pemungutan Perhutanan	290.952.857		72.349.790	218.603.067	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	10.196.847		1.820.000	8.376.847	-
CHT	-			-	-
SDA	1.098.508.357	1.517.403.697	590.092.025	2.025.820.029	2.094.373.007
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 15%		-	-		
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi dalam rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-				-
Gas Bumi dalam rangka Otsus	-	-			
Minerba	-	1.517.403.697	364.532.425		1.952.877.032
Iuran Tetap		-	-	-	
Royalti		1.517.403.697	364.532.425	-	1.952.877.032
Panas Bumi	311.321		4.650.975	-	4.339.654
Setoran Produksi	-				-
Iuran Tetap	311.321	-	4.650.975		4.339.654
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-		
Kehutanan	1.098.053.836		3.876.725	595.513.865	
DR				-	-
IIUPH	453.744.000			1.453.744.000	-
PSDH	75.761.454	-	3.876.725	71.884.729	
Perikanan	175.193.020	-	216.831.002		137.156.321
Grand Total	12.777.721.370	1.517.403.697	3.225.373.328	11.069.640.755	2.099.253.120

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kabupaten/Kota (Dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR DBH TA 2020	LEBIH BAYAR DBH TA 2019	Alokasi Kurang Bayar DBH TA 2021 (PMK No. 03/PMK.07/2021)	Perubahan Alokasi Kurang Bayar DBH TA 2021 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	Alokasi Kurang Bayar DBH TA 2021 Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)
Pajak			1.749.750.923	532.359.877	1.206.032.156
PBB			287.233.842	-	287.233.842
BPHTB			211.070.709	-	345.816.453
PPh Pasal 21			32.210.021	-	32.210.021
DBH			1.710.295.813	532.359.877	627.461.771
Bagi Rata					
Bagi Rata Negeri					
Bagi Rata Provinsi					
Bagian Daerah Penghasil			1.310.206.913	532.816.179	777.390.734
Bagian Daerah Penerima Alokasi					
Bagian Daerah Penghasil			79.113.100		79.113.100
Bagian Daerah Penerima Alokasi					
Bagian Penerimaan Negara					
Bagian Penerimaan Negara Migas			202.000		202.000
Bagian Pemerintah Pusat			79.101.000		79.101.000
Bagian Penerimaan Pertambangan					
Bagian Penerimaan Pertambangan			1.551.648		1.551.648
Bagian Penerimaan Pertambangan					
PPh					
PDA		489.146	3.193.790.000		3.193.489.146
Migas					
Migas Sumber					
Migas Sumber					
Migas Sumber Daerah Penghasil					
Gas Bumi					
Gas Bumi					
Gas Bumi Sumber Daerah Penghasil					
Minyak			3.193.790.000		3.193.489.146
Bunga			203.666.159		203.666.159
Royalti			2.364.755.41		2.364.755.41
Panas Bumi					
Sumber Daerah					
Sumber Daerah					
Pertama					
Kedua					
Ketiga					
Keempat					
Kelima		489.146			
Dst					
Total					
Tambah		489.146			
Grand Total			7.308.369.792	532.359.877	7.776.729.669

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lorem ipsum

(dalam rupiah)

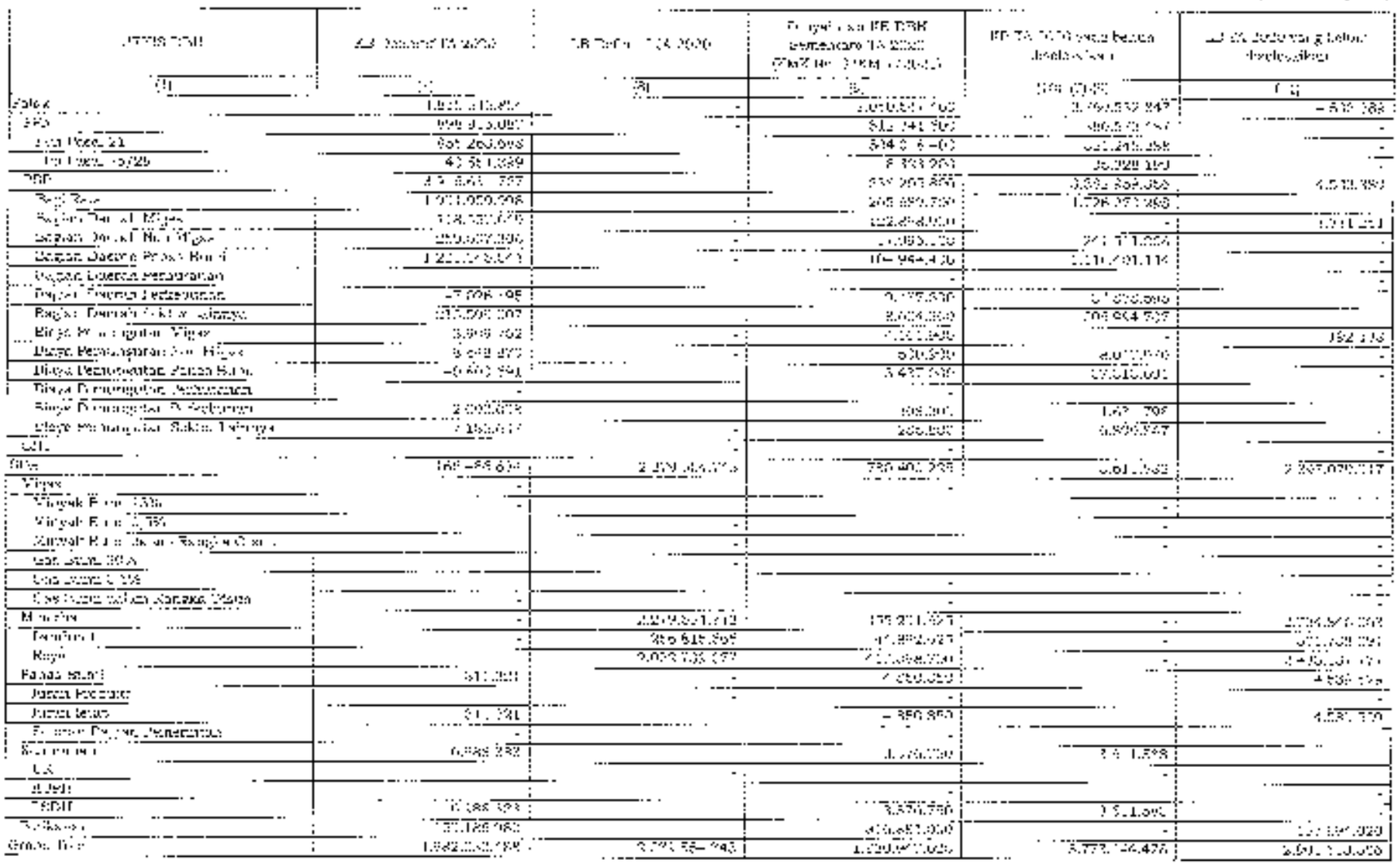

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kapuas Hulu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	LEBIH BAYAR TA 2018	PENETAPAN TA 2019 (PMK No. 217/PMK.07/2020)	Penyaluran TA 2019 (KMK No. 374/KM.7/2021)	Kurang (Lebih) Bayar TA 2019 (PMK No. 8/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			221.253.051	221.253.051	
Jumlah			705.963.585	705.963.585	
PPh Pasal 21			191.552.176	191.552.176	
PPh Pasal 25/29			23.014.630	23.014.630	
PBB			5.272.496	5.272.496	
Bagi Rata					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Non Penghasil					
Bagian Daerah Kabupaten/Kota					
Bagian Daerah Perbatasan					
Bagian Daerah Perkebunan			7.020.042	7.020.042	
Bagian Daerah Kehutanan Tertinggal					
Bagian Pertambangan Minyak			3.026.071	3.026.071	
Bagian Pertambangan Non Migas					
Bagian Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Perikanan					
Bagian Pertambangan Penghasil Perikanan			913.278	913.278	
Bagian Pertambangan Baku Tertinggal					
Cukai					
Migas		758.030	2.455.220.942	46.495.181	(1.408.324.209)
Minyak					
Minyak Bumi (15%)					
Minyak Bumi (0,5%)					
Kelebihan Bayar dari Kontraktor Asing					
Gas Alam (30%)					
Gas Alam (70%)					
Gas Alam Bagian Kontraktor Asing					
Mineral			1.443.245.130	22.495.182	(1.420.749.948)
Tambang					
Panas Bumi			2.110.249.394	23.905.183	(2.086.344.209)
Kehutanan					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap					
Provisi Sumber Daya Hutan					
Reboisasi		758.030			
DR					
Luas					
PSDH		758.030			
Perikanan					
Jumlah DAU		758.030	3.660.236.210	83.504.359	(3.576.731.851)

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauang

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi DBH Tahun 2022	DB Terhutang Tahun 2021	Realisasi KB 2021 Sesuai PMK 226/PMK.07/2021 (PMK No. 9/PMK.7/2022)	KB yg Belum/Lebih Bayar Kurang dikurangkan	KB yg [illegible] dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)
Pajak	2.347.010.082		968.115.860	2.609.011.535	3.316.774
PBB	1.998.301.932		548.955.860	535.740.752	-
PBB Pasal 21	1.934.108.810		531.107.860	478.317.503	-
PBB Pasal 25/29	64.192.999		17.848.000	31.705.779	-
BPHTB	2.467.071.850		702.041.000	2.060.016.783	3.316.774
Cukai Data	1.911.080.018	-	201.369.720	1.720.277.264	-
Pungutan Daerah Lainnya	94.110.307	-	101.960.720	-	3.741.016
Pungutan Daerah Non Pajak			-	-	-
Pungutan Daerah Pajak Lain			-	-	-
Pungutan Daerah Perkebunan			-	-	-
Pungutan Daerah Perkebunan	8.448.774		21.894.000	13.445.226	-
Pungutan Daerah Sektor Lainnya	81.580.107	-	80.066.720	206.994.703	-
Pungutan Daerah Lainnya	3.240.000	-	3.319.820	-	180.000
Pungutan Daerah Non Migas			-	-	-
Pungutan Daerah Pajak Lain			-	-	-
Pungutan Perkebunan Asal Migas	-	-			
Pungutan Perkebunan Asal Migas	3.172.907	-	960.000	3.021.097	
Pungutan Perkebunan Asal Migas	1.145.200	-	956.800	2.309.847	
DPH				-	
SDA	47.951.951	1.511.403.697	711.830.000	3.434.760	1.663.410.736
Cukai	-	-			
Alokasi Cukai Lain	-	-			
Pungutan Cukai Lain		-			
Pungutan Pajak Rokok Daerah Cukai			-	-	
Cukai Rokok			-	-	-
Cukai Rokok			-	-	-
Cukai Rokok Pungutan Daerah Cukai			-	-	-
Kehutanan	-	1.511.403.697	91.601.000		1.663.410.736
Landbase	-	-	-	-	
Tanah		1.511.403.697	464.338.425		1.663.410.736
Pajak Lain	1.000.000		27.847.305		25.000.000
Pajak Tidak Ada			-	-	-
Pajak Lain	3.263.772		27.847.305		25.000.000
Beberapa Lainnya Pemerintah	-				
Kehutanan	3.171.779	-	3.078.000	3.021.000	
PBB		-	-	-	
PBB				-	-
PBB	3.171.519		1.078.000	3.021.000	-
Perkebunan	150.154.050		316.991.050		107.041.000
Grand Total	3.727.428.413	1.511.403.697	1.630.357.160	7.845.921.021	2.066.241.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Provinsi / Kabupaten/Kota :

(dalam rupiah)

JENIS DBH	SUMBER	KETERANGAN	Sesudah Perubahan (PMK No. 93/PMK.07/2021)	Perubahan ke-1 (KEP-76/PK.3/2021)	Sisa Kurang Bayar (KEP-79/PK.3/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PPh			1.005.018.674	145.913.446	
PPN			9.[illegible].871	92.921.875	
PBB			7.[illegible].382	7.[illegible].532	
PPh Pasal 21/26			27.[illegible].113	1.[illegible].434	
CHT			9.[illegible].771	87.[illegible].013	
Bagi Hasil					
Bagi Hasil Sumber Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas Lainnya					
Bagian Daerah Penghasil Migas Dana Bagi Hasil					
Bagian Daerah Penghasil Migas Dana Alokasi Khusus					
Bagian Daerah Penghasil Migas Dana Otonomi Khusus					
Bagian Daerah Penghasil Migas Dana Keistimewaan DIY					
Bagian Daerah Penghasil Migas Dana Tambahan Infrastruktur					
Bagian Daerah Penghasil Migas Dana Penyesuaian Infrastruktur					
Bagian Daerah Penghasil Migas Dana Otonomi Khusus Papua					
Bagian Daerah Penghasil Migas Dana Otonomi Khusus Papua Barat					
Bagian Daerah Penghasil Migas Dana Keistimewaan DIY					
Bagi Hasil Sumber Daya Alam					
PPh		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas					
Migas Bagian Pemerintah					
Migas Bagian Pemerintah 0,5%					
Migas Bagian Daerah Penghasil					
Dari Bagian 0,5%					
Dari Bagian 0,5%					
Dari Bagian Daerah Penghasil Lainnya					
Pertambangan			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Minyak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Gas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Panas Bumi					
Kehutanan					
Iuran Hasil Hutan					
Provisi Sumber Daya Hutan					
Pertambangan Umum		[illegible]			
Iuran Tetap					
Iuran Eksploitasi					
Pertambangan Minyak Bumi					
Pertambangan Gas Bumi					
Pertambangan Panas Bumi					
Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Rokok		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DBH Lainnya					
Jumlah Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sangkulirang

(Rupiah)

URAIAN	PMK Alokasi TA 2020	KB Definitif TA 2020	Pagu Definitif DBH Berdasarkan PMK Alokasi TA 2021 (PMK No. 210/PMK.07/2021)	PMK TA 2020 yang Seharusnya (Dasar Perhitungan)	KB TA 2020 yang Belum Disalurkan (Dasar Perhitungan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (2)	(6) = (3) - (5)
DBH	6.774.945.861		1.010.021.702	3.201.912.142	3.572.961
DBH Migas	1.209.780.069		990.208.702	2.200.077.302	-
DBH Migas - Lifting	1.209.101.069		990.101.102	2.199.112.202	
DBH Migas - PPh Pasal 22 Migas	679.000		107.600	786.600	
DBH PBB	1.278.100.020		1.019.846.302	4.345.210.920	2.200.092
DBH Pajak Lainnya	1.291.954.998		949.660.700	796.271.918	
Dana Bagi Hasil Migas	915.000.015		98.048.100	-	1.542.085
Dana Bagi Hasil Non Migas	1.187.885.158		318.602.000	1.530.202.108	-
Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi	-				-
Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak					
Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Alam	1.270.000.000		968.000.000	363.969.000	
Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	200.000.157		3.607.200	209.364.525	
Dana Otonomi Khusus	3.666.404		3.081.100	-	1.585
Dana Penyesuaian	60.477.700		10.670.900	21.411.270	
Dana Penyesuaian Papua Barat					
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus			-	-	
Dana Penyesuaian Daerah Istimewa	90.905.511		13.720.000	43.113.044	
Dana Penyesuaian Keistimewaan Yogyakarta	7.380.547		280.000	3.490.447	
DAU	-				
DAK	104.121.900	9.852.371.000	2.183.116.975	3.010.010	11.111.111.111
Fisik			-	-	
DAK Fisik Reguler					
DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan					-
DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan					-
DAK Fisik Reguler Bidang Infrastruktur					-
DAK Fisik Reguler Bidang Kewilayahan					
DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian					
DAK Fisik Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan					
DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata					
DAK Fisik Reguler Bidang Perdesaan					
DAK Fisik Afirmasi		3.211.870.000	1.268.208.125	-	1.370.370.701
DAK Fisik Penugasan		1.208.300.000	370.010.125	-	1.264.289.875
DAK Fisik Lainnya		2.152.200.000	1.027.397.250	-	12.199.824
DAK Nonfisik	3.121		1.000.000		4.330.525
DAK Nonfisik Reguler	-	-			-
DAK Nonfisik Afirmasi	3.121	-	4.600.000		4.600.000
DAK Nonfisik Penugasan			-		
Kabupaten	79.000.000		3.500.000	6.600.000	
DID	-				-
Provinsi	-				
DBH-CT	3.000.000		5.000.000	5.600.000	
Pemerintah	337.000.000		810.000.000	-	337.000.000
Grand Total	7.041.067.761	9.852.371.000	3.205.811.677	3.207.010.031	11.543.775.541

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Lampung (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 139/PMK.07/2019)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. [illegible]/2019)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	316.418.183	316.416.189	-
PPh	-	-	316.418.183	316.416.189	-
PPh Pasal 21	-	-	87.662.743	87.662.742	-
PPh Pasal 25/29	-	-	228.755.440	228.753.447	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	29.426.778	5.920.612.253	1.434.602.538	4.485.709.695
Migas	-	-	5.920.612.253	1.434.602.538	4.485.709.695
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	5.920.612.253	1.434.602.538	4.485.709.695
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	29.426.778	-	-	-
DR	-	55.779	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	29.370.999	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	29.426.778	6.237.030.436	1.751.018.727	4.485.709.695

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2022

Provinsi Sumatera Barat

(dalam rupiah)

PPKD DBH	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak	6.837.948.171		28.068.919.000	36.301.000.000	
PPh	20.537.748.302	-	30.000.000.000	15.462.000.000	
PPh Pasal 21	17.477.000.605	-	13.481.057.500	12.903.000.000	-
PPh Pasal 25/29	3.070.078.807	-	1.351.000.000	972.000.000	-
PPN	29.900.000.000		9.826.117.200	17.074.000.000	-
PPh Barang					-
Bagian Daerah Pajak	2.100.000.000		916.000.000	2.100.000.000	
Bagian Daerah Non Migas	287.000.000		85.000.000	350.000.000	
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	1.487.000.000	-	619.000.000	1.049.000.000	-
Bagian Daerah Perikanan	183.000.000	-	34.000.000	70.000.000	-
Bagian Daerah Pertambangan	11.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000	-
Bagian Daerah Kehutanan	900.000.000		300.000.000	700.000.000	
Bagian Daerah Migas	100.000.000		20.000.000	20.000.000	
Bagian Pemerintah Non Migas	70.000.000	-	3.000.000	20.000.000	
Bagian Pertambangan Panas Bumi	100.000.000	-	17.000.000	10.000.000	-
Bagian Pertambangan Perikanan	100.000		1.000.000	3.000.000	-
Bagian Pertambangan Kehutanan	300.000.000		100.000.000	200.000.000	
Bagian Pertambangan Pertambangan	300.000.000		100.000.000	200.000.000	
Bagian Pertambangan Lainnya	100.000.000		20.000.000	100.000.000	
PBB	825.000.000	-	257.000.000	500.000.000	-
BPHTB	17.027.000.427	44.476.077	147.353.000	6.000.000.000	7.000.000
Pajak	11.711.000.000		916.000.000	10.800.000.000	-
Pajak Rokok (50%)	11.200.000.000		919.000.000	10.300.000.000	-
Pajak Rokok (50%)	300.000.000		200.000.000	500.000.000	
Pajak Rokok dalam Rangka Otsus	-				
Cukai Hasil Tembakau	20.000.000	-	10.000.000	20.000.000	
Cukai Hasil Tembakau	3.000.000	-	800.000	3.000.000	-
Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Otsus					-
Minyak Bumi	2.000.000.000	14.000.000	10.000.000	2.000.000.000	7.000.000
Gas Bumi		13.000.000	2.000.000		21.000.000
Pajak	2.000.000.000		15.000.000	2.000.000.000	
Pajak Rokok	3.000.000.000		500.000.000	2.000.000.000	
Cukai Minuman	-		-		
Cukai Lainnya	100.000.000		30.000.000	60.000.000	
Pajak Lainnya Pertambangan	3.000.000.000		300.000.000	2.000.000.000	-
Pajak Lainnya	300.000.000		100.000.000	200.000.000	
DR	9.000.000	-		3.000.000	
DBH	-	-	-	-	-
Pajak	200.000.000		100.000.000	100.000.000	-
Tambahan					-
Grand Total	99.000.000.000	71.000.000	20.000.000.000	100.000.000.000	21.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lamongan Bayar

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KPPN 2018	KPPN 2019	LPSDH TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2019)	Penyaluran DBH TA 2020 (KMK No. 318/KM.7/2020)	Penyaluran DBH TA 2021 (PMK No. 7/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	-	-	2.363.751	12.297.084	-
PPh	-	-	2.050.951	12.296.062	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	2.050.951	12.296.062	-
PBB	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah dari Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-	-	-
Cukai	-	-	-	-	-
SDA	-	7.994.877	672.752.365	169.897.997	73.616.101
Migas	-	-	672.752.365	169.897.997	73.616.101
Kehutanan	-	1.231.957	-	-	-
IHPHT	-	-	-	-	-
PSDH	-	1.231.957	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	9.226.834	675.116.316	182.195.081	73.616.101

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lampung Barat

(dalam rupiah)

Uraian	(4) Realisasi TA 2020	(5) Realisasi TA 2020	Penyaluran DBH DAU Semester II TA 2020 (Kas Negara)	DBH TA 2020 yang Seharusnya Dialokasikan	(2) = (3) - (4) Kurang Bayar / (Lebih Bayar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Tanah	1.113.906.256	-	1.060.110.629	2.011.476.027	53.158.854
PBB	1.699.310.792	-	1.069.644.000	302.690.731	-
PPh Pasal 21	1.027.101.895	-	1.027.000.000	333.111.836	-
PPh Pasal 25/29	671.108.077	-	42.029.500	66.186.171	-
PPh	7.744.183.638	-	3.010.750.000	2.937.055.578	20.736.310
Sewa Tanah	2.177.183.833	-	1.112.536.500	1.064.647.333	-
Bagian Pemerintah Pusat	63.077.876	-	8.070.200	-	23.05 [illegible]
Bagian Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Provinsi	3.031.2.074	-	-	20.032.107	-
Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Sektor Lainnya	915.339.017	-	3.00 [illegible]	700.10 [illegible]	-
Biaya Pemungutan Sektor Minerba	1.768.570	-	2.871.350	-	707.333
Biaya Pemungutan Sektor Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	3.866.020	-	-	2.90 [illegible]	-
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.720.077	-	293.020	1.2 [illegible]	-
Cukai	120.082.227	-	91.320.200	28.76 [illegible]	-
PDRD	2.621.191.419	-	353.750.575	1.7 [illegible]	82.208.710
Rokok	896.196.732	-	175.353.020	294.81 [illegible]	-
Pajak Rokok	517.534.662	-	171.282.020	1.03 [illegible]	-
Cukai Rokok	10.217.143	-	3.991.020	16.727.0 [illegible]	-
Pajak Rokok Dalam Rangka Cukai Rokok	-	-	-	-	-
Opsen PKB 66%	2.0 [illegible]	-	2.47 [illegible]	2.4 [illegible]	-
Opsen BBNKB 66%	412.20 [illegible]	-	39.830	1 [illegible]	-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Minerba	89.1 [illegible]	-	4.8 [illegible]	505.83 [illegible]	-
Kehutanan	155.960.361	-	3.4 [illegible]	105.076.732	-
Perikanan	371.131.347	-	10.134.140	340.770.907	-
Pajak Alat Berat	102.909.748	-	97.490.815	3.76 [illegible]	-
Pajak Pengambilan Air Permukaan	-	-	-	-	-
Pajak Hotel	91.177.760	-	1.1 [illegible]	70.05 [illegible]	-
Pajak Restoran	1.3 [illegible]	-	97.830.170	384.360.428	-
Pajak Hiburan	31.341.346	-	17.171.925	3.05 [illegible]	-
PBB	-	-	-	-	-
BPHTB	-	-	-	-	-
PDRD	31.491.510	-	17.434.525	3.93 [illegible]	-
Tertentu	2.3 [illegible]	-	23.1 [illegible]	-	50.050.775
Grand Total	7.919.171.252	-	2.007.1 [illegible]	5.1 [illegible]	1.3 [illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lampung Selatan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	TB TA 2020	DB TA 2020	LB TA 2020 (Sesuai PMK 226/PMK.07/2021)	Penyelesaian (Sesuai PMK No. 226/PMK.07/2021)	Alokasi KB/LB DBH TA 2021 (KB/LB TA 2020 Sesuai PMK 226/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
PajAk		-	6.[illegible].227.492	[illegible].132.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
CHT		-	36.607.230		36.607.230
2% Pasal 21		-	-		-
4% Pasal 25/29		-	36.681.810		36.681.810
PBB		-	4.[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	3.[illegible].181.[illegible]	3.[illegible].[illegible].[illegible]
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau Bagian Daerah Penghasil		-			-
Bagian Daerah Penghasil Tembakau Lainnya		-			-
Bagian Daerah Penghasil Tembakau Lainnya Dana Alokasi Umum		-	4.[illegible].[illegible]		11.[illegible].[illegible]
Bagian Daerah Penghasil Tembakau Lainnya Dana Alokasi Khusus		-	-		-
Bagian Daerah Penghasil Tembakau Lainnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		-	5.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
Bagian Daerah Penghasil Tembakau Lainnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Sehat		-			-
Bagian Daerah Penghasil Tembakau Lainnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Penegakan Hukum		-			-
Bagian Daerah Penghasil Tembakau Lainnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Peningkatan Perekonomian Masyarakat		-	49[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Bagian Daerah Penghasil Tembakau Lainnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Peningkatan Perekonomian Masyarakat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Lainnya		-	-		-
Bagian Daerah Penghasil Tembakau Lainnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Peningkatan Perekonomian Masyarakat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Peningkatan Perekonomian Masyarakat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Lainnya		-	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Bagian Daerah Penghasil Tembakau Lainnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Peningkatan Perekonomian Masyarakat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dana Peningkatan Perekonomian Masyarakat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Lainnya Dana Alokasi Umum		-	-		-
CHT		-	-		-
PBH		4[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Migas			[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 15%		-			-
Minyak Bumi 3%		-			-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Daerah		-			-
Gas Bumi 70%		-	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi 30%		-	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah		-	-		-
Panas Bumi		-	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Landreat		-	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Lainnya		-	-		-
Pajak Rokok		-	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Pajak Rokok		-	-		-
Bagian Pemerintah Daerah		-	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Kekurangan		1[illegible].[illegible].[illegible]			-
DAK		-			-
DTDP		-			-
DBHP		1[illegible].[illegible].[illegible]			-
Pemerintah		-			-
Grand Total		9[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Keb. Lampung Selatan

(rupiah)

Uraian	Kurang Bayar DBH	Lebih Bayar DBH	Penyaluran DBH Sampai dengan PMK 2020 (sesuai PMK 7/PMK.07/2021)	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	DBH TA 2021 yang belum disalurkan
1	(2)	(3)	(4)	(5=2-3-4)	(6)
Pajak	13.778.847.113	9.428.000	4.871.380.474	8.894.018.639	70.230.000
PPh	4.810.760.150		2.819.672.220	1.991.087.930	-
PPh Pasal 21	4.541.984.797		2.550.896.867	1.990.771.930	-
PPh Pasal 25/29	268.775.353		268.775.353	316.000	-
PPN	7.969.013.696	9.428.000	1.751.487.020	6.902.930.709	70.230.000
Cukai Hasil	1.071.080.506	-	265.469.730	1.026.272.258	-
Pajak Daerah Provinsi	315.775.207	-	178.161.030	-	46.382.565
Bagian Provinsi Pajak Rokok	283.187.241		131.023.030	760.901.365	-
Bagian Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor		3.870.000	1.280.000		13.200.000
Bagian Provinsi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.000.384.797	-	1.060.746.730	3.813.106.040	-
Bagian Daerah Hasil Pajak Rokok	117.592.207	-	3.614.730	108.304.937	-
Pajak Air Permukaan Sektor Energi	6.661.160		3.990.960	-	2.293.840
Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah	33.677.111		3.070.000	7.858.000	23.000
Bagian Pemerintah Pajak Rokok		29.200	12.000		29.200
Bagian Pemerintah Pajak Rokok	-	-	-		
Bagian Pemerintah Pajak Rokok	240.240.100	-	48.88 .600	191.960.500	-
Bagian Pemerintah Pajak Rokok	7.146.117		240.960	6.905.157	-
PPH	15.139.907		11.200.000	1.186.000	
Pajak	5.826.891.284	2.807.990	3.428.822.921	2.112.307.121	103.870.134
Migas	606.757.000	-	417.035.800	1.078.857.000	
Minyak Bumi (PPh)	1.537.584.079	-	1.111.754.160	425.829.919	
Minyak Bumi (PPh)	38.219.743	-	3.634.750	19.589.026	-
Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Negeri					-
Gas Bumi (PPh)	26.877.252		2.307.850	2.273.090	-
Gas Bumi (PPh)	411.20		38.830	25.181	
Gas Bumi dan Gas Bumi Dalam Negeri	-				
Pajak	207.206.932	2.807.990	19.774.760	24.450.241	9.116.125
Lapangan	-	2.807.990	796.205	-	9.196.916
Panas Bumi	207.206.932	-	17.576.226	241.910.517	-
Pajak Air	920.078.774		101.838.000	272.975.994	-
Pajak Penerangan Jalan					-
Pajak Rokok	47.307.906		21.593.300	25.900.826	
Pajak Hiburan	63.793.875	-	26.567.400	106.060.325	
Pajak Reklame	31.070.158	-	17.837.205	13.232.939	-
Pajak Parkir				-	-
Pajak Air Tanah					
Pajak Sarang Burung Walet	51.382.148	-	17.601.295	33.780.902	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	178.166.020	-	316.581.000	-	167.864.000
Cukai Tembakau	15.301.003.309	13.065.173	3.890.702.242	10.940.981....	248.016.945

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lampung Tengah

(dalam rupiah)

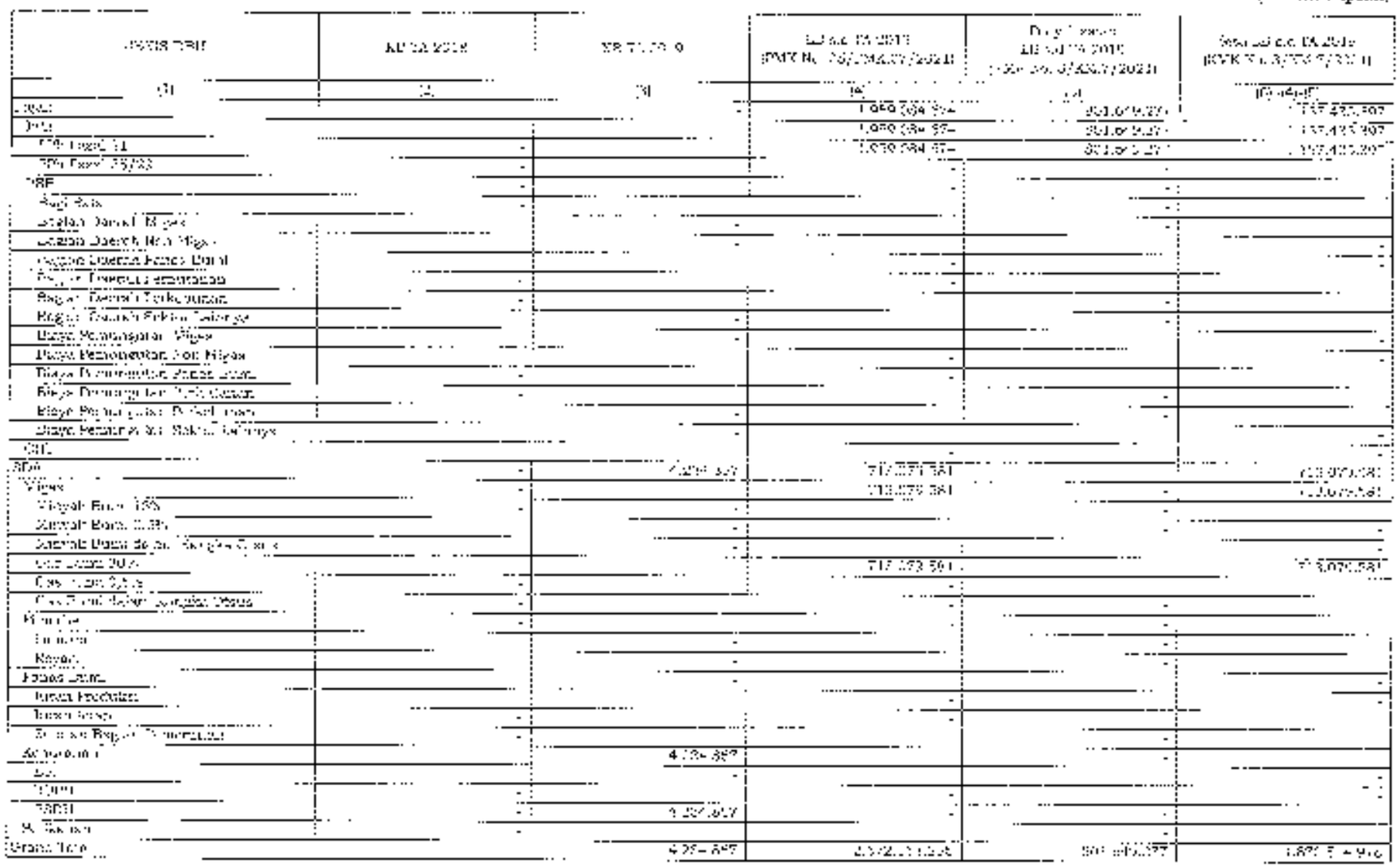

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tambrauw (Papua)

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	PB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran DBH Desember TA 2020 (KMK No. 8/PK.07/2021)	DBH TA 2020 yang seharusnya diterima	DBH TA 2020 yang telah diterima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)-(4)	(6)
Pajak	24.874.205.177	-	8.980.971.647	15.893.233.530	21.313.599
PPh	6.047.171.341		2.857.951.830	3.189.219.511	
PPh Pasal 21	6.047.171.341		2.857.951.830	3.189.219.511	-
PPh Pasal 25/29	137.813.729		79.423.936	171.733.729	-
PBB	18.010.220.107		6.014.720.000	12.360.053.125	21.313.599
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	39.350.948		30.039.000	1.128.310.948	
Cukai Hasil Tembakau	565.911.151	-	2.320.000		21.313.599
Pajak Rokok	96.879.81		2.320.000	94.541.151	
Pajak Penerangan Jalan Umum			-	-	
Pajak Parkir Pajak Hiburan			-	-	-
Pajak Air Permukaan Pajak Rokok	15.599.762.962		3.000.000.000	12.599.762.962	-
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	2.155.599.000		3.000.000	2.152.599.000	
Pajak Alat Berat	1.079.815.151	-	134.000		1.079.949
Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.075.800		67.500	1.008.300	-
Pajak Pengambilan Air Permukaan dan Pajak Air Tanah				-	-
Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan				-	
Pajak Pengambilan Air Permukaan dan Pajak Air Tanah	1.078.724.151	-	134.000	1.078.590.000	-
Pajak Alat Berat	1.150.017	-	66.500	1.083.517	-
PDRD	2.151.153.730		670.777.875	2.021.375.855	199.934.750
Hotel	1.654.373.820		17.382.300	1.637.034.520	-
Restoran	1.654.373.820		17.382.300	1.637.034.520	-
Hiburan	1.716.814.673		11.780.900	1.705.033.773	
Reklame	96.613.448	-	3.881.100	99.594.548	
Penerangan Jalan Umum		-	-	-	
Parkir	20.230.830	-	1.407.300	24.438.130	
Air Tanah	17.2611		37.900	405.411	-
Sarang Burung Walet					-
Mineral Bukan Logam dan Batuan	34.603.449		11.079.700	23.523.749	-
Mineral Bukan Logam dan Batuan	479.617			479.617	
Bea Meterai	343.866.242	-	1.779.950	332.105.392	
Opsen Pajak	400.419.017	-	30.150.700	370.400.317	
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		-	-	-	
Opsen Pajak Air Permukaan	27.089.365		1.779.950	25.109.415	-
Opsen Pajak Rokok	423.720.842		70.302.750	330.302.750	-
Kekurangan	73.736.556	-	16.791.250	16.145.250	
DAU	-	-	-	-	
DBHCHT			-	-	-
DBHP	36.736.556		16.791.250	16.145.250	-
Kehutanan	36.736.556		16.791.250		137.671.250
Jumlah Total	27.163.015.597	-	9.526.596.572	20.449.307.317	370.169.599

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lanoptung Utara

(dalam rupiah)

Uraian DBH	PB TA 2018	PB TA 2019	Lebih Bayar DBH TA 2020 (PMK No. 98/PMK.07/2020)	Penyaluran Lebih Bayar DBH TA 2020 (PMK No. 5/PMK.7/2021)	Sisa Lebih Bayar DBH TA 2020 (Lebih Bayar DBH TA 2020 - Penyaluran Lebih Bayar DBH TA 2020)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6=[4]-[5]]
Pajak			675.777.351	539.616.207	136.161.144
PPh			675.777.351	539.616.207	136.161.144
PPh Pasal 21			675.777.351	539.616.207	136.161.144
PPh Pasal 25/29					
PBB					
Cukai Hasil					
Pungutan Lainnya Migas					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Sektor Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Pertambangan Umum					
Biaya Pemungutan Kehutanan					
Biaya Pemungutan Sektor Perikanan					
Biaya Pemungutan Pertambangan Minyak					
Biaya Pemungutan Pertambangan Gas Bumi					
Biaya Pemungutan Pertambangan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Sektor Kehutanan					
Biaya Pemungutan Sektor Perikanan					
Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Lainnya					
OPT					
SDA		1.234.567	225.000.000		225.000.000
Sawit			225.000.000		225.000.000
Minyak Bumi (PSC)					
Minyak Bumi (Non PSC)					
Minyak Bumi Hulu Migas Lainnya					
Gas Bumi (PSC)			675.555.555		675.555.555
Gas Bumi (Non PSC)					
Gas Bumi Hulu Migas Lainnya					
Mineral					
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi					
Pajak Daerah					
Pajak Lainnya					
Retribusi Daerah					
Perikanan		1.234.567			
PNBP					
DBHCHT					
PNBP		1.234.567			
Lainnya					
Jumlah		4.034.567	1.591.111.111	279.616.207	1.311.494.904

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Lampung Utara

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi TA 2020	Penyaluran TA 2020	Penyaluran DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 32/PMK.07/2021)	PB TA 2020 yang Belum Disalurkan	TKDD TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PPh	5.019.272.042	-	3.020.661.854	2.198.610.188	68.417.581
PPN	3.425.744.720	-	1.613.306.400	1.812.438.320	
PPh Pasal 21	1.531.450.058		757.782.400	1.773.667.658	
PPh Pasal 25/29	86.897.612		47.526.501	47.921.512	
PBB	4.251.965.210		1.[illegible].499	3.830.555.991	68.417.581
Cukai Hasil Tembakau	1.421.969.618		208.663.754	1.790.973.969	-
Penerimaan Pajak Migas	88.903.844		12.[illegible].482		68.121.494
Bagian Pemerintah Pusat Migas	13.034.430		5.758.770	6.440.770	-
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi			-		
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan			-		
Bagian Daerah Penghasil	2.469.626.720		698.310.020	1.771.265.868	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	615.536.697		8.004.309	200.597.737	-
Pajak Penghasilan Pasal	2.826.975		2.332.736		2.273.775
Bagian Pemerintah Dari Migas	1.271.145		52.030	1.219.045	
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi			-		
Bagian Pemerintah Pertambangan	-		-	-	
Bagian Pemerintah Pertambangan	780.795.762		21.[illegible].289	78.749.041	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	7.746.647		320.520	8.[illegible].127	-
CHT	10.005.302		1.[illegible].615	7.[illegible].020	
BEA	2.290.781.113		745.[illegible].828	1.[illegible].373.230	191.654.030
Migas	906.996.300		17.[illegible].610	1.[illegible].638	
Migas Bumi (1%)	610.784.662		11.[illegible].[illegible]	1.[illegible].586	-
Migas Bumi (2,5)	70.[illegible].749		6.[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible]	-
Migas Bumi Sektor Tertentu			-		-
Gas Bumi 3%	20.[illegible].[illegible]		3.[illegible].[illegible]	2.[illegible].[illegible]	
Gas Bumi 0,5%	4.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Panas Bumi	141.969.382		11.[illegible].[illegible]	129.[illegible].[illegible]	
Pertambangan	-		-		-
Royalti	992.904.548		1.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Pajak Lainnya	100.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Pajak Daerah	-		-		
Opsen PKB	24.[illegible].[illegible]		4.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Retribusi Daerah	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Pelayanan	32.[illegible].[illegible]		17.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Lain-lain	-		-		
Opsen PBBKB	-		-		
Pajak	52.[illegible].[illegible]		13.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Pertambangan	150.176.630		33.[illegible].[illegible]	-	157.634.[illegible]
Grand Total	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

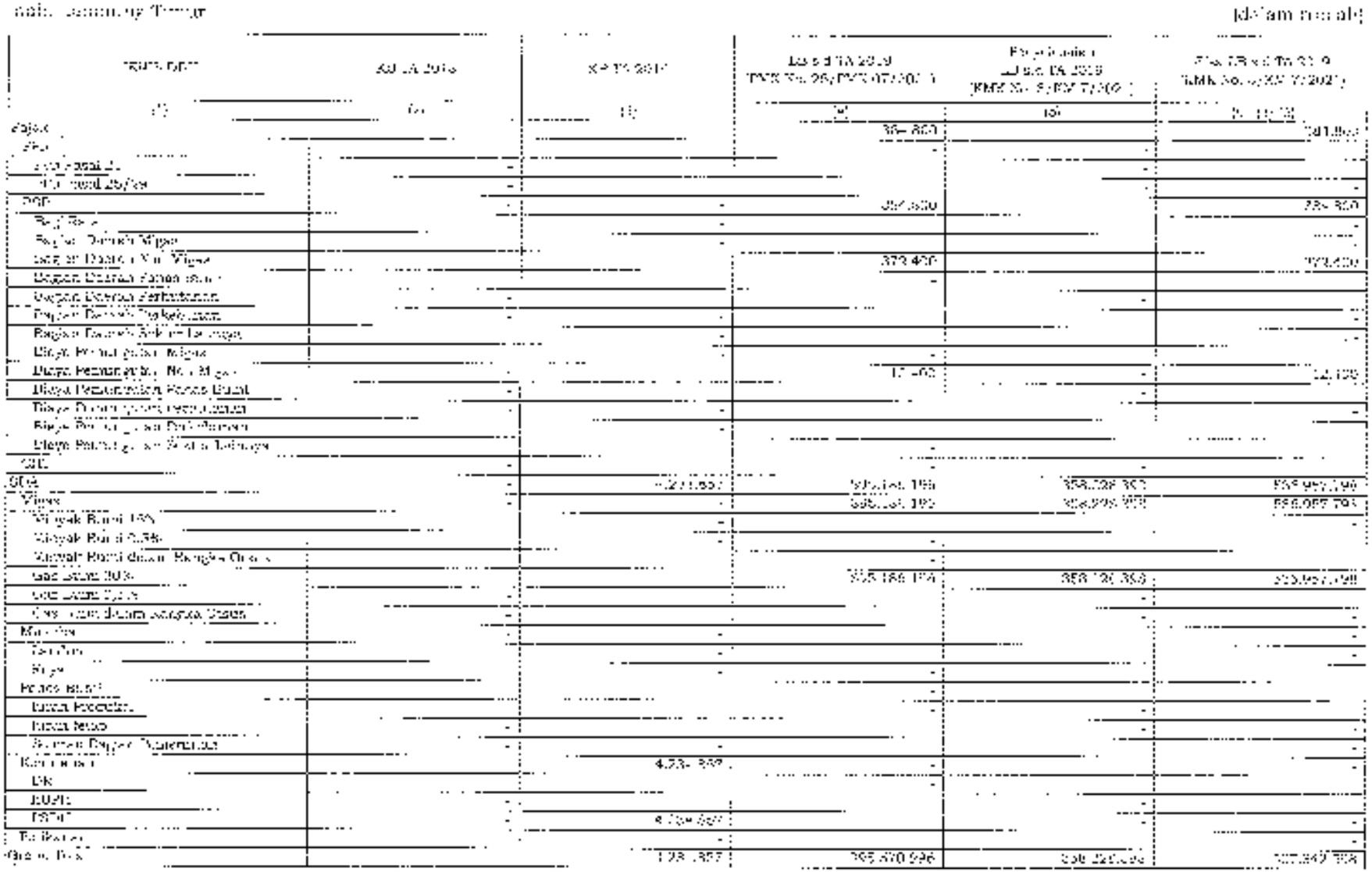

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lamongan Timur

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	13.660.239.617		7.347.894.627	15.450.133.630	
PPh	2.020.196.094		1.773.657.256	532.453.026	
PPh Pasal 21	1.934.430.961		1.438.815.030	13.250.096	
PPh Pasal 25/29	85.765.133		334.842.226	519.203.073	
PBB	14.814.343.961.961		1.222.670.650	13.592.417.030	
Pajak Rokok	1.227.878.797		265.999.105	1.123.210.205	
Bagian Daerah Hasil Migas	11.011.031.372		779.515.420	12.792.021.376	
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Kehutanan	682.258.468		170.572.117	853.041.169	
Bagian Daerah Pertambangan Umum	215.399.627		8.698.303	206.921.101	
Bagian Daerah Perikanan	252.868.272		23.706.761	365.[illegible]	
Bagian Pertambangan Minyak Bumi					
Bagian Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pertambangan Kehutanan					
Bagian Pertambangan Perikanan	11.731.791		6.469.960	5.261.831	
Bagian Pertambangan Pertambangan Umum	1.192.617		285.393	1.477.947	
Cukai	62.067.292		11.007.927	17.455.335	
Pajak	9.203.584.585		979.705.740	4.411.267.583	187.634.333
Migas	8.834.714.000		527.803.960	7.682.903.720	
Minyak Bumi 15%	7.017.960.237		934.195.400	7.111.367.227	
Minyak Bumi 0,5%	301.220.203		16.792.960	96.721.393	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	26.060.960		2.107.820	24.773.054	
Gas Bumi 0,5%	4.[illegible]94		30.450	89.422	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	368.866.147		110.710.950	302.[illegible]492	
Panas Bumi					
Pajak	1.[illegible]6.372		1.079.950	531.[illegible]342	
Bunga Pajak	120.319.213		87.358.730	1[illegible]1.[illegible]13	
Denda Pajak					
Jenis Lainnya	27.598.326		4.774.320	12.170.698	
Pendapatan Bagian Pemerintah	41.726.795		73.260.120	30[illegible]127	
Pendapatan	8.209.109		9.710.530	18.529.053	
Migas					
Pajak					
Pajak	32.961.107		15.010.260	31.[illegible]974	
Pendapatan	1.[illegible]8.782		3.[illegible]3.[illegible]		137.807.920
Grand Total	26.[illegible]3.[illegible]		3.[illegible]1.[illegible]	2[illegible]6[illegible]5[illegible]	137.807.920

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tanggamus

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB s.d. TA 2019 PMK No. 8/PMK.07/2021	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
PajAk	-	-	1.020.861.017	42.733.317	978.127.700
Cukai	-	-	791.523.037	360.825.132	430.697.905
50% Penerimaan	-	-	775.760.038	360.825.132	414.934.906
50% Penerimaan (2%)	-	-	15.762.974	-	15.762.974
PNBP			272.353.530	255.750.450	
Jasa Giro	-	-	-	-	-
Dividen Bumn	-	-	-	-	-
Bunga Penerimaan Lainnya	-	-	31.396.071	41.902.071	
Bagian Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan Bersama	-	-	-		
Bagian Pemerintah Terkompensasi	-	-	-		
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	180.759.975	97.703.979	
Bagian Pemerintah Pusat Dari Penerimaan Tertentu	-	-	-	-	-
Biaya Pengembangan Kelapa	-	-	-		-
Biaya Pengembangan Non Kelapa	-	-	59.832.103	29.892.102	
Biaya Pengembangan Kelapa Sawit	-	-	-		
Biaya Pengembangan Perkebunan Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pengembangan Perkebunan Kelapa	-	-	9.836.149	5.958.777	-
Biaya Pengembangan Perkebunan Lainnya	-	-	-		-
DAU	-	-	-		
DAK	-	227.857	1.654.662.777		1.654.434.920
Opsen	-	-	940.574.59	-	839.843.991
Kehutanan (PSDH 15%)	-	-	-	-	-
Kehutanan (DR 15%)	-	-	-		-
Kehutanan (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan)	-	-	-		-
Pertambangan (PBH 32%)	-	-	534.[illegible]50.7		534.[illegible]10.070
Pertambangan (IHPB)	-	-	154.[illegible]86.7		154.[illegible]12.867
Pertambangan (Iuran Tetap)	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	[illegible]5.017.709	-	185.016.302
Landrent	-	-	145.016.302	-	145.016.302
Jaminan	-	-	-		-
Panas Bumi	-	-	332.[illegible]73		332.776
Pajak Penghasilan	-	-	-		
Pajak Lainnya	-	-	782.776		782.776
Kehutanan (PSDH 80%)	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	227.857	-	-	-
DR	-	-	-		-
PSDH	-	-	-		-
Perikanan	-	4.034.577	-	-	-
Grand Total	-	4.034.957	2.[illegible]10.[illegible].279	42.[illegible]2.04	1.468.832.175

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tanjung Jabung Barat (dalam rupiah)

Jenis DBH	PB Tahun 2021	DBH Tahun 2020	Alokasi DBH Tahun 2021 (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.07/2021)	Kurang Bayar DBH Tahun 2020 yang belum dialokasikan	Lebih Bayar DBH Tahun 2020 yang sudah dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas	21.477.470.882	-	8.847.785.672	17.634.544.969	5.631.719
PBB	2.237.037.751		460.166.803	786.173.961	-
PPh Pasal 21	2.184.240.477		92.940.436	744.999.179	-
PPh Pasal 25/29	80.541.231		61.217.450	21.323.811	-
PPN	17.016.247.671		2.211.012.110	17.788.000.187	5.212.119
Hasil Hutan	1.421.659.496		293.060.776	1.128.270.296	-
Bagian Daerah Hasil Migas	3.780.181	-	184.383.020		5.173.563
Bagian Daerah Hasil Migas	8.417.534.709	-	102.455.730	3.944.968.153	-
Bagian Daerah Dana Hutan	1.613.513.814	-	1.307.429.836	1.381.309.074	-
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	903.717.991		27.070.030	875.104.453	
Bagian Daerah Pertambangan	(14.593.307)	-	6.511.030	206.097.777	
Bagian Perimbangan Migas	5.704.231	-	6.850.130	-	668.499
Bagian Perimbangan Non Migas	61.272.211	-	3.420.630	71.161.617	-
Bagian Perimbangan Panas Bumi	14.165.301	-	13.482.739	302.754.078	-
Bagian Perimbangan Pertambangan					
Bagian Pertambangan Panas Bumi	17.311.952	-	1.201.630	13.371.709	-
Bagian Perimbangan Pertambangan	7.186.647	-	996.830	5.359.842	-
PDRD	21.111.422		24.651.984	3.473.545	-
PPN	12.879.271.876	109.727.939	1.211.431.299	11.777.350.942	218.389.437
Migas	599.376.220		117.645.830	1.171.027.340	
Pertambangan Umum	816.454.462	-	1.121.1.920	1.701.078.042	
Kehutanan	52.219.268	-	3.69 .509	11.921.918	
Kehutanan Dana Reboisasi	-	-	-	-	
Perikanan	11.863.469		3.437.570	8.278.598	-
Pertambangan Panas Bumi	7.113.277		703.797	439.404	-
Pertambangan Minyak Bumi				-	-
Pajak	4.501.369.969	109.727.939	1.181.001.019	1.164.156.129	179.188.437
Cukai	-	109.727.939	49.110.503		159.194.157
Lainnya	4.781.994.665	-	1.131.890.516	1.164.156.129	19.994.280
Pajak Daerah	2.177.478.779	-	1.064.758.778	5.297.479.256	
Pajak Rokok		-	-	-	-
Pajak Lainnya	11.258.480		3.729.125	46.318.278	-
Cukai Hasil Tembakau	8.1 .738.260		1.081.1 .1.1.0	1.1 .1.1.1.1	
Retribusi	52.169.512	-	17.279.775	7.991.927	
Pajak	-	-	-	-	-
Pajak			-	-	-
Pajak	332.062.012		17.279.775	7.991.927	-
Pajak Lainnya	132.154.960		316.99 .195		1.1 .1.1.1.1
Grand Total	3.306.754.734	109.727.939	8.974.991.184	25.305.060.112	222.961.081

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tulang Bawang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2019	LB TA 2019	KB s.d TA 2019 (PMK No. 91/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	867.[illegible].581	[illegible].635	544.179.[illegible]
PPh	-	-	867.[illegible].581	[illegible].635	544.179.[illegible]
PPh Pasal 21	-	-	867.[illegible].581	[illegible]	544.179.[illegible]
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	4.234.537	[illegible].911	-	[illegible].911
Migas	-	-	569.504.911	-	569.504.911
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	569.504.911	-	569.504.911
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	67.200.000	-	67.200.000
Iuran Tetap	-	-	67.200.000	-	67.200.000
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	4.234.537	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH	-	4.234.537	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	4.234.537	1.0[illegible].137.775	[illegible].635	[illegible].210

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tabalong Hiswang

(dalam rupiah)

TKDD DBH	LO Desember TA 2020	LO Desember TA 2020	Penyaluran DBH TA 2020 (PMK 226/PMK.07/2020, PMK 55/PMK.07/2021)	DBH TA 2020 yang Dapat Dialokasikan	LO TA 2020 yang Belum Dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(2)	(6)
Pajak	1.286.062.445		8.158.000.441	7.561.168.276	62.836.355
PBB	2.813.646.424		1.977.262.020	1.963.304.117	
PBB Pasal 21	2.763.809.196		1.927.424.820	509.854.956	
PBB Pasal 25/29	49.837.228		49.837.200	53.449.161	
BPHTB	5.030.857.471		1.398.562.530	6.742.173.051	51.851.380
Pasal 22	1.947.846.795		245.650.750	705.920.948	
Pasal 22 Impor Migas	13.028.907		169.774.230		41.405.820
Pasal 22 Impor Non Migas	2.479.207			9.468.250	
Pasal 22 Impor Hasil Tembakau					
Pasal 22 Impor Perbendaharaan					
Pasal 22 Impor Perbekalan	6.841.701.997		1.505.405.000	4.769.978.897	
Pasal 22 Impor Selain Migas	221.201.000		8.024.500	209.926.797	
Pasal 23 Migas	2.111.147		3.412.500		2.151.035
Pasal 23 Non Migas	1.945			11.892	
Pasal 23 Hasil Tembakau					
Pasal 23 Perbendaharaan					
Pasal 23 Selain Migas	352.210.703		20.430.500	21.660.597	
Pasal 23 Non Migas	7.185.617		280.800	6.905.017	
PPh	1.997.500		9.022.500	10.525.000	
PPN	2.791.850.863	18.018.000	648.135.700	2.210.900.500	90.914.363
Migas	1.301.379.250		119.581.300	1.115.994.300	
Migas Pasal 22	1.111.437.082		11.274.300	1.403.851.782	
Migas Pasal 23	9.220.036		2.241.300	18.887.125	
Migas Pasal 23 Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau	19.960.850		2.501.800	21.171.250	
Cukai Hasil Tembakau	249.000		35.900	900.000	
Cukai Hasil Tembakau Kategori Tertentu					
Pajak Lainnya	11.000.000	18.018.000	16.741.950	870.036.250	93.000.000
Pajak Lainnya		18.018.000	5.162.250		41.360.000
Pajak Air Permukaan	910.000.000		17.271.250	330.750.000	
Pajak Rokok	490.000.000		80.000.000	570.740.312	
Pajak Produksi Batubara					
Pajak Lainnya	77.378.578		4.979.300	20.120.000	
Pajak Lainnya Perbendaharaan	43.720.000		26.362.400	806.962.400	
Pajak Lainnya	30.000.000		16.220.000	16.000.000	
PPh					
PPN					
PPh	2.000.000		16.220.000	16.000.000	
PPN	200.000.000		210.000.000		57.634.000
Total	10.000.000.000	36.036.000	10.000.000.000	10.000.000.000	36.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Wajo Kotam

(dalam rupiah)

Jenis DBH	SE TA 2018	RO TA 2019	SE TA 2019 (PMK No. 226/PMK.07/2021)	Target Sektor SE TA 2019 (KEP No. 3/KEP/2021)	Sisa LB SE TA 2019 (KEP No. 3/KEP/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
PPh			1.970.150.019	1.970.150.019	
PPh Pasal 21			997.941.532		997.941.532
PPh Pasal 25/29			39.796.803		39.796.803
PPh Pasal 26			3.303.841		3.303.841
PBB			1.729.078.491	931.778.465	541.990.191
Bea Hasil					
Bagian Daerah Penerimaan Migas					
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi			69.693.979	39.167.913	
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Gas Bumi			1.359.305.179	979.668.247	565.647.041
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Mineral dan Batubara					
Biaya Pemungutan PPh					
Biaya Pemungutan PBB Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan					
Biaya Pemungutan Pertambangan			14.848.559		14.848.559
Biaya Pemungutan Pertambangan Minyak Bumi			80.490.673		80.490.673
Biaya Pemungutan Pertambangan Gas Bumi					
CHT					
SDA		54.137.554	1.384.344.810		1.138.429.310
Migas			949.783.774		949.783.774
Minyak Bumi (0,5%)					
Minyak Bumi (Dana Bagi Hasil)					
Minyak Bumi (Dana Bagi Hasil Tambahan)					
Gas Bumi (0,5%)			509.150.637		509.150.637
Gas Bumi (Dana Bagi Hasil)			440.633.137		440.633.137
Gas Bumi (Dana Bagi Hasil Tambahan)					
Mineral			434.560.999		434.560.999
Batubara			434.560.999		434.560.999
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Tetap					
Kehutanan		54.137.554	53.701.656		53.742.960
PSDH					
DR					
DBHR		54.137.554	53.701.656		53.742.960
Perikanan					
Jumlah		54.137.554	3.354.128.429	1.970.150.019	1.680.213.451

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab/Kota: Wajo Kurnia

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang/(Lebih) Bayar DBH Tahun 2020	LEBIH BAYAR TAHUN 2020	Penyaluran Kurang Bayar DBH Berdasarkan PMK No. 81/PMK.07/2021	Kurang/(Lebih) Bayar DBH yang Belum Disalurkan	Kurang/(Lebih) Bayar DBH yang Telah Disalurkan
A	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
BPHTB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pengenaan Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PDD	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dana Bagi Hasil	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 21	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Pajak Penghasilan Pasal 23	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 15	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 22 Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Pemerintah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 22 Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 23 Dividen	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 23 Bunga	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 23 Sewa dan Penghasilan Lain Terkait Properti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Teknik, Manajemen, Konstruksi, dan Konsultan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 23 Hadiah dan Penghargaan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bunga	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Dividen	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Sewa dan Penghasilan Lain Terkait Properti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Jasa Teknik, Manajemen, Konstruksi, dan Konsultan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Hadiah dan Penghargaan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bendahara Pemerintah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Orang Pribadi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Badan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemerintah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 26 Penerima Penghasilan Tertentu Lainnya

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Bandar Lampung (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. .../KM.7/2021)	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	1.019.024.861	1.019.024.861	-
PPh	-	-	1.019.024.861	1.019.024.861	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	1.019.024.861	1.019.024.861	-
PBB	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	1.294.857	853.996.118	164.455.629	689.540.489
Migas	-	-	853.996.118	164.455.629	689.540.489
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Tambahan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	853.996.118	164.455.629	689.540.489
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Tambahan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
[illegible] Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	1.294.857	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	1.294.857	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah Total	-	1.294.857	1.873.020.979	1.183.480.490	689.540.489

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bandar Lampung

(dalam rupiah)

URAIAN	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyesuaian KB 2021 Setelah TA 2020 (KEP-SK-347/PK/2021)	Jml KB 2020 yang belum dikembalikan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB Pasal 25	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Pusat	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Daerah Yang	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Daerah Non Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Daerah Pertambangan					
Pajak Daerah Perikanan					
Pajak Daerah Perkebunan					
Pajak Daerah Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]			[illegible]	
Biaya Pemungutan Pajak Pusat					
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Perikanan					
Biaya Pemungutan Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Cukai	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (0,5%)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Minyak Bumi (0,5%)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Minyak Bumi (Dalam Rangka Otsus)					
Gas Bumi (70%)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi (0,5%)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi (Dalam Rangka Otsus)					
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pertambangan					
Minyak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pertambangan					
Minyak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Bumi					
Pajak Penghasilan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh					
BPHTB					
Hutan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Metro

(dalam ribuan)

Jenis DBH	TA 2018	TA 2019	Penyaluran (PMK No. 26/PMK.07/2021)	Penyaluran (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Kurang (Lebih) Bayar (PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)
Triwulan I					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB					
Bagi Rata					
Realisasi Penerimaan PBB					
Realisasi Penerimaan PBB Migas					
Realisasi Penerimaan PBB Non Migas					
Realisasi Penerimaan PBB Pertambangan					
Realisasi Penerimaan PBB Perkebunan					
Realisasi Penerimaan PBB Kehutanan					
Realisasi Penerimaan PBB Perikanan					
Realisasi Penerimaan PBB Pertambangan Panas Bumi					
Realisasi Penerimaan PBB Penerimaan Lainnya					
Proporsi Penerimaan PBB					
BPHTB		237,857	872,870,719	772,776,544	99,313,175
Migas			872,870,719	772,776,544	99,313,175
Realisasi Penerimaan Migas					
Realisasi Penerimaan DMO					
Realisasi Penerimaan Migas Bagian Pemerintah					
Bagi Rata DMO			872,870,719	772,776,544	99,313,175
Bagi Rata DBH Migas					
Bagi Rata DBH Migas Bagian Pemerintah					
Realisasi Penerimaan Migas					
Realisasi Penerimaan DMO					
Realisasi Penerimaan Migas Bagian Pemerintah					
Proporsi Penerimaan Migas					
Realisasi Penerimaan DMO					
Realisasi Penerimaan Migas Bagian Pemerintah					
Proporsi Penerimaan Migas					
Pertambangan					
Realisasi Penerimaan Pertambangan					
Realisasi Penerimaan Pertambangan Bagian Pemerintah					
Proporsi Penerimaan Pertambangan					
Kehutanan		1,274,617			
PSDH					
DR		1,274,617			
Proporsi Penerimaan					
Bagi Rata		1,512,474	872,870,719	772,776,544	100,094,175

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kurang Bayar

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak	5.350.078.852	-	1.303.722.000	3.712.015.852	1.634.063
Sektor	3.944.094.736	-	1.717.111.000	2.629.279.450	-
PPh Pasal 21	2.520.770.777	-	960.912.800	1.559.857.977	-
PPh Pasal 25/29	707.417.707	-	134.779.000	572.638.707	-
PPN	2.697.937.811	-	300.864.136	2.397.073.675	1.634.063
Dari Pusat	1.761.326.928	-	263.780.736	1.497.546.192	-
Bagian Daerah Migas	80.330.304	-	14.456.530	65.873.774	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan Tuna	219.599.304	-	4.404.000	215.195.304	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	1.948.905	-	2.796.000	-	847.095
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pajak	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Cukai	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Bea Masuk	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Bea Keluar	7.163.640	-	200.937	3.889.977	-
Cukai	16.201.104	-	16.916.544	4.026.636	-
DBH	2.301.869.863	-	1.233.631.731	2.205.830.381	137.594.020
Migas	1.095.978.220	-	17.283.000	1.078.694.592	-
Migas Pasal 22	1.113.457.842	-	11.231.300	1.102.779.542	-
Migas Pasal 25/29	613.949	-	5.051.700	10.201.975	-
Migas Pasal 26 (Dividen, Bunga dan Royalti)	-	-	-	-	-
Migas Pasal 26	28.870.896	-	1.497.000	24.113.046	-
Migas Pasal 4 (2)	7.178.534	-	99.000	439.104	-
Migas Bukan Pajak Penerimaan Negara	-	-	-	-	-
Minerba	1.113.043.972	-	1.227.700	382.796.807	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Royalti	34.736.948	-	11.779.000	23.179.948	-
Pajak Daerah	1.171.946.943	-	1.216.852.731	1.127.035.789	-
Bukan Pajak	-	-	-	-	-
Pasal 4 ayat 2	27.798.498	-	4.451.300	13.126.504	-
Pajak Penerimaan Negara	1.144.148.445	-	1.212.401.431	1.113.909.285	-
PPh Pasal 21	7.638.148	-	10.777.200	13.139.248	-
DR	-	-	-	-	-
LDPB	-	-	-	-	-
PBJT	36.772.109	-	16.772.969	16.888.004	-
Tambahan	159.199.000	-	316.861.397	-	157.662.397
Total	9.350.078.852	-	2.537.353.731	5.917.845.852	139.228.083

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	-	-			
[illegible]		-	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		-	[illegible]		[illegible]
[illegible]					
[illegible]	-		[illegible]		[illegible]
[illegible]		-			
[illegible]		-	-		
[illegible]					
[illegible]			[illegible]		
[illegible]	-	-	[illegible]		[illegible]
[illegible]		-			
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-				
[illegible]		-931,677	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-				
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	-	-		
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]				-	
[illegible]	-				
[illegible]	-	-			
[illegible]			-	-	
[illegible]		-12,318,87			
[illegible]	-				
[illegible]	-				
[illegible]		4,934,334		-	
[illegible]			-	-	
[illegible]		12,318,87	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pemalang (dalam rupiah)

Jenis DBH	(1)	KB DBH Definitif Tahun 2020 (2)	LB DBH Definitif Tahun 2020 (3)	Penyaluran DBH Definitif Tahun 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021) (4)	KB DBH 2020 yang belum diselesaikan (5)=(2)-(4)	LB DBH 2020 yang telah diselesaikan (6)=(3)-(4)
Pajak		3.370.776.631	-	3.191.382.697	179.393.934	1.961.771
PBB		1.770.000.000	-	1.770.178.400	(178.400)	-
PPh Pasal 21		1.600.000.000	-	1.160.513.909	439.486.091	-
PPh Pasal 25/29		90.000.000	-	43.015.405	46.984.595	-
PPN		4.200.000.000	-	270.174.200	3.929.825.800	4.264.771
Pajak Rokok		1.250.000.000	-	350.000.000	900.000.000	-
Bagian Dearah Atas Migas		36.000.000	-	110.000.000	(74.000.000)	(1.000.000)
Bagian Daerah Non Migas		24.000.000	-	9.211.000	14.789.000	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan		-	-	-	-	-
Bagian Daerah Umum		1.700.000.000	-	200.000.000	1.500.000.000	-
Bagian Daerah Sumber Daya Alam Tertentu		200.000.000	-	50.000.000	150.000.000	-
Bagian Pertambangan Mineral		4.000.000	-	1.000.000	3.000.000	1.771.771
Bagian Pertambangan Non Migas		100.000	-	25.000	75.000	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan		-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		75.000.000	-	18.000.000	57.000.000	-
Bagian Perimbangan Lainnya		7.000.000	-	1.000.000	6.000.000	-
Cukai		15.000.000	-	10.000.000	5.000.000	-
DAU		2.810.000.000	27.000.000	350.000.000	2.460.000.000	190.000.000
DAK		1.100.000.000	-	170.000.000	930.000.000	-
Dana Bagi Hasil SDA		1.000.000.000	-	150.000.000	850.000.000	-
Dana Bagi Hasil Cukai		100.000.000	-	20.000.000	80.000.000	-
Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-	-
Dana Keistimewaan		-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak		78.000.000	-	9.000.000	69.000.000	-
Dana Bagi Hasil SDA		22.000.000	-	5.000.000	17.000.000	-
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD		-	-	-	-	-
Migas		911.000.000	27.000.000	150.000.000	788.000.000	29.000.000
Tambahan I			27.000.000	2.000.000		29.000.000
Reguler		911.000.000	-	148.000.000	763.000.000	-
Hibah Daerah		2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-
Dana Keistimewaan		-	-	-	-	-
Dana Otsus		2.000.000.000	-	300.000.000	1.700.000.000	-
Dana Otsus Tambahan Infrastruktur		400.000.000	-	100.000.000	300.000.000	-
Kurang/Lebih		300.000.000	-	100.000.000	200.000.000	-
DR		-	-	-	-	-
DOKA		-	-	-	-	-
DPPP		30.000.000	-	10.000.000	20.000.000	-
Dana Desa		350.000.000	-	310.000.000	40.000.000	10.000.000
Grand Total		24.000.000.000	27.000.000	2.000.000.000	22.000.000.000	10.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pringgasena

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KPP Terdaftar	PPh Pasal 25/29	Realisasi PPh Tahun 2019 (PMK No. 205/PMK.07/2020)	Penyaluran Realisasi PPh Tahun 2019 (KEP-[illegible]/KM.7/2021)	Kurang/(Lebih) Bayar Realisasi PPh Tahun 2019 (Kolom 4 - Kolom 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			9.869.017	19.997.917	
PPh			9.827.117	19.997.917	
PPh Pasal 21			-	-	-
PPh Pasal 25/29			(70.827.117)	9.997.117	-
PPh 4				-	-
Bea Meterai					-
Kurang Salur Tahun Lalu					
Lebih Salur Tahun Lalu					
Kurang Salur Realisasi PPh Tahun Lalu					-
Lebih Salur Realisasi PPh Tahun Lalu					-
Kurang Salur Realisasi PPN Tahun Lalu					
Lebih Salur Realisasi PPN Tahun Lalu					
Kurang Salur Realisasi PPnBM Tahun Lalu					
Lebih Salur Realisasi PPnBM Tahun Lalu					
Kurang Salur Realisasi PBB Tahun Lalu					
Lebih Salur Realisasi PBB Tahun Lalu					
Kurang Salur Realisasi BPHTB Tahun Lalu					
Lebih Salur Realisasi BPHTB Tahun Lalu					
Kurang Salur Realisasi PPh Pasal 22 Impor					
Lebih Salur Realisasi PPh Pasal 22 Impor					
Kurang Salur Realisasi Cukai Hasil Tembakau					
Lebih Salur Realisasi Cukai Hasil Tembakau					
Kurang Salur Realisasi Pajak Rokok					
Lebih Salur Realisasi Pajak Rokok					
Kurang Salur Realisasi Sektor Lainnya					
Lebih Salur Realisasi Sektor Lainnya					
PPN					
PBB		123.187	702.547.838	926.547.700	568.[illegible].[illegible]
Migas			(28.[illegible].[illegible])	926.547.700	568.702.183
Minyak Bumi (15%)					-
Minyak Bumi (0,5%)					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi (30%)			702.547.838	926.547.700	[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi (0,5%)				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba				-	-
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Tetap				-	
Iuran Eksploitasi				-	-
Kehutanan				-	-
Iuran Hasil Hutan		[illegible].[illegible].[illegible]			
Dana Reboisasi					
PSDH		[illegible].[illegible].[illegible]			-
Perikanan					-
Cukai Hasil Tembakau		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lampiran Penjelasan

(dalam rupiah)

Uraian	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Anggaran KB dan/atau LB Tahun TA 2020 Berdasarkan PMK No. 226/PMK.07/2020	LB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PPh					
PPN					
PPh Migas					
PPh Pasal 22 Impor					
PBB					
PBB Migas					
Pajak Daerah					
Pajak Rokok Migas					
Pajak Rokok Non Migas					
Pajak Hotel Migas					
Pajak Hotel Non Migas					
Pajak Restoran Migas					
Pajak Restoran Non Migas					
Pajak Hiburan Migas					
Pajak Hiburan Non Migas					
Pajak Reklame Migas					
Pajak Reklame Non Migas					
Pajak Penerangan Jalan Migas					
Pajak Penerangan Jalan Non Migas					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Migas					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Non Migas					
Pajak Parkir Migas					
Pajak Parkir Non Migas					
Pajak Air Permukaan Migas					
Pajak Air Permukaan Non Migas					
Pajak Sarang Burung Walet Migas					
Pajak Sarang Burung Walet Non Migas					
Pajak Alat Berat Migas					
Pajak Alat Berat Non Migas					
Pajak Opsen Migas					
Pajak Opsen Non Migas					
Pajak Lainnya Migas					
Pajak Lainnya Non Migas					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau Migas					
Cukai Hasil Tembakau Non Migas					
Cukai Hasil Tembakau Dikembalikan					
Cukai Hasil Tembakau Dikembalikan Migas					
Cukai Hasil Tembakau Dikembalikan Non Migas					
Cukai Hasil Tembakau Dikembalikan Kepada Daerah Penghasil					
Cukai Hasil Tembakau Dikembalikan Kepada Daerah Penghasil Migas					
Cukai Hasil Tembakau Dikembalikan Kepada Daerah Penghasil Non Migas					
Cukai Hasil Tembakau Dikembalikan Kepada Daerah Lainnya					
Cukai Hasil Tembakau Dikembalikan Kepada Daerah Lainnya Migas					
Cukai Hasil Tembakau Dikembalikan Kepada Daerah Lainnya Non Migas					
PNBP					
PNBP Migas					
PNBP Non Migas					
Minyak Bumi (15%)					
Minyak Bumi (0,5%)					
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi (70%)					
Gas Bumi (0,5%)					
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus					
Minerba					
Panas Bumi					
Pungut					
Pungut Migas					
Pungut Non Migas					
Bukan Pungut					
Bukan Migas					
Bukan Pungut Migas					
Bukan Pungut Non Migas					
Bukan Migas					
PDP					
BLUD					
Migas					
Non Migas					
Grand Total					

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Medan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	LB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	1.073.795	1.073.795	-
PPh	-	-	1.073.795	1.073.795	-
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29			1.073.795	1.073.795	-
PBB					
Bagian Pusat				-	-
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perkebunan	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-		-	-	-
SDA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi 0,5%			-		-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus					
Minerba					
Landrent	-				
Royalti	-	-			
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap			-		-
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
DR	-	-	-	-	-
IIUPH		-	-	-	-
PSDH		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Perikanan					
Grand Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Musuj

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar Tahun 2020	DBH Tahun 2021	Penyesuaian APBD Berdasarkan PMK No. 5/PMK.07/2021	Kurang Bayar yang belum diselesaikan	Lebih Bayar yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	1.[illegible]	-	3.106.939.059	[illegible]	1.530.436
PPh	1.[illegible]	-	2.[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	1.[illegible]	-	777.424.000	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	30.[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	-	2.278.[illegible]	[illegible]	1.530.436
[illegible]	[illegible]	-	200.[illegible]	[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Lainnya	[illegible]	-	-	[illegible]	-
Pajak Daerah [illegible]	-	-	-	-	-
Pajak Daerah [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Daerah [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Daerah [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penerangan Jalan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	[illegible]	-	-	[illegible]	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Pajak Parkir	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Pemanfaatan Sarang Burung Walet	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	286.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hibah	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dikelola Oleh [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dikelola Oleh [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dikelola Oleh [illegible]	-	-	-	-	-
Dikelola Oleh [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dikelola Oleh [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dikelola Oleh [illegible]	-	-	-	-	-
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Lainnya	-	-	-	-	-
Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dikelola Oleh [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dikelola Oleh [illegible]	-	-	-	-	-
Dikelola Oleh [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Dikelola Oleh [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Kehutanan	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	286.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tulang Bawang (0441)

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 PMK No. 37/PMK.07/2021	Pasca Penyesuaian LB s.d TA 2019 PMK No. 81/PMK.07/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak			703.472.042	148.266.793	855.738.834
PPh			2.278.350		2.278.350
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			2.278.350		2.278.350
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			701.193.692	148.266.794	849.460.486
Bea Perolehan Hak atas Tanah					
Bea Perolehan Hak atas Tanah Pemerintah Daerah Provinsi					
Bea Perolehan Hak atas Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
Bea Perolehan Hak atas Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima Alokasi Kurang Bayar			701.193.692	148.266.794	849.460.486
Bea Perolehan Hak atas Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima Alokasi Lebih Bayar					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau Pemerintah Daerah Provinsi					
Cukai Hasil Tembakau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
Cukai Hasil Tembakau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima Alokasi Kurang Bayar					
Cukai Hasil Tembakau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima Alokasi Lebih Bayar			(25.448.211)		(25.448.211)
Cukai Hasil Tembakau Sektor Lainnya					
SDA		4.791.577	840.553.554		845.345.131
Migas			840.553.554		840.553.554
Minyak Bumi (15%)					
Minyak Bumi (0,5%)					
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Daerah					
Gas Bumi (30%)			504.332.132		504.332.132
Gas Bumi (0,5%)			8.409.422		8.409.422
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah					
Minerba					
Landrent					
Dinas					
Panas Bumi					
Iuran Tetap					
Iuran Produksi					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		4.791.577			
PSDH					
DR		121.357			
Perikanan					
Jumlah		4.791.577	1.543.026.246	148.266.794	1.691.292.040

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(satuan rupiah)

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PPh	5.830.039.994		1.092.322.120	7.870.251.000	2.039.790
PBB	2.013.730.501	-	336.211.000	3.977.719.362	
PBB Sektor P3	1.859.017.132	-	320.550.000	942.241.000	
PBB Sektor (2)(3)	120.893.379	-	45.861.000	75.471.362	-
BPHTB	4.435.081.348	-	917.103.810	3.735.615.274	38.691.164
Cukai Hasil Tembakau	3.997.000.000		265.650.710	1.790.775.438	-
Pajak Penerangan Jalan	1.148.121		51.716.000		24.791.921
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Hasil Gas Bumi	-	-			
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-		
Bagian Daerah Kehutanan	2.107.767.274		350.916.000	1.774.573.870	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	230.000.000		2.604.000	200.000.000	-
Bagian Daerah Hasil Migas	1.984.929		3.000.000		1.150.151
Bagian Pertambangan Hasil Migas	-	-			
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Pertambangan Perikanan			-	-	-
Bagian Daerah Hasil Pertambangan	92.100.000		12.784.200	78.272.000	-
Bagian Daerah Hasil Pertambangan	1.185.597		296.925	2.814.977	
DAK	14.918.000	-	3.032.620	11.115.041	
DAU	2.591.320.868	-	542.065.750	3.105.800.000	51.554.000
Hibah	120.177.230		1.535.000	499.964.550	-
Pajak Rokok (10)	111.284.690		111.034.690	1.105.370.830	-
Pajak Rokok (2,5%)	27.210.000		3.001.000	110.000.000	-
Pajak Rokok (Dana Bagi Hasil)					
Gas Bumi (70%)	93.960.806	-	9.477.900	264.000.000	-
Gas Bumi (30%)	43.034	-	39.610	3.404	
Gas Bumi (Hibah Kompensasi Otsus)	-	-	-	-	-
Minerba	110.403.810	-	11.079.350	282.994.530	-
Perikanan					-
Panas Bumi	311.065.042		17.077.910	310.750.000	
Pajak Rokok	60.310.210		30.535.700	309.000.000	
Dana Otsus	-	-			
Dana Desa	179.178.534	-	8.405.700	91.170.000	-
Dana Bagi Hasil Pemerintah	432.720.627		70.560.200	336.360.495	-
Dana Otsus	30.220.175		10.770.200	1.704.748	
DAK					
DAU	-	-	-		
DAU	91.920.720	-	10.791.200	8.538.000	-
Dana Hibah	210.210.000		510.347.000	-	37.650.000
Dana Desa	8.060.208.132		2.030.760.827	77.110.000.000	102.850.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Fakfak Barat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2019	Lebih Bayar TA 2019	Alokasi TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2020)	Penyesuaian TA 2019 (PMK No. 7/PMK.07/2021)	Alokasi Definitif TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (D) + (E)
Pajak			945.786	-1.051.049	
PPh			945.786	-1.051.049	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			945.786	-1.051.049	
PBB					
Cukai Hasil Tembakau					
Pajak Penghasilan Migas					
Pajak Penghasilan Non Migas					
Pajak Penghasilan Pasal 21					
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi					
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan					
Pajak Penghasilan Pasal 26					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Migas					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Non Migas					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bunga, Dividen dan Royalti					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Jasa Teknik, Manajemen, Teknik dan Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Hadiah dan Penghargaan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Pihak Lain					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Pihak Lain Selain Bentuk Usaha Tetap					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Selain Kegiatan Usaha Hulu Migas					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Sebagian					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Pertama					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya Pengalihan Seluruh Lainnya					
Pajak Penghasilan Pasal 26 Bentuk Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Migas Pengalihan Participating Interest Pengalihan Seluruh Pengalihan Seluruh Lainnya

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Poso Pesisir Barat

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Alokasi DBH Tersedia TA 2021 (PMK 133/PMK.07/2021)	KB DBH 2021 yang belum dibayarkan	LB DBH 2021 yang belum dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	1.326.029.774	-	2.141.453.509	3.029.967.351	3.468.050
PPh	1.420.410.509	-	746.813.430	650.500.903	-
20% Pasal 2	1.326.139.773	-	399.390.420	400.869.435	-
80% Pasal 25/29	92.052.102	-	89.310.230	12.883.935	-
PBB	2.911.307.102	-	747.062.330	2.179.941.117	3.468.050
Cukai	2.177.136.369	-	2.152.330.139	1.911.111.098	-
Cukai Dalam Negeri	18.127.269	-	121.000.000	-	3.329.012
Cukai Hasil Tembakau	18.284.774	-	3.926.139	105.073.021	-
Pajak Lainnya (Pajak Lotre)	-	-	-	-	-
Pajak Daerah (PDRD Lainnya)	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pertambangan	779.387.969	-	41.281.307	207.750.097	-
Pajak Daerah Mineral Bukan Logam	779.965.994	-	5.001.290	207.094.777	-
Pajak Pengambilan Mineral	3.999.466	-	4.067.600	-	134.031
Pajak Pengambilan Air Tanah	3.000.194	-	86.500	3.929.194	-
Pajak Pengambilan Air Permukaan	-	-	-	-	-
Pajak Pengambilan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet	3.265.629	-	5.136.503	3.099.122	-
Pajak Pengambilan Sumber Daya Alam	3.156.617	-	38.900	3.938.017	-
CHT	17.052.077	-	16.523.659	55.495	-
PDA	2.220.153.412	-	228.700.377	2.140.477.693	82.018.745
Pajak	1.997.940.620	-	171.362.300	1.170.791.255	-
Bagian Daerah 15%	5.981.683	-	31.304.950	1.470.179.342	-
Bagian Daerah 0,5%	222.940.426	-	2.591.500	19.027.919	-
Bagian Daerah dalam Wilayah Darat	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	2....	-	1.407.300	1....	-
Dana Reboisasi 5%	17....	-	32....	4....	-
Dana Reboisasi Provinsi Penghasil	-	-	-	-	-
Migas	651....	-	16....	810....	-
Landaian	-	-	-	-	-
Jumlah	3....	-	1....	3....	-
Bagian Daerah	3....	-	6....	3....	-
Dana Otsus	20....	-	1....	20....	-
Dana Tambahan	20....	-	1....	20....	-
Kekurangan	20....	-	1....	20....	-
DID	-	-	-	-	-
DTKP	-	-	-	-	-
PDSP	20....	-	1....	20....	-
Kekurangan	3....	-	2....	-	82.018.745
Grand Total	7....	-	1....	3....	3....

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi DKI Jakarta (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB s.d. 2018	LB s.d. 2019	KB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa KB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	542.791.507.522	271.397.[illegible]	271.397.117.311
PPh	-	-	542.775.772.522	271.397.417.211	271.3[illegible].311
PPh Pasal 21	-	-	533.864.437.018	271.397.417.211	262.4[illegible].019.707
PPh Pasal 25/29	-	-	8.934.335.504	-	8.9[illegible].536.504
PBB	-	-	15.762.000	-	15.762.000
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah P. Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah P. Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	15.762.000	-	15.762.000
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	-	-	-	-
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Tambahan Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Tambahan Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	542.791.534.522	271.397.417.211	271.397.117.311

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi DKI Jakarta

(dalam rupiah)

JENIS DBH	Per 31 Desember TA 2020	Alokasi TA 2021	Penyaluran DBH s.d. Bulan ke-12 TA 2021 (PMK No. 27/PMK.07/2022)	KURANG BAYAR yang belum Disalurkan	LEBIH BAYAR yang belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Migas	622.59.547.950	522.827.032	2.000.000.000.000	1.077.370.628.997	1.000.473.359
PPh	6.691.867.913.865		3.000.000.000.000	3.691.867.913.865	
PPh Pasal 21	6.184.866.874.450		2.500.000.000.000	3.684.866.874.450	
PPh Pasal 25/29	7.000.039.415	-	500.000.000.000	500.000.039.415	
PBB	9.772.447.776	636.817.282	8.500.000.000	1.909.265.058	1.000.000.000
Penghasilan	1.091.011.098	-	748.664.870	1.734.115.333	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000.000		1.750.000.000.000	10.000.000.000	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-			
Bagian Daerah Penghasil Migas		-			
Dana Reboisasi Sektor Lainnya		600.000.000	600.000.000	-	
Bagian Pemerintah Migas	721.031.113		93.517.850	627.513.263	
Bagian Pemerintah Non Migas	-				
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat Migas		-			
Bagian Pemerintah Kabupaten					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya		20.221.781	22.110.100	-	
DHE					
PDP	614.573.163	3.430.773.05	3.941.126.000	104.220.219	
Migas	611.973.163	3.101.361.91	3.105.715.000	595.267.079	
Bagian Pemerintah Pusat		2.470.588.000	1.965.440.000	-	
Bagian Daerah Penghasil		67.953.732	66.131.000	-	
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil					
Gas Bumi PGN	504.703.997		1.000.000.000	1.000.000.000	
Gas Bumi Non PGN	10.361.579		900.000	9.177.000	
Gas Bumi dalam rangka Otsus	-	-			
Migas	-	-	-	-	
Panas Bumi					
Bagian Pemerintah	-				
Bagian Daerah	-				
Bagian Pemerintah					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Pemerintah					
Bagian Daerah					
Pajak Karbon		277.970.540	224.411.000	-	612.306.619
Grand Total	9.922.271.221.111	3.101.777.043	2.000.000.738.100	4.011.390.410.794	6.791.270.762

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Jawa Barat

(Dalam Rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2019	Kurang Bayar TA 2020	Lebih Bayar DBH TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyaluran DBH TA 2019 (Kep. No. 0430/KEP/2021)	Sisa Lebih DBH TA 2019 (Kep. No. 0430/KEP/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			7.023.010.071	2.777.380.110	2.245.629.961
PBB			3.315.030.042	2.777.380.110	537.649.932
PBB Sektor P3	-	-	-	-	-
PBB Pasal 25/29	-	-	2.715.030.042	2.777.380.110	(61.649.932)
BPHTB	-	-	1.200.000.000	-	599.999.971
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau					
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Parkir	-	-	-	-	-
Pajak Reklame	-	-	1.707.980.029		1.707.980.029
Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-			
Opsen Pajak MBLB					
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Opsen Pajak Air Permukaan					
Opsen Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	17.437.369	-	17.437.369
Opsen Pajak MBLB					
Opsen Pajak Air Permukaan					
CHT	-				
SDA	-	76.125.077	21.195.787		12.933.787
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 84%					
Migas Bumi 69% dari Bagian Daerah					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 30%	-	-			
Gas Bumi 30% dari Migas Bumi	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	21.195.787	-	12.933.787
Landrent			21.195.787	-	12.933.787
Royalti					
Panas Bumi					
Dana Prasi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Kehutanan		76.125.077			
PSDH					
DR					
PSDH	-	76.125.077	-	-	-
Perikanan			-	-	-
Grand Total	76.125.077	4.075.302.361	[illegible]		[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Jawa Barat

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Alokasi Tahun 2020	LB Tahun 2020	Penyesuaian Alokasi DBH Berdasarkan PMK No. 53/PMK.07/2021	KB TA 2021 yang belum Dibayarkan	LB TA 2020 yang belum Dikembalikan
(1)	2	3	4	5 = (2+3+4)	6
Pajak	910.127.897.941		260.568.473.552	731.817.371.493	-
PPh	810.827.046.421		248.106.720.030	611.201.430.727	
PPh Pasal 21	475.655.691.567		157.212.826.200	232.861.213.115	
PPh Pasal 25/29	79.519.355.362		19.536.287.997	21.956.207.252	
PPh Pasal 26	5.654.744.268	-	1.987.456.650	36.532.916.696	
Dan Lain	-	-	-		
Pajak Bumi dan Bangunan	21.210.850.127	-	7.149.856.300	16.351.434.495	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.760.252.281		1.398.092.700	2.677.033.237	-
Cukai Hasil Tembakau	17.341.131.389		3.013.731.000	12.284.794.776	
Cukai Hasil Tembakau Dikembalikan	2.312.403.440		1.080.000.700	2.724.328.078	
Pajak Rokok	1.860.377.422	-	2.837.010.900	2.360.370.903	
Pajak Rokok Sebesar 50%	1.170.221.013	-	504.634.991	1.362.879.991	-
Pajak Penerangan Jalan Negara	201.017.036		69.797.300	153.420.236	-
Pajak Penerangan Jalan Daerah	53.373.913		9.978.900	30.997.878	
Pajak Penerangan Jalan Sebesar 50%	1.118.155.506		20.206.350	90.029.925	
Pajak Penerangan Jalan Dikembalikan	59.353.016	-	13.486.350	53.010.016	
Pajak Penerangan Jalan Belum Dikembalikan	21.127.056		24.537.600	14.375.256	-
Pajak Penerangan Jalan Sebesar 10%	22.313.921		108.360	1.677.111	-
CHT	13.760.242.260		9.121.052.300	3.610.332.003	
SDA	157.345.799.117	20.676.278.575	20.881.360.350	1.159.497.111.098	28.780.230.547
Migas		13.474.794.575	5.916.561.450		25.290.042.779
Panas Bumi (15%)		1.055.311.947	1.637.717.900	-	18.540.035.667
Minyak Bumi (0,5%)		787.414.462	37.240.700	-	562.776.943
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%		4.091.942.591	1.111.111.150		2.677.831.702
Gas Bumi 0,5%		1.201.795.591	2.872.750		13.132.350
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			-
Minerba	7.023.674.575	-	4.441.102.975	1.159.497.111	-
Landrent	964.190.042	-	30.261.675	26.258.217	-
Perikanan	4.407.734.747		413.741.600	1.033.684.157	-
Panas Bumi	132.950.307.139		21.203.743.127	111.760.957.702	24.307.731
Luar Negeri					
Hibah Daerah	3.119.485	-	27.108.200		27.108.201
Sebesar Negara Penerimaan	179.806.019.685	-	2.966.181.013	1.149.497.111.098	
Kehutanan	435.026.600	-	796.777.450	17.337.351	-
DR				-	-
PHPH					
PSDH	435.026.600	-	536.227.950	17.337.351	
Pertambangan		-	-	-	
Grand Total	1.068.063.673.102	23.676.761.179	794.198.133.903	1.734.493.263.791	28.780.230.547

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bandung

(Dalam Rupiah)

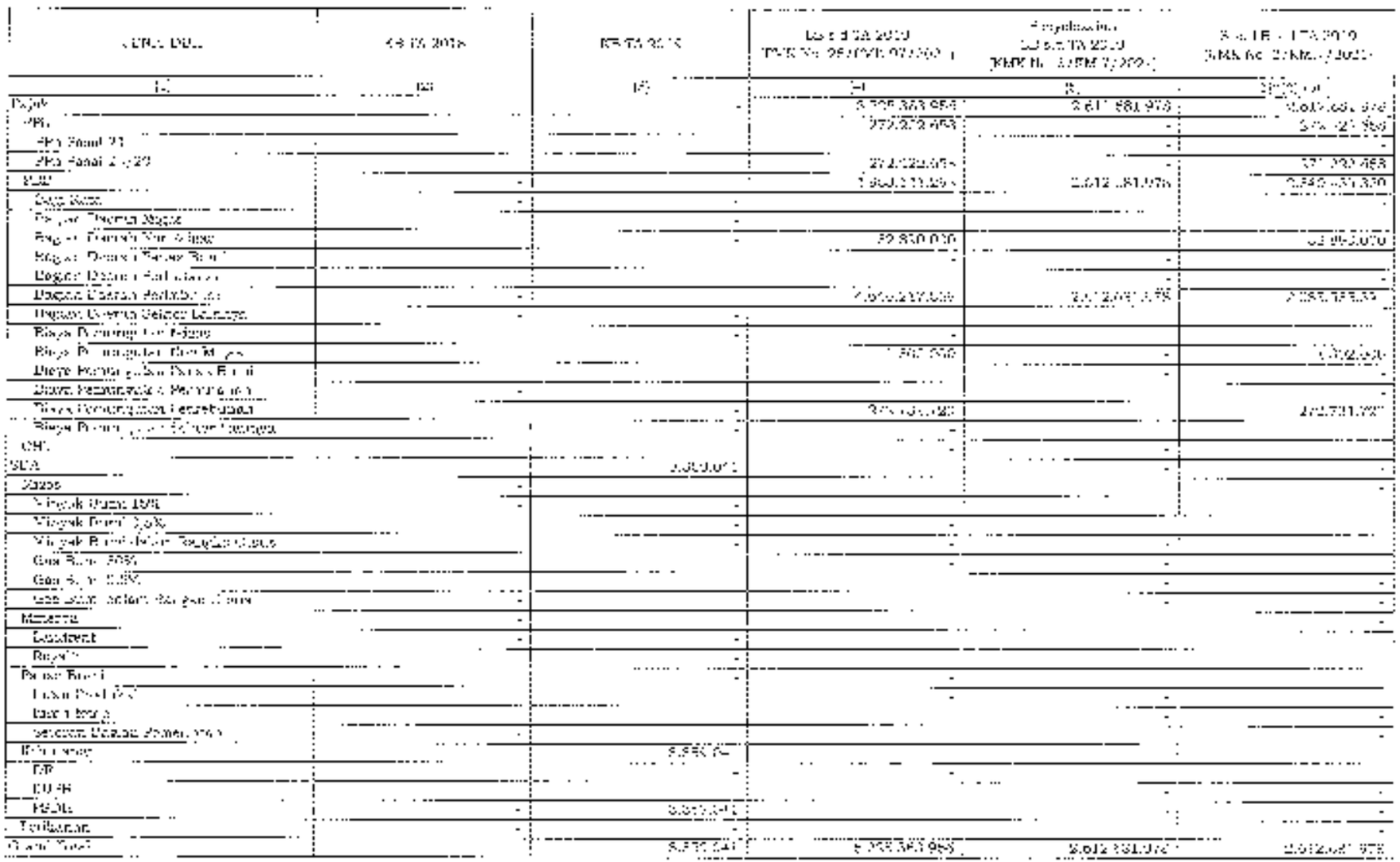

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bandung

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PPh Pasal 21 TA 2020	PB Definitif TA 2021	Penyaluran KE DBH Berdasarkan PA 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	PPh Pasal 21 TA 2020 yang belum disalurkan	PPh Pasal 21 TA 2020 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
DBH	90.347.978.280	-	71.034.888.304	37.889.613.304	52.458.365.000
PPh	11.171.979.070	-	1.058.047.900	1.113.931.170	-
PPh Pasal 21	21.782.402.000		10.135.735.961	11.646.666.039	-
PPh Pasal 25/29	2.412.353.231		1.160.511.700	1.251.841.531	-
PBB	37.256.421.000		8.430.815.300	28.825.605.700	14.331.965
Bagi Rata	1.291.959.963		215.326.660	1.076.633.303	
Bagi Rata PBB Migas	541.253.537		90.209.200		14.331.965
Alokasi Lebih Bayar Migas	-		-		
Bagian Daerah Hasil Migas	11.163.411.028		3.496.373.150	6.938.437.878	-
Bagian Daerah Pertambangan	972.967.070		20.258.130	952.708.940	-
Bagian Daerah PPh Migas	1.760.000.139		1.361.324.200		98.661.784
Bagian Daerah Pajak Lainnya	2.272.553.000		10.711.000	2.261.842.000	
Dana Kompensasi Migas	21.078.026		21.078.026		21.078.026
Dana Kompensasi Pajak Daerah	-		-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Dari PDRD	981.771.000		211.231.130	770.539.870	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	4.020.817		1.042.000	3.178.817	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	89.924.000		89.924.000		1.020.000
Dana Kompensasi DBH CHT Tahun	8.499.742		21.930	7.893.242	
CHT	1.020.770.705		156.153.750	464.573.629	-
PDA	197.182.851.977	1.811.073.157	87.316.287.075	111.677.638.735	21.475.978.324
Migas		1.811.073.157	141.081.070		1.670.991.087
Migas Bagi Rata	-	1.771.992.230	12.632.030		1.759.360.200
Migas Pph 21/26	-	39.080.927	128.448.040		911.630.887
Migas Dana Kelola Bangkit Sehat	-	-	-	-	
Sda Dana 80%		628.366.158	2.016.772		626.349.386
Sda Pusat 0,5%		15.805.181	874.490	-	14.930.691
Sda Pusat Dana Bangkit Sehat				-	-
Panas Bumi	2.327.410.000		1.431.000	810.204.000	-
Pertambangan Umum	-		-	-	-
Pungut	545.044.978		92.160.951	317.978.029	
Sda Pertambangan	192.308.396.998	-	87.158.313.745	111.150.083.253	7.199.010
Sda Pertambangan	-	-	-	-	-
Sda Pertambangan	91.357		3.050.450	-	3.159.015
Sda Pertambangan Panas Bumi	106.196.478.000		21.450.120.000	84.746.358.000	-
Sda Pertambangan	58.353.247	-	23.870.295	34.482.952	
Sda Pertambangan	-	-	-		
Sda Pertambangan	31.000.000		21.430.200	31.223.015	-
Sda Pertambangan	106.196.478		21.450.120		87.36.2020
Grand Total	97.582.262.257	60.079.016	41.020.211.811	110.624.070.001	52.272.410.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH TAHUN 2021

Kab. Bekasi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PPh 21	-	-	[illegible]	[illegible]	
PPh 25/29 Badan	-	-	[illegible]	[illegible]	
PPh 25/29 Orang Pribadi			-	-	-
PPh 26			[illegible]	[illegible]	-
PPh 4 ayat (2)			-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Cukai	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Pajak Hiburan					
Pajak Reklame					
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Parkir					
Pajak Air Tanah					
Pajak Sarang Burung Walet					
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
Pajak Alat Berat					
Pajak Opsen MBLB					
Pajak Opsen BBNKB					
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Opsen PKB dan Opsen BBNKB	-	-	-	-	-
Minerba					
Iuran Tetap					
Royalti					
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Provisi					
Kehutanan					
PSDH					
DR	-	-	-	-	-
IHPH					
PSDH					
Perikanan					
Grand Total	-				

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Lampiran Sebelas

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PMK No. 177/PMK.07/2020	PMK No. 40/PMK.07/2021	Penyaluran DBH Berdasarkan PMK No. 177/PMK.07/2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	17.386.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
CHT	160.07[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Rokok	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Alat Berat	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Air Permukaan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Hotel	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Restoran	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Hiburan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Reklame	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penerangan Jalan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Parkir	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Sarang Burung Walet	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Air Tanah	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Opsen MBLB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Alat Berat Perkebunan dan Perhutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
CHT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi 15%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi 30%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi 70%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi 3,5%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi Sebelum Tambahan Alokasi 0,5%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Tetap	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Royalti	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Produksi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kehutanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Provisi Sumber Daya Hutan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Perikanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PNBP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertanian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bogor

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	Lebih TA 2019 (PMK No. 26/PMK.07/2021)	Penyelesaian Lebih TA 2019 (KMK No. /KM.7/2021)	Sisa Lebih TA 2019 (PMK No. /KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PAJAK			971.179.069	485.589.535	485.589.534
PPh			397.316.070	397.316.070	-
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			321.191.200	321.191.200	
PBB			575.862.999	151.420.269	424.442.730
Bea Balik Nama	-	-			
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	
Daerah Penerima Bea Migas		-	-	-	-
Daerah Penerima Pasal 21			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan			424.862.869	161.420.269	176.442.730
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-		
Daerah Penerima Migas	-	-	-	-	-
Daerah Penerima Pasal 25/29			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak					
Bagian Daerah Pertambangan Gas			247.862.870		247.862.870
Bagian Daerah Pertambangan Batubara	-	-	-	-	
Daerah Penerima Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	-	-	-		-
PPN					-
PPnBM					
Migas					
Migas Bagian 15%	-	-	-		
Migas Bagian 0,5%	-	-	-	-	
Migas Dana Cadangan Negara Dasar			-	-	-
Gas Bumi 84%			-		-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Bagian Negara Dasar					
Pertambangan					
Panas Bumi	-	-			
Kehutanan	-	-	-	-	
Dana Reboisasi			-	-	-
Penerimaan Negara Pertambangan					
Kehutanan	-	5.196.252	-	-	
PSDH	-	-	-	-	-
DR		5.196.252			
Perikanan	-				
Cukai Hasil Tembakau	-	5.196.252	-	-	
Pajak Rokok					
Jumlah	-	5.196.252			
Grand Total	-	5.196.252	971.179.069	485.589.535	485.589.534

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Daerah

(dalam rupiah)

Uraian DBH	KB Tahun Ini TA 2021	LB Tahun Ini TA 2021	Penetapan KB DBH Sementara TA 2021 (KMK No. 219/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum Dialokasikan	LB TA 2020 yang belum Dialokasikan
A	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)
Pajak	72.[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
PPh	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
PPh Pasal 25/29	2.47[illegible].410.000	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
PPN	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Bea Rata	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
Pajak Daerah Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Pajak Daerah Non Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Daerah Non Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Daerah Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
Pajak Daerah Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
Pajak Daerah Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Pajak Daerah Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Daerah Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Daerah Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Daerah Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pajak Daerah Pilihan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
DPHT	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
SDA	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Migas	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi Hasil Pengolahan Kondensat Donan				-	-
Gas Bumi 30%		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi 15%		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi dari Hasil Pengolahan Blend	-	-			
Minerba	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Panas Bumi	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Pajak Karbon	71.[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					-
Cukai	259.[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
Pertambangan	58.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
PE			-	-	-
PUPH					-
PSDH	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Garut

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible] TA 2018	[illegible] TA 2019	[illegible] s.d. TA 2019 [illegible]	[illegible] [illegible] s.d. TA 2019 [illegible]	[illegible] s.d. TA 2019 [illegible]
[illegible]	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6-5)
Pajak	-	-	268.920.401	5.516.126	263.404.275
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21				-	-
PPh Pasal 25/29					-
PBB			268.920.401	5.516.126	263.404.275
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Bagian Daerah atas Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Dana Reboisasi		-			-
Bagian Daerah Penghasilan			267.347.889	90.099.122	(81.077.490)
Bagian Daerah Pajak Penghasilan					
Bagian Daerah Sektor Pertambangan	-				
Cukai Hasil Tembakau Migas	-	-	-		
Cukai Hasil Tembakau Non Migas		-	852.860	-	820.760
Bagian Daerah atas Pajak Alkohol				-	-
Bagian Daerah atas Pajak Rokok			720.652		20.632.360
Cukai Hasil Tembakau Sektor Pertambangan	-				
DAU	-	-	-	-	-
DTA		10.132.171		-	-
Migas					
Migas Bagian 15%	-				
Migas Bagian 0,5%	-	-	-		
Migas Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Dana Otsus 70%		-	-	-	-
Dana Otsus Migas				-	-
Dana Tambahan Infrastruktur				-	-
Minerba					
Iuran Tetap	-				
Royalti	-				
Panas Bumi	-	-	-	-	
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Eksplorasi				-	-
Iuran Eksploitasi					
DAK	-	19.150.171			
DAK	-	-	-	-	
DAK Fisik		-	-	-	-
DAK Nonfisik		18.370.171			
Tambahan DAK					
Dana Desa	-	9.150.171	268.920.401	90.099.120	272.210.290

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Ciamis

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	94.320.772.610	10.351.000	2.776.201.220	2.867.250.501	347.190.216
PPh	1.958.629.515		5.102.772.703	5.102.772.703	
PPh Pasal 21	19.133.699.696	-	6.936.817.100	7.024.317.100	
PPh Pasal 25/29	17.917.810.299	-	495.361.000	1.283.350.929	
PPN	4.184.847.017	153.551.000	681.791.300	3.110.836.100	347.190.216
Pajak Bumi	2.172.760.206	-	741.556.220	1.914.643.392	
Bagian Daerah Migas	137.271.274		197.317.720	-	69.634.654
Bagian Daerah Non Migas				-	
Bagian Daerah Pertambangan	87.736		451.220	60.000	
Bagian Daerah Perikanan	1.956.724.915	-	761.220.170	1.283.218.011	
Bagian Daerah Kehutanan		-7.734.000	1.136.150		208.766.000
Bagian Daerah Sektor Pertambangan	210.106.207		7.424.339	908.984.277	-
Bagian Daerah Migas	1.191.458		74.100.000	-	7.736.000
Bagian Daerah Non Migas	-				-
Bagian Pemerintah Pusat Bunga	381.715	-	71.000	1.000	
Bagian Pemerintah Perbendaharaan	71.006.870	-	681.110.000	98.594.870	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya		2.007.000	3.873.430	-	15.900.430
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	6.104.250		100.000	2.105.748	-
DBH	636.681.341		951.020.125	1.470.361.016	-
SUM	10.732.227.722	208.104.000	3.184.019.478	5.842.107.792	1.340.172.070
Migas		208.104.000	1.400.000.000		1.221.204.150
Minyak Bumi 15%		44.303.000	60.555.000	-	241.909.150
Minyak Bumi 0,5%		13.801.000	3.000.000	-	17.909.000
Minyak Bumi Hasil Tambang Lainnya				-	-
Gas Bumi 30%	-	629.000.000	1.336.445.000		741.870.000
Gas Bumi 0,5%	-	21.000.000	214.555.000		10.721.000
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-		
Pertambangan	201.006.204	-	79.450.878	797.100.000	
Kehutanan	-	-	-	-	
Panas Bumi	94.000.000		27.830.878	148.100.413	-
Pertambangan Umum	1.111.050.000		1.087.034.000	6.580.000.000	1.851.000
Iuran Produksi	-				-
Iuran Tetap	250.81	-	2.000.000		1.851.000
Penerimaan Negara Pertambangan	1.077.453.190	-	1.415.855.750	6.580.000.000	
Pertambangan	32.000.000		177.540.000	-	84.250.000
Air				-	-
Lainnya	-				
Pajak	79.073.540	-	177.540.000		84.250.000
Perikanan	21.000.000	-	955.385.878	-	6.000.000
Kehutanan	2.027.000.000	1.000.000	977.000.000	17.707.393.554	1.851.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Cianjur

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TAHUN 2018	KURANG BAYAR TAHUN 2019	PENYALURAN TAHUN 2020 (PMK No. 93/PMK.07/2020)	Penyaluran Sampai dengan Bulan Desember 2020 (PMK No. 33/PMK.07/2020)	SISA KURANG BAYAR TAHUN 2019 AKIBAT PMK No. 33/PMK.07/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(5)
Pusat	-	-	1.780.510.460	1.276.893.460	1.276.893.460
PPh	-	-	-	-	-
PPh Migas			-	-	-
PPh Pasal 21/26			-	-	-
PBB			2.866.014.416	1.778.093.416	1.087.921.000
Bea Perolehan					-
Bagian Pemerintah Pusat					-
Daerah Penghasil Non Migas	-	-	-	-	-
Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Daerah Penghasil Non Migas			1.174.320.830	-	54.320.830
Bagian Daerah Penghasil			1.174.320.830	1.120.000.000	-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya					-
Daerah Penerima Migas	-	-			-
Daerah Penerima Non Migas		-	1.675.696	1.675.696	-
Bagian Pemerintah Daerah			-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil			54.327.200		29.327.200
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	125.212.212	125.212.212	-
Daerah Penerima Bagian Lainnya	-	-	-		
Pajak	-	-	-	-	-
PPh	-	1.778.000	490.556.040	281.335.780	210.998.260
Migas			130.872.041	48.712.349	82.159.692
Migas Bagian Pusat 15%	-		2.020.220	2.020.220	-
Migas Bagian 0,5%	-	-	9.152.143	1.720.151	7.431.992
Migas Bagian Dana Bagi Hasil Migas	-	-	-		
Gas Bumi 84%		-	78.523.346	-	78.523.346
Gas Bumi 0,5%		-	1.200.191	-	1.200.191
Gas Bumi Bagian Pusat 15%				-	-
Minerba			159.633.705	-	159.633.705
Panas Bumi			199.050.501		199.050.501
Royalti	-				
Pajak Lain	-	-	-		
Bunga Deposito		-	-	-	-
Denda Pajak			-	-	-
Kekurangan Pembayaran					-
Sanksi Bagi Hasil Pajak					-
Sumber Daya Alam	-	177.993.96			
Kehutanan	-	-	-		
Iuran Hak Pengusahaan Hutan			-	-	-
PSDH		177.993.96		-	-
Pertambangan					-
Pertambangan Umum	-	177.993.96			
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					
Pertambangan Panas Bumi					
Perikanan					
Pungutan Hasil Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau	-	177.993.96	5.997.105.547	1.276.893.460	1.720.211.087

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Cianjur

(Rupiah)

Jenis DBH	PPh Pasal 21 TA 2020	PBB P2 TA 2020	Penyaluran DBH Bulan Desember TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	LB DBH Akan diperhitungkan Desember	LB DBH yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kapuk	20.089.709.340	17.921.250	9.510.745.736	11.377.775.082	45.113.677
Tem	11.021.952.218		4.002.612.200	7.019.340.018	
PPh Pasal 21	1.307.407.921		332.427.411.000	1.010.092.321	
PPh Pasal 25/29	5.747.499.451		1.190.000.100	1.972.027.701	
PBB	8.764.362.846	17.913.250	2.275.101.300	3.212.979.293	37.707.677
Hasil Kayu	391.933.963	-	956.685.701	1.276.270.196	
Iuran Eksploitasi Mineral	21.349.410	-	434.705.402	-	3.569.501
Iuran Eksploitasi Non Migas		1.000.000	17.107.102	-	20.139.176
Pajak Penerangan Hotel	1.371.787		9.301.760		126.812
Pajak Penerangan Restoran	1.991.914.459		606.100.100	1.011.100.819	
Pajak Penerangan Perkantoran	391.975.565	-	234.595.302	427.119.402	
Iuran Eksploitasi Sektor Lainnya	2.319.000.027	-	7.504.300	554.566.767	-
Iuran Pertambangan Migas	17.072.027	-	17.107.602	-	230.373
Pajak Penerangan Jalan Umum		60.000	105.103		1.135.200
Pajak Penerangan Sarang Burung	259.251		34.000	2.141	
Pajak Penerangan Perhotelan	723.415.745	-	45.451.170	46.995.541	
Iuran Pertambangan Perkantoran	59.317.475	-	4.382.350	1.100.350	-
Iuran Pertambangan Sektor Lainnya	6.002.223		941.301	8.102.743	-
PPN	410.117.027		349.887.000	120.672.971	
PPnBM	10.917.070.946	2.020.126.139	2.299.101.220	3.002.104.110	2.010.021.018
Migas	-	1.855.079.258	101.957.000		1.903.030.701
Minyak Bumi (0,5%)	-	174.038.497	27.938.350	-	1.025.62 .470
Minyak Bumi (0,5%)		38.907.317	2.000.001	-	25.351.933
Minyak Bumi (Bagian Daerah Otsus)				-	-
Gas Bumi (0,5%)		0.30.000.129	12.027.700		1.017.312.859
Gas Bumi (0,5%)		10.307.101	204.790		10.027.301
Gas Bumi (Bagian Daerah Otsus)	-			-	
PPh DN	570.575.746	12.127.402	13.557.000	280.106.120	212.196.129
Perikanan	-	25.127.402	53.362.215	-	215.692.965
Kehutanan	150.355.889	-	3.207.171	136.140.603	-
Pajak Daerah	10.210.013.340		1.657.081.121	2.582.207.707	1.601.84
Retribusi Daerah					-
Pendapatan Lain	209.931		2.161.011		1.321.317
Bagian Laba Penyertaan Modal	10.215.655.541	-	1.501.362.731	3.420.200.794	
Asuransi	220.178.219	-	45.211.000	98.988.918	-
...				-	-
TOTAL					
PBHB	695.79.719	-	91.791.000	240.108.114	
Kehutanan	86.186.382	-	19.831.000	-	11.898.229
Jumlah Total	2.156.015.146	5.012.107.171	1.101.390.381	20.38.336.102	9.414.598.204

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Cirebon

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Alokasi TA 2019	Realisasi TA 2019	Alokasi TA 2020 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Realisasi TA 2020 (PMK No. 91/PMK.07/2021)	Kurang/(Lebih) Salur TA 2020 (PMK No. 91/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Total			116.[illegible].280	[illegible].902	[illegible].708
PBH					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB			15.747.220	30.603.452	(14.856.232)
Dana Bagi					
Bagian Daerah Sebesar 10%					
Bagian Daerah Penghasil Sebesar 16,2%					
Bagian Daerah Sebesar 64,8%			14.467.220	30.603.452	(16.136.232)
Bagian Daerah Kabupaten/Kota					
Bagian Daerah Kabupaten/Kota Penghasil					
Bagian Daerah Kabupaten/Kota Lainnya					
Biaya Pemungutan 9% untuk Kabupaten/Kota					
Biaya Pemungutan 9% untuk Desa/Kelurahan					
Biaya Pemungutan 9% untuk Pemerintah Pusat					
BPHTB			1.280.000		1.280.000
Biaya Pemungutan 5% untuk Pemerintah Pusat					
SDA		3.291.156	98.937.464	98.937.464	
Migas			98.937.464	98.937.464	
Minyak Bumi 15%			15.737.464	98.937.464	
Minyak Bumi Bagian Pemerintah 0,5%					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Bagian Pemerintah 69,5%					
Pertambangan					
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Tetap					
Iuran Eksploitasi					
Setoran Sebesar 20% dari Bonus Produksi					
Kehutanan		3.291.156			
PSDH					
DR					
PSDH		3.291.156			
Perikanan					
Pungutan Hasil Perikanan		3.291.156	116.[illegible].744	[illegible].902	[illegible].842

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Cirebon (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran Kurang Bayar TA 2020 ([illegible])	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	13.736.[illegible]		[illegible].622.[illegible]	16.[illegible].196	-
PPh	21.[illegible].794.[illegible]		9.163.197.[illegible]	13.[illegible].413	
PPh Pasal 21	15.4[illegible].748.[illegible]	-	[illegible].750	11.7[illegible].4[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible].541	-	-45.[illegible].620	[illegible]	
PBB	6.[illegible].849	-	1.755.412.[illegible]	4.030.[illegible]	
Bagi Rata	[illegible].008		263.570.706	738.370.398	
Bagian Daerah Migas	2.[illegible].408		1.[illegible].508	1.757.[illegible]	-
Bagian Daerah Non Migas	[illegible].869		[illegible]	1.375.[illegible]	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-				-
Bagian Daerah Perkebunan	55.201.248	-	[illegible]	25.201.[illegible]	
Bagian Daerah Perhutanan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible].077		8.[illegible].706	2[illegible].410.[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible].200	78.[illegible].731	-
Biaya Pemungutan Non Migas	35.[illegible]	-	15.[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-			
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible].500	-	[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Perhutanan			-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
CHT	185.018.074	-	122.[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible].497.[illegible]	1.853.070.555	[illegible]	[illegible]	2.[illegible]
Migas		1.853.070.555	-4.[illegible]		1.[illegible]
Minyak Bumi 15%		1.[illegible].429	[illegible]	-	1.[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		36.[illegible]	[illegible]	-	4[illegible]
Minyak Bumi Lokasi Kilang Otsus	-				-
Gas Bumi 30%	-	[illegible].129	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	10.[illegible]	[illegible]		10.[illegible]
Gas Bumi Lokasi Kilang Otsus		-	-		
Minerba	590.[illegible]	-	32.[illegible]	[illegible]	
Iuran Tetap	50.[illegible]		[illegible]	50.[illegible].375	
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	[illegible]		[illegible].125	[illegible]	[illegible]
Iuran Produksi	-				
Iuran Tetap	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah	10.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
DR	-				-
IUPHH	-	-			
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Jumlah Total	[illegible]	[illegible]	12.[illegible]	27.[illegible]	2.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Garut

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Alokasi TA 2014	Alokasi TA 2019	Alokasi TA 2015 (PMK No. 247/PMK.07/2015)	Penyelesaian Alokasi TA 2015 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Kurang/(Lebih) Bayar TA 2015 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	1.220.630.854	1.027.785.679	192.845.175
PBB					
PBB Pasal 25	-	-			
PBB Pasal 29 (2)	-	-			
Pph2	-	-	1.539.836.604	1.027.736.842	512.099.762
Dana Darat			-	-	-
Dampak Inflasi Migas			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas			283.071.233		283.071.233
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil	-	-	2.319.201.393		2.319.201.393
Bagian Daerah Penghasil 2	-	-	910.737.161	910.737.161	-
Bagian Daerah Bantuan Lainnya			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat					-
Bagian Pemerintah Pusat Migas			9.005.213	14.005	8.991.208
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-	-		-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	1.449.307	-	1.449.307
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya			196.162.847	196.162.847	-
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					-
PPh					
BHA	-	5.556.395	1.658.113	67.126.319	93.731.794
Migas	-	-	140.950.694	97.126.346	253.824.348
Bagian Daerah Migas	-	-	232.936.278	97.126.346	135.791.932
Migas Pusat			8.192.716	-	8.192.716
Migas Pusat Bagian Daerah Penghasil					
Dana Bagi Hasil			79.211.212		79.211.212
Dana Bagi Hasil	-	-	1.292.794		1.292.794
Dana Bagi Hasil Bagian Daerah Penghasil	-	-			
Minerba	-	-	1.658.113	-	1.658.113
Landreform			376.913.425	-	376.913.425
Kehutanan			-	-	-
Dana Reboisasi					
Dana Reboisasi					
Dana Bagi Hasil	-	-			
Dana Reboisasi					
Kehutanan		5.556.395	-	-	-
PNBP					
Migas	-	-			
PNBP		5.556.395	-	-	-
Perikanan			-	-	-
Dana Desa		3.556.395	2.219.570.975	1.124.911.825	1.094.659.150

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Contoh

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(a)	(b)	(c)	(d=c-a)	(e)
PPh	34.561.184.317		113.231.185.847	20.420.032.530	1.008.713.498
PPN	14.594.719.711		2.662.998.700	9.431.763.011	-
PPh Pasal 21	11.168.599.443		7.190.776.200	3.978.135.243	-
PPh Pasal 22/26	1.855.120.666		496.186.200	1.358.934.466	-
PBB	6.177.179.179		5.276.960.000	12.222.261.361	1.022.261.643
Bea Hak [illegible]	1.081.059.094		505.663.750	1.126.270.856	
Bea Hak [illegible] Migas	222.012.119		393.948.850	-	122.167.922
Bea Hak [illegible] Non Migas	9.021.149		4.358.750	4.782.999	-
Cukai Hasil Pengolahan Tembakau	3.199.268.035		3.211.210.000	12.049.965	-
Cukai Hasil Hasil Pertembakauan	1.503.077.404		511.029.000	28.238.727	-
Pajak Rokok	1.170.163.778		1.264.662.000		570.171.043
Pajak Penerangan Jalan Perkotaan	211.026.202		3.427.536	208.884.313	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.082.350		13.027.750	-	5.124.940
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Migas	555.55		150.000	149.999	-
Biaya Administrasi Pajak Rokok	326.457.751		120.150.530	241.084.051	-
Biaya Administrasi Pertembakauan	5.850.027		1.020.420	1.020.424	
Biaya Pemungutan Pertembakauan	10.228.547		54.076.500	-	43.852.010
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	6.501.243		3.365.000	3.136.243	
DBH	5.779.586.124		3.320.010.421	859.846.550	-
DBHCHT	4.650.104.253	1.051.329.868	13.027.040.200	7.315.605.687	7.137.681.019
Migas		1.853.079.855	44.507.100		1.808.572.755
Minyak Bumi 15%		1.177.963.428	37.606.500		1.140.356.928
Minyak Bumi 3,5%		38.802.068	4.116.600	-	34.685.468
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Daerah				-	-
Gas Bumi 15%	-	626.696.130	12.827.000	-	641.615.599
Gas Bumi 0,5%	-	9.607.131	211.000		9.772.131
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah	-	-			-
Pph 21	367.870.478	-	4.836.775	372.707.253	
Pph 22	77.124.450	-	19.336.600	96.461.050	
Pph 23	1.[illegible].070.000		34.425.475	313.355.595	
Pajak Rokok	4.[illegible].419.775		10.016.778.700	53.710.586.780	2.084.[illegible]
Bagian Pemerintah	-				-
Bagian Lainnya	999.87	-	2.131.272		1.677.940
Bagian Daerah Pemerintah	4.[illegible].808.037	-	10.[illegible].[illegible].[illegible]	50.732.830.202	
Pajak Rokok	12.[illegible].037		28.348.155	19.[illegible].[illegible]	
DR				-	
DAU	-				-
DAK	47.[illegible].837	-	25.[illegible].[illegible]	19.[illegible].[illegible]	-
Total Pusat	121.[illegible].[illegible]	-	2.[illegible].[illegible]		357.[illegible].[illegible]
Grand Total	79.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	96.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Indramayu

(Dalam Rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2020	KB TA 2019	LB TA 2021 (PMK No. 29/PMK.07/2021)	Kompensasi TA 2019 (PMK No. 6/PMK.07/2021)	LB TA 2021 (KEP-6/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			6,067,201,227	6,067,201,227	
PPh			5,031,166,377	5,031,166,377	
PPh Pasal 21	-		2,090,201,437	2,090,201,437	
PPh Pasal 25/29	-	-	2,494,551,240	2,494,551,240	-
PPh	-	-	446,241,700	446,241,700	-
Jabatan	-	-	-	-	-
Usaha					
Bunga					
Dividen					
Royalti					
Sewa					
Jasa Lainnya					
Pasal 26	-	-	537,224,244	537,224,244	-
Pasal 26 (DTP)	-	-	-	-	-
Pasal 15					
Pasal 22					
Pasal 23	-	-	-	-	-
Pasal 4 (2)	-	-	93,024,676	93,024,676	-
Pasal 4 (2) Pertambangan Panas Bumi					
Pasal 4 (2) Lainnya					
PPN					
PPnBM	-	5,484,180	3,264,554,434	3,259,070,254	5,484,180
Migas	-	-	3,264,554,434	3,259,070,254	5,484,180
Minyak Bumi	-	-	2,941,817,276	2,936,333,096	5,484,180
Minyak Bumi DTP			279,452,551	279,452,551	
Minyak Bumi Hasil Pengolahan Kilang					
Gas Bumi			43,284,607	43,284,607	
Gas Bumi (DTP)			-	-	
Gas Bumi Hasil Pengolahan Kilang	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landaian	-	-	-	-	-
Iuran					
Jenis Lain					
Pajak Lainnya					
Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Opsen Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Kehutanan		5,484,180			
PSDH					
DR	-	5,484,180	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah Total		5,484,180	15,021,020,719	14,810,550,654	5,484,180

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Indramayu

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Tahun Anggaran TA 2020 (PMK No. 134/PMK.07/2021)	LB TA 2020 yang belum Disalurkan	KB TA 2020 yang belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	54.414.001.042	-	17.397.770.030	36.616.104.013	-
PDP	7.030.219.121	-	3.013.070.036	5.017.227.097	-
PPh Pasal 21	12.960.220.218	-	3.112.099.130	1.848.770.016	
PPh Pasal 25/29	2.070.501.807	-	497.090.830	1.573.410.977	
PBB	39.630.344.971	-	10.284.981.720	29.345.340.113	
Bagi Hasil	60.350.308	-	266.049.100	1.284.301.208	
Bagian Daerah - Igas	55.736.943.815	-	9.818.855.610	45.963.757.516	
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 4 Ayat (2)			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	346.159.250		109.021.100	337.034.150	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	1.051.022.-		726.100.007	1.325.029.073	
Bagian Daerah Sektor Pertambangan	2.111.377.814	-	1.695.700	850.104.007	
Lebih Perhitungan Migas	1.351.171.871	-	837.706.700	973.476.795	-
Lebih Perhitungan Non Migas				-	-
Pajak Penghasilan Pasal 21					
Bagian Pemerintah Pusat Migas	44.154.-		10.925.307	30.750.925	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	103.941.142	-	37.156.100	1.076.654	
Bagian Pemerintah Sektor Pertambangan	2.357.013	-	450.300	2.630.-	-
PPh	401.031.072		102.312.183	1.000.017.817	-
PPN	1.764.771.156	1.908.700.010	1.076.027.109	11.017.433.300	3.130.420.552
Migas	-	1.908.700.010	121.107.710		3.290.700.200
Migas Bagian 15%	-	1.171.048.635	530.444.300		5.451.745.902
Migas Bagian 0,5%	-	179.134.355	5.310.301	-	181.144.650
Migas Bagian dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Migas Bagian 30%		2.170.414.641	1.202.200	-	2.463.678.841
Migas Bagian 2,5%		12.034.179	300.196		43.425.245
Migas Bagian dalam Rangka Otsus					
Migas	343.044.016		32.151.950	210.979.100	
Migas	-	-	-		
Migas	343.044.016	-	37.165.950	310.979.060	
Pajak Lain	1.010.013.280	-	1.637.384.178	3.380.102.799	1.69 .544
Jumlah Pendaftar			-	-	-
Tanah dan	309.901		2.151.170		1.841.154
Bagian Pemerintah Pusat	9.316.853.549		1.568.402.700	8.020.050.150	
Administrasi	64.405.816	-	37.154.610	27.599.950	
Lain	-	-	-	-	-
Pajak				-	-
PBHP	8.432.619		37.307.320	27.051.700	
Pajak Lain	59.756.580	-	1.216.304.-		107.091.142
Grand Total	61.770.405.133	3.058.735.746	2.112.513.330	43.034.016.170	9.229.650.902

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Kotawaringin

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	7.630.163.392	6.732.800.018	1.770.817.782
Pph	-	-	7.026.194.760	6.732.800.018	1.293.394.682
Pph Pasal 21	-	-	3.457.8[illegible].870	3.457.8[illegible].870	-
Pph Pasal 25/29	-	-	5.858.255.970	5.138.363.198	477.087.974
Ppn	-	-	904.587.620	-	904.587.620
Pbb P2				-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pajak Bumi					
Bagian Daerah Perbatasan		-	483.3[illegible].030	-	183.3[illegible].030
Bagian Daerah Perbatasan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Bagi Pemerintah Migas					
Bagi Pemerintah Non Migas		-	-		
Bagi Pemerintah Pajak Bumi		-	-	-	
Bagi Pemerintah Perbatasan			19.273.630	-	19.273.630
Bagi Pemerintah Perbatasan					
Bagi Pemerintah Sektor Lainnya					
Cht	-	-	-		
Bea	-	3[illegible].097	6.383.687.482	-	6.[illegible].982.379
Migas			6.383.097.482	-	6.[illegible].982.379
Minyak Bumi (15%)			2.762.[illegible].122	-	2.762.[illegible].122
Minyak Bumi (0,5%)			92.0[illegible].707		92.0[illegible].707
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-				
Gas Bumi (20%)	-	-	3.[illegible].652.073		3.[illegible].652.073
Gas Bumi (0,5%)	-	-	-	-	
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah	-	-	-	-	
Mineral		-	-	-	-
Panas Bumi				-	-
Royalti					
Pajak Progresif					
Iuran Pertambangan	-	-			
Iuran tetap	-	-	-	-	
Penerimaan Negara Bukan Pajak			-	-	-
Kehutanan		3.010.077			-
PSDH			-	-	
DR	-	-	-	-	
IHPHH		3.010.077	-	-	-
Perikanan				-	-
Cukai Hasil Tembakau		3.010.077	12.[illegible].[illegible].[illegible]	6.[illegible].[illegible].[illegible]	6.[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kerawang

(dalam rupiah)

Uraian	PK DBH TA 2022	TB DBH TA 2022	Realisasi APBN Sumber Dana TA 2021 (Lap. Keu. BUN/LKPP)	KB LA 2020 yang Belum Disalurkan	Kurang Salur yang Belum Direalisasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)	(6)
Pajak	101.308.272.000		85.810.090.156	61.460.241.153	178.540.156
PPh	91.124.811.992		73.534.513.200	44.887.115.599	-
PPh Pasal 21	71.168.430.192		57.120.617.308	14.015.645.859	-
PPh Pasal 22/23	4.756.838.760		3.243.670.802	2.611.172.300	-
PBB	4.356.616.936	-	2.670.201.902	11.033.777.174	126.842.152
Cukai Hasil Tembakau	1.071.089.076	-	248.736.760	1.726.372.494	
Pungutan Lainnya Migas	1.790.000.000	-	758.304.861	9.543.813.020	
Bagian Daerah Non Migas	6.837.000		1.256.150	4.101.953	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak	63.648.126		111....		54.159.474
Bagian Daerah Pertambangan Gas	-				
Pajak Lainnya (Selain Sumber)	615.835.307	-	5....	205....	
Pajak Penghasilan Pasal	1....	-	83....	15....	
Pajak Penghasilan Pasal Migas	1....		83....	179.343	-
Pajak Penghasilan Pasal Panas Bumi					-
Pajak Pertambangan Minyak	3....	-	13....		1....
Pajak Pertambangan Selain Migas	1....		-		
Pajak Penghasilan Sektor Lainnya	1....		3....	3....	-
CHT	10....	9....	7....	2....	-
SDA	10.758....	9....	3....	8....	8....
Migas	-	9....	2....	2....	2....
Minyak Bumi	-	7....	2....	2....	2....
Gas Bumi		2....	1....		91....
Pajak Penghasilan Pasal Migas			-	-	-
Gas Bumi 1,5%		1....	88....	-	8....
Gas Bumi 0,5%		92....	10....		94....
Gas Bumi Bagian Pemerintah	-				-
Minyak	343....	-	30....	31....	
Landasan	280....	-	-	28....	
Tanah	343....	-	49....	3....	
Panas Bumi	10....		1....	1....	1....
Pajak Penghasilan Pasal					-
Iuran Tetap	298....		2....		1....
Setoran Lebih Pembayaran	12....	-	1....	11....	
Kehutanan	37....	-	19....	19....	
PSDH			-	-	-
DR				-	-
Asli	83....		17....	19....	
Perikanan	150....	-	5....		1....
Grand Total	115....	9....	46....	72....	9....

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kuningan (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 57/PMK.07/2020)	Penyaluran LB TA 2019 (SMK No. 2/KM.7/2021)	Sisa LB TA 2019 (PMK No. 57/PMK.07/2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			706.846.550	624.903.611	81.942.939
CHT			-		-
70% Jawa & Bali			-		-
30% Luar Jawa & Bali			-		-
PBB			305.470.000	1.170.028.234	-782.907.634
Bag. Rata					-
Bagian Daerah Penghasil					-
Bagian Daerah Non Migas			-		-
Bagian Daerah Untuk Lokasi			-		-
Bagian Daerah Pemerataan			305.470.000	1.170.028.234	-782.907.634
Bagian Daerah Penghasil					-
Bagian Daerah Penghasil Sektor Pertanian					-
Biaya Pemungutan Migas			-		-
Biaya Pemungutan non Migas			-		-
Biaya Pemungutan Daerah Penghasil			-		-
Biaya Pemungutan Pemerataan			21.727.407		21.727.407
Biaya Pemungutan Daerah Penghasil					-
Biaya Pemungutan Sektor Pertanian			-		-
Cukai			-		-
PDP		6.292.323	-	-	-
Migas					-
Wilayak Bantul 85%					-
Wilayah Bantul 0,5%					-
Wilayah Daerah dalam Provinsi Penghasil			-		-
Luar Daerah 20%			-		-
Luar Daerah 0,5%			-		-
Luar Daerah dalam Provinsi 0,5%			-		-
Minerba					-
Iuran Tetap					-
Royalti					-
Panas Bumi		-	-		-
Iuran Produksi			-		-
Iuran Tetap			-		-
Penerimaan Negara Bukan Pajak					-
Kehutanan		6.292.323			-
DR		-	-		-
PSDH		-	-		-
PSDH		6.292.323			-
Pungutan Lain					-
Grand Total		6.292.323	706.846.550	624.903.611	81.942.939

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Toraja Utara

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	KB DBH TA 2021	Penyaluran KB DBH Tahun 2020 (PMK 71/PMK.07/2021)	Alokasi KB DBH yang belum disalurkan	LB DBH TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	2,887,070,530	-	2,109,545,375	777,525,155	7,554,469
PBB	1,691,410,787		913,000,400	778,410,387	-
20% Pasal 21	1,197,660,592		541,000,400	656,660,192	-
20% Pasal 25/29	1,693,749,795		372,000,000	1,321,749,795	-
BPHTB	3,610,254,701		971,120,400	2,639,134,301	7,554,469
Pajak Air Permukaan	101,350,396		200,069,700	(98,719,304)	
Pajak Rokok	91,340,155	-	299,677,030	(208,336,875)	1,554,000
Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		-	-	-	-
Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			-	-	-
Pajak Opsen Pajak Rokok	1,131,201		600,000	531,201	-
Pajak Opsen Pajak Air Permukaan	9,360,424		2,282,000	7,078,424	-
Pajak Opsen Pajak Rokok	15,690,307	-	3,021,000	12,669,307	
Biaya Pemungutan Pajak	9,561,171	-	9,457,000	104,171	554,000
Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Air Permukaan					-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	51,309,467		11,701,000	39,608,467	
Biaya Pemungutan Pajak Opsen	2,556,368	-	720,000	1,836,368	
Biaya Pemungutan Opsen Pajak Lainnya	5,347,347	-	5,400,000	(52,653)	-
PBH	102,278,794		496,700,000	192,678,794	-
DBH	10,814,117,032	1,858,070,000	11,170,000,000	9,914,000,000	2,187,687,032
Pajak		1,858,070,000	2,136,000,000		1,858,070,000
Bagian Hasil PBB	-	1,174,953,435	1,174,829,000		1,174,953,435
Bagian Hasil BPHTB	-	683,116,565	961,171,000		683,116,565
Bagian Hasil PPh Pasal 21			-	-	
Cukai Hasil Tembakau		474,000,000	474,000,000	-	541,613,032
Cukai Tahun 2020		13,407,131	211,000	-	13,196,131
Cukai Tahun Sebelum Tahun 2020				-	-
Minerba	343,044,013		32,151,000	310,893,013	-
Kehutanan					-
Panas Bumi	343,044,013	-	37,151,000	310,893,013	-
Dana Reboisasi	11,471,073,045	-	1,037,384,105	3,590,000,000	1,884,941
Sumber Daya Alam		-	-	-	-
Provisi Sumber Daya Hutan	2,471,073		2,151,000	-	1,884,941
Setoran Pungutan Provisi Sumber Daya Hutan	11,468,602,000		1,035,233,105	8,000,000,000	
Kekurangan	17,829,054	-	36,149,000	57,778,054	
DAK		-	-	-	-
Fisik				-	-
Non Fisik	59,822,951		36,219,000	123,603,951	-
Pajak Alat Berat	159,745,000		316,931,000		287,601,000
Grand Total	77,478,146,841	1,858,070,000	9,107,506,480	2,657,815,341	2,190,920,000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lab. Majalengka

(Dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2020	TB TA 2019	Kurang Salur PMK No. 27/PMK.07/2021	Kurang Salur PMK No. 9/PMK.07/2021	Sisa KB s.d TA 2021 (KEP-No. 9/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)-(2)
Pajak			200.840.000	397.730.000	1.129.000.000
PPh			139.997.000	139.997.000	
Pph Pasal 21					-
Pph Pasal 25/29			139.997.000	139.997.000	-
PBB	-	-	697.697.549	265.697.549	(1.129.000.000)
Pajak Desa	-	-	-	-	
Pajak Daerah Lainnya	-	-			
Pajak Daerah Yang Belum Ada					
Pajak Daerah Pemekaran					-
Cukai Tembakau (Cukai Rokok)	-	-	557.842.549	125.842.549	-
Pajak Penerangan Jalan	-	-			
Pajak Penerangan Bukan Migas					-
Pajak Penerangan Non Migas					-
Pajak Penerangan Khusus Migas					-
Pajak Penerangan Khusus Non Migas	-	-	4.312.000	-	4.312.000
Pajak Penerangan Bukan Migas	-	-	97.855.000	97.855.000	
Pajak Penerangan Khusus Migas	-				
Cukai					-
Migas		3.637.000	615.353.177	364.756.304	540.596.873
Migas	-	-	615.353.177	364.756.304	540.596.873
Migas Bumi (85)	-	-	757.781.000	364.756.304	710.824.000
Migas Bumi (15)			90.248.774		30.228.074
Migas Bumi dan Sumber Daya Alam Lainnya					
Gas Bumi (70%)					
Gas bumi sebelum kenaikan			-	-	-
Minyak	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	
Royalti					
Pajak Bumi					
Bunga Kompensasi					
Bunga lainnya	-	-	-	-	-
Kompensasi Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	3.637.000			
PSDH					
DR					-
Royalti	-	3.637.000	-	-	-
Perikanan	-	-			
Grand Total	-	3.637.000	1.321.193.726	660.486.853	660.706.873

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lampiran I
Salinan sesuai dengan aslinya

No	Uraian	Alokasi DBH Tahun 2021	Realisasi DBH Tahun 2021	Kurang/(Lebih) Bayar DBH Tahun 2021 (Alokasi DBH Tahun 2021 - Realisasi DBH Tahun 2021)	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan	Kurang/(Lebih) Bayar DBH Tahun 2021 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	PPh	31.549.262.000		6.901.805.000	12.003.177.302	-
B	PPN	4.208.931.000		6.245.818.000	7.972.972.000	
1	PPh Pasal 21	2.805.402.000	-	6.077.201.000	6.729.187.213	
2	PPh Pasal 25/29	1.403.529.000	-	824.617.000	1.011.092.179	
C	PBB	3.427.017.000	-	842.587.000	6.603.528.541	
1	Bagi Hasil	1.951.950.000	-	548.669.000	1.796.372.958	
2	Bagian Daerah Migas	1.475.071.000		293.918.000	807.155.583	-
3	Bagian Daerah Non Migas					-
4	Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan	694.997		913.000	73.000	
D	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	856.493.000	-	104.990.000	201.572.000	
E	Cukai	4.700.000.000	-	484.549.000	6.651.071.000	
F	Pajak Daerah Sektor Tertentu	210.000.000		6.614.000	206.364.000	-
1	Pajak Penerangan Jalan	210.000.000		29.250.000	35.172.000	-
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-				
3	Pajak Pengambilan Air Permukaan	90.000	-	36.000	54.000	
4	Pajak Pengambilan Air Tanah	16.168.000	-	4.847.000	16.590.000	
5	Pajak Parkir	210.000.000		23.025.000	169.971.000	-
6	Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet	6.500.000		2.000.000	6.192.000	-
G	DBH	781.482.000	-	242.172.000	353.078.000	
H	DBHCHT	10.763.286.000	7.356.117.861	2.172.024.000	9.868.451.000	2.212.489.000
1	Cukai		7.356.117.861	60.784.000	-	2.193.970.000
2	Sanksi Denda (5%)		1.307.303.000	20.026.000	-	1.439.869.000
3	Sanksi Denda (2%)		1.129.000	4.395.000	-	47.634.000
4	Sanksi Denda Dalam Rangka Penagihan					-
I	DBH SDA	-	974.012.000	10.000.000		987.000.000
1	DBH SDA Migas	-	1.265.000	340.000		11.000.000
2	DBH SDA Migas Dalam Rangka Otsus		-			
J	Pertanahan	340.000.000	-	90.000.000	3.000.000	
1	Pertanahan	-		-	-	-
2	Reboisasi	340.000.000		90.000.000	3.000.000	-
K	DBH Pertambangan	2.000.000.000		1.000.000.000	8.000.000.000	1.000.000
1	Iuran Produksi	-				
2	Iuran Tetap	250.000	-	50.000		50.000
L	Pertambangan Panas Bumi	11.215.000.000	-	1.000.000.000	8.000.000.000	
M	Kehutanan	41.701.000		24.000.000	5.000.000	-
1	PSDH	-	-			
2	DBHDR	41.701.000	-	24.000.000	5.000.000	
N	Perikanan	200.000.000		100.000.000	-	100.000.000
O	Total	67.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000	73.000.000.000	9.300.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 202 .

Kab. Purwakarta

(dalam rupiah)

Uraian	[illegible]	[illegible]	Sisa TA 2019 (PMK No. [illegible])	Realisasi TA [illegible] (PMK No. [illegible])	Sisa TA s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PPh 21			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 25/29 [illegible]					
PPh [illegible]			[illegible]		[illegible]
Iuran Pokok					
Pungutan Ekspor Kayu					
Bagian Pemerintah Pusat Negara					
Bagian Pemerintah Pusat Provinsi			[illegible]		[illegible]
Bagian Pemerintah Pusat Kabupaten/Kota			[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Penghasil Provinsi					
Bagian Daerah Penghasil Kabupaten/Kota					
Bagian Pemerintah Negara					
Bagian Pemerintah Pusat Provinsi					
6,0% Penerimaan Pertambangan Panas Bumi			[illegible]		[illegible]
Iuran Pertambangan Panas Bumi			[illegible]		[illegible]
Bagian Pemerintah Pusat Kabupaten/Kota					
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil					
PPh [illegible]					
PBB		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten/Kota					
Minerba			[illegible]		[illegible]
Landrent			[illegible]		[illegible]
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap					
Kehutanan		[illegible]			
PSDH					
DR					
IHPH					
PSDH		[illegible]			
Perikanan					
Cukai Hasil [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Purwakarta

(dalam rupiah)

Uraian DBH	KB DBH TA 2021	LB DBH TA 2021	Perubahan PB DBH Sebelumnya ke 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang telah dibayarkan	LB TA 2020 yang telah dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DBH	64.211.031.438	-	14.136.169.364	21.119.200.459	260.200.062
PBH	63.950.830.320		17.738.572.950	17.946.781.018	
PBH Pasal 21	28.526.960.782		13.162.999.270	16.710.784.350	
PBH Pasal 25/29	1.765.564.107		624.949.830	1.136.331.427	
PBB	4.158.574.720		3.950.997.850	8.125.264.878	38.192.045
Cukai Hasil	1.031.650.026		200.000.000	1.220.270.026	-
Pajak Penghasilan Migas	24.068.897		198.780.000		317.694.426
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	180.127.139	-	93.102.320	99.010.139	
Bagian Pemerintah Pusat Migas		-	-		
Bagian Daerah Perikanan	309.647.976		929.453.736	619.135.646	
Bagian Daerah Pertambangan	750.490.736		1.130.000.000	1.870.320.836	-
Bagian Daerah Kehutanan	215.690.207	-	8.621.000	300.094.707	-
Bagian Pemerintah Daerah Migas	1.570.247	-	6.030.000		1.459.753
Bagian Pemerintah Daerah Pertambangan Migas	18.247.243	-	3.158.592	15.946.651	
Bagian Pemerintah Daerah Panas Bumi			-		
Dana Reboisasi	42.904.974		13.221.000	28.720.774	-
Dana Reboisasi Kehutanan	11.894.964	-	7.210.000	3.580.041	-
Bagian Pemerintah Daerah Pertambangan	9.317.243	-	5.000.000	8.146.071	
DAU	202.217.029		365.406.104	1.070.015.551	
DAK	12.925.761.565	1.257.877.000	2.773.177.371	3.061.479.205	1.250.000.126
Hibah	-	1.950.000.000	124.847.000	-	1.918.098.300
Hibah Dalam Bentuk Uang	-	1.177.956.435	127.025.000		1.302.097.775
Hibah Dalam Bentuk Barang		53.032.555	4.732.500		13.000.255
Hibah Dalam Bentuk Surat Berharga Utang		-	-		
Dana Bagi Hasil (DBH)		624.090.098	17.337.701		91.610.824
Dana Bagi Hasil (DBH)		10.477.131	214.400	-	10.721.561
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah			-		
Marsora	363.071.767	3.703.000	32.073.000	210.907.827	4.746.250
Lendawai	-	3.716.000	500.000		4.746.250
Rawa Tri	410.057.777	-	32.101.950	110.008.837	-
Desa Bagi	20.267.772.471	-	6.611.000	8.615.201.961	
Dana Perimbangan		-	-		
Bagi Hasil	521.3.812		12.901.000	30.254.262	
Sebelum Lebih Bayar (PMK)	76.915.863.320		1.001.000.000	4.748.000.000	-
Kompensasi	84.525.418	-	32.210.302	20.312.116	-
DP		-	-		
PPH			-	-	
PPDL	58.493.818		32.210.000	20.312.116	-
Verifikasi	150.731.000		210.000.000		127.000.000
Grand Total	12.111.031.054	1.880.587.135	16.111.111.111	20.027.000.000	5.000.187.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab/Kota

(Dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar		Lebih Bayar		
	TA 2019	TA 2020	Sebelum Penundaan (PMK No. 26/PMK.07/2021)	Penundaan (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Setelah Penundaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)
PPh	-	-	[illegible]	[illegible]	262.[illegible].400
PPh	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	-	-	[illegible]	[illegible]	-
Jasa			[illegible]		262.[illegible].400
Dana Bagi					
Bagian Daerah Hasil					
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29	-	-	[illegible]	-	250.[illegible].000
Bagian Daerah Perseorangan					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perseorangan			11.[illegible].000		11.[illegible].000
Bagian Pemerintah Perseorangan					
Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA		3.[illegible].[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi Hasil Pengolahan	-	-	-	-	-
Gas Bumi	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi	-	-	-	-	-
Pertambangan Panas Bumi					
Kehutanan					
Reboisasi					
Provisi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Perikanan					
Pertambangan		3.[illegible].[illegible]			
PBB	-	-	-	-	-
BPHTB	-	-	-	-	-
Pasal 21		3.[illegible].[illegible]			
Pertambangan					
Total		3.[illegible].[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Subang (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. .../PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang akan diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	76.697.191.998		14.267.160.272	62.430.029.526	
PPh	16.279.421.062		6.245.382.100	10.033.738.762	-
PPh Pasal 21	15.536.971.615		5.816.421.150	9.720.550.465	-
PPh Pasal 25/29	731.849.447		428.612.050	1.303.137.147	-
PBB	37.102.309.927	-	5.633.791.292	22.2[illegible]	
Bagi Rata	1.991.050.038	-	195.183.700	1.795.277.292	
Bagian Daerah Migas	75.[illegible]1.020	-	[illegible]	15.695.161.852	
Bagian Daerah Non Migas			-	-	
Bagian Daerah Panas Bumi			-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	534.728.951		167.[illegible]	167.282.751	-
Bagian Daerah Perhutanan	4.748.023.317		1.359.342.670	3.397.[illegible]	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	515.[illegible]	-	[illegible]	298.[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	722.[illegible]	-	143.378.820	613.[illegible]2.458	
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-				-
Biaya Pemungutan Perkebunan	27.456.795	-	8.6[illegible]	18.[illegible]	
Biaya Pemungutan Perhutanan	250.[illegible]	-	71.358.700	179.[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	3.[illegible]	
CHT	315.[illegible]		[illegible]	143.316.637	-
SDA	10.753.856.972	12.[illegible]	2.[illegible]	8.[illegible]	12.640.473.816
Migas	-	11.[illegible]	2[illegible]		12.[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]		2.[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		62.472.053	5.[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	
Gas Bumi 30%		1[illegible]	94.[illegible]	-	1[illegible]
Gas Bumi 0,5%		16[illegible]	[illegible]		163.044.033
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Minerba	345.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Iuran Tetap	-	-	-		
Royalti	363.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	10.235.[illegible]	25.[illegible]	1.[illegible]	8.580.[illegible]	15.[illegible]
Iuran Produksi				-	-
Iuran Tetap	-	15.[illegible]	15.[illegible]		48.[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah	10.215.853.549	-	1.[illegible]	8.[illegible]	
Kehutanan	35.[illegible]	-	25.[illegible]	9.[illegible]	
DR			-	-	-
IIUPH				-	-
PSDH	35.272.325	-	25.[illegible]	9.682.[illegible]	-
Perikanan	3[illegible]	-	316.[illegible]		3[illegible]
Jumlah Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	41.[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sukabumi

(Rupiah)

Uraian	KB TA 2018	KB TA 2019	Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2022)	Sisa Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	3,668,934,960	1,910,783,560	1,758,151,400
PPh	-	-	-		
PPh Pasal 21	-				
PPh Pasal 25/29					
PDB			3,668,934,960	1,910,783,560	1,758,151,400
Cukai Hasil Tembakau					
Sanksi Cukai Hasil Tembakau			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	97,593,870	97,593,870	-
Bagian Pemerintah Pusat PPh Pasal 21	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat PDB	-		1,672,340,000		1,672,340,000
Bagian Daerah Penghasil			1,898,999,090	1,813,189,690	85,809,400
Bagian Lainnya (PPh Pasal 22 Impor)				-	-
Bagian Pemerintah Pusat		-		-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	92,963,827	92,963,827	-
Bagian Pemerintah Pusat PPh Pasal 22 Impor					
Bagian Pemerintah Pusat Pajak Lainnya			91,750,000		91,750,000
Bagian Pemerintah Daerah			80,906,663	80,906,663	-
Bagian Pemerintah Pusat Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
DAK		7,957,852	721,917,037	677,866,153	44,050,884
Migas			741,874,064	677,866,153	64,007,911
Minyak Bumi (15%)			652,650,620	652,650,620	-
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	7,450,740	7,450,740	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi (30%)	-	-	77,257,863	18,257,943	57,999,920
Gas Bumi (0,5%)			1,286,799		1,286,799
Gas Bumi dalam rangka Otsus Maluku			291,119,039		291,119,039
Pertambangan Panas Bumi			291,119,039		291,119,039
Pajak Penghasilan			-	-	-
Pertambangan Umum	-	-	83,211,887	-	83,211,887
Iuran Tetap (Landrent)	-	-	-		
Iuran Eksploitasi (Royalti)			83,211,887		83,211,887
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi					
Kehutanan		7,957,852	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DBHDR	-	-			
Pungut		7,957,852			
Perikanan					-
Jumlah Total	-	7,957,852	4,390,848,997	2,588,649,713	1,802,199,284

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sukabumi (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH s.d. TA 2020	LB DBH s.d. TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (KMK No. .../KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum Disalurkan	LB TA 2020 yang belum Diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Migas	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	[illegible]			[illegible]	-
Bagian Daerah [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah P. [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah P. [illegible]	453.429.[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]			[illegible]	
Biaya Pemungutan [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
CHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Landrent	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Royalti	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	205.931		[illegible]		[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
DR				-	-
IIUPH					
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Jumlah Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumedang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Alokasi 2020	Alokasi 2019	Penyaluran s.d. TW IV 2021 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian s.d. TW IV 2021 (KEP-[illegible]/PK/2021)	Alokasi yang Harus Disalurkan (KEP-[illegible]/PK/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reg. Baru	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Umum	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Dalam Lokasi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Pemerintah Pusat Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai	-	-	-	-	-
BPHTB	-	[illegible]	-	-	-
Migas	-	-	-	-	-
Bagian 0,5%	-	-	-	-	-
Bagian 0,5%	-	-	-	-	-
Bagian Pajak Migas Lainnya	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Tahun Berjalan	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Bagian Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	[illegible]	-	-	-
IHPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	[illegible]	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kuantan Singingi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB (Lebih Salur)	Kurang Salur	Penyaluran s.d. DIPA Perubahan ke-2 Tahun 2021 (PMK No. 97/PMK.07/2021)	Per PB 2021 yang belum tersalurkan	PB Tahun 2021 yang belum tersalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Migas	10.277.074.687	2.356.201	9.443.369.117	833.705.570	833.705.570
PBB	12.952.089.847	-	7.815.583.000	5.136.506.847	-
Pertambangan Umum	12.010.021.230		6.956.467.000	5.053.554.230	-
Pertambangan Migas	1.010.068.617		858.716.000	151.352.617	-
PPh	3.185.064.825	71.870.000	761.021.000	2.495.913.825	47.870.000
Pasal 21	1.951.359.590		200.000.000	1.751.359.590	
Pasal 25/29 Orang Pribadi Migas	278.074.351		250.000.000		71.870.000
Pasal 25/29 Badan Migas	94.693.501	-	310.000	93.383.501	
Pasal 26 Dalam Negeri Umum	-	3.500.000	440.000	-	3.500.000
Pasal 26 Dalam Negeri Migas	9.021.122.122		250.778.000	771.344.122	-
Pasal 26 Luar Negeri Umum		35.370.000	10.000.000		35.370.000
Pasal 26 Luar Negeri Migas	316.995.107		9.000.000	307.995.107	
Pasal 4(2) Dalam Negeri Migas	9.000.000	-	9.000.000		9.000.000
Pasal 4(2) Luar Negeri Non Migas	1.000.000	-	440.000	560.000	-
Pasal 4(2) Luar Negeri Pasal Migas		1.000.000	10.000		1.000.000
Pasal 15 Dalam Negeri Umum	3.000.000		1.000.000	2.000.000	
Pasal 15 Dalam Negeri Migas	5.556.243	-	5.000.000	556.243	-
PPN	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-
Cukai	10.522.201.131	1.000.000.000	2.000.000.000	8.522.201.131	1.000.000.000
Migas		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000
Minyak Bumi (15%)		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000
Gas Bumi (15%)		50.000.000	1.000.000		50.000.000
Minyak Bumi (0,5%) Dalam Negeri Umum	-	-	-	-	
Gas Bumi 0,5%		473.000.000	15.000.000	-	473.000.000
Gas Bumi 0,5%		50.000.000	1.000.000	-	50.000.000
Gas Bumi Dalam Negeri Umum				-	-
Pertambangan	10.522.201.131		1.000.000.000	9.522.201.131	-
Perikanan	-				
Migas	343.000.000		12.000.000	331.000.000	
Pertambangan Umum	10.179.201.131	-	1.000.000.000	9.179.201.131	-
Kehutanan	-	-	-	-	
Iuran Tetap	250.000		1.000.000	-	750.000
Setoran Sisa Lebih Penggunaan	11.115.000.000		3.000.000.000	8.000.000.000	-
Reboisasi	10.864.000		10.000.000	864.000	
DR	-	-	-	-	
SDA					
PNBP	10.000.000		10.000.000	-	-
Pertambangan Umum	198.161.990		100.000.000		100.000.000
Jumlah	50.398.915.818	1.871.496.168	28.007.108.591	19.719.950.519	2.120.923.570

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tasikmalaya (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			2.391.374.285	845.567.528	1.545.806.757
PPh					-
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29	-				
PBB	-	-	2.391.374.285	845.567.528	1.545.806.757
Bagi Rata	-	-	-		
Insentif Daerah Migas		-	-	-	-
Insentif Daerah Non Migas			15.756.090	-	15.756.090
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Perhutanan			1.771.029.373	845.567.528	[illegible]
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	529.347.469		529.347.469
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan			520.490		520.490
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	91.724.127		91.724.127
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	13.104.187	-	13.104.187
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya				-	-
CHT					-
SDA		6.235.429	22.517.696		22.517.696
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 15,5%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	22.544.536	-	22.517.696
Landrent	-	-	22.544.536	-	22.517.696
Royalti		-	-	-	-
Panas Bumi				-	-
Iuran Tetap					-
Iuran Produksi	-				
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-		
Kehutanan		6.235.429	-	-	-
DR				-	-
IIUPH					
PSDH	-	6.235.429	-		
Perikanan	-	-	-	-	
Jumlah Total		6.235.429	2.413.918.621	845.567.528	1.568.350.253

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tasikmalaya (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (PMK No. .../PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum Disalurkan	LB TA 2020 yang belum Diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	14.047.538.[illegible]	-	7.220.37[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	1.010.496.025	
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Rata	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	127.3[illegible].540	
Bagian Daerah Perhutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Perkebunan	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]	-	6.594.[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	15.[illegible]	-	367.585
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			
Biaya Pemungutan Panas Bumi	[illegible]		1.905.[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Perhutanan	[illegible]		16.[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
CHT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15%		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]	4.[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%		[illegible]	211.[illegible]		[illegible]
Gas Bumi Otonomi Khusus					
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	256.[illegible]	[illegible]
Landrent		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Royalti	[illegible]	-	34.[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi	[illegible]	-	1.637.[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Tetap	-	-			
Iuran Produksi	[illegible]		2.[illegible]		[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	-				
DR	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Perikanan	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bandung

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi 2019	Realisasi 2019	Kurang/(Lebih) Bayar DBH 2019 (Realisasi 2019 - Alokasi 2019)	Penyesuaian Kurang/(Lebih) Bayar DBH 2019	Kurang/(Lebih) Bayar DBH 2019 (Setelah Penyesuaian)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak			1.438.725.201	719.362.601	719.362.601
PPh	-	-	1.438.725.201	719.362.601	719.362.601
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	1.438.725.201	719.362.601	719.362.601
PPN					
Cukai Hasil					
Cukai Tembakau					
Sumber Daya Alam Migas					
Sumber Daya Alam Pertambangan Umum					
Sumber Daya Alam Kehutanan					
Sumber Daya Alam Perikanan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi					
Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan Panas Bumi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Berjalan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Berjalan Pusat					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Berjalan Daerah Penghasil					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Berjalan Daerah Penghasil Provinsi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Berjalan Daerah Penghasil Kabupaten/Kota					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Berjalan Daerah Lainnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Berjalan Daerah Lainnya Provinsi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Berjalan Daerah Lainnya Kabupaten/Kota					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Pusat					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Penghasil					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Penghasil Provinsi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Penghasil Kabupaten/Kota					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Provinsi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Berjalan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Pusat					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Penghasil					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Penghasil Provinsi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Penghasil Kabupaten/Kota					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Provinsi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Berjalan					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Pusat					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Penghasil					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Penghasil Provinsi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Penghasil Kabupaten/Kota					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Provinsi					
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Hasil Produksi Batubara Iuran Tetap Penerimaan Tahun Lalu Daerah Lainnya Kabupaten/Kota

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tangerang

(dalam rupiah)

URAIAN	LRA (Unaudited)	LO (Unaudited)	Alokasi KB DBH Berdasarkan PMK 226/PMK.07/2021	KB TA 2021 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)
Pajak	142.963.899.760	-	71.747.452.958	71.026.467.953	13.041.431
PBB	119.841.859.026		71.747.452.958	48.094.406.068	-
BPHTB	10.174.040.734		0.849.103.790	3.324.936.944	
PBB P2	13.947.999.000		0.449.894.000	3.498.105.000	
Cukai	1.026.979.297		599.213.000	427.766.297	12.041.431
Retribusi	1.951.939.599		201.969.700	1.749.969.899	
Bagian Daerah Migas	337.957.306	-	168.978.653		1.453.866
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Perkebunan					
Dana Bagi Hasil Kehutanan					
Dana Bagi Hasil Pertambangan	210.599.710	-	0.651.630	208.947.980	
Dana Perimbangan Migas	13.857.148	-	6.137.730	-	593.566
Dana Perimbangan Non Migas		-	-	-	-
Dana Perimbangan Pajak Daerah					
Dana Perimbangan Dana Reboisasi					
Dana Perimbangan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Bukan Lainnya	6.534.747	-	340.330	6.193.417	-
DAU	515.012.237	-	378.718.858	136.293.379	-
DAK	10.730.962.201	13.013.076.000	2.120.626.940	8.610.335.261	2.177.351.019
Hibah		13.013.076.000	11.287.030		1.998.063.030
Hibah Bukan KK		11.776.993.000	177.628.000		1.792.341.730
Hibah KK	-	37.693.000	0.916.850	-	41.104.913
Hibah Bukan Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-	-	-	-
Dana Darurat CNS	-	197.666.176	19.027.750	-	141.613.828
Dana Darurat DAK		12.397.151	914.190		12.571.053
Dana Darurat dalam Bentuk Uang					
Pinjaman	9.210.319.218		32.130.650	9.178.188.568	
Pinjaman	-	-	-		
Pinjaman	0.449.044.219	-	32.130.650	417.913.569	-
Pendapatan Lain	10.710.197.572	-	1.427.074.196	8.582.001.736	1.391.544
Jasa Giro	-	-			-
Jasa Lainnya	2.981.831		0.731.814		1.991.174
Pendapatan Penalti Perpajakan	10.210.150.170		1.426.342.750	8.580.000.000	
Pendapatan	37.857.907	-	0.831.636	14.026.271	
Jasa	-	-	-	-	-
Lainnya					
Hibah	32.331.427		18.000.000	14.331.427	
Pendapatan	55.181.892		0.150.256		10.031.636
Grand Total	35.134.781.965	643.179.265	5.426.226.156	29.851.826.821	6.168.230.0

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bekasi

(dalam rupiah)

Uraian	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 75/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 20.. (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	854,831,209	527,423,600	327,407,609
PPh	-	-	854,831,209	527,423,600	327,407,609
PPh Pasal 21			497,212,113	327,423,600	169,788,513
PPh Pasal 25/29			357,619,096		157,618,796
PBB					
Bea Nota					
Dearah Daerah Biasa	-	-			
Daerah Daerah Non Kilang	-				
Daerah Daerah Penerima Kilang	-				
Daerah Daerah Perbatasan					
Daerah Daerah Perbatasan					
Daerah Daerah Belum Berlaku	-	-			
Daerah Pemerintahan Aceh	-	-			
Daerah Pemerintahan Non Aceh	-				
Daerah Pemerintahan Daerah Biasa					
Daerah Pemerintahan Perbatasan					
Daerah Pemerintahan Perbatasan	-	-			
Daerah Pemerintahan Belum Berlaku	-	-			
PPh					
PBB		3,756,036			
Migas					
Minyak Bumi (%)					
Minyak Bumi (%)	-	-			
Minyak Bumi Dalam Kawasan Khusus	-	-			
Gas Bumi (%)	-	-			
Gas Bumi (0,5%)					
Gas Bumi Dalam Kawasan Khusus					
Minerba					
Landbase		-			
Royalti		-			
Panas Bumi	-				
Iuran Tetap (Land Rent)	-				
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Bagian Daerah Penghasil					
Kehutanan		765,636			
PSDH	-				
DR					
PSDH		2,990,400			
Perikanan					
Grand Total	-	7,512,072	854,831,209	527,423,600	327,407,609

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bekasi

(rupiah)

Uraian	PPh Dipotong Tahun 2021	PPh Dibebaskan Tahun 2021	Penyaluran PPh DBH Desember s.d. Juni (DMP No. 3/PM.7/2021)	Alokasi yang belum disalurkan	Lebih Bayar yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pusat	5.[illegible].360.157	-	33.636.[illegible].247	70.414.247.903	
DBH	77.[illegible].353.303	-	20.497.607.693	26.709.631.253	-
PPh [illegible]	38.[illegible].81.145	-	16.330.646.807	10.726.[illegible].343	
PPh [illegible]	8.[illegible].319.430	-	1.900.376.300	6.[illegible].[illegible].307	
PPh [illegible]	3.[illegible].764.470		913.[illegible].[illegible]	2.[illegible].[illegible].073	-
Reg. Kerja	1.[illegible].[illegible]		231.[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	1.[illegible].[illegible].[illegible]		619.[illegible].[illegible]	7.[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pasal [illegible]	-	-	-		
Bagian Daerah PPh [illegible]	-				
Bagian Daerah Pemotong	-				
Bagian Daerah Bunga Deposito	2.[illegible].[illegible].[illegible]		9.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pasal [illegible]	-				
Biaya Pemungutan Perbankan				-	
Biaya Pemungutan Pemotong				-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Cukai	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
DBH	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Migas		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 15%		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Minyak Bumi Sektor Panas Bumi		-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Gas Bumi Sektor Panas Bumi	-				
Pertambangan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pertambangan Umum				-	
Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Pertambangan Panas Bumi					
Pajak Daerah	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Opsen Pertambangan	-	-	-		
Pajak Rokok	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Kelebihan Pembayaran Pajak	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
DAU		-	-	-	-
DAK	-	-			
Fisik	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Non Fisik	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Grand Total	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lampiran ...

Tabel ...

Satuan: Rupiah

URAIAN DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2020)	Penyesuaian LB TA 2019 PMK No. 71/PMK.07/2021	Total LB TA 2019 (PMK No. 71/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
PPh ...	-	-			
PBB	-	-			
PPh Pasal 21		-	-		
PPh Pasal 25/29 ...		-	-		
CHT		-	-		
Pajak ...			-		
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Pertambangan ...	-	-			
Bagian Daerah Perikanan		-	-		
Bagian Daerah Pajak Penghasilan				-	-
Bagian Pemerintah Migas	-				
Bagian Pemerintah Non Migas	-				
Bagian Pemerintah Pertambangan ...		-	-		
Bagian Pemerintah Perikanan				-	-
Bagian Pemerintah Pajak Penghasilan	-				
DBH	-	-			
SDA		2.774.638	76.896.34-	20.676.558	96.017.905
Migas			76.896.34-	20.676.558	96.017.905
Minyak Bumi ...			76.896.34-	20.676.558	96.017.905
Minyak Bumi ...	-				
Minyak Bumi ...	-				
Gas Bumi ...	-	-			
Gas Bumi ...		-	-		
Gas Bumi ...		-	-		
Pertambangan			-	-	-
Pertambangan			-	-	-
Kehutanan			-	-	-
Perikanan			-	-	-
Pertambangan Panas Bumi	-				
Pajak Penghasilan	-	-			
Pajak ...			-	-	-
Pajak ...			-	-	-
Pertambangan Umum		2.780.638			
Iuran	-				
Iuran Tetap	-				
Royalti		2.780.638			
Pajak ...			-	-	-
Jumlah	-	2.780.638	76.896.34-	20.676.558	96.017.905

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bogor

Satuan rupiah

Jenis DBH	KB Tahun 2020	LB Tahun 2020	Penyaluran KB dan LB Tahun 2021 (PMK No. 95/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	Sisa KB TA 2020 yang akan disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	30.710.200.147	-	2.792.747.201	27.917.452.946	5.000.000
Cukai	30.607.702.501	-	1.891.291.100	28.716.411.401	
PPh Pasal 21	26.497.548.598	-	1.096.136.100	25.401.412.498	
PPh Pasal 25/29	4.636.737.843	-	1.611.611.300	3.025.126.543	-
PBB	10.490.502.732		1.000.732.302	1.911.110.430	3.577.660
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.891.273.008		280.669.102	1.715.270.196	-
Bagian Daerah dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi	10.000.000.000		10.756.800	-	9.217.243
Bagian Daerah dari Iuran Tetap		-	-	-	-
Bagian Daerah dari Iuran Eksploitasi (Royalti)	37.962	-	37.200		36
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara dari Pengusahaan Panas Bumi	-	-			-
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara dari Pengusahaan Panas Bumi					-
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara dari Pengusahaan Pertambangan Minyak	210.353.007		6.691.301	206.934.107	-
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara dari Pengusahaan Pertambangan Minyak	6.972.720	-	5.704.109	-	1.268.611
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara dari Pengusahaan Pertambangan Gas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara dari Pengusahaan Pertambangan Gas Bumi	1.267	-	1.300		347
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara dari Pengusahaan Pertambangan Panas Bumi					-
Bagian Daerah dari Penerimaan Negara dari Pengusahaan Pertambangan Panas Bumi			-	-	
Bagian Pemerintah Daerah dari Penerimaan Negara dari Pengusahaan Pertambangan Panas Bumi	9.997.276	-	2.478.503	8.718.773	
Cukai	849.550.791	-	165.277.401	1.180.313.390	
DBH	10.752.343.057	1.253.070.333	1.190.837.300	8.808.006.289	2.206.551.945
Migas		1.253.070.333	271.047.200		981.982.133
Minyak Bumi 15%		1.177.093.420	177.029.300	-	902.671.725
Minyak Bumi 0,5%		75.976.913	4.316.900	-	71.160.013
Alokasi Bumi Sektor Energi Migas		-	-		
Gas Bumi 30%	-	975.251.736	19.027.700		641.611.636
Gas Bumi 0,5%	-	2.795.178	214.100		17.721.000
Gas Bumi Setelah Pengalokasian	-	-			-
Pertambangan	242.341.078		32.130.800	1.139.650.956	-
Kehutanan			-		-
Iuran IHPH	343.017.048		72.138.582	3.378.098	-
Pasal 31	10.215.293.057	-	1.894.694.786	8.320.598.271	1.291.514
Iuran Provisi	-	-	-		
Dana Reboisasi	299.351		2.137.275		2.091.049
Setoran Bagian Pemerintah	10.215.293.057		1.892.557.511	8.320.598.271	-
Kehutanan	92.518.027		18.049.725	14.179.415	-
DR	-	-	-	-	-
SDA		-			-
Migas	78.468.827		14.039.325	14.179.415	-
Pertambangan	14.049.200		4.010.400	-	57.690.070
Dana Total	41.310.803.102	1.253.070.333	1.469.669.69	29.411.993.815	2.765.127.269

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Cirebon

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar	Lebih Bayar	Realisasi TA 2021 (LRA No. 23/LRA/I/2022)	Penyaluran (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa Realisasi TA 2021 (LRA No. 23/LRA/I/2022)
	[2]	[3]	[4]	[5]	[6=[4]-[5]]
PPh			118.215.151	70.289.760	47.925.391
PBB			118.215.151	47.926.961	70.288.190
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			118.215.151	47.926.961	70.288.190
Cukai					
Bea Meterai					
Denda Administrasi Pajak					
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Daerah					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					
Sanksi Administrasi Pajak					
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Daerah					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					
PNBP					
SDA		2.780.696			
Migas					
Minyak Bumi (PPh Pasal 22 Migas)					
Gas Bumi (PPh Pasal 22 Migas)					
Minyak Bumi					
Gas Bumi					
Pertambangan Panas Bumi					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Pertambangan Mineral dan Batubara					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Kehutanan		2.780.696			
PSDH					
DR					
Perikanan		2.780.696			
Jumlah Total		2.780.696	118.215.151	47.926.961	70.288.190

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Objek/Uraian

(dalam rupiah)

Kode Objek/Uraian	Kurang Bayar DBH Tahun 2020	Lebih Bayar DBH Tahun 2020	Penyaluran 20% Tahap I Tahun 2021 (PMK 17/PMK.07/2021)	Kurang Bayar DBH Tahun 2020 yang Telah Disalurkan pada Tahap I Tahun 2021	Lebih Bayar DBH Tahun 2020 yang Telah Disalurkan pada Tahap I Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	6.854.300.2[illegible]		[illegible]	[illegible]	172.812.345
PPh	6.251.675.066		1.562.[illegible].103	1.562.918.766	
PPh Pasal 21	1.322.963.970	-	330.740.992	330.740.992	
PPh Pasal 25/29	1.971.326.[illegible]6	-	492.[illegible]4.014	492.831.504	
PBB	2.956.[illegible]4.026	-	739.[illegible]3.501	739.228.749	172.812.345
Pajak Lain	1.091.959.026		272.989.757	272.989.757	-
Bagian Pemerintah Pusat dari Migas	22.[illegible]4.771		5.[illegible]3.693		1.660.345.179
Bagian Pemerintah Pusat dari Non Migas	-		-		
Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-		
Bagian Daerah dari Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Cukai Hasil Tembakau	21.[illegible]6.207		5.[illegible]8.052	302.[illegible].307	-
Bagian Pemerintah Pusat dari Migas	[illegible]6.752		[illegible]4.038		6.[illegible]4.[illegible]
Bagian Pemerintah Pusat dari Non Migas	-		-		
Bagian Pemerintah Pusat dari Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-		
Bagian Pemerintah Pemerintah Perkebunan			-	-	-
Bagian Pemerintah Pemerintah Pertambangan					-
Bagian Pemerintah Pusat dari Sektor Kehutanan	6.457.[illegible]3		387.[illegible]20	3.[illegible]2.[illegible]1	
CHT	603.[illegible]6.948	-	362.[illegible]3.961	[illegible].[illegible].[illegible]2o	
DBH	10.770.[illegible].209	3.[illegible].[illegible].365	2.[illegible].[illegible].930	6.[illegible].[illegible].089	2.[illegible].[illegible].9[illegible]
Migas		[illegible].[illegible].361	14.[illegible].[illegible]2o	-	[illegible].[illegible].365
Minyak Bumi (PPh 22)		[illegible].[illegible].[illegible]2	137.[illegible].[illegible]7	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi (PPh 26)		[illegible].[illegible].[illegible]	4.[illegible].[illegible]		4.[illegible].[illegible]
Minyak Bumi (Selain dari Penjualan Bagian Pemerintah)					
Gas Alam (PPh 22)	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Gas Alam (PPh 26)	-	[illegible].[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Alam (Selain dari Bagian Pemerintah)	-	-	-	-	
Panas Bumi	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Perikanan			-		-
Pertambangan Umum	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Pertambangan Batubara	10.[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Pertambangan Minyak	-		-		
Pertambangan Panas Bumi	[illegible].[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Kehutanan	19.[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Pertambangan Umum	[illegible].[illegible]		[illegible]		
PPh			-		
PPh Pasal 21	[illegible].[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
PPh Pasal 25/29	[illegible].[illegible]		[illegible]		
PBB	[illegible].[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Lainnya	[illegible].[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	2[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 202[illegible]

[illegible]

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(5)
[illegible]					
PPh:					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
[illegible]					
Dapil Papua					
Bagian Daerah Minyak					
Bagian Daerah Non Minyak					
Bagian Daerah Pajak Rokok					
Jumlah Daerah Penghasil					
Jumlah Daerah Penerimaan					
Bagian Provinsi Sebesar Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat Minyak					
Bagian Pemerintah Pusat Minyak					
Bagian Pemerintah Pusat Minyak					
Bagian Pemerintah Pusat Non Minyak					
Bagian Pemerintah Pusat Non Minyak					
[illegible]					
Jumlah		2.196.796	1.000.000.000	17.000.000	17.002.196.796
Minyak			1.000.000.000	17.000.000	17.002.196.796
Minyak Bumi (PPh 22)			1.000.000.000	17.000.000	17.002.196.796
Minyak Bumi (PPh 22)					
Minyak Bumi (Selain dari Bagian Pemerintah)					
Gas Bumi (PPh 22)					
Gas Bumi (PPh 22)					
Gas Bumi dari Bagian Pemerintah Pusat					
Pertambangan					
Pertambangan Umum					
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran tetap					
Penerimaan Dalam Pertambangan					
Kehutanan		2.196.796			
PSDH					
DR					
Perikanan					
Pertambangan					
Grand Total		2.196.796	15.244.5[illegible]	17.000.000	17.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Depok

(dalam rupiah)

Jenis DBH	(2) Tahun ke (2020)	(3) Tahun ke (2020)	Penyaluran DBH Tahun ke (2020) sesuai PMK No. [illegible]	PMK 2020 yang [illegible] disesuaikan	PMK 2020 yang [illegible] disesuaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3)	(12)
Pajak	313.311.211.362		[illegible]	270.053.032.197	8.[illegible]
CHT	3.481.165.740		[illegible]	[illegible]	-
PBB Pasal 21	2.196.35[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB Pasal 25/29	4.380.395.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bea Meterai	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Denda Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	
Dana Reboisasi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Hasil Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Pemerintah Dari Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Dari Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri					
Bagian Pemerintah Dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Badan					
Bagian Pemerintah Dari Pajak Penghasilan Pasal 26	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas Bumi Dalam Wilayah Kerja Bersama					
Gas Bumi 30%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi dari Wilayah Kerja Bersama	-	-	-	-	-
Pertambangan Umum	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Landrent					
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pertambangan Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dana Produksi	-	-	-	-	-
Dana Hasil	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Sumber Daya Alam Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh					
Pasal 21	-	-	-	-	-
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah DBH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Sukoharjo (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 20..	LB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 29/PMK.07/2014)	Penyaluran LB s.d. TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2020)	Kek. LB s.d. TA 2021 (PMK No. 39/PMK.07/2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PPh	-	-	-		
PPN	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21			-	-	-
PPh Pasal 25/29			-	-	-
PBB					-
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		-
Dikelola Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Dikelola Daerah Lainnya			-	-	-
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Seluruhnya					
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Kepala Daerah				-	-
Biaya Pemungutan Lainnya					
Biaya Pemungutan Pihak Ketiga	-				
Biaya Pemungutan Pihak Lainnya	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
PPh		9.719.036	89.078.303	59.013.060	30.065.243
Migas			89.078.303	59.013.060	30.065.243
Minyak Bumi (MB)			89.078.303	59.013.060	30.065.243
Minyak Bumi (MB)	-	-	-		
Natural Gas Bagian Negara (NGBN)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (GB)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (GB)				-	-
Gas Bumi Bagian Negara (GBN)					-
Non Migas					
Panas Bumi					
Royalti	-				
Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Pajak Reklame	-	-	-	-	-
Pajak Rokok				-	-
Pajak Penerangan Jalan					
Sumber Daya Alam	-	2.760.868			
PBB	-	-	-	-	-
PDRD		2.760.868			-
Cukai Hasil Tembakau					
Pajak Rokok	-	6.958.168	89.078.303	59.013.060	30.065.243

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi	3.079.847.578		6.643.302.870	9.319.833.450	2.256.679
Kab.	1.170.159.271		1.772.003.739	3.242.311.014	
Kab. Jombang	1.091.134.978		1.617.080.729	3.161.229.830	
Kab. Nganjuk	1.021.131.201		1.617.221.120	3.161.127.893	
Kab. Madiun	2.537.875.999	-	349.703.803	1.341.450.446	2.987.646
Kab. Ngawi	1.000.650.444	-	265.679.720	765.270.936	-
Kab. Bojonegoro	99.982.777	-	71.050.452	-	2.109.026
Kab. Tuban					
Kab. Lamongan					
Kab. Gresik		-	-	-	-
Kab. Bangkalan		-			
Kab. Sampang	775.901.777	-	3.404.700	207.934.737	-
Kab. Pamekasan	1.745.437		2.893.787	-	118.026
Kab. Sumenep					
Kota Surabaya					
Kota Mojokerto		-	-	-	-
Kota Madiun		-	-	-	
Kota Surabaya	5.354.913		3.450.-	8.183.713	
Kota Batu	102.006.711		302.102.064	113.227.036	
Total	10.103.592.972	1.991.778.010	2.18.300.300	5.801.894.290	5.107.051.-
Provinsi	-	691.299.864	154.997.500	-	300.084.028
Kab. Pacitan	-	174.969.438	134.026.701	-	300.417.729
Kab. Ponorogo	-	89.909.053	170.960.-	-	411.700.-
Kab. Trenggalek					
Kab. Tulungagung		168.106.124	124.27.-		111.-
Kab. Blitar		17.-	2.1.100		1.071.-
Kab. Kediri					
Kab. Malang	347.34-.-	-	32.-.-	7.-.-	-
Kab. Lumajang	-	-	-	-	-
Kab. Jember	347.34-.-	-	32.-.-	7.-.-	-
Kab. Banyuwangi	10.2-.-.-		1.137.-.-	5.3-.-.-	1.-.-
Kab. Bondowoso					
Kab. Situbondo	2.-.-		2.-.-		1.-.-
Kab. Probolinggo	1.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Pasuruan	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Sidoarjo	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Mojokerto					
Kab. Jombang	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Nganjuk	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Madiun					
Kab. Ngawi	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Bojonegoro	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Tuban	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Lamongan	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Gresik	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Bangkalan	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Sampang	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Pamekasan	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kab. Sumenep	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kota Kediri	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kota Blitar	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kota Malang	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kota Probolinggo	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kota Pasuruan	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kota Mojokerto	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kota Madiun	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kota Surabaya	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Kota Batu	5.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-
Total	10.-.-.-	-	1.-.-.-	1.-.-.-	-

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tasikmalaya

Satuan : rupiah

URAIAN	Tahun 2019		Tahun 2020		Penyesuaian (PMK No. 226/PMK.07/2020)		Jumlah Tahun 2021 (PMK No. 226/PMK.07/2020)
	%						
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)=(3)+(4)
Pajak		-		-	30.646.866	1.290.070	31.936.936
PBB		-		-	-		-
PPh Pasal 21							
PPh Pasal 25/29							
BPHTB					30.646.866	1.290.070	31.936.936
Cukai							-
Bagian Daerah Migas				-			-
Bagian Daerah Hasil Migas		-		-			-
Bagian Daerah Bukan Migas		-		-			-
Selisih Dasar Perhitungan				-	13.711.870		13.711.870
Alokasi Daerah Penerimaan				-	16.934.996	1.290.070	18.225.066
Kurang/ Lebih Salur Sebelumnya							-
Bagian Pertambangan Migas		-		-			-
Bagian Pertambangan Non Migas		-		-			-
Bagian Pertambangan Panas Bumi							
Dasar Perhitungan Penerimaan					501.870		501.870
Bagian Pertambangan Kehutanan				-	1.157.158		1.157.158
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya		-		-			-
CHT		-		-			-
DAK			5.629.861				
Migas							
Minyak Bumi 15%							-
Minyak Bumi 0,5%		-		-			-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus		-		-			-
Gas Bumi 30%		-		-			
Gas Bumi 0,5%							
Per Bumi dalam Rangka Otsus							
Minerba							
Dasarnya				-			-
Royalti				-			-
Panas Bumi		-		-			-
Dasar Perhitungan		-		-			
Bagian Daerah							
Kehutanan Dalam Rangka Otsus							
Kehutanan			5.629.861				-
PSDH		-		-			-
IHPH							
Provisi			5.629.861				
Perikanan							-
Jumlah Total		-	5.629.861		30.646.866	1.290.070	31.936.936

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tasikmalaya

(dalam rupiah)

Uraian DBH	Kurang Salur TA 2020	Lebih Salur TA 2020	Penyaluran DBH Semester I TA 2021 (sebelum PMK 17/2021)	PMK 17/2021 yang telah disesuaikan	PMK 17/2021 yang belum disesuaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)
Pajak	16.101.281.770		7.076.542.443	8.138.421.213	1.065.878
PPh	15.605.279.429	-	6.721.135.201	7.017.535.209	-
PPh Pasal 21	1.355.368.670	-	4.658.791.401	5.107.535.250	
PPh Pasal 23/26	2.137.907.519	-	368.297.800	1.890.738.982	
PPh	2.387.121.241	-	420.201.900	1.070.208.007	1.065.878
Hotel Kota	1.791.020.098		220.845.100	1.132.272.856	
Jasa Konstruksi Kegiatan	128.210.021		102.206.700		3.845.049
Jasa Konstruksi Pembangunan	24.013.021			113.113.021	-
Jasa Konstruksi Pengadaan Barang	-	-	-	-	-
Jasa Konstruksi Pengadaan Tanah	1.761.805	-	7.332.500	15.269.104	
Jasa Konstruksi Pengadaan Lainnya					
Jasa Konstruksi Sektor Lainnya	211.170.027		5.107.150	286.300.727	
Jasa Konsultansi Kegiatan	2.027.312		5.211.150		515.258
Jasa Konsultansi Pengadaan Barang	61.500.470	-	-	855.870	-
Jasa Konsultansi Pengadaan Tanah	-	-	-	-	
Jasa Konsultansi Pengadaan Perencana	1.072.970		272.650	642.210	
Jasa Konsultansi Pengadaan Pengawas					
Jasa Konsultansi Sektor Lainnya	6.021.125		211.500	9.191.710	-
PPN	85.287.151	-	248.264.589	20.695.208	-
PPnBM	2.930.124.737	1.858.221.135	1.150.347.275	2.014.349.070	2.155.037.179
Migas		1.858.221.135	12.147.060		1.096.036.854
Minyak Bumi 15%		1.774.000.000	10.128.030		1.082.621.023
Minyak Bumi 0,5%		84.221.135	1.219.030		13.415.831
Minyak Bumi dalam Rangka Gross			-	-	-
Gas Bumi 30%		618.696.179	17.337.750	-	941.615.335
Gas Bumi 0,5%	-	19.507.151	2.431	-	19.727.331
Gas Bumi dalam Rangka Gross	-	-	-	-	-
Minerba	318.074.591		92.163.951	110.578.058	
Kehutanan					
Panas Bumi	2.611.049.146		32.102.350	110.878.368	
Pajak Daerah	10.219.059.745		1.037.591.126	8.020.003.759	1.891.54
Pajak Provinsi	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	539.231	-	131.371	-	1.811.34
Pajak Kabupaten/Kota	9.615.633.514		1.035.918.755	8.189.300.759	
Kehutanan	603.426.231		19.826.402	30.703.000	
DR	-		-	-	-
PHPB	-	-	-	-	-
PBHP	97.796.705		19.327.806	84.170.109	
Perikanan	90.190.780		316.861.050		10.061.027
Jumlah Total	27.191.130.721	1.858.221.135	3.007.277.324	28.192.774.282	2.161.714.943

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Cimahi

(dalam rupiah)

Uraian DBH	KB TA 2019	KB TA 2019	DBH TA 2021 (PMK No. 226/PMK.07/2020)	Penyaluran DBH TA 2021 (PMK No. 1/PMK.07/2021)	Sisa DBH TA 2021 (PMK No. 226/PMK.07/2020 - PMK No. 1/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	58.495.960	33.837.160	24.657.800
PPh	-	-	58.495.960	33.837.160	24.657.800
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 23/26	-	-	58.495.960	33.837.160	24.657.800
PPN	-	-			
Cukai Hasil Tembakau					
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Hasil Migas				-	-
Bagian Daerah Hasil Pertama Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Kedua Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Minyak Bumi					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi dari Wilayah Kerja					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Terminal Penerimaan					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi dari Terminal Penerimaan					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Lokasi Lainnya					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi dari Lokasi Lainnya					
PPh	-	-	-	-	-
PBB	-	3.786.897	52.707.063	-	56.493.960
BPHTB			52.707.063		56.493.960
Kekurangan DBH			52.707.063		56.493.960
Kelebihan DBH					
Minerba					
Kekurangan					
Kelebihan					
Panas Bumi					
Kekurangan					
Kelebihan					
Kekurangan					
Kelebihan					
Kekurangan		2.786.897			
DR			-	-	-
PBPH			-	-	-
PKTB		2.786.897			
Kehutanan					
Jumlah Total		2.786.897	111.203.023	33.837.160	77.365.760

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

[illegible] (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH s.d. TA 2020	LB DBH s.d. TA 2020	Penyesuaian KB DBH Realisasi TA 2020 (PMK [illegible])	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dikompensasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	15.[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Rata	1.[illegible]	-	[illegible]	1.[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah [illegible]					
Bagian Daerah [illegible]					-
Bagian Daerah [illegible]	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan [illegible]				-	-
Biaya Pemungutan [illegible]	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan [illegible]	-	-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
DR					
IIUPH					
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Banjar

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PBH TA 2018	PBH TA 2019	PBH TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian PBH TA 2020 (KMK No. 63/KM.7/2021)	Total PBH TA 2020 (KMK No. 63/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
DBH			3,136,445,234	622,608,805	3,668,734,436
Pajak Rokok					
Dibagi Daerah Induk					
Dibagi Daerah Non Migas			2,197,206,401	436,626,676	1,451,178,932
Dibagi Secara Merata Antar Daerah					
Dibagi Berdasarkan Faktor Pemerataan			939,239,087		939,239,087
Dibagi Berdasarkan Faktor Kewilayahan			142,347,249		678,316,245
Dibagi Berdasarkan Realisasi Penerimaan					
Dibagi Berdasarkan Migas					
Dibagi Berdasarkan Non Migas			120,019,044		324,019,044
Dibagi Berdasarkan Faktor Pemerataan					
Dibagi Berdasarkan Perbandingan			7,248,253		18,248,253
Dibagi Berdasarkan Kebijakan			7,102,621		8,402,301
Dibagi Berdasarkan Sektor Lainnya					
CHT					
DBH		1,057,641			
Migas					
PPh Pasal 25/29 WPOPDN					
Pemotongan atau PPh Pasal 21					
Pemotongan atau PPh Pasal 26					
Pemotongan atau PPh Pasal 4 ayat (2)					
PPh Pasal 15					
Pemotongan atau PPh Pasal 22 Impor					
Minerba					
Iuran Tetap					
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi					
Kehutanan					
Provisi Sumber Daya Hutan		17,057,641			
DAU					
PBB P3					
PBB-P2		1,057,641			
Pajak Lainnya					
Jumlah Total		17,057,641	3,136,445,234	622,608,805	3,668,734,436

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Banjar (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH s.d. TA 2019	LB DBH s.d. TA 2019	Penyaluran KB/LB Berdasarkan TA 2020 (PMK 2.../PMK.07/2020)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		1.891.[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	1.[illegible]		[illegible]	930.[illegible]	-
PBB	2.[illegible]	[illegible]	45[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Rata	1.931.[illegible]	-	265.[illegible]	1.726.[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]		[illegible]		27.[illegible]
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perkebunan	263.[illegible]		61.[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	[illegible]	[illegible]	-	74.[illegible]
Bagian Daerah Sektor Lainnya	317.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		2.[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Panas Bumi				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	15.534.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Perhutanan		2.[illegible]	[illegible]		4.[illegible]
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	5.[illegible]	
CHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	[illegible]	144.[illegible]	-	1.0[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]	-	1.[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Land Rent	-	-	-	-	
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	10.[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah	10.[illegible]	-	636.[illegible]	8.[illegible]	-
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DR					
IIUPH			-	-	-
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bandung Barat

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
[illegible]			1,791,768,576	913,307,430	878,461,146
PPh			453,847,011		453,847,011
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25 dan 29			181,921,021		181,921,021
PPN			1,156,000,544	522,077,430	633,923,114
Pajak Rokok					
Pajak Bumi dan Bangunan					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Pajak Penghasilan Pasal 21					
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26			916,921,719	522,077,430	394,844,289
Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29					
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)					
Pajak Penghasilan Pasal 15					
Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor					
Pajak Penghasilan Pasal 22 Migas					
Pajak Penghasilan Pasal 22 Selain Impor dan Migas			239,231,549		239,231,549
Pajak Penghasilan Pasal 26					
Cukai					
PDRI		1,096,132			
Migas					
Minyak Bumi (PPh)					
Minyak Bumi (PBB)					
Minyak Bumi dan Hasil Pengolahan Migas					
Gas Bumi (PPh)					
Gas Bumi (PBB)					
Gas Bumi dan Hasil Pengolahan Migas					
Minerba					
Royalti					
Iuran Tetap					
Pajak Air Permukaan					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi					
Pajak Penerangan Jalan					
PBB Perkebunan		4,096,147			
PBB					
PDRD					
PBHTB		1,096,132			
Penerangan					
[illegible]		4,096,147	1,885,767,576	913,307,430	972,460,146

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kabupaten/Kota/Provinsi

(satuan rupiah)

[illegible] DBH	[illegible] DBH Tahun 2021	[illegible] DBH TA 2022	Perubahan [illegible] Bulan [illegible] Tahun 2021 [illegible] No. [illegible]	[illegible] Penyaluran [illegible]	[illegible] TA 2022 yang [illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
[illegible]	24.202.283.074		3.675.439.332	20.526.843.742	7.972.879
PPh	12.760.783.087		3.239.145.308	9.521.637.779	
PPh Pasal 21	12.760.783.087		3.239.145.308	9.521.637.779	
PPh Pasal 25/29	1.912.393.069		67.394.103	1.844.998.966	
PPN	5.322.451.450	-	1.192.222.903	4.130.228.547	2.575.115
Pajak Rokok	201.960.936	-	96.583.760	105.377.176	-
Bagian Pemerintah Negara	267.489.554	-	133.231.060	-	5.497.882
Bagian Daerah Penghasil	535.052.596		91.277.109	181.104.223	
Bagian Daerah Bukan Penghasil	1.337.136		1.668.250		9.196
Alokasi Daerah Penghasil	926.127.720		159.618.280	325.078.109	
Bagian Pemerintah Pusat	1.391.312.2[illegible]		636.405.760	1.370.894.240	-
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil	2.556.519.617		8.604.364	834.364.707	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	1.274.797		16.736.229		10.275
Jasa Pemanfaatan Air Tanah	8.414.645		1.242.350	7.570.015	
Sewa Penggunaan Tanah Negara	29.175		161.650	1.475	
Bagian Pemerintah Pusat Migas	62.244.511	-	5.187.950	124.287.371	-
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	1.648.649	-	17.232.520	48.736.143	-
Jasa Pemanfaatan Barang Milik Negara	4.734.478		24.[illegible]	6.[illegible]	
Lain	3[illegible]		12.[illegible]	3.[illegible]	
[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	2.[illegible]	5.[illegible]	2.[illegible]
Migas		1.[illegible]	-4.[illegible]	-	1.[illegible]
Minyak Bumi (PSC)	-	1.[illegible]	97.[illegible]	-	13.[illegible]
Minyak Bumi (Non PSC)		[illegible]	17.[illegible]		13.[illegible]
Alokasi Dana dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi (PSC)		62[illegible]	12.[illegible]		6.[illegible]
Gas Bumi (Non PSC)		10.[illegible]	2.[illegible]		10.[illegible]
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau					
Minerba	56[illegible]	-	37.[illegible]	370.[illegible]	-
Batubara	-	-	-	-	-
Panas Bumi	363.[illegible]	-	37.[illegible]	370.[illegible]	-
Pendapatan Hibah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Dana Reboisasi	21.[illegible]		15.[illegible]	6.[illegible]	
Kekurangan Pembayaran	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Kelebihan	85.[illegible]	-	27.[illegible]	96.[illegible]	-
DR					
DBH					
DBHT	57.[illegible]	-	2.[illegible]	196.[illegible]	-
Tambahan	150.[illegible]	-	516.[illegible]	-	167.[illegible]
[illegible]	75.[illegible]	1.[illegible]	12.[illegible]	63.[illegible]	2.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pangandaran

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar DBH Tahun 2020	Kurang Bayar DBH Tahun 2019	Lebih Bayar DBH Tahun 2019 (PMK No. 203/PMK.07/2020)	Lebih Bayar DBH Tahun 2020 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Kurang Bayar DBH Tahun 2019 (PMK No. 17/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total			2.182.994.210	551.403.740	1.828.553.497
PPh			108.585.438	-	91.585.438
PPh Pasal 21			-	-	-
PPh Pasal 25/29			108.585.438	-	91.585.438
PBB			2.074.408.772	551.403.740	1.737.968.059
Kota Jakarta					
Kabupaten Kepulauan Seribu					
Kabupaten Bantul/Kota Yogyakarta			-	-	-
Kabupaten Gunung Kidul/Kabupaten Sleman			1.369.439.839	551.403.740	797.965.099
Kabupaten Kulon Progo/Kabupaten Bantul			704.969.933		704.969.933
Kabupaten Sleman/Kota Yogyakarta					
Kabupaten Purwakarta/Kabupaten Subang			-	-	-
Kabupaten Karawang/Kabupaten Bekasi			-	-	-
Kabupaten Purwakarta/Kabupaten Karawang			89.877.312		89.877.312
Kabupaten Purwakarta/Kabupaten Bekasi			111.111.792		111.111.792
Kabupaten Purwakarta/Kabupaten Subang					
CHT			-	-	-
SDA		11.503.077	2.702.262		417.271.521
Migas			946.895.677		946.279.611
Minyak Bumi (PPh)			1.242.616.736		2.428.442.236
Minyak Bumi (PBH)			4.192.779		9.772.779
Minyak Bumi Sektor Lainnya/Migas Gunung					-
Gas Bumi (PPh)			76.313.656		91.157.365
Gas Bumi (PBH)			1.380.730		1.201.730
Gas Bumi Sektor Lainnya/Migas Gunung			-	-	-
Panas Bumi			78.118.890		76.118.890
Kehutanan			78.118.890		76.118.890
Kopi/Ji					
Pertambangan					
Iuran Tetap (Pasal 31)			-	-	-
Iuran Eksploitasi			-	-	-
Sektor Lainnya Pertambangan					
Kehutanan		11.503.077			
PPh					
PPh 21		-	-	-	-
PBH		11.503.077	-		
Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau		11.503.077	2.182.994.210	551.403.740	2.245.824.997

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pangandaran

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran s.d. 2021 (PMK No. 226/PMK.07/2020)	Alokasi yang belum disalurkan	Alokasi yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
PPh	10.000.000.000	-	3.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000
PBB	1.000.000.000		4.000.000.000	4.000.000.000	-
CHT Pasal 2	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	-
CHT Pasal 29/77	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
PPN	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
BPHTB	2.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
PBB P2	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Cukai Hasil Tembakau	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Pajak Rokok	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Dana Reboisasi	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Pajak Air Permukaan	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Pajak Pengambilan Panas Bumi	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Pajak Penerangan Jalan	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Pajak Pengambilan Air Permukaan	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Pajak Pengambilan Mineral Lainnya	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
DBH	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
SDA	10.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000
Migas	-	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000
Minerba Pusat 15%	-	441.000.000	1.000.000.000		441.000.000
Minerba Pusat 8,5%	-	340.000	1.000.000	-	340.000
Minerba Pusat dengan Kontrak Karya					
Gas Bumi 70%		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Gas Bumi 6,5%		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000
Gas Bumi dari Pengelola Blok					
Minerba	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Landrent	-	-	-		
Jaminan	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	
Kayu Bulat	10.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000
Panas Bumi				-	
Provisi	1.000.000		1.000.000		1.000.000
Iuran Eksploitasi	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
Kehutanan	10.000.000	-	1.000.000	1.000.000	
PNBP				-	
Pajak					
PNBP	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
Perikanan	1.000.000.000	-	1.000.000.000		1.000.000.000
Grand Total	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Jawa Tengah

(Dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2018	Kurang Bayar TA 2019	Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 21/PMK.07/2021)	Lebih Bayar TA 2020 (PMK No. 21/PMK.07/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 21/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pasal 25	-	-	-	-	-
Pasal 25/29	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BPHTB	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Reg. Lain					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Pusat dari Migas				-	-
Bagian Pemerintah Pusat dari Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Dalam Negeri					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan dari Pemerintah			-	-	-
Biaya Pemungutan dari Daerah Lain	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan dari Pertambangan	-	-	-		
Biaya Pemungutan dari Perikanan			[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
PNBP	-	-	-	-	-
SDA	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi			[illegible]		[illegible]
Gas Bumi			[illegible]		[illegible]
Pertambangan					
Kehutanan	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Perikanan					
Pungutan Perikanan	-	-	-	-	-
Pungutan Hasil Perikanan	-	-	-	-	-
Pungutan Perikanan Asing	-	-	-	-	-
Pertambangan Panas Bumi		[illegible]			
PPh					
Pasal 21	-	-	-	-	-
Pasal 26	-	[illegible]	-	-	-
Perikanan					
Jumlah		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Jawa Tengah | (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Omnibus TA 2020	LB Omnibus TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester II TA 2020 (PMK No. [illegible])	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=(2)-(4))	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible].341.446.471	-
PPh	[illegible]	-	[illegible]	[illegible].959.[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	37.782.910.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Non Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Perhutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Perhutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
CHT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi 30%		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Landrent	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Royalti		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Iuran Tetap	-	-	-		-
Iuran Produksi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Setoran Bagian Pemerintah	[illegible]			[illegible]	
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
IIUPH	[illegible]		-	[illegible]	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Perikanan					
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Keb. Banjarnegara

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Kurang Bayar	Lebih Bayar	Realisasi Tahun 2019 (UMA No. 20/UMA.07/2021)	Realisasi Tahun 2020 (UMA No. 8/UMA.07/2021)	Selisih Realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2020 (UMA No. 8/UMA.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			1.265.482.543	640.116.816	625.365.727
PPh			456.215.574	97.870.577	358.344.997
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			97.815.574	97.870.577	(55.003)
PPh 4			358.399.999	358.399.999	
Pajak Bumi					
Dikelola Daerah Kabupaten					
Dikelola Daerah Kota Kabupaten					
Dikelola Daerah Provinsi					
Dikelola Daerah Provinsi Kabupaten			215.231.031	215.231.031	
Dikelola Daerah Kota Kabupaten					
Dikelola Daerah Provinsi Kabupaten					
Dikelola Daerah Kabupaten Kabupaten					
Dikelola Daerah Kota Kabupaten					
Dikelola Daerah Provinsi Kabupaten					
Dikelola Daerah Kabupaten Kabupaten			14.210.026	14.210.026	
Dikelola Daerah Kota Kabupaten					
Dikelola Daerah Provinsi Kabupaten					
PPh					
BPHTB		1.088.815	348.850.799		352.488.720
Migas			351.913.177		351.913.177
Dikelola Daerah Kabupaten			129.021.079		129.021.079
Dikelola Daerah Kota			4.024.076		4.024.076
Dikelola Daerah Provinsi Kabupaten					
Dikelola Daerah Kabupaten			564.105.785		564.105.785
Dikelola Daerah Kota			4.750.724		4.750.724
Dikelola Daerah Provinsi Kabupaten					
Dikelola Daerah Kabupaten			1.000.000		1.000.000
Dikelola Daerah Kota			1.000.000		1.000.000
Dikelola Daerah Provinsi					
Dikelola Daerah Kabupaten					
Dikelola Daerah Kota					
Dikelola Daerah Provinsi					
Kehutanan		1.088.815			
PHT					
PSDH		1.088.815			
Perikanan					
Grand Total		1.088.815	1.614.332.342	640.116.816	974.215.526

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Banjarnegara

(satuan rupiah)

Uraian	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(2)	(6)
Pajak	(1.106.901.253)	-	-	2.384.419.133	3.480.421.551	6.078.201
PPh	4.787.560.447	-	-	2.466.007.200	2.067.719.247	
PPh Pasal 21	3.142.209.454	-	-	2.470.729.200	1.428.340.996	
PPh Pasal 25/29	777.441.047	-	-	192.277.800	579.213.241	
PBB	5.261.470.220			1.081.360.100	4.180.110.121	5.161.261
Dari Kas	1.894.020.096			210.669.100	1.726.277.296	
Dana Alokasi Khusus	241.5.5.156			237.305.000	-	3.736.504
Bagian Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
Bagian Dana Bagi Hasil Pajak	395.215.01	-	-	290.711.460	1.067.924.491	
Bagian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	71.020.070	-	-	70.286.700	414.6.5.470	
Dana Alokasi Umum	1.5.2.0.0			1.243.000	12.127.000	
Dana Alokasi Khusus Fisik	2.1.0.0.0			5.000.000	926.895.007	-
Bagian Dana Otonomi Khusus	5.0.9.610	-		6.536.500	-	70.792
Bagian Dana Keistimewaan	-	-		-	-	
Dana Perimbangan Pemerintah Pusat	64.787.511			9.833.800	30.921.711	
Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi	27.080.775			10.109.100	17.1.1.222	
Bagian Pemerintah Desa	757.5.7			190.200	561.397	-
Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota	1.1.26.0.1	-		385.800	1.101.947	-
DAK	742.835.63	-		534.102.918	1.1.1.7.9.3	
SILPA	702.494.1.5		111.1.3.5.2	202.447.771	471.108.1.1	270.7.1.1.1.1
Hibah			110.7.1.2.6	1.1.1.7.0		112.571.953
Jaminan Hasil BUMN			20.516.0.1	515.200		1.1.1.3.9.1
Pinjaman Dana Darurat			7.0.0.1.7	1.1.1.1.0	-	824.249
Pinjaman Dana Darurat Sesuai Ketentuan	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	11.676.151	707.500	-	5.1.1.1.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak			1.414.7.7	1.1.1.1.1		1.1.1.1.1
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau						
Kurang Bayar			2.1.1.1.1	202.7.0		161.1.1
Lainnya			1.1.1.1.1	1.1.1.7.5		1.1.1.1.5
Dividen			1.1.1.1.7	1.1.1.1.5	-	1.1.1.1.5
Pajak Rokok	1.1.1.1.1.1	-		1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-		-		
Cukai Hasil Tembakau				1.1.1.1.1		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan						
Pajak Rokok	1.1.1.1.1.1			1.1.1.1.1		
Kelebihan	1.1.1.1.1.1			1.1.1.1.1		-
DP	-	-		-	-	-
PHPB	-	-		-		
PBHB	1.1.1.1.1.1			1.1.1.1.1		
Pengurangan	1.1.1.1.1.1			1.1.1.1.1		1.1.1.1.1
Jumlah Total	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1		1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. [illegible] (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. [illegible]/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			[illegible]	1.331.705.015	[illegible]
PPh			[illegible]	1.331.705.015	[illegible]
PPh Pasal 21			[illegible]	411.390.971	-
PPh Pasal 25/29		-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagi Rata	-	-	-	-	
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi					-
Bagian Daerah Perkebunan			[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	201.406.437	-	[illegible]
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-		
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Panas Bumi			-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	13.866.000	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Perhutanan	-		[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT				-	-
SDA		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-		[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Royalti	-				
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	[illegible]			
DR					
IIUPH			-	-	-
PSDH	-	[illegible]	-	-	-
Perikanan	-	-	-		
Grand Total		[illegible]	[illegible]	1.331.705.015	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Contoh Penyajian

(dalam rupiah)

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PKP	5.891.572.196		7.307.069.705	8.527.202.891	
PBB	9.910.515.405	-	5.404.630.203	4.495.756.203	-
PBB Pasal 2	3.030.545.104	-	5.271.050.000	5.520.300.894	
PBB Pasal 2 (2)	1.130.144.301	-	353.065.705	502.380.515	-
PDB	5.030.545.041	-	1.111.581.502	5.936.164.514	-
DBH Pajak	1.941.322.008		207.070.705	1.770.970.705	-
Bagian Daerah Migas	101.303.311		63.175.000	40.128.097	
Bagian Daerah Non Migas	416.341.750		117.201.100	298.087.005	
Bagian Daerah Penerimaan Pusat	63.750	-	35.705	35.750	
Bagian Daerah Perikanan	1.012.553.020	-	474.417.301	537.445.726	-
Bagian Daerah Pertambangan	740.765.017		154.535.300	606.150.757	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	231.693.057		5.004.300	226.074.707	
Biaya Pemungutan Migas	15.313.575		11.740.102	3.573.573	
Biaya Pemungutan Non Migas	21.317.670	-	9.547.903	14.929.527	-
Biaya Pemungutan Pusat	3.333	-	903	533	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	12.790.402		18.447.903	23.043.617	-
Biaya Pemungutan Perikanan	5.317.913		7.117.303	28.082.213	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	7.165.647		295.903	5.869.847	
DAK	7.125.178.441	-	625.561.705	20.959.271	
DAU	341.775.440	1.454.794	435.181.250	101.958.496	299.879.415
Minyak		170.894.230	1.667.496	-	1.257.356
Minyak Pasal 22		23.010.671	916.300	-	1.736.771
Minyak Pasal 25		70.072	32.351	-	424.172
Minyak Bumi Dalam Rangka Gross	-				
Gas Alam PPh	-	6.878.55	109.700		35.087.501
Gas Alam PPh	-	1.414.730	1.900	-	1.176.535
Gas Alam Dalam Rangka Gross	-	-	-	-	-
Mineral	21.050.077	191.040	65.321	1.050.177	197.565
Tambang	21.050.077			21.050.077	-
Royalti		1.267.910	13.021		197.565
Pasal 21	10.710.999	1.139.925	21.902.353	10.710.999	20.702.078
Pasal 22	-	-	-		
Pasal 23	-	4.418.426	24.537.351	-	58.300.270
Pasal 25/29 Badan	10.710.999		-	10.710.181	-
Pasal 26	152.510.075		20.138.075	42.181.998	
PPh	-		-		-
PPh	-	-	-		-
PPnBM	152.510.300	-	57.667.375	42.181.425	-
Tembakau	10.120.000		31.857.000		107.004.000
Cukai Hasil	3.121.279.079	11.151.021	7.750.000.000	1.324.057.098	276.422.117

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Batang

(rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	RE TA 2019	LRE TA 2020 (PMK No. 85/PMK.07/2021)	Penyelesaian TA 2020 (KMS No. S-1581/MK.7/2021)	Alokasi LRE TA 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
PPh			992.041.904	420.437.572	1.412.479.476
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
Pajak	-	-	972.212.705	126.901.922	949.201.247
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Pajak Hotel					
Pajak Restoran			70.000.000	126.851.922	196.851.922
Pajak Hiburan	-	-	902.212.705		902.212.705
Pajak Reklame	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Parkir					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	7.018.830		7.018.830
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan			33.010.417	-	33.010.417
Pajak Sarang Burung Walet			-	-	-
BPHTB		2.102.030	93.012.130		93.012.130
Migas	-	-	93.012.130		93.012.130
Minyak Bumi	-	-	61.615.850	-	3.385.850
Gas Bumi	-	-	8.044.350	-	8.044.350
Pajak Karbon Sesuai Undang-Undang					-
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Etil Alkohol					
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol	-				
Minerba	-	-	-		
Landrent		-	-	-	-
Royalti		-	-	-	-
Dana Reboisasi					-
Iuran Tetap (Dead Rent)					
Iuran Eksplorasi	-				
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-				
Kehutanan	-	75.102.030	-	-	-
IHH			-	-	-
PSDH					
PSDH	-	75.102.030			
Perikanan	-	-	-	-	
Jumlah Pokok		77.102.030	1.067.096.830	420.437.572	1.487.534.476

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Salinan Lampiran

(Rincian per provinsi)

(PROVINSI)	(a) Dialokasikan TA 2021	(b) Dialokasikan TA 2022	Dasar Hukum PP 72/2021 Sebagaimana Telah Diubah dengan PP 78/2021	(c) TA 2020 yang Telah Disalurkan	(d) TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	97.113.389.516		3.280.075.212	11.280.035.012	42.259
Sumatera Utara	13.956.339.825		250.960.091.000	13.020.075.000	
Sumatera Barat	18.131.772.379	-	2.695.261.201	10.120.000	
Riau	74.147.027.000	-	30.591.200	958.213.362	
Jambi	12.124.774.000	-	1.840.613.000	6.014.425.358	10.059
Sumatera Selatan	1.951.249.035		345.683.700	1.734.745.358	-
Bengkulu	221.011.000		108.711.000	31.766.350	-
Lampung	-				
Kepulauan Bangka Belitung	2.564.761	-	2.101.000		42.259
Kepulauan Riau	705.435.547	-	12.704.000	979.788.000	
DKI Jakarta	4.011.039.079	-	597.075.156	4.830.561.978	
Jawa Barat	210.689.007		8.827.500	707.264.625	-
Jawa Tengah	1.975.131		5.666.000	1.860.181	-
DI Yogyakarta	-	-			
Jawa Timur	20.765	-	14.930	1.095	
Bali	37.276.011		2.483.000	14.757.141	-
Nusa Tenggara Barat	19.316.107		4.056.000	302.662.000	-
Nusa Tenggara Timur	3.385.941		280.000	6.201.417	-
Kalimantan Barat	827.330.861	-	290.700.200	201.107.036	
Kalimantan Tengah	705.708.379	111.156.214	65.899.925	708.242.960	207.763.571
Kalimantan Selatan		10.001.256	1.667.400	-	33.211.010
Kalimantan Timur		23.811.607	91.000	-	24.752.074
Kalimantan Utara		661.612	30.000	-	374.643
Sulawesi Utara	-				
Gorontalo	-	34.572.951	775.730		65.357.000
Sulawesi Tengah	-	1.-.776	1.832		1.720.000
Sulawesi Barat	-	-	-		
Sulawesi Selatan	53.101.0	152.0.6	3.926	337.053	157.955
Sulawesi Tenggara	82.101.0			337.053	-
Maluku		112.070	10.915	-	157.955
Maluku Utara	34.2 .343		7.035.000	23.057.033	
Papua Barat	-		-		
Papua	5.712.471	-	1.026.650	1.363.871	
Provinsi Papua Barat Daya	28.301.642		-	92.371.862	-
Papua Tengah	199.167.202		114.270.938	23.147.000	-
Papua Pegunungan	-				-
Papua Selatan	-	-			
Papua Barat	205.263.282	-	144.248.350	364 - 8.953	-
Papua Tengah	109.192.080		37.437.350	-	57.962.000
Papua Pegunungan	29.611.264.0-	1.1.0.3.260	3.210.110.128	0.99.7.0.0.010	291.763.970

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. [illegible] (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. .../PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	1.865.243.47[illegible]	311.842.970	1.571.400.50[illegible]
PPh		-	271.314.640	271.314.640	-
PPh Pasal 21			-	-	-
PPh Pasal 25/29			271.314.640	271.314.640	-
PBB			1.594.[illegible]	41.[illegible]	1.572.[illegible]
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			1.[illegible]	-	1.302.313.43[illegible]
Bagian Daerah Perhutanan			30.517.089	30.517.089	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-				
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi					-
Biaya Pemungutan Perkebunan			70.000.[illegible]		70.000.[illegible]
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	1.712.911	1.712.911	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	
CHT		-	-	-	-
SDA		119.594.758	10.168.[illegible]	2.9[illegible]	7.[illegible]
Migas			10.150.[illegible]	2.9[illegible]	7.17[illegible]
Minyak Bumi 15%	-		5.127.827.[illegible]		5.027.[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	-	94.[illegible]		99.[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-	5.0[illegible]	2.953.399.614	4.1[illegible]
Gas Bumi 0,5%			[illegible]	-	155.07[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba			1.803.[illegible]		1.803.[illegible]
Land-rent	-				
Royalti	-	-	1.803.[illegible]		1.803.[illegible]
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi		-	-	-	-
Iuran Tetap				-	-
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	119.594.758			
DR	-	-	-	-	-
IIUPH			-	-	-
PSDH		119.594.758			
Perikanan					
Grand Total	-	119.594.758	12.03[illegible]	3.[illegible]	8.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nias

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PPh Pasal 21 TA 2020	PPh Pasal 25/29 OP TA 2020	Penyaluran DBH Triwulan IV TA 2021 (PMK No. 94/PMK.07/2021)	KB DBH 2020 yang Belum Disalurkan	KB DBH 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	6,047,127,775	-	1,364,491,356	36,284,651,442	-
PBB	1,591,605,203	-	3,013,731,303	15,357,423	-
BPHTB Pasal 21	1,728,752,153		9,819,038,800	979,756,538	-
PPh Pasal 25/29 OP	703,973,073		130,186,200	403,756,373	-
PPh	2,310,378,029		727,120,500	3,335,179,429	
Reg. Perkebunan	1,591,968,953		219,639,750	1,720,215,256	
Reg. Kehutanan Iuran	34,158,542,242		7,546,501,700	92,576,645,417	
Dana Reboisasi Non Migas	-	-	-	-	-
Provisi Sumber Daya Hutan		-		-	-
Iuran Izin Usaha Pertambangan	2,730,630,024		3,906,214,350	28,697,872	-
Reg. Pertambangan Minyak Bumi					
Reg. Pertambangan Minyak Bumi	2,659,030		9,500,000	270,896,727	
Reg. Pertambangan Mineral	1,101,357,535	-	45,757,500	1,016,[illegible]55	
Dana Pertambangan Non Migas		-	-	-	-
Reg. Pertambangan Batubara					-
Reg. Pertambangan Panas Bumi	1,430,030,041		122,704,000	1,311,777	
Reg. Pertambangan Perikanan	-				
Dana Pertambangan Minyak Bumi	7,761,7	-	26,600	6,893,047	-
PDRD	484,076,52	-	595,127,034	935,303,555	-
DAU	1,25,3[illegible]0,079	3,711,[illegible]2	1,24[illegible]8,[illegible]9	210,[illegible]0,060	3,09[illegible]1,347
DAK		3,710,[illegible]03	2,750,220		3,76[illegible]2
Pungut Pajak Rokok	-	311,[illegible]7	21,157,630		[illegible]7
Hibah Pajak Rokok	-	2[illegible]8,743	1,03[illegible]0	-	20,291,312
Alokasi Dana Desa	-	-	-	-	-
Dana Desa		2,823,[illegible]5	92,[illegible]3,030	-	2,94[illegible]3
Dana Desa		17,[illegible]1,[illegible]2	[illegible]70,[illegible]6	-	47,45[illegible]48
Dana Insentif Daerah					-
Minerba	9[illegible]5,[illegible]9	102,[illegible]12	10,[illegible]2	[illegible]3,[illegible]46	[illegible]7,[illegible]3
Panas Bumi	84[illegible]5,[illegible]0			1,[illegible]9,[illegible]19	
Reg.	-	[illegible]7,[illegible]43	86,[illegible]26		[illegible]1,[illegible]0
Pajak Daerah	20,496,[illegible]70	-	4,[illegible]3,650	16,[illegible]5,[illegible]30	
Dana Reboisasi			-	-	-
Dana Bagi	2,[illegible]12,[illegible]41		1,024,[illegible]30	1,[illegible]83,[illegible]82	
Pajak Rokok Daerah	15,[illegible]16,[illegible]66			10,[illegible]2,[illegible]89	
Kurang Bayar	[illegible]79,[illegible]94,[illegible]51		97[illegible],[illegible]82,[illegible]10	4[illegible],[illegible]11,[illegible]73	
DBH	-	-	-	-	-
PBH			-	-	-
TOTAL	10[illegible],[illegible]1,[illegible]61		87[illegible],[illegible]2,[illegible]30	[illegible]30,[illegible]41,[illegible]31	-
Tunjangan	5[illegible],[illegible]6,[illegible]30		[illegible],[illegible]1,[illegible]30		[illegible],[illegible]1,[illegible]23
Grand Total	37,[illegible]4,[illegible]2,[illegible]37	3,[illegible]19,[illegible]1,[illegible]42	1,[illegible]0,[illegible]6,[illegible]7	76,[illegible]4,[illegible]5,[illegible]11	3,[illegible]0,[illegible]1,[illegible]27

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Provinsi :

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	TA 2018	TA 2019	TA 2021 (PMK No. 07/PMK.07/2021)	Penyesuaian TA 2021 (PMK No. 61/PMK.07/2021)	TA 2021 (PMK No. 61/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
PPh 21			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh 25/29 OP			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh 25/29 Badan			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Kurang/(Lebih) Bayar PBB	-	-			
Pajak Daerah Non Migas					
Kurang/(Lebih) Bayar Pajak Daerah					
Bagian Daerah Perhitungan			[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Penerimaan	-	-	-	-	-
Kurang/(Lebih) Bayar Penerimaan	-	-	-		
Kurang Penyaluran Migas					
Kurang Penyaluran Pajak Daerah					
Bagian Pemerintah Pusat Perhitungan					-
Bagian Pemerintah Pusat Penerimaan	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Kurang/(Lebih) Bayar Pemerintah Pusat					
Kurang Penyaluran Sektor Migas					
Total					
PPh		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
PPh pasal 21 (DP)	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Migas pasal 0,5%		-	[illegible]		[illegible]
Hasil Pengolahan Kekayaan Negara					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Minyak	-	-	-	-	-
Kondensat					
Panas Bumi					
Jumlah Kurang/(Lebih)					
Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Kurang/(Lebih) Bayar Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	[illegible]			
PSDH					
DR					
Total	-	[illegible]	-	-	-
Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Rekap Lampiran III

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2021	LB DBH TA 2020	Alokasi KB DBH TA 2020 (sesuai PMK 226/PMK.07/2020)	TRANSFER KB DBH TA 2021	LB DBH TA 2021 sampai dengan Bulan Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	2.304.[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPN	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reg. Rokok	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Pertambangan Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Pertambangan Non migas					
Bagian Pertambangan Panas Bumi				-	-
Bagian Pertambangan Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pertambangan Kehutanan					
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau			[illegible]	-	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Golongan I			[illegible]		[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Golongan II			[illegible]		
Cukai Hasil Tembakau Golongan III			[illegible]		
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Buatan Indonesia					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Buatan Indonesia					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Buatan Indonesia					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Buatan Indonesia					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Buatan Luar Negeri					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Buatan Luar Negeri					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Buatan Luar Negeri					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Buatan Luar Negeri					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Sendiri					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Sendiri					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Sendiri					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Sendiri					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Bersama					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Bersama					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Bersama					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Bersama					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Perseorangan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Perseorangan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Perseorangan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Perseorangan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Lainnya					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Lainnya					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Lainnya					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Lainnya					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Tidak Ada Pita Cukai					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Palsu					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Bekas					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Peruntukan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Kemasan					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Jenis					
Cukai Hasil Tembakau Golongan I Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan II Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan III Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Tahun					
Cukai Hasil Tembakau Golongan Lainnya Hasil Pengolahan Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Personalisasi Kemasan Jenis Tahun Tidak Diketahui Pita Cukai Salah Tahun			

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Brebes (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB ... TA 2019 (KMK No. .../KM.7/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. .../PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB		-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pedesaan					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Perkotaan		-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-				
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pedesaan					
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkotaan	-	-	[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT					
SDA		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	-	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-			
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap				-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	[illegible]	-		
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kurang Bayar | (dalam rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)	(6)
Aceh	38.654.601	6.707.234	5.265.064.000	7.240.621.735	35.759.834
Pajak	4.007.211.382	-	3.982.179.730	5.174.178.650	-
PPh Pasal 21	3.968.995.477	-	3.850.846.030	7.970.079.017	-
PPh Pasal 25/29	754.384.472	-	859.736.030	803.079.837	-
PPN	1.284.010.312	1.024.470	1.779.387.730	3.113.415.006	45.721.691
Pajak Lainnya	1.191.353.098	-	251.068.030	1.121.210.209	-
Bagian Daerah Migas	205.112.367	-	29.705.000	-	175.407.367
Bagian Pemerintah Pusat Migas	29.592.367	-	2.715.100	90.856.851	-
Bagian Daerah Penghasilan Pusat	-	5.113.420	870.720	-	4.242.700
Bagian Daerah Perikanan	1.119.187.793	-	1.087.787.530	1.369.730.295	-
Bagian Daerah Pertambangan	976.192.807	-	1.148.888.780	824.716.045	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	371.369.027	-	5.691.000	265.761.107	-
Bagian Pemerintah Migas	8.943.979	-	9.893.500	-	949.521
Bagian Pemerintah Non Migas	363.119	-	157.500	934.430	-
Jasa Pemanfaatan Panas Bumi	-	28.620	28.770	-	222.000
Jasa Pemanfaatan Perikanan	42.078.110	-	41.131.100	10.970.010	-
Jasa Pemanfaatan Pertambangan	31.062.000	-	6.642.720	29.681.277	-
Jasa Pemanfaatan Sektor Lainnya	7.165.647	-	1.368.000	5.690.647	-
OHT	371.853.610	-	368.945.225	918.510.171	-
PBBKB	301.130.767	17.692.410	197.846.225	185.250.208	20.720.344
Bagian	-	112.081.230	1.667.700	-	113.471.930
Minyak Bumi 15%	-	20.616.041	816.200	-	21.432.241
Minyak Bumi 3,5%	-	91.065	30.500	-	121.565
Minyak Bumi Sebelum Tambang Timur	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	84.878.68	701.700	-	85.580.68
Gas Bumi 0,5%	-	1.414.790	17.700	-	1.432.490
Gas Bumi Pelabuhan Kawasan Khusus					
Mineral	2.521.084	1.000	41.000	2.481.084	322.000
Tambang	1.021.084	-	-	2.021.084	-
Sumber	-	211.040	56.940	-	157.940
Dana Bagi	67.569.670	1.773.116	10.575.625	69.116.381	2.145.520
Dana Reklamasi	-	-	-	-	-
Dana Hasil	-	1.760.116	10.071.625	-	12.117.741
Dana Bagi Hasil Pemerintah	11.210.689	-	-	11.210.689	-
PPh Pasal	921.775.121	-	157.892.625	164.112.129	-
DR	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PBBKB	921.775.121	-	157.892.625	164.112.129	-
Dana Bagi	150.196.000	-	216.981.700	-	66.785.700
Total	2.562.063.973	1.214.913	5.211.331.651	2.852.211.971	288.968.910

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Wilayah

(Rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-			
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	-		
[illegible]					
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-
[illegible]	-	-	-		
[illegible]		[illegible]			
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Cilacap

(dalam rupiah)

URAIAN	PPh Pasal 21 TA 2020	PBB Perdesaan dan Perkotaan TA 2020	Penyaluran KB DBH Desember TA 2020 (PMK No. 226/PMK.07/2020)	Alokasi 2020 yang belum disalurkan	KB TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cilacap	19.387.453.058	-	19.387.453.058	3.789.572.144	15.597.880.914
PPA	6.743.857.758	-	3.956.893.500	903.696.301	3.053.197.199
PPh Pasal 21	6.743.857.758		3.956.893.500	-	3.053.197.199
PPh Pasal 25/29	1.203.107.491		431.213.750	431.213.750	-
PBB	11.719.018.727		9.071.202.308	2.885.447.191	185.431.202
Dapil Baru	1.991.919.969		231.151.750	1.760.768.219	
Bagian Daerah Sharing	2.153.531.531		214.313.750		39.348.968
Bagian Daerah Penghargaan	9.565.586.827	-	8.840.050.808	1.124.678.252	
Bagian Daerah Pemerataan					-
Bagian Daerah Pemerataan	1.451.033.635		587.070.550	965.183.381	-
Bagian Daerah Penghargaan	7.020.785.249		7.038.454.150	5.797.771.149	
Bagian Daerah Pemerataan	93.038.501		15.032.150	141.366.102	
Bagian Penghargaan	7.680.616	-	2.970.150		5.014.299
Bagian Pemerataan	71.797.174	-	1.462.550	84.153.174	-
Bagian Pemerataan			-	-	-
Bagian Penghargaan	1.349.259		21.200.050	37.178.324	
Bagian Penghargaan	920.[illegible]48		53.336.950	150.[illegible]23	
Bagian Penghargaan	6.797.247	-	550.200	6.246.147	
CHT	726.131.153	-	5.[illegible]2.779	764.351.393	-
DBH	116.[illegible]01	25.[illegible]54	87.[illegible]95	40.[illegible]27	250.[illegible]81
Migas		15.[illegible]28	1.[illegible]39		12.371.456
Migas Baru		22.[illegible]37	916.230		21.[illegible]07
Migas Baru	-	93.[illegible]42	30.[illegible]20		89.[illegible]32
Migas [illegible]	-	-	-	-	
Gas Bumi	-	34.[illegible]61	758.700	-	33.[illegible]35
Gas Bumi		1.[illegible]58	17.[illegible]00	-	458.749
Gas Bumi [illegible]				-	-
Minerba	43.[illegible]00	21.[illegible]30	2.[illegible]30	45.[illegible]28	16.[illegible]57
Iuran	4.[illegible]00		150.[illegible]70	45.[illegible]28	
Royalti	-	21.[illegible]60	1.[illegible]45		16.[illegible]87
Panas Bumi	97.[illegible]72	-	4.[illegible]30	16.[illegible]10	
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	1.[illegible]51		4.[illegible]30	1.[illegible]87	-
Setoran Bagian Pemerintah	16.[illegible]99			16.[illegible]99	
Pajak Lain	491.307.949		1.[illegible]76	79.[illegible]76	
DAK	-	-	-		
Lainnya			-	-	-
TOTAL	101.[illegible]12		1.[illegible]47	79.[illegible]74	-
Perkiraan	165.[illegible]90		31.[illegible]30		1.[illegible]20
Grand Total	18.[illegible]46	25.[illegible]76	1.[illegible]98	3.[illegible]69	3.[illegible]30

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bernah

Dalam rupiah

URAIAN	KPP [illegible]	KPP [illegible]	Lebih Bayar DBH [illegible]	Penyelesaian [illegible]	Sisa Lebih Bayar DBH [illegible]
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)
Pajak	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB					
Bea Perolehan					
Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbatasan					
Bagian Daerah Perlakuan Khusus					
Bagian Daerah Tertentu Lainnya		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-		-		
Bagian Penghasilan Pasal 21/26					
Bagian Pemerintah Perbatasan					
Bagian Pemerintah Perlakuan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Tertentu Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-				
PDRA		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas			[illegible]		[illegible]
Migas Pasal 22	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Migas Pasal 25/29	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Migas Sumber Daya Alam Panas Bumi	-	-	-	-	-
Gas Bumi					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Negeri Harga Khusus Migas					
Pertama	-		-	-	-
Bagian	-	-	-	-	-
Alokasi Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Proporsional					
Bagian tetap					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah	-	[illegible]	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal					
PPh 21		[illegible]			
PPh 22					
Kedua					
Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RENCANA ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Demak

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar DBH Tahun 2020	Lebih Bayar DBH Tahun 2020	Pagu DBH Semester I Tahun 2021 (Lampiran PMK ... /2021)	PMK ... /2020 yang Telah Ditetapkan	Lebih Bayar DBH yang Akan Ditetapkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)=(3)-(4)
Total	21.961.084.214		6.018.796.366	5.995.638.281	61.796.761
PPh	8.324.870.256	-	2.677.491.300	3.337.992.968	-
PPh Pasal 21	7.567.963.374	-	2.651.567.300	2.916.396.074	-
PPh Pasal 25/29	814.849.736	-	215.795.200	414.524.794	-
PBB	2.168.321.077	-	744.407.900	1.074.240.250	10.208.339
Total BHT	1.951.050.096		265.695.700	1.720.271.896	
Cukai Daerah Hasil	294.069.021		272....		9.860.561
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	154.930.525	-	40.183.100	87....	-
Bagian Daerah Perikanan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.709.547		8....	180....	
Dana Perimbangan Migas	0....		9....		9....
Dana Pertimbangan Pertambangan		-	-	-	-
Dana Perimbangan Panas Bumi		-	-	-	-
Dana Perimbangan Kehutanan	7....		7....	2....	
Dana Perimbangan Perikanan					
Dana Perimbangan Pajak Lainnya	7....		1....	6....	-
DTP	2....	-	6....	6....	-
DAU	306....	1....	88....	72....	270....
DAK		10....	1....		11....
Migas		2....	9....		21....
Migas Bagian 0,...		7....	1....		3....
Migas Bagian Dana Otonomi Khusus				-	-
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		84....	1....	-	55....
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian ...		414....	1....	-	1....
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian ...	-	-	-	-	-
Minerba		12....	4....		7....
Lainnya					
Panas Bumi		1....	1....		1....
Dana Otsus	12....		4....	10....	
Dana Otsus Papua	-	-	-	-	-
Dana Otsus Aceh	3....	-	1....	1....	-
Dana Otsus Bagian Tambahan DTF	10....			10....	
Keistimewaan	14....		3....	11....	
DID	-	-	-	-	-
Total DBH	4....	-	1....	94....	
Keistimewaan	20....		11....		11....
Provinsi Jateng	17....	11....	3....	3....	29....

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lampiran Ordonansi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	PENGALOKASIAN KURANG BAYAR DBH TAHUN 2019 (PMK NO. 21/PMK.07/2021)	PENGALOKASIAN LEBIH BAYAR DBH TAHUN 2019 (PMK NO. 6/PMK.07/2021)	SISA KURANG BAYAR DBH TAHUN 2019 (PMK NO. 6/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(5)
Pajak			-70.064.814	2.120.997.555	220.932.445
PPh			436.641.161	2.120.647.555	220.934.347
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			436.641.161	2.120.647.555	220.934.347
PPN					
Dana Reboisasi					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah PNBP Kehutanan					
Bagian Daerah Pertambangan Umum					
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas					
Bagian Pemerintah Pusat PNBP Kehutanan					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Umum					
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan					
PPh 21					
PPh Pasal 22 Impor					
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Daerah					
PPh Pasal 22 Impor Migas					
PPh Pasal 22 Impor Non Migas					
PPh Pasal 23					
PPh Pasal 26					
PPh Pasal 4 ayat (2)					
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Migas					
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Non Migas					
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Pertambangan Umum					
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Perikanan					
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Kehutanan					
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Panas Bumi					
PPh Pasal 15					
PPh Pasal 15 Migas					
PPh Pasal 15 Non Migas					
PPh Pasal 15 Pertambangan Umum					
PPh Pasal 15 Perikanan					
PPh Pasal 15 Kehutanan					
PPh Pasal 15 Panas Bumi					
PPh Pasal 21 Migas					
PPh Pasal 21 Non Migas					
PPh Pasal 21 Pertambangan Umum					
PPh Pasal 21 Perikanan					
PPh Pasal 21 Kehutanan					
PPh Pasal 21 Panas Bumi					
PPh Pasal 25/29 Migas					
PPh Pasal 25/29 Non Migas					
PPh Pasal 25/29 Pertambangan Umum					
PPh Pasal 25/29 Perikanan					
PPh Pasal 25/29 Kehutanan					
PPh Pasal 25/29 Panas Bumi					
PPN					
PPN Migas					
PPN Non Migas					
PPN Pertambangan Umum					
PPN Perikanan					
PPN Kehutanan					
PPN Panas Bumi					
PPnBM					
PPnBM Migas					
PPnBM Non Migas					
PPnBM Pertambangan Umum					
PPnBM Perikanan					
PPnBM Kehutanan					
PPnBM Panas Bumi					
PBB					
PBB Migas					
PBB Non Migas					
PBB Pertambangan Umum					
PBB Perikanan					
PBB Kehutanan					
PBB Panas Bumi					
BPHTB					
BPHTB Migas					
BPHTB Non Migas					
BPHTB Pertambangan Umum					
BPHTB Perikanan					
BPHTB Kehutanan					
BPHTB Panas Bumi					
Cukai					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Otsus					
Cukai Hasil Tembakau 0,3%					
Cukai Hasil Tembakau 0,7%					
Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Otsus					
Minerba					
Royalti					
Royalti					
Pajak Bumi dan Bangunan					
Bunga Pinjaman					
Jangka Waktu					
Penerusan Pinjaman Pemerintah					
Hibah					
Hibah					
Hibah					
Penerusan Hibah					
Total Dana					

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Grobogan

(dalam rupiah)

Rincian Data	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PPh	3.812.810.206		6.[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pkb Pasal 2	4.716.810.803	-	[illegible]	[illegible]	-
Pkb Pasal 2(2)(2)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
BBN	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Cukai Hasil	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Daerah Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Daerah Non Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Daerah Tarif Baru	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Daerah Pemekaran	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Sebelum Pemekaran	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Daerah Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Non Migas	42.897	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Pajak Baru	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pemekaran	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Perbatasan					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PNBP	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kehutanan		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Penyaluran DR		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Penyaluran PSDH		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Penyaluran PSDH Non Pengelola Hutan	-				
Gas Bumi - Migas	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi - Non Migas	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi Setelah Dikurangi Biaya Operasi	-	-	-	-	-
Mineral	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Penalti	[illegible]			[illegible]	-
Bunga		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Penyaluran DR	-	-	-	-	-
Penyaluran PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pertambangan Pemekaran	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DR	-		-	-	
PSDH	-	-	-	-	-
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Jepara (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Yang Sudah Dibayar TA 2020 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak					
PPh	-				
PPh Pasal 21	-	-		-	
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata		-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan	-	-			
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas	-				
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT	-	-		-	
SDA	-	167.114.565	66.389.849	19.918.955	46.470.894
Migas		-	66.389.849	19.918.955	46.470.894
Minyak Bumi 15%			66.389.849	19.918.955	46.470.894
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba		-	-	-	-
Iuran Tetap			-	-	-
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Produksi	-				
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan		167.114.565			
DR					
IIUPH	-	-	-	-	
PSDH	-	167.114.565	-	-	-
Perikanan			-	-	-
Grand Total		167.114.565	66.389.849	19.918.955	46.470.894

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Jepara (dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Pengalokasian KB DBH Sementara TA 2020 (PMK Nomor [illegible])	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	21.544.524.090		5.675.697.155	[illegible]	[illegible]
PPh	17.254.303.714	-	3.790.595.500	13.463.708.214	-
PPh Pasal 21	16.350.380.050	-	3.445.[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	904.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PBB	4.150.261.236		1.472.971.000	2.644.502.117	[illegible]
Bagi Rata	1.983.343.998		263.[illegible]	1.720.270.[illegible]	
Bagian Daerah Migas	299.954.054		257.[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	16.779.054		4.[illegible]	11.[illegible]	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	352.477.785	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Perkebunan	1.455.[illegible]		642.[illegible]	812.17[illegible]	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.[illegible]		8.[illegible]	206.[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	8.946.[illegible]		9.[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	524.[illegible]	-	[illegible]	363.[illegible]	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	10.[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Perkebunan	16.756.[illegible]		26.761.[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
CHT	550.495.780	-	304.[illegible]	[illegible]	-
SDA	420.785.[illegible]	[illegible]	292.[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas		[illegible]	1.[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15%		[illegible]	[illegible]		24.[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	
Gas Bumi 30%	-	84.[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Minerba	[illegible]		[illegible]	47.[illegible]	-
Iuran Tetap	[illegible]			[illegible]	
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Iuran Tetap	5.712.481	-	[illegible]	[illegible]	-
Setoran Bagian Pemerintah	[illegible]			[illegible]	-
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DR	-	-	-		
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	[illegible]		70.[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Karanganyar (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	1.040.390.535	758.706.926	590.855.609
PPh	-	-	850.617.601	260.752.095	590.855.639
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			850.627.604	260.752.095	590.855.639
PBB			189.773.931	189.773.841	-
Bagi Rata			-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Perhutani	-	-			
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perkebunan			147.753.910	147.046.810	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas	-				-
Biaya Pemungutan Perhutani					
Biaya Pemungutan Pertambangan			-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	42.023.031	42.023.03	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-		
CHT	-				
SDA		9.681.125	95.956.186		96.955.706
Migas			95.052.180	-	95.252.156
Minyak Bumi 15%		-	91.996.630	-	91.265.800
Minyak Bumi 0,5%	-	-	3.056.750	-	3.066.350
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Minerba			1.903.906	-	903.606
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	1.903.906	-	1.903.606
Panas Bumi	-	-			
Iuran Produksi	-				
Iuran Tetap					-
Setoran Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan	-	9.681.429	-	-	-
DR	-	-			
IIUPH					
PSDH		9.681.125		-	-
Perikanan		-	-	-	-
Total DBH	-	9.681.429	1.146.550.241	477.740.806	687.711.315

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Karangasem (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Dialokasikan TA 2021	LB Dialokasikan TA 2021	Penyelesaian KB DBH Sampai dengan TA 2020 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	12.821.182.0[illegible]		5.494.[illegible]	7.[illegible]	[illegible]
PPh	7.8[illegible]		3.05[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	6.[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	-	754.[illegible]	[illegible]	50.[illegible]
Bagi Rata	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pusat Migas	83.[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pusat Daerah					
Bagian Daerah Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Perhutanan	950.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Pertambangan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pusat Daerah					-
Biaya Pemungutan Perkebunan	4[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	45.[illegible]	-	14.[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT	1.[illegible]		[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	10.[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]	-	24.[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	97.965
Landrent	[illegible]	-	-	[illegible]	-
Royalti	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Iuran Produksi					
Iuran Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Dana Reboisasi / Pajak [illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-
Panas Bumi	128.[illegible]	-	66.[illegible]	6[illegible]	
PSH					
IHPH					
DR/IT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	150.[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	13.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kebumen (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/202[illegible])	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/202[illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh		-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21	-	-	-		
PPh Pasal 25/29	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	-	-	[illegible]		[illegible]
Bagi Rata	-				
Bagian Daerah Penghasil				-	-
Bagian Daerah Dari Migas			[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Panas Bumi		-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		
Bagian Daerah Perhutanan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	-				
Biaya Pemungutan Perhutanan					-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	-
CHT	-	-	-		
SDA	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas	-		[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15%	-		[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 0,5%			[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	-		[illegible]		[illegible]
Iuran Tetap			[illegible]		[illegible]
Royalti		-	-	-	-
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Produksi		-	-	-	
Iuran Tetap	-	-			
Setoran Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan		[illegible]		-	-
DR			-	-	-
IIUPH	-	-	-		
PSDH	-	[illegible]			
Perikanan					
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sebastian

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi Definitif TA 2020	Alokasi Definitif TA 2020	Pengalokasian DBH TA 2020 Berdasarkan PMK-226/PMK.07/2021	TKDD TA 2020 yang Belum Disalurkan	TKDD TA 2020 yang Disalurkan Kembali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	10.270.240.165		7.019.028.342	3.251.211.823	3.018.817
PPh	6.126.057.876		3.257.047.102	2.868.010.774	
PPh Pasal 21	4.679.183.283		2.972.999.102	1.706.184.181	
PPh Pasal 25/29	1.450.750.101		284.108.100	1.161.826.593	
PBB	5.313.241.389		818.381.620	3.871.377.113	76.518.344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.831.379.902		738.681.720	798.251.818	
Cukai Hasil Tembakau	12.771.611.334		306.170.000		75.178.695
Pungutan Pajak Rokok Daerah	1.124.11		141.120	100.819	
Pungutan Pajak Rokok Provinsi					
Pungutan Pajak Rokok Kabupaten/Kota	630.184.11		241.197.120	388.986.991	
Pungutan Pajak Rokok Pemerintah					
Pungutan Pajak Rokok Kabupaten/Kota	211.348.307		3.679.120	206.974.227	
Pungutan Pajak Rokok Lainnya	1.153.161		1.144.120		8.016.819
Pungutan Pajak Rokok Non Pajak	1.981		1.981	100.811	
Pungutan Pajak Rokok Pemerintah					
Pungutan Pajak Rokok Pemerintah Daerah	81.175.078		17.511.120	33.663.876	
Pungutan Pajak Rokok Pemerintah Kabupaten/Kota					
Pungutan Pajak Rokok Pemerintah Daerah Lainnya	1.153.217		1.153.217	1.153.217	
DBH	765.491.167		163.921.342	221.163.211	
DBH	361.327.654	153.365.53	393.919.636	91.922.719	504.720.219
Dana		113.604.084	1.987.400		17.551.655
Alokasi Dana Desa		93.813.074	91.813.941		94.759.974
Dana Desa		19.791.010	80.079		9.274.7
Alokasi Dana Desa Berdasarkan Prioritas Daerah					
Dana Bagi Hasil		94.184.041	71.171.71		41.351.001
Dana Bagi Hasil Pajak		1.154.189	1.154		1.153.049
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau					
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		73.481.035	19.3.596		37.456.630
Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara		19.791.941	3.167.471		37.209.635
Kehutanan		19.1.019	19.915		197.065
Perikanan	1.141.140		1.026.120	19.120.129	
Pertambangan Minyak Bumi					
Pertambangan Gas Bumi	5.7 .141		1.128.621	1.193.621	
Dana Reboisasi	1.716.139			1.141.119	
Kehutanan	119.111.209		73.191.731	73.121.131	
Pertambangan Panas Bumi					
Dana Otonomi Khusus					
Dana Otsus Papua	159.01 .131		73.179.151	73.171.951	
Dana Otsus Aceh	113.130.119		71.811.611		57.191.139
Dana Desa	1.111.111.111	131.11 .11	5.171.731.211	5.731.113.741	131.741.011

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kendal

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2018	TA 2019	TA 2020 (PMK No. 05/PMK.07/2021)	Realisasi TA 2020 (BKN No. [illegible]/2021)	Selisih Lebih/(Kurang) (PMK No. 5/PMK.7/2021)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DBH Pasal 11					
DBH Pasal 12(3)(a)					
PBB	-	-			
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Kabupaten Daerah Migas	-	-	-	-	-
Kabupaten Daerah Non Migas					
Kabupaten Daerah Penerima Dana					
Bagian Daerah Penghasilan					
Bagian Daerah Pajak Rokok	-	-			
Bagian Daerah Bea Perolehan	-	-	-	-	-
Dana Pemungutan Migas					
Dana Pemungutan Non Migas					
Bagian Pemerintah Pasal 21					
Bagian Pemerintah Pasal 25/29	-	-		-	
Bagian Pemerintah Penghasilan	-	-		-	
Dana Pemerintah Daerah Lainnya					
PDP					
PPh					
Migas	-	-		-	
Migas Blok [illegible]	-	-		-	
Migas Blok [illegible]	-	-		-	
Migas Lainnya					
Panas Bumi					
Bagi Hasil	-	-		-	
Bonus	-	-	-	-	-
Royalti	-	-		-	
Pajak Daerah					
Hotel					
Restoran					
Hiburan					
Reklame					
Penerangan Jalan					
Parkir					
Air Tanah					
Sarang Burung Walet					
Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
Pajak Rokok					
BPHTB	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Opsen					
Grand Total					

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Sub. Kertotal

Satuan: rupiah

Uraian	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran DBH Sesuai PMK No. 213/PMK.07/2020	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
BPHTB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21/26	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Pungutan Provinsi Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pungutan Provinsi Non Migas					-
Pungutan Provinsi Pertambangan Panas Bumi	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Pungutan Provinsi Pertambangan Mineral dan Batubara	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Pungutan Provinsi Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Pungutan Provinsi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pungutan Provinsi Pertambangan Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pungutan Provinsi Pertambangan Mineral dan Batubara	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pungutan Provinsi Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pungutan Provinsi Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
DBH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas Bagian 85%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas Bagian 15%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas Bagian 0,5% Tambahan Migas					-
Gas Bumi 30%	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 70%	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi Bagian Kabupaten/Kota Penghasil	-	-	-		
Pertambangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Landrent	[illegible]	-	-	[illegible]	-
Royalti		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Iuran Eksploitasi	-				-
Iuran Tetap	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Tertentu	[illegible]	-	-	[illegible]	
PNBP Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
DR					-
LQ45	-	-			
PNBP	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kanal: Akuisisi (dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	PENETAPAN KURANG BAYAR DBH TAHUN 2019	PENETAPAN LEBIH BAYAR DBH TAHUN 2019	SISA KURANG BAYAR DBH TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	2.573.436.818	(427.991.324)	2.145.445.494
PBB	-	-	2.417.330.090	(1.339.284.536)	1.077.945.494
PBB Pasal 21			(266.795.741)	(1.339.284.536)	(1.606.080.277)
PBB Pasal 25/29			2.684.125.831	-	2.684.125.831
BPHTB			156.106.728	(88.707.212)	67.399.516
Cukai					
Bagian Daerah Migas	-	-			
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan			98.702.949	(88.707.212)	9.995.737
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Daerah Pertambangan Migas					
Bagian Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Air Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pertambangan Perikanan			1.681.373	1.189.311	492.062
Bagian Pertambangan Kehutanan	-		-		
Bagian Pertambangan Pertambangan	-	-	-	-	-
DAU	-	-	58.107.974	(58.707.974)	-
DAK		10.405.206	913.096.209		913.096.209
Jumlah			971.203.183		971.203.183
Bagian Daerah 15%			129.291.107		129.291.107
Bagian Daerah 0,5%	-	-	4.306.970		4.306.970
Bagian Dana Otonomi Khusus Provinsi	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil DBH	-	-	734.103.303	-	954.103.303
Dana Bagi Hasil DAK			1.245.971		4.025.794
Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah					
Kehutanan			2.203.150		2.203.150
Perikanan			166.500		166.500
Pertanian	-	-	1.301.909		1.270.000
Pertambangan	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pertambangan Minyak Bumi					
Pertambangan Gas Bumi					
Pertambangan Minerba		10.405.206	-		
PBH	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29		10.405.206			
PPh Pasal 26					
Jumlah Total	-	10.405.206	2.115.802.552	1.187.791.794	1.703.694.002

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nias Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	Pagu DBH TA 2021	LO Belanja TA 2020	Penyaluran DBH Berdasarkan PMK Nomor 57/PMK.07/2021	REALISASI yang Dapat Diakui	SELISIH yang belum Dapat Diakui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	1.637.610.113		1.737.020.650	1.062.789.149	700.114.065
SDE	7.632.955.665	-	4.067.611.647	3.001.011.705	-
PPh Pasal 21	5.647.341.665	-	2.996.630.102	1.966.711.295	-
PPh Pasal 25/29	1.971.614.000	-	306.487.901	1.565.426.901	-
PBB	1.014.413.111	-	471.861.200	1.019.417.863	69.210.182
Bagi Hasil	1.961.955.993		925.238.700	1.036.779.293	-
Bagian Daerah Migas	1.307.28.211		180.625.103	-	64.930.789
Bagian Daerah Dan Migas	-				
Bagian Daerah Pajak Lainnya					
Bagian Daerah Perkebunan	11.076.811		19.597.561	1.449.111	
Bagian Daerah Perikanan				-	
Bagian Daerah Kehutanan	310.089.107		5.001.397	308.19.727	-
Bagian Pertambangan Migas	5.725.206		9.713.050		2.317.394
Bagian Pertambangan Non Migas	-	-			
Bagian Pertambangan Panas Bumi		-	-		
Bagian Pertambangan Batubara	1.030.811		762.050	85.317	-
Bagian Pajak Lainnya				-	
Bagian Pertambangan Bahan Tambang	7.138.947		753.670	6.994.617	-
PDN	1.025.760.701	-	1.091.747.917	109.303.534	
SDA	310.149.745	1.136.206	181.772.650	93.184.05	8.010.041
Migas		10.001.206	1.667.450	-	210.171.810
Pajak Bumi		10.001.074	90.000	-	34.783.974
Minerba		127.132	30.000	-	175.142
Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam	-	-			
Kehutanan	-	84.997.961	1.760.720		87.284.681
Cukai Hasil Tembakau		1.136.206	1.820		2.720.280
Cukai Hasil Hutan Lainnya		-	-		
Perikanan	201.791	152.010	11.023	667.43	197.965
Kehutanan	201.791	-		667.40	-
Migas		152.010	11.023		197.965
Sumber Daya	97.133.770	-	7.026.000	12.750.020	-
Sumber Produksi	-	-	-		
Provisi	8.771.481	-	1.038.650	1.960.630	
Provisi Reboisasi	21.110.089		-	3.916.030	
Kompensasi	139.265.300		10.620.721	7.710.000	-
DR	-				-
IHPH			-		
DSHT	19.265.000		30.840.726	5.416.000	
Perikanan	100.183.980		21.881.850	-	57.954.000
Jumlah Total	1.934.971.882	1.136.206	1.120.010.217	1.077.171.203	936.676.825

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kudus

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)	Sisa LB TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			15.081.880.424	3.871.376.868	3.210.454.[illegible]
PPh		-	15.052.270.924	3.871.376.[illegible]	3.200.797.[illegible]
PPh Pasal 21		-			-
PPh Pasal 25/29		-	15.052.270.921	3.871.376.[illegible]	[illegible].200.797.[illegible]
PBB		-	23.565.899		20.576.[illegible]
Bagi Rata		-	-		
Bagian Daerah Migas			-	-	
Bagian Daerah Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-			-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-		26.150.170		2[illegible]
Bagian Daerah Perhutanan		-			-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-		-
Biaya Pemungutan Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-			-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-			
Biaya Pemungutan Perkebunan		-	[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Perhutanan			-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya				-	
CHT	-			-	-
SDA	-	9.851.648	[illegible]		[illegible]
Migas		-	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15%		-	[illegible]	-	91.960.[illegible]
Minyak Bumi 0,5%			[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 30%	-				-
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Minerba		-	-		
Iuran Tetap		-	-	-	
Royalti			-	-	
Panas Bumi				-	-
Iuran Produksi	-			-	
Iuran Tetap	-	-		-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-		
Kehutanan		9.851.648	-	-	
IIUPH				-	-
PSDH	-	-			-
DR		[illegible]	-		
Perikanan		-	-		
Grand Total		9.851.648	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kudus (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB s.d. TA 2020	LB s.d. TA 2020	Penyaluran KB DBH Sampai dengan TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]		2.551.434.105	[illegible]	-
PBB	5.594.284.770	-	[illegible]	1.845.104.452	85.743.757
Bagi Rata	1.591.533.438	-	265.999.707	1.720.379.295	
Bagian Daerah Migas	103.213.774	-	165.679.705		62.232.925
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	
Bagian Daerah Perhutanan			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	2.257.053		[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Perikanan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	273.770.007	-	[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi					-
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Perhutanan		-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	286.300	[illegible]	
CHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	270.465.641
Migas	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		703.742	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	
Gas Bumi 30%		[illegible]	709.720	-	65.597.550
Gas Bumi 0,5%		[illegible]	11.400	-	1.426.584
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Minerba	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Iuran Tetap	-	-	-		
Royalti		[illegible]	45.925	-	[illegible]
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Iuran Produksi			-	-	-
Iuran Tetap	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Setoran Bagian Pemerintah	[illegible]	-		[illegible]	
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
DR		-	-	-	
IIUPH				-	-
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Anggidana

(dalam rupiah)

Uraian	PBH Tahun 2020	PBH Tahun 2019	Penyaluran Tahun 2021 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyaluran Tahun 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Kurang/(Lebih) Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PPh 21	-	-	2.497.406.287	768.745.756	1.728.660.531
PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	2.497.406.287	768.745.756	1.728.660.531
PPh Pasal 21			-	-	-
PPh Pasal 25/29 OP	-	-	2.497.406.287	768.745.756	1.728.660.531
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Hasil	-	-			
Bagian Daerah Migas					
Dana Alokasi Non Migas					
Dana Alokasi Khusus Fisik			-	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi Tahun Lalu	-				
Dana Kompensasi Migas					
Dana Kompensasi Dana Alokasi Khusus			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-	-			
Dana Kompensasi Belum Salur					-
DLH			-	-	-
PHT	-	9.051.036	35.252.102	-	35.252.102
Migas	-	-	35.252.102	-	35.252.102
Migas Bagi Rata (5%)	-	-	27.945.227	-	27.945.227
Migas Bagi Daerah (5%)			6.306.875		6.306.875
Migas Bagi Daerah dalam Kawasan Ekonomi Khusus				-	-
Gas Bumi 70%			-	-	-
Gas Bumi 6,5%		-	-		
Gas Bumi Bagian Daerah 6,5%	-	-	-		
Minerba	-	-			
Iuran Tetap					
Royalti					
Pajak Lainnya				-	-
Jasa Produksi			-	-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-		
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-			
Pertanahan		9.051.036			
DR					-
PDLN	-	-	-	-	-
PDRI	-	9.051.036	-		
Tambahan	-				
Grand Total		9.051.036	2.532.658.389	768.745.756	1.763.912.633

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mayabumi

(Dalam ribuan)

URAIAN	Kurang Bayar DBH TA 2021	Lebih Bayar DBH TA 2020	Penyaluran Kurang Bayar DBH Berdasarkan PMK 226/PMK.07/2017 jo. PMK 57/PMK.07/2021	Kurang Bayar DBH TA 2020 yang belum disalurkan	Penyaluran Lebih Bayar DBH TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
PPh Pasal 21	9.998.578.770	-	4.990.395.402	5.008.183.368	9.998.578.770
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	6.998.125.207	-	3.178.615.200	3.819.509.807	-
PPh Pasal 25/29 Badan	4.603.961.759	-	2.553.024.000	2.050.937.759	-
PPh Pasal 26	631.661.578	-	251.040.197	380.621.381	-
PPh Pasal 4 ayat (2)	5.651.777.917	-	2.621.230.000	3.030.547.917	49.333.515
PPh Pasal 15	359.107.058	-	260.099.107	98.907.951	-
PPh Pasal 22 Impor	193.629.210	-	180.316.512	-	193.629.210
PPh Pasal 22 Migas	-	-	-	-	-
PPh Pasal 22 Industri Semen	-	-	-	-	-
PPh Pasal 22 Industri Pupuk	5.782.766	-	88.778.207	10.004.559	-
PPh Pasal 23	36.873.768	-	9.198.207	27.675.561	-
PPh Pasal 26 Pasal 26 ayat (5) huruf a	215.209.007	-	9.621.000	205.588.007	-
PPh Pasal 4 ayat (2) Migas	2.723.127	-	4.035.700	-	2.723.127
PPh Pasal 4 ayat (2) Panas Bumi	-	-	-	-	-
PPh Pasal 4 ayat (2) Usaha Hulu Migas	-	-	-	-	-
PPh Pasal 4 ayat (2) Sektor Perbankan	5.780.257	-	2.121.000	3.659.257	-
PPh Pasal 4 ayat (2) Sektor Asuransi	1.102.082	-	376.432	725.650	-
PPh Pasal 4 ayat (2) Sektor Lainnya	7.161.317	-	216.800	6.944.517	-
PPh 21	1.396.167.569	-	689.670.108	706.497.461	-
PPh 25/29	193.908.233	1.156.956	350.196.736	159.712.497	35.063.964
Migas	-	13.309.230	1.057.130	-	13.971.656
Minyak Bumi (50%)	-	23.810.674	916.500	-	24.727.174
Minyak Bumi (15%)	-	720.372	20.600	-	821.472
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Pertama	-	-	-	-	-
Gas Bumi (50%)	-	34.573.651	736.700	-	35.310.351
Gas Bumi (15%)	-	1.156.956	33.030	-	1.189.986
Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertama	-	-	-	-	-
PPh Pasal 26	4.557.834	102.030	63.030	4.593.834	102.030
Tambahan	4.038.426	-	-	4.038.426	-
Migas	-	102.030	45.405	-	102.030
Pasal Pasal	30.072.309	-	3.087.150	30.981.159	-
Bunga Obligasi	-	-	-	-	-
Bunga Deposito	23.054.430	-	3.087.150	19.967.280	-
Bunga Obligasi Pemerintah	10.017.879			10.017.879	
Pasal Lainnya	7.018.059		61.357.215	78.660.903	
PPh Pasal 26	-	-	-	-	-
PPh Pasal 26	-	-	-	-	-
PPh Pasal 26	40.104.280		31.850.270	10.258.260	-
PPh Pasal 26	130.148.360		216.401.050	-	157.004.200
PPh Pasal 26 Total	10.000.000.000	13.568.290	6.260.000.000	5.548.577.778	60.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pati

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2018	TA 2019	Realisasi TA 2020 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Perkiraan TA 2021 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Selisih Kurang/Lebih (PMK No. 33/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
PPh			995,787,286	212,457,554	573,138,132
PPh			116,170,191	148,420,701	-
50% Pasal 21					
50% Pasal 25/29			279,776,105	116,170,010	
PBB			720,995,152	260,097,302	460,897,850
Cukai Hasil Tembakau					
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Non Migas			97,487	97,487	-
Bagian Daerah Dana Hutan					
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			727,218,713	313,220,763	413,997,950
Bagian Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara					
Bagian Daerah Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Bagian Daerah Penerimaan Negara Bukan Pajak Kehutanan					
Bagian Daerah Penerimaan Negara Bukan Pajak Perikanan			1,000		1,000
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pertambangan Minyak Bumi			93,254,910		93,254,910
Bagian Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi					
PPh					
BPHTB		23,782,703	95,052,170		95,052,170
Cukai			95,052,170		95,052,170
Bagian Dari Cukai			91,954,860		91,954,860
Bagian Dari Cukai			3,097,310		3,097,310
Bagian Dari Cukai Hasil Tembakau					
Dari Cukai					
Dari Cukai					
Dari Cukai					
Minerba					
Landasan					
Royalti					
Panas Bumi					
Dari Produksi					
Dari Hasil					
Bagian dari Hasil Pengelolaan					
Kehutanan		97,382,773			
PSDH					
Provisi					
DBHDR		97,382,773			
Perikanan					
Pajak Daerah		97,382,773	1,825,416,230	417,197,554	5,261,032

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Keb. Padi

(dalam rupiah)

Uraian	Pagu DBH TA 2020	DBH yang Telah Disalurkan TA 2020	Perkiraan Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran TA 2020 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Lebih Bayar DBH TA 2020 yang Perlu Diperhitungkan	Kurang Bayar DBH TA 2020 yang Belum Diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(4)-(5)
Total	12.119.503.153		5.987.857.990	6.094.339.439	(106.481.449)
PPh	6.979.897.327		3.611.455.916	3.979.414.735	(367.958.819)
PPh Pasal 21	5.106.313.211		3.317.703.707	1.840.187.815	1.477.515.892
PPh Pasal 25/29	994.707.165		293.751.809	1.073.715.205	(779.963.396)
PPN	4.513.262.103		2.376.401.902	2.139.260.469	237.141.433
Cukai Hasil Tembakau	1.991.037.058		265.000.402	1.726.036.656	(1.461.036.254)
Pajak Alat Berat	147.260.004		215.501.201	-	(215.501.201)
Pajak Rokok	1.101.737		699.202	2.434.264	(1.735.062)
Pajak Air Permukaan				-	-
Pajak Hotel	480.155.784		625.422.000	211.772.736	413.649.264
Pajak Restoran	1.251.455.556		2.253.819.000	963.274.308	1.290.544.692
Pajak Hiburan	256.023.007		154.111.200	154.111.207	(7)
Pajak Reklame	2.470.700		5.776.000	-	5.776.000
Pajak Penerangan Jalan	2.000.721		28.800	2.371.001	(2.342.201)
Pajak Pengambilan Mineral Non Logam dan Batuan					
Pajak Parkir	70.674.65		94.444.800	9.928.452	84.516.348
Pajak Penerangan Jalan Perdesaan	57.017.000		17.350.800	44.598.300	(27.247.500)
Pajak Air Permukaan Daerah Lainnya	6.997.847		306.420	6.806.249	(6.499.829)
CHT	1.016.270.722		772.300.000	622.853.328	149.446.672
DAK	947.674.500	1.506.291	1.211.400.000	1.064.581.270	146.818.730
Migas	-	10.694.209	1.162.130		1.162.130
Migas Jenis 15%	-	35.116.652	9.450.000	-	9.450.000
Migas Jenis 0,5%		703.842	70.620	-	70.620
Migas Tambahan Bagian Daerah Penghasil				-	-
Pph Pasal 26		8.108.201	428.700	-	428.700
Pph Pasal 4(2)		2.127.166	11.830		11.830
Pph Pasal 21 Bangunan Di Laut	-				
Kehutanan	-	(57.748)	46.970		46.970
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan		152.040	45.025	-	45.025
Pertambangan Umum	22.329.777		4.025.230	18.402.800	-
Pertambangan Minyak					
Pertambangan Gas	5.117.461		4.022.000	1.095.461	
Pertambangan Panas Bumi	16.719.583	-		16.719.583	
Kehutanan	2.612.729	-	151.278.030	34.262.430	
PPh			-	-	-
PPN/PPnBM					-
PBB	346.587.451	-	131.760.000	131.760.000	
Perikanan	170.189.961	-	3.583.000		127.042.020
Grand Total	12.806.178.253	77.658.274	6.042.948.87	6.881.213.875	(838.264.995)

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 202

Kab. Tolikalongan

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 03/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Bisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pusat	-	-	105.207.696	396.383.826	611.743.437
PPh			27.377.550	27.377.550	-
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 22/23			27.377.550	27.377.550	-
PBB			58.169.179	58.169.179	519.810.197
Reg. Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Pasca Bunga					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	62.401.777	62.401.777	171.870.238
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Lebih Pembayaran Migas	-	-	-	-	-
Lebih Pembayaran Non Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Lain					
Bagian Pemerintah Pusat Lain					
Lebih Pembayaran Pertambangan	-	-	28.147.269	-	148.940.042
Lebih Pembayaran Sektor Lainnya			-	-	-
CHT					
PDA		1.166.921	30.702.150		8.408.200
Migas	-	-	30.702.150		8.408.200
Minyak Bumi 15%	-	-	9.185.360		31.999.655
Gas Bumi 6%	-	-	5.266.260	-	3.056.750
Kelebihan Bagi Hasil Migas Tahun				-	-
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi Kelebihan Bagian Daerah					
Non Migas	-	-	-		
Kehutanan	-	-	-	-	-
Panas Bumi				-	-
Iuran Eksploitasi					-
Pertambangan					
Reboisasi Bagian Pemerintah	-	-			
Kehutanan	-	1.166.921	-	-	-
DR			-	-	-
PSDH					
DBHP	-	1.166.921			
Perikanan	-	-	-	-	
Jumlah Total	-	1.166.921	135.909.846	396.383.826	611.743.437

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Seribu (dalam rupiah)

Jenis DBH	PMK 226/PMK.07/2020	PMK 222/PMK.07/2020	Anggaran DBH Desember TA 2020 (PMK 226/PMK.07/2020)	DBH TA 2021 yang sudah dialokasikan	DBH TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(8)	(11)
Total	3,995,842,620	-	4,263,818,604	5,791,101,943	101,539,936
PPh	4,172,171,624	-	3,773,815,702	1,513,381,880	-
PPh Pasal 21	3,787,333,020	-	3,035,576,500	901,244,000	-
PPh Pasal 25/29	731,391,062	-	188,175,230	599,137,067	-
PBB	4,181,267,032	-	1,021,161,300	3,321,161,147	107,610,995
Hasil Bea	101,969,938	-	256,969,107	1,426,210,208	-
Bagian Daerah Migas	83,773,020	-	14,551,703	-	12,080,220
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Pajak Tanah dan Bangunan Migas	4,744,133	-	4,109,303	634,830	-
Pajak Tanah dan Bangunan	421,947,019	-	426,267,750	-	61,530,730
Bagian Pemerintah Pusat	3,575,376,836	-	291,913,800	1,714,326,112	-
Bagian Daerah Sektor Tahun ini	103,313,127	-	97,105,350	18,951,000	-
Bagian Pemerintah Migas	6,017,268	-	4,734,991	-	1,617,212
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Tahun Lalu	14,181	-	14,181	12,756	-
Bagian Pemerintah Daerah Migas	6,017,65	-	12,700,110	-	1,930,245
Bagian Pemerintah Non Migas	44,734,228	-	15,105,950	60,777,126	-
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya	3,605,877	-	973,020	631,247	-
PDPT	726,987,077	-	298,134,017	920,926,969	-
BPHTB	380,537,510	211,030,304	349,511,210	311,979,814	107,443,941
Migas	-	10,191,306	1,991,470	-	10,577,674
Bagian pemerintah Pusat	-	10,616,874	4,000,000	-	21,702,077
Bagian Daerah Migas	-	797,540	241,630	-	621,742
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	24,577,157	708,730	-	26,537,957
Cukai Hasil Tembakau	-	1,111,764	1,430	-	426,990
Cukai Hasil Tembakau Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Minerba	-	4,412,012	50,929	-	61,905
Bagian Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah	-	57,340	45,924	-	82,000
Panas Bumi	10,192,243	-	4,078,570	36,164,250	-
Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah	5,112,121	-	1,024,640	1,683,421	-
Kekurangan Bagian DBH Tahun Lalu	34,681,462			34,681,462	
Kehutanan	27,177,953	-	19,309,974	48,198,741	
PSDH	-	-	-	-	-
DR				-	-
Bagian Pusat	21,127,953		13,284,274	48,198,741	-
Bagian Daerah	50,186,941	-	32,594,230		13,240,020
Grand Total	10,032,102,749	211,226,906	4,650,410,645	8,649,726,910	278,211,116

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pemalang

(Rupiah)

Uraian	KB TA 2019	KB TA 2020	Alokasi PMK No. 73/PMK.07/2021	Penyesuaian LB TA 2019 KEP-[illegible]/PK/2021	Alokasi KEP-[illegible]/PK/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak			648.[illegible].417	208.[illegible].416	856.687.833
PPh			300.[illegible].721	92.[illegible].000	392.[illegible].721
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29	-	-	300.[illegible].721	92.[illegible].000	392.[illegible].721
PBB	-	-	293.[illegible].676	91.[illegible].865	385.[illegible].541
Reg. Pem.	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kaya				-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Pemerintah Migas			[illegible].107		[illegible].107
Bagian Pemerintah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil	-	-	270.[illegible].180	7.[illegible].547	289.[illegible].727
Alokasi Lebih Salur Migas		-	-	-	-
Jatah Pemanfaatan Migas					
Jatah Pemanfaatan Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil			177.[illegible]	9.[illegible]	[illegible].[illegible]
Alokasi Lebih Salur Migas		-	-	-	-
Jatah Pemanfaatan Migas			[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Jatah Pemanfaatan Non Migas					
CHT					
DBH	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Migas	-	-	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	-	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 3,1%			[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja					
Gas Bumi 15%					
Gas Bumi 3,1%	-				
Gas Bumi dari Wilayah Kerja	-	-	-	-	
Panas Bumi	-	-	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti			[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Panas Bumi			[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Panas Bumi					
Pertambangan	-	-	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-	-		-
Kehutanan		[illegible].[illegible].[illegible]			
IHH					
PSDH	-	[illegible].[illegible].[illegible]	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah Total		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pemalang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	DBH Tahun Ini (Tahun 2021)	DBH Tahun Lalu (Tahun 2020)	Penyaluran KU DBH (Sesuai PMK 226/PMK.07/2021)	KU DBH 2020 yang belum disalurkan	KU DBH 2020 yang akan disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)
PPh	18.734.923.412		6.735.541.301	6.299.434.097	99.513.615
PPh Migas	1.328.498.424		478.001.703	2.784.074.038	-
PPh Pasal 21	1.251.617.207		11.707.662.206	1.944.107.307	-
PPh Pasal 25/29	972.761.918		221.170.162	670.874.269	-
PBB	14.561.206.816		3.326.911.300	14.111.178.851	99.513.615
BPHTB	1.961.049.926		2.351.368.700	1.710.215.200	-
Cukai Hasil Tembakau	159.823.013	-	1.105.163	-	158.717.850
Cukai Hasil Hasil Migas		-	-	-	-
Cukai Hasil Hasil Lainnya			-	-	-
Pajak Penghasilan Perorangan	1.120.087.350		127.320.030	749.044.017	-
Pajak Penghasilan Perusahaan	760.831.406		120.135.000	640.696.406	-
Pajak Penghasilan Perseroan Terbatas	3.363.565.007	-	1.021.320	3.362.543.687	-
Pajak Penghasilan Migas	4.558.120	-	2.058.000	-	2.500.120
Pajak Penghasilan Pasal Lainnya				-	-
Pajak Penghasilan Perusahaan Pasal Lainnya					
Pajak Penghasilan Perseroan Terbatas	56.590.131		23.072.230	33.517.901	
Pajak Penghasilan Perusahaan Pasal Lainnya	90.145.842	-	59.603.000	30.542.842	
Pajak Penghasilan Pasal Lainnya	7.077.047	-	367.500	6.709.547	-
PPnBM	3.913.102		391.054.001	38.316.161	-
PPN	822.109.102	1.177.300	200.000.730	1.010.113.172	277.564.002
Migas	-	1.176.420	1.177.120		132.971.000
Migas Pasal 15	-	880.000	916.500		47.163.000
Migas Pasal 22	-	296.842	50.820		84.408
Migas Pasal Lainnya			-	-	-
Bea Materai				-	85.389.05
Bea Meterai		1.420.752	11.000		1.409.752
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Pasal 4	5.305.401	152.040	2.000	2.900.121	157.441
Pasal 21	5.305.401	-	-	2.905.401	-
Pasal 26	-	152.040	2.000	-	157.440
Cukai Hasil Tembakau	10.716.089	970.007	4.101.276	10.716.089	7.970.007
Cukai Hasil Hasil					-
Cukai Hasil Hasil Lainnya		970.007	6.101.276		7.970.007
Pajak Penghasilan Perseroan Terbatas	10.716.089	-		10.716.089	
Pajak Penghasilan Perusahaan Pasal Lainnya	152.958.939	-	154.516.100	450.716.939	
PPnBM			-	-	-
PPN					-
PPnBM	80.599.202	-	154.774.105	138.219.102	
PPN Migas	132.187.961	-	4.168.000.000		2.017.812.039
Grand Total	17.537.879.001	1.073.328	5.349.416.150	6.641.918.145	164.965.939

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Donggalinapu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KETA 2018	KETA 2019	Kurang Bayar (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Pengalokasian Lebih Bayar (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa Kurang Bayar (PMK No. 8/PMK.07/2021)
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)
Pajak	-	-	999.995.403	142.856.901	857.138.502
Jumlah	-	-	999.995.403	142.856.901	857.138.502
Pajak Rokok			-	-	-
50% Pajak Rokok			999.995.403	142.856.901	857.138.502
DBH					-
Migas					-
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Penerima Alokasi Lainnya	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat Penerimaan Migas					-
Bagian Pemerintah Pusat Penerimaan Non Migas					-
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Migas	-				
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Non Migas					-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Non Migas					-
Bagian Pemerintah Pusat Penerimaan Lainnya	-				
Bagian Pemerintah Daerah Penerimaan Lainnya		-			
PPh					-
PBB	-	18.179.489	9.003.500	-	95.392.839
Minyak			9.003.500	-	95.392.839
Bagian Daerah Penghasil	-		81.924.867		81.924.867
Bagian Daerah Lainnya	-	-	3.076.300		3.076.300
Bagian Daerah Penghasil dan Daerah Lainnya Provinsi	-	-	-		-
Gas Alam	-	-	-		-
Gas Alam (Migas)					-
Gas Alam Bagian Pemerintah Pusat					-
Pertambangan					-
Kehutanan	-	-			-
Iuran Hasil Hutan					-
Dana Reboisasi	-	-			-
Pertambangan Umum					-
Iuran Tetap					-
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	10.179.489			-
Perikanan					-
Grand Total	-	18.179.489	999.995.403	142.856.901	857.138.502

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Purbalingga

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran DBH/DBF Januari s.d. Juni 2021 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	KB TA 2021 yang telah diselesaikan	LB TA 2020 yang telah diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	6.248.286.226	-	2.221.480.034	1.636.704.960	1.811.332
PPh	4.830.408.794	-	581.868.630	2.561.269.934	-
PPh Pasal 21	28.021.931	-	207.414.630	197.607.110	-
PPh Pasal 25/29	799.928.363	-	203.474.000	544.902.825	-
PPh	3.970.198.701		366.001.000	1.818.759.997	5.617.703
PPN Dalam Negeri	1.871.179.018		265.000.000	1.781.177.036	
Bea Meterai	28.098.150		1.611.000		1.260.371
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
Pajak Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Kabupaten/Kota	91.861.150	-	1.879.200	38.999.999	-
Retribusi Daerah Provinsi					
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	231.491.007		5.001.300	200.094.707	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara	3.961.250		3.189.000		250.000
Bagian Pemerintah Pusat dari Pajak	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat dari Penerimaan SDA	-	-	-	-	-
Iuran Pengusahaan Perikanan	6.870.750		4.595.700	2.170.437	
Iuran Eksploitasi dan Iuran Tetap					
Bagian Pemerintah Pusat dari Cukai Hasil Tembakau	1.193.647		330.000	3.559.947	
PNBP	775.471.736	-	356.151.934	2.966.791	-
DAU	300.973.824	1.210.535.700	376.209.430	83.520.187	277.070.474
Migas		1.000.024.000	1.007.715		1.271.000
Minyak Bumi 15%		23.510.001	91.000		24.780.001
Minyak Bumi 0,5%		799.974	39.990		826.174
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Daerah	-		-	-	
Gas Bumi 30%	-	5.878.95	706.700	-	11.367.65
Gas Bumi 0,5%	-	1.414.796	11.901	-	1.426.681
Bea Masuk Barang Impor	-		-	-	-
Mineral	2.007.074	13.040	45.923	2.007.077	197.065
Batubara	2.007.074			2.007.074	
Panas Bumi		13.040	45.923		197.065
Pajak Tidak Langsung	5.710.000	976.000	6.568.967	15.710.000	1.455.000
Bea Masuk	-	-	-	-	-
Bea Keluar	-	976.000	6.568.967	-	2.454.000
Pendapatan Lainnya	15.710.000			15.710.000	
Keseluruhan	331.163.000		10.305.172	99.791.000	
DR					
BHPB	-		-	-	-
PPDB	127.718.230		63.211.173	37.724.073	-
Pendidikan	19.179.000		310.861.000		121.000.000
Grand Total	8.253.119.000	1.210.535.700	4.052.808.700	4.365.731.000	201.270.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Kewenangan

(Dalam Rupiah)

[illegible]	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019	PENYALURAN TA 2021 (PMK No. 85/PMK.07/2021)	Penyesuaian TA 2021 (PMK No. 7/PMK.07/2021)	Total PENYALURAN TA 2021 (PMK No. 81/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
PBB P2			775.291.532	25.213.123.520	25.988.415.052
PPh	-	-	775.291.532	25.748.580	801.040.112
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	775.291.532	25.748.580	801.040.112
PBB			-	-	-
Cagar Biosfer					-
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Provinsi	-	-			
Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
Bagian Daerah Penerbangan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas	-				
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT	-	-	-	-	
BEA	-	12.960.015	1.646.150	-	95.362.150
Sektor			1.000.150		95.362.150
Minyak Bumi (MB)			81.062.850		81.062.850
Minyak Bumi (MBS)			3.000.000		3.000.000
Minyak Bumi Produksi Baru/Lama	-	-	-		
Gas Bumi (GB)	-	-	-	-	
Gas Bumi (GBS)	-	-	-		
Gas Bumi Selain Kawasan Khusus		-	-	-	-
Mineral					-
Tambang					
Batu					
Panas Bumi	-	-			
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran tetap			-	-	-
Royalti Dalam Negeri					-
Kehutanan		2.078.010			
PSDH	-	-			
DR	-	-	-	-	-
PHTL		10.050.015			-
Perikanan					
Cukai Hasil		2.078.010	1.000.150	200.000.000	300.362.150

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Purworejo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Dialokasi TA 2020	LB Dialokasi TA 2020	Penyaluran 2021 s.d Semester I TA 2020 (PMK No. .../PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	6.743.441.415		6.521.158.884	4.223.033.191	3.131.274
PPh	4.346.433.303		2.579.256.399	1.706.766.107	-
PPh Pasal 21	3.35[illegible]	-	2.532.758.330	989.571.[illegible]	
PPh Pasal 25/29	918.420.[illegible]	-	96.2[illegible]	716.197.482	
PBB	2.910.777.308	-	633.054.530	2.595.020.972	3.131.297
Bagi Rata	1.091.270.958		365.300.730	726.271.258	
Bagian Daerah Migas	159.054.[illegible]		142.054.000	-	4.904.849
Bagian Daerah Non Migas	-				-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			-
Bagian Daerah Perkebunan	540.514.286	-	201.578.530	338.9[illegible]	
Bagian Daerah Perhutanan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	216.880.707		8.604.200	208.2[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	6.145.765		[illegible]	-	3.274.835
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	11.020.[illegible]		5.837.702	5.183.344	
Biaya Pemungutan Perhutanan				-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.158.947		266.560	6.892.387	-
CHT	540.[illegible]	-	313.107.559	213.022.[illegible]	-
SDA	331.272.189	111.056.926	383.[illegible].535	162.157.075	278.469.041
Migas		112.562.330	647.403	-	112.514.000
Minyak Bumi 15%		23.410.614	516.393	-	4.325.379
Minyak Bumi 0,5%		790.072	40.040	-	694.45[illegible]
Minyak Bumi Tambahan Otonomi Khusus	-				-
Gas Bumi 30%	-	84.873.9[illegible]	109.160		83.337.678
Gas Bumi 0,5%	-	1.414.729	11.860		1.120.589
Gas Bumi Tambahan Otonomi Khusus		-	-		
Minerba		150.000	45.205	-	107.561
Iuran Tetap				-	
Royalti		150.000	45.025	-	97.568
Panas Bumi	32.439.[illegible]		1.028.3[illegible]	16.400.2[illegible]	-
Iuran Produksi	-	-			-
Iuran Tetap	3.410.431	-	1.837.550	1.582.881	
Setoran Bagian Pemerintah	12.719.000		-	16.719.909	
Kehutanan	159.239.519		81.158.330	63.797.[illegible]	-
DR	-				-
IIUPH	-	-	-		
PSDH	144.835.559	-	81.481.560	63.797.999	
Perikanan	150.000.000		716.364.899	-	233.591.122
Grand Total	7.06[illegible].513.864	111.056.926	4.210.811.119	4.397.211.303	375.594.335

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lamp. Keputusan

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
Pajak [illegible]	-	-	3.064.571.343	1.383.529.198	1.681.042.145
PPh	-	-	750.406.578	-	750.406.578
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			750.406.578		750.406.578
PPN			2.314.164.765	1.383.529.198	930.635.567
Bagi Hasil					
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	708.161.835	1.424.797.855	-
Dana Alokasi Khusus Migas	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Pertambangan			1.207.142.107	192.745.401	814.396.706
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Bagian Pemerintah Pusat dari Setoran	-		-		
Bagi Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagi Pemerintah Non Migas		-	4.348.836	8.278.971	37.387.601
Bagi Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagi Pemerintah Pusat Lainnya			48.962.010		48.962.010
Bagi Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-		
Bagi Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
PPh				-	-
PPN		35.261.778	35.261.778		308.816.709
Migas			391.932.931		391.932.931
Migas Bagian DBH	-		129.207.570		129.207.570
Migas Bagian DAU	-	-	4.309.776	-	4.309.776
Migas Bagian Dana Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
Gas Bagian DBH		-	258.415.585	-	258.415.585
Gas Bagian DAU			7.035.304		7.035.304
Gas Bagi Hasil Lainnya					
Pungut			1.964.626		1.964.626
Denda	-	-	-		
Royalti	-	-	1.964.626		1.964.626
Pajak Lain	-	-	-	-	-
Bunga Pinjaman			-	-	-
Bunga Lainnya					
Pungutan Pajak Lainnya					
Pungutan	-	96.265.178	-		
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]					
Pajak	-	96.265.178			
Pajak Lainnya					
Jumlah	-	96.265.178	3.456.837.757	192.153.198	3.264.684.559

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Rembang (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan TA 2020 (PMK No. [illegible]/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	16.9[illegible]		[illegible]	1[illegible].[illegible].[illegible]	10.802
PPh	1[illegible]	-	[illegible].512.[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	4.383.[illegible]	-	2.385.[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	5.[illegible]	-	310.[illegible]	[illegible]	-
PBB	5.3[illegible]	-	1.070.441.[illegible]	4.300.024.[illegible]	43.[illegible]
Bagian Daerah [illegible]	1.[illegible]		[illegible]	1.[illegible]	-
Bagian Daerah [illegible]	17[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah [illegible]	2.[illegible]		[illegible]	1.[illegible]	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah [illegible]	834.[illegible]	-	617.[illegible]	2[illegible]	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT	3.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	19.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	20.[illegible]
Minyak Bumi 15%		18.[illegible]	[illegible]		19.[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi 0,5%	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Iuran Tetap	[illegible]			[illegible]	
Royalti		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	-	-	-		
Iuran Tetap	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Setoran Bagian Pemerintah	[illegible]			[illegible]	-
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DR	-				
IIUPH	-	-	-	-	
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Total	[illegible]	19.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Kementerian/Lembaga

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Tahun 2018	Tahun 2019	TA 2020 (PMK No. 226/PMK.07/2020)	Tahun 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2021)	Alokasi TA 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=(3)-(5))
Pajak	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	-	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible] Pasal 21	-	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible] Pasal 15/25	-	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-			
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					-
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]			[illegible]	[illegible]	-
[illegible]			[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					-
CHT	-	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-	-	-		
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]		
DR					
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	-	-			
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Semarang

(Dalam rupiah)

Uraian	PBH/PBB tahun 2020	Sektor tahun 2020	Penyaluran KB DBH Semester I Tahun 2021 (sesuai PMK 226/PMK.07/2020)	DBH 2020 yang telah disalurkan	DBH 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
Jumlah	37.752.808.131		9.619.305.892	13.620.042.924	10.093.960
PPh	9.111.528.014		4.611.195.202	3.966.131.979	-
PPh Pasal 21	1.505.670.812	-	4.158.525.301	3.546.795.252	-
PPh Pasal 25/29	3.205.856.346	-	452.669.901	419.336.848	-
PBB	7.525.047.647		1.747.354.700	6.826.039.204	55.745.823
Cukai Hasil Hasil	1.971.060.976		265.865.701	1.726.271.298	
Denda Daerah Pajak	91.424.112		71.117.040		53.010.028
Denda Daerah Pajak Lainnya					
Bunga Daerah Pajak Daerah Lainnya		-	-	-	-
Bunga Daerah Pajak Retribusi	218.775.277		101.935.250	6.452.279	-
Bunga Daerah Pajak Lainnya	4.730.076.000		809.809.230	4.106.372.788	
Bunga Daerah Sektor Lainnya	21.543.206.06		8.811.401	236.025.814	
Bunga Pemungutan Jasa	2.097.709		1.401.000		1.809.101
Bunga Pemungutan Dan Bagus	-	-	-	-	-
Bunga Pemungutan Bahan Pokok	-		-	-	-
Bunga Pemungutan Pajak Lainnya	6.897.777		5.616.000	271.170	
Bunga Pemungutan Pajak Lainnya	220.771.241		28.117.000	203.901.034	
Bunga Pemungutan Pajak Daerah	711.911.02		84.000	6.994.642	
DBH	986.435.896	-	7.411.601.56	10.772.541	-
DAU	978.10.647	11.136.205	42.562.073	97.646.328	89.191.264
Migas		110.00.926	1.827.228		12.871.858
Minerba Jenis DHA		23.811.077	916.500		21.142.077
Minerba Jenis DBH		192.812	30.630		82.732
Minerba Jenis Dalam Rangka Otsus					
Dana Reboisasi	-	84.999.451	722.721	-	81.587.561
Dana Reboisasi Otsus	-	1.5.3.782	1.850	-	1.201.920
Dana Reboisasi Otsus Rangka Otsus	-	-	-	-	-
PE (DBH)	4.893.277	172.343	15.021	2.373.407	10.0.0.4
Belanja Hibah	2.5.3.207			2.373.407	
Bonus		1.1.3.13	30.000		1.1.0.0
Dana Desa	20.0.2.119		61.612.726	16.1.7.909	2.1.1.369
Dana Otsus	-	-	-	-	-
Dana Otsus	5.631.131	-	38.642.725	-	5.7.1.735
Belanja Bagus Tambahan	10.211.787			12.1.1.080	-
Keuntungan	7.0.1.207		4.1.1.023	9.0.1.272	
DP					
Other	-	-	-	-	-
PBDH	25.70.207	-	46.313.021	5.1.6.272	-
Pelayanan	36.36.941		21.451.030		17.0.1.721
Jumlah Total	1.1.1.1.1.1.1	11.1.8.241	7.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gorontalo

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar	Lebih Bayar	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 63/PMK.07/2021)	Penyesuaian Alokasi Kurang Bayar DBH (KMK No. 9/KM.7/2021)	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2021 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak			302.078.297	(4.169.149)	297.909.148
PPh			302.078.297	(4.169.149)	297.909.148
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29			302.078.297	(4.169.149)	297.909.148
Bea					-
Bea Materai					-
Dipungut Daerah Asal					-
Dipungut Daerah Penghasil					-
Bagian Daerah Penghasil Migas					-
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					-
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan					-
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					-
Bagian Daerah Penghasil Perikanan					-
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Minerba					-
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi					-
Bagian Daerah Penghasil Kelautan dan Perikanan					-
Bagian Daerah Penghasil Perkebunan					-
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					-
Cukai					-
DBH		15.427.205	95.000.130		79.572.925
Migas			95.000.130		95.000.130
Penerimaan Negara (15%)			0		0
Penerimaan Negara (0,5%)			0		0
Migas Dari Wilayah Tertentu					-
Dana Bagi Hasil (DBH)					-
Dana Bagi Hasil (0,5%)					-
Dana Otonomi Khusus Migas					-
Minerba					-
Landrent					-
Royalti					-
Panas Bumi					-
Iuran Eksplorasi					-
Iuran Eksploitasi					-
Setoran Bagian Pemerintah					-
Kehutanan		15.427.205			-
PSDH					-
DR					-
IUPHH					-
PSDH		15.427.205			-
Perikanan					-
Grand Total		15.427.205	397.078.427	(4.169.149)	377.481.073

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sragen

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	PMK Nomor 81/PMK.07/2021	DIPA DBH TA 2021	Alokasi DBH TA 2021 Berdasarkan PMK Nomor 81/PMK.07/2021	PMK Nomor 205/PMK.07/2021	DIPA DBH TA 2021 yang Telah Disesuaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Rata	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagi Proporsi Luas	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Dialokasikan Kembali (Luas Wilayah)					
Dialokasikan Kembali (Luas Bumi Dalam)					
Bagian Daerah Penerimaan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Penghasil	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Penghasil Tambahan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan (1%)	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan (Luas Wilayah)					
Bagian Pemerintah Pusat (Sektor)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pemerintah Pusat (Sektor)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan (Sektor Lahan)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi (85%)	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi (0,5%)		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi (70%)		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi (0,5%)		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		-
Pertambangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minerba	[illegible]	-	-	[illegible]	-
Panas Bumi		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Pajak Daerah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Opsen Pajak					
Pertanian	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Kehutanan	[illegible]	-	-	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh 21					
PPh 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pungutan Lain	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sukoharjo

(Dalam rupiah)

JENIS DBH	KPPN Solo	KPPN Wonogiri	Lebih Bayar DBH TA 2021 (PMK No. 205/PMK.07/2021)	Penyesuaian Lebih Bayar DBH TA 2021 (PMK No. 61/PMK.07/2021)	Kurang Bayar DBH TA 2021 (PMK No. 61/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak	-	-	(54.135.975)	+59.670.350	5.534.375
PPh	-	-	(58.733.051)	+59.670.350	948.049.300
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29			(308.203.05	+59.670.350	5.859.101
PBB			45.902.977	-	3.847.277
BPHTB					-
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Pasal 21/26	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perhotelan			-	-	-
Bagian Daerah Restoran			13.231.117		47.537.177
Bagian Daerah Hiburan					
Bagian Pertambangan Migas	-	-	-		
Bagian Pertambangan Non Migas			-	-	
Bagian Pertambangan Panas Bumi					-
Bagian Pertambangan Perikanan			2.029.114		2.029.114
Bagian Pertambangan Kehutanan	-	-	-		
CHT	-	-	-	-	
DBH		2.000.000	95.000.000	-	95.000.000
Migas			95.000.000		95.000.000
Migas Bagian 15%			91.760.850		91.760.850
Migas Bagian 0,5%	-		3.239.150		3.239.150
Kawasan Pertambangan Migas Tertentu	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	
Gas Bumi 70%		-	-	-	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat				-	-
Minerba					-
Royalti					
Pajak	-				
Panas Bumi	-	-	-		
Iuran Produksi	-	-		-	
Royalti				-	-
Kehutanan					
Reboisasi	-	9.000.000			
PSDH	-	-	-		
DR	-	-	-	-	
IHPH		-	-	-	-
PSDH		9.000.241		-	-
Perikanan					
Pungutan Hasil Perikanan	-	9.659.759	3.249.977.373	+59.670.350	833.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bekasi

(Dalam rupiah)

Jenis DBH	DBH Tahun 2020	DBH Tahun 2020	Realisasi DBH Tahun 2020 Berdasarkan PMK No. 63/PMK.07/2021	DBH yang telah dialokasikan	DBH yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	1.209.940.718		1.211.290.077	1.191.150.715	19.741.362
PPh	10.778.519.197		10.778.696.629	10.758.954.851	
PPh Pasal 21	9.137.731.892		10.001.179.900	9.998.798.446	
PPh Pasal 25/29	1.036.156.156	-	777.516.729	759.956.405	-
BPHTB	4.768.791.871	-	4.768.791.871	4.732.965.825	49.202.85
Bagi Hasil	591.130.063	-	593.470.730	1.730.970.736	-
Bagian Daerah Provinsi	41.342.111		108.998.156		47.870.436
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Sektor Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	1.719.438		2.217.938	1.591.509	
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya	549.409.649	-	485.252.792	362.378.781	
Pajak Daerah Sektor Migas	213.999.067		8.674.800	206.084.707	
Biaya Pemungutan Migas	2.000.000		4.317.907		1.317.907
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Daerah			-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	147.974	-	88.101	59.874	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	10.499.953		6.415.301	11.025.106	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	1.153.617		281.803	1.699.427	
DAK	5.170.250		5.208.301	21.289.696	
DBH	3.215.135.126	212.065.396	3.427.200.522	89.219.640	3.337.980.882
Migas	-	110.634.736	110.634.736	-	110.634.736
15% Migas Pasal 31	-	23.810.674	23.810.674	-	23.810.674
3% Migas Pasal 32		196.472	196.472		196.472
Migas Pasal 4 ayat (2)					
PPh Pasal 21		84.626.890	84.626.890		84.626.890
PPh Pasal 25/29		1.111.729	1.111.729	-	1.111.729
PPh Pasal 4 ayat (2)	-	-	-	-	-
Minerba	-	50.640	45.905	-	50.640
Royalti	-	-	-	-	-
Sewa		50.640	45.905		50.640
Pajak Daerah	23.129.110		1.028.572	24.470.682	
Opsen Pajak Daerah					
Opsen MBLB	6.712.961	-	4.036.563	1.666.831	-
Opsen Pajak Rokok	16.416.149		-	6.716.781	
Kehutanan	990.997.833		30.268.822	78.611.316	
DR					
PSDH				-	-
Pajak	109.577.455	-	56.765.955	73.81 .536	-
Perikanan	109.770.080	-	210.781.350	-	157.434.020
Grand Total	14.011.177.023	311.030.206	12.212.079.307	8.201.494.412	4.009.582.797

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tegal

(Dalam Rupiah)

Jenis DBH	PB TA 2019	PB TA 2019	PB TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyaluran PB TA 2019 (KEP-[illegible]/KM.7/2021)	Sisa PB TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Jumlah			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 25/29			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kabupaten					
Bagian Daerah Kota Madya					
Imbalan Daerah Penghasil			[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-		-
Bagian Daerah Penghasil	-	-			
Lebih Pembayaran Migas					
Lebih Pembayaran PPh Migas					
Bagian Pemerintah Pusat			[illegible]		[illegible]
Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat					
Lebih Pembayaran Sektor Lain					
Cukai					
BPHTB		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Migas Bagi Hasil	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Migas Bagi Hasil			[illegible]		[illegible]
Migas Bagi Hasil dari Wilayah Operasi					
Cukai Hasil 70%					
Cukai Hasil 2,5%					
Cukai Hasil Tembakau [illegible]	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Pertambangan					
Pertambangan					
Pertambangan Minyak			[illegible]		[illegible]
Pertambangan Gas					
Pertambangan Panas Bumi	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Pertambangan Batubara	-	-	-	-	-
Kehutanan		[illegible]			
DR					
PSDH			-	-	-
PSDH	-	[illegible]	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tegal

(rupiah)

Uraian	Alokasi DBH Tahun 2020	Alokasi DBH Tahun 2021	Penyaluran DBH TA 2021 s.d. Bulan Ke-12 TA 2020 (PMK-39/PMK.07/2020)	Alokasi DBH Tahun 2021 setelah Penyesuaian	Kurang Bayar DBH Tahun 2021 yang Dialokasikan pada APBD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3)	(6)
Total	2.[illegible].950.120	1.678.330	1.[illegible].302.070	[illegible].732.070	732.330.720
PPh	5.[illegible].865.716	-	3.[illegible].730.132	2.[illegible].135.584	-
PPh Pasal 21	5.[illegible].345.936	-	3.[illegible].804.000	2.[illegible].541.936	-
PPh Pasal 21 (DJP)	804.520.420	-	747.[illegible].220	[illegible].[illegible].200	-
PBB	3.[illegible].[illegible].[illegible]	4.[illegible].[illegible]	2.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Cukai Hasil Tembakau	1.[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pungutan Daerah Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Pungutan Daerah Non Migas	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pungutan Daerah Pemda Sektor [illegible]	-	-	-	-	-
Pungutan Daerah Pertambangan	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pungutan Daerah Perikanan	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Pungutan Lainnya Sektor Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pungutan Lainnya Sektor Migas	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Pungutan Pemerintah Pusat Migas	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pungutan Pemerintah Pusat Minerba	-	-	-	-	-
Pungutan Pemerintah Pusat Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Pungutan Pemerintah Pusat Perikanan	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
PBHTB	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
BPHTB	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Migas	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Migas Dana [illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Migas Dana [illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Migas Dana Reboisasi	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Pajak Rokok	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Hibah	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Dana Reboisasi	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Dana Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Lainnya	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Dana Bagi Hasil Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Dana Bagi Hasil Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Dana Bagi Hasil Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode / Nama Daerah

(Rupiah)

URAIAN	KP TA 2019	KP TA 2019	PMK No. 03/PMK.07/2021	PMK No. 17/PMK.07/2019 (KMK No. 1/KMK.07/2021)	KP TA 2019 (KMK No. 3/KMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21					
Bagian Daerah Perhotelan					
Bagian Daerah Pajak Hiburan		-	-	-	-
Bagian Daerah Reklame	-	-	-	-	-
Bagi Pemungutan Migas	-				-
Bagi Pemungutan Non Migas					
Bagi Pemungutan Pasal 21					
Bagi Pemungutan Perhotelan					
Bagi Pemungutan Pajak Hiburan		-	-	-	-
Bagi Pemungutan Reklame	-	-	-	-	-
Lain					
SDA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (DR)	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (DMO)	-	-	-	-	-
Kontribusi Blok Migas Wilayah Khusus					
Gas Bumi (DR)					
Gas Bumi (DMO)					
Gas Bumi Dalam Kondisi Khusus					
Mineral	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi		-			
Iuran Produksi					
Iuran Tetap					
Setoran Tambahan Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	[illegible]	-	-	-
IHH					
DR/SDH					
PSDH	-	[illegible]	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Penanggung — Jenis Belanja

Uraian	Alokasi DBH TA 2021	Alokasi DBH TA 2020	Penyaluran DBH TA 2021 (PMK No. 81/PMK.07/2021)	Alokasi DBH yang Belum Disalurkan	Kurang/(Lebih) Bayar DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)=(3)-(5)
Pajak	17.201.211.170	-	5.030.797.582	6.142.887.587	-44.774.635
PPh	5.487.981.316	-	2.788.795.496	2.719.410.819	-
PPh Pasal 21	2.963.267.179		2.438.776.658	1.470.831.521	
PPh Pasal 21/26	1.524.713.137		349.018.838	911.000.299	
PPh	3.103.001.000		250.000.000	334.578.999	-44.774.635
Dana Bagi Hasil	1.096.000.000		250.000.000	1.020.000.000	
Kurang Salur/Lebih Bayar	12.000.001		18.795.000	-	-43.698.635
Kurang Salur/Lebih Bayar	-		-	-	-
Kurang Salur/Lebih Bayar	378.817		337.000	40.817	-
Kurang Salur/Lebih Bayar	471.008.996		250.000.000	221.008.996	-
Kurang Salur/Lebih Pengembalian	42.174.000		40.000.000	2.000.000	-
Kurang Salur/Lebih Bayar	211.000.000		5.000.000	206.000.000	-
Kurang Salur/Lebih Bayar	2.000.000		1.000.000	-	670.000
Kurang Salur/Lebih Bayar	-		-	-	-
Kurang Penerimaan Pajak	19.921		17.000	1.921	
Kurang Penerimaan Pertambangan	16.179.000		8.000.000	8.000.000	-
Kurang Penerimaan Pertambangan	10.000.001		4.000.000	10.000.001	-
Kurang Penerimaan Pertambangan	7.000.000		264.000	6.000.000	-
DBH	3.884.400.107	-	2.405.000.000	1.000.000.000	-
DAK	403.000.000	11.000.000	300.000.000	114.000.000	275.000.000
Pajak		10.000.000	1.000.000		12.000.000
Minyak Bumi 15%		20.000.000	5.000.000		25.000.000
Minyak Bumi 0,5%	-	700.000	50.000	-	650.000
Minyak Bumi Dalam Rangka PPh Pasal 22	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	84.000.000	700.000	-	85.000.000
Gas Bumi 0,5%	-	1.000.000	1.000	-	1.000.000
Gas Bumi Dalam Rangka PPh Pasal 22					
Mineral		500.000	10.000		490.000
Batubara		-	-		-
Panas Bumi		50.000	45.000	-	10.000
Pajak Bumi	-	-	5.000.000	-	-
Tanah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bea Perolehan	30.000.000		5.000.000	20.000.000	
Sebesar Bagian Pemerintah	10.000.000			10.000.000	
Kehutanan	11.000.000		10.000.000	20.000.000	-
IHT	-	-	-	-	-
Cukai	-				
PNBP	100.000.000		50.000.000	100.000.000	
Kehutanan	100.000.000		50.000.000		50.000.000
Grand Total	18.490.000.000	11.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	500.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Wonogiri

Satuan: rupiah

Jenis DBH	Kurang Bayar DBH TA 2021	Lebih Bayar DBH TA 2021	Alokasi DBH TA 2021 (PMK No. 03/PMK.07/2021)	Penyelesaian Kurang Bayar DBH TA 2021 (KEP-[illegible])	Sisa Lebih Bayar DBH TA 2021 (PMK No. [illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			891.222.715	470.228.126	420.794.589
PPh			878.024.127	457.029.538	420.994.589
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			518.032.127	329.128.038	188.904.089
PBB			262.167.711	262.167.711	
Bagi Rata					
Bagian Daerah Kaya					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penerimaan Umum					
Bagian Daerah Pemerataan			359.856.401	208.860.412	
Alokasi Daerah Penghasil Migas					
Alokasi Pemerataan Migas					
Bagi Rata Migas dan Non Migas					
Bagi Rata Migas dan Penerimaan Umum					
Bagi Rata Pemerataan					
Lebih Salur Pemerataan			11.095.233	1.539.731	
Lebih Salur Pemerataan Sektor Lainnya					
CHT			15.168.277	14.130.271	
DBH			137.032.971		
Migas			65.536.103		
Alokasi Dasar 15%			20.784.643		
Alokasi Dasar 0,5%			4.460.778		
Alokasi Dasar dengan Asumsi Lifting					
Cadangan 20%			224.101.262		
Cadangan 85%			1.201.187		
Cadangan Non Participating					
Hutan			6.196.368		
Sedimen			75.696.262		
Bunga			101.906		
Denda Bunga					
Lain-lain					
Selisih Bagi Hasil					
Kehutanan					
PSDH					
PSDH					
Perikanan					
Grand Total			1.028.255.084	470.228.126	

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Wonogiri

(dalam rupiah)

Jenis DBH	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak	9.[illegible].[illegible].650		4.273.392.[illegible]	5.[illegible].566.5[illegible]	63.696.[illegible]
PPh	5.5.5.[illegible].5[illegible]	-	3.[illegible].[illegible].360	2.[illegible].[illegible].9	-
PPh Pasal 21	[illegible].[illegible].[illegible]a	-	3.716.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].30-	-
PPh Pasal 25/29	755.4[illegible].516	-	[illegible].[illegible].360	[illegible].[illegible]	-
PPN	3.[illegible].[illegible].7[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]1	63.[illegible].[illegible]
Total Pajak	1.[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Cukai Daerah Hasil	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Cukai Daerah Hasil Bagi	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Penerimaan Rokok	-		-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Minuman	378.535.[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Penerimaan Hasil Tembakau					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	21.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Bagi Hasil Pungutan Rokok	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Bagi Hasil Pungutan Non Rokok	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Bagian Pungutan Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Pungutan Pajak Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Bagian Pungutan Retribusi Lainnya					
Bagian Pemerintahan Sektor Lainnya	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
DTT	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]4	[illegible].[illegible].[illegible]	-
DAU	41[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
DAK		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
DAK Fisik		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
DAK Nonfisik		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
DAK Nonfisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	-	-
Otsus	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Dana Otsus	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Dana Tambahan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Dana Keistimewaan	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Dana Otsus Tambahan Dana Bagi Hasil	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Keistimewaan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DID	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
DBH	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Keistimewa	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Jumlah Total	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Wonosobo

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar Tahun 2020	Lebih Bayar Tahun 2020	Penyaluran Tahun 2021 (PMK No. 34/PMK.07/2021)	Penyaluran Tahun 2021 (PMK No. 57/PMK.07/2021)	Penyaluran Tahun 2021 (PMK No. 112/PMK.07/2021)
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
PPh			10.948.302	9.170.221	20.118.523
PPh Pasal 21	-	-			
PPh Pasal 22/26	-	-	-	-	-
PBH	-	-	10.903.386	9.170.221	20.073.607
Dari Kas			-	-	-
Jumlah Lebih Salur					
Pajak Penghasilan Pasal 25					
Pajak Penghasilan Pasal 29	-	-			
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau			72.641.458	60.156.271	20.485.209
Cukai Hasil Tembakau Sektor Lainnya					-
Pajak Penghasilan Migas					
Pajak Penghasilan Pasal Migas	-	-			
Pajak Penghasilan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau Kesehatan			-	-	-
Pajak Penghasilan Perdagangan Berjangka			1.050.918		1.050.918
Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Jasa Konstruksi					
PPN	-	-	-	-	-
PPnBM			95.955.708	-	96.861.709
Migas			95.955.790	-	96.861.709
Minyak Bumi (Net)			91.955.570	-	91.955.570
Minyak Bumi (Gross)			3.000.220	-	3.906.139
Minyak Bumi Dalam Rangka Domestik					
Gas Bumi (Net)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (Gross)	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Migas Other	-	-	-	-	-
Materai			1.903.606	-	1.903.606
Lainnya					-
Pajak			1.903.606		1.903.606
Pajak Bumi					
Pajak Bumi (Net)	-	-			
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			-	-	-
Sebelum Daerah Pemekaran			-	-	-
Akumulasi		11.207.086			
PBB					
Migas	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	11.207.086			-
Pertambangan					-
Cukai Tembakau		11.207.086	172.541.309	69.326.492	241.867.801

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Wonosobo

Rincian rupiah

Jenis DBH	PMK 226/PMK.07/2020	PMK 222/PMK.07/2021	Penyaluran KB 2021 s.d. PMK 74/PMK.07/2021	Alokasi 2020 yang belum disalurkan	KB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	11.257.410.167		4.695.078.648	6.710.242.519	50.835.668
Cukai	7.018.394.137		2.166.187.430	3.441.031.301	-
PPh Pasal 21	2.092.014.630		2.271.213.530	3.821.100.000	
PPh Pasal 25/29	617.381.155		174.078.000	619.381.155	
PBB	26.307.605		1.720.013.778	3.269.111.968	9.938.582
BPHTB	191.695.109	-	264.899.230	1.120.270.258	
Sumber Daya Alam Migas	73.130.799	-	182.878.530	-	5.130.174
Sumber Daya Alam Non Migas			-	-	-
Pajak Penerangan Jalan Umum	1.011.052.121		274.470.000	737.581.121	-
Pajak Penerangan Jalan Umum	650.636.211		264.016.134	386.620.077	
Pajak Rokok	617.647.742		60.152.730	557.494.012	
Pajak Rokok (Sebelum Penyesuaian)	513.606.107	-	8.424.230	705.182.877	
Dana Perkebunan Kawasan	2.772.311	-	2.497.500	-	707.380
Dana Perkebunan Non Migas					-
Dana Perkebunan Pajak Rokok	85.041.635		21.260.000	63.781.635	
Dana Perkebunan Pajak Rokok	98.984.384	-	11.050.000	87.934.384	
Dana Perkebunan Pajak Rokok	17.275.257	-	9.736.500	7.277.631	-
Dana Perkebunan Sektor Lainnya	7.146.617	-	1.749.000	5.699.617	-
DBH	1.368.824.203		976.730.142	391.914.478	-
DAU	939.114.914	1.110.950.250	592.111.000	261.120.000	477.474.164
Migas	-	1.110.950.250	2.057.500		1.108.971.950
Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	-	53.870.674	516.000	-	24.792.914
Kehutanan	-	773.840	37.500	-	94.440
Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan			-		-
Dana Reboisasi	-	87.474.031	705.500		83.397.081
Dana Reboisasi		17.477.789	11.000		1.466.789
Dana Reboisasi Sebelum Penyesuaian					
Minerba	-	153.040	45.000		15.040
Panas Bumi	-	-	-	-	
Perikanan	-	153.040	45.000	-	153.040
Dana Desa	103.353.774		4.029.000	103.557.784	-
Insentif Fiskal					
Dana Otsus	3.712.491		1.029.000	1.683.000	
Tambahan Dana Otsus	156.673.000			156.673.000	
Infrastruktur	102.371.710		39.531.000	62.840.710	
Lain			-	-	
Migas					
Tambah	153.979.000		39.531.000	92.979.000	
Dana Insentif	153.154.000		516.000		153.154.000
Jumlah Total	11.071.398.000	11.098.706	6.914.467.500	6.889.96	3.529.102

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Kegiatan :

(Dalam Rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2016	KURANG BAYAR TA 2018	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 28/PMK.07/2020)	Penyesuaian LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	SALDO LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	739.941.979	965.203.359	1.705.145.338
Sektor		-	439.702.676	8.500.486	448.203.162
PPh Pasal 21			-	-	-
PPh Pasal 25/29 OP			108.302.870	8.500.486	116.803.356
PPN			241.436.013	277.832.873	519.268.886
Pajak Rokok					
Bagian Dana Hasil Migas					
Bagian Dana Hasil Pertambangan Minyak		-	-		
Bagian Dana Hasil Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Dana Hasil Pertambangan Panas Bumi			227.476.407	227.476.407	-
Bagian Dana Hasil Kehutanan					-
Bagian Dana Hasil Perikanan					
Bagian Dana Hasil Pertambangan Minerba		-	-		
Bagian Dana Hasil Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Dana Hasil Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Dana Hasil Pertambangan Minyak Bumi			12.162.716	12.162.716	
Bagian Dana Hasil Kehutanan					
Bagian Dana Hasil Perikanan	-	-	-	-	-
DAU			-	-	-
DBH		5.680.[illegible]	[illegible].035.706	-	96.765.726
Migas			93.032.190		93.032.190
Migas Bagian DAU			91.999.290		91.999.290
Migas Bagian DBH	-	-	3.056.[illegible]		3.066.900
Migas Bagian DBH Dana Bagi Hasil Sawit	-	-	-	-	
Gas Bumi DAU		-	-	-	-
Gas Bumi DBH				-	-
Gas Bumi Bagian Kontrak Baru					
Minerba			3.003.[illegible]		[illegible].[illegible]
Sektor					
Royalti	-		1.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Pajak Rokok	-	-	-	-	
Bagian Produksi		-	-	-	-
Bagian Luas				-	-
Bagian Dana Penyeimbang					
Kehutanan	-	5.[illegible]			
DR	-	-	-	-	
DAK			-	-	-
DBH		[illegible].[illegible]			-
Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Magelang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PBH Tahun TA 2020	PBH Tahun TA 2020	Alokasi DBH TA 2020 (PMK No. 53/PMK.07/2021)	PBH TA 2020 yang telah disalurkan	PBH TA 2020 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
Pajak	5.500.999.382	-	3.837.446.734	1.663.552.648	1.663.552.648
PPh	5.500.901.742	-	3.837.348.094	1.663.553.648	
PPh Pasal 21	1.637.113.418		1.637.113.418		
PPh Pasal 23/26	307.400.017		307.400.017		
PPh Pasal 25/29	1.554.914.429		1.554.914.429		
PPh Pasal 4 ayat (2)	1.301.069.953		337.819.713	963.250.240	
Pajak Bumi dan Bangunan	97.640.933		97.640.933		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.815.519.007		3.815.519.007		
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.440.030		7.440.030		
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					
Bagian Pemerintah Desa					
Dana Reboisasi	97.967.747		97.967.747		
DBH	7.554.573.137		7.554.573.137		
DAU	622.391.000	11.089.936	633.480.936	633.480.936	633.480.936
DAK		10.891.200	10.891.200		10.891.200
Hibah		22.196.736	22.196.736		22.196.736
Hibah dari Swasta		797.940	797.940		797.940
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya					
Dana Darurat		8.877.751	8.877.751		8.877.751
Dana Penyesuaian		1.113.796	1.113.796		1.113.796
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
Insentif		192.013	192.013		192.013
Dana Desa					
Apbdes		192.013	192.013		192.013
Pajak Alkon	97.760.275		97.760.275	97.760.275	
Tunjangan Profesi Guru					
Tunjangan PPh	5.713.751		4.049.868	1.663.883	
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	19.713.864			19.713.864	
Kelebihan Bayar	132.997.966		59.015.028	73.982.938	
Lainnya					
TOTAL					
PBH	132.997.966		132.997.966		
Pasal 21	153.184.940		210.166.108		153.184.940
Grand Total	5.717.387.607	11.089.936	4.260.868.108	1.468.050.974	2.481.724.435

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Pekalongan (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB s.d. TA 2018	LB TA 2019	KB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible])	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/202[illegible])	Sisa KB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 25/29	-		[illegible]	-	[illegible]
PBB			[illegible]	[illegible]	
Lain-lain					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-		-
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya			[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-				-
Biaya Pemungutan Perikanan					
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	[illegible]	[illegible]	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas			[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 15%			[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi 0,5%		-	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi 0,5%	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Minerba			[illegible]		[illegible]
Iuran Tetap					
Royalti			[illegible]		[illegible]
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-				-
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		[illegible]			
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH		[illegible]			
Perikanan					
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pekalongan

(dalam rupiah)

Uraian	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
Pajak	8.664.592.250	-	3.913.724.501	4.634.153.317	2.496.760
PPh	8.603.947.750	-	3.913.537.274	4.697.076.732	-
PPh Pasal 21	7.798.268.478		3.713.130.220	4.085.138.372	
PPh Pasal 25/29	1.284.381.074		470.132.000	814.249.278	
PPN	8.448.183.284		3.913.724.501	4.534.458.783	2.496.760
PBB Desa	1.991.050.958		2.913.724.501	1.925.240.299	
Pajak Daerah Milik	11.243.265		76.849.107	-	2.000.833
Pajak Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pusat Rp1	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Perbatasan					
Pajak Daerah Pelabuhan					
Pajak Daerah Sektor Lainnya	11.243.265		8.849.107	65.934.107	-
Pajak Penerangan Migas	2.049.636	-	1.484.907	-	564.729
Pajak Penerangan Non Migas	-	-	-		
Jasa Pemanfaatan Jalan Air					
Jasa Pemanfaatan Perbatasan					
Pajak Penerangan Sektor Lainnya			-	-	-
Pajak Penerangan Sektor Tertentu	9.193.629	-	289.800	6.899.747	-
CHT	766.316.736		571.87.1.951	194.444.785	
SDA	114.070.287	11.030.200	342.048.861	82.021.814	210.614.471
Migas		10.961.200	1.561.750		112.011.950
Minyak Bumi 15%		20.910.679	6.273.203	-	14.637.475
Minyak Bumi 0,5%	-	736.64	221.001	-	515.641
Minyak Bumi Dalam Rangka DMO	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	94.676.751	709.703		93.967.048
Gas Bumi 0,5%		1.414.747	11.830		1.402.917
Gas Bumi dalam Rangka DMO					
Mineral	1.870.102	1.224.000	12.922	1.870.102	987.901
Landrent	1.870.102		-	1.870.102	-
Royalti		91.245	45.915	-	87.330
Panas Bumi	32.620.472	-	4.893.660	16.430.733	-
Dana Produksi	-	-	-	-	-
Dana Iuran	7.710.181		1.028.024	1.645.851	
Dana Bagian Pemerintah	10.710.969			10.710.969	
Kehutanan	130.677.605	-	55.765.026	70.851.460	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
PSDH	130.677.605		97.402.823	70.851.460	
Perikanan	159.180.966		210.981.847		317.954.045
Cukai Hasil Tembakau	877.012.435	1.098.249	1.981.480	2.945.445	272.872.470

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Salatiga

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 22/26	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pasal	-	-	-	-	-
Bea Meterai	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Migas					-
Bagian Daerah dari Hasil Migas					
Bagian Daerah Hasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Lainnya		-	-	-	-
Bagian Daerah dari Hasil Kehutanan					-
Bagian Daerah dari Hasil Pertambangan Non Migas					
Bagian Daerah dari Hasil Perikanan					
Bagian Daerah dari Hasil Pertambangan Panas Bumi	-				
Bagian Daerah dari Hasil Pertambangan Minyak Bumi		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat dari Hasil Pertambangan Minyak Bumi				-	-
Bagian Pemerintah Pusat dari Hasil Pertambangan Gas Bumi					
PBB					
BPHTB	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Cukai	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau	-	-	[illegible]		[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Sebesar 0,3%	-	-	[illegible]		[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Sebesar 0,4%			[illegible]		[illegible]
Bagian Cukai Hasil Tembakau Sebesar 2% dari Cukai Hasil Tembakau yang Dikembalikan ke Daerah Penghasil Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau (0,3%)					
Cukai Hasil Tembakau (0,4%)					
Cukai Hasil Tembakau Sebesar 2% dari Cukai Hasil Tembakau yang Dikembalikan ke Daerah Penghasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Pajak Karbon	-	-	-	-	-
Landasan Kontinen	-	-	-	-	-
Lainnya				-	-
Bukan Pajak					
Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan					
Hasil Tambang	-	-	-		
Bagian Pemerintah dari Hasil Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Kekayaan Negara Dipisahkan		[illegible]			
Hibah					
PNBP	-	[illegible]	-	-	-
Pendapatan	-	-	-	-	-
Jumlah Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Salatiga

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PK Tahun 2020	SK Tahun 2020	Penyaluran DP DBH Tahun Anggaran 2020 KMK No. 578/KM.7/2020	SK TA 2020 yang belum disalurkan	SK TA 2020 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Pajak	3.092.033.111		2.712.032.068	379.801.043	379.801.043
CHT	3.035.812.191		1.858.040.498	1.177.771.693	
70% Bagian Pusat	637.920.960	-	390.188.505	247.732.455	-
80% Penerimaan Negara	1.917.891.231	-	1.172.673.993	745.217.238	-
PBB	2.531.244.915	-	836.340.802	1.694.904.113	1.694.904.113
Bagi Hasil	1.971.171.202	-	967.040.782	1.004.130.420	-
Bagian Daerah Migas	4.008.811	-	10.811.040	-	6.802.229
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21					-
Bagian Daerah Pasal 25/29	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 4(2)	67.969.554	-	1.457.900	66.834.454	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	515.599.007	-	8.001.200	507.597.807	-
Bagian Pemerintah Migas	1.761.000	-	1.761.000	-	61.020
Bagian Pemerintah Non Migas				-	-
Bagian Pemerintah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pasal 25/29	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pasal 4(2)	2.143.033		516.000	1.627.033	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	1.196.977		296.800	900.177	-
PPh	729.773.116		615.775.861	26.955.255	-
PBH	1.536.518.-	1.105.326	581.605.301	12.356.651	271.405.6-
Migas	-	1.104.330	1.647.-	-	112.777.676
Bagian Pusat 15%	-	29.817.291	716.300		24.719.971
Bagian Daerah 0,5%		994.-	21.350		824.172
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Pertambangan Panas Bumi		9.361.-	109.700		83.097.-
Pertambangan Umum		1.-14.729	27.800	-	1.472.-
Bagian Pemerintah Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	53.-0	46.221	-	17.-
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan Minyak		152.010	41.-		127.-
Bagian Daerah	29.-		1.-	21.-	
Bagian Pemerintah					
Pertambangan Gas	89.-	-	4.-	-	-
Pertambangan Panas Bumi	6.-	-	-	-	-
Kehutanan	1.-		31.-	79.-	
Pertambangan					
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan Umum	183.-	-	39.-	79.-	-
Pertambangan Minyak	1.-	-	47.-	-	1.-
Grand Total	9.-	1.1.-	3.-	1.-	271.-

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Semarang

(dalam rupiah)

[illegible]	Kurang Bayar	Kurang Bayar	Lebih Bayar DBH (PMK No. [illegible])	Penyesuaian Lebih Bayar DBH (PMK No. [illegible])	Sisa Lebih Bayar DBH (PMK No. [illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21			[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29 [illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB					
Pajak Rokok					
Bagian Daerah Hasil Pajak	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pajak	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Bukan Pajak					
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perikanan	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PBB	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi (15%)			[illegible]		[illegible]
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi Sebelum Tanggal [illegible]	-	-	-	-	-
Gas Bumi (30%)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (0,5%)					
Gas Bumi Sebelum Tanggal [illegible]					
Mineral					
Panas Bumi					
Biaya	-	-	-	-	-
Pungut Bumi	-	-	-	-	-
Lahan Produksi					
Lahan Baru					
Kekurangan Dana Penyesuaian					
Kurang Bayar	-	[illegible]			
DR	-	-			-
DAK					-
PBBKB		[illegible]			
Tambahan					
Grand Total	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Semarang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Alokasi TA 2020	Alokasi TA 2020	Penyaluran DBH TA 2020 sesuai PMK Nomor 226/PMK.07/2020	DBH TA 2020 yang telah disalurkan	DBH TA 2020 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	1.165.351.921		51.310.775.575	38.177.389.671	
PPh	57.165.952.572		20.435.614.107	16.214.230.674	
PPh Pasal 21	38.764.967.785	-	13.010.992.500	10.982.071.308	
PPh Pasal 25/29	18.200.979.887	-	3.960.230.501	4.845.130.537	-
PBB	2.151.017.479		724.396.703	2.209.317.555	-
Bea Bea	1.201.050.084		283.287.308	1.278.690.209	-
Cukai Daerah Asal	72.317.006		287.102.002	20.130.948	
Bagian Daerah Penerimaan					
Bagian Daerah Bukan Penerimaan	-				
Bagian Daerah Penerimaan	355.043.733	-	97.314.961	153.628.704	-
Bagian Daerah Penerimaan		-	-		-
Bagian Daerah sesuai Lainnya	21.000.000.007		5.691.283	10.000.703	
Bagian Tambahan Dasar	10.750.275		2.000.000	3.349.300	
Bagian Tambahan Dasar Migas	-		-		
Bagian Tambahan Dasar Bukan Migas	-		-	-	
Bagian Pertambangan Pertambangan	14.057.004	-	6.309.787	7.705.184	-
Bagian Pertambangan Perkebunan					
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	1.150.977		551.650	639.317	
DBH	954.526.790	-	891.712.870	202.605.457	
DAU	970.758.599	17.487.666	703.759.100	10.000.-	372.034.541
Migas		217.247.836	2.943.020	-	214.404.156
Minyak Bumi (PPh)		23.516.677	914.100	-	24.430.777
Minyak Bumi (PPh)		703.813	30.000		821.042
Minyak Bumi Sebelum Deviasi					
Gas Bumi (PPh)		39.567.151	1.275.020		38.303.201
Gas Bumi (PPh)	-	5.225.969	1.200	-	5.067.136
Gas Bumi sebelum Koreksi	-	-	-	-	-
Mineral		132.141	15.020	-	97.365
Lainnya					-
Panas Bumi		1.231.010	10.010		97.703
Pajak Daerah	22.020.970		7.028.020	15.000.020	
Pajak Daerah	-		-		
Pajak Daerah	5.017.481	-	1.018.650	382.951	-
Retribusi Daerah Pelayanan	16.710.787	-	-	10.778.050	-
Pengelolaan	92.271.921		73.300.021	25.361.309	
PPh					
PPN	-	-	-		
PBNB	98.147.781	-	39.360.325	27.581.514	-
Pengelolaan	138.148.948	-	21.000.000	-	87.034.201
Grand Total	1.330.791.893	212.701.666	82.870.112.646	39.211.512.461	372.034.541

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Surakarta

(Dalam Rupiah)

Uraian	KB TA 2018	KB TA 2019	TB s.d TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa KB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			25.214.261.277	6.875.714.007	18.338.547.270
PPh			25.214.261.277	6.875.714.007	18.338.547.270
PPh Pasal 21	-	-	566.455.719	566.455.719	-
PPh Pasal 25/29 OP	-	-	6.249.276.562	6.309.258.288	18.338.547.270
PBB	-	-	-	-	-
Dalam Kota	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kota				-	-
Bagian Daerah Kab/Kota					
Bagian Daerah Kab/Kota Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkotaan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya				-	-
Bagian Pemerintah Pusat					-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pemerintah	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perkotaan					-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					-
BPHT	-	-			
PDN	-	9.652.241	99.000.000		99.000.000
Migas	-	-	99.000.000	-	99.000.000
Minyak Bumi (85%)			21.087.850	-	21.087.850
Minyak Bumi (0,5%)			3.000.000	-	3.000.000
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus					
Gas Bumi (30%)					
Gas Bumi (0,5%)	-	-			
Gas Bumi dari Wilayah Kerja Khusus	-	-	-		
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Perikanan			-	-	-
Pertanian				-	-
Pertambangan					
Pertambangan Umum					
Kehutanan	-	-	-	-	-
Sebelum Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Sebelumnya		2.670.013		-	-
PPh					
PPh Pasal 21	-	-			
PPh Pasal 25/29 OP	-	1.982.241	-	-	-
Perikanan				-	-
Jumlah Total		9.652.241	37.300.000.000	6.875.714.007	18.338.547.270

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Surakarta

(rupiah)

Uraian	DBH Definitif TA 2020	DBH Definitif TA 2020	Penyaluran DBH TA 2020 Berdasarkan PMK No. 33/PMK.07/2021	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	7.929.540.758	-	8.102.326.699	8.437.457.949	97.662.371
PBB	1.473.064.605	-	8.169.389.870	(6.870.865.794)	
PBB Sektor P3	70.156.044.020		6.201.732.020	3.967.311.427	
PPh Pasal 21/26	4.367.730.571		1.774.700.220	2.592.842.370	
BPHTB	2.121.540.063		3.193.210.029	1.874.197.852	96.662.321
Cukai Hasil Tembakau	1.991.644.948		200.099.730	11.120.272.950	
Kurang Salur/Lebih Salur	99.092.904		7.707.930	-	96.372.411
Bagian Daerah Penghasil Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-				
Bagian Daerah Penerbangan					
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan	210.398.201		8.907.203	106.394.747	-
Bagian Penerimaan Migas	648.162	-	2.426.726	-	652.960
Bagian Penerimaan Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Penerimaan Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pertambangan Mineral dan Batubara					
Bagian Pertambangan Perikanan		-	-	-	-
Bagian Penerimaan Sektor Energi	1.181.967	-	350.807	2.192.847	-
CHT	241.332.178	-	317.165.832	218.700.294	
DAK	272.170.105	11.168.228	782.088.900	97.211.200	270.410.674
Otsus		17.984.213	1.007.135		1.121.121.929
Dampak Lanjut DAK		22.613.647	916.705	-	24.712.974
Dampak Lanjut Otsus		760.842	30.697	-	834.454
Dampak Tambahan Bagian Otsus	-	-	-	-	-
Dak Reg 1,25%	-	8.473.051	726.700		8.599.653
Dak Reg 70,0%		14.779.797	31.500		1.420.239
Dak Reg di Dalam Rangka Otsus					
Kinerja		102.050	4.625		107.950
Insentif		-	-	-	-
Disinsentif		150.040	6.378	-	37.966
Dana Desa	93.493.170	-	4.026.632	4.493.220	-
Dana Bagi Hasil	-	-			-
Dana Otsus	8.712.458		4.026.632	1.134.631	
Belanja Daerah Pemerintah	84.780.712			14.358.589	
Infrastruktur	105.227.969	-	29.056.125	21.911.830	-
PID	-	-	-	-	-
DBHCHT	-				
PSDH	1.231.055		68.750.862	71.811.920	
Perikanan	136.151.980		3.330.205		157.964.030
Total (Rp)	17.124.324.450	1.065.256	3.492.543.430	1.531.324.322	349.631.645

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tegal

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2018	Kurang Bayar TA 2019	Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyaluran Lebih Bayar TA 2020 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 37/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PPh	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Dalam Negeri	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB					
Sektor Jasa					
Sektor Industri Migas					
Bagian Pemerintah Pusan Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya					
Bagian Daerah Pemilik Kewenangan					
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi	-	-	-		-
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan					
Bagian Pemerintah Bagian Daerah Penghasil		-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
DAU	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (DAU)			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi (DBH)			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi Sebelum Penyaluran Dana Otsus	-	-	-	-	-
Dana Otsus (2,5%)	-	-	-	-	-
Dana Otsus (0,5%)	-	-	-	-	-
Dana Otsus Tambahan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Minerba					
Kehutanan					
Perikanan					
Pertanian	-	-	-	-	-
Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Kehutanan		[illegible]			
PPh	-	-	-	-	-
PDTS	-	-	-	-	-
PBB		[illegible]			
Perikanan					
Jumlah Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Tegal

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PB Tahun TA 2020	KB Tahun TA 2020	Alokasi KB DBH Tahun TA 2020 (Kep Men Keu/PMK No. 226/KMK.07/2021)	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan	KB TA 2020 yang akan di diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)=(3)-(5)
Pajak	0.00 (628.84)	-	1,179,389,724	5,782,628,935	(5,782,628,935)
PPh	0.00 (0.00)	-	2,535,497,020	7,084,124,758	-
PPh Pasal 21	0.00 (0.00)	-	2,021,782,020	2,947,917,915	-
PPh Pasal 23/26	996,199,510	-	481,056,120	514,036,614	-
PPN	7,241,584,294	-	980,676,000	1,910,104,632	17,100,124
Pajak Kendaraan Bermotor	201,353,663	-	260,069,000	1,123,220,289	-
Bagian Daerah dari Pajak Alat Berat	20,374,877	-	14,596,000	-	15,277,120
Bagian Daerah dari Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9,139,000,027	-	6,604,300	20,000,000	-
Cukai Hasil Tembakau	974,777	-	49,700	-	512,969
Bagian Daerah dari Pajak Alat Berat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Hotel	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Restoran	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Hiburan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Reklame	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Penerangan Jalan	2,136,047	-	286,800	2,500,847	-
PBB	770,245,020	-	502,371,424	168,047,943	-
BHT	912,354,720	(1,350,294)	362,368,850	89,217,850	276,468,024
Migas	-	(10,501,207)	1,161,750	-	11,677,676
Bagian Daerah dari PBB	-	(8,516,954)	9,350	-	24,732,979
Bagian Daerah dari BPHTB	-	709,543	50,000	-	521,042
Bagian Daerah dari Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	11,872,001	568,750	-	55,307,651
Gas Bumi	-	(1,111,000)	1,250	-	1,420,544
Gas Bumi Kekurangan Penyaluran					
Minyak Bumi	-	(3,101,241)	10,750		197,968
Landrent	-	-	-		
Royalti	-	152,140	45,025	-	197,965
Panas Bumi	21,128,170		2,675,650	15,402,830	-
Bagian Daerah dari Panas Bumi			-	-	-
Pajak Air Tanah	0.00 (2,701		1,028,050	1,638,651	-
Bagian Daerah dari Pajak Air Tanah	16,716,536			16,716,536	
Kehutanan	10,917,638	-	53,765,800	10,917,638	
IHH			-	-	-
IHPH					-
PSDH	10,917,638		53,765,800	10,917,638	-
Perikanan	98,353,582	-	3,569,020		127,017,527
Jumlah Total	0.00 (28,356	(11,096,034)	4,553,250,624	8,911,958,668	291,612,192

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi DI Yogyakarta

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (PMK No. [illegible])	[illegible] (KMK No. [illegible])	[illegible] (KMK No. [illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB			[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Hasil Non Migas			[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi					
Dana Alokasi Khusus Reboisasi					
Dana Alokasi Khusus Pertambangan					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Minyak					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Gas Bumi					
Dana Alokasi Khusus Migas					
Dana Alokasi Khusus Non Migas			[illegible]		[illegible]
Dana Alokasi Khusus Perkebunan					
Dana Alokasi Khusus Pertambangan					
Bagian Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi					
DBH					
DAK		[illegible]			
Migas					
Minyak Bumi (15%)					
Minyak Bumi (0,5%)					
Minyak Bumi Tambahan Wewenang (0,5%)					
Gas Bumi (30%)					
Gas Bumi (0,5%)					
Gas Bumi Tambahan Wewenang (0,5%)					
Mineral					
Penerimaan					
Royalti					
Pajak Bumi					
Cukai Produksi					
Bunga Bank					
Kekurangan Pembayaran Pemerintah					
Kekurangan Pembayaran Pemerintah		[illegible]			
DR					
DAK					
Hibah		[illegible]			
Tambahan					
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi DI Yogyakarta (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Dibayar TA 2021	LB Dipotong TA 2020	Pengalihan KB DBH Sesuai PMK TA 2020 (KMK No. 216/KM.7/2020)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	-5.191.974.099		10.813.816.131	21.124.031.110	52.690.057
PPh	-4.388.057.213		10.862.660.165	21.324.376.112	
PPh Pasal 21	37.243.079.487	-	[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	7.146.064.743	-	[illegible]	[illegible]	
PBB	361.014.456	-	56.580.803	260.074.537	52.690.057
[illegible]			-	-	-
Bagian Daerah Migas	55.083.846		136.802.700		50.876.212
Bagian Daerah Non Migas	12.729.591		3.711.093	11.018.498	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan	-	-			
Bagian Daerah Perhutanan	[illegible]	-	384.800	1.085.212	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	255.181.839		18.763.800	658.719.073	-
Biaya Pemungutan Migas	2.531.589		1.481.250		1.775.277
Biaya Pemungutan Non Migas	490.709	-	127.070	376.163	
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-		
Biaya Pemungutan Perhutanan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	49.433		13.600	36.013	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	3.899.909		804.800	[illegible]	-
CHT	418.602.5[illegible]	-	299.163.[illegible]	120.[illegible]	
SDA	36.095.779	[illegible]	[illegible]	32.556.976	4.199.333
Migas		-	-	-	-
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	-
Minyak Bumi dalam rangka Otsus			-		-
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	
Minerba	25.240.337	3.163.196	1.556.???	38.???	4.???
Landrent		3.163.196	1.014.100	-	4.???
Royalti	25.2??.???		???.925	[illegible]	-
Panas Bumi					
Setoran Produksi	-				
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan	254.??.???		1.961.325	[illegible]	-
DR					-
IIUPH	-	-	-		
PSDH	29.132.479	-	1.961.325	[illegible]	-
Perikanan			-	-	-
Grand Total	-5.??.???	3.??.196	10.??.???	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Banjar

(dalam rupiah)

Uraian Data	Kurang Bayar DBH Tahun 2019	Kurang Bayar DBH Tahun 2020	Lebih Bayar DBH Tahun 2019 (PMK No. 82/PMK.07/2021)	Penyesuaian Lebih Bayar DBH Tahun 2019 (Kepmen No. 3/KM.7/2021)	Sisa Lebih Bayar DBH Tahun 2019 (PMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Desa			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Migas					
Bagian Daerah Sektor Panas Bumi					
Bagian Daerah Pajak Penghasilan					
Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Kehutanan					
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lainnya					
CHT	-	-	-	-	-
DBH	-	[illegible]	-	-	-
Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah 15%					
Bagian Daerah 3,125%					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Dana Bagi Hasil (DBH)					
Dana Bagi Hasil Migas	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent					
Royalti					
Kurang Bayar					
Dana Bagi Hasil			-		
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Sebagian Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		[illegible]			
PSDH					
PSDH	-	[illegible]	-	-	-
Perikanan					-
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bantul

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Salur TA 2020	Lebih Salur TA 2020	Dasar Penyaluran DBH Sesuai PMK 226/PMK.07/2021	DBH TA 2020 yang Dapat Dialokasikan	TA 2020 yang Telah Dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penerimaan Umum					
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	-		-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Kehutanan	-		-	-	-
Dana Reboisasi	213.113.407		8.045.707	205.809.102	-
Dana Kompensasi Migas	1.708.512		1.708.512		1.708.512
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi	-		-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	-
Dana Kompensasi Pertambangan					
Bagian Kompensasi Pelabuhan Laut	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DBH	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	-	-	-	-
Kurang Salur DBH	-	-	-	-	-
Kurang Salur DBH					
Selisih Kurang Salur Kurang Salur					
Cukai Hasil Tembakau			-		
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau Kurang Salur	-	-	-	-	-
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Batubara		-			
Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Dana Otsus					
Dana Otonomi					
Pajak	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-		-	-	-
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
DBH					
PPh 21	-	-	-	-	-
PPh OP	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Bab. Gubernur/Kepala

(dalam rupiah)

Uraian DBH	KB TA 2019	LB TA 2019	PB sd TA 2019 (PMK No. 22/PMK.07/2021)	Tagihan sd TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa sd TA 2019 (Lebih/(Kurang))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak			17.029.567	45.81.434	72.917.[illegible]
PPh			17.029.567	45.81.434	72.917.[illegible]
PPh Pasal 21		-	17.029.567	45.81.434	72.917.[illegible]
PPh Pasal 21 Migas	-	-	-	-	
PPh		-	-		
Bagi Hasil					
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Non Migas				-	-
Iuran Tetap Pemda Migas				-	-
Iuran Eksplorasi Pemda Migas				-	-
Bagian Pemerintah Pusat	-				
Bagian Pemerintah Sub Total	-				
Bagian Pemerintah Pusat Migas				-	-
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas				-	-
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi		-		-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-		-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan					
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan				-	-
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan				-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi				-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya				-	-
Cukai				-	-
Migas		-		-	
Minyak Bumi (PSO)	-	-		-	-
Minyak Bumi (Non PSO)				-	-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Migas				-	-
Gas Bumi (PSO)				-	-
Gas Bumi (Non PSO)		-		-	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Migas	-	-		-	-
Minerba	-	-			
Tambang	-				
Royalti					
Pajak Pusat				-	-
Pajak Penghasilan				-	-
Pajak Lainnya	-	-		-	-
Kehutanan		-			
DR				-	-
PSDH		-		-	-
PHT	-	-			
Perikanan					
Grand Total			17.029.567	45.81.434	72.917.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gunung Kidul (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH s.d. TA 2020	LB DBH s.d. TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	9.633.[illegible]	-	[illegible]	5.872.[illegible]	[illegible]
PPh	7.196.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		2.043.[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PBB	2.297.[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Rata	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perhutanan	-		-	-	
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan					-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
CHT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas					-
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%	-	-			
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Minerba	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Iuran Tetap					-
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	-	-	-		
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap			-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
IHPH	-	-	-		
PSDH		-	-	-	
DR	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Grand Total	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kulon Progo

(dalam rupiah)

Uraian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	-	-	27.981.600	-	27.981.600
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	27.981.600	-	27.981.600
Hasil Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Minyak Bumi	-	-	27.079.600	-	27.079.600
Bagian Daerah dari Gas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Gas Bumi	-	-	-	-	-
Hasil Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Panas Bumi	-	-	902.000	-	902.000
Hasil Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Iuran Tetap (Landrent)	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-	-	-
Hasil Perikanan	-	-	-	-	-
Pungutan Hasil Perikanan	-	-	-	-	-
PNBP	-	-	-	-	-
BLU	-	1.199.080	12.134.657	3.023.341	11.157.918
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (SDA)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Bagian	-	-	-	-	-
Kelebihan Dana Bagi Hasil Gas Bumi	-	-	-	-	-
Gas Bumi (SDA)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (SDA)	-	-	-	-	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	2.134.657	2.023.341	111.316
Panas Bumi	-	-	6.111.774	1.000.000	5.111.774
Kehutanan	-	-	3.888.226	-	3.888.226
Kelautan Lainnya	-	-	-	-	-
Iuran Perikanan	-	-	-	-	-
Pungutan Perikanan	-	-	-	-	-
Kelautan - Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kebudayaan	-	1.199.080	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-
PNBP	-	-	-	-	-
BLUD	-	1.199.080	-	-	-
Pendapatan	-	-	-	-	-
Jumlah Total	-	1.199.080	40.116.257	3.023.341	39.139.518

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Keb. Kulon Progo

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar TA 2020	Lebih Bayar TA 2020	Penyaluran s.d. PMK Nomor ... TA 2021 (PMK No. ... /KM.7/2021)	Kurang/(Lebih) Bayar Belum Disalurkan	Lebih Bayar yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bea Meterai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cukai Ethil Alkohol	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Cukai Minuman Mengandung Ethil Alkohol	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pungutan Ekspor Sawit (Sawit)					
Pungutan Ekspor Perkebunan					
Pungutan Ekspor Produk Industri	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pungutan Ekspor Produk Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pungutan Perusahaan Rokok	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pungutan Perusahaan Sawit	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pungutan Perusahaan Non Sawit	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pungutan Perusahaan Tahun Buku	-				
Pungutan Perusahaan Asal Ekspor	-	-	-		
Iuran Pemanfaatan Perkebunan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pungutan Pemanfaatan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
PPTT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PTH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi (PPh)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (PBH)			-	-	-
Minyak Bumi Hasil Produksi Khusus				-	-
Gas Bumi (PPh)					
Gas Bumi (PBH)					
Gas Bumi Hasil Produksi Khusus	-				
Panas Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Landaan	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Hasil Hutan					-
Iuran Tetap (Land Rent)					-
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-		-		
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pertambangan Umum				-	-
Iuran Tetap	[illegible]	-	[illegible]		
Iuran Eksploitasi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertanahan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Kehutanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sleman

(dalam rupiah)

Uraian Data	Kurang Bayar TA 2018	Kurang Bayar TA 2019	Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyesuaian Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(c)+(d)+(e)
Pajak			(452.436.207)	512.873.731	60.437.524
PPh			(452.436.207)	512.873.731	60.437.524
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			(452.436.207)	512.873.731	60.437.524
PBB					
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Sektor Migas					
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara					
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Pertambangan Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Bagian Pemerintah Kehutanan					
Bagian Pemerintah Perikanan					
PBHTB					
BPHTB		1.736.585			
Hibah					
Hibah Pihak Luar					
Hibah Pihak Dalam					
Pihak Lain Sesama Pemda Dalam Negeri					
Dana Bagi Hasil					
Dana Bagi Hasil Pajak					
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam					
Kehutanan					
Landrent					
Royalti					
Pajak Daerah					
Pajak Hotel					
Pajak Restoran					
Pajak Hiburan					
Pajak Reklame					
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Parkir					
Pajak Air Tanah					
Pajak Sarang Burung Walet					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		1.736.585			
Kehutanan					
IHPH					
PSDH					
DR		1.736.585			
Perikanan					
Pungutan Perikanan					
Retribusi Izin Usaha Perikanan					
Pertambangan					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Pertambangan Mineral dan Batubara					
Penerimaan Iuran Tetap (Landrent)					
Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Pertambangan Migas					
Penerimaan Iuran Tetap (Landrent)					
Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Pertambangan Panas Bumi					
Penerimaan Iuran Tetap (Landrent)					
Penerimaan Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Kurang Bayar		1.736.585	(452.436.207)	512.873.731	60.437.524

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sleman

Dalam rupiah

Jenis DBH	PR Juli PMK 120/2020	PR Juli PMK 70/2020	Penyaluran PMK 81 Tahun 2021 sesuai PMK 226/2021	Kurang/(Lebih) Salur	DBH 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	30.269.211.712		26.643.419.182	33.791.130.038	54.653.826
PPh	20.173.192.284		9.971.121.203	31.736.756.868	
PPh Pasal 21	16.695.192.454		8.130.687.103	31.001.919.607	
PPh Pasal 25/29	3.477.977.830	-	1.840.434.100	734.837.261	
PBB	10.095.982.976	-	670.697.980	1.941.373.170	53.826.928
Heg. Rata	1.701.450.078		583.687.780	1.774.070.268	-
Bagian Daerah Atas	85.361.478		130.610.200		53.826.928
Bagian Daerah Bea Migas					
Bagian Daerah Pajak Daerah					
Bagian Daerah PBB					
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Jasa Layanan Sekolah Kedinasan	276.799.027		7.60 .320	306.094.307	-
Jasa Pemanfaatan Migas	3.116.036		1.106.230		1.009.806
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-				
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Jasa Pemanfaatan Perbatasan					-
Jasa Pemanfaatan Kawasan Ekonomi	11.189.077		3 .0 0	6 .0 .817	
PPh	1 1.0 6.8 9		2 .0 0.0 0	2 .2 0 .6	
PDN	1 6.6 6 .9	-	1 .9 2.6 6	6.19 .9 6	1 .6 9 .2
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi PPh	-	-	-	-	-
Gas Bumi PPh					-
Minyak Bumi dalam Kondisi Ulayat					
Gas Bumi PPh					
Gas Bumi PPh	-	-			
Gas Bumi dalam Kondisi Ulayat	-	-	-	-	
Minyak	18. 20.32	-	70.630	1 .1 1.9 3	-
Interest	-	-		-	-
Bonus	1 .1 0.0 2		70.630	1 .1 .0	-
Panas Bumi					
Panas Bumi					
Penerimaan	-	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-	-
Kehutanan	14.226.101		0 .6	1 .1 .3	-
IHH					
PSDH	-	-			
DBHP	14 6.6 .61	-	0 .6	1 .1 .3	-
Perikanan	1 0.1 0.6	-	1 .6 .0	-	6 .6 .0
Jumlah Total	2 1.1 .0 .0		1 .1 .1 .6	3 .0 .0 .6	1 .6 .2

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Yogyakarta (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2018 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Pengakuan LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			7.165.7[illegible].737	2.866.281.915	4.299.[illegible].872
PPh			7.165.7[illegible].737	2.866.281.915	4.299.[illegible].872
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	7.165.7[illegible].737	2.866.281.915	4.299.[illegible].872
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata					
Bagian Daerah Kinerja					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Sektor [illegible]	-	-			-
Bagian Daerah Sektor [illegible]	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor [illegible]	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Sektor [illegible]	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor [illegible]			-		-
Biaya Pemungutan Sektor Perhutanan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	1.8[illegible]7.630	-	-	-
Migas	-	-	-		-
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Iuran Tetap					
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		1.8[illegible]7.630			
IIUPH					
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	1.8[illegible]7.630	-	-	-
Perikanan					
Grand Total		1.8[illegible]7.630	7.165.7[illegible].737	2.866.281.915	4.299.[illegible].872

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Yogyakarta

(Dalam rupiah)

URAIAN DBH	KURANG BAYAR TA 2020	LEBIH BAYAR TA 2020	Penyaluran 2021 (PMK-226/PMK.07/2020 dan PMK-17/PMK.07/2021)	SISA 2020 yang belum disalurkan	SISA 2020 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DAU	23.603.042.000		23.603.042.000	1.600.042.814	22.003.042
DBH	22.804.796.139		3.930.777.103	13.921.997.870	
79% Pasal 21	19.451.316.138		3.870.291.103	6.701.736.000	
80% Pasal 25/29	3.349.479.001		60.486.000	7.220.261.870	
DBH	2.353.510.000		530.185.500	1.540.154.382	23.034.133
Jasa Air	1.071.000.938		345.687.500	1.790.272.953	
Cukai Tembakau Rokok	37.247.472		37.307.500		20.733.028
Dengan Alokasi Jenis Rokok					
Rokok Sigaret Kretek Mesin					
Rokok Sigaret Putih Mesin					
Rokok Kretek Tangan					
Dengan Alokasi Sektor Tabel	37.247.472		37.307.500	200.00.707	
Dengan Pertimbangan Lain	1.033.753.466		308.379.000		7.45.067
Dengan Pertimbangan Sektor Lainnya					
Dengan Pertimbangan Pemerataan					
Dengan Pertimbangan Pertumbuhan					
Dengan Pertimbangan Pemerataan	7.160.677		0.960.00	1.000.077	
DTF	755.579.100		755.37.000	02.207.121	
DAK	97.413.655		3.772.972.676	37.672.004	37.134.000
Sigaa					
Manyaa Jaaa Lain					
Manyaa Jaaa Gaaa					
Manyaa Jaaa Lain Kaaaka Gaaa					
Gaa Baa (GB)					
Gaa Baa (GB)					
Gaa Baa Gaaa Baaa Gaaa					
Gaaaa	17.102.262		70.830	3.000.000	
Gaaaaaa					
Jaaaa	70.830		70.830	70.830	
Gaaaa Gaaa					
Gaaaa Gaaa					
Gaaaaaa					
Gaaaaaa Gaaaa (Gaaaaaa)					
Gaaaaaaa	25.500.000		970.830	1.970.830	
Gaa					
Gaaaa					
GBH	25.561.112		970.830	5.570.801	
Gaaaaaaa	77.196.000		3.000.000		37.00.000
Grand Total	2.111.672.007		3.364.746.107	13.873.024.845	780.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Jawa Timur

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
[illegible]	-	-	-82.857.035.857	19.177.794.119	-63.679.241.738
PPh	-	-	-82.857.035.857	19.177.794.119	-63.679.241.738
Pasal 21	-	-	-	-	-
Pasal 25/29 Badan	-	-	-82.857.035.857	19.177.794.119	-63.679.241.738
Hasil	-	-	-1.869.690.303	-	-1.869.690.303
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan	-	-	-1.869.690.303	-	-1.869.690.303
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Gas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Perbendaharaan	-	-	-50.651.119	-	-50.651.119
Bagian Daerah Pertambangan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	-1.768.689.301	-	-	-
Kurang	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Kehutanan	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Perikanan	-	-	-	-	-
Lebih Salur Dana Bagi Hasil Sebelum Tahun Anggaran Berjalan	-	-	-	-	-
Kurang/Lebih	-	-	-	-	-
Sanksi	-	-	-	-	-
Pengenaan	-	-	-	-	-
Pembayaran	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Tertentu	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Sebelum Tahun Anggaran Berjalan	-	-	-	-	-
Kurang/Lebih	-	-99.078.859	-	-	-
PPh	-	-67.760.820	-	-	-
Migas	-	-	-	-	-
PBB	-	-231.048.000	-	-	-
Kurang/Lebih	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-99.078.859	-84.857.035.857	19.177.794.119	-65.679.241.738

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Jawa Timur (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (PMK No. [illegible])	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	6[illegible]9.827.416.402	[illegible]1.402	1[illegible]4.7[illegible].679.6[illegible]	495.[illegible].842	1.[illegible]03.072
PPh	455.[illegible].214.290	-	57.[illegible]946.100	398.[illegible]267.390	
PPh Pasal 21	[illegible]	-	38.861.873.600	45.99[illegible].445	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]252.075.700	54.030.[illegible]448	-
PBB	130.296.[illegible].359	1.420.070	15.104.721.500	1[illegible].191.172.089	1.903.072
Bagi Rata					-
Bagian Daerah Migas	124.356.[illegible]		7.878.637.900	116.[illegible].214	
Bagian Daerah Non Migas	8.[illegible]	-	851.559.700	7.[illegible]	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	1.382.833	98.300	-	1.382.[illegible]
Bagian Daerah Perhutanan	13.[illegible].[illegible].069	-	4.150.[illegible].600	8.[illegible]243.669	-
Bagian Daerah Perkebunan	4.[illegible]		1.[illegible]360	[illegible].775	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2.[illegible].769		[illegible].300	1.[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	3.[illegible].635	-	210.899.500	[illegible]	
Biaya Pemungutan Non Migas	235.541.878	-	25.[illegible]	205.273.439	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi		25.080	4.300	-	49.880
Biaya Pemungutan Perhutanan	[illegible]		111.[illegible].800	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]		50.[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	58.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
CHT	89.455.356.623	-	42.0[illegible].561	46.[illegible].624.562	-
SDA	1[illegible].057	157.894.789	[illegible].177	490.[illegible].837	255.[illegible]
Migas	[illegible]		10.[illegible].800	348.[illegible]	-
Minyak Bumi 15%	[illegible]		10.[illegible]	371.[illegible].108	
Minyak Bumi 0,5%	[illegible].615		[illegible]	[illegible]	
Minyak Bumi Selain Bagian Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 30%	[illegible].875.328.426	-	36.[illegible]	[illegible]69.408.[illegible]	
Gas Bumi 0,5%	78.[illegible]	-	[illegible]	75.[illegible]	-
Gas Bumi Selain Bagian Otsus		-	-	-	-
Minerba	[illegible]		157.[illegible].727	[illegible]	-
Landrent	[illegible]		12.[illegible]	27.[illegible]	
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	-	155.894.789	75.[illegible]		255.[illegible]
Setoran Bagian Pusat	-	-	-	-	
Iuran Tetap		157.894.789	70.[illegible].375	-	255.[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah					-
Kehutanan	2.[illegible]		[illegible]	1.[illegible].149	
DR	156.921.551	-	-	115.[illegible].551	
IIUPH	-		-	-	-
PSDH	1.[illegible].923		[illegible].327	[illegible]	-
Perikanan					
Grand Total	[illegible].879.695.106	[illegible]	2[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. [illegible]

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible] TA 2019	[illegible] TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21	-	-	-		
PPh Pasal 25/29	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB		-	-	-	
[illegible]		-	-	-	-
Bagian Daerah Migas				-	-
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-		-
Bagian Daerah Perkebunan		-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pertambangan			-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-			-
CHT	-	-	-		-
SDA	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas		-	[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 15%			[illegible]	-	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Minerba		-	-	-	
Iuran Tetap		-	-	-	
Royalti			-	-	-
Panas Bumi					-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-			
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Iuran Produksi		-	-	-	
Kehutanan		[illegible]			-
DR					-
IIUPH	-	-	-		
PSDH		[illegible]	-	-	
Perikanan			-	-	
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lampiran

(dalam rupiah)

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kurang Bayar DBH TA 2020	Lebih Bayar DBH TA 2020	Penyaluran DBH TA 2020 (sesudah PMK 226/PMK.07/2021)	Alokasi DBH TA 2020 yang Benar (1)-(2)+(3)	Lebih Bayar DBH yang Belum Diperhitungkan
Migas	24.407.164.048	-	33.484.041.762	9.076.877.714	-
PPh	6.513.240.731	-	20.458.577.990	13.945.337.259	-
PPh Pasal 21	5.713.677.643		9.660.985.350	3.947.307.707	
PPh Pasal 25/29	1.301.132.612		2.197.704.193	896.571.581	
PPh	498.431.176		1.840.412.382	1.341.981.206	
PPh Pasal 4	1.951.956.999		2.956.886.779	1.004.929.780	
Pajak Bumi dan Bangunan Migas	1.541.613.345	-	601.697.420	2.859.608.941	-
Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	10.478.161		42.712.130	53.234.304	
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan					
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	410.049.210		9.350.630	400.698.580	
Pajak Bumi dan Bangunan Migas	120.726.326	-	27.540.530	98.185.796	-
Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	9.167.111		1.170.630	7.996.481	
Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	-	-	-	-	
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	7.486.134	-	293.630	7.192.504	-
PBB	1.084.047.977	-	1.611.351.611	534.203.634	-
BPHTB	2.156.019.213	8.124.129	1.901.818.677	2.261.713.419	170.124.770
Migas	2.156.019.213		1.901.818.677	30.895.371.036	
Minyak Bumi (65)	20.000.196.927		826.930.430	19.173.266.497	
Minyak Bumi (0,5)	496.132.304	-	70.683.609	566.357.474	-
Minyak Bumi Sebelum Penyesuaian Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi (69)	797.570.283	-	8.033.940	697.156.795	-
Gas Bumi (0,5)	10.120.317		930.270	11.050.587	
Gas Bumi dalam rangka Otsus Aceh	1.631.099.382		97.019.130	1.728.118.512	
Panas Bumi			-	-	
Pajak	651.632.553	-	54.343.159	705.975.712	
Pajak Bumi dan Bangunan Migas	-	8.124.129	933.696	-	17.792.761
Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas			-	-	
Jumlah Setelah Penyesuaian		8.124.129	1.867.425		15.722.770
Lebih/(Kurang) Bayar Ditetapkan					
Pajak Bumi dan Bangunan	1.469.671.597	-	84.540.420	85.105.217	
PBB	-	-	-	-	-
BPHTB	-				-
Migas	24.107.211.117		33.037.130	47.166.317	
Pertambangan	199.105.897		313.991.020		114.885.123
Grand Total	52.574.705.253	8.124.129	54.609.449.532	31.126.545.111	170.124.770

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Banyuwangi

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar	TA 2019	TA 2020 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Realisasi TA 2020 (PMK No. 7/PMK.07/2021)	Kurang/(Lebih) Bayar (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh			[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21			[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29			[illegible]	[illegible]	
PBB			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reg. Kini		-	-	-	
Daerah Provinsi Asal			-	-	-
Daerah Provinsi Non Migas					-
Daerah Provinsi Selain Asal					-
Daerah Kabupaten/Kota Penghasil			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reg. Lampau Penerimaan		-	-		
Daerah Provinsi Asal		-	-	-	-
Daerah Provinsi Migas			-	-	-
Daerah Provinsi Non Migas					
Daerah Provinsi Selain Asal					
Daerah Kabupaten/Kota Penghasil		-	86.657.403	-	86.657.403
Daerah Kabupaten/Kota Pengolah			-	-	-
Daerah Kabupaten/Kota Sekitar Penghasil					-
PPh					
BPHTB		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Migas		-	-	-	
Alokasi Dasar 10%		-	-	-	-
Alokasi Dasar 2,5%				-	-
Alokasi Dasar Daerah Penghasil					-
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat		-	-		
Minyak Bumi		-	-	-	
Landrent		-	-	-	-
Jaminan			-	-	-
Panas Bumi			[illegible]	[illegible]	-
Iuran Tetap/Flat					
Iuran Eksplorasi			[illegible]	[illegible]	
Iuran Eksploitasi (Produksi)		-	-		
Kehutanan		[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
IHPH					-
PSDH					
DR	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Pertambangan		-	-		
Pungutan Lainnya		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lampiran ...

(dalam rupiah)

...	...	...	...	...	...
...	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PPh ...	49.126.070.446	-	1.790.600.941	47.335.469.505	104.900.000
PPN ...	1.676.744.044.026	-	46.963.685.301	1.629.780.358.725	-
PPh Pasal 21	1.575.897.765		6.000.000.301	5.987.710.542	-
PPh Pasal 22/26	1.453.113.874		370.587.120	1.170.564.954	-
PPnBM	69.721.381.777		4.631.774.900	65.189.630.279	109.976.577
Pajak ...	1.961.959.963		233.189.762	1.728.170.201	
Pajak Penghasilan Migas	291.917.229		286.718.230		105.085.077
Pajak Penghasilan Non Migas	31.89 .628.693		615.56 .901	30.869. 6.560	
... Dalam Negeri	-		-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan	4.256.424.681		1.444.601.050	3.046. 30.76	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.111.090.901		1.165.879.751	4.077.211.202	
Pajak Penghasilan Pasal 21 ...	2.567....		9.762.070	277.279.907	
Pajak Penghasilan Migas	6. 5 .101	-	5.9 5.830	-	3.919.299
PPh Pasal ... Non Migas	750.723.417	-	39.742.510	704.482. 6 2	-
Pajak Penghasilan Pasal 22 ...					-
Pajak Penghasilan Pasal 23 ...	272....		6....	271....	
Pajak Penghasilan Pasal 25 ...	3.0 .05 .11		9 .956.070	3....	
Pajak Penghasilan Pasal 26 ...	7.497....	-	26	7....	
...	2.070.486.533	-	497.364.4 0	573.122.9 .3	-
JUMLAH	37.270.936.107	16....	2.747.287.728	51.07 .18 .077	250.432.76
Migas	21.027....		1 .021.070	21.0	
Minyak Bumi ...	20....		5	20....	
Minyak Bumi 0,5%	536....	-	1	5	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi ...	779....	-	1....	686....	-
Gas Bumi 0,5%	4....		150....	4	-
Gas Bumi dalam rangka Otsus					-
Migas ...	11....		2	10....	
Panas ...	29....		10....	29....	
Pajak ...	5		96	50....	
Pajak Bumi ...	-	16....	3	-	7 ....
Bea Perolehan ...			-		-
Jenis Setoran		1	55....		97....
Penerimaan Dalam Perjalanan					
Pajak Lainnya	63....		97	35....	
...	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-
...	....		31	35....	-
...	199....		1		1 ....
Total ...	37....	19....	2	1	2 ....

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Blitar

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2019	KB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2020)	Dialokasikan pada TA 2020 (PMK No. 172/PMK.07/2020)	Sisa LB s.d TA 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	6.691.201.941	1.686.940.226	5.004.261.715
PBB	-	-	6.194.553.451	925.292.578	5.269.260.873
PBB Pasal 25	-	-	175.292.327	99.292.327	-
PBB Pasal 29/29	-	-	5.969.179.130	826.181.317	5.143.048.813
BPHTB			496.648.490	761.647.648	121.999.158
Bagi Rata					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Penerimaan Minyak	-	-	365.011	365.011	-
Bagian Daerah Penghasil Bukan Minyak	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Gas	-	-	761.972.064	264.311.914	497.372.250
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					
Bagian Penerimaan Pertambangan					
Bagian Penerimaan Minyak Bumi	-	-	12.684	12.684	-
Bagian Penerimaan Bukan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Penerimaan Pertambangan Panas Bumi			32.087.298	12.271.298	19.816.000
Bagian Penerimaan Pertambangan Kehutanan					
Bagian Penerimaan Pertambangan Lainnya		-	-	-	-
CHT	-	-	- 345.540	- 345.540	-
PBB	-	19.472.067	94.817.890	-	87.217.339
Migas			53.050.033		46.370.084
Migas Bukan DBH					
Migas Pasal 22			53.050.033		46.370.084
Migas Pasal 25/29 Badan Sanksi	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	4.846	-	- 4.846
Gas Bumi 0,5%	-	-	6.850	-	6.850
Gas Bumi dalam Rangka PMDN	-	-	-	-	-
Kehutanan			490.000		490.000
Landbon			490.000		490.000
Sanksi					
Panas Bumi	-	-	98.676	-	98.676
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	867.676	-	767.676
Deforestasi Lainnya Kehutanan					
Perikanan		19.472.067			
PNBP	-	-	-	-	-
BLUPS	-	-	-	-	-
Pasal 4		19.472.067			
Pertambangan					
Grand Total	19.472.067		3.859.010.654	1.773.273.428	2.371.462.942

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Blitar

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2021 yang telah Dibayarkan	TA 2021 yang belum Dibayarkan	Perhitungan TA 2021 Sesudah Audit (LHP No. 31/LHP/XVII/2022)	Selisih TA 2020 yang belum Dibayarkan	Selisih TA 2020 yang telah Dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-(2)	(6)
Pajak	1.[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Hasil	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Migas	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Dana Bunga					
Bagian Daerah PPh Pasal 21 Pensiunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah PPh Pasal 21 Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah PPh Pasal 25/29 Badan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pemerintah Daerah Migas	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Bagian Pemerintah Daerah Non Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Dana Reboisasi					
Bagian Daerah PPh Pasal 21 Pensiunan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pemerintah Daerah Migas	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Bagian Pemerintah Daerah Non Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
PPN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Migas Bagian DBH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Migas Bagian DAU	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Migas Bagian Dana Bunga					-
Gas Bumi PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi PPh Pasal 22	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi PPh Pasal 22 Bagian Pemerintah	-				
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Minerba PPh	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Minerba PPh Pasal 22	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Lainnya		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Alat Berat	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Alat Berat PPh Pasal 22	-	-	-		
Pajak Air Permukaan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Pajak Air Permukaan PPh Pasal 22	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Pajak Rokok	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Rokok PPh Pasal 22	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opsen		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Opsen PKB	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Opsen BBNKB	-	-	-		
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Lainnya					
Total	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Denda Pajak	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bojonegoro (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB/KB TA 2019 (PMK No. 115/PMK.07/2021)	Penyesuaian Realisasi TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.[illegible]/2021)	Sisa LB/KB TA 2019 (KMK No. [illegible]/KM.[illegible]/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			[illegible]	2.702.2[illegible].928	[illegible]
PPh			2.702.[illegible]	2.702.2[illegible].928	
PPh Pasal 21			[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	-	-	1.93[illegible]	1.[illegible]	-
PBB	-	-	2.563.275.644	-	2.538.275.64[illegible]
Bagi Rata	-	-	-	-	
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perkebunan			2.434.244.714	-	2.434.244.7[illegible]
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-				
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	103.330.930	-	108.387.930
Biaya Pemungutan Perhutanan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT					-
SDA	-	36.791.415	342.[illegible].858.478	170.317.944.548	70.66[illegible].[illegible]3.930
Migas	-	-	340.[illegible].858.478	170.317.549.548	170.461.[illegible]3.930
Minyak Bumi 15%	-	-	340.[illegible].120.030	170.317.[illegible].548	170.[illegible]
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%			[illegible]	-	49.448
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent	-	-		-	
Royalti					
Panas Bumi					
Setoran Produksi					
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		36.791.4[illegible]			
IIU					
IHPH			-	-	-
PSDH	-	36.791.415	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	
Grand Total		36.791.[illegible]	344.084.720.[illegible]	173.0[illegible].291.074	173.029.291.[illegible]

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota [illegible]

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Sampai dengan TA 2020 (PMK No. [illegible]/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bag. Pusat	[illegible]	-	265.685.700	[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perkebunan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]	-	8.604.300	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Non Migas	-				
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		209.300	[illegible]	
CHT	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Minyak Bumi 0,5%	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Minyak Bumi dalam rangka Otsus					
Gas Bumi 30%		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%		[illegible]	309.200		[illegible]
Gas Bumi dalam rangka Otsus				-	
Minerba	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Panas Bumi		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Setoran Produksi					
Iuran Tetap		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
IHPH					
DR					
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Jumlah Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Nama Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

PPh DBH	PP No. 55 Tahun 2005	PP No. 104 Tahun 2000	Alokasi DBH TA 2020 (PMK No. 45/PMK.07/2020)	Penyaluran DBH TA 2021 (PMK No. 9/PMK.07/2021)	Alokasi DBH TA 2021 (PMK No. 226/PMK.07/2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pokok	-	-	1.207.963.806	1.449.968.044	(242.004.238)
Kini			1.204.973.326	1.281.911.197	(76.937.871)
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29			1.204.973.326	1.281.911.197	(76.937.871)
PPh			2.990.480	168.057.847	(165.067.367)
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah PPh Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 21			-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			721.010.000		721.010.000
Bagian Daerah Pertambangan			1.220.000.242	1.220.000.242	
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat PPh Migas			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pasal 21			1.130.102	1.130.102	
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan			30.007.428		30.007.428
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan	-	-	15.815.134	15.815.134	
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan	-	-	-	-	-
Cukai					-
Cukai		12.603.503	1.027.147.047		1.039.750.550
Migas			2.611.142.502		2.611.142.502
Migas Bagian Pusat (85%)	-		1.970.711.892		1.970.711.892
Migas Bagian Daerah	-	-	536.784.127	-	536.784.127
Migas Bagian Pemerintah Pusat Anggota OPEC	-	-	-	-	-
Gas Alam 2021			117.646	-	117.646
Gas Alam 2020			1.870		1.870
Gas Alam Bagian Pemerintah Pusat					
Minerba					
Royalti	-	-	-		
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Hasil Hutan	-	-	7.196.909	-	7.196.909
Dana Reboisasi			-	-	-
Dana Hutan			7.196.909		7.196.909
Bagian Pemerintah Pusat					
Perikanan	-	12.603.503	-		
PNBP	-	-	-	-	-
Lainnya				-	-
PNBP		12.603.503			
Pertambangan	-	-			
Jumlah Total	-	12.603.503	4.235.996.213	1.449.968.044	2.798.631.672

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bondowoso

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2020	PPh Pasal 21 Tahun 2020	Kurang/(Lebih) Bayar DBH Berdasarkan LKPP Tahun 2020 (PMK No. 93/PMK.07/2021)	DBH Tahun 2022 yang telah disalurkan	DBH Tahun 2022 yang harus disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	7,870,030,202	-	7,650,479,548	6,730,260,760	919,818
PBB	4,014,753,142	-	3,741,951,838	3,651,961,748	-
PBB Migas	3,000,000,000	-	3,000,978,100	2,736,999,000	-
PPh Pasal 25/29	1,013,821,712	-	271,090,104	267,278,978	-
BPHTB	7,020,030,102	-	3,411,734,000	3,600,000,000	5,110,774
Pajak Rokok	1,951,536,897	-	203,089,707	1,748,270,947	-
Kurang Bayar Tahun Lalu	1,786,500	-	167,011,000	-	7,081,000
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Migas	-	-	-	-	-
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
Kurang Bayar Dana Alokasi Umum	900,000,000	-	712,430,000	548,000,000	-
Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus	1,156,231,000	-	324,242,000	1,420,000,000	-
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	15,000,000	-	8,000,000	200,000,000	-
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Migas	5,503,200	-	5,637,400	-	277,160
Kurang Penyaluran Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Kurang Penyaluran Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-
Kurang Penyaluran Dana Alokasi Khusus	91,120,214	-	16,142,000	16,042,011	-
Kurang Penyaluran Dana Otonomi Khusus	55,382,036	-	10,736,350	50,000,000	-
Kurang Penyaluran Dana Keistimewaan DIY	7,741,024	-	1,501,000	6,697,324	-
DAU	3,670,212,014	-	2,444,077,143	1,911,039,748	-
DBH	221,167,701,611	1,000,000	1,080,172,000	22,710,790,171	250,000,000
Migas	21,736,000,000	-	282,121,000	21,017,000,000	-
Pajak Rokok	27,591,000,000	-	971,219,000	27,314,000,000	-
Minerba Bagian Pusat	668,000,000	-	16,000,000	5,000,000	-
Minerba Bagian Daerah dari Penerimaan Pusat	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	205,000,000	-	9,000,000	365,000,000	-
Cukai Hasil Tembakau	4,000,000	-	1,000,000	4,410,000	-
Cukai Hasil Tembakau Kurang Salur	-	-	-	-	-
Migas Hulu	1,967,000,000	-	21,000,000	1,000,000,000	-
Tambang Panas Bumi	-	-	-	-	-
Royalti	1,967,000,000	-	21,000,000	1,000,000,000	-
Pajak Daerah	-	15,000,000	25,000,000	-	12,000,000
Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
Pungutan Lainnya	-	15,000,000	25,000,000	-	13,000,000
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Koreksi Pajak	10,000,000	-	1,000,000	10,000,000	-
DAK	-	-	-	-	-
DID	-	-	-	-	-
TOTAL	15,000,000	-	100,000,000	10,000,000	-
Tidak Dapat	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000
Jumlah	58,438,696,639	15,000,000	7,650,479,548	70,000,000,000	27,000,000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gresik

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	3.411.331.024	202.809.300	204.721.000
[illegible]	-	-	201.797.276	190.123.472	11.961.124
PPh Pasal 21				-	-
PPh Pasal 21/26			191.797.276	80.123.472	11.961.124
PBB	-	-	13.947.026	33.679.274	32.670.400
Bea Perolehan	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan	-	-			
Pajak Penerangan Jalan Dari Pemerintah Daerah					-
Pajak Penerangan Jalan Dari Pemerintah			72.000.000	-	72.000.000
Pajak Daerah Pemerintah			-	-	-
Pajak Daerah Lainnya	-	-	867.000	867.000	
Pajak Penerangan Jalan	-	-			
Pajak Penerangan Jalan Dari Pemerintah			1.001.021	1.001.021	-
Pajak Penerangan Jalan Dari Pemerintah Daerah				-	-
Pajak Penerangan Jalan Dari Pemerintah			3.222.630	-	3.222.630
Pajak Penerangan Jalan Dari Pemerintah	-	-	-	-	
Pajak Penerangan Jalan Dari Pemerintah	-	-	1.000.000	1.000.000	
CHT				-	-
SDA	-	265.000.000	265.000	-	265.000
Nasab			-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Panas Bumi			-	-	-
Landrent	-	-	-	-	
Royalti	-	-			
Dana Bagi Hasil			897.000	-	897.000
Dana Perimbangan					-
Dana Bagi Hasil			897.000	-	897.000
Dana Insentif Daerah Pemerintah			-	-	-
DAU	-	6.575.636			
DAK	-				
DAU				-	-
DAK		9.000.000	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	
Total Dana	-	9.577.636	580.167.297	192.809.300	192.809.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gresik

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2020	Lebih Bayar TA 2020	Pagu DBH Tahun TA 2020 (PMK No. 67/PMK.07/2021)	PB TA 2020 yang telah disalurkan	Sisa PB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3)	(6)
Pajak	20.[illegible].202.000		[illegible].224.110.000	[illegible].[illegible].000.000	
Cukai	39.[illegible].[illegible].000		[illegible].[illegible].000.000	[illegible].[illegible].[illegible].000	
70% Pajak	[illegible].[illegible].[illegible].347	-	[illegible].[illegible].[illegible].000	[illegible].[illegible].[illegible].347	-
70% Pasal 25/29	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].000	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
PBB	[illegible].[illegible].[illegible].177	-	[illegible].[illegible].[illegible].000	[illegible].[illegible].[illegible].177	-
Bagi Hasil	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].000	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].000	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
Bagian Daerah Migas	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].000	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
Bagian Daerah Panas Bumi					-
Bagian Daerah Pertambangan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].000	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
Dana Perimbangan Minerba	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
Dana Perimbangan Dari Migas	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Dana Perimbangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Pertambangan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Dana Perimbangan Kehutanan					
Dana Perimbangan Pertambangan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
DBH	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Total	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Migas	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Minyak Bumi (15%)	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Minyak Bumi (0,5%)	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
Minyak Bumi Hasil Kondensat Ultras					
Gas Bumi (30%)		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi (0,5%)	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Pertambangan	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-
Landrent	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Royalti	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	
Panas Bumi		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Hasil Perikanan			-		
Perikanan	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Kehutanan Reboisasi (DR)	-	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Iuran					
Total		-	-	-	-
PBHT	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Pajak Rokok	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Grand Total	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Jember

(dalam rupiah)

Jenis DBH	DBH yang Disalurkan	Kurang Bayar	PMK No. 82/PMK.07/2021	Perpres No. 75 Tahun 2015 (Perpres No. 39/2021)	Hasil Rekonsiliasi (Kolom (5)-(4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=(5)-(4))
Pajak			1.272.127.478	2.354.156.495	1.082.029.017
PPh			1.268.239.769	-	(1.268.239.769)
PPh Pasal 21			1.268.239.769	-	(1.268.239.769)
PPh Pasal 25/29					-
PBB			3.887.709	2.354.156.495	2.350.268.786
Cukai Hasil					
Bagian Daerah Hasil					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Tambang			796.981.000		796.981.000
Bagian Daerah Penghasil Perikanan			9.787.561.147	2.268.361.477	
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan					
Bagian Pemerintah Pusat					
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil Migas					
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil Tambang			53.135.730		53.135.730
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil Perikanan			157.017.180	97.270.135	(59.747.045)
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil Kehutanan					
DBH					
SDA		34.111.049	8.181.701		8.181.701
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pertambangan			17.317.675		17.317.675
Landrent			17.317.675		17.317.675
Dividen					
Panas Bumi			96.079		96.079
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi			96.079		96.079
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		34.111.049			
PSDH					
DR					
PSDH		34.111.049			
Perikanan					
Jumlah Total		34.111.049	1.322.679.097	2.356.156.495	2.350.268.786

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Jember

(dalam rupiah)

Jenis DBH	TA Berjalan TA 2021	TB Definitif TA 2020	Penyaluran s.d. DBH Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 7/PMK.7/2021)	Alokasi Kurang Bayar DBH (Penyaluran)	DBH 2020 yang Belum Disalurkan
1	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	(8)=(4)-(7)
Total	27.202.178.810		14.098.709.774	-129.650.582	
PPh	15.191.923.271		5.717.243.760	3.478.758.582	-
PPh Pasal 21	2.242.190.006		2.242.190.006	414.814.278	-
PPh Pasal 25/29	1.791.841.008		478.791.000	1.313.027.428	-
PBB	9.309.487.956		3.216.262.754	3.750.916.876	11.809.754
Cukai Hasil	1.851.080.534		781.996.720	1.726.270.200	
Sanksi Daerah Angsur	4.000.410.761		573.959.106		27.451.220
Bagian Daerah Hasil Cukai				-	
Bagian Daerah Hasil Migas				-	
Bagian Daerah Hasil Laut	659.884.915		401.233.980	102.746.570	
Bagian Daerah Hasil Pertambangan	2.516.697.901	-	1.896.060.020	647.321.032	
Bagian Daerah Hasil Perikanan	814.601.207	-	9.202.500	208.599.000	
Bagian Afirmasi Hasil Migas	10.618.702	-	8.477.710	-	857.970
Bagian Afirmasi Hasil Migas				-	
Bagian Afirmasi Hasil Migas				-	
Bagian Pemerataan Hasil Pertambangan	38.142.362	-	29.819.430	21.762.042	
Bagian Pemerataan Hasil Pertambangan	25.709.301	-	23.676.510	21.498.030	
Bagian Pemerataan Hasil Perikanan	7.118.424	-	210.600	7.153.924	
DBH	9.351.058.916		4.024.734.810	1.301.255.434	-
SDA	20.849.101.107	31.650.010	13.810....	12.2...	17.020.605
Migas	2.697.985.350	-	978.52...	21.21...	
Bagian Daerah 0,5%	20.697.1...	-	554....	20.15...	
Bagian Daerah 0,5%	648....	-	16.47...	57...	
Migas Bagian Daerah Lainnya				-	
Gas Bumi (0,5%)	271....		9.7...	261....	-
Gas Bumi (0,5%)	9....		1...	7....	-
Gas Bumi Bagian Daerah Lainnya	-				-
Pertambangan	1.841....	3....	6....	1....	5....
Landrent	-	3....	4...		5....
Royalti	1.841....	-	2...	1....	
Panas Bumi		4....	4....	-	2....
Bagian Daerah	-	4....	1....		1....
Bagian Daerah Lainnya	-				
Kehutanan	946....		3...	2...	
IHP			-	-	
PSDH				-	-
PSDH	584....		2...	27...	
Perikanan	150....	-	11...		13...
Grand Total	31....	1....	4....	1...	1...

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gunung ...

(dalam rupiah)

Uraian	PT Tbk 01	PT Tbk 02	Sebelum Penyesuaian (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyesuaian (KEP-[illegible]/PK.7/2021)	Setelah Penyesuaian (KEP-[illegible]/PK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=(1)+...+5)
Pajak			1.854.[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Atas Migas					
Bagian Daerah Atas Migas					
Bagian Daerah Pertambangan			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Pertambangan			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Daerah Atas Migas					
Bagian Pertambangan Atas Migas			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Pertambangan Panas Bumi					
Pasal 21					
PPh		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Migas			[illegible]		[illegible]
Migas Pasal 22					
Migas Pasal 0,5%					
Migas Lapor Dalam Negeri Orang					
Gas Bumi 0,5%			[illegible]		[illegible]
Gas Bumi 0,5%			[illegible]		[illegible]
Gas Bumi dalam Negeri Orang					
Minerba					
Minerba					
Royalti					
Panas Bumi			[illegible]		[illegible]
Panas Bumi					
Panas Bumi			[illegible]		[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah					
PPh Pasal 21		[illegible]			
PPh					
PPh 22					
PPh 23		[illegible]			
Pajak Lain					
Jumlah		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Jombang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	LB TA 2020	Pagu DBH Berdasarkan TA 2020 (PMK No. 226/PMK.07/2019)	KB TA 2020 yang telah dibayarkan	LB TA 2020 yang telah dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PBB	10.479.778.505	1.703.176	9.010.952.814	11.090.132.869	17.021.700
BPHTB	6.031.504.545	-	3.848.607.402	5.182.576.002	
CHT (Dana Bagi Hasil)	3.812.222.084	-	3.429.659.700	4.605.605.163	
CHT (Dana Alokasi Umum)	1.833.854.490	-	335.585.272	1.158.017.161	-
PBB	5.960.118.627	1.724.420	914.534.200	2.923.434.757	17.034.700
Rokok	1.541.958.960		2.010.481.702	1.177.277.203	-
Sawit Dana Bagi Hasil	554.312.076		115.221.800	20.000.274	
Sawit Dana Alokasi Umum	1.339.540	-	16.116.702	37.222.310	
Sawit Dana Alokasi Khusus	-	-	-		
Pajak Penerangan Jalan	3.011.776.348	-	794.437.702	2.527.751.958	
Pajak Daerah Tertentu		2.127.280	6.777.907	-	16.138.100
Sawit Dana Bagi Hasil Cukai	2.529.057		8.101.302	226.094.737	-
Dana Kehutanan Migas	1.638.59		11.782.502	270.122	
Dana Perimbangan Panas Bumi	5.084.346	-	842.451	2.722.950	
Pajak Penerangan Jalan Migas			-	-	
Pajak Penerangan Jalan Minerba	139.733.648	-	12.267.151	114.771.058	-
Pajak Penerangan Jalan Panas Bumi	-	13.307	302.450		280.400
Dana Perimbangan Batu Bara Migas	7.430.224	-	295.350	7.139.321	
DAU	4.177.200.272	-	5.301.719.151	1.291.132.192	
DBH	20.706.000.000	5.127.155	1.053.217.150	23.704.138.150	25.127.155
Migas	11.627.365.202		362.121.400	27.256.348.735	-
Minyak Bumi	10.619.714.393		362.121.400	20.710.250.000	-
Minyak Bumi - DBH	676.650.547		362.121.400	6.545.921.747	-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-		
Gas Bumi	791.650.272	-	3.472.511	191.643.012	
Gas Bumi - DBH	6.571.323	-	160.720	4.176.636	
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat			-	-	
Pertanian	1.921.000.000		24.000.000	1.643.612.735	-
Kehutanan	-		-		-
Pertambangan	837.850.365		27.000.000	13.013.612.735	-
Pajak Rokok	-	5.127.155	1.250.000		12.721.710
Cukai Hasil Tembakau	-		-		
Dana Reboisasi		5.127.155	5.077.036	-	12.721.710
Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi				-	
Perikanan	98.350.431		92.000.000	10.431.722	-
Cukai	-	-			
Tembakau	-	-	-	-	
Lainnya	598.322.727		92.870.775	3.451.722	-
Pajak Rokok	536.350.990		213.981.000		137.852.000
Grand Total	47.197.868.778	5.129.029	9.064.124.001	31.394.680.209	167.411.470

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kuantan

(dalam rupiah)

URAIAN	KPPN [illegible]	KPPN 2018	Kab. Kuantan (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyesuaian Kab. Kuantan (KMK No. 5/KM.7/2021)	Kab. Kuantan (PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak			1.3[illegible]6.126.403	2.067.274.9[illegible]	2.3[illegible]3.400.561
PPh			1.457.241.671	-	1.457.241.671
PPh Pasal 21			-		-
PPh Pasal 25/29			1.457.241.671		1.457.241.671
PBB			879.[illegible]8.329	2.067.[illegible].829	2.9[illegible].[illegible]
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat			-	-	-
Bagian Daerah Hasil Migas			-	-	-
Bagian Daerah Hasil Pajak Lainnya			-	-	-
Bagian Daerah Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			207.101.480		207.101.480
Bagian Daerah Hasil Pajak Penghasilan			672.[illegible].[illegible]	2.067.[illegible].829	2.[illegible].[illegible]
Cukai Hasil Tembakau			-		-
Bagian Pemerintah Pusat			-	-	-
Bagian Daerah Penghasilan Cukai Hasil Tembakan			-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Cukai Hasil Tembakau			4.911.252		4.911.252
Bagian Daerah Penerimaan Cukai Hasil Tembakau			167.[illegible].606	-	[illegible].606
Bagian Pemerintah Daerah Penerimaan Cukai Hasil Tembakau			-	-	-
PNBP			107.715.000	107.345.000	-
SDA		[illegible].[illegible].271	2.[illegible].[illegible].606		2.[illegible].[illegible].[illegible]
Migas			2.[illegible].960.[illegible]		2.[illegible].960.[illegible]
Bagian Pusat 15%			[illegible].[illegible].756		[illegible].756
Bagian Daerah 0,5%			358.262.[illegible]		358.262.[illegible]
Bagian Daerah Migas Kategori Tertentu			-	-	-
Non Migas/SDA			418.466	-	418.466
Bagian Pusat 0,5 %			0.830		0.830
Bagian Daerah Non Migas/SDA					
Pertambangan			-		
Kehutanan			-	-	
Perikanan			367.696	-	367.696
Panas Bumi			-		-
Pertambangan			67.[illegible].[illegible]		467.[illegible]
Bagian Daerah Pertambangan					
Kehutanan		[illegible].[illegible].[illegible]	-	-	-
Perikanan			-	-	-
PNBP		[illegible].[illegible].[illegible]			
PP Khusus		-			
Jumlah Total		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kediri (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH sementara TA 2020 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2020)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	20.543.[illegible].064	-	8.974.[illegible].595	11.56[illegible].275	9.66[illegible]
PPh	8.543.[illegible].610	-	3.954.[illegible].300	5.59[illegible]	
PPh Pasal 21	7.[illegible].027	-	3.656.[illegible].300	[illegible].237	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]		[illegible]	1.[illegible].583	-
PBB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tahun Lalu	[illegible]		[illegible]	1.726.[illegible].292	
Bagian Daerah Migas	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perdesaan	870.[illegible]		[illegible]	[illegible].553	-
Bagian Daerah Perkotaan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi			-	-	-
Biaya Pemungutan Perdesaan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Perkotaan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.436.[illegible]	-	[illegible]	7.[illegible]	
CHT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
SDA	23.[illegible]	[illegible].123	[illegible].125	23.[illegible].540	[illegible]
Migas	21.627.[illegible]		[illegible]	21.[illegible]	-
Minyak Bumi 15%	20.[illegible]		[illegible]	20.[illegible]	
Minyak Bumi 0,5%	603.695.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Minyak Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	[illegible].262	-	[illegible]	[illegible]	
Gas Bumi 0,5%	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi dalam rangka Otsus			-	-	-
Minerba	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Iuran Tetap	2.[illegible].729			2.[illegible].729	
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Iuran Produksi	-		-	-	-
Iuran Tetap		[illegible].127	[illegible]	-	[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah					-
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
IIUPH	-	-	-		
PSDH	-	-	-	-	-
DR	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lamongan

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	Kab TA 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2020)	Penyesuaian Kab TA 2020 (PMK No. 208/PMK.07/2020)	Kab. KB TA 2020 Setelah PMK 208/PMK.07/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	721.761.944	7.472.347.553	8.194.109.497
PBB			-	-	-
PPh Pasal 21				-	-
PPh Pasal 25/29					-
PDB			1.217.074.000	291.101.027	1.517.202.363
Cukai					
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 21		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29			1.201.073.000	208.103.027	1.409.176.000
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Pasal 4 ayat 2	-	-			
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas		-			-
Bagian Pemerintah Pasal 21					-
Bagian Pemerintah Pasal 25/29			20.761.000		20.761.000
Bagian Pemerintah Perkebunan	-	-	-		-
Bagian Pemerintah Pasal 4 ayat 2	-	-	-	-	-
PPN			917.304.944	7.181.320.526	-
PPnBM		19.121.204	1.202.002	1.202.002	-
Migas			42.031	42.031	
Minyak Bumi PBH	-	-			
Minyak Bumi PBM	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Pasal 4 Ayat 2 Final	-	-	-	-	-
Gas Bumi PBH		-	419.496	419.496	-
Gas Bumi PBM			42.031	42.031	-
Gas Bumi selain Pasal 4 Ayat 2 Final					-
Pajak Lainnya					
Cukai	-	-			
Bea Meterai	-	-	-		
Pajak Bumi	-	-	697.674	697.674	
Pajak Penghasilan		-	-	-	-
Pajak Lainnya			697.674	697.674	-
Pendapatan Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	3.177.994	-		
IHT	-	-	-	-	-
Lainnya				-	-
PHTL		15.127.221			
Perikanan	-				
Jumlah Total	-	3.177.994	1.649.351.969	7.183.351.571	1.217.092.592

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lamandau

(rupiah)

URAIAN DBH	PENETAPAN TA 2021	LEBIH BAYAR TA 2021	PENYALURAN APBN TA 2020 (KMK No. 743/2020)	KURANG BAYAR TA 2020 yang belum disalurkan	LEBIH BAYAR TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	28.179.770.000		8.154.136.113	20.025.633.887	
PBB	8.701.877.000		2.610.563.100	6.091.313.900	
PPh Pasal 21	2.672.051.000		2.201.815.750	470.235.250	
PPh Pasal 25/29	1.270.840.000		291.000.000	979.840.000	
BPHTB	1.755.110.848	-	1.113.500.400	641.610.448	-
Pajak Lainnya	1.931.960.000	-	268.489.750	1.663.470.250	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	670.710.000	-	401.458.100	269.251.900	-
Bagian Daerah Penghasil Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Perimbangan	2.750.182.000		912.930.120	1.837.251.880	
Bagian Daerah Perimbangan Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sebagai Penyalur	615.300.207	-	346.373.600	268.926.607	-
Dana Perimbangan Migas	27.711.181	-	13.064.320	14.646.861	-
Dana Perimbangan Non Migas					
Dana Perimbangan Pemanfaatan Hutan					
Dana Perimbangan Pertambangan	16.697.695	-	8.301.300	8.396.395	-
Dana Perimbangan Perikanan	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Reboisasi	7.146.021		2.142.000	5.004.021	
DBH	4.486.310.971		1.084.078.140	3.402.232.831	
Pajak	30.648.426.912	5.427.127	1.060.010.973	29.588.415.939	5.427.127
Migas	1.627.506.303	-	582.571.620	1.044.934.683	-
Pertambangan Umum	26.459.114.963	-	452.210.960	26.006.904.003	-
Kehutanan	225.703.647	-	12.450.400	213.253.247	-
Pertanian Dan Jenang Kanggo					
Cukai Hasil Tembakau	2.750.903.303		9.011.293	2.741.892.010	
Cukai Hasil Hasil	9.577.329		3.767.720	5.809.609	
Cukai Hasil Olahan Lainnya					
Pajak Rokok	1.858.350.309	-	1.068.350	1.857.282.959	-
Sanksi Pajak	888.334	-	-	888.334	-
Bea Meterai	1.047.140.857	-	21.013.700	1.026.127.157	-
Pajak Lainnya		5.427.127	1.297.000		12.727.250
Jasa Produksi					
Cukai Hasil		5.427.127	7.300.000		12.727.250
Sebagian Bagian Dari Pajak	-	-	-	-	-
Pajak Lainnya	136.768.170	-	140.010.000	93.850.000	-
Cukai					-
Migas					
Pajak	96.160.150	-	102.910.000	93.850.000	
Pajak Lainnya	50.108.020	-	37.100.000	-	57.994.070
Jasa Produksi	1.584.906.341	5.427.127	1.213.000.000	37.573.000.000	70.721.320

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lumajang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PMK No. 39/PMK.07/2019	PMK No. 55/PMK.07/2020	PMK No. 57/PMK.07/2020	PMK No. 8/PMK.07/2021	Jumlah (4+5+6+7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=1+2+3+4)
Pajak			1.977.614.062	1.165.320.464	3.142.934.526
PPh			1.476.406.062	1.165.320.464	3.001.726.526
PPh Pasal 21			38.334.749	28.534.149	
PPh Pasal 25/29			1.438.071.313	1.136.786.315	574.705.628
PBB			455.208.000		528.658.000
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Atas Migas					
Bagian Daerah Dari Migas					
Bagian Daerah Atas Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Dari Pertambangan Panas Bumi			488.799.809		430.067.809
Bagian Daerah Atas Pertambangan Minerba					
Bagian Daerah Dari Pertambangan Minerba					
Bagian Pemerintah Atas Migas					
Bagian Pemerintah Dari Migas					
Bagian Pemerintah Atas Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Dari Pertambangan Panas Bumi			88.147.420		88.147.420
Bagian Pemerintah Atas Pertambangan Minerba					
Bagian Pemerintah Dari Pertambangan Minerba					
PPh 21					
PPh 25		16.120.638	314.787.030		637.567.026
Migas			731.420.317		731.420.317
Minyak Bumi 15%			731.420.317		731.420.317
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Kondisi Tertentu					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Cost Recovery					
Minerba			205.757.719		205.757.719
Landrent			205.757.719		205.757.719
Royalti					
Panas Bumi					
Bunga Tanah					
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		17.152.393			
PSDH					
DR					
PSLH		17.152.393			
Perikanan					
Jumlah Total		17.152.393	2.977.614.062	1.165.320.464	4.177.934.526

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tanjung (Rupiah)

URAIAN DBH	PB TA 2020	LB TA 2020	Penyaluran DBH Sampai dengan TA 2020 (Min No. 7/KM.7/2021)	PB TA 2020 yang Belum Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	8.353.707.305	527.175.705	7.125.000.172	1.228.707.133	527.175.705
PPh	7.777.021.045	-	5.548.313.912	2.228.707.133	-
PPh Pasal 21	5.219.113.051	-	2.990.405.918	2.228.707.133	-
PPh Pasal 25/29	1.557.907.994	-	1.557.907.994	-	-
PBB	576.685.260	527.175.705	1.576.686.260	-	527.175.705
Cukai	1.981.651.845	-	265.679.772	726.273.916	-
Bagian Pemerintah Pusat	97.184.180	-	172.013.672	-	74.829.492
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Non Migas					
Bagian Daerah Perbatasan	580.221.100		1.727.736.600	727.184.136	
Bagian Daerah Lokasi Cukai		527.268.544	979.514.772	-	527.268.544
Bagian Daerah Penghasil Tembakau	716.964.160	-	8.034.300	708.929.860	-
Bagian Pemerintah Migas	2.605.360		5.015.200		2.409.840
Bagian Pemerintah Non Migas					
Bagian Pemerintah Kepada Daerah					
Bagian Daerah Penghasil Tembakau	28.592.850	-	13.939.500	3.354.650	-
Bagian Pemerintah Pusat Penghasil	-	94.449.161	27.307.567		69.313.094
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil	7.466.307		236.300	7.197.021	
DAU	9.143.841.000		1.421.543.000	7.722.297.131	
DAK	20.891.450.000	21.250.072	1.011.606.977	20.121.770.555	1.901.195.517
Migas	2.182.450.000	-	872.980.000	1.309.470.000	-
Migas Tahun 2020	20.650.000.000	-	864.000.000	19.786.000.000	-
Migas Tahun 2019	889.000.547	-	8.980.000	880.020.547	-
Migas Sumber Daya Alam Panas Bumi	-				
Gas Bumi (PSO)	275.007.000		5.072.200	269.934.800	
Gas Bumi (Non PSO)	1.075.000		1.000	74.000	
Gas Bumi dalam Negeri Non PSO	-		-	-	
Minerba	1.808.173.000	7.078.517	77.474.508	1.837.876.592	9.771.517
Panas Bumi	-	7.978.517	8.907.200	-	9.771.517
Regsati	633.170.435	-	23.000.000	1.831.999.360	-
Pajak Alat Berat		5.271.555	4.271.000		10.742.555
Pajak Rokok					
Cukai Rokok		9.471.000	1.385.000		11.771.000
Retribusi Perizinan Perikanan		-	-	-	-
Pajak Lainnya	512.968.000	-	50.212.400	31.975.000	-
Dst					
Jumlah					
Pajak	5.111.000.000	-	70.513.400	454.176.600	-
Perikanan	15.185.000	-	3.000.000	-	12.185.000
Grand Total	37.701.067.000	532.261.517	9.777.413.000	9.007.172.000	1.901.195.517

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Keb. Madiun

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar DBH Tahun 2019	Kurang Bayar DBH Tahun 2020	Penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 24/PMK.07/2021)	Penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 81/PMK.07/2021)	Penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2021 (PMK No. 108/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak			2.117.111.141	328.152.109	1.789.959.032
PPh			1.991.998.912	720.198.800	2.712.197.712
PPh Pasal 21	-	-			
PPh Pasal 22/26	-	-	(0) 685.940	720.91.930	911.040.912
PPh 23	-	-	1.426.525.209	6.747.209	1.843.356.906
Jasa Kena					-
Jasa Kena Pasal 4 Ayat 2					-
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat PPh Pasal 25 Orang Pribadi Dalam Negeri	-	-	334.567.761		2.091.567.201
Bagian Pemerintah Pusat PPh Pasal 25 Badan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat PPh Pasal 26				-	-
Bagian Pemerintah Pusat PPh Pasal 4 Ayat 2					
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Mineral dan Batubara			41.059.420	7.947.029	97.592.420
Bagian Pemerintah Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Mineral dan Batubara					
PPN	-	-			
PPN DN	-	42.004.179	1.169.979.445	-	1.211.983.945
Migas	-	-	1.156.424.704	-	1.196.554.124
Minyak Bumi 15%			949.027.587	-	982.997.261
Minyak Bumi 0,5%			207.396.117		214.362.117
Minyak Bumi Sebesar Deviasi Volume					
Gas Bumi 30%			13.130		13.410
Gas Bumi 0,5%	-	-	6.650		6.650
Gas Bumi Sebesar Deviasi Volume	-	-	-	-	
Mineral	-	-	-	-	-
Batubara					-
Panas Bumi					-
Pertambangan Mineral dan Batubara			13.555.741		13.967.641
Iuran Tetap	-				
Iuran Eksploitasi	-	-	3.997.84	-	1.267.841
Iuran Eksplorasi			-	-	-
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		13.001.179			-
PPh					
PPh DN	-	-	-	-	
PPh Pasal 21	-	1.001.179	-	-	-
Perseorangan				-	-
Jumlah Total		43.005.179	3.313.111.141	728.100.138	4.041.211.279

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Madiun

(Rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	Ls Desember TA 2020	Alokasi KB DBH Desember TA 2020 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	LB TA 2020 yang belum dimanfaatkan	LB TA 2020 yang belum dimanfaatkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	14.867.067.077	-	5.837.185.775	6.713.201.764	68.719.537
Cukai	1.753.541.451	-	3.930.347.020	4.268.905.705	
Cukai Hasil Tembakau	5.971.109.537	-	3.710.790.000	3.710.190.000	
PPh Pasal 25/29	1.301.344.714	-	275.848.160	1.025.496.554	
PBB	3.753.010.997	-	638.378.320	1.428.460.759	1.210.077
Sektor Migas	1.091.051.705	-	238.500.700	1.120.270.298	-
Migas Daerah Migas	2.092.708	-	15.120.600	-	24.933.372
Migas Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Migas Daerah Dana Bumi	46.734	-	-	46.734	
Migas Daerah Pertambangan	2.824.460.997	-	547.287.120	1.938.703.427	
Migas Daerah Kehutanan	315.070.751	-	21.852.120	293.218.631	
Migas Daerah Pertambangan Panas Bumi	213.726.207	-	9.504.000	204.222.207	-
Migas Pertambangan Minyak	2.021.102	-	4.015.430	-	1.993.328
Migas Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	
Migas Pertambangan Panas Bumi	507	-	-	1.275	
Migas Pertambangan Perseorangan	115.777.547	-	60.960.200	54.817.347	
Migas Pertambangan Kehutanan	1.077.132	-	1.220.920	2.453.256	-
Migas Pertambangan Panas Bumi	2.199.129	-	243.830	2.199.204	-
PPnBM	2.213.394.777	-	508.609.755	303.040.514	
PPh	1.060.694.772	7.102.671	1.178.411.372	23.311.687.020	241.324.020
Migas	21.027.945.232	-	562.221.020	21.211.050.735	
Migas Pasal 22 Impor	20.020.111.909	-	562.221.020	21.104.356.645	-
Migas Pasal 22 Lainnya	956.008.647	-	16.414.430	97.329.127	-
Migas Pasal 22 Industri Rokok, Otorisa	-	-	-	-	-
Sektor Migas Pasal 23	279.920.767	-	1.972.000	90.028.067	
Sektor Migas Pasal 26	4.870.525	-	150.720	4.719.805	
Sektor Migas Pasal 4 Ayat (2)	-	-	-	-	
Migas	1.667.630.575	-	20.918.150	1.113.912.979	
Pasal 21	-	-	-	-	-
Pasal 22	1.667.630.575	-	20.918.150	1.113.912.979	-
Pasal 23/26	-	7.102.671	23.760.576	-	83.763.020
Pasal 4 Ayat (2)	-	-	-	-	
Pasal 15	-	7.102.671	12.470.312	-	83.763.020
Pasal 4 Ayat (2) Final Migas	-	-	-	-	
Kehutanan	97.097.042	-	308.809.450	363.871.097	-
Lak	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh/PPnBM	175.847.642	-	238.500.130	208.721.142	
Pasal 26	130.726.968	-	215.861.020	-	15.594.010
Jumlah	30.010.402.812	7.102.671	12.470.312.650	37.151.963.034	787.545.359

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Magelang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar	Lebih Bayar	Lebih Bayar DBH yang Telah Disalurkan Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK.07/2019	Penyesuaian Lebih Bayar DBH Tahun 2019 Berdasarkan PMK Nomor 3/PMK.07/2021	Sisa Lebih Bayar DBH yang Belum Disalurkan (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
PPh Pasal 21	-	-	747.241.526	586.540.065	160.701.461
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	-	-	901.369.926	1.076.240.061	174.870.135
PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	453.020.911	280.479.911	
PPh Pasal 26/26	-	-	1.970.730.000	3.047.973.000	1.077.243.000
PBB			115.011.000		115.011.000
Bagi Hasil Pajak					
Bagian Daerah Migas				-	
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah dari Dana Reboisasi	-	-	-	-	
Bagian Daerah dari Penerimaan SDA Pertambangan Umum	-	-	110.200.000		110.200.000
Bagian Daerah dari Pertambangan Minyak Bumi					
Bagian Daerah dari Pertambangan Gas Bumi				-	
Dana Perimbangan Migas		-	-	-	-
Bagian Dari Penerimaan Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	
Bagian Dari Penerimaan Dana Alokasi Umum	-				
Bagian Dari Penerimaan Pajak Daerah			3.047.973.000		3.911.000
Bagian Dari Penerimaan Retribusi Daerah			-	-	-
Dana Perimbangan Migas Lainnya			-	-	-
PPN	-	-			
PPnBM	-	6.458.818	1.871.098.329		1.871.098.329
Migas			1.871.098.329		1.871.098.329
Minyak Bumi (0,5%)			1.871.098.329	-	1.871.098.329
Natural Gas (0,5%)		-	-	-	-
Natural Gas Dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	
Cukai Hasil Tembakau (2%)	-	-			
Cukai Hasil Tembakau - Bagian Provinsi	-				
Minerba					
Iuran Tetap		-	-	-	-
Royalti		-	-	-	-
Pajak Daerah		-	-	-	-
Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-		
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-			
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
Kehutanan		3.150.329	-	-	-
DR		-	-	-	-
PSDH	-	-			
Pungutan		3.308.489			
Perikanan					-
Grand Total		9.459.147	9.518.459.844	935.542.065	9.931.243.824

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Magetan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Alokasi DBH Tahun 2020	Alokasi Lebih Salur DBH Tahun 2020	Penyesuaian DBH Berdasarkan PMK No. 8/KM.7/2021	DBH Tahun 2021 yang telah dialokasikan	DBH Tahun 2021 yang belum dialokasikan
Pajak	11.810.654.195	-	3.214.230.272	9.110.024.692	11.914.860.775
PBB	4.654.536.473		3.427.311.000	2.113.000.675	-
BPHTB	7.156.117.722		3.077.000.000	4.517.213.735	-
PPh Pasal 25/29	1.010.772.143		279.687.000	880.338.142	-
PBB	6.577.275.000		464.230.000	1.184.933.043	41.091.775
BPHTB	1.041.016.998		265.626.700	1.226.070.208	
Bagian Daerah dari Migas	10.255.101	-	128.814.500		604.170.369
Bagian Daerah dari Minerba	-	-			
Bagian Daerah dari Panas Bumi	-				-
Bagian Daerah dari Perikanan	210.185.145		3.011.000	765.900.546	-
Bagian Daerah dari Kehutanan	-		-	-	
Bagian Daerah dari Pertambangan Umum	215.139.207	-	8.734.300	900.074.700	
Dana Perimbangan Migas	1.705.267	-	5.710.200		3.116.643
Dana Perimbangan dari Pajak Migas	-				-
Dana Perimbangan dari Panas Bumi				-	-
Dana Perimbangan dari Perikanan	11.038.706		3.030.640	3.370.648	
Dana Perimbangan dari Kehutanan		-	-		
Dana Perimbangan dari Pertambangan Umum	1.486.744	-	270.900	1.157.221	
DAU	730.693.333		1.712.915.272	267.029.031	-
DAK	23.648.211.248		997.047.721	2.775.85[illegible]	167.434.032
Migas	21.647.841.352		928.941.600	2.943.365.737	
Migas Bagian 15%	20.006.131.999	-	384.310.300	2.101.213.705	
Migas Bagian 3,1%	699.695.197	-	18.470.400	100.228.171	
Migas Bagian Tambahan Alokasi Khusus	-	-			
Dan Bagi Hasil 3%	223.500.262		9.072.200	20.[illegible]	-
Dan Bagi Hasil 0,5%	4.978.393		1.134.400	4.[illegible]	-
Dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-		-	-	-
Minerba	1.[illegible]		[illegible]	642.[illegible]	
Iuran Tetap	-	-	-		
Royalti	1.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Pajak Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Iuran Eksploitasi	-				-
Iuran Eksplorasi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-		-	-	
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
DAK	-	-		-	
DBHCHT	-				-
DBHDR	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Reklamasi	[illegible]	-	[illegible]		[illegible]
Kendaraan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lampiran I

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	ALOKASI TAHUN BERJALAN (PMK No. 17/PMK.07/2021)	PENYESUAIAN LEBIH BAYAR TAHUN 2019 (KEP-35/PK/2021)	ALOKASI TAHUN BERJALAN SETELAH PENYESUAIAN (KEP-35/PK/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak	-	-	8.995.700.612	2.140.977.010	11.136.677.622
PPh	-	-	311.233.029	-	341.703.079
80% Pasal 25/29	-	-	311.233.029	-	341.703.079
20% Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	2.862.213.615	397.179.033	3.259.392.647
Bea Meterai			-		
Pajak Penghasilan Migas		-	-	-	
Pajak Penghasilan Non Migas	-	-		-	-
Pajak Penghasilan Pasal 21/26	-	-			-
Pajak Penghasilan Pasal 22			181.570.057	93.373.035	141.503.152
Pajak Penghasilan Pasal 23			2.367.869.850	564.769.750	2.907.869.130
Pajak Penghasilan Pasal 26		-	-		
Pajak Penghasilan Migas					
Pajak Penghasilan Non Migas	-			-	-
Pajak Penghasilan Pasal 15	-			-	-
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)			(3.043.4)	-	179.343.431
Pajak PPh Pasal 4 (2) Kegiatan Konstruksi		-	202.438.074		202.438.074
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Lainnya					
CHT	-		(1.052.013.291)	(102.215.28)	-
DBH	-	15.020.9 2	3.010.9 7	-	3.6 3.6 9
Migas			-63.6	-	-63.6
Migas Bagian Pusat (85%)		-	-		
Migas Bagian Daerah (15%)		-	-		
Migas Bagian Daerah Penghasil Migas	-				
Sda Migas 70%	-		-14.4 2	-	9.9 -69
Sda Migas 30%	-		5.650	-	5.650
Sda Migas Bagian Daerah Penghasil Migas	-		-	-	-
Minerba			5.3 .150	-	639.150
Dana Hasil		-	5.3 .150		639.150
Royalti		-	-		
Pajak Migas		-	1.372.331	-	1.372.331
Pajak Migas	-			-	-
Jumlah Migas	-		1.372.331	-	1.372.331
Sda Migas Bagian Daerah Penghasil Migas	-		-	-	-
Kehutanan		63.626.332	-		
DR	-	-			
Jumlah	-				-
PSDH		1.3 3 .3 3	-	-	
Perikanan			-		
Barang Tidak		1.636.63	5.877.663.789	2.131.377.1 11	8.249.01 .972

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Malang

(dalam rupiah)

URAIAN	PPh DTP	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29 OP	PPh Pasal 25/29 Badan	PBB	BPHTB	Penyesuaian DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA)	DBH Cukai Hasil Tembakau	DBH Pajak Penghasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	32.718.426.072	1.083.211.732	1.683.771.345	3.200.016.847	8.251.372.209	1.951.959.196	14.133.243.197	17.279.380.012	13.960.880
PPh	1.083.211.732	1.083.211.732					9.911.310.220	10.079.122.052	
PPh Pasal 21	1.683.771.345		1.683.771.345				5.350.772.220	5.177.021.670	
PPh Pasal 25/29	3.200.016.847			3.200.016.847			563.010.000	1.636.994.282	
PBB	8.251.372.209				8.251.372.209		8.147.750.700	8.963.676.437	13.960.880
Pajak Rokok	1.951.959.196					1.951.959.196	195.169.730	708.250.936	-
Pajak Hiburan Negara	253.136.787					253.136.787	44.361.750	-	13.167.068
Pajak Barang dan Jasa Negara	773.747.693					773.747.693	11.878.118	710.305.715	
Pajak Daerah Pelaku Usaha									
Pajak Daerah Perkebunan	3.079.439.101						1.107.210.000	1.200.000.000	
Pajak Daerah Perkebunan	1.071.014.941						561.000.000	591.327.941	-
Pajak Daerah Pelaku Usaha	314.657.107					314.657.107	2.310.000	305.346.107	-
Pajak Penerangan Jalan	13.638.964					13.638.964	6.271.000	-	367.000
Pajak Pengolahan Air Bawah	6.013.325					6.013.325	367.000	5.013.000	
Pajak Pemanfaatan Air Bawah									
Pajak Pengolahan Pelaku	149.911.401					149.911.401	67.346.700	81.565.701	-
Pajak Pengolahan Pelaku	80.781.287					80.781.287	47.633.700	33.147.587	-
Pajak Pengolahan Sarang Burung	7.113.63					7.113.63	323.700	7.130.024	
DAU	6.372.608.310						1.996.732.200	4.375.876.110	
DAK	20.050.211.811						1.727.012.720	22.177.023.091	109.910.000
Migas	20.050.938.360						783.871.600	21.243.866.960	-
Migas Bagi Hasil	19.859.114.369						93.319.500	19.952.433.869	-
Migas Bagi Hasil	938.607.547						690.470.400	670.220.477	-
Migas Bagi Hasil Tambahan Bagian Daerah									
Gas Bumi 70%	2.150.503.302						30.432.300	2.080.434.002	
Gas Bumi 30%	1.072.127						129.700	942.427	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus									
Migas Otsus	1.050.607.260						943.159.700	1.194.469.036	-
Tambang	195.958						131.500	1.064.558	-
Panas Bumi	1.037.650.405						1.048.405	1.343.407.090	-
Panas Bumi	4.015.000						5.427.000		811.000
Panas Bumi									
Airbus Group	1.031.920						3.027.000		811.000
Belanja Bagian Pemerintah									
Total Dana	93.924.5						95.729.650	107.051.067	
Dana									
Jumlah									
Jumlah	2.079.7						9.7 2.6	10.05.1.67	-
Tambahan	53.8 .67						3.6.871.000	-	137.50.000
Grand Total	56.0 .6 2.3						10 .77.021.017	40.00.027.552	172.3 .790

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kojokerto

(dalam ribuan)

Jenis DBH	Kurang Bayar		Lebih Bayar	
	PMK No. 39/PMK.07/2021		PMK No. 81/PMK.07/2021	
(1)	(2)		(3)	
Pajak			1.130.572.219	497.255.120
PBB			741.000.000	226.722.000
PBB Kabupaten				
PBB Kabupaten/Kota			544.961.399	224.755.393
BPHTB			654.961.881	10.741.481
Bagi Hasil				
Bagi Hasil Migas				
Bagi Hasil Migas Blok Migas			47.812.762	
Bagi Hasil Migas Blok Migas Baru				
Bagi Hasil Migas Kontraktor			772.171.350	-
Bagi Hasil Migas Kontraktor Perpanjangan			-	-
Bagi Hasil Migas Kontraktor Baru				
Bagi Hasil Migas Kontraktor Baru Migas				
Bagi Hasil Migas Kontraktor Baru Migas Baru			1.000.124	
Bagi Hasil Migas Kontraktor Baru Migas Baru				
Bagi Hasil Migas Kontraktor Perpanjangan			30.452.381	10.741.481
Bagi Hasil Migas Kontraktor Perpanjangan				
Bagi Hasil Migas Kontraktor Perpanjangan				
PPh			383.121.175	236.722.175
SDA		6.276.310	3.506.351	-
Migas			425.316	-
Migas Blok Migas 15%				
Migas Blok Migas 0,5%				
Migas Blok Migas Kontraktor Perpanjangan				
Migas Blok Migas 0,5%			119.463	
Migas Blok Migas 0,5%			5.853	
Migas Blok Migas Kontraktor Perpanjangan			-	-
Migas Blok Migas Kontraktor Perpanjangan			-	-
Migas Blok Migas Kontraktor Perpanjangan			-	-
Panas Bumi			3.080.988	
Panas Bumi				
Panas Bumi			3.080.988	
Panas Bumi Kontraktor Perpanjangan			-	-
Kehutanan		6.276.310		
PSDH				
DR				
PUPS				
Perikanan		6.276.310	-	-
Pertambangan			-	
Jumlah		6.276.310	1.773.206.189	497.255.120

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mojokerto

(dalam rupiah)

Uraian DBH	Alokasi DBH 2021	DBH Tahun 2020 yang Dialokasikan pada Tahun 2021	Penyaluran DBH s.d. Bulan Desember Tahun 2020 (Kas Umum Daerah)	DBH 2021 yang Dialokasikan pada Tahun 2021	DBH Tahun 2020 yang Dialokasikan pada Tahun 2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2]-[4]	[6]
Pajak	17.968.279.118		7.142.987.097	10.825.292.021	-
PPh	12.202.891.029		4.622.750.750	7.580.140.279	-
PPh Pasal 21	11.201.284.087		4.271.227.930	6.930.056.157	-
PPh Pasal 25/29	1.001.606.942		351.522.820	650.084.122	-
PPh	13.171.389.041	-	4.603.268.730	8.567.120.311	-
Pajak Kota	1.991.959.948	-	748.329.750	1.243.630.198	-
Dikelola Langsung Negara	327.961.575	-	309.734.430	18.192.175	-
Dikelola Daerah Provinsi	1.663.998.373	-	438.595.320	1.225.403.053	-
Pajak Daerah Dikelola Daerah Provinsi	-				-
Pajak Daerah Dikelola Kabupaten/Kota	824.798.809		368.798.130	456.000.679	-
Pajak Daerah Dikelola Pemerintah Desa	344.000.000		3.071.600	340.928.400	-
Dikelola Langsung Negara Lainnya	4.139.997.477	-	1.424.500	738.797.977	-
Dikelola Daerah Provinsi Lainnya	1.278.336	-	1.278.000	336.000	-
Pajak Penerangan Jalan Dikelola Daerah Provinsi	4.178.728	-	966.900	3.211.828	-
Pajak Penerangan Jalan Dikelola Kabupaten/Kota	-			-	-
Pajak Penerangan Jalan Dikelola Pemerintah Desa	97.136.112	-	2.950.500	19.647.312	-
Pajak Penerangan Jalan Dikelola Langsung Negara	5.004.699	-	957.450	4.200.460	-
Pajak Penerangan Jalan Dikelola Daerah Provinsi	4.476.094	-	998.500	3.180.220	-
CHT	2.669.136.706	-	1.161.061.611	1.508.075.095	-
SDA	10.822.111.019	-	1.307.969.220	12.892.150.814	37.952.010
Migas	21.042.080.303	-	580.571.630	11.043.368.765	-
Minyak Bumi 15%	20.366.110.595	-	534.939.530	10.734.705.190	-
Minyak Bumi 0,5%	662.553.847	-	17.470.450	308.259.110	-
Minyak Bumi Dikelola Pemerintah Daerah	-				
Gas Bumi 30%	275.320.747	-	9.161.650	266.020.062	-
Gas Bumi 0,5%	4.579.245	-	161.020	4.418.225	-
Gas Bumi Dikelola Pemerintah Daerah			-	-	-
Kehutanan	1.104.000.000	-	24.348.150	1.456.612.665	-
Landrent	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	1.464.000.000	-	24.348.150	1.439.651.850	-
Provisi Pertambangan Mineral dan Batubara	40.000.000	-	16.960.500	23.039.500	-
Iuran Tetap	37.000.000	-	16.960.500	20.039.500	-
Iuran Eksploitasi/Royalti	3.000.000	-	-	3.000.000	-
Perikanan	208.470.560	-	69.490.186	138.980.374	-
Pungutan Perikanan dari Perairan Umum	-			-	-
PNBP Lainnya	208.470.560	-	69.490.186	138.980.374	-
Pertambangan	208.199.910	-	818.681.669	60.053.275	949.828.304
Grand Total	54.382.239.335	-	24.750.420.691	29.631.818.644	987.780.314

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Ngada Utk

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2018 (PMK No. 55/PMK.07/2020)	Penyaluran TA 2019 (Kep. Dir. PK/6/KP.0700/2019)	S-A LB s.d TA 2018 (Kep. Dir. PK/6/KP.0700/2019)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			3.200.611.935	520.756.428	2.679.855.507
PBH			1.326.317.737	520.756.428	805.561.309
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			1.326.317.737	520.756.428	805.561.309
PBB			873.694.198		873.694.198
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Tembakau Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah 80:20 Migas Baru					
Bagian Daerah Penghasil			912.019.012		912.019.012
Bagian Daerah Penghasil Lainnya					
Bagian Daerah Penghasil Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Non Migas					
Bagian Pemerintah pada Laut					
Bagian Pemerintah Perhutanan			65.105.136		65.105.136
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					
PPh					
PBB		21.384.970	309.970.237		309.970.237
Migas			309.970.237		309.970.237
Minyak Bumi (85%)			143.641.710		143.641.710
Minyak Bumi (0,5%)			201.109.427		92.328.473
Minyak Bumi Sebelum Bagian Otsus					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi Setelah Bagian Otsus					
Pertanian					
Kehutanan					
Perikanan					
Pertambangan Umum					
Sektor Lainnya					
Pertambangan		21.384.970			
Pajak					
Bunga					
PBB		21.384.970			
Perkebunan					
Kehutanan		21.384.970	3.510.582.172	520.756.428	2.989.825.744

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Ngada/Kota (dalam rupiah)

JENIS DBH	PB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH Tahun Anggaran 2021 (PMK No. 97/PMK.07/2021)	KB DBH TA 2021 yang belum diselesaikan	LB DBH TA 2020 yang belum diselesaikan
	(3)	(5)	(9)	(12=10-9)	(14)
Pajak	12.337.670.891		9.210.373.438	7.298.806.112	4.127.676
PPh	6.111.010.903		3.071.702.000	3.039.308.103	-
PPh Pasal 21	5.764.031.351		3.033.305.600	2.730.725.775	-
PPh Pasal 25/29	1.356.979.552	-	38.396.400	308.582.328	-
PBB	6.210.746.479	-	841.362.438	5.877.301.456	3.134.676
Cukai Hasil Tembakau	3.031.660.106	-	205.690.700	1.726.270.254	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	958.036.137		241.707.120		1.766.992
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Penghasil Batubara			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	1.070.089.872		792.184.620	905.438.740	-
Dana Reboisasi			-		
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan	2.135.536.107		8.067.430	206.304.277	
Bagian Daerah Penghasil Migas	8.316.561		8.316.561		360.736
Bagian Daerah Penghasil Non Migas			-	-	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi			-	-	
Dana Perimbangan Pertambangan	89.640.695		92.103.000	97.150.481	
Bagian Pertambangan Perikanan	-		-		
Bagian Pertambangan Perikanan Lainnya	2.126.891		356.930	2.157.824	-
CHT	2.103.409.197		1.791.511.348	61.209.849	-
PDN	23.959.712.113	6.421.135	373.609.830	26.677.052.368	172.471.770
Migas	21.027.885.393	-	582.311.630	21.025.208.724	-
Panas Bumi 2,5%	2.980.114.001	-	511.213.500	20.191.896.189	-
Panas Bumi 0,5%	458.070.547	-	18.470.470	670.226.147	-
Migas Bumi Dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 50%	2.173.450.201		3.772.850	58.722.062	-
Gas Bumi 0,5%	21.016.532		159.700	4.175.921	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba	1.697.050.961	-	21.349.150	1.673.812.225	-
Landrent	-	-			
Royalti	1.467.050.578		21.318.210	1.673.812.225	-
Panas Bumi		6.121.126	1.291.620		17.152.750
Iuran Eksplorasi			-	-	-
Iuran Eksploitasi		6.421.135	4.265.403	-	17.152.750
Kehutanan Dalam Rangka Otsus	-	-	-		
PSDH	741.070.348		121.861.720	930.113.020	
DR				-	-
PSDH		-	-	-	-
Pajak	911.915.234	-	81.561.220	900.137.923	-
Perikanan	169.776.632	-	210.861.350	-	1.774.097.020
Grand Total	57.752.076.107	6.127.125	9.210.373.438	20.610.902.192	1.795.847.446

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Ngawi

(rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 57/PMK.07/2021)	Sisa LB TA 2020 (KSK No. 37/MK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	3,540,[illegible]4.13	1,[illegible]10.[illegible]	[illegible]
Cukai	-	-	694,091,302	545,631,729	148,459,573
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	694,091,302	545,631,729	148,459,573
PBB			3,[illegible]6,076,[illegible]11	1,[illegible]14,[illegible]9	[illegible]47,963
Bea Materai			-		-
Pajak Daerah Migas					
Pajak Daerah Non Migas	-	-	-		
Pajak Daerah Pemda Bersama	-	-	-	-	
Sebesar 20% PPh Perorangan	-	-	[illegible]936,941,426	[illegible]68,150,304	[illegible]768,791,122
Sebesar Daerah Kabupaten			[illegible]67,[illegible]1,[illegible]77	[illegible]87,[illegible]1,[illegible]77	-
Pajak Daerah Bagian Daerah					
Bagian Pemerintah Pusat Migas		-			
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pemda Bersama	-	-	-	-	-
Sebesar 20% PPh Perorangan			1,2,19,[illegible]71[illegible]	[illegible]92,[illegible]57[illegible]	69,469,020
Sebesar Daerah Kabupaten			9,120,610	9,[illegible]0,610	
Bagian Pemerintah Pusat Pajak Daerah	-	-			
DAU	-	-	-	-	
DAK		26,[illegible]6,[illegible]7	3,201,458,897	-	3,201,458,897
Migas			3,201,458,897	-	3,201,458,897
Minyak Bumi (15%)			2,[illegible]4[illegible],[illegible]1		2,[illegible],[illegible],[illegible]4
Minyak Bumi (0,5%)			[illegible],[illegible],[illegible]		[illegible],[illegible],[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi (30%)	-	-	4,[illegible]46	-	[illegible]
Gas Bumi (0,5%)	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba				-	-
Panas Bumi				-	-
Royalti					
Pertambangan Umum	-	-			
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Kehutanan Bagian Pemerintah				-	-
Perikanan		2[illegible],[illegible],[illegible]			
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
Sektor		25,[illegible],[illegible]		-	-
Pertambangan					-
Panas Bumi		26,[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible],[illegible]16	[illegible],[illegible],[illegible]4[illegible]	[illegible],[illegible],[illegible]71

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Nomor

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2019	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Alokasi DBH yang belum disalurkan	KB TA 2020 yang akan diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)=(3)-(4)
Pajak	78.611.073.078		6.933.941.424	8.677.205.918	57.177.975.736
Cukai	7.781.481.502		3.210.850.656	4.570.630.846	-
Sumber Daya Alam	1.070.174.662		1.031.484.720	38.689.942	-
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1.110.001.108		294.206.289	815.794.819	-
PPh	9.350.091.103		1.163.000.526	8.187.090.577	57.177.975.736
Pasal 25	1.931.645.396		265.654.700	1.666.990.696	
Pasal 21 Dalam Negeri	38.818.124		187.642.600		95.120.012
Pasal 21 Luar Negeri	-		-	-	-
Pasal 26	-		-	-	-
Pasal 22 Impor	2.716.000.000		1.096.360.500	1.619.639.500	-
Pasal 22 Bendahara Pemerintah	640.532.700		18.714.207	621.818.493	
Pasal 23 dan Pasal 26 Dalam Negeri	913.893.307		8.034.500	905.858.807	
Pasal 26 Luar Negeri	5.772.207		5.554.500	-	196.596
Pasal 26 Dalam Negeri	-		-	-	-
Pasal 26 Bendahara Pemerintah					
Pasal 4 ayat (2) Dalam Negeri	104.542.500		46.601.000	57.941.500	-
Pasal 4 ayat (2) Luar Negeri	3.193.929		8.526.100	12.750.829	-
Pasal 4 ayat (2) Bendahara Pemerintah	7.496.027		709.900	6.786.127	-
PPN	1.230.505.794		1.073.647.701	856.857.893	-
PPnBM	21.696.713.697		3.211.201.328	23.110.315.369	167.074.000
Migas	21.624.985.010		648.532.100	21.911.033.910	-
PPh Migas Pasal 22	20.855.115.919		899.715.300	21.155.399.619	-
Migas Bagian Pemerintah	669.869.147		18.477.400	670.025.147	-
Migas Bagian Pemerintah Pengganti Tunai	-		-	-	-
Gas Bumi Dalam Negeri	275.003.000		9.677.900	265.325.100	-
Gas Bumi Luar Negeri	1.973.020		1.900	1.971.120	-
Gas Bumi Dalam Rangka Migas					-
Minerba	1.850.760.850		31.019.100	1.819.841.750	-
Landrent	-		-	-	-
Royalti	847.801.855		24.147.150	1.643.611.705	-
Panas Bumi	48.857.350		3.074.400	45.783.950	-
Jasa Konstruksi					-
Jasa Lainnya	1.134.750		3.797.550	34.149.750	-
Sektor Kehutanan Dan Perikanan					
Kehutanan	847.805.876		8.469.135	339.703.351	-
Iuran					-
Jasa					-
PBB	196.450.810		31.798.120	389.789.513	
PBB Migas	154.184.666		216.561.051		127.061.727
Jumlah Total	33.787.178.873		7.811.360.749	32.079.214.394	21.393.191.191

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kas Daerah

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (PMK No. 27/PMK.07/2021)	[illegible] (PMK No. 91/PMK.07/2021)	[illegible] (PMK No. 216/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			1,210,696,971	1,210,677,772	19,199,199
Perl			1,079,696,899	1,079,696,899	-
PBB Pasal 21		-	-	-	-
PBB Pasal 25/29	-	-	1,009,696,396	1,009,696,396	-
PPh	-	-	133,696,962	115,696,772	19,199,199
Pajak Pusat	-	-			
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Pertambangan Migas					-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-	24,179,193	15,197,393	18,981,800
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-		
Bagian Daerah Perikanan	-				
Bagian Daerah Pertambangan Migas					
Bagian Pertambangan Panas Bumi			372,982	372,982	-
Bagian Pertambangan Pertambangan Umum		-	-	-	-
Bagian Pertambangan Pertambangan	-	-	16,191,696	15,818,804	372,892
Bagian Pertambangan Pertambangan	-				
Bagian Pertambangan Pertambangan					-
DBH		-	-	-	-
DBH		(361,578)	3,814,191,292	65,993,911	3,748,990,330
Migas	-	-	3,797,317,696	65,993,911	3,731,323,785
Migas Pasal 22	-		1,470,046,273	65,993,911	1,404,052,342
Migas Pasal 25/29	-		270,242,127		270,242,127
Migas Pasal 26 dan Migas Lainnya					-
Gas Alam			416,469	-	416,469
Gas Alam DBH		-	6,651	-	6,651
Gas Alam Migas Panas Bumi	-	-	-	-	-
Migas	-	-	1,053,641,904		1,053,641,904
Tambang	-		105,011,203		105,011,203
Pajak					
Pajak Bumi			961,373		961,373
Pajak Penghasilan			-	-	-
Pajak Penghasilan	-	-	837,679	-	837,679
Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-			
Pajak Penghasilan		(361,578)			
Pajak					
Pajak	-	-	-	-	-
Pajak	-	(361,578)	-		
Pajak	-				
Total		(361,578)	4,030,271,000	1,276,671,683	2,753,599,320

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pacitan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB/LB Tahun 2021	LB Tahun 2020	Penyaluran DBH 2021 s.d. Bulan ke 12 2020 (PMK 226/PMK.07/2020)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	16.211.[illegible].610		1.701.[illegible].021	0.701.[illegible].010	632.[illegible].07
Cukai	6.[illegible].[illegible].610		2.[illegible].[illegible].020	3.[illegible].[illegible].010	
PPh Pasal 21	5.[illegible].[illegible].021	-	5.[illegible].[illegible].020	5.[illegible].[illegible].021	-
PPh Pasal 25/29	1.[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
PBB	2.[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	45.[illegible].[illegible]
BPHTB	1.[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau	70.[illegible].[illegible]		1.[illegible].[illegible]		41.[illegible].[illegible]
Cukai Hasil Tembakau Non Migas	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Pajak Penghasilan Pasal 21					
Pajak Penghasilan Pasal 22	2[illegible].[illegible].[illegible]	-	37.[illegible].[illegible]	2.[illegible].[illegible]	-
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	[illegible].[illegible].[illegible]		1.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Bunga Penerimaan Negara	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Pungutan Pajak Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Pungutan Pajak Penerimaan Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	-
Pungutan Pajak Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Pungutan Pajak Penerimaan Pertambangan Lainnya					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Usaha					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Dana Reboisasi					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Hasil Hutan					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Penggantian Nilai Tegakan					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Pungutan Pajak Penerimaan Kehutanan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR PBB
PADA TAHUN 2021

Kab. Pamekasan

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1)	2)	3)	4)	5)	6) = 4) - 5)
Pusat			1.671.793.782	584.363.820	1.087.429.962
Provinsi			1.077.794.376	157.373.814	920.420.562
Pajak Hasil Bumi					
Pajak Bumi dan Bangunan			1.077.794.376	157.373.814	920.420.562
BPHTB			593.999.406		593.999.406
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Atas			75.711.750		75.711.750
Bagian Daerah Dari Migas					
Bagian Daerah Dari Pajak Pusat					
Bagian Daerah Dari Pajak Provinsi			15.999.000		15.999.000
Bagian Daerah Dari Pajak Lainnya					
Insentif Daerah Sektor Migas					
Dana Perimbangan Migas			61.712.750		61.712.750
Bagi Hasil Dari Pajak					
Bagi Hasil Dari Pajak Pusat					
Bagi Hasil Dari Provinsi			326.000		326.000
Dana Perimbangan Lainnya					
Dana Perimbangan Sektor Lainnya					
PPH					
PBB		6.852.759	1.808.612.870		1.808.612.870
Migas			1.808.612.870		1.808.612.870
Minerba Dalam DBH			669.584.000		669.584.000
Minerba Dalam DAU					
Minerba Dalam Otsus					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Etil Alkohol					
Pajak Karbon					
Minerba					
Kehutanan					
Perikanan					
Panas Bumi					
Pajak Daerah					
Pajak Provinsi					
Retribusi Jasa Umum					
Kehutanan		6.852.759			
DAU					
DBHP					
DBHCHT		5.111.109			
Perikanan					
Jumlah Total		6.852.759	3.264.429.746	584.363.820	2.680.065.926

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	PENETAPAN TA 2020	PENYALURAN TA 2020	Penyesuaian ke DBH Penetapan TA 2020 (KMK No. 347/KM.7/2021)	KURANG/(LEBIH) BAYAR DBH TA 2020 yang belum disalurkan	SISA KURANG/(LEBIH) BAYAR DBH TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)-(4)	(6)
PPh 21	5.067.799.585	76.028.978	2.764.067.017	2.227.703.590	382.760.000
PPh	10.470.738.178		3.127.097.720	3.771.797.458	
PPh Pasal 21	7.041.042.189		2.811.041.420	4.229.000.769	
PPh Pasal 25/29	3.001.132.179		251.082.230	2.743.796.689	
PPN	4.231.151.217	76.699.980	990.000.000	3.164.451.237	382.760.000
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.981.343.893	-	366.669.100	1.614.674.793	
Bagian Pemerintah Pusat dari Migas	-	76.028.978	963.540.900	-	382.760.000
Bagian Pemerintah Pusat dari Pertambangan Panas Bumi	-			-	-
Bagian Pemerintah Pusat dari Pertambangan Umum	31.811.000		11.270.000	20.541.000	
Bagian Pemerintah Pusat dari Kehutanan		-			
Bagian Pemerintah Pusat dari Perikanan	16.463.000	-	8.638.800	7.824.200	-
Bagian Pemerintah Pusat dari Pertambangan Minyak Bumi	-	2.741.430	19.733.700	-	2.041.830
Bagian Pemerintah Pusat dari Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat dari Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat dari Pertambangan Umum	750.928	-	457.100	293.828	
Bagian Pemerintah Pusat dari Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat dari Perikanan	97.476.024		306.900	97.169.124	-
PPnBM	1.241.127.484		4.295.086.111	1.054.041.373	
PBB	21.201.493.043	8.227.125	980.902.900	22.212.363.018	170.110.772
Migas	2.738.496.039	-	969.582.500	21.019.913.539	
Minyak Bumi (35%)	22.454.1 – 959	-	554.171.807	21.174.69x.695	-
Minyak Bumi (15%)	687.459.347	-	18.471.201	470.796.147	-
Minyak Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu					-
Gas Bumi (30%)	2.051.300.111		396.972.307	364.515.703	-
Gas Bumi (70%)	4.479.029		1.247.700	4.119.829	
Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu					
Pajak	1.961.961.610	-	243.461.101	1.518.501.101	-
Cukai	-	-	-	-	-
Hasil Tembakau	847.869.853	-	24.249.131	1.143.611.205	-
Pajak Hiburan		8.227.125	4.705.175	-	19.791.751
Pajak Reklame					-
Pajak Penerangan Jalan		8.227.125	1.295.125		12.791.751
Pajak Parkir					
Pajak Air Tanah	173.864.610	-	50.157.225	99.799.485	-
Pajak Sarang Burung Walet					-
BPHTB	1.000.000.910	-	59.101.720	55.789.790	
Cukai Hasil Tembakau	152.175.690	-	616.88x.301	-	457.094.127
PBB Perkebunan	37.847.3 8.025	87.175.00	8.933.701.717	81.179.19 301	859.8 1.445

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pesurocar (dalam rupiah)

URAIAN	Kurang Bayar TA 2021	Lebih Bayar TA 2021	Kurang Bayar TA 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2020)	Penyaluran Lebih Bayar TA 2020 (PMK No. 205/PMK.07/2020)	Sisa Lebih Bayar TA 2020 (PMK No. 205/PMK. 7/2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)
Pajak	-	-	2.[illegible]0.157.[illegible]35-	[illegible].196.973	1.05[illegible].196.[illegible]
PPh	-	-	63[illegible].917.[illegible]	-	63[illegible].917.[illegible]
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 22/23	-	-	631.791.71[illegible]	-	63[illegible].917.[illegible]
PBB			[illegible].[illegible]10.247.[illegible]29	67[illegible].141.079	437.105.250
Cukai Hasil Tembakau					
Dampak Penerimaan Negara					
Kurang Salur Dana Bagi Hasil Non Migas	-	-	-		
Kurang Salur Dana Bagi Hasil Migas	-	-	-	-	-
Kurang Salur Dana Alokasi Umum			740.806.096	67[illegible].141.079	81.743.060
Kurang Salur Dana Alokasi Khusus			302.[illegible]34.[illegible]2		302.[illegible]34.[illegible]2
Kurang Salur Dana Otonomi Khusus Provinsi					
Kurang Salur Dana Keistimewaan Yogyakarta			-		
Kurang Salur Dana Bagi Hasil Non Migas	-	-	-	-	-
Kurang Salur Dana Bagi Hasil Migas	-	-	-	-	-
Kurang Salur Dana Alokasi Umum			[illegible].[illegible]73.[illegible]28-		[illegible].[illegible]73.[illegible]28
Kurang Salur Dana Alokasi Khusus			[illegible].[illegible]07.[illegible]36		[illegible].[illegible]07.[illegible]36
Kurang Salur Dana Otonomi Khusus Provinsi	-	-	-	-	-
DBH	-	-	302.418.794	302.418.794	-
[illegible]	-	[illegible].[illegible]03.[illegible]19	2.[illegible]63.[illegible]12	-	2.[illegible]63.[illegible]12
Migas			42[illegible].[illegible]16		42[illegible].[illegible]16
Minyak Bumi (0,5%)					
Minyak Bumi (0,5%)			-		
Minyak Bumi (Dalam Rangka Otsus)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (0,5%)	-	-	418.4[illegible]6	-	- 0.4[illegible]6
Gas Bumi (0,5%)	-	-	0.[illegible]70	-	0.[illegible]70
Dana Bagi Hasil Kehutanan					-
Mineral					
Pertambangan					
Panas Bumi					
Pajak	-	-	2.[illegible]8.49[illegible]	-	2.[illegible]8.[illegible]0
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-
Pasal 21	-	-	2.[illegible]8.[illegible]06	-	2.[illegible]8.[illegible]0
Pasal 25/29 Badan					
Kehutanan		[illegible].[illegible]03.[illegible]10			
PBB	-	-	-	-	-
BPHTB	-	-	-	-	-
Pajak Lainnya		[illegible].[illegible]03.[illegible]16			-
Perikanan					
Total Dana		[illegible].[illegible]65.[illegible]10	1.[illegible]90.[illegible].[illegible]1[illegible]5	1.[illegible]71.[illegible]70.[illegible]79	[illegible].[illegible]71.[illegible]00.[illegible]16

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pasuruan

(Dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Setelah PA 2021	LB Setelah PA 2021	Dasar Hukum KB PMK Setelah PA 2020 (PMK No. 171/PMK.07/2020)	LB PA 2020 yang Telah Dicairkan	LB PA 2020 yang Belum Dapat Dicairkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	49.506.461.213	-	3.206.121.852	46.299.339.361	
PPh	26.382.922.745	-	7.668.294.250	18.714.628.495	-
PPh Pasal 21	2.356.478.870	-	1.982.103.850	374.375.020	-
PPh Pasal 25/29	1.272.793.017	-	686.267.400	586.525.617	-
PBB	8.993.410.844		901.108.700	8.092.302.144	-
Bea Rba	1.991.000.994		203.643.000	1.787.357.994	
Bagian Daerah Atas	745.911.249		115.311.000	630.600.249	
Bagian Daerah Bawah	1.245.089.745	-	88.332.000	1.156.757.745	
Bagian Daerah Bawah Laut	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	227.021.395	-	42.343.350	184.678.045	-
Dana Bagi Hasil Perkebunan	29.700.383		10.799.700	18.900.683	
Dana Bagi Hasil Sektor Lainnya	11.000.000		8.992.000	2.008.000	
Biaya Pemungutan PBB	10.000.000		10.000.000	-	
Biaya Pemungutan BPHTB	4.696.249	-	1.000.000	3.696.249	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Dana Penerimaan Pertambangan	10.181.302		1.000.000	9.181.302	
Dana Penerimaan Perikanan	11.109.221		3.000.000	8.109.221	
Biaya Pemungutan Pajak Penerangan	2.496.124	-	250.000	2.246.124	
CHT	32.255.816.457	-	16.553.262.031	15.702.554.426	-
DBH	63.069.588.702	-	1.201.499.400	59.868.089.302	37.000.000
Migas	21.027.845.218		582.321.000	20.445.524.218	
Minerba	20.050.111.819		547.200.000	19.502.911.819	
Minyak Bumi 15%	960.846.511		18.470.400	942.376.111	
Minyak Bumi Dalam Rangka PPh Pasal 22	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	373.870.262	-	8.673.000	365.197.262	-
Gas Bumi 70%	4.693.705	-	150.000	4.543.705	-
Gas Bumi Dalam Rangka PPh Pasal 22	-		-	-	
Panas Bumi	1.640.121.318		27.036.000	1.613.085.318	
Sementara	2.820.961			2.820.961	
Royalti	1.637.300.357		27.036.000	1.610.264.357	
Pajak Tanah	78.740.045	-	5.600.000	73.140.045	-
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan	78.740.045		5.600.000	73.140.045	
Sektor Migas Pertambangan					
Pajak Rokok	120.772.906		71.016.000	49.756.906	
DR	-	-	-		
DR PP	-	-	-	-	-
PR DR	120.772.906		71.016.000	49.756.906	
Kekurangan	1.040.000.000		1.040.000.000		1.040.000.000
Jumlah	49.110.000.000		49.110.000.000	49.110.000.000	1.077.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Penerimaan

(Dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 Setelah Penyesuaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			4.760.969.554	(1.484.352.638)	3.276.616.916
PBB			1.340.750.634	543.286.945	1.884.037.579
PBB Sektor P3		-	215.548.657	215.548.657	
PBB Sektor P5/P4	-	-	1.125.201.977	327.738.288	1.452.940.265
BPHTB	-	-	3.420.218.920	(1.028.039.583)	2.392.179.337
Pajak	-				
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas			1.276.920	-	1.276.920
Bagian Daerah Pasal 21			-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan		-	3.046.941.953	1.478.956.973	1.567.984.980
Bagian Daerah Pertambangan		-			
Bagian Daerah Pertambangan Batubara					
Bagian Daerah Non Migas				-	-
Bagian Pemerintah Pusat		-	58.727	18.927	39.800
Bagian Pemerintah Pusat Migas		-	830.207	830.207	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas		-	130.290.240	97.977.297	32.312.943
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Batubara				-	-
PPh 21				-	-
PPN		17.022.571	1.370.071.441		1.370.071.441
Migas		-	1.367.420.516		1.367.420.516
Migas Bagian 15%		-	1.129.977.600		1.129.977.600
Migas Bagian 6,5%			237.442.916		237.442.916
Migas Hasil Olah Bagian Daerah				-	-
Gas Bumi PPN			417.445	-	417.445
Gas Bumi 0,5%		-	6.851		6.851
Gas Bumi dalam Negeri Others		-			
Minerba		-			
Iuran Tetap					
Royalti					
Iuran Eksploitasi			2.650.925	-	2.650.925
Iuran Eksplorasi				-	-
Iuran Tetap	-	-	2.650.925		2.650.925
Penerimaan Dari Pemerintah					
PPh 21		17.022.571			
PPN			-	-	-
Others		-	-	-	-
Total	-	17.022.571			
Tambahan					
Grand Total		17.022.571	6.130.891.895	(1.484.352.638)	4.646.539.257

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Ponorogo (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA s.d. TA 2020	LB TA s.d. TA 2020	Penyelesaian LB DBH Sampai dengan TA 2020 (KMK No. [illegible]/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	7.640.072.508	7.120.400	6.563.4[illegible]	31.118.738.208	73.733.891
PPh	7.426.197.211		3.329.425.500	4.197.721.711	
PPh Pasal 21	6.777.242.808		3.270.172.300	3.273.070.508	
PPh Pasal 25/29	1.248.[illegible].402		342.[illegible]	913.071.[illegible]	
PBB	6.6[illegible].963	7.120.400	1.099.7[illegible].302	5.032.956.871	71.788.991
Bagi Rata	1.991.[illegible].953	-	356.630.702	1.726.[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	45.772.313	-	90.5[illegible].202	-	60.039.[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	-	1.790.800	1.312.100		3.652.700
Bagian Daerah Panas Bumi		5.129.400	470.100		6.196.800
Bagian Daerah Perhutanan	5.132.991.217		905.1[illegible].800	4.227.[illegible]	
Bagian Daerah Perkebunan	11.597.017		5.191.400	6.506.[illegible]	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	19.939.02[illegible]	-	8.304.300	326.694.[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	5.441.676	-	3.602.100	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas		60.800	45.000		106.100
Biaya Pemungutan Panas Bumi		159.200	29.900		215.100
Biaya Pemungutan Perhutanan	317.861.252	-	37.[illegible].100	276.143.600	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	563.716	-	135.100	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.476.074		292.900	7.183.[illegible]	-
CHT	2.143.477.714		1.5[illegible].891	621.[illegible]	
SDA	23.836.773.072	327.816.076	1.096.[illegible]	22.941.[illegible].237	416.252.211
Migas	21.[illegible].035		682.[illegible]	21.045.[illegible]	
Minyak Bumi 15%	20.[illegible].939	-	654.[illegible]	20.[illegible].599	-
Minyak Bumi 0,5%	688.910.547	-	18.472.400	670.[illegible].147	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	272.[illegible]		9.072.[illegible]	2[illegible].062	
Gas Bumi 0,5%	[illegible]		159.400	[illegible]	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	1.[illegible].675	-	24.[illegible]	1.5[illegible]	-
Landrent	1.326.850	-	-	[illegible]	-
Royalti	547.[illegible].735	-	24.[illegible].075	1.[illegible].550	-
Panas Bumi		327.876.076	32.692.150		238.568.203
Iuran Produksi					
Iuran Tetap		327.876.076	32.[illegible].100		2[illegible]
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	
Kehutanan	362.7[illegible].34	-	3.[illegible]	[illegible]	-
DR	-				-
IIUPH					
PSDH	362.7[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Perikanan	152.[illegible].520	-	216.[illegible]	-	177.694.[illegible]
Grand Total	41.4[illegible].950	335.[illegible]	7.[illegible].374	34.[illegible].357	416.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Probolinggo

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	-	-		
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]					
[illegible]	-	-			
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	-	-	-		
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]					
[illegible]			-		
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	-	-	[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]					
[illegible]		[illegible]			
[illegible]	-	-	-		
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]		[illegible]	[illegible]		-
[illegible]					
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kurs : Dolar Singapura

Dalam Rupiah

Uraian	Kurang/(Lebih) Bayar DBH Berdasarkan PMK No. 226/PMK.07/2021	Penyesuaian Kurang/(Lebih) Bayar DBH Tahun 2020	Kurang/(Lebih) Bayar DBH Tahun 2020 yang Belum Disalurkan	Kurang/(Lebih) Bayar DBH Tahun 2020 yang Telah Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Migas	9.710.374.838		7.250.777.938	959.596.900
PPh	3.021.042.000		3.021.042.000	
PPh Pasal 21	2.313.109.800		2.313.109.800	
PPh Pasal 25/29	707.932.200		707.932.200	
PBB	2.765.816.838		1.479.826.838	959.596.900
Cukai	1.914.970.197		1.914.970.197	-
Pajak Daerah Migas	918.785.701		-	918.785.701
Pajak Daerah Non Migas				
Pajak Daerah Perseorangan				
Pajak Daerah Perkebunan	1.230.822.300		1.230.822.300	-
Pajak Daerah Pertambangan	5.385.900		5.385.900	-
Pajak Daerah Kehutanan	8.604.300		8.604.300	-
Biaya Pemungutan Migas	15.717.900		15.717.900	-
Biaya Pemungutan Non Migas				
Biaya Pengawasan Pusat				
Biaya Pengurusan Hak Pengusahaan	15.804.060		15.804.060	-
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan	5.384.700		5.384.700	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	205.200		205.200	-
DBH	4.997.869.930		4.997.869.930	-
SDA	1.017.706.350	4.117.120	1.013.589.230	-
Kayu	90.918.900		90.918.900	-
Minyak Bumi	884.311.300		884.311.300	-
Minyak Bumi (Migas)	18.476.150		18.476.150	-
Minyak Bumi dari Tanah Objek Pajak				
Gas Bumi (PDN)	9.072.250		9.072.250	-
Gas Bumi (DMO)	1.158.100		1.158.100	-
Gas Bumi dalam Rangka Migas				
Kehutanan	24.149.150		24.149.150	-
Perikanan	-		-	-
Pertambangan	24.049.150		24.049.150	-
Pertambangan Umum	4.205.823	4.117.120		88.703
Pertambangan Migas				
Pertambangan Panas Bumi	1.291.329			1.291.329
Pertambangan Batubara	18.552.000	4.117.120	14.434.880	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Lainnya	18.552.000	4.117.120	14.434.880	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Tetap	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Produksi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksploitasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksploitasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksploitasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksploitasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksploitasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi	-		-	-
Pertambangan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Batubara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi Lainnya

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Lampiran

(dalam Rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TAHUN 2020	LEBIH BAYAR TAHUN 2020	KURANG BAYAR TAHUN 2021 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	LEBIH BAYAR TAHUN 2021 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	KURANG BAYAR TAHUN 2021 (PMK No. 81/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	-	-	346.268.413	1.913.191.430	2.259.459.843
PPh	-	-	715.506.807	2.076.976.830	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 22 Impor	-	-	715.506.807	2.076.976.830	-
PPN			3.675.505.174	1.171.736.174	2.337.632.786
PBB Pusat					-
Bagian Pemerintah Pusat			3.675.505.174	1.171.736.174	2.337.632.786
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	-	-	36.731.073	36.731.073	-
Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai					-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	
Jasa Pengelolaan Aset Idle			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan			1.638.733	1.638.733	-
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan			-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan	-	-	-	-	
Cukai			913.744.449	3.616.449	-
Pajak		8.053.510	1.952.010	391.960	-
Pajak			475.310	495.316	-
Minyak Bumi (PPh)					
Minyak Bumi (PPN)					
Minyak Bumi Hasil Sampel Offstream	-	-	-		
Gas Bumi (PPh)	-	-	6.496	919.465	
Gas Bumi (PPN)	-	-	6.850	5.580	-
Gas Bumi dalam Negeri Offstream			-	-	-
Mineral					-
Perikanan					
Pajak					
Pajak Bumi	-	-	987.670	90.570	
Bunga Eksploitasi	-	-	-	-	
Panas bumi	-	-	867.670	867.670	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak					-
Kehutanan		8.245.514			
PSDH	-	-			
DR	-	-	-	-	-
SDAKSA		8.245.514	-	-	-
Pertambangan					
Jumlah	-	8.245.514	3.982.081.139	1.847.107.432	2.337.632.786

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gambang

(Rupiah)

Uraian	Alokasi DBH TA 2020	Alokasi DBH TA 2020	Penyaluran DBH Sebelum Penundaan TA 2020 (PMK-71/PMK.07/2021)	Alokasi DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan	Kurang Bayar yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)
Pajak	1.078.470.012	-	2.784.665.203	6.791.779.029	-
Cukai	5.363.965.824	-	3.560.000.000	1.803.965.824	-
PPh Pasal 21	8.267.431.107		3.045.714.430	2.221.716.677	-
PPh Pasal 25/29	550.457.625		2.000.000.000	691.058.012	-
PBB	2.675.873.107		5.127.651.850	2.021.713.445	-
Bea Balik Nama	1.291.000.000		291.999.700	726.270.000	-
Pajak Daerah Lainnya	1.291.000.000		345.729.530	72.000.000	
Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-		
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-			
Dana Alokasi Umum	3.410.500		12.700.000	2.000.000	-
Dana Alokasi Khusus				-	-
Dana Otonomi Khusus	2.000.000.000		6.000.000	106.000.000	-
Dana Keistimewaan DIY	1.000.000.000	-	2.000.000	2.000.000	
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	-	-			
Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat					-
Dana Tambahan Infrastruktur	747.000		961.000	205.000	-
Dana Alokasi Khusus Nonfisik		-	-	-	
Dana Insentif Daerah	1.100.000		915.000	2.197.224	
Total	2.755.653.018		1.000.000.000	2.000.000.000	
DBH	49.773.460.000	3.427.125	960.000.000	25.000.000.000	200.000.000
Migas	21.497.000.000		750.000.000	2.000.000.000	-
Migas Pasal 22	20.000.000.000		500.000.000	20.000.000.000	-
Migas Pasal 25/29	990.000.000	-	1.000.000	1.000.000.000	
Migas Pasal 26	-	-	-		
Gas Bumi	975.000.000	-	1.000.000	200.000.000	
Gas Bumi Pasal 22	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
Gas Bumi Pasal 25/29	-				-
Pertambangan Umum	1.000.000.000		20.000.000	500.000.000	-
Migas Pasal 26			-	-	-
Panas Bumi	1.000.000.000	-	20.000.000	1.000.000.000	
Pajak Daerah	-	3.427.125	4.000.000		12.000.000
Pajak Hotel	-				
Pajak Restoran		3.427.125	1.000.000		12.000.000
Pajak Hiburan				-	-
Pajak Penerangan Jalan	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	
Pajak Reklame	30.000.000		30.000.000	30.000.000	
Pajak Parkir	-				
Pajak Air Tanah	1.000.000		1.000.000	1.000.000	-
PBB-P2	1.000.000		1.000.000	1.000.000	-
BPHTB	998.000.000		30.000.000	1.000.000	-
Pajak Lainnya	100.000.000		100.000.000	-	57.000.000
Jumlah Total	2.000.000.000	3.427.125	1.000.000.000	3.000.000.000	70.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sidoarjo

(dalam rupiah)

Uraian	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=(5)-(3))
Pajak	-	-	-	-	
Cukai	-	-			
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 23/26					
PBB					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pasal 21	-	-			
Bagian Daerah PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi					
Bagian Daerah PPh Pasal 25/29 Badan					
Bagian Daerah Pasal 26 (Dividen)					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat PPh Pasal 21					
Bagian Pemerintah Perseorangan					
Bagian Pemerintah Perbadan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	
CHT	-	-			
SDA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Pusat 15%					
Bagian Pusat 0,5%	-	-	-	-	
Bagian Pusat Setara Penghasil Migas	-	-	-	-	
Gas Bumi 70%	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat					
Panas Bumi					
Landrent			-	-	-
Jasa Air		-	-	-	-
Bagian Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Provinsi					
Kabupaten/Kota					
Kehutanan		[illegible]	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DR					
Bagian Pemerintah		[illegible]			
Perikanan				-	-
Jumlah Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sidoarjo

(Rupiah)

Jenis DBH	PR Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran ke RKUD Provinsi TA 2021 KMK No. 97/KM.7/2021	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	302.200.151.728		65.453.389.272	0.007.178.678	-
PPh	212.969.151.139		14.136.071.000	0.210.[illegible]	
PPh Pasal 21	36.291.504.578		13.925.208.100	17.022.021.079	
PPh Pasal 25/29	7.367.304.472		1.289.969.902	2.327.999.373	
PBB	8.567.273.179	-	3.520.542.900	7.145.111.267	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	160.839.069.911	-	935.681.701	1.736.192.368	
Bagian Daerah Hasil Migas	103.348.357	-	3.414.227.199	199.119.937	-
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan					
Bagian Daerah Hasil Pertambangan	-	-	-	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara	213.799.027	-	8.601.369	436.901.927	-
Bagian Perimbangan dari Provinsi	98.297.770		11.242.101	0.243.110	-
Bagian Perimbangan dari Pemerintah Daerah Lainnya					
Bagian Perimbangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	-				
Bagian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	
Bagian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			-	-	-
Bagian Dana Penyesuaian Sektor Lainnya	7.416.021		278.920	7.187.024	-
DBH	1.990.016.733		1.0[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DBH	37.218.988.724	6.421.121	501.[illegible].[illegible]	20.0[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]
Migas	28.823.437.685	-	586.269.620	10.307.145.160	
Pokok Bagi Hasil (PBH)	05.653.420.709	-	8.12[illegible].420	20.[illegible].[illegible]	-
Pokok Bagi Hasil (PBH)	684.310.477		17.777.720	[illegible].[illegible]	-
Migas Bagi Hasil dalam Daerah Otonom					
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.077.017.132		1.[illegible].720	4.[illegible].[illegible]	
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.111.[illegible]		203.720	70.[illegible].077	
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	-		
Migas	1.667.[illegible].[illegible]	-	9.043.[illegible]	64.[illegible].[illegible]	
Lainnya		-	-	-	-
Pajak	1.667.[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	643.[illegible].[illegible]	-
Pajak Daerah		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Pajak Daerah					
Pajak Penghasilan	-	[illegible].[illegible]	4.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-		
Kehutanan	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
PBB					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29	28.[illegible].[illegible]	-	37.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Pertambangan	30.[illegible].[illegible]	-	3.[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Jumlah Total	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Situbondo

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2018	Kurang Bayar TA 2019	Alokasi TA 2019 (PMK No. 223/PMK.07/2020)	Penyaluran s.d. TA 2019 (PMK No. 226/PMK.07/2020)	Sisa Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 226/PMK.07/2020)
a	b	c	d=1	e=2	f=d-e
Pajak			1.507.760.545	1.461.263.845	46.496.700
PPh	-	-	1.209.646.698	1.041.306.935	168.339.935
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	1.209.646.698	1.041.306.935	168.339.935
PBB			1.718.220.562	1.607.127.662	111.092.900
Cukai Hasil Tembakau					
Pungutan Ekspor Kelapa Sawit					
Bagian Pemerintah Pusat atas Pajak	-	-			
Bagian Pemerintah Daerah atas PPh	-	-	946.700	336.700	610.000
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi	-	-	1.259.224.213	1.388.134.413	870.489.800
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Gas Bumi			297.153.000	170.075.000	
Bagian Daerah atas Iuran Eksploitasi dan Iuran Tetap					
Bagian Pemerintah Pusat atas PBB					
Bagian Pemerintah Pusat atas PBB P5L	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat atas BPHTB	-	-	14.200	14.200	-
Bagian Pemerintah atas Pertambangan Minyak Bumi			51.378.900	14.214.500	30.664.300
Bagian Pemerintah atas Pertambangan Gas Bumi			9.201.700	9.201.700	
Bagian Pemerintah atas Pertambangan Panas Bumi			-	-	
PPN	-	-	39.887.161	109.899.381	-
BHCT	-	2.864.317	2.324.035.100	-	2.324.035.100
Kehutanan			2.[illegible]		2.[illegible]
Penerimaan Dana 15%			2.016.102.151		2.016.102.151
Penerimaan Dana 80%			256.202.127		256.202.127
Penerimaan Reboisasi dari Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil 15%	-	-	416.469	-	416.469
Dana Bagi Hasil 80%	-	-	6.932	-	6.932
Dana Bagi Hasil dari Kegiatan Usaha Migas	-	-	-	-	-
Panas Bumi					
Landbased					
Offshore					
Dana Bagi Hasi	-		976.132	-	976.132
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	975.132	-	975.132
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam					
Dana Alokasi Umum		2.864.317			
DAU	-	-	-	-	
DAU-I	-	-	-	-	-
DAU-A		2.864.317			
Dana Alokasi Khusus					
Dana Otsus		2.864.317	4.[illegible]	1.[illegible]	3.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sinabendo

(satuan rupiah)

Uraian	KB TA 2021	LB TA 2020	Realisasi TA 2021 Sesuai PMK No. 81/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang belum Dibayarkan	LB TA 2020 yang belum Dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	11.200.823.052		6.611.973.107	7.077.196.591	34.070.202
PPh	6.874.172.052		3.153.139.305	3.732.728.583	
PPh Pasal 21	3.014.122.152		2.931.000.702	2.914.129.704	
PPh Pasal 25/29	3.216.211.920		911.111.303	717.207.420	
PPN	4.126.774.360	-	1.155.171.300	3.020.514.210	34.070.202
Bagi Hasil	101.050.618	-	146.681.990	179.170.208	-
Bagian Daerah Atas Migas	82.174.050	-	72.147.295	-	51.713.241
Dampak Daerah dari Migas					
Dampak Daerah Hutan Dana					
Bagian Daerah Pertambangan	96.876.218		506.287.100	146.360.076	
Bagian Daerah Perikanan	727.229.065		97.453.200	674.706.053	
Bagian Daerah Kehutanan	2.179.000.027	-	7.601.300	108.206.727	-
Dana Perimbangan Migas	9.073.110		1.202.201	-	1.206.481
Dampak Pengurangan Non Migas					
Bagian Pertanian dan Panas Bumi					
Bagian Pertanian dan Perkebunan	41.916.418	-	21.209.270	15.149.262	
Dana Perimbangan Pertanian	11.270.708	-	3.962.300	37.942.708	-
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	7.496.024		202.400	7.167.024	-
PPh	3.203.916.102		1.301.101.951	905.252.076	
PPN	21.960.000.041	5.515.529	2.101.215.230	22.107.215.041	107.322.176
Migas	21.107.605.736	-	1.901.511.630	21.145.360.136	
Migas Pasal 15%	20.960.714.010	-	1.852.715.030	20.104.991.459	-
Minyak Bumi (Lain)	456.000.917		97.771.400	670.979.117	-
Minyak Bumi dalam Negeri Umum					-
Gas Bumi 70%	27.000.212		9.000.000	205.000.000	
Gas Bumi 30%	4.000.000		1.000.000	1.000.000	
Gas Bumi dalam Negeri Umum	-	-			
Panas Bumi	1.497.690.736	-	24.068.170	(6.000.000)	
Pasal 21	-	-	-	-	-
Pasal 4	1.667.080.835		2.700.000	1.143.000.000	-
Pajak Lainnya		5.515.529	1.710.000		3.978.178
Pajak Hotel					
Pajak Restoran		5.515.529	1.710.000		12.000.000
Pajak Hiburan	-	-	-	-	
Pajak Reklame	18.000.000		29.051.800	12.700.415	-
Air Tanah					-
Sarang Burung					
PBB P2	58.000.000	-	29.051.800	12.700.415	
Cukai Hasil	150.000.000	-	3.781.000	-	37.000.000
Grand Total	37.758.018.191	5.515.529	7.902.058.004	30.249.173.415	228.570.180

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumenep

(Rupiah)

Uraian DBH	Realisasi	Alokasi	Alokasi TA 2019 (PMK No. 57/PMK.07/2021)	Penyesuaian Alokasi TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Total Alokasi (PMK No. 57/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
PPh	-	-	1.649.520.447	313.719.[illegible]	1.963.[illegible]
PPh	-	-	173.8[illegible]		173.[illegible]
PPh Pasal 21	-	-	69.[illegible]		69.[illegible]
PPh Pasal 25/29	-	-	104.[illegible]		104.[illegible]
PBB	-	-	1.475.[illegible]	313.[illegible]	1.789.[illegible]
Cukai Hasil Tembakau					
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau			-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Paling Sedikit	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-	-	1.[illegible]	[illegible]	1.[illegible]
Bagian Daerah Bukan Penghasil			-	-	-
Dana Alokasi Dana Bagi Hasil			-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	-	-	[illegible]		[illegible]
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Puskesmas					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Puskesmas Keliling					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Bidan di Desa					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Rujukan					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Tertinggal					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Perbatasan					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Kepulauan					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Ketahanan Pangan					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Pariwisata					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Pariwisata Prioritas					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Pariwisata Prioritas Super Prioritas					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Pariwisata Prioritas Super Prioritas Danau Toba					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Pariwisata Prioritas Super Prioritas Mandalika					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Pariwisata Prioritas Super Prioritas Borobudur					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Pariwisata Prioritas Super Prioritas Labuan Bajo					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Pariwisata Prioritas Super Prioritas Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Pariwisata Prioritas Prioritas					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Pariwisata Prioritas Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Prioritas					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya					
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Non Rujukan Daerah Lainnya

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2022

Kab. Sumenep

(Dalam Rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	10.868.078.102		1.784.541.047	9.083.536.055	-
PPh	6.470.153.250		1.969.901.720	8.440.054.970	
PPh Pasal 21	5.441.765.741	-	1.784.641.648	7.226.823.714	
PPh Pasal 25/29	1.028.487.845	-	243.520.750	1.272.008.595	
PPN	8.398.118.637	-	1.384.716.739	1.112.097.247	
Bagi Rata	1.911.059.998		293.000.000	1.204.059.998	
Bagian Daerah Migas	2.784.018.607		1.090.018.000	1.100.098.707	-
Bagian Lebih Bagi Hasil Migas				-	-
Bagian Lebih Bagi Hasil Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	88.445.611	-	253.034.000	831.570.702	
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-				
Bagian Daerah Bukan Penghasil	815.000.007		202.000	203.091.707	-
Dana Penyeimbang Migas	87.017.211		76.870.000	61.746.511	-
Dana Penyeimbang PPh Migas			-	-	
Bagian Penyeimbang Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Penyeimbang Pajak Daerah	36.000.787		1.711.000	23.078.088	
Bagian Penyeimbang Pajak Lainnya					-
Dana Penyeimbang Sektor Lainnya	11.120.021		288.000	7.197.724	-
Cukai	3.078.511.105	-	311.745.647	2.766.766.458	
SDA	15.815.515.517	6.497.125	917.724.300	24.536.710.342	1.714.110.700
Migas	13.930.453.203		787.001.700	22.611.009.923	
Minyak Bumi PSC	9.017.702.201		414.677.000	20.250.120.205	-
Minyak Bumi 0,5%	68.139.477		10.131.000	104.099.477	-
Minyak Bumi Dalam Kawasan Otsus			-	-	-
Gas Bumi 70%	4.844.207.705		362.193.700	2.256.410.241	-
Gas Bumi 0,5%	7.115.211	-	528.700	53.870.017	
Gas Bumi Dalam Kawasan Otsus	-				
Mineral	1.867.049.975		27.094.130	1.810.612.419	
Tambang					-
Kayu	1.867.049.975		27.094.130	1.810.612.419	-
Pajak Lainnya		6.497.125	2.746.625	-	2.772.550
Pajak Kendaraan			-	-	-
Pajak Rokok	-	6.497.125	2.746.625		12.722.750
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-				
Kehutanan	120.037.817		65.127.025	11.920.201	-
DR			-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DBHT	16.037.733		65.127.025	41.820.201	-
Perikanan	50.780.762		3.134.813.000		20.299.020
Jumlah Total	42.001.175.354	6.497.125	9.134.286.047	76.329.250.764	1.714.110.700

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Trenggalek

(dalam rupiah)

Uraian	KB TA 2020	LB TA 2019	KB TA 2021 berdasarkan SP2HKP Tahun 2021	Penyelesaian KB TA 2019 berdasarkan SP2HKP Tahun 2021	Sisa KB TA 2021 setelah penyelesaian KB TA 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
PPh	-	-	2.079.651.187	1.407.840.801	1.671.810.386
PBB	-	-	1.551.726.674	681.077.791	870.648.883
PPh Pasal 21	-	-	344.447.611	344.447.611	-
PPh Pasal 25/29	-	-	1.207.279.063	416.630.180	870.648.883
BHT			320.731.613	240.849.141	100.000.472
Dana Reboisasi					
Provisi Sumber Daya Hutan					
Bagian Pemerintah Pusat (PSDH)	-	-	21.691.200		21.691.200
Bagian Pemerintah Pusat - Reboisasi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Provinsi	-	-	848.283.961	977.981.661	870.682.300
Bagian Penerimaan Kabupaten			42.905.179		42.905.179
Bagian Penerimaan Desa/Kelurahan					
Bagian Pemerintah Pusat (PSDH)					
Bagian Pemerintah Pusat (PSDH)	-	-	1.216.128	1.350.914	750.362
Bagian Pemerintah Provinsi - Reboisasi	-	-	-	-	-
Bagian Penerimaan Kabupaten			32.121.024	31.709.762	10.802.430
Bagian Penerimaan Desa/Kelurahan			1.934.720		1.934.720
Bagian Pemerintah Pusat (PSDH)	-	-	-	-	-
(PSDH)	-	-	-	-	-
DBH	-	11.292.772	1.407.498.363	-	1.407.498.363
Migas			1.175.067.750		1.175.067.750
Migas Bagian 15%			1.139.317.116		1.139.317.116
Migas Bagian 0,5%			35.750.634		35.750.634
Migas Bagian Daerah Penghasil (Blok)	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	6.456	-	6.456
Cukai Hasil Tembakau	-	-	6.850	-	6.850
Cukai Hasil Tembakau Kurang Salur			-	-	-
Minerba			225.317.128		225.317.128
Opsen			225.317.128		225.317.128
Pajak					
Pajak Rokok	-		86.646	-	86.646
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	167.476		167.476
Pajak Rokok Bagian Pemerintah					
Kehutanan		1.282.772			
DR		-	-		
DJPB		-	-	-	-
PSDH		11.292.772			-
Pertambangan					
Dana Bagi		11.292.772	5.751.790.156	2.384.670.956	3.367.119.200

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Trenggalek

(Rupiah)

Jenis DBH	Realisasi TA 2020	DBHCHT TA 2020	Nomenklatur Realisasi TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	PB TA 2021 yang Telah Disalurkan	Sisa TA 2021 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	62.151.221.705		52.130.792.611	72.760.010.857	5.000.569
PPh	6.267.708.525		3.859.386.939	3.760.000.121	
PPh Pasal 21	5.592.691.863	-	3.516.929.497	3.771.021.039	
PPh Pasal 25/29	668.660.336	-	259.514.641	178.305.764	
PBB	44.780.303.501	-	37.077.749.402	53.210.536.418	5.000.569
BPHTB	11.101.109.099	-	11.193.656.270	15.774.796.701	-
Pajak Daerah Lainnya	102.109.618		79.785.161	-	569.432
Pajak Rokok Dari Cukai	3.193.793		1.051.262	1.512.396	
Pajak Rokok Dari Bea Balik Nama	-				
Pajak Rokok Dari Opsen	1.788.971.487	-	669.102.302	1.136.208.767	
Pajak Rokok Dari Lainnya	83.618.486	-	4.525.561	34.559.369	
Pajak Rokok Dari Cukai Lainnya	215.790.007		6.601.201	920.104.957	-
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.010.013		1.871.103		971.581
Bagi Hasil Cukai dari Bea Cukai	110.942		98.202	12.740	
Bagi Hasil Cukai dari Bea Balik Nama	-	-			
Bagi Hasil Cukai dari Opsen	92.992.537	-	24.551.560	5.723.061	-
Bagi Hasil Cukai dari Lainnya	3.010.529		68.307	1.107.555	-
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	7.169.021		208.803	7.116.227	-
SDA	150.139.970	-	3.032.618.734	621.772.036	
DAU	3.654.597.000	6.497.195	3.036.861.913	2.276.361.217	377.133.170
Migas	21.027.861.239	-	850.851.650	2.125.363.710	-
Minyak Bumi 15%	20.000.714.000		574.970.000	20.784.305.650	-
Minyak Bumi 0,5%	986.609.147		15.777.760	670.970.117	-
Minyak Bumi dari Penerimaan Tertentu					
Gas Bumi 30%	340.930.262		99.103.890	200.088.943	
Gas Bumi 0,5%	4.606.826	-	165.000	54.000.000	
Gas Bumi dari Penerimaan Tertentu	-	-	-	-	
Panas Bumi	1.067.069.978	-	94.049.150	849.969.978	-
Cukai			-	-	-
Pajak	1.000.000.000		61.000.000	1.000.000.000	-
Bagi Hasi			4.000.000		377.133.170
Bagi Hasil Cukai	-		-		
Bea Hasil Migas	-	6.497.195	4.000.000	-	377.133.170
Bagian Daerah Penerimaan	-	-	-	-	
Kehutanan	139.591.278		93.000.000	83.377.779	-
PT	-	-			
IUPH	-	-			
PSDH	139.591.278	-	93.000.000	83.377.779	
Perikanan	1.481.961		2.000.000	-	132.000.000
Grand Total	86.079.128.201	6.497.195	6.000.000.000	80.000.000.000	132.000.000

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Tabel (Dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KEP-[illegible]/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KEP-[illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
PPh			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			-	-	-
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			-	-	-
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]			[illegible]	-	[illegible]
[illegible]			-		-
CHT	-		-		-
SDA	-	[illegible]	-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]	-		-		-
[illegible]	-		-		-
[illegible]	-		-	-	-
[illegible]	-		-	-	-
[illegible]			-		-
[illegible]			-		-
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-		-	-	-
[illegible]			-	-	-
[illegible]		[illegible]			
[illegible]			-	-	-
[illegible]		[illegible]	-	-	-
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tuban

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KP Definitif TA 2020	LO Definitif TA 2020	Penyaluran DB DBH Semester I TA 2020 (PMK No. 139/PMK.07/2020)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LO TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10=(7)-(9))	(11)
Pajak	88.171.378.053	-	2.860.824.653	85.350.553.402	-
PPh	8.590.168.884		5.700.575.502	2.907.413.381	
PPh Pasal 21	7.569.134.252		4.474.661.648	3.094.472.604	
PPh Pasal 25/29	1.021.050.632		1.225.913.854	-204.863.222	-
PBB	27.731.459.640		9.212.916.200	18.518.543.440	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	301.969.918	-	265.699.720	36.270.198	-
Cukai Hasil Tembakau	7.815.693.614	-	1.857.074.600	5.958.619.014	
Pajak Rokok	10.301.147.110		2.080.887.900	8.220.259.210	
Pajak Daerah Lainnya					-
Pajak Daerah Retribusi	6.216.781.173		1.632.053.200	4.584.728.073	-
Pajak Daerah Pendapatan	-	-	-	-	
Pajak Daerah Sektor Lainnya	215.506.207		8.604.500	206.901.707	
Pajak Penerangan Jalan	270.135.210		67.567.600	202.567.610	-
Pajak Sarang Burung Walet	557.572.773		70.812.720	486.760.053	-
Pajak Pengambilan Bahan Galian	-	-	-	-	
Pajak Pengangkatan Pendapatan	230.641.616		76.380.600	154.261.016	
Pajak Penerangan Perkotaan					-
Pajak Penerangan Bukan Perkotaan	7.486.034		250.000	7.236.034	-
CHT	3.635.700.531	-	668.103.553	2.967.596.978	
SDA	24.510.975.041	8.427.125	1.277.202.050	23.233.772.991	170.419.770
Migas	23.140.062.171		608.500.800	21.531.561.371	
Minyak Bumi 15%	21.207.709.901		681.708.500	20.525.971.201	-
Minyak Bumi 0,5%	706.935.752		22.340.400	684.595.352	-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 69%	226.628.668	-	6.646.300	219.678.768	
Gas Bumi 0,5%	3.787.925	-	101.300	3.686.625	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	1.030.297.130		21.045.150	1.011.289.030	-
Iuran Tetap	170.625.285		-	170.625.285	-
Royalti	1.867.690.853	-	54.048.450	645.642.425	-
Panas Bumi	-	8.427.125	2.333.625	-	10.760.750
Iuran Produksi		-	-		
Iuran Tetap		8.427.125	2.333.625		10.760.750
Sumber Daya Kelautan Perikanan	-				-
Kehutanan	345.- 3.369	-	2.360.975	149.817.394	-
DR		-	-	-	
IHPH					
PSDH	366.413.369		216.301.975	149.817.394	-
Perikanan	59.136.960		216.981.000	-	157.844.040
Grand Total	89.697.502.695	8.427.125	14.416.217.703	75.066.273.637	170.419.770

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tulungagung

(dalam rupiah)

JENIS DBH	SISA 2018	SISA 2019	LS s.d TA 2019 (KMK No. 265/KMK.07/2019)	Penyelesaian LS s.d TA 2018 (KMK No. 8/KM.7/2021)	Sisa LS s.d TA 2019 (KMK No. 8/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4) (5)
Pajak	-	-	3.036.024.181	1.181.122.061	2.736.792.117
PPh			2.490.778.181	1.181.122.061	1.309.656.117
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29	-		2.490.778.181	1.181.122.064	309.656.117
PBB	-	-	1.546.176.000	-	1.546.176.000
BPHTB	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau					-
Pajak Rokok	-			-	-
Pajak Penerangan Jalan	-		1.484.369.820	-	1.484.369.820
Pajak Air Permukaan		-	-		-
Pajak Alat Berat					-
Pajak Hiburan					-
Pajak Penerangan Jalan Non Migas	-	-	-	-	-
Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan		-	-		-
Pajak Pengambilan Air Permukaan			97.819.820		61.647.703
Pajak Pengambilan Air Tanah					-
Pajak Penerangan Jalan Sektor Perkotaan	-		-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
BLA		10.117.665	142.703		162.720
Migas					-
Minyak Bumi 85%	-			-	-
Minyak Bumi 0,5%	-		-	-	-
Migas Bagian Pemerintah Daerah dari Kontraktor	-	-	-	-	-
Gas Bumi 42%		-	-		-
Gas Bumi 0,5%		-			-
Gas Bumi dari Kontraktor					-
Minerba	-		192.720	-	30.703
Panas Bumi	-		162.720	-	130.000
Royalti	-	-	-	-	-
Pajak Bumi		-	-		-
Bunga Produksi		-			-
Bunga Lain					-
Setoran Pajak Penghasilan Final	-		-	-	-
Kehutanan	-	10.117.665	-	-	-
DR		-			-
BLHT					-
PNBP	-	10.117.665	-	-	-
Perikanan	-		-	-	
Grand Total	-	10.117.665	3.037.706.681	1.181.122.064	2.736.954.837

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tuhanpagang (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LP Definitif TA 2020	Penyaluran TA 2021 Sesudah PMK 7/2021	DBH TA 2021 yang Seharusnya Dialokasikan	LB TA 2021 yang Dapat Dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)-(4)	(6)
Pajak	14.350.569.234	-	6.726.735.270	7.623.833.964	6.020.102
PPh	8.282.370.460	-	3.846.204.600	4.436.165.860	-
PPh Pasal 21	6.275.177.060	-	3.376.178.900	2.898.998.160	-
PPh Pasal 25/29	1.947.264.680	-	470.025.900	1.477.238.980	-
PBB	3.277.321.267	-	1.097.121.102	2.456.455.265	6.753.787
Bea BPHTB	2.791.859.990	-	283.636.470	2.508.223.520	-
Bagian Daerah Cukai	707.304.817	-	313.656.602	393.648.215	5.266.785
Bagian Daerah Sda Migas	38.213.882	-	9.790.502	28.423.380	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Jamsos Daerah Kesehatan	926.691.908	-	527.628.630	399.063.278	-
Bagian Daerah Perkebunan	96.655.540	-	53.756.400	42.899.140	-
Bagian Daerah Sda Perikanan	715.503.207	-	8.624.530	706.878.677	-
Biaya Pemungutan Migas	7.122.281	-	7.424.620	-	302.339
Biaya Pemungutan Non Migas	1.861.830	-	298.530	1.563.300	-
Biaya Pemungutan Cukai Daerah	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	20.607.014	-	21.358.320	-	751.306
Biaya Pemungutan Perkebunan	4.650.166	-	1.737.030	2.913.136	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.186.021	-	298.830	7.187.324	-
DBH	2.450.845.502	-	1.791.105.570	658.739.932	-
SDA	73.630.030.822	8.427.135	501.838.765	72.779.338.792	179.416.770
Migas	71.017.897.523	-	522.521.190	71.017.362.133	-
Minyak Bumi 15%	20.682.114.090	-	61.215.100	20.104.696.646	-
Minyak Bumi 3,5%	568.099.017	-	18.179.703	670.239.147	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	275.760.262	-	9.673.202	265.826.667	-
Gas Bumi 6,5%	4.773.111	-	139.702	4.410.827	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Migas Lainnya	1.166.291.253	-	24.21..230	1.041.050.750	-
Landrent	-	-	-	-	-
Geothermal	1.666.39..95	-	24.361.200	1.641.050.751	-
Cukai Hasil Tembakau	-	8.427.135	2.297.635	-	12.724.770
Tarif Cukai 57%	-	-	-	-	-
Tarif Cukai	-	8.427.135	2.293.623	-	12.724.750
Sebesar Bagian Penerimaan	-	-	-	-	-
Kehutanan	177.035.561	-	74.695.275	102.630.278	-
PSDH	-	-	-	-	-
DBHPH	-	-	-	-	-
PSDH	177.720.081	-	71.926.275	102.639.279	-
Perikanan	159.199.940	-	316.651.200	-	157.691.870
Grand Total	2.798.659.050	8.427.135	7.228.590.677	32.210.810.897	76.968.872

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kurang Bayar

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KOTA 2019	KOTA 2020	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KEP No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KEP No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak		-	3.195.085.191	1.567.501.097	1.627.583.094
PPh			3.195.085.191	1.567.501.097	1.627.583.094
PPh Pasal 21	-		71.952.726	114.952.726	
PPh Pasal 25/29	-		2.177.067.565	652.567.471	1.624.510.094
PBB		-	2.972.400	-	2.972.400
Hasil Hutan		-			
Bagian Daerah Migas		-			
Bagian Daerah Non Migas	-			-	
Bagian Daerah Panas Bumi	-		-	-	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya		-	2.835.000		2.835.000
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-			
Biaya Pemungutan Migas	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas		-		-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-			
Biaya Pemungutan Perkebunan			1.400		116.900
Biaya Pemungutan Perkehutanan	-		-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-			-	-
CHT		-			-
PBB		4.275.510	1.563.494.902		1.563.494.902
Migas	-		1.563.408.809	-	1.563.408.809
Migas Bagi 15%	-		1.471.915.488	-	291.953.496
Migas Bagi 0,5%		-	91.493.417	-	91.640.834
Migas Bagi Tidak Ada Rangka Offset		-			-
Gas Bumi 30%		-			
Gas Bumi 0,5%			-		
Gas Bumi dalam Rangka Offset	-		-	-	
Minerba	-		-	-	-
Penalti	-	-			-
Royalti		-			
Panas Bumi		-			
Bagian Produksi			-		
Dana Iuran	-		-	-	
Subsidi Bagian Pemerintah	-			-	-
Kehutanan		5.248.516			-
IHH		-	-		
PSDH	-		-	-	
DR	-	6.241.519		-	-
Perikanan		-			-
Grand Total		8.248.516	4.768.911.048	1.567.501.097	3.180.078.938

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Uraian

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Tahun TA 2020	LB Daerah TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (SAKTI No. 211M.1/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2] - [4]	[6]
Pajak	1.303.340.120		1.303.340.120	0	1.047.009
PPh	7.197.170.470	-	2.851.221.700	4.345.948.770	-
PPh Pasal 21	5.456.026.007	-	2.458.597.500	2.997.428.507	-
PPh Pasal 25/29	1.741.144.463	-	392.624.200	1.348.520.263	-
PBB	2.369.943.229		321.677.500	2.048.265.729	1.047.009
Bagi Rata	1.901.960.918		321.677.500	1.580.283.418	
Bagian Daerah Migas	47.180.358	-	50.000.000		1.478.412
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasar Bunil			-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	3.497.863		2.707.500	790.363	
Bagian Daerah Perikanan	-				
Bagian Daerah Lainnya	215.299.087	-	8.021.200	207.277.887	-
Pasal 22 Impor	1.217.997	-	1.535.400	-	69.591
Bagian Pemerintah Non Migas	-				
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-				
Bagian Pemerintah Perkebunan	252.220	-	112.600	139.620	-
Bagian Pemerintah Perikanan			-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	74.586.24		2.498.800	7.187.227	-
CHT	1.326.217.431		1.326.600.000	973.291.753	
PBH	25.583.611.702	8.427.125	984.720.350	22.730.974.227	110.110.779
Migas	21.027.861.393	-	582.571.400	21.045.363.793	-
Minyak Bumi 15%	20.659.111.999		33.210.300	20.34.205.693	-
Minyak Bumi 0,5%	636.695.547		19.761.400	616.225.147	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	375.500.747	-	9.571.200	260.629.362	
Gas Bumi 0,5%	4.370.525	-	109.700	4.410.825	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Mineral	1.667.610.906		24.347.150	1.643.613.735	-
Landrent	-				
Iuran Tetap	1.667.660.666		21.548.150	1.645.612.731	
Panas Bumi	-	8.427.125	1.296.125		12.723.150
Iuran Tetap		-	-	-	-
Iuran Eksploitasi		8.427.125	4.235.625	-	13.727.750
Setoran Bagian Pemerintah	-				-
Kehutanan	178.878.554		50.000.170	71.894.370	
IHH	-	-	-		
SDHDR		-	-	-	-
PSDH	159.878.554		50.000.170	71.202.270	-
Perikanan	159.169.961		100.000.000		157.694.020
Grand total	31.772.951.847	8.427.125	5.312.470.990	29.091.312.909	171.954.649

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Kediri

(dalam rupiah)

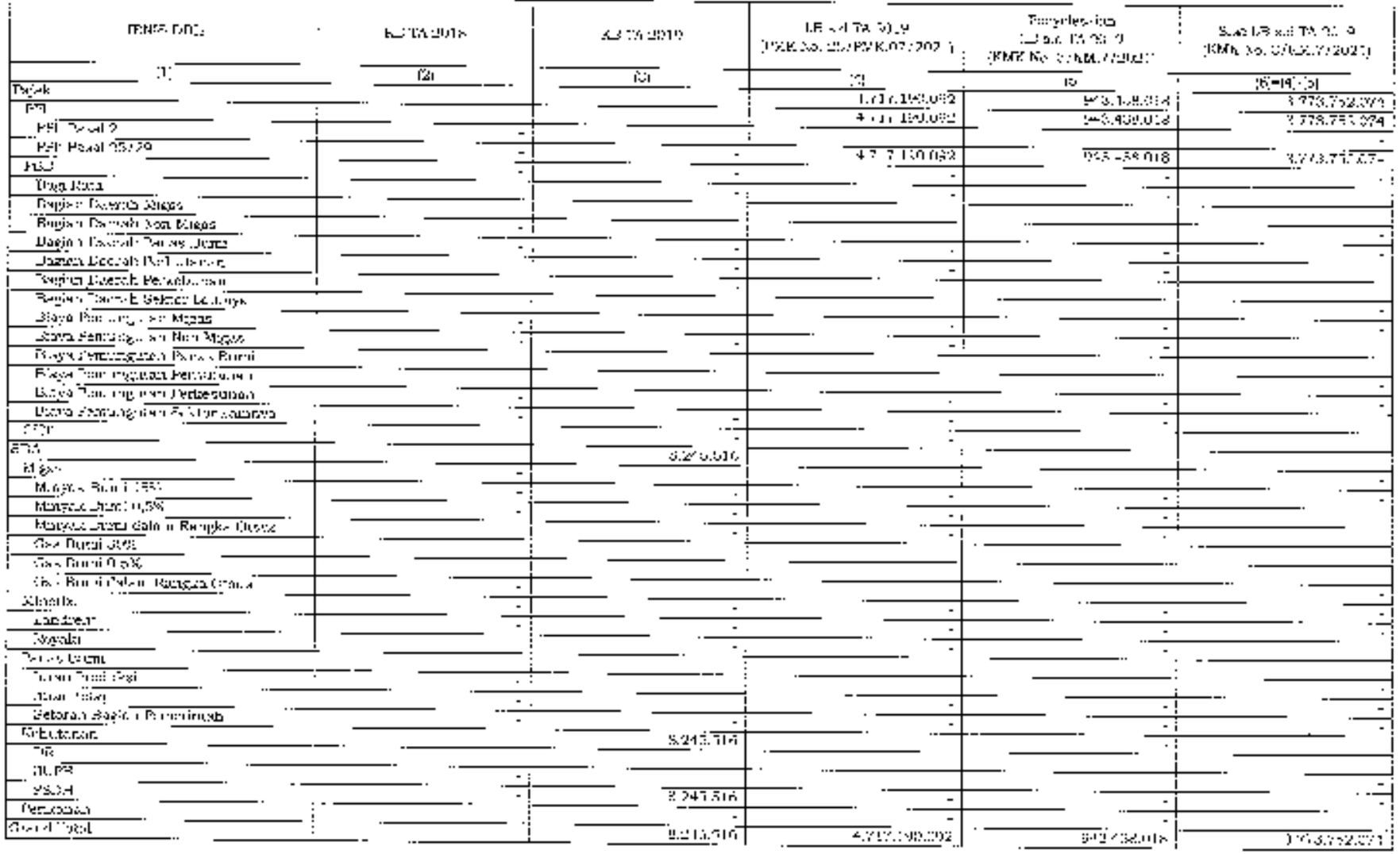

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Kediri

(dalam rupiah)

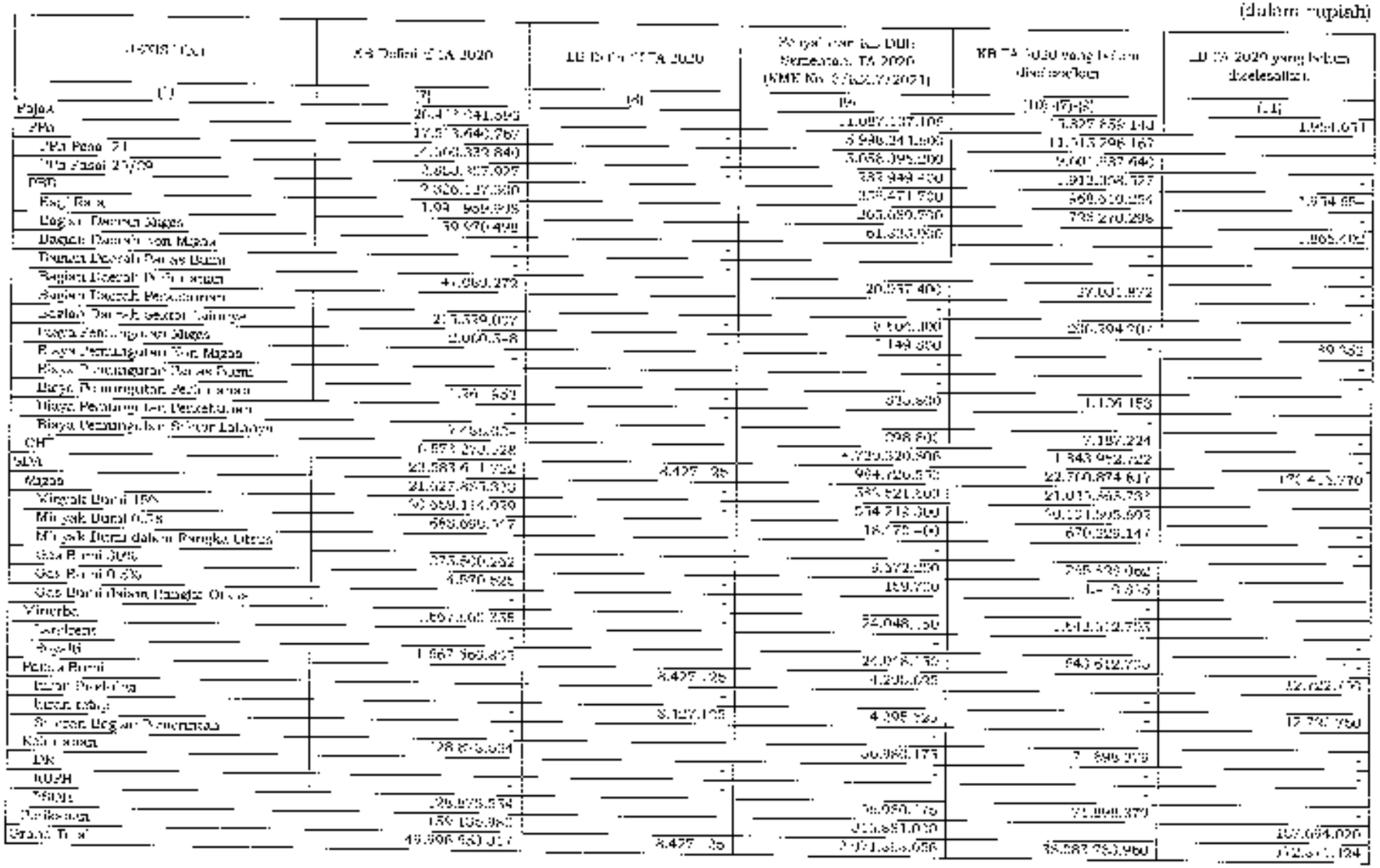

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Madiun

(dalam rupiah)

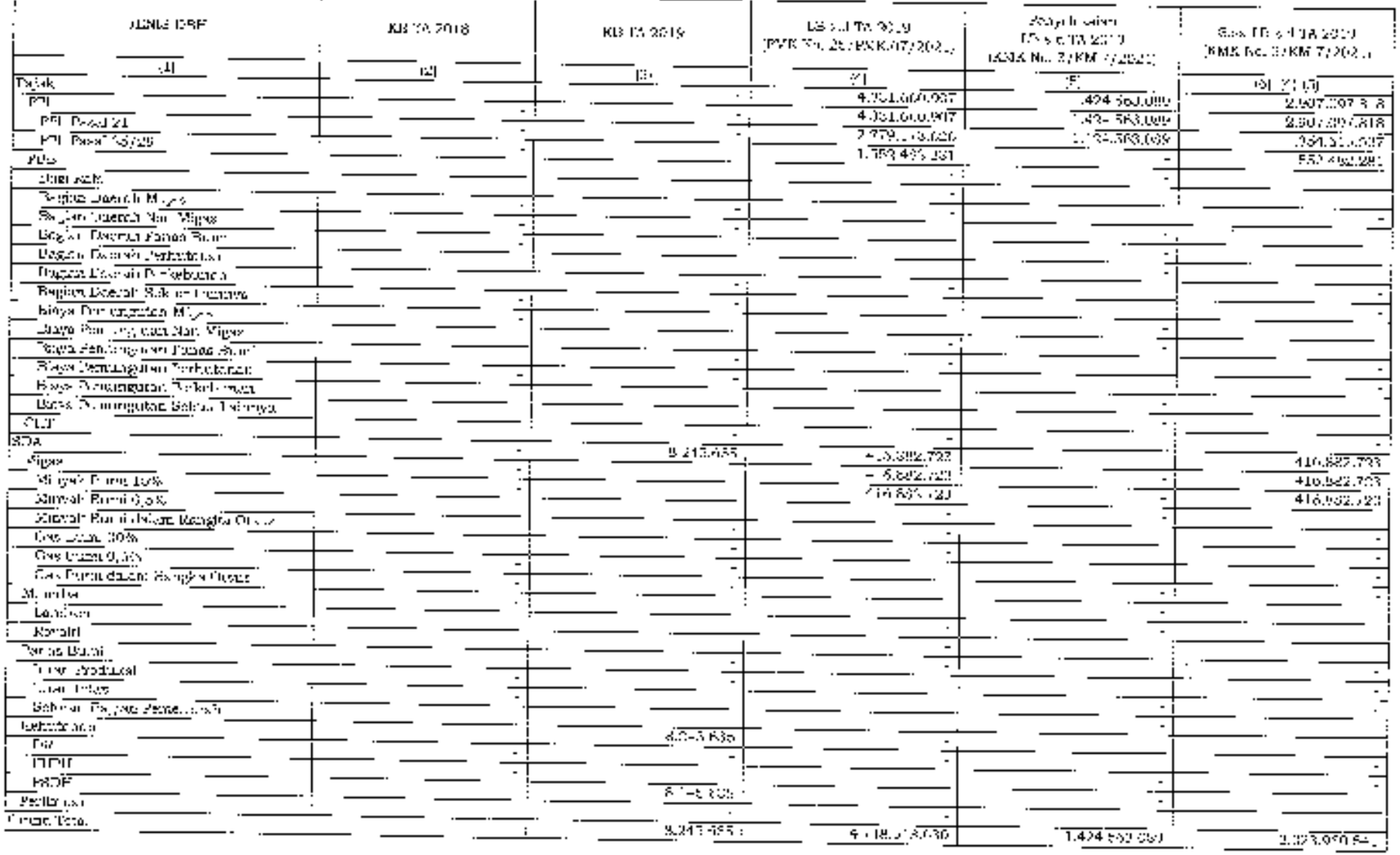

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Nota Matikan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB TA YE Sebelumnya (PMK No. 97/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	14.595.139.274	-	5.191.404.536	9.441.680.496	976.479
CHT	10.171.309.042	-	4.481.939.600	5.999.418.747	
PPh Pasal 21	8.572.925.702		3.065.338.800	1.727.586.902	
PBB Pasal 25/29	631.482.510		350.437.100	1.535.031.210	
PBB	3.739.457.540		324.421.900	1.910.762.228	14.925.469
Bea Ate	791.331.005	-	200.099.700	1.129.270.298	-
Pajak Daerah Migas	21.268.077	-	58.457.900	-	14.407.773
Pajak Daerah Non Migas			-		
Pajak Daerah Pertambangan Panas Bumi					-
Pajak Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Sektor Perairan	210.209.307	-	3.850.300	206.359.007	
Pajak Penerangan Migas	822.597		1.311.300		515.710
Pajak Penerangan Non Migas	-				-
Pajak Penerangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Perairan			-	-	
Pajak Penerangan Sektor Lainnya	7.486.724		288.000	7.187.221	-
PBB	1.418.707.142	-	1.204.537.300	578.810.064	-
SDA	23.050.350.322	8.497.125	984.747.100	22.770.778.387	173.416.770
Migas	21.527.380.303		527.301.900	21.015.363.733	
Minyak Bumi 15%	20.659.149.999		521.219.200	20.197.459.099	
Minyak Bumi 0,5%	868.649.547		15.170.300	853.229.247	-
Minyak Bumi dalam Rangka Gross Split	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	273.380.021	-	9.673.700	248.573.062	-
Gas Bumi 0,5%	4.570.033		150.700	1.713.823	
Gas Bumi dalam Rangka Gross Split					
Mineral	1.967.560.355		24.026.100	1.943.532.703	
Batubara	-	-	-	-	-
Kehutanan	1.697.560.855	-	54.048.150	643.617.705	-
Panas Bumi		8.497.125	- 955.625	-	12.570.750
Iuran Produksi			-	-	
Iuran Tetap		8.497.125	1.293.025		12.720.750
Setoran Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan	26.817.654	-	57.307.775	71.816.925	-
IHP		-	-	-	-
PSDH					
DBHR	26.817.654		57.307.775	71.816.925	-
Perikanan	30.786.380		316.931.500		57.694.220
Grand Total	36.311.709.276	8.497.125	7.280.451.388	31.202.473.952	85.343.220

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Malang

(Dalam Rupiah)

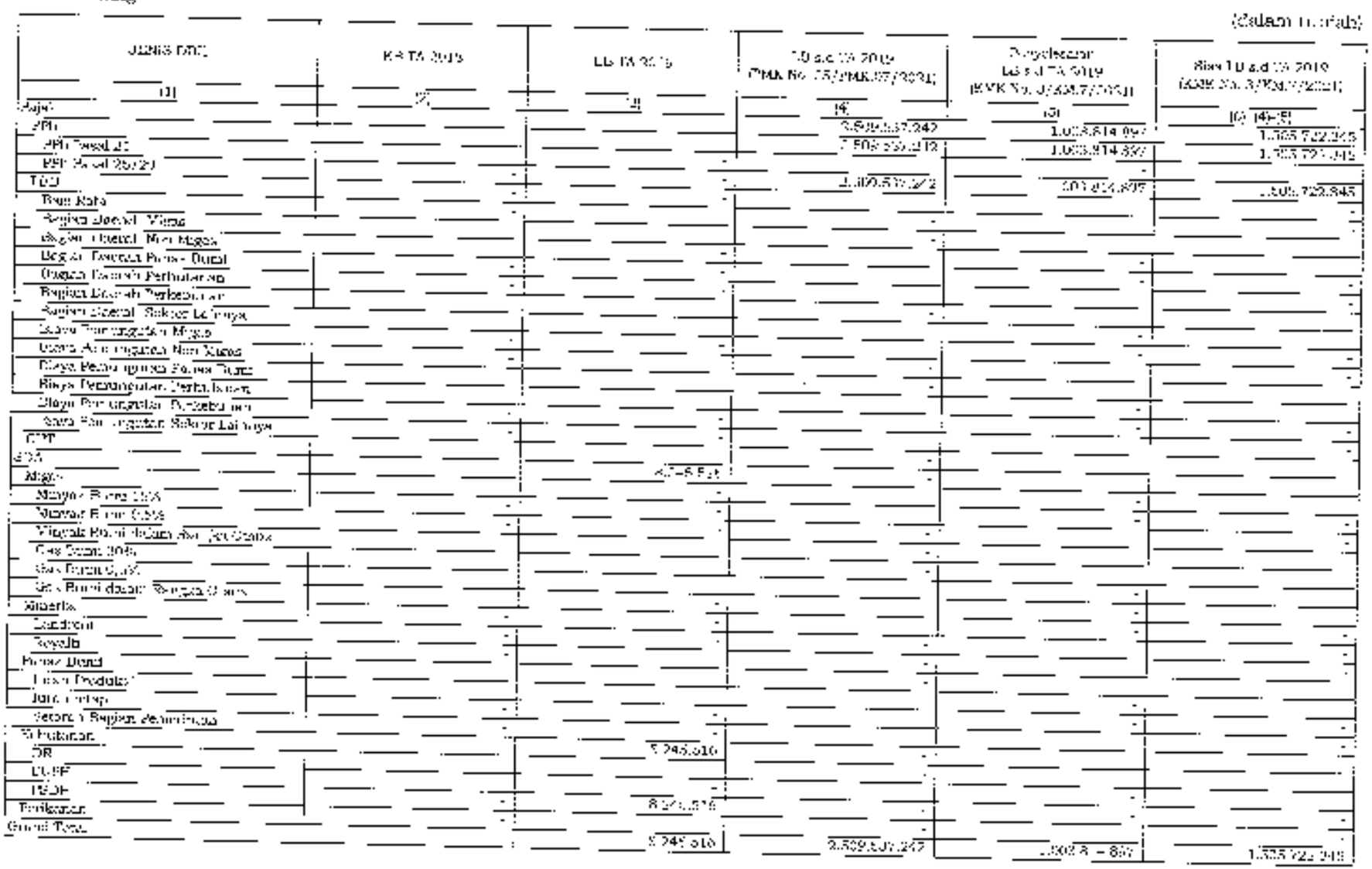

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Malang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	Kas DBH TA 2020	LB Salur DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 71/PMK.07/2021)	KB DBH 2020 yang belum dikembalikan	LB DBH 2020 yang telah dikembalikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]
Pajak	52.362.372.351	-	13.602.116.821	10.794.597.279	14.319.687
PPh	21.799.008.197		10.656.881.702	8.026.585.497	
PPh Pasal 21	21.462.670.065		9.780.291.103	11.268.187.365	
PPh Pasal 25/29	6.306.452.532		1.585.591.662	4.720.860.922	-
PBB	9.250.376.754	-	291.104.150	1.960.903.220	32.535.687
Pajak Rokok	1.0[illegible]1.050.998	-	302.693.730	1.726.291.268	-
Bagian Daerah Migas	72.716.084	-	1.3[illegible]5.510.330	-	12.795.656
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21			-		-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		-
Bagian Daerah Perbendaharaan	-	-			-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.569.507		8.624.020	206.964.707	-
Biaya Pemungutan Migas	3.494.643		4.055.700	-	5[illegible]6.051
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Pasal 21	-	-			-
Biaya Pemungutan Perkebunan					-
Biaya Pemungutan PBB				-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.486.934	-	298.850	7.197.211	-
CHT	8.297.027.853	-	2.372.016.020	5[illegible].059.833	-
SDA	25.593.031.722	8.427.125	96[illegible].730.500	20.796.874.817	170.110.770
Migas	2.[illegible]27.995.358		592.50[illegible].620	1[illegible].245.868.738	
Minyak Bumi (PBH)	20.65[illegible].114.964		797.510.500	20.107.[illegible].000	-
Minyak Bumi (PPh)	682.601.547	-	14.170.000	670.229.147	-
Minyak Bumi dalam Negeri Lainnya	-	-		-	-
Gas Bumi (PBH)	2[illegible].300.202	-	9.612.200	265.828.[illegible]	-
Gas Bumi (PPh)	4.577.323		99.700	4.410.895	
Gas Bumi Dalam Negeri Lainnya					
Panas Bumi	1.647.960.000		24.6[illegible].50	1.[illegible].612.705	
Pertambangan	-	-	-		-
Kehutanan	1.667.[illegible].355	-	21.[illegible].150	54[illegible].612.705	-
Pertambangan Umum	-	8.427.[illegible]	4.[illegible].[illegible]	-	12.7[illegible].[illegible]
Iuran Tetap (Land Rent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)		8.427.[illegible]	4.[illegible].[illegible]		1[illegible].[illegible].[illegible]
Setoran Kelebihan Pembayaran		-	-		
Perikanan	122.[illegible].[illegible]	-	50.[illegible].[illegible]	71.[illegible].[illegible]	-
PBB	-			-	-
BPHTB				-	
PDRD	139.[illegible].[illegible]	-	50.[illegible].[illegible]	71.[illegible].[illegible]	
Pertambangan	150.[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Grand Total	51.[illegible].[illegible].[illegible]	8.427.[illegible]	14.[illegible].[illegible].[illegible]	4[illegible].[illegible].[illegible]	21[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Mojokerto

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2020	KB TA 2019	LD s.d. TA 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2020)	Penyesuaian LD s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 71/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			2.022.024.313	445.616.921	1.576.407.392
PPh			2.022.024.313	445.616.921	1.576.407.392
PPh Pasal 21			467.016.021	16.116.000	
PPh Pasal 25/29			657.763.959	191.570.907	1.576.107.392
CHT					
Pajak Rokok					
Bagian Daerah Hasil					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 4(2)					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bunga Penerimaan Migas					
Bagian Penerimaan Sda Migas					
Bagian Penerimaan Panas Bumi					
Bagian Penerimaan Pertambangan					
Bunga Penerimaan Pertambangan					
Bagian Penerimaan Sektor Lainnya					
CHT					
DAK		[illegible]	630.032.424		630.032.424
Migas			630.032.424		630.032.424
Minyak Bumi 15%			630.032.424		630.032.424
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Untuk Rokyan Ubtosa					
Gas Bumi 2016					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi untuk Rokyan Ubtosa					
Mineral					
Batubara					
Tahun					
Panas Bumi					
Tahun Pajak Lalu					
Tahun Lebih					
Sebelum Lainnya Pemerintah					
Reboisasi		[illegible]			
PBB					
BPHTB					
PDRD		[illegible]			
Perikanan					
Grand Total		[illegible]	2.652.056.737	445.616.921	2.206.439.816

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Mojokerto

(dalam rupiah)

Uraian	PB Definitif TA 2020	LB DBH TA 2020	Asumsi Alokasi KB DBH Sementara TA 2020 (KMK No. 347/KMK.7/2021)	PB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6) = (3) - (4)
PajAk	1.470.421.258		4.673.350.636	6.795.212.090	1.327.4**
PPh	7.291.078.572		7.705.076.600	4.314.861.942	
PPh Pasal 21	3.121.110.777		2.642.994.600	5.43* 437.1**	
PPh Pasal 25/29	1.177.210.162	-	321.692.000	837.50*.765	-
PPN	2.356.238.145	-	727.013.600	1.*19.*41.756	854.** 1
Peg. Pusat	1.0** .059.408	-	265.669.000	1.730.27*.***	-
Bagian Daerah Pajak	58.030.779		50.748.000		1.291.721
Bagian Daerah Sektor Migas	191.913		491.700	190.813	
Bagian Daerah Cukai Hasil Tembakau				-	-
Bagian Daerah PPh Pasal 21	-	-		-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-		-		-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.591.207		8.604.300	936.394.707	
Biaya Pemungutan Pajak	1.861.413	-	1.784.100	-	63.984
Biaya Pemungutan Sektor Migas	25.514	-	17.100	8.414	-
Biaya Pemungutan Pajak Pusat	-		-		
Biaya Pemungutan PBB Pedesaan			-		
Biaya Pemungutan Perkebunan		-		-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.486.934	-	298.629	7.187.234	-
CHT	1.074.583.947		38.350.436	1.036.233.762	-
DAK	23.083.617.702	8.427.125	984.774.550	22.*50.*71.277	170.116.775
Migas	31.627.949.353		1**.721.000	21.0**.***.***	
Minyak Bumi 15%	30.659.111.899	-	99*.210.300	20.***.***.***	-
Minyak Bumi 0,5%	678.699.547	-	19.410.100	659.289.147	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Gas Bumi 30%	271.910.747		9.472.900	262.*29.***	
Gas Bumi 0,5%	17.278.505		150.720	4.119.***	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	
Minerba	1.657.650.***	-	47.018.150	1.*15.*17.***	-
Tambahan	-	-		-	-
Royalti	1.657.650.735	-	94.*** .***	1.*13.*12.***	-
Pajak Bumi	-	8.427.125	4.253.425		12.721.750
Cukai Rokok			-		
Cukai lain		8.427.125	1.293.025	-	12.721.750
Kurang Bayar Normalisasi				-	-
Kehutanan	128.878.534	-	3*.9*.***	71.*9*.***	-
DR			-		
DAK				-	
PSDH	128.878.534	-	56.982.***	71.*9*.***	-
Perikanan	150.*76.382	-	*16.*** .***		177.*** .***
Grand Total	35.056.022.577	8.427.125	5.643.577.236	29.*** .***.***	177.***.***

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Pasuruan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	Lo s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Terealisasi di s.d. TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			1.071.220.305	314.396.179	756.824.126
PPh			1.071.220.305	314.396.179	756.824.126
PPh Pasal 21		-		-	
PPh Pasal 25/29	-	-	1.071.220.305	314.396.179	756.824.126
PBB	-	-		-	-
Sektor Lain					-
Sektor Pertambangan Minyak					
Sektor Pertambangan Non Migas		-			
Sektor Kehutanan	-				
Sektor Perikanan	-				-
Sektor Pertambangan Panas Bumi					
Sektor Pertambangan Lainnya		-			
Bunga Pertambangan Migas	-	-		-	
Bunga Pertambangan Non Migas	-				-
Bunga Pertambangan Panas Bumi					-
Bunga Pertambangan Perikanan					
Bunga Pertambangan Kehutanan	-	-		-	
Bunga Pertambangan Sektor Lainnya		-		-	-
PPh					-
PBH					
Migas		4.940.810	2.072.743.490		2.072.743.490
Migas		-	2.072.743.490	-	2.072.743.490
Migas Bagi 15%	-	-	1.945.760.302	-	1.945.760.302
Migas Bagi 3,5%	-		227.260.378	-	227.260.378
Migas Bagi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 6,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	
Minerba	-	-		-	
Landrent					-
Royalti					-
Panas Bumi					
Iuran Produksi		-			
Iuran Tetap	-	-		-	
Bagian Bagi dari Pemerintah	-				
Kehutanan		8.240.516		-	
DR					
IIUPH	-	-		-	
PSDH	-	8.240.516		-	-
Perikanan					-
Grand Total		8.240.516	3.143.963.795	314.396.179	2.829.567.616

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pasuruan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA Tahun TA 2021	LB Tahun TA 2020	Penyaluran LB DBH Sebelum TA 2021 (PMK No. 71/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	11.903.742.792		4.665.700.282	7.237.249.263	2.196.791
PPh	7.859.684.152		3.056.231.001	4.791.225.142	
PPh Pasal 21	1.718.25-.036		3.603.343.000	3.939.343.036	-
PPh Pasal 25/29	1.110.-70.716	-	744.383.000	85.-83.1.6	-
PPN	2.217.880.076	-	387.652.500	1.830.432.259	2.196.791
PPh Pasal 22	194.-54.305	-	208.660.700	1.721.270.278	
Bagian Daerah dari PPh Migas	60.7-9.-36		614.-6.720		2.047.5.7
Bagian Daerah dari PPh Migas	-				-
Bagian Daerah dari PPh Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah dari PPh Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah dari PPh Migas					-
Bagian Daerah dari PPh Migas	215.593.-0-		3.674.320	305.994.727	
Bagian Daerah dari PPh Migas	2.2a6.703		2.-65.030		95.259
Bagian Daerah dari PPh Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah dari PPh Migas					
Bagian Daerah dari PPh Migas					
Bagian Daerah dari PPh Migas	7.792.024	-	206.506	7.787.224	-
CHT	1.764.306.642		1.270.774.782	493.160.979	
SDA	23.783.611.722	6.427.125	609.120.-.-3	92.760.87.1.1-.	70.-.5.7-0
Migas	21.027.453.833		581.-21.500	71.045.3.35.-02	
Minyak Bumi 15%	20.651.-14.090	-	534.714.-0(-	70.-24.605.699	-
Minyak Bumi 0,5%	693.694.-.7	-	19.-7-.-00	670.729.147	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%	675.520.352		9.272.-50	256.528.-02	
Gas Bumi 0,5%	4.370.525		1-0.-.-0	1.-19.825	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Pinerba	1.057.-.0.-.75	-	52.-48.-5(-	1.-25.-1-.7(-	-
Perikanan	-		-	-	-
Pajak	1.967.-50.-0-	-	24.-12.-50	1.-43.-12.703	-
Cukai Hasil		9.-2-.-23	7.-29.-27		2.732.730
Cukai Hasil	-				
Cukai Hasil	-	5.-37.-.5	2.-95.-2-	-	12.-74.-50
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Kehutanan	134.-7-.-.-		50.-90.-.75	71.-02.-79	
IHPH	-				
PSDH	-	-			-
DR	120.-74.-52	-	50.-50.-.75	71.-03.-79	-
Pertanian	159.-.-.-80	-	0-0.-27.-06	-	157.-94.-02
Dana Bagi Hasil	35.-67.-8-.-1-	6.427.125	5.-50.-.-0.-.-2	2-.-3-.-.-.-77	1-2.-12.-21

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Probolinggo

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Alokasi TA 2018	Alokasi TA 2019	Alokasi TA 2020 (PMK No. 23/PMK.07/2020)	Penyesuaian TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Alokasi TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak			1.039.211.360	283.736.240	1.322.947.600
PPh			2.755.747.938	761.431.318	3.517.179.256
PPh Pasal 21			335.435.241	257.423.047	592.858.288
PPh Pasal 25/29			2.761.592.741	718.020.227	3.479.612.968
PBB			302.363.975	302.363.975	604.727.950
Bagi Hasil					
Dalam Negeri: Migas					
Dalam Negeri: Non Migas					
Bagian Daerah: Pajak Bumi					
Bagian Daerah: Pertambangan			218.948.156	218.948.156	437.896.312
Bagian Daerah: Perikanan			11.921.320	4.421.307	16.342.627
Bagian Daerah: Kehutanan					
Bagian Pemerintah: Migas					
Bagian Pemerintah: Non Migas					
Bagian Pemerintah: Pajak Bumi					
Bagian Pemerintah: Pertambangan			71.488.189	71.488.189	142.976.378
Bagian Pemerintah: Perikanan			56.950	57.053	114.003
Bagian Pemerintah: Kehutanan					
DAU					
DAK		9.215.231	34.209.720		43.424.951
Cukai			283.358.231		1.229.345.101
Cukai Hasil Tembakau			209.650.656		1.024.630.561
Cukai Hasil Tembakau Dana Sehat			25.029.297		334.954.147
Cukai Hasil Tembakau Dana Kesehatan					
Gas Bumi 1,85%			118.160		118.466
Gas Bumi 0,5%			0.560		0.560
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pungutan					
Perikanan					
Pasal 22 Impor					
Bea Meterai			847.676		847.676
Denda Pajak					
Denda Cukai			867.879		867.879
Sebagian Bagian Pemerintah					
Kehutanan		8.215.316			
DR					
DBHT					
PSDH		8.215.316			
Perikanan					
Grand Total		8.215.316	4.209.931.013	283.736.240	3.913.592.360

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pembelinggo

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH Sebelumnya TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB DBH 2020 yang belum disalurkan	LB DBH 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	1.383.607.026		4.817.364.573	4.049.981.260	3.665.195
PPh	6.700.197.534		3.778.870.700	3.468.526.834	-
PPh Pasal 21	3.408.887.835		2.785.217.020	3.029.581.053	-
PPh Pasal 25/29	990.290.181	-	299.197.800	620.541.681	-
PBB	2.301.966.011	-	594.043.920	1.911.123.306	3.665.195
Bea Jasa	1.991.959.946		745.589.770	1.726.370.176	
Bagian Daerah Migas	80.059.922		92.452.220	-	3.369.377
Bagian Daerah Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Pasal 21		-			
Bagian Daerah Perbankan		-			
Bagian Daerah Pertambangan	9.146.034		4.644.470	4.496.504	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	191.172.027		26.922.100	164.246.507	-
Bagian Pemerintah Migas	3.350.032	-	2.211.200	-	154.318
Bagian Pemerintah Non Migas		-	-		
Bagian Pemerintah Pasal 21			-		
Bagian Pemerintah Perbankan	-			-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	938.473	-	220.209	724.273	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	3.328.024	-	534.903	2.793.211	
Cukai	1.762.139.680		1.068.107.202	694.432.456	
PNBP	22.362.611.773	6.427.129	994.796.362	21.362.611.773	12.776.770
Migas	21.627.863.828		982.547.900	21.345.368.735	-
Minyak Bumi 15%	20.106.111.090	-	954.219.207	20.106.489.709	-
Minyak Bumi 0,5%	138.569.017	-	13.470.400	575.229.127	
Minyak Bumi dalam Rangka Cadangan Operasi	-		-	-	
Gas Alam 30%	275.501.262		9.677.300	265.738.062	-
Gas Alam 0,5%	4.373.721		130.700	4.170.821	-
Gas Bumi dalam Rangka Migas	-			-	-
Minerba	1.047.660.058	-	24.078.196	1.023.112.753	
Tarif 0 %	-	-	-		
Mineral	697.660.058	-	24.078.196	673.612.753	
Batubara	-	5.127.129	4.253.025	-	12.776.770
Panas Bumi	-			-	-
Kehutanan	1.349.135		7.229.030		12.776.770
Iuran Hasil Hutan		-	-		
Perikanan	26.879.154	-	38.090.775	11.648.779	
Lain	-		-	-	-
BLUD	-			-	-
PNBP	126.879.154	-	38.090.775	11.648.779	-
Perikanan	79.196.980	-	216.461.020		154.320.020
Jumlah total	24.447.936.727	6.427.129	6.202.305.052	33.810.392.15	170.970.565

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Surabaya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KRITA 2018	KRITA 2019	DBH TA 2021 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penjelasan DBH TA 2021 (KKK No. 3/KK.7/2021)	Sisa Lebih TA 2019 (SVS No. 3/SV.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5-3)
Pajak	-	-	22.710.118.391	11.356.059.700	1.356.359.191
PBB	-	-	22.710.118.391	11.356.059.700	11.356.359.191
PBB Pasal 25/29	-	-	13.863.207.312	11.356.059.700	2.849.218.012
PBB Pasal 25/29	-	-	8.846.911.079		8.846.911.079
BPHTB	-	-	-	-	-
Jasa Raharja	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Atas Laba	-	-			
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Pasal 4 ayat	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perhitungan	-	-		-	-
Bagian Daerah Akhir Tahun	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-		
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Pasal 4 Ayat	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Perhitungan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-		-	-
CHT	-	-		-	-
SDA	-	8.345.516			
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 85%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%	-	-		-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	-	-		-	
Iuran Tetap				-	-
Royalti		-		-	-
Pajak Lainnya		-			-
Jasa Produksi	-	-	-		
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Penerimaan Negara Bukan Pajak				-	-
Kehutanan		8.345.516		-	-
DR		-	-		
IHPH	-		-		
PSDH		8.345.516		-	-
Perikanan		-		-	-
Grand Total		8.345.516	22.710.118.391	11.356.059.700	11.356.359.191

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Surabaya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KU Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Definitif TA 2020 [LKK No. S-658/PK/2021]	KU TA 2020 yang belum Diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]=[3]-[4]
Pajak	210.932.717.460		72.811.907.000	138.120.810.460	123.095.002
DBH	205.167.978.758	-	70.810.405.400	134.357.573.358	
PPh Pasal 21	107.183.612.000	-	57.817.040.670	49.372.971.330	-
PPh Pasal 25/29	48.250.994.000	-	13.005.364.730	35.245.629.270	-
PBB	49.533.372.758		988.000.000	48.545.372.758	5.886.372
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.901.959.000		200.000.000	1.701.959.000	
Cukai Tembakau	286.671.000		176.000.000	110.671.000	123.002.617
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Dana Hasil		-	-	-	-
Bagian Daerah PPh Pasal 21			-	-	-
Bagian Daerah Perseorangan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.301.067	-	13.000.000	196.300.700	
Biaya Pengelolaan Migas	9.292.010	-	12.556.167	-	4.945.555
Biaya Pengelolaan Non Migas	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-				
Biaya Pemungutan Perseorangan		-			
Biaya Pengelolaan DBH Lainnya		-	-	-	-
Biaya Pengelolaan Sektor Lainnya	7.313.024		420.000	6.893.024	-
CHT	1.516.576.345		1.016.725.000	499.851.345	
SDA	23.570.813.979	8.427.125	997.035.671	22.781.776.842	172.416.779
Migas	21.027.842.233	-	589.952.840	21.046.889.393	
Minyak Bumi 15%	20.606.111.949	-	154.210.300	20.154.895.600	-
Minyak Bumi 0,5%	698.695.541		14.470.102	670.020.747	-
Migas 0,1% dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	370.500.243	-	9.012.200	361.826.032	
Gas Bumi 0,5%	4.570.555	-	139.700	4.410.855	
Gas Bumi Bagi Rangka Otsus		-	-	-	-
Panas Bumi	1.667.610.000	-	7.048.750	643.619.775	-
Tambang	-		-	-	-
Kehutanan	1.667.661.668		27.018.750	1.643.617.775	-
Pungutan Lainnya	-	8.427.125	4.295.625		12.722.750
Iuran Produksi	-	-			
Iuran Hutan		8.427.125	4.295.625	-	4.131.500
Sumber Daya Alam Lainnya			-	-	-
Kehutanan	129.077.804		99.277.300	62.900.504	
DR	-	-			
PHPT	-		-	-	-
PSDH	129.077.804		99.277.300	62.900.504	-
Pertambangan	153.176.960		316.561.000		163.384.040
Grand Total	232.873.706.439	8.427.125	1.053.076.300	160.250.121.111	311.103.172

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Baru

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR 2018	KURANG BAYAR 2019	LEBIH BAYAR 2019 (PMK No. 77/PMK.07/2020)	Penyesuaian LEBIH BAYAR 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LEBIH BAYAR 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak			1.153.776.719	-83.445.176	869.384.672
PPh			926.731.831	-82.441.176	443.303.674
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 15/29			916.731.819	-82.441.176	443.303.674
PPnBM			274.588.800		226.358.830
Orang Pribadi					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 25 Ayat 2					
Bagian Daerah Air Permukaan			217.533.200		217.533.200
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pasal Pajak					
Biaya Pemungutan Air Permukaan			9.035.600		9.035.600
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
Cukai					
SDA	83.292.763	1.241.090.171			1.241.090.171
Migas		1.241.090.171			1.154.292.171
Minyak Bumi 15%		1.158.704.241			1.158.704.241
Minyak Bumi 0,5%		105.385.930			105.385.930
Minyak Bumi Bekas Pengolahan Primer					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Bekas Pengolahan Primer					
Pertambangan					
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksploitasi (Royalti)					
Bagian Daerah Penerimaan Negara					
Kehutanan	83.292.763				
PSDH					
DR	83.292.763				
Ambalan					
Grand Total	83.292.763	2.417.870.890	485.246.173		1.010.761.672

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Batu

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH PBH sebelum TA 2020 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	20.987.920.890	-	4.050.789.762	8.954.315.181	20.151.832
PPh	5.740.851.772		3.545.503.120	2.151.256.852	-
PPh Pasal 21	5.341.648.594		2.236.727.020	2.142.897.502	-
PPh Pasal 25/29	1.350.778.178		310.900.100	1.048.377.078	-
PBB	2.324.894.980	-	131.122.800	2.071.110.188	20.151.832
Pajak Rokok	1.061.959.936	-	366.289.700	1.720.210.299	
Bagian Daerah Migas	72.014.550		51.542.950	-	29.461.600
Bagian Daerah Pajak Migas	-		-	-	-
Bagian Daerah Pajak Dana	-				-
Bagian Daerah Terkontaminasi	207.167.137	-	100.419.000	106.419.237	
Bagian Daerah Pelabuhan		-	-		
Bagian Daerah Sesuai Tahunya	2.536.039.077		6.904.300	206.954.707	-
Bagian Pemanfaatan Migas	1.095.468		1.095.700	-	700.532
Bagian Pemanfaatan Pajak Migas	-	-			
Bagian Pemanfaatan Panas Bumi		-	-		
Bagian Pemanfaatan Pertambangan	11.077.972		5.447.400	5.560.313	-
Bagian Pemanfaatan Perkebunan	-				-
Bagian Pemanfaatan Sektor Lainnya	7.474.024	-	298.800	7.197.211	
CHT	1.720.613.717	-	1.240.100.890	480.512.826	
SDA	21.301.987.010	-	977.657.155	23.777.039.510	57.894.651
Migas	21.637.865.303		19.552.600	21.045.303.738	-
Bagian Dana 15%	20.659.174.959		35.121.200	20.203.893.709	-
Bagian Dana 0,5%	688.690.517	-	18.170.100	670.520.117	
Bagian Dana Dari Penerimaan Spesifik Cukai		-	-		
Gas Bumi 70%	270.000.262	-	9.672.300	465.920.062	
Gas Bumi 0,5%	4.570.535		50.700	4.419.835	-
Gas Bumi Selain Bagian Daerah	-			-	-
Panas Bumi	1.697.860.855		27.036.150	1.671.612.707	-
Perikanan	-	-			
Kehutanan	1.107.860.853	-	54.048.150	1.643.612.703	
Pertambangan Umum	2.179.939	-	6.326.020	15.019.598	
Bagian Pemerintah	-		-	-	-
Bagian Setoran	21.779.686		6.326.020	15.019.598	-
Setoran Bagian Pemerintah	-				
PNBP	105.354.851	-	57.956.425	42.639.122	
DAK		-	-	-	-
DBH CHT	-			-	-
BPHTB	130.584.731		91.592.720	72.409.120	
Perikanan	139.160.080	-	316.981.000		177.820.920
Grand Total	24.001.929.205	-	5.241.141.987	33.501.284.668	177.820.920

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Kalimantan Barat

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2020)	Penyelesaian LEBIH BAYAR TA 2019 (KMK No. 2/KM.7/2021)	SISA LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (PMK No. 7/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-		4.020.259.702	4.020.259.702	
PPh	-		4.020.259.702	4.020.259.702	
PPh Pasal 21		-	4.020.259.702	4.020.259.702	
PPh Pasal 25/29		-	-	-	-
PBB	-		-	-	-
Hasil Bea	-			-	
Bagian Daerah Sebesar	-				
Bagian Daerah Non Migas		-			
Bagian Daerah Pasal 21		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29			-	-	-
Bagian Daerah Pemotong/	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			
Bagian Pemerintah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas			-	-	-
Bagian Pemerintah Pasal 21	-				
Bagian Pemerintah Pemotong/	-	-			
Bagian Pemerintah Pemotongan		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya			-	-	-
Cukai	-			-	
SDA	-	54.132.940	21.979.959.087	3.305.850.665	18.674.108.422
Migas		-	-		
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	-
Kompensasi dalam Rangka Divestasi	-			-	
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Rangka Divestasi		-	-		
Minerba		-	947.336.761	947.336.761	-
Tambang			947.336.761	947.336.761	-
Lainnya	-			-	
Pasca Tambang	-				
Iuran Produksi	-	-			
Iuran Tetap		-	-	-	-
Bonus Penyerahan Pertama			-	-	-
Kehutanan	-	911.092.670	20.032.622.326	2.358.050.027	18.674.572.299
DR	-	911.092.670	20.032.622.326	2.358.050.027	18.674.572.299
PSDH		1.530.969	-		-
DBHP		121.770.371	-	-	-
Perikanan	-			-	-
Grand Total	-	911.092.670	25.000.227.570	7.261.467.030	18.674.572.299

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Kalimantan Barat

[dalam rupiah]

URAIAN	PB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB TA 20.. Sesuai dgn PMK No. ... TA 2021 (PMK No. ... TA 2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	89.031.202.130	-	29.743.061.301	62.288.140.829	23.111.081
PPh	34.920.502.962	-	5.923.432.300	11.996.720.662	
PPh Pasal 21	28.971.347.852		5.171.030.490	13.800.317.360	
PPh Pasal 25/29	5.949.155.110		1.701.401.810	4.184.918.503	-
PBB	54.620.805.386		9.408.730.200	44.946.215.730	25.143.364
Cukai Hasil Tembakau	-				-
Bagian Daerah dari Pajak	736.147.845	-	779.710.605		21.222.710
Bagian Daerah dari Pajak Migas	10.435.115.491	-	662.010.700	9.773.104.791	
Bagian Daerah dari Pajak Lainnya	-		-	-	-
Bagian Daerah dari Perikanan	1.085.860.100		1.211.724.168	1.102.151.794	-
Bagian Daerah dari Pertambangan	33.030.025.609	-	6.601.457.609	28.047.468.109	
Bagian Daerah dari Sektor Lainnya	723.147.142	-	94.778.530	1.217.910.820	
Dana Penyesuaian Migas	20.760.196		21.676.460	-	62.180
Dana Penyesuaian Non Migas	670.118.675		18.130.000	276.983.077	-
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus Lainnya		-			
Dana Penyesuaian Pajak Lainnya	357.067.892	-	53.767.430	124.122.492	
Dana Penyesuaian Pajak Daerah	967.705.361		100.370.850	797.158.587	-
Dana Penyesuaian Sektor Lainnya	20.700.237		207.000	18.213.887	-
DPPT	4.865.302	-	1.623.750	1.241.802	
BCHT	93.218.811.780	4.439.733.923	8.558.533.930	88.199.590.721	20.368.870.138
Migas			-	-	
Minyak Bumi 15%	-		-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-			-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Gas Bumi 30%		-			
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			
Mineral	83.177.956.936	360.347.282	1.662.147.373	89.438.536 - 1	506.766.630
Landrent	-	360.347.282	1.032.319.850	-	1.507.766.030
Royalti	83.177.956.936		629.827.523	82.498.589.121	-
Panas Bumi		-			
Iuran Produksi		-	-	-	
Iuran Tetap	-		-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-			-	-
Kehutanan	121.377.850	3.861.752....	4.960.340.923		4.780.773.268
PSDH		2.307.054.485	3.536.040.421		5.038....
DR	121.377.850		273.557.125	-	126.902.275
PSDH	-	920.697.676	1.130.743.377	-	1.068.741.193
Perikanan	-				-
Grand Total	172.902.341.176	4.439.733.918	53.402.616.208	245.202.973.120	19.453.645.702

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bengkayang

(Dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH 2018	KB DBH 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak			3.025.966.639	270.804.794	3.736.102.853
PPh			626.021 – 803		626.021.623
PPh Pasal 21			626.02– 823		626.024.913
PPh Pasal 25/29					
PPN			2.100.071.776	270.8 82.794	1.727.137.982
Pajak Rokok					
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Non Migas			582.63– 764	476 63 76–	305.791.301
Bagian Daerah Hasil Migas Dana					
Bagian Daerah Non Migas Dana					
Bagian Daerah Perikanan			728.728.171		728.728.171
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Non Migas			57.127.242		57.127.242
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Kehutanan					
Bagian Pemerintah Perikanan			35.424.646		35.424.646
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					
PPnBM					
SDA		14.731.021	738.241.358		738.241.358
Migas					
Minyak Bumi (PPh)					
Minyak Bumi (Iuran Eksploitasi dan Iuran Tetap)					
Gas Bumi (PPh)					
Gas Bumi (Iuran Eksploitasi dan Iuran Tetap)					
Gas Bumi Setelah Konversi Migas					
Pertambangan			738.241.358		738.241.358
Pertambangan Umum			738.241.358		738.241.358
Panas Bumi					
Kehutanan					
Iuran Hasil Hutan					
Dana Reboisasi					
Perikanan					
Pertambangan Minyak Bumi					
Pertambangan Gas Bumi					
Pertambangan Panas Bumi					
Kehutanan		16.731.984			
Perikanan					
Grand Total		16.731.984	7.763.372.975	270.804.794	2.701.224.172

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bengkayang

(Dalam rupiah)

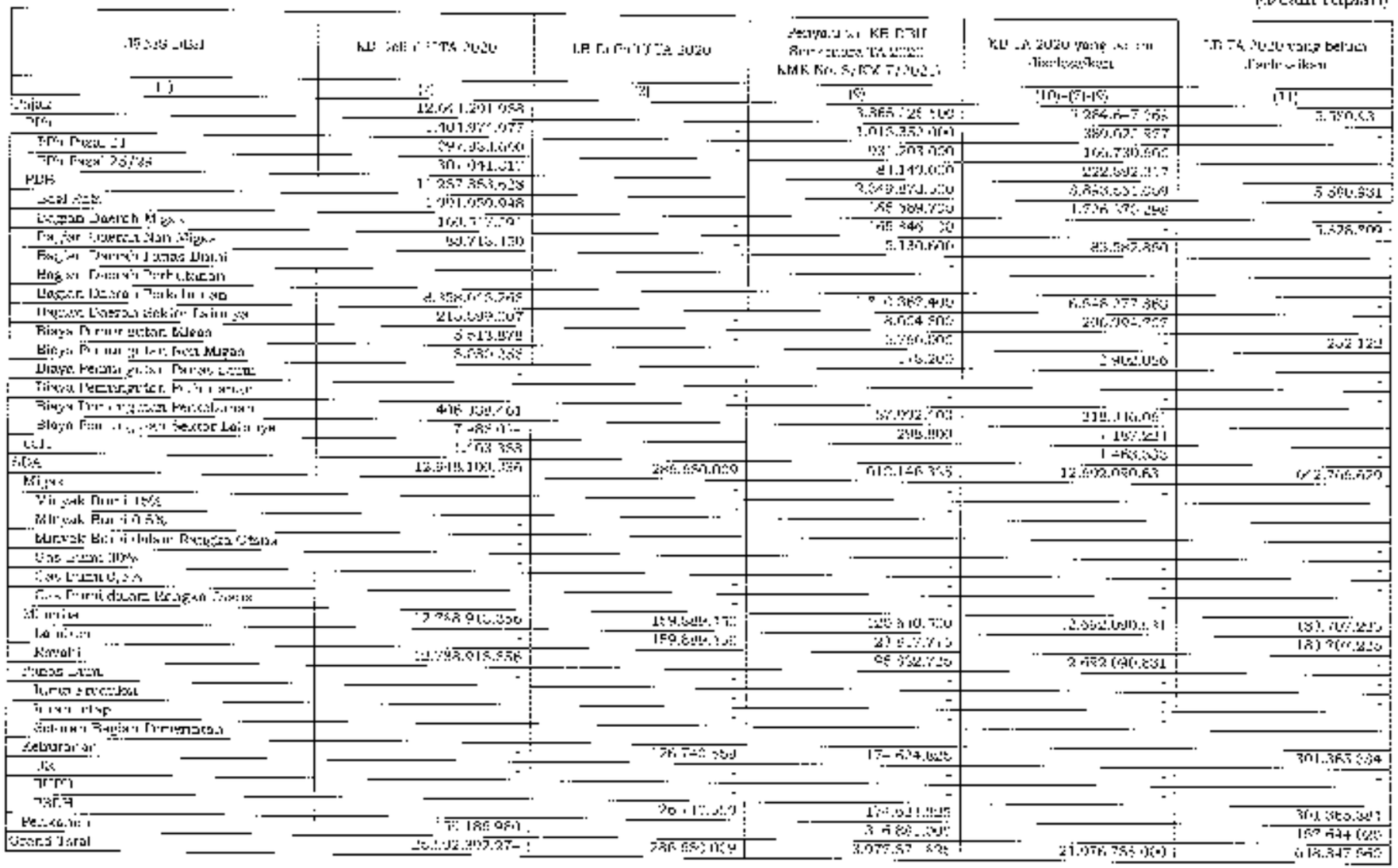

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Surabaya

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KUA 2019	PKPA 2019	LKPA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2020)	Penyesuaian LKPA 2019 (KEP-No.3/PK.7/2021)	Hasil DBH sd TA 2019 (Hasil Ver. 3/PK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-		23.027.577	-	23.027.577
PPh	-			-	-
PPh Pasal 21		-			
PPh Pasal 23/26		-			
PBB		-	23.027.577		23.027.577
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Sanksi Administrasi PBB	-				-
Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Dalam Negeri	-		20.129.069		20.129.069
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan		-			
Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan		-	-		
Cukai Hasil Tembakau	-		-	-	-
Pajak Rokok Sebelum Opsen	-				-
Pajak Penerangan Jalan		-			
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		-	823.632		823.632
Cukai Hasil Tembakan Pajak Rokok	-		-	-	-
Pajak Rokok Sebelum Pemotongan	-			-	-
Pajak Penerangan Jalan Pemerintah		-			
Sanksi Administrasi Pajak Rokok		-	-		
Cukai	-		-	-	-
SDA	-	18.718.987	3.071.708.994	1.115.993.887	2.370.813.117
Migas		-			
Minyak Bumi 15%		-	-		
Minyak Bumi 0,5%		-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-		-	-	-
Gas Bumi 69%	-			-	-
Gas Bumi 0,5%	-				-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus		-			
Minerba		-	3.191.134.412	1.115.993.861	2.371.129.537
Panas Bumi		-	3.191.134.412	1.115.993.861	2.371.129.537
Kehutanan			-	-	
Pungutan Progas	-				-
Provisi Produksi	-				-
Iuran Hutan		-			
Reboisasi		-			
Perikanan	-	18.718.987	505.58 - 762	-	501.564.762
KP	-			-	-
PDPH		-	346.320.307		305.800.307
PSDH		18.718.994	18.264.762		109.291.762
Kehutanan			-	-	
Grand Total	-	18.718.987	3.719.026.207	1.115.993.887	2.603.757.384

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tanahlak

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Perkiraan KB DBH Penerimaan TA 2020 (ADK No. S-XXX/PK.7/2020)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)	(6)
Pajak	15.208.234.394		3.774.643.200	14.811.769.302	67.791.111
PPh	1.944.539.116	-	1.781.139.501	783.960.242	
PPh Pasal 21	1.645.141.191	-	1.131.221.601	540.517.594	
PPh Pasal 25/29	299.377.962	-	649.917.900	226.442.532	-
PBB	13.263.695.050		2.563.513.200	13.884.323.961	67.791.111
Bagi Rata	1.991.050.978		263.683.700	1.716.279.299	-
Bagian Daerah Kaya	10.632.644.072		1.635.101.600		64.980.778
Bagian Daerah Non Kaya	84.000.000	-	30.016.300	825.407.001	
Bagian Daerah Desa Hutan	-	-		-	-
Bagian Daerah Perkebunan	113.457.050		65.754.200	50.172.817	-
Bagian Daerah Pertambangan	12.770.887.01[illegible]		1.038.200.300	10.012.590.111	
Bagian Daerah sektor Lainnya	2.5.559.007	-	5.001.300	226.194.707	
Biaya Pemungutan Migas	3.676.032	-	6.509.700	-	2.833.668
Biaya Pemungutan Non Migas	20.307.926		7.167.600	26.548.326	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi			-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	4.730.047	-	2.036.450	2.693.597	
Biaya Pemungutan Pertambangan	894.941.030	-	45.103.250	817.078.150	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.476.094	-	108.300	7.367.794	-
Cukai	74.308	-	-	71.098	-
SDA	2.963.150.830	738.970.913	1.179.100.700	2.633.790.931	1.562.304.911
Migas		-		-	
Minyak Bumi 15%	-	-		-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-		-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-			-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%		-		-	
Gas Bumi dalam rangka Otsus		-		-	
Minerba	12.788.013.556	121.510.902	549.930.200	12.092.090.631	704.668.433
Landrent	-	121.510.902	455.457.300		704.668.433
Royalti	12.788.013.556		94.472.900	12.092.090.631	-
Panas Bumi			-		
Iuran Produksi		-		-	
Iuran Tetap	-	-		-	
Setoran Bagian Pemerintah	-				-
Kehutanan		474.136.827	312.852.775		749.982.422
IHT		-	-	-	
IHPHT		191.489.102	91.117.300	-	795.801.700
PSDH	-	283.450.527	308.125.175		514.275.702
Perikanan	150.150.030		316.631.200		137.694.070
Grand Total	31.260.533.030	738.970.913	7.054.477.700	27.323.349.030	1.719.579.155

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kapuas Hulu

(dalam rupiah)

Jenis Dbh	KB TA 20.. 6	KB TA 2019	TB s.d TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyesuaian TB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa TB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) [5]-[3]
Pajak	-	-	1.730.814.738	1.068.323.810	11.791.464
PPh		-	606.912.010	606.912.010	
PPh Pasal 21		-	460.518.774	460.518.774	
PPh Pasal 25/29			167.934.036	67.934.036	-
PBB	-		1.123.902.728	461.537	14.794.988
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-				-
Bagian Daerah Sektor Pertambangan Minyak		-			-
Bagian Daerah Sektor Pertambangan Gas Bumi		-	4.253.071		11.289.301
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			-		-
Bagian Daerah Kehutanan	-		968.716.084	968.716.084	-
Bagian Daerah Pertambangan Umum	-	-			-
Bagian Daerah Sektor Perikanan		-			
Dana Penyimbangan Minyak			-	-	
Dana Penyimbangan Gas Bumi	-		3.827.167	3.329.300	496.767
Dana Penyimbangan Panas Bumi	-				-
Dana Penyimbangan Pertambangan Umum		-	79.456.773	79.456.773	
Dana Penyimbangan Kehutanan			-	-	
Dana Penyimbangan Sektor Lainnya	-		-	-	-
DBH	-				-
SDA		5.540.697	10.701.210.769	1.913.301.302	8.790.414.886
Migas			-	-	
Minyak Bumi 15%			-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-		-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Bumi 30%		-			
Gas Bumi 0,5%		-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	
Minerba	-		8.930.137.402	0.3.814.025	7.116.940.869
Landrent	-		6.896.922.793	1.073.814.025	6.681.427.967
Royalti	-		34.214.602		34.214.602
Panas Bumi	-				
Iuran Tetap		-	-		
Iuran Eksploitasi			-	-	-
Setoran Lainnya Pemerintah	-		-	-	-
Kehutanan	-	41.344.597	1.343.330.277		1.375.506.277
PSDH		-			
DBHH		-	434.430.000	-	491.100.000
PSDH	-	41.344.597	878.900.277	-	878.906.277
Perikanan	-				-
Grand Total		41.344.597	12.062.052.177	3.002.713.111	8.403.073.751

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Aru

(dalam rupiah)

URAIAN	(1)	KB Definitif TA 2020	(3)	Perwalian KB DBH Definitif TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	(4)	KB TA 2020 yang telah disalurkan	(5)=(3)-(4)	LB TA 2020 yang telah disalurkan	(6)
Pajak	13.156.406.306			-316.014.206		9.363.618.621		115.066.522	
PPh	1.885.347.857			1.453.370.000		80.617.057		-	
PPh Pasal 21	1.394.200.786			1.373.912.109		221.088.786			
PPh Pasal 25/29	291.966.071		-	91.107.905		215.520.171			
PBB	11.279.291.127		-	-2.761.654.105		8.852.930.271		115.066.522	
Bea Rata	1.941.369.999			265.629.702		725.270.596		-	
Bagian Daerah Atas Waris	86.562.384			907.057.105		-		1.307.066	
Bagian Daerah Dari Migas	5.807.252					2.099.937		-	
Bagian Daerah Dari Pajak Bumi			-						
Bagian Daerah Pertambangan	5.10.227.976		-	-369.[illegible]07		401.436.376			
Bagian Daerah Kehutanan	7.61[illegible]4.120			1.681.423.000		5.931.8[illegible]5.920		-	
Bagian Daerah Dalam Perikanan	215.508.207			8.634.300		206.906.707		-	
Biaya Pemungutan Migas	6.877.746		-	10.510.750				3.633.004	
Biaya Pemungutan Non Migas	109.120		-	-		130.630			
Biaya Pemungutan Perikanan				-		-		-	
Biaya Pemungutan Pertambangan	33.42[illegible].778			10.630.630		18.811.078		-	
Biaya Pemungutan PPh Perikanan	370.284.906		-	61.736.190		248.270.390			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.180.821		-	353.820		7.18[illegible].824			
CHT	74.796			-		74.[illegible]53		-	
SDA	2.279.696.786		1.940.727.203	1.[illegible]4.[illegible]0.730		13.097.348.364		2.8[illegible]2.626.212	
Migas	-								
Minyak Bumi - 85%			-						
Minyak Bumi 0,5%			-	-		-		-	
Minyak Bumi Tambahan Rangka Otsus				-		-		-	
Gas Bumi 30%	-					-		-	
Gas Bumi 0,5%	-					-		-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-							-	
Minerba	1.756.714.930		887.047.153	1[illegible].30[illegible].[illegible]0		2.[illegible]90.691.10[illegible]		1.[illegible]33.[illegible]45	
Tambahan			887.0[illegible].[illegible]5	56.189.775				1.[illegible]12.[illegible]45	
Panas Bumi	1.[illegible]83.[illegible]4.930		-	97.[illegible].[illegible]5		1[illegible].689.034.40[illegible]			
Perikanan	-					-		-	
Luasan Produksi	-					-		-	
Luasan Benih	-		-						
Standar Penjaga Tambak Garam			-						
Kehutanan	1.[illegible]2.[illegible].270		1.[illegible].[illegible]0.[illegible]10	7[illegible].[illegible]4.[illegible]05		3[illegible].[illegible]5.[illegible]30		1.[illegible].[illegible]9[illegible].[illegible]00	
DR	-					-		-	
DBH	1.[illegible].[illegible].930			22[illegible].[illegible]3.[illegible]00		1.[illegible]02.[illegible]51.[illegible]30		-	
[illegible]			1.[illegible].[illegible]0.[illegible]40	5[illegible].[illegible]6.[illegible]45				1.[illegible]1.[illegible]8[illegible].[illegible]03	
Pariwisata	1[illegible].[illegible]2.[illegible]90		-	3.[illegible].[illegible]3.[illegible]00				[illegible].[illegible]1.[illegible]20	
Grand Total	21.[illegible].[illegible].[illegible]		1.[illegible].[illegible].[illegible]	3.[illegible].[illegible].[illegible]		28.[illegible].[illegible].[illegible]		2.[illegible].[illegible].[illegible]	

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kotaparing

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KEP. No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	7.198.274.611	6.652.274.611	
PPh	-	-	1.654.360.427	1.654.360.427	
PPh Pasal 21	-	-	1.654.360.427	1.654.360.427	-
PPh Pasal 25/29			-	-	-
PBB	-		2.843.374.284	2.843.374.284	-
Bagi Rata	-				
Bagian Daerah Migas		-			
Bagian Daerah Non Migas		-	2.543.159.183	2.543.159.183	-
Bagian Daerah Penghasil Migas			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-			-	
Bagian Daerah Perkebunan	-	-			
Bagian Daerah Kehutanan		-	-		
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pertambangan Migas			-	-	-
Bagian Pertambangan Non Migas	-		1.007.215.101	1.007.215.101	-
Bagian Pertambangan Pusat Daerah	-	-			
Bagian Pertambangan Pusat Lainnya		-	-		
Bagian Pertambangan Pusat Lainnya			-	-	-
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	-			-	-
CHT	-	-			
PDA		148.477.931	38.906.191.462	6.912.177.181	29.994.014.281
Migas		-	-	-	-
Alokasi Pusat 15%			-	-	-
Alokasi Pusat 3,5%	-				
Migas Pusat dalam Angka Dasar	-	-			
Gas Bumi 70%		-			
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi Calon Pengalihan Dasar		-	-	-	-
Minerba	-		58.220.120.462	5.892.173.781	29.595.332.681
Landasan	-		36.227.703.904	5.892.173.781	27.475.000.183
Royalti	-		1.870.832.798		1.870.832.798
Panas Bumi		-			
Iuran Tetap		-	-	-	-
Iuran Tetap	-		-	-	-
Setoran Dasar Penghasilan	-			-	-
Kehutanan	-	-			
PSDH		-	-		
DR		-	-	-	-
IUPH	-	-			
PSDH	-	-		-	-
Perikanan	-				
Cukai Tembakau	-	-	41.991.360.643	12.557.408.292	29.433.952.081

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Ketapang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Alokasi KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	PB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (7)-(4)	(6)
Pajak	93.036.812.005		5.2 – 600.607	78.458.055.886	2.879.874
PPh	6.450.109.797		2.355.4–5.20[illegible]	1.114.054.791	-
PPh Pasal 21	5.946.929.772		2.198.784.402	2.905.020.072	-
PPh Pasal 22/23	45[illegible].9	-	112.137.600	309.034.719	-
PBB	87.107.682.208	-	2.873.462.200	7.341.552.674	12.870.551
Cukai Hasil Tembakau	1.691.357.068		265.669.100	1.778.370.795	
Bagian Daerah Migas	117.109.199		239.479.500	-	2.361.402
Bagian Daerah Non Migas	25.761.921.259		1.476.149.700	21.377.322.100	-
Bagian Daerah Dana Perimbangan		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	16.707.077.874	-	1.791.351.700	9.027.220.104	
Bagian Daerah Perkebunan	47.[illegible].2[illegible].759	-	3.408.977.500	30.011.070.382	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	311.[illegible].027		8.[illegible].3[illegible]	250.[illegible].707	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	14.[illegible].137	-	11.931.600		788.185
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	700.351.416	-	74.[illegible].[illegible]	740.[illegible].[illegible]	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-			-	
Bagian Pemerintah Pertambangan	449.[illegible].[illegible]		74.656.2[illegible]	370.311.[illegible]	-
Bagian Pemerintah Perkebunan	2.309.[illegible].211	-	406.7[illegible].[illegible]	1.387.[illegible].[illegible]	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	7.[illegible].024	-	208.200	7.[illegible].[illegible]	
DLH	970.00		201.600	74.308	
PTNB	31.[illegible].[illegible].029	2.[illegible].[illegible].[illegible]	4.[illegible].[illegible].[illegible]	60.[illegible].[illegible].[illegible]	6.202.9[illegible].[illegible]
Migas			-		-
Migas Bunga (15%)		-	-		-
Migas Bunga (0,5%)	-	-		-	
Migas Jasa dalam Rangka Otsus	-			-	
Gas Bumi 30%	-			-	
Gas Bumi 0,5%			-		-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus			-		-
Minerba	81.[illegible].[illegible].[illegible]	2.[illegible].[illegible].[illegible]	2.[illegible].[illegible].[illegible]	60.[illegible].[illegible].[illegible]	2.[illegible].[illegible].[illegible]
Landrent	-	2.[illegible].[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible].[illegible]	-	2.[illegible].[illegible].[illegible]
Royalti	81.[illegible].[illegible].[illegible]		6[illegible].[illegible].[illegible]	60.[illegible].[illegible].[illegible]	
Panas Bumi				-	
Iuran Eksplorasi			-		-
Iuran Eksploitasi			-		-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan	9[illegible].[illegible].[illegible]	5.[illegible].[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible].[illegible]	-	2.[illegible].[illegible].[illegible]
IHT	-				
DBHCHT		8[illegible].[illegible].[illegible]	3[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
PSDH	51.[illegible].[illegible]	-	9.[illegible].[illegible].[illegible]	-	97.[illegible].[illegible]
Perikanan	150.[illegible].[illegible]		3[illegible].[illegible].[illegible]	-	1[illegible].[illegible].[illegible]
Dana Bagi	170.[illegible].[illegible].[illegible]	2.[illegible].[illegible].[illegible]	19.484.[illegible].[illegible]	100.[illegible].[illegible].[illegible]	6.[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mempawah

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2020 (PMK No. 82/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2020 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (PMK No. 8/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak		-	1.039.137.791	(60.801.585)	978.335.206
PPh		-	1.039.137.791	(60.801.585)	978.335.206
PPh Pasal 21			539.137.791	(60.801.585)	478.335.206
PPh Pasal 25/29	-		-	-	
PBB	-		-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-		-	-	-
Bagian Daerah Migas		-			
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21		-	-	-	
Bagian Daerah Pasal 25/29	-		-	-	-
Bagian Daerah PPh Pasal 26		-			-
Bagian Daerah Sektor Tambang		-			
Bagian Pemerintah Migas	-		-	-	
Bagian Pemerintah Non Migas	-		-	-	-
Bagian Pemerintah Pasal 21		-		-	-
Bagian Pemerintah Perhutanan		-			
Bagian Pemerintah Perkebunan	-		-		
Bagian Pemerintah Sektor Tambang	-		-	-	-
PPh		-		-	-
SDA		18.733.934	424.935.104		161.905.157
Migas			-		
Minyak Bumi 15%	-		-	-	
Minyak Bumi 0,5%	-			-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus		-		-	-
Gas Bumi 30%		-			-
Gas Bumi 0,5%		-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Minerba	-		118.601.074	-	118.601.074
Tambang	-		118.601.074	-	118.601.074
Royalti	-			-	-
Pajak Bumi		-			-
Bagian Pemerintah		-	-		
Bagian Produksi	-		-	-	
Bagian Setoran Pegawai Perseorangan	-		-	-	
Kehutanan		18.733.934	306.333.030		343.066.964
DR		-			-
PSDH	-		-		-
Perikanan	-	18.733.934	306.333.030	-	343.066.964
PE Tambang	-			-	-
Grand Total		18.733.934	1.464.072.895	(60.801.585)	1.443.213.340

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mamuju Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB Triwulan IV TA 2020	LB Triwulan IV TA 2020	Penyaluran LB DBH Triwulan IV TA 2020 [PMK No. 6/PMK.07/2021]	LB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)-(9)	(11)
Pajak	7.770.038.942	26.044.902	1.992.093.098	3.801.988.007	79.078.923
PBB	1.711.829.098	-	1.257.059.570	151.769.528	
PPh Pasal 21	1.420.713.003	-	154.956.200	251.756.803	
PPh Pasal 25/29	978.116.171	-	102.493.620	96.962.549	-
PBJT	5.803.95[illegible]146	26.044.902	603.421.250	3.[illegible]76.471	39.575.123
Opsi Lain	1.057.650.496		263.691.730	1.720.975.298	-
Bagian Daerah Migas	120.434.649	-	113.919.430		6.515.731
Bagian Daerah Non Migas	117.225.179	-	15.975.630	15[illegible]2.670	
Bagian Daerah Penda Baru		-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	30.291.200	18.068.450	-	42.359.602
Bagian Daerah Perkehutanan	3.178.030.437		2.[illegible]2.[illegible]90	2.022.748.457	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.[illegible]207	-	9.[illegible]30	256.[illegible]707	
Bagian Pertambangan Migas	3.756.605	-	2.[illegible]2.[illegible]51	-	159.[illegible]93
Bagian Pertambangan Non Migas	5.865.[illegible]58		333.[illegible]60	3.2[illegible]1.751	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-				
Bagian Pertambangan Batu Bara		1.055.600	99.200		1.[illegible]13.320
Bagian Pertambangan Batu Bara	154.[illegible]1.020		17.[illegible]98.360	148.[illegible]1.360	-
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	7.466.024		209.[illegible]903	6.[illegible]37.224	-
CHT	277.596		202.[illegible]928	71.[illegible]205	
PTA	12.[illegible]16.072.830	177.[illegible]30.969	7[illegible]0.[illegible]3.[illegible]72	12.[illegible]62.[illegible]0.[illegible]90	1.[illegible]1.[illegible]18.4[illegible]1
Migas		-	-		
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-			-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Gas Alam 30%	-				
Gas Bumi 2,5%		-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Mineral	17.[illegible]89.[illegible]865.[illegible]79	2.[illegible]39.[illegible]202.[illegible]250	134.[illegible]937.[illegible]225	13.[illegible]89.[illegible]1.[illegible]60.[illegible]926	307.[illegible]43.[illegible]304
Landrent	-	2.[illegible]39.[illegible]202.[illegible]279	9[illegible].[illegible]52.[illegible]225	-	327.[illegible]43.[illegible]304
Royalti	12.785.[illegible]867.[illegible]036		90.[illegible]20.[illegible]000	12.[illegible]92.[illegible]60.[illegible]026	-
Panas Bumi					
Iuran Produksi		-	-		
Iuran Tetap		-	-	-	
Setoran Dividen Pemerintah	-		-	-	-
Kehutanan	-	587.[illegible]17.[illegible]703	228.[illegible]791.[illegible]450	-	5[illegible].[illegible]32.[illegible]70
IHH	-	-			
PSDH		-	-		
PSDH	-	287.[illegible]15.[illegible]703	228.[illegible]791.[illegible]450	-	5[illegible].[illegible]32.[illegible]50
Perikanan	19.[illegible]86.[illegible]382		3[illegible].[illegible]81.[illegible]020	-	[illegible]37.[illegible]95.[illegible]020
Cukai Data	20.[illegible]04[illegible].[illegible]31.[illegible]708	5[illegible].[illegible]3[illegible].[illegible]179	2.[illegible]93.[illegible]3[illegible].[illegible]470	18.[illegible]04.[illegible]79.[illegible]278	[illegible].[illegible]01.[illegible]27.[illegible]387

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sambas

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2018	Kurang Bayar TA 2019	Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 57/PMK.07/2020)	Penyesuaian Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 57/PMK.07/2020 jo. PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Migas		-	5.252.918.137	(1.871.445.105)	4.052.472.032
PPh			378.062.818	-	378.062.818
PPh Pasal 21	-		378.062.818	-	378.062.818
PPh Pasal 25/29	-				
PPN		-	5.874.855.319	(1.871.445.105)	3.973.368.211
Bagi Rata		-	-		
Bagian Daerah Penghasil Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Lainnya dalam Provinsi	-				
Bagian Daerah Lain di Luar Provinsi		-			
Bagian Daerah Penghasil Migas		-	5.496.800.667	(681.442.105)	3.506.372.456
Bagian Daerah Penghasil Migas	-		(2.638.220)	-	47.688.250
Bagian Pemerintah Pusat	-				
Bagian Pemerintah Non Migas		-			
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-		-	-	-
Bagian Pemerintah Perhitungan	-		300.316.497		300.316.497
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya		-	2.174.911		2.174.911
PBB		-	-	-	-
BPHTB		18.027.235	37.303.747	-	55.330.982
Migas	-				-
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%		-			
Minyak Bumi Non Rampak Migas		-	-	-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-				-
Gas Bumi Bagian Daerah Penghasil Migas	-				-
Panas Bumi	-	-	35.050.479		35.050.479
Pertambangan		-	35.050.479		35.050.479
Kehutanan		-	-		
Iuran Hak Pengusahaan Hutan			-	-	-
Dana Reboisasi	-		-	-	-
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	-				
Setoran Sisa Lelang Pertambangan		-			
Perikanan		8.027.235	2.510.569		10.537.804
CHT			-	-	-
PNBP Lainnya					-
PNBP Perikanan		8.027.235	2.510.569		10.537.804
Pertambangan Panas Bumi		-	-		
Jumlah Total		18.027.235	6.271.478.684	(681.442.105)	5.590.036.579

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sumbawa

(dalam rupiah)

URAIAN	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran PB DBH Sebelumnya TA 2020 (PMK 71/PMK.07/2020)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	17.516.499.940	-	4.719.091.128	9.497.044.948	97.103.221
PPh	3.040.602.599	-	1.339.931.620	406.370.789	-
PPh Pasal 21	2.204.097.117	-	1.122.314.300	78.540.817	-
PPh Pasal 25/29	847.713.050	-	138.254.620	707.250.085	-
PBB	12.307.020.740	-	2.861.260.670	7.941.393.781	97.103.221
Bagi Hasil	1.991.696.698	-	765.689.120	1.126.273.258	
Bagian Daerah Migas	109.147.940	-	174.940.780	-	65.092.160
Bagian Daerah Non Migas	2.434.990	-	183.020	24.811.250	-
Bagian Daerah Dana Hibah	-	-		-	-
Bagian Daerah Penerimaan		-			
Bagian Daerah PI Overriding	1.880.313.708	-	2.090.560.000	3.736.880.000	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	5.559.077	-	7.600.330	936.494.707	-
Biaya Pemungutan Migas	3.777.584	-	6.277.800	-	2.500.216
Biaya Pemungutan Non Migas	457.015	-	5.300	501.211	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi		-	-		
Biaya Pemungutan Perhutanan	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Perbendaharaan	280.858.774		102.303.000	378.705.177	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.750.021	-	299.800	7.141.224	-
CHT	277.396	-	202.953	74.443	
SDA	17.448.599.626	63.216.182	300.682.800	9.635.533.842	997.397.571
Kliring	-			-	-
Minyak Bumi 15%	-			-	-
Minyak Bumi 3,5%		-			
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Gas Bumi 6,5%			-	-	
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Minerba	12.788.202.545		90.522.720	12.692.579.825	-
Panas Bumi	440.189	-		439.189	-
Kehutanan	12.789.813.356	-	56.622.189	12.892.090.631	-
Perikanan			-	-	
Pungutan Pusat	-			-	
Pungutan Daerah	-			-	-
Pungutan Daerah Overprint/Lak	-	-			-
Pertambangan		63.216.182	176.975.201		270.103.357
LHP			-	-	
BLBI	-			-	-
TSTH	-	63.216.182	176.975.201		270.103.357
Perikanan	199.180.080	-	3.139.000		197.041.080
Grand Total	48.887.349.200	63.216.182	4.805.777.599	33.169.364.705	1.064.248.458

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sanggau

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 97/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 8/KM.7/2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-		3.455.799.405	3.081.868.964	1.373.930.441
PPh	-		1.277.232.064		1.277.230.991
PPh Pasal 21			1.156.201.879	-	1.156.201.879
PPh Pasal 25/29		-	85.939.105	-	85.939.105
PPN		-	1.196.562.001	3.081.868.964	314.699.447
Bagi Rata	-	-			-
Bagian Daerah Migas	-		-		-
Bagian Daerah Non Migas			0.2a1.186.196	2.58 86.196	
Bagian Daerah Hasil Hutan		-		-	
Bagian Daerah Perkebunan		-	1.42 .974.860	1.720.076.8 9	121.535.0 0
Bagian Daerah Perik.Tambak	-		-		-
Bagian Daerah Sektor Tertentu			-		-
Biaya Pemungutan Migas		-	11.0 7.1	-	11.027.342
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	1 .7 7.1 7	-	1 .7 4.1 1
Biaya Pemungutan Hasil Hutan	-		-		-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-		9 241.035		9 .2 4.9 5
Biaya Pemungutan Perikanan		-		-	
Biaya Pemungutan Sektor Tertentu		-		-	-
PPh 21	-		-		-
PBB	-	21.9 5.6 2	7.185.756.019		7.7 5.7 0.019
Migas				-	
Minyak Bumi 15%		-		-	
Minyak Bumi 0,5%		-		-	
Minyak Bumi Hasil Pengolahan	-		-		-
Gas Bumi 30%	-		-		-
Gas Bumi 0,5%			-		
Gas Bumi dalam Negeri (Pasal			-	-	
Minerba		-	7.191 .6 .12	-	1 .1 1.2 .1
Panas Bumi		-	6.6 1 .7 2.9 9	-	5.5 7.4 0.6 6
Royalti	-		556 .97.569		1 .56 .07.569
Hasil Hutan	-			-	
Iuran Provinsi				-	
Iuran Tetap		-		-	
Swadaya Pengusahaan Perkebunan		-		-	
Pertambangan	-	21.9 5.6 2		-	-
PPh	-			-	
Jumlah		-		-	
PBNP		21.9 5.6 5		-	
Perikanan	-		9 .7 1.6	-	2 .7 1.6
Grand Total	-	21.9 5.6 5	19.9 .5 .5 .5	3.9 1.9 9.6	3.9 2.6 0.6

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sanggau

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2021	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesta TA 2021 (PMK No. 17/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang telah diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	1.727.342.760	-	7.853.790.600	32.351.987.030	8.307.872
PBB	8.172.779.710		1.770.127.500	26.602.021.910	
PPh Pasal 21	1.711.806.060		1.657.608.200	57.197.790	-
Cukai Pasal 29/29	297.992.429		116.139.600	178.491.129	-
PDRD	29.695.206.541	-	8.029.094.200	32.26- 575.519	8.307.872
Bagi Rata	1.09 651.304	-	285.630.700	726.270.206	
Bagian Daerah Migas	210.745.917	-	257.768.750		5.122.186
Bagian Daerah Sda Migas	1.016.137.767		1.12-.122.000	10.368.015.720	-
Bagian Daerah Panas Bumi				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	1.362.574.704		367.841.620	1.401.732.638	-
Bagian Daerah Kehutanan	5.770.631.304	-	5.701.865.850	12.018.306.684	
Bagian Daerah Iuran Lainnya	213.709.107		2.684.450	210.024.757	
Dana Reboisasi	8.0-6.111		8.361.370		305.563
Dana Penerimaan Sda Migas	638.126.838	-	39.167.920	598.34? 363	-
Dana Penerimaan Panas Bumi	-	-	-	-	
Dana Penerimaan Pertambangan	77.036.720		13.1[illegible].380	63.901.720	
Dana Penerimaan Perkebunan	707.1[illegible].936		182.[illegible].750	524.[illegible].268	-
Dana Penerimaan Kehutanan	7.466.024	-	.99.360	7.[illegible]37.024	-
CHT	74.898	-	-	74.898	
DAU	77.109.153.020	-	3.777.189.240	73.380.731.102	848.780.322
Migas					-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-			
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Nonmigas	10.[illegible]6.60[illegible].1[illegible]		1.[illegible]24.[illegible]79.6[illegible]	10.60[illegible]751.454	457.005.367
Tambahan	6[illegible].[illegible]5.683		1.069.251.270	-	457.005.367
Reguler	76.510.405.727	-	453.454.373	75.080.731.453	
Dana Bagi Hasil	-	-			
Dana Alokasi Umum					
Dana Otsus					-
Dana Insentif Daerah	-		-	-	-
Kehutanan	1.817.836	-	335.[illegible]03.[illegible]73	-	23.[illegible]85.[illegible]69
DR		-			
IHPH					-
PSDH	1.[illegible]7.036		235.[illegible]97.037	-	134.085.979
Perikanan	133.166.060	-	5[illegible]8.[illegible]02	-	37.60[illegible].020
Grand Total	115.787.068.680	-	9.[illegible]35.[illegible]7[illegible]	99.[illegible]2.[illegible]3.[illegible]98	837.202.218

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sintang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	PB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian PB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Alokasi s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			2.080.732.898	3.577.070.531	550.912.551
PBB	-		691.243.302	216.574.944	477.368.358
PPh Pasal 21	-	-	691.243.302	216.574.944	477.368.358
PPh Pasal 22/26	-	-	-	-	-
CHT	-	-	3.356.430.596	3.360.715.042	15.777.054
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-	-	250.531.103	195.472.331	57.302.563
Dana Reboisasi Paska Bun.	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi Pertambangan		-	2.087.068.295	2.087.068.295	
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-				-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	05.057.029	27.15 .218	1.67 .648
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	-		124.456.970	124.456.970	-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 22	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-	-	-
CHT					
SDA		24.169.438	1.156.990.138		9.766.980.638
Migas	-	-		-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 0,5%	-				-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	3.268.077.454	-	3.268.077.454
Landrent		-	3.268.077.134	-	3.268.077.134
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Tetap (Landrent)	-				
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Jasa/Biaya Pemanfaatan		-	-	-	-
Kehutanan		24.169.438	1.318.913.979		1.318.913.979
DR					
DBHPB	-	-	795.570.020	-	795.570.020
PSDH		24.169.438	122.305.079	-	1.133.305.079
Perikanan					
Grand Total		24.169.438	5.957.421.034	3.577.070.531	5.929.333.812

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sirimang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	27.093.351.578	-	5.187.244.736	21.901.340.816	93.953.555
PPh	3.692.080.908		1.757.068.830	1.667.312.190	
PPh Pasal 21	3.214.042.069		1.618.134.400	1.595.547.269	
PPh Pasal 25/29	478.038.971		138.934.430	339.104.541	
PBB	23.665.436.314	-	4.618.975.090	19.046.461.224	93.953.555
Land Area	1.951.050.908	-	565.689.930	1.296.960.978	-
Bagian Daerah Migas	132.110.537	-	242.794.380	-	110.683.843
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan	5.406.462.538	-	951.126.930	2.455.335.608	-
Bagian Daerah Perkebunan	16.970.074.027	-	3.799.491.420	13.170.582.262	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.690.007		7.601.820	208.088.187	
Biaya Pemungutan Migas	5.197.478		5.701.080		504.602
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	141.031.217		39.729.400	101.301.817	
Biaya Pemungutan Pertambangan	924.027.753		125.777.050	798.250.703	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.466.024	-	299.900	7.166.124	-
CHT	277.374	-	202.468	74.906	-
SDA	12.042.290.780	(210.080.820)	1.125.582.977	17.246.010.776	(1.920.748.993)
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka PDN		-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka PDN					
Minerba	2.465.607.805	60.771.060	142.677.840	2.383.010.816	90.396.925
Iuran Tetap	-	60.771.060	25.900.875	-	90.396.925
Royalti	2.465.607.706	-	126.863.950	2.338.743.856	-
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Produksi					
Eksplorasi					
Setoran Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan	-	956.61 .774	716.140.350	-	572.666.020
PSDH			-	-	-
DR		709.012.050	180.398.050		500.130.050
PSDH	-	946.000.770	536.136.300		1.332.032.520
Perikanan	137.164.950	-	316.951.000	-	137.864.000
Grand Total	70.020.242.387	1.070.051.820	7.875.277.173	38.641.060. 3	3.014.561.820

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pontianak

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	LB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	110.389.729	70.136.957	40.252.772
PPh	-	-	110.389.729	70.136.957	40.252.772
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			16.389.729	70.136.957	40.252.772
PBB					
BPHTB					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21					
Bagian Daerah Pasal 25/29					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Non Migas					
Bagian Pemerintah Pasal 21					
Bagian Pemerintah Pasal 25/29					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					
PPN					
SDA		21.941.633	127.491.142		17.401.152
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Kegiatan Offstream					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Kegiatan Offstream					
Minerba			17.401.152	-	17.401.152
Dana Reboisasi			17.401.152	-	17.401.152
Penalti					
Pajak Ekspor					
Bea Keluar					
Pungutan Ekspor					
Kehutanan		21.917.633			
PSDH					
DR					
IUPH					
PNBP		21.917.633			
Perikanan					
Cukai Tembakau		21.917.633	221.169.859	70.136.957	151.032.901

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pontianak

(dalam rupiah)

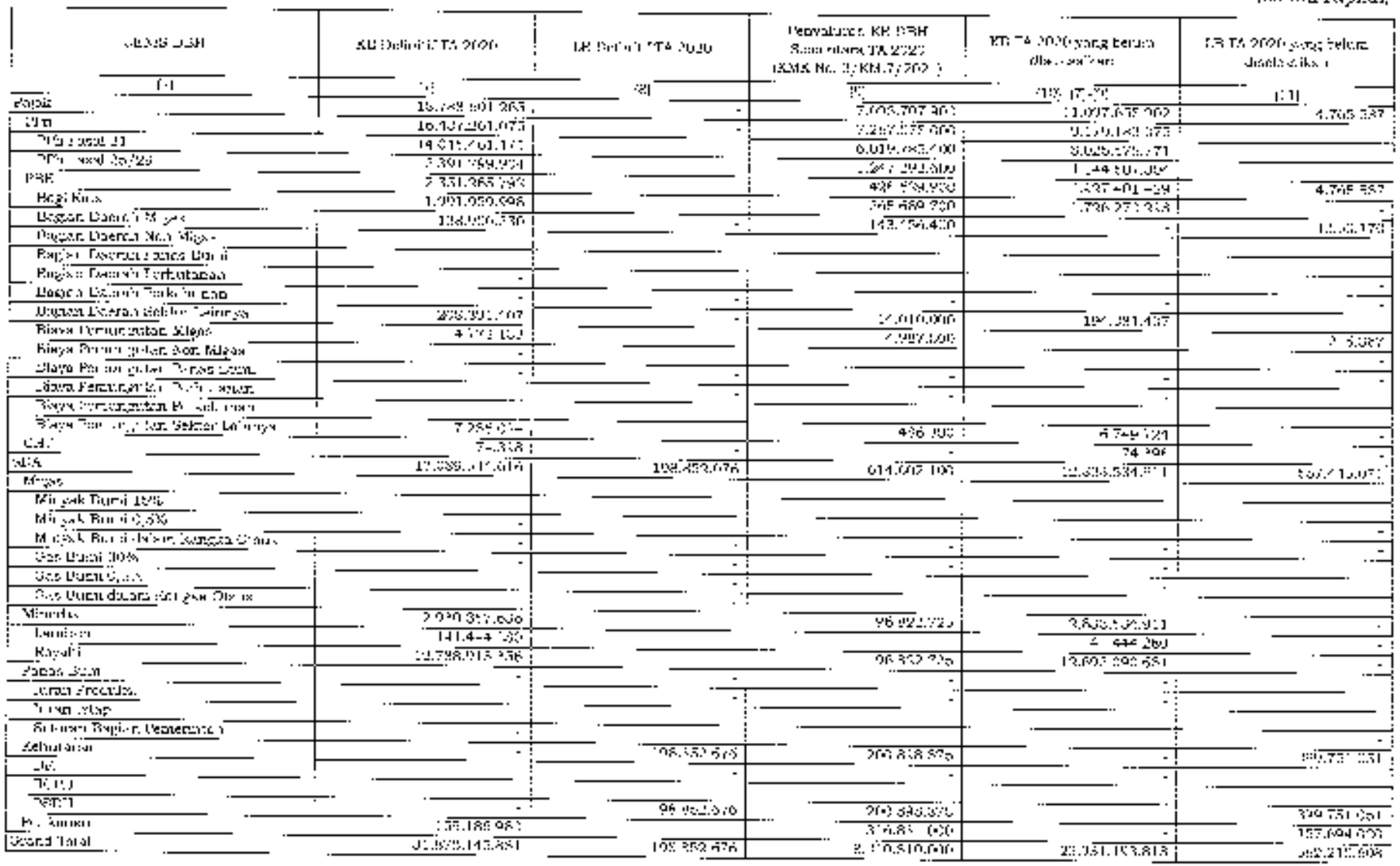

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Singkawang

(dalam rupiah)

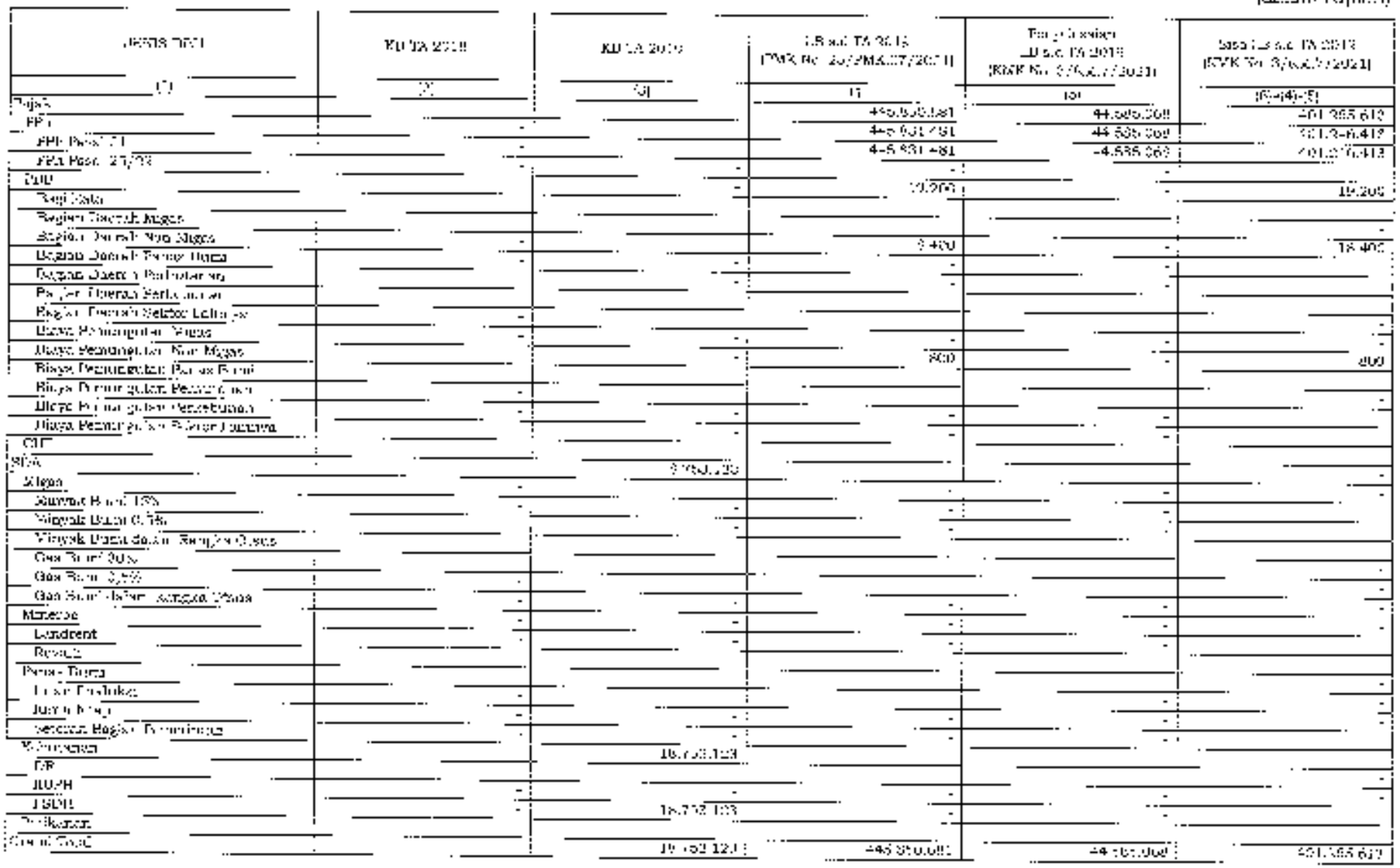

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Singkawang (dalam rupiah)

URAIAN	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran PA DBH Semester II TA 2020 [PMK No. 9/PMK.07/2021]	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Pajak	5.990.200.842	-	1.091.938.010	7.116.258.164	28.332.812
CHT	4.527.542.000	-	538.134.700	5.148.307.090	-
PPh Pasal 21	2.483.095.439	-	307.743.590	2.941.019.029	-
PPh Pasal 25/29	2.075.640.427	-	250.351.430	2.645.397.997	-
PBB	1.258.777.765	-	271.262.060	1.927.168.060	20.301.012
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.981.939.903	-	301.090.780	1.720.272.358	-
Pajak Daerah	97.140.727	-	90.027.450	-	92.442.173
Pajak Daerah Jenis Hiburan	8.684.620	-	-	2.897.420	-
Pajak Daerah Jenis Reklame	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pengambilan dan Pengolahan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	17.790.113	-	4.449.100	13.341.013	-
Pajak Daerah Sektor Lainnya	48.901.347	-	91.562.850	170.218.297	-
Pajak Pemanfaatan Alkohol	669.461	-	2.677.900	-	909.130
Pajak Pemanfaatan Air Minyak	134.900	-	-	134.900	-
Pajak Pemanfaatan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Pajak Pemanfaatan Pertambangan	-	-	-	-	-
Pajak Pemanfaatan Perkebunan	865.926	-	206.720	659.206	-
Pajak Pemanfaatan Sektor Lainnya	6.845.024	-	261.800	6.183.224	-
DBH	281.728	-	211.830	74.398	-
SDA	2.993.130.030	178.661.415	539.767.250	12.072.000.031	461.168.563
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (15%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Sebelum Penyaluran Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi (30%)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (0,5%)	-	-	-	-	-
Gas Bumi Sebelum Penyaluran Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	12.788.013.556	-	90.932.725	12.952.080.831	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Royalti	12.788.013.330	-	90.932.725	12.952.080.831	-
Pajak Progresif	-	-	-	-	-
Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	178.661.415	178.661.415	-	909.474.948
DR	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
PNBP	-	178.661.415	178.661.415	-	909.474.948
Perikanan	129.186.950	-	310.581.000	-	57.894.020
Grand Total	19.909.301.212	107.361.418	2.491.0-6.262	17.909.0 10.715	484.351.275

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sekadau

(dalam rupiah)

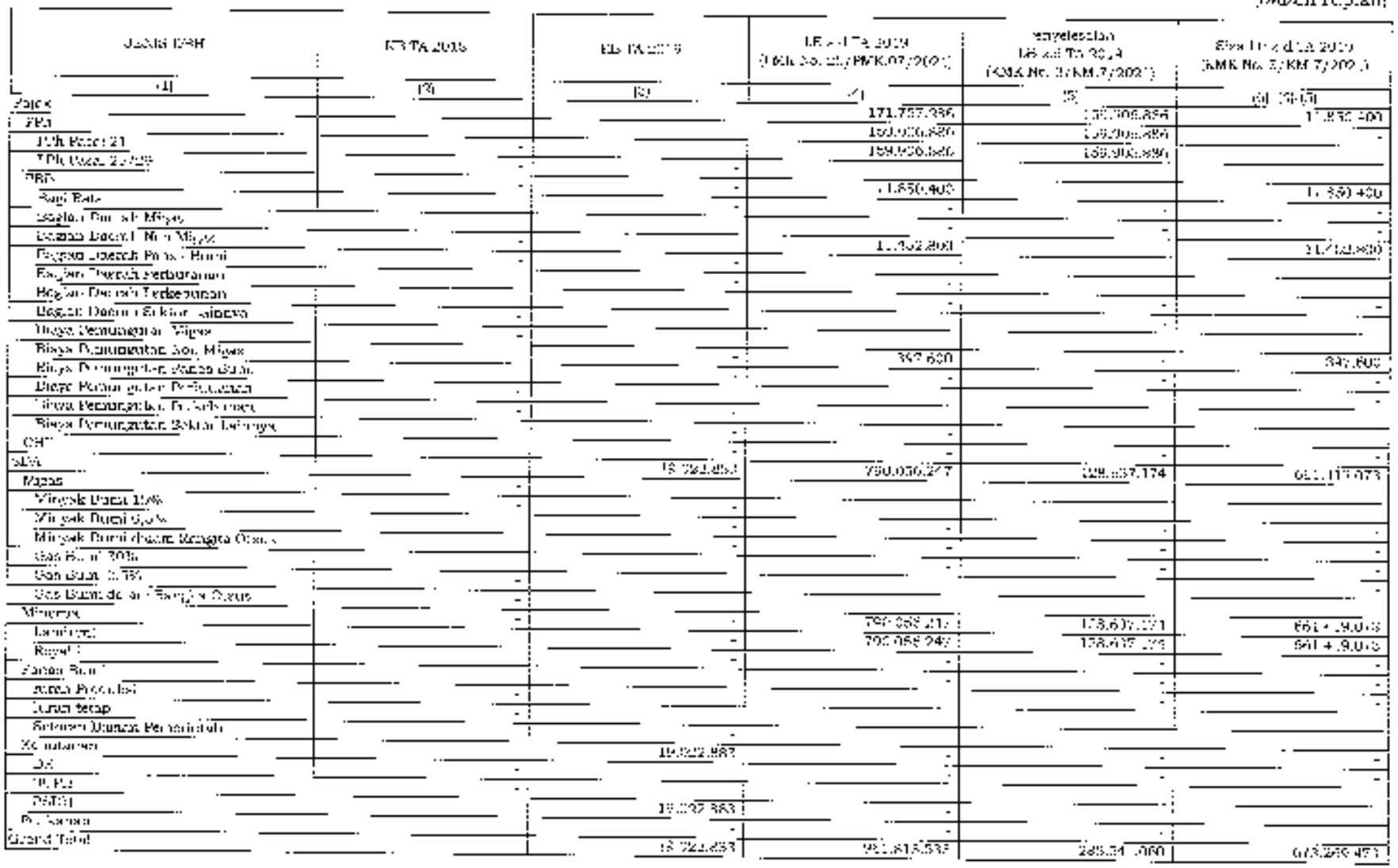

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sekadau

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH Semester I TA 2020 (PMK No. 5/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang telah dialokasikan	LB TA 2020 yang telah dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.250.011.125		7.113.230.739	15.149.746.241	4.436.775
PDn	3.912.472.968		1.156.792.508	1.403.695.430	-
PPh Pasal 21	3.794.281.911		1.030.578.300	1.163.935.611	-
PPh Pasal 25/29	118.191.057	-	78.404.208	239.759.819	
PBB	10.747.838.301	-	2.030.715.800	8.716.917.206	94.129.771
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.941.070.058	-	251.049.700	1.726.270.298	
Cukai	71.120.037		114.708.300		43.588.263
Pungutan Daerah atas Migas	93.962.963			98.547.963	-
Bagian Daerah Pasca Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	379.313.859	-	203.109.000	89.953.000	
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	1.588.084.157		1.276.754.850	6.511.371.157	-
Bagian Daerah Sektor Kehutanan	2.539.077		5.504.000	706.304.077	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak	2.478.436		3.972.200	-	1.493.764
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi	4.268.078	-	-	3.202.601	
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan Perikanan	15.830.572		12.244.770	2.582.342	-
Bagian Daerah Pertambangan Perikanan	368.837.126		42.021.150	306.251.925	
Bagian Daerah Pertambangan Selaras Lingkungan	7.187.224	-	259.850	6.187.224	
CHT	288.171		213.050	75.121	-
PDRA	2.619.747.504	515.849.270	992.990.250	17.552.185.701	675.678.615
Migas			-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Kontribusi Migas Dalam Rangka Otsus	-		-		
Gas Bumi 30%			-		-
Gas Bumi 0,5%			-		-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		-
Minerba	12.668.356.456	101.741.320	124.741.295	12.322.183.781	217.339.650
Royalti	-	101.741.320	27.908.275		541.739.850
Iuran Tetap	12.668.356.456	-	156.370.975	12.682.180.781	
Panas Bumi					-
Bagian Pemerintah				-	-
Bagian Pemerintah Daerah	-		-	-	
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-		
Kehutanan		123.830.970	110.530.975		700.342.995
PSDH					-
DBHPDR	-		-	-	-
DBHDR	-	123.830.970	176.530.975	-	700.342.995
Perikanan	100.190.090	-	210.861.850		157.564.020
Seluruh Total	55.070.597.791	515.849.270	3.772.311.850	39.701.573.922	791.103.580

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Melawi

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	KB TA 2020	LB TA 2021 (PMK No. 26/PMK.07/2021)	Penyaluran TA 2021 (KMK No. 83/KM.7/2021)	Sisa LB TA 2021 (KMK No. 83/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5-6)
Pajak				3.691.519.779	3.668.988.879	22.530
Cukai				68.248.705	68.248.705	
PPh Pasal 21				21.931.299	21.931.299	
PPh Pasal 25/29				146.351.426	146.351.426	
PBB				3.453.988.349	3.453.988.349	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				95.260.784	95.260.784	
Bagian Daerah Migas				301.271.621	301.271.621	
Bagian Daerah Non Migas				1.327.620	1.779.420	451.800
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi						
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi				3.301.418.485	3.301.418.485	
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi						
Bagian Daerah Sektor Kehutanan						
Bagian Daerah Sektor Pertambangan Lainnya						
Bagian Pemerintah Pusat Migas				10.439.431	10.439.431	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas				22.760	18.060	4.700
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi						
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan				83.340.636	83.340.636	
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan						
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Lainnya						
CHT						
PBB			92.613.224	3.818.458.910	654.603.386	13.163.854.838
Migas						
Migas Pasal 22						
Migas Pasal 4 ayat (2)						
Migas Pasal 4 ayat (2) Bagian Daerah						
Gas Bumi (PBH)						
Gas Bumi (PPh)						
Pertambangan Panas Bumi						
Minerba				13.137.601.773		13.457.961.573
Royalti				13.000.041.173		13.000.744.173
Iuran Tetap				137.560.600		137.216.800
Pajak Daerah						
Pajak Kendaraan Bermotor						
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor						
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						
Pajak Air Permukaan						
Pajak Rokok						
Kehutanan		30.615.224		4.268.300.051	634.603.388	(430.697.664)
DR				715.343.562	634.603.388	80.739.174
PSDH		3.535.632		366.649.145		366.649.145
DBHTI		26.987.592		96.007.312		987.310.232
Perikanan				191.791.894		351.491.894
Grand Total		30.615.224		16.759.959.256	8.796.395.268	13.193.097.381

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Melawi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Alokasi KB DBH Prioritas TA 2020 (KMK No. 8/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dapat diperhitungkan	LB TA 2020 yang telah dapat diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	22.057.403.177		3.075.655.630	9.280.026.979	1.599.712
PPh	1.758.130.861		958.450.700	899.681.061	-
PPh Pasal 21	1.474.657.308		450.360.200	514.797.135	-
PPh Pasal 23/26	283.473.553		70.092.500	269.894.553	-
PBJT	10.580.513.567		2.112.092.300	8.132.470.830	69.710
Pajak Data	1.991.939.992		385.686.100	1.926.030.705	
Pajak Bumi dan Bangunan Migas	205.101.098		91.647.400		5.931.444
Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas	91.797			35.161	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-				-
Pajak Daerah Pertambangan	1.242.317.785		429.815.700	3.979.397.554	
Pajak Daerah Perkebunan	3.472.302.087		1.145.199.300	2.326.309.236	
Pajak Daerah Kehutanan	315.359.097		8.904.300	306.961.707	-
Pajak Air Permukaan Migas	7.947.632		2.368.900		578.268
Pajak Pengambilan Air Non Migas	1.333			280	
Pajak Pengambilan Panas Bumi				-	
Pajak Penerangan Jalan Perkotaan	187.912.990		17.795.300	169.023.090	-
Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokan	169.713.856		56.602.000	113.066.952	-
Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet	7.456.074		298.800	5.157.274	
CHT	253.738		211.300	71.262	
SDA	14.501.656.830	182.949.858	792.799.050	2.241.211.128	647.538.496
Migas					-
Setoran Bunga 15%	-	-		-	-
Setoran Bunga 0,5%	-			-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%				-	
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Minerba	1.342.890.626		97.258.700	2.344.611.126	-
Landrent	1.353.456.470		1.355.940	1.789.420.054	
Royalti	12.784.911.530		96.902.710	12.687.008.851	
Panas Bumi				-	
Iuran Produksi				-	-
Iuran Tetap	-				-
Setoran Bagian Pemerintah	-			-	-
Kehutanan		182.949.858	707.659.910		49.079.286
DR		-		-	-
PSDH		-		-	-
PSDH	-	182.949.858	707.659.910	-	49.079.286
Perikanan	120.790.830		5.981.030		157.091.029
Pajak Air	20.350.189.982	93.949.968	5.797.150.980	23.033.738.084	651.752.940

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kayong Utara

(dalam rupiah)

JENIS PENERIMAAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2020 (PMK No. 35/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 37/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
PPh Pasal 21	-	-	127.633.030	127.626.959	-
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	-	-	127.633.030	127.626.959	-
PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	127.633.030	127.626.959	-
PPh Pasal 26	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari PBB	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari BPHTB	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari PPh Pasal 25 Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari PPh Pasal 26	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Karbon	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Alat Berat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Hotel	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Restoran	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Hiburan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Reklame	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Parkir	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Alat Berat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen MBLB	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen PPh Pasal 25 Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen PPh Pasal 26	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Karbon	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Alat Berat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Hotel	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Restoran	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Hiburan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Reklame	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Parkir	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Opsen Pajak Alat Berat	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
DAK	-	18.736.834	3.721.353.724	642.207.590	3.079.040.968
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 6%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 6%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	5.720.853.834	642.207.590	5.078.646.244
Panas Bumi	-	-	5.720.853.834	642.207.590	5.078.646.244
Kehutanan	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Keharusan	-	18.736.834	707.660	-	707.660
Lain-lain	-	-	-	-	-
DTDTH	-	-	-	-	-
TKDD	-	18.736.834	707.660	-	707.660
Kehutanan	-	-	-	-	-
Jumlah Total	-	18.736.834	3.849.182.143	769.816.469	3.079.365.674

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kayong Utara

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2021	LB TA 2021	Perubahan KB DBH Tahun Berjalan TA 2021 (KEP No. 3/PMK.7/2021)	KB TA 2021 yang belum dibayarkan	LB TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pajak	3.078.534.410	9.736.600	775.302.800	6.134.142.660	22.747.200
PPh	1.429.776.473	-	750.978.000	1.081.911.775	
PPh Pasal 21	1.202.537.680	-	548.300.800	916.011.480	
PPh Pasal 25/29	210.238.793	-	97.324.200	69.901.682	-
PBB	5.132.671.108	9.736.800	194.116.800	5.052.157.260	22.747.200
Bea Meterai	1.041.695.595		265.659.200	1.796.270.318	
Pajak Daerah Provinsi	735.795.336	-	178.439.000	-	9.215.200
Pajak Daerah Non Migas	-	9.407.800	7.130.700		15.569.200
Pajak Daerah Provinsi Lainnya		-			-
Pajak Daerah Kabupaten	93.347.860			103.347.860	-
Pajak Daerah Kabupaten	5.519.693.815		825.775.100	2.902.756.716	
Pajak Daerah Kabupaten Lainnya	215.593.007	-	8.631.200	306.094.707	
Biaya Pemungutan Pajak	1.9[illegible]	-	9.235.700		257.936
Biaya Pemungutan Pajak Non Migas		329.200	345.900	-	376.100
Biaya Pemungutan Pajak Provinsi			-		
Biaya Pemungutan Pajak Kabupaten	1.306.161	-	-	7.000.000	
Biaya Pemungutan Pajak Kabupaten	171.009.727		20.161.000	149.011.921	-
Biaya Pemungutan Pajak Kabupaten	1.761.027		396.900	2.157.924	-
PNBP	74.058		-	74.308	
SDA	65.945.870.456	150.339.700	617.782.325	55.070.000.000	461.667.610
Migas	-	-			
Minyak Bumi (15%)					
Minyak Bumi (0,5%)				-	
Minyak Bumi dari Kontraktor Kontrak				-	
Gas Bumi (30%)	-			-	
Gas Bumi (0,5%)	-	-			
Gas Bumi dari Kontraktor Kontrak		-			
Minerba	55.799.623.110		119.518.000	55.670.075.101	-
Landrent	1.206.436.127		27.191.250	1.054.508.307	-
Royalti	5.5[illegible]90.019		97.390.125	5.415.736.792	
Panas Bumi	-	-		-	
Iuran Produksi		-	-		
Iuran Tetap					-
Setoran Migas dari Kontraktor					-
Kehutanan		30.[illegible]00	175.553.950	-	39.[illegible].020
PSDH		-	-		
DBHH					-
PSDH		120.[illegible]00	171.[illegible].950	-	307.[illegible].840
Perikanan	59.[illegible]937		2.[illegible].020	-	22.[illegible].020
Grand Total	73.[illegible]426	160.[illegible]00	2.[illegible]. 25	11.[illegible].237.761	496.[illegible].560

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kuhu Raya

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 95/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	3.8--6.130.950	3.478.377.745	710.730.285
PBB	-	-	3.597.157.178	3.132.906.243	419.730.285
PBB Pasal 21	-	-	2.672.208.756	2.672.208.756	-
PBB Pasal 25/29	-	-	519.139.665	229.428.727	419.730.285
PPh	-	-	325.977.922	325.977.922	-
Pajak Sewa	-	-	93.049.344	93.049.344	-
Bagian Daerah Migas	-	-	210.051.946	210.051.946	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29	-	-	810.573	140.573	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Migas	-	-	7.292.765	7.292.765	-
Dana Perimbangan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	924.924	924.924	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
DBH	-	67.930.--7	7.170.773.784	-	7.575.770.786
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka OTS	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Mineral	-	-	5.0--.599.266	-	3.341.957.268
Landrent	-	-	2.586.973.000	-	2.583.070.838
Royalti	-	-	456.3--.766	-	758.017.780
Pasal Tunai	-	-	-	-	-
Luas Daerah	-	-	-	-	-
Dana Iuran	-	-	-	-	-
Bagian Bagi Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	67.--0.117	2.948.96--.824	-	2.9--.294.594
DR	-	-	3.---.698.619	-	3.01-.683.619
DHPH	-	-	951.263.205	-	951.585.705
PSDH	-	67.--0.117	-	-	-
Perikanan	-	-	291.--91.894	-	291.431.894
Grand Total	-	67.930.147	21.237.025.816	3.128.377.745	7.980.--4.071

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kota: Riau

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Tahun APBN 2020	LB Tahun APBN 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 7/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
PPh	10.701.728.162	-	5.572.577.625	17.503.422.510	6.477.060
PPN	4.191.547.191		2.158.277.200	7.915.695.510	
PPh Pasal 21	3.941.529.171		2.031.191.800	1.910.427.007	
PPh Pasal 25/29	550.018.020		127.086.000	423.432.020	
PBB	12.030.806.113	-	2.153.722.600	9.491.560.513	6.477.060
Bea Bea	1.097.736.705	-	265.630.000	736.270.348	-
Bagian Daerah Migas	230.278.019		266.438.700		6.177.381
Bagian Daerah Non Migas	240.156.283		7.020.000	199.121.082	
Bagian Daerah Pasal 21	-				
Bagian Daerah Perkebunan	1.070.718.236	-	4.219.100	693.035.536	-
Bagian Daerah Perkebunan	8.011.710.205	-	1.607.658.000	6.406.20 .325	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.009.007		8.007.300	206.201.707	
Biaya Pemungutan Migas	6.880.416		1.177.000		301.481
Biaya Pemungutan Non Migas	4.070.476	-	171.300	4.799.176	-
Biaya Pemungutan Pasal 21		-	-	-	-
Biaya Pemungutan PPh Lainnya	14.929.043		1.381.400	27.547.643	
Biaya Pemungutan Perkebunan	369.666.687		78.141.000	311.525.687	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.456.074	-	263.800	7.187.274	-
DLP	297.126	-	2.229.75	74.396	-
JUMLAH	17.205.854.007	171.843.000	1.707.880.925	2.0 6.921.072	700.254.270
MIGAS					
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dari dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
PERTAMBANGAN	13.702.407.697	-	90.522.125	12.695.964.974	
Landrent	4.40 .341	-	-	4.46 .84	-
Royalti	17.728.312.358	-	64.823.725	12.602.050.62	-
PERIKANAN					
Cukai Perikanan					
PERHUTANAN	-	-			
Provisi Sumber Daya Hutan	-	-	-	-	-
KEHUTANAN	234.23 .200	171.842.575	693.976.600	-	61.660.235
DAU					
DBHTB	364.336.500		263.290.750		32.020.505
DBHCHT	-	7 .845.555	407.619.850	-	579.523.405
Perikanan	150.720.780	-	216.361.020	-	189.434.020
Grand Total	23.401.082.709	171.843.575	5.581.263.250	0.172.712.291	773.731.337

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PB TA 2018	KB TA 2019	LB TA 2019 (KMK No. 279/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB TA 2019 (KMK No. 576/PMK.07/2021)	Sisa LB TA 20_4 (KMK No. 274/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak		-	5.890.498.343	5.890.498.343	
PBB			5.890.498.343	5.890.498.343	-
PBB Pasal 21			1.176.527.062	1.176.527.062	-
PBB Pasal 25/29	-		4.713.971.281	4.713.971.281	-
PBB	-	-			
Pajak Bumi	-	-			
Bagian Daerah Migas		-		-	
Bagian Daerah Non Migas				-	-
Bagian Daerah Pajak Bumi	-			-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-				
Bagian Daerah Pajak Pertambangan		-	-		
Bagian Daerah Pajak Lainnya			-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-			-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-			
Bagian Pemerintah Pajak Bumi		-	-		
Bagian Pemerintah Pertambangan				-	-
Bagian Pemerintah Pajak Pertambangan	-			-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-				
PBB		-	-		
SDA		10.61[illegible].301.677	58.778.833.554	13.611.[illegible].916	45.[illegible].072.638
Migas			1.359.510.487	1.185.551.831	148.038.656
Bagian Daerah 15%	-		2.068.118.303	2.040.373.423	28.077.878
Bagian Daerah 3,5%	-	-	73.691.392	71.691.392	935.000
Minyak Bumi Bagian Daerah Lainnya		-	-		
Gas Bumi 15%		-	2.[illegible].189.520	1.[illegible].031.960	187.[illegible].560
Gas Bumi 0,5%			83.670.456	80.733.016	2.937.440
Gas Bumi Bagian Daerah Lainnya	-		-		-
Kehutanan	-		21.821.[illegible].316	5.[illegible].207.157	6.[illegible].108.159
Landreform	-	-	11.982.[illegible].127	5.[illegible].207.157	6.[illegible].124.252
Tambang		-	9.[illegible].670.911		9.[illegible].670.911
Panas Bumi		-	-	-	
Iuran Produksi			-	-	-
Iuran tetap	-			-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-				
Perikanan		[illegible].[illegible].[illegible].077	26.[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]		26.[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
DR		9.[illegible].057.878	26.[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	-	26.[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]
BUMN	-	[illegible].417.520	-	-	-
PNBP	-	868.[illegible].613			-
Pertambangan		-			
Grand Total		10.[illegible].[illegible].077	61.[illegible].[illegible].197	13.[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]	48.[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
TAHUN 2021

Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran s.d TA 2020 (PMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2021 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pajak	93.896.120.953	-	29.105.971.030	67.790.148.923	-
PPh	28.614.736.127	-	15.795.365.030	10.245.308.827	-
PPh Pasal 21	23.069.864.676		13.154.883.920	11.915.197.776	
PPh Pasal 25/29	1.57- 870.451		24.772.430	1.530.148.051	-
PPN	67.241.074.936		16.301.205.030	50.939.38 .054	-
Bagi Rata					-
Bagian Daerah Migas	1.282.961.360	-	996.94 .720	383.413.860	
Bagian Daerah Non Migas	91.779.265.791		5.654.268.830	17.085.765.96	
Bagian Daerah Sesuai Pasal	-		-	-	-
Bagian Daerah Perbatasan	4.738.7 .0.280		2.171.896.030	2.5 7.9 2.963	-
Bagian Daerah Pelabuhan	5.027.299.179	-	8.717.199.900	27.611.166.39	
Bagian Daerah Kurang Lainnya	754.996.926	-	8(1 5.200	721.481.129	
Bagian Pemerintah Migas	63.667.656		45.906.150	18.667.760	
Bagian Pemerintah Non Migas	1.056.6 1 .1 . 35		142.900.330	833.905.605	-
Bagian Pemerintah Kurang Lainnya		-			
Bagian Pemerintah Perbatasan	270.850.099	-	-4 479 -(4)	1 .779 .39	
Bagian Pemerintah Pelabuhan	2.365.350.9 5		534.136.060	1 8- 114.93	
Bagian Pemerintah Kurang Lainnya	37.770.836		1.008.700	36.794.106	-
CHT		-			-
PDN	141 1.0 2 6.7 9	1.778. 94.0 5	48 457 183 7 5	9 .1 1.0 9 .9 2	5.361.730.015
Migas	369 8 .5.7 6	770.9 7	.185.000	368.9 7.9 6	1.0 8.0 2
Minyak Bumi 15%	-	7 5.0 1	247.50	-	1 03.4 4
Minyak Bumi 3,5%	-	24.098	9.0 5	-	5 .5 8
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat		-			-
Gas Bumi 30%	36 .7 .6 2	-	624.50	36 .0 0.6 2	
Gas Bumi 0,5%	3.3 3.9 4	-	15.700	3.3 7.2 1	
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat				-	
Minerba	81 783 8 3 -(1	1.7 2.4 0..17	10.470.215.505	72 875 710 (-5	3.395 .31 .9 7
Panas Bumi	-	1.7 2.4 0..17	1.01 .09 .7 2	-	3.5 5 .5 2 .9 7
Pajak	81.7 3.823.4 1	-	9 .3 .1 5.7 5	72.87 .7 0.0 6	-
Pasal 21		-			
Pasal 22 Impor			-		
Pasal 23			-	-	
Pasal 26				-	-
Kepabeanan dan Cukai	50.9 1.2 .3 2	-	37 95 .3 .5 5	25.1 9.0 3.3	2. 1 .3 9
PDRI	31.321 99 .1 1	-	3 .9 1 50 50	29.29 .7 .2	
BLRT	.7 6 4 4 0		-	.7 6 4 0	
PNBP	4.7 5 5 6 1		.7 .7 .3 .1	-	2 1 3 .9 4
Pertambangan					-
Grand Total	2 0.0 1.0 9.9 2	.7 5 1 9 .9	76 19 .9 0 5	1 .0.2 5.0 .9	5.361.730.012

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Banda Seribu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 65/PMK.07/2021)	Penyelesaian LEBIH BAYAR TA 2019 (KMK No. 313/KM.7/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) [(4)-(5)]
Dijual	-		142.911.161	42.145.489	20.128.672
PPh		-	456.495.361	456.495.361	
PPh Pasal 21		-	269.327.469	269.327.469	
PPh Pasal 25/29		-	86.138.150	186.138.150	-
PBB	-		20.127.959	-	20.128.672
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-			-	-
Pajak Daerah	-	-			
Pajak Hotel		-	-		
Pajak Restoran		-	-	-	-
Pajak Hiburan			25.578.709	-	25.350.409
Pajak Reklame					
Pajak Penerangan Jalan		-			
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		-	-	-	-
Pajak Parkir	-		-	-	-
Pajak Air Tanah	-				
Pajak Sarang Burung Walet					
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		-	656.341		656.341
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			-	-	-
Pajak Barang dan Jasa Tertentu			-	-	-
Cukai	-				-
SDA		156.956.353	1.210.916.216	1.081.590.476	3.022.358.670
Migas		-	497.335.756	656.555.076	30.103.350
Minyak Bumi (70%)			348.040.651	344.636.65	4.1 - 2(0)
Minyak Bumi (0,5%)	-		1.620.905	11 -67.4-5	147.550
Minyak Bumi dalam Satuan Energi	-				-
Gas Bumi (70%)	-	-	326.314.092	201.299.012	35.711.150
Gas Bumi (0,5%)		-	2.329.179	2.732.958	128.702
Gas Bumi dalam Satuan Energi		-	-	-	-
Panas Bumi			5.707.477.086	1.024.585.540	7.883.491.549
Landrent	-		6.537.351.391	1.024.585.540	5.512.949.851
Royalti	-		2.371.721.695		2.371.42 .695
Pajak Migas	-	-			
Bunga Deposito			-	-	
Setoran Pajak Penghasilan (Pasal 26)			-	-	-
Kehutanan	-	156.956.353	300.000.000		305.720.000
PSDH	-	-			
DR	-	-			
IIUPH		-	596.592.000	-	595.020.000
PSDH		156.956.353	-	-	-
Pertambangan	-		212.003.774		212.003.774
Grand Total	-	156.956.353	10.040.950.777	2.137.136.136	8.549.647.035

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Barito Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2019	LB Definitif TA 2020	Penyaluran K/L DBH Pertama TA 2020 (KMK No. 379/KMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
PPh	2.197.678.024		2.173.438.320	7.594.953.920	45.080.064
PPh	1.871.777.531		268.316.720	602.393.82?	
PPh Pasal 21	1.791.150.142	-	268.329.820	537.146.652	-
PPh Pasal 22/29	80.627.389	-	9.052.920	65.247.170	-
PPh	25.299.749	-	165.061.820	6.601.548.039	15.586.766
Bagi Rata	1.081.680.304		268.459.720	1.126.270.258	-
Bagian Daerah Migas	210.000.100		240.485.020	-	9.396.500
Bagian Daerah Non Migas	4.850.502.807	-	784.397.820	4.375.267.087	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	11.650.636		4.476.920	-	30.815.716
Bagian Daerah Pertambangan	850.404.555		76.041.020	52.451.515	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	212.700.007	-	8.004.320	206.06?.??	
Dana Perimbangan Migas	6.947.103	-	7.256.520	-	556.573
Dana Perimbangan Non Migas	4.172.474		4.158.920	127.568.070	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-		-		
Biaya Pemungutan PBB	307.206	-	1.511.220	-	1.116.107
Dana Perimbangan Perkebunan	8.450.206	-	2.956.520	5.068.756	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.336.113		251.020	6.257.010	-
CHT	-		-		
DBH	24.402.318.277	417.496.924	3.200.702.020	23.53?.?05.215	1.236.270.721
Migas	5.045.109	17.301	174.720	7?.24?.?20	69.502
Minyak Bumi 15%		14.138	94.920		56.633
Minyak Bumi 0,5%	-	3.163	1.420		1.941
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-		-		
Gas Bumi 30%	54.920.671		126.820	58.463.251	
Gas Bumi 0,5%	924.178	-	2.720	981.258	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		-
Minerba	45.413.170.032	417.378.821	3.481.498.920	23.302.165.207	7.?18.5.674
Iuran Tetap	-	127.376.821	3.126.750		7?8.5.674
Royalti	21.473.160.687		3.178.033.175	30.??2.168.207	
Pajak Bumi	-		-	-	
Iuran Eksplorasi		-			-
Iuran Tetap		-			-
Kekurangan Bayar Pemerintah			-		-
Kehutanan	2.779.076.546		1.108.291.575	2.019.215.207	344.764.820
PSDH	-	-		-	
DBHPR	2.019.615.200	-		2.019.615.200	-
DBHDR	760.461.346		108.291.575		343.788.829
Perikanan	159.346.980		216.581.020		175.667.020
Grand Total	32.056.076.041	417.496.924	6.233.17?.?20	52.886.??1.132	1.269.054.819

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Barito Utara

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Proyeksi LB s.d. TA 2019 (KVK No. 8/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KEP-[illegible]/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			172.597.277	172.597.277	
PPh			172.597.277	172.597.277	-
PPh Pasal 21	-				-
PPh Pasal 25/29	-	-	172.597.277	172.597.277	-
PPN		-	-		
Bagi Rata		-	-		
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-				-
Bagian Daerah Pasal Dalam	-	-			-
Bagian Daerah Pasal [illegible]		-	-		
Bagian Daerah Pasal [illegible]			-	-	
Bagian Daerah Bekas Lapangan	-			-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-		
Biaya Pemungutan Pasal [illegible]			-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan	-			-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-		
CHT			-	-	
DAU	-	330.131.276	36.391.570.785	17.740.256.119	45.921.632.964
Migas	-		9.069.027.025	4.031.213.878	357.617.250
Migas [illegible] 15%	-	-	4.197.966.040	4.171.579.892	30.085.150
Migas [illegible] 0,5%		-	151.011.617	149.132.367	1.539.250
Migas [illegible] Bagian Daerah			-	-	
Gas Bumi 69%			12.987.353.230	3.936.243.420	334.296.150
Gas Bumi 0,5%	-		67.303.211	67.433.711	5.597.500
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Minerba		-	47.687.512.192	2.719.025.716	41.253.021.246
Panas Bumi		-	1.156.597.832	2.789.029.716	8.351.477.870
Royalti		-	36.764.14- 960		36.297.191.000
Pajak Bumi [illegible]			-	-	-
Bunga Pinjaman	-			-	-
Hibah terkait	-	-			-
Dana Reboisasi		-	-		
Kehutanan		303.131.276	-	-	
DR	-			-	-
LLAJ	-	2.930.000			-
PBB-P2		362.361.017	-		
Perikanan		-	-		
Total		330.131.276	36.391.570.785	17.740.256.119	45.921.632.964

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Barito Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KP Definitif TA 2020	KP Definitif TA 2020	Penetapan PP 78/2021 Setelah TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KP TA 2020 yang telah Diverifikasi	Selisih TA 2020 yang belum Diverifikasi
(1)	(7)	(8)	(9)	(7)-(7)-(9)	(11)
PajAk	44,670 56,282		9,953,933,290	35,696,935,092	-
PPh	3,727,619,534		1,201,368,500	2,526,251,434	-
PPh Pasal 21	3,120,415,502		1,192,128,700	1,928,286,802	-
PPh Pasal 25/29	92,601,131		9,239,800	83,361,331	-
PPN	21,476,208,319		1,772,981,700	19,703,226,619	-
Tapi Bea	99,356,968		285,669,100	1,736,310,299	-
Bagian Daerah Sirga	1,817,747,552		639,613,900	1,153,834,652	-
Bagian Daerah Non Migas	11,878,944,206		4,871,097,300	20,100,[illegible] 7,206	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-		-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	595,779,127		1,040,091,900	819,887,581	-
Bagian Daerah Perikanan	2,296,206,775		659,471,400	2,456,649,[illegible]35	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2,378,790,007		8,502,300	220,994,707	-
Cukai Hasil Tembakau Migas	314,812,774		29,140,750	29,102,30[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau Non Migas	905,190,113		42,211,050	732,671,174	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi					-
Bagian Kehutanan dan Pendapatan Lain	67,328,580		35,470,520	29,327,060	-
Bagian Pertambangan Perkebunan	127,038,097		20,813,750	101,[illegible]24,097	-
Bagian Pertambangan Gas Bumi Tertentu	6,285,110		291,120	6,[illegible]3,990	-
DTF					-
DAU	13,317,535,188	1,226,608,493	9,743,856,626	5,900,788,438	3,990,905,303
Migas	713,070,206		2,090,750	710,979,456	-
Migas Hulu 15%	6,317,102		391,290	2,921,[illegible]92	-
Migas Hulu 0,5%	11,000		13,990	9[illegible],010	-
Migas Hulu dari Wilayah Kerja Blok					-
Gas Bumi 69%	706,568,863		1,648,500	705,270,356	-
Gas Bumi 0,5%	12,787,143		25,500	12,758,[illegible]43	-
Gas Bumi Hulu dari Wilayah Kerja Blok	-		-	-	-
Simatan	50,121,521,317	1,226,608,493	5,043,241,775	-[illegible],971,[illegible]32	3,649,[illegible]40
Lapindo		1,226,608,493	1,439,791,150		3,649,362,660
Regular	50,124,791,367		5,282,530,125	44,871,[illegible]32	-
Dana Desa	-		-	-	-
Dana Transfer Lainnya	-		-	-	-
Dana Insentif Daerah					-
Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY					-
Kelebihan/Kekurangan	2,438,544,916		2,787,581,750	194,630,000	-543,841,916
DBH	-		-	-	-
DBH Migas	103,490,000		-	136,[illegible]0,000	-
DBH SDA	2,290,715,513		2,787,581,750		-543,841,916
Transfer Lainnya	153,196,990		516,881,000		139,684,010
Grand Total	68,187,431,470	1,226,608,493	18,727,772,076	81,306,01[illegible]43	3,260,878,568

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab./ Kota ...

(dalam ribuan)

PENGURANG	KB DBH 2016	KB DBH 2019	LB DBH 2021 (PMK No. 85/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB s.d TA 2020 (KMK No. 15/KM.7/2021)	Sisa LB setelah penyelesaian (PMK No. 85/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Dajak		-	1.771.981.180	1.771.981.180	-
PPh		-	1.543.709.707	1.543.709.707	-
PPh Pasal 21	-		1.543.709.707	1.543.709.707	-
PPh Pasal 25/29	-		-		
Aset	-		237.271.462	237.271.462	
Bagi Aset					
Bagian Daerah Migas		-			-
Bagian Daerah Non Migas	-	-			-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan	-		235.261.772	235.261.772	
Bagian Daerah Perkebunan		-			
Bagian Daerah sektor Lainnya		-			-
Bagi Pertambangan Migas	-		-		
Bagi Pertambangan Non Migas	-		-		
Bagi Pertambangan Panas Bumi		-	-		
Bagi Pertambangan Pertambangan		-	27.009.700	27.009.700	-
Bagi Pertambangan Perkebunan	-		-		
Bagi Pertambangan Sektor Lainnya	-		-		
CUT		-			
SDA		338.810.820	3.220.771.560	221.560.960	2.997.3 1.525
Migas	-		237.567.307	175.066.577	62.500.550
Minyak Bumi 15%	-		23.364.117	20.049.911	3.314.220
Minyak Bumi 0,5%	-		1.009.38-	974.034	110.050
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	
Gas Bumi 30%		-	213.067.253	154.018.635	59.2 - 150
Gas Bumi 0,5%	-		3.541.191	3.413.741	127.450
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-		-		-
Mineral	-		2.028.730.771	45.536.035	1.992.5 13.320
Landrent	-		2.028.730.771	45.536.035	1.992.5 11.320
Royalti				-	
Cukai Hasil		-		-	
Pasal Produksi		-			-
Pasal Lain	-		-		-
Subsektor Pajak Penghasilan	-		-		
Kehutanan		338.810.820	974.668.831	-	971.669.951
IHP		-		-	-
PSDH	-	105.410	974.668.831		971.669.951
DR	-	338.705.971	-		
Perikanan				-	
Grand Total		338.810.820	4.963.082.675	1.705.541.15	3.992.611.127

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kapuas

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (KMK 57/KM.7/2021)	PB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	28.060.807.035		6.978.277.000	19.544.368.821	-1.761.263
PPh	3.061.603.715		1.313.561.500	1.771.612.013	
PPh Pasal 21	2.963.534.850		1.297.609.200	1.665.852.650	
PPh Pasal 25/29	96.432.665	-	13.422.900	77.009.363	
PBB	25.284.163.625	-	5.550.130.000	19.731.144.763	4.761.363
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.091.950.995	-	345.683.700	1.726.272.268	-
Bagian Daerah Migas	290.217.697		249.732.000	-	10.485.603
Bagian Daerah Non Migas	3.501.126.720		3.197.712.000	9.003.233.220	
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan	1.018.087.277	-	878.365.500	439.582.277	-
Bagian Daerah Pertambangan	9.250.016.023		2.226.705.000	7.801.342.771	-
Bagian Daerah Pertambangan Batubara	2.156.699.037		5.000.000	236.901.707	
Bagian Pemungutan Migas	6.972.040	-	8.196.000		1.223.960
Bagian Pemungutan Non Migas	304.737.017	-	35.500.000	269.237.947	-
Bagian Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	-
Bagian Pemungutan Pertambangan	44.508.762		29.540.000	14.722.202	
Bagian Pemungutan Perkebunan	332.613.950	-	92.601.000	239.736.950	-
Bagian Pemungutan Sektor Lainnya	6.268.175	-	35.100	6.037.016	-
PPh			-	-	-
PBHTB	63.146.941.000	112.000	9.061.029.775	33.732.030.847	888.051.078
Hiburan	59.973.409	1.309	11.500	59.961.909	160.000
Mineral Bukan Logam	-	1.459	44.930		156.029
Minyak Bumi		2.461	400	-	3.061
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi 0,5%	95.895.001		120.450	38.403.573	-
Gas Bumi 0,5%	501.306		2.130	499.206	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Mineral	60.067.200.482	-	8.998.948.100	50.194.242.302	
Landrent	1.032.815.222	-	958.973.975	873.841.948	-
Jagung	53.309.271.209		8.261.974.121	59.313.351.084	-
Panas Bumi					-
Dalam Produksi	-				
Eksplorasi	-	-			
Sektor Daerah Pertambangan		-	-	-	
Kehutanan	1.976.290.710		7.479.592.175	78.34-.300	750.75.455
PSDH					
DR	178.042.000	-		178.042.000	
IUPH	1.720.316.710	-	9.459.592.175	-	750.116.759
Perikanan	193.180.980		816.581.300	-	157.654.020
Dana Bagi	5.615.379.000	110.000	14.456.037.775	72.070.117.142	199.738.042

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Konawaringin Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 93/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KV.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KV.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] [4]-[5]
Pajak			1.310.232.788	1.187.017.082	0.302.215.101
PPh	-		2.210.04 .502		2.210.04 .502
PPh Pasal 21	-	-	65.382.415		65.382.415
PPh Pasal 25/29	-	-	2.154. 65.487	-	2. 54 165.487
PBB	-	-	7.370.684.584	4.187.017.082	5.842.667.502
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			-	-	-
Pajak Rokok					
Bagian Daerah Penerimaan Migas	-				
Bagian Daerah Penerimaan Non Migas	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Panas Bumi			7.003.735.121	1.187.017.082	5.118.718.039
Bagian Daerah Penerimaan Kehutanan	-				
Bagian Daerah Penerimaan Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Minyak	-		-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Gas Bumi	-		-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Panas Bumi			99.132.547		99.132.547
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Umum	-	-	249.638.516	-	249.638.516
Bagian Daerah Penerimaan Sektor Lainnya		-	-	-	-
DTF					
DTA	-	215.761.978	668.310.218		668.310.218
Migas	-	-	207.383.921		207.383.921
Minyak Bumi 15%		-	32.954. 17	-	32.954. 17
Minyak Bumi 0,5%		-	1.038.584	-	1.038.584
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat					
Gas Bumi 30%			173.387.230		173.387.230
Gas Bumi 15%	-		2.914.191		2.914.191
Gas Bumi dalam Rangka PSDH	-	-	-		
Minerba	-	-	460.746.961	-	460.746.961
Landrent		-	460.746.961	-	460.746.961
Royalti				-	-
Panas Bumi					
Iuran Tetap	-				
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Perikanan		215.761.978			
CHT	-				
PNBP	-	2.885.011	-		
PSDH		212.876.965	-	-	-
Pertambangan					-
Total Transfer		215.761.978	11.311.312.731	4.187.017.082	6.730.092.022

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Konawe Kepulauan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran TA 2021 s.d. September TA 2020 (KMK No. 370/KM.7/2021)	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang telah dan akan disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(2)	(6)
Pajak	28.772.000.128		9.471.560.700	18.300.693.714	1.359.025
PPh Pasal 21	5.570.000.000		2.457.343.120	3.112.082.430	
PPh Pasal 25/29	5.076.941.950		2.875.158.840	2.201.783.030	-
PPh Pasal 26/26	368.550.701	-	118.134.500	421.185.126	-
PPN	23.337.030.333	-	7.707.022.000	15.629.971.250	11.206.076
Pajak Bea	1.091.970.705	-	200.000.705	1.791.970.000	-
Pajak Daerah Migas	180.078.167		180.611.405	-	5.361.570
Pajak Daerah Non Migas	2.495.107		77.5-7.910		5.371.276
Pajak Daerah Aneka Barang	-	-	-		-
Pajak Daerah Perhotelan	2.320.771.703	-	1.258.771.000	361.035.960	-
Pajak Daerah Pertambangan	17.011.777.113		5.-42.705.500	12.171.745.134	
Pajak Daerah Sarang Burung	415.159.207		8.614.300	206.094.707	
Pajak Pengambilan Migas	5.305.795	-	5.587.-05		256.644
Pajak Pengambilan Non Migas	633.077	-	901.303		153.373
Pajak Penerangan Jalan Baru				-	
Pajak Penerangan Perkotaan	79.267.700		8.-72.301	30.110.105	
Pajak Penerangan Perkotaan	685.161.-59	-	21.-.682.803	7.-.027.009	-
Pajak Pengambilan Sarang Burung	6.288.1-6.1	-	201.103	6.007.010	-
CHT				-	
BHA	12.767.029.710	263.720.199	3.578.782.335	11.920.-.-.07	7.107.507.230
Kelapa	59.973.429	16.500	174.300	59.-.1.109	182.500
Minyak Bumi 15%	-	14.439	41.200		158.670
Minyak Bumi 0,5%	-	0.16	1.450	-	3.-67
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Offshore				-	
Gas Bumi 15%	98.290.002		126.300	98.869.231	
Gas Bumi 0,5%	990.000		2.120	987.270	
Gas Bumi dari Wilayah Kerja Offshore			-		-
Mineral	2.140.870.357	-	1.380.392.077	1.760.320.552	-
Perikanan	272.820.053	-	17.-7.-.020	261.652.103	-
Panas Bumi	13.461.050.534		582.-03.-77	1.438.575.572	
Lahan Perkebunan			-	-	
Lahan Kehutanan	-	-	-	-	-
Setoran Lelang Kayu Kehutanan	-	-	-		-
Kehutanan		236.000.000	681.174.150	-	1.919.790.710
IHPS			-	-	
IHPB		-	-		-
PSDH	-	263.000.000	1.681.174.150	-	1.919.790.710
Perikanan	150.130.080		3.-.-.1.050	-	10.-.084.020
Grand Total	42.0-0.052.231	236.722.700	15.300.-48.105	30.027.861.003	21.9.024.-.6

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kotawaringin Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	ALOKASI 2018	REALISASI 2019	Alokasi LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran LB s.d TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (SAKTI No. 27/SAKTI/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-		30.027.501.319	1.657.383.472	28.370.117.847
PBB	-		1.731.312.067	-	1.731.312.067
PBB Pasal 2		-	1.722.773.032		1.722.773.032
PBB Pasal 25/29		-	8.539.035		8.539.035
BPHTB		-	24.566.201.944	1.657.383.472	22.908.818.472
Bagi Hasil	-		-	-	-
Bagian Daerah Migas	-			-	-
Bagian Daerah Non Migas		-	13.117.247.054	11.657.863.472	1.459.383.582
Bagian Daerah Dana Reboisasi		-	-		
Bagian Daerah Pertambangan			425.601.363		425.601.363
Bagian Daerah Perkebunan	-		18.571.907.026	-	9.541.965.084
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-		-	-
Bagi Hasil Migas		-			
Bagi Hasil Pajak Non Migas			1.726.983.040	-	1.726.983.040
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-		-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan	-	-	33.218.727		33.218.727
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan		-	721.076.496		721.076.496
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan		-	-	-	-
DAU	-		-	-	-
DAK	-	341.206.830	2.782.340.587	-	2.782.340.587
Migas		-	207.303.027		207.303.027
Minyak Bumi 15%		-	32.664.127		32.664.127
Minyak Bumi 0,5%			1.095.381	-	1.095.381
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-		-	-	-
Gas Alam 30%	-		173.543.519	-	173.543.519
Gas Bumi 0,5%	-	-	2.947.191		2.947.191
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			-
Pertambangan		-	2.079.168.212		2.079.168.212
Pertambangan			2.079.168.212	-	2.079.168.212
Kehutanan	-		-	-	-
Panas Bumi	-			-	-
Iuran Eksplorasi	-	-			-
Iuran Tetap		-	-		
Setoran Bagian Pemerintah			-		
Perikanan	-	341.206.830	471.036.349	-	470.809.719
PE	-			-	-
PDPH		8.910	170.626.149		170.605.748
PBDH		341.197.920	-		
Perikanan			-	-	
Jumlah Total	-	341.206.830	38.870.014.906	11.037.783.472	27.832.561.434

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Konawaringin Timur

(dalam rupiah)

URAIAN	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH DBF Semester I TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2020)	KB TA 2021 yang belum diselesaikan	LB TA 2021 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	99.512.065.282	-	14.701.909.830	84.810.155.452	90.080.167
PPh	8.457.922.607		3.238.803.830	5.196.187.309	
Pph Pasal 21	3.830.833.565		3.101.308.730	729.524.835	-
Pph Pasal 25/29	4.718.090.234		60.326.030	4.657.782.65	-
PBB	90.114.766.676	-	11.463.014.230	12.272.303.213	90.080.787
Bagi Rata	1.961.944.906	-	261.594.750	1.720.275.259	
Bagian Daerah Migas	171.647.301		204.359.201		73.012.199
Bagian Daerah Non Migas	1.071.550.444		215.348.030	81.204.414	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-			-	-
Bagian Daerah Perkebunan	1.118.636.515	-	560.260.320	558.377.193	-
Bagian Daerah Perkehutanan	45.674.627.500	-	6.692.224.000	38.982.403.500	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.649.010		5.850.850	916.494.917	
Biaya Pemungutan Migas	3.775.000		1.411.050	-	2.363.496
Biaya Pemungutan Non Migas	20.724.721	-	6.118.000	20.605.921	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	40.396.501		22.287.102	18.109.631	
Biaya Pemungutan Perkehutanan	1.473.020.735		376.791.603	1.438.405.183	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.298.716	-	201.100	6.007.216	-
CHT		-	-		
PDN	35.23-.783.773	116.030	8.508.324.901	51.713.585.496	157.050.030
Migas	50.073.429	116.030	171.300	50.8-4.909	162.530
Minyak Bumi 15%	-	114.109	41.200	-	155.630
Minyak Bumi 0,5%		2.46	1.700		3.461
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Daerah		-	-		
Gas Bumi 30%	50.950.05-		126.510	50.863.75-	
Gas Bumi 0,5%	96.3.3.5		2.100	95.356	
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah	-		-	-	-
Pertanian	35.84[illegible]1.863	-	1.721.103.225	29.1[illegible]7.637	-
Perikanan	700.353.750	-	91.971.200	60.291.990	-
Royalti	39.711.[illegible]8.7	-	1.613.729.776	29.709.260.276	
Pajak Rokok			-		
Bagian Pemerintah	-		-	-	
Bagian Daerah	-			-	-
Pemerintah Daerah Provinsi Lain		-			-
Kabupaten/Kota	1.171.197.307	-	1.667.733.635	2.[illegible]8.991.192	
DR			-	-	
DLPS	-			-	-
PDPT	1.171.697.307	-	1.667.733.635	2.[illegible]8.991.192	-
Pemerintah	1.[illegible]8.[illegible]8.080	-	3.[illegible]6.[illegible]1.000		157.074.020
Grand Total	31.[illegible]7.459.080	116.030	13.[illegible]8.[illegible]4.400	96.[illegible]4.[illegible]4.[illegible]	236.[illegible]2.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pelangkaraya

(dalam rupiah)

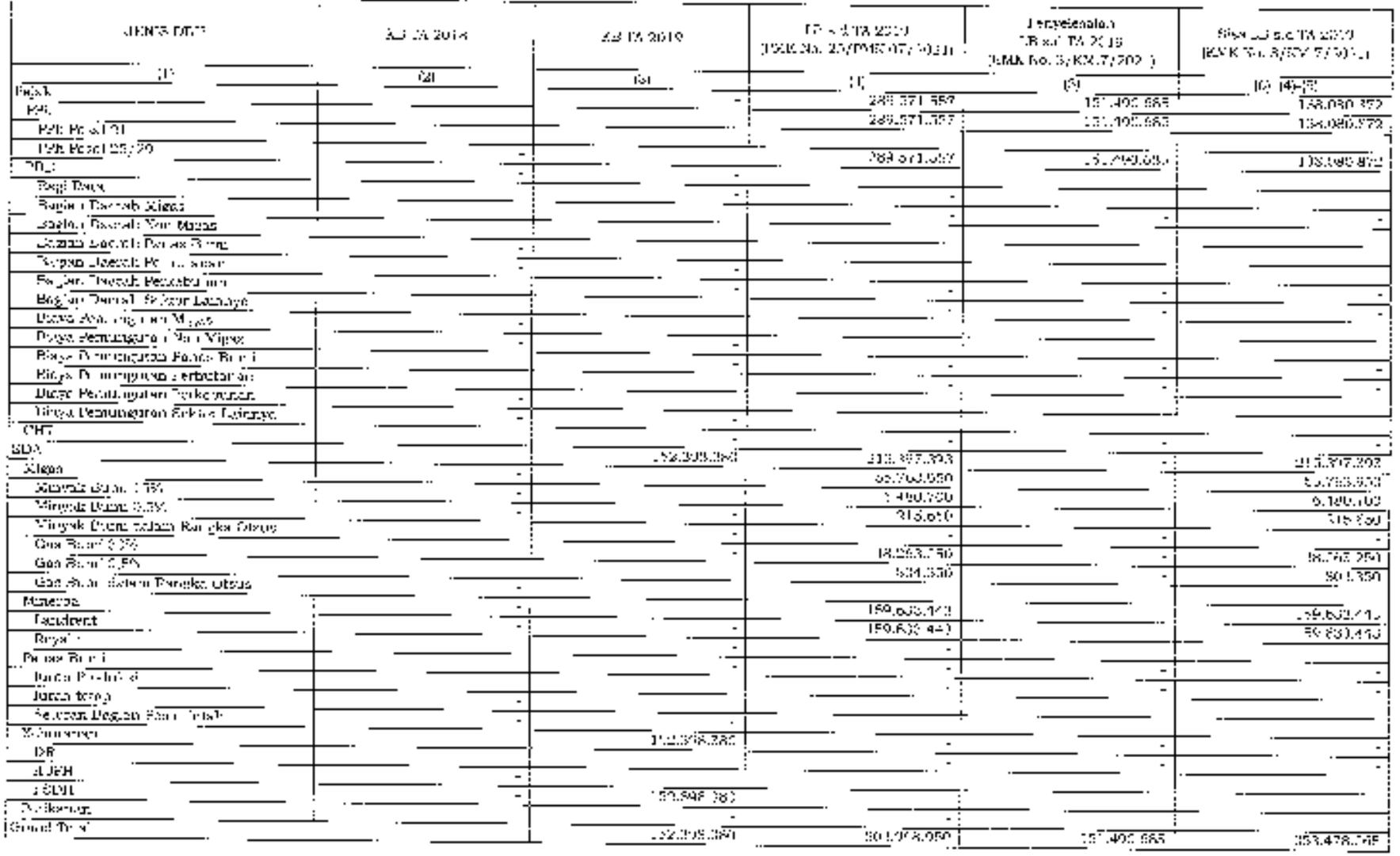

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Palangkaraya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DJPK Sampai dengan TA 2020 (LAMP. No. 31/KEP/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6) = (3)-(4)
Pajak	10.340.935.641		4.316.111.700	6.024.823.941	3.142.065
PPh	7.078.772.512		3.765.077.100	3.313.695.412	
PPh Pasal 21	7.125.781.543	-	3.707.418.900	3.418.362.643	
PPh Pasal 25/29	273.386.969	-	57.658.200	215.728.769	
PBB	2.551.206.129		473.564.200	2.145.592.410	3.142.065
Bagi Rata	69.453.969		267.090.700	336.270.938	-
Bagian Daerah Sagas	91.703.607		94.724.807		3.021.200
Bagian Daerah non Migas	18.111.759	-	1.911.000	8.736.782	
Bagian Daerah Penerimaan Pajak		-	-		
Bagian Daerah Bea Cukai			-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	238.378.926		43.127.100	195.240.023	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.598.207	-	4.694.200	200.894.207	
Biaya Pemungutan Migas	2.076.101	-	2.766.402		690.301
Biaya Pemungutan Non Migas	393.196		48.000	345.196	-
Biaya Pemungutan Pajak PBB	-			-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	9.576.903	-	1.677.000	7.899.903	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.786.116		251.000	6.535.116	-
DAK	-			-	-
SDA	18.010.820.764	1.8.902	2.773.979.249	15.176.017.118	1.021.185.777
Migas	39.913.100	1.8.902	17.620	39.913.580	122.302
Minyak Bumi 15%		71.487	45.000		116.639
Minyak Bumi 0,5%		2.761	1.400	-	5.661
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 30%	58.090.05		123.920	58.503.291	-
Gas Bumi 70%	993.558	-	2.170	991.268	
Gas Bumi dalam rangka Otsus		-	-		
Mineral	17.919.616.114	-	1.240.788.975	1.396.677.939	
Iuran Tetap	176.233.332		-	115.027.592	-
Royalti	2.57- 43- 332		1.3e2.765.275	1.211.7-6.647	-
Pajak Daerah	-				-
Dana Reboisasi	-	-			
Lainnya		-	-	-	
Kekurangan Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan	233.502.261		1.093.5.1.203	-	743.332.250
IR	-	-			
PSDH		-			
DBHI	233.502.261		1.093.534.303	-	643.350.209
Perikanan	151.188.963		410.581.200	-	157.69-.151
Grand Total	25.102.146.405	210.970	9.05.3.610.975	17.503.311.394	1.661.281.85-

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Tagih Lebih LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	5.152.301.647	2.151.776.587	3.000.524.060
SDA	-	-	0.5-1.307		0.5-1.307
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 22/26			0.541.307		0.541.307
PBB			5.112.011.340	2.151.776.587	3.000.584.753
Bea Meterai			-	-	
Pajak Daerah Lainnya	-	-	-		
Bagian Daerah dari Migas			373.029.093	312.202.093	
Bagian Daerah Panas Bumi					-
Bagian Daerah Pertambangan			5.627.333.943	1.840.033.588	3.753.650.385
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			
Biaya Pemungutan Migas		-			-
Dana Pemungutan Non Migas			9.068.111	-	9.068.111
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	198.166.233		198.166.233
Biaya Pemungutan Perikanan					-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya				-	-
DAK	-	-	-	-	
SDA	-	4.118.874.718	1.406.030.262		1.406.030.262
Migas			207.203.927		207.203.927
Minyak Bumi 15%			22.951.111	-	22.951.111
Minyak Bumi 3,5%			1.046.191	-	597.382
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 69%	-	-	170.657.235		170.657.235
Gas Bumi 10,5%	-	-	2.834.791		2.834.791
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba			2.865.030.971	-	2.865.030.534
Landrent			2.865.030.971	-	2.865.030.534
Royalti			-	-	-
Panas Bumi	-	-	-		
Iuran Produksi	-	-	-		
Iuran Tetap					-
Sebesar Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan		4.118.874.718	1.534.030.979	-	1.534.030.979
DR	-	-	-		
PSDH		2.484.034	1.311.826.709		1.311.826.709
Reboisasi		106.720.191		-	-
Perikanan			-	-	-
Grand Total	-	4.118.874.718	9.258.831.307	3.151.776.587	8.037.106.326

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kutingyu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	(3) Dana Bagi Hasil TA 2020	(4) Lebih/(Kurang) Bayar DBH TA 2020	(5) Penyaluran DBH Triwulan IV TA 2020 (PMK Nomor 210/PMK.07/2020)	(6) DBH TA 2020 yang Telah Disalurkan	(7) DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) - (4)	(6)
Pajak	1.710.107.309.796	-	1.651.091.900	1.494.273.661	64.116.836
PPh	2.221.914.012	-	856.736.000	1.364.908.412	-
PPh Pasal 21	1.641.361.810		757.097.400	1.348.676.445	-
PPh Pasal 23/26	76.383.790		8.748.900	76.427.795	-
PBB	6.547.463.944		1.894.639.000	4.206.023.239	64.116.836
Bagi Rata	1.591.333.953	-	260.689.100	1.325.210.295	
Bagian Daerah Migas	241.118.356	-	252.936.800	-	64.116.836
Bagian Daerah Non Migas	1.126.258.218		2.507.500	1.123.941.518	-
Bagian Daerah Dana Reboisasi	-		-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	5.532.792.519		1.196.111.000	2.110.114.019	
Bagian Daerah Perkebunan	3.597.117.97-	-	1.257.217.000	547.201.814	
Bagian Daerah Kehutanan	211.356.000	-	3.624.500	206.964.737	-
Biaya Pemungutan Migas	7.272.579		7.890.000	-	318.971
Biaya Pemungutan Non Migas	37.552.854		942.100	32.768.771	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-			
Biaya Pemungutan Perkebunan	129.175.162	-	41.524.930	87.641.930	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	99.557.922		78.224.000	21.331.078	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	67.884.145		251.100	6.257.010	
Cukai	-	-	-		
SDA	10.307.075.873	501.902.182	5.211.355.130	17.797.466.088	4.302.413.777
Migas	39.973.709	116.909	174.500	15.754.709	63.502
Minyak Bumi 15%	-	111.709	47.200		38.637
Minyak Bumi 0,5%	-	491	1.400		3.961
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 15%	58.090.077	-	126.800	58.640.251	
Gas Bumi 0,5%	983.305		2.150	581.258	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Minerba	4.077.006.404	196.621.526	2.135.682.650	12.782.761.570	377.467.671
Landrent	-	196.621.526	286.805.920		377.467.751
Royalti	4.727.428.484	-	1.848.876.920	12.012.761.569	
Pajak Lain		-	-	-	
Iuran Pelabuhan		-	-	-	-
Iuran Tetap				-	-
Sumber Daya Alam Lainnya	-				
Kehutanan	3.150.890.000	607.951.956	3.289.145.102	3.150.890.000	2.811.098.756
DR		-	-	-	
IHPH	3.150.890.000			3.150.890.000	-
PSDF	-	507.951.956	3.289.145.102		3.947.309.706
Perikanan	139.186.070	-	319.861.300		1.111.457.020
Grand Total	32.305.157.759	70.300.478	9.463.976.502	29.247.719.719	4.799.989.312

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Serayun

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
DBH			10.960.061.810	3.193.060.210	7.767.001.600
PPh			373.594.267	-	373.594.267
PPh Pasal 21			364.022.733	-	364.022.733
PPh Pasal 25/29			9.571.534	-	9.571.534
PBB			10.220.060.175	7.220.060.210	3.000.000.000
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Bagian Daerah Penerimaan Migas					
Bagian Daerah Penerimaan Non Migas			951.640	191.738.401	32.810.000
Bagian Daerah Pertambangan Minyak					
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi			9.701.931.357	3.062.944.907	6.638.986.450
Bagian Daerah Sektor Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas			1.636.000		1.636.000
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Perbendaharaan					
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Sektor Lainnya			549.958.465		549.958.465
PPh Pasal 22 Impor					
PBB		503.491.912	8.254.361.732		8.254.861.732
Migas			207.568.025		207.568.025
Minyak Bumi (85%)			32.084.117		32.084.117
Minyak Bumi (0,5%)			1.094.321		1.094.321
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Daerah Otonom					
Gas Bumi (70%)			170.657.250		170.657.250
Gas Bumi (0,5%)			2.844.191		2.844.191
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah Otonom					
Pertambangan Umum			794.487.607		794.487.607
Kehutanan			794.487.607		794.487.607
Iuran Hasil Hutan					
Dana Reboisasi					
Provisi Sumber Daya Hutan					
Bagian Pemerintah Pusat					
Perikanan		503.491.912	4.252.930.109		4.756.422.021
CHT					
PBB		115.876	4.078.892.504		4.078.892.380
Pajak Penghasilan		503.375.036	211.207.687		514.582.723
Pertambangan					
Grand Total		503.491.912	5.116.913.210	3.193.060.210	12.894.752.828

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Serayen

(dalam rupiah)

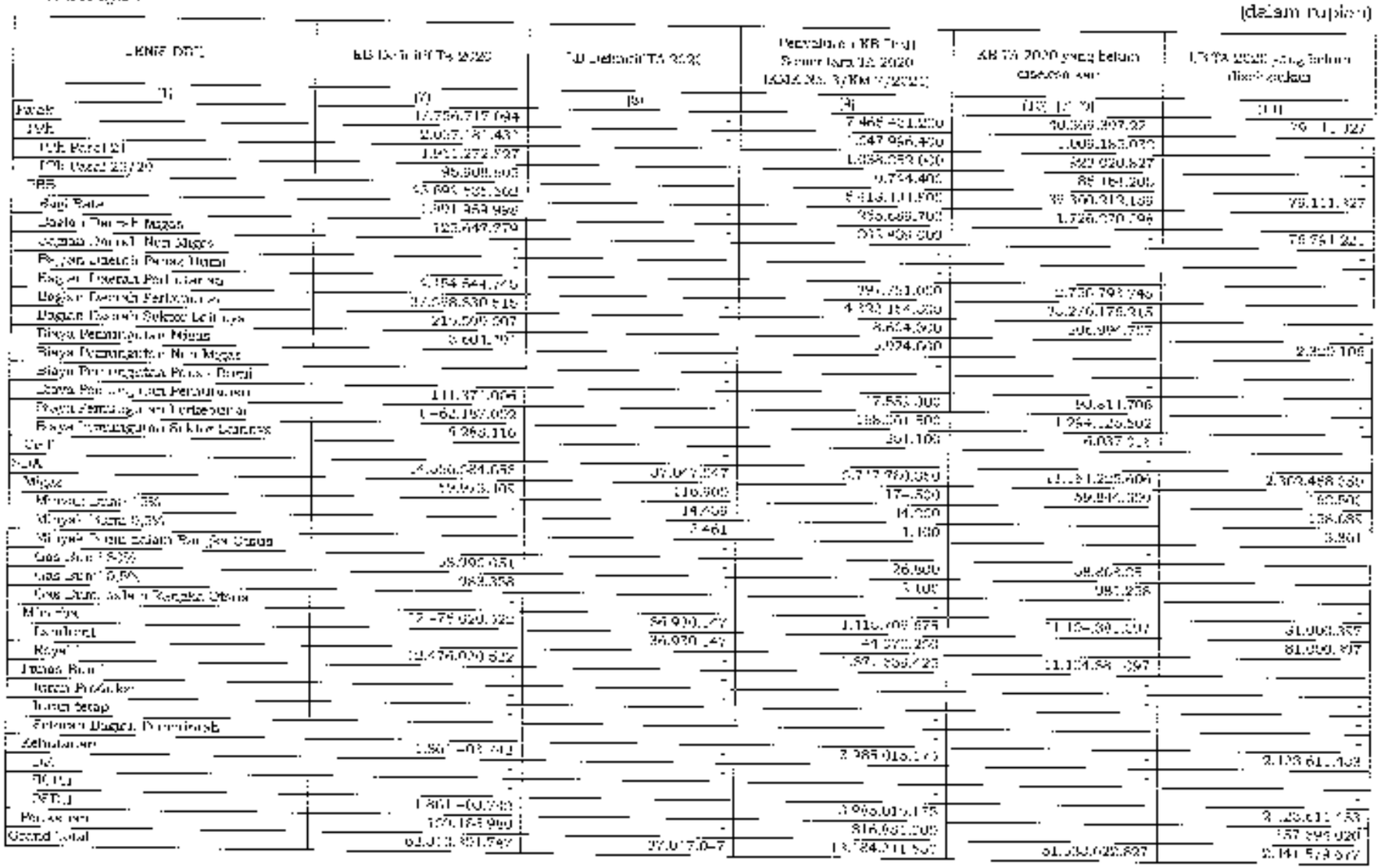

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sukamaju

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2018	KB TA 2019	LS s.d. TA 2019 (KVR No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian I s.d. TA 2019 (KVR No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LS s.d. TA 2019 (KVR No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	233.738.681	233.738.681	-
PPh			233.738.681	233.738.681	
Pasal 21			41.738.111	41.738.111	
PPh Pasal 25/29			191.920.570	191.920.570	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	
Bagian Daerah Aceh			-		
Bagian Daerah Non Aceh					
Bagian Daerah Penghasil					-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	
Bagian Daerah Selain Lainnya					
Bagian Pemerintahan Aceh					-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perhutanan					
Bagian Pemerintah Perkebunan					-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	
SDA	-	176.373.440	4.097.685.705	191.139.711	3.906.546.001
Migas			611.942.477	191.139.711	420.802.766
Minyak Bumi 15%			356.970.891	191.139.714	156.971.197
Minyak Bumi 0,5%	-	-	11.630.594	-	11.682.965
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 15%		-	300.970.568		300.970.568
Gas Bumi 0,5%			3.134.938		3.134.938
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba			3.919.763.015	-	3.346.703.021
Tambang	-	-	1.36- 112.0	-	1.36- 73.072
Royalti	-	-	982.520.955	-	1.069.330.033
Aceh Baru			-		
Jaring Provinsi					
Jaring lainnya					-
Sumber Daya Non Energi	-	-	-	-	-
Perikanan	-	196.373.440	-	-	-
DR					
LOTI					
PSDH	-	196.373.440	-	-	-
Pertanian	-	-	-	-	-
Grand Total		176.373.440	4.097.243.971	191.774.369	3.837.619.381

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sukamara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	DBH Definitif TA 2020	DBH Definitif TA 2021	Penyaluran DBH TA 2021 Sesuai PMK Nomor 71/PMK.07/2021	KBH TA 2020 yang belum disalurkan	KBH TA 2020 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	8.650.707.150	-	2.102.298.300	7.563.691.981	5.288.537
PBB	1.947.917.151	-	645.696.300	1.203.021.151	-
PBB Pasal 21	1.778.306.013	-	635.928.600	1.133.068.515	-
PBB Pasal 25/29	92.328.233	-	10.367.400	80.152.833	-
BPHTB	7.401.189.969		1.456.602.000	6.030.471.100	1.260.031
Pajak Rokok	591.969.969		200.094.000	1.720.240.396	-
Pajak Penerangan Jalan	186.556.219	-	141.635.910	-	5.287.074
Pajak Sarang Burung Walet		-	-		
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Parkir					
Pajak Hotel	5.749.544.507	-	997.510.000	4.045.033.507	-
Pajak Restoran	315.593.507	-	3.654.000	206.064.737	
Pajak Hiburan	3.935.743		1.150.000		196.267
Pajak Reklame					-
Pajak Penerangan Jalan Bukan PLN	-	-		-	-
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-	-	-	-	
Pajak Parkir	283.922.102		87.787.000	185.135.102	
Pajak Sarang Burung Walet	6.249.119		261.100	6.031.019	-
PDRD	-	-	-	-	-
DBH	13.336.510.594	977.605.157	3.604.854.975	1.07 403.436	761.014.314
Migas	50.073.439	10.305	17.361	50.024.507	102.706
Migas Jenis Lain		111.149	41.203		159.639
Migas Sektor 0,5%		2.161	1.700		3.861
Migas Tahun Sebelum Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	58.050.05	-	26.600	58.855.75	-
Gas Bumi 0,5%	963.858	-	3.102	971.276	
Gas Bumi Sebelum Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	12.277.737.022	277.798.257	1.451.131.725	11.21 1.603.847	310.191.707
Landrent		277.798.257	36.330.150		310.191.707
Royalti	3.974.832.232		1.360.799.275	1.1 1.1 540.957	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap					
Sebelum Dibagi Pertambangan					
Kehutanan	197.734.763		1.259.577.750	-	267.902.987
PSDH	-	-	-	-	-
DR Pst					
PSDH	789.721.763		1.280.321.750		267.902.987
Perikanan	59.736.500		216.981.050		157.594.000
Grand Total	28.748.606.594	977.605.157	4.917.153.175	3.833.185.787	767.109.323

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lamandau

(dalam rupiah)

[JENIS DBH]	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyelesaian LEBIH BAYAR TA 2019* (KMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-		114.229.939	114.229.939	-
PPh	-	-	40.095.409	40.095.409	-
PPh Pasal 21		-	-	-	-
PPh Pasal 25/29		-	40.095.409	40.095.409	-
PPN			74.134.530	74.134.530	
Bagi Rata					
Bagian Daerah Utama	-			-	-
Bagian Daerah Non Bagi Hasil		-	52.091.250	52.091.250	-
Bagian Daerah Penerima Jatah		-	-	-	
Bagian Daerah Penerima Lainnya					
Bagian Daerah Penerima Hasil	-				-
Bagian Daerah Selain Utama	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Utama		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas			2.102.650	2.102.650	
Bagian Pemerintah Pusat Lain	-				
Bagian Pemerintah Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perkebunan			-	-	
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					
PBB	-				-
BPHTB	-	264.736.077	3.868.343.973	793.006.614	7.395.621.451
Migas	-		207.568.027	-	207.568.027
Minyak Bumi 15%			32.004.717	-	32.004.717
Minyak Bumi 0,5%			1.099.381		1.099.381
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus	-				-
Gas Bumi 30%	-		170.657.255	-	170.657.255
Gas Bumi 0,5%	-	-	3.811.674	-	3.811.674
Gas Bumi dalam Wilayah Kerja Khusus		-	-	-	-
Panas Bumi			1.303.369.729		1.303.369.729
Tambahan			1.303.369.729		1.303.369.729
Regular	-				
Pariwisata			-		-
Jumlah Transfer	-	-	-	-	-
Jumlah Setiap		-		-	
Kelebihan Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	261.736.077	7.111.410.215	793.028.514	7.091.067.651
PDB	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	7.147.176.369	793.028.514	6.354.387.855	
[%] [1]		261.736.077			
Perikanan					
[%] [1]	-	264.736.077	8.072.579.243	917.269.921	7.155.309.322

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lamandau

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Salur TA 2020	LB Salur TA 2020	Penyaluran Kurang Salur TA 2020 (KMK No. 53/KM.7/2021)	LB TA 2020 yang belum Dikembalikan	LB TA 2020 yang telah dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	92.164.592.044		3.875.119.400	16.201.204.850	6.812.705
PPh	1.692.614.405		682.910.350	909.960.050	-
PPh Pasal 21	1.559.453.034	-	640.290.300	615.765.772	-
PPh Pasal 25/29	133.118.197	-	42.620.050	27.703.969	-
PBB	23.471.977.639		3.193.340.850	7.834.259.847	6.812.705
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.991.959.995		203.050.700	1.720.270.284	
Penerimaan Pertambangan Minyak	150.113.996		106.720.850		6.996.601
Penerimaan Pertambangan Gas Alam	24.645.773	-	9.369.050	2.428.606.772	-
Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Penerimaan Pertambangan Mineral dan Batubara	3.137.407.050		675.551.700	2.461.855.350	
Penerimaan Kehutanan	1.191.461.261		1.012.696.500	9.048.850.661	
Penerimaan Perikanan	25.509.027		9.106.300	255.941.100	-
Cukai Hasil Tembakau	2.551.798	-	4.547.400	-	315.893
Pajak Rokok	72.791.892		242.106	70.031.702	
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Parkir	106.852.371	-	25.913.300	80.939.071	-
Pajak Air Tanah	102.336.260	-	74.345.202	368.87 (80	-
Pajak Sarang Burung Walet	6.258.110	-	271.100	6.027.010	
PBB-P2					
SDA	18.656.505.575	11.670.290	4.041.256.600	15.132.320.675	312.148.190
Migas	35.377.400	1.790	79.100	83.044.629	162.850
Minyak Bumi (PPh)	-	1.439	4.700	-	139.689
Minyak Bumi (PBH)		351	1.400	-	9.261
Minyak Bumi Hasil Pengolahan Dikuasai Negara					
Gas Bumi 30%	56.990.061		136.920	56.853.141	
Gas Bumi 70%	989.958	-	2.700	981.258	
Gas Bumi dalam Rangka Domestik	-	-	-	-	-
Minerba	10.376.847.791	11.758.380	1.703.150.075	4.685.847.309	153.078.830
Landrent		11.772.380	113.325.050	-	1.015.298.030
Royalti	10.090.142.791		1.679.374.425	14.063.567.309	
Panas Bumi					
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap	-	-	-	-	-
Setoran Angsuran Pemerintah			-	-	-
Perikanan	2.369.980.092		1.911.299.425	461.858.967	
CHT	-	-	-	-	-
DBHP	-	-	-	-	-
Others	2.295.301.092		1.934.091.125	461.858.967	-
Pajak Karbon	108.181.990		216.841.300		137.031.800
Grand Total	4.123.084.929	11.670.290	7.920.945.500	33.179.720.096	318.960.595

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gunung Mas

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	Realisasi TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Target Realisasi TA 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Kurang/(Lebih) Bayar TA 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			1.970.589.302	1.970.589.302	
PPh			-	-	-
PPh Pasal 21		-		-	-
PPh Pasal 25/29		-		-	-
PBB		-	1.970.589.302	1.970.589.302	
Bagi Hasil		-	-		
Bagian Daerah Migas	-		-	-	
Bagian Daerah Non Migas		-	421.701.267	421.701.267	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya		-			-
Bagian Daerah PBB		-	1.469.972.312	1.469.972.312	
Bagian Daerah Bea Perolehan			-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-		-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas		-	12.501.536	12.501.536	
Bagian Pemerintah Pajak Lainnya			-		
Bagian Pemerintah Pertambangan	-		50.564.536	50.564.536	-
Bagian Pemerintah Perkebunan	-	-			-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya		-			
CHT			-	-	
PDN		3.023.957.220	3.354.018.500	287.052.619	3.597.903.981
Migas			207.063.927	19.330.715	94.924.212
Minyak Bumi 0,5%		-	32.921.117	13.330.719	19.590.398
Minyak Bumi 0,3%		-	1.088.791		1.088.791
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	
Gas Bumi 0,5%			170.057.135	-	170.057.135
Gas Bumi 0,3%		-	2.834.797	-	2.834.797
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-		-	-
Pertambangan		-	3.073.026.089		3.073.026.089
Perikanan		-	3.073.026.089		3.073.026.089
Kehutanan			-		
Panas Bumi			-	-	
Jaminan Reklamasi	-		-	-	-
Tanah Sawah	-	-			-
Pendapatan Bagian Pemerintah		-			-
Pertambangan		358.957.220	273.965.924	267.721.900	
DR	-		-	-	
DBH	-	4.291.503		-	-
DSHF		348.699.793	273.965.924	267.721.900	-
Perikanan			-		
Grand Total		3.023.957.220	7.595.633.426	2.257.642.521	5.337.990.905

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Gunung Mas

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB Definitif TA 2020	LPD Definitif TA 2020	Penyaluran K/L DBH Sesuai PMK No. 8/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang belum dikembalikan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
Migas	17.07.391.377	-	5.589.607.150	6.798.160.052	686.935.675
PPh	2.230.221.939		819.152.000	1.432.202.239	
PPh Pasal 21	2.[illegible]9.110.703		909.979.800	1.[illegible]0.130.903	
PPh Pasal 23/26	7[illegible]14.636		9.[illegible]0.150	81.[illegible]0.595	-
PBB	1.71[illegible]69.438	-	3.[illegible]3[illegible]0(1	9.[illegible]56.[illegible]66.89)	456.935.655
Bagi Rata	1.09[illegible]880.998	-	765.684.700	1.[illegible]26.[illegible]70.268	-
Bagian Daerah Migas	189.[illegible]8.281		[illegible]05.781.700		6.261.179
Bagian Daerah Non Migas	5[illegible]6.2[illegible]3.679		[illegible]3.[illegible]6.800	4[illegible]2.[illegible]5.778	
Bagian Daerah Penghasil	-	-		-	-
Bagian Daerah Pemerataan	520.[illegible]27.49	-	1.[illegible]77.506.401	-	687.360.079
Bagian Daerah Perbatasan	7.064.090.301		1.[illegible]33.[illegible]57.[illegible]06	6.681.[illegible]12.[illegible]01	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.[illegible]9.027		8.[illegible]0.1[illegible]03	[illegible]50.[illegible]91.[illegible]07	
Biaya Pemungutan Migas	5.490.550	-	5.709.103		249.550
Biaya Pemungutan Non Migas	16.[illegible]1.020	-	9.7[illegible]7.[illegible]02	3.[illegible]73.[illegible]99	-
Biaya Pemungutan Pajak Jalan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Perbatasan	27.[illegible]2.650		10.0[illegible]5.[illegible]00		22.261.917
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	3[illegible]9.7[illegible]4.[illegible]1		[illegible]8.[illegible]1.[illegible]95	2[illegible]9.[illegible]82.[illegible]07[illegible]	-
Biaya Pemungutan BKBH Lainnya	8.[illegible]8[illegible]1[illegible]	-	[illegible]1[illegible]0(	[illegible].[illegible]97.[illegible]16	-
Cukai		-	-	-	
Kurang	11.[illegible]7.[illegible]9[illegible].[illegible]16	879.[illegible]39.[illegible]16	1.[illegible]11.[illegible]3[illegible]5	11.[illegible]09.[illegible]6[illegible].[illegible]1	[illegible].[illegible]6[illegible].[illegible]6
Migas	69.[illegible]73.[illegible]39	1[illegible].950	[illegible]74.[illegible]20	68.[illegible]7.[illegible]29	182.502
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]74.[illegible]20	74.[illegible]20	-	56.539
Kondensat Bumi 0,5%	-	2.[illegible]61	[illegible]4.20	-	5.861
Kondensat Bumi Bukan Penghasil Daerah		-	-	-	-
Gas Bumi 30%	68.[illegible]0.[illegible]51		176.[illegible]50	68.[illegible]3.251	
Gas Bumi 0,5%	[illegible]2.[illegible]98		2.[illegible]20	[illegible]61.[illegible]98	
Gas Bumi Diluar Penghasil Daerah	-				
Pph 21/26	12.[illegible]6.[illegible]76.[illegible]5[illegible]	[illegible]79.[illegible]2[illegible].[illegible]1[illegible]	[illegible].[illegible]61.[illegible]96[illegible].[illegible]0[illegible]	[illegible].[illegible]54[illegible].[illegible]2[illegible]	[illegible].[illegible]37.[illegible]7[illegible]
[illegible]	-	[illegible]70.[illegible]2[illegible].[illegible]3	[illegible]59.[illegible]7.[illegible]2[illegible]5	-	[illegible]39.[illegible]7[illegible].[illegible]3
Migas	12.[illegible]2.[illegible]75.[illegible]32	-	[illegible].[illegible]05.[illegible]54.[illegible]80[illegible]	[illegible].[illegible]40.[illegible]2[illegible]2	-
Pajak Lain					
Bunga Deposito					
Denda	-	-			-
Kurang Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kekurangan	1.[illegible]3.[illegible]62.[illegible]3[illegible]	-	2.[illegible]7[illegible].[illegible]35.[illegible]60[illegible]	-	[illegible].[illegible]50.[illegible]71.[illegible]23[illegible]
PBB					
PPh 21	-				
PPh 25	1.[illegible]3.[illegible]62.[illegible]3[illegible]	-	2.[illegible]72.[illegible]43.[illegible]60[illegible]	-	[illegible].[illegible]50.[illegible]27.[illegible]23[illegible]
Penagihan	150.[illegible]56.[illegible]30	-	[illegible]6.[illegible]3[illegible].[illegible]0[illegible]	-	87.[illegible]04.[illegible]23
Grand Total	28.[illegible]2.[illegible]92.[illegible]23	879.[illegible]39.[illegible]16	9.[illegible]91.[illegible]2[illegible].[illegible]03[illegible]	22.[illegible]7.[illegible]26.[illegible]78	[illegible].[illegible]47.[illegible]09.[illegible]21[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Polewali Mandar

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TAHUN 2019	KURANG BAYAR TAHUN 2020	Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyesuaian Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa Alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4]-[5]
Pajak			483.074.040	348.665.032	302.409.008
PBB			313.610.000	348.665.032	
PBB Pasal 21			185.999.701	185.999.754	
PBB Pasal 25/29			161.089.476	161.801.278	-
BPHTB			351.430.640		302.409.008
Pajak Hotel			-		-
Pajak Restoran				-	
Pajak Hiburan			349.074.205	-	349.315.270
Pajak Reklame			-	-	-
Pajak Penerangan Jalan					-
Pajak Parkir				-	
Pajak Air Tanah					
Pajak Sarang Burung Walet				-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			11.094.502		1.086.420
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Pajak Penerangan Jalan				-	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					-
Pajak Pemungutan Sarang Burung Walet					-
CHT					
DBH SDA		155.155,61	1.010.930.302	170.[illegible].036	1.879.784.267
Migas			614.603.272	170.121.036	504.360.036
Minyak Bumi 15%			348.642.351	170.121.036	178.8.8.916
Minyak Bumi 3,5%			11.030.705		1.850.053
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Offshore					
Gas Bumi 30%			359.2.6.20[illegible]	-	309.2[illegible].0[illegible]
Gas Bumi 6,5%			5.131.308	-	5.13[illegible].053
Gas Bumi dalam Rangka Ekspor					
Minerba			554.7[illegible].76[illegible]		554.942.764
Landrent					-
Royalti			554.7[illegible].701		554.942.764
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap					-
Setoran Sewa Pemanfaatan					-
Kehutanan		155.[illegible].6[illegible]	417.[illegible].[illegible]02		117.133.168
DR					
IUPH			417.[illegible].160	-	417.[illegible].160
PSDH		155.217.021			
Perikanan					
Grand Total		155.[illegible].60	2.[illegible].[illegible].[illegible]84	[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]6[illegible]	2.[illegible].[illegible].[illegible]07

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pulang Pisau

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN DBH	Kurang Bayar TA 2020	Lebih Bayar TA 2020	Penyaluran s.d. bulan Desember TA 2020 (sesuai PMK Nomor 17/PMK.07/2020)	TA 2020 yang belum disalurkan	TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(3)-(4)	(6)
Pajak	6.536.4[illegible]		1.942.013.200	5.031.020.121	5.121.610
PBB	1.562.249.847	-	709.550.400	1.234.039.447	-
PBB Pasal 21	1.348.276.057	-	730.762.200	1.158.345.257	-
PBB Pasal 25/29	73.101.790	-	8.707.400	64.890.500	-
BPHTB	1.671.301.057		1.203.155.200	3.778.331.277	5.121.610
Bagi Rata	69.353.960		250.029.700	1.723.240.209	
Bagian Daerah Migas	77.502.181	-	193.091.900		5.867.319
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 4(2)		-	-	-	
Bagian Daerah PPh Pasal 21					
Bagian Daerah PPh Pasal 25/29	2.43[illegible]		711.130.500	[illegible]	
Bagian Daerah Selisih Lebihnya	715.595.207	-	8.604.500	206.964.707	-
Biaya Pemungutan Migas	9.122.309	-	5.533.600	-	233.791
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pasal 4 Ayat 2	-				
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	90.114.700		27.667.400	65.849.858	
Biaya Pemungutan Selisih Lebihnya	6.286.116		221.100	6.037.016	
DPT	-				
DBH	3.017.826.597	16.500	3.844.553.875	11.774.861.069	202.525.217
Migas	50.073.109	16.500	17.520	55.744.520	69.500
Minyak Bumi 15%		14.139	17.220	-	36.039
Minyak Bumi 0,5%		2.161	1.410		3.551
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	58.050.05		128.900	58.599.201	-
Gas Bumi 0,5%	953.538	-	2.160	951.350	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba	12.57[illegible].921.513		1.362.765.275	[illegible].215.130.548	-
Panas Bumi	1.467.015			3.487.013	
Kehutanan	13.574.[illegible]4.322		1.362.765.275	11.211.676.347	
Pajak Rokok	-	-			-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Cukai Lainnya		-	-	-	-
Sebesar Bagian Daerah					
PPh Pasal 22	30.246.300		1.164.710.200		43.166.100
DAK	-	-	-	-	-
DAK Fisik		-	-	-	-
DAK Non Fisik	30.246.300		1.164.713.200		43.166.797
Tambahan	50.[illegible]6.980		1.[illegible].951.030		257.091.025
Grand Total	20.834.[illegible].241	116.90[illegible]	4.765.[illegible].4[illegible]	16.[illegible]6.201.753	308.444.527

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Murung Raya

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PB TA 2018	PB TA 2019	DBH TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran DBH TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Sisa DBH TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak		-	1.679.531.445	1.679.531.445	
PPh			1.679.531.445	1.679.531.445	-
PPh Pasal 21			1.510.597.429	1.510.597.429	-
PPh Pasal 25/29			168.934.016	168.934.016	-
PBB		-			
Bagian Pusat		-			
Bagian Daerah Migas		-			
Bagian Daerah Non Migas			-	-	-
Dalam Daerah Penghasil Dalam		-			-
Dalam Daerah Penghasil		-			
Bagian Daerah Penghasil Lainnya			-		
Bagian Daerah Bukan Penghasil			-	-	-
Dalam Perimbangan Migas		-		-	-
Dalam Perimbangan Non Migas		-			
Bagian Pemerintah Pusat Dalam Daerah			-		
Bagian Pemerintah Pusat Penghasil			-	-	-
Dalam Perimbangan Penghasil		-			-
Dalam Perimbangan Bukan Penghasil		-			
PBB		-	-		
BPHTB		387.876.776	72.938.348.658	12.501.707.335	60.729.630.146
Cukai			736.778.000	705.978.364	30.800.350
Cukai Hasil Tembakau			10.000.000.000	9.995.485.787	4.514.200
Cukai Hasil Tembakau		-	11.111.557	11.098.317	13.240
Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Ekstensifikasi		-	-		
Cukai Hasil Tembakau			25.574.536	926.060.440	20.714.100
Cukai Hasil Tembakau			5.020.458	5.482.958	478.150
Cukai Hasil Tembakau Kawasan Khusus		-	-	-	-
Minerba		-	72.301.707.857	12.472.729.859	59.829.033.998
Landrent		-	15.727.719.030	9.716.102.033	6.011.616.997
Royalti		-	56.574.013.827	2.756.627.826	53.817.393.001
Panas Bumi			-	-	
Iuran Eksploitasi			-	-	-
Iuran Tetap		-			-
Setoran Bagian Pemerintah		-			
Kehutanan		387.876.776	-		
DR			-	-	
PSDH		3.762.951			-
Reboisasi		384.113.825			-
Perikanan		-			
Grand Total		387.876.776	73.918.175.303	15.182.639.651	60.729.630.146

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Murung Raya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	LB Desember TA 2020	Pengalokasian KB/LB Semester I TA 2020 (KMK-[illegible]/KM.7/2021)	KB TA 2021 yang belum dialokasikan	LB TA 2021 yang belum dikembalikan
[1]	[7]	[8]	[9]	[10] = [7] - [9]	[11]
Pajak	35.023.070.665	-	6.761.402.000	28.660.268.165	11.075.397
PBB	2.057.257.421	-	2.457.757.120	614.499.299	
BPHTB	1.980.090.107	-	232.461.800	55.614.307	-
PBB P2	71.515.277		9.265.800	62.249.477	-
PBB	32.976.740.692		4.139.213.200	27.837.527.492	11.075.397
Pajak Rokok	1.951.959.968		295.599.720	1.716.279.248	
Pajak Daerah Migas	310.084.668	-	300.300.600		10.215.931
Pajak Daerah Non Migas	22.176.451.342	-	3.254.452.320	18.921.999.022	-
Pajak Daerah Pusat Bagi I			-	-	-
Pajak Daerah Perhutanan	1.340.173.436		1.127.956.050	212.217.386	
Pajak Daerah Perkebunan	47.022.027	-	9.470.300	37.551.727	
Pajak Daerah Sektor Lainnya	213.390.037	-	7.594.300	205.795.737	-
Pajak Pertambangan Migas	9.227.345		9.646.600	-	421.455
Pajak Pertambangan Non Migas	931.469.934		95.343.150	726.611.121	
Pajak Pertambangan Panas Bumi	-	-			
Pajak Pertambangan Perikanan	15.103.833	-	36.277.960	9.326.697	-
Pajak Pertambangan Perikanan	1.062.611		228.700	1.535.574	-
Pajak Pertambangan Sektor Lainnya	9.263.116		231.100	6.037.016	
Cukai	-	-			
PPh	71.932.103.312	3.487.183.07	8.427.105.550	66.992.083.710	6.775.282.119
Migas	69.971.429	176.030	174.800	69.844.629	169.530
Minyak Bumi 15%		114.430	44.300	-	157.670
Mineral Bumi 3,5%	-	2.451	1.000		3.451
Minyak Bumi dalam Rangka DMO	-	-			
Gas Bumi 30%	35.900.051	-	26.900	35.873.151	
Gas Bumi 0,5%	962.358	-	2.100	961.258	-
Gas Bumi dalam Rangka DMO		-	-	-	-
Minerba	59.6[illegible].098.125	3.169.215.171	5.332.431.000	50.[illegible].882.296	5.330.507.256
Panas Bumi	-	3.169.215.171	2.912.081.125		3.330.977.296
Jumlah	69.823.765.125		7.799.639.925	20.701.350.251	
Pasal Lain		-	-		
Tarif Progresif		-	-		-
Tarif Flat			-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-				-
Perhitungan	1.850.235.797	-	2.577.102.150		357.816.203
Pph		-	-		
PPh/PPh			-	-	-
PPh/BP	1.850.235.797		2.577.102.150		357.816.203
Perhitungan	150.726.580		216.951.000		157.697.020
Grand Total	104.066.750.377	3.488.183.771	14.906.940.950	95.050.022.969	6.793.207.013

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Barito Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2019	LP (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian DBH TA 2020 (KMK No. 315/KM.7/2021)	Sisa LP (PMK No. 9/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-		176.170.494	176.170.494	
PPh	-	-	176.170.494	176.170.494	-
PPh Pasal 21	-	-	13.183.287	13.183.287	-
PPh Pasal 25/29		-	163.387.208	163.077.208	-
CHT			-		
Cukai Rokok					
Bagian Daerah Migas	-				-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Pertambangan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-		-	-
Dana Penerimaan Migas		-	-	-	-
Dana Penerimaan Non Migas					
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-				
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perikanan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
PBB	-				
SDA	-	155.758.162	19.060.251.027	17.777.771.859	2.815.515.266
Migas		-	561.739.058	650.788.708	30.020.550
Minyak Bumi 15%		-	351.711.024	350.197.724	4.314.200
Minyak Bumi Dalam Rangka DMO			11.416.713	11.673.163	143.550
Gas Bumi 30%	-		205.250.060	290.647.913	25.714.150
Gas Bumi 0,5%	-	-	5.154.568	4.525.508	458.450
Gas Bumi dalam Rangka DMO		-	-	-	-
Non Migas		-	18.498.778.027	707.630.348	17.765.159.015
Panas Bumi			4.737.251.201	597.630.848	1.139.612.015
Perikanan			4.629.121.973		5.625.247.073
Pertambangan	-				
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap		-	-	-	-
Kehutanan					
Iuran Hasil Hutan	-	103.068.000	10.770.000		10.770.000
PSDH	-	-	-		-
DR		-	10.770.000	-	10.770.000
Pungutan		52.308.000		-	
Perikanan					
Grand Total	-	155.758.162	19.298.483.670	1.123.941.192	18.815.515.266

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Barito Timur

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (KMK No. 9/KM.7/2021)	Sisa KB 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2021 yang akan disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.160.716.016	-	8.506.710.200	6.854.206.184	-
PPh	3.056.729.229		1.337.702.800	1.478.035.629	
PPh Pasal 21	2.961.364.394		1.347.351.200	1.614.333.827	
PPh Pasal 25/29	95.835.005		9.712.700	5.022.802	
Duti	13.135.197.784	-	1.954.540.500	6.180.250.534	-
Bagi Hasil	1.091.050.054	-	755.633.700	1.974.240.298	-
Bagian Daerah Migas	774.427.182		670.369.700	100.057.782	-
Bagian Daerah Non Migas	316.622.872		282.270.800	2.020.015.300	
Bagian Daerah Pajak Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan	88.256.760	-	-	88.256.760	-
Bagian Daerah Perkebunan	2.092.731.602	-	840.618.800	1.551.618.802	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2.116.599.037		8.694.300	206.904.737	
Dana Pertimbangan Migas	92.147.965		9.643.200	12.493.330	
Dana Pertimbangan Non Migas	90.823.581	-	14.676.900	85.146.681	-
Dana Pertimbangan Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Dana Pertimbangan Perkebunan	2.054.252			3.054.252	
Dana Pertimbangan Sektor Lainnya	181.467.215		30.000.000	98.720.115	
Dana Pertimbangan sektor Lainnya	6.268.176	-	281.000	8.037.016	-
PPH		-	-	-	-
SDA	13.905.391.639	3.881.120	4.276.097.000	9.469.177.054	537.174.845
Migas	51.037.409	2.881.100	316.100	98.240.000	4.078.000
Kurang Bayar Tahun	-	3.756.354	100.100		3.809.406
Kurang Bayar Tahun	-	125.561	6.200	-	3.161
Kurang Bayar Tahun Sebelum Kurang Bayar Tahun			-	-	-
Gas Bumi 1,5%	98.990.291		126.850	38.963.951	-
Gas Bumi 0,5%	592.359		2.220	961.258	
Gas Bumi Selain Rokok Cukai	-				
Kehutanan	12.460.020.622	-	3.965.710.000	9.100.272.515	
Perikanan	328.794.559	-	427.950.575	230.3-3.494	-
Pertambangan	13.911.326.531	-	7.631.797.500	9.820.051.251	-
Pertambangan			-	-	-
Iuran Tetap (Landrent)					
Iuran Eksplorasi	-				
Iuran Eksploitasi	-	-			
Pertambangan	720.153.510	-	1.100.285.525	-	349.979.715
PBB					-
BPHTB	-				
PPh Pasal 21	630.153.810	-	1.130.033.525	-	269.979.715
Perikanan	100.000.000	-	816.67-.502	-	57.694.000
Grand Total	95.572.251.182	3.881.120	7.733.077.202	16.31-.333.317	537.644.351

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Kalimantan Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2016	KB TA 2020	LB s.d TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyaluran LB s.d TA 2020 (KMK No. 230/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak		-	13.821.261.606	13.821.261.606	-
PPh			13.821.261.606	13.821.261.606	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29	-		13.821.261.606	13.821.261.606	-
PBB	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasca Tambang	-	-			-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan		-	-	-	
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	-				
Bagian Pemerintah Migas	-				-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pasca Tambang			-	-	
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Bagian Pemerintah Perkebunan	-				-
Bagian Pemerintah Kehutanan Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai		-	-	-	-
PDA		103.761.090	209.321.590.742	81.141.309.000	127.020.390.742
Migas			9.301.216.240	6.202.317.016	4.098.899.224
Minyak Bumi PSC	-	-	9.191.962.009	6.121.594.829	4.180.367.180
Minyak Bumi Blok	-	-	109.254.287	80.722.187	108.674.750
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi PSC					
Gas Bumi Blok					
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Mineral	-	-	188.020.344.502	75.109.156.194	163.442.884.948
Batubara	-	-	-	-	-
Kayu		-	188.020.344.502	46.190.799.584	156.742.884.948
Panas Bumi					
Pajak Daerah					
Retribusi Daerah	-	-			-
Swasta Bagian Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
Kehutanan		103.761.090	-		
DR		364.017.756			
PSDH	-	-			
Reboisasi	-	42.573.341	-	-	-
Perikanan			-	-	-
Grand Total		103.761.090	727.912.752.484	87.303.703.716	127.020.390.742

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Kalimantan Selatan

[dalam rupiah]

JENIS DBH	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak	95.5[illegible]7.020	-	5[illegible]4.5[illegible].20[illegible]	[illegible]1.753.282.620	
PPh	[illegible].[illegible]6.[illegible]28	-	[illegible].[illegible]52.[illegible]62	28.862.726.624	-
PPh Pasal 21	[illegible]7[illegible]1		[illegible].154.047.602	31.860.863.871	-
PPh Pasal 25/29	[illegible]6[illegible]7		[illegible].217.856.[illegible]8	2.01[illegible].862.737	-
PBB	[illegible].[illegible]2.965.975		[illegible]5.[illegible]62.117.[illegible]00	[illegible]7.879.[illegible]6.[illegible]75	
Cukai Kaki	-	-	-		
Bagian Daerah Migas	[illegible].[illegible]1.[illegible]6.[illegible]2	-	[illegible].[illegible]7[illegible].26.10[illegible]	[illegible]7[illegible]=.[illegible]52.6=[illegible]	-
Bagian Daerah Non Migas	[illegible]9.109.[illegible]06.[illegible]12		[illegible]8.372.[illegible]50.[illegible]00	27.[illegible]78.946.015	-
Bagian Daerah Pasal Rumit	-				
Bagian Daerah Pertambangan	[illegible]82.[illegible]80[illegible].9[illegible]=		[illegible]26.[illegible]21.[illegible]00	[illegible]1.[illegible]76.[illegible]21	
Bagian Daerah Perkebunan	[illegible]1.[illegible]48.[illegible]78.[illegible]86[illegible]	-	[illegible].[illegible]63.[illegible]89[illegible].[illegible]0[illegible]	[illegible].[illegible]78.151.[illegible]94	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]0[illegible].[illegible]21.[illegible]87[illegible]		[illegible]7.[illegible]30.[illegible]40[illegible]	[illegible]74.[illegible]8=.474	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]26.[illegible]26.[illegible]94[illegible]		[illegible].[illegible]1[illegible].[illegible]56[illegible]	[illegible]22[illegible].[illegible]5.[illegible]78	-
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]07.[illegible]7=8.[illegible]=	-	[illegible]15.[illegible]9[illegible].[illegible]29[illegible]	[illegible]6[illegible].[illegible]60.[illegible]11[illegible]	
Biaya Pemungutan Pasal Dalam	-	-	-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]0.[illegible]98.[illegible]0[illegible]		[illegible].[illegible]410.[illegible]60[illegible]	[illegible].[illegible]58.[illegible]85	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	[illegible]5[illegible].[illegible]96.[illegible]9[illegible]		[illegible]1.[illegible]8.[illegible]10.[illegible]90[illegible]	[illegible]16.[illegible]78.[illegible]07[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]5.[illegible]86.[illegible]60[illegible]		[illegible]04.[illegible]20[illegible]	[illegible]2[illegible].[illegible]1.[illegible]82[illegible]	
CHT	[illegible].[illegible]7	-	-	[illegible]7	-
SDA	[illegible]1.[illegible]1[illegible].[illegible]16	[illegible]0.[illegible]96.[illegible]82.[illegible]70	[illegible]0.[illegible]96.[illegible]02.[illegible]60	-	[illegible]42.[illegible]67.[illegible]24.65=
Migas		[illegible].[illegible]1.[illegible]79.[illegible]20[illegible]	[illegible]3.[illegible]7.[illegible]60[illegible]	-	[illegible]5.[illegible]0.[illegible]05.[illegible]40[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible].[illegible]7.[illegible]51.[illegible]50[illegible]	[illegible].[illegible]63.[illegible]20[illegible]		[illegible].[illegible]61.[illegible]84.[illegible]50[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]=.[illegible]26.[illegible]70[illegible]	[illegible].[illegible]4[illegible].[illegible]70[illegible]		[illegible]6.[illegible]72[illegible].[illegible]60[illegible]
Minyak Bumi dalam Kawasan Khusus	-	-	-		
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi dalam Kawasan Khusus			-	-	-
Mineral	[illegible]0.[illegible]5=.[illegible]3[illegible]	[illegible]6.[illegible]1[illegible].[illegible]21.[illegible]12[illegible]	[illegible]0.[illegible]7[illegible].[illegible]1[illegible].[illegible]50	-	[illegible]38.[illegible]41.[illegible]47.[illegible]735
Batubara	[illegible]0.[illegible]5=.[illegible]83[illegible]		[illegible].[illegible]29.[illegible]2[illegible].[illegible]93[illegible]		[illegible]03.[illegible]71.[illegible]090
Panas	-	[illegible]3.[illegible]41.[illegible]35=.[illegible]20	[illegible]9[illegible].[illegible]1.[illegible]71[illegible].[illegible]=3[illegible]		[illegible]37.[illegible]72.[illegible]70.[illegible]0[illegible]
Pasal Dalam			-	-	-
Pasal Perikanan			-	-	-
Pasal Lainnya	-			-	-
Setoran Sektor Kehutanan	-				
Kehutanan	[illegible]73.[illegible]76.[illegible]81[illegible]	-	[illegible]0[illegible].[illegible]29.[illegible]60[illegible]		[illegible]35.[illegible]72.[illegible]79[illegible]
PHT	[illegible]2[illegible].[illegible]1[illegible].[illegible]30[illegible]	-	[illegible]=[illegible].[illegible]02.[illegible]30[illegible]	-	[illegible]6[illegible].[illegible]47.[illegible]=[illegible]
PSDH				-	-
DBHDR	[illegible]=[illegible]. [illegible]51		[illegible]2.[illegible]76.[illegible]7[illegible]		[illegible]0.[illegible]05.[illegible]12[illegible]
Pertambangan	-	-			
Bruto Total	[illegible]8.[illegible]2.[illegible]65.[illegible]38[illegible]	[illegible]8.[illegible]96.[illegible]83.[illegible]30	[illegible]7.[illegible]60.[illegible]73.[illegible]52[illegible]	[illegible]=.[illegible]5[illegible].[illegible]82.[illegible]20	[illegible]42.[illegible]67.[illegible]24.=[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Banjar (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2017	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak		-	1.470.473.758	1.470.473.758	-
PPh			1.470.473.758	1.470.473.758	
PPh Pasal 21	-		853.862.051	853.862.051	
PPh Pasal 25/29	-		616.610.712	616.610.712	
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata		-	-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Pertambangan	-				
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-		-
Bagian Daerah Perkebunan		-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas	-				
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan					
Biaya Pemungutan Perkebunan	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT		-	-	-	-
SDA		6.764.289	95.[illegible]	17.310.124.722	78.287.018.011
Migas	-		1.575.[illegible]	953.[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-		1.576.577.204	953.[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	-	[illegible]	36.453.356	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30,5%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	94.[illegible]	16.431.[illegible]	77.[illegible]
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti		-	94.[illegible]	16.43[illegible]	77.[illegible]
Panas Bumi				-	-
Iuran Produksi	-			-	
Iuran tetap	-				
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-		
Kehutanan		6.764.289	-	-	-
DR				-	
IIUPH	-				
PSDH	-	6.764.289	-		-
Perikanan		-	-	-	-
Grand Total		6.764.289	97.[illegible]	7.[illegible]	77.287.018.011

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Banjar

(dalam rupiah)

JENIS DBH	Alokasi Definitif TA 2021	KB Penyaluran TA 2020	Penyaluran KB TA 20 Berdasarkan TA 2021 (KMK No. 378/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dapat disalurkan	LB TA 2020 yang telah dapat diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Pajak	19.240.312.809		5.116.910.000	14.031.957.410	10.957.524
PPh	3.756.592.384	-	2.177.586.700	1.590.034.684	-
PPh Pasal 21	3.469.437.971	-	2.084.859.300	357.172.614	
PPh Pasal 25/29	300.138.373	-	87.056.300	212.902.070	
PBB	15.541.319.929		2.942.310.200	12.142.031.235	10.957.524
Pajak Rokok	1.961.659.929		302.089.700	1.720.270.295	
Bagian Daerah Migas	37.798.848		282.297.700	-	10.498.852
Bagian Daerah Non Migas	9.636.713.760	-	421.797.200	8.314.376.560	
Bagian Daerah Pasal 26(1)a	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perhutanan	186.680.941		53.000.000	133.333.118	
Bagian Daerah Pertambangan	2.610.952.711		935.172.200	1.775.648.111	-
Bagian Daerah Sektor Panas Bumi	2.535.390.207	-	7.650.300	936.094.707	-
Biaya Pemungutan Migas	8.068.848	-	3.482.000	-	434.032
Biaya Pemungutan Non Migas	321.171.312		47.797.100	273.648.212	
Biaya Pemungutan Panas Bumi					-
Biaya Pemungutan Pertambangan	7.960.154	-	2.006.000	5.954.154	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	116.640.990	-	37.111.200	78.038.208	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	1.190.077		280.800	909.341	
PPH	1.150			1.197	-
PPN	167.943.319	35.465.886.857	13.316.856.900	-	48.513.871.138
Migas	-	242.463.400	9.077.300	-	251.786.750
Alokasi Dasar 15%	-	234.612.700	8.077.300		242.611.000
Alokasi Dasar 3,5%		7.821.000	200.000		9.120.050
Migas di dalam Wilayah Kerja Offshore					-
Gas Bumi 70%				-	-
Gas Bumi 6,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Lokasi Bangkit Offshore	-	-	-	-	-
Minerba	-	35.223.262.157	12.998.156.000		48.191.606.342
Landrent		497.875.821	251.021.125		826.852.210
Royalti		34.810.921.358	12.747.134.900		47.358.070.106
Panas Bumi	-			-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Royalti	-	-	-	-	-
Sebelum Bagian Pemerintah					
Kehutanan	8.756.338		2.707.373		12.212.038
DR	-	-	-	-	-
IHPH	-	-	-	-	-
PSDH	8.756.338		2.707.373		12.212.038
Perikanan	109.196.980		316.981.300		157.891.020
Grand Total	19.309.854.126	35.465.886.857	13.434.559.892	14.031.957.410	48.824.926.942

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bintan Kepri

(dalam rupiah)

JENIS DBH	TA 20.8	TA 2019	Lebih Salur TA 2019 (PMK No. 75/PMK.07/2021)	Tunjangan Lebih Salur TA 2019 (KEP-5/PK.5/2021)	Sisa Lebih Salur TA 2019 (PMK No. 75/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=(4)-(5))
DAU		-	606.208.877	606.208.877	-
DBH			606.208.877	606.208.877	
DBH Pasal 21					
DBH Pasal 25/29	-		606.208.877	606.208.877	-
DAK	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Khusus			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Pajak Rokok	-				
Dana Desa Pemerataan	-	-		-	-
Dana Desa Perkebunan		-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Tertentu					
Biaya Pemungutan Migas	-				
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Kehutanan	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
DTI		-	-	-	-
SDA		6.760.265	20.099.207.737	7.373.115.866	18.707.871.268
Migas			1.705.641.302	882.000.102	716.480.926
Migas Bagi Hasil 15%	-	-	1.676.971.254	853.329.031	340.513.250
Migas Bagi Hasil 0,5%	-	-	28.670.048	28.670.071	375.967.676
Migas Bagi Hasil 0,5% Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%			-		
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi Bagian Daerah					
Minyak Bumi	-	-	18.393.565.435	6.491.115.764	17.991.391.342
Landrent	-	-	-	-	-
Geothermal		-	34.501.727.435	6.503.309.464	17.991.387.668
Bagian Daerah			-		-
Dana Otsus					
Dana Otsus Provinsi					
Dana Otsus Kabupaten/Kota	-	-			
Dana Otsus Tambahan Infrastruktur	-	-		-	-
Kehutanan		6.760.265	-	-	-
PSDH					
DBHDR	-	-	-	-	-
DBHDR	-	6.760.265	-	-	-
Perikanan			-	-	-
Jumlah Total		6.760.265	26.735.350.211	8.017.016.942	18.707.871.268

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Barito Kuala

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran KB DBH Tahun ini TA 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	9.250.142.208		2.781.360.000	6.847.571.313	31.141.473
PPh	3.[illegible].270.[illegible]		[illegible].130.000	1.040.201.096	
PPh Pasal 21	3.0[illegible].[illegible].967		1.428.026.000	1.582.308.467	-
PPh Pasal 25/29	30.099.481	-	98.190.000	[illegible].691.201	-
PBB	6.023.070.616	-	196.210.000	5.[illegible].385.191	54.444.473
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.991.[illegible].909	-	245.460.000	1.720.[illegible].288	
Cukai	80.134.896		138.000.000		22.697.000
Pajak Daerah Non Migas	-				-
Pajak Daerah Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara		-	-	-	-
Pajak Daerah Perikanan	3.[illegible].[illegible].[illegible]		511.300.000	3.[illegible].[illegible].233	
Pajak Daerah Sektor Pariwisata	215.[illegible].[illegible]		9.[illegible].000	206.[illegible].[illegible]	
Pajak Pengangguran Migas	2.82[illegible].630	-	49.[illegible].000	-	1.317.370
Pajak Pengangguran Non Migas	-	-	-	-	-
Pajak Pengangguran Daerah Tipe A					
Pajak Pengangguran Perkebunan					
Pajak Pengangguran Perikanan	161.357.406	-	23.[illegible].[illegible]	137.[illegible].406	-
Pajak Pengangguran Pelabuhan Laut	7.[illegible].077	-	[illegible].300	6.[illegible].847	-
CHT	024			024	
PNBP	152.[illegible].287	15.[illegible].[illegible].278	8.[illegible].[illegible].[illegible]		30.[illegible].[illegible].[illegible]
Migas	-	212.[illegible].430	9.[illegible].000		2[illegible].[illegible].[illegible]
Kekurangan Bagian DMO	-	2[illegible].[illegible].430	8.[illegible].000	-	[illegible].[illegible].720
Kekurangan Bagian DHPM		[illegible].[illegible].000	[illegible].000	-	8.[illegible].000
Kekurangan Bagian Pajak Penghasilan Migas		-	-	-	
Gas Bumi 50%					
Gas Bumi 15,5%	-				
Gas Bumi Kekurangan Bagian Pajak Penghasilan	-				-
Minerba	-	14.772.540.378	6.163.619.625	-	32.962.[illegible].703
Kekurangan		-	-	-	-
Kelebihan		14.772.540.378	6.182.619.625	-	32.962.[illegible].703
Panas Bumi					
Bunga Produksi	-				
Bunga Deposito	-	-	-	-	-
Sewa Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Kehutanan	2.972.317		27.[illegible].477	-	[illegible].[illegible].[illegible]
PNP					
BLUD	-		-		-
Pajak	[illegible].[illegible].317	-	20.452.[illegible]	-	13.[illegible].[illegible]
Perikanan	110.[illegible].[illegible]		310.[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Grand Total	9.[illegible].[illegible].[illegible]	15.[illegible].[illegible].[illegible]	11.[illegible].[illegible].[illegible]	6.[illegible].[illegible].[illegible]	2[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Hulu Sungai Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	TA 2018	TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB TA 2019 (PMK No. 9/PMK.07/2021)	Sisa LB TA 2019 (PMK No. 9/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	16.796.733.784	9.953.807.732	6.842.926.052
PPh	-	-	1.093.631.353	-	1.093.631.353
PPh Pasal 21			486.137.773	-	486.137.773
PPh Pasal 22/26	-		613.193.020	-	613.193.020
PBB	-	-	15.710.119.705	9.953.807.732	5.756.311.973
Sektor Aktif	-	-			
Bagian Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			14.330.274.608	9.953.807.732	4.376.466.876
Bagian Daerah Pasca Bagi	-				
Dampak Kebijakan Pemerintah	-		21.956.697		21.956.697
Sektor Kebijakan Pemerintah		-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	-
Biaya Pemungutan Bea Migas	-				
Biaya Pemungutan Bea Migas	-	-	1.191.011.496		1.191.011.496
Biaya Pemungutan Pasca Bagi		-	-	-	-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21		-	686.632	-	686.632
Biaya Pemungutan PPh Pasal 22	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-				
CHT		-	-	-	-
SDA		6.771.260	82.076.868.640	-	82.076.868.640
Migas			1.398.510.302	-	1.398.510.302
Migas Bagi Hasil	-		1.317.971.241		1.317.971.241
Migas Jenis 0,5%	-	-	81.060.015		81.060.015
Migas Jenis Selain Kondisi Khusus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi Bagi Hasil Blok Khusus	-			-	-
Minerba	-		31.377.428.307		31.377.428.307
Landrent	-		441.915.020		441.915.020
Royalti		-	30.935.482.959		30.935.482.959
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Produksi			-	-	-
Iuran Tetap	-				
Setoran Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan		6.771.260	-	-	-
DR		-	-	-	-
IUPHHBK	-				
PSDH	-	6.771.260			
Perikanan		-	-		
Cukai Tembakau		6.771.260	49.769.108.672	9.953.807.732	39.815.300.939

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Hulu Sungai Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	Alokasi DBH TA 2020	KB DBH TA 2020	Penyaluran DBH Sesuai Peraturan TA 2020 (KMK No. 27/KM.7/2021)	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	29.535.800.261		7.838.722.102	21.521.498.159	40.670.756
PPh	3.611.494.016		1.461.056.600	1.440.943.716	-
PPh Pasal 21	3.635.734.617	-	1.482.906.500	1.251.032.737	-
PPh Pasal 23/26	230.577.399	-	58.649.900	197.050.487	
PBB	20.579.107.911		3.317.153.302	25.072.550.009	40.320.756
Bea Ba	1.191.368.999		203.089.700	1.429.210.299	
Bagian Daerah Pajak	83.564.693		102.613.103		30.764.621
Bagian Daerah Pajak Migas	710.648.691	-	2.451.[illegible].500	16.595.328.730	-
Bagian Daerah Pajak BLU	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan	35.183.165		3.217.830	31.033.369	
Bagian Daerah Perikanan	2.212.817.094		711.579.920	1.501.137.251	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.599.207	-	3.604.000	908.994.707	-
Biaya Pemungutan Migas	2.083.743	-	3.458.050	-	1.536.197
Biaya Pemungutan Non Migas	721.107.123		41.212.400	619.391.724	
Biaya Pemungutan Sektor Pajak					
Biaya Pemungutan PBB Migas	1.484.505	-	146.300	258.605	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	98.850.945	-	15.206.320	80.038.787	-
Biaya Pemungutan Perikanan	7.180.077		28.400	6.901.817	
CHT	621			621	-
SDA	183.4[illegible].[illegible]72	29.141.019.811	13.194.701.[illegible]76	-	36.167.754.079
Migas	-	949.453.402	9.271.300	-	251.734.700
Minyak Bumi 15%	-	934.049.402	8.872.300	-	243.614.730
Minyak Bumi 0,5%		15.404.000	399.000		8.120.020
Minyak Bumi dibagi Rata Daerah					
Gas Bumi 30%	-				-
Gas Bumi 6,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dibagi Rata Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Minerba	-	24.505.654.217	12.817.035.776		37.770.719.993
Landrent		17.[illegible].350	61.[illegible].926		921.[illegible].851
Royalti		21.1.[illegible].[illegible]5.2	12.7[illegible].[illegible].738		37.[illegible].[illegible].[illegible]2
Panas Bumi	-				-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Pelorasi Daerah Penghasil					
Kehutanan	9.392.120		29.[illegible].[illegible]70		1.[illegible].[illegible]72
PSDH	-	-	-	-	-
DBHPH	-	-	-	-	-
PSDH	9.202.127		29.[illegible].[illegible]50		1.[illegible].[illegible]3
Perikanan	189.[illegible].[illegible]93		310.[illegible].[illegible]20		1.[illegible].[illegible]30
Grand Total	58.[illegible].[illegible].[illegible]39	29.141.019.811	18.[illegible].[illegible].[illegible]76	2[illegible].[illegible].[illegible]36	36.[illegible].[illegible].[illegible]57

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Hulu Sungai Tengah

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (KMK No. 167/KM.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 373/KM.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 373/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
PajAk	-		1.302.435.638	1.023.457.381	278.978.257
PPh	-		1.027.834.56	227.856.381	
PPh Pasal 21	-		410.710.093	42.853.693	
PPh Pasal 21/20	-	-	257.177.611	257.177.611	-
PBB	-	-	91.950.760	-	91.950.760
Dari Kota	-	-			-
Bagian Daerah Utara	-		-		
Bagian Daerah Non Migas	-		33.474.933	-	33.474.933
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi		-		-	-
Bagian Daerah Perkebunan		-			-
Bagian Daerah Perkebunan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-		-	-	
Bagian Pertambangan Migas		-		-	
Bagian Pertambangan Non Migas		-	1.116.667	-	15.867
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-		-		-
Bagian Pertambangan Perkebunan	-		-	-	
Bagian Pertambangan Perkebunan		-		-	-
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya		-		-	-
Cukai	-		-		-
DBH	-	6.761.203	32.787.363.000	9.667.042.070	23.120.320.930
Migas	-		1.308.710.367	782.066.403	716.787.302	
Minyak Bumi 15%		-	1.212.974.281	812.603.084	453.371.197
Minyak Bumi 0,5%		-	11.010.010	11.010.010	38.137.653
Minyak Bumi dalam rangka Otsus	-		-		-
Gas Bumi 15%	-		-	-	
Gas Bumi 0,5%	-		-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-		-	-	
Minerba	-		31.958.652.633	8.818.976.625	23.139.676.008
Landasan	-		-		-
Royalti			31.480.652.633	8.818.976.625	22.661.676.008
Panas Bumi	-		-	-	
Iuran Tetap	-		-	-	
Iuran Tetap		-		-	
Setoran Bagian Pemerintah		-			-
Kehutanan		6.761.203	-		
DR	-		-	-	
PSDH	-	-		-	
PSDH		6.761.203			-
Perikanan			-		-
Grand Total	-	6.761.203	37.642.687.971	10.694.506.701	26.947.781.270

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Hulu Sungai Tengah

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi Definitif TA 2020	Alokasi Definitif TA 2020	Pengalokasian DBH Semester I TA 2020 (Lebih Salur/Kurang Salur)	Realisasi TA 2020 yang belum dialokasikan	Realisasi TA 2020 yang telah dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2-4)	(6)
Pajak	5.041.617.027	-	2.504.271.350	3.073.535.504	35.637.723
PPh	2.760.498.587	-	631.343.720	1.727.154.867	-
PPh Pasal 21	2.763.877.615	-	1.535.317.820	1.020.660.073	-
PPh Pasal 25/29	17.121.072	-	79.026.430	97.094.642	-
PBB	1.261.118.030	-	370.027.660	1.910.125.369	35.637.723
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.991.959.946	-	295.260.750	1.730.270.296	-
Bagian Daerah Cukai Hasil Tembakau	64.854.795	-	9.583.960	-	5.735.703
Bagian Daerah Sumber Daya Alam	8.414.820	-	7.378.460	4.036.702	-
Bagian Daerah Cukai Hasil Ekspor	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perimbangan Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sebelum Tahunnya	216.350.227	-	7.560.701	208.729.507	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.464.390	-	5.076.600	-	1.200.030
Dana Penyesuaian dan Otsus Migas	2.130.917	-	79.200	124.717	-
Dana Tambahan dan Percepatan Otsus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Infrastruktur	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Perbendaharaan	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Infrastruktur Lainnya	7.129.617	-	291.909	6.937.947	-
DTF	504	-	-	624	-
SDA	36.764.[illegible]	15.144.961.573	4.568.091.225	-	33.63[illegible].956
Migas	[illegible]	747.[illegible].600	9.077.500	-	23[illegible].750
Minyak Bumi 15%	[illegible]	231.642.[illegible]	2.072.300	-	2[illegible].[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	[illegible]	7.921.202	299.050	-	8.120.252
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	-
Nonmigas	[illegible]	14.[illegible].[illegible].125	8.[illegible].[illegible].[illegible]	-	21.[illegible].[illegible].829
Pertambangan Umum	[illegible]	128.[illegible].[illegible]	17[illegible].[illegible]	-	115.[illegible].[illegible]
Panas Bumi	[illegible]	[illegible].[illegible].325	8.[illegible].[illegible].[illegible]	-	22.[illegible].[illegible]
Pertanian	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
DR	-	-	-	-	-
LPEI	-	-	-	-	-
PNBP	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
DAK Fisik	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Total	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Hulu Sungai Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LS s.d TA 2019 (PMK No. 75/PMK.07/2021)	Bagi Hasil s.d. TA 2019 (KEP-[illegible])	Sisa LS s.d TA 2019 (LS-LH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-		608.070.644	608.070.644	-
PPh			608.070.644	608.070.644	
PPh Pasal 21			30.660.832	30.660.832	
PPh Pasal 23/26	-		577.409.811	577.409.811	
PBB	-	-			-
Dari Kota	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasca Bea Perolehan	-				
Dalam Daerah Perhitungan		-			-
Dalam Daerah Pembebanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya				-	
Biaya Pemungutan Migas	-				
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pasca Bea		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhitungan					
Biaya Pemungutan Pembebanan	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-		-
BPHTB		-	-	-	-
SDA		6.772.272	35.747.067.740	6.057.405.102	29.696.320.088
Migas			1.135.342.708	1.135.342.708	770.418.390
Minyak Bumi 15%	-		1.064.717.824	1.064.717.824	590.041.390
Minyak Bumi 0,5%	-	-	56.381.844	56.706.194	53.676.610
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Otsus Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 3,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-		29.042.679.262	3.016.062.394	26.026.616.868
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	53.621.578.520	6.848.593.034	26.074.016.168
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi	-				
Setoran Sanksi Pelanggaran	-	-			
Kehutanan		6.772.272	-	-	-
PSDH				-	
IHPH	-				
PSDH	-	6.772.272	-		-
Perikanan		-	-	-	-
Pungli Pusat		6.772.272	86.357.07 [illegible]824	10.595.[illegible]75.746	26.[illegible]20.088

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Hulu Sungai Utara

(Dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran TA DBH Sampai dengan 28 Juni 2021 (KMK No. 347/KMK.07/2021)	KB TA 2021 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	5.097.320.103	-	4.558.908.120	3.506.269.689	3.437.275
PPh	2.486.090.069	-	1.240.847.400	1.534.239.069	-
PPh Pasal 21	2.176.378.443	-	1.288.728.800	1.731.949.643	-
PPh Pasal 25/29	240.333.746	-	61.014.480	179.319.266	-
PBJT	2.723.752.780	-	3.141.304.320	2.211.231.000	3.137.275
Pkg. Bea	1.091.050.958	-	455.589.960	1.726.270.250	-
Bagian Daerah Migas	220.696.121	-	135.357.720	-	3.437.275
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasca Bea	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbatasan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	366.133.721	-	98.736.600	268.402.154	-
Bagian Daerah Sektor Tertentu	2.153.669.037	-	8.904.360	226.694.707	-
Biaya Pemungutan Migas	- 303.46		1.303.400		271.996
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pasca Bea	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perbatasan	180.470.970	-	1.201.200	1.000.979	-
Biaya Pemungutan Sektor Tertentu	7.150.017	-	200.000	5.959.917	-
CHT	624	-	-	624	-
PHT	155.150.990	15.028.772.000	8.525.077.078	-	35.402.351.956
Migas	-	212.760.190	9.271.300	-	73.738.630
Minyak Bumi 15%	-	204.649.490	8.912.300	-	243.677.190
Minyak Bumi 3,5%	-	7.871.000	269.300	-	5.121.000
Minyak Bumi dari Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 6,5%					-
Gas Bumi dalam rangka Otsus	-				-
Panas Bumi	-	14.772.543.478	8.168.620.000		22.962.192.178
Landaan	-	-			
Royalti		14.772.543.478	8.168.620.000		22.962.192.178
Pajak Bumi			-	-	
Atas Tanah			-	-	-
Lainnya	-				-
Sebesar Bagian Pemerintah	-	-			
Cukai		10.743.683	32.961.726	-	31.959.726
BP			-		-
PUPH	-				-
PBBN	-	10.743.683	29.903.726		31.810.726
Perikanan	109.190.589	-	516.981.000		1.148.000
Grand Total	9.917.020.173	15.026.745.201	10.596.673.173	3.506.269.689	35.402.351.956

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kotabaru

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar	Kurang Bayar	Lebih Bayar s.d. TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2020)	Penyesuaian Lebih Bayar s.d. TA 2019 (SMS No. 3/KM.7/2020)	Sisa Lebih Bayar s.d. TA 2019 (PMK No. 7/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			770.213.507	770.213.507	-
PPh			770.213.507	770.213.507	-
PPh Pasal 21	-		72.056.212	72.056.212	-
PPh Pasal 25/29	-	-	698.277.295	698.277.295	-
PPN		-	-	-	-
Pajak Bumi			-	-	-
Bagian Daerah Migas				-	-
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Hasil Hutan	-	-			
Bagian Daerah Perikanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-				
Bagian Pemerintah Migas	-	-			
Bagian Pemerintah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi			-	-	-
Bagian Pemerintah Perikanan	-				
Bagian Pemerintah Kehutanan	-	-			
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya		-	-	-	-
PPh			-	-	-
BPHTB		40.493.121	178.037.879.237	29.101.237.721	135.775.649.813
Migas	-	-	1.320.320.305	1.101.812.705	718.507.600
Sebesar Dana 15%	-	-	1.786.474.524	1.071.010.071	672.271.250
Minyak Bumi 3,5%		-	58.69 .44	58.769. 94	21 .7 .350
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi 6%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Panas Bumi	-	-	177.1 .6 3.439	27.0 1.4 4.016	150.094.209.423
Pertambangan		-	1.598.8 1.357	-	1.598.8 1.357
Perikanan			175.5 3.739.015	27.032.20 .356	153.481.437.659
Pertambangan Umum				-	-
Iuran Tetap	-				
Iuran Eksplorasi	-	-			
Iuran Eksploitasi					
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	-	-	
Kehutanan		40.493.121	-	-	-
PSDH	-				-
DR	-	-			
IHPHT		0.693.421	-	-	
Pertambangan			-	-	-
Pertambangan Umum			-	-	-
Pertambangan Minyak Bumi					
Pertambangan Gas Bumi					
Pertambangan Panas Bumi					
Perikanan			-	-	-
Pungutan Perikanan					
Grand Total		40.193.121	179.717.203.237	29.0 1.1 0.721	58.775.649.813

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kotabaru

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DI TAHUN 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran TA 2021 Sebelum PMK 7/2021	PMK TA 2020 yang telah disalurkan	PMK TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10=7+9)	(11)
Pajak	37.807.378.833	-	9.385.505.500	29.940.032.705	6.026.588
CHT	3.503.071.037	-	3.326.606.900	361.362.137	-
PPh Pasal 21	3.211.908.773		3.138.878.000	173.030.773	-
PPh Pasal 25/29	276.911.064		70.628.900	206.282.164	
PBB	34.071.541.652		6.126.901.000	28.201.084.565	6.026.588
Bagi Hasil	1.891.033.933		265.669.700	1.625.270.299	
Dalam Daerah Migas	701.797.877	-	76.937.900	-	61.864.695
Bagian Daerah Non Migas	10.267.749.177		1.624.741.900	12.460.697.255	-
Bagian Daerah Pasca Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan	923.915.542		114.102.800	911.850.742	
Dalam Daerah Perkebunan	15.555.764.777	-	3.497.905.200	11.961.459.577	-
Dalam Daerah Sumber Daya	1.138.945.807	-	2.135.700	157.746.657	-
Biaya Pemungutan Migas	3.402.012		3.565.100	-	2.730.088
Biaya Pemungutan Non Migas	516.474.345		60.092.500	548.570.176	
Biaya Pemungutan Pasca Bumi	-	-			
Biaya Pemungutan Pertambangan	8.076.200	-	6.330.500	2.364.438	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	692.505.107		155.411.200	537.393.430	
Biaya Pemungutan Sumber Daya	6.625.447		721.700	5.927.717	
CHT	63-	-	-	631	-
PDA	1.063.779.171	12.037.444.213	14.3 1.630.500	614.567.692	35.430.021.3 -
Migas		2.242.662.700	9.071.500	-	251.734.700
Minyak Bumi 15%		221.627.700	8.072.300		213.611.400
Minyak Bumi 0,5%	-	7.921.700	294.020		8.120.700
Minyak Bumi Dalam Negeri (DMO)	-	-	-		-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi Dalam Negeri (DMO)		-	-	-	-
Minerba	1.494.133.912	11.791.080.913	13.9(1.337.400	614.567.702	25.371.059.675
Iuran Tetap	1.6- 133.614		659.568.050	617.037.702	
Royalti	-	1.754.980.622	13.3(6.979.350		25.371.959.675
Pasca Tambang		-	-	-	-
Dalam Produksi		-	-	-	-
Lainnya					-
Setoran Pegawai Kantor Pusat	-				
Kehutanan	21.-63.379	-	39.023.350		15.137.930
IHH		-	-	-	-
PSDH				-	-
DBHT	2(.-39.379		39.023.350		15.137.930
Perikanan	155.186.060		316.961.300		177.675.020
Grand Total	39.020.297.709	12.037.4- 2.3	33.656.320.150	29.954.901.085	35.453.641.297

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tabalong (dalam rupiah)

JENIS DBH	KPPN [2]	KUA [3]	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021) [4]	Realisasi LB s.d TA 2020 (PMK No. 3/PMK.7/2021) [5]	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021) [6]=[5]-[4]
Pajak		-	563.317.924	1.669.397.924	-
PPh		-	563.317.924	1.669.397.924	-
PPh Pasal 21			471.583.267	1.071.583.267	
PPh Pasal 25/29			91.734.657	597.814.657	
PBB	-				
Bagi Rata	-	-	-		-
Bagian Daerah Sagita		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasca Bagi					
Bagian Daerah Perbatasan	-				
Bagian Daerah Perbatasan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-			-
Bagian Pemerintah Pasca Bagi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perbatasan			-	-	
Bagian Pemerintah Perbatasan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-				
DAK	-	-	-	-	-
DBHCHT		21.649.269	127.734.573.581	36.907.054.647	90.137.593.064
Migas			17.891.042.197	10.379.028.697	7.512.013.500
Minyak Bumi 15%	-		17.310.971.281	10.047.402.681	7.263.568.600
Minyak Bumi 0,5%	-		580.070.916	331.626.016	248.444.900
Bagian Daerah dari Alokasi Migas	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi Bagian Daerah Penghasil					
Minerba	-		108.210.087.581	26.527.772.970	81.682.314.611
Landrent	-		957.085.605		957.085.605
Iuran Tetap	-	-	106.279.959.329	26.527.772.970	81.665.586.359
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Produksi		-	-	-	-
Iuran Tetap	-				
Bagian Daerah Penghasil	-				
Kehutanan	-	2.149.269	-	-	-
IHT		-	-	-	-
PHTNP					
PSDH	-	2.149.269			
Perikanan	-	-	-	-	-
Jumlah Total		2.149.269	28.797.397.253	38.576.452.571	90.137.593.064

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tulsalong

(dalam rupiah)

URAIAN	KB Dalam TA 2020	LB Dalam TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan PMK 205/PMK.07/2020	KB TA 2020 yang Belum Disalurkan	LB TA 2020 yang Telah Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	25.073.475.537	120.203.220	3.531.785.000	19.223.020.970	593.480.920
PPh	3.861.369.707		2.672.139.540	1.189.230.167	-
PPh Pasal 21	3.736.425.708		2.307.024.720	1.109.119.208	-
PPh Pasal 25/29	215.143.791	-	75.792.970	139.950.909	-
PBB	24.791.967.961	120.203.220	5.919.036.300	19.045.651.661	593.480.920
Bagi Hasil	1.991.939.933		265.669.100	1.726.070.208	
Penjualan Tanah dan Bangunan	17.119.826.056		4.177.745.500	12.941.971.105	
Bagian Daerah Hasil Migas	5.220.422.122		1.651.919.100	1.510.990.022	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	-	214.311.724	280.000.100	-	277.431.47
Bagian Daerah Pertambangan	822.058.727		367.130.300	417.287.693	
Bagian Daerah sektor Lainnya	2.130.000.017		8.604.300	250.911.707	-
Bagian Dana Tunjangan Migas	589.230.000	-	127.745.200	461.150.050	-
Bagian Kehutanan dan Pertambangan	107.479.854	-	56.187.200	51.292.654	-
Bagian Pertanggungan Panas Bumi	-			-	
Bagian Pertanggungan Perikanan		2.229.192	10.230.300		92.454.000
Bagian Pertanggungan Pertambangan	55.347.010	-	10.000.700	19.692.310	-
Bagian Pertanggungan Sektor Lainnya	7.156.647	-	23.200	6.793.347	-
CHT	624			624	
DAK	961.782.720	95.564.241.068	10.731.174.100	376.430.000	15.962.539.268
Migas		2.753.576.400	105.200.300		2.538.867.900
Minyak Bumi 15%		2.664.776.400	101.004.300	-	2.760.017.700
Minyak Bumi 0,5%	-	88.800.000	3.000.000	-	92.221.200
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	
Gas Bumi 30%	-			-	
Gas Bumi 0,5%			-		-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		-
Pajak	513.996.240	92.823.246.668	19.190.270.073	576.530.960	112.217.058.835
Lainnya	799.396.756	-	213.510.750	576.552.966	
Royalti	-	90.823.246.668	18.976.759.320	-	112.217.058.835
Dana Desa			-		
Tunai Produksi			-		-
Non Tunai		-	-		-
Sanksi Pajak Pertambangan		-		-	-
Kehutanan	-	6.369.202	29.599.030	-	120.020.193
PSDH			-		
DBHDR		-	-		-
PSDH	-	6.369.202	121.070.327	-	122.010.795
Perikanan	30.786.380		516.961.070	-	157.694.020
Grand Total	26.042.258.778	95.930.750.120	29.567.944.950	19.002.842.018	16.562.430.191

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Keb. Tanah Laut

(dalam rupiah)

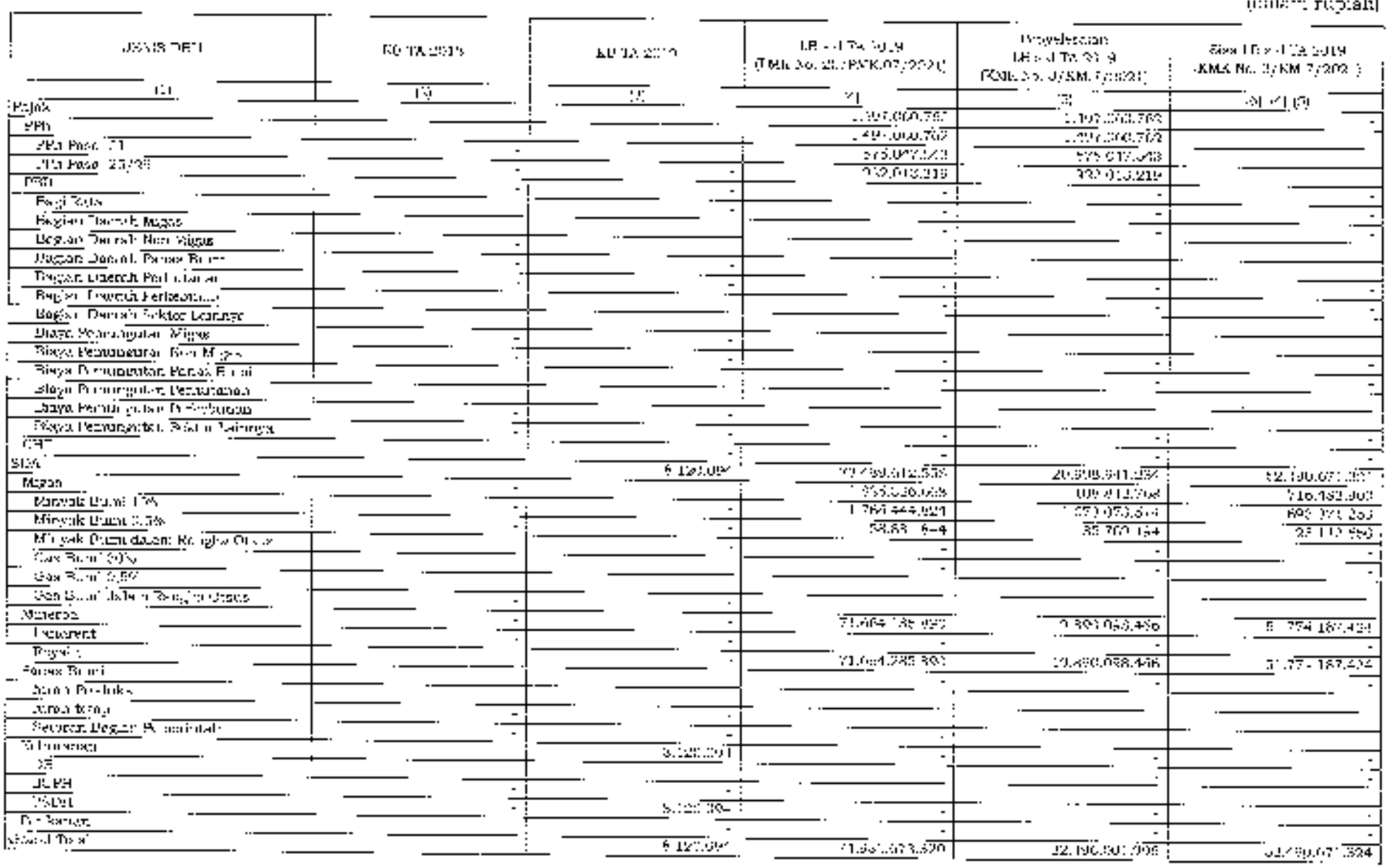

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tanah Laut

(dalam rupiah)

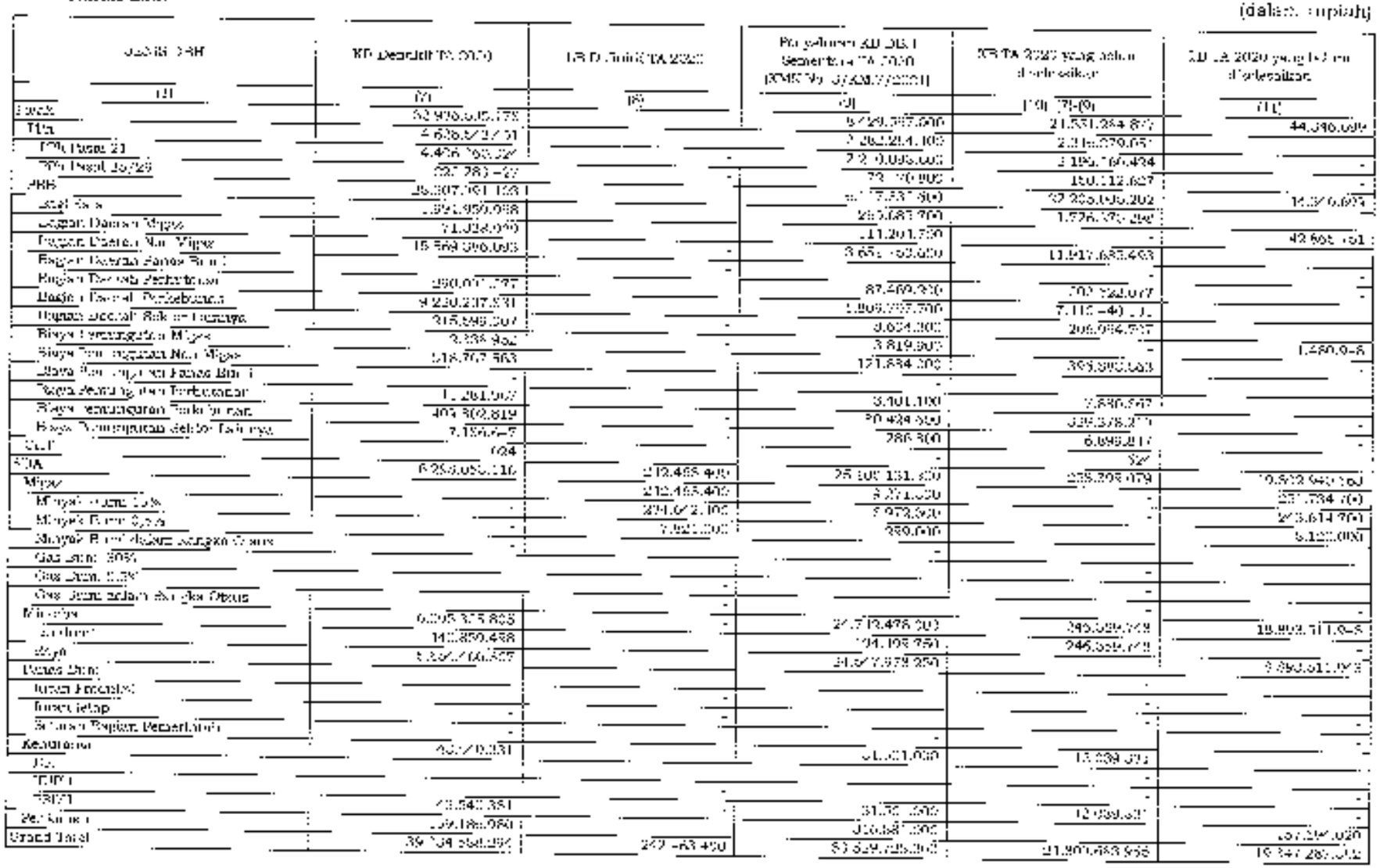

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tapir

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	DBH yang TA 2019 (PMK No. 28/PMK.07/2021)	Penyesuaian DBH yang TA 2019 (KEP. No. 3/KM.7/2021)	Sisa DBH yang TA 2019 (KEP. No. 3/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4]-[5]
Pajak	-		1.519.127.362	1.519.127.362	-
PPh		-	1.519.127.362	1.519.127.362	-
PPh Pasal 21		-	692.771.530	692.771.530	-
PPh Pasal 25/29			826.355.832	826.355.832	-
PBB	-				
Bag. Pusat	-				
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 21			-	-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29					
Bagian Daerah Perkebunan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-	-	-
Bagi Hasil Migas		-	-	-	-
Bagi Hasil Non Migas	-				
Bagi Hasil Pasal 21	-				
Bagi Hasil Pasal 25/29		-	-	-	-
Bagi Hasil Perkebunan			-	-	
Bagi Hasil Sektor Lainnya	-				
PBB	-	-			
SDA		7.169.543	49.441.451.136	19.605.103.697	30.577.364.049
Migas		-	1.823.526.648	106.842.758	716.683.890
Minyak Bumi 15%			1.704.414.824	1.078.073.574	626.341.250
Minyak Bumi 0,5%	-		119.111.824	28.769.184	90.342.640
Setoran Bunga dr Jasa Giro Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Hasil Pengolahan Otsus		-	-	-	-
Minerba			47.617.924.488	17.770.260.939	29.847.663.549
Landrent	-				
Royalti	-		47.617.924.488	17.770.260.939	29.847.663.549
Pasal Lain	-	-			
Panas Bumi		-	-	-	-
Tarif Progresif			-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	11.169.543			
IHP		-	-	-	-
PSDH		-	-	-	-
Perikanan	-	7.169.543			
Grand Total	-	7.169.543	50.950.592.149	20.384.276.059	30.575.364.089

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pupin

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PP No.35/2020 TA 2020	LB Rebasa TA 2020	Penyaluran (PMK 101/PMK.07/2020 Sebelum TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dapat dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	21.240.715.206	-	8.130.750.020	13.025.352.573	40.244.262
PPh	2.870.642.200	-	835.560.020	1.935.082.364	-
PPh Pasal 21	2.082.212.611	-	587.662.620	1.087.653.364	-
PPh Pasal 25/29	384.209.612	-	77.997.400	172.132.012	-
PPN	18.693.972.376	-	6.215.141.000	12.121.203.382	19.271.264
Reg. Kota	59.350.306	-	235.580.720	1.726.270.206	-
Bagian Daerah Migas	77.592.585	-	24.027.050	-	47.524.12
Bagian Daerah Non Migas	29.660.735.131	-	4.835.336.000	24.824.02[illegible]	
Bagian Daerah Dana Reboisasi					
Bagian Daerah Dana Bagi Hasil	15.624.627		7.207.100	8.017.527	
Bagian Daerah PPh 21/26	5.68[illegible] 379.720	-	1.050.611.900	4.630.767.820	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.5[illegible].037	-	8.604.301	206.694.707	
Bagian Pemerintah Migas	2.005.200		4.127.700		1.610.[illegible]
Bagian Pemerintah Non Migas	998.937.82[illegible]		161.109.108	820.[illegible].281	
Biaya Pemungutan Pusat Hasil	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	520.078	-	225.600	287.[illegible]	-
Biaya Pemungutan Perpajakan	252.511.0[illegible]		47.[illegible].100	205.[illegible]	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible] 96.647		240.300	3.[illegible]	
Opsen	624	-		624	-
SDA	[illegible].[illegible]7.[illegible]20	3[illegible].[illegible]78.[illegible]69.860	2.004.934.[illegible]	-	51.[illegible]36.[illegible]32.[illegible]70
Migas		242.[illegible]6.[illegible]30	9.[illegible].300		23[illegible].[illegible]73.760
Minyak Bumi 15%		2[illegible].[illegible]12.[illegible]30	2.[illegible].300		[illegible]15.[illegible]11.[illegible]00
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]21.020	290.020		[illegible].[illegible]20.702
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Pertambangan		31.[illegible]0.[illegible]99.[illegible]63	16.[illegible]7.[illegible]20.[illegible]30		3[illegible].[illegible]93.[illegible]66.[illegible]03
Panas Bumi	-	[illegible]41.[illegible]81.[illegible]78	101.[illegible].[illegible]50		[illegible]19.[illegible]01.[illegible]29
Royalti	-	24.[illegible]9[illegible].[illegible]82	16.[illegible]2[illegible].[illegible]30		50.[illegible]4.[illegible]34.[illegible]03
Pajak Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
Kehutanan		-	-	-	-
Perikanan					
Pertambangan Panas Bumi					
Sumber Daya Air	15.[illegible]87.760	-	20.[illegible]12.[illegible]02	-	2.[illegible]4.940
DAK	-	-	-	-	-
Fisik			-		
Reguler	15.[illegible]87.760		20.[illegible]12.[illegible]02		2.[illegible]4.940
Perikanan	50.[illegible]6.[illegible]30	-	[illegible]10.[illegible]0[illegible].[illegible]00		[illegible]57.[illegible]91.[illegible]20
Grand Total	[illegible].[illegible]38.[illegible]00.[illegible]34	3[illegible].[illegible]75.[illegible]82.[illegible]60	[illegible].[illegible]19.[illegible]0[illegible].[illegible]02	35.[illegible]23.[illegible]52.[illegible]78	51.[illegible]3.[illegible]36.[illegible]09

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Banjarbaru

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KURANG BAYAR TAHUN 2019	KURANG BAYAR TAHUN 2020	LEBIH BAYAR TAHUN 2019 PMK No. 28/PMK.07/2021	Penyelesaian LEBIH BAYAR TAHUN 2020 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TAHUN 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
Pph 21	-	-	1,639,437,762	1,639,437,762	-
PBB			1,639,437,762	1,639,437,762	
20% Dasar Pengenaan			165,636,436	165,636,436	
80% Dasar Pengenaan			1,473,792,326	1,473,792,326	
BPHTB	-				-
Hasil Kota	-	-		-	-
Bagian Daerah Kota	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kab. Migas					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Lainnya	-				-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pemerataan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas	-				-
Biaya Pemungutan Pajak PBB	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak BPHTB		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perdesaan					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-				-
DBH	-	-	-	-	-
SDA		6,382,980	4,256,371,944	10,640,266,171	30,626,633,182
Migas			725,256,616	1,435,812,702	710,484,906
Minyak Bumi 15%			1,706,715,824	1,706,715,824	690,000,000
Minyak Bumi 6%	-		20,251,616	20,251,616	20,000,000
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%			-	-	
Gas Bumi Bagian Pemerintah					
Minerba			33,451,574,376	9,261,423,843	29,927,121,223
Penalti	-				-
Asuransi	-	-	59,451,644,376	5,261,423,843	29,927,121,223
Panas Bumi		-	-	-	-
Jasa Konsultasi		-	-	-	
Pemeliharaan					
Bunga Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan	-	6,382,980	-	-	-
DR		-	-	-	-
PSDH					
PSDH	-	6,382,980			-
Asuransi	-	-	-		-
Grand Total		6,382,980	71,316,309,026	12,279,720,673	60,626,633,185

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Banjarbaru

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Tahun TA 2020 (KMK No. 439/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum tersalurkan	LB TA 2020 yang belum tersalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	13.244.149.616		3.643.293.020	9.600.856.596	7.160.685
PBB	6.095.685.185		3.324.234.790	2.771.450.395	
PPh Pasal 21	6.334.459.490		3.103.834.000	3.151.815.490	
PPh Pasal 25/29	387.038.105	-	97.150.000	289.888.105	
BPHTB	1.292.520.967	-	409.456.820	1.456.464.852	54.660.685
Bagi Hasil	1.961.954.909		268.660.720	1.720.294.209	-
Bagian Daerah dari Migas	79.850.542		58.921.420		22.142.772
Bagian Daerah dari Panas Bumi	98.519.250		68.368.330		30.850.920
Bagian Daerah Dana Reboisasi	-	-	-	-	
Bagian Daerah PNBP Kehutanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Umum	2.783.549.917		141.380.300	226.991.707	-
Biaya Pemungutan Migas	1.038.787	-	1.682.350		7.643.563
Biaya Pemungutan Pertambangan Panas Bumi	1.270.672	-	2.281.520	-	1.010.848
Biaya Pemungutan Perikanan				-	-
Biaya Pemungutan PBB Kehutanan	-				
Biaya Pemungutan Pertambangan		-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	1.156.077	-	736.703	419.374	-
DBHT	7.994		-	4.794	-
SDA	359.370.573	15.316.000.428	8.870.330.745	199.030.000	23.276.991.416
Migas	-	12.146.000	9.427.200		261.787.750
Minyak Bumi 15%		734.940.000	8.977.300	-	141.914.000
Minyak Bumi 0,5%		7.971.000	906.202	-	1.192.000
Minyak Bumi Dalam Rangka DMO				-	-
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka DMO	-	-			
Minerba	359.370.391	14.570.940.428	8.860.568.676	199.030.000	23.134.991.416
Panas Bumi	203.878.091	-	3.048.526	90.282.000	-
Reguler		14.570.940.428	8.857.520.150	-	23.069.181.497
Dana Reboisasi	-				
Dana Produksi	-				
Dana Hutan		-	-	-	-
Sebagian Bagian Pemerintah		-	-	-	-
PBB Lainnya	16.209.302		21.813.450	-	5.810.018
DR	-				
DBH		-	-		-
Lainnya	16.209.302	-	21.813.450	-	5.810.018
Perikanan	156.190.980		317.281.000	-	137.804.020
Grand Total	13.933.509.519	15.316.000.428	12.163.811.215	9.284.916.592	23.580.206.140

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Banjarmasin

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Dajak			15.353.451.285	15.353.451.285	
PPh			15.353.451.285	15.353.451.285	-
PPh Pasal 21	-		1.172.176.116	1.172.176.116	-
PPh Pasal 25/29	-	-	14.365.175.873	14.365.175.873	-
PBB		-	-	-	
Dari Kota			-		
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan	-				-
Bagi Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagi Pemerintah Non Migas		-	-		
Bagi Pemerintah Panas Bumi					
Bagi Pemerintah Pertambangan	-				-
Bagi Pemerintah Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagi Pemerintah Bidang Perikanan		-	-	-	
PPh 21					
PBB		9.890.878	27.204.070.091	1.564.120.160	25.645.909.021
Migas	-	-	1.550.640.973	382.056.103	716.483.930
Minyak Bumi 15%	-	-	1.546.974.134	353.623.034	705.271.250
Minyak Bumi 0,5%		-	51.366.018	28.433.366	23.112.650
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-			-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	25.615.502.779	687.350.058	24.928.152.721
Landrent		-	-		
Royalti			25.615.502.779	687.350.058	24.928.152.721
Panas Bumi					
Iuran Tetap	-			-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-		
Kehutanan		9.890.878			
DR	-				
PSDH	-	-	-	-	-
Perikanan		9.890.878	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau					
Grand Total		9.890.878	127.101.494.337	17.269.757.778	50.645.909.021

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Banjarmasin

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DBH DBF Semester I TA 2020 (PMK Nomor 57/PMK.07/2020)	KB TA 2020 yang telah diselesaikan	LB TA 2020 yang telah diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]=[3]-[4]
Pajak	30.039.045.263	-	8.352.580.630	1.738.467.450	38.004.640
PBB	17.796.080.938	-	8.473.384.000	9.315.266.615	-
PBB Pasal 21	5.536.[illegible]	-	7.581.[illegible]	7.346.650.612	-
PBB Pasal 25/29	2.260.[illegible]	-	891.066.000	1.369.[illegible]	-
BPHTB	2.280.330.272	-	379.195.000	1.901.[illegible]	39.001.810
Bagi Rata	1.091.[illegible]	-	181.[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]	-	101.279.630	-	37.761.652
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Dampak Daerah Pabrik Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	[illegible]	-	2.[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perikanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
CHT	[illegible]	-	-	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Migas	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 0,5%	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reboisasi	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Rekening : (dalam rupiah)

JENIS DBH	KPA TA 2018	KPA TA 2019	KPA TA 2020 (PMK No. 2/PMK.07/2021)	Perpelesaian KPA TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Total KPA TA 2020 (PMK No. 8/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4) (5)
Pajak	-		739.058.111	739.058.111	
PPh		-	704.974.111	704.974.111	
PPh Pasal 21		-	165.631.459	165.631.459	-
PPh Pasal 25/29		-	539.284.652	539.284.652	-
PBB	-		-	-	-
Bagi Rata	-				
Bagian Daerah Migas	-	-			
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 21			-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-			-	-
Bagian Daerah Kehutanan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-		
Bagi Rata Penerimaan Migas		-	-	-	-
Bagi Rata Penerimaan Non Migas	-			-	-
Bagi Rata Penerimaan Pasal 21	-				
Bagi Rata Penerimaan Perkebunan		-	-		
Bagi Rata Penerimaan Kehutanan			-	-	
Bagi Rata Penerimaan Sektor Lainnya	-		-	-	-
Cukai	-				
KPA		7.566.484	59.530.141.647	70.140.527.090	129.677.219.561
Migas		-	1.786.864.439	1.097.[illegible]269	1.969.734.708
Minyak Bumi 15%			1.703.780.878	1.053.057.573	1.741.678.405
Minyak Bumi 3,5%	-		83.123.760	57.067.766	59.053.808
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%		-			
Gas Bumi 6,5%		-	-		
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba			56.043.267.209	82.368.803.741	124.30[illegible]484.86
Landaian	-			-	-
Royalti	-		56.043.267.209	82.368.803.741	121.301.[illegible]36
Panas Bumi		-			
Iuran Produksi		-	-		
Iuran Tetap				-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-			-	-
Kehutanan	-	7.566.401			
DR		-	-		
IIUPH		-	-	-	-
PSDH	-	7.566.401		-	-
Perikanan	-				
Grand Total		7.566.484	160.263.049.762	94.180.861.191	129.124.219.561

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Balangar

(dalam rupiah)

Uraian Jenis	SK Definitif TA 2020	LS Desember TA 2020	Alokasi DBH Sementara TA 2020 (PMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dicairkan	LB TA 2020 yang belum dicairkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
Pajak	1.192.191.043		4.297.732.609	2.799.468.142	
PBB	4.974.011.092		1.923.149.930	3.150.821.562	
BPHTB Pasal 21	6.812.25 .856		1.776.782.290	1.059.199.566	
BPHTB Pasal 22 dan 23	151.750. 96	-	77.137.740	89.321.196	-
PDD	2.2 2.170.737	-	2.639.53 -(+)	3 -(+) 646 .37	-
Bagi Hasil	1.091.000.000	-	265.683.700	1.776.870.300	-
Bagian Daerah Migas	1.896.616.091		587.207.900	1.287.452.171	
Bagian Daerah Non Migas	7.665 .5 .		1.828.775.800	5.836.052.171	
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-		-	-
Dana Bagi Hasil Perkebunan		-	-	-	-
Bagian Daerah Tarif Progresif	115.107.122		13.575.600	102.531.522	
Bagian Daerah Sektor Tambang	215.599.027		6.601.300	208.097.727	
Biaya Pemungutan Migas	67.669.253	-	19.121.700	41.567.953	-
Biaya Pemungutan Non Migas	205.7 7.771	-	61.036.500	194.373.87	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah			-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	-				
Biaya Pemungutan Pertambangan	6.443.8 .9	-	1.350.150	1.501.9 .9	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.1 6 .47	-	256.620	6.403.347	-
DTF	22		-	22	
DBH	69.59 .302	09.29.129.316	27.967.07.330	113.9 .9.250	97.196.0 0.292
Migas	-	986.146 70	1.1 26.950		13.6 2.2 3
Minyak Bumi 15%	-	395.59 .40	4 74 .30	-	4 1.3 7.70
Minyak Bumi 0,5%		12.5 2.20	91.520	-	13.3 4.350
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	
Gas Bumi 50%					
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Mineral	720.035.775	09.360.707.614	25.634.523.250	2.959.550	96.3 .543.350
Landrent	60.0 3.7 5	-	3 .606.75	3.959.550	-
Royalti		09.360.707.614	25.030.932.703	-	96.313.543.350
Dana Reboisasi					
Luasan Produksi	-				
Luasan tetap	-	-	-	-	-
Deforestasi Daerah Penerimaan		-	-	-	-
Kehutanan	.75 .017		90.038.950		13 .53.703
PBB	-				
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	6.7 .017	-	90.038.950	-	13 .53.703
Pph Migas	1.8 152.990		3 6.851.000	-	157.6 .070
Grand Total	17.959 .63 .745	99.7 9.1 .4 .07	32.3 3.127.330	3 3.1 7.127.092	97.4 4.0 0.3 2

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tanah Bumbu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	ALT TA 2018	ALT TA 2019	LKPD TA 2018 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian TA 2018 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB/KB TA 2018 (KMK No. 3/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4] - [5]
Pajak	-		3.067.056.279	3.067.056.279	
PPh		-	3.067.056.279	3.067.056.279	
PPh Pasal 21		-	929.620.697	929.620.697	
PPh Pasal 25/29		-	2.137.435.582	2.137.435.582	-
PBB			-	-	-
Bagian Satu	-				
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas		-	-		
Bagian Daerah Pasal 21		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29				-	-
Bagian Daerah Perseorangan	-				
Bagian Daerah Gabungan		-			
Bagian Pemerintah Migas		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-			-	-
Bagian Pemerintah Pasal 21	-				
Bagian Pemerintah Perseorangan		-			
Bagian Pemerintah Gabungan			-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Tertentu			-	-	-
Cukai	-				
SDA	-	29.648.382	55.377.168.218	20.126.711.982	35.114.049.314
Migas		-	598.540.309	692.056.409	(93.516.100)
Minyak Bumi (35%)			1.536.372.984	865.697.384	670.675.600
Minyak Bumi (15%)	-		31.506.018	28.132.208	3.373.810
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Otonom	-				
Gas Bumi 69%	-	-			
Gas Bumi 0,5%		-			
Gas Bumi Bagian Pemerintah Otonom		-	-	-	-
Minerba			53.677.818.348	19.243.650.532	34.434.169.816
Landrent	-		366.078.005	366.078.005	-
Royalty	-		53.311.740.343	18.877.572.527	34.434.169.816
Panas Bumi	-	-			
Iuran Tetap/Eksplorasi		-	-	-	
Iuran Tetap		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan	-	29.648.382			
IHP	-	-			
PSDH		-	-	-	-
DR		29.648.382	-	-	-
Perikanan	-				-
Grand Total	-	29.648.382	58.377.403.227	23.193.767.261	35.114.013.316

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tanah Bumbu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	Kurang Salur TA 2020	LB Salur TA 2020	Perwalian KB DBH Sampai dengan TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
Pajak	56.590.149.346		18.120.000.000	49.017.000.000	42.820.000
PBB	8.477.752.782		2.720.487.000	6.214.200.782	
PBB Pasal 21	7.667.772.782	-	2.520.000.000	5.711.454.810	-
PBB Pasal 25/29	1.809.979.600	-	200.487.000	503.745.972	-
BHTB	38.021.591.242	-	15.399.474.000	47.672.746.024	47.820.000
Bagi Rata	1.261.638.978		203.000.000	1.730.270.018	
Bagian Daerah Migas	58.776.647		106.000.000		41.223.353
Bagian Daerah Non Migas	23.070.733.735		12.311.763.100	32.197.960.000	-
Bagian Daerah Penghasil Dalam	-		-	-	-
Bagian Daerah Perimbangan	681.945.282		203.028.870	226.703.455	-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	8.092.541.940		1.581.207.000	6.501.111.810	
Bagian Daerah Bagi Hasil Lainnya	315.549.507		8.564.030	200.894.707	
Biaya Pemungutan Migas	2.734.605	-	1.010.830	-	1.424.105
Biaya Pemungutan Non Migas	1.951.924.531	-	420.362.000	1.680.582.531	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					
Biaya Pemungutan PBB	26.675.694		12.200.130	11.005.804	
Biaya Pemungutan BPHTB	350.970.060	-	70.968.600	998.960.262	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.186.077	-	286.800	6.805.747	-
CHT	624			624	
DBH	41.363.353	28.016.726.564	30.201.991.723		78.814.427.610
Migas	-	349.453.430	9.771.300	-	161.775.730
Minyak Bumi 15%		224.643.430	8.577.300	-	141.644.730
Minyak Bumi 0,5%		7.421.000	295.200	-	5.175.000
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi Jatah Kontrak Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	315.103.377	17.791.190.661	34.766.596.502	-	474.345.705.702
Landrent	315.103.377		618.824.572	-	305.728.177
Royalti		17.926.306.661	34.147.771.930		474.039.977.525
Panas Bumi	-				
Luran Produksi	-	-			
Luran tetap	-	-	-	-	-
Seluruh Jenis Perpajakan			-	-	-
PDRD Lainnya		75.722.472	112.715.027		158.179.701
Pajak	-				
BLBP	-	-	-	-	-
Pasir		5.733.176	12.445.625	-	187.159.101
Perkebunan	139.260.000		316.991.000		755.697.020
Grand Total	97.487.638.603	28.016.726.541	78.312.961.023	18.010.012.011	78.961.092.270

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi: Kalimantan Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR	PENGALOKASIAN	LEBIH BAYAR d.h. DAU 2019 (PMK No. 45/PMK.07/2021)	Penyesuaian LEBIH BAYAR d.h. DAU 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LEBIH BAYAR d.h. DAU 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4]-[5]
Pajak			5.682.371.060	5.682.371.060	
PPh			5.682.371.060	5.682.371.060	
PPh Pasal 21	-		5.682.371.060	5.682.371.060	-
PPh Pasal 22/26	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	
Bagi Rata		-	-		
Bagian Daerah Kilang					
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Bagi Pemerataan Migas	-	-	-	-	-
Bagi Pemerataan Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagi Pemerataan Pusat Lainnya					-
Bagi Pemerataan Sektor Lainnya	-		-	-	-
Lain	-	-	-	-	
PBH		5.207.963.413	13.751.030.619	5.207.963.413	10.156.119.871
Migas	-				-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 3,5%		-	-	-	
Minyak Bumi dibawah Kontrak Khusus		-	-		
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 6,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap		-	-	-	
Royalti		-			
Pajak Lainnya					
Pajak Penghasilan	-				-
Pajak Migas	-	-	-	-	-
Sumber Daya Pemerintah		-	-	-	
Pertambangan		5.207.963.413	13.751.030.619	5.207.963.413	10.156.119.871
PBB		5.207.963.413	13.751.030.619	5.207.963.413	10.156.119.871
PDRD	-	1.760.798	-	-	-
PBB-P2	-	552.661.021	-	-	-
Perkebunan		-			
Grand Total		5.207.963.413	13.751.030.619	5.207.963.413	10.156.119.871

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Kalimantan Timur

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Alokasi DBH TA 2020	Penyaluran DBH TA 2020	Penyaluran KLHDH Berdasarkan PMK TA 2020 (PMK No. 37/KM.7/2021)	DBH TA 2020 yang Seharusnya Disalurkan	KLHDH TA 2020 yang Seharusnya Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3) - (4)	(6)
Pajak	288.843.424.536		110.770.000.000	178.073.424.536	
PPh	89.908.135.036	-	67.872.842.000	22.035.293.036	-
PPh Pasal 21	67.018.222.898	-	56.698.182.000	10.320.040.898	-
PPh Pasal 22 dan 23	4.870.027.703	-	1.884.559.000	2.985.468.703	-
PPN	199.111.227.376		43.196.121.000	155.915.106.376	
Bagi Hasil					
Bagi Hasil Migas	61.381.044.999		18.116.967.000	43.264.077.999	-
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	70.117.430.037	-	16.040.556.000	54.076.874.037	-
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	207.276	-	-	207.276	
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan	5.269.760.137		2.826.718.000	2.442.742.137	
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	30.367.761.149		5.209.124.000	25.158.637.149	
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	853.957.318	-	2.510.000	851.447.318	-
Bagi Hasil Penerimaan Migas	1.894.216.611	-	513.030.000	1.381.186.611	-
Bagi Hasil Penerimaan Non Migas	2.194.169.027		419.991.000	1.774.178.027	
Bagi Hasil Penerimaan Panas Bumi	7.471			7.471	
Bagi Hasil Penerimaan Pertambangan	138.845.739	-	82.757.000	56.088.739	-
Bagi Hasil Penerimaan Pertanahan	871.302.110	-	174.120.000	697.182.110	
Bagi Hasil Penerimaan Sektor Lainnya	11.971.019		397.000	11.574.019	
DBH	11.772			11.772	
DAU	3.635.543.460	3.525.875.350	109.779.098.000	254.126.460.460	110.319.656.350
Migas	34.535.719.709	-	4.480.960.000	140.631.456.256	-
Minyak Bumi 15%	65.064.631.021	-	4.501.810.000	60.562.821.021	
Minyak Bumi 0,25%	225.089.805		131.326.000	93.763.805	
Minyak Bumi Sebelum Tambahan Bagian Daerah	-				-
Gas Bumi 15%	145.015.513.885		44.350.190.000	100.665.323.885	-
Gas Bumi 0,5%	2.437.397.635	-	17.784.000	2.419.613.635	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Pajak	3.810.382.309	2.109.033.178	76.236.705.073	-	68.336.387.494
Cukai		2.109.033.178	2.101.901.123		5.271.854.280
Subsidi	5.301.522.536		94.031.931.952		89.304.902.611
Pajak Rokok	-				-
Dana Otsus	-	-	-	-	-
Dana Desa		-	-	-	
Subsidi Bagian Pemerintah					
Otsus/Keistimewaan	21.262.041.826		30.087.305.000	171.070.250	10.763.257.424
DBH	12.388.768.833	-	25.862.535.726	-	14.527.694.257
DAU	5.121.666.050	-	633.023.726	4.487.975.050	-
TKDD	3.751.611.962		3.590.911.225		1.230.105.260
Pinjaman	-				
Grand Total	470.453.247.778	5.634.909.188	344.469.551.178	592.196.171.492	110.319.656.686

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Boven ... (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian TA 2016 (KEP-No.3/KV.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KEP-No.3/KV.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Total			7.922.226.907	7.922.226.907	
PPh			1.214.016.725	1.214.016.725	
PPh Pasal 21	-		2.708.093.016	2.708.093.016	-
PPh Pasal 25/29	-	-	1.928.953.709	928.953.709	-
PBB	-	-	5.385.160.792	5.385.160.792	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		-	-	-	-
Penerimaan Pajak Penghasilan Migas					
Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas	-		2.506.161.161	2.506.161.161	-
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-	-	-
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 26	-	-	-	-	-
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor			235.502.026	235.502.026	
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26					
Penerimaan Pajak Penghasilan Migas	-	-		-	-
Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas	-	-	63.595.176	63.595.176	-
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 15					
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)					
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi	-	-	11.450.677	11.450.677	-
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan	-	-	-	-	-
PPN					
PBB		703.077.238	11.142.962.161.167	11.142.954.311	90.850.199.856
Migas	-	-		-	-
Penerimaan Migas 15%	-	-	-	-	-
Penerimaan Migas 0,5%		-	-	-	-
Penerimaan Migas dalam Rangka Otsus					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Migas	-	-	5.774.5 7.319	53.175.74 .3 1	91.054.695.207
Landrent	-	-	5.766.285.627	4.026.69 .856	1.739.488.7 1
Bagian			97.360.701.7 3	18.05 .21 1	89.358.0 2.207
Pajak Hotel					
Pajak Restoran	-				
Pajak Hiburan	-	-	-	-	-
Pajak Reklame	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan		703.077.238	808.132.3 8		909.453.8 8
Pajak Parkir					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	624.463	603.403.9 9	-	603.403.9 3
Pajak Sarang Burung Walet	-	703.077.238	-	-	-
Pajak Air Permukaan			-		
Pajak Rokok		703.077.238	191.30 .178.87 1	60.30 .07 1.218	90.903.10 .822

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Deiyai (dalam rupiah)

JENIS DBH	PPh Tahun TA 2020	PU Tahun TA 2020	Penyaluran DBH TA 2021 Berdasarkan PMK 07/PMK.07/2021	DBH TA 2020 yang telah dialokasikan	DBH TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	98.978.210.494	-	1.838.946.000	27.040.264.376	1.955.005.677
DBH	19.337.830.750	-	6.476 -4.400	6.361.655.050	-
PPh Pasal 21	10.007.760.217		6.260.070.650	7.75-.276.5-7	
PPh Pasal 25/29	539.350.200		256.[illegible]4.500	107.218.735	
PBB	25.510.369.805		12.052.812.100	11.951.312.310	1.805.300.512
Bea Hak	60 .353.964		266.099.700	1 .28.270.208	-
Cukai Daerah Migas	297.191.783	-	259.926.600	-	7.7 -.815
Pungutan Daerah Non Migas	2.219.1.0.362	-	2.857.338. 00	-	.676.[illegible]80.378
Bagian Daerah Pajak Pusat			-		
Bagian Daerah Pajak Lainnya	9.63 .736.767		2.780.000.000		107.101.370
Dana Bagi Hasil Pertambangan	17.013.327.789	-	1.779.061.770	13.408.5.5.039	-
Dana Bagi Hasil Kehutanan	219.[illegible]0.207		3.60-.320	206.20-.207	-
Bagi Hasil Perikanan Migas	10.[illegible]0.115		61.[illegible]0.000		110.283
Bagi Hasil Perikanan Non Migas	76.830.420		152.[illegible]34.000		38.[illegible]6.172
Dana Reboisasi	-	-			-
Dana Pemanfaatan Pencadangan	120.[illegible]0.207	-	1 - 143.400	-	4.474.302
Dana Bagi Hasil Pertambangan	729.[illegible]6.710		183.[illegible]5.000	[illegible]84.[illegible]1.[illegible]	
Dana Bagi Hasil Kehutanan	2.486.[illegible]34		248.200	7.[illegible]7.227	
DAU	4. .50	-	-	4 .5[illegible]	-
DAK	4.1[illegible]6.[illegible]3.900	27.[illegible]0.163.742	-7.358.973.[illegible]00	50.769.604.131	71.202.020.202
Migas	50.011.[illegible]3.212		.038.[illegible]08.700	31.072.[illegible]07.512	
Migas Bagi Hasil 15%	15.[illegible]40.021		530.[illegible]7.000	20[illegible]3.[illegible]21	
Migas Bagi Hasil 0,5%	5- 133.607		25.21[illegible]7.07	23.[illegible]6.027	
Migas Bagi Hasil dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%	35.[illegible]0.[illegible]96.770	-	56.[illegible]36.[illegible]10[illegible]	32.[illegible]73.[illegible]08.68[illegible]	-
Gas Bumi 1,5%	311.[illegible]20.482	-	1.60[illegible].202	500.[illegible]35.[illegible]33	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Minyak Bumi	35[illegible].951.13-	25.[illegible].[illegible]60.252	13.[illegible]87.5a0.1.0		03.[illegible]72.[illegible]31[illegible]
Tambahan I	35[illegible].951.[illegible]34		7[illegible]0.2[illegible].370		127.[illegible]01.[illegible]31
Reguler	-	26.[illegible]7.[illegible]60.252	43.[illegible]27.[illegible]1.[illegible]70		69.[illegible]46.[illegible]34.[illegible]67
Pemda Darat		-	-	-	-
Dana Otonomi			-	-	-
Dana Infra					
Subsidi Bagian Pemda Darat	-				
Kehutanan	10.[illegible]-.20[illegible].6[illegible]	[illegible]0 .[illegible]60 -50	3.[illegible]56.[illegible]12.[illegible]250	7.[illegible]96.[illegible]9[illegible].539	1.5[illegible]2.[illegible]34.[illegible]75
JR		-	-	-	-
JPTI		1.[illegible]91.[illegible]92.[illegible].[illegible]0	[illegible]81.[illegible]32.[illegible]277		1.372.[illegible]91.[illegible]725
PSDH	0 .43.70 .[illegible]	-	2.3[illegible].[illegible]97.[illegible]97[illegible]	7.[illegible]96.[illegible]96.[illegible]39	
Perikanan	150.[illegible]36.380	-	1.[illegible].[illegible]91.[illegible]80		107.[illegible]6-.[illegible]0.0
Jumlah Total	91.[illegible]97.[illegible]55.[illegible]06	27.[illegible]0.[illegible]63.742	5[illegible].[illegible]32.[illegible]93.[illegible]900	63.[illegible]3.[illegible]66.[illegible]796	73.[illegible]57.[illegible]96[illegible].[illegible]63

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kutai Kertanegara

[dalam rupiah]

JENIS DBH	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	Alokasi TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran DBH s.d. TA 2019 (KVK No. S-3/KV.2/2021)	Sisa DBH s.d TA 2019 (Kolom 4 - 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			38.3 – 320.63[illegible]	38.314.890.82[illegible]	-
PPh			17.308.707.013	17.308.707.013	-
PPh Pasal 21			13.638.49[illegible].871	13.638.49[illegible].834	
PPh Pasal 22/23	-		3.[illegible]7.[illegible].[illegible]49	3.[illegible]7.[illegible].[illegible]79	
PBB	-	-	20.9[illegible].[illegible].819	20.916.[illegible].819	
Bea Hak		-	-		-
Bagian Daerah Migas		-	15.535.[illegible].[illegible]97	15.535.[illegible].[illegible]13	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pajak Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	5.[illegible].[illegible].007	5.[illegible].[illegible].077	
Bagian Daerah Kehutanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya				-	
Biaya Pemungutan Migas	-		1.[illegible].[illegible].717	1.[illegible].[illegible].717	
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Kehutanan			[illegible]8.0[illegible]6	138.[illegible].343	-
Biaya Pemungutan Perikanan	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-		
OOT		-	-	-	-
BHT		[illegible]6.[illegible].368	19[illegible].14.171.324	73.049.670.246	1[illegible].064.[illegible].078
Migas	-		14.029.703.158	14.029.703.182	
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi dalam Negeri Bagian Daerah		-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	[illegible]4.[illegible].505.347	14.[illegible].515.5[illegible]7	-
Gas Bumi 0,5%			[illegible]41.[illegible]07.641	241.127.6[illegible]7	
Gas Bumi dalam Negeri Bagian Daerah	-				
Minerba	-		10[illegible].161.[illegible]26.1[illegible]	25.[illegible].[illegible].[illegible]35	1[illegible].[illegible]61.[illegible]76
Landrent	-	-	[illegible].[illegible]66.[illegible]10.[illegible]92	[illegible].[illegible]66.[illegible]10.[illegible]90	
Royalti		-	13[illegible].675.017.[illegible]46	[illegible].[illegible]75.[illegible]56.[illegible]58	[illegible].[illegible]61.[illegible]76
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Tetap				-	
Iuran Eksploitasi	-				
Setoran Bagian Pemerintah	-				
Kurang Salur		41[illegible].[illegible].368	[illegible].[illegible]63.[illegible]41.[illegible]20	-	[illegible].[illegible]63.[illegible]41.[illegible]20
PPh			-	-	-
DJPK	-		[illegible].[illegible]2[illegible].[illegible]30.[illegible]30		[illegible].[illegible]2[illegible].[illegible]30.[illegible]30
PNBP	-	41[illegible].[illegible].368			
Perikanan		-	-		-
Grand Total		[illegible]6.[illegible].368	[illegible]20.[illegible]39.[illegible]02.[illegible]50	1.[illegible]06.[illegible].[illegible]50.[illegible]78	111.06[illegible].[illegible]72.[illegible]78

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kutai Kartanegara

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan DA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB DBH TA 2020 yang Akan Dikonfirmasikan	LB DBH TA 2020 yang Akan Dikonfirmasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	377.046.247.165		11.736.702.460	365.309.544.705	22.336.248
PPh	5.075.989.265		13.113.283.050	1.037.971.471	22.336.248
PPh Pasal 21	4.874.911.211		13.136.093.050	1.037.971.471	
PPh Pasal 25/29	201.078.054		273.290.000		22.336.248
PBB	302.050.276.900		98.314.419.410	263.693.761.250	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.981.924.900		265.689.710	1.736.752.253	-
Bagian Daerah Migas	201.761.604.105		36.785.887.650	141.031.581.953	-
Bagian Daerah Non Migas	17.378.856.146		29.922.967.000	87.020.745.414	
Bagian Daerah Pasal Lainnya	-				
Bagian Daerah Pph Lainnya	8.454.974.974		636.351.100	716.692.874	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	22.511.140.319		4.339.279.300	3.353.504.119	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2.535.501		5.000.300	250.994.707	
Bukan Pertambangan Migas	6.040.016.714		2.343.095.900	2.956.320.814	
Bukan Pertambangan Non Migas	2.050.786.314		60.000	1.019.420.114	-
Bukan Pertambangan Panas Bumi			-	-	-
Bukan Pertambangan Lainnya	966.879.64		70.343.700	106.295.82	
Bukan Pertambangan Perbendaharaan	1.103.668.476		267.311.100	893.052.370	
Bukan Pertambangan Sektor Lainnya	2.750.024		106.300	2.37.724	-
UPT	4.150		-	4.. 50	-
SDA	211.961.273.360	30.322.761.000	83.019.312.000	701.282.456.20	11.105.978.473
Migas	205.767.120.328		3.087.097.900	202.679.022.628	
Minyak Bumi 15%	25.312.120.817		4.624.594.400	20.687.726.417	
Minyak Bumi 0,5%	841.711.650		5 630.400	211.083.450	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi 15%	26.452.307.942		670.402.000	175.781.405.016	-
Gas Bumi 0,5%	1.337.469.463		11.092.120	2.247.27..013	
Gas Bumi dalam rangka Otsus					
Panas Bumi		24.607.264.355	7.453.900.000		109.329.321.100
Perikanan		2.7-0.207.332	2.376.375.750	-	5.012.832.606
Kehutanan		25.097.316.107	72.979.324.593	-	10.. 37.4-0.892
Pertambangan Umum					-
Iuran Eksploitasi	-				
Iuran tetap	-	-			
Setoran Tagihan Pertambangan		-	-	-	-
Kehutanan	6.131.931.900	1.360.537.100	2.345.913.000	3.923.525.883	1.206.460.925
DR	-				
PSDH	-	1.384.557.400	1.178.902.700		2.305.760.220
DBHI	6.131.931.900	-	1.166.941.175	3.902.925.683	-
Perikanan	219.260.500	-	216.261.000	-	137.69-.070
Grand Total	589.107.619.511	56.230.181.455	201.506.275.353	667.624.707.702	11.512.97..021

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kutai Barat (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak		-	1.314.416.515	1.314.416.515	-
PPh			1.314.415.915	1.314.416.515	-
PPh Pasal 21	-		616.451.724	616.451.724	
PPh Pasal 25/29	-		697.964.791	697.964.791	
PBB		-			
Bagi Rata		-	-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan		-			
Bagian Daerah Perhutanan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Migas	-				
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-		
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan					-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-			
CHT		-	-	-	-
SDA		253.016.039	115.698.205.635	56.747.839.412	58.950.366.221
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	115.696.205.693	56.747.839.412	58.950.366.221
Landrent		-	9.396.910.253	8.244.826.074	1.152.084.551
Royalti		-	106.299.287.405	48.503.013.338	57.798.274.582
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Produksi	-		-	-	-
Iuran Tetap	-	-			
Setoran Bagian Pemerintah	-	-			
Kehutanan		253.016.039	-	-	-
DR			-	-	-
IIUPH	-	2.051.746			
PSDH	-	253.564.193			
Perikanan		-	-	-	
Grand Total		253.016.039	117.012.621.448	58.062.255.927	58.950.366.221

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kutai Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Realisasi DBH Tahun TA 2020 (PMK No. 07/KM.07/2021)	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	68.744.854.867		16.231.049.470	14.121.822.036	11.537.233
PPh	8.471.720.636	-	5.307.912.830	3.115.713.839	
PPh Pasal 21	8.007.676.672	-	4.547.543.430	3.126.196.102	-
PPh Pasal 25/29	463.943.937	-	111.303.450	282.514.737	-
PBB	51.979.654.015		11.281.086.720	40.508.104.547	11.537.233
Bea Bea	2.177.179.546		242.530.470	1.934.649.709	
Tagihan Daerah Kayu	314.098.488	-	727.121.450		11.022.962
Bagian Daerah Sda Migas	27.372.042.685	-	6.807.784.100	20.788.280.103	
Bagian Daerah Panas Bumi	1.068.991		-	1.068.384	-
Bagian Daerah Perikanan	2.482.913.511		1.086.100.600	1.376.837.811	-
Bagian Daerah Perkebunan	23.203.267.820		2.595.779.100	20.607.188.220	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.490.007	-	6.601.300	220.091.707	
Biaya Pemungutan Migas	13.858.697	-	1.353.003	-	514.303
Biaya Pemungutan Sda Migas	345.951.000		220.787.000	676.034.070	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	37.118			37.118	
Biaya Pemungutan Pbb Migas	113.061.021	-	45.194.503	68.696.021	
Biaya Pemungutan Pbb Non Migas	881.012.081		20.187.100	860.824.981	-
Biaya Pemungutan Bphtb	7.469.014		298.900	7.197.594	-
Cukai	- 150	-		4.130	
DTA	90.187.391.170	2.183.343.073	41.309.595.775	67.177.024.040	6.363.707.629
Migas	37.711.201.232	-	1.038.035.700	31.973.907.512	-
Minyak Bumi 15%	615.710.021		830.867.500	761.875.121	-
Minyak Bumi 0,5%	54.133.907		28.277.100	25.856.707	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Bumi 70%	36.949.300.762	-	150.595.100	30.072.508.062	
Gas Bumi 0,5%	91.729.492	-	2.552.500	506.191.162	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba	6.775.761.319	2.183.343.073	36.370.354.595	5.858.543.300	3.558.501.647
Landrent	-	2.183.343.073	1.494.600.575	-	3.558.501.647
Royalti	6.775.761.319		34.875.754.020	5.858.543.300	
Panas Bumi	-	-			
Dana Reklamasi		-	-		
Dana Hasil			-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-			-	-
Kehutanan	6.470.738.615	-	3.167.378.000	13.619.070.071	2.275.167.231
Tpt		-	-		
Iuphh	19.154.281.350		584.187.675	5.476.076.875	-
Psdh	3.716.023.665		3.143.190.325	-	2.275.167.231
Reboisasi	213.034.530		291.190.325		82.052.717
Grand Total	152.031.977.917	2.183.343.073	57.674.791.970	91.369.397.122	6.363.707.629

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kotai Timur

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TAHUN 2019	KURANG BAYAR TAHUN 2021	LEBIH BAYAR TAHUN 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran Lebih Bayar Tahun 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2020)	Sisa Lebih Bayar Tahun 2019 (PMK No. 25/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			11.860.487.586	11.860.487.586	-
PPh			11.860.487.586	11.860.487.586	-
PPh Pasal 21	-		9.819.181.515	9.819.181.515	
PPh Pasal 25/29	-		2.041.306.071	2.041.306.071	
PBB		-			
Bagi Rata		-	-		
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-			-	
Bagian Daerah Dana Bagi	-				
Bagian Daerah Kabupaten		-			
Bagian Daerah Kota Tertentu		-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Tertentu	-			-	-
Bagi Kemampuan Migas	-				
Bagi Kemampuan Non Migas		-	-		
Bagi Kemampuan Pensi Bumi		-	-	-	-
Bagi Kemampuan Perhutanan	-			-	-
Bagi Kemampuan Perbendaharaan	-				
Bagi Kemampuan Sektor Tertentu		-	-		
CHT		-	-	-	-
SDA		132.11.2.00	8.474.364.113	27.101.068.044	292.287.346.360
Migas	-		1.762.870.360	5.167.515.85	
Minyak Bumi 15%	-		-		
Minyak Bumi 0,5%			-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi 30%			5.370.311.015	5.561.2 1.915	-
Gas Bumi 0,5%	-		91.233.830	91.233.861	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	113.322.010.612	121.729.132.213	291.290.346.349
Perikanan		-	3.635.506.946	3.636.501.215	
Kehutanan		-	410. 87 .2.755	1.3 893.546.369	39. 293.586.589
Panas Bumi				-	-
Iuran Eksplorasi	-			-	-
Iuran Tetap	-				
Setoran Bagian Pemerintah		-	-		
Pertambangan		492.213.636	685.702.050	-	506.000.000
PPh	-			-	-
PPh 21	-		685.902.000		685.902.000
PPh Ps 25		-92.313.956	-		
Perikanan		-	-		
Pertambangan		2.32.2.050	231.334.871.707	39.252.465.626	292.287.346.360

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kabupaten Kutai Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang Belum Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	346.434.554.153		41.250.670.000	305.197.627.278	-
PBB	18.599.781.400		11.003.730.000	7.595.724.000	
PPh Pasal 21	16.230.272.300	-	9.277.310.000	7.072.962.000	
PPh Pasal 25/29	2.369.509.100	-	1.725.420.000	644.089.100	
BPHTB	327.834.991.753	-	88.253.924.400	97.971.068.116	-
Cukai Rokok	1.09 .358.998		961.620.700	1.736.970.398	-
Sumber Daya Alam	15.804.852.700		6.012.707.100	8.859.061.600	-
Bagian Pemerintah dari Migas	120.773.742.970	-	32.791.606.700	1.0.413.174.269	
Bagian Pemerintah dari Panas Bumi		-	-		
Bagian Daerah Penghasilan	6.121.727.013		1.753.981.000	4.367.324.013	-
Bagian Daerah Pertambangan	40.026.292.7 5		9.607.010.400	30.691.440.813	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	715.598.307	-	4.004.900	201.594.707	
Biaya Pemungutan Migas	1 6.2 6.142	-	140.545.000	201.711.042	
Biaya Pemungutan Non Migas	5.178.631.119		-68.050.000	4.711.681.119	-
Biaya Pemindahbukuan Pemda Daerah	-			-	
Biaya Pemungutan Pertambangan	255.261.178		72.211.100	142.811.000	
Biaya Pemungutan Perikanan	2.080.501.538	-	-69.345.350	1.926.191.250	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.196.321		209.800	7.187.2 4	-
DAK	4.150			- 150	-
DAU	10 .057.737.679	477.102.937	69.2 3.7 5.000	30.5 0.092.359	10.590.709.276
Migas	31.770.209.512	-	1.758.079.000	21.142.115.89	510.147.172
Minyak Bumi 15%	391.7 5.121	-	297.559.500		502.813.179
Minyak Bumi 0,5%	13.434.207		28.303.600	-	5.369.9 5
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-		-	-	-
Gas Bumi 30%	31.370.906.705		1 .068.100	21.075.018.997	-
Gas Bumi 0,5%	311.720.407	-	2.593.300	209.137.192	
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat		-			
Mineral	6 .0 3.113.726	477.7 7.937	85.7 7.111.300	-	17.896.795.021
Batubara	-	477.102.937	0.587.179.153	-	5.364.279.107
Kehutanan	66.073.413.756		91.195.9 5.170	-	15.132.5 6.304
Iuran Hasil Hutan	-				-
Iuran Provinsi		-			
Iuran Izin		-	-		
Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari			-	-	
Perikanan	5.375.837.902		3.897.413.700	5 .0 .046.475	1.295.582.253
DAK	-	-			-
DTKP	6.761.7 2.050	-	657.5 6.475	5.70 .210.1 9	
PBH	3.2 8.05 .942		3.020.864.225	-	1.276.631.283
Perusahaan	138.186.960		316.827.000	-	57.604.222
Grand Total	437.991.793.823	477.102.937	129.320.117.328	2 .7 8.079.6 5	16.520.5 0.246

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH TAHUN 2021

Kab. Pasir

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KBYTA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 7/PMK.07/2022)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 7/PMK.07/2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pusat	-	-	41.958.038.663	39.548.656.209	2.419.686.644
PPh	-	-	6.466.132.159	6.466.132.159	-
PPh Pasal 21			5.296.584.703	5.296.584.703	
PPh Pasal 25/29	-		1.169.547.456	1.169.547.456	
PBB	-		32.026.189.217	32.026.189.217	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-			-
Bagian Daerah Migas		-	1.218.056.385	-	1.218.056.385
Bagian Daerah Non Migas			9.320.220.143	8.205.266.179	1.114.953.964
Bagian Daerah Pertambangan Minyak	-				
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi	-		718.089.582	718.089.582	
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	1.602.610.526	1.602.610.526	-
Bagian Daerah Kehutanan			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara			37.338.107		37.338.107
Bagian Daerah Perikanan	-	-	980.650.231	911.629.631	69.020.600
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Perdagangan			20.020.499	20.020.499	-
Bagian Daerah Pertambangan Jasa-Jasa			367.098.080	367.098.080	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			
PBB	-	-	-	-	-
DBH	-	263.744.050	36.306.374.497	603.2...273	54.315.120.249
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-			
Minyak Bumi dalam Kawasan Khusus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi dalam Kawasan Khusus					
Minerba	-		20.420.324.472	620.211.220	20.317.120.249
Iuran Tetap	-	-	5.009.272.112	609.211.232	1.100.060.880
Royalti	-	-	51.887.052.360	-	51.887.052.360
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Produksi			-	-	-
Iuran Tetap					
Sektor Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan	-	263.744.050	-	-	-
DR			-	-	-
PSDH		7.378.720			
DBHDR	-	256.365.330			
Perikanan	-	-		-	-
Grand Total		263.744.050	97.364.675.155	30.157.949.264	53.206.625.892

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pasir

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Pajak	11.032.100.708		13.560.963.500	27.159.213.293	
PPh	5.489.674.401		5.792.191.000	2.911.965.701	-
PPh Pasal 21	5.074.829.535		5.659.734.000	2.135.285.965	-
PPh Pasal 23/26	334.844.866	-	114.445.000	530.293.466	-
PBB	32.332.722.244	-	7.893.706.500	24.791.335.744	
Bea Balik Nama	1.091.936.905		265.680.700	1.720.275.208	
Pungutan Daerah Atas Migas	4.411.918.001		949.778.100	4.131.045.301	
Pungutan Daerah Sektor Migas	3.026.697.597		2.796.211.800	10.270.139.597	-
Pungutan Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pungutan Daerah Kehutanan	450.091.908	-	307.333.000	167.031.908	
Pungutan Daerah Perkebunan	1.267.332.573		3.217.179.300	8.070.101.573	
Pungutan Daerah Pertambangan	2.569.407		9.000.000	250.991.707	-
Pajak Penerangan Jalan	159.833.515	-	38.819.701	119.614.815	-
Pungutan Pertambangan Non Migas	152.493.473	-	37.217.000	385.074.573	
Pungutan Pertambangan Panas Bumi					
Pajak Penerangan Jalan Lainnya	9.169.234		12.205.500	3.961.701	-
Pajak Penerangan Jalan Jasa	547.274.086	-	56.000.400	391.901.586	-
Pajak Penerangan Sektor Lainnya	7.456.024	-	706.700	6.175.224	
Lain	4.130			4.130	
DTA	58.205.977.170	77.705.490.212	14.642.030.202	32.199.071.612	11.858.069.654
Migas	37.211.603.323	-	1.078.086.000	31.357.907.612	-
Minyak Bumi 15%	615.743.071	-	350.867.302	764.875.769	-
Minyak Bumi 0,5%	71.133.007	-	78.047.400	165.886.707	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Alam 70%	36.525.327.245		649.086.290	30.673.208.382	
Gas Alam 0,5%	51.729.492		2.392.930	509.137.152	-
Gas Alam dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba		70.600.488.750	41.453.174.575	-	11.453.015.297
Landrent		707.960.101	403.790.850	-	617.357.951
Royalti		69.792.912.749	41.049.383.725		10.835.657.346
Jenis Pajak					
Sumber Daya Alam	-				-
Sumber Hutan	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	
Kehutanan	2.020.080.945		1.533.925.123	920.404.300	24.722.117
DR					
PHPH	376.464.020	-	-	376.464.020	-
PSDH	1.890.222.078	-	1.533.925.125	-	91.702.747
Perikanan	153.180.980		416.587.000		1.077.857.029
Grand Total	71.258.277.980	77.705.490.212	54.229.011.707	36.631.162.237	11.906.069.654

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Ba Ok upam

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 20 8	Alo LA 20 9	LB s.d TA 2019 (PMK No 56/PMK.07/2021)	Prog Desember LB s.d TA 2019 (PMK No 3/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (SAS No. 37/AS.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]
Dana			21 506 937 665	21 506 937 665	-
PPh			21 506 937 665	21 506 937 665	-
PPh Pasal 21			14 745 437 590	14 745 437 590	
PPh Pasal 25/29	-		6 761 500 075	6 761 500 075	
PBB	-	-			
Aset Tetap	-	-			-
Bagian Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pertama Sisa	-				
Daerah Penghasil Pertambangan	-				
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-				
Biaya Pemungutan Non Migas		-			-
Biaya Pemungutan Pasal 21		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pph Pasal 25				-	
Biaya Pemungutan Pph Pasal 29	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-			-
CUT		-	-	-	-
DTA		189 063 264	53 826 762 329	16 189 825 232	37 647 781 497
Migas					
Migas Bagian DTA	-				
Migas Dana 0,5%	-	-	-	-	-
Migas Dana 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Bagian Daerah Penghasil	-				
Minyak	-		53 826 762 329	16 189 825 232	37 647 781 497
Landrent	-	-	-		-
Royalti		-	53 826 762 329	16 189 825 232	37 647 781 497
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Tetap					
Iuran Eksplorasi	-				
Bagian Daerah Penghasil	-	-			
Kehutanan		189 063 264	-	-	-
PSDH					-
DR	-				
PSDH	-	189 063 264	-		-
Perikanan		-	-	-	-
Cukai Hasil		189 063 264	53 826 762 329	37 647 825 497	37 647 781 497

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kode Kelompok

(dalam rupiah)

[illegible]	KB Sebelum TA 2020	LB Sebelum TA 2020	Alokasi KB/LB DBH Sementara TA 2020 (PMK No. 3/PMK.7/2020)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
Pajak	533.[illegible]65.447		24.760.545.200	3.019.637.052	17.837.603
PPh	37.765.052.119		20.741.656.200	1.027.395.919	-
PPh Pasal 21	23.837.376.010		2.089.238.000	252.018.919	
PPh Pasal 25/29	1.027.483.330	-	515.700.000	1.379.000.700	
PBB	2.719.090.782	-	630.000.000	2.019.585.782	17.397.605
Pbg. Rokok	1.961.959.953	-	265.680.700	1.776.370.260	-
Bagian Daerah Migas	159.[illegible]65.603		508.543.200	-	168.908.577
Bagian Daerah Non Migas	45.085.128		5.560.000	39.708.522	
Bagian Daerah Tanah Tepi		-			
Bagian Daerah Perkebunan	11.778.057	-	3.716.900	39.051.151	
Bagian Daerah Perkebunan	-		-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2.[illegible]500.027		5.011.300	356.914.707	-
Biaya Pemungutan Migas	4.738.060	-	10.727.100		5.989.040
Biaya Pemungutan Non Migas	1.[illegible]470	-	539.000	1.256.972	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi			-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	1.943.564		113.100	1.027.006	-
Biaya Pemungutan Perkebunan		-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	4.793.027	-	368.600	7.197.241	
CHT	15.240		-	15.[illegible]5	-
SDA	37.547.348.900		23.470.010.725	31.979.316.717	15.736.017.[illegible]
Migas	12.[illegible]88.612	-	1.002.600.900	11.[illegible]1.110.712	
Minyak Bumi 15%	1.[illegible]13.021	-	50.987.900	1.[illegible]2.[illegible]1.121	
Minyak Bumi 0,5%	94.102.900	-	28.247.400	1.[illegible]66.[illegible]07	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-		-	-	-
Gas Bumi 30%	30.73[illegible]13.797		1.060.[illegible]7.120	30.574.[illegible]66.633	-
Gas Bumi 0,5%	510.589.297		2.691.720	507.[illegible]89.392	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-			
Minerba	6.[illegible]2.[illegible]45.347	-	20.890.[illegible]69.[illegible]25		17.[illegible]1.[illegible]82.779
Lain-Lain		-		-	
Kehutanan	3.[illegible]4.736.747		20.693.768.125	-	17.[illegible]1.192.778
Panas Bumi	-		-	-	-
Dana Reboisasi	-				-
Dana Iuran		-			
Sisa Lebih Pembiayaan		-	-		
Kelautan	854.[illegible]30.950		1.[illegible]35.536.700	-	49[illegible]14.717
Ikan	-			-	-
PNBP		-			
BPHTB	854.[illegible]30.950	-	1.[illegible]35.536.700		199.[illegible]17.717
Pertambangan	159.[illegible]65.990		510.[illegible]8.[illegible]202	-	57.[illegible]96.[illegible]20
Grand Total	67.759.[illegible]4.056		50.[illegible]72.995.[illegible]03	58.431.085.764	17.[illegible]3.[illegible]15.[illegible]93

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bontang

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KEP-[illegible])	Sisa LB s.d. TA 2019 (SAKTI No. [illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	7.434.283.624	7.425.304.677	8.978.953
PPh		-	7.425.304.677	7.425.304.677	-
PPh Pasal 21			5.314.477.875	5.314.477.875	
PPh Pasal 25/29			2.110.826.790	2.110.826.790	
PBB	-		8.978.953		8.978.953
Bagi Rata	-	-		-	-
Bagian Daerah Bagian		-	-	-	
Bagian Daerah Non Bagian			7.677.878		6.677.925
Bagian Daerah Penerimaan					
Bagian Daerah Pertambangan	-				-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-		
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	201.130	-	901.130
Bagian Pemerintah Panas Bum.	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan			-		
Bagian Pemerintah Perkebunan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-			-
Cukai	-	-	-	-	-
SDA		193.663.799	38.920.730.443	19.871.804.535	19.199.454.887
Migas			54.627.926	47.627.926	
Minyak Bumi (PPh					
Minyak Bumi (Bag	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dari Kontraktor Kontrak Operasi	-	-	-	-	-
Gas Bumi (PPh	-	-	33.767.749	33.767.749	
Gas Bumi (Bag			920.177	920.177	
Gas Bumi Bagian Daerah Migas					
Pertambangan	-		29.872.071.211	15.795.830.329	10.176.191.882
Iuran Tetap	-	-	210.676.404		210.676.404
Royalti	-	-	58.664.195.060	18.795.636.609	39.848.558.451
Pertambangan		-	-	-	
Iuran Produksi			-		
Iuran Tetap					
Penerimaan Bagian Pemerintah	-			-	-
Kehutanan	-	193.663.799	-	-	-
PSDH			-		
DR					
PSDHDR	-	193.663.799		-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Grand Total		193.663.799	68.864.038.067	26.745.670.796	42.118.473.838

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Dumai

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB Definitif TA 2020	KB Definitif TA 2020	Alokasi KB DBH Definitif TA 2020 (KMK No. 830/KMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	68.530.365.361		17.406.371.020	51.123.994.341	-
PBB	21.538.807.296		13.272.086.420	8.266.720.876	-
Pasal 21	21.067.515.172		13.172.014.120	8.085.571.052	-
PPh Pasal 25/29	290.287.124	-	100.050.300	91.196.824	
BPHTB	19.963.536.965	-	4.034.277.600	15.929.259.365	
Rugi Rata	1.944.366.928	-	268.689.530	726.979.398	-
Dasbor Daerah Migas	43.995.995.352		8.682.363.000	29.006.001.452	-
Dasbor Daerah Non Migas	2.700.000			2.700.000	
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-			
Bagian Daerah Penghasil Lainnya		-	-		
Bagian Daerah Penghasil Lainnya			-	-	-
Dasbor Daerah Selain Penghasil	313.500.000		9.600.000	303.900.000	
Biaya Pemungutan Migas	1.700.834.191	-	122.320.000	1.578.514.191	
Biaya Pemungutan Non Migas	4.000	-	-	4.000	-
Biaya Pemungutan Pasir Besi			-	-	-
Biaya Pemungutan Pasir Timah	-				
Biaya Pemungutan Pasir Timah		-			
Biaya Pemungutan Pasir Timah	7.186.821	-	200.000	7.186.821	
DBH	4.000		-	4.000	-
DAU	86.676.536.825	350.919.000	25.002.285.375	51.357.708.815	17.854.047.165
Migas	89.060.083.416		1.120.121.700	31.527.098.815	17.412.863
Minyak Bumi 15%	4.227.110.539	-	957.139.400		197.089.261
Minyak Bumi 0,5%	20.721.000	-	3.739.700	-	13.062.600
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi 70%	51.006.826.625		158.837.600	30.845.078.797	-
Gas Bumi 0,5%	574.453.995		2.000.000	512.020.015	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Minerba	3.112.793.317	350.919.300	90.704.602.975		17.202.112.928
Panas Bumi		300.919.300	404.644.650	-	241.361.150
Royalti	7.342.750.007		20.613.068.125	-	17.05 180.778
Pajak Daerah	-			-	-
Pajak Kendaraan	-				
Pajak Rokok		-	-		
Sumber Daya Alam Perikanan		-			
Kehutanan	677.401.379		1.430.420.700	-	667.018.32
DR	-			-	-
DPJ		-			
PSDH	677.401.379	-	1.401.420.300	-	667.018.321
Pertambangan	169.180.999		316.871.000	-	189.624.001
Grand Total	133.536.971.983	350.919.300	41.009.617.175	82.442.657.656	3.854.047.165

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Samarinda

(dalam rupiah)

JENIS DBH	LEBIH TA 2019	KURANG TA 2019	Lebih s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian Lebih s.d. TA 2019 (KEP-[illegible])	Sisa Lebih s.d. TA 2019 (SAS[illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
DBH	-		11.167.030.860	11.164.909.869	
PPh	-		11.167.030.860	11.164.909.860	-
PPh Pasal 21	-		3.393.394.771	3.392.308.774	-
PPh Pasal 25/29		-	7.773.636.089	7.772.601.086	-
PBB		-			
Dari Pusat			-		
Bagian Daerah Migas	-		-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Pertambangan Migas		-			-
Bagian Daerah Pertambangan Non Migas		-			
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			-		
Bagian Daerah Kehutanan	-			-	-
Bagian Daerah Perikanan	-			-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Migas		-			-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Non Migas		-	-		
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi	-		-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan		-		-	-
Bagian Pemerintah Pusat Perikanan		-			
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Minyak Bumi		-	-		
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Gas Bumi	-		-	-	
PPh Pasal 22 Impor	-			-	
PBB	-	199.707.089	105.803.121.011	38.6[illegible]043.468	67.059.077.543
Migas			5.210.166.642	5.205.166.372	-
Minyak Bumi 15%		-			
Minyak Bumi 0,5%		-	-		
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Otomatis	-		-	-	
Gas Bumi 30%	-		5.[illegible]72.914.174	5.455.644.172	
Gas Bumi 0,5%	-		91.329.194	91.327.193	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Otomatis		-			-
Pajak		-	85.[illegible]96.957.039	27.[illegible]922.111	67.059.070.928
Pertambangan		-		-	
Kehutanan	-		33.[illegible]54.354.439	27.[illegible]952.111	67.[illegible]72.043
PSDH	-			-	-
Iuran Tetap (Land Rent)	-			-	-
Iuran Eksploitasi (Royalti)		-			-
Pertambangan Panas Bumi		-			
Perikanan	-	199.707.089	-	-	
CHT	-			-	-
PNBP		-			-
PDLH		199.707.089	-		
Pertambangan			-		
Grand Total	-	199.707.089	111.[illegible]3.190.860	-4.[illegible]048.051	67.[illegible]3.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Samarinda

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA TA 2020	LB Sebelum TA 2020	Penyaluran KB DBH Sebelum TA 2020 (UU No. 3 / KM.7/2021)	KB DBH 2020 yang belum disalurkan	LB DBH 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	38.740.309.152		11.472.630.700	27.267.678.452	-
PBB	25.268.301.693	-	17.459.691.703	7.808.609.990	-
PPh Pasal 21	11.481.891.117	-	11.451.855.107	30.036.011	
PPh Pasal 25/29	7.808.716.513	-	1.032.736.500	6.775.979.913	
BPHTB	15.631.357.875		2.066.020.699	13.565.348.876	-
Pajak Rokok	1.701.051.002		202.680.764	1.498.370.238	-
Bagian Daerah Migas	1.836.113.086	-	1.036.712.500	5.201.701.086	-
Bagian Daerah Non Migas	15.475.267.518	-	7.905.030.500	7.570.236.918	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan	-		-	-	
Bagian Daerah Kehutanan	-			-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	115.269.000	-	8.001.900	200.267.100	
Bagian Pemerintah Migas	167.172.470	-	53.440.500	117.572.970	
Bagian Pemerintah Non Migas	263.843.854		184.720.500	354.123.354	
Bagian Pemerintah Panas Bumi				-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan		-			
Bagian Pemerintah Kehutanan			-		
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	7.186.294		978.900	7.187.294	
DAK	47.622			47.622	-
SDA	31.503.249.019	93.407.387.361	28.795.174.000	32.143.324.387	32.007.631.237
Migas	30.371.211.197	-	1.395.750.500	28.587.200.097	277.602.143
Minyak Bumi 15%	606.217.511		90.356.720		293.035.569
Minyak Bumi 0,5%	20.183.144		80.357.020	-	9.000.606
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 15%	32.209.171.742	-	108.329.020	32.031.216.233	-
Gas Bumi 0,5%	531.135.762	-	2.527.900	672.101.862	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Pertambangan	5.215.535	23.102.387.361	20.795.941.120	-	91.019.009.196
Kehutanan	31.219.535	-	145.199.273	-	54.172.240
Perikanan	-	93.182.387.361	20.814.348.427	-	3.306.455.205
Pertambangan Panas Bumi		-			-
Jaminan Kesehatan		-			-
Jaminan Lainnya			-		
Kehutanan Lainnya	-		-	-	
Pertambangan	532.720.435	-	1.535.536.700	-	501.136.247
DAK		-			-
BLUD			-		
TSDH	859.730.435		1.535.536.700	-	501.136.247
Perikanan	150.726.050		316.361.700	-	37.694.750
Grand Total	42.740.609.078	93.182.387.550	40.221.939.200	31.307.701.035	32.007.631.237

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Perangkat Pusat: [illegible]

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (SMT No. 3/PM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 57/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			8.03 [illegible]	8.03 [illegible]	
PPh			5.781 [illegible]	5.78 [illegible]	
PPh Pasal 21			2.482.758.621	2.482.758.621	
PPh Pasal 25/29			903.739.727	903.739.727	
PBB					
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pertambangan Umum					
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pertambangan Umum					
Biaya Pemungutan Pertambangan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Kehutanan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
Cukai					
PTA		278.083.877	37.343.049.770	10.000.709.084	32.348.510.641
Migas			1.007.207.482	1.007.207.482	
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%			573.210.166	573.210.166	
Gas Bumi 0,5%			129.150.836	129.150.836	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Non Migas			36.336.079.672	17.992.708.637	32.348.510.641
Landrent					
Royalti			36.336.079.672	17.992.708.637	32.348.510.641
Jasa Jaminan					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	278.083.877	1.186.562.020			185.562.020
PSDH			1.186.562.020		1.186.562.020
DR	278.083.877				
Perikanan					
Sektor Lain	278.083.877	35.156.487.750	79.212.901.720		32.348.510.641

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Penajam Paser Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DBH Triwulan I s.d. IV TA 2020 (MK No. 37/KM.7/2021)	KB TA 2021 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang telah diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3) - (4)	(6)
Pajak	29.610.268.236		9.502.361.020	12.872.301.017	83.206.179
PPh	6.417.483.381	-	3.909.520.420	2.505.961.961	-
PPh Pasal 21	6.133.363.149	-	3.612.742.000	2.520.621.149	-
PPh Pasal 25/29	270.021.032	-	9.781.420	84.340.832	-
PBB	5.196.710.907		5.891.213.150	10.587.536.450	83.206.179
Bagi Rata	1.911.659.696		282.389.730	1.726.270.266	
Bagian Daerah Kabupaten	6.187.678.102		5.149.922.500	2.705.161.520	
Bagian Daerah Kota Bukan	917.395	-	67.341.220	-	8.429.825
Bagian Daerah Kota Bukan		-	-	-	-
Bagian Daerah Kabupaten	1.311.0[illegible]2.150		781.241.060	529.840.590	
Bagian Daerah Kabupaten	3.058.570.617		1.111.221.000	2.741.105.312	
Bagian Daerah Kabupaten	215.780.067	-	8.894.300	206.999.107	-
Biaya Pemungutan Migas	21.0[illegible]0.101	-	15.305.200	53.73[illegible]01	-
Biaya Pemungutan Non Migas	27.650		2.197.200		2.129.934
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-				
Biaya Pemungutan Pertambangan	187.0[illegible]6.033	-	31.716.300	155.229.563	-
Biaya Pemungutan Kehutanan	191.[illegible]0.922		56.501.400	13[illegible].894.392	-
Biaya Pemungutan Sektor Pariwisata	1.490.031		295.800	7.127.221	
CHT	- 150			4.130	
SDA	89.577.070.033	452.[illegible]3.871	54.911.870.400	80.557.763.503	20.41[illegible].077.959
Migas	5[illegible].[illegible].320.122	-	1.279.[illegible]4.500	30.197.[illegible]2.916	445.098.396
Minyak Bumi 15%	536.[illegible]03.581		931.[illegible].300	-	451.[illegible].770
Minyak Bumi 0,5%	18.171.[illegible]70		32.925.100		14.7[illegible].660
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Offshore	-				
Gas Bumi 30%	29.305.381.356	-	201.[illegible].900	29.[illegible]09.[illegible]22.150	
Gas Bumi 0,5%	486.[illegible]90.202	-	3.346.620	485.462.462	-
Gas Bumi Dalam Kawasan Khusus		-	-	-	-
Mineral	[illegible].150.[illegible]23.913		21.[illegible]83.[illegible]2.750	[illegible]70.[illegible]50.965	10.[illegible]65.731.722
Panas Bumi	849.[illegible]0[illegible].102		10[illegible].250.230	[illegible]70.[illegible]30.765	
Royalti	1.015.[illegible]27.779		20.[illegible]79.[illegible]70.520		10.[illegible]65.731.722
Panas Bumi	-	-			
Iuran Eksplorasi		-	-	-	-
Iuran Eksploitasi		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	[illegible]10.[illegible]10.[illegible]71	[illegible].[illegible]3[illegible].[illegible]09.[illegible]09		2.[illegible]21.[illegible]50.[illegible]71
Iuran	-	-	-		-
PSDH		104.787.830	3[illegible].[illegible]81.[illegible]08	-	146.[illegible]77.775
DR		707.[illegible]20.[illegible]07	1.[illegible]16.[illegible]49.[illegible]73		2.[illegible]77.[illegible]73.[illegible]09
Reklamasi	159.[illegible]6.680		[illegible]10.[illegible]91.[illegible]00		1.[illegible]7.[illegible]0.[illegible]20
Grand Total	38.187.338.505	870.[illegible]13.[illegible]6[illegible]	7[illegible].413.[illegible]05.[illegible]07	47.[illegible]61.[illegible]56.[illegible]30	20.47[illegible].[illegible]44.[illegible]78

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mahakam Ulu

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar DBH TA 2019	Kurang Bayar DBH TA 2020	Alokasi Kurang Bayar DBH TA 2019 (PMK No. 222/PMK.07/2021)	Penyesuaian Alokasi Kurang Bayar DBH TA 2019 (KEP-333/PK/2021)	Sisa Kurang Bayar DBH TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	916.169.251	916.169.251	-
PPh	-	-	916.169.251	916.169.251	
PPh Pasal 21		-	139.980.951	139.980.951	
PPh Pasal 25/29			776.879.310	776.879.310	
PPN					-
Bagi Rata			-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Non Migas		-	-		
Bagian Daerah Dana Bunga					
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Perkebunan	-			-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-	-	
Bagi Pemerataan Migas			-		
Bagi Pemerataan Non Migas					-
Bagi Pemerataan Provinsi Induk	-			-	-
Bagi Pemerataan Perhutanan		-	-	-	
Bagi Pemerataan Perbendaharaan					
Bagi Pemerataan Sektor Lainnya					-
DPH	-	-	-	-	-
SDA	-	791.473.5.2	79.968.748.80	23.945.3 .9.138	54.013.109.032
Migas		-	5.679.670.067	5.679.670.067	
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi bagian Pertambangan	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	5.586.442.861	5.586.442.861	-
Gas Bumi 0,5%		-	93.233.806	93.233.806	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			
Pertambangan			66.011.308.117	10.[illegible]2.2[illegible]	52.219.060.025
Kehutanan	-				-
Pungutan	-		93.614.209.154	39.965.643.126	53.648.565.028
Perikanan	-	-	-	-	
Panas Bumi		-	-	-	
Pertambangan Lainnya					-
Kekurangan	-	297.873.512	1.994.934.000	-	1.994.934.000
DR		-	-	-	
DBH			1.994.934.000		1.994.934.000
DBH	-	297.873.512			-
Perikanan	-		-	-	-
Total	-	297.873.512	77.965.056.013	25.[illegible]86.964	52.043.469.025

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mahakam Ulu

(dalam rupiah)

URAIAN	Alokasi Definitif TA 2020	LRA Tahun TA 2020	Perubahan Alokasi TA 2020 (PMK No. 8/PK.7/2021)	KB TA 2020 yang Telah dialokasikan	KB TA 2020 yang Belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
Pajak	13.823.743.621		1.305.199.000	8.313.370.135	99.051.936
PPh	5.678.695.938		2.545.196.700	3.132.794.638	-
PPh Pasal 21	3.470.705.472	-	2.453.238.600	387.466.872	-
PPh Pasal 22/26	238.340.937	-	92.050.100	146.370.774	-
PBB	4.174.376.179	-	1.750.000.000	6.987.777.317	99.051.936
Bea Perol	1.157.196.395		242.330.100	1.914.810.996	
Bagian Daerah Pajak	200.617.537		50.000.000		6.536.463
Bagian Daerah Non Migas	336.070.557	-	34.215.100	30.344.452	-
Bagian Daerah Pajak Lain	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbatasan	420.922.021		505.600.000		170.178.979
Bagian Daerah Perkebunan	4.400.357.136		279.721.600	1.210.696.320	
Bagian Daerah Sektor Tertentu	215.530.027	-	9.504.000	926.594.027	-
Biaya Pemungutan Migas	7.022.024	-	9.260.000	-	330.216
Biaya Pemungutan Non Migas	11.007.197		1.000.000	10.176.787	
Biaya Pemungutan Pasal Lain					
Biaya Pemungutan Perkebunan	7.758.000	-	37.110.600	-	9.515.40
Biaya Pemungutan Perbatasan	218.171.340	-	15.595.400	224.095.545	
Biaya Pemungutan Sektor Tertentu	7.752.024		209.200	7.127.221	
PPN	7.150			1.150	
PTH	5.313.901.184	1.227.956.450	24.826.025.900	30.171.313.134	4.274.546.900
Migas	32.671.303.213	-	1.078.095.700	31.979.035.513	-
Bagian Daerah 15%	1.215.743.021	-	850.947.300	764.871.721	-
Bagian Daerah 0,5%	64.143.987		28.277.300	25.856.187	
Bagian Daerah Sektor Tertentu					
Gas Bumi 30%	30.891.396.762		150.870.100	30.970.000.092	-
Gas Bumi 0,5%	511.729.492	-	2.930.300	509.197.192	-
Gas Bumi Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Minerba	29.907.783.107	-	11.840.478.675	17.979.254.232	
Landrent	905.317.702		274.020.530	545.367.013	
Royalti	19.549.115.619		19.351.570.325	1.212.801.310	
Panas Bumi	-				-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi		-	-	-	-
Pendapatan Daerah Pemerintah					
Volume	5.180.830.315	1.227.956.450	3.872.921.050		1.234.716.185
DR	-	-		-	-
DBH	-	1.227.956.450	217.101.375	-	3.746.057.725
PBHB	776.830.319		2.825.240.775		2.016.302.760
Tambahan	213.074.630		289.103.275		82.028.715
Grand Total	83.634.334.791	1.227.956.450	30.031.329.250	42.145.737.867	4.671.519.726

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sulawesi Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2016	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	1.555.137.111	509.910.472	1.045.265.639
PPh	-	-	1.457.787.503	418.594.685	1.039.192.818
PPh Pasal 21			-	-	-
PPh Pasal 25/29	-		1.430.747.205	414.794.685	1.015.952.520
PBB	-		96.391.210	97.621.241	6.042.298
Cukai Hasil Tembakau	-	-			
Penerimaan Daerah Bagian		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Pasca Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan	-		16.180.251	8.036.015	7.217.791
Bagian Daerah Perikanan		-	14.271.750	14.197.262	-
Bagian Daerah Kehutanan			-	-	-
Bagian Pertambangan Migas					
Bagian Pertambangan Non Migas	-				
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-			-
Bagian Pertambangan Perikanan			830.533	406.366	424.167
Bagian Pertambangan Kehutanan			4.121.516	1.121.516	
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	-				
DAK	-	-	-	-	-
DTE	3.002.178.000	1.058.338	977.460.338	-	977.460.338
Migas					
Migas Blok Tiaka	-				
Migas Blok Senoro	-				
Migas Dana Bagi Hasil Kepada Daerah		-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi Sebesar Rangka Operasi					
Minerba	3.693.476.959		63.919.193		63.919.193
Iuran Tetap	-	-	63.919.193		63.919.193
Royalti	3.693.476.959	-			
Panas Bumi		-	-	-	-
Dana Produksi			-	-	-
Dana Hasil	-				
Bonus Produksi	-				
Kehutanan		2.230.838	915.461.200	-	915.461.200
PSDH		1.093.374	815.208.691	-	815.208.691
DBHDR					
PSDH	-	253.964	100.252.509		100.252.509
Perikanan	-	-			
Grand Total	3.693.476.959	2.230.838	2.539.583.361	509.910.472	2.029.672.889

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Sulawesi Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	DBH Tahun Ini (Tahun 2021)	DBH Definitif TA 2021	Penyaluran DBH Semesteran TA 2021 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	DBH TA 2020 yang belum diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[3]-[4]	[6]
Pajak	38.117.378.017	-	15.574.635.200	23.642.454.292	106.790.417
PPh	26.472.709.392		13.561.067.800	12.911.641.592	
PPh Pasal 21	21.692.514.010		12.350.732.705	11.732.491.341	
PPh Pasal 25/29	4.489.767.382		1.010.915.105	14.78.852.751	-
PPN	10.642.168.619	-	2.013.567.400	10.763.063.636	106.790.417
Hidrokarbon	-	-	-	-	
Bagian Daerah Migas	172.038.000		274.037.500		102.870.000
Bagian Daerah Non Migas	9.247.161.018		1.352.071.200	8.035.108.015	
Bagian Daerah Pasal Tertentu	1.797.941.245		212.014.000	1.185.491.845	-
Bagian Daerah Perikanan	-	-		-	-
Bagian Daerah Pertambangan	35.207.302	-	7.515.600	37.991.702	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	720.219.377		43.074.466	7.1.24.177	
Biaya Pemungutan Migas	2.308.037		11.490.020		4.428.617
Biaya Pemungutan Non Migas	89.032.252	-	9.4.0.500	334.694.550	-
Biaya Pemungutan Pasal Tertentu	70.168.777	-	3.076.620	67.192.177	
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perikanan	3.048.127		937.020	2.111.120	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	32.696.907	-	1.9.2.250	3.761.107	-
CHT	-	-	-	-	
DBH	57.614.320.191	130.797.300	1.165.270.250	56.317.437.197	106.271.773
Minyak					
Minyak Bumi 85%	-				-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Penyesuaian setelah Kenaikan Ditjen	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%		-			
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dari Jenis Regulasi Khusus					
Pertambangan	34.562.293.017		1.011.521.875	33.550.781.042	-
Iuran Tetap	961.343.810	-	104.511.625	856.397.965	-
Royalti	33.700.959.207	-	919.155.850	32.781.785.357	
Pasal Dua	2.932.092.057		368.474.300	2.563.617.757	
Jenis Produksi					
Iuran Tetap	-				-
Setoran Bagian Pemerintah	1.537.302.257	-	369.474.300	2.563.61.757	-
Kehutanan	-	130.797.300	67.060.475	-	197.271.775
DR		130.201.518	37.207.477		168.209.061
PSDH					-
DBHI	-	27.639.131	10.2.2.60	-	8.7.2.384
Pertambangan	-	-	-	-	-
Grand Total	90.720.038.115	130.797.300	17.072.692.650	79.2.8.405.337	301.781.192

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bekasi, Mimpi Indah

(Dalam Rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2016	KB TA 2019	LB sd TA 2019 (PER-25/PB.05/2020)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 9/KM.7/2021)	Sisa LB sd TA 2019 (BMN No. S/BL.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	416.196.590	416.196.590	20.405.776
PPh			636.777.7[illegible]	636.777.7[illegible]	-
PPh Pasal 21			156.485.250	156.485.250	-
PPh Pasal 25/29	-		219.247.161	219.247.161	
PBB	-	-	20.125.779		20.125.779
Bagi Hasil	-	-			-
Bagian Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasca Bagi	-				
Bagian Daerah Pertambangan	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan		-	9.638.875	-	13.601.875
Bagian Daerah Kehutanan			-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	-				
Bagian Pertambangan Non Migas	-	-			
Bagian Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Pertambangan Pertanahan			-	-	-
Bagian Kehutanan PSDH	-		510.903		510.903
Bagian Perikanan Sektor Lainnya	-	-			
Cukai		-	-	-	-
DTH	3.179.913.938	95.939	4.273.870.378	647.242.761	3.721.030.598
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi sebelum Kenaikan Harga		-	-	-	-
Gas Bumi 15%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi Sebelum Kenaikan Harga	-				
Minerba	3.179.913.938		1.236.927.350	242.242.492	3.694.177.710
Panas Bumi	-	-	-		-
Kehutanan	3.179.913.938	-	4.136.428.550	642.242.730	3.592.177.253
Pajak Bumi			17.050.518	-	17.050.518
Bunga Pinjaman				-	
Denda Pajak	-				
Sektor Lainnya	-	-	17.050.518		17.050.518
Kehutanan		95.939	2.408.337	-	2.408.337
DR			-	-	-
PHPB	-				
PSDH	-	95.939	21.036.327		21.036.327
Perikanan		-	-	-	-
Grand Total	3.179.913.938	95.939	4.660.077.678	647.242.761	3.759.060.976

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bolaang Mongondow

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran KB 2021 Anggaran SAL (PMK No. 39/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	7.291.422.219		1.730.979.000	5.527.013.777	10.210.281
PBB	1.172.382.499		351.029.200	1.211.021.249	-
PPh Pasal 21	83.188.851		933.982.200	1.139.170.650	-
PPh Pasal 25/29	120.291.669	-	30.347.000	1.068.468.669	-
PBB	5.183.046.027	-	913.050.600	4.269.995.427	3.960.281
Jenis Pajak	1.391.979.048		265.070.700	1.126.870.748	
Bagian Daerah Migas	106.498.107		109.030.100		2.177.010
Bagian Daerah Non Migas	3.206.581.262		351.960.700	2.854.620.562	-
Dalam Daerah Penerimaan Migas	-	-	-	-	-
Dalam Daerah Penerimaan Non Migas		-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan	20.380.241		6.415.800	36.068.717	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.595.301		2.654.520	208.987.787	-
Biaya Pemungutan Migas	5.791.385	-	1.450.520	-	136.567
Biaya Pemungutan Non Migas	94.030.061	-	7.271.420	86.758.064	
Biaya Pemungutan Dalam Daerah Migas					
Biaya Pemungutan Dalam Daerah Non Migas	-				-
Biaya Pemungutan Pertambangan	2.024.531	-	584.000	542.551	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.737.281	-	203.820	6.493.781	
CHT					
SDA	79.645.940.179	6.976.298	682.823.700	84.125.112.141	166.340.369
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 6,5%	-				-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	29.007.807.378	-	510.937.600	33.787.431.728	-
Landrent	70....	-	36.476.650	7....	
Royalti	29....		474.013.050	33....	
Panas Bumi	16....		52.020.100	30....	
Dana Reklamasi	-				-
Dana Hasil	-	-	-	-	-
Sebesar Belum Ditentukan	115....	-	32....	346....	-
Kehutanan		6.976.298	2....		9....
DR					
PSDH	-	-	-	-	-
PSDH	-	6.976.298	2.3....	-	9....
Pungutan	1....		216....		2....
Grand Total	86....	6.976.298	2....	8....	17....

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Minahasa

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (SMS No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 9/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PajAk					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PPN					
Pajak Bumi dan Bangunan					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Kabupaten/Kota					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Pemerataan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Bagian Pemerintah Daerah Migas					
Bagian Pemerintah Daerah Non Migas					
Bagian Pemerintah Pusat					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
CHT					
DBH	931.762.736	9.389	9.677.809	1.935.560	7.742.249
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 3,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 15%					
Gas Bumi 3,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Kehutanan	921.742.709				
Iuran Hasil Hutan					
Provisi Sumber Daya Hutan					
Pungutan Hasil Perikanan					
Iuran Tetap					
Iuran Eksploitasi					
Pertambangan Umum		4.349	9.677.809	1.935.560	7.742.249
PBB					
BPHTB					
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi/Badan		4.349	9.677.809	1.935.560	7.742.249
Panas Bumi					
Otsus dan Dana Keistimewaan	9.719.870	4.349	9.677.809	1.935.560	7.742.249

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Minahasa

(dalam rupiah)

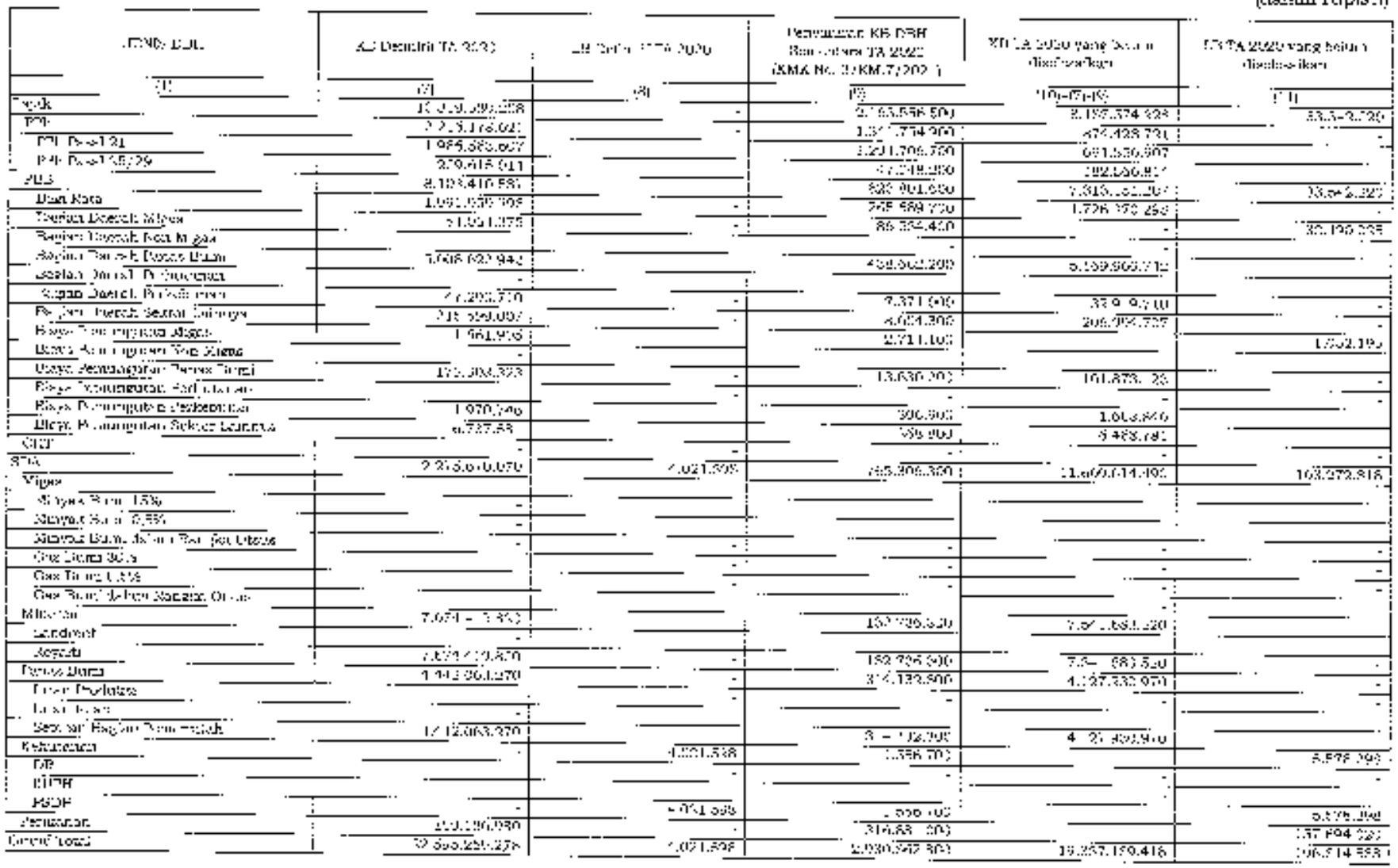

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sangihe

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS	KURANG BAYAR TA 2016	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR s.d TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LEBIH BAYAR TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4] - [5]
Pajak	-	-	25.929.806	3.514.630	22.415.176
PBB	-	-	25.929.806	3.514.630	22.415.176
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25 dan 29	-	-	25.929.806	3.514.630	22.415.176
PPN	-	-	-	-	-
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Lain	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pajak Lain	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
DAK	-	-	-	-	-
DBH	321.792.738	39.281	7.927.680	-	7.927.680
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Pinjaman	321.792.738	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Pajak	321.792.738	-	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Sumber Daya Pertambangan	-	-	-	-	-
SDA Migas	-	39.281	7.927.680	-	7.927.680
DAK	-	-	-	-	-
DBHCHT	-	-	-	-	-
TKDD	-	39.281	7.927.680	-	7.927.680
Pembulatan	-	-	-	-	-
Grand Total	321.792.738	39.281	33.857.486	3.514.630	30.342.856

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sanggau

(dalam rupiah)

URAIAN	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran KE DBH Semester I TA 2020 (SMP No. S-[illegible]/PK.7/2020)	KB TA 2020 yang telah diselesaikan	LB TA 2020 yang telah diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
Pertak	4.466.4[illegible]	-	1.268.685.600	3.199.504.928	29.811.291
PPh	7.017.280.309		958.042.005	27.046.936	-
PPh Pasal 21	1.775.294.695		405.805.700	782.968.995	-
PPh Pasal 25/29	232.302.613		111.136.300	191.067.313	-
PBB	2.113.306.100	-	360.010.500	2.113.361.600	29.841.291
BPHTB	1.891.309.999	-	285.689.700	1.128.270.293	
Bagian Daerah Migas	35.704.[illegible]		62.765.500	-	29.841.000
Bagian Daerah Non Migas	97.381.288		20.057.000	152.943.338	-
Bagian Daerah Penerimaan Dalam	-				-
Bagian Daerah Penerimaan		-			
Bagian Daerah Penerimaan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	114.753.201		0.284.500	705.53[illegible].707	-
Biaya Pemungutan Migas	1.292.775		1.000.100	-	747.265
Biaya Pemungutan Non Migas	0.329.570	-	537.030	5.761.570	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi			-		
Biaya Pemungutan Penerimaan	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Pengembalian	-				-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	0.711.181	-	388.030	0.722.291	-
CHT			-		
DBH	10.706.426.348	3.985.398	302.301.400	10.569.366.966	183.209.110
Migas	-			-	-
Minyak Bumi 6%	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%		-			
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Gas Bumi 30%			-	-	
Gas Bumi 0,5%	-		-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Pertambangan	10.230.375.701	-	102.730.000	9.997.035.801	-
Landrent	2.413.[illegible].281	-		2.413.[illegible].241	
Royalti	7.817.[illegible].420	-	35.736.001	7.981.[illegible].329	
Pajak Lain	418.889.[illegible]		67.[illegible].401	365.930.465	
Iuran Eksplorasi	-		-	-	-
Iuran Tetap	-	-			-
Penerimaan Negara Pertambangan	218.[illegible].[illegible]	-	52.[illegible].302	303.230.100	
Kehutanan		3.[illegible].[illegible]	15.4.702		5.390.[illegible]
DR	-		-	-	
IHPH	-	-		-	-
PSDH		3.985.598	1.[illegible].102		5.5[illegible].598
Perikanan	100.192.030	-	816.63[illegible].[illegible]		177.[illegible].020
Jumlah Total	3.170.[illegible].[illegible]	3.[illegible].[illegible]	1.8[illegible].477.302	13.[illegible].[illegible].[illegible]	1[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bitung

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	LB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Jml LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak		-	1.017.171.148	192.893.787	824.277.361
PPh			1.017.171.148	192.893.787	824.277.361
PPh Pasal 21			970.877.642	192.893.787	777.983.855
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi/Badan			46.293.506		46.293.506
PBB	-	-	-	-	-
Bea BPHTB	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21	-				
Bagian Daerah Pasal 25/29	-	-	-		-
Bagian Daerah Perbedaan		-	-	-	-
Bagian Daerah untuk sektor lainnya					
Bagian Pemerintah Migas	-				
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pasal 21		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perbedaan					
Bagian Pemerintah Pasal 25/29					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai	-	-	-	-	-
DBH	521.762.706	36.291	7.327.689	-	7.327.689
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	521.762.706	-			
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	521.762.706	-	-	-	-
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi	-				
Setoran Bagian Pemerintah	-	-		-	-
Kehutanan		36.291	7.327.689	-	7.327.689
DR					
PSDH	-				
Reboisasi	-	36.291	7.327.689	-	7.327.689
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	521.762.706	36.291	1.014.498.837	192.893.787	821.604.972

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kode Bilangan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB Definitif TA 2020	PB Definitif TA 2020	Penyaluran TA 2021 (PMK-[illegible]/PMK.07/2021)	PB TA 2020 yang Belum Disalurkan	PB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	30.428.5[illegible]8.6[illegible]5		6.277.102.000	24.[illegible]93.537.8[illegible]	20.000.201
PBB	2.697.050.760	-	1.656.272.000	1.[illegible]19.1[illegible].460	
PPh Pasal 21	1.[illegible]4.828.332	-	[illegible]91.[illegible]48.200	1.[illegible]13.[illegible]42.132	
PPh Pasal 25/29	974.[illegible]78[illegible].[illegible]05	-	74.367.[illegible]01	[illegible]00.[illegible]96.[illegible]03	-
BBN	2.[illegible]23.84[illegible].[illegible]63		4.[illegible]87.[illegible]87.[illegible]05	[illegible]2.864.[illegible]95.[illegible]58	[illegible]2.686.201
Bagi Rata	[illegible]91.[illegible]50.[illegible]36		202.[illegible]89.[illegible]00	[illegible].[illegible]20.[illegible]77.[illegible]03	-
Bagian Daerah Kaya	36.[illegible]53.[illegible]36		[illegible]5.[illegible]8.[illegible]00		[illegible]1.[illegible]54.[illegible]02
Bagian Daerah Non Migas	[illegible]7.[illegible]51.[illegible]10.[illegible]20	-	4.[illegible]1.[illegible]79.[illegible]40	[illegible]3.[illegible]80.[illegible]72.[illegible]80	
Bagian Daerah Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-				-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible]07.[illegible]53.[illegible]07	-	[illegible]6.[illegible]17.[illegible]00	[illegible]17.[illegible]35.[illegible]30	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible].[illegible]23.[illegible]91	-	[illegible]35.[illegible]61	-	[illegible]1.[illegible]09
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]73.[illegible]27.[illegible]16		[illegible]30.[illegible]74.[illegible]00	[illegible]36.[illegible]65.[illegible]1[illegible]3	-
Biaya Pemungutan Pajak Daer.	-				
Biaya Pemungutan Pertambangan		-			
Biaya Pemungutan Perkebunan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible].[illegible]46.[illegible]91		[illegible]67.[illegible]00	[illegible].[illegible]38.[illegible]81	-
OLT	-				-
JUMLAH	67.[illegible]88.[illegible]00[illegible].[illegible]54	[illegible]37.[illegible]29.[illegible]65[illegible]	[illegible]17.[illegible]91[illegible].[illegible]97	[illegible]1.[illegible]13.[illegible]37.[illegible]77	[illegible]70.[illegible]31.[illegible]06
Migas		-	-		
Migas Bagi Hasil 15%		-	-	-	-
Migas Bagi Hasil 0,5%	-			-	-
Migas dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%		-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Minyak Bumi	[illegible]7.[illegible]05.[illegible]1[illegible].[illegible]09	[illegible]25.[illegible]27.[illegible]06[illegible]	[illegible]36.[illegible]19.[illegible]50	[illegible]8.[illegible]57.[illegible]20[illegible].[illegible]59	[illegible]96.[illegible]01[illegible].[illegible]13
Kondensat	-	[illegible]21.[illegible]22[illegible].[illegible]06[illegible]	[illegible]3.[illegible]28.[illegible]50	-	[illegible]96.[illegible]01[illegible].[illegible]13
Panas Bumi	[illegible]7.[illegible]10.[illegible]94[illegible].[illegible]09		[illegible]31.[illegible]20.[illegible]30[illegible]	[illegible]0.[illegible]77.[illegible]20[illegible].[illegible]59	-
Pajak Daerah	[illegible]15.[illegible]03.[illegible]36[illegible]		[illegible]2.[illegible]29.[illegible]10[illegible]	[illegible]00.[illegible]23[illegible].[illegible]16[illegible]	
Cukai Tembakau		-	-		
Opsen Pajak		-	-	-	
Subtotal Bagian Pemerintah	[illegible]15.[illegible]90[illegible].[illegible]80[illegible]		[illegible]2.[illegible]30.[illegible]40[illegible]	[illegible]48.[illegible]29[illegible].[illegible]45[illegible]	-
Kehutanan	-	[illegible].[illegible]58.[illegible]39[illegible]	[illegible].[illegible]4.[illegible]70[illegible]	-	[illegible].[illegible]30.[illegible]79[illegible]
IR	-	-			
PDPT		-	-		
PBPH		[illegible].[illegible]48.[illegible]39[illegible]	[illegible]1.[illegible]47.[illegible]70[illegible]	-	[illegible].[illegible]20.[illegible]96[illegible]
Perikanan	[illegible]9[illegible].[illegible]36.[illegible]80[illegible]		[illegible]11.[illegible]51.[illegible]10[illegible]	-	[illegible]37.[illegible]64.[illegible]00[illegible]
Grand Total	[illegible]8.[illegible]00.[illegible]44.[illegible]07	[illegible]37.[illegible]29.[illegible]10[illegible]	[illegible]8.[illegible]15.[illegible]92.[illegible]50[illegible]	[illegible]1.[illegible]20.[illegible]75.[illegible]4[illegible]	[illegible]72.[illegible]77.[illegible]37

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Manado

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2016	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 226/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB TA 2019 (PMK No. 37/PMK.07/2021)	Sisa LB TA 2019 (PMK No. 37/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak		-	3.497.063.314	1.849.141.501	1.647.921.813
PPh		-	39.721.071	39.721.071	-
PPh Pasal 21			-	-	-
PPh Pasal 25/29	-		39.721.071	39.721.071	-
PBB	-		3.457.342.243	1.809.419.430	1.647.921.813
Dana Bagi Hasil	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat Migas		-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-		2.739.419.127	987.419.623	1.851.719.504
Bagian Daerah Penghasil Non Migas	-				
Bagian Daerah Perkebunan		-	-		
Bagian Daerah Pajak Lainnya			-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-			-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Bagian Pemerintah Pusat Dana Reboisasi		-	96.626.119		96.626.119
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-			-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-				
Cukai		-	-		
PPh	921.782.705	36.281	10.758.185	-	10.758.185
Migas				-	-
Minyak Bumi PPh	-			-	-
Minyak Bumi Sisa	-	-			
Minyak Bumi Sisa Bagian Daerah		-	-		
Gas Bumi 15%		-	-	-	
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi Sisa Bagian Daerah	-		-	-	-
Minerba	921.782.705		3.410.000		3.410.000
Landrent	-	-	3.410.000		3.410.000
Royalti	921.782.705	-			
Panas Bumi		-	-	-	
Sumber Daya Air			-	-	-
Iuran Tetap	-			-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan		36.281	7.337.569		7.337.569
PSDH		-	-	-	-
IHPH	-			-	-
PSDH	-	36.281	7.337.569		7.337.569
Perikanan		-	-		
Grand Total	921.782.705	36.281	3.517.857.503	1.849.141.501	1.668.716.002

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Manado

(dalam rupiah)

JENIS DBH	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4]-[5]	[7]
	ED Definitif TA 2022	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KE DAU Semester I TA 2021 (KMK No. 317/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan		
Pajak	15.747.357.263		7.270.000.000	8.701.856.322	1.324.000		
PPh	13.171.382.487		5.894.729.307	6.599.651.295			
PPh Pasal 21	12.166.702.865	-	5.196.673.490	6.271.126.490	-		
PPh Pasal 25/29	1.001.760.252	-	668.055.702	328.775.745	-		
PBB	2.295.101.794		991.825.500	1.304.355.067	3.124.060		
Bagi Hasil	59.359.960		200.000.702	1.770.270.298			
Bagian Daerah Migas	95.375.305		90.281.105		1.903.792		
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-			
Bagian Daerah Pasal 4 ayat (2)	579.370	-	578.700	-	4.370		
Bagian Daerah Pasal 21				-	-		
Bagian Daerah Pasal 26	-						
Bagian Daerah Sektor Lainnya	705.917.307	-	20.410.220	172.771.007			
Biaya Pemungutan Migas	2.374.247	-	2.075.500	-	137.353		
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	-		
Biaya Pemungutan Pasal 4 ayat 2	16.481		14.920	281			
Biaya Pemungutan Pasal 21	-	-					
Biaya Pemungutan Perseorangan		-	-	-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.119.151		742.020	5.246.581	-		
CHT	-						
DBH	8.024.716.345	5.021.949	501.761.810	7.970.139.102	184.150.242		
Migas	-	-	-	-	-		
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%				-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-						
Gas Bumi 30%	-						
Gas Bumi 0,5%	-	-	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-		
Mineral	1.277.220.830	1.030.050	130.578.977	7.541.683.920	1.176.053		
Iuran Tetap		1.030.050	130.973		1.176.053		
Royalti	7.974.220.830		130.736.302	7.541.683.920			
Pajak Ekspor	450.999.545		50.139.900	291.410.615			
Barang Produksi	-	-	-	-			
Barang Tetap		-	-	-	-		
Sumber Daya Alam Perikanan	450.999.515		50.139.900	291.440.615	-		
Kehutanan	-	2.990.899	1.671.700		5.580.209		
PSDH	-	-	-	-	-		
DR		-	-	-	-		
PSDH		2.990.899	1.514.700	-	5.580.209		
Pertambangan	59.185.982		311.491.030		157.074.028		
Grand Total	24.051.552.638	5.021.949	7.791.910.975	16.120.019.217	347.331.112		

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Talaud

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB TA 2020	KB TA 2020	LB s.d TA 2019 (PMK No. 253/PMK.07/2020)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 718/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 8/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 22/26					
PPh Pasal 23					
PPh Pasal 25/29					
PPh Pasal 4 ayat (2)					
PPh Pasal 15					
PBB					
BPHTB					
Cukai Hasil Tembakau					
Pajak Rokok					
Pajak Alat Berat					
Pajak Hotel					
Pajak Restoran					
Pajak Hiburan					
Pajak Reklame					
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Pengambilan Mineral Galian C					
Pajak Parkir					
Pajak Air Tanah					
Pajak Sarang Burung Walet					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Lainnya					
DBH	651.782.708	39.281	46.254.182	-625.416	131.710.764
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Dalam Rangka DMO					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam rangka DMO					
Minerba	651.782.708		130.020.792	11.637.416	124.501.376
Dana Bagi Hasil			130.020.792	11.637.416	124.501.376
Royalti	651.782.708				
Pajak Progresif					
Pajak Perikanan					
Pajak Rokok					
Pajak Karbon					
Kehutanan					
Reboisasi		39.281	7.327.089		7.327.089
DR					
PSDH					
Jumlah		39.281	7.327.089		7.327.089
Pajak Lainnya					
Grand Total	651.782.708	39.281	146.364.152	11.637.416	131.710.764

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Talaud

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Tahun TA 2020	KB Tahun TA 2021	Penyaluran DBH TA 2021 Semester I TA 2020 (PMK No. 32/PMK.07/2020)	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	DBH TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10 = (7-9))	(11)
Pajak	1.667.174.003	-	1.039.128.204	1.574.953.351	92.220.652
PPh	1.361.014.351	-	665.737.800	696.943.151	
PPh Pasal 21	1.212.046.916		631.257.100	580.789.816	-
PPh Pasal 25/29	148.967.435		34.673.700	78.014.735	-
PBB	2.272.159.652		337.917.702	1.934.241.950	47.303.044
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.941.050.096	-	295.688.102	1.720.320.298	
Cukai Hasil Tembakau	331.109.556	-	42.229.600		47.422.029
Pajak Daerah		-		-	-
Pajak Rokok	-			-	-
Pajak Parkir					
Pajak Air Tanah		-			
Pajak Sarang Burung Walet	219.031.377		9.020.700	209.010.677	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.194.365		2.927.300	-	583.035
Pajak Alat Berat	-	-			-
Pajak Reklame		-			
Pajak Penerangan Jalan			-	-	-
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Air Bawah Tanah	-			-	-
Pajak Parkir	67.909.071	-	282.000	67.627.071	-
Opsen		-			
PDRD	8.261.771.000	3.083.798	508.851.402	7.756.843.496	150.329.316
Hotel				-	-
Restoran	-			-	-
Hiburan	-	-			
Reklame		-			
Penerangan Jalan		-			
Mineral Bukan Logam dan Batuan		-		-	-
Parkir					
Air Tanah				-	-
Sarang Burung Walet					
Pajak Alat Berat dan Alat Berat Perairan					
Pajak Tontonan					
Pajak Hiburan					
Pajak Reklame					
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
Pajak Parkir					
Pajak Air Permukaan					
Pajak Rokok					
Minerba	7.974.413.331		132.730.600	7.841.682.720	-
Landrent	-				
Royalti	7.971.111.355	-	132.730.600	7.841.582.720	
Pajak Progresif	115.868.365	-	52.659.420	316.707.765	
Dana Reboisasi			-	-	-
Dana Bagi Hasil	-			-	-
Kelompok Usaha Pemanfaatan	418.660.646		52.659.420	366.200.765	
DBH Perikanan		3.083.798	1.544.700		1.539.098
PSDH			-	-	
DBHP	-				-
PNBP	-	3.083.798	1.544.700		1.539.098
Cukai	150.720.330	-	316.991.000		147.057.020
Grand Total	11.886.050.736	3.083.798	537.536.502	9.542.987.922	297.129.062

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Minahasa Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2021)	Penyesuaian LEBIH BAYAR TA 2019 (KSSK No. 1/KM.7/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-		21.241.607	3.737.223	20.503.617
PPh	-	-	10.793.839		10.793.839
PPh Pasal 21		-	-		
PPh Pasal 25/29		-	10.793.839	-	10.793.839
PBB			7.447.768	3.787.223	3.713.775
Pajak Rokok					
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas			-		
Bagian Daerah Penerimaan Tertentu		-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-		3.191.094	3.737.223	3.414.775
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			
Pasca Penambangan Migas		-	-	-	-
Pasca Penambangan Non Migas				-	-
Biaya Penambangan Panas Bumi	-				
Biaya Penambangan Kehutanan	-	-			
Biaya Penambangan Perkebunan			705.202	-	253.020
Biaya Penambangan Sektor Lainnya				-	-
CHT	-				
DAK	501.782.706	36.261	13.128.091		13.128.091
Migas		-	-	-	
Minyak Bumi PSO		-	-	-	-
Minyak Bumi Non PSO					-
Minyak Bumi Infrastruktur Ruas Otsus	-				
Gas Bumi PSO	-				
Gas Bumi Non PSO		-	-		
Gas Bumi Infrastruktur Ruas Otsus		-	-	-	-
Minerba	121.953.709		-	-	-
Panas Bumi				-	-
Otsus II	501.782.706				
Pokok Otsus	-				
Tambahan Otsus		-	-		
Infrastruktur Provinsi				-	-
Kehutanan	-	36.261	13.128.091		13.128.091
DAU	-	-	-		
DTDW		-	-	-	-
DBH		36.261	13.128.091	-	13.128.091
Pajak Lain	-				
Grand Total	501.782.706	36.261	37.072.271	3.737.223	33.334.048

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Minahasa Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Defisit TA 2020	LB Defisit TA 2020	Penyaluran (s.d DRK Surat ... Tgl 2021 (KMK No. ...)	KB TA 2021 yang belum dilunasi	LB TA 2021 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	652.819.704	30.023.804	1.111.124.000	3.091.817.000	61.290.701
PBB	2.091.727.901	-	803.803.700	1.287.924.201	
PPh Pasal 21	2.195.618.905	-	553.109.700	553.559.136	-
PPh Pasal 25/29	186.419.000	-	51.600.000	37.360.064	-
PBB	2.961.69...507	30.122.803	109.330.800	5.307.558.464	84.290.761
Bea Ba...	1.961.950.606		205.351.700	1.710.273.298	
Bagian Daerah Migas	51.460.777	-	53.017.900		30.565.123
Dhigaan Daerah Dari Migas		20.208.702	3.405.600	-	61.121.701
Bagian Daerah Pajak Rokok	491.902		52.800	54.602	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-				-
Bagian Daerah Perikanan	60.060.605		25.202.900	3.182.123	
Bagian Daerah Pekerja Lainnya	213.390.007	-	6.504.300	926.391.707	
Bagian Pertambangan Minyak	1.951.942	-	2.872.500	-	662.738
Bagian Pertambangan Dari Migas	-	911.305	643.300		1.909.505
Bagian Pertambangan Panas Bumi	5.344		12.100	1.202	
Bagian Pertambangan Perhutanan		-	-		
Bagian Pertambangan Pertukangan	2.753.750		631.500	3.707.353	-
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	6.707.591		209.800	6.615.791	-
Cukai	-	-			
SDA	5.241.370.610	22.615.878	588.428.000	7.676.647.214	193.816.595
Migas		-	-	-	-
Minyak Bumi 15%			-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-				
Minyak Bumi dari Kontrak Khusus	-	-			
Gas Bumi 30%	-	-			
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	
Cadangan Dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba	7.5... 2.429.512	17.290.030	1...4.000.105	7...1.677.045	22.861.325
Panas Bumi	-	17.290.930	5.000.975		22.861.325
Kehutanan	7.6...3.426.045		1...1.000.000	7...7.422.090	
Perikanan	420.914.504	-	95.298.275	282.915.319	
Pertanian		-	-	-	
Perkebunan			-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	439.514.599	-	95.358.575	285.971.810	-
Kehutanan	-	5.299.919	1.955.030		7.230.273
Air		-	-		
Minyak		-	-	-	-
PNBP		5.391.919	1.955.225		7.230.273
Panas Bumi	139.154.630		310.951.030		157.074.228
Jumlah Total	7.863.428.825	52.938.672	1.890.504.030	11.275.891.979	270.136.369

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tanjungbaru (dalam rupiah)

URAIAN	TA 2018	TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)	Stlh LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-		27.407.741	76.047.286	103.455.027
PPh			27.407.741	20.047.286	103.455.027
PPh Pasal 21			134.078.227	20.047.286	77.812.171
PPh Pasal 25/29			22.029.514		22.029.514
PBB	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi	-				-
Bagian Daerah Pertambangan Umum	-	-		-	-
Bagian Daerah Kehutanan		-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		-	-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perkebunan					-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT		-	-	-	-
DBH	321.782.708	36.281	7.327.689		7.327.689
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Kawasan Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%			-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Kawasan Otsus					
Non Migas	321.782.708			-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Reboisasi	321.782.708	-	-	-	-
Pajak Daerah					
Hasil Produksi					
Dana Reboisasi	-				-
Sumber Daya Alam Perikanan	-	-	-	-	-
Kehutanan		36.281	7.327.689	-	7.327.689
PBB					
PPh 21	-				
PPh 25	-	36.281	7.327.689	-	7.327.689
Pertambangan	-	-	-	-	-
Grand Total	321.782.708	36.281	131.735.430	20.047.286	107.784.144

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tomohon

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH Triwulan IV TA 2020 (KEP-[illegible]/PK/2020)	DBH yang belum disalurkan	LB DBH 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 21	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPN	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Non Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Atas Laut	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Perbatasan		-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya					
Bagian Daerah Pajak Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Perkebunan	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PPnBM			-	-	
PPh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi Bekas Rangka Atas			-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi Bekas Rangka Atas	-	-			
Panas Bumi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Landrent		-	-	-	-
Iuran Tetap	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pertambangan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Iuran Tetap	-		-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Royalti Panas Bumi		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
PPh	-				
PPh DPR	-	-	-		
PPh DN		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Perikanan	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Cukai Tembakau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Minahasa Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	KB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 22/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4)-(5)
Pajak			13.470.192.315	3.427.883.522	10.042.308.793
PPh	-		891.029.050		891.029.050
PPh Pasal 21	-	-	493.076.050		493.076.050
PPh Pasal 25/29	-	-	397.953.000	-	397.953.000
PBB		-	12.579.163.265	3.427.883.522	9.151.279.743
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas	-	-	11.470.092.157	3.427.883.522	8.042.208.635
Bagian Daerah Dana Bunga		-	175.739.187	-	175.739.187
Bagian Daerah Dana Migas			-	-	-
Bagian Daerah Dana Reboisasi			277.282.187		277.282.187
Bagian Daerah Bakau Lainnya	-	-			
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas			653.750.736	-	653.750.736
Bagian Pemerintah Dana Bunga			24.397.231		24.397.231
Bagian Pemerintah Dana Reboisasi	-	-			
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	11.428.937	-	11.428.937
Bagian Pemerintah Perikanan Lainnya		-	-	-	-
Cukai					
SDA	52.782.703	56.281	2.950.956.152		2.950.956.152
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%				-	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 3,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Panas Bumi	321.762.703	-	2.525.516.217	-	2.525.516.217
Pertambangan			2.525.516.217	-	2.525.516.217
Hutan	321.762.703				
Pertambangan Minerba	-		397.212.505		397.212.505
Iuran Produksi	-	-	24.915.191		24.915.191
Iuran Tetap		-	-	-	-
Pertambangan Panas Bumi			372.297.314	-	372.297.314
Kehutanan	-	56.281	7.327.689		7.327.689
DR	-	-			
PSDH	-	-	-	-	-
DBHT		56.281	7.327.689	-	7.327.689
Perikanan					
Pertambangan	52.782.703	56.281	23.707.961.727	3.427.883.522	18.772.968.250

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Minahasa Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Pada TA 2020	LB Pada TA 2020	Penyaluran DBH Pada TA 2020 (KEP-[illegible])	LB TA 2020 yang telah disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[7]	[8]	[9]	[10] [7, 9]	[11]
Pajak	1.050.153.272		2.181.998.350	8.897.172.078	29.272.094
PPh	32.517.851		1.702.241.600	1.670.577.761	-
PPh Pasal 21	2.491.948.467	-	1.695.077.600	1.036.430.542	-
PPh Pasal 25/29	277.869.[illegible]12	-	7.536.000	177.542.[illegible]19	-
PBB	8.167.010.711	-	787.414.350	7.353.999.973	20.272.761
Bea BPHTB	1.991.056.[illegible]95		2.165.249.700	1.720.275.298	
Pajak Daerah Migas	47.973.041		10.128.300		28.384.096
Pajak Daerah Non Migas	8.661.970.[illegible]02	-	905.868.500	5.256.905.690	-
Pajak Daerah Pajak Rokok	1.179.935	-	5.653.200	535.205	-
Pajak Daerah Kendaraan	-		-		
Pajak Daerah Kendaraan	97.829.270		9.905.900	21.736.249	
Pajak Daerah Bahan Bakar	315.599.107		8.601.300	205.961.[illegible]01	-
Biaya Pemungutan Migas	1.[illegible]47.935	-	9.565.102	-	9.782.5
Biaya Pemungutan Non Migas	176.281.287		10.746.300	167.210.787	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	193.109		119.900	13.209	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-				-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.[illegible]26.738	-	576.600	674.[illegible]96	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.737.351	-	768.900	5.264.781	
DAU					
DBH	32.[illegible].[illegible].959	2.980.999	1.024.610.975	1.215.[illegible].745	130.229.[illegible]
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 3,1%					
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-	-		-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	51.[illegible].796.177	-	632.108.735	50.[illegible].87[illegible]664	-
Landrent	98.[illegible]27.[illegible]19		12.778.075	929.512.[illegible]49	
Royalti	52.[illegible]10.[illegible]101		579.329.750	23.[illegible]02.[illegible]271	
Iuran Tetap	597.[illegible]5.195		41.[illegible]7.[illegible]00	520.183.[illegible]19	
Pajak Penghasilan	-	-		-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	397.550.400	-	24.[illegible]6.[illegible]50	273.[illegible]85.[illegible]49	
Kehutanan		1.[illegible].[illegible]08	1.[illegible]1.700		5.[illegible].[illegible]96
DR					
PSDH	-	-	-	-	-
DBHP		3.[illegible].[illegible]98	5[illegible]4.700	-	5.[illegible].[illegible]96
Perikanan	19.[illegible].[illegible]80		216.[illegible].[illegible]00		127.[illegible].[illegible]20
Grand Total	40.[illegible].[illegible].[illegible]10	3.[illegible].[illegible]98	3.[illegible].[illegible].[illegible]75	70.[illegible].[illegible].[illegible]49	192.[illegible].[illegible]82

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TAHUN 2018	KURANG BAYAR TAHUN 2019	LEBIH BAYAR TAHUN 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LEBIH BAYAR TAHUN 2020 (KMS No. 3/KM.7/2021)	SISA LEBIH BAYAR TAHUN 2020 (KVR No. 5/KV.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) [4-5]
PAJAK	-	-	17.010.922	2.874.500	14.136.422
DBH	-	-	17.010.922	2.874.500	14.136.422
DBH Pasal 21	-	-	17.010.922	2.874.500	14.136.422
DBH Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bag. Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kaya	-	-			
Bagian Daerah Non Kilang	-	-			
Bagian Daerah Faktor Pemerataan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkotaan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbatasan	-	-			
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			
Bagi Rata Penerimaan Migas	-	-	-	-	-
Bagi Rata Penerimaan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagi Rata Penerimaan Panas Bumi	-	-			-
Bagi Rata Penerimaan Perkebunan	-	-			-
Bagi Rata Penerimaan Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagi Rata Penerimaan Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
CHT	-	-			-
SDA	321.787.707	36.781	11.130.000		11.130.000
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (OS)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (PPh)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus	-	-			-
Gas Alam (OS)	-	-			
Gas Alam (PPh)	-	-			
Penerimaan Migas Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Minerba	321.787.707	-	-	-	-
Iuran Tetap				-	-
Royalti	321.787.707				-
Pajak Lainnya	-				
Bagian Pemerintah	-	-	-		
Bagian Penghasil				-	-
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya				-	-
Kehutanan	-	35.281	11.130.000		11.130.000
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH		35.281	11.130.000	-	11.130.000
Pertikan	-				-
Jumlah Total	321.787.707	36.781	28.140.922	2.874.500	25.267.422

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kep. Sitaro Tagulandang Biaro

[dalam rupiah]

URAIAN	KB DBH TA 2020	KB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesteran TA 2021 (PMK No. 219/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.038.363.772	-	957.626.200	2.450.101.285	27.864.796
PPh	935.269.582	-	614.829.700	617.439.982	
PPh Pasal 21	617.842.082		350.270.500	292.685.082	-
PPh Pasal 25/29	317.427.500		34.570.700	94.756.800	-
PBB	2.250.102.190	-	342.996.500	1.037.070.180	27.864.796
Pajak Rokok	1.901.946.998	-	265.699.100	1.720.270.205	
Bagian Daerah Migas	41.536.490	-	65.690.200		21.050.830
Bagian Daerah Non Migas	-		-	-	
Bagian Daerah Pasal Dalam	-			-	-
Bagian Daerah Pasal Lainnya		-			-
Bagian Daerah Pasal Lainnya		-	-		
Bagian Daerah Bahan Lainnya	514.642.207		9.536.700	205.889.207	
Biaya Pemungutan Migas	1.256.703		2.037.700	-	781.997
Biaya Pemungutan Non Migas		-			-
Biaya Pemungutan Pasal Lainnya		-	-		
Biaya Pemungutan Pasal Lainnya	-			-	
Biaya Pemungutan Pasal Lainnya			-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.706.781	-	291.900	6.414.881	-
DBH		-	-		
DBHA	8.755.476.801	3.985.798	308.851.400	7.407.913.999	133.221.018
Migas	-		-	-	-
Migas Bagian 15%	-			-	-
Migas Bagian 0,5%		-			-
Migas Bagian Dalam Rangka Otsus		-	-		
Gas Bagian 30%		-	-		
Gas Bagian 0,5%	-		-	-	
Gas Bagian dalam Rangka Otsus	-		-	-	-
Minyak Bumi	7.074.119.899		132.736.900	7.541.383.320	-
Tambahan		-			-
Royalti	7.074.119.899	-	132.736.900	7.541.383.320	
Panas Bumi	418.699.965		67.439.400	356.260.465	
Bagian Pemerintah	-		-	-	
Bagian Daerah	-			-	-
Bagian Daerah Penghasil	418.699.965	-	67.439.400	356.260.465	-
Kehutanan		3.985.798	1.534.700		3.330.298
PSDH	-		-	-	
DR	-			-	-
PSDH		3.985.798	1.534.700		3.330.298
Perikanan	259.190.940	-	316.861.000		127.607.020
Grand Total	1.940.839.407	3.985.798	1.161.607.600	10.599.215.467	188.099.211

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Kotamobagu

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2019	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyesuaian LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(5)
Pajak	-	-	-	-	
PPh			-	-	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PPN	-			-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Dari Sisaan					
Bagian Daerah Penghasil Migas					-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-				-
Bagian Daerah Penghasil Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Lainnya Lainnya					
Bagian Penerimaan Migas					-
Bagian Penerimaan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Penerimaan Pajak Pusat	-	-	-	-	-
Bagian Penerimaan Pertambangan					
Bagian Penerimaan Perkebunan					
Bagian Penerimaan Sektor Lainnya	-			-	-
PPnBM	-	-	-	-	-
PBB	321.782.708	36.031	12.802.165	1.289.217	11.602.048
Migas					
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 3,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Alam 30%	-	-	-	-	-
Gas Alam 9,5%					
Gas Alam dalam Rangka Otsus					
Pertambangan	321.782.708				-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Royalti	321.782.708	-	-	-	-
Pajak Lain		-	-	-	
Bunga Produksi		-	-		
Bunga Tetap					
Pertambangan Pertambangan	-				-
Kehutanan	-	36.031	12.802.165	1.289.217	11.602.048
PSDH	-			-	
DR	-	-			
PSDH					
Perikanan	-	36.031	12.802.165	1.289.217	11.602.048
Pertambangan	-	-	-	-	-
Jumlah Total	321.782.708	36.031	12.802.165	1.289.217	11.602.048

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Kotamobagu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Sisa tahun TA 2021 (PMK No. 21/KM.7/2021)	KB DBH 2020 yang belum disalurkan	LB DBH 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pusat	1.581.470.753		1.470.588.000	3.006.881.403	2.011.296
PPh	5.303.411.067		1.072.993.900	1.127.177.067	
PPh Pasal 21	646.760.751		1.030.227.200	913.900.071	-
PPh Pasal 25/29	357.945.826	-	29.036.700	214.609.126	-
PPh	4.277.693.488	-	341.376.700	4.337.753.730	2.011.296
Cukai Hasil Tembakau	1.901.000.098	-	267.020.700	1.726.270.098	
Bagian Daerah Migas	92.760.772		66.096.300		2.011.296
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	215.356.007		8.004.600	206.941.707	-
Bagian Pemerintah Pertambangan Minyak	581.392	-	2.004.200	-	95.772
Bagian Pemerintah Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pemerintah Pertambangan Perikanan					
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	6.737.581	-	268.800	6.468.781	-
OTC					
SDA	6.252.170.001	10.787.042	512.901.200	1.807.910.595	17.390.052
Migas				-	-
Migas Pasal 22	-	-	-	-	-
Migas Pasal 0,5%	-	-	-		
Migas Pasal dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Minerba	7.65[illegible].630	43.30[illegible].394	1[illegible].600.[illegible]	5.64[illegible].930	5[illegible].38[illegible]
Minerba	-	43.30[illegible].394	8.665.332	-	3[illegible].278.33[illegible]
Royalti	7.67[illegible].630		132.730.200	7.5[illegible].930	
Pajak Daerah	119.869.800		52.000.100	316.2[illegible].700	
Dana Reboisasi					
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Sebesar Bagian Penerimaan DR	415.[illegible].368	-	39.620.450	366.[illegible].63	-
Kehutanan		4.202.208	1.[illegible].750		5.087.038
IHT					
CHT	-	-	-	-	-
PNBP	-	4.805.208	1.[illegible]4.[illegible]20	-	5.087.038
Perikanan	150.[illegible].380		316.981.050		137.807.020
Pajak Pusat	12.[illegible].[illegible].[illegible]	10.787.042	1.[illegible].[illegible].050	15.[illegible].[illegible].[illegible]	21.[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bolaang Mongondow Utara

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2016	TA 2019	LRA TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2020)	Penyaluran TA 2021 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	96.858.345	92.064.636	4.793.712
PBB					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					-
BPHTB	-	-	96.858.345	92.064.636	4.793.712
Reg. Rusa	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas			96.728		102.128
Bagian Daerah Panas Bumi					-
Bagian Daerah Perikanan	-	-	10.264.497	10.264.497	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	5.975.686	11.365.487	4.837.201
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Dagang Penerangan Migas					-
Biaya Penerangan Non Migas	-	-	369.753	364.474	5.366
Biaya Penerangan Panas Bumi	-		-	-	
Biaya Penerangan Perikanan			1.603.356	1.603.356	
Biaya Penerangan Pertambangan			939.021	773.107	154.617
Biaya Penerangan & Sisa Lebih Lainnya	-	-	-	-	-
DAK	-	-	-	-	-
SDA	921.782.705	283.705	202.030.705	10.001.373	190.247.190
Migas					-
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka OTSUS	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pinerba	921.782.705		96.212.507	10.664.575	534.547.582
Perikanan	-	-	345.313.577	10.664.975	534.547.582
Kehutanan	921.782.705	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-		
Jukan Produksi					
Jukan Cukai					-
Pertambangan Batubara	-		-	-	-
Kehutanan	-	283.705	48.777.308	-	48.777.705
DR					
DBH					
PNBP	-	283.705	48.777.308	-	48.777.308
Pertambangan	-	-	-	-	-
Grand Total	921.782.705	283.705	197.202.113	2.729.571	194.552.322

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bolaang Mongondow Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(9)	(11)
Pajak	3.209.763.858	2.048.000	0-0.6-7.505	2.258.380.428	6.790.640
PBB	566.010.253		554.367.300	971.067.085	
PPh Pasal 21	785.308.852		524.832.165	2.310.141.163	
PPh Pasal 25/29	864.132.92		25.026.950	89.313.602	
DBH	3.537.556.403	2.048.000	356.296.000	1.345.950.040	6.792.640
Migas	1.991.379.008	-	365.689.770	1.726.370.998	-
Bagian Daerah Minyak	109.900.387	-	112.043.720		3.371.663
Bagian Daerah Non Migas	-	1.961.000	1.490.500		3.371.500
Bagian Daerah Panas Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Kehutanan	0.571.231	-	2.402.820	6.971.431	-
Dana Bagi Hasil Sektor Lainnya	210.009.300		2.892.320	200.009.707	
Biaya Pemungutan Migas	3.397.382		1.250.000		138.377
Biaya Pemungutan Non Migas	-	61.300	45.500	-	68.502
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-	-	-
Dana Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Kehutanan	386.026		108.500	285.125	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.737.581	-	768.800	6.468.781	-
OTI	-	-	-	-	-
SDA	8.284.181.200	11.777.042	532.841.875	7.007.913.385	22.419.201
Migas					
Migas Bagi 0,5%	-				-
Migas Bagi 0,5%	-	-	-	-	-
Migas Lainnya dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minyak	7.878.134.346		148.7 6.175	7.511.693.630	13.305.549
Tambang	370.- 574	-	5.0.0..75		13.705.640
Migas	7.071.770.820	-	132.736.500	7.541.483.530	-
Panas Bumi	115.900.860		52.020.400	368.263.465	
Iuran Eksplorasi					
Iuran Tetap	-				
Setoran Bagian Pemerintah	416.541.765	-	62.829.420	936.230 -65	-
Kehutanan		-.773.942	- 673.050	-	54.4-0.502
PSDH					
PSDH	-	4..77.942	14.673.950	-	65 446 585
Provisi	159.736.382	-	516.781.050	-	157.664.000
Grand Total	11.450.037.979	15.825.042	1.187.587.373	13.164.460.112	252.258.301

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Minahasa Tenggara

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2020	LEBIH BAYAR TA 2020	PMK No. 226/PMK.07/2020	PMK No. 37/PMK.07/2021	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	38.646.824	16.387.873	22.258.951
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21		-	-		
PPh Pasal 25/29					
PBB	-		30.811.691	15.261.873	15.549.818
Bagi Rata	-				-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas		-	6.271.137	7.771.182	1.500.045
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Pajak Lainnya					
Bagian Daerah Pajak Daerah	-	-	26.868.254	17.636.745	9.232.509
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-	-	
Bagian Pemerataan Migas					
Bagian Pemerataan Non Migas	-		321.350		321.350
Bagian Pemerataan Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerataan Pertambangan		-	-	-	
Bagian Pemerataan Perbendaharaan			1.362.103		1.362.103
Bagian Pemerataan Sektor Lainnya					
DAK	-	-	-	-	-
SDA	521.782.707	86.261	66.208.406	-	66.208.406
Migas					
Migas dari 15%					
Minyak Bumi 6,5%	-				-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-		-	-	-
Gas Bumi 6,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pertambangan	521.782.707		41.300.995		41.300.995
Panas Bumi	-		41.300.995		41.300.995
Royalti	521.782.707		-	-	-
Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Dalam Produksi		-	-	-	-
Dalam Lelang					
Penjualan Tanah Negara					
Kehutanan	-	86.261	14.731.501	-	14.731.501
DR	-	-	-	-	-
IUPHH					
PSDH		86.261	14.731.501		14.731.501
Pertanian	-	-		-	-
Grand Total	521.782.707	86.261	61.939.292	4.387.878	76.551.170

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Minahasa Tenggara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Des. TA 2020	Realisasi KB Juli Semester I TA 2021 (KMK No. 678/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	5.775.268.770	267.782	1.011.793.502	2.361.807.622	93.170.774
PPh	69.442.571		569.670.202	4.307.760.044	-
PPh Pasal 21	597.205.570	-	854.230.702	347.905.570	-
PPh Pasal 25/29	106.147.001	-	55.735.802	52.361.22	-
PBB	2.230.366.199	267.782	354.217.602	1.841.961.697	93.170.774
Bagi Hasil	1.391.303.952		203.089.702	1.721.270.198	
Bagian Daerah Migas	46.168.105		75.020.305		29.162.756
Bagian Dana Bagi Hasil Migas	-	543.563	920.605	-	361.359
Bagian Daerah Pertambangan Umum	131.723	-	135.805	1.450	-
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Kehutanan	241.702		2.079.309	251.350	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	313.593.207	-	9.654.200	906.594.207	-
Biaya Pemungutan Migas	7.168.602	-	2.335.500	-	512.707
Biaya Pemungutan Non Migas		17.193	16.500		33.693
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	2.535		3.050	50	
Biaya Pemungutan PBB Perdesaan	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	700.105	-	847.510	12.702	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.737.141		208.800	6.168.781	
CHT					
PDA	3.961.580.456	5.115.196	510.961.950	7.910.779.867	164.676.896
Migas	-	-	-	-	-
Panas Bumi 15%		-	-	-	-
Panas Bumi 0,5%					
Panas Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30 dan 70 Tiga Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	7.640.283.830		128.573.830	7.841.832.830	-
Landrent	5.750.020		3.037.270	118.730	
Royalti	7.774.729.830		132.736.200	7.511.653.020	
Panas Bumi	44.387.377		53.054.547	389.017.057	
Iuran Pelaku Usaha	-	-	-	-	-
Iuran Tetap		-	-	-	-
Setoran Langsung Pemerintah	121.964.207		53.020.670	368.247.057	
Cukai Hasil		5.115.196	1.017.000		6.379.848
Tax	-	-		-	
PBB-P4		-	-	-	-
Pasir		5.115.196	1.017.000		6.379.848
Perikanan	59.196.957		21.251.030		10.094.020
Grand Total	11.071.416.512	5.639.539	1.536.750.452	10.264.307.928	194.777.672

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bolaang Mongondow Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2021	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2020)	Realisasi LB s.d TA 2020 (PMK No. 7/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (PMK No. 7/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			322.253.064	317.251.104	5.038.800
PPh			317.251.160	317.251.104	
PPh Pasal 21	-		32.512.160	32.512.160	
PPh Pasal 25/29	-	-	284.738.922	284.738.922	
PBB	-	-	5.209.840	-	5.209.840
Sewa Ruang		-	-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan			3.330.400	-	3.063.400
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas	-	-			
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi			-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	276.100		219.700
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT		-	-	-	-
SDA	521.782.707	17.016	3.013.938.574	48.625.715	3.284.942.625
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dr Bag Pemerintah		-	-	-	-
Gas Bumi 30%			-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dr Bag Pemerintah	-				
Minerba	521.782.707	-	3.291.468.716	48.625.715	3.237.163.059
Landrent	-	-	(30.349.561)	48.625.715	782.290.842
Royalti	521.782.707	-	2.452.062.277	-	2.452.062.277
Panas Bumi			87.940.012		87.940.012
Dana Reklamasi					
Dana Hasil	-	-			
Setoran Dana Perimbangan	-	-	38.343.912	-	38.343.912
Kehutanan		17.016	8.747.654	-	8.747.654
DR					
IHPH	-				
PSDH	-	17.016	8.747.654	-	8.747.654
Perikanan		-	-	-	-
Grand Total	521.782.707	17.016	3.036.192.638	365.878.819	3.291.097.785

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tabalong, Mungkinkow Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesteran TA 2020 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Alokasi KB 2020 yang Belum Disalurkan	LB TA 2020 yang Telah Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (2)-(4)	(6)
Pajak	5.207.686.340	65.051.620	971.090.300	2.390.026.097	126.259.149
PPh	397.257.083	-	317.033.200	450.243.881	5.054.028
PPh Pasal 21	547.205.211		496.721.200	450.243.881	
PPh Pasal 25/29	45.205.872		60.030.000	-	5.054.028
PBB	2.331.011.201	98.051.600	436.033.100	1.080.738.796	119.205.121
Bea Jabatan	1.591.999.499	-	268.690.700	1.276.270.204	
Cukai Daerah Minol	96.175.107	-	100.774.600		1.469.063
Pajak Daerah Non Migas	-	10.205.200	43.221.100	-	95.516.600
Pajak Daerah Pariwisata			-	-	-
Pajak Daerah Aeteteteun			-		
Pajak Daerah Perkeovoran	-	3.714.800	2.786.100		6.500.300
Pajak Daerah Penerangan Jalanan	215.600.607		5.207.300	209.991.707	-
Biaya Pemungutan Migas	3.035.272		2.150.400	-	714.825
Biaya Pemungutan Non Migas		2.850.900	2.850		2.821.500
Biaya Pemungutan Pajak Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-				-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		134.500	114.100	-	970.000
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	2.737.041		166.800	6.466.781	
CHT	-	-	-		-
SDA	6.642.865.348	4.050.718	790.116.300	9.220.027.706	164.003.368
Migas				-	
Migas Bagian 15%			-	-	
Migas Bagian 3,5%			-		
Migas Bagian Daerah Penghasil	-	-	-		-
Gas Bumi 30%	-	-		-	-
Gas Bumi 0,5%	-			-	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat				-	
Minerba	4.013.535.103		965.211.216	7.653.707.273	
Royalti	280.711.109	-	96.257.935	220.480.161	
Iuran Tetap	7.711.097.339	-	37.786.350	7.641.310.989	
Pajak Lainnya	4.358.869.686	-	30.039.700	60.205.703	-
Pajak Daerah	-			-	-
Pajak Rokok				-	
Sumber Daya Alam Lainnya	128.609.836		93.835.400	364.020.460	
Kehutanan	-	4.050.718	4.035.700		6.124.340
DR	-	-	-	-	-
PSDH				-	
Perikanan		4.190.000	1.633.750	-	6.311.218
Pertambangan	166.108.961	-	316.851.000		137.691.029
Grand Total	11.848.733.691	72.782.138	1.761.206.600	10.610.054.085	297.057.517

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

(Rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 95/PMK.07/2021)	Perwalacatan TA 2020 (KMK No. 37/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 37/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			20.371.630		20.371.630
PPh	-				
PPh Pasal 21	-			-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	32.373.600	-	32.373.600
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Dasar Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Dasar Daerah Penghasil		-	26.602.800	-	26.602.800
Bagian Daerah Penghasil			2.502.100		2.502.100
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-		-		-
Biaya Pengumpulan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pengumpulan Non Migas		-	-	-	
Biaya Pengumpulan Non Migas					
Biaya Pengumpulan Perikanan	-		1.726.600		1.726.600
Biaya Pengumpulan Perikanan	-	-	86.000	-	86.000
Biaya Pengumpulan Sektor Lainnya		-	-	-	-
CHT					
SDA	4.646.798.592	194.027	1.376.030.491	142.220.950	1.233.941.451
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-		
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-				-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	4.646.798.592	-	387.857.961	48.795.552	1.164.020.011
Landrent		-	-	-	-
Royalti	4.646.798.592		1.387.272.961	113.023.552	1.164.020.011
Panas Bumi	-				
Iuran Produksi	-	-		-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan		194.027	40.812.940		40.812.940
PSDH	-				
DBHI	-	-	-	-	-
PSDH	-	194.027	40.812.940	-	40.812.940
Perikanan					
Grand Total	4.646.798.592	194.027	1.472.229.021	142.220.950	1.330.008.071

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bolsang Mongondow Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran KB DBH Bulan Januari TA 2021 [PMK No. 3/PMK.07/2021]	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2] - [4]	[6] = [3] - [4]
Pajak	6.352.262.636		1.173.309.103	7.015.700.259	28.731.061
PBB	11.316.35		550.177.900	562.736.461	
PBB Pasal 21	1.021.897.430	-	515.639.603	536.757.833	-
PBB Pasal 25/29	52.812.917	-	34.538.103	53.080.617	-
PPh	5.238.063.187	-	602.530.202	371.067.647	28.731.061
Bagi Rata	1.991.958.958		265.628.700	1.726.330.258	
Bagian Daerah Penghasil Migas	4.467.317		10.277.200		25.801.193
Bagian Daerah Non Migas	2.567.5 6.133	-	326.907.200	2.240.659.937	
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan	215.599.070		8.601.300	206.997.707	
Bagian Pertambangan Migas	1.373.272	-	2.935.700	-	630.428
Bagian Pertambangan Non Migas	90.200.929	-	16.531.200	73.654.029	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pertambangan Pertanahan	-				
Bagian Pertambangan Perkebunan		-	-	-	-
Bagian Pertambangan & Pemanfaatan	6.107.261	-	268.800	6.108.731	-
PPh	-				
SDA	14.717.605.303	10.902.474	691.961.020	10.000.020.206	218.030.566
Kilang	-	-	-		
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-		-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Perikanan	11.039.775.533	-	505.333.750	13.134.394.903	-
Kehutanan	161.113.669		21.511.673	70.016.8 4	-
Royalti	10.415.646.654		125.8 9.373	13.05 .777.784	
Panas Bumi	4.8.860.855		32.639.702	160.230.101	
Iuran Produksi	-	-	-		
Iuran Tetap		-	-	-	-
Provisi Pengembangan Migas	216.069.816		52.639.702	316.230.465	-
Kehutanan	-	10.852.1 1	7.090.175		28.942.349
DR	-		-		
DBH		-	-	-	-
PSDH		10.852.474	7.090.175	-	20.942.349
Denda	(59.165.96)		316.821.000		157.091.823
Grand Total	20.572.067.941	17.98.2.4 4	2.324.9 2.725	16.130.361.032	276.036.052

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sulawesi Tengah

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PPh Ps 21	Migas	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2020)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 349/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 37/KM.7/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	975.553.449	1.975.553.449	-
80%	-	-	1.975.553.449	1.975.553.449	-
PPh Ps 21			-	-	
PPh Ps 25/29			1.975.553.449	1.975.553.449	
PBB	-				
Bagi Rata	-	-			
Bagian Daerah Sopeq		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan	-				
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	-
Bagian Pemerintah Migas					
Bagi Pemerintah Non Migas	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya			-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-				
PPh	-	-	-	-	-
PPN		277.398.078	61.800.340.555	12.793.461.832	5.277.145.123
Migas			5.428.718.401	10.793.461.832	-5.277.116.809
Minyak Bumi 15%	-		2.114.054.720	2.114.054.720	
Minyak Bumi 0,5%	-	-	172.460.771	172.460.771	
Minyak Bumi dalam Wilayah Daerah	-	-	-	-	-
Gas Alam 30%		-	47.986.454.524	3.501.951.628	42.477.626.28-
Gas Bumi 2,5%			1.349.790.775	-	1.349.790.775
Gas Bumi dalam Wilayah Daerah			-	-	-
Migas	-		6.363.113.014		6.363.113.014
Landaran	-	-	6.391.957.624		6.391.957.624
Royalti	-	-	28.160.060		28.160.060
Pasal Umum		-	-	-	-
Bunga Deposito			-	-	-
Denda Pajak	-				
Sebagian Bagian Pemerintah	-				
Sebagian		277.398.078	1.469.582.691	-	1.469.582.691
TPA		23.141.928	-	-	-
TUPR			1.410.542.350		1.165.342.350
PSDH	-	94.150.750			
Pelabuhan	-	-			
Grand Total		277.398.078	63.844.806.904	12.793.461.832	5.277.145.123

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sulawesi Tengah

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH (Lampiran I PMK No. 3/KM.7/2021)	Kurang Salur yang Belum Disalurkan	LB DBH 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)-(4)	(6)
Pajak	68.419.812.697		11.777.851.955	47.679.631.877	-
PPh	37.154.754.892		8.021.202.203	29.133.552.002	
PPh Pasal 21	5.940.029.730		2.793.870.200	3.146.159.530	
PPh Pasal 22/29	3.473.755.167	-	220.631.603	3.253.123.563	
PPN	27.791.017.997	-	5.334.036.501	22.459.039.497	-
Pajak Lainnya			-	-	-
Bagian Daerah Migas	14.061.276.236		2.197.360.200	11.863.915.036	
Bagian Daerah Non Migas	3.342.724.486		232.629.107	3.110.095.382	
Bagian Daerah Pajak Lain	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perantauan	73.766.070	-	14.571.200	59.194.870	-
Bagian Daerah Pertambangan	2.115.369.039		741.090.200	1.374.278.839	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	700.474.071		27.378.000	673.096.071	
Dana Pertanggungan Migas	167.971.128	-	73.000.000	94.971.128	-
Dana Pertanggungan Non Migas	111.210.111	-	7.764.500	103.445.611	-
Dana Pertanggungan Pajak Lainnya					
Dana Pertanggungan Perantauan	2.868.937		1.036.000	1.832.137	
Dana Pertanggungan Pertambangan	91.247.040	-	28.218.000	63.029.040	-
Dana Pertanggungan Sektor Lainnya	20.104.203	-	950.400	19.153.803	-
DAK	31.729.713		20.779.193	10.950.520	
DBH	97.545.015.546	1.279.000.076	2.103.419.635	[illegible]	1.911.127.801
Migas	33.554.386.360	-	261.979.000	31.292.261.292	
Kurang Bayar PPh	2.150.491.971	-	173.214.500	8.382.977.471	-
Minyak Bumi (PPh)	241.999.000	-	8.775.000	256.182.150	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi (PPh)	15.058.126.440		81.701.400	27.083.512.218	
Gas Bumi (PPh)	1.38 [illegible]		1.210.100	1.219.728.067	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Kurang Bayar PPN	27.833.035.909	435.875.193	1.013.275	74.906.775.934	1.087.954.726
Lainnya		833.078.193	554.386.361	-	1.087.954.726
Pajak	27.833.035.909		886.203.971	74.906.775.934	-
Pajak Lain					
Bunga Pinjaman	-				
Jurnal Lainnya	-	-	-	-	-
Koreksi Objek Pemerintah		-	-	-	-
Pajak Lainnya	4.610.932.232	360.324.108	870.847.100	3.383.018.732	242.303.071
PPh	1.654.294.246		311.000.000	1.079.431.030	
BUMN	-	588.805.150	253.007.535		940.360.076
BUMD	102.656.011	-	165.918.075	777.636	-
Perikanan				-	
Grand Total	226.091.997.116	1.279.000.076	13.478.601.215	213.1 [illegible]	1.911.127.801

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Banggai

(dalam rupiah)

URAIAN	ALOKASI 2019	REALISASI 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	PENYESUAIAN LEBIH BAYAR TA 2019 (KEPDIRJEN PK No. 3/KM.7/2021)	SISA LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	-471.479.093	471.479.093	-
PBB			-471.479.093	471.479.093	
PPh Pasal 21			-343.209.778	343.209.778	
PPh Pasal 25/29			-128.269.315	128.269.315	-
BHT	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hilir	-	-	-		-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Hulu Migas					-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Tanpa Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Tertentu					
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	
Biaya Pendampingan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Perkebunan					-
Biaya Pemungutan Sektor Tertentu	-	-	-	-	-
DPT	-	-	-	-	
PDA		9.033.158	-1.338.980.009	62.192.994.446	60.863.981.595
Migas			103.471.105.367	22.012.795.360	80.902.201.982
Minyak Bumi 15%			10.238.078.740	10.238.078.740	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	340.973,66	340.973,66	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	9.397.770.610	17.892.957.777	-8.495.187.167
Gas Bumi 0,5%			1.371.713.830		1.371.713.830
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Migas			5.373.907.392	-	5.679.607.647
Tambang	-	-	5.373.511.426	-	5.373.511.426
Perikanan	-	-	395.966	-	4.095.547
Panas Bumi		-			
Dana Reboisasi					
Dana Reklamasi					-
Kehutanan Tegakan Dimanfaatkan	-		-	-	-
Kehutanan	-	8.033.158	2.794.809.202	-	2.802.842.360
DR					
Minerba			2.221.950.202		2.221.950.202
DHPT	-	8.033.158	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	9.033.158	-1.471.471.574.702	62.716.197.058	-1.408.755.377.644

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Banggai

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesta TA 2021 (KMK No. 37/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(10)=(2)-(4)	(11)
Pajak	21.24 1.203.868	297 867 260	5 140 334 445	36 147 458 823	521 267 620
PDE	1.911.111.892	-	1.060.307.100	2 943 917 992	-
PPh Pasal 2	1.305.101.351	-	1.056.31 .300	2.361.420.651	-
PPh Pasal 25/29	176 383 691	-	62.990.100	313.387.691	-
PBB	20.205 357 161	297 867 260	3.171.2 0.000	30.3 1.137.021	521 26 .620
Bea Ba	297 377 008	-	265 639 700	79 270 348	-
Bagian Daerah Migas	86.143.272.1 2	-	2 267.360.500	30.597 709.6 2	-
Bagian Daerah Non Migas	33.325. 90		3.830.500	37.356.2	
Bagian Daerah Dana Reboi	-				
Bagian Daerah Pe 0	-	526 716 000	2 .0 8.620		52 .ro 1
Bagian Daerah Pertambangan	650.20 .758	-	256 830.620	60 3 .2 58	-
Bagian Daerah Sumber Daya	219.509.207		8.092.820	700 901 .707	
Biaya Pemungutan Migas	977 594 750		7 .6 0.020	2.6 .3 .238	
Biaya Pemungutan Non Migas	4.440 303	-	180.020	4.241.350	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan		1 .2 9.208	8.361.020		10.61 .108
Biaya Pemungutan Perkebunan	38..39 .8		11 .0.220	26.772.350	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7. 36 647	-	368.320	6.998 .47	
PBB	24.070.605	-	16 557 465	8 13 .140	-
SDA	195.2 .0 6.301	2.817.924.730	7.281 641.020	103.3 2.817.2 2	1 .278.427.208
Migas	170.258. 1 .1 1		5 5 .2 1.720	100 2 .212.2 1	
Minyak Bumi 15%	9.061 5 .2 5		2 2 .1 0.700	16.7 9.6 .4	
Minyak Bumi 0,5%	368 487 606	-	1 .6 8 20	2 .389 79	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	1 .128.2 2.2 6		68.507 .02	1 .7.2 5.206	-
Gas Bumi 0,5%	3 .1 .1 .2		2.6 .20	2.1 .487.2	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Panas Bumi	25 .42 .61.6	-	2 .2 .1	2 .6 .6 .6	-
Landrent	347 780.230	-	.82.61.80	1 5 .6 .630	-
Royalti	25..61 .01.1	-	1 .6 .2	26 .1 .16 .16	-
Pajak Bumi			-	-	-
Cukai Hasil Tembakau					
Denda Bunga	-				
Sanksi Bagian Pemerintah	-	-		-	
Kehutanan	1.16 .6 7	2.817.924.7 2	1 .1 .6 .2	-	3 .3 7 .2
PNBP					-
PHPB	-	2.817.921.7 2	1.1 .6 .2		3.83 .1 .2
PSDH	4 .6 .6 7	-	8 .2 .020	-	2.2 0.6
Reboisasi	1 .7 .6	-	3 .6 .020	-	1 .6 .0
Grand Total	2 1.1 .3 .1 2	3.115.7 1.9	7 .1 .6 .6	28 .3 .17 6.2	4 .7 .6 .6

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Banggai Kepulauan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 56/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KEP-3/PK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (SAS No. 71/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			88.807.037	3.147.385	85.752.652
PPh			3.147.385	3.147.385	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 22/26			3.147.385	3.147.385	
PBB			85.752.652		85.752.652
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Daerah Provinsi					
Daerah Kabupaten/Kota					
Pajak Penghasilan					
Pajak Penghasilan Pasal 21					
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi Dalam Negeri					
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan					
Pajak Penghasilan Pasal 26					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Bunga Obligasi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Dividen					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Hadiah Undian					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Penjualan Saham Perusahaan Kena Pajak					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Penjualan Atas Tanah dan/atau Bangunan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Perseroan Terbatas					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Orang Pribadi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Badan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Daerah					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Badan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Orang Pribadi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Orang Pribadi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Badan dan Orang Pribadi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan					
Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas dan Badan dan Orang Pribadi

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Banggai Kepulauan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2020	LB TA 2020	Penyaluran DBH Sisa Kurang TA 2020 (Lebih Bayar)/Kurang Salur	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	4.349.84[illegible].724		9.124.972.240	3.674.551.260	37.787.223
PBB	1.878.880.971	-	458.961.220	1.42[illegible].751.751	-
PPh Pasal 21	1.75[illegible].6[illegible].7.614	-	447.373.820	1.307.27[illegible].33[illegible]	-
PPh Pasal 22/26	124.[illegible]13.935	-	11.607.000	114.[illegible]06.935	
BPHTB	2.468.[illegible]27.136		3.7[illegible]9.400	2.[illegible]91.[illegible]39.737	37.787.223
Cukai Hasil Tembakau	1.[illegible]27.[illegible]96.[illegible]98		243.[illegible]63.420	1.904.6[illegible]3.[illegible]99	-
Pajak Daerah Migas	69.[illegible]39.615	-	96.[illegible]43.800	-	26.594.785
Pajak Daerah Non Migas	-	-	-		-
Pajak Daerah Pulau Buru					
Pajak Daerah Perbatasan					
Pajak Daerah Tertentu	[illegible]7.91[illegible].[illegible]76		138.[illegible]43	[illegible]5.[illegible]35.906	-
Pajak Daerah Pusat Tertinggi	2.[illegible]539.[illegible]27	-	6.904.300	226.994.707	
Pajak Penerangan Migas	2.6[illegible].[illegible]7		5.[illegible]1.[illegible]93		1.[illegible]2.[illegible]13
Pajak Penerangan Non Migas					-
Pajak Penerangan Perbatasan			-	-	-
Pajak Penerangan Perbatasan	-	-	-		
Bawa Pengurangan Perbatasan	163.[illegible]17		26.[illegible]10[illegible]	139.[illegible]14	
Bawa Pengurangan Sektor Lainnya	1.[illegible]52.[illegible]17		286.[illegible]07	3.[illegible]68.[illegible]77	-
DAK	[illegible]83.[illegible]09		1.9[illegible].[illegible]72	9[illegible].[illegible]39	-
PSA	25.496.131.[illegible]8[illegible]	-	[illegible]0.460.[illegible]95	26.[illegible]93.906.[illegible]13	82.[illegible]5.[illegible]76
Migas	14.[illegible]75.681.780	-	43.[illegible]72.[illegible]40	14.[illegible]32.[illegible]00.[illegible]50	
Minyak Bumi 15%	1.[illegible]39.[illegible]08.[illegible]95		22.48[illegible].[illegible]98	1.[illegible]6[illegible].[illegible]13.[illegible]97	
Minyak Bumi 0,5%	76.[illegible]92.[illegible]07		9[illegible].[illegible]50	76.[illegible]27.[illegible]57	-
Minyak Bumi Pelaku Kegiatan Usaha	-		-	-	-
Gas Bumi 15%	2.[illegible]10.[illegible]87.[illegible]41	-	3.[illegible]20.[illegible]10	12.497.[illegible]87.[illegible]41	-
Gas Bumi 0,5%	[illegible]28.[illegible]1.[illegible]04	-	2[illegible].[illegible]20	[illegible]26.[illegible]87.[illegible]97	
Gas Bumi Pelaku Kegiatan Usaha	-	-	-		
Kehutanan	[illegible].[illegible]0[illegible].[illegible]7[illegible].[illegible]10		14[illegible].[illegible]1[illegible]	[illegible]2.[illegible]1[illegible].[illegible]7[illegible].[illegible]2[illegible]	
Perikanan					-
Panas Bumi	[illegible].[illegible]8[illegible].[illegible]0[illegible].[illegible]10		14.[illegible]52.[illegible]16	[illegible]2.[illegible]67.[illegible]97.[illegible]35	-
Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap					
Sektor Kegiatan Pertambangan					
Kehutanan	39.[illegible]65.[illegible]04		29.[illegible]1[illegible].[illegible]15	-	[illegible]1.[illegible]7.[illegible]51
DR	-	-	-	-	-
PSDH					
Reboisasi	29.[illegible]5[illegible].[illegible]14		29.[illegible]2[illegible].[illegible]75		[illegible]1.[illegible]1[illegible].[illegible]51
Perikanan	[illegible]17.[illegible]9[illegible].[illegible]60		2[illegible].[illegible]5.[illegible]25	-	[illegible]3.[illegible]98.[illegible]45
Grand Total	[illegible].[illegible]75.[illegible]62.[illegible]88	-	[illegible].[illegible]32.[illegible]38.[illegible]95	[illegible]0.[illegible]4.[illegible]36.[illegible]07	[illegible].[illegible]08.[illegible]1[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bucl

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian DBH s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4] - [5]
Pajak	-		62.169.050	62.169.050	
PPh	-	-	62.169.050	62.169.050	
PPh Pasal 21	-	-	62.169.050	62.169.050	-
PPh Pasal 25/29		-	-	-	-
PBB			-	-	
Bagi Rata					
Bagian Daerah Penghasil Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas	-				
Bagian Daerah Penghasil Migas		-		-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas					
Bagian Pemerintah Pusat - Panas Bumi	-				
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan	-	-			-
Bagian Pemerintah Pusat Perkebunan		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan					
PPh	-				
SDA	-	8.690.573	8.221.109.877	736.939.970	7.484.261.791
Migas	-	-	7.585.769.646	736.636.970	6.849.132.676
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi (Atas Bagian Daerah)	-				
Gas Bumi 30%	-		7.585.102.552	736.636.970	6.848.465.582
Gas Bumi 0,5%	-	-	666.970.956	-	666.970.956
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Panas Bumi		-	231.400.220	-	231.400.220
Tambang			227.373.492		227.373.492
Royalti			1.026.317		1.026.317
Pertambangan	-				
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap		-	-	-	-
Kehutanan					
Kehutanan	-	8.690.573			
DR	-	-		-	
IUPHH		-	-	-	-
PSDH		8.690.573			
Perikanan					
Grand Total	-	8.690.573	8.283.279.050	798.809.020	7.484.261.791

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. [illegible] (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB [illegible] TA 2020	LB [illegible] TA 2020	Penyaluran KB [illegible] TA 2020 (PMK No. [illegible]/2021)	KB TA 2020 yang [illegible] dialokasikan	LB TA 2020 yang [illegible] dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	6.898.765.692	-	1.135.215.526	5.761.[illegible]	4.306.861
PPh	1.707.575.[illegible]	-	533.155.600	1.174.419.509	-
PPh Pasal 21	1.[illegible]	-	500.508.330	682.[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	205.[illegible]		[illegible]2.617.400	190.[illegible]	-
PBB	4.986.[illegible]		1.[illegible]	3.[illegible]	4.266.861
Bagi Rata	[illegible]		262.[illegible]	1.726.[illegible]	
Bagian Daerah Migas	16.504.[illegible]	-	[illegible]		4.025.[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	35.[illegible]	-	7.463.000	27.[illegible]	-
Bagian Daerah Panas Bumi			-	-	-
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Perkebunan	[illegible]	-	551.[illegible]	1.[illegible]	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-			
Biaya Pemungutan Perikanan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	[illegible]		29.971.[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
SDA	27.[illegible]	-	[illegible]	25.[illegible]	157.[illegible]
Migas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Minyak Bumi 15%	1.[illegible]		28.[illegible]	1.[illegible]	-
Minyak Bumi 0,5%	46.[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 30%	[illegible]	-	15.[illegible]	13.[illegible]	
Gas Bumi 0,5%	209.[illegible]	-	[illegible]	208.[illegible]	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba	[illegible]		170.[illegible]	12.[illegible]	-
Landrent	45.[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Royalti	2.[illegible]		[illegible]	12.[illegible]	
Panas Bumi	-	-		-	
Iuran Produksi		-	-	-	-
Iuran Tetap			-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	75.[illegible]	-	11.[illegible]	[illegible]	
IHH	-	-	-	-	
IIUPH			-	-	-
PSDH	75.[illegible]		41.[illegible]	34.[illegible]	
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]		157.[illegible]
Grand Total	34.[illegible]	-	2.[illegible]	32.[illegible]	161.[illegible]

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Toli Toli

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Koreksi/Revisi LEBIH BAYAR TA 2019 (KMK No. 430/KMK.07/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	261.977.218	174.435.914	87.541.304
PPh	-	-	174.435.914	174.435.914	-
PPh Pasal 21			163.625.917	163.625.917	-
PPh Pasal 25/29			10.809.997	10.809.997	-
PBB	-		87.541.304		87.541.304
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-		-	-	-
Cukai					
Cukai Hasil Tembakau			-	-	-
Pungutan Hasil Perikanan					
Bagian Daerah Penghasil	-		109.350.124		109.350.124
Bagian Daerah Penerimaan Lainnya	-	-	3.053.894		3.053.894
Pungutan Hasil Hutan			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusan					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Penerimaan Lainnya	-				
Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat		-	3.903.554	-	3.903.554
Bagian Pemerintah Daerah Penghasil			13.289		13.289
Bagian Pemerintah Daerah Penerimaan Lainnya	-				
DBH	-	-	-		-
Gas		8.022.303	10.587.483.783	1.786.415.387	8.801.018.796
Migas			8.979.473.947	1.786.415.387	7.193.038.860
Minyak Bumi 15%	-		612.343.770	612.343.770	
Minyak Bumi 0,5%	-		26.111.429	26.111.429	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 69%		-	7.856.730.657	905.670.788	6.951.059.869
Gas Bumi 0,5%		-	30.378.096	-	130.978.096
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Minerba	-		1.710.979.096		1.710.979.096
Iuran Tetap	-		1.712.929.189		1.712.929.189
Royalti	-	-	4.026.744		1.926.347
Pajak Lainnya		-	-	-	-
Pungut Provinsi		-	-	-	-
Pungut Kab/Kota					
Bagian Pemerintah Pusat	-				
Kehutanan	-	8.363.369			
PSDH		-	-	-	-
DR					
PSDH	-	8.363.369			
Perikanan	-	-			
Grand Total		8.333.369	12.864.341.848	1.960.851.301	9.903.489.547

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Toli-Toli

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Perubahan APBD 2021 Setelah Perpres TA 2020 (SAKTI No. [illegible]/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2021 yang belum dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	5.470.300.934		1.171.296.772	4.299.004.162	14.516.961
PBB	3.597.291.566	-	720.933.810	2.876.357.756	-
PBB Pasal 21	2.196.264.250	-	796.396.602	469.764.659	-
PBB Pasal 25/29	170.227.427	-	4.034.200	302.073.527	-
BPHTB	2.898.171.239		742.890.200	2.763.074.020	14.516.961
Pajak Rokok	1.994.556.960		203.099.702	1.791.270.296	
Bagian Dari 50% Migas	30.384.456		139.277.705		108.893.249
Bagian Daerah Dari Migas	93.197.074	-	91.955.000	93.050.074	-
Bagian Daerah Dana Bagi		-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	178.281.074			178.281.074	
Bagian Daerah Pajak Pertambahan	5.595.259		10.196.920		4.601.661
Bagian Daerah Bahan Bakar Kendaraan	313.595.207	-	9.654.000	208.994.707	-
Biaya Pemungutan Migas	4.219.038	-	4.316.750	-	97.712
Biaya Pemungutan Non Migas	1.137.161		870.000	706.067	
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-				
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan	18.622.705	-	-	18.622.705	-
Biaya Pemungutan Pajak Pertambahan	131.131	-	565.000	-	433.869
Biaya Pemungutan Bahan Bakar Kendaraan	7.126.617		265.400	6.906.847	
CHT	2.635.505		1.301.670	331.259	
SDA	27.358.03 .485	91.575.121	635.109.830	26.944.566.190	753.319.526
Migas	2.177.681.740	-	43.472.320	2.133.705.282	-
Minyak Bumi 15%	1.792.496.890	-	25.283.750	1.370.615.795	
Minyak Bumi 0,5%	49.950.000		902.850	16.020.950	
Minyak Bumi Dibagi ke Pemprov Dan	-				
Gas Bumi 30%	1.5 .0 .7 .6		19.905.900	1.497.207.5	-
Gas Bumi 0,5%	209.311.894	-	729.40	2 .3 .9 4	-
Gas Bumi dibagi ke Pemprov Dan		-	-	-	-
Minerba	12.9 .1.290.3.0	91.575.121	513.225.205	12.4 2.360.710	5 0.878.496
Panas Bumi		91.575.121	10.333.373		5 0.878.496
Kehutanan	12.5 9.460.680		116.620.502	12.811.001.110	
Pungutan Kehutanan	-				-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Dana Hasil Hutan		-	-	-	-
Setoran Kehutanan Lainnya					
Perikanan	4.681.165		96.624.116		11.0 7.031
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Produksi		-	-	-	-
PNBP	1.992.190		70.320.176		14.077.018
Pertambangan	.59 .3 .960		213.261.020		157.094.020
Grand Total	59.8 8.534.4 3	91.575.121	1.906.390.970	31.253.297.490	767.836.057

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Donggala

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2021)	Perubahan LEBIH BAYAR TA 2019 (KMK No. 276/KM.7/2021)	PERUBAHAN LEBIH BAYAR TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)
Pajak	-		146.925.931	418.525.931	-
PPh	-		146.925.931	418.525.931	-
PPh Pasal 21	-	-	439.675.946	243.675.946	-
PPh Pasal 25/29	-	-	234.650.985	234.650.985	-
PBB		-		-	
Cukai					
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas	-	-		-	-
Bagian Daerah Pasal 21	-	-		-	-
Bagian Daerah Pemotongan					
Bagian Daerah Pemungutan					
Bagian Daerah Sektor Tertentu	-	-		-	-
Bunga Penerimaan Migas	-	-	-	-	-
Bunga Penerimaan Non Migas			-		
Bunga Penerimaan Pasal 21					
Bunga Penerimaan Pemotongan	-	-			-
Bunga Penerimaan Pemungutan		-	-	-	-
Bunga Penerimaan Sektor Tertentu		-	-	-	
DMF					
SDA	-	5.761.765	14.171.091.531	2.695.119.969	12.498.670.962
Migas	-	-	1.551.550.034	1.551.550.034	9.830.951.125
Minyak Bumi (15%)	-	-	857.383.770	857.383.770	-
Minyak Bumi (85%)			28.111.750	28.111.750	
Minyak Bumi dalam Rangka DMO					
Gas Bumi (70%)	-		10.095.922.649	9.111.172.172	9.854.129.079
Gas Bumi (30%)	-	-	1.976.902.016	-	1.976.902.046
Gas Bumi dalam Rangka DMO	-	-	-	-	-
Panas Bumi		-	3.619.304.979	-	3.619.304.979
Dividen			2.615.172.380		2.615.172.380
Royalti			1.004.317		1.004.317
Pertambangan Umum	-				
Iuran Produksi	-	-		-	-
Iuran tetap		-	-	-	-
Kekurangan Bayar Penerimaan			-		
Kehutanan		5.761.765			
IHPH	-				
PSDH	-	-	-	-	-
Jaring		5.761.765	-	-	-
Perikanan					
Total	-	5.761.765	14.317.238.462	2.695.119.969	12.498.670.962

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Dompggu n

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2021	LB Defisit TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesta TA 2020 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)	(6)
Pajak	7.107.382.943	-	1.352.044.270	5.841.360.094	6.974.410
PPh	2.717.147.408		620.170.350	2.179.365.058	
PPh Pasal 21	2.552.329.021		624.891.430	1.988.637.691	
PPh Pasal 25/29	164.818.387		13.297.920	170.817.967	
PBB	4.412.714.958	-	660.963.430	3.728.072.967	6.974.409
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.291.191.908	-	265.689.750	736.970.238	-
Cukai	176.318.744	-	169.370.920	-	5.055.754
Pajak Rokok	940.068.474	-	86.271.430	940.068.474	
Pajak Sarang Burung Walet	-			-	
Pajak Alat Berat	-	-	-	-	-
Pajak Air Permukaan	953.017.036	-	181.673.400	771.984.356	-
Pajak Rokok Sebesar Opsen	210.208.207		9.901.350	200.307.707	
Biaya Pemungutan Migas	5.626.505		5.390.250		236.505
Biaya Pemungutan Non Migas	30.888.105	-	1.237.350	31.560.855	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok					
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	42.331.450		9.272.500	31.212.950	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.136.647	-	736.800	6.399.847	-
Cukai	2.833.500	-	1.301.850	33.750	-
SDA	27.239.211.279	609.797.100	735.271.275	26.084.248.277	949.853.570
Migas	14.150.691.280		43.172.500	14.032.209.260	
Migas Pasal 4 ayat (3)	1.429.498.695		26.985.100	1.380.613.195	
Migas Pasal 4 ayat (2)	46.973.050	-	56.600	46.920.650	-
Migas Lain-lain dalam Kategori Others	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	12.510.687.841		15.600.800	12.497.087.041	-
Gas Bumi 0,5%	208.011.694		226.100	208.287.011	
Gas Bumi dalam Kategori Others					
Minerba	12.958.260.360	609.797.100	828.281.450	13.631.080.110	949.853.570
Panas Bumi	-	609.797.100	62.364.450	-	609.797.550
Kehutanan	12.958.260.360	-	145.020.450	12.813.080.110	-
Perikanan					
Pungutan Perikanan					
Pajak Karbon	-				
Sektor Energi Primer Total	-	-	-	-	-
Kehutanan	467.113.927	-	56.783.975	3.673.824	-
Cukai					
Pertambangan					
PBBP	46.414.753	-	36.736.975	9.677.864	-
Perikanan	420.780.980	-	315.881.000	-	157.564.020
Grand Total	34.780.608.151	609.797.100	337.179.843	32.793.517.369	736.070.090

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Morowali

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (KMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 9/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 20.. (KMK No. 9/PMK.07/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] [4]-[5]
Pajak	-		5.011.249	5.011.249	
PPh	-	-	5.011.249	5.011.249	-
PPh Pasal 21		-	-	-	-
PPh Pasal 25/29			5.011.249	5.011.249	-
PPN					
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas	-	-			
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 21			-	-	-
Bagian Daerah PPh Orang Pribadi					
Bagian Daerah PPh Perusahaan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-		-	-	-
Bagian Pemerintah Migas			-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas					
Bagian Pemerintah Pasal 21 Orang Pribadi	-				
Bagian Pemerintah Perusahaan	-		-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya			-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					
PPN	-				
SDA	-	16.893.567	1.336.562.63	2.340.507.437	9.999.075.194
Migas		-	8.570.345.847	2.340.507.437	6.610.047.302
Minyak Bumi 6%			572.353.770	572.353.770	-
Minyak Bumi 0,5%			28.111.729	28.111.729	-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-				
Gas Bumi 12%	-	-	7.676.732.692	1.066.732.298	6.610.000.394
Gas Bumi 0,5%		-	30.493.656	-	30.493.656
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Panas Bumi			1.076.072.192	-	1.076.072.192
Tambang					
Royalti	-		1.076.072.192		1.076.072.192
Pajak Migas	-	-	-		
Bonus Produksi	-	-	-	-	-
Bunga Migas			-	-	-
Kelebihan Pembayaran Administrasi					
Kehutanan	-	16.893.567	1.276.056.642		1.276.056.642
IHH	-	-	-	-	-
DR		-	1.276.056.642	-	1.276.056.642
PSDH		16.893.567			
Perikanan					
Grand Total	-	16.893.567	11.352.634.030	2.345.518.686	8.999.075.324

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Mata Uang

(Dalam rupiah)

URAIAN	KB Defisit TA 2020	LB Defisit TA 2020	Penyaluran TA 2021 (Sesuai PMK 39/2020 dan PMK 57/2021)	KB TA 2021 yang belum dialokasikan	LB TA 2021 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	34.379.483.627	-	2.128.126.370	32.276.561.262	
PPh	21.459.560.288	-	527.363.800	20.932.196.488	-
PPh Pasal 21	21.348.373.101	-	515.3[illegible]0	20.[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	111.187.187		12.033.700	99.153.487	-
PBB	12.919.923.339		1.600.763.070	11.319.160.269	
BPHTB	2.177.736.746		272.592.700	1.905.144.046	
Bagi Hasil	314.340.847	-	20.801.300	293.539.547	-
Bagian Daerah Migas	9.011.195.220	-	666.252.460	8.344.942.760	-
Bagian Daerah Non Migas			-	-	
Bagian Daerah Penambahan					
Bagian Daerah Perbatasan	783.846.087	-	82.360.200	701.485.887	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2.130.348.107	-	8.601.800	2.121.746.307	-
Bagian Pemerintah Migas	11.429.630		4.092.800	7.336.830	-
Bagian Pemerintah Non Migas	301.687.393		26.260.200	275.427.193	
Bagian Pemerintah Pusat Lain	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perbatasan		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	26.939.127		10.870.000	16.069.127	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	7.166.647		280.000	6.886.647	
Cukai	2.853.529	-	1.992.000	861.529	
Pajak	135.102.237.008	3.[illegible] - 6.003	31.[illegible]0.535	166.[illegible]	3.335.[illegible]
Migas	11.071.361.780		43.470.500	14.[illegible]	-
Minyak Bumi PPh	2.109.799.000		28.895.000	[illegible]	
Minyak Bumi PBB	6.583.500		902.500	7.[illegible]	
Minyak Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu	-	-	-	-	
Gas Bumi PPh	19.516.687.341	-	3.420.630	[illegible]	-
Gas Bumi PBB	208.511.207	-	923.400	916.387.95[illegible]	-
Gas Bumi Pajak Penerangan Industri		-	-	-	-
Minerba	130.030.321.783	886.003.312	2.109.330.000	122.[illegible]	1.000.015.072
Tambang	-	886.003.312	103.271.700		1.000.015.072
Jumlah	123.673.[illegible]		1.[illegible]	121.[illegible]	
Pajak Lainnya		-	-	-	-
Cukai Tembakau		-	-	-	-
Denda Pajak					
Pendapatan Bagi Hasi[illegible]					
Kekurangan	461.[illegible]	16.8[illegible]	65[illegible]	3.[illegible]	5.203.[illegible]
Jasa		-	-	-	-
PTNBP		16.8[illegible]	283.141.700	-	5.[illegible]
PNBP	461.359.316		81.[illegible]	31.[illegible]	
Perikanan	2.[illegible]		360.[illegible]		6[illegible]
Jumlah Total	137.[illegible]	3.[illegible]	3.[illegible]	3[illegible]	3.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pasir

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KETA 2018	KETA 2019	DBH TA 2019 (PMK No. 250/PMK.07/2020)	Penyesuaian DBH TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Jml DBH TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	237.587.306	297.592.306	-
PPh:					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 26 (2)					
PBB	-	-	237.587.306	297.592.306	-
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas			280.328.875	280.328.875	
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal Tertentu					
Bagian Daerah Perimbangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perseorangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas			17.258.131	17.258.131	
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Perseorangan Pajak Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Perseorangan Perdagangan					
Bagian Pemerintah Tertentu					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
DAK	-	-	-	-	-
SDA		5.301.986	10.276.330.017	760.905.019	9.515.424.998
Migas			7.989.701.618	759.905.019	7.229.796.629
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%		-	7.878.780.489	759.905.019	7.068.021.035
Gas Bumi 0,5%			110.979.090		110.774.090
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pertambangan	-		1.130.921.960		1.130.921.960
Iuran Tetap	-	-	1.096.611.760	-	1.096.611.760
Royalti	-	-	48.310.160	-	48.310.160
Pajak Lainnya		-	-		-
Jumlah Produksi					
Tarif Iuran					
Bagian Pemerintah	-	-		-	
Kehutanan	-	5.301.986	1.259.605.359	-	1.259.605.359
DR					
PSDH			1.179.727.240		1.179.727.240
DBHPH	-	5.301.986	72.960.099	-	72.960.099
Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Grand Total		5.301.986	10.672.918.753	1.057.501.373	9.615.417.998

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Poso

(dalam rupiah)

JENIS DBH	(1) Deficit/(LB 2020)	(2) Deficit/(LB 2021)	(3) Penyaluran DBH TKDD Semesteran (PMK No. 226/PMK.07/2020)	(4) DBH 2021 yang telah disalurkan	(5) DBH 2021 yang akan disalurkan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(3)-(5)	(7)
Pajak	3.731.453.674	-	1.410.434.277	2.318.344.277	7.828.067
PBB	3.742.506.293	-	858.177.600	1.055.428.693	
PBB Pasal 25	2.122.116.456		791.534.560	1.728.061.536	
PBB Pasal 25/29	220.979.737		13.015.100	207.964.637	
PPN	2.515.021.494		360.060.100	2.154.961.394	7.033.094
Pajak Rokok	19.353.968		265.699.100	246.200.598	-
Bagian Daerah Migas	105.412.561	-	360.145.400	-	7.812.339
Bagian Daerah Non Migas	2.302.577		166.700	2.135.877	
Bagian Daerah Pasal 21					-
Bagian Daerah PPh Perseorangan					-
Bagian Daerah PPh Kehutanan	534.105.383	-	13.362.820	431.040.580	-
Bagian Daerah Bahan Bakar Minyak	215.525.207	-	8.661.500	206.863.707	
Bagian Pertambangan Migas	8.779.479		8.680.400		215.722
Bagian Pertambangan Non Migas	76.576		5.700	70.876	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Perikanan			-		
Bagian Pertambangan Pertambangan	30.772.237		1.057.020	15.117.317	
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	7.211.167		260.500	6.995.547	-
CHT	3.838.503	-	301.470	331.893	-
DBH	27.283.700.320	1.027.8[illegible].338	[illegible].106.707.475	26.0[illegible].568.305	1.963.060.385
Bagian	14.17[illegible].681.760		48.172.300	14.[illegible]2.209.260	
Minyak Bumi (SDA)	1.[illegible]0.196.890		25.865.700	1.080.613.195	
Minyak Bumi (PPh)	46.960.610	-	903.900	46.020.952	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi (SDA)	12.[illegible]3.677.84[illegible]	-	15.400.600	12.417.097.24[illegible]	-
Gas Bumi (PPh)	202.[illegible].494	-	225.705	108.287.801	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	13.368.290.560		145.920.150	12.912.380.110	
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pajak	1[illegible].358.290.560	-	45.920.450	1[illegible].360.110	-
Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Pajak Perdesaan			-		
Pajak Perkotaan					
Pajak Perdesaan Pertambangan					
Realisasi	-	1.027.8[illegible].558	60[illegible].535	-	1.828.125.048
PDK	-		-		
BUMN		1.021.0[illegible].1[illegible]	138.[illegible].700		1.710.[illegible].220
BUMD	-	16.[illegible].[illegible]	61.[illegible].750	-	[illegible].636
Perseorangan	59.[illegible].382	-	116.881.000	-	197.[illegible].[illegible]
Grand Total	33.014.[illegible].206	1.027.8[illegible].338	2.517.141.[illegible]	31.[illegible].[illegible].747	2.[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Palu

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			276.709.150	276.709.150	
PPh	-		276.709.150	276.709.150	
PPh Pasal 21	-	-			
PPh Pasal 25/29	-	-	276.709.150	276.709.150	-
PBB		-	-	-	-
BPHTB			-		
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Pasal Dalam	-		-	-	-
Bagian Daerah Pasal Luar Negeri			-	-	-
Bagian Daerah Pasal 26					
Bagian Daerah Sektor Tertentu	-				
Bagian Pemerintahan Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintahan Non Migas		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Bunga					
Bagian Pemerintah Perhutanan	-				
Bagian Pemerintah Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya		-	-	-	-
CHT					
DBH	-	4.501.615	8.120.690.791	1.072.793.571	4.131.208.123
Migas	-	-	8.120.690.791	4.072.793.571	4.130.077.428
Minyak Bumi 15%	-	-	852.333.770	852.333.771	-
Minyak Bumi 0,5%			28.411.459	28.411.459	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 2013	-		7.131.821.692	3.291.748.341	4.130.077.128
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Sumber Daya Alam		-	31.122.730	-	31.122.730
Kehutanan		-	31.122.730	-	31.122.730
Perikanan					
Pertambangan Umum	-				
Dana Reboisasi	-				
Dana Setoran		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Pertambangan		4.501.615			
PBB	-				
BPHTB	-	-	-	-	-
PSDH		4.501.615	-	-	-
Pertambangan					
Grand Total	-	4.501.615	8.152.130.241	1.137.203.121	4.131.208.123

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Palu

(dalam rupiah)

Jenis Dana	KB Dana TA 2020	LB Dana TA 2020	Penyaluran KB dan Penyaluran TA 2020 [(3)=(1)-(2)]	TA 2020 yang Belum Disalurkan	LB TA 2020 yang telah Disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
PajAk	1.589.010.771		1.589.010.771	1.587.787.102	2.611.361
PPh	3.553.343.484		3.553.343.484	3.012.430.134	-
PPh Pasal 21	2.454.148.386	-	2.454.148.386	1.969.528.562	-
PPh Pasal 25/29	1.099.195.098	-	99.195.098	42.901.572	-
PBB	3.032.614.784	-	3.032.614.784	2.614.425.745	2.611.361
Pajak Rokok	1.961.959.998		1.961.959.998	1.720.270.259	
Bagian Daerah Migas	79.690.184		79.690.184		2.456.246
Bagian Daerah Non Migas	1.302.152	-	1.302.152	581.545.187	-
Bagian Daerah Pasca Bond	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Kehutanan	2.553.107	-	2.553.107	309.954.507	-
Dana Penerimaan Migas	2.703.379	-	2.700.402	-	2.977
Dana Penerimaan Non Migas	21.767.758		1.032.702	22.714.720	
Dana Penerimaan Pertambangan Panas Bumi					
Dana Penerimaan Pertambangan	-	-	-	-	-
Dana Penerimaan Perkebunan	-	-	-	-	
Dana Penerimaan Sektor Lainnya	6.196.617		286.800	6.209.617	
DTF	1.032.509		1.032.509	961.679	
DTA	27.307.544.844	90.012.739	952.446.560	26.444.161.365	170.078.351
Migas	14.175.681.763	-	43.472.509	14.132.209.254	-
Kurang Bayar 0,5%	1.109.708.203	-	28.857.750	1.580.612.193	
Kurang Bayar 0,5%	76.993.832		962.430	76.031.402	
Minyak Bumi dan Gas Bumi Kurang Bayar					
Gas Bumi 1,5%	12.810.687.641		13.450.050	12.197.237.241	-
Gas Bumi 0,5%	238.51 .304	-	243.420	238.537.884	-
Gas Bumi Bagian Negara Kurang Bayar	-	-	-	-	-
Khusus	12.038.275.519	90.012.739	136.800.050	2.812.554.585	91.720.870
Tambahan		90.012.739	10.282.120		91.720.870
Tunjangan	12.913.270.510		141.920.020	12.411.031.048	
Tambahan Bagian	-				-
Dana Perimbangan	-	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	1.430.264		30.262.703		20.837.152
DP	-		-	-	-
DAK	-	-	-	-	-
Fisik	17.710.217		37.283.308		20.583.114
Non Fisik	164.193.990		316.981.395		127.091.327
Grand Total	36.896.560.965	90.012.739	4.496.276.227	31.002.301.303	243.649.296

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pacitan Provinsi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	Kurang TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KEP. No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak		-	952.546.430	942.867.930	9.678.500
PPh			942.867.930	942.867.930	-
PPh Pasal 21			643.420.113	643.420.113	
PPh Pasal 22/26	-		299.037.237	299.037.237	
PBB	-	-	9.678.500		9.678.500
Cukai Hasil Tembakau		-	-		
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			9.678.500	-	9.678.500
Bagian Daerah Pajak Rokok	-				
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-			
Bagian Daerah Pertambangan Minyak		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi				-	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi	-				
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	7.224.000		7.224.000
Bagian Pemerintah Pusat Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Minyak Bumi			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Gas Bumi	-				
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-	-			
PPh 21		-	-	-	-
PBB		6.721.238	20.015.536.312	1.229.536.569	18.786.017.948
Migas			11.847.251.980	1.229.536.569	10.617.715.420
Minyak Bumi (PPh)	-		922.032.920	922.032.920	
Minyak Bumi (PBB)	-	-	31.095.112	31.095.112	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	10.748.504.588	265.818.405	10.482.686.180
Gas Bumi 0,5%			170.730.940	-	170.730.940
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Kehutanan	-		8.122.301.023		8.122.301.023
Landrent	-	-	8.093.976.900		8.093.976.900
Royalti	-	-	28.324.123	-	28.324.123
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Produksi			-	-	-
Iuran Tetap	-				
Setoran Bagian Pemerintah	-	-			
Kehutanan		6.721.238	-	-	
DR			-	-	-
PSDH	-				-
Reboisasi	-	6.721.238			
Perikanan	-	-	-		
Grand Total		6.721.238	20.968.182.742	2.172.404.499	18.795.778.243

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pringsewu

(dalam rupiah)

URAIAN	PK Definitif TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran DBH TA 2021 Sebelum/s.d. TA 2020 (Kolom 3 - Kolom 4 TA 2020)	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(5)	(7)=(4)
Pajak	5.257.548.670	616.604.800	1.256.031.342	4.004.056.268	76.496.742
PBB	2.637.083.107	-	736.(-3.8(e)	1.8- 35.307	-
BPHTB Pasal 21	2.317.232.077		770.901.200	1.575.31 777	
PPh Pasal 25/29	291.782.130		25.878.600	267.823.530	
PBB	1.863.745.373	10.000.000	139.972.300	2.187.6(1.(12	10.196.729
Bagi Hasil	901.960.938		250.669.103	1.730.270.299	-
Bagian Daerah Migas	99.267.143	-	42.3-, 302	-	53.0(6.837
Bagian Daerah Non Migas		1.679.430	7.636.700	-	7.050.370
Bagian Daerah Pasal 21					
Bagian Daerah Perkebunan	-				
Bagian Daerah Perkebunan	261.16..373	-	74..47..00	206.957.470	-
Bagian Daerah sektor Lainnya	215.393.907	-	8.634.702	206.934.707	-
Pajak Penerangan Migas	2.723.339		2.994.570		1.091.762
Pajak Penerangan Non Migas	-	312.430	256.900		249.230
Bunga Pembangunan Pedesaan	-	-		-	-
Bunga Pembangunan Perbatasan		-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan	1.607.317		1.077.330	130.532.417	
Pajak Penerangan Jalan Non Migas	7.135.147	-	256.500	6.894.947	
DAK	16.913.749	-	11.259.0.2	5.304.207	-
DAU	27.203.179.200	660.702.1.8	680.308.675	26.544.569.350	1.031.53..263
Migas	11.(.6.(4(.(48		42.172.300	14.78.206.281	
Minyak Bumi 15%	1.029.199.998		28.887.700	1.(85.(.8.19(	
Minyak Bumi 3%	6.686.662		901.800	76.(26.(60	
Minyak Bumi dan/atau Sebagai Pasal	-	-	-	-	-
Gas Bumi 69%	79.310.667.541	-	12.4(6.6(e)	12.497.187.341	-
Gas Bumi 0,5%	574.31..291		723.-60	228.587.704	-
Gas Bumi dalam Rangka PNBP					
Minerba	1.995.(40.660	95.726.100	2(1.(78.200	1.8(2.(80.(19	1.052.(70.(20
Tambang	-	95.(16.100	126.882.200		1.052.(79.(20
Kayu	2.058.250.566	-	1(6.920.(60	1.9(8.(90.(10	
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Aturan Perpajakan		-	-	-	-
Tambahan					
Sumber Daya Alam Perikanan	-				
Kehutanan	-	6.846.(18	16.71..926	-	5(.656.613
DAK	-	-	-	-	-
Reboisasi					
PSDH	-	6.(11.(16	13.(11.(26		32.(05.(62
Earmark 5%	156.186.962	-	1(1.(91.(20		1(1.(94.(20
Grand Total	32.(82.(02.(20	5(.202.(.8	348.(6(.(12	30.(78.(21.646	1.368.(26.(31

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Toje Una Una

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB LB 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)	Stlh LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	156.640.066	156.640.066	
PPh		-	156.640.066	156.640.066	
Pph Pasal 21			81.614.040	81.614.040	
Pph Pasal 25/29			74.491.026	74.491.026	-
PBB				-	-
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Kehutanan					-
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Bidang Lainnya					
Bagi Pemungutan Kehutanan					-
Bagi Pemungutan Non Migas	-			-	-
Bagi Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagi Pemungutan Pertambangan		-			
Bagi Pemungutan Perikanan					-
Bagi Pemungutan Sektor Lainnya	-			-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	5.308.156	7.603.336.172	2.27 .033.000	15.470.464.172
Migas			1.400.820.541	2.223.011.000	3.113.990.541
Minyak Bumi 15%			200.020.770	200.020.770	-
Minyak Bumi 0,5%	-		23.411.425	23.411.425	-
Minyak Bumi (Bagian Daerah Otsus)	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	1.03 .148.706	1.348.190.807	8.982.054.495
Gas Bumi 0,5%		-	17.089.040		17.089.040
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus					
Kehutanan			6.006.826.074		6.006.826.049
Iuran Hasil	-		6.001.800.000	-	6.001.800.000
Bagi Hasil	-	-	4.026.347	-	4.026.347
Dana Reboisasi	-	-	-	-	
Iuran Produksi		-			
Iuran Sewa					-
Sumber Daya Air Pemerintah					-
Pertambangan	-	5.308.156	1.179.737.260	-	1.179.737.260
IUPHH		-	-		
IHPHH			1.179.737.260		1.179.737.260
PSDH	-	5.308.156	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	5.308.156	7.759.976.238	2.362.654.066	15.477.454.410

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tojo Una-Una

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang/(Lebih) TA 2020	DBH Triwulan IV TA 2020	Penyaluran KB DBH Triwulan I s.d. IV TA 2020 (SMK No. 3/KM.7/2021)	Alokasi TA 2020 yang belum disalurkan	Alokasi TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(3)-(4)	(6) = (2)-(3)
Pajak	4.110.933.709		968.971.056	3.137.295.053	3.705.372
PPh	1.993.459.150		503.128.400	1.115.033.750	
PPh Pasal 21	1.893.939.840		503.020.050	1.289.589.210	
PPh Pasal 25/29	35.519.310	-	108.350	25.449.540	-
PBB	2.430.253.894	-	452.651.370	2.011.137.405	3.705.372
Pajak Rokok	1.981.059.996	-	385.685.705	1.526.770.293	-
Bagian Daerah Migas	87.312.000		175.280.200		3.130.905
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Hutan Hutan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	68.710.920		-	68.710.920	
Bagian Daerah Sawit Tahunan	216.659.107		6.001.200	210.657.707	
Bagian Pemungutan Migas	5.535.333	-	5.246.405		288.927
Bagian Pemungutan Non Migas		-	-	-	-
Bagian Pemungutan Pajak Daerah			-	-	
Bagian Pemungutan PPh Pasal 21	-				
Bagian Pemungutan PPh/Pasal 25	3.078.610	-		3.078.610	-
Bagian Pemungutan Sektor Lainnya	7.158.617	-	238.600	6.919.617	-
CHT	1.921.690		1.828.850	921.830	-
DBH	27.111.438.834	1.330.082.200	1.173.420.225	26.917.700.809	2.151.813.159
Migas	1.178.961.784		13.172.500	11.152.289.280	
Minyak Bumi 15%	1.097.797.304	-	23.363.700	180.913.196	-
Minyak Bumi 0,5%	13.963.870	-	962.800	49.012.850	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-		-
Gas Bumi 15%	12.513.221.211		13.730.630	12.197.267.321	
Gas Bumi 0,5%	306.511.394		22.170	208.251.094	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	13.918.382.560	654.432.920	23.962.320	12.611.306.110	636.071.330
Landrent		654.432.920	8.640.050	-	636.071.330
Royalti	12.918.240.560	-	15.322.270	12.611.306.110	-
Panas Bumi					
Iuran Produksi	-				
Iuran Tetap	-	-			
Sektor Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Perikanan	15.210.180	1.211.649.280	197.505.228	-	1.029.878.130
DP					
PUPP	-	1.221.519.450	9.838.505.172		1.764.230.820
PNBP	14.279.180	-	48.049.452	-	51.969.981
Pertambangan	310.190.980	-	376.887.300	-	137.303.030
Grand Total	31.721.097.043	1.330.082.200	2.107.705.287	41.371.390.595	2.641.260.477

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sigi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2018 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2018 (PMK No. 33/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-		604.01.1.936	604.01.1.936	
PPh	-	-	654.371.968	654.371.968	-
PPh Pasal 21		-	645.685.903	645.685.903	-
PPh Pasal 25/29			8.686.065	8.686.065	
PBB					
Bagi Rata	-				
Daerah Provinsi Sigi	-	-	-	-	-
Daerah Provinsi Dan Sigi		-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil			-	-	
Bagian Daerah Pemerataan					
Bagian Daerah Perkotaan	-	-			
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sigi			-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Bumi Bumi	-				
Biaya Pemungutan Perkotaan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT	-				
BHA	-	4.037.744	8.[illegible]231.973	223.187.427	7.393.948.55
Migas		-	8.004.500.778	223.285.427	7.781.[illegible]13.51
Migas Bumi 15%			832.232.778	223.285.427	[illegible]50.[illegible]7.3[illegible]
Migas Bumi 0,5%			28.111.429		28.111.429
Migas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 2019	-	-	7.[illegible]24.156.579	-	7.124.156.579
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba			117.331.200		117.331.200
Panas Bumi			117.331.200		117.331.200
Kopi	-				
Pajak Rokok	-	-	-	-	
Bunga Produksi	-	-	-	-	-
Bunga Jetap			-		-
Sebagian Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	4.[illegible]0.[illegible]4			
DR	-	-	-	-	-
IR PSDH			-	-	-
PSDH		1.207.[illegible]2			
PE Tambang	-				
Grand Total	-	4.[illegible]07.74	8.[illegible]9.330.946	8.[illegible]7.660.395	[illegible]50.[illegible]0.55

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sigi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KL Definitif TA 2020	DS Definitif TA 2020	Penyaluran KL DS Definitif TA 2020 [PMK No. 27/KMK.07/2021]	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	DBH TA 2020 yang telah disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2]-[4]	[6]
Pajak	4.240.227.095		1.017.636.079	3.222.591.016	4.221.561
PPh	1.868.955.496		672.965.607	1.195.989.889	-
PPh Pasal 21	1.768.238.610	-	569.701.960	1.198.536.650	-
PPh Pasal 22/23	127.717.786	-	18.184.201	109.533.585	-
PBB	2.016.672.969		415.747.993	1.600.924.976	4.284.561
Pajak Lain	1.951.959.969		216.668.103	1.735.290.209	
Bagian Daerah dari Migas	109.672.513		103.688.137		4.016.589
Bagian Daerah dari Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah dari Pertambangan					
Bagian Daerah dari Perikanan					
Bagian Daerah dari Kehutanan	2.535.039	-	3.604.300	(69.954.307)	-
Dana Reboisasi	7.277.774	-	4.462.400	-	187.676
Dana Perimbangan dari Migas					
Dana Perimbangan dari Pertambangan Umum					
Dana Perimbangan dari Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan dari Kehutanan		-	-	-	-
Dana Perimbangan dari Perikanan	15.5.6.17		256.630	6.899.477	
CHT	2.930.059		1.991.670	901.629	
SDA	27.3.5.369.74-	8.361.260	945.690.075	26.944.964.980	19.402.231
Migas	11.175.681.780	-	43.-72.530	14.-33.309.260	-
Dana Bagi Hasil SDA	1.709.709.905	-	97.867.700	1.580.673.157	-
Migas (Bagian 0,5%)	40.893.860		902.850	40.020.450	
Migas Bagian Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	13.510.637.641		12.700.630	12.997.331.241	
Gas Bumi 0,5%	208.51 .30-	-	933.-50	908.337.90-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Kehutanan	12.956.240.560	10.361.200	198.130.350	12.810.540.110	18.571.700
Landrent		10.361.200	2.209.000		18.571.700
Royalti	12.956.240.560		195.921.350	12.810.540.110	
Pertanian Rinci	-				
Luas Produksi	-	-	-	-	-
Jasa Lingkungan		-	-	-	-
Perikanan Budidaya Laut/Perairan Umum					
Kelautan	22.810.121		27.190.225		18.168.191
DR	-	-	-	-	-
LLAJ	-	-	-	-	-
PNBP	22.210.121		27.190.225		18.168.191
Pertanian	159.196.980		116.891.309		137.001.329
Grand Total	31.556.6.7.417	19.361.260	1.200.130.143	30.171.261.617	195.695.-95

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Banggai Laut

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2018 (PMK No. 65/PMK.07/2020)	Perubahan LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	SISA LEBIH BAYAR TA 2018 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	181.605	181.605	-
PBB		-	181.605	181.605	
PBB Pasal 25					
PBB Pasal 29/25			181.605	181.605	-
BPHTB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas		-	-		
Dampak Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasca Tambang					-
Bagian Daerah Penghasil	-			-	-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-	-	-	-	
Bagian Daerah Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas					-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pengembalian					
Bagian Pemerintah Pengembalian					-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-		-	-	-
DBH	-	-	-	-	
PPh		4.017.078	7.017.078.127	721.631.370	6.196.210.757
Migas			7.017.078.127	721.631.370	6.196.210.757
Migas Bumi 15%					-
Migas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Migas Bumi Tambahan Bonus Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	7.017.078.127	721.631.370	6.196.210.757
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam rangka Otsus					-
Minerba				-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Pajak Bumi		-			
Bunga Pinjaman					
Denda PBB/BPHTB					-
Setoran Kepala Daerah Lain	-		-	-	-
Pendapatan	-	4.017.958	-	-	-
DAK		-			
DAU					-
TOTAL	-	4.017.958	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total		4.017.958	7.018.720.732	721.813.028	6.196.210.757

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Banggai Laut

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PK DBH TA 2021	KB DBH TA 2020	Penyaluran DBH TA 2021 Sebelum PMK No. 109/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2021 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PPh	387.963.613	-	616.044.070	1.022.007.683	23.058.304
PPN	1.056.941.741		427.453.360	1.139.163.411	-
PPh Pasal 21	1.773.103.007		447.532.360	1.326.612.905	-
PPh Pasal 25/29	101.778.230		8.923.000	47.636.506	
PBB	2.454.206.418	-	380.773.000	2.126.544.582	51.063.164
Bagi Rata	2.177.166.366	-	242.508.410	1.034.647.958	-
Bagian Daerah Minyak	69.513.854		81.539.350		20.615.446
Bagian Daerah Gas Bumi					
Bagian Daerah Panas Bumi		-			
Bagian Daerah Pertambangan		-			
Bagian Daerah Pertambangan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	115.590.007		7.861.320	200.892.097	-
Biaya Pemungutan Migas	1.722.572		2.762.350		1.039.778
Biaya Pemungutan Non Migas		-			
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-			-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-				
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	71.190.677	-	266.450	6.508.342	
CHT	9.833.609	-	1.901.010	931.250	-
SDA	252.10.050.764		506.589.575	27.010.708.473	92.096.745
Kelapa	24.172.081.720		42.179.520	24.032.309.290	
Minyak Bumi 15%	1.439.193.900	-	25.283.730	1.580.630.155	
Minyak Bumi 0,5%	46.960.000	-	960.400	70.232.350	
Minyak Bumi Dari Wilayah Khusus	-	-		-	-
Gas Bumi 15%	13.510.657.8-		13.462.420	22.197.267.211	-
Gas Bumi 0,5%	225.317.804		223.420	209.267.987	-
Gas Bumi Dari Wilayah Khusus					
Minerba	3.036.080.000	-	141.810.330	13.864.464.160	
Perikanan		-			
Pegawai	18.026.063.690	-	14.129.300	23.864.161.169	
Pajak Bumi	-				-
Jasa Giro	-				-
Jasa Lainnya		-			
Pelayanan Pemerintah		-			
Kehutanan	45.459.494	-	26.364.300	19.091.097	-
DR	-				
DR PLT					
PNBP	45.459.291	-	26.364.300	19.094.991	
Perikanan	213.034.500	-	196.103.270	-	82.068.745
Grand Total	21.828.3-3.953		523.581.946	30.016.715.206	1.3.151.6-9

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Morowali Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (DMS No. 25/TM.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (DMS No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (SAKA No. 1/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			69.243.695	69.243.695	-
PBB			69.243.695	69.243.695	-
PBB Pasal 21	-				
PBB Pasal 25/29	-		69.243.695	69.243.695	
BPHTB	-	-	-		
Bagi Rata		-	-	-	
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan				-	-
Bagian Daerah Pertambangan Umum					
Bagian Daerah Perikanan					-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi	-	-	-		
PPh		-	-	-	-
SDA		10.550.139	27.718.631.673	2.710.432.587	25.008.099.83
Migas	-		21.611.199.284	2.710.432.587	8.911.167.797
Minyak Bumi 15%	-	-	852.707.770	852.707.770	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	28.417.426	28.417.426	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%			6.481.917.948	1.830.657.587	6.845.235.46
Gas Bumi 0,5%			174.952.041		174.952.041
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Minerba	-	-	5.169.928.921		10.166.028.122
Landrent	-	-	8.394.454.791	-	8.394.454.791
Royalti		-	5.760.774.127	-	9.769.473.127
Panas Bumi				-	-
Iuran Produksi					-
Jam Hasil	-	-			
Sebesar Bagian Pemerintah	-	-	-		
Kehutanan		10.550.139	-	-	-
DR				-	-
DHPH	-	-			
PSDH	-	10.550.139	-		
Perikanan			-	-	
Grand Total		10.550.139	27.786.702.727	2.776.676.270	25.018.026.43

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Morowali Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran KB DBH Desember TA 2020 (KMK No. 370/KM.7/2021)	KB TA 2021 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	10.014.9x1.309	-	1.6x4.25 670	8...55.690.97x	86.701.x55
PBB	2.270.990.255	-	647.483.520	1.696.405.755	-
PBB Pasal 21	3.344...10.1.3	-	637.27.6.420	1.6... 704.5.2	-
PBB Pasal 25/29	26.735.123	-	10.173.100	20.612.023	-
BPHTB	7.07...22x.1x4	-	1.995.x5x.x99	5.1x1.5x2.x01	86.301.78x
Cukai Data	2.177.x20.209	-	245.538.450	1.921.6x9.959	-
Bagian Daerah Pajak	3...1.x55.x75	-	97.774.700	-	55.x94.625
Bagian Daerah Non Migas	3.45...x5x.1.9	-	711.98.1.x99	2.x3x.x2x.7.3	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	1.120.391.172	-	699.119.900	1.x21.x91.x72	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.699.307	-	8.604.300	226.594.707	-
Iuran Pertambangan Migas	3.x5x.x85	-	6.615.200	-	3.x60.x11
Iuran Pertambangan Non Migas	81.996.761	-	6.x17.x99	77.x5x.x91	-
Biaya Pengembangan Energi Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemanfaatan Data Seismik	-	-	-	-	-
Biaya Pemanfaatan Pasca Eksplorasi	1.2.103.x97	-	31.x77.x.x	50.x76.x97	-
Iuran Pemanfaatan Sektor Lainnya	7.176.x27	-	2x5.x00	6.x9x.x27	-
DLT	2.x13.x39	-	61.x5x	91.x3x	-
SDA	17.x9x.254.x71	-	979.475.200	46.799.874.719	82.x63.x4x
Migas	4.x74.x72.x80	-	19.2x1.x00	13.x75.x78.x80	-
Minyak Bumi (Liq)	1.x63.x28.x95	-	34.1x.1.x00	1.x29.x37.x05	-
Minyak Bumi (Cond)	92.174.x80	-	1.x79.100	10.x5x.x50	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi (LNG)	1.x.x.x87.x41	-	3.x30.x02	1.x67.x97.x4	-
Gas Bumi (Gas)	2x9.x1.x.x91	-	x28.4x0	2x3.x57.x94	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Non Migas	13.x43.x51.x63	-	x48.x33.77x	32.x91.x83.x87	-
Kehutanan	677.x96.x20	-	2x2.x7x.x2x	415.x39.x2x	-
Panas Bumi	12.x62.x7x.x63	-	3x5.5x.x.x50	35.x3x.x49.x12	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Sektor Lainnya Pertambangan	-	-	-	-	-
Pertambangan	216.x3x.x02	-	75.165.650	140.x91.x52	-
DR	-	-	-	-	-
DTPF	-	-	-	-	-
PSDH	216.x3x.x02	-	75.165.650	140.x91.x52	-
Perikanan	215.x31.x83	-	2x5.x3x.2x5	-	x2.x6x.7x5
Grand Total	27.x10.2x6.x62	-	3.x36.x04.x70	54.x5x.76x.x90	193.4x3.x4x

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sulawesi Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 8/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (4)=(3)-(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak			2.802.071.250	2.802.071.250	-
PPh	-		2.802.071.250	2.802.071.250	-
PPh Pasal 21	-	-	937.351.357	937.351.357	
PPh Pasal 25/29	-	-	1.764.719.893	1.764.719.893	
PBB		-	-	-	
Bea BPHTB			-	-	-
Bagian Daerah Migas	-			-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Dana Hutan		-	-		
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan	-			-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-				
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-		
Bagian Pemerintah Non Migas		-	-	-	
Bunga Pengusahaan Panas Bumi				-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	-				
Bagian Pemerintah Perkebunan		-	-		
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya		-	-	-	
Cukai	-			-	-
PDRA	-	51.960.936	5.048.251.000	905.051.007	7.435.247.139
Migas	-	-	7.535.560.127	80.311.008	7.435.247.139
Minyak Bumi 15%			-		
Minyak Bumi 0,5%			-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 30%	-		7.112.729.703	80.216.579	7.821.715.845
Gas Bumi 0,5%	-		123.503.796		123.503.796
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Minerba		-	-		
Pendapatan		-		-	
Kehutanan				-	-
Perikanan Bumi	-				-
Jenis Produksi	-	-			
Iuran Hasil		-	-		
Reboisasi Bagian Pemerintah		-	-		
Kehutanan	-	51.960.936	712.719.309	712.719.039	-
Lain	-	96.960.936	712.719.309	712.719.039	-
PSDH		-	-		
DBHDR		6.020.64	-	-	
Perikanan				-	-
Grand Total	-	51.960.936	13.050.583.309	5.193.103.017	7.435.247.139

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sulawesi Selatan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 17/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang telah disalurkan	LB TA 2020 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	87.131.107.087	-	41.956.040.106	45.207.629.400	442.454.581
PBB	77.929.508.250		38.853.770.202	39.567.840.293	-
PPh Pasal 21	57.685.059.772		26.070.472.106	31.614.477.227	-
PPh Pasal 25/29	10.284.748.551		2.292.380.000	7.792.361.021	-
BPHTB	9.957.967.583	-	2.960.630.700	7.134.790.541	842.454.581
Cukai Rokok		-			
Bagian Daerah Migas	17.901.917		944.596.702	-	525.292.785
Bagian Daerah Non Migas	4.376.470.147		1.754.724.500	2.715.878.834	-
Bagian Daerah Pasca Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan	25.541.779	-	27.670.000	924.119	
Bagian Daerah Perkebunan	2.248.939.021	-	338.087.000	1.941.702.021	
Bagian Daerah Kehutanan	1.943.413.247		51.720.500	241.952.04-4	-
Bagian Pertambangan Migas	135.342		13.797.120		15.901.758
Bagian Pertambangan Non Migas	82.507.599	-	19.288.700	63.038.899	
Bagian Pertambangan Pasca Bumi		-	-	-	
Bagian Pertambangan Perikanan	501.060		127.620	7.468	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	50.797.623		7.311.720	43.485.903	-
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	21.517.541	-	982.200	20.535.341	
PDRD	176.019.671	-	342.650.438	33.369.263	
DAU	30.641.611.283	82.600	7.651.350.800	23.698.343.765	82.600
Migas	4.816.339.140	82.600	1.837.400	4.837.444.740	82.600
Minyak Bumi 15%	-	79.900	1.150		82.600
Minyak Bumi 0,5%	-	2.700	250		2.700
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	
Gas Bumi 30%	4.770.730.220	-	1.582.000	4.768.41.845	
Gas Bumi 10,5%	45.612.115		301.750	70.303.9.3	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Otsus	23.279.65.,40		2.170.048.223	17.809.032.906	-
Tambahan	357.865.226	-	106.242.775	356.106.451	
Reguler	20.722.290.383	-	931.[illegible]59	17.410.[illegible]2	
Dana Desa			-	-	
Insentif Fiskal			-	-	-
Dana Hibah	-				-
Penyesuaian Belanja Pemerintah	-	-			-
Kab/Kota	1.109.623.814	-	9.603.[illegible]	1.215.820.036	
DBH	1.098.701.186	-	17.025.232	174.5[illegible]6	-
DBHCHT	-				-
PBBKB	10.922.628	-	10.571.220	68.29[illegible]0	
Pertambangan	-	-			
Grand Total	113.000.801.782	82.600	43.027.530.607	70.[illegible]3[illegible]6	942.540.1.1

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bantaeng (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 55/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			7.110.872	7.110.872	-
PPh			7.110.872	7.110.872	
PPh Pasal 21	-		7.110.872	7.110.872	
PPh Pasal 25/29	-	-			
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata		-		-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas	-	-			
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi			-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan					
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT			-	-	-
SDA		597.494	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi 30%			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi 0,5%			[illegible]		[illegible]
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	-	-	
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti			-	-	-
Panas Bumi					-
Iuran Produksi	-				
Iuran Tetap	-	-			
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		597.494	-	-	-
DR					
IIUPH	-	-			
PSDH	-	597.494	-	-	-
Perikanan			-	-	-
Grand Total		597.494	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bantaeng

(dalam rupiah)

JENIS DBH	Alokasi Definitif TA 2020	Alokasi Definitif TA 2020	Penyaluran s.d. Bulan ke-12 TA 2020 (SAS No. 3/KM.7/2021)	Alokasi TA 2020 yang Telah Disalurkan	Alokasi TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Pajak	2.619.629.485		1.410.325.150	3.212.960.250	3.993.220
PPh	2.260.807.187	-	607.543.400	1.262.490.787	-
PPh Pasal 21	1.083.991.537	-	61.705.200	1.021.996.356	-
PPh Pasal 25/29	277.812.611		46.837.950	323.994.111	-
PBB	2.316.989.150		370.767.000	1.911.027.643	3.993.221
Bagi Hasil	1.951.969.948		296.699.750	1.725.270.298	
Bagian Daerah Migas	57.834.495	-	40.351.150	-	57.183.601
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Umum			-	-	
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Kehutanan	-				
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	217.390.007	-	6.604.360	205.934.707	-
Dana Reboisasi	3.610.741	-	8.794.100	-	183.626
Dana Pertimbangan Non Migas					
Dana Pertimbangan Dana Bagi Hasil	-				
Dana Pertimbangan Kehutanan	-	-	-	-	-
Dana Pertimbangan Perikanan					
Dana Pertimbangan Pertambangan Panas Bumi	8.095.148		342.500	7.102.648	
DTF	52.512.542		23.077.105	9.264.797	-
DAU	7.207.050.775	5.600	503.476.575	6.963.372	57.703.800
Migas	420.201.368	5.600	1.648.500	420.647.268	5.800
Minyak Bumi 15%		5.600	200	-	6.200
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	415.367.628	-	1.648.300	415.715.928	-
Gas Bumi 0,5%	6.833.740	-	67.000	6.898.740	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	1.714.982.161		200.057.025	1.713.091.536	
Panas Bumi					
Pph 21	1.714.982.161		200.057.025	1.913.091.536	
Pph 25/29 Badan	-	-	-	-	-
Pph Migas	-	-	-	-	-
Pph Panas Bumi					
Kehutanan	10.595.196		5.995.150	5.929.675	
PSDH	-	-	-	-	-
DR		-	-	-	-
PNBP	10.595.196		5.995.150	5.929.675	
Perikanan	159.199.990		110.901.700		127.049.920
Grand Total	6.914.086.913	5.600	1.970.830.707	8.157.954.629	191.801.247

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Barru

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Kurang Bayar TA 2018	Kurang Bayar TA 2019	Lebih Bayar TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian Lebih Bayar TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa Lebih Bayar TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			-	-	-
PPh	-				
Pph Pasal 21	-				
Pph Pasal 25/29	-	-			
PPN		-	-	-	-
Bagi Rata			-	-	-
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Pasal Dalam	-	-			
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-				
Biaya Pemungutan Migas	-	-			
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pasal Dalam			-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-				
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-	-	-
cukai				-	-
BHA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 3,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Dari Kontraktor					-
Gas Bumi 2021			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gas Bumi 2019	-		[illegible]		[illegible]
Gas Bumi Bagian Pemerintah Dari Kontraktor	-				
Pertambangan	-	-	-		
Perikanan		-	-	-	-
Kehutanan			-	-	-
Pertambangan Umum					-
Iuran Tetap	-	-			
Iuran Eksploitasi	-				
Pungutan Pemerintah Pusat Lainnya		-	-	-	-
Kelautan		[illegible]		-	-
DR	-				
IUPHH	-	-			
PSDH		[illegible]	-	-	-
Pungutan			-	-	-
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bantul

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	LB TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesta TA 2020 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	1.017.197.110	-	1.026.454.440	8.486.552.650	5.949.070
PPh	2.029.730.702		1.220.973.800	1.548.882.000	
PPh Pasal 21	2.023.196.464		1.212.026.020	1.335.910.850	-
PPh Pasal 25/29	206.399.541		43.307.850	162.911.710	-
PBB	2.818.918.364	-	978.899.850	1.839.997.850	3.946.210
Bea Beli	1.097.050.005	-	268.489.520	1.796.273.265	-
Cukai Daerah Minol	91.721.749		95.204.850		3.183.101
Pajak Daerah Non Migas	30.501		178.020		261.519
Pajak Daerah Belum Bayar	-				-
Pajak Daerah Kurang Bayar	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pemerintah		-	-		
Pajak Daerah Sektor Lainnya	210.089.547		8.90 1.300	230.901.707	
Biaya Pemungutan Migas	3.614.907		3.631.710		16.849
Biaya Pemungutan Non Migas	773	-	11.760	-	9.949
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pemerintah					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-				
Biaya Pemungutan PBB/BPHTB	8.075.178	-	821.510	7.761.676	-
CHT	23.328.735	-	16.721.342	6.607.505	-
SDA	3.302.303.410	667.041	720.747.570	1.089.210.636	139.756.067
Migas	420.269.018	5.630	1.678.398	420.667.235	5.980
Minyak Bumi 15%	-	5.630	300	-	5.630
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Gas Bumi 30%	115.307.024		1.010.700	114.751.128	
Gas Bumi 0,5%	5.022.770		27.000	5.49 1.770	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	714.380.161	658.051	202.392.976	1.310.99 1.366	3.053.781
Landrent	-	658.051	1.334.750	-	3.053.781
Royalti	1.711.047.161	-	200.089.625	1.511.09 1.356	-
Panas Bumi			-		
Dana Produksi					
Dana Hasil	-				
Sebagian Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	8.578.887	-	4.29 1.873	4.549.3 19	-
DR					
PSDH	-				
PSDH	8.8 8.887	-	4.29 1.873	4.569.3 19	-
Perikanan	150.150.380	-	516.581.202	-	137.69 1.070
Grand Total	4.242.117.517	667.041	1.050.638.780	8.925.978.512	142.709.650

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bone

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	LB TA 2019	KB s.d TA 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyesuaian KB s.d TA 2019 (KMK No. 377/KM.7/2021)	Sisa KB s.d TA 2019 (KMK No. 377/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			1.718.047.012	1.445.647.052	-
PPh	-	-	445.847.652	445.847.652	-
PPh Pasal 21	-	-	345.0 7.47	345 7.47	
PPh Pasal 25/29		-	100.000.181	100.000.181	
PBB					
Cukai Hasil Tembakau					-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Bukan Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pemberi Bukan Migas		-	-		
Bagian Daerah Pemberi Migas					
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi			-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Bukan Migas					
Biaya Pemungutan Panas Bumi					-
Biaya Pemungutan Kehutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
PPh Pasal 22 Impor				-	-
PBB	-	1.128.840	5.813.330.157	1.979.423.706	4.092.307.051
Migas	-	-	1.887.5-5. 43	952.078.4-4	935.206.979
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Otonomi Khusus				-	-
Gas Bumi 20%	-	-	1.561.323.572	516.798.957	644.524.615
Gas Bumi 0,5%	-	-	95.0 1.77	15.270.487	10.747.284
Gas Bumi Bagian Pemerintah Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Mineral			3.785.983.017	977.345.262	2.738.670.032
Landrent			308.090.791	977.345.262	10.774.529
Royalti			3.267.893.220		2.727.895.629
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi		-	-		
Bagian Daerah Penghasil					
Kehutanan		1.128.840			-
PSDH	-	-	-	-	-
DBHDR	-	-	-	-	
Reboisasi		1.128.840			
Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau	-	1.128.840	1.820.116.915	1.479.271.358	340.845.251

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota ... Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyelesaian KB DBH Tahun TA 2020 (SMS No. S-[illegible]/KM.7/2021)	KB TA 2021 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4) - (6)	(6) = (3)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PPh Pasal 25/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bea Perolehan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Cukai Hasil Tembakau	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Pajak Daerah Non Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Pajak Daerah Penerangan Jalan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Daerah Parkir	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Daerah Pengambilan Air Tanah	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Daerah Sarang Burung Walet	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Daerah Air Permukaan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Pajak Daerah Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Penerangan Jalan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Rokok	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Alat Berat	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Opsen Pajak Rokok	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Opsen Pajak Alat Berat	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Opsen Pajak Air Permukaan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Pajak Opsen Pajak Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
SDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi SDA	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi DBH	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Pertambangan Umum	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pertambangan Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Pajak Karbon					-
Bunga Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Denda Dana Reboisasi	-	-	-	-	
Sumber Daya Alam Lainnya					
Kehutanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-
Jasa	-		-	-	-
DTPK	-		-	-	
PBB-P2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Perikanan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pertambangan Panas Bumi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bulukumba

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	Alokasi Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyaluran Kurang Bayar TA 2019 (KEP-[illegible]/PK/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2019 (Kolom 4)-(Kolom 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PPh			[illegible]	[illegible]	-
PBB	-		[illegible]	[illegible]	-
PBB Pasal 21	-		[illegible]	[illegible]	
PBB Pasal 25/29	-	-			
BPHTB		-	-	-	
Bagi Hasil		-	-	-	
Bagian Daerah Migas				-	-
Bagian Daerah Sektor Migas	-				
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-			
Bagian Daerah Sektor Pertambangan		-	-		
Bagian Daerah Perikanan			-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	-				-
Bagian Pemerintah Sektor Migas	-	-			
Bagian Pemerintah Sektor Pertambangan			-	-	-
Bagian Pemerintah Perikanan			-	-	
Bagian Pemerintah Kehutanan	-				-
Bagian Pemerintah Pertanahan	-	-			
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya		-	-	-	
OPT			-	-	-
SDA		910.575	10.729.691.317	1.415.316.209	9.294.475.508
Migas	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	
Minyak Bumi Dalam Rangka DMO			-	-	-
Gas Bumi 30%			[illegible]	272.617.244	442.534.416
Gas Bumi 0,5%	-		10.049.038	2.000.282	8.049.054
Gas Bumi dalam Rangka DMO	-				
Pertambangan	-	-	9.593.127.223	1.010.912.612	8.582.200.610
Panas Bumi		-	3.[illegible]	1.010.912.615	2.[illegible]
Royalti		-	6.427.[illegible]	-	6.427.259.269
Pajak Bumi				-	-
Batubara Produksi	-				-
Batubara Sewa	-	-			
Kehutanan Setoran Penerimaan		-	-		
Kehutanan		910.575	-	-	-
IUPHHK	-			-	-
IUPHHK	-	-			
PSDH		910.575	-		
Pertambangan		-	-	-	
Perikanan		910.575	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bulukumba

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LO (sebelum TA 2020)	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (KMK No. 8/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang seharusnya Disalurkan	KB TA 2020 yang telah disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	6.771.391.935	-	2.340.692.797	4.430.697.972	4.715.349
PPh	2.772.616.501		1.561.260.200	1.211.356.151	-
PPh Pasal 21	2.430.625.676		1.458.139.200	972.145.813	
PPh Pasal 22/26	85.991.396		33.731.000	205.810.252	
PBB	3.810.711.418	-	745.685.800	3.064.825.267	4.715.349
Bea Perolehan	1.087.050.016	-	345.581.797	1.226.052.264	-
Bagian Daerah Migas	132.080.733		137.065.800	-	4.466.067
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pajak Rokok	-				
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan	1.772.014.085	-	515.435.800	1.160.480.385	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.380.027		6.631.202	270.991.707	
Biaya Pemungutan Migas	4.918.616		3.270.103		227.642
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	73.543.749		10.619.807	58.020.979	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	2.065.178	-	323.502	1.784.676	-
PBB	31.356.721	-	22.618.127	8.078.594	-
SDA	2.014.097.197	1.600	373.527.203	1.740.561.771	137.705.820
Migas	421.291.068	2.000	1.063.200	420.077.218	6.850
Minyak Bumi 15%	-	2.000	200		6.850
Minyak Bumi 0,1%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%	115.307.328		1.616.750	473.751.578	-
Gas Bumi 0,5%	6.923.719		27.030	6.896.710	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	714.582.181	-	209.967.635	1.112.014.550	
Landrent	-	-	-	-	
Royalti	1.714.582.181	-	209.967.635	1.513.304.554	-
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi	-				
Setoran Sisa Lebih Pemanfaatan	-	-			
Kehutanan	16.537.025	-	5.315.275	14.732.356	-
IHPH				-	-
PSDH					
DR	16.537.025	-	5.315.275	14.732.356	-
Perikanan	150.750.080	-	516.88 .200	-	157.844.030
Grand Total	9.018.012.071	6.720	2.719.550.397	6.368.071.746	142.426.769

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Karekung

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 29/PMK.07/2021)	Penyelesaian LEBIH BAYAR TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	SISA LEBIH BAYAR TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-				
PPh	-	-			
PPh Pasal 21		-	-	-	-
PPh Pasal 25/29		-	-	-	-
PBB			-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas		-	-		
Bagian Daerah Penghasil		-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya				-	-
Bagian Daerah Penerimaan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			
Pajak Penghasilan Migas		-	-	-	-
Pajak Penghasilan Non Migas				-	-
Bagian Pemerintah Pusat (Pajak Bumi dan Bangunan)	-				
Bagian Pemerintah Daerah	-	-			
Pajak Penghasilan Perseorangan			-	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 26				-	-
CHT	-				
SDA	-	979.586	680.957.008	176.199.410	721.737.184
Migas		-	831.973.884	176.199.410	654.774.474
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 3,5%				-	-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Offshore	-				
Gas Bumi 30%	-	-	831.161.010	176.199.700	654.962.310
Gas Bumi 0,5%	-	-	10.742.874		10.742.874
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat		-	-	-	-
Minerba			39.079.154	-	59.079.154
Pertambangan Umum			39.079.154	-	59.079.154
Kehutanan					
Provisi Sumber Daya Hutan	-	-	-		
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah				-	-
Perikanan	-	979.586			
CHT	-	-			
PNBP		-	-	-	-
PNBP		979.586		-	-
Pertambangan					
Grand Total	-	979.586	680.957.008	176.199.410	721.737.184

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Enrekang

(Rupiah rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	KB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (KMK No. 377/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Pajak	4.001.327.502	17.893.931	1.502.027.687	2.775.233.070	80.722.113
PPh	1.965.397.303		1.371.120.750	913.071.362	
PPh Pasal 21	1.774.55 .404		1.113.790.700	661.551.704	
PPh Pasal 2 /29	210.676.598	-	51.73 .050	59.721.590	-
PBB	2.292.176.540	17.893.931	401 .5 .750	1.055.301.569	80.722.113
Cukai Hasil Tembakau	1.691.8 0.0 9		565.660.750	1.126.255.202	
Bagian Daerah Penghasil Migas	2.1 5.5 1.1 7		99.208.1 0		37.6 2.941
Bagian Daerah Penghasil Migas	8.790.63		11 .3 0	8.612.952	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	3.770.404	-	-	3.77 .40	-
Bagian Daerah Penghasil Batubara		10.0 5.6 7	22 .3 .450		80.6 1.6 7
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan	315.699.0 7		5 .0 .350	259.0 1.701	
Biaya Pemungutan Migas	9.360.69	-	3.73 .0 0	-	1 .83 .476
Biaya Pemungutan Gas Migas	328.726	-	3 .62	328.596	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Pertambangan	165.0 1			165.0 1	
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	8 9. 4	.3 .4 0	-	- 9 9.5 4
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.0 7.17	-	5 2. 02	7.962.676	-
OPT	2 .5 .6		1 .53 .2 7	7.1 7.07	
BHA	1.1 .3 3.2 2	7.0 0.1 0	5 .0 .6 2	1.1 2.6 6.791	1 0.3 9.220
Migas	3 .2 1.3 3	5.6 0	1.6 0.3 2	2 .1 7.2 3	5 0
Minyak Bumi 15%	-	5 2.0	3 2	-	6 3
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Tanah Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	11 .6 .32		1.6 6.1 0	11 .7 1.32	
Gas Bumi 0,5%	6.52 .74		27.0 0	6.5 5.71	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Mineral	1.71 .5 5.3 1	3 .3 3.5 1	2 5.5 1.2 5	1.5 1 .6 5.5	5 .5 5.4
Landrent		3 .3 3.5	2 1.0 0	-	5 .5 5.4
Royalti	1.71 .5 5.3 1		2 .3 .7	1.5 5.6 5.6	
Panas Bumi					
Iuran Tetap	-				
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Setoran Jasa Pengembang		-	-	-	-
Kehutanan	1 .5 .7 2		4.57 .67	1.46 .5 7	
PSDH	-	-	-	-	-
DBHDR	7 .02 .31	-	4.6 5.67	1 6 .6 7	-
Perikanan	1 1.1 6.0 0		3 6 .5 .50	-	37.6 1.67
Total Dana	5.5 .72 .6	5 .4 .26	1.12 .712.6	1.72 .1 0.76	27.2 0.25

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gowa

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian (TA s.d TA 2019) (SMK No. 2/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 2/KM.7/2021)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
Pajak	-	-	69.196.700	130.682.276	151.011.424
PPh:	-	-	581.561.849	130.207.725	451.354.124
PPh Pasal 21	-	-	589.561.849	130.207.725	451.354.124
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	2.134.851	2.534.551	1.600.300
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Non Migas	-	-	4.049.530	3.512.000	401.530
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Non Migas	-	-	189.271	123.000	52.727
Bagian Daerah Penerimaan Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
SDA	2.260.378	87.610.458	-	-	671.3.7.050
Migas	-	808.817.207	-	-	848.2.7.007
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Migas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	854.574.050	-	-	854.574.050
Gas Bumi 0,5%	-	14.242.841	-	-	14.242.841
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Produksi	-	-	-	-	-
Bunga Iuran	-	-	-	-	-
Sebagian Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	1.260.378	3.242.750	-	-	2.242.750
DR	-	-	-	-	-
IUPHH	-	3.000.788	-	-	3.000.788
PSDH	2.253.578	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	2.253.578	1.465.601.565	130.682.276	-	835.925.019

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gowa

(dalam rupiah)

Uraian	KU Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DB DBH Sebelum TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum Dikembalikan	LB TA 2020 yang belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Total	6.664.3[illegible].730	75.529.602	2.505.402.000	4.534.932.707	229.[illegible].814
PPh	1.293.371.326	-	1.765.126.905	2.587.90[illegible].526	
PPh Pasal 21	1.001.732.010		1.0[illegible].271.[illegible]09	2.265.258.[illegible]19	-
PPh Pasal 22/29	291.738.717		72.102.[illegible]00	519.636.[illegible]07	-
PBB	2.375.163.089	75.529.602	9[illegible].271.[illegible]00	1.[illegible]94.[illegible]07.663	229.4[illegible]4.814
Cukai Rokok	191.459.938	-	965.[illegible]85.705	1.[illegible]26.[illegible]75.705	
Bagian Daerah Migas	87.197.018	-	[illegible]30.[illegible]35.302		62.[illegible]3.602
Bagian Daerah Non Migas	21.125		[illegible]9.900		116.675
Bagian Daerah Pasca Bumi				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	68.[illegible]05.[illegible]13		10[illegible].6[illegible].[illegible]00	-	42.[illegible]67.[illegible]27
Bagian Daerah Perikanan	-	21.[illegible]36.[illegible]20	55.[illegible]6.[illegible]03		123.[illegible]71.[illegible]20
Bagian Daerah Sektor Lainnya	715.[illegible]09.[illegible]07		8.[illegible]4.[illegible]00	20[illegible].[illegible]91.[illegible]07	
Dana Penerimaan Migas	3.[illegible]1.[illegible]28		3.[illegible]0.[illegible]05	-	[illegible].[illegible]54.[illegible]73
Dana Penerimaan Non Migas	1.[illegible]95	-	5.[illegible]00	-	[illegible].[illegible]57
Dana Penerimaan Pasca Bumi	-	-	-		
Dana Penerimaan Pertambangan	7.[illegible]78.[illegible]72		7.[illegible]72.[illegible]80		1.[illegible]3.[illegible]43
Dana Penerimaan Perikanan		3.[illegible]6.[illegible]09	2.[illegible]7.[illegible]20	-	6.[illegible]0.[illegible]01
Dana Penerimaan Sektor Lainnya	3.[illegible]5.[illegible]79	-	[illegible]72.[illegible]50	7.[illegible]62.[illegible]78	-
PBHT	20.[illegible]9.[illegible]95	-	- [illegible]67.[illegible]30	5[illegible].[illegible]1.[illegible]61	
BPHTB	2.318.[illegible]0.[illegible]00	[illegible].[illegible]%	[illegible]02.[illegible]7[illegible].[illegible]30	1.[illegible]47.[illegible]1[illegible].[illegible]40	197.[illegible]0.[illegible]27
Pajak	42[illegible].[illegible]0.[illegible]68	[illegible].[illegible]%	1.[illegible]1.[illegible]0	[illegible]20.[illegible]1.[illegible]68	[illegible].[illegible]%
Minyak Bumi 15%		[illegible].[illegible]%	[illegible]9[illegible]	-	[illegible].[illegible]%
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 30%	- 1.[illegible]67.[illegible]28	-	[illegible].[illegible]16.[illegible]09	41[illegible].[illegible]1.[illegible]29	
Gas Bumi 0,5%	[illegible].[illegible]2.[illegible]70		[illegible]7.[illegible]00	[illegible].[illegible]5.[illegible]43	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Pajak Lainnya	1.[illegible]4.[illegible]2.[illegible]81		[illegible]70.[illegible]7.[illegible]25	1.[illegible].[illegible]4.[illegible]56	-
Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai	714.[illegible]2.[illegible]91	-	[illegible]0.[illegible]7.[illegible]05	[illegible]1[illegible].[illegible]4.[illegible]30	
Denda Pajak	-	-	-		
Denda PPh Migas				-	-
Denda PPh Non Migas				-	-
Denda Lainnya					
Pendapatan	2[illegible].[illegible]0.[illegible]40	-	[illegible].[illegible]57.[illegible]25	1[illegible].[illegible]2.[illegible]20	
PNBP	-				-
BLUD	[illegible].[illegible]0.[illegible]01	-	[illegible].[illegible]57.[illegible]35	[illegible].[illegible]2.[illegible]56	-
Pendapatan	[illegible]9[illegible].[illegible]6.[illegible]5[illegible]	-	[illegible]16.[illegible]81.[illegible]00	-	[illegible].[illegible]7.[illegible]20
Grand Total	[illegible].[illegible]7.[illegible]80	[illegible].[illegible]0.[illegible]02	[illegible].[illegible]7.[illegible]71.[illegible]60	[illegible].[illegible]2.[illegible]7[illegible].[illegible]7	[illegible].[illegible]1.[illegible]31

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Jeneponto

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	DBH s.d TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Target Lebih Bayar DBH s.d TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa DBH s.d TA 2019 (KMK No. 374/KMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	4.343.618	4.340.958	-
PBB	-	-	-	-	-
PBB Pasal 25					
PBB Pasal 29/SKP					
BPHTB			11.010.918	11.010.918	-
Pajak Rokok	-	-		-	-
Kurang Bayar DBH Pajak	-	-	-	-	-
Kurang Bayar DBH Pajak Rokok			-		
Kurang Bayar DBH Pajak Rokok Tahun Lalu					
Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21					-
Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25/29	-	-	3.660.931	13.660.931	-
Kurang Bayar DBH Pajak Lainnya		-	-	-	
Lebih Bayar DBH Migas					
Lebih Bayar DBH Pajak Rokok	-				-
Lebih Bayar DBH PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
Lebih Bayar DBH Pertambangan		-	-	-	
Lebih Bayar DBH Pertambangan Panas Bumi			682.087	682.087	
Lebih Bayar DBH Pajak Rokok					-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	338.140	603.184.830	126.061.854	563.023.030
Migas			603.184.830	126.061.854	563.023.030
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%	-				-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	661.453.612	126.061.844	534.460.766
Gas Bumi 0,5%		-	10.730.784	-	10.749.684
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba					
Dead Rent					-
Royalti	-	-	-	-	-
Pajak Bunga	-	-	-	-	-
Iuran Produksi		-	-	-	
Iuran tetap					
Setoran Sanksi Administratif					
Kehutanan	-	595.140	-	-	-
IHK	-	-	-	-	-
IHPH					
PSDH		595.140			-
Perikanan	-				-
Grand Total	-	595.140	706.936.830	141.803.793	565.023.050

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Jeneponto

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Defisit TA 2020	LB Defisit TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesta TA 2020 (PMK No. 57/PMK.07/2020)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]=[3]-[4]
Pajak	6.236.903.567	-	1.794.758.590	4.496.641.437	-3.615.818
PPh	3.005.288.277	-	967.815.900	2.387.572.077	-
PPh Pasal 21	3.372.823.103		1.276.890.400	2.095.932.703	
PPh Pasal 25/29	232.102.117		11.422.800	191.130.314	
PBB	3.611.305.177		791.057.000	2.511.063.000	1.891.018
Bagi Hasil	69.353.304	-	265.099.700	1.726.270.246	-
Bagian Daerah dari Migas	1.101.134.-	-	135.975.600	-	4.575.056
Bagian Daerah dari Migas	2.349.776		-	7.569.776	
Bagian Daerah dari Pajak Bumi					
Bagian Daerah dari Penerimaan					
Bagian Daerah Pertambangan	7.417.10.50-	-	4.150.400	9) 914.50(-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.598.007	-	3.664.500	926.59- 507	
Biaya Pemungutan Migas	1.970.228		3.107.700		2.137.472
Biaya Pemungutan Non Migas	96.367			96.367	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Cukai Perebakan	12.21..105		2.150.700	10.031.703	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	3.086.776		982.600	2.732.879	
CHT	22.929.- 15	-	15.399.954	6.309.930	-
SDA	2.427.099.- 37	6.602	593.-33.150	1.940.936.276	159.720.920
Migas	722.690.335	6.602	143.330	720.017.268	6.602
Migas Bagian 85%		6.602	250		6.602
Migas Bagian 0,5%	-				
Migas Bagian Daerah Penghasil dan Daerah Lain dalam Provinsi Penghasil	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	113.867.028	-	615.100	- 3.75- 528	-
Gas Bumi 0,5%	6.020.710	-	97.200	6.853.740	
Gas Bumi dalam Daerah Penghasil dan Daerah Lain dalam Provinsi Penghasil					
Minerba	1.1.0.962.192		220.987.026	1.313.99-.936	
Iuran Tetap	-				-
Royalti	214.982.151	-	200.967.925	1.313.494.356	-
Pajak Lainnya		-	-	-	-
Bunga Deposito		-	-	-	
Cukai Hasil Tembakau					
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya	-				
Kekurangan	5.449.677	-	3.911.-75	9.539-.52	-
DR		-	-	-	-
PSDH					
PSDH	9.965.53-		3.911.-15	3.0.3.702	
Kompensasi	59.-36.382	-	2.1.-91.020		157.634.020
Grand Total	8.574.332.642	6.602	2.048.151.433	5.526.84-.209	162.355.538

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Lawu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019	PB s.d. TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyesuaian PB s.d. TA 2019 (KEP-20/PK/2021)	Sisa PB s.d. TA 2019 (KEP-20/PK/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak	-	-	800.000.000	487.500.000	487.500.000
PPh		-	455.373.000	487.500.066	487.500.066
PPh Pasal 21			707.651.000	487.500.066	410.086.307
PPh Pasal 22/26			77.670.010	-	77.670.010
BPHTB	-				
Luar Kota	-	-			
Daerah Kabupaten Lawu			-	-	-
Daerah Kota Non Migas			-	-	-
Daerah Provinsi Pulau Bumi					
Daerah Provinsi Pulau Lain	-				
Daerah Kabupaten Pulau Lain	-	-	-		
Daerah Provinsi Pulau Bumi			-	-	-
Bagian Pemerintah Migas				-	
Bagian Pemerintah Non Migas	-				
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-			
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya			-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-				
Cukai	-	-	-		
PBB		578.788	686.301.353	-	849.303.053
Migas			686.703.353	-	849.703.053
Migas Bumi 0,5%	-				
Migas Bumi 0,5%	-				
Migas di Luar Bumi dalam Negeri Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 30%		-	659.715.665	-	659.351.969
Gas Bumi 0,5%		-	10.710.384	-	10.710.384
Gas Bumi dalam Negeri Otsus			-	-	-
Minerba	-				
Landrent	-				
Royalti		-			
Cukai Rokok		-	-	-	
Pajak Daerah		-	-	-	-
Hotel					
Restoran	-				
Hiburan	-	578.788			
Reklame		-	-	-	-
PPJ			-	-	-
PBB-P2	-	578.788			
Pemungut	-	-			
Grand Total		578.788	825.365.954	487.500.066	1.337.703.860

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Luwu

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran Kas DBH Sesuai UU HKPD TA 2020 (UU No. 1/2022)	KB TA 2020 yang belum Terdistribusi	LB TA 2020 yang belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	2.811.082.717		2.001.278.773	809.803.944	39.495.293
PPh	2.032.066.849		1.281.129.470	750.937.379	-
PPh Pasal 21	2.290.719.615		1.277.117.770	1.013.601.845	-
PPh Pasal 25/29	341.376.525		4.011.700	337.364.825	-
PPN	2.096.863.587		202.864.920	1.893.998.667	39.495.293
Bagi Hasil	1.041.030.807		205.150.750	835.880.057	-
Bagian Daerah Migas	64.316.922		103.158.250	-	38.401.278
Bagian Daerah Non Migas	103.162.827		12.191.450	91.971.377	-
Bagian Daerah Pasal 21	-		-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-		-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan				-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.699.507		9.501.370	204.198.137	-
Jasa Pemanfaatan Migas	2.373.795		3.866.320		1.192.303
Jasa Pemanfaatan Non Migas	398.135		457.820	59.385	
Biaya Pemungutan Pasal 21				-	-
Biaya Pemungutan PPh Lainnya					-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.033.796		372.350	7.762.679	
CHT	23.033.905		16.700.106	6.333.799	-
SDA	2.010.613.141	6.600	551.760.020	1.458.853.121	157.730.523
Migas	32.980.309	6.600	1.540.000	120.241.209	6.600
Minyak Bumi 15%	-	6.600	220		6.600
Minyak Bumi 0,5%	-		-	-	
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-		-	-	-
Gas Bumi 15%	413.367.049		1.512.330	413.771.552	-
Gas Bumi 0,5%	5.942.749		27.450	5.915.349	-
Gas Bumi bagian Pemerintah Pusat			-		-
Panas Bumi	2.309.913.536		729.243.375	2.040.854.481	
Pertama	664.076.076		28.281.750	376.847.125	
Kedua	1.774.093.731		209.947.275	1.318.094.536	
Pajak Bumi					-
Bunga Pinjaman					-
Jasa tetap			-		
Bagian Bagian Pemerintah	-		-	-	
Kehutanan	9.726.737		3.909.350	5.426.587	-
IHPH					
IIUPH			-		
PSDH	9.426.437		3.909.350	5.426.587	
Perikanan	150.176.690		316.582.000	-	151.099.030
Grand Total	6.052.774.138	6.600	2.270.271.129	3.707.096.135	197.965.453

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kanwil Ditjen Pbn

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KEP No. 9/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (SISK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	9.133.111.006	998.807.051	8.134.303.955
PPh	-	-	743.347.135	349.405.038	393.941.097
PPh Pasal 21	-	-	594.580.406	345.241.668	249.338.738
PPh Pasal 25/29			148.766.729	-	148.766.729
PBB	-	-	107.097.023	132.401.113	17.304.090
Jasa Sita	-				
Dampak Alokasi Migas	-	-			
Pegiat Panas Bumi Non Migas		-	6.950.430	-	16.950.430
Pegiat Panas Bumi			-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-				-
Dampak Alokasi Pertambangan	-	-	103.399.137	103.092.407	
Pegiat Panas Bumi		-	-	-	
Biaya Pemungutan Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-		2.721.702	1.786.102	685.600
Biaya Pemungutan Pasal Dalam	-	-			
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan			17.717.834	17.717.834	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-				-
CHT	-	-			
SDA		635.749	582.760.065		1.082.703.295
Migas			1.187.970.265	-	1.187.970.295
Minyak Bumi 15%			-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-				-
Minyak Bumi dalam Kawasan Khusus	-	-			
Gas Bumi 69%	-	-	16.521.569		1.116.021.039
Gas Bumi 0,5%		-	16.643.699	-	16.078.030
Gas Bumi dalam Kawasan Khusus		-	-	-	-
Minerba			175.132.803	-	45.132.820
Tambang	-		175.132.803		45.132.820
Kayuan	-				
Panas Bumi		-			
Iuran Produksi		-	-	-	
Iuran Tetap			-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-				-
Kehutanan	-	635.749			
IHP		-	-		
PSDH		-	-	-	-
DBHTI	-	635.749		-	-
Perikanan	-				
Grand Total	-	635.749	9.464.077.756	998.807.051	9.317.230.202

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Luwu Utara

(dalam rupiah)

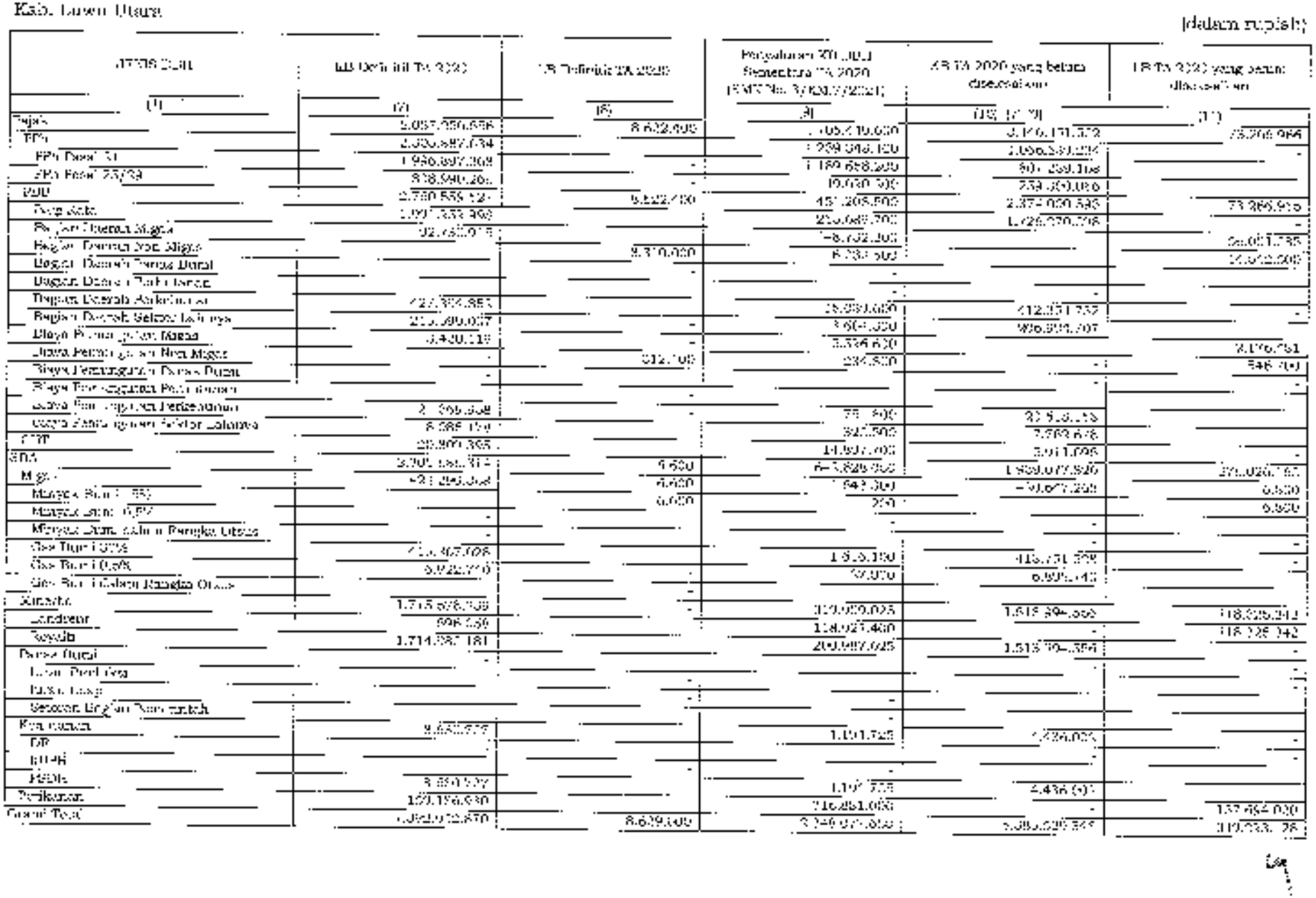

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mazos

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2021)	Penyesuaian TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 2/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak			1.108.460.070	1.192.106.750	2.300.566.750
PPh	-		98.290.507		98.290.507
PPh Pasal 21	-	-	98.290.507	-	98.290.507
PPh Pasal 23/26	-	-	-	-	-
PBB		-	1.010.383.472	1.192.106.750	2.202.490.222
Bea Jasa					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-	-	3.041.790.503	1.192.106.750	4.233.897.253
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-			
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-			-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	165.201.000		165.201.000
Biaya Pemungutan Sektor Jasa					
Biaya Pemungutan Perikanan	-			-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-		
CHT					
BHA		720.750	905.002.291		905.002.291
Migas	-	-	868.817.091	-	868.817.091
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-			
Minyak Bumi dr Wil Kerja Khusus					
Gas Bumi 30%			354.011.000		354.011.000
Gas Bumi 0,5%	-		14.260.041	-	14.260.041
Gas Bumi dr Wil Kerja Khusus	-	-	-	-	-
Mineral	-	-	36.215.200	-	36.215.200
Landrent		-	36.215.200		36.215.200
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Produksi	-			-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Dana Pengembangan		-			
Kehutanan		720.750			
PSDH	-				
DR	-	-	-	-	-
PSDH		720.750	-	-	-
Perikanan					
Cukai Hasil		720.750	4.378.906.270	1.192.106.750	5.571.013.020

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Maros

(dalam rupiah)

JENIS DBH	TP Sebelum TA 2020	LB Sebelum TA 2020	Penyaluran KB DBH Sampai dengan TA 2020 (KMK No. 310/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang Belum Dapat Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	7.961.224.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	33.736.155
PBB	3.963.010.501	-	[illegible]	[illegible]	-
BPH Migas	3.650.540.770	-	[illegible]	[illegible]	-
PPh Pasal 21/26	317.470.604		[illegible]	[illegible]	
Pajak Lainnya	3.683.728.414	-	[illegible]	[illegible]	
Bagi Hasil	3.961.9[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	30.[illegible]
Bagian Daerah Sesuai	54.[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah dari Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	37.[illegible]
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2.5[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pertimbangan Migas	1.092.963	-	[illegible]	[illegible]	-
Bagian Pertimbangan Non Migas	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	1.260.012
Biaya Pemungutan Sumber Daya Alam	-	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
DAK	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
DAU	21.089.575	-	[illegible]	[illegible]	
DBHCHT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Migas	472.390.299	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.[illegible]
Dacron Pajak [illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi [illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Offshore	-	-	-	-	-
Gas Bumi [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi [illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Gas Bumi dari Wilayah Kerja Offshore					
Sawit [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Tembakau	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Daerah	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan	-	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
DR					
DBHPH					
Pusat	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Perikanan	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	157.[illegible]
Grand Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pangkajene Kepulauan

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR DBH TA 2020	LEBIH BAYAR DBH TA 2020	PENYALURAN DBH TA 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2020)	PENYESUAIAN DBH TA 2019 (KEP-343/PK/2021)	SISA LEBIH DBH TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3]-[4]
Pajak	-				
PBB	-				
PPh Pasal 21	-	-	-	-	
PPh Pasal 25/29		-	-	-	-
BPHTB		-	-	-	-
Bagi Rata					
Bagian Daerah Minyak	-				
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Dana Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			
Biaya Pemungutan Pajak		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-				
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-			
Biaya Pemungutan Perikanan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	-
CHT	-				
SDA	-	1.036.456	67.515.031	168.049.901	570.799.157
Migas	-	-	63.516.979	168.049.864	560.586.785
Minyak Bumi (15%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (0,5%)			-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi (30%)	-		536.771.215	168.049.864	368.721.351
Gas Bumi (0,5%)	-	-	10.745.764		10.745.764
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba		-	7.030.603	-	7.030.603
Panas Bumi			7.030.603	-	7.030.603
Royalti					
Pajak Migas	-				
Bagian Produksi	-	-	-		
Bagian Lifting		-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-			-	-
Kehutanan	-	1.036.456			
DR	-	-			
PSDH		-	-	-	-
Perikanan		1.036.456	-	-	-
Pertambangan					
Grand Total	-	2.036.456	67.515.031	168.049.901	570.799.157

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pangkajene Kepulauan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Perhitungan KB DBH Definitif TA 2020 (KMK No. 378/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	2.990.121.452		1.173.735.400	5.897.867.837	1.797.870.025
PBB	1.966.116.758		1.820.386.420	276.857.173	1.130.868.730
PBB Pasal 21	1.023.194.703	-	1.761.363.500		1.738.168.797
PBB Pasal 25/29	942.921.973	-	87.770.430	959.036.170	
BPHTB	6.990.005.114	-	13.370.356.830	5.380.351.284	51.702.795
Sagu Batu	1.961.368.979		207.680.750	1.726.270.216	-
Bagian Daerah Migas	85.586.720		131.080.620		45.101.777
Bagian Daerah Non Migas	2.784.469.994	-	897.312.230	5.249.357.724	
Bagian Daerah Pasca Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan	913.539.107		8.957.030	20.209.707	
Dana Perimbangan Lainnya	3.075.000	-	4.950.800	-	1.875.800
Dana Perimbangan Non Migas	151.981.052	-	83.273.800	2.761.052	-
Dana Perimbangan Pasca Bumi					
Dana Perimbangan Pertambangan	-				
Dana Perimbangan Perkebunan		-	-		-
Dana Perimbangan Kehutanan Lainnya	8.080.178	-	372.320	7.742.678	-
OPT	91.809.695		17.807.700	3.971.995	
SDA	9.377.426.59	6.600	229.200.720	1.936.230.456	197.730.320
Migas	472.930.368	6.600	1.911.300	120.617.268	6.600
Minyak Bumi 15%		6.600	200	-	6.600
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%	5.387.628		1.010.100	13.731.528	
Gas Bumi 0,5%	8.972.540		200	0.898.740	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	1.887.023.139	-	136.222.553	1.761.700.691	-
Panas Bumi	11.738.780	-	1.505.750	2.526.646	-
Kehutanan	1.974.104.096		231.210.700	1.743.078.686	-
Perikanan	-				
Pertambangan Mineral	-				
Pertambangan Batubara		-	-		-
Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-
Perkebunan	9.722.362		4.718.575	3.003.077	-
PDE	-				
PBB P3		-	-		
PDRD	5.022.862	-	4.718.875	3.903.967	-
Perikanan	154.136.982		37.491.000	-	117.634.223
Grand Total	10.356.144.973	6.600	1.121.022.120	7.506.701.153	1.915.320.045

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Palopo

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KEP No. 8/PM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 8/PM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-		300.134.913	113.510.121	341.391.379
PPh	-		300.134.913	113.510.121	341.391.379
PPh Pasal 21	-	-	305.012.047	113.510.121	220.272.450
PPh Pasal 23/26		-	164.831.966	-	591.921.966
PBB		-	-	-	-
Bagi Rata				-	-
Bagian Daerah Migas	-				
Dampak Daerah Non Migas	-	-			
Tagihan Tagihan Pajak Pusat		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	-				
Dampak Daerah Bekas Lapangan	-	-			
Biaya Pemungutan Migas		-	-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-				-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-			
Biaya Pemungutan Perikanan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Bekas Lapangan			-	-	-
CHT	-				-
SDA	-	97.6.379	635.268.999		635.268.999
Migas		-	635.267.599		635.268.099
Minyak Bumi (6%)		-	-	-	-
Minyak Bumi (0,5%)				-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi (70%)	-		97.1.1.1.1.1		97.1.1.1.1.1
Gas Bumi (0,5%)	-	-	10.1.1.1.1.1		10.1.1.1.1.1
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Mineral		-		-	-
Panas Bumi			-	-	-
Royalti				-	-
Pajak Bumi	-				
Dana Reboisasi	-	-			
Dana Hasil		-	-	-	-
Setoran Sisa Lebih Perusahaan			-	-	-
Kehutanan	-	97.6.379			-
IHPH	-		-		
PSDH		97.6.379		-	-
Pertanian			-	-	-
Grand Total	-	97.6.379	1.135.471.212	113.510.121	1.020.88.1.091

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Palopo

(dalam rupiah)

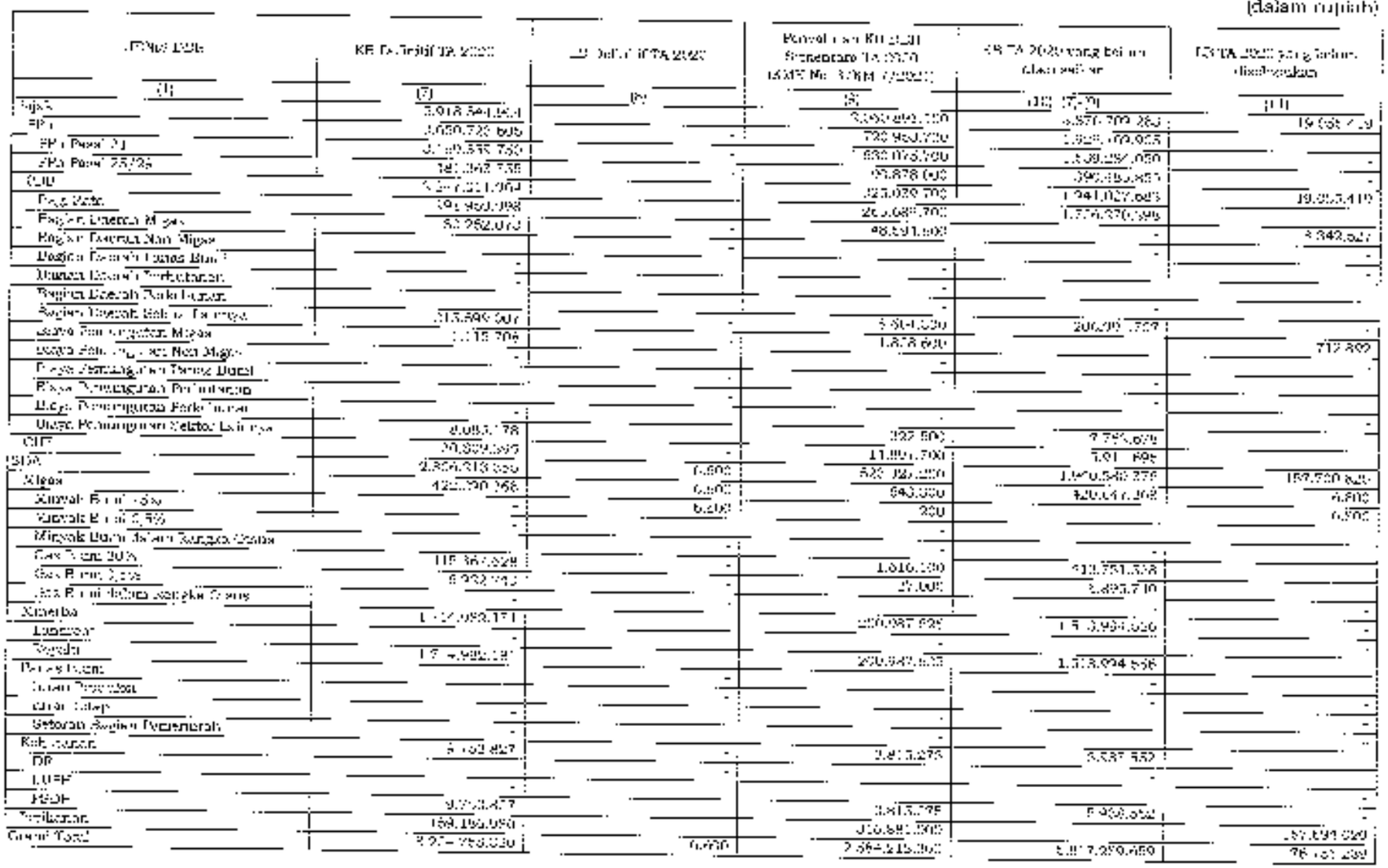

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lowu Timur

(dalam rupiah)

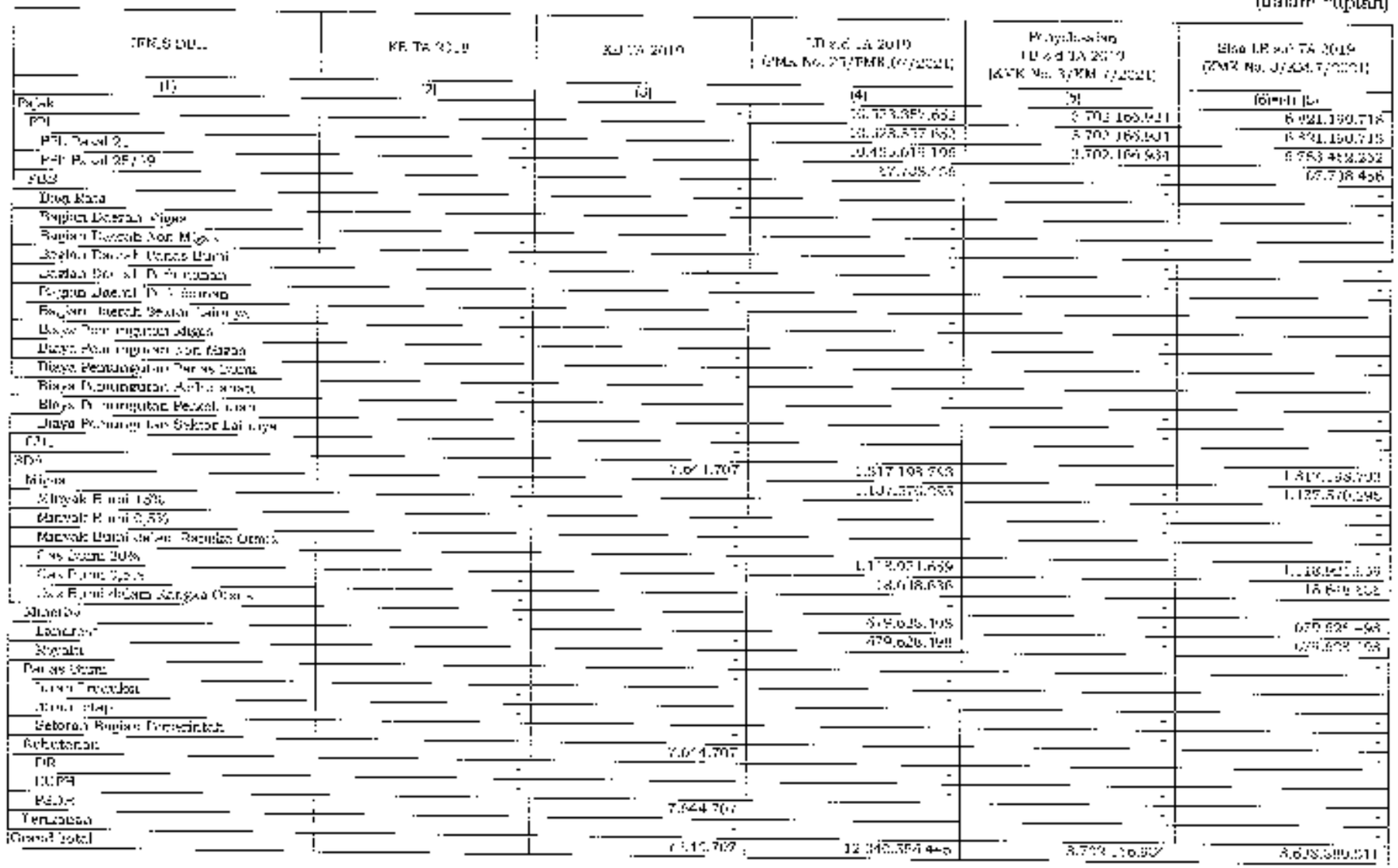

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Luwu Timur

(dalam rupiah)

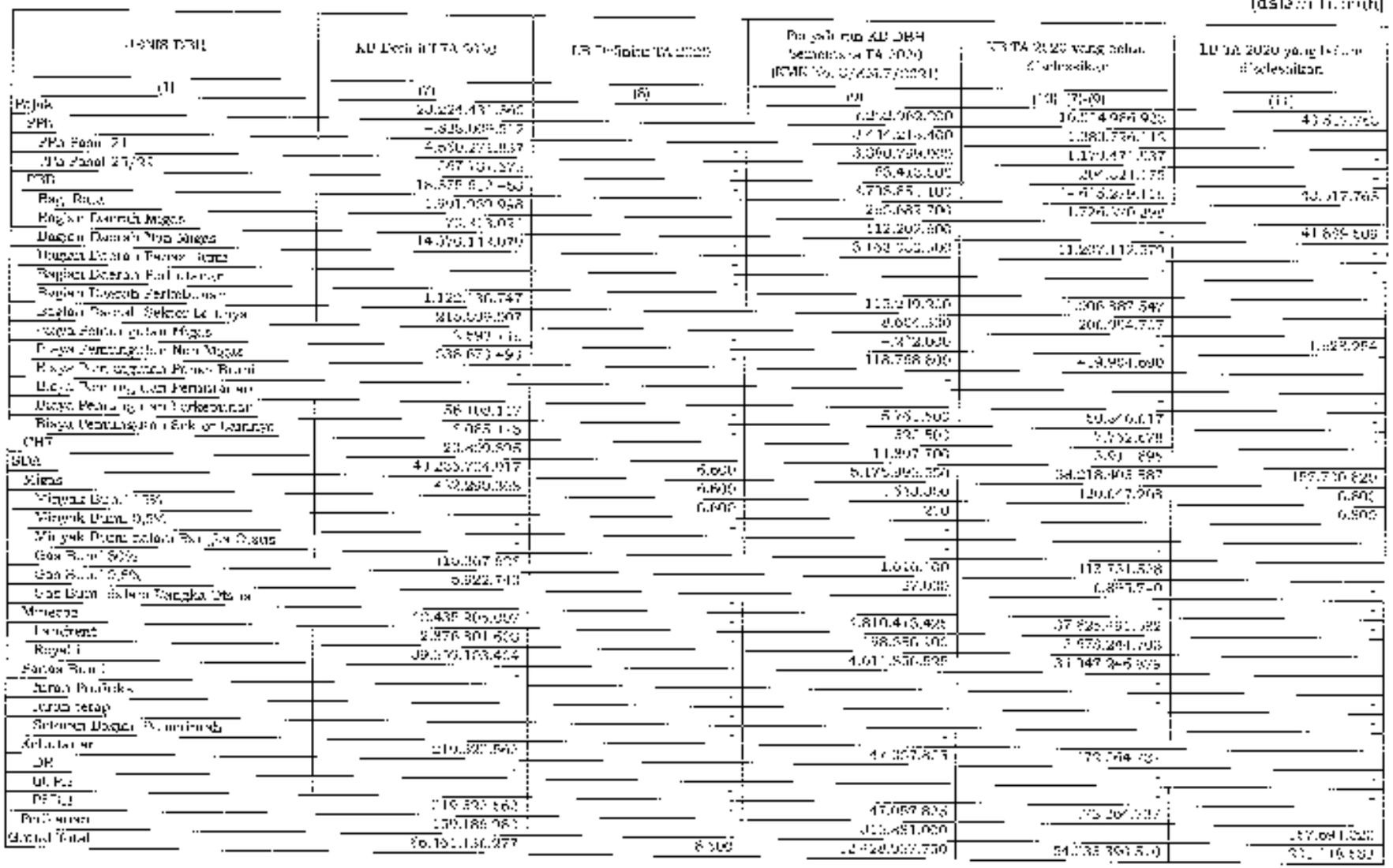

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pinrang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 2.../PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	631.059	695.053.678	139.010.736	556.042.942
Migas	-	-	695.053.678	139.010.736	556.042.942
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0.5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	684.311.394	139.010.736	545.300.658
Gas Bumi 0.5%	-	-	10.742.284	-	10.742.284
Gas Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	631.059	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	631.059	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	631.059	695.053.678	139.010.736	556.042.942

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pinrang

(dalam rupiah)

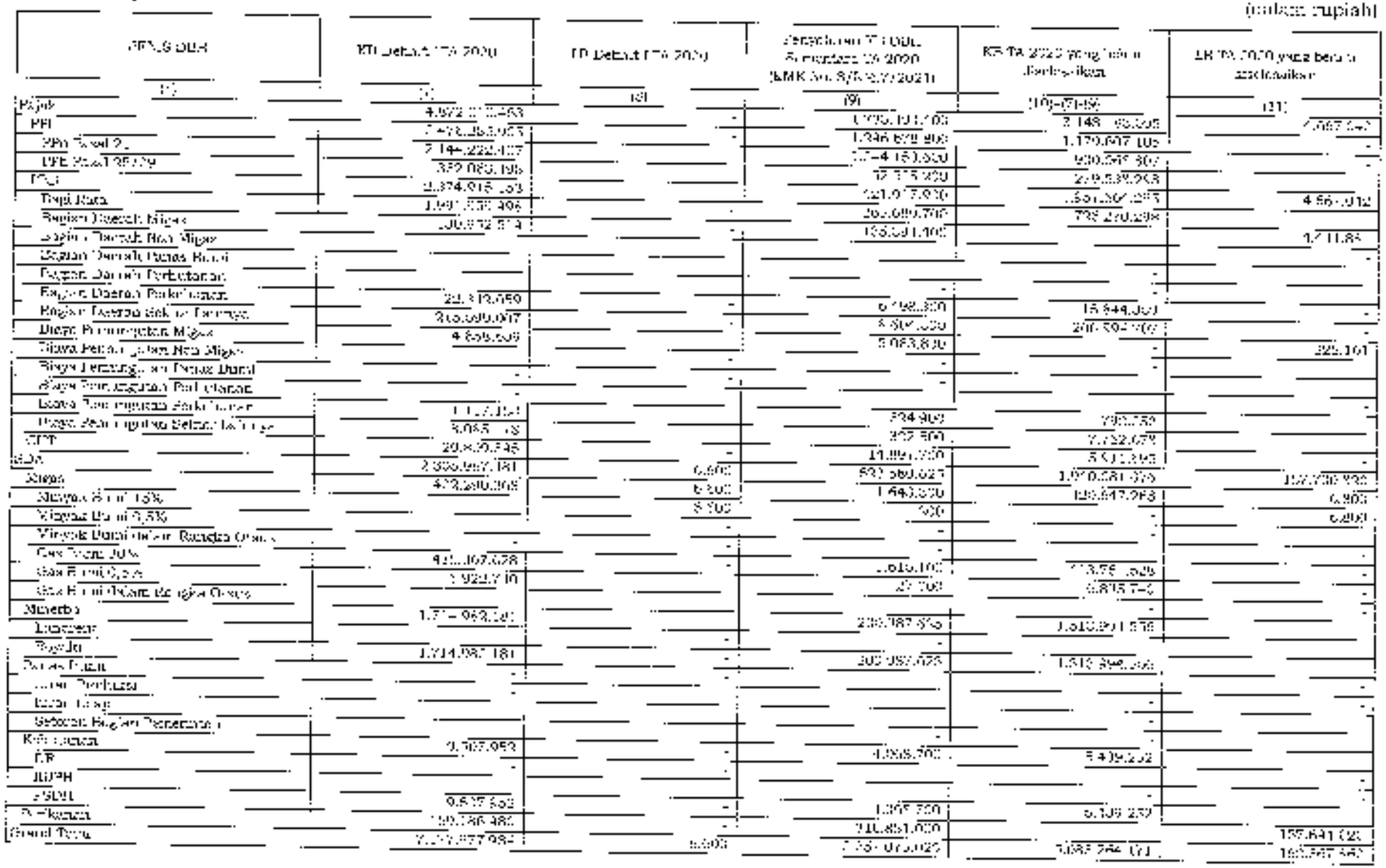

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Siak

(dalam ribuan rupiah)

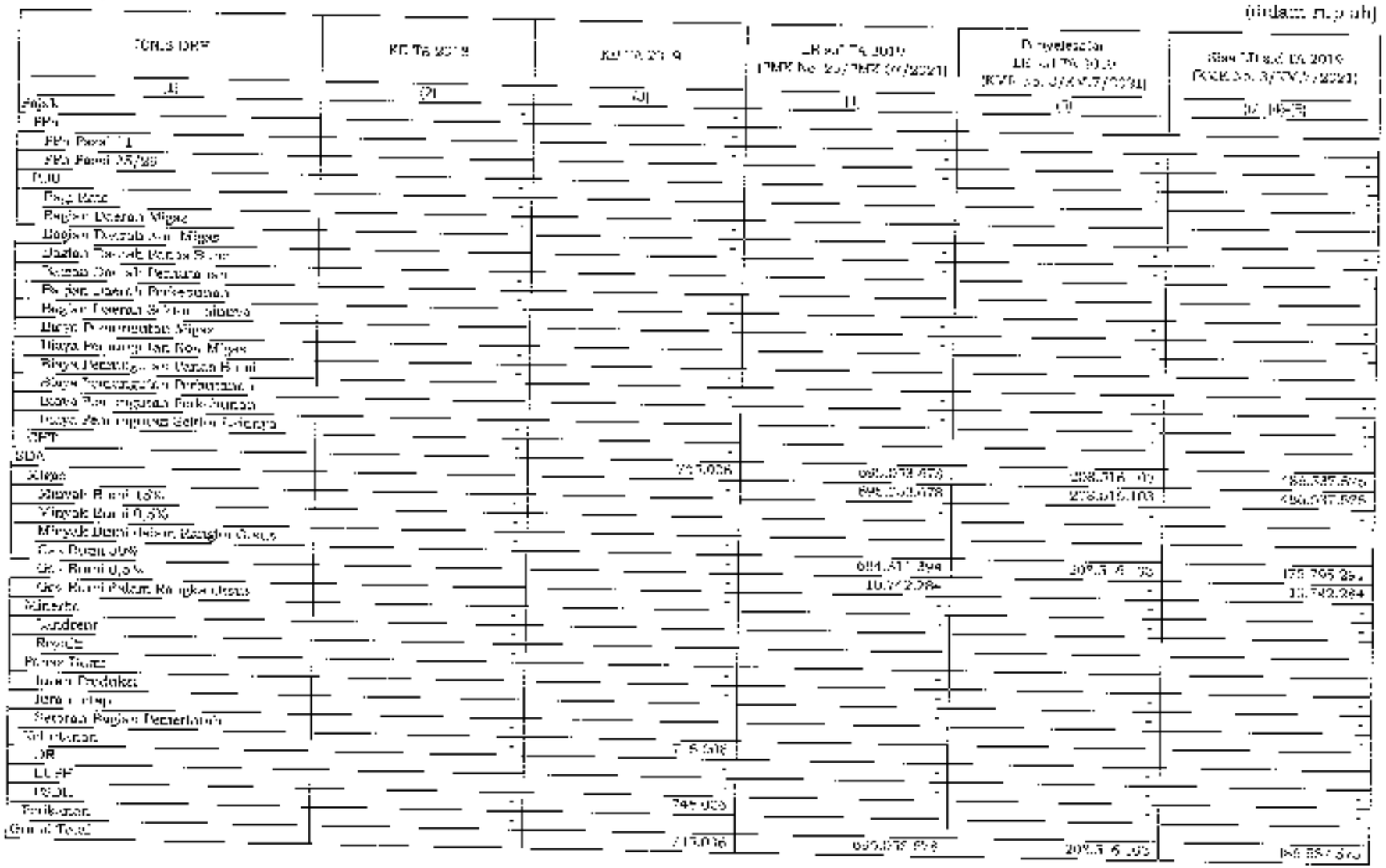

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Aceh, Sinjai

(dalam rupiah)

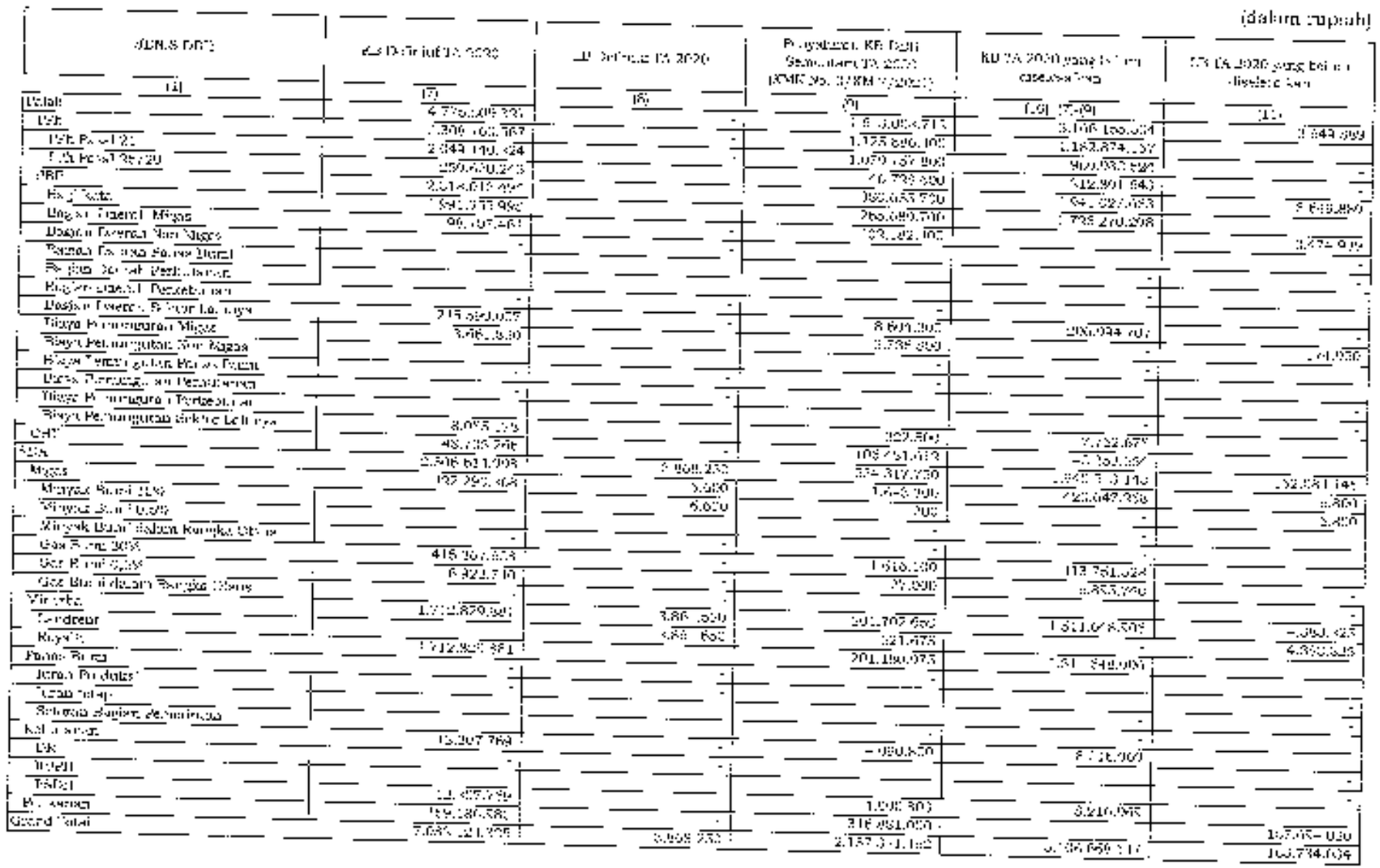

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Selayar

(dalam rupiah)

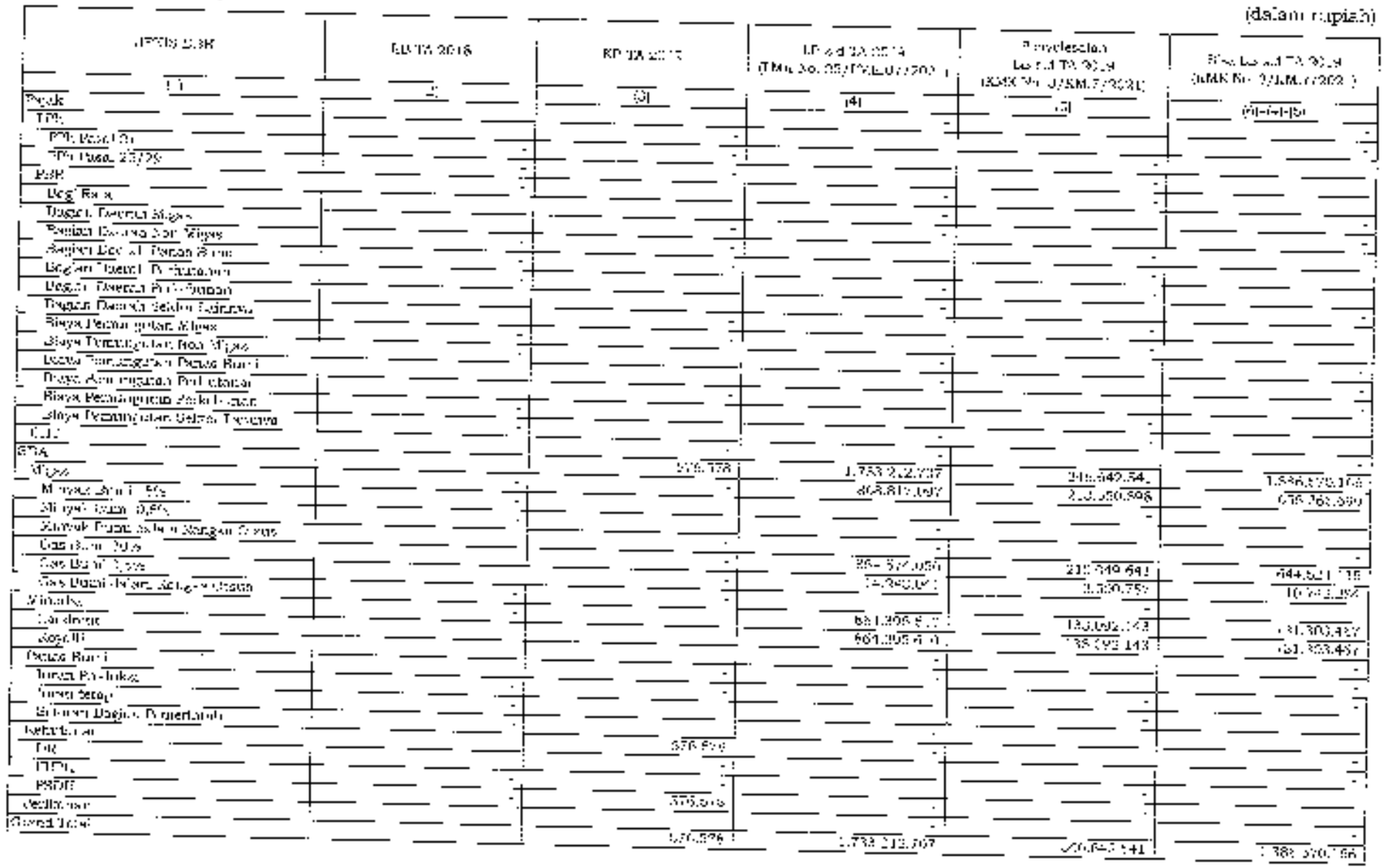

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Selayar

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2021 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Alokasi DBH TA 2021 yang belum disalurkan	LB DBH TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	7.250.350.210		1.465.590.705	5.790.495.505	4.791.539
PPh	1.650.328.141		1.816.942.702	833.385.511	
PPh Pasal 21	1.569.464.156		972.638.200	626.825.956	-
PPh Pasal 25/29	260.894.286		71.207.402	189.686.884	-
PBB	7.979.169.420	-	432.756.302	1.941.027.58	52.553
Bagi Hasil	1.091.090.094	-	265.686.702	1.726.276.207	-
Bagian Daerah Migas	119.080.607		35.177.102		4.457.103
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Penghasil Bunga	-	-		-	-
Bagian Daerah Perbatasan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	225.250.000		5.611.000	200.000.000	
Bukan Pertambangan Migas	5.538.643	-	5.712.700		264.060
Bukan Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-
Bukan Pertambangan Bunga Bunga			-		
Bukan Pertambangan Perkebunan					
Bukan Pertambangan Perkebunan	-	-		-	-
Bukan Pertambangan Sektor Lainnya	7.085.177	-	322.500	7.762.678	-
Cukai	29.906.103		14.817.760	5.911.711	
DTA	2.905.797.369	12.905.150	323.050.125	1.941.720.319	1.702.390
Migas	491.790.369	6.502	1.610.000	129.517.269	6.502
Minyak Bumi 15%	-	6.502	320	-	6.502
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Kategori Otsus			-		
Gas Bumi 69%	113.337.629		1.610.000	113.731.728	
Gas Bumi 0,5%	8.542.740		320.000	8.905.710	
Gas Bumi dalam Kategori Otsus	-		-		
Minerba	1.914.090.131	12.898.650	202.960.860	1.813.594.569	1.061.775
Landaan	-	12.898.650	322.125	-	1.061.775
Jumlah	1.914.090.131		202.587.603	1.813.694.578	-
Jenis Lain					
Iuran Produksi					
Iuran Hasil	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	9.893.770		8.815.275	8.078.495	
PSDH					
DHPH	-	-		-	-
PSDH	9.893.770	-	8.815.275	8.078.495	-
Perikanan	139.180.080		376.871.050		167.774.020
Grand Total	6.146.765.760	12.905.150	1.090.796.825	4.738.113.734	176.121.149

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sidenreng Rappang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak	-	-	386.873.000	546.824.000	-
PPh	-	-	241.708.830	302.309.870	-
PPh Pasal 21	-	-	241.708.830	302.309.870	-
PPh Pasal 22/26				-	-
PBB			-91.134.830	-531.369.870	
Bea Materai			-	-	
Bagian Daerah Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah Non Migas	-				-
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	
Bagian Daerah Perkebunan		-	-5.156.360	13.750.000	
Bagian Daerah Kehutanan	-	-			-
Bagian Pemerintah Migas				-	-
Bagian Pemerintah Non Migas			-	-	
Bagian Pemerintah Pertambangan		-	-		
Bagian Pemerintah Perkebunan	-	-			-
Bagian Pemerintah Kehutanan			2.156.000	2.156.000	
Bagian Pemerintah Bidang Perikanan			-	-	-
Cukai	-	-	-		-
DBHCHT	-	795.005	1.312.007.000	173.307.000	539.637.000
Migas	-		603.000.000	173.760.000	482.952.000
Minyak Bumi 15%				-	
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%	-	-	64.392.415	1.452.883	471.416.535
Gas Bumi 0,5%	-	-	10.742.285		2.742.284
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba			527.865.300	-	277.668.420
Tambahan			527.865.300	-	277.668.420
Kawasan		-	-		
Pasal Lain	-	-			-
Iuran Eksplorasi	-	-			-
Iuran Eksploitasi				-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan		795.005	-		
DR	-	-			-
PSDH				-	-
Provisi		795.005	-	-	
Perikanan			-		
Grand Total	-	795.005	1.895.738.000	720.891.000	921.977.419

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sidenreng Rappang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan PA 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum Dialokasikan	LB TA 2020 yang belum Dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Cukai	5.413.639.344	-	778.964.000	4.634.675.344	73.911.791
PPh	2.844.014.585	-	1.671.037.700	1.172.976.885	
PPh Pasal 21	2.467.021.585		1.319.090.000	1.147.931.585	-
PPh Pasal 22 dan 26	377.492.907		52.212.700	325.280.207	-
PBB	1.287.930.311		299.121.000	988.809.311	73.911.791
Bea Meterai	1.951.999.949		795.880.700	1.156.119.249	
Pajak Daerah Migas	68.956.585	-	11.728.320		12.271.515
Pajak Daerah Non Migas	758.585	-	87.000	671.585	-
Pajak Daerah Pasal Bunga				-	-
Pajak Daerah Perbankan				-	
Pajak Daerah Tanda Daerah	-	-	-		
Pajak Daerah Selain Tanda	2.330.025	-	8.601.361	220.091.000	-
Bea Perolehan Migas	2.513.024		1.149.300	-	1.642.976
Bea Perolehan Hak Atas	28.254		3.700	24.554	
Pajak Penerangan Jalan Bunga	-	-	-	-	
Pajak Penerangan Perbankan	-	-			-
Bea Perolehan Perbankan				-	-
Bea Perolehan Sektor Lainnya	9.750.174		372.500	7.762.674	
Cukai	20.609.360	-	4.837.700	5.971.660	
DBH	2.505.332.430	506.355.500	777.133.775	1.981.430.014	636.174.270
Migas	197.201.304	6.600	1.013.300	125.511.260	6.300
Minyak Bumi 15%		1.200	200	-	1.200
Minyak Bumi 0%			-	-	
Minyak Bumi Bagian Daerah	-	-	-		
Gas Bumi 84%	415.987.697	-	1.676.150	113.711.028	
Gas Bumi 16%	6.025.741	-	27.000	6.895.412	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Minerba	1.714.992.141	360.525.900	201.092.175	1.513.944.155	291.478.450
Landrent		360.525.900	53.504.550	-	306.978.450
Royalti	1.714.992.141	-	910.387.675	1.513.944.550	
Panas Bumi	-	-			
Iuran Produksi	-	-			-
Pajak Lainnya				-	-
Sektor Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan	9.862.901	-	4.066.700	5.796.220	
DR	-	-			-
IHPH				-	-
PSDH	9.862.901		4.066.700	4.796.220	
Perikanan	154.189.960	-	2.685.000		117.091.240
Grand Total	7.458.542.403	506.355.500	2.234.122.075	7.360.112.859	632.098.061

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Soppeng

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyelesaian s.d akr. TA 2019 (PMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (Kolom 3=4-5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6=4-5]
Pajak	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	
PPh Pasal 21	-	-	-		
PPh Pasal 22/26					
PBB					-
Pajak Bumi dan Bangunan Migas				-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan					
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Pertambangan	-		-	-	-
Bagian Daerah Sektor Pertambangan Panas Bumi	-	-	-		
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-			-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	761.389	835.564.723	82.330.422	743.827.690
Migas	-	-	82.570.024.027	82.330.423	239.600.604
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	955 [illegible] 14	82.556.428	717.645.301
Gas Bumi 0,5%	-	-	8.742.784		10.742.284
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Mineral					
Landrent				-	-
Royalti				-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap					
Bagian Daerah Pertambangan					-
Kehutanan		761.389	19.440.131	-	19.440.131
PSDH	-	-	-	-	
DR	-	-	-	-	
IIUPH					
PSDH		761.389	19.440.131		19.440.131
Perikanan				-	-
Grand Total	-	761.389	835.564.723	82.556.428	743.827.706

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Soppeng

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran PP 78/2020 Semester I TA 2020 (PMK No. 57/PMK.07/2021)	RB TA 2020 yang telah dan akan disalurkan	SB TA 2020 yang telah dan akan disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	5.[illegible]406.231	-	1.695.594.092	3.[illegible]810.637.313	[illegible]3.434
PBB	3.337.177.077	-	1.205.853.920	131.973.817	-
PBB Pasal 21	2.080.909.081	-	1.[illegible]752.920	581.[illegible]2.494	
PPh Pasal 25/29	241.152.940	-	51.183.020	200.[illegible]1.823	
PBB	2.177.795.797		1.[illegible]7.[illegible]4.[illegible]30	2.011.[illegible]2.377	3.[illegible]2.420
Bagi Rata	199.[illegible]6.596		266.599.720	1.[illegible]28.270.256	
Bagian Daerah Migas	90.606.935	-	103.[illegible]5.750	-	5.[illegible]7.371
Bagian Daerah Non Migas	6.11[illegible]78	-	2.142.820	4.268.758	
Bagian Daerah Dana Desa			-		
Bagian Daerah Pertambangan	47.[illegible]6.240			47.[illegible]1.210	
Bagian Daerah Perkebunan	30.[illegible]0.066		14.[illegible]9.350	15.[illegible]7.965	-
Bagian Daerah Pelabuhan Laut	315.[illegible]0.007	-	4.[illegible]4.360	956.[illegible]4.707	-
Biaya Pemungutan Pusat	3.710.277		3.201.300		181.[illegible]0
Biaya Pemungutan Non Migas	200.000		40.[illegible]0	1.[illegible]8.932	
Biaya Pemungutan Bagian Pusat	-	-			-
Biaya Pemungutan Pertambangan	3.011.807	-	-	3.[illegible]5.[illegible]07	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	1.[illegible]1.[illegible]3		735.[illegible]0	782.[illegible]2	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	3.[illegible]0.[illegible]8		822.[illegible]0	7.[illegible]2.[illegible]9	
CHT	-[illegible]6.475.46	-	29.[illegible]0.[illegible]2	116.[illegible]4.[illegible]19	-
SDA	2.[illegible]6.450.720	3.[illegible]4.51	529.[illegible]7.[illegible]5	1.[illegible]4.[illegible]-.[illegible]24	173.[illegible]4.38
Migas	-[illegible]21.[illegible]0.[illegible]0	6.020	2.[illegible]-5.[illegible]0	-[illegible]20.[illegible]7.[illegible]0	6.[illegible]0
Minyak Bumi 15%		6.020	200		6.020
Minyak Bumi 69%					
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-[illegible]5.367.[illegible]03	-	1.[illegible]6.[illegible]0	-.[illegible]7.[illegible]5.[illegible]28	-
Gas Bumi 70%	[illegible]2.[illegible]0.740	-	29.060	6.[illegible]3.[illegible]7-0	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Minerba	1.[illegible]1.[illegible]2.151	3.[illegible]6.[illegible]21	201.[illegible]4.[illegible]30	1.[illegible]3.[illegible]9.[illegible]50	1.[illegible]3.[illegible]21
Panas Bumi		3.[illegible]6.[illegible]56	2[illegible].1[illegible]0		1.[illegible]3.[illegible]26
Pajak	714.[illegible]2.181		2[illegible].[illegible]6.[illegible]30	1.[illegible]3.[illegible]9.[illegible]66	-
Pajak - Pusat	-	-	-	-	-
Cukai Produksi	-	-	-	-	-
Bea Meterai					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	2.[illegible]6.[illegible]5	[illegible]2.[illegible]4.[illegible]5	-	1.[illegible]3.[illegible]6
IPK	-	-	-	-	-
IP PSJ					
PNBP		2.[illegible]6.[illegible]2	[illegible].[illegible]1.[illegible]5		1.[illegible]2.[illegible]6
Perikanan	199.[illegible]6.[illegible]0		216.[illegible]1.[illegible]2		16.[illegible]9-.[illegible]0
Grand Total	[illegible].447.[illegible]3.730	3.[illegible]4.51	[illegible].49[illegible].[illegible]1.[illegible]5	[illegible].[illegible]3.[illegible]3.[illegible]7	[illegible]5.[illegible]2.[illegible]3

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH TAHUN 2021

Kab. Takalar

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	KURANG BAYAR TA 2020 (KMK No. 25/KM.07/2021)	Penyelesaian Kurang Bayar s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	SISA KURANG BAYAR TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(3)	(5)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	-		
PPh					
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29				-	-
PPN	-	-	-	-	-
Bagi Hasil	-	-	-		
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Dana Bunga				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas				-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi & Bangunan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Perkebunan					-
Biaya Pemungutan Dana Reboisasi				-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	
OPT	-	-	-		
SDA		570.275	70.993.002	70.993.201	555.090.859
Migas			70.993.002	70.993.201	555.363.859
Minyak Bumi 15%	-		-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Minyak Bumi (Dalam Rangka Otsus)	-	-	-		
Gas Bumi 30%			70.720.798	70.198.207	521.211.010
Gas Bumi 70%			10.772.264		10.772.264
Gas Bumi (dalam rangka Otsus)				-	-
Mineral	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	
Negeri	-	-	-		
Pajak Rokok					
Dana Reklamasi					-
Dana Lelang	-		-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Pertambangan	-	556.555	-		
Otsus					-
Otsus				-	-
Otsus	-	576.576	-	-	-
Tambahan	-	-	-	-	
Grand Total		776.576	70.993.002	70.198.207	555.363.859

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Takalar

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Dialokasikan TA 2021	LB Dialokasikan TA 2020	Penyaluran DBH DBHT Sisa Tahun TA 2021 (PMK No. 67/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	5.047.647.355	-	2.008.818.700	3.038.828.655	30.472.854
PBB	2.238.180.660	-	1.190.829.630	539.371.565	
PBB Pasal 21	1.035.139.230	-	1.389.751.360	615.387.870	
PBB Pasal 25/29	278.041.227		53.057.340	222.983.887	
BPHTB	3.690.027.997		818.111.700	3.091.979.080	30.417.856
Pajak Rokok	1.951.969.598		205.999.700	1.726.990.958	-
Bagian Daerah Migas	48.516.845	-	27.959.820	-	20.775.205
Bagian Daerah Non Migas		-	-		
Bagian Daerah Perbatasan					-
Bagian Daerah Tertentu Lainnya	1.369.708.820	-	36.229.700	1.408.594.481	-
Bagian Daerah Eks Kilang Tertunda	215.339.007	-	8.680.820	206.991.707	
Bagian Pemanfaatan Khusus	1.791.779		2.927.200		1.137.021
Bagian Pemanfaatan Non Migas				-	-
Bagian Pemanfaatan Tertentu Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemanfaatan Eks Kilang	-	-	-		
Bagian Pemanfaatan Perbatasan	67.083.089		12.539.200	54.429.869	
Bagian Pemanfaatan Wilayah Lainnya	8.051.174		322.500	7.728.674	-
CHT	30.309.363	-	14.697.700	5.911.695	-
DTA	3.206.2 3.358	6.800	328.597.200	1.346.320.376	137.701.420
Migas	1.552.951.362	6.800	1.673.300	1.210.017.268	6.800
Kilang Blok 1/5%		6.800	200		6.800
Kilang Blok 0,5%				-	-
Minyak Bumi dari Lapangan Tertua	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	415.367.638	-	1.614.100	413.751.538	
Gas Bumi 0,5%	6.302.742	-	27.000	6.265.710	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			
Minerba	1.714.982.141		302.097.622	1.613.896.016	-
Landreform				-	-
Panas Bumi	1.714.982.141		302.987.622	1.615.294.556	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-		
Iuran Tetap					-
Setoran Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan	9.763.837	-	5.415.275	5.638.552	-
DR	-	-	-	-	
IHPH					
PSDH	9.763.837		5.415.275	5.638.552	-
Perikanan	153.165.990		316.53 .000	-	37.604.020
Grand Total	8.333.861.3 1	6.800	2.389. 3.500	3.783.342.487	88.121.879

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Toraja Utara (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 226/PMK.07/2021)	Terkoreksi LB s.d TA 2019 (SSSK No. S-6317/PK.01)	Sisa LB s.d. TA 2019 (SSSK No. S-6317/PK.01)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]
Pajak			1.013.652.930	355.159.079	737.493.971
PPh	-	-	537.562.930	355.159.079	737.493.971
20% Pasal 21	-	-	521.262.373	355.159.079	286.103.194
80% Pasal 25/29	-	-	16.300.027		16.300.027
PBB					-
Bea Bea					-
Daerah Provinsi Kilpas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-			
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Perkebunan				-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Panas Bumi				-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
CUKAI				-	-
SDA	-	951.029	758.178.097	-	738.173.097
Migas	-	-	758.178.097		738.173.097
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 0,5%			727.435.813	-	727.435.813
Gas Bumi 0,5%	-	-	10.742.284	-	10.742.284
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	-	-			-
Panas Bumi					-
Kehutanan				-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Iuran Hasil	-	-	-		
Reboisasi					-
Perikanan		951.029		-	-
DR	-	-	-	-	-
PHPT	-	-	-		
PSDH		951.029		-	-
Pertambangan					-
Grand Total		951.029	1.771.831.027	355.159.079	1.020.008.212

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tanah Tenggi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	KB Definitif TA 2020	Penyaluran KB Definitif Sampai dengan TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Dejota	4.254.277.150		1.642.311.970	2.589.965.180	27.670.617
PPh	1.815.215.917		1.317.096.620	498.119.297	
PPh Pasal 21	1.556.937.566		1.207.179.070	357.101.369	-
PPh Pasal 23/26	258.278.351	-	83.931.330	174.347	-
PBB	2.368.721.149	-	325.214.800	2.035.284.365	27.670.617
Bea Rata	1.091.939.931		265.690.700	1.790.271.208	
Jenjem Daerah Sipra	41.719.776		71.161.110		29.441.334
Bagian Daerah Sur Migas	4.471.530		801.600	3.192.367	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	99.639.242		19.829.207	69.802.032	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.689.037		9.697.300	205.991.737	
Biaya Pemungutan Migas	1.649.427	-	5.585.300	-	1.935.873
Biaya Pemungutan Sur Migas	167.728	-	37.891	30.237	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	851.943	-	941.700	3.840.743	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	9.463.178	-	291.502	7.760.676	-
OLT	21.801.394		14.307.700	3.911.695	
Gas	3.701.201.360	5.670	324.533.042	1.910.072.156	15.760.320
Minyak	492.292.360	5.670	1.646.700	453.647.256	6.300
Minyak Bumi 15%	-	5.670	920	-	6.300
Minyak Bumi 3,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	115.701.229		1.616.180	113.461.026	
Gas Bumi 0,5%	6.622.412		27.020	6.595.392	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Mineral	1.714.681.181	-	302.987.673	813.194.556	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Jumlah	1.714.982.181		302.987.673	1.013.991.356	
Dana Desa					
Dana Tambang	-				
Dana Hibah	-	-	-	-	-
Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
Kehutanan	10.712.314		5.211.703	5.420.631	
DR					
IHPH	-	-	-	-	-
PSDH	10.742.324	-	5.211.703	5.420.634	-
Perikanan	1.616.000		310.681.200		137.697.020
Grand Total	5.731.019.215	5.670	1.207.305.312	1.729.067.726	185.367.431

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Wajo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	SISA LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)
PAJAK:	-	-	715.607.775	715.607.775	-
PPH:		-	715.607.775	715.607.775	-
Pph Pasal 21			582.273.743	582.273.743	-
Pph Pasal 25/29			133.334.032	133.334.032	-
PBB:	-				-
Pajak Rokok	-	-		-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi					-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas					-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi		-	-		
Bagian Pemerintah Pertambangan					-
Bagian Pemerintah Kehutanan	-				-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT		300.921	26.947.977.884	5.659.595.337	21.594.078.927
DBHA			26.947.977.884	5.659.595.337	21.594.078.927
Migas					
Minyak Bumi (15%)	-				-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	15.003.185.292	4.689.339.337	21.317.851.037
Gas Bumi 30%			217.047.592		217.047.592
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			26.025.000		26.025.000
Panas Bumi	-		26.025.000		26.025.000
Royalti	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah		-		-	
Bagian Daerah					
Bagian Desa					-
Subbagian Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan	-	300.921	-	-	-
DR		-	-	-	
DR PSDH					
DBHDR	-	300.921	-	-	-
DR Reboisasi	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	300.921	26.921.185.650	5.359.937.152	21.561.248.927

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kode Satker (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2021 TA 2022	LB TA 2021 TA 2022	Perubahan KB DBH Semester I TA 2022 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)
Pajak	6.701.211.650	1.193.000.824	3.520.020.216	4.201.027.117	2.902.190.624
PPh	2.111.869.715		1.717.070.200	1.394.813.515	
PPh Pasal 21	1.781.955.515		1.613.089.300	1.111.810.215	
PPh Pasal 25/29	329.914.200		91.340.900	215.917.300	-
PBB	3.271.402.353	1.193.000.824	1.797.109.600	2.694.552.536	2.902.190.624
Bea Meterai	1.901.650.058	-	365.839.700	736.270.238	-
Bagian Daerah Migas		1.141.320.250	1.357.501.700		2.770.830.050
Bagian Daerah Non Migas	561.101			897.101	
Bagian Daerah Pasca Bumi	-	-			-
Bagian Daerah Pertambangan	1.752.348	-	-	1.752.348	-
Bagian Daerah Perkebunan	1.203.161.320	-	161.727.600	902.673.720	
Bagian Daerah Kehutanan	331.199.000		8.004.300	200.099.700	
Bagian Pemerintah Migas	-	51.571.077	50.997.000		135.536.674
Bagian Pemerintah Non Migas	97.016	-	-	97.016	-
Bagian Pemerintah Pasca Bumi		-	-	-	
Bagian Pemerintah Pertambangan	76.603			76.603	
Bagian Pemerintah Perkebunan	50.457.596		5.050.200	45.107.396	-
Bagian Pemerintah Kehutanan	8.685.179	-	332.500	7.760.679	-
Cukai	22.935.220	-	16.454.016	6.521.264	
PDN	11.040.591.776	27.931.200	503.031.750	11.794.713.919	191.386.220
Migas	9.713.676.681	51.600	37.093.500	9.611.982.281	140.850
Bagian Pemerintah 15%	-	59.000	5.100	-	165.900
Bagian Pemerintah 0,5%	-	4.600	100	-	4.020
Bagian Pemerintah dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%	9.553.152.030		37.102.900	9.516.249.130	
Gas Bumi 0,5%	159.224.651		619.368	158.604.851	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	1.714.072.17	24.759.600	204.736.126	1.513.994.656	31.526.304
Landrent	-	22.760.620	5.750.702	-	3.502.304
Royalti	1.714.084.181	-	200.687.625	1.513.396.556	-
Pajak Lainnya					
Jasa Pelayanan					
Jasa Lainnya	-	-		-	-
Sedekah Kepala Teknik Minyak	-	-	-	-	-
Kehutanan	9.419.206	-	3.010.825	5.282.061	-
DR					
PSDH	-				
PSDH	9.249.306	-	3.010.825	5.631.081	-
Perikanan	169.900	-	376.851.000	-	157.695.020
Grand Total	18.052.972.241	1.520.931.624	1.280.014.766	13.430.027.035	3.091.599.774

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Para-para

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KSSK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (Skb No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak	-		951.120.414	902.279.039	997.849.453
PPh	-	-	668.820.384	902.279.039	887.849.423
PPh Pasal 21		-	668.919.384	902.279.039	887.849.423
PPh Pasal 22/26		-	-	-	-
PBB			283.000		283.000
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas	-	-			-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29			-	-	
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Pertambangan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Bagi Pemungutan Migas		-	-	-	-
Bagi Pemungutan Non Migas			283.000		283.000
Bagi Pemungutan Pasal 25/29	-				
Bagi Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagi Pemungutan Pertambangan			-	-	
Bagi Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT	-	-			
DBH	-	574.578	650.456.695	-	650.761.609
Migas	-	-	650.456.695	-	650.761.609
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-	-	644.524.415	-	644.524.415
Gas Bumi 0,5%	-	-	10.742.434	-	10.742.434
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Mineral			-		
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi	-	-		-	
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Iuran tetap			-	-	-
Kelebihan Bayar Pemerintah					
Kehutanan		574.578			
DR	-	-	-	-	-
IHPH		-	-	-	-
PSDH		574.578			
Perikanan					
Grand Total	-	574.578	1.616.395.143	902.279.039	1.647.611.062

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pare-pare

(dalam rupiah)

Uraian	KU Definitif TA 2021	LB Definitif TA 2021	Penyaluran XII TA 2021 Semester I TA 2022 (PMK No. 27/PMK.07/2022)	KRTA 2022 yang telah disalurkan	LRTA 2022 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
PPh	5.647.747.012	-	2.207.673.500	3.439.944.625	9.470.117
PPh	3.278.022.351	-	1.865.517.102	1.412.505.249	-
PPh Pasal 21	2.907.278.736		1.758.615.202	1.068.357.336	
PPh Pasal 25/29	132.801.015		64.703.900	44.114.015	
PPN	3.134.021.260		323.237.705	1.911.027.085	39.270.117
Pajak Bumi dan Bangunan	191.959.993		266.699.103	1.725.210.295	-
Bagian Daerah dari Migas	30.735.267	-	48.884.700	-	18.349.415
Bagian Daerah dari Pertambangan Minyak Bumi			-	-	
Bagian Daerah dari Pertambangan Gas Bumi					
Bagian Daerah dari Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan	215.508.207	-	8.604.600	206.964.727	-
Bagian Pemerintah dari Migas	1.131.799		1.838.530		706.731
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Minyak Bumi					
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Kehutanan					
Bagian Pemerintah dari Perikanan	8.095.175		321.370	7.761.578	
CHT	20.850.795	-	14.397.220	6.511.595	-
SDA	2.500.213.376	6.602	535.337.350	1.940.582.376	157.700.928
Batubara	422.290.368	6.602	1.643.360	490.077.202	6.602
Kehutanan Iuran IHPH		0.000	200		0.000
Minyak Bumi 0,5%	-				
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	475.867.608	-	616.160	413.751.536	-
Gas Bumi 0,5%	6.027.710	-	27.500	6.895.742	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Panas Bumi	1.727.782.191		270.987.228	1.110.091.530	
Perikanan	-				
Royalti	17.982.161		270.967.628	15.954.000	-
Pajak Lain	-	-	-	-	-
Jasa Produksi	-	-	-	-	-
Jasa Lainnya					
Kehutanan Pertambangan Panas Bumi					
Kehutanan	3.253.803	-	3.815.376	5.938.692	-
DR	-	-	-	-	-
LO/L					
OL/L	9.167.826		3.815.376	5.938.692	
Perikanan	59.186.382		1.781.961.050		257.694.020
Jumlah Total	7.653.242.266	6.602	1.782.969.750	5.896.335.905	176.970.337

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Makassar

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KETA 20.. ?	KETA 20.. 4	LLB s.d. TA 2019 (TMK No. 25/TMK.07/2020)	Penyaluran LLB s.d TA 2019 (SMC No. 3/KM.7/2021)	Sisa LLB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			1.251.555.124	975.755.458	275.804.667
PPh			1.251.555.124	975.755.458	275.804.667
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29	-	-	1.251.555.124	975.755.458	275.804.667
PBB	-	-	-	-	-
BPHTB	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-			
Bagian Daerah Perhubungan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagi Hasil Pertambangan Migas	-	-			
Bagi Hasil Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya			-	-	-
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya					
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	-				
Bagi Hasil Pertambangan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
DAU		-		-	-
DBH		1.364.037	676.015.790		676.015.790
Migas	-	-	676.015.790		676.015.790
Minyak Bumi 15%	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi dan/atau Kondensat Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 70%			676.015.509	-	676.015.509
Gas Bumi 0,5%			13.712.281		13.712.281
Gas Bumi Sebelum Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	-		
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi			-	-	
Iuran Pelaku Usaha	-				
Iuran Tetap	-	-	-		
Setoran Daerah Pemberitahu	-	-	-	-	-
Kehutanan		1.364.037	-	-	-
DR					
PHPB	-				
PSDH	-	1.364.037	-	-	-
Perikanan		-		-	-
Grand Total		1.364.037	1.017.508.618	975.755.458	275.752.667

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Makassar

(dalam rupiah)

JENIS DBH	DBH Tahun Tahun 2020	DBH Tahun TA 2020	Penyaluran DBH Sementara TA 2021 (KMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum Disalurkan	LB TA 2020 yang belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	22.037.177.797		21.089.074.060	947.931.353.837	81.018.092
PPh	50.290.380.169		28.374.262.620	21.916.117.549	
PPh Pasal 21	43.465.032.269		19.293.823.020	24.171.209.249	-
PPh Pasal 25/29	7.776.91.505	-	1.911.979.020	5.864.968.485	-
PBB	6.536.447.501	-	501.513.700	1.031.965.048	34.219.092
Bea Perolehan	1.041.830.905	-	265.490.750	1.726.976.098	
Bagian Daerah Minyak	136.386.927		217.262.620		80.875.693
Bagian Daerah Gas Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dasbun Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Dasbun Daerah Pengembangan					
Bagian Daerah Sektor Kehutanan	215.068.607		9.217.350	205.851.257	
Bagian Pertambangan Minyak	3.030.78	-	9.175.350	-	3.144.515
Bagian Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pertambangan Perikanan					
Bagian Pertambangan Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Batubara Lainnya	8.063.778	-	333.000	7.724.178	-
Cukai	20.450.000	-	14.907.705	5.091.2005	
SDA	2.0.90.035.171	0.000	529.0.35.725	1.017.881.006	1.1.709.520
Migas	-32.950.380	0.000	1.643.307	420.047.356	3.804
Minyak Bumi (15%)	-	0.000	705	-	3.804
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 30%	421.301.520		1.010.105	103.451.025	
Gas Bumi 2,5%	6.942.712		27.000	2.89.7.70	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Mineral	1.214.382.181	-	203.957.625	1.010.99- 556	-
Landrent	-	-	-	-	-
Kondib	1.214.942.181	-	203.057.625	1.011.09- 556	
Panas Bumi					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	22.0.0.572		3.2.0.400	19.791.772	
PSDH					
IUPH	-	-			-
PSDH	22.390.372	-	9.426.800	9.739.772	-
Perikanan	150.196.920	-	316.581.000	-	17.207.020
Grand Total	24.953.067.350	0.000	21.019.212.725	31.374.0e7.172	24.1.18.012

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Toraja Utara

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 65/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	-33.045.324	241.321.586	17.761.623
PPh		-	241.321.586	241.321.586	
PPh Pasal 21			606.170.730	606.170.730	
PPh Pasal 25/29			241.951.530	241.951.530	-
BPHTB	-		-1.760.606	-	1.760.606
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Non Migas			11.958.975		11.309.275
Bagian Daerah Pajak Bumi					-
Bagian Daerah Pajak Lainnya				-	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-		
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	425.900	-	425.900
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya			-		
Biaya Pemungutan Pertambangan					-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-		-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	183.035	2.493.770.282	760.728.065	3.023.012.217
Migas			1.787.375.142	760.728.065	1.026.647.078
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 69,5%	-	-		-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	1.761.323.597	760.728.065	1.000.595.532
Gas Bumi 0,5%			26.051.545		26.051.545
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus					
Minerba			706.394.140		706.394.140
Landrent	-	-	95.564.020	-	95.564.020
Royalti	-	-	795.351.113	-	795.351.113
Panas Bumi	-	-	-		
Dalam Produksi			-		
Dalam Setup					
Setoran Dalam Pertambangan				-	-
Kehutanan	-	530.531	-	-	-
PSDH	-		-	-	
DBHPH					
DBHTI		963.965		-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Cukai Hasil	-	788.035	2.006.865.502	970.050.000	2.031.905.852

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Toraja Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PMK Desember TA 2020	LB Jan s.d. Nov TA 2020	Penyaluran DBH TA 2020 Sebelum PMK 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	4.77 (+).552		1.469.350.030	3.021.7.8 - -	26.109.26-
PPh	2.585.709.603	-	294.501.720	1.384.602.503	-
PPh Pasal 21	2.067.737.703	-	1.328.261.630	1.036.076.193	
PPh Pasal 25/29	520.535.813	-	62.330.350	232.216.213	
PBB	2.030.393.132		359.891.250	2.003.111.213	26.109.89
Cukai Hasil Tembakau	1.981.956.999		265.569.750	1.716.379.299	-
Bagian Daerah Migas	43.556.686	-	67.465.500	-	23.30.112
Bagian Daerah dari Migas	519.760	-	-	519.760	
Bagian Daerah Panas Bumi					
Dana Reboisasi					
Bagian Daerah Perikanan	100.702.992		14.532.500	86.169.792	-
Bagian Daerah Sektor Pertambangan	215.390.607	-	8.504.300	226.894.707	
Biaya Pemungutan Migas	1.062.028	-	7.532.300		976.072
Biaya Pemungutan Gas Bumi	20.991			20.991	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi				-	-
Biaya Pemungutan Perikanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	3.094.390		720.300	4.310.390	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	4.059.016		322.300	7.702.016	
CHT	52.809.346	-	11.097.100	5.911.636	-
SDA	7.307.099.428	6.600	595.546.152	941.154.678	137.703.826
Migas	307.260.368	6.600	1.6=5.700	436.617.078	6.800
Minyak Bumi 15%		6.600	200		2.800
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Bersama	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%	415.367.643	-	1.616. 20	419.751.513	-
Gas Bumi 0,5%	6.127.740	-	25.020	6.905.740	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		-
Mineral	1.011.962.161		200.057.020	1.015.991.356	
Landrent					-
Royalti	1.714.562.131		307.957.030	1.615.594.536	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap		-			
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	10.5=2.675		1.537.525	8.944.854	-
PSDH	-	-	-	-	-
DR		-	-		
IHPH					
PSDH	10.5=2.675		1.537.525	8.942.854	
Perikanan	154.196.990		516.86..500		137.594.050
Grand Total	7.073.041.038	6.600	1.913.636.950	5.267.963.013	132.707.80-

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sulawesi Tenggara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2020)	Penyesuaian LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			2.772.606.171	1.466.843.829	1.305.762.342
PPh			2.772.606.171	1.466.843.829	1.305.762.342
PPh Pasal 21			1.357.603.329	1.357.603.329	-
PPh Pasal 25/29	-		1.414.902.842	109.240.500	1.305.762.342
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-		-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Penerimaan Baru	-		-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan		-			
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Bagian Pemerintah Migas	-			-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya		-			
Bagian Pemerintah Perkebunan					-
Bagian Pemerintah Penerimaan Baru	-		-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	
OPT		-			
SDA		205.547.379	1.372.220.075		4.678.280.075
Migas				-	-
Minyak Bumi PPh 22	-		-	-	-
Minyak Bumi PPh 25/29	-	-	-	-	
Minyak Bumi dan Gas Bumi Produksi		-	-		
Gas Bumi PPh 22					
Gas Bumi PPh 25/29					-
Gas Bumi Produksi Ekspor	-			-	-
Pertambangan	-		2.631.240.603	-	2.631.240.603
Pertambangan	-	-	1.261.765.689	-	1.261.765.689
Royalti		-	769.474.914		769.474.914
Pajak Lainnya					
Bunga Produksi					-
Jasa Giro	-		-	-	-
Bunga Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Kehutanan		205.547.379	2.530.080.072		2.530.080.072
DR		147.782.107			-
PSDH	-		2.530.080.072	-	2.530.080.072
DBHPS	-	57.765.272	-	-	-
Pertambangan		-			
Grand Total		205.547.379	4.142.060.246	1.466.843.829	2.675.216.417

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sulawesi Tenggara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PS Definitif TA 2020	LP Definitif TA 2020	Penyaluran KB/LBH Semester IA 2020 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	KB/LA 2020 yang belum Dipenuhi	LB/LA 2020 yang belum Dipenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	20.278.812.176	6.645.305	3.575.817.630	26.691.061.176	27.181.983
PPh	16.088.206.903		6.387.318.050	17.281.712.023	
PPh Pasal 21	10.630.773.969		6.700.764.230	10.213.179.609	
PPh Pasal 22/26	1.036.399.034		198.753.920	1.009.509.234	
PBB	12.470.73 .587	9.645.300	2.587.969.920	9.503.346.932	27.181.983
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	171.611.589	-	-8 .667.920	-	9.016.588
Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Minyak dan Gas Bumi	9.191.610.372		1.780.817.030	7.413.902.312	
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiun	-				
Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Bunga Deposito dan Tabungan	-	9.481.930	7.095.900	-	9.387 .00
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	1.090.425.373	-	335.682.101	1.445.742.243	-
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	916.041.591		8.722.701	279.222.181	
Biaya Pemungutan Migas	1.827.796		3.276.100		259.079
Biaya Pemungutan Non Migas	153. 1 .86	-	29 7.16.209	123.476.661	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan		197.000	139.000		322.000
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	97.092.610		6.223.200	32.119.279	
Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan	3.265.405	-	614.600	1.654.625	-
CHT	97.097	-	-	34.236	-
SDA	215.92 .712.113	51.780.253	4.235.247.400	211.606.127.07	291.31.350
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Cross Border	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Cross Border					
Mineral	215.740.437.909		2.656.151.030	279.60 .579.827	220.949.101
Landrent	72 .3 -6.594	-	361.56 .035	-	291.343.43
Royalti	213.990.247.315	-	2 .07.567 .75	269.60 .579.857	-
Panas Bumi		-	-	-	-
Termin (Up Front)					
Iuran Tetap	-				
Sebelum Berlakunya Undang-Undang	-	-		-	-
Kehutanan	2.397.731.739	51.470.950	3 .9 .905.900	2.064.857.214	74.163.135
IHPH	2.213.280.203		234.776.175	1.06 .504.118	
PSDH		51.799.250	22.609.975		71.139.125
PSDH	184.973.946	-	96.820.950	101.313.096	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	215.17 .074.027	61.18 .450	13.777.564.300	787.837.338.817	87.749.541

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bulan (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	163.080.511	52.721.092	30.529.351
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 22/26	-				-
PBB	-	-	(4) 080 511	52 721 961	30 529 351
Bea Rota		-	-	-	-
Dusian Daerah Kaya					
Bagian Daerah Dari Migas			110.782.321	22.381.061	133.200.922
Bagian Daerah Dari Sda Pajak	-			-	-
Bagian Daerah Perimbangan	-	-	167.050	-	27.650
Dusian Daerah Perbatasan		-	-	-	
Dusian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas	-				-
Biaya Pemungutan Sda Migas	-	-	7.195.461	-	7.195.461
Biaya Pemungutan Pajak Sda			-	-	
Biaya Pemungutan Perbatasan			5.350		5.350
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-				-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT		-	-	-	-
DBHCHT		2.316.391	162.259.501		162.259.501
Migas					
Minyak Bumi 15%	-	-		-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Kawasan Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Kawasan Otsus	-				
Minerba	-	-	162.259.501	-	162.259.501
Panas Bumi	-	-	162.259.501	-	162.259.501
Kehutanan		-	-	-	-
Perikanan					
Iuran Izin Usaha					
Iuran Tetap	-	-		-	
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Reboisasi		2.316.391	-		-
PSDH					
DBHDR	-	-		-	
PNBP	-	2.316.89	-	-	-
Kehutanan			-	-	-
Grand Total		2.316.391	337.317.973	52.721.092	360.789.402

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Buton (dalam rupiah)

URAIAN (1)	KB Tahun Anggaran 2020 (2)	LB Desember TA 2020 (3)	Penyaluran KB DBH Semesteran TA 2020 (PMK No. 108/PMK.07/2020) (4)	KB TA 2020 yang belum tersalurkan (5=2-4)	LB TA 2020 yang belum disalurkan (6)
Pajak	3.356.757.626	-	894.302.701	2.462.454.925	2.511.815
PBB	732.174.312	-	467.272.600	264.901.712	-
PPh Pasal 21	568.952.102		460.750.000	108.202.102	
PPh Pasal 25/29	92.992.010		6.250.000	86.742.010	
BPHTB	2.428.379.668	-	357.719.101	2.070.660.567	2.511.815
Reg. Kota	2.901.164.758	-	278.039.101	2.623.125.657	-
Bagian Daerah Migas	87.373.868	-	50.552.700	-	2.384.529
Bagian Daerah Non Migas	218.107.703		28.608.100	189.499.603	
Bagian Daerah Dana Bagi Hasil					
Bagian Daerah Pertambangan	-				
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	218.101.207		8.077.200	209.174.607	
Bagian Pemerintah Migas	2.107.913		2.250.200		127.287
Bagian Pemerintah Non Migas	6.173.951	-	1.081.900	1.097.011	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perkebunan			-	-	
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	8.365.370	-	376.000	7.989.370	-
Cukai	7.038	-	-	7.038	-
SDA	27.235.749.852	-	909.259.730	26.478.066.707	127.150.845
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pertambangan	27.090.938.752		902.279.330	26.700.059.127	
Kehutanan	145.705.055	-	17.630.900	58.290.155	-
Royalti	74.020.278.697	-	454.635.435	26.435.207.971	-
Pajak Ekspor		-	-	-	-
Jaminan Reklamasi				-	
Tunggakan					
Pendapatan Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan	84.609.640	-	9.489.300	145.340	-
DR		-	-	-	-
PHPL					
PSDH	84.309.640		9.489.300	145.340	
Perikanan	185.271.151	-	306.568.075	-	127.150.845
Jumlah Total	30.948.201.350	-	1.733.278.430	29.130.142.972	129.661.764

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Konawe

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			902.309.390	902.309.390	-
PPh			902.309.390	902.309.390	
PPh Pasal 21	-		879.013.490	879.013.490	
PPh Pasal 25/29	-	-	23.295.900	23.295.900	
PBB	-	-	-	-	-
Bea Perolehan		-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Pasal 4(2)	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan					
Dana Reboisasi	-	-			
Dana Penerimaan Migas			-	-	-
Dana Penerimaan Non Migas			-	-	-
Dana Penerimaan Pajak Lainnya			-	-	-
Dana Penerimaan Perkebunan					
Dana Penerimaan Pertambangan	-	-			
Dana Penerimaan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT			-	-	-
BHA		12.830.327	3.090.080.108	(188.271.720)	3.278.351.828
Migas					
Minyak Bumi 15%	-	-	-		-
Minyak Bumi 3,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka DMO		-	-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 6,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka DMO	-				
Minerba	-	-	1.439.360.405	1.189.282.705	
Landrent		-	706.364.520	706.364.520	-
Royalti		-	732.995.885	732.917.985	-
Panas Bumi					
Iuran Tetap	-				
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Setoran Bunga Pemerintah		-	-	-	-
Perikanan		12.830.327	3.531.662.090	18.855.734	3.512.806.356
PPh					
PBPH	-		3.531.662.090	18.855.734	3.512.806.356
PNBP		12.830.327	-	-	-
Perikanan		-	-	-	-
Grand Total		12.830.327	3.531.662.090	18.855.734	3.512.806.356

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kutowe

(dalam rupiah)

[illegible]	KU Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DBH Sampai dengan TA 2020 (KUR Rp0,00/LEB Rp0,00)	KURTA 2020 yang telah diselesaikan	LBTA 2020 yang telah diselesaikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	2.153.864.500	-	1.284.251.900	2.856.109.972	3.925.160
PBB	1.251.020.145	-	542.197.400	1.026.302.745	-
BPHTB	1.272.487.803	-	586.584.600	936.362.243	-
PPh Pasal 25/29	75.302.302		6.002.200	60.666.302	
PBB	7.567.60-.106		74.081.300	3.650.175.199	3.922.160
Bag. Rata	2.177.166.596		324.536.760	1.911.545.999	
Bagian Daerah Atas	178.618.026	-	27.242.300	-	3.729.975
Bagian Daerah Dan Atasa	3.007.681.057	-	124.252.300	2.0-8.526.251	-
Bagian Daerah Pertama					
Bagian Daerah Pertama	-				
Bagian Daerah Pertama	1.791.462.8-3	-	525.530.203	1.263.624.145	-
Bagian Daerah Sebar Lainnya	2.1.3.397.057	-	6.904.302	274.994.707	-
Pasal Penangguhan Migas	4.791.612		1.503.302	-	109.788
Pasal Penangguhan Non Migas	115.029.720		1.039.302	110.330.223	
Pasal Penangguhan Pasal Bunga	-	-			-
Pasal Penangguhan Perbankan		-	-	-	-
Pasal Penangguhan Perkebunan	99.577.397		11.723.302	78.430.797	
Pasal Penangguhan Sektor Lainnya	9.085.178		302.100	7.712.075	
PPH	2.073		-	2.025	-
JUMLAH	20.715.243.333	4.505.502.200	2.677.633.150	26.304.132.536	6.748.273.255
Migas			-	-	-
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%	-				
Minyak Bumi Dalam Rangka Gross Split	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Gross Split					
Pertama	18.817.107.201		721.011.070	26.243.3 85.197	110.036.075
Tambahan	69.425 6.5		219.007.250		110.035.075
Progresif	28.7-5.71 .720		503.675.030	26.243.858.197	
Pasal Bunga	-	-	-	-	-
Pasal Perkebunan		-	-	-	-
Pasal Migas					
Pasal Bagian Pemerintah					
Kehutanan	175.096.56	– 628.5 0.930	655 .01 5.0	80.057.71	6.150 511.650
DAK	-	-	-	-	-
PBHT		1.308.720.030	1.025.000.500	-	6.182.341.750
PBHT	156.066.21		31.719.900	90.057.311	
Panas Bumi	2.3.05– 530		395.103.275		33.799.715
Jumlah Total	22.201.106.633	4.504.550.930	8.093.695.550	36.190.657.490	6.166.701.392

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kolaka

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	SR TA 2019	LPy d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LR s.d TA 2019 (KSK No. S-452/K.7/2021)	Sisa LPy d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
Pajak	-	-	8.120.810.019	1.821.724.540	1.598.284.161
PBB	-	-	2.345.920.010	-	2.346.920.010
PBB Pasal 21	-	-	1.484.650.315	-	1.484.650.315
PBB Pasal 25/29	-	-	861.269.795	-	861.269.795
PPh			5.774.890.009	4.023.774.853	2.751.171.194
Bagi Rata					
Bagian Daerah Hasil Migas	-	-	2.884.711.936	2.884.711.936	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	1.139.821.122	1.139.821.069	1.139.606.053
Bagian Daerah Pasca Bayar		-	-	-	-
Bagian Daerah Penambahan					
Bagian Daerah Perimbangan			147.298.373		147.298.373
Bagian Daerah Kab. Lainnya	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	837.837.706	-	837.837.706
Biaya Pemungutan Non Migas			87.368.154		87.368.154
Biaya Pemungutan Pasca Bayar					
Biaya Pemungutan Perimbangan	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	7.864.851	-	7.864.851
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT	-				
DBH	-	4.853.519	4.749.261.697		4.754.263.867
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba		-	2.159.028.608	-	2.159.028.608
Landrent			2.159.028.608		2.159.028.608
Royalti					
Panas Bumi	-				
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap		-	-	-	-
Deforestasi Jualan Perseroan Tbk					
Sda Lainnya		1.853.519	2.579.010.289		2.580.010.289
PE	-	-		-	
PLTP	-	-	2.849.040.389	-	2.849.040.389
PSDH		4.853.519			
Perikanan					
Cukai Tbkt	-	4.853.519	13.109.752.019	7.032.721.973	9.261.060.041

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kolaka

(dalam rupiah)

URAIAN	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DBH (PMK Sementara TA 2020 s.d. PMK-37/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dikonsolidasikan	LB TA 2020 yang belum dikonsolidasikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	19.727.178.545	-	4.046.[illegible].200	15.680.897.[illegible]	22.4[illegible].253
PPh	7.059.090.697	-	1.595.[illegible]-(o)	9.666.813.[illegible]	-
PPh Pasal 21	3.810.720.187		1.537.231.[illegible]	2.31[illegible].697.587	
PPh Pasal 25/29	252.920.190		85.[illegible].800	174.014.[illegible]	
PBB	15.650.081.660		3.025.139.[illegible]	12.6[illegible].085.[illegible]	32.[illegible].272
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.177.196.936		242.[illegible].760	1.934.[illegible].599	-
Cukai Hasil Tembakau	62.373.950	-	62.[illegible]-(o)	-	51.2[illegible].4[illegible]
Pendapatan Sumber Daya Alam	1.708.[illegible].[illegible]	-	2.529.[illegible]-(o)	5.179.363.[illegible]	
Pendapatan Sumber Daya Alam Migas					
Pendapatan Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi					
Pendapatan Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara	1.103.[illegible].042	-	25[illegible].[illegible].[illegible]	844.[illegible].382	-
Pendapatan Sumber Daya Alam Kehutanan	2[illegible].[illegible].[illegible]	-	8.[illegible].[illegible]	20[illegible].[illegible]	-
Pendapatan Sumber Daya Alam Perikanan	1.[illegible].[illegible]		3.[illegible].[illegible]	-	1.21[illegible]
Pendapatan Sumber Daya Alam Pertambangan Migas	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	212.[illegible].[illegible]	
Pendapatan Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi	-	-			-
Pendapatan Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-	-	-	-
Pendapatan Sumber Daya Alam Kehutanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Pendapatan Sumber Daya Alam Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
DAU	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	5.757.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
DAU Tanah Bumbu			-	-	
DAU Kabupaten Kolaka					
DAU Kabupaten Kolaka Timur			-	-	-
DAU Kabupaten Kolaka Utara	-	-	-	-	-
DAU Kabupaten Konawe	-	-	-	-	-
DAU Kabupaten Konawe Selatan			-	-	-
DAU Kabupaten Konawe Utara			-	-	-
DAU Kabupaten Bombana	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DAU Kabupaten Buton	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DAU Kabupaten Muna	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DAU Kabupaten Buton Utara	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DAU Kabupaten Konawe Kepulauan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DAU Kabupaten Muna Barat	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DAU Kabupaten Buton Tengah	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DAU Kabupaten Buton Selatan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DAU Kota Kendari	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DAU Kota Baubau	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DAU Provinsi Sulawesi Tenggara	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
DBH	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
DBH Migas	-	-	-	-	-
DBH SDA	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
DBH Pajak	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
Pendapatan Lainnya	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Grand Total	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Muna

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (KVK No. S-6053/KV.7/2021)	Realisasi Alok. TA 2015 (KVK No. S/KV.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KVK No. S/KV.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
Pajak	-	-	4.737.943	4.737.943	-
PPh			4.233.741	4.233.741	-
PPh Pasal 21			4.233.741	4.233.741	-
PPh Pasal 25/29					-
PBB	-	-	54.096	54.096	-
Bea BPHTB	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas		-	-		
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi					-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan			-	-	
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pasca Bumi	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan			54.096	54.096	
Biaya Pemungutan Perikanan					-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
OPT	-	-	-	-	-
SDA		5.705.856	707.501.650	25.405.707	267.191.496
Migas					-
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam rangka Otsus					
Pinjaman			252.091.800	25.410.021	267.191.496
Pemerintah	-	-	252.091.800	25.410.021	267.191.496
Bayar	-	-	-	-	-
Bukan Migas		-			
Panas Bumi					
Dalam Produksi					-
Dalam Uap					-
Bagian Daerah Penghasil	-		-	-	-
Kehutanan	-	5.705.856	-	-	
DR		-			
IUPHH					-
PSDH	-	5.705.856	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Grand Total		5.705.856	706.871.740	29.637.871	267.191.496

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Muna

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Tahun Anggaran TA 2020	DBH Tahun TA 2020	Penyaluran KB / LB Semester I TA 2020 (PMK No. 37/KM.7/2021)	PMK TA 2020 yang Belum Disalurkan	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan (Belum Salur)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2]-[4]	[6] = [3]-[4]
Pajak	3.561.376.353	459.630	1.009.176.923	2.552.199.430	1.074.574
PBB	207.941.000	-	561.164.430	561.676.430	-
PPh Pasal 21	911.502.918		949.960.036	361.874.118	-
PPh Pasal 25/29	109.247.882		1.965.430	96.359.282	
BPHTB	2.508.735.397	459.630	249.997.030	2.101.701.071	1.074.574
Pajak Rokok	2.316.565.198	-	2.076.150.350	1.078.127.650	-
Bagian Laba Pajak Migas	74.875.525	-	97.117.101	-	2.837.875
Bagian Pajak Penghasilan	260.027			260.027	
Bagian Pajak Atas Tanah dan Bangunan	-				
Bagian Pajak Reklame	-	710.430	330.900	-	779.730
Bagian Pajak Parkir	-	-	-	-	-
Bagian Pajak Sarang Burung Walet	215.598.307		3.624.500	208.954.707	-
Bagian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.125.301		3.670.120		545.019
Bagian Pajak Air Permukaan	9.775	-	-	9.750	-
Bagian Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah		10.200	14.460	-	38.640
Bagian Pajak Sarang Burung Walet					
Bagian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.065.178	-	342.100	7.712.078	-
Cukai Hasil Tembakau	2.078	-	-	2.026	-
SDA	56.207.363.153	-	763.468.675	29.171.363.530	30.288.270
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Setelah Tambang	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Bagian Pemerintah Setelah Tambang					
Pertambangan	22.206.925.464		450.497.920	26.136.428.039	
Kehutanan	121.366.264	-		171.364.061	
Perikanan	26.483.557.350	-	132.497.835	20.639.299.965	-
Pajak Bumi		-	-	-	-
Bagian Pemerintah					
Bagian Pemerintah Setelah Tambang					
Pertambangan	13.940.431	-	8.991.100	17.956.537	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Perikanan					
PNBP	29.549.421		8.991.100	11.963.321	
PBBP	26.726.480	-	108.998.750		130.283.240
Perkebunan	30.57 . 60.770	459.600	1.777.660.275	28.720.617.302	131.062.044
Grand Total					

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Kendari

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2018	Kurang Bayar TA 2019	Penyaluran TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyaluran TA 2021 (KMK No. 8/KM.7/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2019 (KMK No. 8/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
Pajak	-	-	-		
PPh	-	-	-		-
PPh Pasal 21	-	-			-
PPh Pasal 22/23					-
PBB				-	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				-	
Bagian Pemerintah Pusat	-	-		-	
Bagian Daerah Penerimaan Migas	-	-		-	-
Bagian Daerah Penerimaan Non Migas				-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi				-	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi				-	
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi		-	-		
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas				-	
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-		
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	-	-			-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 25/29				-	-
Biaya Pemungutan Bidang Lainnya				-	
CHT	-	-	-		
DAU	-	2.269.754	41.724	123.517	288.207
Migas	-				-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 70%	-	-			-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Minerba				-	-
Landaran			-	-	
Kovensi		-	-	-	
Panas Bumi	-	-	-		
Tunjangan Profesi	-	-	-		-
Tambahan Penghasilan				-	-
Otonomi Khusus Bagian Pemerintah				-	
Keseluruhan		2.269.754	41.724	123.517	288.207
DR	-	-	-		
SDNR	-				-
PSDH		2.269.754	41.724	123.517	288.207
Perikanan		-	-		
Grand Total	-	2.269.754	41.724	123.517	288.207

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Kendari

(rupiah)

JENIS DBH	KB Tersalur TA 2020	LB Tersalur TA 2020	Perwalian KB LB Tersalur TA 2020 (PMK No. 37/KM.7/2021)	KB LB 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(9)	(10) = (2)-(9)	(11)
Dajak	10.487.283.087	-	2.687.790.000	7.799.493.087	3.250.870
PPh	8.378.156.208		3.265.090.000	5.113.176.208	-
PPh Pasal 21	7.782.652.027		3.127.410.000	4.655.242.027	-
PPh Pasal 25/29	595.504.181		137.680.000	457.824.181	-
PBB	2.109.127.780	-	371.818.000	1.737.309.780	3.250.870
Bagi Rata	1.997.858.000	-	265.670.700	1.732.187.300	
Bagian Daerah Penghasil	90.269.780		90.363.200		3.296.441
Bagian Daerah Non Migas				-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-			
Bagian Daerah Belum Layanan	21.270.000		8.820.000	276.249.000	-
Biaya Pemungutan Migas	3.079.200		1.505.600	-	80.360
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Penghasil	-	-			
Biaya Pemungutan Pemanfaatan					-
Biaya Pemungutan Pemanfaatan			-	-	-
Biaya Pemungutan Belum Layanan	3.069.798	-	284.800	7.734.078	
DPP	43.400	-		13.400	
BHA	26.705.367.481		799.167.000	25.760.277.151	15.784.000
Migas				-	-
Minyak Bumi 15%	-		-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam rangka Otsus				-	-
Nonmigas	26.626.105.732		474.200.000	25.751.904.045	-
Perikanan	-	-	-	-	
Kehutanan	26.626.105.732	-	474.200.000	25.751.904.045	
Pertambangan Panas Bumi	-				
Iuran Pertambangan					-
Iuran tetap			-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Pertambangan	79.971.753	-	8.105.203	1.466.000	
Dana					-
Jasa			-	-	-
PSDH	79.971.753	-	8.465.203	1.506.550	
Perikanan	139.156.070	-	816.887.200		137.001.725
Grand Total	37.092.587.518	-	1.437.290.200	26.510.213.111	130.941.982

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Batu Bara (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 20.8	LB TA 2019	Lebih Salur TA 2019 (PMK No. 15/PMK.07/2021)	Penyelesaian Lebih Salur TA 2019 (KVK No. 3/KM.7/2021)	Sisa Lebih Salur TA 2019 (KVK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			208.000.002	61.795.564	230.205.120
PPh			284.177.585	61.795.564	222.705.129
PPh Pasal 21			284.190.585	61.795.564	222.705.129
PPh Pasal 23/26	-	-		-	-
PBB	-	-	23.824.810	-	15.904.810
Cukai Lebih			-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas			11.061.068		13.205.858
Bagian Daerah Pajak Rokok	-			-	-
Lebihan Daerah Perimbangan	-	-	-	-	-
Lebihan Daerah Perimbangan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Tertentu					
Biaya Pemungutan Migas	-				-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-99.152	-	499.152
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		-	-		
Biaya Pemungutan DBH Tertentu					
Biaya Pemungutan Perkebunan	-				-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Lain-lain		-	-	-	
SDA		9.037.298	10.977.125		10.977.125
Migas	-			-	-
Minyak Bumi 15%	-			-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	10.977.125	-	10.977.125
Iuran Tetap	-	-	10.977.125	-	10.977.125
Royalti		-	-	-	-
Panas Bumi					
Dana Reboisasi					
Iuran Tetap	-				-
Pencadangan Reklamasi dan Pascatambang	-	-	-	-	-
Kehutanan		9.037.298	-	-	
PSDH					
Migas	-				-
Non Migas	-	9.037.298	-	-	-
Perikanan		-	-	-	-
Grand Total		9.037.298	208.977.813	61.795.564	247.182.254

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Bau-bau

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	PB Tetap TA 2020	PB Tambahan TA 2020	Alokasi dan Realisasi DBH Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.7/2021	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	3.610.170.189		1.217.701.100	2.417.302.956	3.242.937
PPh	1.095.574.172		572.772.000	422.802.172	
PPh Pasal 21	1.103.980.460		813.241.250	290.311.460	
PPh Pasal 22/26	343.027.913		39.570.000	303.457.913	-
PBB	2.510.368.500	-	644.930.100	1.865.438.400	3.242.937
Bagi Rata	1.061.959.996	-	765.683.700	1.296.276.296	-
Bagian Daerah Migas	83.519.002		27.006.200		3.080.008
Bagian Daerah Pajak Migas	65.760.998		21.200	10.042.202	
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-		-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2.56.760.827		5.025.200	200.000.607	
Biaya Pemungutan Migas	3.048.741		3.000.000	-	65.459
Biaya Pemungutan Non Migas	676.410	-	90	605.500	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi			-		
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-			-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	2.083.078	-	303.410	2.761.578	-
SDA	2.324	-	-	2.026	-
SDA	25.721.09.951		89.120.775	25.77.03.220	137.01.020
Migas					
Migas Bagi 15%	-	-		-	-
Minyak Bumi 6,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 6,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	26.744.415.772	-	676.496.100	6.756.110.570	-
Landrent	13.207.772	-	4.301.675	1.896.675	-
Royalti	26.228.186.780	-	472.592.425	25.754.414.595	-
Panas Bumi					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Tetap	-			-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	14.877.021	-	8.015.675	9.028.576	-
PSDH					
DR	-				
PSDH	13.877.03	-	8.015.675	9.013.556	-
Perikanan	150.150.020	-	5.16.63 .002	-	137.004.020
Grand Total	92.05.013.090		2.021.424.775	29.257.127.412	140.336.977

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Konawe Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2015	KB TA 2019	LB TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian DB TA 2020 (LMAS No. 3/LMS/I/2021)	Sisa DB TA 2019 (LMAS No. 3/LMS/I/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5, 3)
Pajak			147.113.069	83.756.752	63.356.317
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	147.113.069	83.756.752	63.356.317
Bagi Rata					-
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	50.976.319	83.756.752	7.219.567
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas			6.037.737		6.037.737
Bagian Pemerintah Panas Bumi					-
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perkebunan	-	-	-		
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					
Cukai					-
DTA		2.284.000	181.970.690	-	181.970.690
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 85%					-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 70%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba		-	181.970.690		181.970.690
Kehutanan			181.970.690		181.970.690
Kelautan					
Dana Alokasi				-	-
Tunjangan Dosen	-	-	-	-	-
Tunjangan Guru	-	-	-		
Bantuan Biaya Pendidikan					
Kehutanan		2.284.000			-
DAU	-	-	-	-	-
DAK	-	-	-	-	-
Reboisasi		2.284.000			
Perkebunan					
Grand Total		2.284.000	328.083.759	83.756.752	263.327.007

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Konawe Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (KMK No. 230/KM.7/2021)	KB DBH 2020 yang belum disalurkan	LB DBH 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Pajak	6.260.811.350		2.778.718.360	3.141.730.119	142.038.928
PBB	1.135.801.955		240.315.140	895.486.815	-
PPh Pasal 21	1.094.472.675		240.315.200	911.759.675	-
PPh Pasal 25/29	5.233.111	-	7.302.940	(2.069.829)	-
PBB	4.845.504.609	-	2.537.803.700	3.261.900.736	454.008.369
Bea Bea	360.378.109	-	267.080.700	193.270.295	-
Bagian Daerah Hasil	167.813.175	-	173.320.700		5.507.525
Bagian Daerah Hasil Migas	926.995.591		1.011.201.000	-	422.035.409
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	
Dana Bagi Hasil Pertambangan	1.180.173.340		207.751.740	1.237.392.389	
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	210.533.310		8.534.020	206.617.807	-
Biaya Pemungutan Migas	6.426.204	-	5.007.900	-	78.306
Biaya Pemungutan Panas Bumi	28.750.642	-	43.254.320	-	1.083.541
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					
Biaya Pemungutan Perikanan					-
Biaya Pemungutan Pertambangan	13.038.714	-	12.153.430	63.875.284	-
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan	8.058.576	-	232.720	7.716.378	
CHT	3.247			3.247	
SDA	67.128.200.190		1.081.922.220	61.500.126.294	104.752.415
Migas	-			-	-
Migas Bagian 15%	-	-	-	-	-
Migas Bagian 0,5%	-	-	-	-	
Migas dalam Kabupaten Penghasil Otsus					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Kabupaten Penghasil Otsus	-		-	-	-
Minerba	61.357.543.360	-	1.364.504.476	60.001.145.384	-
Landrent	282.772.344	-	123.732.125	295.066.219	
Royalti	65.071.871.317	-	1.250.722.530	62.371.190.107	
Panas Bumi					
Dana Reboisasi					-
Dana Iuran	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	
Kehutanan	1.125.351		22.312.750		2.016.309
IHPH					-
PSDH	-		-	-	-
PSDH	1.125.351	-	12.312.750	-	2.016.309
Perikanan	30.790.582	-	317.381.020		1.012.047.020
Dana Tera	69.439.073.772		1.263.241.020	61.713.432.503	902.750.785

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bumibaru (dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2020)	Penyesuaian TA 2021 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Jml LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak			3.715.908.387	586.077.193	4.301.985.580
PPh			330.376.216		330.376.241
PPh Pasal 21			276.849.713		276.849.713
PPh Pasal 25/29	-	-	53.526.503		53.526.503
PBB	-	-	3.385.532.171	586.077.193	3.971.609.364
Bagi Hasil		-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas			3.821.231.956	586.077.193	4.407.309.149
Bagian Daerah Pasca Bea Cukai	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan		-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Tambang					
Biaya Pemungutan Migas	-				-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Pasca Bea Cukai		-	-	-	
Biaya Pemungutan Perikanan					
Biaya Pemungutan Pasca Cukai	-				-
Biaya Pemungutan Sektor Tambang	-	-	-	-	-
Cukai		-	-	-	-
SDA		5.853.013	2.000.772.029		2.000.772.029
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Landrent	-	-	[illegible]	-	[illegible]
Royalti		-	-	-	-
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	-		-		-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		5.853.013			
IHPH					
PSDH	-	5.853.013	-	-	-
Perikanan		-	-	-	-
Grand Total		5.853.013	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bombana

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB/LB DBH TA 2020	DBH TA 2020	Penyaluran DBH TA 2020 (KMK-35/KM.7/2021)	DBH TA 2020 yang Telah Dialokasikan	DBH TA 2020 yang Telah dipenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak	16.644.151.170		1.620.976.200	14.677.735.456	4.590.535
PPh	1.234.066.613	-	415.431.100	628.685.577	-
PPh Pasal 21	962.875.056	-	429.444.300	554.926.656	
PPh Pasal 26/26	79.270.056	-	6.381.200	88.238.976	
PBB	15.355.021.613		1.085.975.100	13.030.567.909	2.680.535
Cukai Rokok	1.941.969.096		210.089.100	1.726.270.299	
Pajak Daerah Migas	135.774.241		11.144.100	-	4.310.059
Pajak Daerah Non Migas	17.706.291.637	-	649.955.100	1.054.536.537	-
Bagian Daerah Pajak Pusat	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perbatasan					
Pajak Daerah Perkebunan	503.340.470			502.030.470	-
Pajak Daerah Sektor Lainnya	15.593.007	-	8.634.200	205.954.707	-
Biaya Pemungutan Migas	1.702.70-	-	2.034.200	-	255.479
Biaya Pemungutan Non Migas	135.931.191		24.433.000	111.316.191	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	23.117.324	-	-	95.117.074	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.548.179		821.700	7.702.079	
Cukai	2.029			2.029	-
SDA	1.193.516.847	-	151.145.420	1.043.263.848	66.906.606
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	1.178.608.847.084	-	1.055.850.250	1.043.463.392	8.305.670
Lancaran	205.073.724		211.161.200		8.305.670
Reguler	1.178.403.773.360		1.055.639.050	1.043.463.392	
Panas Bumi				-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Panas Bumi		-	-	-	
Sebagian Wilayah Kewenangan					
Kehutanan	11.221.231		10.116.170	2.905.410	
IHP	-	-		-	-
IHPS	-	-	-	-	
PSDH	11.321.631		10.116.170	2.905.410	
Perikanan	19.120.981		31.451.020		157.694.020
Grand Total	27.826.437.669		3.113.122.010	134.646.108.465	170.790.93

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Wakatobi (dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2019	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (Lihat Lamp. I.2 PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 173/PMK.07/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 173/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	9.205.968	820.597	8.385.371
PPh	-	-	9.205.968	820.597	8.385.371
PPh Pasal 21			9.205.968	820.597	8.385.371
PPh Pasal 25/29					
PBB					
Reg. Baru	-				
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			-	-	
Bagian Daerah Lama Migas					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Non Migas	-				
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perkebunan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	2.230.652	-	-	-
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 3,5%					
Minyak Bumi dalam Wilayah Kerja Khusus	-	-	-	-	-
Gas Alam 30%	-	-	-	-	-
Gas Alam 6,5%		-	-	-	-
Gas Alam dalam Wilayah Khusus					
Pertambangan					
Landrent	-				
Royalti	-				-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi		-	-	-	-
Iuran Tetap					
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Perikanan	-	2.230.652	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PHT					
PSDH		2.230.652			
Pertanian	-	-			-
Grand Total	-	2.230.652	9.205.968	820.597	8.385.371

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Wakatobi

(dalam rupiah)

URAIAN	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB LB DBH Semester I TA 2021 (KMK No. 8/KM.7/2021)	KB DBH TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB DBH TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	5,189,185,215		702,764,750	2,190,179,217	3,715,202
PBB	548,063,301		209,063,430	139,259,036	
BPHTB	785,605,415		391,091,750	197,282,710	-
PPh Pasal 25/29	54,277,656	-	7,109,130	54,968,766	-
PDRD	2,53 ,551,581	-	94,070,420	1,94 ,027,653	3,715,202
Bagi Rata	1,091,059,908	-	268,650,750	1,730,275,288	
Bagian Daerah Atas	1,15 ,5 ,709	-	1,5 ,131,050		3,012,231
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerima					
Bagian Daerah Lainnya	21 ,060,007		5,0 ,300	209,0 1,707	-
Biaya Pemungutan Migas	4,139,939	-	1,022,900	-	192,07
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemanfaatan Pemda Lain					
Biaya Pemanfaatan Antarpemda					-
Biaya Pemungutan Pusat	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	3,065,178	-	231,502	7,702,078	-
DPT	2,074	-		2,025	
DAK	2 ,7 8,7 ,31		799,07 ,27	2 ,1 ,95 ,0	1 ,899,02
Migas					-
Minyak Bumi (15%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-			
Gas Bumi (30%)					
Gas Bumi (0,5%)					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Migas	26,028,408,030	-	472,953,425	25,554,414,595	-
Tambahan	-	-	-	-	
Reguler	26,028,408,030	-	472,953,425	25,554,414,595	
Panas Bumi					
Dana Reboisasi					-
PNBP	-		-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Kehutanan	25,87 ,7 1	-	8,207,6	2,068,1	
Dll.					
PNBP	-			-	-
TSPDT	91,371,53	-	8,01 ,652	12,603,03	-
Tambahan	191,186,050	-	3 ,88 ,200		1 ,0 1,2
Grand Total	29,2 7,0 7,7		1,391, ,2	2 ,1 ,02,7	1 ,13 ,22

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Kotaku Utama

(Dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 20[illegible]	KB TA 20[illegible]	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (SMS No. 37/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (SMS No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	936,261,000	875,211,000	961,001,009
PPh			152,161,017	152,161,017	-
PPh Pasal 21	-	-	152,161,017	152,161,017	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	783,614,078	525,280,000	961,134,009
Dapat Rata					
Dapat Daerah Migas					
Dapat Daerah Non Migas	-		716,996,947	776,049,967	541,85[illegible],027
Dapat Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dapat Daerah Perbatasan		-	-		
Dapat Daerah Perbatasan					
Dapat Daerah Sektor Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	66,717,14[illegible]	66,433,000	28,284,112
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Tertentu Lainnya					-
Biaya Pemungutan Tertentu Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	
CUT					
PTA		2,451,764	3,020,112,772	102,427,791	3,719,164,962
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-		-
Minyak Bumi dalam Kategori Khusus					
Gas Bumi 6%					-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	5,920,172,773	80,407,791	3,719,764,982
Landrent		-	5,920,172,773	120,407,791	3,719,764,982
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Tetap	-			-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		2,451,764			
IHT					-
IHTPB	-	-	-	-	-
PSDH	-	2,451,764	-	-	
Perikanan					
Grand Total		2,451,764	4,756,284,189	177,834,791	4,280,866,221

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kolaka Utara

(dalam rupiah)

URAIAN	KB Tahun 2021	LB Tahun 2020	Penyaluran KB LB Tahun 2020 (KMK No. 37/KM.7/2021)	(KB TA 2020) yang belum disalurkan	(LB TA 2020) yang belum dikembalikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
Pajak	2.429.594.176		792.666.000	2.012.586.000	30.660.528
PPh	382.143.116		261.117.100	618.005.016	-
PPh Pasal 21	837.383.496	-	367.000.000	470.956.896	-
PPh Pasal 25/29	51.750.020	-	7.083.100	7.676.536	-
PBB	2.546.743.067		428.535.900	2.154.515.900	30.660.528
Cukai Hasil	1.991.000.998		200.000.000	1.720.270.208	
Bagian Daerah Migas	59.582.884		50.972.300		35.289.568
Bagian Daerah Non Migas	262.193 – 2	-	51.336.100	205.809.017	-
Bagian Daerah Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Perkehutanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	115.695.007		8.021.200	205.984.207	-
Bagian Pemerintah Migas	2.164 – 7	-	3.336.202	-	1.371.385
Bagian Pemerintah Non Migas	8.231.805		2.042.700	9.271.995	
Bagian Pemerintah Pajak Rokok					
Bagian Pemerintah Perkebunan	-			-	-
Bagian Pemerintah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	5.085.179		372.900	7.702.078	
Cukai	2.028			2.028	
SDA	29.660.601.449	1.071.307.984	1.201.050.000	30.909.709.162	1.410.011.749
Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			-		-
Bagian Daerah dalam Rangka Otsus					
Dana Reboisasi					
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	29.195.251.137	1.071.405.084	550.317.550	29.036.750.747	1.232.052.020
Langsung		1.071.405.084	177.768.000		1.232.052.020
Royalti	29.195.251.187		351.545.025	29.036.750.162	
Panas Bumi					
Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-		
Kehutanan	1.302.291		11.754.500		225.959
IHP	-			-	-
PSDH	-	-	-	-	-
PSDH	1.238.281		11.453.500		225.959
Perikanan	139.340.962		316.951.000		177.958.829
Grand Total	93.089.275.625	1.071.307.984	1.993.323.000	41.011.253.105	1.410.011.749

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Konawe Utara

(dalam ribuan)

Jenis DBH	SBN TA 2018	KN TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (kolom 3-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)
Pajak		-	5.051.478.502	2.582.920.607	7.634.399.109
PBB			34.927.997	-	34.927.997
PPh Pasal 21	-		20.021.097		20.021.097
PPh Pasal 25/29	-		14.906.901		14.906.901
SDA	-	-	4.977.550.505	2.582.920.607	2.394.629.898
Bagi Hasil		-	-		-
Bagian Daerah Penghasil Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-		4.727.311.194	2.582.920.607	2.144.390.587
Lebihan Daerah Penghasil Migas	-				
Bagian Daerah Penghasil		-			
Bagian Daerah Penghasil		-	-	-	-
Bagian Daerah Bukan Penghasil				-	-
Dana Pengimbangan Migas	-				
Dana Pengimbangan Non Migas	-	-	209.670.046		209.670.046
Biaya Pemungutan Dan Tunjangan		-	-	-	-
Biaya Pengimbangan Pertambangan				-	-
Biaya Pengimbangan Perkebunan	-				
Biaya Pengimbangan Sektor Lainnya	-	-			
CHT		-	-	-	-
SDA		9.163.430	20.867.827.480	-	20.867.827.480
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 3,5%	-	-	-		
Minyak Pengolahan Bersifat Khusus		-	-	-	-
Gas Bumi 15%			-	-	-
Gas Bumi 70,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	16.942.824.790		16.942.824.790
Landrent	-	-	959.097.030		959.097.030
Royalti		-	15.983.727.760	-	15.983.727.760
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Produksi				-	-
Iuran tetap	-	-			
Kehutanan Dibagi di Pemerintah	-	-			
Perikanan		9.163.430	3.955.202.205	-	3.964.365.635
DR			-	-	-
DBHPB	-		3.955.202.205		3.955.202.205
PSDH	-	9.163.430			
Tambahan		-	-	-	
Grand Total		9.163.430	31.820.530.272	2.582.920.607	29.247.375.463

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2021	KB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (PMK No. 33/PMK.07/2020)	Kit TA 2020 yang belum disalurkan	LEBIH 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	11.000.827.878	-	3.043.477.302	1.368.605.786	4.625.303
PPh	929.021.092		905.425.700	623.599.252	
PPh Pasal 21	998.364.959		290.212.600	691.152.359	
PPh Pasal 25/29	36.551.439		6.210.500	22.147.329	
PBB	15.677.303.262	-	2.747.104.102	12.935.644.272	4.625.808
Bea Bea	1.391.920.062	-	265.639.702	1.726.280.295	-
Bagian Daerah Migas	1.113.118.166		153.677.300	-	1.805.731
Bagian Daerah Non Migas	9.299.103.270		1.993.731.900	7.348.077.078	
Bagian Daerah Pasal 21	-				
Bagian Daerah Pasal 25/29	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbendaharaan	1.079.302.334	-	274.551.600	1.304.811.434	-
Bagian Daerah Cukai Hasil Tembakau	215.339.201		8.024.300	206.964.737	
Bagian Pemerintah Migas	9.831.295		2.820.300		232.041
Bagian Pemerintah Non Migas	8.455.383	-	73.168.900	270.362.436	-
Bagian Pemerintah Pasal 21		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pasal 25/29					
Bagian Pemerintah Perbendaharaan	18.970.192		12.725.000	95.215.192	
Bagian Pemerintah Cukai Hasil Tembakau	8.085.173	-	372.600	7.762.573	-
DBH	2.028	-	-	2.028	-
SDA	220.429.530.838		3.202.741.850	218.406.483.171	34.297.197
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 85%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Kawasan Khusus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	220.429.530.838		1.991.111.750	218.438.483.171	164.697.713
Landrent	161.058.038	-	315.726.950	-	164.697.712
Royalti	220.268.472.800	-	1.568.587.300	218.438.483.171	-
Panas Bumi		-		-	-
Sumber Daya Air					
Iuran Tetap	-				
Pajak Air Bawah Tanah (PAT)	-		-		-
Kehutanan	307.313.013	-	59.4-6.400	-	27.052.455
IHH				-	
PSDH	-				
DBHP	30.413.945	-	32.446.450		27.052.455
Perikanan	30.186.982	-	2.687.000	-	57.894.000
Grand Total	225.010.258.716	-	5.305.830.750	220.059.478.96	5.625.303

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bolaang Mongondow Utara (dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 05/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Tajuk					
PPh					-
PPh Pasal 21	-			-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	
Bagi Hasil		-	-		
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan		-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pasal 21					
Biaya Pemungutan Perkebunan					-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	
DAU					
SDA		3.035.331	3.027.023	3.015.702	31.941.7
Migas	-			-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-			
Gas Alam 30%					
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Minerba	-	-	27.517.067	-	27.527.067
Landcover	-	-	27.517.067	-	27.527.067
Asuransi					
Panas Bumi					
Dana Tambahan					-
Dana Tunai	-	-	-	-	-
Sebagai Bagian Pemerintah	-	-	-		-
Kehutanan		3.035.31	7.630.456	3.015.702	4.114.754
PSDH					
DBHPR	-	-		-	-
DBHDR	-	3.035.31	7.630.456	3.015.75	4.114.754
Perikanan		-	-		
Pajak Total		3.035.31	3.027.525	3.015.702	31.941.7

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Buton Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran DBH Sampai dengan TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dapat disalurkan	LB TA 2020 yang belum dapat diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
DBHCT	7.128.107.000		3.961.280	2.420.545.920	-
PPh	745.359.819		304.465.900	444.764.010	
PPh Pasal 21	705.263.091	-	298.269.500	407.043.837	
PPh Pasal 25/29	41.026.788	-	6.276.720	37.750.068	
PBB	2.376.825.081		303.078.400	1.940.017.281	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.391.591.208		265.293.750	1.126.270.253	-
Cukai Hasil Tembakau	133.929.193		114.174.900	19.754.293	-
Pajak Daerah	-	-	-	-	
Pajak Daerah Tertentu	-	-	-	-	
Pajak Daerah Perhotelan					
Pajak Daerah Restoran	21.179.428			21.179.428	-
Pajak Daerah Hiburan	115.595.301	-	6.604.300	330.604.707	
Pajak Penerangan Jalan	4.565.466	-	4.287.101	278.365	
Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan					-
Pajak Pengambilan Air Permukaan					-
Pajak Parkir	-	-	-	-	
Pajak Sarang Burung Walet	1.038.89	-	-	1.038.891	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.087.179		322.500	7.764.679	-
CHT	2.025			5.046	-
DAU	20.430.010.470	77.074.620	303.956.000	35.785.45 .686	202.377.820
Migas	-	-	-	-	
Migas Bagian 1%	-	-	-		
Migas Bagian 0,5%					-
Migas Bagian dengan Pengaturan Khusus				-	-
Gas Bumi 70%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi Bagian Pemprov Otsus	-	-	-		
Minerba	36.737.403.673	87.601.601	179.679.025	23.731.1 .393	12.083.801
Panas Bumi		87.601.601	5.879.200		12.083.801
Kehutanan	20.293.709.920		173.094.425	20.731.034.992	-
Dana Desa				-	-
Dana Tunjangan	-	-	-	-	-
Dana Insentif	-	-	-		
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Cukai					
Kehutanan	21.021.160		10.501.375	31.037.395	-
DAK		-	-	-	-
DBHOT	-	-	-		
PSDH	21.021.160		10.501.375	31.037.091	
Perikanan	150.180.089		210.581.000		57.599.091
Jumlah Total	28.021.970.091	77.074.620	1.003.042.300	28.713.956.014	300.577.330

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Konawe Kepulauan

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian atas LB TA 2020 (BMK No. 5/KM.7/2021)	SISA LEBIH TA 2020 (PMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	74.672.517	55.635.181	19.037.336
PPh	-	-	74.672.517	55.635.181	19.037.336
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 22/26			74.672.517	55.635.182	19.037.335
PBB					-
Pajak Bumi				-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas		-	-		
Bagian Daerah Pasal Lain					
Bagian Daerah Pajak Lain					-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	2.220.653	29.457.268	-	102.479.218
Migas		-			
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Panas Bumi			123.179.298		123.179.298
Landreform					-
Reboisasi			123.179.298	-	123.179.298
Pajak Ekspor	-	-	-	-	-
Tarif Progresif	-	-	-	-	
Tarif Tetap					
Sebesar Biaya Pemungutan					
Pertambangan	-	2.220.653	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
SDAH	-				
PSDH		2.220.653			
Perikanan					-
Grand Total	-	2.220.653	68.361.815	5.805.181	-71.318.453

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kanwil Kementerian Keuangan ...

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2021	LB DBH TA 2020	Penyaluran s.d. ... Berdasarkan TA 2021 KMA No. 276/KM.7/2021	KB TA 2020 yang belum dikembalikan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	6.156.792.500		989.745.100	5.585.037.60	2.756.776
PPh	654.300.100	-	228.620.900	453.026.700	
PPh Pasal 21	626.514.399	-	212.93 ... 500	503.023.399	
PPh Pasal 25/29	38.335.701	-	5.7 ... 1.050	50.694.701	-
PBB	5.041.901.383		351.... 3.700	2.049.497.683	... 206.458
Bea. Bea	... 77.140.399		212.... 36.100	...34 619.936	-
Bagian Daerah Migas	97.322.801		99.999.870	-	2.566.213
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-		-
Bagian Daerah PPh 25/29 ...					-
Bagian Daerah Pertambangan				-	
Bagian Daerah Sektor Perikanan	216.589.607	-	8.6(... 30)	208.80 ...707	
Biaya Pemungutan Migas	3.610.5=7	-	3.760.750		19.767
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Pasal 21					
Biaya Pemungutan PPh 25/29 ...	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan PBB	-	-			
Biaya Pemungutan Sektor ...	8.097.174		802.300	7.7 ... 879	-
CHT	2.026			2.726	-
SDA	21.495.364.921		799.756.875	26.85=.036.591	42.099.710
Migas	-	-	-		
Migas Bagi Hasil 15%	-	-			-
Migas Bagi Hasil 0,5%					-
Migas Bagian Daerah Penghasil Migas				-	-
Gas Bumi PPh			-	-	
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-		
Minerba	27.265.572.760	-	997.970.225	20.4=7.6=2.03=	-
Iuran Tetap	195.242.171			192.552.110	-
Royalti	27.070.330.629		997.970.225	27.910.420.395	-
Panas Bumi				-	
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap	-	-			-
Bagian Bagi Hasil Pertambangan Kehutanan	16.077.631		9.693.175	7.974.456	-
PSDH	-	-	-	-	
DR	-	-	-		
PSDH	16.077.631		9.693.175	6.924.156	-
Perikanan	233.034.030		250.... 30.275	-	12.706.745
Grand Total	30.651.121.624		1.289.492.575	19.456.34=.332	54.855.143

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kolaka Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB - I TA 2018 (PER-20/PMK.07/2021)	Tanggal Input LB s.d. TA 2019 (LRA s.d. 31/12/2020)	Sisa LB s.d. TA 2019 (LRA s.d. 31/12/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
DBH	-	-	55.859.000	-	55.859.000
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-		-
PPh Pasal 25 dan 29	-	-	-		-
PBB	-	-	55.859.000		55.859.000
Dana Bona				-	-
Bagian Daerah Migas	-		-	-	
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Pasal 4 Ayat 2	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Perkebunan			92.161.000	-	88.161.000
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-		
Bagian Pemerintah Non Migas					-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya				-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	3.637.000		3.637.000
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan					-
CHT				-	-
PPh	-	9.621.95.	5.099.191	- 175.678	203.513
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi sebelum Kenaikan Ongkos				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi sebelum Kenaikan Ongkos	-	-	-		
Minerba	-	-			
Landrent					-
Royalti				-	-
Panas Bumi				-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap	-	-	-		
Setoran Bagian Pemerintah					-
Kehutanan		9.621.951	10.099.191	- 175.678	803.513
DR	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-		
Reboisasi		9.621.951	10.099.191	- 175.678	803.513
Perikanan				-	-
Grand Total		9.621.951	99.958.191	- 175.678	56.662.513

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kondei Timur

(dalam rupiah)

URAIAN	PB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran KB TA 2020 Berdasarkan PMK No. 37/KM.7/2021	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10=7-9)	(11)
Pajak	3.452.030.532	35.670.209	650.701.202	2.960.292.657	69.478.540
PPh	973.363.251		294.969.801	678.885.451	
PPh Pasal 21	841.365.036	-	280.430.000	561.36.036	
PPh Pasal 25/29	131.487.815	-	5.730.705	125.717.115	
PBB	2.307.178.528	33.477.220	337.594.900	2.113.457.848	67.463.860
Bagi Rata	2.177.150.598		212.030.102	1.907.619.596	-
Bagian Daerah Migas	103.703.282		103.796.307	-	3.323.918
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan	-				-
Bagian Daerah Perkebunan		32.072.050	27.054.600	-	36.126.600
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.950.047		9.604.600	706.30- 707	
Biaya Pemungutan Migas	2.838.553		2.010.000		771.212
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Panas Bumi				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	601.301	209.400		2.650.605
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.386.177	-	852.300	7.732.678	-
CHT	2.928			5.026	-
BEA	70.074.230.601		1.029.601.901	55.461.655.746	82.056.775
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-				-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat				-	-
Gas Alam 30%				-	
Gas Alam 0,5%		-	-	-	
Gas Alam dalam Rangka Proyek	-	-	-		
Minerba	36.172.477.562	-	7.0658.700	35.132.818.862	
Iuran Tetap	207.067.870		2.190.830	204.868.029	-
Royalti	35.877.2[illegible].653		17.0.6.3.0	26.157.161.333	-
Panas Bumi				-	
Iuran Produksi		-	-	-	
Iuran Tetap	-	-	-		
Pendapatan Bagian Pemerintah	-				-
Perikanan	233.709.500		11.877.126	278.614.334	-
PPh		-		-	
PPN	-	-	-		
PBNP	268.708.500		14.571.123	254.334.021	-
Perkebunan	317.074.530		293.103.270	-	23.293.745
Grand Total	10.124.211.093	33.0-0.230	1.0[illegible].91.202	36.151.945.638	4.537.603

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Muara Enim (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d TA 2020 (PMK No. 120/PMK.07/2021)	Penyelesaian Lebih BA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
Pajak			36.957.195	3.586.720	33.370.475
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-		-
PPh Pasal 22/26	-	-	-		-
PBB			27.057.195	3.586.720	33.370.475
Bagi Hasil			-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah Penerimaan Baru	-	-	-		-
Bagian Daerah Kehutanan					-
Bagian Daerah Perkebunan			9.900.000	3.586.720	30.467.175
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Pajak Jalan				-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-	103.020		1.903.020
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
Cukai			-	-	-
SDA		2.220.632	-	-	-
Migas	-	-	-		-
Minyak Bumi 15%	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Kelebihan Bagian Pemerintah Pusat				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		-
Gas Bumi Pelaku Eksplorasi	-	-	-		-
Minerba	-	-			-
Landrent					-
Royalti				-	-
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi		-	-		-
Kelebihan Bagian Pemerintah					-
Kehutanan		2.220.632		-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-		-
DBHT		2.220.632			-
Provensi				-	-
Grand Total		2.220.632	36.957.195	3.586.720	33.370.475

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Muara Bera

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran LB DBH Triwulan I TA 2020 (BNE No. S-434/2021)	KB TA 2020 yang belum dilakukan rekonsiliasi	LB TA 2020 yang belum direkonsiliasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2] - [4]	[6] = [3] - [4]
Pajak	3.419.3.29.530		111.992.350	2.895.491.182	3.125.756
PPh	750.774.670		39.928.300	475.831.370	-
PPh Pasal 21	717.854.439	-	282.923.400	435.613.039	-
PPh Pasal 25/29	45.847.93	-	5.685.900	10.209.331	-
PBB	2.457.777.838	-	223.535.950	2.234.241.888	2.120.106
Bagi Rata	2.234.191.938		239.100.200	1.921.991.738	-
Daerah Penerima Migas	71.074.647		73.009.400	-	2.018.447
Daerah Penerima Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Bersama Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Penghasil	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan	118.481.820			118.041.920	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2.115.698.077		8.921.700	206.934.707	
Biaya Pemungutan Migas	2.697.417	-	3.754.700	-	10.283
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi					-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	7.344.051	-	-	7.344.051	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	3.085.179	-	322.350	2.762.829	-
DPH	2.028			2.028	-
SDA	20.621.360.031		191.250.350	36.043.542.401	950.810.179
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi (85%)	-	-	-		
Minyak Bumi (15%)	-	-			-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Panas Bumi				-	-
Gas Bumi (70%)				-	-
Gas Bumi (30%)			-	-	
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Pertambangan	26.489.028.770	-	451.775.300	38.038.853.470	
Kehutanan	-	-			-
Perikanan	20.782.028.770		451.775.300	20.330.253.470	-
Panas Bumi				-	-
Jumlah Produksi	-		-	-	
Tenaga Listrik	-	-	-	-	
Pertanian Bagian Daerah Lain		-			
Kehutanan	22.871.361		8.202.650	12.668.931	-
DR			-	-	-
PHTP	-	-	-	-	
PSDH	20.871.581	-	8.202.650	12.668.931	
Perikanan	22.039.48		321.875.850		208.8 .170
Grand Total	30.07 .169.597		1.103.11 .907	29.0 0.0 0.690	31.041.956

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Dalam Pengaji (dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 82/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			91.079.935	9.107.604	81.969.331
PPh	-	-	13.581.405		13.581.405
PPh Pasal 21	-	-	13.581.405		13.581.405
PPh Pasal 25/29	-	-			-
PBB			77.498.530	9.107.604	68.387.926
Pajak Lain					-
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	74.498.530	9.107.604	65.390.926
Bagian Daerah Panas Bumi		-			-
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Perbendaharaan					-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-		-
Bagian Pemerintah Migas	-	-			-
Bagian Pemerintah Non Migas			3.100.911	-	3.100.911
Bagian Pemerintah Panas Bumi			-	-	
Bagian Pemerintah Perbendaharaan	-	-	-		-
Bagian Pemerintah Pajak Lainnya	-	-			-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya				-	
CHT			-	-	
SDA		2.220.032	-		
Cukai	-	-			-
Minyak Bumi 15%	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%				-	
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat			-	-	
Gas Bumi 30%			-		
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-		-
Pertambangan	-	-			-
Panas Bumi				-	
Royalti				-	
Pungutan Panas Bumi			-		
Hasil Produksi	-	-	-		-
Iuran Tetap	-	-			-
Bagian Pemerintah Pusat				-	
Kehutanan		2.220.032	-	-	
PSDH		-	-		
DR	-	-			-
PSDH	-	2.220.032		-	-
Dana Reboisasi				-	
Grand Total		2.220.032	91.079.935	9.107.604	81.969.331

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Buton Tengah

(dalam rupiah)

JENIS DBH	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak	2,927,648,587	-	660,291,600	3,010,802,766	3,875,277
PPh	468,724,515		260,765,400	670,939,251	
PPh Pasal 21	427,187,072		254,969,200	597,346,572	
PPh Pasal 22/26	29,537,129		5,516,900	33,054,001	
PBB	2,349,631,438	-	364,605,300	2,979,490,980	39,635,571
Dana Bagi Hasil	2,207,451,938	-	227,478,200	2,979,170,795	-
Bagian Daerah Migas	108,311,044		111,809,300	-	3,668,836
Bagian Daerah Non Migas	681,725,417		11,077,300	664,875,945	
Bagian Daerah Pasal Unit			-	-	
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-		-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-			-
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	215,184,207		9,513,100	918,461,307	
Bagian Pertambangan Migas	1,911,054		4,201,600	-	140,218
Dana Perimbangan Non Kasus	25,105,252	-	-55,400	25,119,852	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-			-
Bagian Pertambangan Pertambangan				-	
Bagian Pertambangan Perkebunan			-		
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	8,084,776	-	333,100	7,751,276	-
DAK	4,028	-		2,028	-
DTA	11,730,077,217		701,581,100	12,940,943,617	198,356,415
Migas				-	
Minyak Bumi 0,1%			-		
Minyak Bumi 0,2%	-	-	-		-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Gas Bumi 3%	-			-	-
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Minerba	40,998,078,095	-	-97,787,605	30,530,249,381	
Landrent	104,201,499	-	-1,469,700	109,265,196	-
Royalti	-(9,431,840,510)	-	143,113,071	31,960,022,292	-
Iuran Tetap	-			-	-
Iuran Produksi				-	
Iuran Eksplorasi		-	-		
Setoran Sisa/Lebih Perusahaan		-	-		
Kehutanan	16,707,78	-	8,307,678	13,307,191	-
DR	-			-	-
PSDH			-		-
PSDH	13,777,09	-	8,993,682	18,307,731	-
Perikanan	120,[illegible]20	-	358,710,575		138,296,445
Grand Total	48,84[illegible]825,804		[illegible]2,072,739	71,081,824,871	363,[illegible]5,7

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Buton Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	LB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 27/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-			-
PPh:				-	-
PPh Pasal 21				-	
PPh Pasal 22/26			-	-	
PBB	-	-	-		
Bagi Dua	-	-	-		-
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas				-	
Dasar Pengenaan Pajak Jasa			-	-	
Dasar Pengenaan Pajak Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Pajak Migas	-	-			-
Bagian Daerah Pajak Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-			-
Biaya Pemungutan Pertambangan				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-		
CHT	-	-			-
SDA		2.038.885	8.504.601	950.460	9.554.141
Migas				-	
Minyak Bumi 15%			-	-	
Minyak Bumi 3,5%	-	-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Bumi 15%					-
Gas Bumi 10,5%				-	-
Gas Bumi dalam rangka Otsus				-	
Pertambangan				-	
Landrent	-	-	-		
Royalti	-	-			
Panas Bumi					-
Iuran Eksplorasi				-	-
Iuran tetap			-	-	
Pendapatan Bagian Pemerintah	-	-	-		
Kehutanan	-	2.038.885	8.504.601	950.460	9.554.141
DR				-	-
IUPHH			-	-	
PSDH	-	2.038.885	8.504.601	950.460	9.554.141
Dana Reboisasi	-	-			
Perikanan	-	2.038.885	8.504.601	950.460	9.554.141

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Hulu Sungai Selatan

(Dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Defisit TA 2020	LB Deficit TA 2020	Tambahan DBH Semester I TA 2020 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	ALOKASI 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	3.450.365.425	-	636.038.102	2.781.291.107	- 866.841
PPh	762.333.00	-	281.791.300	480.526.721	-
PPh Pasal 21	57 - 953.074		210.079.107	-49.501.857	
PPh Pasal 25/29	37.370.737		6.371.900	51.026.947	
PBB	2.371.010.014		374.940.500	2.360.008.115	7.853.341
Hasil Rokok	2.291.551.953	-	327.478.700	2.070.172.705	-
Bagian Daerah Migas	129.592.047	-	18.513.597.200		4.686.158
Bagian Daerah Non Migas	15.602.451		226.200	1.452.53	
Bagian Daerah Pasal Buruh			-	-	
Bagian Daerah Pertambangan			-		
Bagian Daerah Perkebunan	-				-
Bagian Daerah Kurang Lebihnya	715.505.207		8.607.320	306.964.707	
Bagian Pemerintah Migas	4.773.312		5.000.720	-	2.11.632
Bagian Pemerintah Non Migas	589.101	-	7.220	365.361	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-			-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-			-
Bagian Pertambangan Panas Bumi			-		-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	3.085.179		327.503	7.752.679	-
CHT	2.026	-		2.028	-
SDA	15.519.05 .73	103.217.030	780.783.900	28.124.020.601	315.393.020
Migas				-	
Minyak Bumi (15%)			-	-	
Minyak Bumi (0,5%)		-	-		-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Bumi (70%)	-	-			-
Gas Bumi (3,5%)				-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	
Minerba	20.630.0 .0.370	103.21 .960	449.962.776	26.714.101.370	117.139.975
Panas Bumi		103.21 .960	12.941.376		117.139.975
Royalti	26.850.150.172	-	486.241.200	20.214.101.070	-
Pajak Daerah	-	-			-
Pajak Reklame	-			-	
Pajak Hotel			-	-	
Pajak Restoran			-		
Kehutanan	13.727.06	-	8.736.630	10.001.101	-
IHPH	-	-		-	-
PSDH			-	-	
Pungutan	18.707.081		3.203.650	10.304.431	-
Perikanan	107.15 - 100	-	308.100.575		153.536.445
Grand Total	30.750 - 7.924	013 .950	1 .13.722.050	29.035.050.985	370.470.791

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Bali

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4]-[5]
Pajak	-	-	378.448.858	73.687.608	352.760.272
PPh	-	-	347.981.827	73.687.608	267.290.159
PPh Pasal 21	-	-			-
PPh Pasal 25/29	-		342.889.42	10.598.660	267.290.159
PBB			35.558.511	-	34.738.511
Bagi Rata			-	-	
Bagian Daerah Migas	-	-			
Bagian Daerah Non Migas	-	-			-
Bagian Daerah Pajak Bumi	-			-	-
Bagian Daerah Perkebunan				-	
Bagian Daerah Kehutanan			34.537.316		31.393.319
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-			-
Biaya Pemungutan Migas				-	-
Biaya Pemungutan Non Migas				-	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi			-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Pertambangan			961.192	-	961.192
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya				-	
Cukai		-	-		
SDA	-	-	-		
Migas	-	-			-
Minyak Bumi 15%	-			-	-
Minyak Bumi 0,5%				-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Minerba				-	-
Pertambangan				-	
Panas Bumi			-		
Pertambangan	-	-	-		
Perikanan	-			-	-
Kehutanan				-	-
Reboisasi		-	-		
PNBP	-	-	-		
PPh 21	-				-
PPh 25				-	-
Kehutanan			-	-	
Jumlah Total	-	-	378.448.858	73.687.608	352.760.272

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Bali

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Dalam APBN TA 2020	LB Dalam APBN TA 2020	Penyaluran (KB - LB) Sesuai Surat PA 2020 (SAKTI No. 37/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10=7-9)	(11)
Pajak	31.820.090.309		30.120.991.594	20.465.211.184	7.718.770
PPh	54.930.060.194		32.64_.994(e)	31.887.067.138	
PPh Pasal 21	-6.[illegible].599.647	-	39.745.557.702	13.371.876.547	
PPh Pasal 25/29	6.791.-60.357	-	2.883.770.892	3.923.714.237	-
PBB	569.679.853	-	314.315.300	250.[illegible].721	7.718.469
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				-	-
Bagian Daerah Migas	323.[illegible].030		270.244.300	-	53.[illegible].61
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Bersama Bumi	27.483.342	-	11.475.500	11.007.672	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak	-				-
Bagian Daerah Pertambangan Gas	61.112.[illegible]		23.950.500	37.161.536	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	19[illegible].720.366	-	37.152.500	424.[illegible].169	
Biaya Pemungutan Migas	6.[illegible].595	-	6.403.020		391.[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	-				-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	6.[illegible].960		333.450	115.560	-
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	- 780.867	-	748.800	1.032.067	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	12.814.795	-	1.[illegible].050	11.[illegible].960	-
CHT	292.[illegible].110		210.[illegible].034	82.[illegible].076	
SDA			-	-	
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 85%	-	-	-		-
Minyak Bumi 0,5%	-			-	-
Minyak Bumi Dalam Kontrak Operasi				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	
Gas Bumi 0,5%		-	-		
Gas Bumi dalam Kontrak Operasi	-	-	-		
Pertambangan	-	-			-
Panas Bumi	-			-	-
Sektor Kehutanan			-	-	
Sektor Lainnya	-	-	-		-
Setoran Bagian Pemerintah	-				-
Perikanan				-	
PBB		-	-	-	
PDRD	-	-	-		
PBHTI	-				-
Perikanan				-	-
Grand Total	32.[illegible].090.309		30.[illegible].994.394	20.465.2[illegible].174	7.718.770

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bandung

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2019	KB TA 2018	LB s.d TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (SMS No. S-7/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (SMS No. S-7/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			297.528.792	148.065.396	149.463.396
PPh			297.528.792	148.065.396	149.463.396
PPh Pasal 21	-	-	-		
PPh Pasal 22/29	-	-	297.926.792	148.963.396	149.963.396
PBB	-			-	-
Bagi Rata				-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Penerimaan Pajak Bumi	-	-			-
Bagian Daerah Pertambangan	-				-
Bagian Daerah Perkebunan				-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-		
Bagian Pemerintah Migas	-	-		-	-
Bagian Pemerintah Non Migas				-	-
Bagian Pemanfaatan Pajak Bumi				-	
Bagian Pemanfaatan Perkebunan		-	-		
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-			-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya (BPHTB)	-			-	-
Cukai			-	-	
Migas	-	-			
Minyak Bumi 15%	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	
Gas Alam 30%			-	-	
Gas Alam 0,5%	-	-	-		-
Gas Alam dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Panas Bumi	-	-			-
Tambahan				-	-
Royalti				-	
Pasal Alam:			-	-	
Jenis Produksi	-	-	-		
Jenis Hasil	-	-			-
Kehutanan Reguler Tunggul (IHH)	-				-
Kelautan Perikanan				-	
DR			-	-	
LLAJ	-	-			-
PBTT	-				-
Pertambangan				-	-
Grand Total:			297.528.792	148.065.396	149.463.396

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bandung (dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH 2021 Berdasarkan PMK 3/KM.7/2021	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)-(4)	(6)
Pajak	10.780.126.159		14.236.648.568	2.439.168.757	2.894.106
DBH	8.340.936.535	-	13.874.327.200	2.497.035.730	
PPh Pasal 21	6.611.857.184	-	12.097.575.905	1.021.212.479	-
PPh Pasal 25/29	1.758.819.067	-	887.200.748	911.521.251	-
PBB	2.311.198.017	-	370.321.100	1.940.396.953	2.894.106
Local Naba	1.981.956.956		205.659.402	1.776.370.202	
Bagian Daerah Migas	60.619.917	-	33.434.102	-	2.894.106
Bagian Daerah Non Migas	-	-		-	-
Bagian Daerah Pasal 21	2.468.147	-	2.491.000	-	22.853
Bagian Daerah Perforasian				-	
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	
Bagian Daerah Sumber Daya Alamnya	2.585.007	-	3.628.500	208.034.507	-
Biaya Pemungutan Migas	3.100.800	-	3.210.600	-	109.800
Biaya Pemungutan Non Migas				-	
Biaya Pemungutan Pasal Dalam	60.214		76.930	1.914	
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perforasian	-				-
Biaya Pemungutan Sumber Daya Alamnya	7.151.857		294.720	7.185.137	
CHT	61.991.507		58.651.768	28.731.740	
SDA	59.436.582	-	116.781.030		157.654.020
Migas	-	-			-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%				-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	
Gas Bumi 69%		-		-	
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Minerba				-	-
Panas Bumi			-	-	
Kehutanan					
Perikanan	-	-	-	-	
Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Pertambangan Panas Bumi	-				-
Kelautan dan Perikanan				-	
PNBP	-				-
IHPHT	-				-
PHPDH				-	
Perikanan	139.186.890		316.630.300	-	37.807.020
Grand Total	18.912.676.439	-	14.428.727.537	4.390.163.537	195.805.172

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bungli (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 9/PM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 9/PM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4+5)
Pajak			1.293.750	318.744	1.274.976
PPh	-	-	-		
PPh Pasal 21	-	-	-		-
PPh Pasal 25/29 Migas	-	-	-		-
			1.293.750	318.744	1.274.976
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				-	
Bagian Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	1.293.750	318.744	1.274.976
Bagian Daerah Pajak Lainnya				-	-
Bagian Daerah Perbatasan				-	
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-	-		
Biaya Pemungutan Migas	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Non Migas				-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah			99.600	-	99.600
Biaya Pemungutan Perbatasan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21				-	-
CHT			-	-	
SDA			-		
Migas	-	-		-	-
Minyak Bumi 15%	-	-		-	-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus			-	-	
Gas Bumi 15%		-	-		
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah	-	-			-
Pertambangan Minyak	-			-	-
Pertambangan Gas Bumi				-	-
Royalti				-	
Panas Bumi		-	-		
Iuran Produksi	-	-	-		
Iuran Tetap		-	-		-
Bonus Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan			-	-	
DR	-	-	-		
PSDH	-	-			-
PNBP Penghutanan				-	-
Grand Total	-	-	1.293.750	318.744	1.274.976

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bangli

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Tahun TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang Belum Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Pajak	6.206.479.310		2.174.352.927	4.032.126.383	73.965.507
PBB	4.377.363.492		2.116.099.302	2.091.696.190	
PBB Pasal 21	2.502.098.670		2.216.621.700	1.497.770.576	
PBB Pasal 25/29	617.975.010	-	330.081.460	- 3.855.316	
BPHTB	2.251.853.171	-	836.251.200	1.941.730.139	42.913.607
Pajak Rokok	1.901.030.038	-	957.649.708	1.721.270.295	-
Bagian Daerah Migas	36.223.511		50.072.300		22.116.459
Bagian Daerah Dari Migas				-	
Bagian Daerah Pajak Lain	178.365	-	530.300	46.565	
Bagian Daerah Dari Lainnya	-	-	-		-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-				-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	216.599.307		8.631.200	916.394.707	
Jasa Pertanggungan Migas	1.251.962	-	2.058.200	-	797.238
Jasa Pertanggungan Non Migas	-	-	-		-
Biaya Pertanggungan Panas Bumi	20.134		14.350	1.284	-
Biaya Pertanggungan Pertambangan				-	
Biaya Pertanggungan Perbendaharaan		-	-	-	
Biaya Pertanggungan Sektor Lainnya	7.436.084	-	268.850	7.187.234	-
CHT	42.073.000		30.361.427	11.900.999	-
DBH	150.156.080		910.251.000	-	137.694.920
Migas			-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-		-
Minyak Bumi Bagian Daerah	-				-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	
Minerba	-	-	-		-
Landrent	-	-	-		-
Royalti	-	-	-		-
Panas Bumi				-	-
Iuran Produksi				-	-
Iuran tetap		-	-	-	
Kehutanan Bagian Pemerintah	-	-	-		
Perikanan	-				-
PSDH				-	-
DR				-	-
IUPHH		-	-	-	
PSDH	-	-	-		
Perikanan	150.156.080	-	370.581.000		137.694.920
Cukai Hasil	7.003.662.090		3.102.205.227	4.044.200.459	160.637.527

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Buleleng

(dalam rupiah)

JENIS DBH	ME TA 2018	ME TA 2019	LRA s.d TA 2019 (PMK No. 28/PMK.07/2021)	Penyaluran s.d TA (a) - b (PMK No. 8/KM.7/2021)	Sisa LB / d TA 2019 (PMK No. 8/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] - [5]
DBH	-	-	65.580.184	26.235.674	39.344.510
PPh	-	-	35.603.661		35.603.661
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 22/26			35.603.661	-	35.603.661
PBB			29.976.523	26.738.674	3.237.849
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Panas Bumi				-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya			21.525.693	21.525.693	-
Biaya Pemungutan Migas				-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	803.730	803.730	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-			-
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			1.366.830	528.81	837.849
DAK	-	-	-		
DTA	-	-			
Migas					-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus	-	-	-		-
Gas Bumi 15%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%		-			-
Gas Bumi dari Wilayah Kerja Khusus					-
Minerba				-	-
Landrent			-	-	
Royalti	-	-	-		
Panas Bumi	-	-			
Iuran Produksi	-	-			-
Iuran Tetap				-	-
Sebesar Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan	-	-	-		
PSDH	-	-			-
DR					-
PHPB				-	
Pasut				-	
Perikanan	-	-	-	-	
Grand Total	-	-	65.580.184	26.235.674	39.344.510

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bulelong

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	KB Definitif TA 2021	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	7.772.072.825		7.410.772.251	4.374.005.810	7.809.120
PPh	6.251.013.027		3.976.952.700	2.476.085.027	
PPh Pasal 21	1.052.077.477		3.510.904.400	1.041.827.077	
PPh Pasal 25/29	199.569.650	-	335.457.600	(63.217.950)	-
PBB	3.191.399.184	-	470.457.300	1.931.826.313	4.809.120
Dana Bagi Hasil	30.953.068	-	267.080.700	1.125.210.286	-
Bagian Daerah Hasil Migas	137.972.047		102.020.500	-	1.584.253
Bagian Daerah Non Migas			-		
Bagian Daerah Pasca Bumi	12.295.520	-	5.670.500	6.711.020	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-			-
Bagian Daerah Perikanan	98.206.160		1.782.670	15.007.280	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	105.121.307		81.772.230	76.403.607	
Biaya Pemungutan Migas	6.126.920	-	5.951.620		219.676
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Pasca Bumi	435.010		101.500	336.510	
Biaya Pemungutan Pertambangan			-	-	
Biaya Pemungutan Perikanan	1.132.160	-	251.300	774.186	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.879.704	-	773.900	6.126.221	-
Cukai	131.570.62		91.109.301	32.130.779	
SDA	150.150.990		110.851.700	-	27.607.020
Migas			-		
Minyak Bumi 15%		-	-		-
Minyak Bumi 0,5%	-	-			-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 30%				-	
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Minerba		-			-
Landrent	-	-			-
Royalti	-	-		-	-
Panas Bumi				-	
Iuran Tetap			-	-	
Iuran Eksplorasi		-	-		-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-			-
Kehutanan	-			-	
PSDH			-	-	
DR		-	-		
Perikanan	-	-			-
Pungut Total	133.186.060	-	111.881.030	-	157.634.020
	5.9 [illegible] 170.272		1.12[illegible]	4.374.205.8[illegible]	172.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Gianyar (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	2.349.200	979.680	1.369.520
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	2.349.200	979.680	1.369.520
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	2.212.400	979.680	1.232.720
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	136.800	-	136.800
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	-	-	-	-
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	-	2.349.200	979.680	1.369.520

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gunungan (dalam rupiah)

JENIS DBH	(1)	(2)	(3)	(4) (5)-(6)	(7)
	Alokasi DBH TA 2020	Realisasi DBH TA 2020	Penyaluran DBH sampai dengan Desember TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2020)	Kurang Salur DBH TA 2020 yang belum disalurkan	Lebih Salur DBH TA 2020 yang telah diperhitungkan
Pajak	8.936.435.636	-	4.736.702.163	4.199.733.473	3.027.859
PPh	5.018.640.038	-	3.781.813.260	2.136.827.251	-
PPh Pasal 21	3.857.464.039		3.321.127.401	1.062.374.236	-
PPh Pasal 25/29	526.184.042		135.291.859	91.839.643	
PBB	2.610.227.129		576.165.801	1.089.896.307	3.027.038
Bea Bea	1.951.919.958	-	955.888.903	1.976.370.208	
Denda Daerah Pajak	9.156.37	-	37.026.403		3.970.29
Bagian Daerah Pajak	-				-
Bagian Daerah Bea Bea	1.070.078		1.098.307	-	28.022
Bagian Daerah Perhutanan			-	-	
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	2.5.263.007		8.823.800	206.581.207	-
Biaya Pemungutan Pajak	3.251.093		3.013.305	-	137.807
Biaya Pemungutan Bea Balas			-	-	
Biaya Pemungutan Bea Balas	30.460	-	58.000	41.8	
Biaya Pemungutan Perkebunan	-		-		-
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.176.621		305.620	5.143.634	
DAU	99.5-9.415	-	43.931.138	10.025.222	-
DAK	89. 86.130	-	810.281.030		157.934.020
Migas	-			-	-
Minyak Bumi 15%			-	-	
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Alokasi Bumi Bagian 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 69%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%	-				-
Gas Bumi Bagian Pengelola Migas	-			-	-
Minerba				-	
Iuran Tetap		-	-	-	
Royalti		-	-		
Pajak Lain	-	-			-
Iuran Perikanan	-	-		-	-
Iuran Hasil				-	-
Sekolah Kedinasan			-	-	
Kehutanan	-	-	-		
DR	-	-			-
PSDH				-	-
Perikanan	199.166.990	-	316.83 .502		57.392.020
Grand Total	9.466.602.615	-	4.783.283.102	1.112 .61.030	160.751.969

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Jeneponto (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2017 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak	-	-	401.211.134	787.903.331	289.847.773
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-		-	-
PPh Pasal 25/29	-	-		-	-
PBB			401.211.134	20.363.331	289.847.773
Bagi Rata			-	-	-
Bagian Daerah Kota	-	-	-		-
Bagian Daerah Kab/Kota	-	-			-
Bagian Daerah Provinsi				-	-
Bagian Daerah Kabupaten				-	-
Bagian Daerah Perdesaan		-	380.848.340	170.363.331	300.182.011
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			-
Biaya Pemungutan Migas	-			-	-
Biaya Pemungutan Sektor Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Jalan			-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-			-
Biaya Pemungutan Perkebunan			20.000.772	-	20.665.762
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya				-	
Cukai		-	-	-	
SDA	-	-	-	-	-
Migas	-	-			-
Minyak Bumi 15%				-	
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Migas					
Gas Bumi 30%	-	-	-		-
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi Dalam Rangka Migas	-	-			-
Pertambangan				-	-
Landrent			-	-	
Royalti			-	-	
Pajak Lain	-	-	-		
Jasa Produksi	-	-		-	-
Pungutan	-			-	-
Pungutan Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan				-	
DR	-	-			-
PSDH	-		-	-	-
Perikanan			-	-	
Grand Total	-	-	421.211.134	808.266.662	289.847.773

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Jembrana

(dalam rupiah)

JENIS DAU	DU Definitif TA 2020	DU Tertib (TA 2020)	Perubahan DU TA 2021 Berdasarkan KMK No. 5/KM.7/2021	DBHTA 2020 yang telah dialokasikan	DBHTA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(10=7+8+9)	(11)
Pajak	7.767.131.972		211.533.521	4.946.646.643	55.484.211
PBB	4.710.870.000		3.502.409.500	3.838.887.700	
PBB Pasal 21	1.103.002.061		1.499.378.700	857.225.857	-
PPh Pasal 22/29	613.206.906	-	220.110.500	251.532.139	-
BPHTB	3.453.215.733	-	760.612.000	1.971.191.217	25.858.384
Cukai Tanah	1.091.950.309		201.000.000	1.128.210.986	
Bagian Daerah Pajak Lainnya	75.035.900		56.979.000	-	21.942.307
Bagian Daerah Sda Migas			-		-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-		-		-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-			-
Bagian Daerah Pajak Daerah	150.715.014		105.512.450	- 553.944	-
Bagian Daerah Sda Migas	211.861.837		1.444.000	220.367.107	-
Biaya Pemungutan Migas	1.496.115	-	2.333.600		837.485
Biaya Pemungutan Sda Migas	-	-		-	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-			-	
Biaya Pemungutan Pbb Perdesaan			-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	4.296.414	-	5.775.500	2.022.941	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.354.371	-	307.200	5.057.629	-
DTT	89.943.900		20.134.127	1.075.637	
DBH	1.911.161.000		1.153.991.000	-	137.081.020
Migas		-	-		-
Kehutanan Dalam 10%	-	-	-		-
Kehutanan Dalam 0,64	-	-		-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 50%				-	-
Gas Bumi 0,5%			-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			-
Kehutanan	-	-			-
Perikanan	-	-		-	-
Pertambangan	-			-	-
Iuran Eksploitasi			-		
Iuran Tetap			-	-	-
Pertambangan Panas Bumi	-	-			-
Pertambangan	-			-	-
DR			-	-	
DAK Fisik		-	-		-
DAK Non Fisik	-	-			-
Pertambangan	120.780.880		210.851.000	-	137.697.020
Grand Total	7.327.313.933		3.454.700.527	- 0.646.943	193.231.011

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kutai Kartanegara (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)	LB s.d TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	28.825.678	7.117.697	21.707.981
PBB	-	-	28.825.678	7.117.697	21.707.981
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	28.825.678	7.147.697	16.677.981
PBB	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Batubara	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PPh Pasal 26	-	-	-	-	-
PPh Pasal 4 ayat (2)	-	-	-	-	-
PPh Pasal 15	-	-	-	-	-
PPh Pasal 22	-	-	-	-	-
PPh Pasal 23	-	-	-	-	-
PPh Pasal 26	-	-	-	-	-
PPh Pasal 4 ayat (2)	-	-	-	-	-
PPh Pasal 15	-	-	-	-	-
PPh Pasal 22	-	-	-	-	-
PPh Pasal 23	-	-	-	-	-
Grand Total	-	-	28.825.678	7.117.697	16.677.981

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kanangasem

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PK Tahun 2020	LKPP Tahun 2020	Penyaluran DBH Tahun 2021 (PMK No. 37/KM.7/2021)	ATTA 2020 yang Telah Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Pajak	7.106.469.065		3.196.920.825	3.773.130.475	24.822.136
PBB	1.832.114.212		3.019.660.700	1.752.465.512	
PPh Pasal 21	4.250.210.925		2.852.013.100	1.397.527.836	
PPh Pasal 25/29	279.642.240	-	324.666.300	354.035.874	
PPN	2.327.247.436	-	878.217.100	1.708.852.162	97.032.136
Cukai Rokok	1.701.950.038	-	557.280.700	1.721.210.288	-
Bagian Daerah Migas	46.793.717		90.332.600	-	87.538.158
Bagian Daerah Non Migas			-	-	
Bagian Daerah Pasca Bona		-	-		
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		-
Bagian Daerah Pertambangan	46.293.061		19.210.830	27.082.191	-
Bagian Daerah Pertambangan Lainnya	215.599.007		8.694.500	206.904.707	
Bunga Penerimaan Migas	1.350.317	-	3.147.500	-	1.209.883
Bunga Penerimaan Non Migas	-	-	-		-
Bunga Penerimaan Pasca Bona	-				-
Bunga Penerimaan Perkebunan				-	
Bunga Penerimaan Pertambangan	2.350.413	-	933.600	1.417.142	
Bunga Penerimaan Pertambangan Lainnya	7.436.224	-	207.300	7.187.221	-
PBHT	45.070.215		30.201.324	13.671.091	-
BPHTB	150.180.980		310.881.900	-	157.694.020
Migas			-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-	-		-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 15%				-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	
Mineral	-		-		
Landrent	-	-			-
Royalti	-	-			-
Panas Bumi				-	-
Iuran Produksi			-	-	
Iuran tetap		-	-		
Setoran Bagian Pemerintah	-	-			
Kehutanan					-
PSDH				-	-
DR				-	
IHPH		-	-		
PSDH	-	-	-		-
Perikanan	150.176.080	-	310.881.900		157.694.020
Grand Total	7.453.054.018		3.814.949.621	3.773.130.475	90.510.156

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Klungkung

(dalam rupiah)

JENIS DBH	TA 2016	TA 2019	Usulan TA 2021 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Pengalokasian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KL.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KL.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak					
PPh					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PPN					
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Penghasil Tambahan					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Non Migas					
Bagian Pemerataan Provinsi Bersangkutan					
Bagian Pemerataan Kabupaten/Kota					
Bagian Pemerataan Provinsi Lainnya					
Bagian Pemerataan Kabupaten/Kota Lainnya					
PPh Pasal 22 Impor					
PBB					
Migas					
Minyak Bumi 85%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Tertentu					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pertambangan					
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap					
Bagian Bagian Pemerintah					
Kehutanan					
PSDH					
DR					
Cukai Hasil Tembakau					
Pajak Rokok					

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Klungkung

(dalam rupiah)

URAIAN	KB DefinitifTA 2020	LB DefinitifTA 2020	Perhitungan KB/LB Berdasarkan TA 2020 KMK No. 230/KM.7/2021	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)=(3)-(4)
Pajak	6.575.271.181		2.108.093.725	3.657.905.244	18.732.471
PBB	1.086.277.476		2.593.150.970	507.151.474	
PBB Migas	1.029.955.501	-	2.471.598.500	544.267.024	
PPh Pasal 25/29	57.321.975	-	206.437.500	362.884.474	
BPHTB	2.236.373.758	-	324.652.700	1.911.721.229	18.730.471
Bagi Rata	1.071.330.808		265.189.700	1.726.279.298	-
Bagian Daerah Migas	30.290.321		76.275.350	-	13.070.979
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Perkebunan	-	-			-
Bagian Daerah Perkehutanan				-	-
Bagian Daerah Selisih Lebihnya	213.080.077		5.091.703	264.044.707	
Dana Perimbangan Lainnya	105.405	-	1.685.405	-	582.492
Dana Perimbangan Non Migas	-	-	-		-
Dana Perimbangan Pajak Rokok			-		-
Dana Perimbangan Perkebunan			-	-	
Dana Perimbangan Perkehutanan	-	-	-		
Dana Perimbangan Selisih Lebihnya	7.486.815-	-	258.830	7.157.027	-
DBH	30.617.747		28.259.225	15.034.529	-
DAU	149.189.963		178.961.000	-	157.074.026
Migas		-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-	-			-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Offshore				-	-
Gas Alam 0,5%				-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minyak Bumi	-	-	-		
Panas Bumi	-	-			-
Migas Hulu					-
Pertambangan Umum				-	-
Kehutanan	-	-	-		
Perikanan	-	-	-		
Pertambangan Minyak Bumi				-	
Pertambangan Gas Bumi				-	-
Pertambangan Panas Bumi	-	-			-
DR			-	-	
DAK		-		-	
DBHCT	-	-			-
Perseorangan	135.180.780		310.851.009		57.690.051
Grand Total	7.037.135.161		3.056.971.108	3.857.928.544	176.405.701

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tabanan

(dalam rupiah)

URAIAN (1)	KURANG BAYAR TA 2019 (2)	KURANG BAYAR TA 2019 (3)	LEBIH BAYAR s.d TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021) (4)	Perkembangan LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021) (5)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021) (6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	72.790.065	11.148.195	61.641.870
PBB			72.790.065	11.148.195	61.641.870
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29				14.156.163	14.156.163
BPHTB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-		
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Dana Reboisasi			-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-		
Bagian Daerah Bukan Penghasil	-	-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Bagian Pemerintahan Kurang				-	-
Bagian Pemerintahan Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintahan Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Pemerintahan Pertambangan					-
Bagian Pemerintahan Perkebunan				-	-
Bagian Pemerintahan Sektor Lainnya	-	-	-	-	
CHT	-	-	-	-	
DBH					-
Migas					-
Migas Pasal 15%			-	-	-
Migas Pasal 3,5%	-	-	-	-	
Migas Pasal 0,5% Bagian Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi 0,1%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba			-	-	-
Landrent	-	-	-	-	
Royalti	-	-	-		
Panas Bumi					
Bunga Produksi					-
Jaminan Setor				-	-
Sanksi Bayar Pemerintah	-	-	-	-	
Kehutanan	-	-	-		
DR					
IHPHTI				-	-
PSDH	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-		
Cukai Tembakau			72.790.065	11.148.195	61.641.870

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tabanan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Pengalokasian KB DBH Semester II TA 2020 (ADK No. 17/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	9.720.150.162	-	3.720.416.708	4.307.735.172	1.978.998
PBB	5.767.129.569	-	3.350.097.200	2.306.077.120	-
PBB Migas 12%	4.345.003.173	-	2.070.585.200	1.891.015.973	-
PBB Migas 88%	717.151.476	-	310.689.305	405.461.616	-
BPHTB	2.305.102.473	-	411.239.295	895.179.61	2.978.998
Pajak Rokok	1.951.020.593		266.089.700	736.270.076	
Bagian Daerah Migas	93.309.197	-	64.750.500		2.941.500
Bagian Daerah Non Migas	-	-			-
Bagian Daerah Bersama Migas	76.468.302		3.220.050	3.137.280	-
Bagian Daerah Bersama Non Migas				-	
Bagian Daerah Pertambangan		-	-		
Bagian Daerah Bersama Lainnya	316.999.201	-	3.604.800	230.901.707	-
Biaya Pemungutan Migas	8.726.705		3.363.750	-	37.405
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	27.50.523		293.361	1.535.722	
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-			-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-			-	-
Biaya Pemungutan Bukan Pajak Migas	7.750.024		299.092	7.437.724	
DBH	98.500.750	-	45.105.508	76.751.232	
KDH	194.195.990	-	81.683.200		57.694.020
Migas	-	-			-
Minyak Bumi 15%	-			-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Gas Bumi 30%			-		-
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Minyak	-			-	-
Pertambangan			-	-	
Perikanan			-	-	
Pertambangan Panas Bumi		-	-		
Kehutanan	-	-			-
Pertambangan	-	-		-	-
Pertambangan Minyak				-	
Pertambangan Gas	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-		-	-
PPh Pasal 25/29			-	-	
Perikanan	109.160.990		53.861.000	-	127.694.020
Grand Total	9.979.307.142	-	4.038.997.708	4.307.735.172	162.973.018

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Denpasar

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 65/PMK.07/2019)	Penyesuaian TA s.d. TA 2019 (SMS No. S-7830/PK/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMS No. S-7830/PK/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	2.178.676.384	435.735.277	1.742.941.107
PPh	-	-	2.178.676.384	435.735.277	1.742.941.107
PPh Pasal 21	-	-	1.621.261.302	435.735.277	1.185.526.025
PPh Pasal 25/29	-	-	557.415.082	-	557.415.082
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Aceh	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Aceh	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Papua Barat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kalimantan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Bagi Penerimaan Migas	-	-	-	-	-
Bagi Penerimaan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagi Penerimaan Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagi Penerimaan Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagi Penerimaan Perikanan	-	-	-	-	-
Bagi Penerimaan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	-	-	-	-
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH DR	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Cukai Tembakau	-	-	2.178.676.384	435.735.277	1.742.941.107

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Denpasar

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Sebelum TA 2020	LB Sebelum TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (PMK No. 7/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum Disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[7]	[8]	[9]	[10]=[7]-[9]	[11]
PPh	53.737.583.375	-	5.050.608.244	48.686.975.131	3.644.436
PPN	31.987.850.772	-	14.463.025.700	16.821.727.621	-
PPh Pasal 21	27.003.872.850		12.838.081.100	14.165.791.750	-
PPh Pasal 25/29	3.383.829.095		1.527.961.600	1.855.867.495	
PBB	2.208.121.421		496.981.900	1.707.139.521	3.641.436
Bea Meterai	1.391.909.999		265.699.700	1.126.210.299	
Bagian Daerah Migas	115.368.909	-	118.840.800		3.471.891
Bagian Daerah Non Migas	-				-
Bagian Daerah Pajak Rokok				-	
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	7.500.707	-	62.737.400	70.238.107	-
Biaya Pemungutan Migas	3.913.281		4.181.800	-	268.519
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-		
Biaya Pemungutan PBB Perdesaan	-	-			-
Biaya Pemungutan PBB Sektor Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	4.944.124		2.213.500	2.730.624	
Cukai	16.620.837	-	130.382.424	51.238.587	-
Rokok	159.186.080	-	316.581.200		157.395.120
Migas				-	-
Minyak Bumi 15%				-	
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Gas Bumi 30%	-	-		-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Mineral				-	
Landrent			-	-	
Royalti		-	-		
Panas Bumi	-	-			-
Iuran Tetap Jasa	-	-			-
Iuran Eksploitasi				-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan		-	-		
PSDH	-	-			-
DR	-			-	-
IHPH			-	-	
Perikanan	159.161.969	-	3.681.600		157.091.025
Grand Total	53.886.977.369	-	15.207.770.024	18.689.204.213	161.536.428

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Nusa Tenggara Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 20[illegible]	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2020)	Penyaluran LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak					
PBB					
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBNB					
Bagi Hasil Panas Bumi					
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Hutan					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bunga Pinjaman Migas					
Bunga Pinjaman Non Migas					
Bunga Pinjaman Panas Bumi					
Bunga Pengusahaan Perbatubaraan					
Bunga Pengusahaan Perbatubaraan					
Bunga Pengusahaan Kehutanan					
PBB					
Migas		134.620.24[illegible]	10.926.845.[illegible]	-785.369.765	11.711.[illegible]0.682
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Hasil Pengolahan					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Perikanan			25.[illegible]6.613.827	4.7[illegible]9.765	9.141.476.062
Pertambangan			36.[illegible]1.613.827	-785.369.765	11.141.[illegible]0.682
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran tetap					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		124.620.241			
IHPH		123.096.[illegible]49			
PSDH		2.718			
DR		1.520.074			
Perikanan					
Grand Total		124.620.241	10.926.845.827	-785.369.765	11.711.[illegible]0.682

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Nusa Tenggara Barat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PB Tahun Berjalan (TA 2021)	PB Tahun lalu (TA 2020)	Penyaluran PB Tahun lalu TA 2020 (sesuai SP2D/SAP/SAKTI)	PB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	38.871.273.036		24.340.792.407	1.051.170.201	120.693.262
SDA	18.330.611.037	-	5.240.496.500	3.050.113.737	-
PPh Pasal 21	16.961.391.220	-	5.668.670.502	1.713.750.122	-
PPh Pasal 25/29	1.367.284.114	-	350.838.998	1.073.395.514	-
PBB	5.574.503.610		874.021.105	461.051.774	120.513.262
Dana Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas	168.203.708		268.912.600		99.509.892
Bagian Daerah Sda Migas	1.619.901.307	-	504.277.500	4.115.361.307	-
Bagian Daerah Pajak Dana	-	-		-	-
Bagian Daerah Pertimbangan	15.606.804		32.897.200	-	17.277.396
Bagian Daerah Pph Pasal 21	96.687.359		11.949.200	84.635.179	
Bagian Daerah Pasal Lainnya	520.974.218	-	38.145.500	482.718.218	-
Biaya Pemungutan Migas	4.617.848	-	7.705.400		3.677.731
Biaya Pemungutan Non Migas	28.504.888		11.226.250	114.476.638	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah			-		
Biaya Pemungutan Pbb	135.827	-	515.200		479.645
Biaya Pemungutan Pertambangan	2.741.581	-	322.700	2.518.881	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	468.048		976.500	1.444.548	
DAU	1.397.850.580		9.210.241.407	5.187.058.873	
DAK	37.722.610.705	503.709.754	5.240.504.625	32.037.878.705	113.513.659
Migas		-			
Minyak Bumi 15%	-	-		-	
Minyak Bumi 0,5%	-			-	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus			-	-	
Gas Bumi 30%			-		
Gas Bumi 70%		-	-		
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus		-	-		
Minerba	35.936.094.111	330.709.754	5.187.041.725	31.080.147.565	72.316.029
Landrent	-	330.709.754	205.766.875	-	72.316.029
Royalti	35.936.094.111		4.981.274.850	31.804.147.565	
Dana Otsus			-		
Dana Reboisasi		-	-		
Dana Reboisasi	-	-		-	
Sebesar Dengan Perimbangan	-			-	
Kehutanan	1.136.364.820		102.380.150	1.035.781.250	
PSDA	1.091.211.426	-	77.469.550	973.729.976	-
BLUPH	-	-			-
PSDH	85.153.394		24.910.600	60.042.554	
Perikanan				-	
Grand Total	78.031.032.320	834.419.751	34.631.367.982	43.799.035.041	354.083.951

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. / Kota

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2020	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	8.2[illegible].329.624	[illegible].861.784.145	[illegible].316.034.479
PPh	-	-	8.2[illegible].329.624	[illegible].861.784.145	[illegible].316.034.479
PPh Pasal 21	-	-	8.173.223.199	[illegible].991.956.265	[illegible].179.235.934
PPh Pasal 21/26			57.499.425	-	57.499.425
PPh				-	
Dagi Hasil			-	-	
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas	-	-			-
Bagian Daerah Panas Bumi				-	-
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-		-
Bunga Pemanfaatan Migas				-	-
Bunga Pemanfaatan Non Migas			-	-	
Bunga Pemanfaatan Panas Bumi		-	-		
Bunga Pemanfaatan Pertambangan	-	-			-
Bunga Pemanfaatan Perkebunan				-	-
Bunga Pemanfaatan Sektor Lainnya			-	-	
Cukai	-	-	-		
DBH	-	2.875.209	6.2[illegible].[illegible].[illegible]		6.2[illegible].[illegible].101
Migas					
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus					-
Minerba			6.2[illegible].[illegible].101	-	6.2[illegible].[illegible].101
Landreform			278.[illegible].[illegible]	-	278.[illegible].[illegible]
Kehutanan			[illegible].963.067.773	-	[illegible].963.067.773
Pajak Lain	-	-			
Jasa Perikanan	-	-			-
Laba BUMN				-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan	-	2.875.209	-		
IHT	-	-			-
PHTT				-	-
PBBP		2.[illegible].[illegible]	-	-	
Perikanan		-	-		
Grand Total	-	2.875.209	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bima

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran KB LB Desember TA 2020 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10) (7)-(9)	(11)
Pajak	3.035.722.180	157.077.060	2.723.231.039	2.750.966.079	345.168.049
PBB	327.890.062		1.164.891.705	169.066.205	
PPh Pasal 21	1.191.206.368		1.191.092.505	30.0 -. 37	
PPh Pasal 25/29	136.191.207		27.432.500	136.079.120	
PBB	4.290.120.448	157.077.060	504.774.500	1.902.654.779	245.168.049
Cukai Tmbk	94 656 395	-	203.690.700	1.120.270.299	-
Bagian Daerah Migas	60.127.705		17.010.200	-	5.085.375
Bagian Daerah Non Migas	38.791.337			38 191 387	
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	
Bagian Daerah Perikanan	-	15.557.705	84 717.020		197.075 107
Bagian Daerah Kehutanan	-	18.436.805	19.892.000		33.399 402
Bagian Daerah Sda Lainnya	107.021.037		71.365.030	73.575 007	
Dana Perimbangan Migas	5.810.126		6 260 500	-	577.371
Dana Perimbangan Non Migas	1.326.099	-		1.320.299	-
Dana Perimbangan Pertambangan	-	-			-
Dana Perimbangan Perikanan		4.776.000	0.529 300	-	2.246.300
Dana Perimbangan Kehutanan		897.870	877.900	-	1.070.190
Dana Perimbangan Sda Lainnya	1 551 22-	-	1.639 805	1.291.321	-
DTT	1 348 655 850	-	900.729.139	373.926.071	-
DTE	9.289.702.607	242.359.190	1.007.41 1.502	1 0.4 869.715	386 0 9.727
Migas			-	-	
Minyak Bumi 15%			-	-	
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		-
Minyak Bumi dr Lok. Terapung & Laut	-	-			-
Gas Bumi 30%	-			-	-
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi dalam Rangka CBM			-	-	
Minerba	5.103.090.007	050.606.180	84 685 575	5.090.649.503	729.224.705
Landaan	-	353.659 80	75.645 575		729.224.705
Royalti	5 128 690.035	-	1.139.021.307	5.090.649.503	-
Panas Bumi				-	-
Iuran Produksi				-	-
Iuran tetap			-	-	
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-		
Kehutanan	21 366 694	-	5.866.075	15.169.729	-
DR				-	-
IHPH			-	-	
PSDH	21 366 964	-	5.866.075	15.169.729	
Perikanan	59 186 961	-	2 6 981.030		157.634 (20
Grand Total	13.647.788.736	100 570 383	4.230.720.190	9.4 0.328 091	872.034 774

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Donggala

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	KB TA 2018	KB TA 2019	Lebih TA 2019 (LMK No. S-6/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KYK No. S-553/MK.07/2021)	Sisa Lebih TA 2019 (KYK No. S-553/MK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak	-	-	50.113.796	8.253.415	46.861.381
PPh	-	-			-
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29					-
PBB			60.136.186	9.933.835	50.202.351
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-			-
Bagian Daerah dari Migas					-
Bagian Daerah dari Non Migas					-
Dana Bagi Hasil Pajak Dalam Negeri					-
Dana Bagi Hasil Pajak Perseorangan			-	-	-
Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan	-	-	27.791.070	9.838.935	18.978.135
Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan	-				-
Biaya Pemungutan Migas				-	
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-				-
Biaya Pemungutan Pertambangan			2.823.126	-	2.823.126
Biaya Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		-	-	-	
CHT	-	-	-		
DBH SDA	-	10.260.853	7.159.212.015	1.139.017.691	8.721.224.394
Migas				-	-
Minyak Bumi PPh				-	
Minyak Bumi PPh 22		-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi PPh 22	-	-	-		-
Gas Bumi PPh 25/29					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba			7.159.212.015	1.139.017.691	8.721.224.394
Landrent		-	39.190.351	2.220.073	41.410.424
Royalti	-	-	6.867.441.674	1.187.067.051	8.054.508.725
Dana Reboisasi	-	-			
Iuran Produksi					-
Iuran Tetap				-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan	-	2.260.853	-		-
PSDH	-				-
DBHPH				-	-
PSDH		10.260.853	-	-	
Perikanan	-	-	-		
Grand Total	-	10.260.853	7.209.326.811	1.147.270.926	8.356.597.737

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Donggala

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH 2021 Sebelum PMK 2020 (PMK 39/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)	(6)
Pajak	5.050.000.668	5.798.000	2.036.106.360	2.997.586.307	17.307.692
PBB	1.750.519.567	-	1.130.058.960	620.460.607	
PBB Pasal 31	1.599.435.010	-	1.104.177.900	495.271.110	-
PBB Pasal 25/29	151.056.548	-	25.881.060	125.189.918	-
BPHB	2.651.797.830	5.798.000	424.913.800	2.226.883.030	5.815.084
Sewa Kapal	1.081.999.998		280.000.000	1.726.370.198	
Bagian Daerah Migas	106.776.000	-	109.076.300	-	3.316.077
Bagian Daerah Non Migas	5.009.183	-	18.497.700	3.511.183	
Bagian Daerah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		6.228.000	7.861.900	-	11.482.500
Bagian Daerah Kehutanan	268.317.173		81.673.700	186.643.473	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	715.699.000	-	8.624.900	206.794.237	-
Biaya Pemungutan Migas	3.651.963	-	3.792.930		139.367
Biaya Pemungutan Non Migas	282.827		912.900	189.973	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah			-	-	
Biaya Pemungutan Perhutanan		17.000	26.000		116.000
Biaya Pemungutan Pertambangan	14.025.280	-	1.880.000	12.145.280	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.186.327		298.900	7.131.354	-
DAU	673.379.294		171.731.060	501.648.234	
DAK	8.539.609.197	25.634.656	1.514.328.150	7.001.537.153	30.149.670
Migas	-	-			-
Minyak Bumi (15%)	-	-			-
Minyak Bumi (0,5%)				-	-
Minyak Bumi Bagian Khusan Daerah Otonom			-	-	
Gas Bumi 69%			-	-	
Gas Bumi (0,5%)	-	-	-		-
Gas Bumi Bagian Khusan Daerah Otonom	-	-	-		-
Minerba	2.176.472.383	275.587.960	1.178.030.630	7.001.350.150	375.454.646
Panas Bumi		250.387.294	93.070.520	-	375.454.646
Jumlah	8.113.722.350		1.102.965.150	7.001.557.153	
Pemda Darat			-	-	
Laut Terdekat	-	-	-		
Laut Lainnya	-	-			-
Bagian Bagi Hasil Pemerintah				-	-
Kehutanan		12.170.236	19.511.560	-	98.661.020
DAU		-			
DBHCHT	-	-			-
PBNP		2.110.039	18.011.002	-	30.657.909
Perkebunan	150.186.980		316.861.300	-	37.074.026
Grand Total	13.039.071.847	364.322.010	3.961.034.530	9.193.145.329	719.197.679

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lombok Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2020)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak	-	-	-		-
PPh	-	-	-		-
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29					-
PBB					-
Dari Pusat	-	-	-		-
Bagian Daerah Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Sektor Lain					-
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-		-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Bunga Pertambangan Migas					-
Bagian Pertambangan Non Migas	-	-	-		-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-	-		-
Bagian Pertambangan Perikanan					-
Bunga Pertambangan Pertanahan					-
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	-		-		-
CHT	-	-	-		-
DBH	-	3,893,139	4,835,361,803	(1,715,608,792)	3,119,752,913
Migas					-
Minyak Bumi (15%)					-
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-		-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Gas Bumi (30%)	-	-			
Gas Bumi (0,5%)					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Kehutanan			4,835,361,803	(1,715,608,890)	3,119,752,913
Iuran Hak	-	-	-		-
Provisi	-	-	4,835,361,803	(1,715,608,890)	3,119,752,913
Pajak Bumi	-	-			
Iuran Eksploitasi					-
Iuran Tetap					-
Sektor Lainnya Pemerintah			-		-
Perikanan	-	3,893,139	-		-
DR					-
DAK					-
PSDH	-	3,893,139	-		-
Pertanian	-	-	-		-
Grand Total	-	3,893,139	4,835,361,803	(1,715,608,792)	3,119,752,913

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lombok Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Penyaluran TA 2020	LB Penyaluran TA 2020	Penyaluran KB DBH Setelah Tahun TA 2020 (KMK No. 95/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang telah dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	6.423.928.257	21.341.113	3.818.196.119	2.644.073.837	80.341.776
PPh	2.089.340.832		1.115.286.960	244.075.352	
PPh Pasal 21	1.829.710.960		1.683.109.130	49.607.750	
PPh Pasal 25/29	259.630.936	-	58.196.250	208.307.000	-
PBB	3.383.810.558	9.244.145	307.813.000	1.912.691.029	80.034.776
Cukai Tembakau	1.031.070.598	-	2.185.089.720	1.726.279.260	-
Bagian Daerah Migas	70.025.731		112.193.000	-	11.535.306
Bagian Daerah Sektor Minerba		20.097.032	15.400.500	-	3.770.032
Bagian Daerah Pajak Lain	-	-	-		-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-			-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-			-	
Bagian Daerah Pajak Lainnya	211.710.627		1.106.700	150.551.707	
Bagian Pertimbangan Migas	2.412.000	-	3.508.700		1.496.000
Bagian Pertimbangan Non Migas	-	735.025	535.900		1.242.525
Bagian Pertimbangan Panas Bumi	-			-	-
Bagian Pertimbangan Pertambangan			-	-	
Bagian Pertimbangan Perkebunan		-	-		
Bagian Pertimbangan Sektor Lainnya	7.040.-	-	400.200	6.932.921	-
CHT	2.036.647.-07		1.761.0.9.215	567.788.256	-
SDA	5.301.340.817	2.35-.007	1.491.136.9-6	7.03 .257.397	160.230.002
Migas			-		
Minyak Bumi 15%	-	-	-		-
Minyak Bumi 0,5%	-	-			-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 30%				-	
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Minerba	4.149.-74.803	2.335.047	1.127.135.-75	7.022.511.903	2.512.743
Landrent	-	2.335.067	305.675		2.542.742
Royalti	2.120.67-.803		1.127.132.900	7.022.541.903	-
Panas Bumi				-	
Uap Dialirkan			-	-	
Uap Sendiri			-		
Setoran Bagian Pemerintah	-				-
Kehutanan	15.52 .73-		5.200.150	8.015.-3-	-
PSDH			-	-	
DR		-	-		
Perikanan	15.52 .634	-	6.206.430	9.313.136	-
Pungutan	30.-86.580		310.8s1.900		157.36-.020
Grand Total	14.724.017.936	23.281.212	6.049.329.066	9.675.978 .74	242.271.478

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kec. Jok Tengah

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian (PMK No. 210/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (SMK No. 216/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	1.719.555.462	1.719.555.462	-
PPh			1.719.555.462	1.719.555.462	-
PPh Pasal 21			1.719.555.462	1.719.555.462	-
PPh Pasal 25/29			-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Hasil	-	-			-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Penas Bumi			-		-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		-
Bagian Daerah Pertambangan	-			-	-
Bagian Daerah Bidang Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Migas			-		
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Dana Bumi	-			-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai	-			-	-
SDA		2.846.078	6.365.890.186	594.076.652	5.771.814.534
Migas			-		
Minyak Bumi 15%		-	-		-
Minyak Bumi 0,5%	-	-			-
Minyak Bumi dalam Rangka DMO	-	-		-	-
Gas Bumi 30%	-			-	
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi Bagi Hasil Tambang Panas Bumi			-	-	
Minerba		-	6.365.890.186	593.076.652	5.772.814.534
Royalti	-	-			-
Royalti	-	-	6.365.890.186	593.076.652	5.772.814.534
Dana Bumi				-	
Dana Bagi Hasil			-	-	
Dana Tabg.		-	-		
Setoran Modal Pemerintah		-			-
Kehutanan	-	2.846.078		-	-
IHH				-	
PSDH					
PSDH	-	2.846.078			-
Perikanan	-			-	-
Cukai Tembakau	-	2.846.078	6.365.890.186	2.263.553.014	5.497.203.250

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH TAHUN 2021

Kab. Lombok Tengah

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Definitif TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dilaksanakan	LB TA 2020 yang sudah dilaksanakan
(1)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)
Pajak	1.697.078.774		2.231.900.862	4.968.912.304	8.770.797
PPh	2.393.490.836		1.941.231.902	246.3-6.058	
PPh Pasal 21	2.097.271.093		1.321.095.405	503.875.693	
PPh Pasal 22/26	196.084.785	-	85.-49-03	159.890.365	
PPh	2-79.134.687	-	318.280.502	1.072.590.979	6.729.732
Bagi Hasil	1.201.050.038	-	97.0.389.702	1.128.210.259	-
Bagian Daerah Migas	209.272.035		214.391.700	-	6.402.617
Bagian Daerah Non Migas			-	-	
Bagian Daerah Pasal Dalam	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan	46.501.752	-	7.618.516	38.872.892	-
Bagian Daerah Perkehutanan	-				-
Bagian Daerah Sektor Pertambangan	215.592.087		8.591.530	206.99- 727	
Bagian Penerimaan Migas	7.162.350	-	7-71.930	-	329.148
Bagian Penerimaan Non Migas	-	-	-		-
Bagian Penerimaan Pasal Dalam	-				-
Bagian Penerimaan Perkebunan	1.937.198		361.900	1.585.353	
Bagian Penerimaan Perkehutanan		-	-		
Bagian Penerimaan Sektor Pertambangan	7.486.88-	-	205.360	7.187.226	-
PPN	6.022.47-.725		4.772.201.362	1.850.075.167	-
PPh	8.320.809.667		1.129.691.475	7.03- 989.213	137.901.020
Migas			-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-	-			-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Gas Bumi 15%				-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	
Nonmigas	9.130.240.700	-	1.107.063.550	7.025.143.353	
Listrik	-	-			-
Panas Bumi	8.130.228.703	-	1.107.063.350	7.025.142.353	-
Pertambangan Umum				-	-
Iuran Eksploitasi			-	-	
Iuran Tetap		-	-	-	
Kehutanan	-	-	-		
Reboisasi	17.485.584		5.675.125	11.910.559	-
PSDH				-	
DR		-	-	-	
PSDH	17.485.584	-	5.675.125	11.810.559	-
Perikanan	150.170.080	-	10.591.500		157.634.220
Cukai Tembakau	34.063.072.61-		9.50-.-90.337	1. 603 901 -16	164.428.517

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lombok Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB s.d TA 2018	KB s.d TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 15/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-			-
PPh					-
PPh Pasal 21				-	
PPh Pasal 22/26			-	-	
PBB	-	-	-	-	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-		
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Sda Migas				-	
Bagian Daerah Pajak Lain			-	-	
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan	-	-			-
Bagian Daerah Sektor Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Sda Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Lain	-	-			-
Biaya Pemungutan Pbb Perdesaan dan Perkotaan					-
Biaya Pemungutan Perhutanan			-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	
Cht	-	-			-
Sda		2.802.436	1.122.830.611	1.049.000.246	2.473.502.368
Migas				-	
Minyak Bumi 15%			-	-	
Minyak Bumi (Bagian Pemerintah Pusat)	-	-	-		
Minyak Bumi (Bagian Pemerintah Daerah)	-	-			-
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi (Bagian Pemerintah Daerah)				-	
Mineral			[illegible]	1.049.000.246	2.473.502.368
Landrent	-	-	-		
Royalti	-	-	[illegible]	1.049.000.246	2.473.502.368
Panas Bumi	-				-
Bagian Pemerintah				-	-
Bagian Daerah			-	-	
Kelebihan Bagian Pemerintah	-	-	-		
Kehutanan	-	2.802.436			-
PSDH					-
DR			-		
PSDH	-	2.802.436	-		
Perikanan	-	-			-
Grand Total		2.802.436	1.122.830.611	1.049.000.246	2.473.502.368

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lembata Timur

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (SAS No. 3/KM.1/2021)	KB TA 2020 yang Telah Dibayarkan	LB TA 2020 yang telah dimanfaatkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10=7+9-5)	(11)
Pajak	17.715.200.253		7.021.047.328	5.167.715.484	7.100.532.537
PPh	5.172.562.383		2.035.994.000	1.143.918.480	-
PPh Pasal 21	2.897.342.033		1.962.647.300	957.794.710	-
PPh Pasal 25/29	276.221.350	-	69.517.400	213.453.950	-
PBB	2.196.561.209	-	73.346.700	2.023.470.959	72.702.457
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	69.353.308	-	265.482.700	1.126.270.988	
Cukai (Hasil Tembakau)	20.074.775		151.000.000	-	71.702.325
Pajak Daerah			-		-
Bagian Daerah Penerimaan Migas		-	-		-
Bagian Daerah Penerimaan Non Migas	79.176.576	-	31.750.400	77.148.176	-
Bagian Daerah Perimbangan	70.626.591		13.291.770	57.681.971	
Bagian Daerah Sebagai Daerah Otonom	31.527.537		9.543.450	326.070.607	-
Biaya Pemungutan Migas	7.122.099	-	6.673.300		2.356.737
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-		-	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-			-	
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	3.250.157		1.205.500	1.080.677	-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 25/29	1.712.726	-	6.620	2.790.625	-
Biaya Pemungutan PBB dan BPHTB	1.165.217	-	200.000	1.165.834	
Cukai	7.247.979.687		3.070.035.220	1.563.947.4-	
SDA	8.401.125.087	30.891.151	1.419.629.450	7.187.870.863	221.362.191
Migas			-		-
Minyak Bumi 15%			-		-
Kontrak Baru 0,5%	-	-		-	
Kontrak Baru dalam Rangka Otsus	-			-	
Gas Bumi 30%	-			-	
Gas Bumi 0,5%			-		-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus			-		-
Pertanian	8.217.257.116	30.891.151	1.412.772.450	7.182.510.995	87.873.826
Kehutanan	-	30.891.151	6.856.775	-	87.873.826
Kelautan	8.047.359.115		1.114.345.302	1.130.870.695	
Pertambangan	-			-	
Tambang Batubara			-		-
Tambang Panas Bumi			-		-
Sektor Bagian Pemerintah			-		-
Perikanan	2.682.991		11.076.000	-	4.005.100
LH	-		-		-
PUPR		-	-		-
PSDH	2.682.991	-	11.379.027	-	3.455.035
Pertambangan	59.786.982		316.851.020	-	137.697.020
Jumlah Total	31.135.590.338	30.891.151	9.073.677.049	9.309.586.347	207.462.728

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sumbawa

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2015	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian TA 2021 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5-3)
Pusat	-	-	1.413.022.017.919	1.719.022.319	-
PDN:	-		1.210.672.828.828	1.049.136.829	
PPh Pasal 21			910.851.029	3.351.426	
PPh Pasal 25/29			426.774.905	426.774.400	
PPB		-	149.736.496	149.786.490	-
Bea Meterai		-	-		-
Pajak Daerah Migas	-	-			-
Pajak Daerah Non Migas	-		99.171.279	99.171.948	
Pajak Daerah Pusat - Bumi			-	-	
Pajak Daerah Pertambangan			-		-
Pajak Daerah Perkebunan	-	-			-
Pajak Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Migas		-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas		-	50.625.242	50.625.242	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-			
Biaya Pemungutan Pajak Pusat	-			-	
Biaya Pemungutan Pajak Pusat				-	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya		-	-		-
CHT	-	-			-
DAK	-	8.318.033	10.010.285.231	2.291.510.948	8.711.577.364
Migas					
Minyak Bumi 15%			-	-	
Minyak Bumi 0,5%		-	-		-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Bumi 30%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba			10.645.182.824	2.257.610.845	8.711.577.369
Landrent		-	4.770.926.455	2.257.610.845	2.513.315.769
Royalti		-	5.878.561.397		6.078.561.597
Pusat Lain	-	-			-
Pajak Penghasilan	-			-	
Bea Masuk		-	-	-	
Sektor Regio Pemerintah					
Kehutanan	-	8.347.053			-
DR	-			-	-
PSDH		67.972	-	-	
DBHP		6.279.181	-	-	-
Perikanan		-	-		-
Grand Total	-	8.318.033	12.145.118.032	3.770.636.196	8.711.577.836

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Surabaya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	SK Menkeu TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran s.d. Triwulan I Tahun Anggaran 2020 (KPPN No. S-633/WPB.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
Pajak	6.010.341.946		3.797.215.810	2.213.126.136	6.337.351
PPh	2.719.745.605	-	467.803.400	1.251.942.205	
PPh Pasal 21	2.358.571.707	-	404.741.400	858.030.307	
PPh Pasal 25/29	401.873.898	-	63.062.000	394.911.898	
PBB	2.434.611.610		1.423.831.700	1.020.931.219	6.337.333
Dan Kata	1.961.959.999		250.639.700	1.726.270.299	-
Pajak Daerah Migas	166.972....		20....38.100	-	5.859.075
Pajak Daerah Non Migas	1.9...535.752	-	912.657.000	1.070.865.232	
Pajak Daerah Lainnya	-	-	-		
Pajak Daerah Pertambangan					-
Pajak Daerah Perikanan	50.192.810		6.146.203	53.106.673	-
Pajak Daerah Sektor Lainnya	2.5...539.027	-	8.604.303	206.084.707	
Biaya Pemungutan Migas	6.720.0..0	-	7.611...02		267.300
Biaya Pemungutan Non Migas	6...721.713		31.116.102	62.050.602	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Perikanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	1.856.092	-	250.700	1...05.8...2	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	7.4...024		256.500	7.197.221	-
CHT	1.311.427.731		875.317.172	436.110.256	-
PTA	8.645.100.859	-	1.960.951.675	7.515.842.034	187.694.500
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi Bagian Pusat				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi Bagian Pusat	-	-	-	-	
Minerba	4.938.130.747	-	1.472.217.525	4.196.113.202	
Landrent	406.201.341		2.10.2...173	172.949.909	-
Royalti	6.120.220.703		1...07.0...300	4.926.249.761	-
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Iuran Eksplorasi	-	-	-		
Setoran Bagian Pemerintah					
Perikanan	12.480.042		9.759.760	11.759.702	-
TIU	-	-	-	-	-
PNBP	-	-	-		
PSDH	107.453.072		9.7...3.330	117.129.722	
Perikanan	1.6...192.090		2...3.951.930		187.694.000
Jumlah Total	1...191.205.795		5.438.987.446	1.926.694.636	193.81...539

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Mataram

(dalam rupiah)

Jenis DBH	TA 2018	TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]
Pajak			3.500.076.637	3.500.076.637	
PPh	-	-	3.500.076.637	3.500.076.637	
PPh Pasal 21	-	-	2.446.764.403	2.446.764.403	-
PPh Pasal 25/29	-	-	1.053.312.134	1.053.312.134	-
PBB				-	-
Bagi Hasil				-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak					-
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-		-
Bagian Daerah Pertambangan Non Migas				-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi				-	-
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi			-	-	-
Cukai			-	-	-
DAK	-	2.603.536	3.840.697.731	256.737.301	3.837.727.733
Pajak	-	-			
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Migas			3.840.697.731	256.737.301	3.837.727.733
Lainnya				-	-
Pertanian			3.840.697.731	256.737.301	3.837.727.733
Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Pajak Penghasilan	-	-	-		-
Pajak Lainnya					-
Sektor Lainnya					-
Kehutanan		2.603.536	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-			-
PSDH		2.603.536		-	-
Perikanan			-	-	-
Grand Total	-	2.603.536	9.840.774.501	3.756.813.938	3.837.727.733

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Mataram

(dalam rupiah)

URAIAN	Alokasi DBH TA 2020	Lebih Salur DBH TA 2020	Penyaluran DBH PMK Sesuai PMK TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	DBH TA 2020 yang Seharusnya Disalurkan	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan (Kurang Salur)
(1)	(2)	(3)	(4)	(10=4)-(5)	(11)
Pajak	17.537.564.702		10,007,725,5[illegible]	7.5[illegible]6.825.973	27.010.706
PPh	9.452.136.079	-	5.4[illegible]6.882.200	3.0[illegible]05.877	
PPh Pasal 21	8.992.768.[illegible]37	-	5.030.838.200	3.311.912.937	
PPh Pasal 25/29	209.467.942		398.175.000	210.792.942	-
PBB	2.219.350.923		921.880.700	1.921.629.229	27.010.706
Dana Bagi Hasil	1.991.959.998		280.606.000	1.711.370.998	-
Bagian Daerah Migas	43.732.109	-	59.795.910	-	26.071.731
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan				-	-
Bagian Daerah Pertambangan				-	-
Bagian Daerah Kehutanan			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	205.203.307	-	6.420.700	198.803.107	-
Bagian Pemerintah Migas	1.700.873	-	2.431.800		730.927
Bagian Pemerintah Non Migas				-	-
Bagian Pemerintah Pajak Bumi dan Bangunan				-	
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-		-
Bagian Pemerintah Kehutanan					-
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	7.121.257		200.120	6.921.[illegible]94	-
PPh 21	6.816.901.[illegible]91	-	4.[illegible]7.[illegible]69.916	1.[illegible]38.[illegible]4.[illegible]95	
PBB	8.808.537.[illegible]47	-	425.80[illegible]4[illegible]75	7.036.477.[illegible]72	177.694.020
Migas	-	-			
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Minerba	9.133.[illegible]26.[illegible]03		1.107.[illegible]83.[illegible]30	7.[illegible]21.[illegible]10.[illegible]50	-
Lainnya				-	-
Kehutanan	9.[illegible]35.[illegible]26.[illegible]50		1.107.[illegible]83.[illegible]50	7.[illegible]25.[illegible]14).[illegible]58	-
Panas Bumi	-	-	-	-	
Iuran Eksplorasi	-	-	-		
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah					-
Perikanan	18.[illegible]71.[illegible]29		5.[illegible]92.[illegible]15	8.[illegible]34.[illegible]54	-
DP	-	-		-	
PNBP	-				
PSDH	18.[illegible]71.[illegible]81		[illegible].[illegible]12.[illegible]15	[illegible].[illegible]34.[illegible]39	-
Pertambangan	159.[illegible]20.[illegible]60		316.[illegible]31.[illegible]20	-	157.[illegible]0.[illegible]30
Grand Total	43.[illegible]6.[illegible]2.[illegible]50	-	14[illegible]7.[illegible]26.[illegible]91	14.[illegible]83.[illegible]57.[illegible]35	[illegible]1.[illegible]7.[illegible]25

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bima

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2016	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	820.670.225	820.670.225	-
PPh		-	820.670.225	820.670.225	-
PPh Pasal 21			224.720.129	224.720.129	-
PPh Pasal 25/29			100.949.096	100.949.096	-
PBB	-		-	-	-
Bag. Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					-
Bagian Daerah Penghasil	-			-	-
Bagian Daerah Pemerataan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Bagian Pemerintah Migas					-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Rutin	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pemerataan					-
Bagian Pemerintah Perbendaharaan					-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-		-		-
PPh	-	-	-	-	
BPHTB	-	2.568.441	6.137.758.415	215.070.644	5.838.687.771
Migas					-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 12%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Minerba			6.137.758.415	215.070.644	5.838.687.771
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	6.137.758.415	215.070.644	5.838.687.771
Pajak Bumi	-	-	-		
Jumlah Produksi					
Jumlah Ikan				-	-
Alokasi Pajak Penghasilan				-	-
PBB Perkebunan	-	2.568.441	-		-
DR					
LLAJ					-
PBB P3	-	2.568.441	-	-	-
Pajak Lainnya	-	-	-	-	
TOTAL	-	2.568.441	6.487.428.640	649.740.869	5.837.687.771

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Bima

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PB Tersalur (TA 2020)	PB Belum Salur (TA 2020)	Penyaluran PB TA 2021 (KMK No. 3/KM.7/2021)	PB TA 2020 yang belum disalurkan	Sisa TA 2020 yang belum Disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10=7)-(9)	(11)
Pajak	1.198.9[illegible]		2.179.610.276	2.356.877.017	2.861.021
PPh	1.8[illegible]		1.[illegible]25.625.600	258.713.600	-
PPh Pasal 21	1.623.[illegible]	-	557.769.600	83.328.200	-
PPh Pasal 25/29	3[illegible]	-	60.838.000	102.165.000	-
PBB	3.[illegible]	-	379.630.000	1.[illegible]52.809	2.861.021
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	[illegible]	-	265.360.000	728.270.348	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	[illegible]	-	81.[illegible]320	-	2.721.764
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Pertambangan	21[illegible]	-	8.804.300	[illegible]1.707	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	9.802.300	-	139.257
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Kehutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]	-	294.900	[illegible]7.524	-
CHT	276.383.720		199.[illegible]2.076	77.2[illegible]8.4	-
DBH	9.309.358.[illegible]		[illegible]3.404.476	7.286.648.170	137.049.021
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	8.[illegible]30.926.700	-	1.[illegible]07.023.300	1.023.[illegible]302	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	8.150.926.700	-	1.107.023.300	7.043.[illegible]400	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Setoran Produksi	-	-	-	-	-
Jenis lainnya	-	-	-	-	-
Setoran Dugaan Overpaid	-	-	-	-	-
Kehutanan	19.[illegible]051		5.[illegible]125	19.504.[illegible]	-
DR	-	-	-	-	-
IUPH	-	-	-	-	-
PSDH	19.[illegible]351	-	5.[illegible]125	19.504.926	-
Perikanan	50.[illegible]382	-	316.[illegible]050	-	137.[illegible]020
Grand Total	12.738.[illegible]8		3.[illegible]14.761	7.[illegible]026.50[illegible]	[illegible]1.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumbawa Barat (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2018 (KMK No. 3/KV.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 20.. (KMK No. 3/KV.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			6.740.436.584	6.740.436.584	-
PPh	-	-	6.740.436.584	6.740.436.584	-
PPh Pasal 21	-	-	6.740.436.584	6.740.436.584	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB			-	-	-
Bea Rate			-	-	-
Bagian Daerah Atas		-	-	-	-
Bagian Daerah Atas Migas	-	-			-
Bagian Daerah Bawah Sendiri	-			-	-
Bagian Daerah Bawah Bersama				-	
Bagian Daerah Perkebunan			-		
Bagian Daerah Pekerbunan Lainnya	-	-			-
Biaya Pemungutan Migas	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pasca BLM			-		
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-			-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-			-	-
Biaya Pemungutan Biaya Lainnya			-	-	
DHT		-	-		
SDA		9.974.845	51.458.035.975	6.3 8.284.776	53.119.771.527
Migas	-	-			-
Minyak Bumi DSH	-			-	-
Minyak Bumi Bagi			-	-	
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Lama		-	-		
Gas Alam DSH		-	-		
Gas Alam Bagi	-	-			-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Pertambangan	-		29.038.750.810	6.539.494.146	53.119.771.527
Kehutanan			69.350.250	-	69.350.250
Panas Bumi			59.568.735.675	6.320.934.349	53.049.780.927
Perikanan		-	-		
Jenis Produksi	-	-			-
Jenis Ikan	-			-	-
Perikanan Bagian Daerah (PBD)				-	
Kehutanan		9.974.845	-		
DR	-	-	-		-
IUPH	-			-	-
PSDH		9.974.845	-	-	
Pertambangan			-	-	
Grand Total		9.974.845	66.207.564.429	13.370.002.862	53.119.771.527

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sumbawa Barat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	DBH Tahun TA 2021	DBH Tahun TA 2020	Penyaluran DBH Tahun 2020 (sesuai PMK 226/PMK.07/2020)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(5)	(6)	(7)	(10=(7)-(5))	(11)
Pajak	21.772.280.430		4.092.022.163	92.736.807.500	56.042.587
PPh	3.548.250.716		3.477.154.300	103.865.776	32.770.344
PPh Pasal 21	3.108.557.259	-	3.430.423.600		32.756.341
PPh Pasal 25/29	141.595.456	-	27.730.700	100.930.756	-
PBB	20.941.552.244		536.371.900	20.525.415.490	23.278.176
Pajak Rokok	1.891.130.058		200.000.000	1.736.970.706	
Bagian Daerah Migas	38.227.270		61.570.000		23.342.730
Bagian Daerah Non Migas	17.952.701.090	-	-	17.952.701.090	-
Bagian Daerah Pasca Bum	-	-	-		-
Bagian Daerah Pertambangan	-			-	
Bagian Daerah Perikanan			-		
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	210.321.330	-	3.660.700	206.960.630	-
Iuran Pengusahaan Migas	1.319.073	-	21.000.000		726.231
Iuran Pengusahaan Non Migas	628.696.546			628.696.546	
Biaya Pemungutan Pajak Rokok			-		
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-			-
Dana Penunjang Sektor Lainnya	7.458.024		300.000	7.158.024	
CHT	382.060.631		276.493.963	104.466.563	
SDA	73.113.013.984	1.407.609.708	9.660.585.200	62.907.715.171	1.958.713.176
Migas		-			-
Minyak Bumi 15%	-	-		-	-
Minyak Bumi 0,5%	-			-	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus			-	-	
Gas Bumi 30%			-		
Gas Bumi 0,5%		-	-		-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-			-
Minerba	73.096.307.204	1.407.609.708	10.038.114.200	60.471.503.204	1.738.049.187
Landrent	-	1.407.609.708	365.739.100	-	1.733.640.139
Royalti	73.096.307.204		9.672.374.300	60.144.337.204	
Panas Bumi			-		
Iuran Tetap		-	-		-
Iuran Eksplorasi	-	-		-	-
Iuran Eksploitasi	-			-	
Kehutanan	88.710.800		20.999.800	62.470.040	
PSDH		-	-		-
DR	-	-		-	-
PSDH	88.449.830		20.999.800	50.479.960	-
Perikanan	131.166.050		316.391.300	-	37.001.023
Grand Total	98.113.931.374	2.107.609.708	14.773.968.566	83.047.579.063	2.027.267.605

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lombok Utara (dalam ribuan)

URAIAN DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB TA 2020 (KMK No. 25/KM.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	8.710.561	8.710.561	
PPh	-	-	8.710.561	8.710.561	-
PPh Pasal 21	-				-
PPh Pasal 25/29			8.710.561	8.710.561	-
PBB			-	-	
Dapat Rata			-	-	
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Pasal 21			-	-	-
Bagian Daerah Perseorangan				-	
Bagian Daerah Perseorangan	-	-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			-
Biaya Pemungutan Migas				-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pasal 21	-	-	-		
Biaya Pemungutan Perseorangan	-	-			-
Biaya Pemungutan Perseorangan				-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	
Cukai	-	-	-		
SDA	-	2.621.136	6.021.350.981	1.231.117.745	4.998.233.236
Migas				-	-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Minerba			6.021.350.981	1.237.617.745	4.783.733.236
Kehutanan			-	-	
Reboisasi		-	6.021.350.981	1.237.617.745	1.961.233.236
Panas Bumi	-	-	-		
Iuran Tetap Izin	-	-			-
Iuran Tetap				-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan		2.621.136	-		
Ikan	-	-	-		-
PDTH	-			-	-
PBDH		2.621.136	-	-	
Perikanan			-		
Grand Total	-	2.621.136	6.030.071.542	1.240.028.306	4.997.220.236

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lor[illegible] Utara

(dalam rupiah)

URAIAN	Kurang Salur TA 2020	LB Salur TA 2020	Penyaluran KB DBH Tahun Anggaran TA 2020 (KSK No. 1/KSM/7/2021)	TOTAL DBH yang telah diterima daerah	LB TA 2020 yang akan disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2] - [4]	[6]
Gabungan	3.182.085.272		2.132.312.000	3.021.159.995	30.72[illegible].352
PPh	1.082.957.470		965.928.500	660.[illegible].874	-
PPh Pasal 21	1.518.353.470	-	95.[illegible].500	325.[illegible].970	
PPh Pasal 23/26	124.644.065	-	3.[illegible].100	120.[illegible].206	
PBB	2.351.810.734	-	530.965.300	1.0[illegible].046	20.7[illegible].352
Dana Bagi Hasil	1.091.090.976		203.[illegible].700	1.[illegible].276	-
Dari Bagian Daerah Migas	30.770.312		30.772.200	-	9[illegible].576
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perbatasan	40.[illegible].088			[illegible].088	
Bagian Daerah Perdesaan					-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	[illegible].664.200		8.[illegible].900	304.[illegible].617	-
Biaya Pemungutan Migas	1.[illegible].656	-	1.875.500	-	[illegible].874
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Bumi					-
Biaya Pemungutan Perbatasan	[illegible].[illegible].958	-	-	[illegible].[illegible].629	-
Biaya Pemungutan Perdesaan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.[illegible].827	-	[illegible].930	7.[illegible].124	
DAU	1.[illegible].[illegible].772		849.[illegible].600	[illegible].[illegible].970	-
DTA	8.[illegible].[illegible].960		1.[illegible].[illegible].410	7.[illegible].[illegible].[illegible]	159.[illegible].220
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Bagian Daerah Penghasil					-
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	
Non Migas	8.120.[illegible].[illegible]	-	1.127.[illegible].[illegible]	7.[illegible].[illegible]	
Pajak Air Permukaan					-
Kehutanan	2.[illegible].[illegible]		1.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
Pertambangan Umum				-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	
Bagian Daerah Penghasil					
Pertambangan	19.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	-
PSDH	-		-	-	-
DBHPDP	-	-	-	-	
Pajak Karbon	18.[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Grand Total	[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Nusa Tenggara Timur

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar TA 2016	Kurang Bayar TA 2020	Kurang Bayar TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian Kurang Bayar TA 2019 (KMK No. 2/KM.7/2021)	Sisa Kurang Bayar TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			1.487.861.328	825.039.863	1.062.821.676
PPh			1.276.021.301	825.039.863	862.026.049
PPh Pasal 21			956.142.960	855.539.657	93.603.703
PPh Pasal 25/29	-	-	9.949.349	-	9.949.349
PPN	-	-	92.415.697		92.415.697
Pajak Lainnya	-	-			-
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas			29.010.201	-	29.376.267
Bagian Daerah Pasca Tambang	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	50.847.696		50.811.580
Bagian Daerah Perikanan	-	-			-
Bagian Daerah Sektor Lainnya				-	-
Iuran Pertambangan Migas			-	-	
Iuran Pertambangan Non Migas	-	-	1.065.565		1.065.267
Iuran Pertambangan Pasca Tambang	-	-			-
Iuran Pertambangan Pertanahan			1.412.410	-	1.412.406
Iuran Pertambangan Perikanan			-	-	
Iuran Pertambangan Sektor Lainnya	-	-	-		-
CHT	-	-			-
SDA			597.171.010		597.171.519
Migas			-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	
Minerba	-	-	879.987.687	-	879.987.931
Panas Bumi	-	-	850.783.687		850.783.901
Kehutanan	-	-	13.104.000		13.204.030
Perikanan					-
Iuran Produksi				-	-
Iuran tetap			-	-	
Setoran Dalam Perjalanan	-	-	-		
Pendapatan Lainnya	-	-	21.903.456		21.903.516
Jasa				-	-
Lainnya			-	-	
Pajak	-	-	24.903.456		21.903.516
Perikanan	-	-			
Jumlah			2.790.132.841	825.039.863	3.592.989

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KU Desember TA 2020	LB Januari TA 2020	Perpres ttg APBN, Lampiran TA 2020 (PMK No. 3/KM.7/2021)	KURANG BAYAR TA 2020 yang belum dialokasikan	LEBIH BAYAR TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(3)-(4)	(6)
Migas	2.290.951.436	3.654.760	10.976.170.007	13.287.941.283	43.114.757
PPh	18.705.836.458		10.001.738.209	8.961.086.250	-
PPh Pasal 21	16.271.380.420		9.026.171.000	7.245.209.420	-
PPh Pasal 25/29	2.326.715.014		409.286.400	1.857.150.714	-
PBB	2.741.291.134	1.364.760	76.567.000	1.673.729.601	11.172.773
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	583.139.610		680.000.000		17.302.150
Bagian Daerah Non Migas		1.109.217	13.019.200	-	15.692.717
Bagian Daerah Pasca Bunal	251.871.330		92.000.500	382.771.138	
Bagian Daerah Perkebunan		2.494.600	1.856.100		1.230.450
Bagian Daerah Pertambangan	376.835.670	-	83.007.500	293.112.170	-
Pajak Daerah & Opsen Tertentu	1.765.202.340		676.221.930	1.089.041.590	
Biaya Pemungutan Migas	10.927.100		15.714.950	-	687.700
Biaya Pemungutan Non Migas		3.[illegible]	5.[illegible].50		97.619
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	7.695.642	-	811.000	6.183.710	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok		68.900	51.000	-	120.400
Biaya Pemungutan Perkebunan	7.690.241		935.000	6.754.346	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	22.515.165	-	1.783.520	20.529.965	
DAU	247.864.845	-	78.724.407	68.170.262	-
DBH	357.827.588	731.254.773	220.291.700	329.327.614	553.941.008
Migas				-	
Minyak Bumi 15%			-		
Penyesuaian Volume 0,5%	-	-	-		-
Penyesuaian Volume Kondensat 0%	-	-			-
Gas Bumi 30%	-				-
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus				-	
Minerba	212.324.720	120.949.959	95.375.950	77.898.329	310.280.701
Kehutanan		420.344.959	95.375.675		310.280.701
Perikanan	212.324.720	-	949.075	211.049.319	-
Pajak Bumi	24.605.980	54.715.284	118.791.250	117.672.263	145.961.834
Pajak Penghasilan	24.605.980		27.307.720	1.296.260	-
Pajak Lainnya		54.610.284	91.561.530	-	145.061.834
Setoran Sanksi Pemerintah		-	-		
Kehutanan	-	5.000.000	5.404.500		21.400.500
Tik	-			-	-
PDPR				-	
PSDH		5.959.020	5.404.500		21.400.500
Perikanan	-	-	-		-
Jumlah Total	21.659.978.735	904.058.007	1.127.647.707	10.657.208.943	976.780.692

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Alor

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	KB TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran TA 2020 (KMA No. 276/KM.7/2021)	Sisa KB s.d TA 2020 (kol 4 s.d 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4-5)
Pajak			147.192.000	19.532.853	168.059.947
PPh			147.192.000	19.532.853	168.059.947
PPh Pasal 21	-	-	47.791.865	19.532.853	168.059.947
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-		-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-	-	-
Bagian Penerimaan Migas	-	-	-	-	-
Bagian Penerimaan Non Migas	-		-	-	-
Bagian Pertanahan Panas Bumi			-	-	-
Bagian Pertambangan Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Penerimaan Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Penerimaan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT			-	-	-
SDA			1.937.000	-	1.937.000
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dalam Kondisi Khusus				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-		
Gas Bumi dalam Kondisi Khusus	-	-	-		
Pertambangan	-	-	1.558.000		1.558.000
Iuran Tetap	-		-		-
Royalti			1.215.130	-	1.215.130
Pajak Ekspor			-	-	
Iuran Produksi		-	-	-	
Iuran Tetap	-	-	-		
Pertambangan Batubara Non Migas	-				-
Kehutanan			6.260.218	-	6.260.218
DR		-	-	-	-
PSDH	-	-	-		-
DBHTI	-		6.260.218		6.260.218
Perikanan					-
Grand Total			149.036.179	19.532.853	175.797.165

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Alor

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan	Penyaluran DBH TA 2021 Sesuai PMK TA 2021 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang sudah dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.059.306.365	-	1.006.465.000	2.052.865.852	3.723.363
PBB	627.015.292	-	509.842.420	244.972.044	27.791.292
PBB Pasal 21	465.727.578	-	401.046.820		27.791.292
PBB Pasal 25/29	161.287.714	-	78.820.600	241.972.014	-
BPHTB	2.316.020.005	-	409.722.450	1.806.297.829	3.925.161
Pajak Rokok	1.994.994.995	-	385.999.720	1.726.272.260	-
Pajak Reklame	29.856.180	-	126.650.220	-	3.778.155
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					-
Pajak Parkir	-			-	-
Pajak Air Tanah	210.355.827	-	15.592.960	195.623.607	-
Pajak Sarang Burung Walet	7.020.630	-	4.301.250		190.771
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				-	-
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan					-
Pajak Pemanfaatan Sumber Daya Alam	1.301.627		197.100	3.861.621	-
CHT	95.472.879		99.662.500	5.569.379	-
DBH	302.768.063	5.703.850	355.920.650	125.804.838	130.662.415
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 15%		-			
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	41.170.205		90.777	41.340.702	
Landrent	21.220.167			21.220.167	-
Royalti	20.250.039		89.770	20.159.823	-
Panas Bumi	20.234.646	-	15.385.560	64.918.246	-
Iuran Produksi	13.780.758	-	2.576.871	1.035.582	
Iuran tetap	56.624.000	-	13.209.000	74.014.646	
Beberapa Jenis Pendapatan					
Cukai Hasil Tembakau		5.703.850	2.259.570	-	6.365.470
PDRI	-	-	-	-	-
PDPH		-			
PBBKB		0.704.450	2.251.071		5.959.760
Otsus	100.169.990		319.382.309		157.694.202
Jumlah Total	3.364.875.262	5.703.850	1.014.969.560	2.308.960.650	158.585.202

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Belu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	TR TA 2018	TR TA 2019	LO s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian TR s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LO s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
Pajak			1.111.010.261	108.216.71.	902.791.553
PPh			1.111.010.261	108.218.71.	402.791.553
PPh Pasal 21	-		1.111.010.261	708.218,71	402.791.553
PPh Pasal 23/26	-	-	-	-	
PBB	-	-	-		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Bagian Daerah Mineral Logam					-
Bagian Daerah Mineral Bukan Logam	-			-	-
Bagian Daerah Pertambangan Batubara	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi		-	-		
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Kehutanan				-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perikanan				-	-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Kehutanan Lainnya	-	-	-		
CHT					-
BHA			1.249.719.775		244.7 .977
Cukai	-		-	-	-
Migas Bagian 15%	-	-	-	-	
Migas Bagian 0,5%	-	-	-		
Migas Bagian Dana dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minyak Bumi	-	-	1.247.347.096	-	1.217.317.020
Landrent	-	-	1.224.378.720		1.224.378.720
Royalti			22.968.320		22.968.300
Dana Reboisasi					-
Dana Reklamasi				-	-
Dana Hutang	-	-	-	-	-
Saldo Kas Daerah yang Belum Disalurkan	-	-	-		
Kehutanan			2.371.718		2.371.718
Tax					-
PDPT	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	2.371.718		2.371.718
Perikanan					
Grand Total			2.360.729.979	108.216.71.	1.655.510.327

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pelalu

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Realisasi TA 2020	LB Realisasi TA 2020	Penyaluran KB DBH Sebelumnya TA 2021 (PMK No. 57/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang Sudah Dialokasikan	LB TA 2021 yang Belum Dialokasikan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)-(d)	(f)
Dajak	2.684.865.320		1.152.859.402	2.677.075.436	21.079.336
PPh	852.1[illegible].055	-	758.[illegible].500	582.077.337	
PPh Pasal 21	513.747.681	-	760.022.402	112.300.321	
PPh Pasal 25/29	278.168.474		37.139.100	221.200.321	-
PBB	2.109.852.[illegible]20		317.630.920	2.131.308.016	2.074.804
Bea Bea	2.077.136.392		242.536.430	1.934.549.958	
Bagian Daerah Migas	34.426.565	-	5.703.530	-	20.340.534
Bagian Daerah Non Migas	7.460.294	-	-	7.460.294	
Bagian Daerah Pajak Rokok					-
Bagian Daerah Perkebunan				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-		-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	988.816.507	-	172.[illegible].330	783.407.907	
Biaya Pengangkatan Migas	[illegible].95.[illegible]98	-	[illegible].302.[illegible]00		7.[illegible]2.873
Biaya Pengangkatan Non Migas	2.[illegible].[illegible]38			2[illegible].[illegible]38	-
Biaya Pengangkatan Pajak Rokok			-	-	
Biaya Pengangkatan Perkebunan	-	-	-		
Biaya Pengangkatan Pertambangan					-
Biaya Pengangkatan Sektor Lainnya	7.[illegible].[illegible]21		615.[illegible]02	7.[illegible]1.[illegible]24	-
PDLT	81.386.820	-	17.[illegible]74.[illegible]00	63[illegible].820	-
DBH	251.[illegible]20.536	351.[illegible]1.435	360.637.252	12.[illegible]6.[illegible]7	100.[illegible]4.[illegible]50
Migas	-	-			
Minyak Bumi (15%)					-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Kontrak Jasa dalam Rangka Migas		-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	
Gas Bumi 2,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Migas	-	-	-		
Minerba	1.215.[illegible]12	3[illegible].[illegible]05.[illegible]53	32.[illegible].[illegible]50	2.[illegible]82.[illegible]99	35[illegible].[illegible]78.[illegible]52
Landrent		3[illegible].[illegible]00.[illegible]61	32.[illegible]50.[illegible]70	-	36[illegible].[illegible]78.[illegible]55
Kehutanan	1.215.[illegible]19		1.[illegible]82.[illegible]50	2.[illegible]82.[illegible]59	-
Panas Bumi	[illegible].[illegible]30.[illegible]56	[illegible].[illegible]72.[illegible]82	1.[illegible]05.[illegible]60	1.[illegible]55.[illegible]82	[illegible].[illegible]91.[illegible]37
Iuran Tetap Kehutanan	18.730.752	-	2.[illegible]76.[illegible]75	1.[illegible]3.[illegible]43	
Iuran Hasil		[illegible].[illegible]72.[illegible]82	[illegible].[illegible]29.[illegible]75		22.[illegible]01.[illegible]57
Reboisasi Dana Penyediaan				-	-
Kehutanan		1.[illegible].[illegible]30	[illegible]2.[illegible]71	-	1.[illegible].[illegible]73
IHR	-	-	-		
IIUPH	-				
PSDH		1.[illegible].[illegible]30	[illegible]82.[illegible]79	-	[illegible]16.[illegible]25
Perikanan	2.[illegible].[illegible]37.[illegible]30		2[illegible].[illegible]30.[illegible]75	-	[illegible]0.[illegible]08.[illegible]43
Umum Total	2.[illegible].[illegible]95.[illegible]56	[illegible].[illegible]01.[illegible]45	1.[illegible]0.[illegible]26.[illegible]50	2.486.[illegible]62.[illegible]17	[illegible]14.[illegible]1.[illegible]56

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2022

Kab. Brebes (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian (PMK No. 5/KM.7/2021)	Sesudah Penyesuaian (PMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			190.705.978	21.655.900	169.050.078
PPh			190.705.978	21.655.900	169.050.078
PPh Pasal 21			190.705.978	21.655.900	169.050.078
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Reg. Reta		-	-		
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan		-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Lain					
Bagian Pemerintah Perkebunan					-
Bagian Pemerintah Pusat Lain	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	
Cukai					
SDA			21.203.007		21.203.007
Migas				-	-
Minyak Bumi (15%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-	-	
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Daerah		-	-		
Gas Bumi (30%)					
Gas Bumi (0,5%)					-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah	-			-	-
Pertambangan	-	-	1.677.500	-	1.677.500
Pertambangan	-	-	420.500	-	420.500
Kehutanan		-	1.048.100		1.048.100
Perikanan					
Pertambangan					-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Kehutanan			10.357.134		10.357.134
PPh					
PPh	-		-	-	-
PBB	-	-	3.585.134	-	10.357.134
Perkebunan		-	-		
Grand Total			211.779.019	21.655.900	190.123.119

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kode

(dalam rupiah)

JENIS DBH	DBH Definitif TA 2020	DBH Definitif TA 2020	Penyaluran DBH DBH Berdasarkan TA 2020 (KMK No. 3/KK.7/2021)	DBH TA 2020 yang Lebih dialokasikan	DBH TA 2020 yang Lebih ditetapkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[Kol 2]-[4]	[5]
Pajak	4.251.251.304		3.210.220.329	3.114.553.89.	5.562.918
PPh	1.016.762.972		920.0.5.450	895.707.672	-
PPh Pasal 21	1.017.248.270	-	460.514.000	556.752.078	-
PPh Pasal 25/29	88.536.704	-	99.561.450	138.975.394	-
PBB	2.829.777.406	-	1.12.1.3.0	2.11.1.901.039	3.362.913
Pajak Rata	1.09[illegible]905	-	203.091.730	1.026.270.253	-
Dampak Distrik Baru	120.0.7.112		1.1.4.7.050	-	8.503.483
Distrik Daerah Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pajak Bumi	478.5[illegible]7.440	-	13.387.020	438.113.068	
Bagian Daerah Penerimaan	-	-	-		
Bagian Daerah Pemerintah				-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.699.037		6.504.300	226.694.707	
Biaya Pemungutan Migas	3.746.575	-	5.303.805		113.121
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			-
Biaya Pemotongan Pajak Bumi	11.623.730		638.300	10.907.428	-
Biaya Pemotongan Pemerintah			-	-	
Biaya Pemungutan Pemerintah	-	-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.756.034	-	205.900	7.337.221	-
OBT	15.791.730		11.029.125	4.192.610	-
BOA	191.307.615	1.2.27.1.5	384.44.025	53.737.035	5[illegible]43.808
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%		-			-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Mineral	5.[illegible]00.775	-	173.750	2[illegible]023.12[illegible]	
Tambang	14[illegible]775	-	83.075	1.052.900	-
Royalti	20.230.205		90.775	30.130.120	-
Panas Bumi	13.780.756	172.500.103	73.213.250	11.925.683	173.570.875
Jumlah Provinsi	13.780.756		5.676.375	11.925.683	
Jumlah Kab/Kota	-	172.850.496	70.643.375		173.321.610
Pajak Bagian Pemerintah	-	-			
Kehutanan		11.370.030	3.973.725		15.[illegible]9.075
DR			-	-	-
PHT/P	-	-	-		
PSDH	-	1.375.050	38[illegible]025		16.218.975
Perikanan	179.18[illegible]050		316.[illegible]300		357.694.200
Grand Total	1.449.312.021	1.1.2[illegible]7.18	1.997.[illegible]354	3.14[illegible]950	350.096.781

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Flores Timur

(dalam rupiah)

Jenis Dana	PMK TA 2019	PMK TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Tarif Kasda s.d TA 2019 (KMK No. 8/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 8/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
Pajak	-	-	310.045.284	82.368.522	227.676.762
PPh	-	-	274.922.284	82.368.522	192.553.762
PPh Pasal 21			274.922.284	82.368.522	192.553.762
PPh Pasal 25/29					-
PBB			34.542.820	-	34.542.820
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Penghasil Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi					-
Bagian Daerah Pertambangan Minerba				-	-
Bagian Daerah Pertambangan Migas	-	-	82.941.610	-	82.941.610
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Migas					-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Minerba	-	-			
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Perseorangan			1.501.200		1.501.200
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan Sektor Lainnya			-	-	-
CHT	-	-	-	-	
PPh	-	-	5.619.248		5.619.248
Migas					-
Migas Jenis 0,5%				-	-
Migas Jenis 0,3%			-	-	-
Migas Jenis Lainnya (Jenis Dengan Tarif 0%)	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Penghasilan dalam Rangka Otsus					-
Minerba			1.218.100	-	1.218.100
Landrent			-	-	-
Royalti	-	-	1.248.100	-	1.248.100
Panas Bumi	-	-	-		
Iuran Tetap (Landrent)	-	-			
Iuran Eksploitasi (Royalti)					-
Perikanan				-	-
Pungutan Lainnya	-	-	2.371.748	-	2.371.748
PPh	-	-	-	-	
PPN DN					-
PPnBM			2.371.748	-	2.371.748
Perikanan		-	-	-	-
Grand Total	-	-	829.686.282	82.368.522	260.116.701

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Utara Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB/LB DBH TA 2020	LB Setelah TA 2020	Penyaluran DB DBH Sebelum TA 2020 (PMK No. 3/PMK.7/2020)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang telah diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]
Pajak	1.961.317.822	-	1.030.590.513	2.311.990.202	379.256.533
PPh	951.965.945	-	630.730.202	111.269.147	-
PPh Pasal 21	331.573.808		617.711.110	230.759.309	-
PPh Pasal 25/29	193.382.139		22.512.203	107.609.535	
PBB	2.383.013.393		982.702.910	370.953.557	37.130.230
Bagi Rata	1.391.960.962		365.630.700	736.370.708	
Bagian Daerah Migas	60.170.854	-	96.020.462		30.139.570
Bagian Daerah Non Migas	-	-			-
Bagian Daerah Bunga Bank				-	-
Bagian Daerah Perusahaan			-	-	
Bagian Daerah Pertambangan	75.351.417	-	-	75.351.417	
Bagian Daerah Sektor Kehutanan	195.404.807	-	83.250.700	168.107.307	-
Biaya Pemungutan Migas	1.078.600		2.173.170	-	1.094.570
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		-	-		
Opsen Pemungutan Perbankan	-	-			-
Biaya Pemungutan Perbankan	3.765.711		-	3.765.711	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.710.021		678.900	5.839.021	
Cukai	43.006.571	-	56.561.835	71.444.736	
SDA	365.630.654	1.037.350	83.790.178	91.202.971	36.961.195
Migas	-			-	-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		-
Gas Bumi 30%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Minerba	11.230.202		99.710	20.162.313	-
Iuran Tetap			-	-	
Royalti	20.197.298	-	69.775	20.768.323	
Panas Bumi	36.493.178	-	15.601.021	71.892.201	
Iuran Eksplorasi	15.736.758	-	2.376.873	11.833.980	-
Iuran Eksploitasi	77.717.518		12.821.190	89.346.666	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan		1.037.350	591.655		2.361.170
DR	-	-		-	-
PSDH	-			-	-
DBHH		1.037.350	529.655	-	2.287.173
Perikanan	159.196.980	-	3.688.700		11.701.132
Grand Total	3.568.763.415	1.037.350	1.472.020.240	3.135.210.127	197.070.481

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kupang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 21/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KEP-30/PK/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KEP-30/PK/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]
Pajak			19.363.000	6.142.274	13.220.726
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-		
PPh Pasal 25/29	-	-	-		
PBB	-		19.363.000	6.142.274	13.220.726
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				-	-
Bagian Daerah Sektor Pertambangan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Pertambangan Minyak	-	-	-		
Bagian Daerah Sektor Pertambangan Gas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Sektor Pertambangan Panas Bumi			-		
Bagian Daerah Sektor Kehutanan			180.082.703	5.743.274	174.339.429
Bagian Daerah Sektor Perikanan				-	-
Bagian Daerah Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas	-				-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan		-	2.503.703	-	2.503.703
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-			-
Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan	-				-
CHT			-	-	-
SDA		-	3.015.574.878	215.498.822	2.800.076.056
Migas	-	-	-		-
Minyak Bumi 15%	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%	-			-	-
Minyak Bumi dalam Rangka DMO				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	
Gas Bumi Dalam Rangka DMO	-	-	-		
Minerba	-	-	968.275.139	213.498.822	754.776.317
Panas Bumi			967.007.032	213.498.822	893.508.210
Kayu			1.276.107	-	1.268.107
Perikanan			-	-	
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Iuran Eksploitasi	-	-	-		
Setoran Bagian Pemerintah	-				-
Kehutanan			2.071.749	-	2.071.749
PSDH		-	-	-	
DR	-	-	-		
PNBP	-		2.071.749		2.071.749
Pungutan				-	-
Grand Total			3.035.170.703	219.641.096	2.815.769.807

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kupang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar DBH Tahun 2020	Lebih Bayar DBH Tahun 2020	Pengalokasian Kurang Bayar DBH Semesteran Tahun 2020 (PMK No. 37/PMK.07/2021)	Kurang Bayar DBH Tahun 2020 yang belum dialokasikan	Lebih Bayar DBH Tahun 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.608.666.134	-	650.431.806	2.958.234.328	4.771.105
PBB	1.293.330.419	-	596.582.600	696.747.819	
PBB Pasal 21	1.016.467.019		585.581.200	379.946.819	
PBB Pasal 25/29	67.063.400		10.949.400	56.114.000	-
BPHTB	2.079.196.136		140.642.200	1.938.553.936	4.771.105
Pajak Rokok	1.991.959.998		356.636.406	1.635.323.592	-
Bagian Daerah Migas	155.775.759	-	50.324.403	-	4.318.631
Bagian Daerah Non Migas	2.013.330	-	26.902	1.986.428	
Bagian Daerah Panas Bumi					-
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Perkehutanan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Pertanian	2.153.999.027	-	8.664.200	2.145.334.827	
Dana Penerimaan Migas	3.351.436		3.351.436		220.564
Bagian Pemerintah Dari Migas	101.026		4.500	96.526	-
Bagian Pemerintah Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Perkebunan	-	-			
Dana Penerimaan Perkebunan					-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	7.498.724		298.830	7.167.894	-
DTKP	16.932.047	-	3.268.734	4.631.548	
BHN	464.209.931	5.773.579	351.209.220	302.243.320	9.101.189.206
Migas					
Alokasi Untuk 10%					-
Alokasi Untuk 0,5%			-	-	-
Minyak Bumi dalam Negeri Cluster	-	-	-	-	
Gas Bumi 69%	-	-	-	-	
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Negeri Cluster		-			-
Nonmigas	291.126.221	112.630.977	29.790.100	261.036.498	195.963.772
Listrik		112.630.977	29.656.000	-	82.974.977
Tagihan	291.126.221		29.775	261.036.498	
Panas Bumi	3.730.758	5.773.731	11.505.533	11.208.886	13.901.457
Iuran Produksi	3.730.758	-	3.370.973	11.208.886	
Iuran tetap		5.773.731	8.726.071		13.901.457
Pencairan Dalam Pengadaan					-
Kehutanan	-	2.759.400	1.356.600	-	5.017.700
IHPH	-	-	-		
PSDH		2.759.400	1.356.600	-	5.017.700
Total Transfer	165.106.960		1.356.600	-	155.084.020
Grand Total	4.247.767.393	151.773.579	41.691.434	2.888.258.75	353.020.594

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Lombata

(dalam rupiah)

Uraian	K/L TA 2018	K/L TA 2019	LKPD TA 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyelesaian LKPD TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Alokasi LKPD TA 2021 (KMK No. 5/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4] + [5]
Pajak					-
PPh	-		-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29		-	-	-	-
PBB					
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas	-				-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Dalam		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas					
Bagian Pemerintah Pajak Dalam Negeri					
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perkebunan		-	-	-	
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					
CHT					
SDA	-		4.290.054	429.205	3.816.849
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus					
Gas Bumi 13,5%	-				-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Wilayah Kerja Khusus	-	-	-	-	-
Non Migas	-		1.241.100	-	1.241.100
Landrent					
Royalti			1.241.100		1.241.100
Panas Bumi	-				-
Dana Provisi	-	-	-	-	-
Dana Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Sebesar Dasar Penerimaan					
Perikanan			2.991.954	429.205	2.562.749
DR	-	-	-	-	-
LUP-4	-	-	-	-	-
PNBP			2.991.954	429.205	2.562.749
Pertambangan					
Grand Total	-		4.290.054	429.205	3.860.849

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Lombata

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Defisit TA 2020	LB Defisit TA 2020	Target Lain DBH Semesta TA 2020 (PMK No. 37/PMK.07/2021)	DBH TA 2020 yang sebaik-baiknya	LB TA 2020 yang sebaik-baiknya disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)
Pajak	3.051.062.415	-	825.352.200	2.225.221.341	3.001.221
PPh	253.842.088	-	47.680.200	206.161.888	
PPh Pasal 21	643.822.648		127.183.000	216.639.648	-
PPh Pasal 25/29	50.020.010		21.207.700	63.012.310	-
PBB	2.312.981.071		546.301.000	1.907.690.628	3.001.824
Bagi Rata	1.991.959.953		255.855.700	1.776.970.208	
Bagian Daerah Migas	92.252.248	-	37.202.300		2.010.012
Bagian Daerah Non Migas		-			
Bagian Daerah Panas Bumi					-
Bagian Daerah Perbatasan				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	410.852	-	-	2.109.831	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	211.667.807	-	1.330.300	210.107.007	
Bonus Penandatanganan Migas	3.232.082		33.010.100		141.012
Bagian Pemungutan Non Migas			-	-	-
Bagian Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Pemungutan Perbatasan	-	-	-		
Bagian Pemungutan Pertambangan	109.741			109.741	-
Bagian Pemungutan Sektor Lainnya	7.000.002		700.200	6.300.602	-
DAK	5.515.656	-	-	5.515.656	
DBH	504.534.231	1.947.332	341.607.020	170.974.543	151.791.305
Migas					
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 15%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Kehutanan	20.250.068		49.075	20.180.535	-
Perikanan			-	-	-
Pertanian	23.250.053	-	89.775	20.160.828	-
Pertambangan Umum	10.897.173	-	52.105.200	02.780.073	-
Iuran Pertambangan	13.750.558	-	2.570.875	11.203.683	
Iuran Eksplorasi	111.116.713		20.330.340	41.138.060	-
Sektor Daerah Pertambangan				-	-
Kehutanan	-	1.567.750	539.625	-	2.017.575
DP	-	-	-		
Pertanian					
Perikanan		1.567.750	539.625	-	2.017.575
Pertambangan	135.136.482	-	216.981.050	-	137.664.020
Grand Total	3.564.596.646	667.732	1.765.459.870	2.364.027.337	107.281.710

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mamuju (dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2015	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB s.d TA 2019 (SSB No. 2/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			20.737.809	20.737.809	
PPh					
PPh Pasal 21	-				
PPh Pasal 23/26	-	-	-	-	-
PBB	-	-	20.737.809	20.737.809	-
Dari Kota			-	-	
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas			2.170.366	2.170.366	
Bagian Daerah Pasal Ini	-	-	-	-	-
Alokasi Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Alokasi Daerah Perkehutanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya			23.970.193	23.970.193	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	715.906	715.906	-
Biaya Pemungutan Pasal Ini					
Biaya Pemungutan Pasal Lain					
Biaya Pemungutan Pasal Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	901.748	901.748	-
SDA			141.013.692	3.046.794	137.966.898
Migas	-				-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Minerba	-	-	145.842.954	5.946.794	139.896.160
Landrent	-	-	36.282.175	5.946.794	130.335.381
Royalti			8.611.679		8.611.679
Panas Bumi					
Dana Iuran Eksplorasi					
Dana Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan			2.871.738		2.871.738
IHH					
PSDH	-	-		-	-
DR	-	-	2.871.738	-	2.871.738
Perikanan		-	-	-	-
Pertambangan			173.774.618	45.171.702	128.602.916

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Manggarai

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran Kurang DBH Berdasarkan PMK TA 2020 (PMK No. 07/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)-(4)	(6)
DBH	3.953.[illegible].620	19.[illegible].109	[illegible].211.300.829	2.760.879.682	58.79[illegible].131
PPh	1.142.[illegible].921		707.[illegible].092	434.714.729	-
PPh Pasal 21	918.730.754	-	606.153.600	329.637.154	-
PPh Pasal 25/29	223.[illegible].167	-	21.[illegible].492	[illegible].[illegible].265	-
PBB	2.[illegible].329.005	19.[illegible].109	176.[illegible].890	2.[illegible].[illegible].973	58.79[illegible].131
Dana Reboisasi	1.981.999.905		238.[illegible].702	1.743.[illegible].249	-
Bagian Daerah Migas	59.41[illegible].692		22.[illegible].800	-	3.0[illegible].137
Bagian Daerah Non Migas	-	13.[illegible].526	35.137.500	-	53.777.[illegible]
Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	454.[illegible].294	-	37.047.302	481.[illegible].291	
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Pajak Penghasilan Pasal 21	2.[illegible].559.027	-	8.694.302	2[illegible].[illegible].727	-
Biaya Pemungutan Migas	3.[illegible].734	-	3.567.502	-	116.770
Biaya Pemungutan Non Migas		613.022	1.223.106		1.[illegible].372
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	1.[illegible].970.993		1.971.605	1.[illegible].[illegible].398	-
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan	[illegible].[illegible].027		[illegible].[illegible].500	[illegible].[illegible].227	
DAK	27.[illegible].560			27.[illegible].560	-
DTA	486.[illegible].[illegible]49	[illegible].[illegible].228	45.[illegible].[illegible].630	[illegible].[illegible].[illegible]89	[illegible].[illegible].[illegible]34
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-		
Gas Bumi 30%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 50%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Minerba	-	-	-	-	
Landrent	20.[illegible].[illegible]95	[illegible].[illegible].479	[illegible].[illegible].[illegible]73	20.[illegible].[illegible]23	[illegible].[illegible].[illegible]19
Royalti		[illegible].[illegible].479	[illegible].[illegible].303		[illegible].[illegible].[illegible]19
PPh	20.[illegible].[illegible]95		[illegible].[illegible].[illegible]73	20.[illegible].[illegible]23	-
Opsen Pajak	[illegible].[illegible].[illegible]34		[illegible].[illegible].[illegible]02	[illegible].[illegible].[illegible]34	[illegible].[illegible].[illegible]70
Cukai Tembakau	280.[illegible].[illegible]36	-	[illegible]4.[illegible].[illegible]75	[illegible].[illegible].[illegible]34	
Sanksi Cukai	[illegible].[illegible].[illegible]33	-	[illegible].[illegible].[illegible]35		[illegible].[illegible].[illegible]70
Sektor Lainnya		-			
Kehutanan		[illegible].[illegible].[illegible]50	[illegible].[illegible].[illegible]25		[illegible].[illegible].[illegible]75
PSDH	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	
PSDH		[illegible].[illegible].[illegible]03	[illegible].[illegible].[illegible]75		[illegible].[illegible].[illegible]75
Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible]90		[illegible].[illegible].[illegible]30	-	[illegible].[illegible].[illegible]35
Grand Total	[illegible].[illegible].[illegible]82	[illegible].[illegible].[illegible]01	[illegible].[illegible].[illegible]20	[illegible].[illegible].[illegible]92	[illegible].[illegible].[illegible]65

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Ngada

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 20.. S	KB TA 20.. P	LB s.d TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/202..)	Penyelesaian LB s.d TA 20.. P (KMS No. ../KM../2021)	Sisa LB s.d TA 20.. P (KMS No. ../KM../2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			25.977.372	24.979.727	997.645
PPh			80.718.250	24.979.727	40.738.866
PPh Pasal 21	-		43.148.700	34.979.434	8.169.266
PPh Pasal 25/29	-	-	2.321.587	-	21.071.287
PPh	-	-	58.152.102	-	58.152.102
Bagi Rata		-	-		
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perbatasan			51.136.127		37.798.131
Bagian Daerah Selatan Lainnya					-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagian Pemerintah Perbatasan					-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	2.666,90	-	2.605.981
Bagian Pemerintah Selatan Lainnya	-	-	-	-	
CHT					
SDA			124.724.976		136.920.849
Migas	-			-	-
Minyak Bumi (15%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (DAK)	-	-	-	-	
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Pilot					
Gas Bumi (70%)					
Gas Bumi (DAK)					-
Gas Bumi Dalam Wilayah Kerja Pilot	-		-	-	-
Minerba	-	-	26.551.162	-	133.369.130
Tambang	-	-	121.304.262	-	132.307.000
Royalti		-	1.246.102		1.249.130
Panas Bumi					
Bonus Produksi				-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Kehutanan			2.371.748		2.371.748
DR					
PHT	-		-	-	-
PSDH	-	-	2.371.748	-	2.371.748
Perikanan		-	-		
Grand Total			249.794.210	24.979.727	224.814.510

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nganjuk

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Salur TA 2020	LB Salur TA 2020	Penyaluran KB DBH Bersumber TA 2020 (KMK No. 378/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2]-[4]	[6]
Pajak	1.964.050.077		810.595.400	1.153.454.677	2.454.700
PPh	963.462.461		427.142.800	536.319.661	-
PPh Pasal 21	570.074.877	-	435.040.000	135.034.587	
PPh Pasal 25/29	87.401.384	-	20.795.500	58.605.701	
PBB	2.327.350.030	-	396.372.000	1.930.978.230	2.454.700
Bagi Hasil	1.991.900.966		200.089.100	1.729.210.296	-
Bagian Daerah Migas	77.950.031		90.220.300	-	2.277.400
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pajak Bumi	70.100.378	-	70.407.800		307.422
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Perkehutanan	8.410.400		10.220.700		725.300
Bagian Daerah Sektor Tambang	3.149.569.077	-	3.664.300	306.904.777	
Biaya Pemungutan Migas	2.672.777	-	2.570.700		109.223
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	597.191		611.700	6.961	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkehutanan	12.274	-	248.400		35.946
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.166.021		298.300	7.167.721	
Opsen	3.651.196			3.651.196	-
ADA	99.317.838	7.204.106	132.155.050	3.366.206	174.320.726
Migas	-	-	-		-
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Bagian Daerah (0,5%)					
Bagian Daerah dalam rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Mineral	20.050.098	-	35.775	20.100.323	
Panas Bumi					
Minerba	20.050.098	-	35.775	20.100.323	-
Cukai Hasil	13.790.750	5.963.950	13.621.850	1.920.885	16.714.751
Tarif Dasar 1%	3.770.753	-	2.576.675	11.203.878	-
Tarif Tambahan	-	5.866.054	1.017.775		10.711.731
Bagian Bagian Administrasi					
Kehutanan		1.561.759	320.025	-	2.097.575
DR	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-		-
PSDH		1.561.759	320.025		2.097.575
Perikanan	1.019.150.967		310.451.020	-	101.699.020
Grand Total	5.187.917.141	7.204.106	1.291.720.850	3.189.917.397	183.960.316

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sikka

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	163.072.084	38.099.097	126.972.987
PPh			111.527.211		111.527.211
PPh Pasal 21			111.527.211		111.527.211
PPh Pasal 25/29	-		-	-	-
PBB	-	-	51.545.013	36.699.237	14.845.776
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Migas					-
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Pasal 21	-		-	-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pemotongan	-	-	49.145.490	38.099.237	10.446.253
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas				-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pasal 21	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pemotongan					-
Biaya Pemungutan Daerah			4.099.591	-	4.099.591
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-		
BEA			20.923.301		20.923.301
Migas					-
Migas Bagian 85%	-		-	-	-
Migas Bagian 0,5%	-	-	-	-	
Migas Bagian Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bagian 30%					-
Gas Bagian 70%					-
Gas Bagian Dalam Rangka Otsus					-
Mineral	-		1.248.100	-	1.248.100
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	247.100	-	1.248.100
Panas Bumi					
Iuran Produksi					-
Iuran Tetap				-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	28.675.701		28.675.701
DR					
PSDH					-
Total	-	-	28.675.701	-	28.675.701
Perikanan	-	-	-	-	
Grand Total			199.070.785	38.099.237	160.971.548

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sikka

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesteran TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	8.676.237.450	-	18.901.000	7.992.863.077	3.749.516
PPh	1.487.205.616	-	701.700.450	905.388.210	
PPh Pasal 21	1.280.841.222		723.610.800	161.300.422	
PPh Pasal 25/29	206.364.394		68.110.650	211.787.794	-
PBB	2.046.896.834		39.411.650	1.985.195.441	3.749.516
Bea Bala	1.941.650.184	-	365.689.500	1.720.272.958	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	114.807.512	-	115.475.450		3.067.938
Cukai					
Cukai Daerah Untuk Dalam Negeri				-	-
Cukai Daerah Untuk Impor				-	-
Bagian Daerah Perikanan	40.838.877	-	-	40.505.377	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.300.907	-	5.201.200	210.488.607	
Biaya Pemungutan Pajak	3.947.302		1.119.000		2.681.696
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Cukai Daerah	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya		-			
Biaya Pemungutan Perkebunan	1.960.135			1.959.135	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	1.176.104		906.300	269.724	-
CHT	3.063.818	-	-	3.063.818	
SDA	102.217.826	18.315.193	820.715.705	81.617.229	149.171.677
Migas					-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%		-			
Gas Bumi dalam rangka Otsus					-
Minerba	20.250.799		99.715	20.150.920	-
Panas Bumi	-		-	-	-
Kehutanan	20.750.208	-	89.775	20.660.433	
Pertambangan Umum	15.780.778	5.271.781	11.303.750	11.738.583	14.081.427
Iuran Produksi	13.780.778	-	2.577.875	11.203.848	
Iuran tetap		5.271.781	8.725.875		13.981.657
Perikanan Bagian Pemerintah	-		-	-	-
Pertanian	-	13.043.412	4.439.805	-	17.483.217
DR	-	-			-
PNBP					-
Pajak	-	13.043.412	4.439.805	-	17.483.217
Perikanan	159.174.050	-	8.683.500	-	37.004.225
Grand Total	4.000.233.277	31.358.593	1.321.020.925	2.792.245.151	192.829.393

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumba Barat

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2021	KB TA 2021	Kurang Salur TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 317/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 317/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
Pajak			47.569.909	23.202.705	24.367.204
PPh			23.202.705	23.202.705	
PPh Pasal 21	-	-	23.202.705	23.202.705	
PPh Pasal 25/29	-	-	-		
PBB			21.277.203		24.367.204
Dari Kota					-
Dari/dari Daerah Kota				-	-
Bagian Daerah Kab. Minyak	-	-	-	-	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan			25.289.802	-	27.289.802
Bagian Daerah Perkebunan				-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Panas Bumi				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	970.400	-	970.400
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT				-	-
PDA			1.15.920.005	15.104.263	303.605.737
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam rangka Otsus				-	-
Gas Alam 70%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Minerba	-	-	515.738.267	13.104.263	305.134.004
Landrent			317.990.159	13.104.263	299.885.896
Royalti			1.248.108		1.248.108
Kehutanan				-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Hasil	-	-	-		
Setoran Bagian Pemerintah					
Reboisasi			2.371.778	-	2.371.778
DAK			-	-	-
DTDTF	-	-	-		
PeDF	-	-	2.371.778		2.371.778
Perikanan					-
Grand Total			352.690.914	38.306.968	336.782.946

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sumba Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Defisit TA 2020	LB Defisit TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesta TA 2020 (KMK No. 3/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2] - [4]	[6]
Pajak	3.087.704.781	24.402.802	918.705.850	2.241.302.017	46.366.606
PBB	720.745.870		190.244.120	530.501.950	-
PPh Pasal 21	945.417.770		197.160.850	220.675.076	-
PPh Pasal 25/29	31.230.280		13.478.200	18.752.080	-
DBH	2.294.647.595	24.402.802	545.249.280	1.624.472.279	15.030.836
Bagi Rata	1.69 .656.196	-	765.688.700	1.726.271.202	
Bagian Daerah Induk	71.574.465		75.769.020		2.244.439
Bagian Daerah Non Migas				-	-
Bagian Daerah Pemekaran			-	-	
Bagian Daerah Penghasil	-	9.896.600	9.424.100		17.322.000
Bagian Daerah Perbatasan	-	18.438.400	10.078.200		23.577.800
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.790.007		8.631.300	205.064.707	-
Biaya Pemungutan Kurang	2.417.399		2.535.400	-	107.701
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-			
Biaya Pemungutan Perkebunan		412.420	320.920		731.764
Biaya Pemungutan Perikanan		953.200	499.500	-	1.452.100
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.165.924	-	338.900	7.167.924	
CHT	3.511.882	-		3.511.882	
SDA	102.217.958	8.227.082	228.427.370	31.364.230	115.605.420
Migas				-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Gas Bumi 30%	-				-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba	20.250.000		35.775	70.750.925	
Landrent	-	-	-		
Royalti	20.250.000	-	35.775	20.100.925	
Panas Bumi	18.780.758	5.772.782	11.302.572	11.250.968	13.301.572
Iuran Eksplorasi	18.780.758		2.506.975	11.200.975	-
Iuran tetap		5.772.782	8.795.675	-	13.301.572
Setoran Bagian Pemerintah		-	-		
PDL Lainnya	-	1.651.020	158.030		2.229.300
Tarif	-				-
Lainnya			-	-	-
Lainnya	-	1.651.020	158.030		2.229.300
Perikanan	151.185.960	-	216.861.020		101.097.020
Grand Total	3.773.492.177	31.227.182	1.749.329.677	2.011.727.220	118.962.876

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumba Timur

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	SISA TA 2018	SISA TA 2019	Total TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			255.316.886	237.215.686	18.101.200
PPh	-	-	237.215.686	237.215.686	-
PPh Pasal 21	-	-	237.215.686	237.215.686	-
PPh Pasal 22/23	-	-	-	-	-
PBB			18.101.200	-	18.101.200
Bea Bea				-	-
Sektor Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	17.551.400		17.551.400
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-			-
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Kehutanan			-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-		
Biaya Pemungutan Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Non Migas			669.800	-	669.800
Biaya Pemungutan Pajak Daerah			-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Kehutanan	-				-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya				-	-
CHT			-	-	-
DAU	-	-	1.113.667.904	36.997.114	1.076.670.790
Migas	-	-			-
Migas Bruto 15%	-	-			-
Migas Bruto 0,5%				-	-
Migas Bruto dalam Rangka Otsus			-	-	-
Gas Bumi 70%			-	-	
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Non Migas	-	-	1.113.213.350	36.997.114	1.076.216.236
Tambahan			1.112.701.410	36.997.114	1.075.704.296
Reguler			1.349.150	-	1.349.150
Pokok Bumi		-	-	-	
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	
Pajak Bumi dan Bangunan	-	-			-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					-
Kehutanan			2.271.749	-	2.271.749
IHPH	-	-	-	-	
PSDH			2.271.749		2.271.749
Perikanan				-	-
Jumlah Total			1.371.984.720	274.212.800	1.097.771.920

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sumba Timur

(dalam rupiah)

[illegible]	LB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2021	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum dibayarkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10=7-9)	(11)
Pajak	[illegible]	29.076.800	1.510.232.130	3.265.201.170	15.792.998
PPh	1.741.776.320	-	770.005.700	971.705.929	
PPh Pasal 21	1.153.712.310		712.727.300	467.721.810	-
PPh Pasal 25/29	261.014.189		57.278.900	274.071.289	-
PDB	7.303.750.921	22.960.650	510.245.760	3.755.965.811	47.752.030
Cukai Rokok	1.491.950.938	-	965.639.760	1.726.070.207	
Bagian Daerah dari Migas	167.807.177	-	735.716.400		5.312.215
Bagian Daerah Non Migas		22.214.450	16.068.900		59.975.200
Bagian Daerah Pajak Dana				-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	872.363.254	-	54.070.500	777.713.094	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.209.027		8.034.300	206.094.727	
Bagian Pertambangan Migas	5.167.420		5.016.700	-	150.677
Bagian Pertambangan Non Migas	-	722.450	579.200	-	1.871.700
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Pertambangan Perkebunan					
Bagian Pertambangan Perkebunan	72.108.268		7.901.700	37.901.393	-
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	5.496.044	-	263.830	7.187.214	-
PBB	5.447.780	-	-	5.147.850	
BPHTB	115.217.256	570.568.782	167.057.825	31.261.206	513.412.177
Migas					-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%	-		-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-			
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Minerba	20.250.093	261.014.220	16.331.160	20.180.626	885.775.695
Panas Bumi	-	160.548.280	76.[illegible]75	-	635.778.603
Royalti	20.250.048	-	79.775	20.160.525	
Pajak Bumi	13.780.758	5.172.782	1.460.575	11.203.483	15.921.167
Luas Produksi	13.780.758		2.576.575	11.204.183	
Luas Lahan		5.172.782	6.725.675	-	13.96[illegible] 457
Penerimaan Negara Pemerintah			-	-	-
Kehutanan	-	567.750	520.025	-	2.047.875
IHR		-			
DBHPS					-
PHPT	-	1.597.150	599.675	-	2.047.875
Pertanian	59.[illegible]86.482	-	316.861.050	-	157.607.000
Grand Total	4.0[illegible]5.860.016	538.575.582	1.715.[illegible]5.425	2.49[illegible]5.376	8.0[illegible]2.702

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
TAHUN 2021

Kab. Timor Tengah Selatan

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	LB s.d TA 2018 [PMK No. [illegible]/PMK.07/2021]	Penyelesaian LB s.d TA 2019 [KEP-[illegible]/KM.7/2021]	Sisa LB s.d. TA 2019 [KEP-[illegible]/KM.7/2021]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			118.030.161	118.030.161	-
PBB				-	
PBB Pasal 21			-	-	
PBB Pasal 25/29	-	-	-		
PDP	-	-	1.145.350.474	115.038.474	-
Bagi Rata	-				-
Bagian Daerah Migas				-	-
Dana Bagi Hasil Migas			117.292.074	13.292.07-	
Dana Bagi Hasil Gas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-			
Bagian Daerah Pajak Lainnya					-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	6.116.707	6.116.707	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi					-
Biaya Pemungutan Pertambangan			-	-	
Biaya Pemungutan Kehutanan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Perikanan	-	-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
DPT				-	-
DAU			727.036.100	185.264.838	541.741.262
Migas		-	-	-	
Migas 0,10%	-	-	-		
Migas Tbh 0,5%	-				
Migas Bantuan Dalam Rangka Otsus	-				-
Gas 0,1%				-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus		-	-	-	
Minerba	-	-	727.907.150	186.210.058	541.771.202
Terdistri	-	-	745.761.030	185.230.058	560.130.128
Bagi II	-		1.218.100		1.243.120
Dana Bagi				-	-
Dana Alokasi			-	-	-
Dana Setup	-	-	-		
Setoran Bagian Pemerintah	-	-			
Pendapatan					-
DR				-	-
DAU	-	-	-		
DAK	-	-			
Tambahan	-				-
Grand Total			915.394.041	269.601.372	541.7[illegible].207

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Timur Tengah Selatan

(dalam rupiah)

URAIAN	KB Defisit TA 2020	LB Defisit TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (KMK No. 371/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum Disalurkan	LB TA 2020 yang belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2-4)	(6)
Pajak	3.371.170.335		1.035.149.100	2.452.271.035	3.213.580
PPh	992.178.496	-	564.956.300	427.622.196	
PPh Pasal 21	700.127.715	-	97.577.200	198.650.515	
PPh Pasal 25/29	292.360.736	-	15.255.400	219.105.336	-
PBB	2.378.490.919		470.292.700	1.040.457.235	3.213.580
Bagi Rata	1.961.059.698		215.649.700	1.726.370.298	-
Bagian Daerah Biaya	158.027.086		39.201.800		3.002.914
Bagian Daerah Non Biaya		-			
Bagian Daerah Penerimaan Baru		-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan				-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	217.790.007	-	8.691.200	209.098.707	
Biaya Pemungutan Migas	3.428.334	-	5.668.100	-	209.966
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-				
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-			
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.493.047		318.800	7.174.294	-
OLT	172.850			172.850	-
SDA	167.307.456	0.233.442	490.091.300	24.150.126	1.310.144.762
Migas		-	-		
Minyak Bumi 15%			-	-	-
Migas Bumi 0,5%			-	-	-
Minyak Bumi dari dalam Negeri (Final)	-				-
Gas Bumi 30%	-	-			
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Negeri (Final)		-	-	-	
Minerba	16.307.456	1.011.142.362	150.955.050	15.406.973	1.164.996.535
Batubara		1.011.142.362	150.955.575	-	1.164.996.535
Panas Bumi	16.307.456		411.075	15.896.973	-
Kehutanan	13.780.758	5.173.782	11.300.350	11.203.863	1.407.177
Iuran Tetap	13.780.758	-	2.576.500	11.207.863	
Iuran Hasil		5.173.782	8.723.675	-	1.407.177
Kehutanan Reguler Penerimaan Baru			-	-	-
Perkebunan	-	2.606.107	207.050		3.756.050
DR	-	-	-		
PSDH		-	-	-	
Perikanan		2.606.107	207.050	-	3.756.050
Pertambangan	50.136.920		316.961.000		137.602.020
Grand Total	3.564.434.87	1.012.51	1.035.152.500	2.470.271.215	1.348.421.142

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Timor Tengah Utara

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d TA 2019 (PMK No. 226/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d TA 2020 (PMK No. 7/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (PMK No. 7/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			752.102.960	2.354.966	546.685.607
PPh	-	-	752.102.960	2.354.966	546.685.607
PPh Pasal 21	-	-	720.544.278	2.354.966	514.007.011
PPh Pasal 23/26	-	-	32.558.682		32.678.596
PBB					-
Cukai Hasil Tembakau					-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas		-	-		
Bagian Daerah Pajak Lain	-	-	-		
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Pertambangan				-	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Pajak Lain				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan		-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
CHT			-	-	-
PPA	-	-	581.359.712	-	1.359.359.712
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi (18%)		-			
Minyak Bumi (0,5)					-
Minyak Bumi (Dana Kompensasi Khusus)				-	-
Gas Bumi (69%)	-		-	-	-
Gas Bumi (0,5%)	-	-	-	-	
Gas Bumi (Dana Kompensasi Khusus)	-	-	-		
Minerba		-	1.359.027.207		1.359.027.961
Landrent			1.359.022.065		1.359.022.065
Royalti			20.135.142		20.145.918
Panas Bumi	-		-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap	-	-			
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan			2.371.776	-	2.371.743
DR	-	-	-	-	
DTPH	-	-	-		
PSDH			2.371.776		2.371.743
Perikanan					-
Grand Total	-		2.354.493.672	2.354.966	1.363.043.439

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Timor Tengah Utara

(dalam rupiah)

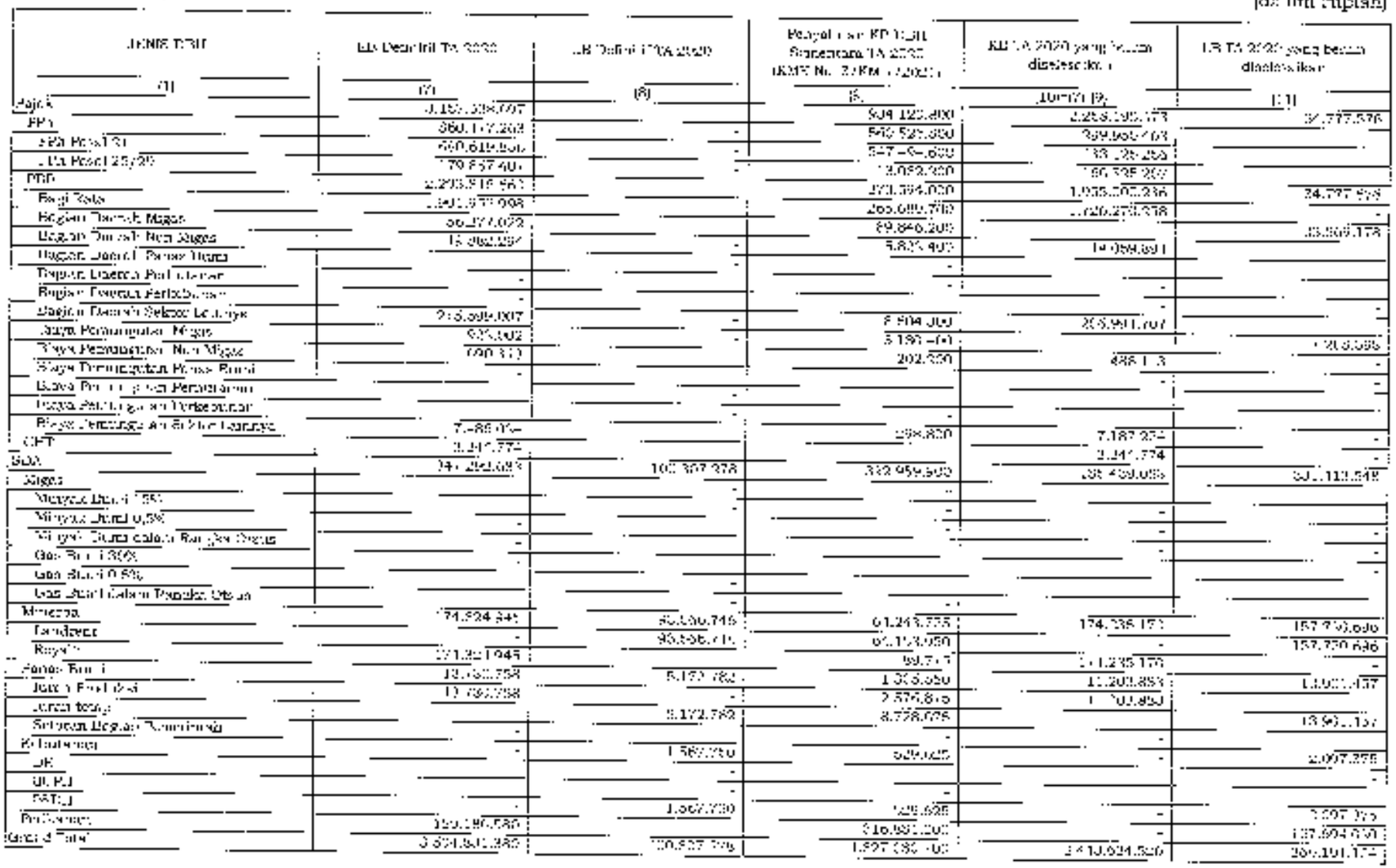

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Kupang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	KB s.d. TA 2019 (PMK No. 2?/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	318.446.004	70.413.370	248.032.634
PPh	-	-	318.446.004	70.413.370	248.032.634
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	318.446.004	70.413.370	248.032.634
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	-	3.619.648	-	3.619.648
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	-
Mineral dan Batubara	-	-	1.248.130	-	1.248.130
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	1.248.130	-	1.248.130
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Setoran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	2.371.518	-	2.371.518
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	2.371.518	-	2.371.518
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	-	322.065.652	70.413.370	251.652.282

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

(dalam rupiah)

Kota Kupang

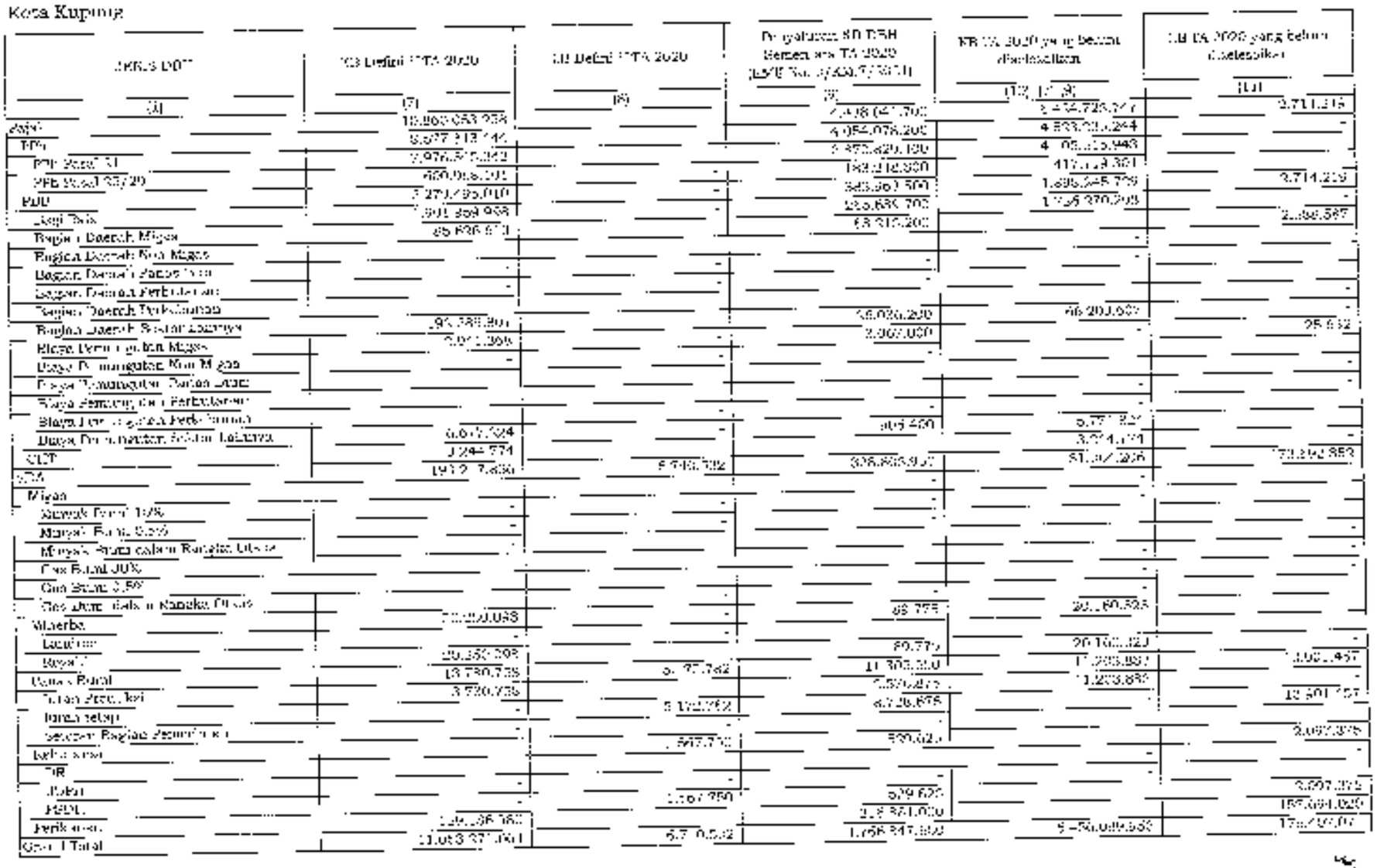

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Rote Ndao

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2022)	Sisa LB s.d TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak					
PPh					
Pph Pasal 21	-				
Pph Pasal 25/29	-	-			
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata		-	-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Pasal Dalam	-	-			
Bagian Daerah Perhitungan		-	-	-	-
Bagian Daerah Tarif Progresif			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-				
Bagian Pemungutan Migas	-	-			
Bagian Pemungutan Non Migas		-	-	-	-
Bagian Pemungutan Tarif Progresif			-	-	-
Bagian Pemungutan Perhitungan	-				
Bagian Pemungutan Perkebunan	-	-			
Bagian Pemungutan Sektor Lainnya		-	-	-	-
PPnT		-	-	-	-
SDA			6.230.051	421.025	5.810.349
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 2,5%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Panas Bumi		-	1.248.150		1.248.150
Sumberdaya		-	-	-	-
Royalti		-	1.248.150	-	1.248.150
Pertambangan Umum				-	-
Iuran Tetap	-				
Iuran Eksplorasi	-	-			
Iuran Eksploitasi (Royalti)		-	-		
Perikanan		-	3.981.901	421.025	3.560.876
PPh	-			-	-
PPh Pasal 21	-				
PPh Pasal 25/29		-	3.981.901	421.025	3.560.876
Pertanian		-	-	-	-
Kehutanan			1.000.000	421.025	578.975

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kota Nama (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Realisasi DBH Berdasarkan PMK 226/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.696.308.054		302.918.576	3.393.389.478	3.241.695
PPh	765.096.795	-	403.477.400	361.619.395	-
PPh Pasal 21	665.930.201	-	202.330.620	463.599.581	-
PPh Pasal 25/29	91.874.704	-	11.096.020	80.778.684	-
PPN	2.930.278.031	-	288.051.700	2.642.226.331	3.241.695
Bea Lelang	1.911.939.000		98.569.520	1.813.369.480	
Bagian Daerah Hasil	937.616.927	-	12.306.320	925.310.607	3.182.377
Bagian Daerah Non Migas	-	-			-
Bagian Daerah Dana Bagi	-			-	-
Bagian Daerah Perikanan				-	
Bagian Daerah Pertambangan				-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	915.699.607	-	8.604.300	907.095.307	-
Biaya Pemungutan Migas	3.077.082	-	3.922.700	-	155.318
Biaya Pemungutan Non Migas				-	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi			-	-	
Biaya Pemungutan Perikanan		-			-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-			-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.750.027		288.900	7.187.224	
CHT	14.177.439	-	9.959.776	2.977.939	
SDA	191.387.810	6.743.559	328.853.970	11.334.190	270.895.852
Migas	-	-			-
Minyak Bumi 15%	-			-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi dari Kontraktor Cooperation			-		
Gas Bumi 30%		-	-		-
Gas Bumi 0,5%	-	-		-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Hilir	-	-		-	-
Minerba	20.120.077		39.772	9.330.497	-
Panas Bumi	1.110.974		-	160.974	
Kehutanan	20.230.096		39.772	20.160.525	
Pertambangan Umum	13.790.758	5.172.792	17.505.532	1.203.583	13.301.797
Iuran Eksploitasi	3.780.758	-	2.576.875	11.203.883	-
Iuran Tetap	-	5.172.792	6.728.657	-	15.951.437
Setoran Bagian Pemerintah Atas Laba				-	
Perikanan		1.570.767	329.625		2.097.375
Lainnya	-	-	-	-	-
Tambang	-			-	-
PNBP		1.570.767	329.625	-	2.097.375
Kehutanan	156.730.058		216.861.020	-	101.639.020
Jumlah Total	5.399.526.944	6.743.559	731.744.376	2.826.479.218	171.027.797

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Manggarai Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2020)	Penyesuaian LEBIH BAYAR TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LEBIH BAYAR DBH 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	-	-	
PPh		-			
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					-
PPN	-		-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil					-
Bagian Daerah Penghasil				-	-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	
Bagian Daerah Bukan Penghasil			-		
Bagian Pemerintah Aceh					-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagian Pemerintah Pertambangan			-		-
Bagian Pemerintah Kehutanan	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-		
Sektor	-	-	4.3-0.251	818.01	3.302.013
Migas					
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba			1.216.120		1.265.,00
Landrent		-	-	-	-
Royalti	-	-	249.150	-	1.265. 00
Panas Bumi	-	-	-		
Dana Reboisasi					
Dana Hasil					
Setoran Sisa Lebih Pemerintah				-	-
Kehutanan	-	-	2.491.45-	8-8.01	7.142.043
IUPHHK	-	-	-		
IUPHHBK					
PSDH		-	2.991.391	843.01	5.147.343
DR	-	-	-	-	-
Grand Total	-	-	4.210.654	843.01	8.307.343

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Mangga Besar Barat (dalam Rupiah)

JENIS DBH	PB Definitif TA 2020	LP Definitif (A-B)	Penyaluran KB DBH Sebelum PPh (A-B) [PMK No. 3/PMK.7/2021]	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang sudah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	2.058.414.708		937.276.677	2.080.019.675	3.581.591
PPh	1.224.414.971		511.102.200	713.712.771	
PPh Pasal 21	1.056.782.917		197.172.200	859.689.511	-
PPh Pasal 23/26	167.632.504	-	14.526.000	153.106.504	-
PBB	2.360.132.03	-	435.574.80	1.060.590.595	3.85 .594
Bea Ba	1.081.050.918	-	285.638.700	1.726.020.208	
Bagian Daerah Migas	114.004.193		120.072.10		3.783.917
Bagian Daerah Non Migas	23.697.181			23.697.181	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-		-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	1.1.201.397		10.337.200	301.897.617	
Biaya Pemungutan Migas	4.067.470		4.281.900	-	157.677
Biaya Pemungutan Non Migas	872.252	-	-	872.252	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi			-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.20 .87	-	360.720	7.245.17	-
CHT	23.807.26	-	7.250.827	6.577.039	
DBH	192.21 .83	1.13.332	328.493.950	11.364.206	13.092.863
Migas					-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,1%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Non Migas	30.350.696	-	89.775	30.150.921	-
Batu Bara	-	-	-	-	-
Kehutanan	20.050.696	-	89.775	23.160.921	-
Panas Bumi	13.790.736	1.1 2.732	11.302.572	11.203.883	13.901.747
Pungutan Kehutanan	13.790.736		2.0 6.975	11.203.883	
Pungutan Lain	-	9.142.732	9.726.675	-	13.91 .457
Sektor Lainnya Pemerintah	-	-	-	-	-
Kelautan	-	1.707.750	529.625		2.017.375
Jas					
TEPM				-	-
PBDE	-	1.567.750	529.625	-	2.017.375
Reklamasi	17.186.080	-	3.6 .851.050	-	157.074.020
Grand Total	2.901.1 2.747	1.1 2.732	201.082.777	2.711.383.981	17.7 .4.4 6

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kolom Kegiatan: (dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian TA s.d. TA 2019 (SMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Migas					
PPh					
PPh Pasal 21	-			-	-
PPh Pasal 22 dan 29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata			-		
Bagian Daerah Minyak					
Bagian Daerah Non Migas	-				-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbatasan		-	-	-	-
Bagian Daerah Perkotaan				-	
Bagian Daerah Sektor Tertinggi					-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					
Biaya Pemungutan Perkotaan					
Biaya Pemungutan Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai					
PDA			8.230.631	823.063	7.712.068
Migas	-		-		-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 69,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	5.987.670	647.310	5.340.360
Landrent		-	4.859.520	647.310	8.702.202
Royalti			1.048.150		1.285.102
Pajak Lain					
Iuran Tetap	-				-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan			2.242.961	175.753	2.371.748
DR					
PSDH	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	2.242.961	175.753	2.371.748
Perikanan					
Grand Total			8.230.631	823.063	7.712.068

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nagekeo

(dalam rupiah)

URAIAN	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH Desember TA 2020 (PMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang telah disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.097.703.253		798.459.113	2.299.178.042	2.928.761
PPh	677.382.171		389.215.890	288.330.911	
PPh Pasal 21	670.210.070		373.649.930	296.397.970	-
PPh Pasal 25/29	88.026.111		15.626.600	92.726.341	-
PBB	2.81 335.295	-	373.827.800	1.940.452.329	2.028.784
Dagi hasil	1.097.050.058	-	200.089.700	1.776.960.396	-
Bagian Daerah Migas	93.070.428		96.8 5.700	-	1.790.252
Bagian Daerah Non Migas			-		-
Bagian Daerah Pasar Dunia			-		-
Bagian Daerah Pertimbangan		-			-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-		-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.500.007		8.634.900	206.994.707	
Biaya Pemungutan Migas	3.197.796		3.335.300		133.500
Biaya Pemungutan Non Migas		-			-
Biaya Pemungutan Pasar Dunia	-	-		-	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-			-	
Biaya Pemungutan Perbendaharaan			-		-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.436.621	-	206.900	7.197.221	-
Cukai	45.700.763	-	26.286.273	18.414.509	
PDP	191.005.975	6.770.592	809.924.960	37.702.945	170.698.562
Migas			-		
Minyak Bumi 15%			-		-
Minyak Bumi 0,5%		-			-
Kurang Salur Tahun Sebelum Pengka Utama	-	-		-	
Gas Bumi 15%	-			-	
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Bagian Pengka Utama			-		
Mineral	31.296.207	-	707.775	20.165.302	-
Iuran Tetap	546.109	-	516.100	526.009	-
Royalti	30.750.098	-	89.775	20 .62.373	-
Pasal Dua	19.780.756	3.172.787	1.705.960	11.207.883	3.097.157
Pasal Anomalat	11.140.758		3.576.675	11.207.883	
Pasal Lainnya		3.172.787	3.728.695		3.90 .457
Kekurangan Bagian Pemerintah		-	-		-
Perikanan	-	3.597.795	529.820	-	3.067.975
PNBP	-		-		
Pasal 22			-		
PNBP		1.947.130	529.820		3.055.595
Perikanan	133.185.330	-	516.961.300		107.794.220
Jumlah Total	3.288.707.415	6.770.592	1.327.421.260	2.370.848.244	173.027.638

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumba Barat Daya

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PMK 226/PMK.07/2019	PMK 226/PMK.07/2019	PMK No. 39/PMK.07/2021	Perubahan PMK 226/PMK.07/2019 (PMK No. 3/KM.7/2021)	Jenis DBH sesuai PMK 226/PMK.07/2019 (PMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	-		-
PBB					-
PBB Pasal 21				-	
PBB Pasal 25/29			-	-	
BPHTB	-	-	-	-	
Tarif Pajak	-	-	-		
Bagian Daerah Migas	-				-
Bagian Daerah Non Migas				-	
Bagian Daerah Pasca Bond			-	-	
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan	-	-			-
Bagian Daerah Sektor Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pasca Bond	-	-			-
Biaya Pemungutan Pertambangan				-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan			-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-		
CHT	-	-			-
DTA	-		516,307,217	51,931,735	48,730,502
Migas				-	
Minyak Bumi 15%			-	-	
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-		
Gas Bumi 15%	-				-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi Hasil Bagian Pemerintah				-	-
Minerba		-	540,595,493	54,026,725	549,352,774
Landrent	-	-	542,757,309	57,026,725	585,130,611
Royalti	-	-	1,218,100		1,218,100
Panas Bumi	-				-
Sewa Pemakaian				-	-
Iuran Eksploitasi			-	-	
Setoran Bagian Pemerintah		-	-		
Kehutanan	-	-	2,371,716		2,371,716
IHH	-			-	-
IIUPH				-	
PSDH		-	2,371,716		2,371,716
Perikanan	-	-	-		
Grand Total	-		516,307,217	54,026,725	491,730,502

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumba Barat Daya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	DB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Definitif TA 2020 (KMK No. 373/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
PPh	1.212.875.702		516.017.200	2.430.336.767	5.403.200
PPh	754.250.861		418.662.461	835.588.552	
PPh Pasal 21	692.779.515	-	405.057.600	377.734.316	
PPh Pasal 25/29	71.469.686	-	13.607.200	57.080.236	-
PBB	2.473.622.732	-	897.781.700	2.081.921.212	3.433.660
Bagi Hasil	1.991.959.908		200.668.102	1.735.240.596	-
Bagian Daerah Masa	110.031.077		110.556.102	-	3.837.433
Bagian Daerah Non Migas		-	-		-
Bagian Daerah Penerimaan	-	-	-		-
Bagian Daerah Pertambangan	-				-
Bagian Daerah Perikanan	130.062.131		3.032.205	134.970.35	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	351.360.027		8.604.340	206.904.727	
Biaya Pemungutan Migas	2.779.898	-	3.041.500		161.457
Biaya Pemungutan Non Migas	-				-
Biaya Pemungutan Panas Bumi					-
Biaya Pemungutan Pertambangan			-		
Biaya Pemungutan Perikanan	6.601.723	-	243.120	6.529.633	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.486.074	-	208.800	7.197.324	-
CHT	12.871.097			12.871.097	-
SDA	193.211.495	6.749.102	326.805.950	31.864.206	176.072.932
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi (85)	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%	-	-			-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	91.350.706	-	59.775	20.160.353	-
Panas Bumi	-	-			-
Bagi Hasil	28.250.006		59.775	20.160.353	-
Iuran Produksi	13.790.755	5.172.782	13.306.550	1.709.983	13.501.357
Iuran Tetap	13.790.755	-	2.576.875	1.709.983	
Iuran Other	-	5.172.782	9.729.675		13.501.357
Setoran Bagian Pemerintah	-	-			-
Kehutanan		1.576.320	529.625	-	3.107.375
PSDH			-	-	
DBHDR	-	-	-		
Perikanan	-	1.576.320	529.625		3.107.375
Pungutan	38.186.783		10.981.200		157.65 - 000
Grand Total	2.140.050.338	8.770.532	1.444.850.450	2.461.667.958	177.163.717

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumba Tengah

(dalam ribuan)

Jenis DBH	Kas TA 2018	Kas TA 2019	Realisasi TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian Kas TA 2020 (KMK No. 9/KM.7/2021)	Kas Realisasi TA 2020 (KMK No. 2/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak					-
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 22/26	-	-	-	-	-
PBB					
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas	-			-	-
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi		-	-		
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-		-	-	
Bagian Pemerintah Non Migas					
Bagian Pemerintah Panas Bumi					-
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perkebunan		-	-		
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					
DTP					-
DTA	-		431.401.914	45.743.191	385.658.723
Migas	-	-	-	-	
Banyak Daerah 3/8		-	-		
Banyak Daerah 0,5 %					
Nilai Bagi Hasil Kurang Salur					-
Cost Recovery	-			-	-
Cost Recovery 0,5%	-	-	-	-	-
Cost Recovery Sisa yang Belum Diterima	-	-	-	-	-
Manfaat		-	430.030.166	43.210.191	386.819.975
Landaan			428.782.066	43.210.191	385.571.875
Jasa-jasa			1.248.100		1.248.100
Pajak Panas Bumi	-		-	-	-
Bunga Pinjaman	-	-	-	-	-
Denda Bunga		-	-		
Kekurangan Bayar Pengembalian					
Kelebihan			2.371.748		2.371.748
PPh	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
PBBP2			2.371.748		2.371.748
Perikanan					
Jumlah	-		431.401.914	45.743.191	385.658.723

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumba Tengah

(rupiah)

JENIS DBH	KB Dan LB TA 2020	LB Dan KB TA 2020	Penyaluran APBN TA 2020 (KMK No. 191/KM.7/2021)	TA 2020 yang Belum Disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan
[1]	[2]	[6]	[9]	[10=(2-9)]	[11]
DBH	2.713.632.840		616.539.700	2.170.989.979	293.405
PPh	481.433.976		304.730.100	197.903.979	-
PPh Pasal 21	427.076.345	-	283.579.800	114.496.645	-
PPh Pasal 25/29	53.656.731	-	19.756.800	12.050.231	-
PBB	2.208.765.120	-	371.224.300	1.910.432.220	2.921.139
Dana Bagi	1.991.950.960		265.689.100	1.726.260.260	
Bagian Pemerintah Pusat	90.557.715		90.557.900		367.060
Bagian Daerah Penghasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Kehutanan	2.859.097	-	3.624.500	765.934.707	-
Biaya Pemungutan Migas	2.172.376	-	3.240.700	-	181.377
Biaya Pemungutan Pertambangan Umum					
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perikanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Kehutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.186.327		298.400	7.187.224	
SDA	3.341.774			2.241.774	
BHA	199.217.368	6.740.332	28.600.950	31.164.205	173.693.550
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	20.250.098	-	80.775	20.160.323	-
Landrent					
Royalti	20.250.098		89.775	20.160.323	
Panas Bumi	13.760.713	5.172.792	11.000.537	1.233.049	19.301.457
Iuran Pokok	3.760.758	-	2.076.675	1.233.649	-
Iuran Tetap	-	5.172.792	8.728.675	-	13.901.457
Setoran Bunga Pinjaman					
Kehutanan		1.567.540	920.025		2.097.375
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH		1.567.540	920.025		2.097.375
Perikanan	169.156.956		310.851.050		107.694.025
Grand Total	5.366.957.701	6.740.332	1.701.360.350	2.136.264.050	176.614.251

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Manggarai Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2016	KL TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Dana Insentif DBH TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	7.560.511	-	7.560.511
PPh		-	-		
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					-
PBB	-		7.560.511	-	7.560.511
Bagi Rata	-	-	-	-	
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Non Migas			7.560.511		7.560.511
Bagian Daerah Pasal Dalam					-
Bagian Daerah Perkebunan	-			-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas	-				-
Biaya Pemungutan PPh Migas	-	-	264.196	-	264.196
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perkebunan					-
Biaya Pemungutan Bidang Lainnya	-			-	-
PPh OPT	-	-	-	-	
PBB	-	-	18.437.292	25.550.028	43.987.320
Migas					
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pertambangan			115.060.374	25.200.261	90.859.863
Landrent	-	-	114.812.044	25.200.261	89.611.783
Royalti	-	-	1.248.330	-	1.248.330
Dana Reboisasi	-	-	-		
Dana Provisi					
Dana Hasil					-
Setoran Pegawai Pemerintah				-	-
Kehutanan	-	-	2.371.748	-	2.371.748
IHPH	-		-		
PSDH					
DR		-	2.371.748	-	2.371.748
Perikanan	-	-	-	-	-
Cukai Hasil	-	-	126.031.403	25.550.028	100.961.122

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Manggarai Timur

(rupiah)

JENIS DBH	KB Tahun APBN 2020	LB Tahun APBN 2020	Perubahan KB TA 2021 Berdasarkan PMK No. 8/KMK.7/2021	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2]-[3]	[6]
Pajak	2.301.039.311		755.139.228	2.301.039.311	3.279.136
PPh	961.680.760		357.010.207	961.680.760	-
PPh Pasal 21	894.699.960	-	345.011.700	894.699.960	-
PPh Pasal 25/29	61.945.707	-	1.850.202	61.945.707	
PBB	2.301.903.143	-	387.733.100	1.341.452.220	3.279.136
Cukai Hasil Tembakau	1.901.959.954		273.697.900	1.901.959.954	
Bagian Daerah Migas	106.210.861		101.310.900		1.127.039
Bagian Daerah Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perikanan		-	-		
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	335.559.007		8.904.000	326.894.007	-
Biaya Pemungutan Migas	3.644.253	-	3.801.420	-	172.147
Biaya Pemungutan Dari Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perikanan				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.486.824	-	209.800	7.127.251	
CHT	10.241.245		13.033.028	3.240.103	-
SDA	290.842.629	5.770.532	172.629.929	31.014.206	173.841.734
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (15%)	-	-	-	-	
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi (30%)					-
Gas Bumi (0,5%)				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	230.241.831	-	3.023.450	20.101.828	149.282
Landyear	3.241.798	-	3.023.675		149.282
Royalti	227.000.034		99.775	20.101.828	
Panas Bumi	32.760.798	5.770.532	1.350.000	10.912.950	13.691.452
Iuran Tetap/Iuran Produksi	32.760.798		1.357.815	10.703.863	-
Iuran Tetap	-	5.770.532	6.773.675	-	18.907.447
Bonus Bagian Pemerintah	-		-		
Kehutanan		1.567.750	823.025		2.097.975
IPK					-
PSDH	-	-	-	-	-
DBHDR	-	1.567.750	529.675		2.097.975
Perikanan	139.140.940		316.541.200		151.697.020
Grand Total	3.020.920.940	5.770.532	1.091.979.200	2.361.732.175	171.150.930

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Siaru Raiata

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KUTA 2018	KUTA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 2/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 2/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29					-
PBB				-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			-	-	-
Bagian Daerah Penghasilan Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah Non Migas	-				-
Bagian Daerah Pajak Alam					-
Bagian Daerah Perhutanan				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			-
Bagian Wajib Pungutan Migas					-
Bagian Pemerintah Dari Migas			-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-			
Bagian Pemerintah Perhutanan					-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya			-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
PBH	-	-	74.006.392	7.109.289	66.896.103
Migas					-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Daerah	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah					-
Minerba			(1.721.671	7.109.689	(8.831.360
Panas Bumi			(0.470.544	7.479.639	(8.006.083
Kayu	-		1.248.150	-	1.248.150
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-			-
Iuran Izin					-
Sektor Lainnya Pertambangan			-	-	-
Perikanan	-	-	2.371.748	-	2.371.748
DR	-	-			
PNBP					-
PNBP			2.371.748	-	2.371.748
Pertanahan			-	-	
Grand Total	-	-	74.006.392	7.109.689	66.896.703

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sabu Raijua

(dalam rupiah)

JENIS DBH	AB Definitif TA 2020	LO Definitif TA 2020	Perkiraan AB DBH Sementara TA 2020 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sal. TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum dipergunakan
[1]	[7]	[8]	[9]	[10] = [7] - [9]	[11]
Pajak	2.993.654.490	-	673.238.700	2.320.415.790	1.950.864
PBB	711.038.020		311.200.800	399.837.220	-
PPh Pasal 21	659.351.870		293.972.300	365.697.570	
PPh Pasal 25/29	52.730.050		10.927.800	41.913.450	
BBNKB	1.271.253.313	-	328.667.600	1.040.453.228	1.950.864
Pajak Rokok	301.990.938	-	263.038.700	1.728.270.208	-
Pungutan Daerah Atas Minyak	63.732.258	-	62.807.100		1.685.815
Pungutan Daerah Atas Migas				-	
Pungutan Daerah Atas Panas Bumi			-	-	
Pungutan Daerah Atas Perkebunan		-	-		
Pungutan Daerah Atas Kehutanan	-	-			-
Pungutan Daerah Atas Pertambangan Umum	315.595.307		2.694.530	306.894.707	-
Pungutan Atas Penggunaan Migas	2.965.260		2.162.720	-	776.157
Pungutan Atas Penggunaan Sda Migas	-		-		-
Pungutan Atas Penggunaan Panas Bumi	-	-			-
Pungutan Atas Penggunaan Kehutanan				-	-
Pungutan Atas Penggunaan Perkebunan			-	-	
Pungutan Atas Penggunaan Sektor Lainnya	7.140.221	-	292.800	7.787.221	
Cukai	3.811.625	-		3.811.625	-
DBH	378.3-0.435	6.730.592	325.905.300	166.195.077	153.612.653
Migas				-	
Minyak Bumi			-	-	
Minyak Bumi Sda	-	-	-		-
Minyak Bumi Sebelum Kontrak Ditetapkan	-	-			-
Gas Bumi 30%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi Sebelum Kontrak Ditetapkan				-	-
Minerba	135.391.300	-	69.775	98.201.850	
Kehutanan	135.131.307	-	-	135.131.307	
Panas Bumi	20.760.768	-	60.777	20.165.120	
Pajak Bumi	15.780.737	6.172.782	11.305.750	11.202.262	3.992.467
Iuran Perikanan	13.780.778		2.375.870	11.705.580	-
Iuran Hutan		6.172.782	8.729.570	-	13.001.437
Setoran Bagian Pemerintah		-	-		
Perkebunan	-	1.557.750	507.623		2.065.373
Tambang	-				-
Minerba				-	-
Panas Bumi		1.557.750	507.623		2.065.373
Perikanan	199.165.930	-	376.887.200		137.091.720
Jumlah Total	3.371.816.825	6.730.532	972.144.000	2.119.362.777	1.152.202.905

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mukaka (dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	Sisa Kurang Bayar DBH s.d. TA 2019 (PMK No. 65/PMK.07/2020)	Penyesuaian DBH s.d. TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Sisa Kurang Bayar DBH s.d. TA 2019 (KPA No. 876/KPA/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	-	-	-
PPh		-	-		
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB	-				-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Dana Bagi Hasil					
Bagian Daerah Penghasil	-				-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-		
Wajib Pungut Migas					
Wajib Pungut Non Migas	-	-		-	-
Bukan Pemungutan Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bukan Pemungutan Perkebunan		-	-		
Wajib Pungut Perkebunan					
Wajib Pungut Bukan Sektor Lainnya	-			-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA		-	4.742.05-	-924.205	3.817.8?9
Migas					
Minyak Bumi 85%					
Minyak Bumi 0,5%	-	-		-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%			-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Migas Lain			1.219.100		1.219.100
Pertambangan	-	-		-	-
Royalti	-	-	1.243.. 2-	-	146.10?
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Jumlah Produksi			-		
Jumlah Pajak					
Asumsi Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan	-	-	1.951.954	-924.205	3.667.349
DR		-	-	-	
PSDH					
DBHTI	-		3.891.954	924.205	2.967.749
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	-	4.742.05-	-924.205	3.817.0-9

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Maluku

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Tertentu TA 2020 (SMS No. 2/KM.7/2021)	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	LB DBH 2020 yang belum disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
Pajak	3.511.392.719	-	585.939.000	2.925.977.019	2.959.597
PPh	1.822.741.213		366.127.400	656.364.813	
PPh Pasal 21	656.672.36-		342.628.800	127.113.564	
PPh Pasal 25/29	450.818.851		2.438.000	260.930.251	-
PBB	3.488.548.102	-	387.702.400	2.195.653.179	2.391.351
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.777.760.209	-	242.388.400	1.934.621.709	-
Bagian Daerah Penerimaan Migas	60.100.102	-	76.219.400	-	2.780.267
Bagian Daerah Penerimaan Non Migas	4.079.5-2		-	4.079.5-2	-
Bagian Daerah Penerimaan Panas Bumi	-		-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara		-		-	-
Bagian Daerah Perkebunan		-		-	-
Bagian Daerah Sektor Kehutanan	215.399.077		8.694.200	206.694.777	
Biaya Pemungutan Migas	2.858.341		2.738.400	-	108.054
Biaya Pemungutan Non Migas	141.651	-	-	141.651	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		-			
Biaya Pemungutan Perkebunan			-		
Biaya Pemungutan Pertambangan	-			-	
Biaya Pemungutan Sektor Kehutanan	5.486.027	-	208.800	5.277.227	-
CHT	5.580.000	-		5.580.000	-
SDA	309.826.119	6.278.732	326.892.135	323.504.536	97.490.077
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-			-	-
Minyak Bumi 0,5%		-		-	-
Minyak Bumi dalam Rangka DMO		-			-
Gas Bumi 30%			-		
Gas Bumi 0,5%		-	-		
Gas Bumi dalam Rangka DMO	-		-	-	
Mineral	313.4-7.182		89.777	3.2.357.358	-
Tertentu	222. 97.382	-		202.137.032	-
Perpajak	20.250.936	-	89.777	22.160.436	-
Panas Bumi	11.790.725	5.172.752	11.926.530	11.293.645	15.301.457
Iuran Produksi	11.790.715		2.576.675	11.300.895	
Iuran Tetap	-	5.172.752	9.728.675	-	10.901.767
Pungutan Bagian Pemerintah					
Kehutanan		1.105.980	360.000		1.420.475
DR			-		
PSDH	-		-	-	
DBHP	-	1.105.980	360.000	-	1.420.475
Perikanan	313.034.539	-	29.1.03.272		81.393.745
Grand Total	4.050.e.1.501	6.248.732	954.31. 935	5.779.334.270	96.786.058

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Maluku

(dalam rupiah)

LRAS 2021	RETA 2019	RETA 2019	LRA TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Alokasi LRA TA 2019 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	Sisa LRA TA 2019 (PMK No. 8/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)
Pajak	-	-	8.8.634.117	390.3xx.176	4xx.6x.9xx
PPh	-	-			
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 22/26				-	-
PBB			818.304.117	389.364.176	428.939.941
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		-	-	-	
Bagian Daerah dari Migas	-	-	-		
Bagian Daerah dari Non Migas				-	-
Bagian Daerah Pajak Daerah				-	-
Dana Bagi Hasil Pertambangan			99.874.236	57.85x.238	
Bagian Daerah dari Kehutanan	-	-	756.341.036	282.170.038	102.911.998
Bagian Daerah dari Perikanan	-	-			-
Biaya Pemungutan Migas				-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	18.95x.794		18.9xx.894
Biaya Pemungutan Kehutanan			40.902.270	-	40.902.270
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	
DBH	-	-	-	-	
SDA	-	1.572.058.434	8.8x.x.707.x41		2.xxx.xxx.xxx
Migas					-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 15%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%	-	-		-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Minerba			78.172.100	-	78.172.100
Landrent			78.172.100	-	78.172.100
Royalti	-	-	-	-	
Panas Bumi	-	-	-		
Iuran Tetap	-	-		-	-
Iuran Tetap				-	-
Seluruh Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan	-	1.527.958.434	3.9x5.3x3.241		2.xxx.xx3.x13
PSDH	-	1.330.785.402	3.242.741.377		1.913.741.977
DBHDR		196.941	723.249.864	-	723.052.964
DBHDR		137.197.123	-	-	-
Perikanan		-	-	-	
Grand Total	-	1.527.958.434	3.8x3.x7x.x78	390.3x4.176	3.xx3.xxx.x92

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Maluku

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Defisit DBH TA 2020	LB Defisit DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Kementerian Keuangan TA 2020 (SMP No. S-KM-.../2021)	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan	LB DBH TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	11.713.738.723	11.457.781	8.804.082.802	2.919.655.779	1.313.319.338
PPh	5.095.092.771		2.730.936.907	4.089.184.971	-
PPh Pasal 21	5.089.712.542		5.073.972.702	15.739.840	
PPh Pasal 25/29	1.013.338.229	-	286.638.605	958.414.695	
PBB	2.642.738.952	3.467.554	1.184.097.602	2.610.730.309	122.019.536
Bag/ Rata					
Bagian Daerah Migas	1.703.102.217		907.020.900	870.317.347	-
Bagian Daerah Non Migas	616.246.291		1.217.700	54.328.59	-
Bagian Daerah Sektor Panas Bumi	-	1.307.681	3.85 .600	-	28.940.481
Bagian Daerah Pertambangan	30.547.741	-	137.350.300		93.191.751
Bagian Daerah Perkebunan	474.234.279		42.053.400	432.273.879	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	582.102.277		31.466.630	550.957.870	-
Bagian Pemerintah Migas	75.165.605	-	36.167.420	38.998.420	
Bagian Pemerintah Non Migas	26.616.645	-	30.750	26.207.013	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya		905.103	307.600		657.703
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	2.610.997		7.697.500	-	4.620.403
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya	26.673.771	-	2.225.120	24.107.071	
Bagian Pemerintah Daerah Lainnya	24.260.900	-	1.211.000	22.937.280	
CHT					-
SDA	2.791.106.120	212.154.922	3.877.925.000	266.214.780	3.87-.826.742
Migas		28.457.396	4.997.200	-	43.431.795
Minyak Bumi 15%	-	27.216.663	4.636.500	-	42.064.173
Minyak Bumi 0,5%	-	1.240.733	61.200		1.702.020
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Pertama	97.358.120	71.307.534	106.826.975	10.837.980	222.101.319
Tambang	-	172.707.534	88.203.825		222.101.319
Royalti	97.358.120		77.031.130	19.021.990	
Panas Bumi				-	-
Iuran Produksi				-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Bonus Penjualan Tanah Negara	-	-	-		
Kayu Angin	2.693.915.230		3.776.900.225	220.812.800	3.738.999.695
DR	1.987.919.380		4.370.396.050	-	1.335.176.684
DAK	266.893.630	-	-	266.893.900	-
PBH	360. . 64	-	960.804.175		501.793.011
Perikanan	-				
Grand Total	16.112.054.081	227.912.936	13.712.027.802	3.965.720.659	5.736.145.360

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Seribu (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DI 2018	KB DI 2019	LS s.d TA 20.0 (KMK No. 29/PMK.07/2021)	Penyaluran LS s.d TA 2019 (KMK No. 9/PMK.07/2021)	Sisa LS s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6=[4-5]
Pajak			379.045.743	250.728.560	128.317.183
PPh	-	-	376.662.743	250.728.560	125.934.183
PPh Pasal 21	-	-	376.662.743	250.728.560	125.934.183
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB			2.382.000	-	2.382.000
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Gas Bumi				-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Panas Bumi				-	-
Bagian Daerah Sebesar Dua Puluh Persen	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau Migas	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau Non Migas			2.382.000	-	2.382.000
Pajak Penerangan Jalan Umum				-	-
Pajak Penerangan Jalan Umum	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan Umum	-	-		-	-
Pajak Penerangan Jalan Umum Sebesar Dua Puluh Persen	-				-
Opsen				-	-
SDA		44.063.359	714.595.557	-	714.595.557
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi Bagian Daerah Migas				-	-
Gas Bumi 69%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		-
Gas Bumi Bagian Daerah Migas	-	-	-		-
Minerba	-	-			-
Iuran Tetap				-	-
Royalti				-	-
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-		-
Setoran Bagian Pemerintah					-
Kehutanan		44.063.359	714.595.557	-	714.595.557
IHPH		-	-	-	-
PSDH	-	-	-		-
DR		44.063.359	714.595.557		714.595.557
PE Kehutanan				-	-
Gratifikasi Tera		4.652.859	1.950.642.302	250.728.560	1.699.913.742

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Tanimbar

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PS DBH(TA 2021)	KB Lebih (TA 2020	Perkiraan KB DBH Berdasarkan TA 2020 (UU No. 2 Thn. 2020)	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=(2)-(3))	(6)
Pajak	3.075.301.097		1.237.251.909	2.158.634.451	820.534.377
PPh	148.067.350		976.115.500	87.069.702	817.017.900
PPh Pasal 21	147.760.250		661.708.100		817.017.900
PPh Pasal 25/29	307.100	-	4.407.400	87.069.702	
PPN	2.626.934.591	-	261.136.409	2.071.014.691	6.816.470
Pajak Bea	69.339.064		203.680.102	1.025.210.396	-
Bagian Daerah Migas	126.842.381		194.913.502	-	6.076.219
Bagian Daerah Non Migas			-		
Bagian Daerah Hasil Hutan	-	-	-		-
Bagian Daerah Perikanan	210.143.262		82.694.700	127.457.827	-
Bagian Daerah Pertambangan				-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.038.307		9.804.900	916.96- 707	
Bunga Penerimaan Migas	5.836.948	-	6.069.020		232.961
Bunga Penerimaan Non Migas	-	-			-
Bunga Penerimaan Pertambangan Panas Bumi				-	-
Bunga Penerimaan Pertambangan	7.297.309		5.871.020	4.426.309	
Bunga Penerimaan Perkebunan	-	-	-		
Bunga Penerimaan Sektor Lainnya	4.737.53	-	209.200	6.155.131	-
DBH				-	-
SDA	131.032.730	1.691.020	916.0.0.776	3.864.341	114.024.720
Migas		1.691.020	999.999		8.691.120
Minyak Bumi 15%	-	7.483.539	967.300		8.410.829
Minyak Bumi 0,5%	-	243.271	32.200		961.571
Minyak Bumi Bagian Pemda Penghasil				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi Bagian Pemda Penghasil		-	-	-	
Minerba	19.461.5 5	-	15.184.575	3.90 .911	-
Landrent	-	-			-
Royalti	10.47 .5 6		15..82.0 6	3.904.941	-
Pasca Tambang			-	-	
Bunga Produksi			-	-	
Bunga tetap	-	-	-		
Deforestasi, Kegiatan Pemanfaatan	-	-			-
Kehutanan	252.014.234		321.342.300	-	248.540.860
PSDH			-	-	
DBHPSDH	-	-	-		
PSDH	252.014.234	-	301.0 3.600		240.548.366
Perikanan	133.186.080		21.328.700		157.594.050
Grand Total	3.507.024.211	7.691.020	2.072.2 2.603	2.15 .948.343	735.483.126

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Maluku Tengah (dalam rupiah)

JENIS DBH	SELISIH 2014	SELISIH 2019	PENYALURAN TA 2018 (PMK No. 30/PMK.07/2021)	Penyaluran DBH TA 2019 (KEPK No. 8/PK.07/2021)	Selisih Penyaluran TA 2018 (KEPK No. 8/PK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
PPh	-	-	1.697.765.696	203.713.763	2.193.052.111
PPh	-	-	-		
PPh Pasal 21	-	-			-
PPh Pasal 25/29	-	-			-
PBB			2.497.765.696	203.713.763	2.493.352.111
Bea Materai			-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-		-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-			-
Bagian Pemerintah Pusat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					-
Bagian Pemerintah Pusat Pajak Penghasilan			692.579.307	693.693.307	-
Bagian Pemerintah Daerah		-	1.692.543.754	3.042.584.366	2.350.038.109
Bagian Pemerintah Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-		
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-			-
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas				-	-
Bagian Pemerintah Pusat Pajak Lainnya			-	-	
Bagian Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	38.244.434		23.014.434
Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			120.139.283		120.139.283
Bagian Pemerintah Daerah Pajak Lainnya				-	-
DBH		-	-	-	
SDA	-	52.992.221	814.678.376		311.071.378
Migas	-	-			-
Migas Bagi Hasil 15%					-
Migas Bagi Hasil 0,5%			-	-	-
Migas Bagian dari Pengelolaan Wilayah Khusus			-	-	
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 3,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Pengelolaan Wilayah Khusus	-	-			-
Minyak Bumi					-
Langsung			-	-	-
Lainnya			-	-	
Panas Bumi	-	-	-		
Iuran Produksi	-	-			
Iuran Tetap	-	-			-
Sebagian Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan		52.992.221	314.678.376	-	311.071.378
IHPH	-	-	-		
PSDH	-	-	314.678.376		314.678.376
Perikanan		52.992.221		-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	52.992.221	-	-	
Pertambangan Mineral dan Batubara			4.012.879.176	203.713.763	2.804.030.301

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Maluku Tengah

(dalam rupiah)

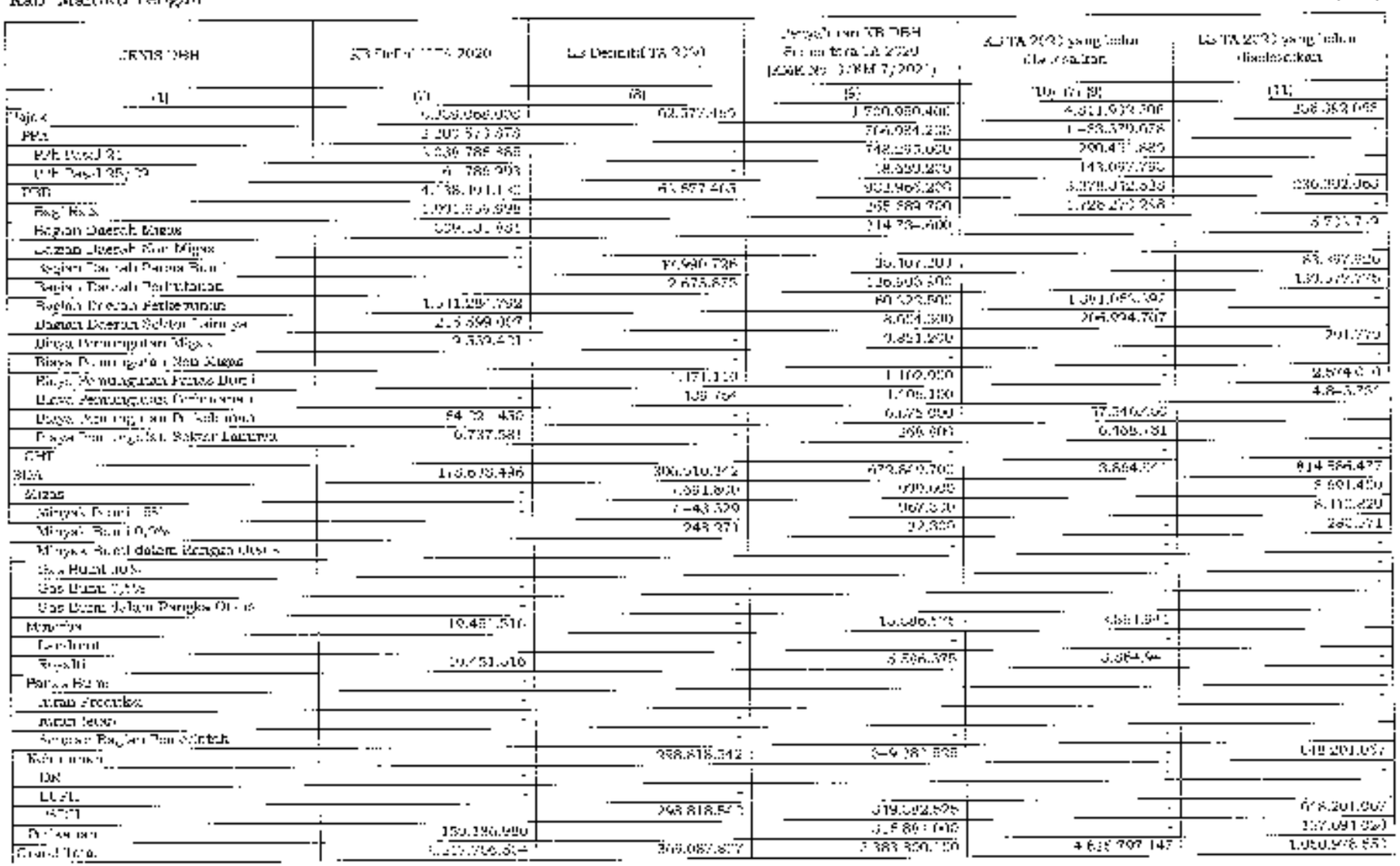

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Maluku Tenggara

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PB TA 2018	PB TA 2019	Realisasi TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian PB TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Realisasi TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(3)
Dajak			230.129.111	10.095.922	19.033.289
PPh			230.129.111	10.095.922	19.033.289
PPh Pasal 21	-	-	230.129.111	10.095.922	19.033.289
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PPh Pasal 26	-	-	-	-	-
Pajak Bumi					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	-				-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas		-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					-
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT					
BHA		27.499.745			
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	
Minyak Bumi dalam Kategori Ultra					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-				-
Gas Bumi Dalam Rangka Ultra	-	-	-	-	-
Mineral	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	
Royalti					
Panas Bumi					
Iuran Tetap	-				-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Bagian Bagian Pemerintah		-	-	-	
Perikanan		27.499.745			
CHT	-				
PNBP	-	-	-	-	-
PSDH		27.499.745	-	-	-
Pertambangan					
Grand Total		27.499.745	230.129.111	10.095.922	19.033.289

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Maluku Tenggara

(dalam rupiah)

JENIS PPH	AD Definitif TA 2020	LD Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Definitif TA 2020 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak	3.063.634.265	-	304.877.750	2.130.757.515	628.979.102
PPh	710.775.637	-	502.381.000	190.591.548	70.165.911
PPh Pasal 21	481.002.848		481.208.760	-	70.165.911
PPh Pasal 25/29	229.772.779		21.172.240	136.997.548	-
PPh 4	2.345.618.63	-	41.496.750	1.939.733.788	628.813.191
Bagi Hasil	1.961.950.198	-	365.683.750	1.726.270.209	
Bagian Daerah Migas	178.838.796	-	182.871.500		4.530.704
Bagian Daerah Non Migas				-	-
Bagian Daerah Pasal 21				-	
Bagian Daerah Pasal 25/29	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pasal 4 ayat 2	-	-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.779.001		5.631.300	208.484.707	-
Bagian Pemungutan Migas	2.068.280		2.120.900	-	102.520
Bagian Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemungutan Pasal 21	-	-	-		
Bagian Pemungutan Perkebunan					-
Bagian Pemungutan Sektor Lainnya	6.757.561	-	268.820	6.467.761	
PPnBM	-	-	-		
SDA	330.781.000	7.697.700	52.626.000	9.804.911	267.45 .789
Migas		7.697.900	959.000	-	8.637.400
Bagian Pusat 15%		7.179.525	367.350	-	8.410.82
Minyak Bumi 0,5%	-	348.771	32.350	-	290.771
Minyak Bumi dalam Rangka OTSUS	-	-	-		
Gas Bumi 1,5%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka OTSUS				-	-
Kehutanan	19.121.510		10.530.575	3.864.0	
Perkebunan	-	-	-	-	
Pertanian	9.45 .516	-	1.336.575	2.907.09	
Bagian Pusat	-	-	-		-
Iuran Produksi					-
Jenis lainnya			-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	
PPh Pasal 22	92.265.5 .3	-	102.101.475		121.0 0.952
DR		-			-
LOTS				-	-
PBB	78.275.5 .7	-	95.161.775	-	121.367.012
Pajak Lainnya	50.188.983	-	310.781.000		121.367.030
Grand Total	3.516.547.277	7.697.700	1.330.709.375	2.148.990.275	1.024.26.197

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Buru (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 2/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 2/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	63.855.059	3.417.372.732	314.757.373	3.102.615.359
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	63.855.059	3.417.372.732	314.757.373	3.102.615.359
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	237.089	3.327.072.676	314.757.373	3.012.315.303
PSDH	-	63.617.970	90.300.056	-	90.300.056
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	63.855.059	3.417.372.732	314.757.373	3.102.615.359

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Buru

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran KB DBH (tahun TA 2021) (PMK No. 27/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
Pajak	2.162.356.110		1.338.370.303	2.080.035.925	50.125.905
PPh	60.140.195		137.636.000	410.045.705	
PPh Pasal 21	775.563.630		140.052.000	302.542.630	-
PPh Pasal 25/29	81.360.565	-	14.031.000	67.536.565	-
PBB	2.981.163.350	-	65.179.300	2.975.097.725	56.125.905
Bagi Rata	1.901.970.096	-	367.083.700	1.576.270.705	
Bagian Daerah Migas	141.317.730		137.133.300		4.850.130
Bagian Daerah Non Migas	-				-
Bagian Daerah Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	168.203.406	-	2.749.200	-	43.491.914
Bagian Daerah Pertambangan	302.711.231			351.473.537	
Bagian Daerah Kelautan Lainnya	315.561.807		8.031.207	205.094.727	
Biaya Pemungutan Migas	4.401.487	-	4.634.400	-	200.913
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					
Biaya Pemungutan Perhutanan	5.934.894		7.016.905		1.016.211
Biaya Pemungutan Pertambangan	15.532.533	-	-	13.962.668	-
Biaya Pemungutan Kelautan Lainnya	6.737.581	-	268.600	6.467.781	-
DAK			-		
SDA	1.646.646.113	7.031.400	900.782.075	1.071.101.111	413.903.303
Migas	-	7.891.900	989.900		8.881.800
Minyak Bumi 15%	-	7.443.534	967.920	-	8.410.534
Minyak Bumi 0,5%	-	728.271	92.500	-	730.571
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	
Minerba	9.451.516	-	15.589.575	3.864.441	-
Landreas	-	-	-	-	-
Jumlah	19.451.516		15.589.575	3.864.441	
Panas Bumi					
Iuran Tetap (Land Rent)	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-	-	-
Kehutanan	1.611.308.217		857.815.300	1.307.771.220	427.578.783
PDP					
PPh OP	347.557.230	-		1.307.571.220	-
PBB-P2	247.757.017	-	857.815.500	-	427.578.483
Perikanan	1.016.196.290		316.827.300		157.004.200
Grand Total	6.301.201.124	7.031.400	2.209.156.975	3.737.302.041	630.087.208

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Ambon

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB s.d TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (KMK No. 25/KM.07/2021)	Penyaluran LB s.d TA 2019 (KMK No. 9/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 9/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
Pajak	-	-	707.032.821	212.109.846	494.922.975
PBB	-	-	303.387.719	91.061.744	212.325.975
PPh Pasal 21	-	-	97.120.128	91.061.744	78.058.384
PPh Pasal 25/29	-	-	115.984.591	-	115.984.591
BPHTB	-	-	203.648.732	203.647.102	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Minyak	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Gas Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	96.217.238	96.060.038	-
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	80.080.080	80.080.080	-
Bagian Daerah Sektor Tertentu	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pusat	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Daerah	-	-	12.052.809	12.052.809	-
Biaya Pemungutan Kehutanan	-	-	3.749.170	3.749.170	-
Biaya Pemungutan Sektor Tertentu	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
PBB	-	21.494.435	-	-	-
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Alam 30%	-	-	-	-	-
Gas Alam 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dalam Produksi	-	-	-	-	-
Dalam Optap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	27.490.135	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IHPHH	-	97.106.423	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	27.490.425	707.032.821	212.109.846	494.922.975

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Ambon

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Deficit TA 2021	LB Deficit TA 2021	Penyaluran DBH PMK Kesinambungan TA 2021 (PMK No. 210/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(9)	(10)=(2)-(9)	(11)
Pajak	6.292.534.445	-	-329.636.102	4.273.484.767	3.406.387
PPh	5.963.698.616	-	3.863.027.700	3.133.760.016	
PPh Pasal 21	5.275.146.652		3.421.027.500	1.941.022.052	-
PPh Pasal 25/29	101.351.964		284.010.500	299.385.464	-
PBB	2.322.825.829		356.956.700	1.536.763.766	3.566.387
Bea Bea	1.291.966.964		266.669.700	726.270.336	
Pajak Daerah Migas	105.973.862	-	108.953.600		3.711.912
Pajak Daerah Non Migas	-	-			
Pajak Daerah Pusat Hotel				-	-
Pajak Daerah Restoran				-	-
Pajak Daerah Pertambangan		-	-	-	
Pajak Daerah Bidang Lainnya	115.503.207	-	3.664.300	226.791.007	
Pajak Penerangan Migas	5.235.362		24.118.100		54.717
Pajak Penerangan Non Migas			-	-	-
Pajak Penerangan Pusat Hotel			-	-	
Pajak Penerangan Pusat Restoran	-	-			
Pajak Penerangan Pusat Lainnya					-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.737.341		309.993	6.456.781	-
CHT	-	-	-	-	
DBH	352.458.600	2.431.600	326.636.952	3.804.000	285.112.092
Migas	-	2.431.820	999.900		6.391.460
Kehutanan (PSDH, DR)		2.215.520	937.200	-	6.412.379
Kehutanan (PSDH, DR)		216.300	62.700	-	280.371
Kehutanan (PSDH, DR) dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-		
Cukai Hasil Tembakau	-	-			
Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Otsus	-	-			-
Minerba	19.791.315		12.980.000	3.804.000	-
Panas Bumi			-	-	-
Kepsda	19.791.315		12.980.000	3.804.000	-
Perikanan	-	-	-		
Iuran Produksi	-	-			-
Iuran Hak					-
Sebesar Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan	70.820.115		93.656.775	-	178.759.662
DR	-	-	-		
PSDH					-
PBB	70.820.115		192.576.775	-	16.736.862
Pertambangan	159.186.900		316.662.500	-	137.694.000
Grand total	6.944.963.054	1.631.820	-748.636.050	4.277.330.613	280.010.139

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Seram Bagian Barat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2021)	Penyesuaian TB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]
Pajak			107.213.720	107.213.720	
PPh	-		212.003.871	212.003.871	
PPh Pasal 21	-	-	348.369.651	348.369.651	-
PPh Pasal 25/29	-	-	73.363.270	73.363.270	-
PBB		-	384.484.340	384.484.340	-
Bagi Rata			95.272.787	95.272.787	
Bagian Daerah Migas	-		289.161.197	289.161.197	
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Daerah Pertambangan Umum	-				
Biaya Pemungutan Migas	-	-	8.794.566	8.794.566	-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Pasal 21					
Biaya Pemungutan Perkebunan	-				
Biaya Pemungutan Kehutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan Umum		-	-	-	-
CHT					
SDA	-	28.410.774	3.830.150.910	882.257.946	3.617.892.964
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	387.137.015	-	1.067.252.715
Landrent		-	387.677.950	-	380.675.700
Royalti			107.470.815		107.470.815
Panas Bumi					
Dana Tambahan	-	-			
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Setoran Biaya Pemeliharaan		-	-	-	-
Kehutanan		28.410.774	1.321.382.201	882.257.946	1.139.124.255
PSDH	-		1.181.715.163	882.257.946	299.456.220
DR	-	-	3.839.786.638	-	3.539.788.819	
DBHDR		28.410.774	-	-	-
Perikanan			291.497.891	-	291.291.894
Grand Total		28.410.774	5.997.586.248	1.107.471.286	5.617.892.964

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Seram Bagian Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Dari PMK TA 2020	LB Dari PMK TA 2020	Penyaluran (01, 05) Tahun TA 2020 (KEP-96/PK/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2] - [4]	[6] = [3] - [4]
Pajak	7.756.050.612		997.179.302	2.110.630.307	4.127.702
PPh	505.913.357		457.674.900	149.238.457	-
PPh Pasal 21	537.185.499	-	449.704.203	85.710.808	
PPh Pasal 25/29	78.782.758	-	13.600.200	64.755.748	
PBB	2.747.137.234		499.503.502	1.004.330.136	5.732.702
Bagi Hasil	1.901.050.094		200.689.100	1.729.210.295	
Bagian Daerah Migas	301.970.535		200.429.307	-	6.545.675
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perorangan					
Bagian Daerah Perseorangan	23.330.017			21.907.744	-
Bagian Daerah Kehutanan	515.193.007	-	3.694.000	206.956.707	-
Bagian Pertambangan Migas	6.744.773	-	6.371.500	-	277.027
Bagian Pertambangan Non Migas					
Bagian Pertambangan Panas Bumi					-
Bagian Pertambangan Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Pertambangan	684.306	-	-	684.306	
Bagian Pertambangan Pertambangan	6.737.541		268.450	6.468.791	
Cukai					-
DAK	944.972.771	220.605.694	575.303.035	595.675.771	354.897.303
Migas	-	7.69 .803	199.600	-	8.077.403
Minyak Bumi 15%	-	7.4 5.521	997.300		6.410.529
Minyak Bumi 0,5%		278.271	82.300		280.571
Minyak Bumi dalam rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	363.064.254	213.014.239	48.830.302	373.370.711	272.124.104
Iuran Tetap		213.014.039	53.211.125		212.128.104
Royalti	363.064.254		1.619.177	373.370.711	
Panas Bumi				-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-		
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	71.219.106		212.176.720		167.857.614
DR		-	-	-	-
PHPDP	-	-	-	-	
PSDH	71.219.106		212.176.720		167.857.614
Perikanan	109.140.952		316.851.030		157.064.020
Grand Total	3.093.329.202	220.605.694	1.326.700.339	2.468.679.144	540.058.935

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Seram Bagian Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2015	KB TA 2016	LB s.d TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 6/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 6/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-		-	-	-
PBB	-		-	-	-
PBB Sektor P1			-	-	-
PBB Sektor P2/P3		-	-	-	-
BPHTB		-	-	-	-
Skp Pilot	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-			-	-
Bagian Daerah Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Penas Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-		-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan PBB P1	-		-	-	-
Biaya Pemungutan PBB P2/P3	-		-	-	-
Biaya Pemungutan BPHTB		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	65.219.511	-	-	-
Migas		-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-		-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-		-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba		-	-	-	-
Landrent		-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-		-	-	-
Pungutan Eksplorasi	-		-	-	-
Pungutan Eksploitasi		-	-	-	-
Pungutan Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan	-	65.245.341	-	-	-
DR	-		-	-	-
DSGR			-	-	-
PSDH		65.245.841	-	-	-
Pungutan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	130.465.352	-	-	-

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Seram Bagian Timur

(dalam rupiah)

Uraian DBH	KB Sebelum TA 2020	LB Sebelum TA 2020	Lebih Salur TA 2020 Sebelum TA 2020 (ADIA No. 2/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	5.261.863.187	184.177.480	2.455.068.300	5.077.932.081	231.700.920
PBB	675.200.729		328.120.230	346.879.499	-
PPh Pasal 21	625.198.108		174.710.630	229.076.128	-
PPh Pasal 25/29	70.318.931		33.410.600	36.594.471	-
BPHTB	7.593.180.635	134.114.802	2.101.369.400	5.630.637.151	284.700.700
Hasil Laut	193.050.905		65.689.700	127.361.205	-
Bagian Daerah Dari Migas	5.000.712.282		1.675.208.200	3.325.504.082	-
Bagian Daerah Dari Minyak Bumi	-		-	-	-
Bagian Daerah Dari Gas Bumi	-		-	-	-
Bagian Daerah Perbendaharaan		125.814.400	97.710.500		226.875.200
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.109.907		8.887.000	230.894.787	-
Biaya Pemungutan Migas	134.[illegible]06	-	61.731.350	109.[illegible]48	-
Biaya Pemungutan Hasil Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Perbendaharaan		2.700.470	3.375.302		1.675.700
Biaya Pemungutan Kehutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.737.371	-	368.600	8.468.771	
DBH					
SDA	275.[illegible]09	70.911.[illegible]96	60.[illegible]0	3.867.941	411.[illegible]09
Migas	-	70.911.[illegible]96	9.995.[illegible]0	-	90.910.396
Minyak Bumi 15%	-	71.[illegible]36	8.[illegible]0	-	6.[illegible]0
Minyak Bumi 0,5%		2.480.610	292.700		2.[illegible]10
Minyak Bumi dari Wp Bengkalis Offshore					
Gas Bumi 69%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dari Wp dari Bengkalis Offshore	-	-	-	-	-
Mineral	15.[illegible]5.[illegible]6	-	1.[illegible]6.575	3.664.941	-
Tambang	-	-	-	-	-
Kehutanan	19.[illegible].516	-	15.[illegible].975	3.864.941	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Provisi Sumber Daya Hutan					
Perikanan	[illegible]6.[illegible]0.[illegible]1	-	26.[illegible]5.425		167.[illegible]4.002
DR					-
DTH	-	-	-	-	-
DBH-CHT	50.920.772	-	394.[illegible]5.[illegible]5	-	147.247.032
PE Kehutanan	150.[illegible]0.080		316.[illegible]7.[illegible]5		97.[illegible]0.020
Grand Total	9.[illegible]4.[illegible]6	211.020.796	3.[illegible]1.[illegible]0	5.[illegible]7.[illegible]6	6[illegible]9.[illegible]

(7)

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Aru

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TAHUN 2018	KURANG BAYAR TAHUN 2019	LEBIH BAYAR TAHUN 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyesuaian LEBIH BAYAR TAHUN 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TAHUN 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	1.211.326.182	366.699.460	844.626.722
PPh	-	-	249.312.536	-	249.312.536
PPh Pasal 21	-	-	276.289.979	-	276.289.979
PPh Pasal 26/DTP	-	-	72.853.667	-	72.853.667
PBB	-	-	88.382.358	465.078.208	465.267.126
Bea Hak	-	-	90.278.784	90.278.784	-
Bagian Daerah Migas	-	-	323.971.553	270.443.684	53.527.869
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bunga Daerah Pada Jasa	-	-	-	-	-
Bunga Daerah Perbankan	-	-	368.077.659	-	368.077.659
Bagian Daerah Pada Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Panas Bumi	-	-	50.200.068	-	50.200.068
Biaya Pemungutan Migas	-	-	10.721.930	-	10.721.930
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pasir Laut	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perikanan	-	-	12.790.610	-	12.790.610
Biaya Pemungutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	1.578.674	-	1.578.674
CHT	-	-	-	-	-
DBH	-	31.738.092	811.163.200	-	811.163.200
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 3,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	121.811.815	-	121.811.815
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	121.811.815	-	121.811.815
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Setoran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	31.738.092	203.852.497	-	203.852.497
PSDH	-	-	-	-	-
DBHSDH	-	-	203.852.497	-	203.852.497
PKDH	-	31.738.092	-	-	-
Perikanan	-	-	139.107.390	-	139.107.390
Grand Total	-	31.738.092	1.535.182.269	366.699.460	1.487.785.870

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Aru

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	LB TA 2020	Penyaluran KB DBH Sesuai PMK TA 2020 (PMK No. 93/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum Direalisasikan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	3.054.250.325	65.161.000	1.021.200.700	2.099.049.625	186.076.680
PBB	794.590.019		584.731.350	209.858.669	-
PPh Pasal 21	568.952.385		539.050.000	29.902.385	-
PPh Pasal 25/29	185.644.634	-	29.681.350	155.963.284	
BPHTB	2.—.3?4.4.06	65.—64.000	605.525.100	1.864.530.546	107.—.3.680
Bagi Rata	1.091.050.098	-	265.788.700	1.720.270.298	
Bagian Daerah Migas	233.160.019		229.243.800		4.—?.??
Bagian Daerah Non Migas				-	-
Bagian Daerah Lainnya	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan	-	61.027.600	65.328.200		15.—60.620
Bagian Daerah Perkebunan	-				-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	171.423.207		33.036.100	138.091.807	-
Biaya Pemungutan Migas	4.?4?.??	-	?.467.??	-	??3.699
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Bumi					
Biaya Pemungutan Pertambangan		2.129.?10	1.914.300	-	5.47—.?0?
Biaya Pemungutan Perkebunan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	5.431.961	-	1.948.050	3.182.961	
DPT	-				-
DBH	282.308.360	7.101.800	505.070.130	5.991.941	265.700.376
Migas		7.891.900	894.510	-	8.—??.?6?
Minyak Bumi 15%	-	7.4—1.?2?	567.300	-	8.410.829
Minyak Bumi 2,5%	-	348.271	82.300		290.—?1
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi (PSC)					-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba	19.—1.316	-	5.536.575	3.864.—1	
Iuran Tetap	-	-	-		
Royalti	10.451.316		3.536.575	3.?67.?41	
Bunga Bank					-
Sewa Kapal/Alat				-	-
Jasa Lainnya	-	-	-	-	
Sumber Daya Pemerintah	-	-	-		
PPh Pasal 22	103.672.360		202.—?3.?23		96.5?0.?36
DR				-	-
BUMN		-	-	-	-
PPh	0?.672.363	-	??.?05.?15		08.833.030
Perikanan	50.—86.385		310.281.030		1??.?9?.?30
Grand Total	5.490.5?8.?0?	130.535.?0?	1.?3?.27?.?30	2.?50.?10.?4?	?02.?65.?16

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Tual

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2019	Alokasi TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian (PMK No. 3/KM.7/2021)	Alokasi TA 2019 (PMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak	-	-			-
PBB					-
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29			-		-
PDE	-	-	-		-
Bagi Rata	-	-	-		
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Penghasil			-		-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-		
Bagian Daerah Penghasil	-	-			
Bagian Daerah Bersama Lainnya					-
Bagian Pemerataan Migas			-		-
Bagian Pemerataan Non Migas	-	-	-		-
Bagian Pemerataan Daerah Biasa	-	-	-		
Bagian Pemerataan Kemiskinan					-
Bagian Pemerataan Kesenjangan			-		-
Bagian Pemerataan Sektor Lainnya	-	-	-		-
DTP	-	-	-		
SDA		27.100.125			-
Migas					-
Minyak Bumi 15%			-		-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Kehutanan	-	-	-		-
Iuran Hasil	-	-	-		
Provisi Sumber Daya Hutan					-
Iuran Tetap			-		-
Setoran/Bagian Pemerintah	-	-	-		
Pertambangan	-	27.100.125			
IHB					-
PHPBB					-
PSDH	-	27.100.125	-		-
Perikanan	-	-	-		
Grand Total		27.100.125			

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tual

(dalam rupiah)

Uraian	Ke Daerah TA 2020	Ke Desa TA 2020	Penyaluran DB DBH Semester IA 2021 (UU No. 7 Tahun 2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	KB TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(10=(7+8)-9)	(11)
Pajak	5.056.003.151	-	636.271.400	2.364.867.743	2.723.417
PPh	742.379.277	-	817.770.300	2.47.626.277	-
PPh Pasal 21	678.756.281		813.514.200	373.241.901	
PPh Pasal 25/29	63.622.996		12.256.100	61.387.560	-
PBB	2.215.520.647		918.622.200	1.509.730.736	2.723.417
Bagi Rata	1.391.464.960		265.699.100	726.270.396	-
Bagian Daerah Migas	92.287.343	-	120.912.200	-	2.723.357
Bagian Daerah Non Migas		-			
Bagian Daerah Penghasil Dana					-
Bagian Daerah Pemerataan					-
Bagian Daerah Dana Alokasi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.508.007	-	8.462.800	307.097.007	
Bunga Penerimaan Migas	3.839.143		3.157.200		117.057
Bunga Penerimaan Non Migas				-	-
Bunga Penerimaan Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bunga Penerimaan Pemerataan	-	-	-		
Bunga Penerimaan Sektor Lainnya					
Bunga Penerimaan Sektor Lainnya	6.737.141		208.800	6.197.761	-
DTT	-	-	-	-	-
SDA	252.456.600	5.83 .300	526.945.200	3.56 .141	285.114.082
Migas		7.07 .300	208.800		8.591.120
Minyak Bumi 15%		9.41 .529	967.300		9.41 .529
Minyak Bumi 0,5%		12.62	32.300	-	280.57
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Kehutanan	19.751.326		1.810.575	1.401.147	-
Lainnya				-	-
Panas Bumi	15 .91.526		15.596.975	2.86 .94	-
Iuran Pelabuhan	-	-	-	-	
Iuran Tetap	-	-	-		
Sektor Lainnya Pemerintah					-
Pertambangan	92.625.1)	-	192.572.775	-	1.3.558.067
DR	-	-	-	-	
DTPA					
PBJT	3.920.177		192.572.775	-	1.9.7 .663
Pertanian	59.36 .320		116.981.200	-	137.89 .020
Grand Total	3.310.46 .740	7.89 .300	720 .17.350	2.363.027.704	287.875.19

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Maluku Barat Daya

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG 2019	LEBIH 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Perkembangan LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(3)
Pajak		-	28.063.010	28.063.010	
PPh			1.671.060	1.671.060	-
PPh Pasal 21				-	-
PPh Pasal 25/29	-		4.674.503	4.674.503	-
PBB	-	-	25.405.557	25.405.557	
Bagi Rata	-	-	-		
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas			117.593.534	117.593.534	-
Bagian Daerah Pajak Lain	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Kehutanan	-	-			
Bagian Daerah Selain Reguler					-
Bagian Pemungutan Khusus			-	-	-
Bagian Pemungutan Non Migas	-	-	5.815.203	5.815.203	
Bagian Pemungutan Panas Bumi	-	-			
Bagian Pemungutan Perkebunan					-
Bagian Pemungutan Perkebunan			-	-	-
Bagian Pemungutan Selain Reguler	-	-	-	-	
DPT	-	-			
SDA		27.510.525	488.275.321	56.854.467	431.420.853
Migas				-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Minyak Bumi Bagian Reguler 85%	-	-	-		
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi Bagian Reguler 69%				-	-
Minerba	-	-	488.275.321	56.854.467	431.420.853
Royalti	-	-	488.275.321	56.854.467	431.420.853
Royalti	-	-	-	-	
Pajak Bumi					
Iuran Eksplorasi					-
Iuran Tetap		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Pertambangan	-	27.510.525			
DR					
PHBPT				-	-
TSDH	-	27.510.525	-	-	-
Perikanan	-	-	-		
Cukai Hasil		27.510.525	1.216.758.350	281.914.308	934.844.042

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Maluku Barat Daya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Sebelum TA 2020	Dasar Hukum KB DBH Berdasarkan TA 2020 (KMK No. 8/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(9)	(10=7-9)	(11)
Pajak	6.873.535.792	-	987.430.560	5.737.329.675	6.020.159
PPh	590.372.305	-	179.772.050	1.715.300.742	-
PPh Pasal 21	1.537.812.742	-	460.677.530	1.077.252.212	-
PPh Pasal 22/23	33.376.823	-	11.850.130	21.161.253	-
PBB	3.010.061.720	-	179.960.630	4.692.691.964	6.020.159
Bea Beli	1.941.306.599	-	165.469.930	1.790.350.208	-
Bagian Daerah Migas	86.77 143	-	91.743.020	-	5.772.601
Bagian Daerah Non Migas	2.393.873.362	-	2.130.700	2.092.231.364	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dalam Daerah Penghasilan	-	-	-	-	-
Dalam Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.599.307	-	8.901.350	206.691.707	-
Biaya Pemungutan Migas	5.830.505	-	6.230.030	-	350.725
Biaya Pemungutan Non Migas	90.627.130	-	112.410	80.634.136	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	5.727.041	-	256.900	6.468.77	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	232.964.438	591.935.868	737.076.300	-	1.086.199.973
Migas	-	7.601.430	990.000	-	8.591.430
Migas Bagi 15%	-	47.131.420	927.930	-	8.415.959
Migas Bagi 0,5%	-	219.271	23.930	-	780.371
Migas Bagi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	383.317.269	226.781.220	-	9.673.705
Landrent	-	130.535.701	79.814.650	-	277.752.037
Royalti	-	17.925.65	56.665.755	-	282.871.380
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Produksi	-	-	-	-	-
Dana Tetap	-	-	-	-	-
Beberapa Daerah Penghasilan	-	-	-	-	-
Kehutanan	70.797.610	-	132.586.455	-	116.789.902
IHT	-	-	-	-	-
PHTH	-	-	-	-	-
PSDH	70.797.610	-	132.586.175	-	116.788.902
Perikanan	168.166.990	-	3.5 8.81 (00	-	157.001.000
Jumlah Total	6.305.570.230	591.935.868	69.747.660	5.737.329.675	1.191.822.132

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Buru Selatan (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2016	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2014)	Bayar/Salur LB s.d. TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
Pajak	-	-	295.640.855	295.640.855	-
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21	-				-
PPh Pasal 25/29					-
PBB			202.619.031	295.640.855	-
Bea BPHTB			-	-	
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Pasca Bunga					-
Bagian Daerah Pertambangan			327.011.966	327.011.966	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	-	-	-		
Iuran Pertambangan Migas					-
Iuran Pertambangan Non Migas				-	-
Iuran Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	
Iuran Pertambangan Perkebunan	-	-	7.007.606	7.007.606	
Iuran Pertambangan Kehutanan					-
Iuran Pertambangan Sektor Lainnya				-	-
Cukai	-	-	-	-	
SDA	-	151.055.433	3.923.488.365	135.281.414	3.788.206.951
Migas					-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	
Gas Bumi 0,5%		-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Minerba			117.112.100	-	117.112.100
Lancaran			117.112.100	-	117.112.100
Royalti			-	-	
Panas Bumi	-	-	-		
Iuran Produksi	-	-			
Iuran Tetap					-
Sektor Lainnya Pertambangan				-	-
Perikanan		151.055.433	3.456.644.765	135.281.414	3.321.363.351
CHT	-	-	-		
PNBP		1.206.366	3.356.316.283	135.281.414	3.220.034.735
PSDH		149.849.067		-	-
Pertanian			-	-	
Panas Bumi	-	1.206.366	3.932.309.654	430.930.769	3.513.378.885

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Buton Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB TA 2021 Sesuai dengan PMK No. 8/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat	2.501.811.407	213.706.050	487.157.580	2.172.116.237	278.060.530
PPh	526.173.761		29.476.050	282.191.151	
PPh Pasal 21	477.035.822		294.022.950	193.036.930	-
PPh Pasal 25/29	49.854	-	1.975.120	59.257.53	-
PBB	5.367.027.966	213.706.050	501.360.550	260.723.774	278.306.320
Cukai Hasil Tembakau	1.991.979.209		203.680.720	1.788.270.236	
Penerimaan Hasil Pertambangan Minyak Bumi	27.737.271		151.050.000		1.303.920
Penerimaan Hasil Pertambangan Gas Bumi	-			-	-
Penerimaan Hasil Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Penerimaan Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara	-	220.233.302	15.740.050	-	361.041.300
Penerimaan Hasil Pertambangan Perikanan					
Penerimaan Hasil Kehutanan	215.569.507		9.507.050	206.062.707	-
Penerimaan Hasil Pertambangan Minyak Bumi	566.597	-	4.754.450	-	35.707
Penerimaan Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	
Penerimaan Pertambangan Panas Bumi					
Penerimaan Hasil Perikanan		7.251.009	5.071.050		12.507.009
Penerimaan Pertambangan Perikanan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	6.727.581	-	265.705	6.461.781	-
PPh	293.871.045	7.691.309	1.227.849.375	6.951.941	1.900.314.371
Migas	-	7.691.309	995.505	-	9.651.420
Minyak Bumi 15%	-	7.443.509	647.705	-	7.795.829
Minyak Bumi 0,5%	-	248.971	37.205	-	280.771
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	15.451.716	-	5.556.575	3.864.941	-
Landrent	-	-	-	-	
Deposit	197.731.316		2.156.075	2.404.017	
Pasal Lain					
Bea Perolehan	-			-	-
Bea Balik Nama	-	-	-	-	-
Setoran angsa Pertambangan	-	-	-	-	
Kehutanan	27.023.479		202.351.250		483.098.701
Tax					
PDPH	-	-	-	-	-
PSDH	57.393.145	-	503.582.960	-	545.084.731
Perikanan	150.240.940		270.261.300		177.047.020
Grand Total	3.021.047.932	221.247.309	2.111.207.472	2.170.035.178	1.862.390.071

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Papua

(dalam rupiah)

JENIS DBH	SB TA 2018	SB TA 2019	LB s.d. TA 2018 (UAA No. 23/PMK.07/2021)	Pelunasan LB s.d. TA 2019 (KVR No. 8/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2018 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	6.111.050.965	6.111.050.965	-
Cukai	-	-	6.111.050.965	6.111.050.965	-
PPh Pasal 21	-	-			-
PPh Pasal 22/26			6.111.050.965	6.111.050.965	-
PBB			-	-	-
Bagi Rata			-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah Non Migas	-	-			-
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Perkebunan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			-
Biaya Pemungutan Migas	-				-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya		-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
Cukai			-	-	-
SDA	-	1.378.801.277	182.303.470.497	74.393.737.220	82.190.414.217
Migas	-				-
Minyak Bumi (PPh)				-	-
Minyak Bumi (PBH)			-	-	-
Kelebihan Bagi dalam Rangka Otsus		-	-	-	
Gas Bumi (PPh)	-	-	-		
Gas Bumi (PBH)	-				-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Pertambangan			138.029.291.129	19.888.737.232	77.740.915.303
Panas Bumi			2.577.300.104	-	2.577.300.104
Kehutanan			135.475.459.025	49.333.737.232	80.141.615.803
Pungutan Perikanan	-	-	-		
Iuran Tetap	-	-			-
Iuran Eksploitasi				-	-
Pungutan Pengusahaan Perikanan				-	-
Perikanan			-	-	-
Pertambangan Umum		2.379.801.277	4.345.676.248		4.345.676.248
DR	-	1.048.775.137	1.345.170.248		1.345.170.248
PHT	-	287.737			-
PNBP		329.913.503			-
Perikanan			-	-	-
Grand Total		1.378.801.277	188.503.873.248	80.505.388.183	82.190.414.217

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Papua

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Dialokasikan TA 2020	LB Dialokasikan TA 2020	Penyaluran KB DBH Sampai dengan TA 2020 (PMK No. 6/PMK.07/2017)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dipertanggungjawabkan
(1)	(3)	(4)	(9)	(10=7/9-19)	(11)
Pajak	237.992.170.252		51.776.609.900	186.251.556.014	75.317.032
PDE	7.790.504.665	-	37.053.435.700	40.752.067.435	
PPh Pasal 21	26.414.132.489	-	30.365.013.300	30.026.137.789	
PPh Pasal 21/26	537.381.166	-	853.424.900	(315.960.266)	-
PBB	150.202.212.027		11.788.012.000	105.619.760.869	68.507.032
Bea Meterai				-	-
Pajak Daerah Migas	1.625.727.101		1.379.220.900	-	32.507.063
Pajak Daerah Non Migas	133.567.625.123	-	16.401.441.000	120.870.281.123	
Pajak Daerah Pajak Rokok	-	-			-
Pajak Daerah Pemanfaatan	1.439.026.249		844.958.100	594.119.196	-
Pajak Daerah Pengambilan	3.926.549.937		952.732.950	3.057.301.197	
Pajak Daerah Sektor Lainnya	1.585.093.103	-	62.361.720	1.520.716.103	
Biaya Pemungutan Migas	75.786.731	-	72.775.000		3.040.966
Biaya Pemungutan Non Migas	3.756.230.547		137.711.000	3.618.519.547	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah				-	-
Biaya Pemungutan Dana Perimbangan	79.727.456	-	46.931.100	32.796.132	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	378.333.666	-	47.275.000	290.058.666	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	63.120.286		2.109.900	60.010.386	-
CHT			-	-	-
SDA	38.727.134.359	2.250.287.435	55.926.504.155	4.378.697.591	6.909.264.830
Migas	-	-	-		
Migas Bunga 15%	-				-
Migas Sewa 0,5%				-	-
Migas Jasa dalam Rangka Sektor Hulu			-	-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		-
Gas Bumi dalam Rangka Sektor Hulu		-	-		
Minerba	29.537.753.971	1.977.235.143	45.371.450.700	1.919.607.521	1.975.035.394
Royalti		1.977.235.143	797.730.100	-	1.975.035.394
Royalti	29.537.753.971		26.573.720.600	2.919.607.521	-
Panas Bumi		-	-	-	
Dana Produksi	-	-	-		
Dana Bunga	-	-			-
Bahan Bakar Minyak (BBM)					-
Kehutanan	2.189.370.389	312.972.550	10.941.641.675	-	5.803.179.337
IHH	1.869.075.946	-	9.495.596.125	-	1.573.321.170
PSDH	-	312.972.550	336.501.325		1.171.260.510
PSDH	320.294.443		1.109.545.125	-	2.058.597.657
Perikanan				-	-
Grand Total	307.109.381.042	2.250.287.435	87.666.613.375	30.709.143.327	7.053.302.709

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kode Unit Nomenklatur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian TA 2021 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 4/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak	-	-	5.025.712.098	1.179.511.028	846.169.070
PPh	-	-	1.179.511.028	1.179.511.028	-
PPh Pasal 21	-	-	1.073.334.813	1.073.334.813	-
PPh Pasal 26/26	-	-	106.004.785	106.004.785	-
PBB			846.169.830	-	846.169.830
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	223.102.000	-	223.102.000
Bagian Pemerintah Pusat Migas				-	
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas			595.030.800	-	595.030.800
Bagian Daerah Perkebunan		-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			-
Biaya Pemungutan Migas	-			-	
Biaya Pemungutan Non Migas			6.974.400	-	6.974.400
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		-	-		
Biaya Pemungutan Non Pajak Daerah	-	-	20.671.200		20.671.200
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	-
CHT		-	-		-
SDA	-	28.517.862	13.242.151.582	3.023.617.723	9.239.664.159
Migas	-			-	-
Migas Bagi Hasil			-	-	
Migas Bagi Hasil 0,7%			-	-	
Migas Bagian Daerah dalam Wilayah Provinsi		-	-		
Gas Bumi 30%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi dalam Wilayah Provinsi	-			-	-
Minerba			12.243.161.860	3.003.617.723	9.239.664.159
Panas Bumi			-	-	
Kehutanan		-	13.243.431.582	3.003.617.723	9.239.664.159
Perikanan	-	-			-
Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Iuran Tetap			-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan		28.517.862	-		
Lain-lain	-	-			-
PSDH			-	-	-
DR		28.517.862	-	-	
Perikanan			-		
Grand Total	-	28.517.862	14.269.102.079	4.183.128.751	10.086.032.959

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Biak Numfor

(dalam rupiah)

DBH/ DBH	PS Daerah TA 2020	PS Daerah TA 2020	Penyaluran KB DBH Daerah TA 2020 (KMK No. 1/KM.7/2021)	Di TA 2020 yang telah disalurkan	KB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (9)	(11)
Pajak	1.956.7.0.977		1.721.3.1.700	3.267.197.956	4.457.717
CHT	2.580.000.902		2.265.808.500	1.597.441.202	-
PPh Pasal 21	2.3.6.7.6.697	-	2.7.6.320.500	1.20.335.087	-
PPh Pasal 25/29	92.8.057.16	-	39.136.061	166.118.118	
PBB	2.373.4.5.774	-	436.198.103	1.030.7.3.786	1.187.712
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.097.030.905		265.689.701	1.710.270.204	
Cukai	1.1.3.1.907		1.6.671.300		2.936.607
Pajak Penerangan Jalan	-		-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-		
Pajak Rokok					-
Pajak Daerah Lainnya	2.5.699.077		3.631.700	205.944.707	-
Biaya Pemungutan Pajak	2.773.61	-	1.664.602	-	191.119
Biaya Pemungutan Non Pajak	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Jalan					-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok				-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	6.757.581	-	374.850	6.762.731	
DAU					-
DBH	2.291.199.971		2.199.697.200	723.706.164	326.435.413
Migas	-	-	-	-	-
Migas Bagian 15%	-	-	-	-	
Migas Bagian 3,5%	-	-			
Migas Bagian dari Dana Bonus Migas					-
Gas Bagian 30%					-
Gas Bagian 6,5%			-	-	-
Gas Bagian dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	2.109.48.434	-	1.976.725.250	329.736.784	
Landrent	-	-			
Royalti	2.109.481.434		1.796.725.250	923.736.184	
Panas Bumi					-
Dana Reboisasi			-	-	-
Landrent	-	-	-	-	
Kehutanan Bagian Pemerintah	-	-	-		
Kehutanan	12.121.037		15.121.050		52.671.987
Otsus				-	-
DTDPI	-	-	-	-	-
PSDH	92.391.337	-	185.972.050		142.771.993
Reboisasi	79.186.050		211.351.050		137.691.020
Grand Total	7.247.345.917		1.012.929.950	3.991.903.172	364.923.720

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Jayapura

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	KB TA 2020 (PMK No. 95/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB s.d TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2022)	Sisa KB s.d TA 2020 (PMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			307.535.503	307.535.503	
PPh			307.535.503	307.535.503	
PPh Pasal 21		-	-		-
PPh Pasal 25/29	-	-	307.535.503	307.535.503	-
PBB	-	-		-	-
Bagi Rata	-			-	
Bagian Daerah Migas			-	-	
Bagian Daerah Non Migas		-	-		
Dasar Daerah Pasal Utama	-				-
Dasar Daerah Pasal Lainnya	-				-
Bagian Daerah Pasal Lainnya				-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	-
Biaya Pemungutan Migas		-	-		-
Biaya Pemungutan Non Migas	-			-	
Biaya Pemungutan Pasal Utama				-	
Biaya Pemungutan Pasal Lainnya			-		-
Biaya Pemungutan Pasal Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-		-	-
Cukai	-			-	
Bea		17.313.796	1.048.379.747	2.360.747.547	11.160.382.200
Migas		-	-		
Minyak Bumi 15%	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%	-			-	-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Otsus	-			-	
Gas Bumi 30%				-	
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi Bagian Pemerintah Otsus				-	-
Panas Bumi	-		14.242.270.717	3.092.270.717	(11.150.000.000)
Landrent	-			-	-
Royalti	-		14.242.270.717	3.092.270.717	(11.150.000.000)
Pajak Karbon				-	
Bunga Pinjaman		-	-		
Dana Reboisasi	-				-
Sebesar Bagian Pemerintah	-	-			-
Kehutanan	-	47.413.796		-	
DR			-	-	
PSDH		-	-		-
PSDH	-	47.313.796		-	-
Perikanan	-			-	-
Grand Total		47.313.796	15.597.905.250	3.670.132.050	(11.150.382.200)

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Jayapura

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB Penetapan TA 2020	LB Penetapan TA 2020	Penyaluran KB-LB Semester I TA 2020 (SAS No. ...JAM.../2020)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	2.365.471.821		2.010.751.050	2.096.944.841	7.027.120
PPh	2.741.412.284	-	1.155.617.702	1.586.494.564	-
PPh Pasal 21	2.161.222.025	-	1.020.897.401	1.360.824.625	-
PPh Pasal 25/29	459.290.020	-	25.575.200	433.714.820	-
PPnBM	120.900.239		109.145.101	11.755.138	7.027.122
Cukai	1.991.958.958		1.762.037.603	1.723.270.295	-
Bagi Hasil	2.975.445		238.634.500	-	7.620.055
Bagian Daerah dari Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	77.616.019		134.670.100	269.156.776	
Bagian Daerah Pertambangan	1.936.342.439		1.627.667.503	1.691.191.936	-
Bagian Daerah Kehutanan	2.500.027	-	3.604.900	306.912.787	-
Bagian Pemerintah Migas	6.666.733	-	7.033.400	-	319.267
Bagian Pemerintah Non Migas					
Bagian Pemerintah Panas Bumi				-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	16.584.382	-	5.545.700	10.353.262	-
Bagian Pemerintah Kehutanan	187.747.243	-	9.478.830	178.268.413	
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	6.736.361		268.500	6.468.761	
CHT				-	-
PBB	5.684.982.139	-	3.491.949.950	8.447.384	155.634.202
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%					
Bagian Bumi Bersama Sebagai Contoh				-	-
Gas Bumi 15%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Minerba	2.129.481.434	-	1.770.725.250	621.756.184	
Panas Bumi					
Kehutanan	2.129.481.131		1.780.725.250	621.756.184	-
Iuran Tetap	-	-		-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Sektor Lainnya Pemerintah			-		
Perikanan	3.555.500.705		298.224.700	5.257.059.205	-
PDP	-	-	-	-	-
PNBP	-	-	-	-	-
PBNBP	915.900.000		298.224.700	617.675.300	
Pertambangan	198.198.992		311.461.000		157.654.020
Grand Total	15.185.594.140		4.719.300.750	8.927.413.337	165.670.943

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Jayawijaya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2018	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 123/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2022)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			249.224.204	242.715.709	6.508.495
PPh	-	-	172.315.709	172.315.709	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	172.315.709	172.315.709	-
PBB			71.908.495		71.908.495
Pajak Rokok					
Bagian Daerah dari Cukai	-				
Bagian Daerah dari Sda Migas	-	-	69.729.486	-	69.729.486
Bagian Daerah Pajak Ppn		-	-	-	-
Bagian Daerah Pbb/Bphtb					
Bagian Daerah Pph Pasal 21					
Bagian Daerah dari Sda Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Sda Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari Sda Migas			2.179.009		2.179.009
Bagian Daerah dari Sda Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah dari Sda Perikanan	-	-		-	-
Bagian Daerah dari Sda Pertambangan Pertanahan		-		-	-
Bagian Daerah dari Sda Pertambangan Panas Bumi					
CHT					
SDA	-	23.302.900	10.250.496.672	3.527.032.896	10.726.545.804
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba		-	12.262.068.670	3.527.232.896	8.734.845.501
Landrent			172.838.410		172.838.410
Royalti			12.089.230.260	3.527.232.896	10.561.997.091
Perikanan	-				
Usaha Perikanan	-	-	-	-	-
Usaha Kelautan	-	-	-	-	-
Sebesar Bagian Pemerintah					
Kehutanan		23.302.900			
DR	-				-
IUPHH	-	-	-	-	-
PSDH		23.302.900	-		-
Dr Pemda					
Grand Total		23.302.900	10.199.192.877	3.269.816.813	10.729.567.299

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Jayawijaya

(dalam ribuan rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Sumber TA 2021 (APBN No. 7/2021)	KB TA 2020 yang belum dianggarkan	LB TA 2020 yang belum dianggarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6) = (3) - (4)
Pajak	6.205.671.904		728.902.420	4.485.572.787	5.993.260
PPh	5.821.680.811		276.218.720	5.545.950.071	-
PPh Pasal 21	872.379.332	-	276.218.720	3.494.307.720	
PPh Pasal 21/26	120.633.142	-	69.171.900	51.461.242	
PBB	2.390.669.393	-	152.849.900	1.989.733.453	5.993.260
Bea Materai	1.051.059.946		935.685.700	1.736.270.796	
Dasbor Daerah Migas	167.232.657		72.975.700	-	5.760.839
Dasbor Daerah Non Migas		-		-	
Dasbor Daerah Pajak Dana		-		-	
Dasbor Daerah Perkebunan			-		
Dasbor Daerah Perkebunan		-	-	-	-
Dasbor Daerah Sektor Lainnya	215.503.007		2.197.320	206.09- 787	-
Biaya Pemungutan Migas	5.166.941		2.412.420	-	242.761
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Dana Reboisasi	-			-	-
Biaya Pemungutan Dana Bagi Hasil					
Biaya Pemungutan Perkebunan		-		-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.727.581	-	356.600	6.455.781	
CHT	-		-	-	-
DBH	3.291.159.071	175.258.930	2.312.079.739	322.733. 34	120.546.863
Migas			-		
Migas Bagi Hasil 15%			-	-	
Migas Dana 0,5%			-	-	
Migas Dana Bagi Hasil dalam Rangka Otsus	-		-	-	-
Gas Bumi 30%	-			-	-
Gas Bumi 0,5%			-		
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus			-		
Minerba	2.120.491.121	175.258.930	1.610.536.600	224.756.121	200.111.450
Landaan		175.258.930	33.812.550	-	200.111.450
Royalti	2.120.491.121		1.784.973.750	224.756.164	
Panas Bumi	-			-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Tetap		-	-		-
Kehutanan					
Sumber Daya Perkebunan		-	-	-	-
Kehutanan	26.82 .567		85.762.903	-	102.711.080
DP	-			-	-
PSDH		-			
DBHI	22.241.667		156.282.950	-	82.741.284
Perikanan	156.169.990		3.4 891.000	-	137.691.240
Grand Total	9.469.861.875	175.258.930	4.041.074.130	4.936.482.081	926.5-0.158

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Morotai

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 20/2020 s.t.d PMK No. 8/2021)	Penjelasan (PMK No. 8/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 8/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			3.733.718.384	0.832.337.016	2.901.061.368
DPR			4.393.573.037	1.097.591.783	3.296.281.246
PPh Pasal 21			1.258.087.033	1.192.691.783	65.395.770
PPh Pasal 25/29			3.201.677.115		3.231.675.178
DBH			5.028.915.250	5.028.915.250	
Dana Reboisasi					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pajak Ibukota					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Perkebunan			1.410.737.447	1.101.797.447	
Bagian Daerah Pajak Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Ibukota					
Biaya Pemungutan Perkebunan			725.137.410	925.187.803	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
CHT					
SDA		60.815.343	7.307.874.207		7.367.877.007
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba			3.213.553.833		3.213.553.833
Iuran Tetap					
Royalti			3.213.815.835		3.213.815.835
Pajak Lain					
Iuran Perikanan					
Iuran Hasil					
Setoran Sisa Lebih Pemerintah					
Kehutanan		60.815.343	4.109.040.513		4.109.040.672
PSDH					
DR			870.929.000		870.929.001
PSDH		60.815.343	3.238.111.513		3.238.111.672
Perikanan					
Grand Total		60.815.343	17.765.543.69	6.832.337.016	10.933.206.672

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Merauke

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PK DBH TA 2020	LS Defisit TA 2020	Penyaluran KB DBH Setelahnya LA 2020 (PMK No. 33/PMK.07/2020)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LS TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	21.186.848.304	-	5.711.606.500	10.580.307.171	133.470.010
PPh	3.636.361.761		2.237.310.300	1.399.050.561	
PPh Pasal 21	3.435.433.177		2.132.100.300	1.303.332.977	-
PPh Pasal 25/29	200.928.584		105.210.000	95.717.584	-
PBB	17.550.267.543	-	3.474.296.200	15.131.110.615	55.109.970
Bea Perolehan	391.959.903	-	365.639.700	726.270.296	
Bagian Daerah Migas	275.27 .31	-	703.604.200		130.00 .000
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Dana Dumi				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	549 46 .261	-	91 .00	1 55 .06	-
Bagian Daerah Perkebunan	18.205.530.3 .5	-	568.203.600	11.617.246.7 5	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.59 .207		2.004.300	30.30 .7 7	
Bagian Pemerintah Migas	7.94 .85		11.724.450	-	4.67 .14
Bagian Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Perkebunan	33.591.275		1.2 .000	30.3 1.5	
Bagian Kehutanan	990.2 2.7		99 .050	1.07 .2	-
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	6.7 .51	-	269.30	6.46 .781	-
Cukai	-	-	-	-	
BHA	2.204.08.111	1.793.523.027	3.515.703.750	32.736.141	3.30 .310.047
Migas					-
Minyak Bumi 15%				-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 69%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Minerba	3.109.761.4		1.796.7 .250	32 .55 .164	-
Tembakau	-	-	-	-	-
Rokok	3.109 61	-	1.964 .55 .50	32 .55 .164	
Pajak Rokok	-	-	-		
Hasil Perikanan					-
Batubara					-
Bagian Bagian Pemerintah	-		-	-	-
Kehutanan	-	1.49 .53 .52	- 9 1 .50	-	9.00 .05 .027
IHPH	-		-		
LHAS		1.092.1 7.150	101 .4 .300		.534 201 .01
PSDH	-	1 .. 6 .27	62 .2 .20	-	32 .53 .37
Provisi	50 .6 .50	-	516 .81 .00	-	17.0 1 .0
Grand Total	23.75 .51 .715	1.793.523.027	8.027 .07 .50	10.20 .11 .05	3.21 .. 9 .1

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mimika

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 20[illegible]	KB TA 20[illegible]	LB s.d TA 2019 (PMK No. [illegible]/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMA No. [illegible]/KMK.[illegible]/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMA No. [illegible]/KMK.[illegible]/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			7.541.321.814	7.541.321.814	-
PPh			7.541.321.814	7.541.321.814	-
PPh Pasal 21		-	4.529.734.958	4.529.734.958	
PPh Pasal 25/29	-	-	3.011.586.856	3.011.586.856	
PBB	-	-			-
Bagi Hasil					-
Bagian Daerah Migas				-	-
Bagian Daerah Non Migas			-	-	
Bagian Daerah Sektor [illegible]	-	-	-		
Bagian Daerah Penerimaan [illegible]	-	-			-
Bagian Daerah Pajak Lainnya				-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan [illegible]				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-			-
DBH				-	-
PPh		91.701.053	241.348.829.537	93.[illegible].758.708	149.430.000.829
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 15%	-	-	-		-
Minyak Bumi 3,5%	-	-			-
Minyak Bumi dalam Rangka [illegible]				-	-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%			-		
Gas Bumi dalam Rangka [illegible]	-	-	-		
Minerba	-	-	241.348.829.537	93.[illegible].758.708	149.430.000.829
Tarif Pasal	-	-			-
Royalti			241.[illegible].829.537	93.[illegible].758.708	149.430.000.829
Iuran Tetap				-	-
Jenis Produksi			-	-	
Jenis lainnya	-	-	-		
Sumber Daya Terbarukan	-	-			
PPh Pasal 21		91.701.053			-
DR			-	-	-
LUFL	-	-	-	-	
[illegible]	-	3.[illegible].385			
Penyesuaian					-
Grand Total		91.701.053	249.030.161.351	99.[illegible].[illegible].567	-6.482.060.829

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mimika

(dalam rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	607.350.025.283		89.040.887.020	537.309.907.883	356.206.979
PBB	54.066.219.108		26.998.404.430	27.737.280.029	37.178.301
PBB Pasal 21	53.016.921.209		26.169.552.930	27.737.280.029	
PBB Pasal 25/29	199.297.899	-	106.772.350		37.178.301
BPHTB	551.951.439.675	-	43.567.285.030	510.141.038.814	239.018.665
Cukai Data	1.031.050.038	-	265.197.700	1.726.377.296	-
Bagian Daerah Migas	370.521.228		329.502.950	-	10.020.688
Bagian Daerah Non Migas	330.795.110.120		10.936.694.700	419.376.505.702	
Bagian Daerah Pasal Dana		-	-		
Bagian Daerah Pertambangan	406.963.380	-	61.730.700	250.051.389	-
Bagian Daerah Perkebunan	30.733.027		21.040.000	-	181.376.565
Bagian Daerah Kehutanan	215.491.007		8.501.300	226.914.707	
Dana Perimbangan Migas	3.670.782	-	10.536.200		787.048
Dana Perimbangan Non Migas	16.669.404.961	-	1.980.034.300	13.050.490.250	-
Dana Perimbangan Pasca Bagi I	-			-	-
Dana Perimbangan Pertambangan	17.206.479		8.397.700	8.857.779	
Dana Perimbangan Perkebunan	2.495.181	-	1.049.600		1.202.309
Dana Perimbangan Kehutanan	8.737.581	-	264.830	8.408.751	-
DTF	-			-	-
TPA	30.840.929.367	2.760.106.392	91.099.116.900	9.644.862.427	3.857.045.972
Migas			-		
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-	-			-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 15%				-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	
Panas Bumi	98.063.850.692	2.760.106.392	50.481.166.478	9.053.861.117	3.194.961.792
Kehutanan	-	2.760.106.392	424.145.200		3.194.961.792
Perikanan	30.582.356.632		33.020.711.278	9.056.861.417	-
Pertambangan				-	-
Iuran Produksi			-	-	
Iuran tetap		-	-		
Kelebihan Bagian Pemerintah	-	-			
Pertambangan	636.086.818		696.077.826	9.000.950	-
DR			-	-	
LUFH		-	-		
PNBP	630.086.818	-	696.077.826	9.000.950	-
Pertambangan	20.780.380		310.851.000		187.614.000
Grand Total	667.231.134.770	2.760.106.392	131.096.913.930	547.020.730.760	3.900.610.092

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nabire

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	Realisasi TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyelesaian Lebih Bayar TA 2020 (KEP No. 5/KV/2021)	Sisa Lebih Bayar TA 2020 (Kolom 5=4-3)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6=4-5]
Pajak			130.586.225	130.586.225	-
PBB			-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-		-
PPh Pasal 25/29	-	-	-		-
PDP	-	-	130.586.225	130.586.225	-
Bagi Hasil				-	-
Bagian Daerah Hasil Migas			-	-	-
Bagian Daerah Hasil Migas		-	-		-
Bagian Daerah Hasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-				-
Bagian Daerah Pertambangan			131.124.716	131.124.716	
Bagian Daerah Hasil Lainnya			-		
Biaya Pemungutan Pajak	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Hasil Migas	-				-
Biaya Pemungutan Panas Bumi				-	
Biaya Pemungutan Pertambangan			-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	3.463.491	3.463.149	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-				-
DPP				-	-
DAU		197.051.093	5.866.475.104	563.719.938	6.302.755.196
Migas		-	-		
Minyak Bumi 15%	-	-	-		-
Minyak Bumi 0,5%	-			-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	
Gas Bumi 0,5%		-	-		
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Manfaat	-	-	3.998.653.404		3.998.653.404
Tambahan	-		3.998.653.404	-	3.998.653.404
Tagih Jil				-	-
Panas Bumi			-	-	
Sektor Kehutanan		-	-	-	
Sektor Perikanan	-	-	-		-
Sektor Pertambangan Umum	-				-
Pertambangan		197.051.093	1.867.821.700	563.719.938	2.304.101.855
PSR		-	-	-	
DOKH	-	-	335.320.300		335.320.300
DBH	-	184.351.063	2.271.331.700	102.109.938	1.926.931.700
Perikanan				-	-
Grand Total		381.351.900	7.000.061.829	702.306.163	6.302.755.196

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Yahukimo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KIB Definitif TA 2021	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Definitif TA 2021 (KMK No. S-/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang telah diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (2)-(4)	(6)
Pajak	6.756.421.563	692.587.667	7.252.710.130	1.096.310.700	597.175.612
PBB	3.496.546.945	-	1.296.010.260	2.079.227.465	
PPh Pasal 21	1.035.120.383		1.201.920.070	833.481.690	
PPh Pasal 25/29	233.125.676		84.279.900	99.145.776	
PBB	1.989.177.921	692.587.667	1.135.597.200	3.326.816.273	1.046.765.512
Bea Hak Atas	1.041.956.896	-	268.689.750	1.720.279.394	-
Cukai Hasil Tembakau	520.760.506	-	292.227.780	-	6.075.104
Bagian Daerah Non Migas	-			-	
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			-	-	
Bagian Daerah Perikanan		692.587.667	43.462.200		1.098.779.870
Bagian Daerah Kehutanan	1.673.051.153	-	76.219.700	1.324.736.177	-
Dana Reboisasi	217.339.007		6.031.300	205.984.707	
Biaya Pemungutan Migas	6.865.047		7.095.300	-	230.053
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-		-
Biaya Pemungutan Panas Bumi					-
Biaya Pemungutan Perikanan	-	22.707.193	13.630.100	-	30.412.393
Biaya Pemungutan Kehutanan	69.973.011		5.410.700	88.449.814	
Biaya Pemungutan Selain Dari Atas	6.487.251	-	268.800	6.168.751	-
Cukai	-	-	-		-
SDA	9.440.714.539	1.894.447.504	3.951.310.130	1.381.696.973	3.930.867.209
Migas	-			-	
Minyak Bumi 15%			-	-	
Minyak Bumi 0,5%		-	-		-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Bumi 30%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%	-			-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	
Minerba	3.281.027.518	-	1.919.91 .478	.541 666.078	
Iuran Tetap	1.159.237.804	-	151.720.600	1.877.837.204	-
Royalti	2.091.042.697	-	1.788.260.873	301.111.800	-
Panas Bumi	-	-			-
Iuran Produksi	-	-		-	-
Iuran Tetap	-		-	-	
Pungutan Panas Bumi					
Kehutanan		1.894.447.504	1.894.706.677		1.479.163.189
DR	-	-		-	-
PSDH	-	720.731.230	233.919.725	-	902.731.055
Provisi		1.164.729.514	1.32 .838.305		2.636.413.214
Pertambangan	159.146.940	-	316.881.300		151.894.700
Grand Total	9.756.536....	2.7 .748.670	6.014.0 5.508	5.867.209.010	4.729.287.721

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Paniai

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (UMA No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (SVR No. 3/PM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (SVR No. 3/PM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	345.974.484	(44.056.884)	(30.917.600)
PPh	-	-	144.056.884	(44.056.884)	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			144.933.884	(44.933.884)	-
PBB			109.917.600	-	109.917.600
Pajak Hotel	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-		
Bagian Pemerintah Pusat: Migas					
Bagian Daerah: Non Migas			97.920.000		97.920.000
Bagian Daerah: Panas Bumi					-
Bagian Daerah: Pajak Daerah				-	-
Bagian Daerah: Pajak Rokok	-	-	-	-	
Bagian Daerah: Sektor Lainnya					
Dana Reboisasi					-
Bagian Pemerintah: Non Migas	-	-	3.047.960	-	3.047.960
Bagian Pemerintah: Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah: Sektor Lainnya					
Dana Perimbangan Pertambangan					-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya			-	-	-
PBB	-	-	-		
SDA	-	93.509.000	6.848.538.909	1.561.707.463	15.241.071.013
Migas					-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Kontrak Baru					
Mineral			16.979.538.909	1.561.707.463	15.241.071.013
Iuran	-	-	7.935.473.145	1.564.467.463	9.788.065.608
Royalti	-	-	9.546.065.764	-	9.546.065.764
Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Produksi		-			
Bagian tetap					-
Setoran Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan	-	93.509.920	-	-	
IHH	-	-			
LLPKH					-
PSDH		93.509.920	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	93.509.920	17.974.048.777	1.793.404.827	19.384.638.945

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Puviini

(Dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB Tahun TA 2020	KB Tahun TA 2020	Penyaluran KB 2021 Tahun TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dipertanggungjawabkan	LB TA 2020 yang belum dipertanggungjawabkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pajak	3.313.028.417		1.290.967.109	3.022.977.356	4.916.053
PBB	1.912.059.250		930.911.600	1.083.347.650	-
PBB Sektor P2	1.901.924.010		850.519.000	1.051.410.010	-
PBB Sektor P5/P9	42.163.240	-	10.227.300	31.935.940	-
BPHTB	2.370.843.217	-	423.025.509	1.939.733.780	4.916.053
Pajak Rokok	1.901.050.098		257.729.709	1.720.320.389	-
Bagian Daerah Migas	1.058.151.618		130.501.109		712.051
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	
Bagian Daerah Pasca Tambang	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		
Bagian Daerah Kehutanan					-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.576.047		6.671.000	209.905.707	-
Biaya Pemungutan Migas	4.964.763	-	356.610	-	203.417
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pasca Tambang					-
Biaya Pemungutan Perkebunan					-
Biaya Pemungutan Kehutanan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Bidang Lainnya	6.737.581	-	203.820	6.708.761	
CHT					-
SDA	2.291.189.971	510.000.000	1.299.970.010	925.169.184	1.946.373.735
Migas			-	-	
Minyak Bumi 85%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Pertambangan	2.109.461.424	3.500.650	1.856.099.525	929.758.774	921.134.925
Kehutanan	-	3.500.650	170.000.675		926.134.925
Panas Bumi	2.109.461.424		1.756.723.230	922.758.194	
Perikanan					-
Pungutan Hasil Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan Umum	-	-	-		
Kehutanan	22.321.547		183.262.050		168.940.990
DR				-	-
DBH	-	-	-	-	-
DBHT	23.59 .557	-	185.267.050		102.771.093
PPh Migas	30.780.980		310.851.000		197.684.020
Grand Total	6.604.218.139	510.000.000	3.091.941.179	3.948.146.420	231.293.807

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Puncak Jaya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PBH TA 2018	KBH TA 2019	LPA-I TA 2019 (PSK No. 29/PSK.07/2021)	Penyelesaian LPA-I TA 2019 (PMK No. 3/KV.7/2021)	Sisa LPA-I TA 2019 (PMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5=3)
Pajak	-	-	219.065.665	121.204.155	157.779.820
PPh	-	-	171.264.465	121.204.455	-
PPh Pasal 21				-	-
PPh Pasal 25/29		-	121.204.155	121.204.455	-
PBB		-	49.779.820		57.779.200
Bea BPHTB			-		
Pajak Rokok			-		
Pajak Daerah Migas			57.799.020		102.995.200
Pajak Daerah Pajak Jasa		-		-	-
Pajak Daerah Pajak Hiburan		-			-
Pajak Daerah Pajak Reklame		-	-		-
Pajak Daerah Pajak Lainnya				-	-
Biaya Pemungutan Migas		-		-	-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	4.761.200		4.761.200
Biaya Pemungutan Pajak Rokok			-		
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		-		-	
Biaya Pemungutan Perhutanan				-	
Biaya Pemungutan Pertambangan				-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
PBH	-	-	-		
SDA	-	23.931.023	18.617.465.726	3.652.982.447	22.304.041.221
Migas		-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-			-
Minyak Bumi 0,5%		-	-		-
Minyak Bumi (Bagian Pemerintah Pusat)		-		-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-			-
Gas Bumi (Bagian Pemerintah Pusat)		-		-	-
Minerba		-	18.617.465.726	3.652.982.447	22.304.041.221
Landrent			6.308.524.010	3.652.895.147	2.366.731.226
Royalti			12.037.690.233		12.937.730.335
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Produksi		-		-	-
Iuran Tetap		-		-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-			-
Kehutanan	-	23.931.023	-	-	-
IHPH		-		-	-
PSDH		-		-	-
Radio		25.804.023	-		-
Perikanan		-		-	-
Grand Total	-	23.931.023	18.666.443.373	3.774.187.602	14.372.330.415

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pacitan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Sebelum TA 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	4.050.630.075	-	3.213.816.720	2.311.182.980	6.563.170
PBB	1.629.447.927	-	707.838.720	971.819.207	-
PBB Pasal 25	1.614.565.788	-	707.838.720	957.226.663	-
PBB Pasal 25/29	14.882.139	-	14.882.520	14.592.544	-
BPHTB	2.417.176.130	-	480.377.280	1.030.752.786	6.563.170
Rugi Rata	1.961.959.998	-	265.683.200	1.730.277.208	-
Bagian Daerah Atas	155.787.690	-	208.261.200	-	6.993.510
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Baru	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kekurangan Volume	215.599.007	-	8.634.300	205.991.707	-
Biaya Pemungutan Migas	6.662.393	-	6.662.930	-	200.010
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemanfaatan Pokok Jenis	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perbedaan Waktu	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pokok Jenis	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sebelum Tahunnya	6.727.381	-	268.800	6.468.781	-
DMF	-	-	-	-	-
SDA	2.59 .185.971	-	2.388.807.200	322.708.104	320.435.413
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi DBH	-	-	-	-	-
Minyak Bumi PPh 22	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus	-	-	-	-	-
Gas Alam 30%	-	-	-	-	-
Gas Alam 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Alam Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	2.109.481.434	-	1.796.723.450	312.758.184	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Royalti	2.109.481.434	-	1.796.723.450	312.758.184	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Hasil	-	-	-	-	-
Provisi Sumber Daya Hutan	-	-	-	-	-
Kelautan	25.521.537	-	188.962.050	-	162.791.085
DR	-	-	-	-	-
DHP	-	-	-	-	-
PSDH	25.521.537	-	188.962.050	-	162.791.085
Perikanan	159.426.240	-	816.758.500	-	161.294.020
Grand Total	9.049.826.044	-	8.570.685.700	2.634.241.317	326.398.853

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Yapen (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2020	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMT No. 2/KM./2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMT No. 2/KM./2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
Pajak	-	-	822.369.015	822.369.015	-
PPh	-	-	689.297.720	689.297.720	-
PPh Pasal 21	-	-	531.820.022	531.820.022	-
PPh Pasal 25/29	-	-	157.476.854	57.477.854	-
PBB	-	-	133.701.269	35.601.269	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	13.454.595	13.454.595	-
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	58.116.704	20.115.384	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	28.502.302	6.120.867.020	1.931.019.291	4.189.277.603
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Kategori Utama	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	1.120.867.020	334.589.634	4.786.277.603
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	6.120.867.020	1.931.019.291	4.189.277.603
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	28.502.302	-	-	-
IHH	-	-	-	-	-
PSDH	-	28.502.302	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	28.502.302	6.943.700.015	2.777.214.410	4.166.277.603

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Yapen

(dalam ribuan)

JENIS DBH	Alokasi TA 2020	LB Disalurkan TA 2020	Penyaluran KB DBH Tahun TA 2020 (KEP-[illegible])	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Pajak	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
PBB Pasal 21	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
PBB Pasal 22/29	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
BPHTB	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sewa Tanah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Bagian Daerah Migas	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Alokasi Daerah Pasca Tambang	-	-	-	-	-
Alokasi Daerah Perbatasan					
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Tanah					-
Biaya Pemungutan Pajak [illegible]	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak [illegible]	-	-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
CHT					-
SDA	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka [illegible]					-
Gas Bumi 30%	-			-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka [illegible]	-	-	-	-	-
Mineral	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	
Landrent					
Royalti	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Panas Bumi	-			-	-
Luas Produksi	-	-	-	-	-
Luas tetap	-	-	-	-	
Setoran Bagian Pemerintah					
Perikanan	[illegible]		[illegible]		[illegible]
DR	-	-	-	-	-
DLPU	-	-	-	-	
PSDH	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Provisi	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Dana Bagi	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Jayapura (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	LB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 8/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (3)-(5)
PPh	-	-	1.292.786.241	1.292.786.241	
Migas			1.292.786.241	1.292.786.241	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29	-		1.292.786.241	1.292.786.241	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Dana Bagi Hasil	-				-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					-
Biaya Pemungutan PBB Perkotaan	-	-	-	-	-
DMF	-	-	-	-	-
SDA		(3.502.902)	5.261.090.283	40.168.820	5.291.820.419
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Mineral Bukan Jenis dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%			-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Bagian Pemprov Papua					
Minerba	-		5.261.090.283	40.179.864	5.291.870.419
Royalti	-	-	-	-	-
Landrent	-	-	5.53 .090.283	40. 79.864	5.291.870.419
Panas Bumi					
Bunga Produksi					
Royalti Panas					
Setoran Bagian Pemerintah	-	-		-	-
Kehutanan		(3.502.902)	-	-	-
IHPH					
PSDH	-	(3.502.902)	-	-	-
Reboisasi	-	-	-	-	-
Grand Total		(3.502.902)	6.6 .775.524	1.932.955.101	5.291.820.419

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Jayapura

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KU Definitif TA 2021	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan TA 2020 (KMK No. 13/KM.7/2021)	LB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang Telah Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)
Pajak	17.125.653.263	-	6.666.227.030	10.459.426.233	29.256.636
PPh	11.906.607.263		6.279.792.030	5.626.815.233	-
PPh Pasal 21	11.379.707.092		6.058.701.750	5.320.905.342	-
PPh Pasal 22/23	526.921.250		221.091.250	305.830.000	
PBB	2.291.941.200	-	386.435.120	1.905.506.080	28.228.636
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	926.104.900	-	260.500.000	665.604.900	
Bagian Daerah dari Migas	46.202.771		77.367.000		29.340.371
Bagian Daerah dari Migas				-	-
Bagian Daerah dari Pajak Lain			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Lainnya		-	-		
Bagian Daerah dari Pajak Lainnya	-	-			-
Bagian Daerah dari Pajak Lainnya	215.509.007		8.901.000	206.891.107	-
Biaya Pemungutan Migas	1.420.371		2.700.000	-	895.815
Biaya Pemungutan dari Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan dari Pajak Lain	-	-	-		-
Biaya Pemungutan dari Pajak Lainnya					-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya				-	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	6.737.341	-	456.900	6.468.731	-
DTH	-	-	-		-
DBH	9.284.710.458	-	2.284.857.200	262.758.241	316.934.976
Migas				-	-
Minyak Bumi 15%			-	-	
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Minyak Bumi dari Hasil Pengolahan Sendiri	-	-	-		-
Gas Bumi 30%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dari Hasil Pengolahan Sendiri					-
Minerba	2.109.781.750		1.036.431.250	323.756.18-	
Landrent	-		-	-	
Royalti	1.709.48.454	-	736.725.950	322.738.181	
Panas Bumi	-	-			-
Iuran Produksi					-
Iuran tetap				-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	
Pertanahan	26.(45.734	-	55.260.870		169.319.219
PP	-	-			-
DJPH				-	-
PBNP	20.040.731	-	165.382.950	-	150.219.219
Perikanan	159 66.930	-	314.851.050		157.091.027
Grand Total	9.423.545.66	-	2.077.089.250	10.9 9.391.30	345.30.923

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sarmi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Target Salur LB s.d. TA 2020 (SK DJPK No. 5/KEP/DJPK/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (PMK No. 27/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			203.052.623	203.150.439	(97.909.084)
PBB			190.276.029	190.276.029	-
PBB Migas			-	-	-
PBB Non Migas			190.276.029	190.276.029	-
BPHTB			12.776.594	12.874.410	(97.815.816)
Cukai			375.801.324	104.304.450	271.496.874
Cukai Hasil Tembakau			-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			265.601.909	-	265.601.909
Bagian Daerah Penghasil			-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Lainnya			-	-	-
Bagian Daerah Bukan Penghasil			100.706.300	100.706.300	-
Bagian Daerah Bukan Penghasil Lainnya			-	-	-
Biaya Pemungutan Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			8.200.220	-	8.200.220
Biaya Pemungutan Cukai Hasil Tembakau			-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan			-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan			4.196.480	4.196.480	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	-
PPh			-	-	-
SDA		261.028.527	21.054.141.353	4.089.141.723	17.264.757.465
Migas			-	-	-
Minyak Bumi (PPh 22)			-	-	-
Minyak Bumi (PPh 26)			-	-	-
Minyak Bumi dalam Bentuk Barang Offstream			-	-	-
Gas Bumi (PPh 22)			-	-	-
Gas Bumi (PPh 26)			-	-	-
Gas Bumi dalam Bentuk Barang Offstream			-	-	-
Minerba			10.177.013.926	-	10.177.013.926
Landrent			5.101.128.361	-	5.101.128.361
Royalti			10.775.952.966	-	10.775.952.966
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Produksi			-	-	-
Iuran tetap			-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan		261.028.527	8.177.227.964	4.089.141.723	4.088.086.241
PSDH			-	-	-
DR			8.747.290.991	8.231.890.934	484.400.057
DBHPR		261.028.527	1.429.936.973	636.903.479	793.033.494
Perikanan		-	-	-	-
Pertambangan Umum		261.028.527	21.927.194.317	4.584.141.723	17.343.052.594

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sarmi

(dalam rupiah)

URAIAN	KB DefinitifTA 2020	LB DefinitifTA 2020	Penyaluran DBH TA 2020 Sementara (PMK No. 37/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
[1]	[7]	[8]	[9]	[10]=[7]-[9]	[11]
Pajak	6.87 .706.73	-	2.134.394.900	-.585.722 -91	10.025.900
PBB	538.074.716	-	717.946.800	823.077.916	
PPh Pasal 21	1.019.07 .24		715.271.700	813.819.721	
PPh pasal 25/29	31.105.709		12.205.800	22.105.109	-
BPHTB	5.317.260.015		1.010.127.700	3.75 1.74 .575	9.025.900
Pajak Rokok	1 4 .650.598		265.696.700	1.776.970.798	-
Bagian Daerah Migas	820.627.487	-	841. 27.600	-	1.277.113
Dana Bagian Daerah Non Migas	17. 30.015		1.068.300	2 1.067.512	
Bagian Daerah Pasal Dana Bumi					-
Bagian Daerah Pertambangan	1.8 4.250.205		913.137.300	891.093.252	-
Bagian Daerah Pertambangan	70.742.649	-	-	70.742.6 9	
Bagian Daerah Kehutanan	217.390.027	-	8.634.200	208.094.727	
Dana Perimbangan Migas	10.220.99		10.07 .800		167.8 7
Dana Perimbangan Non Migas	55. 12.870		155.700	28 .1 .420	-
Dana Perimbangan Pasal Dana	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan PPh Pasal	62.618.068	-	81.766.500	32.747.068	
Dana Perimbangan Perkebunan	80 .277			80 .277	-
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	3.7 7.691		266.920	6.168.7 1	-
OHP	-	-	-	-	-
SDA	128. 21 .751	816 .3 .970	5.625.072.675	1.037.716.229	1.160.220.115
Kayu					-
Minyak Bumi (0,5)				-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	
Gas Bumi (0,5)	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			
Mineral	2.1 9.161.311	190.1 5.270	1.850.015.375	321.715.121	266.1 5.350
Panas Bumi		190.1 5.270	65.247.125	-	159.715.395
Royalti	2 .39.46 .434		1.795.725.250	323.753 .84	-
Pajak Bumi	-	-	-	-	
Dana Reboisasi	-	-	-		
Dana lelang					-
Provisi Sumber Daya Hutan					
Perikanan	1.965.542.340	925.162.700	1.456.161.600	735.157.045	851.870.700
DR	-	-	-	-	
DR PS		626.162.700	225.977.000		851.870.700
PNBP	1.965.5 2.01		1.230.784.600	735.156.045	-
Pertambangan	158.185.9 0		716.981.000	-	157.9 5.000
Grand Total	1.105.801 .61	816 .3 .970	8.607.468.875	8.645.838.782	1.280.2 3.077

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kaeram

(rupiah)

URAIAN	KB TA 2019	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 20.. (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	2.756.785.077	2.390.037.758	345.167.319
PPh	-		1.141.720.397		141.705.397
PPh Pasal 21			5.802.990	-	5.802.990
PPh Pasal 22/29			115.470.491	-	115.470.491
PBB		-	1.184.363.690	1.090.357.738	100.005.952
Bagi Hasil	-	-	-		-
Bagian Daerah Migas	-	-			-
Bagian Daerah Non Migas			1.184.363.690	1.090.357.738	-
Bagian Daerah Pajak Bumi				-	
Bagian Daerah Perkebunan			104.515.150	104.515.150	
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	1.372.308.850	1.252.184.718	120.124.132
Bagian Daerah Kehutanan	-				-
Biaya Pemungutan Migas				-	
Biaya Pemungutan Sektor Minas		-	33.320.070	-	33.320.070
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pertambangan	-		3.638.480		3.638.480
Biaya Pemungutan Perkebunan			58.368.150	-	58.368.150
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	
CHT	-	-	-		-
DBH	-	96.783.852	9.218.583.137		9.316.583.65
Migas				-	-
Minyak Bumi 15%			-	-	
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	
Minyak Bumi dalam Kawasan Khusus	-	-	-		
Gas Bumi 30%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba			7.829.314.369	-	7.678.810.669
Landrent		-	396.900.720	-	396.900.720
Royalti	-	-	6.83 - 5.169		6.831.79.169
Panas Bumi	-	-			-
Iuran Tetap/Landrent	-			-	-
Iuran Eksploitasi				-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	
Kehutanan	-	54.733.851	1.390.762.768		1.390.362.768
PSDH	-	-	-		-
IHPH		3.533.136		-	-
PSDH		93.249.716	1.650.249.746	-	1.500.263.765
Perikanan		-	-		
Dana Total	-	96.783.852	11.954.685.077	2.390.037.758	9.565.750.965

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kecrom

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (SAKTI No. 2/SKM/2021)	KB TA 2020 yang telah disalurkan	LB TA 2021 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	5.129.156.708	102.966.972	1.764.756.400	2.791.411.726	251.251.000
PPh	440.940.110		773.058.700	867.347.010	-
PPh Pasal 21	417.472.789	-	760.084.600	837.854.879	-
PPh Pasal 25/29	23.166.631	-	12.974.100	29.492.131	-
PBB	3.688.216.598	92.860.572	1.212.360.000	2.928.306.707	357.581.398
Bea BPHTB	1.001.999.999		391.584.700	1.796.279.286	
Bagian Pusat: Migas	204.58 .570		71 .201.000	-	6.919.500
Bagian Pusat: Non Migas	128.764.080	-	20.922.300	134 - 782	-
Bagian Daerah: Panas Bumi		-			-
Bagian Daerah: Perikanan		95.278.113	142.939.900		949.058.013
Bagian Daerah: Pertambangan	1.060.282.329		379.495.700	760.370.509	-
Bagian Daerah: Sektor Lainnya	3.8.550.027		8.034.300	208.934.727	-
Biaya Pemungutan: Pusat	6.370.611	-	2.611.000		961.958
Biaya Pemungutan: Non Migas	1.178.360	-	917.430	2.261.290	-
Biaya Pemungutan: Bagian Pusat	-		-	-	-
Biaya Pemungutan: Perikanan	-	3.151.369	4.930.600	-	3.11 .459
Biaya Pemungutan: Pertambangan	-3.615.142	-	12.787.100	31.288.342	-
Biaya Pemungutan: Sektor Lainnya	6.737.181	-	269.300	6.185.781	
PTT	-		-	-	
SDA	2.268.668.414	1.301.100.110	3. 35.472.775	332.758. 84	2.928.726.07
Migas		-			-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Kelebihan Bumi 0,5%		-	-	-	
Kelebihan Bagi Hasil Migas Otsus	-		-	-	
Gas Bumi 15%	-			-	
Gas Bumi 0,5%	-			-	-
Gas Bumi dari Kelebihan Otsus	-	-		-	-
Minerba	9.739.121.131	141.378.87	1.979.115.150	829.736.141	36- 370.07
Iuran Rent		141.378.87	192.991.300		284.370.07
Royalti	2.190.121.434		1.786 726.752	329.753.184	
Panas Bumi	-			-	-
Iuran Tetap Eksplorasi	-			-	-
Iuran Tetap Eksploitasi		-	-		-
Reforma Agraria Pemerintah			-		
Kehutanan	-	1.310.837.945	988.877.975	-	2.928.714.070
Iuran	-			-	-
IHPH		960.846. 50	249.868.525		810 1.3 675
PSDH		866 551.896	617.309.450		402 860.455
Perikanan	124.120.630		316.83 .300		137.69 .020
Grand Total	7.397.370 .25	1.701.333.386	- 970.199.775	3.827 168 910	3.126.611.361

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Yahukimo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 03/PMK.07/2021)	Perwesaan LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			968.152.090	195.653.704	772.498.386
PBB	-		195.653.704	195.653.704	
PBB Pasal 21	-	-			-
PBB Pasal 25/29	-	-	195.785.964	195.785.964	-
BPHTB		-	772.498.386	-	772.498.386
Pajak Rokok					
Bagian Penerimaan Migas					
Bagian Daerah dari Migas	-	-	707.818.960		707.818.960
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Kehutanan	-				
Dana Perimbangan Migas	-	-	-	-	-
Bagian Perimbangan Non Migas		-	95.119.446	-	95.119.446
Bagian Perimbangan Pertambangan Umum					
Bagian Perimbangan Pertambangan Panas Bumi	-				
Dana Perimbangan Pertanahan	-	-	-	-	-
Bagian Perimbangan Sektor Lainnya		-	-	-	-
CHT					
PBH	-	23.502.900	12.020.037.038	3.781.059.398	11.994.958.530
Migas	-	-	-		-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Nonmigas	-	-	16.655.667.578	3.781.029.598	4.854.653.980
Perikanan		-	2.302.041.734	2.302.041.734	-
Pajak			16.373.625.844	1.478.987.864	14.894.638.280
Pajak Bumi					
Iuran Eksploitasi	-				
Iuran tetap	-	-	-	-	-
Bagian Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan		23.502.900			
IHPH	-				
DR	-	-	-	-	-
PSDH		23.502.900	-	-	-
Pertanian					
Grand Total		23.502.900	13.691.202.378	3.976.712.161	11.994.958.530

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Yahukimo

(dalam rupiah)

URAIAN	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Pajak	4.292.347.579	-	1.203.150.501	3.705.391.879	10.178.634
PPh	1.751.235.702		855.697.500	1.295.568.048	
PPh Pasal 21	1.725.706.642		815.291.500	383.565.142	
PPh Pasal 25/29	22.076.312		9.566.400	12.509.912	
PBB	2.539.010.503	-	609.461.600	1.929.733.736	10.178.634
Bea Bptb	99.959.598	-	265.990.700	1.710.179.258	-
Bagian Daerah Migas	514.087.708		327.777.730	-	5.756.492
Bagian Daerah Non Migas				-	
Bagian Daerah Pajak Bumi			-	-	
Bagian Daerah Pertambangan		-	-		
Bagian Daerah Perkebunan	-	-			-
Bagian Daerah Kehutanan	215.770.027		9.200.300	206.569.727	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	9.726.796		10.161.100	-	422.312
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-			-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	-			-	
Biaya Pemungutan PPh Pasal 25			-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	1.737.591	-	788.700	948.891	-
DTE	-	-			-
SDA	2.291.167.971		2.259.817.200	122.956.194	520.453.473
Migas			-	-	
Minyak Bumi 15%			-	-	
Minyak Bumi 0,5%		-	-		-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Bumi 30%	-	-			-
Gas Bumi 2,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	2.109.191.131		1.236.733.350	822.735.181	
Landrent		-	-		-
Royalti	2.129.48 .434	-	1.770.733.250	322.756.184	-
Panas Bumi	-				-
Iuran Tetap (Ipt)	-			-	-
Iuran Tetap			-	-	
Setoran Bagian Pemerintah		-	-		
Kehutanan	52.631.687	-	153.220.000		53.774.063
PSDH	-			-	-
DBHPS			-	-	
DSDH	22.221.687	-	185.262.050		162.771.042
Perikanan	159.136.980	-	3.168.851.020		157.694.040
Jumlah Total	6.53 .547.546	-	5.031.823.730	3.959.150.060	350.614.717

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pegunungan Bintang (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d TA 2019 (PSAK No. 25/PSAK No. 7/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 72/PMK.07/2022)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 72/PMK.07/2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			1.259.628.420	123.514.696	1.136.114.737
PPh	-	-	123.514.696	123.514.696	-
PPh Pasal 21	-	-	-		
PPh Pasal 22/26	-	-	123.514.696	123.514.696	
PBB			1.136.113.724		1.136.113.737
Bea Jabatan					-
Bagian Daerah Migas			-	-	
Bagian Daerah Non Migas	-	-	1.091.090.140		1.091.090.140
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-		
Sebelas Persen Kehutanan					-
Sebelas Persen Perkebunan				-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas			34.134.567		34.134.567
Biaya Pemungutan Atas Laut				-	-
Biaya Pemungutan Atas Darat	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pusat Lainnya	-	-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
PBB					-
SDA		24.439.245	6.715.303.737	1.415.471.956	5.277.831.801
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	-	-	6.715.303.737	1.415.471.956	5.277.831.801
Landrent			317.015.277	219.677.338	797.348.939
Royalti			5.798.288.132	-	4.480.785.162
Dana Bunga			-	-	-
Iuran Tetap (Landrent)	-	-	-	-	
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-		
Kehutanan		21.108.215		-	-
IHH	-	-	-	-	-
PSDH	-	-	-		
Pendapatan		24.439.245			-
Dana Reboisasi				-	-
Jumlah Total		24.439.245	8.099.302.160	1.539.986.652	6.408.946.558

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pegunungan Bintang

(dalam ribuan)

Uraian DBH	PK DBH TA 2020	Realisasi TA 2020	Perubahan KU-LB TA 2020 (PMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3+4)	(6)
Pajak	1.225.500.892	-	(218.412.369)	1.431.783.185	9.712.116
PPh	1.513.093.239	-	156.946.100	756.746.739	-
PPh Pasal 21	484.798.367	-	(46.894.900)	741.953.467	-
PPh Pasal 25/29	27.202.362	-	10.501.600	17.194.262	-
PPh 26	2.815.111.270	-	697.140.400	2.130.307.966	9.742.116
Pajak Bea	1.091.918.999	-	265.669.700	1.126.272.263	-
Bagian Daerah Migas	931.349.521	-	310.361.650	-	9.306.079
Bagian Daerah Non Migas	379.611.202	-	5.028.500	316.481.609	-
Bagian Daerah Pasca Orsus	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasca Otsus	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasca Otsus	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Selisih Lebihnya	2.536.869.017	-	8.021.300	206.904.707	-
Biaya Pemungutan Migas	9.814.380	-	9.716.300	-	98.080
Biaya Pemungutan Non Migas	8.710.720	-	1.010.700	1.021.600	-
Biaya Pemungutan Pasca Otsus	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Selisih Lebihnya	6.737.391	-	263.820	6.101.791	-
PBB	-	-	-	-	-
SDA	6.116.101.172	-	2.327.309.420	4.060.791.100	320.430.412
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dari Participating Interest	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	3.983.856.373	-	465.065.475	4.059.041.100	-
Landrent	3.925.073.111	-	77.342.525	3.847.730.586	-
Royalti	2.109.761.479	-	1.786.721.250	323.736.186	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	22.021.507	-	193.282.900	-	162.711.360
PSDH	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
PSDH	22.021.507	-	193.282.900	-	162.711.360
Perikanan	120.196.990	-	271.851.000	-	157.071.327
Grand Total	12.712.063.614	-	3.785.571.020	6.991.554.285	330.142.528

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tolikara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	LKPD s.d. TA 2019 (PMK No. 91/PMK.07/2021)	Penyesuaian LKPD s.d. TA 2019 (KSSK No. S-433/K.7/2021)	Sisa LKPD s.d. TA 2019 (KSSK No. S-433/K.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak			691.070.107	197.746.677	513.323.430
PPh			193.716.677	193.746.677	-
PPh Pasal 21		-	40.704.548	40.704.548	
PPh Pasal 25/29	-	-	140.042.129	140.042.129	
PBB	-	-	710.323.820		710.323.820
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					-
Cukai					-
Cukai Hasil Tembakau			494.862.433	-	494.862.433
Bagian Daerah Penerimaan Pajak Lainnya	-	-	-	-	
Bagian Daerah Penerimaan Hasil Cukai	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Pajak Lainnya			-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	15.161.288		15.161.288
Biaya Pemungutan Pajak PBB					-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya - DBH CHT	-	-	-		-
SDA		23.302.920	7.126.805.707	3.962.026.203	4.203.347.320
Migas			-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-	-			
Minyak Bumi Hasil Pengolahan Dibagi Rata					-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi Hasil Pengolahan Dibagi Rata	-	-	-	-	
Minerba	-	-	7.126.383.703	3.962.026.203	4.203.347.500
Panas Bumi	-	-	1.286.749.686	276.658.786	1.010.090.900
Kehutanan			5.839.633.017	3.685.367.417	2.154.257.600
Perikanan				-	-
Pertambangan Mineral dan Batubara			-	-	-
Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	
Pertambangan Minyak Bumi	-	-			
Kehutanan		23.302.920			-
SDA			-	-	-
PNBP	-	-	-	-	
PNBP	-	23.302.920			
PNBP Lainnya					
Grand Total		23.302.920	7.817.875.814	4.159.772.880	4.717.774.752

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tanah Laut

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	LB TA 2019	Penyaluran DBH Tahun TA 2020 (Kep. No. 07/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang telah diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]=[3]-[5]
Pajak	3.611.792.027		1.190.760.500	2.626.611.360	7.537.673
PDB	1.374.936.344		696.977.500	677.958.844	
PPh Pasal 21	1.352.870.658	-	675.307.500	677.563.158	
PPh Pasal 23/26	22.124.536	-	16.350.000	5.774.536	
PBB	2.436.716.015	-	501.000.000	1.929.731.154	7.537.673
Bea Meterai	1.091.050.096		293.039.703	1.716.279.296	-
Bagian Daerah Migas	215.776.771		215.776.771	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Perkebunan				-	-
Bagian Daerah Kehutanan	215.699.077	-	8.604.300	206.944.707	
Bagian Pemerintah Migas	8.671.564	-	8.078.505		593.059
Bagian Pemerintah Non Migas					-
Bagian Pemerintah Panas Bumi				-	-
Bagian Pemerintah Perkebunan		-	-	-	
Bagian Pemerintah Kehutanan	-	-	-		
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	6.737.581		286.630	2.068.721	-
CHT				-	-
DBH	2.291.139.971	172.535.100	1.012.174.150	931.958.184	316.207.603
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-				-
Alokasi Untuk dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Pertambangan	2.169.437.434	172.535.100	1.810.535.200	822.735.167	196.602.067
Panas Bumi		172.535.100	23.000.000		195.602.067
Kehutanan	2.169.437.434		1.786.722.200	822.736.139	-
Pertambangan Umum			-	-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-		
Setoran Bagian Pemerintah	-				
Perikanan	22.321.337		193.252.950		1.604.363
DR		-	-	-	-
PHTB	-	-	-	-	
PBBP	22.321.337		193.252.950		1.604.363
Pertambangan	139.180.200		211.691.020		317.694.320
Grand Total	6.102.302.378	172.535.100	3.102.592.720	2.951.569.564	533.835.136

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Boven Digoel

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran LB s.d TA 2019 (KMA No. 177/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMA No. 177/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]
Pajak			162.931.431	162.931.431	-
PPh	-	-	162.931.431	162.931.431	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	
PPh Pasal 25/29	-	-	162.931.431	162.931.431	
PBB					
Bea Meterai					-
Pajak Daerah Migas				-	-
Pajak Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Pajak Daerah Perusahaan	-	-	-		
Pajak Daerah Perseorangan					
Pajak Daerah Pemerintah				-	-
Pajak Daerah Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Daerah				-	-
Biaya Pemungutan Perseorangan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perusahaan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
DLL				-	-
SDA		92.281.749	5.944.670.935	501.349.086	4.635.321.156
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-		
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	-	-	5.779.738.775	643.801.197	635.937.578
Iuran Tetap			770.709.302	770.709.302	
Royalti			5.009.029.473	773.092.895	635.937.578
Panas Bumi				-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-		
Sebelum Bagian Pemerintah					
Kehutanan		92.281.749	3.060.240.022	1.065.647.659	4.494.759.191
PSDH	-	-	-	-	-
DBHPSDH	-	-	607.674.570	109.033.410	4.498.759.191
DSDH		92.281.749	957.612.139	956.614.249	
Perikanan					-
Grand Total		92.281.749	5.907.601.635	2.073.082.497	4.635.321.156

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Boven Digoel

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesteran TA 2021 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(10=2)-(4)	(11)
Pajak	10.366.772.583	-	2.560.642.000	7.595.253.016	108.107.358
PBB	2.401.583.000	-	901.468.700	1.500.114.300	
PPh Pasal 21	2.206.028.422		879.758.600	1.326.269.822	
PPh Pasal 25 dan 29	58.307.307		11.709.400	27.697.907	
PDRD	7.901.169.007		1.669.174.100	6.371.176.000	108.167.358
Bagi Rata	591.969.999	-	265.689.700	726.280.299	-
Bagian Daerah Penghasil Migas	176.804.046	-	282.546.000	-	105.741.954
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas Darat					
Bagian Daerah Perbatasan	2.197.702.242		535.804.200	1.661.147.946	-
Bagian Daerah Pengolahan	5.186.613.264	-	546.352.800	2.639.665.264	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	315.897.607	-	1.604.300	930.301.707	
Dana Pertanggungan Migas	5.131.701		5.826.400		694.699
Dana Pertanggungan Non Migas					-
Dana Pertanggungan Pajak Darat	-	-	-	-	-
Dana Pertanggungan Pajak Darat	75.346.213	-	16.403.300	56.642.913	
Dana Pertanggungan Perkebunan	132.737.902		22.449.300	109.085.602	
Dana Pertanggungan Jasa & Dana Reserva	6.737.541		299.800	6.136.481	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	2.268.066.414	271.219.603	2.851.078.550	322.758.184	1.176.383.124
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka DMO	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka DMO					
Mineral	2.109.751.739		1.781.720.250	322.758.184	
Batubara					-
Perikanan	158.314.675		1.356.750.250	322.758.184	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	
Iuran tetap					
Setoran Dispen Pemerintah					
Kehutanan	-	271.219.603	271.669.300	-	1.176.383.124
DR	-	-	-	-	-
PSDH					
PSDH		271.219.603	777.669.300		1.019.969.103
Penikmatan	159.136.530		316.631.000	-	97.594.070
Grand Total	19.633.640.977	271.219.603	5.431.690.850	8.218.105.200	1.285.732.479

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mappi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB s.d. TA 2019 (KEP No. 6/KEP/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KEP No. 6/KEP/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			190.858.020	190.858.020	
PPh	-		190.858.020	190.858.020	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	190.858.020	190.858.020	-
PBB		-	-	-	
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasca Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-	-		
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan	-			-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-			-	-
Bagian Daerah Perikanan		-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan Batubara		-	-	-	
PPh					
PBB	-	28.209.909	4.909.118.248	880.759.805	4.082.361.443
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-		
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-			-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Panas Bumi	-	-	4.909.118.248	826.756.805	4.082.361.443
Kehutanan					
Reguler			1.909.118.248	826.756.805	1.082.361.443
Dana Reboisasi					-
Iuran Provisi	-	-	-	-	-
Iuran Izin	-	-	-	-	-
Kekurangan Bagian Pemerintah			-	-	
Perikanan		28.209.909			
CHT	-				-
PNBP	-	-	-	-	-
PBB		28.209.909	-	-	
Tambang					
Grand Total	28.209.909		5.100.976.268	1.080.000.000	4.082.361.443

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mappi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	LB TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10) (7)-(9)	(11)
Pajak	7.206.705.317		1.503.779.591	2.800.092.702	107.016.631
PPh	1.360.139.135		760.111.103	773.022.032	-
PPh Pasal 21	1.526.065.630		778.541.768	751.523.862	-
PPh Pasal 25/29	54.072.505	-	15.575.460	51.497.107	-
PBB	2.707.961.928	-	717.641.461	2.064.020.453	107.317.637
Bea. Bea	1.791.050.098	-	665.689.708	1.776.070.209	-
Bagian Daerah Migas	178.837.114		277.285.901		101.916.186
Bagian Daerah Pas Atas					-
Bagian Daerah Pasar Bawah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	202.737.340	-	15.745.302	151.01 .450	
Bagian Daerah Perbendaharaan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.576.007		3.001.206	202.994.707	-
Biaya Pemungutan Migas	5.797.705		3.649.500	-	2.147.165
Biaya Pemungutan Pas Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi					
Biaya Pemungutan Perbendaharaan	10.547.430		3.242.200	5.275.230	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.737.581	-	268.810	6.468.771	-
Cukai	-		-		
SDA	2.256.086.717	1.542.111	2.290.212.670	522.158.197	416.271.196
Migas				-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dr. Wil. Penugasan Daerah	-	-	-		
Gas Bumi 69%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba	2.109.481.434	-	1.736.737.250	372.756.184	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	2.109.481.434	-	1.736.737.250	372.756.184	
Panas Bumi					
Jenis Pendapatan					
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Bunga Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		1.542.111	553.038.625		237.180.736
DR					
PSDH	-	-		-	-
DBHT	-	1.542.111	265.938.625	-	237.180.736
Perikanan	139.786.962	-	316.851.060		157.014.020
Grand Total	6.737.078.733	1.542.111	3.901.321.317	3.192.708.376	622.490.197

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Asmat

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019	KURANG BAYAR TA 2020 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian Kurang Bayar TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Total Kurang Bayar TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	80.085.609	80.085.609	
PPh	-	-	80.085.609	80.085.609	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			80.085.609	80.085.609	-
PPN	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21					-
Bagian Daerah Pasal 25/29				-	-
Bagian Daerah Bea Materai	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Bea Materai	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Kehutanan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-		-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	32.635.671	6.683.003.072	703.613.378	6.091.301.021
Migas					
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Panas Bumi			5.226.347.928		5.226.347.928
Pertambangan	-	-	-	-	-
Pajak	-	-	5.226.521.928	-	5.226.387.313
Panas Bumi	-	-	-	-	
Iuran Produksi					
Iuran tetap					
Pertambangan Panas Bumi				-	-
Kehutanan	-	32.635.671	1.456.617.544	565.613.378	865.004.166
PSDH	-	-	-	-	
DR			1.133.063.210	565.613.378	567.721.832
Total		32.635.671	323.282.334	-	323.282.334
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	32.635.671	6.768.290.771	670.595.377	6.091.301.021

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Asmat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KE Definitif Setelahnya TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dikembalikan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(9)	(10) (9)-(2)	(11)
PPh	8.997.945.776	-	1.488.708.560	2.621.483.730	12.110.654
PPh	1.381.300.114		708.148.100	581.151.941	-
PPh Pasal 21	1.376.208.208		668.159.600	586.702.406	-
PPh Pasal 25/29	32.162.352		20.318.900	20 – 3.538	-
PPh	2.616.545.162	-	569.459.960	333.753.774	12.110.654
Pajak Bumi	1.091.333.005	-	265.459.700	1.726.273.284	
Bagian Daerah Migas	300.5		102.502.850		1.337.677
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Penerimaan Pajak			-		-
Bagian Daerah Penerimaan	-	-	-		
Bagian Daerah Penerimaan		-			
Bagian Daerah Sektor Lainnya	21.339.207		8.107.490	236.891.407	-
Cukai Hasil Tembakau Non Migas	12.0		12.987.350	-	517.697
Bagian Penerimaan Non Migas	-	-	-		
Bagian Penerimaan Pajak Bumi	-	-	-		
Bagian Pertambangan Perikanan					-
Bagian Pertambangan Pertambangan			-	-	-
Bagian Penerimaan Sektor Lainnya	6.737.58	-	766.30	6.468.78	
Cukai Hasil Tembakau	-		-		
SDA	2.712.351.080		2.372.913.720	321.758.161	338.350.949
Migas				-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam rangka Otsus				-	-
Minerba	2.105.461.–94	-	1.765.703.550	325.756.18–	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Royalti	2.109.48[illegible]–5–	-	1.786.713.050	325.758.18[illegible]	
Pajak Hasil					
Panas Bumi					-
Kehutanan			-	-	-
Sumber Daya Perikanan	-	-	-	-	
Kelautan	–3.083.672	-	97.209.171		128.020.023
DR					-
DR PS			-	-	-
PSDH	143.662.654	-	272.503.175	-	135.636.724
Dana Reboisasi	159.156.080	-	316.884.302		157.491.020
Grand Total	8.716.296.256		3.464.412.725	2.941.241.911	295.109.017

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Wonosobo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PPh Ps. 21	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Proyeksi LB s.d. TA 2020 (SVR No. 3/PM.07/2021)	Rincian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pertak	-	-	4.358.903.830	2.683.554.597	1.675.349.233
DAK		-	35.273.837	-	574.273.837
DAK Fisik			363.680.417		363.680.417
DAK Fisik 25/28			69.390.420		69.390.420
PBH	-		3.951.539.193	2.683.554.597	1.269.984.596
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Hasil		-	-	-	-
Bagian Daerah Dari Migas					
Bagian Daerah Dari Pajak Bumi					
Bagian Daerah Dari Panas Bumi	-		3.292.107.071	2.302.274.971	989.832.171
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	456.265.119	-	456.265.119
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	
Bagi Pertimbangan Migas					
Bagi Pertimbangan Non Migas	-				
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Perhutanan		-	159.159.025	-	159.159.025
Bagi Pertimbangan Perkebunan			19.094.390		19.094.390
Bagi Pertimbangan Sektor Lainnya	-				
OHO	-	-	-	-	-
SDA		23.334.029	8.656.845.653	-	8.633.849.653
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%	-	-			
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba			5.305.810.033		4.020.979.105
Pertama	-		5.372.979.190		2.979.169.190
Kedua	-	-	5.983.870.356		5.063.670.356
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi		-	-	-	-
Dana Iuran					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	23.634.029	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH					
PSDH	-	23.634.029			
Perikanan	-	-			
Grand Total	-	23.334.029	12.015.777.385	2.683.554.597	10.332.223.383

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Wonopan (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2021	Penyaluran DB DBH Semester IA 2020 (PMK No. 109/PMK.07/2020)	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10=7-9)	(11)
Pajak	5,069,033,877	-	1,547,355,500	3,521,678,377	9,760,555
PBB	1,387,478,350	-	658,698,300	728,780,050	-
PBB Pasal 21	1,358,418,090		658,698,300	699,719,790	
PBB Pasal 25/29	29,060,260		10,500,000	18,560,260	
BPHTB	3,681,555,527		888,657,200	2,792,898,327	10,760,555
Bagi Hasil	1,961,969,913		265,099,100	1,696,870,813	-
Bagian Daerah Migas	776,503,029	-	420,650,502	-	13,267,478
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	
Bagian Daerah Pusat Dana					
Bagian Daerah Perbantuan					
Bagian Daerah Bank Tanah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215,599,307	-	8,614,500	206,984,807	
Bagian Pemanfaatan Migas	12,595,220		13,118,400		772,851
Bagian Pemanfaatan Non Migas	-				
Bagian Pemanfaatan Dana Bunti	-	-	-	-	-
Bagian Pemanfaatan Perbatasan		-	-	-	-
Bagian Pemanfaatan Perbatasan					
Bagian Pemanfaatan Sektor Lainnya	6,137,581		204,920	6,042,761	
DBH	-	-	-	-	-
DAU	2,265,648,400	45,144,303	1,346,261,775	921,737,181	851,817,387
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	2,139,181,111	723,070,530	1,811,137,823	328,043,288	482,490,129
Panas Bumi		723,070,530	27,111,272		482,490,129
Reguler	2,139,461,404	-	1,784,026,551	328,043,288	-
Kurang Bayar	-	-	-	-	-
Dana Otsus	-	-	-	-	-
Dana Tetap					
Belanja Pegawai Diperhitungkan					
Tambahan	-	26,065,643	185,282,650	-	31,596,490
DR	-	-	-	-	-
DAK					
Fisik		26,065,643	185,282,650		211,062,791
Perbatasan	153,185,980	-	13,951,020	-	137,044,320
Grand Total	9,220,701,791	45,144,303	3,731,553,375	2,956,306,390	893,575,397

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sragen

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
Pajak			91.873.829	91.873.829	
PPh			91.873.829	91.873.829	
PPh Pasal 21	-				
PPh Pasal 25/29	-	-	91.873.829	91.873.829	-
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata			-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkehutanan			-		
Bagian Daerah Pertambangan Umum					
Bagian Penerimaan Pertambangan Migas	-	-			-
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Bumi			-	-	
Bagian Penerimaan Perkebunan					
Bagian Penerimaan Perkehutanan	-	-			
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT			-	-	-
PHT		26.517.862	5.827.092.909	920.092.905	5.827.000.791
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	5.827.092.909	920.092.805	5.827.092.704
Landuse	-	-	-	-	-
Iuran		-	5.827.092.909	920.092.805	5.827.092.704
Otsus Tsus					
Dana Tambahan Infrastruktur					
Dana Otsus	-	-			
Bantuan Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		26.517.862	-	-	-
DR					
IIUPH	-				
PSDH	-	26.517.862	-	-	-
Perikanan		-	-	-	-
Grand Total		26.517.862	5.919.066.738	791.940.634	5.827.092.734

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sumbawi

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Sampai dengan TA 2020 (SMS No. S-6/MK.7/2021)	KB TA 2020 yang telah dialokasikan	LB TA 2020 yang telah diselesaikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (9)	(11)
Pajak	3.948.349.492		1.086.220.100	2.862.794.096	- 303.765
PPh	1.837.294.779		970.293.507	867.001.272	-
PPh Pasal 21	571.027.456	-	469.192.600	101.834.756	
PPh Pasal 25/29	202.717.173	-	0.381.602	1.715.593	
PPN	1.361.449.673	-	476.034.000	1.030.731.780	1.020.750
Bea. Rete	1.991.970.098		265.080.700	1.726.270.298	
Bagian Daerah Migas	142.702.909		115.360.000	-	4.141.031
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pasca Kurang	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan		-			
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.379.700		0.380.000	206.994.700	-
Biaya Pemungutan Migas	4.413.366	-	4.365.800	-	182.032
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			
Biaya Pemungutan Pasca Kurang					-
Biaya Pemungutan Perkebunan			-	-	-
Biaya Pemungutan Dak Fisik	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	0.737.581	-	269.800	0.165.781	
Cukai					-
DBH	2.139.189.971		2.296.700.200	374.756.184	301.435.413
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%		-			
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Minerba	2.109.481.458	-	1.786.725.730	263.758.794	
Iuran Tetap		-			
Royalti	2.109.481.458		1.786.725.200	322.756.194	
Panas Bumi					-
Jenis Pph/pkb	-		-	-	-
Jenis Barang	-	-	-	-	
Bunga Bagian Pusat Utuh		-			
Kehutanan	29.708.500		509.301.950		182.741.393
DR			-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DBHT	29.597.837	-	185.202.950		102.711.093
Perikanan	150.186.985		310.581.000		107.854.020
Grand Total	3.290.589.379		3.065.101.307	3.199.642.249	30.759.76

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mamberamo Raya

(dalam rupiah)

URAIAN	s.d TA 2016	s.d TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 26/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2020 (KMS No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (KMS No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	3.063.947.718	2.450.295.732	613.651.986
PPh			30.580.149		30.580.149
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29	-		140.565.738	-	140.565.738
PPN	-	-	3.893.500.830	4.490.580.732	3.342.972.848
Pbb	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas		-	3.911....	1.761....	3....
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Dana Otsus	-			-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	42.416.700	-	42.416.700
Bagian Daerah Pertambangan	-	-			
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas			210.271.945	-	540.731.945
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-		
Bagian Pemerintah Perhutanan			1.472.800		1.472.800
Bagian Pemerintah Pertambangan				-	-
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
OHP	-	-	-		
SDA		28.977.936	33.243....		33....
Migas					-
Minyak Bumi 15%			-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dari Participating Interest	-	-			
Gas Bumi 30%		-			
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Kehutanan	-		3.194....	-	3....
Pertambangan	-	-	5.400.737.400	-	15.400.737.400
Royalti	-	-	5.373....	-	10....
Pajak Ekspor		-			
Jaminan Reklamasi					
Jaminan Lainnya				-	-
Bagian Bagi Hasil Pertambangan	-	-	-	-	-
Kelautan dan Perikanan	-	27.477.936	1.010....		1....
DR					
DAK			1.069....	-	1.069....
PPh 21	-	28.977.936	-	-	-
Pertanian	-	-	-	-	-
Grand Total		28.977.936	47.209....	4.490.580.732	12....

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mamberamo Raya (dalam rupiah)

URAIAN	(2) Realisasi TA 2020	(3) Desember TA 2020	(4) Penyaluran KB DBH Desember TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	(5)=(2)-(4) KB TA 2020 yang belum diselesaikan	(6) KB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	4.013.715.804	-	497.598.520	3.551.035.082	18.315.563
PBB	1.277.703.776	-	646.301.500	631.302.276	-
PBB Migas (2)	1.277.703.776		646.301.500	631.302.276	
PPh Pasal 25/29	32.139.550		10.309.050	11.441.350	
BPHTB	2.768.025.316		941.201.050	1.809.021.766	18.919.104
Bagi Hasil	1.931.686.196		258.984.750	1.026.279.296	-
Lainnya Daerah Migas	727.710.231	-	555.269.750	-	8.750.481
Lainnya Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Dampak Iklim					
Bagian Daerah Perkebunan					
Lainnya Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Lainnya Daerah Sektor Lainnya	211.709.807	-	8.504.302	926.994.707	-
Biaya Pemungutan Migas	15.070.101		17.371.301		716.009
Biaya Pemungutan Non Migas	-				
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	5.707.501		239.900	6.135.701	
OPT	-	-	-	-	-
SDA	2.202.868.414	142.867.756	2.939.82 .650	372.558. 34	535.768.578
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%	-				
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	2.202.181.714		1.761.723.250	322.758.19	
Panas Bumi	-				
Royalti	2. 02 43. -5-	-	1.761 72 .250	325.1 9 16-	
Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi			-	-	-
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	142.867.756	925.216.800	-	371.101.556
DR	-	-	-	-	-
PSDH					
PSDH		142.867.756	229.216.800		371.101.556
Perikanan	159 66.930	-	916.93 .000	-	157.299.020
Grand Total	6.21 .354.406	142.867.756	3.836.419.552	7.260.714.0-6	554.7 7.145

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mamberamo Tengah

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2019	LB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran LB TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			-6.140.650	142.140.650	
PBB			-6.140.650	142.140.650	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29	-		-142.140.650	142.140.650	-
BPHTB	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21	-			-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas	-				-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pasal 21		-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Pertambangan					-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
PBJT	-	-	-	-	-
PDRD		25.477.031	5.608.763.681	1.037.978.656	4.600.479.025
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Kerja Sama		-	-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Kerja Sama					
Minerba	-	-	5.608.155.181	1.007.675.606	4.600.479.575
Landrent	-	-	-	-	-
Jaminan	-	-	5.608.155.181	1.007.675.606	4.600.479.575
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	-				
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	25.477.031	-	-	-
DR					
PSDH					
PSDH	-	25.477.031	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Grand Total		25.477.031	5.602.506.031	1.030.113.206	4.600.479.025

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mamberamo Tengah

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Pengalokasian PB 2021 berdasarkan TA 2020 (KMK No. 37/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(2)-(3)	(6)
Pajak	3.720.732.870	-	1.044.410.000	2.676.322.870	2.154.380
PPh	1.578.570.654	-	842.807.500	735.762.154	
PPh Pasal 21	1.557.465.738	-	839.782.000	717.683.738	
PPh Pasal 25/29	21.104.916		3.025.500	18.079.416	
PBB	2.142.212.216		201.602.500	1.940.609.716	2.154.380
Bagi Hasil	1.951.959.968		200.699.700	1.751.260.268	-
Bagian Daerah Migas	134.078.577	-	26.124.300	-	2.025.893
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Pasal 21/26					
Bagian Daerah Perbatasan					-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan	215.590.027	-	8.604.200	206.034.707	-
Biaya Pemungutan Migas	3.487.313		3.076.100		109.027
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Kehutanan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perbatasan					
Biaya Pemungutan Pelator Lainnya	2.703.703		268.600	2.768.703	-
CHT	-	-	-	-	-
DBH	7.263.663.-	52.057.936	1.317.820.050	332.758.154	423.047.736
Migas		-			
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 3,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 6,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			
Mineral	2.109.121.131		1.290.720.250	322.736.191	
Landrent					-
Royalti	2.129.491.349		1.290.720.250	332.756.184	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	
Dana Setoran					
Pengenaan Bagian Pemerintah					
Pertambangan	-	52.057.936	27.099.800	-	368.433.956
IHT	-	-	-	-	-
BLPH		-			
PSDH		52.057.936	27.099.800		368.433.956
Perikanan	109.187.987		1.100.000		157.894.928
Grand Total	5.389.451.98-	52.057.936	2.345.941.050	2.996.255.19-	425.201.116

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Yalimo

(rupiah)

JENIS DBH	KPPN 2018	KPPN 2019	Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 95/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB s.d TA 2015 (KMK No. /KM.7/2021)	Sisa Lebih Bayar TA 20 (KPPN No. S/SKP-7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4) (5)
Pajak			137.231.021	137.231.021	
PPh			137.231.021	137.231.021	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			137.231.021	137.231.021	
PBB					
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 4 Ayat 2					
Bagian Daerah PPh Perorangan					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21					
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan PPh Perorangan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT					
SDA		21.922.930	3.671.799.837	1.019.711.171	4.027.784.306
Migas					
Minyak Bumi 85%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Hasil Pengolahan Bagian Daerah 69%					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Hasil Pengolahan Bagian Daerah					
Pertambangan			5.647.436.837	619.700.047	4.027.784.306
Pertambangan					
Kayu			5.647.436.837	1.019.711.171	4.027.784.306
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		28.607.306			
DR					
PSDH					
PSDH		28.607.306			
Perikanan					
Grand Total		21.922.930	3.781.031.154	1.156.942.092	4.027.784.306

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Yalimo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran (s.d. Des) Definitif TA 2020 (bdk No. S-[illegible]/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.720.000.000		991.454.000	2.711.663.842	3.818.158
PPh	1.031.705.356		615.375.200	772.331.056	
PPh Pasal 21	1.369.400.356	-	603.870.500	765.567.856	
PPh Pasal 25/29	29.084.500	-	10.304.700	17.760.300	
PBB	2.358.604.644	-	372.170.100	1.939.731.756	2.806.432
BPHTB	1.081.050.000		291.168.750	1.126.272.250	-
Bagian Daerah Migas	91.656.225		94.199.304	-	2.738.071
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Dana Bagi Hasil	-	-	-		
Bagian Daerah Otonomi Khusus					-
Bagian Daerah Perimbangan				-	-
Dana Daerah Pilihan Lainnya	115.659.027	-	8.604.300	956.994.707	
Biaya Pemungutan Migas	2.859.545	-	2.739.425		120.120
Biaya Pemungutan Non Migas	-				-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah				-	-
Biaya Pemungutan Perimbangan			-	-	
Biaya Pemungutan Lainnya	-	-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya (DR)	6.737.781		2.654.500	2.708.721	-
				-	-
JUMLAH	4.291.199.971		1.267.967.250	920.958.784	920.435.173
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 15%	-		-		
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus				-	-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%		-		-	
Gas Bumi dalam Wilayah Kerja Khusus		-	-		
Minerba	2.109.491.434	-	1.786.733.950	422.736.184	
Tambang Batubara	-				-
Royalti	2.109.491.434		1.786.733.950	322.756.184	-
Pajak Bumi				-	-
Bunga Deposito		-	-	-	
Denda Pajak	-	-	-		
Sebagian Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan	22.321.357		19.222.950	-	1.540.393
DR		-	-	-	-
Perikanan	-	-	-		
PSDH	22.321.357		19.222.950		1.540.393
Panas Bumi	70.194.950		11.691.000	-	117.694.922
Jumlah Total	6.493.869.757		3.267.361.950	3.034.020.306	828.009.533

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Tanjung Jaya

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)	SISA LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			158.118.177	158.118.177	
PPh			158.118.177	158.118.177	
PPh Pasal 21			20.158.983	20.158.983	
PPh Pasal 25/29	-	-	137.959.194	137.959.194	-
PBB	-	-	-	-	-
Reg. Kaz.	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Panas Bumi	-		-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagi Pemerintah Migas	-			-	-
Bagi Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagi Pemerintah Panas Bumi		-	-		
Bagi Pemerintah Pertambangan					
Bagi Pemerintah Perhutanan	-			-	-
Bagi Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT		-	-	-	-
SDA		23.502.000	3.591.159.557	991.721.350	4.599.478.027
Migas					
Minyak Bumi (OSS)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi (DMO)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka OSS	-	-	-	-	-
Gas Bumi OSS					
Gas Bumi DMO					
Gas Bumi dalam Rangka OSS					
Pinalti	-	-	3.591.159.557	991.721.350	4.599.478.027
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	3.591.159.557	991.721.350	4.599.478.027
Panas Bumi					
Setoran Produksi					
Setoran Lain	-				-
Setoran Bagian Panas Bumi	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	23.502.000	-	-	-
IHH					
PSDH					
DR	-	23.502.000	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total		23.502.000	3.749.277.734	1.149.880.527	(399.478.027)

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lamongan

(rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Sesuai PMK No. 39/PMK.07/2021 (PMK No. 81/PMK.07/2021)	KB DBH 2020 yang belum disalurkan	LB DBH 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6) = (3) - (4)
Pajak	7.518.109.111		1.010.045.200	2.508.063.911	3.000.647
PPh	1.313.973.012		65.000.000	868.927.812	
PPh Pasal 21	1.294.215.012	-	641.795.800	652.419.212	-
PPh Pasal 25/29	19.758.000	-	1.387.600	8.370.400	-
PBB	2.234.181.099	-	387.878.200	1.783.733.740	3.000.647
Bagi Pusat	1.901.320.084		267.020.700	761.270.258	
Bagian Daerah Migas	116.292.922		116.083.107		3.000.647
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Hibah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perairan		-	-		
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	115.593.207		8.694.920	206.854.727	
Bonus Penandatanganan Migas	3.503.791	-	3.742.400	-	145.109
Bonus Penandatanganan Non Migas		-	-	-	-
Bonus Penandatanganan Hibah Pusat					
Bonus Penandatanganan Pertambangan	-				
Bonus Penandatanganan Perairan	-	-	-	-	-
Bonus Penandatanganan Sektor Lainnya	6.737.541	-	208.800	6.467.781	-
CHT					
DBH	2.294.139.971		2.269.967.200	922.756.184	330.136.417
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 15%					
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Nonmigas	2.109.461.434	-	1.750.723.253	922.756.184	-
Landreform		-	-	-	
Kehutanan	2.109.461.434		1.750.723.253	922.756.184	
Panas Bumi					
Iuran Produksi	-		-		-
Iuran Tetap		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	
Kelautan dan	22.321.537		185.262.050		162.711.293
DR	-				
PDPH	-	-	-	-	-
PSDI	22.321.537	-	185.262.050	-	162.711.293
Perikanan	184.140.963		313.981.050		167.094.828
Pungut Lain	6.638.289.702		5.108.811.170	2.030.119.761	330.136.417

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Nduga

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS	KETA 2019	KETA 2015	Lebih TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Pengelompokan TA 2015 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa Lebih TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
Pajak			110.236.241	110.236.241	
PBB	-		110.236.241	110.236.241	
PBB Pasal 21	-	-	-	-	-
PBB Pasal 25/29	-	-	140.356.244	140.356.244	-
PPh	-	-	-	-	-
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Pajak Lain	-	-			
Bagian Daerah Pajak Dalam	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan			-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Kehutanan Tahun Lalu	-				
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Kehutanan	-				
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Minyak Bumi		-	-	-	-
DTP					
SDA	-	23.303.900	5.734.915.070	1.569.303.312	4.035.643.230
Migas	-	-			
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 3,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Minerba	-	-	5.624.546.575	1.569.303.312	4.055.643.263
Landrent		-	-	-	-
Royalti			5.624.546.575	1.569.303.312	4.055.643.263
Panas Bumi					
Iuran Produksi	-				
Iuran tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan		23.303.900			
IHH	-				
PSDH	-	-	-	-	-
DR		23.303.900	-	-	-
Perikanan			-	-	-
Cukai Tembakau		23.303.900	5.734.915.070	1.569.303.312	4.035.643.230

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Nduga

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesteran TA 2020 (PMK No. 57/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	5.68[illegible]97.605	-	[illegible].735.585.620	2.643.604.359	3.702.207
PPh	[illegible].537.424.573	-	69[illegible].554.320	700.870.173	-
PPh Pasal 21	[illegible].520.428.506	-	67[illegible].276.600	609[illegible].076	-
PPh Pasal 25/29	21.996.067	-	18.541.720	11.151.347	-
PBB	8.[illegible]9.772.502	-	11.[illegible].350	[illegible].[illegible].799	3.693.864
Pajak Rokok	1.94[illegible].969.599	-	256.634.750	1.726.270.358	-
Bagian Daerah Migas	[illegible].415.[illegible]50	-	35.[illegible].960	-	3.825.778
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasca Bauk	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.330.017	-	8.694.360	204.994.707	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible].[illegible].020	-	4.[illegible].[illegible]0	-	168.011
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan PBB Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	3.727.[illegible]81	-	259.[illegible]00	3.[illegible].781	-
PPh	-	-	-	-	-
SDA	2.291.149.971	-	2.283.867.[illegible]00	372.[illegible].[illegible]71	525.[illegible].[illegible]13
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Sebelum Pemekaran Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 6,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Sebelum Pemekaran Otsus	-	-	-	-	-
Panas Bumi	2.[illegible].[illegible].[illegible]49	-	1.[illegible].[illegible].[illegible]50	[illegible].[illegible].[illegible]99	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Pertambangan Umum	2.[illegible].[illegible].404	-	[illegible].[illegible].250	[illegible].[illegible].[illegible]54	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap Gas	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Sektor Lainnya Pertambangan	-	-	-	-	-
Kehutanan	[illegible].[illegible].597	-	[illegible].[illegible].960	-	162.741.363
DR	-	-	-	-	-
PSDH	[illegible].[illegible].597	-	[illegible].[illegible].[illegible]49	-	[illegible].[illegible].[illegible]50
Perikanan	159.[illegible].990	-	[illegible].[illegible].[illegible]09	-	[illegible].[illegible].[illegible]33
Grand Total	5.[illegible].[illegible].[illegible]96	-	[illegible].[illegible]–[illegible]2.800	[illegible].[illegible].[illegible]15	[illegible].[illegible].[illegible]77

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Boyolali (dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 81/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 317/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 317/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	497.124.961	497.124.961	-
PPh	-	-	535.716.949	535.716.949	-
PPh Pasal 21	-	-	213.698.129	213.698.129	
PPh Pasal 25/29	-	-	92.018.819	92.018.819	
PBB			192.097.819	192.097.819	-
Bea Baru			-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Non Migas	-	-	119.470.569	119.470.569	
Bagian Daerah Pasal 26					-
Bagian Daerah Perbendaharaan					-
Bagian Daerah Pajak Lainnya			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-		
Bagi Pemerintah Migas	-	-			
Bagi Pemerintah Non Migas			14.030.000	14.030.000	-
Bagi Pemerintah Pasal 21			-	-	-
Bagi Pemerintah Perbendaharaan	-	-	-		
Bagi Pemerintah Perbendaharaan					-
Bagi Pemerintah Pajak Lainnya			-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
PBH	-	28.502.902	5.416.576.09	709.035.743	4.707.541.218
Migas	-	-			
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 3,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-		-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	
Gas Bumi 6,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Non Migas		-	5.416.076.961	709.035.743	4.707.041.218
Landrent				-	-
Royalti			5.416.076.961	709.035.743	4.707.041.218
Iuran Tetap (Land Rent)	-	-	-	-	
Iuran Tetap		-	-	-	
Setoran Bagian Pemerintah					-
Kehutanan		28.502.902	-	-	-
DR	-	-	-	-	
PSDH	-	-			
PSDH		28.502.902			-
Perikanan				-	-
Grand Total	-	28.502.902	5.667.901.503	1.176.760.304	4.707.041.218

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Degiyai

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Tahun Ini Th. 2021	LB Tahun Ini Th. 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (PMK No. 57/PMK.07/2011)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(9)	(10)=(2)-(9)	(11)
Pajak	3.010.000.870	-	1.174.104.900	1.785.744.595	6.314.375
PBB	1.401.982.902		657.971.400	797.012.595	-
Pbb Pasal 21	437.594.709		617.410.800	185.114.000	-
Pbb Pasal 25/29	97.291.197		75.077.600	21.697.697	-
BPHTB	3.460.572.961	-	405.219.600	1.968.729.780	6.314.375
Pajak Rokok	1.091.959.909	-	265.669.700	1.125.270.295	
Pajak Daerah Migas	120.669.700	-	171.777.720	-	6.536.241
Pajak Daerah Non Migas				-	-
Pajak Daerah Pemda Lain	-				
Pajak Daerah Perusahaan	-	-			
Pajak Daerah Perseorangan		-	-	-	-
Pajak Daerah Sektor Lainnya	215.599.701		2.607.300	708.992.777	-
Cukai Pertembakauan Migas	5.586.965		5.810.000		236.371
Cukai Pertembakauan Non Migas	-	-			
Pajak Penerangan Jalan Daerah		-	-	-	-
Pajak Pertambangan Perseorangan				-	-
Cukai Pertembakauan Perseorangan	-				
Pajak Pertambangan Sektor Lainnya	6.737.581	-	206.810	6.708.791	
CHT		-	-	-	-
SDA	2.010.742.527		2.287.907.200	80.715.740	370.435.413
Migas	-			-	-
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%		-	-		
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Lainnya		-	-	-	-
Gas Bumi 15%		-		-	-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Kehutanan	2.378.428.040		1.790.723.300	391.210.740	
Pertambangan	969.052.356	-	-	266.902.000	
Perikanan	2.100.791.434	-	1.796.729.252	302.796.184	
Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Produksi	-			-	-
Jaminan Reklamasi	-				
Pemulihan Lingkungan Pertambangan	-	-			
Perkebunan	22.121.057	-	15.262.650	-	82.741.190
PDR			-	-	-
BLUD	-				-
PNBP	27.521.137	-	186.262.950		102.771.303
Perikanan	139.151.992	-	3.468.100.000		157.694.329
Grand Total	6.115.595.297		3.179.072.150	8.326.457.022	815.749.736

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Puncak

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 65/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KEP-5/KT.5/2021)	Sisa KB s.d. TA 2019 (KEP-5/KT.5/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
PxCak		-	648.657.108	207.257.584	441.479.524
PPh			257.257.584	207.257.584	-
PPh Pasal 21	-		65.502.974	65.502.974	
PPh Pasal 25/29	-		111.617.607	111.617.607	
PBB	-	-	441.479.524		441.479.524
Pajak Rokok		-	-	-	-
Bagian Daerah Migas				-	-
Bagian Daerah Non Migas	-		428.101.568		428.101.568
Bagian Daerah Pasca Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-		
Bagian Daerah Kehutanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan					-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagi Hasil Migas	-				
Bagi Hasil Non Migas	-	-	10.377.980	-	10.377.980
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-
Bagi Hasil Pertambangan					-
Bagi Hasil Kehutanan	-				
Bagi Hasil Pertambangan Sektor Lainnya	-	-	-	-	
DTF		-	-	-	-
SDA		23.501.023	5.019.342.070	986.139.254	4.031.903.816
Migas	-				
Minyak Bumi (PPh)	-	-			
Minyak Bumi (Bagi Hasil)	-	-	-	-	
Minyak Bumi (Bagian Pemerintah Untuk Daerah Penghasil)		-	-	-	-
Gas Bumi (PPh)			-	-	-
Gas Bumi (Bagi Hasil)					-
Gas Bumi (Bagian Pemerintah Untuk Daerah Penghasil)	-				
Kehutanan	-	-	5.019.342.070	986.139.254	4.031.903.816
Pertambangan	-	-	-	-	
Perikanan		-	5.019.342.070	986.139.254	4.031.903.816
Pertambangan Panas Bumi			-	-	-
Iuran Eksplorasi					-
Iuran Eksploitasi	-				
Pertambangan Sektor Lainnya	-	-	-		
Kehutanan		23.501.023	-	-	-
PSDH				-	-
DR	-				
Perikanan		23.501.023	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau		-	-	-	-
Grand Total		23.501.023	5.667.999.178	1.193.396.838	4.474.602.340

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Puncak

(dalam rupiah)

Jenis DBH	LB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB TA SH Semester I TA 2021 (PMK No. 17/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(10=2-4)	(11)
Pajak	2.361.216.750	-	1.310.935.602	2.65-.02 .836	5.730.686
PPh	1.706.050.830	-	630.811.200	7 5.194.030	
PPh Pasal 21	1.082.064.830		680.211.600	702.0-3.030	
PPh Pasal 22 / 23	23.021.770		20.017.703	12.314.010	-
PBG	1.-00.2.6.120		520.1-5.205	1.529.770.736	4.705.656
Pajak Rokok	1.361.960.953	-	365.689.702	736.270.036	-
Bagian Daerah Migas	253.603.250	-	258. 66.702		1.777.250
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pesisir Utara					-
Bagian Daerah Perbatasan				-	-
Bagian Daerah Tertentu Lainnya	-	-	-	-	
Bagian Daerah Bekas Kilang	215.300.707	-	8.607.520	200.697.787	
Bonus Penanganan Migas	1.2.6...7		7.7.1.520		105.705
Bonus Penanganan Non Migas			-	-	-
Bonus Penanganan Panas Bumi	-	-	-	-	
Bonus Penanganan Pertambangan	-	-			
Bonus Penanganan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil					-
Bonus Penanganan Sektor Lainnya	6.137.281		200.000	6.456.781	-
CHT	-	-	-	-	
PBH	2.297.789.751	844.830.400	2.535 -87.001	329.738.141	721.877.013
Migas					
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 15%	-	-	-		
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Nonmigas	2.109.791.135	317.803.730	1.633.290.000	321 758.164	59...37.200
Pertambangan		317.803.400	48.07..600	-	59 .57.200
Panas Bumi	1.109.461.494	-	1.785 773.450	321 758.164	-
Pertambangan Umum	-	-	-		
Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-		
Pertambangan Gas Bumi					-
Kehutanan				-	-
Kehutanan	27.521.567	-	182.262.950	-	162.7 .395
PSDH	-	-	-		
DR					-
PSDH	23.021.567		182.262.950	-	162.741.338
DR	5.500.000	-	216.631.000	-	137.69 .020
Grand Total	4. 5.406.731	344.830.400	8.5-6.484.602	2.077.050.328	716.308.290

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Intan Jaya

(dalam rupiah)

Jenis DBH	APBN TA 2018	SiKPA TA 2019	DBH s.d TA 2019 (PMK No. 209/PMK.07/2021)	Penyaluran DBH s.d TA 2019 (KMK No. 374/KM.7/2021)	Sisa DBH s.d TA 2019 (KMK No. 374/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	3.301.620.254	2.305.668.350	1.545.35 .91
PPh	-	-	464.25 .380	658 .31.794	1.205.7 3.13
PPh Pasal 21	-	-	731.605.380	638.151.738	1.073.943.654
PPh Pasal 25/29			137.580.470		131.149.772
PBB			1.998.360.394	1.077.776.294	312.619.909
Bea Ba k					-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	317.646.877	1.79 .216.777	359.430.100
Bagian Daerah Pajak Lain					
Bagian Daerah Perhutanan					
Bagian Daerah Pertambangan				-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-	-	-
Bunga Penerimaan Migas			-		
Bunga Penerimaan Non Migas			70.919.317	68.020.217	22.368.100
Bunga Penerimaan Pensiun Lainnya				-	-
Bunga Penerimaan Pertambangan	-	-	-	-	-
Bunga Penerimaan Perkebunan					
Bunga Penerimaan Sektor Lainnya					
CHT	-		-	-	-
SDA	-	33.503.649	3.831.407.513	-	3.831.407.513
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi (Sebelum Pengaruh Otsus)					-
Gas Bumi (Sebelum Pengaruh Otsus)	-		-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Kehutanan			3.831.407.513		3.831.407.513
Landreform					
Pajak			3.831.407.513		3.831.407.513
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Iuran tetap		-			
Setoran Bagian Pemerintah					
Perikanan		33.503.649		-	-
DR	-	-	-	-	-
LOA		-			
PSDH		33.503.649			
Pungutan					
Grand Total	-	33.503.649	7.666.207.767	7.305.668.350	5.360.353.497

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Urusan Daya

(rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2021 TA 2022	LB Definitif TA 2020	Realisasi APBD 2021 Penerimaan TA 2022 (SAKA No. 37/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang telah dialokasikan	LB TA 2021 yang telah dialokasikan
[1]	[6]	[8]	[9]	[10] [7] [8]	[11]
Jumlah	2.252.910.350	30.210.420	1.020.182.000	2.057.126.225	53.211.643
PDE	345.292.410		327.771.000	1.769.442	-
PPh Pasal 2	520.936.506	-	317.536.000	104.350.026	-
PPh Pasal 25/29	2.767.707	-	9.335.400	1.442.367	
PBB	3.407.502.143	32.240.420	418.787.000	1.020.735.786	98.231.643
Bea Acte	1.901.976.902		263.680.700	1.726.210.205	
Bagian Daerah Migas	167.401.450		152.014.700		1.062.895
Bagian Daerah Non Migas	-	29.747.850	41.954.000	-	51.374.050
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Kehutanan	316.596.201		4.654.320	209.954.727	-
Biaya Pemungutan Migas	5.795.520	-	5.073.820	-	299.250
Biaya Pemungutan Non Migas		917.000	682.250		1.005.850
Biaya Pemungutan Panas Bumi					-
Biaya Pemungutan Pertambangan			-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Kehutanan	6.727.592	-	209.850	6.102.781	
DBH					-
SDA	2.251.109.941		2.295.591.200	925.758.164	330.435.413
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%		-			
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 3,5%	-		-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	2.109.281.184	-	1.784.723.170	379.736.184	
Royalti					
Royalti	2.109.281.184		1.784.723.170	379.736.184	
Pajak Dalam					-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	
Kehutanan					
Kehutanan	32.521.537		145.202.050		218.711.093
IR			-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DBHH	29.521.537		145.202.050		166.771.093
Pertambangan	109.186.980		310.851.030		157.664.320
Grand Total	3.614.777.037	30.210.420	3.612.744.850	2.980.884.389	383.647.056

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Deiyai

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB s.d. TA 2019	LB s.d. TA 2019	TB s.d. TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(5)
Pajak	-	-	102.544.323	102.544.323	-
PBB		-	102.544.323	102.544.323	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			102.544.323	102.544.323	
PDB					-
Bagi Hasil	-			-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			-		
Bagian Daerah Pasal 21					
Bagian Daerah PPh Pasal 25/29					
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan		-	-	-	
Dana Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Bea Masuk	-				-
Biaya Pemungutan Pasal 22 Impor	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perikanan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	13.302.000	5.664.646.203	468.116.541	5.196.946.862
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	
Gas Bumi dalam rangka Otsus					
Minerba			5.196.946.862	196.116.541	5.196.946.862
Landrent	-				
Royalti	-		5.664.063.405	468.116.541	5.196.946.862
Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Iuran Eksplorasi					
Setoran Sisa Lebih Penggunaan					
Kehutanan	-	23.502.600	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IHPH					
PSDH		23.502.600			
Perikanan	-				-
Grand Total	-	23.502.600	5.767.190.526	570.660.864	5.196.946.862

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Deiyai

(dalam rupiah)

JENIS DBH	(1) PB Definitif TA 2020	(2) Deficit TA 2020	(3) Penyaluran PB DBH Semester I TA 2020 (KMK No. ...)	(4) PB TA 2020 yang Dihitung Kembali	(5) TA 2021 yang akan disalurkan
(1)	(2)	(3)	(5)	(10=2-3-5)	(11)
Pajak	5.005.623.110	-	1.035.706.701	3.871.924.414	-
PPh	1.219.658.623	-	616.616.300	795.393.803	-
PPh Pasal 21	1.203.658.623		607.511.703	783.089.803	
PPh Pasal 25/29	23.004.910		10.101.598	12.303.312	
PPN	3.647.014.015		617.092.701	3.029.922.116	-
Pbb Rinci	301.950.913	-	250.636.401	1.736.270.396	-
Bagian Daerah Migas	1.287.4 5.330	-	833.718.801	1.356.436.593	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal Dana					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.305.007	-	8.034.302	206.994.737	
Bagian Pemerintah Migas	72.311.781		10.410.300	32.901.731	
Bagian Pemerintah Non Migas	-				-
Bagian Pemerintah Pasal Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perkebunan		-	-	-	
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	6.737.181		268.900	6.102.791	-
CHT	-	-		-	-
BHA	2.077.785.171	-	1.288.867.030	820.735.184	320.435.412
Bagian					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%	-				-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Kliperbo	3.109.181.101		1.780.721.260	322.756.181	
Perikanan	-				-
Royalti	3.109.461.404	-	1.796.729.360	312.758 84	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Jamsa Produksi		-	-	-	-
Jamsa tetap					
Sumber Daya Alam Lainnya					
Kehutanan	23.531.357	-	166.383.530	-	63.741.391
DR	-	-	-	-	-
LOFL					
PSDH	23.521.357	-	193.282.950		126.741.792
Perikanan	50.185.981	-	1.5 .361.020	-	157.894.720
Grand Total	7.581.533.202	-	5.83- 373.020	4. -7.687.603	320.435.415

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Maluku Utara

(Dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	Alokasi TA 2019 (PMK No. 65/PMK.07/2021)	Realisasi TA 2019 (KMK No. 2/KM.7/2021)	Sisa LB TA 2019 (KMK No. 2/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] [3]-[5]
Pajak			15.171.151.473	2.771.291.300	12.399.860.173
PPh			9.519.361.173		9.519.361.173
PPh Pasal 21	-	-	6.620.663.417	-	6.620.663.417
PPh Pasal 25/29	-	-	2.897.697.756	-	2.897.697.756
PBB			5.651.790.300	2.771.291.300	2.880.499.000
Bea Jabatan					
Pungutan Sektor Migas					
Pungutan Sektor Non Migas	-	-	3.401.595.464	2.771.291.300	630.304.164
Pungutan Sektor Panas Bumi	-	-	7.393.300	-	7.393.300
Jasatirta Daerah Pertambangan			23.075.000		23.075.000
Pungutan Daerah Perkebunan					
Pungutan Daerah Sektor Perairan	-			-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			119.732.133		119.732.133
Biaya Pemungutan Panas Bumi			126.100		126.100
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	2.402.100		2.402.100
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Perairan		-	-	-	
PBB					
SDA		670.877.719	11.206.039.076		11.206.039.076
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 6,5%	-			-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	3.054.736.831	-	3.054.736.831
Landrent		-	1.517.908.848	-	1.517.908.848
Royalti			1.536.827.983		1.536.827.983
Panas Bumi			25.131.998		25.131.998
Dana Reklamasi	-	-	-	-	-
Dana Hasil	-	-	25.131.998	-	25.131.998
Setoran Sisa/Kurang Penyaluran		-	-	-	-
Kehutanan		670.877.719	8.125.170.279		8.125.170.279
PHT	-	611.150.541	4.589.070.181		4.589.070.181
IIUPH	-	59.726.178	-	-	-
PSDH			788.868.478	-	788.868.478
Perikanan					
Jumlah Total		670.877.719	26.377.190.549	2.771.291.300	23.605.899.249

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Maluku Utara

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Sebelum TA 2020	LB Sebelum TA 2020	Penyaluran KB TA 2021 Berdasarkan TA 2020 (UU No. 27/HKPD/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2] - [4]	[6]
Pajak	38.173.861.429		4.784.510.000	28.462.670.194	1.826.681.152
PPh	23.324.992.135	-	5.650.065.300	17.674.926.835	-
PPh Pasal 21	21.760.741.650	-	3.866.515.000	16.054.027.650	-
PPh Pasal 25/29	1.564.250.485	-	784.550.300	1.779.700.185	-
PBB	13.848.869.294		2.091.493.000	10.830.451.230	1.826.681.152
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas	195.866.065	-	312.096.000		116.230.435
Bagian Daerah Non Migas	9.903.379.464	-	1.672.096.400	8.371.46 .064	-
Bagian Daerah Pasca Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	1.528.912.382		64.836.100	1.463.976.082	
Bagian Daerah Perikanan	237.055.061		37.412.000	199.642.961	
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	587.162.138	-	92.868.800	5 4 271.3 8	-
Dana Reboisasi	3.207.633	-	5.210.530	-	2.002.897
Dana Penerimaan Non Migas	166.211.777		27.000.000	139.2 12.177	
Bana Penerimaan Pasca Bumi					
Bana Penerimaan Pertambangan	37.673.566	-	1.271 .30	36 402.566	-
Dana Penerimaan Perikanan	5.176.319	-	964.520	4 1 3	
Dana Penerimaan Kehutanan Lainnya	9.302.209		381.600	8.373.009	
DFT	-				
DBHCHT	24.616.465.434	211.884.000	5.016.770.415	30.128.543.004	709.85.535
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-				-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-		-	-	-
Minerba	92.401.281.713	-	9.427.740.875	05.000.06 .838	-
Panas Bumi	2.017.191.242		180.731.900	1.4 3.412.122	
Pajak	90.112.089.441		1.95 .118.975	88.1 2.019.110	
Pajak Bumi	66.551.613	-	10.062.525	53.489.288	-
Bea Perolehan	-	-	-	-	-
Pajak lainnya	66.351.613	-	13.022.525	53.489.288	-
Retribusi Pengelolaan Pertambangan					
Kehutanan	2.063.861.973	211.884.000	2.091.470.040	3 2 16.0 3	709.181.960
PSDH	2.063.861.073	-	2.05 .243.850	3 1 .3.0 3	-
DR Rel		-	-	-	-
PSDHT		211.884.000	42.201.225		709.145.225
Perikanan					
Pajak Lainnya	183.745.379.863	21.884.000	17.301.363.815	218.336.102.362	867.610.687

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Halmahera Tengah

(dalam rupiah)

Jenis Dbh	Sisa s.d TA 2018	TA 2019	s.d TA 2019 (PMK No. 37/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KEP No. 3/PM.07/2021)	Sisa s.d TA 2019 (PMK No. 3/PM.07/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [2]-[5]
Pajak			1.247.207.271	1.168.321.001	78.916.270
PPh	-	-	1.168.321.001	1.168.321.001	-
PPh Pasal 21	-	-	879.758.777	879.758.777	-
PPh Pasal 26/26	-	-	188.562.367	188.562.367	-
PBB		-	88.916.270	-	88.916.270
Bea Jabatan					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasca Bea	-		-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan			82.343.600	-	82.343.600
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-				-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Dalam Daerah					
Biaya Pemungutan Pusat	-		3.603.600		3.603.600
Biaya Pemungutan Pusat	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-	-	
Cukai					
SDA		21.360.350	9.051.960.774	2.011.117.310	1.343.443.371
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-				-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Migas	-	-	5.8[illegible].474.774	2.0[illegible].474.845	6.904.27[illegible].05
Lebih/rent			2.814.074.537	2.011.417.845	1.200.857.028
Bagi-2			5.207.213.023		5.207.213.023
Panas Bumi					
Dana Bagi-2	-	-	-	-	-
Dana Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Laba/Lain Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan		21.360.350	706.023.710		706.023.710
PSDH					
DBHPS	-	-	395.520.000	-	395.520.000
PSDH		21.360.350	310.503.710	-	310.503.710
Perikanan			79.218.700		79.218.700
Grand Total		21.360.350	10.629.127.968	3.182.738.354	7.725.389.621

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bulungan Tengah

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2021	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 5/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[7]	[8]	[9]	[10]=[7]-[9]	[11]
Pajak	19.102.997.291	-	1.047.074.605	3.861.814.576	6.175.087
PPh	3.915.026.922	-	709.073.500	3.783.163.722	-
PPh Pasal 21	3.457.439.219	-	309.222.200	3.376.217.019	-
PPh Pasal 25/29	94.587.073	-	19.771.600	78.850.173	-
PPN	6.227.367.163	-	557.351.400	6.129.791.800	9.176.687
Bea Meterai	1.991.334.992	-	265.699.700	726.270.996	-
Bagian Daerah Migas	182.000.000	-	182.467.000	-	8.273.031
Bagian Daerah: Non Migas	1.198.328.031	-	101.139.000	1.014.759.431	-
Bagian Daerah: Panas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah: Perhutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah: Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah: Sektor Lainnya	215.309.307	-	8.102.930	206.397.307	-
Biaya Pemungutan Migas	6.774.644	-	1.276.000	-	201.703
Biaya Pemungutan Non Migas	57.335.442	-	6.060.700	51.274.742	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Terkonsolidasi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.053.776	-	747.500	5.161.576	-
Cukai	-	-	-	-	-
SDA	60.822.185.971	20.104.776	7.256.007.071	53.730.347.686	324.434.390
Migas					
Migas: Bagian 15%	-				
Migas: Bagian 0,5%	-	-	-	-	-
Migas: Dana Abadi Daerah Tertentu Aceh	-	-	-	-	-
Gas Bumi 69%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Dana Abadi Daerah Aceh					
Minerba	60.141.870.751		1.730.260.325	57.021.014.136	
Iuran Tetap	556.177.063	-	216.678.425	339.456.476	-
Royalti	59.585.693.688	-	1.203.527.900	57.402.177.038	-
Panas Bumi	21.177.270	-	2.915.000	18.262.020	-
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	21.177.270		2.915.000	18.262.020	
Bonus Bagian Negara Baru	-	-	-		
Kehutanan		20.104.776	226.675.650	-	346.780.776
DR			-	-	-
PHTF					
Reboisasi	-	20.104.776	226.550.650	-	346.780.776
Provisi	130.780.382	-	216.881.020	-	157.634.020
Grand Total	79.025.179.112	20.104.776	8.513.342.775	77.367.794.262	470.610.085

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Tarakan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KRITA 2019	KRITA 2019	TD x d TA 2019 (PMK No. 05/PMK.07/2021)	Penyesuaian TD x d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa TD x d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak			1.760.337.810	370.963.690	1.389.364.117
PPh	-		1.760.337.810	370.963.690	1.389.364.117
PPh Pasal 21	-	-	101.431.993	101.431.993	-
PPh Pasal 22/23	-	-	634.905.872	265.051.455	1.389.364.417
PPN		-	-	-	-
Dapi Bata					
Bagian Terbagi Migas	-				
Bagian Daerah Hasil Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal Dalam	-	-	-	-	-
Bagian Terbagi Pertambangan			-	-	
Bagian Terbagi Perkebunan					
Bagian Terbagi Kehutanan	-	-			-
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas			-	-	
Bagian Pemerintah Pasal Dalam					
Bagian Pemerintah Pertambangan	-				-
Bagian Pemerintah Perkebunan		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Kehutanan		-	-	-	-
PBB					
BPHTB	-	13.701.113	118.579.153		118.579.153
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-			-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Panas Bumi		-	-	-	-
Landrent		-	-	-	-
Geothermal					
Pertambangan Umum	-				
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti		-	-	-	-
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		13.701.113	118.579.153		118.579.153
PPh	-				
PDPH	-	-	-	-	-
PBUH		13.701.113	118.579.153		118.579.153
Perikanan					
Cukai Hasil Tembakau		13.701.113	1.884.916.963	370.963.690	1.507.953.273

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Ternate

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran DBH Desember TA 2020 (KMK No. 393/KM.7/2020)	DBH TA 2021 yang telah disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(7)-(6)	(6)
Pajak	14.206.209.292	-	2.476.267.700	1.736.446.773	3.582.593
PPh	11.855.039.590		2.037.800.000	9.717.185.099	-
PPh Pasal 21	10.193.484.173		1.956.797.000	8.380.142.173	
PPh Pasal 25/29	1.661.555.417	-	79.003.000	1.112.200.917	
PPN	2.350.969.290	-	416.467.300	1.997.827.863	5.582.593
Sewa Rata	1.991.906.908	-	355.685.700	1.736.370.398	-
Bagian Daerah Migas	132.972.469		28.644.700	-	5.075.481
Bagian Daerah Non Migas	-				
Bagian Daerah Pajak Dalam	-	-			
Bagian Daerah Perhutanan		-			
Bagian Daerah Pertambangan			-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.599.501		8.001.300	205.014.707	-
Biaya Pemungutan Migas	4.947.787		3.200.900		204.112
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-		-
Biaya Pemungutan Pajak Dalam		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-			-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	5.080.178	-	1.302.940	7.768.679	
OPT		-	-	-	-
SDA	20.134.394.746	110.015.067	874.028.075	19.334.878.16	424.213.072
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	
Minyak Bumi Hasil Kerja Sama Khusus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-				-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	19.934.050.458	-	457.959.500	19.516.090.958	
Panas Bumi	-	-		-	
Royalti	19.934.050.458	-	457.309.500	19.516.090.958	-
Pajak Sarang	21.177.270		2.945.050	18.232.220	-
Iuran Produksi	-			-	-
Iuran Tetap	21.177.270		2.945.050	18.232.220	
Setoran Sisa Lebih Pemerintah		-			
Perikanan		110.015.067	17.203.625	-	367.113.932
DR			-	-	-
DSDL	-				
DBHP	-	110.015.067	17.203.625		367.113.932
Pariwisata	199.185.362	-	816.68 .502	-	57.099.020
Grand Total	34.340.602.429	110.015.067	3.367.506.575	21.279.789.69	482.343.605

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Halmahera Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 65/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	777.012.699	384.607.875	592.304.824
PPh			307.251.277	81.256.653	170.024.624
PPh Pasal 21	-	-	205.421.221	81.256.653	369.187.035
PPh Pasal 25/29	-	-	101.830.080	-	101.830.080
PPN	-	-	283.831.132	203.351.222	119.289.230
Pbb Desa	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas			-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			277.276.472	176.748.472	94.279.050
Bagian Daerah Pasal 4(2)	-		29.273.570	9.819.550	19.454.750
Bagian Daerah Perkebunan	-	-			-
Bagian Daerah Perkehutanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bunga Pemungutan Migas	-				
Bunga Pemungutan Non Migas	-	-	23.129.950	18.691.909	3.535.903
Bunga Pemungutan Pasal 4(2)		-	109.170	563.900	736.905
Bunga Pemungutan Perkebunan			-	-	
Bunga Pemungutan Sektor Lainnya	-				
Denda Pemungutan Sektor Lainnya	-	-			
PPh		-	-	-	-
PBHTB		12.934.796	2.018.166.052	-	2.018.166.052
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-		-	-
Minyak Bumi dikurangi Jangka Waktu		-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dikurangi Jangka Waktu	-				
Mineral	-		1.814.133.027		1.511.761.057
Landrent	-	-	554.156.100	-	691.308.450
Royalti		-	1.159.954.643	-	1.159.564.549
Panas Bumi			60.472.535	-	60.452.950
Iuran Tetap (Landrent)			-		-
Iuran Tetap	-		60.452.949		60.452.950
Setoran Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan		12.934.796	134.380.636	-	134.380.636
PSDH			-	-	-
DR	-				
PSDH	-	12.934.796	134.380.636	-	134.380.636
Perikanan		-	-	-	-
Cukai Tembakau		12.934.796	2.706.078.778	389.607.775	2.505.470.826

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Halmahera Barat (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DB DBH Sebelumnya TA 2020 (PMK No. 33/PMK.07/2020)	KB TA 2020 yang belum tersalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	4,977,708,242	-	889,[illegible],750	2,088,517,863	5,530,277
PPh	1,167,661,312	-	443,770,820	1,017,205,212	
PPh Pasal 21	1,137,702,242		132,251,220	925,071,111	
PPh Pasal 25/29	29,[illegible],560		11,[illegible],600	91,[illegible],900	-
PBB	3,874,[illegible],235		109,[illegible],800	1,[illegible],[illegible],963	5,530,277
Bea. Rpts	29,[illegible],397	-	355,[illegible],760	1,[illegible],[illegible],203	-
Bagian Daerah Migas	13,[illegible],169	-	37,[illegible],600	-	3,[illegible],43[illegible]
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal Bunga					-
Bagian Daerah Kehutanan	-				-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	21,[illegible],307		8,[illegible],302	204,[illegible],707	
Bagian Pemerintah Migas	3,[illegible],671		[illegible],[illegible],800		208,920
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-		-	-
Bagian Pemerintah Pasal Bunga	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perkebunan			-		
Bagian Pemerintah Kehutanan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	3,[illegible],[illegible]78		1,[illegible],[illegible]00	[illegible],[illegible],[illegible]76	-
DAK	-	-	-	-	-
DAU	20,[illegible],193,397	48,644,267	[illegible],[illegible],[illegible],[illegible]40	20,[illegible],[illegible],[illegible],[illegible]16	370,[illegible],[illegible]02
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 85%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dari Jenis Tertentu yang Diterima	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	2[illegible],[illegible],[illegible],291		[illegible],[illegible],[illegible],[illegible]73	22,[illegible],[illegible],[illegible],[illegible]13	-
Tambahan	[illegible],[illegible],[illegible],[illegible]37	-	2[illegible],[illegible],[illegible]65	[illegible],[illegible],[illegible],102	-
Reguler	20,[illegible],[illegible],[illegible]86	-	4[illegible],[illegible],[illegible]61	[illegible],[illegible],[illegible],[illegible]14	-
Pajak Bumi	[illegible],[illegible]1[illegible]	-	5,[illegible],[illegible]71	-	5,[illegible],[illegible]53
Bunga Penalti		-			
Tunjangan Profesi	725,[illegible]87		[illegible],[illegible],[illegible]75		[illegible],[illegible]52
Kelebihan Bayar Pemerintah	-				-
Perhutanan	-	48,644,267	17,[illegible],[illegible]52	-	86,[illegible],[illegible]17
DAK		-	-	-	
DBHCHT					
PNBP	-	48,644,267	17,[illegible],[illegible]52	-	166,319,317
Perikanan	59,[illegible],680	-	3,[illegible],[illegible],[illegible]20	-	157,[illegible],[illegible]20
Grand Total	22,[illegible],[illegible],[illegible],[illegible]09	47,[illegible],[illegible]62	[illegible],[illegible],[illegible],500	20,[illegible],[illegible],[illegible],[illegible]11	3[illegible],[illegible],[illegible],[illegible]19

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Halmahera Timur (dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2019	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyesuaian LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	TOTAL LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	27.082.605.635	(509.505.594)	26.573.100.041
PBB		-	435.535.230	-	435.535.230
10% Pasal 21			237.708.503	-	237.708.503
50% Pasal 25/29			136.034.239		136.034.239
PPN	-		22.857.273.701	(1.091.039.691)	21.766.234.010
Hasil Kayu	-		95.259.791	95.259.791	-
Dalam Daerah Kaltim	-	-	256.96[illegible]586	256.96[illegible]586	-
Dalam Daerah Non Migas		-	2[illegible]953.884.534	41[illegible]9.034.514	20.53[illegible]700.020
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-		236.220.340		236.220.340
Bagian Daerah Perbatasan	-	-	113.010.879		113.010.879
Dalam Daerah Dalam Cekungan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas			11.083.539		11.083.539
Biaya Pemungutan Non Migas	-		953.704.295		953.704.295
Biaya Pengembangan Panas Bumi	-	-			-
Biaya Pengembangan Perbatasan		-	10.334.500	-	10.334.500
Biaya Pemungutan Pajak Daerah			5.675.884		5.675.884
Biaya Pemungutan Sektor Tambang	-				
CHT	-	-	-	-	-
DBH		30.407.[illegible]68	37.[illegible]50.941.053	-	37.[illegible]70.[illegible]33
Migas			-	-	
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%	-				
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-		-	-
Minerba			3.[illegible]03.132.[illegible]07		3.[illegible]03.[illegible]32.097
Dana Bagi	-		9.[illegible]60.[illegible]92.301		9.[illegible]60.[illegible]92.301
Reboisasi	-		27.[illegible]56.[illegible]90.[illegible]96		27.[illegible]56.[illegible]90.[illegible]96
Panas Bumi		-	5.584.753	-	5.584.753
Dana Produksi		-	-	-	-
Dana Bagi			5.581.732		5.581.732
Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	3[illegible]07.196	3.210.112.[illegible]25		3.210.112.[illegible]59
DR		-	-	-	-
PSDH			1.[illegible]61.266.[illegible]37	-	1.[illegible]61.266.[illegible]37
DBHP	-	3[illegible]07.490	1.[illegible]70.[illegible]61.[illegible]72		1.[illegible]70.[illegible]61.[illegible]72
Perikanan	-		251.[illegible]31.[illegible]94		251.[illegible]31.[illegible]96
Grand Total		3[illegible]97.[illegible]35	64.163.[illegible]48.[illegible]36	4.[illegible]05.[illegible]09.[illegible]34	68.[illegible]63.[illegible]36.[illegible]34

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Halmahera Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesters TA 2020 (PMK No. 3/PMK.7/2020)	KB TA 2020 yang Lebih Disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	12.109.655.801	-	9.498.901.500	0 - 20.596.065	53.555.67-
PPh	1.990.652.967		510.205.360	1.474.735.607	
PPh Pasal 21	1.880.(--4.018		482.(4(..(0	1.397.6(3.118	
PPh Pasal 25/29	85.018.5-9		19.229.790	97.890.249	
PBB	10.714.707.934	-	1.918.593.200	8.054.5(.1.294	53.(13.67?
Pajak Tertu	1.991.939.296	-	355.685.700	1.736.270.296	-
Bagian Daerah Migas	89.125.331		20.487.600	-	51.857.775
Bagian Daerah Non Migas	4.384.84..010		1.4(5.579.700	2.912.(6(.310	
Bagian Daerah Panas Bumi	-				
Bagian Daerah Pertambangan	3.424.2(0.775	-		3.42(.289.(75	
Bagian Daerah Perikanan	82.860.276	-	-	82.860.276	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.089.027		8.(34.200	206.(54.727	-
Biaya Pemungutan Migas	3 - 39.535		5.(39.(00		1.(93.(39
Biaya Pemungutan Non Migas	74.320.028	-	54.(57.(00	19(.169.225	-
Biaya Pemungutan Pajak Panas Bumi		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	149.(10.(15		-	149.8(3.(15	-
Biaya Pemungutan Perikanan	- 148.(14			1.(13.(11	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.053.(78	-	332.500	7(2.6(5	
PPh		-	-	-	-
SDA	51.(12.(63.(00	(08.(5(.7(7	1.870.(60.200	29.55(.(06.(56	404.457.(56
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-			
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 15%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	38.(62.-99.(.1		1.(21.(0(.6(3	10.(4(.(11.(38	
Landrent	1.(72.(52.(41	-	22(.(6(.6(3	3.(47.(7(.(6(	
Royalti	47.(89.(6(.(7(	-	(96.544.100	45.(93.((5.(72	-
Panas Bumi	21.(17.(.(7(		1.545.(50	18.(33.(72	-
Iuran Produksi			-	-	-
Iuran Tetap	2.(77.(7(		2.945.(50	14.(72.(22	
Sektor Lainnya Pemerintah	-	-			
Perikanan		(28.554.5(1	328.495.975	-	(36.(8(.5(6
PDP			-	-	-
BLUPH					
PSDH	-	(08.(54.5(1	228.(29.(75		3(0.(81.238
Perikanan	130.(80.(80	-	3.(6(.(00		(7.(49.(72
Grand Total	13.(2.(29.(32	(08.(54.5(1	4.(58.(83.(00	50.(86.33-.(9(	5-7.(31.(30

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Halmahera Selatan

(dalam rupiah)

URAIAN	KPDP TA 2018	KLU TA 2020	DB sd TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyesuaian DB s.d. TA 2019 (KEP-3/AK.7/2021)	Sisa DB sd TA 2019 (KEP-3/AK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	1.977.150.660	-1.054.243.052	922.943.936
PPh	-	-	-46.373.636	-	-46.373.636
PPh Pasal 21			369.038.778	-	369.038.778
PPh Pasal 25/29			97.627.038	-	97.627.038
PBH	-		1.601.618.611	-1.054.243.052	547.375.559
Bagi Hasil	-				
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas		-	331.379.615	-331.246.453	133.162
Bagian Daerah Tanah Air			-	-	
Bagian Daerah Perkebunan	-				
Bagian Daerah Perkebunan	-	-		-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-	-	-
Bagi Pertambangan Migas			-	-	
Bagi Pertambangan Non Migas	-		75.810.295		75.810.295
Bagi Pengusahaan Panas Bumi	-	-			-
Bagi Pengusahaan Perikanan		-	61.172.806	-	61.172.806
Bagi Pertambangan Perkebunan			1.161.150		1.161.150
Bagi Pertambangan Sektor Lainnya	-				
DBH	-	-		-	-
DAU		81.067.247	1.631.464.856	-	1.631.464.856
Migas				-	
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 3,5%	-				
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 6,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	
Minerba			907.190.023		907.190.023
Panas Bumi			907.190.023		907.190.023
Kehutanan	-				
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan Umum		-	-	-	-
Dana Reboisasi					
Kehutanan		8.361.747	164.778.833	-	164.778.833
SDA		-	-	-	-
Iuran Tetap		1.170.351			
Royalti		40.520.896	131.178.833		164.778.833
Kelautan	-	-			
Grand Total	-	8.647.247	3.504.165.865	-1.054.243.052	2.452.908.854

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Halmahera Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Alokasi KB DBH Setelah TA 2020 (KMK No.3/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	70.975.815.467	-	5.161.389.360	65.875.741.090	92.050.813
PDB	1.995.010.902		593.601.790	1.401.317.282	
PPh Pasal 21	1.720.603.148		171.755.100	1.548.967.923	-
PPh Pasal 25/29	74.407.177	-	19.451.305	154.955.572	-
PBB	30.0-0.604.737	-	1.566.536.360	27.574.427.737	92.05 5.3
Beg. Rata	1.997.020.102	-	765.683.760	1.526.170.298	
Bagian Daerah Migas	140.9.6.412		238.572.760		82.01.648
Bagian Daerah Non Migas	33.911.115.672		501.911.130	33.109.231.572	
Bagian Daerah Bumi Bumi	-	-		-	-
Bagian Daerah Perhutanan	675.566.646	-	38.435.300	541.936.742	-
Bagian Daerah Perbendaharaan	675.830.009	-	30.205.802	676.557.107	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	253.251.107		14.115.000	109.136.107	
Biaya Pemungutan Migas	5.03..203		5.977.100		3.445.897
Biaya Pemungutan Non Migas	1.274.7796.5	-	30.525.903	344.502.6-5	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-	-	-	
Biaya Pemungutan Perbendaharaan	29.020.336		3.021.700	23.710.636	
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	53.783.645		2.951.300	50.929.045	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.860.376	-	599.900	7.260.376	-
Cukai		-	-	-	
SDA	17.09..0.3.696	1.207.207.450	2.714.370.025	12.025.907.221	2.110.275.179
Migas					-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Kontrak Lainnya		-	-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-				-
Minerba	44.382.674.349	739.620.332	1.939.579.900	42.651.033.142	1.230.379.022
Landrent	-	739.620.332	409.303.900	-	330.379.022
Royalti	41.542.371.349	-	1.530.271.200	42.691.058.742	
Panas Bumi	2.2.902.675		18.031.575	284.961.107	
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	455.99..575		18.031.575	284.961.107	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		473.441.978	724.776.130	-	1.250.225.108
IHH					
PSDH	-	473.441.978	724.776.130	-	1.250.225.108
Perikanan	150.790.980	-	3.468.1.000	-	137.014.020
Grand Total	5.0.0.0.0.0.0.2	1.207.207.450	5.103.7.5.725	51.837.206.182	2.132.370.020

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bekasi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian KB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 20.. (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			6.144.905.263	7.050.903.909	2.514.201.375
PPh			6.144.905.263	7.050.903.909	2.514.201.375
PPh Pasal 21			6.997.049.426	7.050.903.909	3.094.755.216
PPh Pasal 25/29	-	-	147.143.837	-	147.143.837
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Tanah Buah	-			-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perbatasan		-	-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas	-			-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Jalan		-	-		
Biaya Pemungutan Perbatasan					-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-			-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT		-	-		
DAK		13.280.949	38.921.617.007		38.934.614.956
Migas					-
Minyak Bumi (15%)	-		-	-	-
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-	-	
Minyak Bumi dr. Lap. Pengelola Khusus	-	-	-	-	
Gas Bumi (30%)					
Gas Bumi (0,5%)					-
Gas Bumi Lapangan Pengelola Khusus					-
Minerba	-	-	53.769.693.196	-	38.780.697.158
Royalti	-	-	-	-	
Iuran Tetap		-	53.769.693.196	-	38.780.697.158
Panas Bumi					
Iuran Produksi					-
Royalti	-		-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Kehutanan		13.280.948	134.017.709		134.017.709
DR					
IIUPH	-			-	-
PSDH	-	13.280.948	134.017.709	-	134.017.709
Perikanan	-	-	-	-	
Gross Total		13.280.948	79.169.128.198	7.050.903.909	72.068.619.292

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Halmahera Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(2) Definitif TA 2020	(3) Realisasi TA 2020	Penyaluran DBH Definitif TA 2020 (Lihat Lampiran I PMK 109/PMK.07/2021)	(4) TA 2020 yang telah dialokasikan	(5) TA 2020 yang belum dialokasikan
Pusat	8.079.692.151	3.160.760.500	4.967.931.500	6.208.989.039	6.208.987.428
PPh	6.079.230.371	-	3.302.268.000	5.171.092.614	-
PPh Pasal 21	5.676.940.106	-	3.269.710.000	5.807.240.750	-
PPh Pasal 22/26	202.290.265		32.548.000	169.851.864	-
PBB	2.000.461.780	3.160.760.500	2.000.000.000	3.282.896.465	6.838.937.428
Cukai Hasil Tembakau	69.233.994		165.663.500	1.754.270.296	
Bagian Daerah Migas	60.521.277	-	99.715.490		36.191.126
Bagian Daerah Non Migas		2.630.715.500	2.190.008.500	-	6.726.756.520
Bagian Daerah Dana Bunga			-	-	-
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	-				
Bagian Daerah Pertambangan	575.070.263			277.870.200	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.509.007	-	8.504.500	926.394.707	-
Biaya Pemungutan Migas	2.202.218	-	2.450.820	-	1.406.582
Biaya Pemungutan Non Migas	-	110.075.002	82.334.220		192.079.903
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-				
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	-		-
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan	18.695.812		-	18.695.812	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.036.176		2.22.300	7.762.679	-
Dll	-				
DAK	52.762.260.702	180.345.247	1.690.521.700	57.050.328.771	442.207.411
Pajak		-	-	-	-
Pajak Rokok 50%			-	-	-
Pajak Rokok 0,5%	-				-
Bagian Dana Kelola Bersama Ormas	-				
Gas Bumi 70%	-	-			
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi Bagian Bersama Ormas		-	-	-	-
Minerba	50.264.291.150		1.450.046.200	37.979.154.185	-
Landas Kontinen	1.952.878		192.577.530	231.373.428	
Kehutanan	35.508.248.575		1.207.157.310	36.710.790.720	
Pajak Daerah	31.177.270	-	2.950.050	19.282.230	
Tarif Progresif	-	-	-	-	-
Tarif Dasar	31.177.270		2.943.050	19.282.230	-
Sanksi Pajak Daerah			-		-
Kehutanan	-	180.345.247	127.050.350		284.978.397
DR		-			
IIUPH		-	-	-	-
PSDH		180.345.247	127.050.350		284.978.397
Perikanan	139.189.960		31.481.000		107.694.020
Grand Total	67.553.188.854	3.491.306.647	6.951.720.070	63.130.377.413	7.201.221.928

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Seribu

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Tanah			[illegible]	641.161.377	-
PPh	-	-	894.767.377	894.767.377	-
PPh Pasal 21	-	-	481.303.678	481.303.678	
PPh Pasal 25/29	-	-	313.463.699	313.463.699	
PBB	-	-	-		
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasca Bunit	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan		-	-		
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya	-			-	-
Bagian Pertambangan Migas	-	-	-	-	
Bagian Pertambangan Non Migas		-	-		
Bagian Pertambangan Panas Bumi					-
Bagian Pertambangan Perikanan				-	-
Bagian Pertambangan Pertambangan	-	-	-	-	
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	-	-	-		
Cukai					-
PDA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%		-	-		-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		-
Minerba	-	-	27.203.870.070	1.625.249.902	25.180.620.168
Panas Bumi		-	25.341.813.367	1.625.249.902	23.737.763.465
Kehutanan			1.862.056.703		1.862.056.703
Dana Otsus					-
Otsus Provinsi	-	-	-	-	-
Otsus Kab/Kota	-	-	-	-	
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-		
Kehutanan		[illegible]	[illegible]		[illegible]
DAU				-	-
DTDP	-	-	[illegible]	-	[illegible]
DBH	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Pemotong					
Grand Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Sula

(dalam rupiah)

JENIS DBH	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)	(5)
Pajak	6,587,426,663	-	1,092,120,000	5,039,494,577	44.15-48
PBB	1,904,238,252	-	439,554,600	964,383,652	-
PPh Pasal 21	1,269,107,252	-	421,581,600	848,085,358	
PPh Pasal 25/29	121,370,901		17,972,220	70,207,707	
BPHTB	1,993,109,411		622,172,000	2,419,038,963	14,110,210
Cukai Rokok	3,377,186,996		272,393,700	1,921,649,962	-
Bagian Daerah Hasil Migas	7,776,330	-	114,226,500	-	42,464,570
Bagian Daerah Hasil Migas	20,713,507	-	24,391,965	53,82 397	
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Pertambangan	2,242,567,913		217,139,500	2,073,129,213	
Bagian Daerah Pertambangan	-				-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215,500,607	-	6,604,302	209,094,707	-
Bagian Pertambangan Migas	2,677,232	-	4,706,100	-	1,650,478
Bagian Pertambangan Hasil Migas	4,020,350		9,111,500	1,590,550	
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-				-
Bagian Pertambangan Pertambangan	130,831,506	-	9,520,100	91,80 406	-
Bagian Pertambangan Pertambangan			-	-	
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya	3,080,109		325,500	2,702,609	
DAK	-				-
SDA	74,770,863,078	3,965,205	1,263,619,125	28,750,087,858	374,606,975
Migas		-	-	-	
Minyak Bumi 15%			-		
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Sektor Ruangan Offshore	-	-			-
Gas Alam 15%	-	-	-	-	-
Gas Alam 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Alam dalam Ruangan Offshore		-	-	-	-
Pertama	25,513,859,771		911,167,077	23,732,181,709	
Tambang	4,201,314,325		102,352,050	3,814,737,725	
Pajak	39,276,181,419		109,251,075	29,367,691,272	
Jasa Air	37,232,972	-	3,174,900	29,616,272	-
Jasa Produksi	-	-	-	-	-
Jasa Lain	22,731,973		7,771,900	9,050,266	
Sumber Daya Tambang					
Kehutanan	-	18,260,275	17,172,975		192,509,160
DR	-	-	-	-	-
IUPH		-	-	-	
PSDH		18,260,275	174,272,975		192,509,160
Perikanan	513,034,530		256,130,275		92,096,145
Grand Total	31,196,861,643	18,265,205	3,045,746,625	29,121,552,465	818,772,378

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Tidore Kepulauan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Tarif Insidil LB s.d. TA 2020 (PMK No. 5/PMK.7/2022)	85% LB - LB TA 2019 (PMK No. 7/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4) - (5)
Pajak	-		261.677.844	261.677.844	-
PPh	-		260.937.701	260.937.701	-
PPh Pasal 21		-	78.271.040	78.271.040	-
PPh Pasal 22/26		-	182.666.661	182.666.661	
PBB		-	1.040.143	1.040.143	
Cukai Rokok			-	-	
Pungutan Daerah Khusus	-		-	-	-
Pungutan Daerah Sawit Migas	-				-
Pungutan Daerah Panas Bumi		-			
Pungutan Daerah Pertambangan Mineral		-	-		
Pungutan Daerah Perkebunan	-			-	
Pungutan Daerah Sektor Lainnya	-			-	-
Biaya Pemungutan Migas		-	1.040.143	1.040.143	
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-		-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan	-			-	-
Biaya Pemungutan Pungutan Lainnya		-			
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-		
DJP	-		-	-	-
PPN	-	13.009.190	3.298.270.709	93.133.928	3.105.131.788
Migas		-			-
Minyak Bumi 15%		-			-
Minyak Bumi 0,5%		-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-		-	-	
Gas Bumi 30%	-		-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-			-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Minerba		-	3.155.040.103	93.133.928	3.061.906.175
Landrent		-	143.230.606	93.133.928	50.096.678
Royalti			3.011.809.497		3.011.809.497
Panas Bumi	-		3.784.735	-	3.784.735
Sumber Daya Alam Perikanan	-			-	-
Cukai Hasil Tembakau		-	3.784.735		3.784.735
Sektor Migas Pertambangan Baru		-	-		
Kehutanan	-	13.009.190	127.691.682	-	127.691.682
PPh	-		-	-	-
PPh DTP	-				-
PBB		13.009.190	127.691.682		127.691.682
Pertambangan			-		
Grand Total	-	13.009.190	3.552.194.673	354.801.771	3.197.392.902

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tidore Kepulauan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran LB DBH Semester I TA 2021 (KMK No. 3/KM.7/2021)	PB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]=[3]-[4]
Pajak	5.287.729.162		1.120.010.730	4.202.305.916	35.718.490
PPh	3.013.989.700		782.210.200	2.231.779.925	
PPh Pasal 21	2.992.271.100		760.602.400	2.231.611.727	
PPh Pasal 25/29	21.718.598	-	21.607.800	110.137.498	-
PPN	1.275.436.607	-	337.550.700	1.047.021.053	35.435.754
Pajak Lain	997.970.909		265.051.770	1.726.279.263	-
Pajak Daerah	39.739.143		69.850.330	-	24.971.307
Bagian Daerah dari Migas			-		
Bagian Daerah Dana Bumi	-	-	-		-
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	-	-			-
Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan				-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.090.027		8.094.300	201.994.707	
Dana Perimbangan Migas	2.026.191	-	3.936.209		1.910.018
Bagian Pemerintah dari Non Migas	-	-			-
Bagian Pemerintah dari Pajak Bumi dan Bangunan				-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan			-	-	
Dana Perimbangan Pertambangan	-	-	-		
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	8.065.173	-	825.500	7.062.673	-
CHT	-			-	-
PBH	40.302.307.302	149.633.191	981.051.300	45.654.435.873	435.178.311
Migas			-		
Minyak Bumi 15%	-	-	-		-
Minyak Bumi 0,5%	-	-			-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	-
Gas Bumi 20%				-	
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Minerba	45.830.635.312	-	475.894.600	45.836.740.603	-
Royalti	4.029.635.580	-	47.900.200	1.100.010.530	-
Iuran Tetap	42.170.097.035		427.989.300	41.077.050.535	-
Panas Bumi	21.177.270		2.945.000	18.232.220	
Royalti			-	-	
Iuran tetap	21.177.270	-	2.945.050	18.232.220	
Setoran Bagian Pemerintah	-	-			-
Kehutanan	-	149.633.191	17.420.309	-	267.464.401
PSDH			-	-	
DBHI		-	-		
DBHP	-	149.633.191	17.420.300		267.464.491
Perikanan	150.736.382		316.851.000		157.664.000
Grand Total	31.758.306.605	149.633.191	2.047.291.730	50.057.243.60	462.376.047

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pulau Morotai

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 65/PMK.07/2021)	Target Lebih Salur LB s.d. TA 2019 (KEP No. 8/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (Kol. 5=4-3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
Pajak	-	-	152.033.726	152.033.726	-
PPh			152.033.726	152.033.726	-
PPh Pasal 21			35.820.935	35.820.935	
PPh Pasal 25/29	-		116.212.791	116.212.791	
Hasil	-	-			
Dana Bagi Hasil	-	-			-
Bagian Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Migas	-				
Bagian Daerah Perbatasan	-	-			
Bagian Daerah Perbatasan		-	-	-	-
Bagian Daerah Kabupaten/Kota Lainnya			-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-				
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			
Biaya Pemungutan Pajak Dalam		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Dalam			-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Dalam	-				
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-			
DBH		-	-	-	-
SDA		10.090.631	1.084.466.550	61.616.263	1.022.850.276
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				
Minyak Bumi 0,5%	-	-			
Minyak Bumi dalam Jangka Waktu	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi Dalam Jangka Waktu	-				
Minerba	-		1.125.591.151	61.616.263	1.063.974.888
Landrent	-	-	15.737.760	15.737.760	
Royalti	-	-	1.445.656.701	45.878.503	1.399.778.198
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Tetap (Land Rent)			-	-	-
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-				
Setoran Dalam Perjalanan	-				
Kehutanan		10.090.631	838.670.705	-	838.670.705
PSDH			-	-	-
DBHPS			307.520.205		307.520.205
PSDH	-	10.090.631	170.950.500		170.950.500
Perikanan	-	-		-	
Grand Total		10.090.631	3.136.436.035	315.643.329	1.909.648.476

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pulau Morotai

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB Defisit DBH TA 2020	LB Defisit DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Sesuai dengan PMK No. 216/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum dapat dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6) = (3)-(4)
Pajak	7.481.319.797		770.913.100	2.917.219.579	36.732.697
PPh	1.502.361.755		395.209.905	1.105.151.895	-
PPh Pasal 21	92.771.077	-	378.347.300	1.034.453.727	-
PPh Pasal 22/29	91.683.758	-	7.932.602	81.658.178	
PBB	2.279.068.022	-	377.673.765	1.941.027.683	39.732.697
Dana Bagi	1.991.000.984		200.000.730	1.791.270.196	
Bagian Daerah Migas	62.000.799		60.010.020		37.263.701
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan		-	-		
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.599.207		9.957.300	305.894.707	-
Biaya Pemungutan Migas	2.285.050	-	2.257.230	-	1.419.178
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-		
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Pertambangan	-			-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.045.179	-	227.300	7.762.179	
DLP					
DTA	10.004.526.134	92.072.639	876.002.750	24.953.244.024	258.762.659
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%		-			
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%	-			-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	28.374.362.524	-	59.210.700	16.185.059.154	
Landrent	420.961.436	-	1.630.630	419.961.206	
Royalti	19.087.050.196		47.029.020	19.510.093.494	
Panas Bumi	51.177.270		2.015.020	19.551.220	-
Iuran Produksi	-		-	-	-
Iuran Tetap	51.177.270	-	2.945.050	16.282.220	
Sebesar Biaya Pemerintah		-	-		
Kehutanan		92.072.639	119.056.230		301.063.639
PSDH	-			-	-
DBHPH	-	-	-	-	-
PSDH		92.072.639	18.806.230		201.268.439
Perikanan	109.180.950		310.961.300		157.795.020
Jumlah Total	24.037.276.701	92.072.639	1.061.841.300	22.050.150.602	947.695.740

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pulau Taliabu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 20[illegible]	KB TA 20[illegible]	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2020)	Proyeksi TA 20[illegible] LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[5]	[7]	[8]=[5]-[6]
Pajak			37.307.830	27.700.200	30.307.830
PPh					
PPh Pasal 21	-				
PPh Pasal 25/29	-				-
PBB	-	-	56.207.830	27.700.200	30.947.602
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Migas					
Bagian Daerah Penerimaan Non Migas					
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	-	-			-
Bagian Daerah Penerimaan Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Perikanan	-	-	55.248.700	26.881.200	28.864.430
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Lainnya					
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi	-				
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dari Wilayah Laut					
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Gas Bumi dari Wilayah Laut			2.732.100	1.018.950	1.713.150
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Umum dari Wilayah Laut	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
DBH	-	23.481.284	2.897.975.130	892.771.317	2.193.577.780
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-			-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Kehutanan	-	-			-
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan					-
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi	-				
Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Pertambangan		25.487.284	3.084.348.096	920.771.317	2.163.577.780
DP					
DBH	-	1.226.041	2.191.193.296	920.771.317	1.271.195.018
DBHCHT	-	24.255.243	893.154.800	-	893.154.800
Penyesuaian		-	-	-	-
Grand Total		71.482.334	3.710.316.756	949.471.517	2.763.845.580

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pulau Taliabu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH TA 2021 Sesuai PMK TA 2020 (PMK 39/PMK.07/2021)	KB DBH TA 2020 yang belum direalisasikan	LB DBH TA 2020 yang belum direalisasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	4.67[illegible]5.636	-	778.398.300	3.885.046.162	8.350.126
PBB	1.727.017.333	-	510.406.100	1.117.[illegible]5.55	-
PPh Pasal 21	1.[illegible]38.807.010	-	295.103.000	1.045.794.[illegible]	-
PPh Pasal 25/29	98.710.000	-	15.305.100	78.518.830	-
PPN	3.213.[illegible]4.091	-	185.703.300	2.778.191.107	3.159.126
Bagi Rata	2.177.[illegible]96.388	-	262.530.700	1.904.[illegible]9.990	-
Bagian Daerah Migas	141.416.457	-	44.491.000	-	2.082.[illegible]8
Bagian Daerah Non Migas	2.[illegible]35.187.007	-	64.775.300	2.383.578.207	-
Bagian Daerah Pasca Tambang	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Kehutanan	213.350.027	-	8.624.200	205.054.737	-
Biaya Pemungutan Migas	2.217.417	-	3.422.500	-	172.[illegible]83
Biaya Pemungutan Non Migas	97.711.717	-	2.132.100	95.059.317	-
Biaya Pemungutan Pasca Tambang	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Kehutanan	8.[illegible]2.178	-	922.600	7.[illegible]2.078	-
PBHTP	-	-	-	-	-
SDA	20.146.[illegible]62.243	3.915.[illegible]1.17	778.046.675	19.4[illegible]39.[illegible]0.[illegible]13	3.534.[illegible]1.087
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Gas Alam 30%	-	-	-	-	-
Gas Alam 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Alam dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Panas Bumi	10.911.[illegible]11.276	2.701.[illegible]90.100	818.800.773	19.[illegible]00.434.823	3.078.[illegible]98.350
Terbentuk		2.701.[illegible]90.100	317.108.[illegible]70		3.078.[illegible]98.350
Tersalur	19.91[illegible]94.748		401.[illegible]03.423	19.[illegible]69.[illegible]34.827	-
Pajak Bumi	23.430.970	-	2.774.303	3.[illegible]56.[illegible]0	-
Sumber Produksi	-	-	-	-	-
Sumber Lahan	23.430.970		2.774.303	19.[illegible]56.070	
Setoran Kegiatan Pemeriksaan					
Penerimaan	-	1.[illegible]05.017	158.[illegible]59.328		3.3[illegible]4.347
Jasa	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	
Pajak		213.[illegible]05.017	170.[illegible]60.[illegible]2		170.[illegible]1.[illegible]72
Perikanan	2.[illegible]04.[illegible]92.[illegible]		3[illegible].123.[illegible]5		82.[illegible]8.[illegible]45
Grand Total	26.817.[illegible]5.88[illegible]	3.915.[illegible]1.17	2.[illegible]5.[illegible]40.[illegible]5	43.[illegible]4.[illegible]6.[illegible]55	3.537.[illegible]0.795

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi/ Banten

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KPPA 2018	KPPA 2019	Alokasi TA 2019 (KMK No. 367/KMK.07/2021)	Penyesuaian Alokasi TA 2019 (KMK No. 367/KMK.07/2021)	Sisa Lebih/Kurang Bayar TA 2019 (LKPD No. 3/SKPD/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	349,477,265	41,448,765	307,828,496
PPh			-	-	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB	-	-	379,247,295	11,418,799	297,828,496
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21					
Bagian Daerah Pasal 25/29	-		283,019,095		586,874,996
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	82,137,616	82,137,616	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	711,085	17,085	-
Biaya Pemungutan Pasal 21	-	-	981,487	981,487	-
Biaya Pemungutan Perkebunan			11,148,801	-	11,148,801
Biaya Pemungutan Perkebunan			7,027,071	7,027,071	
Biaya Pemungutan Pasal 25/29	-				-
CHT	-	-	-	-	-
BHA		11,473,814	218,340,129	126,093,149	92,019,980
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%	-		-	-	-
Minyak Bumi Penyesuaian Kurang/Lebih	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi Dalam Rangka Migas					
Minerba			202,669,852	121,096,127	81,573,430
Iuran Tetap	-	-	118,096,127	118,096,127	-
Royalti	-	-	84,573,430	-	84,573,430
Pasal Bumi	-	-	16,536,705	7,069,522	9,467,183
Iuran Produksi			-	-	
Penerimaan			16,536,705	7,069,522	9,467,183
Sektor Lainnya Pemerintah	-				
Kehutanan	-	1,473,814	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH					
PSDH	-	1,473,814			
DR Tahun	-	-	-	-	-
Grand Total	-	11,473,814	567,816,634	167,541,914	399,828,476

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Maluku

(dalam rupiah)

URAIAN	KU Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran s.d. PMK ... Tahun TA 2021 (KURANG BAYAR TA 2021)	KB TA 2021 yang belum disalurkan	LB TA 2021 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	207.249.0 0.02	7– 400	110.214.598.102	196.211.617.291	10.919.690
PPh	301.757.021.829	-	1 2.015.5 4 .6	192.369..19 05	-
PPh Pasal 21	2 3.0 3.4 3.8 2	-	107.353.839.6 2	175 .79 96.742	-
PPh Pasal 25/29	1 .0 .0 .0 .947	-	2.651.6 8.2 2	13.659. 3.767	-
PPh	2 97.3.91.09.	7 .4 0	1.102.0 0.6 6	2.820.790.191	16.3 0.0 0
Bagi Hasil	-				
Dampak Daerah Migas	3 3.8 6.8 3	-	3.9 2 .6		15 .72.777
Bagian Daerah Non Migas	213.3 1.0 4	-	1 5 6 .6	69 6 3,5 4	-
Bagian Daerah Pasal 21		72.0 0	0.2 2	-	81.0 0
Bagian Daerah Pasal 25/29	704 1 .0 6		210.717.6 5	4 .3 0.7 6	
Bagian Daerah PPh	1 362 1 – 0 4		23 .9 6.2 0	1.12 .223.3 1	
Dampak Daerah Pelaksanaan Otsus	1 1.6 .0 3	-	9 62.4 0	4 .4 7.1 6	-
Biaya Pengurangan Migas	1 .9 6.0 7	-	7.6 0.6 0	-	7 2 .6 3
Biaya Pengurangan Non Migas	37 171.0 0		4.1 3.2 0	22.0 6.3 3	
Biaya Pengurangan Pasal 21	-	1 4	0 0		1 0
Biaya Pengurangan Perhutanan	27.3 2.3 6	-	3.544.3 0	16 3 3.1 6	-
Biaya Pengurangan Pertambangan	6 .1 1.1 1		3.4 3.0 0	3 .3 3.4 0	-
Biaya Pengurangan Sektor Lainnya	14 3 0 5		301.0 0	13.226.0 4	
DBH	7 8.0 1	-		1.0 .011	
BOA	1.117 886.7 2	65.745.3 3	3 6 2 1.5 5	1.136 .92.3 9	149.3– 6 8
Migas		-	-	-	-
Minyak Bumi 15%			-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-				
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-	-			
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-		-	-
Mineral	1.0 6.5 6.4 2	5 .6 1.6 2	2 8.5 6 6	1.1 8.4 8.5 7	2 3 0.4 7
Tambang	-	0 .6 1.6 2	2 .1 .7 3		7 2 0.4 7
Iuran	1.3 6.5 6.7 2		6 .0 8.1 2	1.11 .1 5.1	
Pajak Lainnya	-	1 3 3.5 6	63.6 7 7		75 .5 1 61
Pajak Kendaraan		-	-	-	-
Pajak Lainnya		1 3 3.5 6	63.6 7 5	-	75.5 1 61
Sumber Daya Alam Perikanan					
Kehutanan	36.9 9.73		56.0 6.7 6	13.2 3.0 1	
DR	-	-	-		-
PSDH		-	-	-	-
Pajak Lainnya	9 .2 9.7 1		6.0 9.7 6	4 .2 1.0 7	-
Pertambangan	-				
Grand Total	2 1 3.7 2.7 7.3 5	65 3 9 – 6	1 7 1 2 3 9 .9 6	1 6.9 0 1 1.7 0	16 .7 0.7 9

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lebuk

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran LB s.d TA 2019 (KMK No. 317/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 317/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]
Pajak			3.021.530.179	2.820.111.392	2.807.815.187
PPh			-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-		
PPh Pasal 25/29	-	-	-		-
PBB	-	-	3.021.530.179	2.820.111.392	2.807.818 .87
Bagi Hasil					-
Bagian Daerah Migas				-	
Bagian Daerah Non Migas	-	-	69.420.122		69.420.320
Bagian Daerah Pasca Bumi	-	-	-		-
Bagian Daerah Dana Reboisasi	-	-	370.053.951	170.165.049	421.385.835
Bagian Daerah Pertambangan			1.024.067.030	1.080.543.045	1.041.227.058
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	3.310.830		3.310.890
Biaya Pemungutan Pasca Bumi				-	
Biaya Pemungutan Pertambangan			165.097.740	-	165.097.713
Biaya Pemungutan Reboisasi	-	-	177.260.473		173.836.870
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-		-	-
CHT				-	-
SDA		7.474.027	527.145.830	-	527.7 10.505
Migas	-	-	-		-
Minyak Bumi 85%	-	-	-		-
Minyak Bumi 0,5%	-	-			-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 69%				-	
Gas Bumi 0,5%			-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Pertambangan	-	-	378.065.730		535.067.175
Panas Bumi	-	-	791.021.332		430.381.302
Royalti			2.012.6/91	-	28.735.942
Provisi Bidang			4.562.624	-	4.682.621
Dana Reboisasi			-	-	
Dana Otsus	-	-	4.682.624		4.682.621
Setoran Sisa Lebih Pemakaian	-	-			-
Kehutanan		7.474.027		-	-
DR			-	-	
PSDH	-	-	-		
DBHTI	-	7.474.027			-
Perikanan					-
Grand Total		7.474.027	5.819.379.979	3.253.51 .093	5.345.307.087

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Lebak

(dalam rupiah)

URAIAN	Alokasi Definitif TA 2020	Alokasi Perubahan TA 2020	Penyaluran DBH Sampai dengan Bulan Desember TA 2020 (Kolom 5 = 3/Kolom 7/2020)	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan (Kolom 6=4-5)	DBH TA 2020 yang Belum Disalurkan (Kolom 7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	30.047.029.007	-	10.665.245.150	9.370.705.153	34.744.271
PBB	2.022.016.971	-	970.801.450	1.044.025.854	-
PPh Pasal 21	21.619.031.929	-	8.802.852.050	9.078.782.999	-
PPh Pasal 25/29	1.470.980.950	-	378.591.650	1.092.272.505	-
BPHTB	7.717.763.502	-	1.149.702.700	3.329.156.793	34.744.271
Bagi Rata	191.959.606	-	205.858.750	1.726.270.290	-
Bagian Daerah Migas	152.077.715	-	95.251.000	-	61.040.888
Bagian Daerah Non Migas	1.127.283.001	-	5.236.650	1.151.070.401	-
Bagian Daerah Jasa Sda	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	1.144.124.075	-	280.547.100	1.160.022.905	-
Bagian Daerah Perkebunan	2.356.031.158	-	634.615.100	322.315.245	-
Bagian Daerah Kehutanan	273.390.007	-	8.604.300	206.034.707	-
Dana Perimbangan Migas	7.059.737	-	5.130.100	-	2.117.360
Dana Perimbangan Non Migas	97.965.680	-	171.200	97.794.480	-
Dana Perimbangan Jasa Sda	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Pertambangan	98.161.354	-	10.939.200	45.252.154	-
Dana Perimbangan Perkebunan	132.816.160	-	28.227.500	45.711.060	-
Dana Perimbangan Sektor Kehutanan	1.187.917	-	296.900	890.817	-
DBHT	2.315.516	-	-	2.315.516	-
DAK	601.302.078	5.386.696	134.237.375	337.252.203	133.847.696
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Hasil Pengolahan Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Hasil Pengolahan Bagian Daerah	-	-	-	-	-
Minerba	111.330.937	-	25.506.250	123.696.125	2.260.062
Landrent	4.102.657	-	477.000	-	2.260.062
Royalti	373.834.370	-	46.239.150	265.586.720	-
Dana Reboisasi	-	3.386.696	18.193.500	-	21.580.196
Luran Produksi	-	-	-	-	-
Luran Tetap	-	3.386.696	18.193.500	-	21.580.196
Selisih Hasil Pengolahan					
Pertanian	50.344.758	-	20.668.775	6.656.063	-
DAK	-	-	-	-	-
DAU					
TOTAL	33.317.156	-	20.086.075	6.656.063	-
Perikanan	154.186.960	-	41.581.000	-	15.634.020
Jumlah	3.548.07.077	5.386.696	1.149.316.975	10.733.157.356	270.030.650

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pandeglang

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2019	KB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 26/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2020 (KMK No. 8/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (KMK No. 8/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
Pajak			835.401.350	122.535.984	712.865.366
PPh			14.511.458	14.511.458	-
PPh Pasal 21		-	-		-
PPh Pasal 25/29		-	11.511.458	(4.511.458)	
PBB		-	676.889.800	38.754.578	638.135.222
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		-			-
Bagian Daerah Migas			-		-
Bagian Daerah Non Migas			-		-
Bagian Daerah Pasal 21		-	-		-
Bagian Daerah Pasal 25/29 Orang Pribadi		-	845.890.000	38.754.578	777.635.422
Bagian Daerah Pasal 25/29 Badan		-			-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-		-
Bagian Pemerintah Migas			-		-
Bagian Pemerintah Non Migas		-			-
Bagian Pemerintah Pasal 21		-			-
Bagian Pemerintah Pasal 25/29 Orang Pribadi		-	87.890.400		87.890.400
Bagian Pemerintah Pasal 25/29 Badan		-			-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya		-			-
Cukai		-		-	-
SDA		15.701.082	548.490.812	999.054.990	450.564.178
Migas		-	-		-
Minyak Bumi 15%		-			-
Minyak Bumi 0,5%		-			-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus		-			-
Gas Bumi 30%		-	-		-
Gas Bumi 0,5%		-			-
Gas Bumi dalam rangka Otsus		-			-
Pertambangan Umum		-	262.126.776	5.166.456	256.960.320
Landasan		-	18.166.456	18.166.456	-
Kehutanan		-	170.972.632	-	170.972.632
Panas Bumi		-	85.205.020	19.861.159	65.343.861
Sumber Daya Alam Perikanan		-	-		-
Pertambangan		-	85.205.020	19.861.159	65.343.861
Kehutanan Bagian Pemerintah		-	-		-
Keberatan		15.701.082	241.059.124	241.059.124	-
PPh		-	-		-
PBB		-	-		-
PBB		15.701.082	211.059.124	211.059.124	-
Pasal 21		-	-		-
Jumlah Total		15.701.082	1.589.801.940	1.311.815.355	1.077.865.565

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pemalang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	LB TA 2020	Penyaluran KB DBH Tahun TA 2020 (KMK No. 178/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Pajak	20.953.024.046	590.200	20.931.358.810	20.103.358.810	20.470.026
PBB	21.458.401.972		8.435.842.805	12.850.558.557	-
PBB Pasal 21	21.274.456.518	-	8.320.573.500	12.953.882.718	-
PBB Pasal 25/29	28.972.454	-	114.669.305	87.696.851	
BPHTB	7.795.269.092	209.350	1.902.428.990	5.892.962.416	15.703.026
Rugi Kurs	1.291.946.999		365.969.730	1.726.276.269	9.822.105
Bagian Daerah Migas	209.567.094		203.174.550	-	-
Bagian Daerah Non Migas	944.459.427		422.377.710	52.295.717	535.900
Bagian Daerah Pertik Pusat		209.600	5.250		
Bagian Daerah Pertambangan	1.826.733.749	-	383.671.000	712.101.949	-
Bagian Daerah Perkebunan	2.217.600.606		256.023.900	1.961.576.406	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.389.037		8.694.200	206.994.707	-
Biaya Pemungutan Migas	9.870.120	-	10.314.000		443.880
Biaya Pemungutan Non Migas	31.456.066	-	14.132.900	17.323.766	
Biaya Pemeriksaan Pajak		9.600	1.920	-	17.680
Biaya Pemungutan PBB	31.572.765		32.636.830	26.859.014	-
Biaya Pemungutan BPHTB	93.505.252	-	11.377.220	86.517.052	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.746.817	-	265.600	6.906.217	
DPT	532.150		-	532.150	-
DAK	2.986.795.560	2.643.221.108	837.187.900	2.369.127.557	301.067.795
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka PNBP	-		-	-	-
Gas Bumi 30%	-		-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-			-	-
Gas Bumi dalam Rangka PNBP	-			-	-
Provinsi	2.635.960.700	264.709.550	339.996.250	2.884.273.701	283.173.775
Kabupaten		264.709.550	31.410.225		283.173.775
Kota 1	2.009.510.700		975.597.155	2.007.213.791	
Pajak Daerah	-	2.714.638	45.746.270	-	31.260.908
Pajak Hotel	-			-	-
Pajak Hiburan		9.514.988	13.716.020		52.260.908
Pajak Restoran			-		
Kabupaten	169.411.850		306.540.550	80.197.265	-
Kota	-			-	-
Kota 1	-	-			
PBB-P	20.711.911	-	101.511.100	83.197.250	
Kabupaten	139.140.650		315.69[illegible]202	-	37.091.020
Grand Total	32.013.799.636	267.723.038	11.368.594.705	21.357.339.450	311.457.798

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Serang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KLA TA 2016	KLA TA 2019	KB s.d TA 2018 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2018 (KEP No. 3/KM.7/2021)	Sisa KL s.d TA 2018 (KEP No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-		900.436.773	603.677.661	321.758.112
PPh	-	-	765.644.649	783.096.172	321.758.412
PPh Pasal 21		-	5.788.634.170	783.096.172	5.005.538.346
PPh Pasal 25/29		-	182.330.814	-	182.330.814
PPN			642.791.720	642.791.720	-
Bagi Hasil	-				
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan				-	
Bagian Daerah Perikanan	-		2.241.211.729	2.241.211.729	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas				-	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-				
Biaya Pemungutan Perpajakan	-	-			
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	14.349.280	14.349.280	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	-
CHT	-				
SDA	-	5.281.240	705.412.919		705.418.159
Migas		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%				-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Pertambangan		-	23.868.012	-	23.868.012
Kehutanan				-	-
Royalti			23.868.012		23.868.012
Perikanan	-	-	292.030.937		292.030.937
Jaminan Reklamasi	-	-	-		
Tunjangan Iklan		-	292.030.937	-	292.030.937
Sumber Daya Alam Pertanian			-	-	-
Kehutanan	-	5.281.240			
PSDH		-			
DR	-				
IHPH		-	-	-	-
PSDH		5.281.240	-	-	-
Perikanan					
Grand Total	-	5.281.240	1.261.854.732	603.677.661	658.177.071

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Serang

(dalam rupiah)

Uraian	PS DBH TA 2020	TS DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Sebelum TA 2021 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB DBH 2020 yang Belum Disalurkan	LB DBH 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak	43.540.0-6.402	-	21.6.2[illegible] 187.930	20.0[illegible] 1.9[illegible].9	62.96[illegible].538
PPh	20.127.022.741	-	14.062.856.870	26.[illegible]24.086.244	-
PPh Pasal 21	17.720.028.676	-	13.59[illegible]151.300	24.[illegible]26.197.316	-
PPh Pasal 22/26	1.763.094.065	-	47.705.000	965.[illegible]88.000	-
PPh Pasal 25/29	2.393.700.735	-	417.031.300	3.920.909.431	82.0[illegible]0.099
PPN	1.491.959.938	-	200.089.100	1.726.2[illegible]0.299	-
Pbb Rdd	135.716.073	-	216.516.100	-	79.[illegible]0.027
Bagian Daerah Migas	1.107.343.039	-	48.425.600	1.149.[illegible]8.739	-
Bagian Daerah Pbb Dan Bphtb	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	33.369.442	-	-	33.369.[illegible]40	-
Bagian Daerah Perikanan	715.0-7.278	-	-	715.[illegible]4.269	-
Dana Bagi Hasil Sda Lainnya	215.379.307	-	8.[illegible]0.320	206.[illegible]94.707	-
Bhpdp Pertambangan Migas	7.410.649	-	7.209.350	-	2.[illegible]38.531
Bhpdp Pertambangan Non Migas	39.992.01	-	1.019.100	38.[illegible]8.011	-
Bhpdp Perikanan Dapat Pulih	-	-	-	-	-
Bhpdp Pertambangan Panas Bumi	2.387.053	-	-	7.[illegible]4.077	-
Bhpdp Pertambangan Perikanan	31.[illegible]3.878	-	-	31.770.878	-
Bhpdp Pertambangan Sektor Lainnya	7.[illegible]6.847	-	255.520	6.[illegible]1.327	-
Cht	105.218	-	-	261.019	-
Sda	67[illegible]024.139	-	497.489.075	3[illegible]4.894.277	157.644.[illegible]02
Kheas	-	-	-	-	-
Bhpdp Kheas 0,5%	-	-	-	-	-
Bhpdp Kheas 0,5%	-	-	-	-	-
Bhpdp Kheas dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minyak Bumi	370.310.[illegible]47	-	18.227.923	378.[illegible]82.721	-
Panas Bumi	742.627	-	-	742.627	-
Pungli	378.187.820	-	48.027.925	328.[illegible]19.095	-
Iuran Tetap	103.553.550	-	92.537.500	25[illegible]1.050	-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Iuran Eksplorasi	105.[illegible]33.050	-	89.727.500	20.[illegible]6.050	-
Bonus Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	25.[illegible]2.6[illegible]3	-	16.[illegible]12.500	11.[illegible]0.[illegible]3	-
Dr	-	-	-	-	-
Jpt Pt	-	-	-	-	-
Pnbp	27.[illegible]0.615	-	16.[illegible]2.800	11.[illegible]0.[illegible]13	-
Perikanan	1[illegible]1.[illegible]1.980	-	116.[illegible]1.[illegible]00	-	157.[illegible]1.[illegible]20
Grand Total	44.[illegible]54.[illegible]2.033	-	15.[illegible]0.6.6.925	29.[illegible]1.[illegible]3.616	260.[illegible]4.[illegible]2

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tanggerang

[dalam rupiah]

JENIS DBH	KB TA 2016	KB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2020 (KEP-39/PK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (PMK No. 39/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
Pajak	-	-	1.971.679.119	997.616.842	974.062.277
PPh		-	1.971.679.119	997.616.842	974.062.277
PPh Pasal 21		-	1.723.441.305	997.616.842	725.824.463
PPh Pasal 23/26			248.237.813	-	248.237.813
PBB				-	-
Bag. Pusat	-				
Bagian Daerah Bagian	-	-			
Bagian Daerah Penerimaan		-	-	-	
Bagian Daerah Penerimaan Bersama			-	-	-
Bagian Daerah Perhitungan				-	-
Bagian Daerah Perbatasan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-		
Biaya Pemungutan Pajak		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Pajak	-			-	-
Biaya Pemungutan Pajak Pusat	-				
Biaya Pemungutan Perbatasan		-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Daerah			-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-		-	-	-
CUT	-	-			
SDA	-	5.778.661	31.940.384		23.040.106
Migas		-	-	-	-
Minyak Bumi 15%			-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-			-	-
Minyak Bumi dalam Kerangka Gross	-				
Gas Alam 30%	-	-			
Gas Alam 0,5%		-	-		
Gas Alam dalam Kerangka Gross		-	-	-	-
Minerba			23.646.80	-	23.646.064
Royalti	-			-	-
Iuran IUP	-		23.040.106		23.040.384
Panas Bumi	-	-			
Iuran Produksi		-	-		
Iuran Tetap		-	-	-	-
Kekurangan Bagian Pemerintah				-	-
Kehutanan	-	5.778.661			
IHH	-	-			
PSDH		-	-	-	-
Provisi SDH		5.778.661		-	-
Perikanan	-				-
Grand Total	-	5.778.661	1.993.620.068	997.616.842	997.062.811

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tangerang

(dalam rupiah)

URAIAN	KB DBH TA 2020	KB DBH TA 2021	Penyaluran KB DBH Sampai dengan TA 2020 (APBN No. 9/KM.7/2021)	KB DBH 2020 yang belum disalurkan	LB DBH 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	99.018.458.836		34.062.605.000	65.955.114.795	34.161.689
PPh	91.250.394.252	-	30.371.820.000	60.931.396.211	-
PPh Pasal 21	91.181.305.009	-	82.161.914.600	59.019.390.409	-
PPh Pasal 25/29	6.069.769.945	-	1.109.864.280	4.959.905.745	-
PPN	2.602.365.563		672.690.920	1.929.674.643	34.161.689
Pajak Bea	901.393.093		365.089.920	536.303.173	
Pajak Daerah Migas	564.271.256		573.457.800	726.270.238	10.356.544
Pajak Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pasal Utama	-	-		-	-
Pajak Daerah Pasal Lainnya	-			-	
Pajak Daerah Pasal Tambahan					
Pajak Daerah Sektor Lainnya	213.172.000	-	10.193.500	203.271.500	-
Pajak Penerangan Migas	15.035.765	-	15.977.400	-	655.145
Pajak Penerangan Non Migas	-			-	
Pajak Penerangan Daerah Pasal					
Pajak Penerangan Perorangan		-			-
Pajak Penerangan Perusahaan	-	-			
Pajak Penerangan Sektor Lainnya	5.716.847		339.900	5.716.847	
CHT	237.310		-	237.310	
SDA	358.010.000	3.876.696	309.509.000	51.673.000	174.274.313
Migas	-	-			
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Pusat			-	-	
Gas Bumi 30%			-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Pertambangan Umum	37.803.141	-	15.921.100	20.008.041	-
Kehutanan	-			-	
Perikanan	37.809.141		15.921.100	21.888.041	
Pertambangan Panas Bumi		3.876.696	18.795.600		21.888.266
Iuran Eksplorasi		-	-		-
Iuran Tetap	-	3.876.696	18.795.600	-	21.888.266
Iuran Eksploitasi/Produksi	-			-	
Pertambangan Minyak Bumi	27.514.387		15.027.375	11.487.012	
PBB		-	-		-
BPHTB	-	-			-
Cukai Hasil Tembakau	27.514.387		15.027.375	11.487.012	
Pendapatan	130.186.050		216.861.000	-	17.324.250
Grand Total	100.009.098.237	3.876.696	34.497.038.375	66.023.019.775	192.455.053

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Cilegon

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KPA TA 2018	KPA TA 2019	LB s.d. TA 2019 (LBH No. S-[illegible]/PK.07/2021)	Bayar/Penihil LB s.d. TA 2019 (KVK No. S-[illegible]/PK.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KVK No. S-[illegible]/PK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pertak	-		150.860.646	62.957.476	87.703.170
DPK			150.126.070	62.957.476	87.703.170
PPh Pasal 2					
PPh Pasal 25/29	-		150.126.070	62.957.476	87.168.170
PBB	-	-	1.954.030	-	1.954.030
Bea Jabatan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal Bunga	-				-
Bagian Daerah Pasal Dividen	-	-	1.361.620	-	861.600
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pasal Bunga	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan			72.700		72.100
Biaya Pemungutan Pasal Dividen					-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
OPT	-	-	-	-	
SDA		3.078.661	37.197.808		37.197.026
Migas					
Minyak Bumi 85%	-				-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Mineral	-		24.164.415		24.164.415
Batubara	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	24.164.415	-	24.164.415
Panas Bumi		-	4.692.624		4.692.621
Iuran Eksploitasi					
Iuran Tetap			4.692.621		4.692.621
Provisi Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Perikanan	-	3.078.661	38.650.369	-	38.650.369
CHT		-	-		
PHT2					
PHT4	-	3.078.661	26.593.369	-	38.650.369
Perkebunan	-	-	-	-	-
Grand Total		3.078.661	309.532.264	62.957.476	146.300.778

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Cilegon

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Sampai dengan TA 2020 (KMK No. 31/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (9)	(11)
Pajak	478.105.161.079		448.193.037.909	29.911.723.171	2.975.255
PPh	477.037.853.846		449.429.781.909	27.607.971.937	-
PPh Pasal 21	43.906.771.709		19.969.751.909	24.511.019.805	
PPh Pasal 25/29	3.170.644.241	-	837.825.000	2.332.819.241	
PBB	3.230.656.013	-	368.876.100	2.861.779.913	2.975.255
Bea Balik Nama	1.597.032.902	-	203.020.700	1.394.012.202	
Bagian Daerah Migas	80.660.841		80.410.150	250.691	2.975.255
Bagian Daerah Non Migas	15.767.170			15.767.170	-
Pajak Tidak Pidana Umum	-	-	-	-	
Pajak Tindak Pidana Korupsi	9.729.551	-	1.830.150	7.899.401	
Bagian Pemerintah Pusat					-
Bagian Daerah Secara Langsung	21.913.909.307		9.937.000	876.991.707	-
Hasil Pertambangan Migas	8.868.141	-	7.984.200	-	176.795
Hasil Pertambangan Non Migas	525.597	-	-	525.597	
Hasil Pertambangan Panas Bumi	-				
Hasil Pertambangan Perikanan	376.103		71.100	305.003	-
Hasil Pertambangan Perkebunan	-	-	-	-	
Hasil Pertambangan Kehutanan Lainnya	7.486.457	-	286.705	6.805.557	
CHT	213.510	-		213.510	-
SDA	362.401.287	1.386.696	309.129.903	309.020.501	176.795
Cukai				-	-
Minyak Bumi 85%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Hasil Pengolahan Bersama Migas	-	-			
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Migas			-	-	-
Minerba	376.167.350	-	43.077.925	326.130.855	
Penalti	-	-	-		
Royalti	376.167.350		47.077.925	326.089.855	
Pajak Sarang		1.386.696	19.194.690		21.580.896
Iuran Eksplorasi				-	-
Iuran Tetap		1.386.696	19.193.500	-	21.580.896
Kehutanan Tarif Progresif	-	-	-		
Kelautan	25.814.787		16.287.375	11.487.912	
DR				-	-
LUK		-	-	-	-
PNBP	25.814.787	-	16.027.375	11.487.012	
Perikanan	150.154.070		316.881.200		117.061.020
Grand Total	19.971.855.286	1.386.696	22.394.787.800	20.000.391.074	192.150.971

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tangerang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PMK TA 2018	PMK TA 2019	Kurang (Lebih) Salur TA 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyesuaian Tahun 2018 (KMK No. 9/KM.7/2021)	Sisa Kurang (Lebih) Salur TA 2019 (KMK No. 9/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-	-	2.024.607.507	1.065.108.368	959.499.139
PPh	-	-	2.024.607.507	1.065.108.368	959.499.139
PPh Pasal 21	-	-	1.691.641.291	1.065.108.368	626.532.923
PPh Pasal 23/26	-	-	332.966.216	-	332.966.216
PBB	-	-	-	-	-
Bagi Rata	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pusat Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pasal 25/29	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pasal 26	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Pasal 4(2)	-	-	-	-	-
Bagian Pusat Penerimaan Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pusat Penerimaan Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pusat Penerimaan Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Pusat Penerimaan Perseorangan	-	-	-	-	-
Bagian Pusat Penerimaan Pasal 4(2)	-	-	-	-	-
Bagian Pusat Penerimaan Pasal 26	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
BPHTB	-	5.276.561	21.164.415	-	21.164.415
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Mineral	-	-	21.164.415	-	21.164.415
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	21.164.415	-	21.164.415
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	5.276.561	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-	-	-
Perikanan	-	5.276.561	-	-	-
Cukai Tembakau	-	-	-	-	-
Total	-	5.276.561	2.045.771.922	1.065.108.368	980.663.554

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Tangerang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Alokasi DBH TA 2021	DBH TA 2020	Penyaluran DBH Berdasarkan PMK TA 2021	KB DBH TA 2020 yang belum Disalurkan	LB DBH TA 2020 yang belum Disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3] - [4]	[6] = [4] - [3]
Pajak	106.971.960.194		45.382.033.605	66.382.034.109	2.094.519
PPh	105.556.866.954		47.911.000.105	58.510.917.591	
PPh Pasal 21	98.344.134.117	-	40.251.078.105	58.192.611.771	-
PPh Pasal 25/29	5.111.742.838	-	1.468.535.740	3.451.935.823	-
PBB	2.315.474.437	-	384.020.705	1.058.326.653	2.094.519
Bagi Rata	1.391.960.056		207.020.705	1.270.970.705	
Bagian Daerah Migas	292.984.677		101.000.105		8.094.400
Bagian Daerah Non Migas	-	-			
Bagian Daerah Pesisir Darat	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbatasan		-	-	-	-
Bagian Daerah Pelabuhan					
Bagian Daerah Sebagai Tuan Rumah	314.591.027		9.250.000	305.760.727	
Biaya Pemungutan Migas	5.667.448	-	0.066.020	-	402.352
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pesisir Darat					
Biaya Pemungutan Perbatasan	-				
Biaya Pemungutan Perbatasan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	9.105.217	-	360.000	8.846.647	-
PBB	617.860			617.860	
BPHTB	594.655.187	3.036.191	296.129.900	301.121.907	174.877.316
Migas	-	-	-		-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 3,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi (dalam Rangka Otsus)					
Gas Bumi 15%	-				
Gas Bumi 6,5%	-				
Gas Bumi (dalam Rangka Otsus)	-	-	-	-	-
Minerba	476.187.825	-	8.227.325	308.139.695	-
Landrent	-	-		-	-
Rogohi	370.237.825		18.227.325	328.139.695	
Panas Bumi	-	3.036.000	15.193.000		21.360.250
Iuran Eksplorasi	-	-	-		
Iuran tetap		3.356.096	18.206.602	-	2.583.264
Setoran Tingkat Pemerintah		-	-	-	-
PDRD	27.617.397		16.027.375	11.457.012	
Rokok	-				
PBJT	-	-	-	-	-
Hotel	27.317.497	-	16.027.375	11.457.012	-
Restoran	199.199.990		31.891.000		157.004.025
Grand Total	106.936.804.39	3.036.000	45.901.120.000	60.922.361.016	194.216.901

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Serang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	PMK TA 2018	PMK TA 2019	LKPD TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LKPD TA 2019 (KMK No. 9/KM.7/2021)	Kurang/(Lebih) Bayar DBH TA 2019 (kolom 5=kolom 4-3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=kolom 4-5)
Pajak			20.225.643	20.225.643	-
PPh	-	-	20.225.643	20.225.643	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25 dan 29	-	-	20.225.643	20.225.643	-
PBB					-
Dana Bagi Hasil					-
Bagian Daerah Migas	-			-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-		
Bagian Daerah Perseorangan					
Bagian Daerah Pertambangan					-
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Non Migas					-
Bagian Pemerintah Pasal 21					-
Bagian Pemerintah Perseorangan	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-		
Bagian Pemerintah Sektor Kehutanan					-
CHT				-	-
PBH	-	3.278.661	50.512.942	8.065.792	42.447.150
Migas	-	-	-	-	
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 3,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 15%	-			-	-
Gas Bumi 10,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Silpa/Sisa	-	-	21.164.115		21.164.115
Landreform					
Royalti			21.164.115		21.164.115
Panas Bumi			4.692.621	-	4.692.621
Iuran Tetap (Land Rent)	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	4.692.621	-	4.692.621
Sebesar Bagian Pemerintah					
Kehutanan		3.278.661	21.355.905	8.065.792	13.290.113
DR	-	-	-	-	-
DBH	-	-	-	-	
PSDH		3.278.661	21.355.905	8.065.792	13.290.113
Perikanan					-
Grand Total		3.278.661	70.878.564	28.291.434	42.587.130

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Serang

(dalam rupiah)

URAIAN	PMK Definitif TA 2020	PMK Definitif TA 2020	Penyaluran DBH TA 2021 Berdasarkan PMK No. 27/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang telah dan dapat disalurkan	LB TA 2020 yang telah dan dapat disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	86.666.684.832		1.170.630.200	29.290.929.144	3.527.529
PPh	32.751.174.076	-	1.351.644.900	27.350.530.776	-
PPh Pasal 21	22.204.280.736	-	1.018.000.636	2.247.878.536	-
PPh Pasal 25/29	1.702.253.410	-	382.773.200	1.103.117.340	-
PPN	1.036.276.020		297.610.000	1.943.114.532	2.527.532
Pajak Rokok	1.501.959.950		260.089.720	1.128.210.295	-
Bagian Daerah Migas	115.7 – 251	-	1.9.094.920	-	9.350.042
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	
Bagian Daerah Dana Bagi					
Bagian Daerah Perbatasan					
Bagian Daerah Pajak Tertentu	-				-
Bagian Daerah Sebagai Tuanrya	315.599.007	-	3.604.320	306.96– 727	-
Biaya Pemungutan Migas	3.8[illegible].722	-	3.073.050	-	137.179
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Tanah	-				-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perbendaharaan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.186.241		2[illegible].800	6.905.817	
CHT	219.5[illegible]6	-		217.5[illegible]7	-
SDA	360.845.187	3.536.696	295.179.901	339.626.907	179.274.816
Migas		-	-	-	
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Kehutanan	376.117.520		18.097.925	328.139.[illegible]17	
Pertambangan					
Pungutan	375.187.820		18.027.920	328.139.060	
Panas Bumi	-	3.186.696	18.[illegible].600	-	21.530.794
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap		3.[illegible].[illegible]0	18.153.650		21.020.206
Perikanan Pungutan Pengambilan					
Pertanian	97.5[illegible].067	-	13.027.370	11.[illegible].[illegible]	-
DR	-	-	-	-	-
IHPB					
PSDH	97.[illegible].067		16.027.370	11.187.[illegible]	
Perikanan	165.185.980		210.251.000		157.[illegible].030
Jumlah Total	30.628.334.003	3.536.696	12.[illegible].[illegible]0	94.620.636.851	182.761.838

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tanggerang Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	LB s.d TA 2019	KB s.d TA 2019 (LKPA No. 85/LKPA/07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (LKPA No. 3/LKPA/2021)	Sisa KB s.d TA 2019 (LKPA No. 3/LKPA/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	-	-	-
PPh		-	-	-	-
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					
PBB	-				
Bagi Hasil	-	-			-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 21					
Bagian Daerah PPh Perdagangan	-				
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Migas					
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-	-			-
Bagian Pemerintah Pusat Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan			-	-	
Bagian Pemerintah Perdagangan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-				
Cukai	-	-	-	-	-
SDA		3.078.661	72.737.673	36.566.837	36.170.836
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%	-				-
Minyak Bumi Bagian Pemerintah 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pertambangan			24.104.117		24.104.117
Landrent	-				-
Royalti	-	-	24.104.117	-	24.104.117
Panas Bumi	-	-	4.632.624	-	4.632.624
Iuran Produksi		-	-	-	-
Iuran Tetap			4.632.624		4.632.624
Pajak Bagian Pemerintah	-				
Kehutanan	-	3.078.661	40.385.624	36.566.837	3.818.787
DR	-	-	-	-	-
IHPH					
PSDH	-	3.078.661	40.385.624	36.566.837	3.818.787
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	3.078.661	72.737.673	36.566.837	36.170.836

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Tangerang Selatan

(dalam rupiah)

URAIAN (1)	APBD TA 2020 (2)	31 Desember TA 2020 (3)	Penyaluran TA 2020 sesuai PMK No. 212/PMK.07/2020 (4)	KB TA 2020 yang belum disalurkan (5)=(2)-(3)	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan (6)=(3)-(4)
Pajak	29.790.410.608	-	29.347.353.000	67.448.532.711	6.061.392
PPh	94.383.936.674	-	28.857.080.000	65.526.006.671	-
PPh Pasal 21	86.791.083.775	-	26.015.733.200	60.777.341.975	-
PPh Pasal 25/29	7.592.852.899		1.073.277.800	3.020.581.046	-
PBB	2.729.373.934		190.623.200	1.939.778.163	5.06 .915
Bea Perol	1.991.959.993		258.669.000	1.726.970.397	-
Bagian Daerah Migas	200.362.500	-	209.1 .100	-	8.796.720
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasca Bersama					-
Bagian Daerah Perbatubaraan					-
Bagian Daerah Pajak Panas Bumi	-			-	
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	2.5 346.627	-	8.705.000	206.753.027	
Biaya Pemungutan Migas	2.707.077	-	6.0 .300		272.023
Biaya Pemungutan Gas Bumi			-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi			-	-	-
Biaya Pemungutan Perbatubaraan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.178.211		293.130	6.95 .117	-
CHT	1.819.565	-	-	516.565	-
SDA	88.661.187	3.386.695	309.179.000	530.620.907	179.274.31
Migas	-	-			-
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-		-	-	-
Gas Bumi 1,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			
Pertambangan	3 .1 .820		5.027.925	328.139.995	-
Kehutanan				-	-
Panas Bumi	375.187.820		45.027.925	2 .139.845	-
Iuran Tetap	-	3.366.695	8. 5.600	-	21.5 .295
Iuran Produksi	-	-	-		
Iuran Tetap		3.366.695	18.723.600		21.5 .295
Perikanan					-
Pertambangan	2 .5 .367		5.027.575	1 .487.5 2	
PDP	-		-		
BHPH					-
BHPL	27.317.367		11.925.375	1.1 .7.2	-
Perikanan	165.135.980		216.681.000	-	157.654.020
Grand Total	90.452.304.995	3.386.695	29.747.363.000	67.778. 50.617	185.3 .1.311

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Kepulauan Belitung

(dalam rupiah)

URAIAN [1]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			624.839.241	624.839.241	
PPh			624.839.241	624.839.241	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29			624.839.241	624.839.241	
PBB					
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Penghasil Lainnya					
Bagian Daerah Penghasil Kerja Sama					
Bagian Daerah Selain Penghasil					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Bumi					
Biaya Pemungutan Pendapatan					
Biaya Pemungutan Perpajakan					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
CHT					
BHA		5.993.300	17.142.437.026	151.867.482	15.990.569.544
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Kehutanan			16.029.833.221	1.191.497.462	15.838.335.759
Landreform			16.029.833.221	1.191.497.462	15.838.335.759
Royalti					
Perikanan					
Iuran Tetap					
Iuran Eksploitasi					
Setoran Bagian Pemerintah					
Pertambangan		3.192.242	593.295.763		593.089.810
PNBP		2.800.000	467.920.000		468.013.650
IUPHH					
PSDH		391.992	91.156.813		91.459.815
Perikanan					
Grand Total		8.992.242	17.767.257.027	1.976.726.703	15.991.540.324

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Bangka Belitung

(dalam ribuan rupiah)

Jenis DBH	KB Tersalur TA 2020	LB Tersalur TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	LB TA 2020 yang Belum Disalurkan	Est PA 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Pajak	92.035.566.404		8.375.902.450	20.111.207.917	7.853.913
PPh	4.035.057.625		6.617.342.000	3.015.675.023	-
PPh Pasal 21	1.418.760.017	-	3.593.672.000	5.854.381.017	
PPh Pasal 22/23	3.454.857.625	-	123.801.000	3.067.000.000	
PBB	27.112.309.025	-	2.916.969.892	27.227.129.011	7.853.913
Jasa Kota	-		-	-	
Pegisan Daerah Migas	2.669.1.030		274.183.100	-	1.552.010
Pegisan Daerah Non Migas	26.602.800.458	-	12.450.770.000	13.241.800.435	-
Pegisan Daerah Pasca Tambang		-	-		
Pegisan Daerah Perbatasan	34.1.301.960		29.037.500	312.617.283	
Pegisan Daerah Otonomi Khusus	4.005.341.164		1.141.242.120	6.668.000.029	-
Pegisan Daerah Bekas Tambang	577.20.562		15.100.000	561.320.763	-
Biaya Pengumpulan Migas	3.561.1.07	-	6.210.150		297.502
Biaya Pengumpulan Non Migas	577.726.029		46.362.464	531.272.328	-
Biaya Pengumpulan Pasca Tambang	-		-	-	-
Biaya Pengumpulan Pajak	2.235.000		1.209.600	3.026.200	-
Biaya Pengumpulan Pegisan	209.308.750	-	30.070.000	158.028.150	-
Biaya Pengumpulan Bekas Tambang	10.7.3.750	-	42.600	10.010.040	-
DAK	3.451		-	3.48	-
SDA	34.952.4-.209	3.990.277.963	7.361.4 [illegible],830	28.207.34-.250	5.094.415.459
Migas	106.385.701	-	6.[illegible].130	1.[illegible].391	-
Migas Bagi Hasil 15%	1.37.[illegible].841	-	61.[illegible].500	1.092.2[illegible].319	
Migas Bagi Hasil 3,5%	24.[illegible].561		1.[illegible].960	27.137.561	
Migas Bagi Hasil dari Bagian Pemerintah	-		-	-	-
Gas Alam 70%	-		-	-	-
Gas Alam 30%		-			-
Gas Alam Bagian Negara Dikuasai		-			-
Minerba	82.037.[illegible].032	3.[illegible].186.084	8.221.[illegible].975	27.[illegible].701.057	6.866.786.454
Landaan		8.[illegible].186.084	1.[illegible].049.420	-	6.[illegible].230.034
Royalti	82.[illegible].[illegible].552		6.[illegible].052.071	27.[illegible].61.857	
Pajak Lain	-				-
Bunga Pinjaman	-	-			-
Denda Pinjaman		-	-	-	-
Kehutanan	116.280.736	2.854.031	55.[illegible].275	63.[illegible].[illegible]	16.152.551
PSDH	1.[illegible].280.776	-	50.[illegible].[illegible]	66.150.[illegible]	-
DR		-			-
PSDH		2.784.031	13.289.450	-	16.[illegible].501
Perikanan	-			-	
Jumlah Total	76.[illegible].[illegible].[illegible]	8.[illegible].[illegible].[illegible]	17.327.441.250	61.474.552.[illegible]	6.[illegible].[illegible].746

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bangkalan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR	DBH s.d TA 2018 (PMK No. 22/PMK.07/2021)	Penyesuaian DBH s.d TA 2019 (KEP. No. 07/KM.7/2021)	Jlah DBH s.d TA 2019 (KEP. No. 07/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	625.565.947	625.565.947	-
PPh	-	-	501.799.725	501.799.725	-
PPh Pasal 21		-	-	-	
PPh Pasal 25/29			501.799.725	501.799.725	
PPN	-		23.765.222	23.765.222	
Bea Perolehan	-				
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasca Tambang			-		
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pusat Migas			15.765.891	15.765.891	
Bagian Pemerintah Non Migas	-				
Bagian Pemerintah Pasca Tambang	-	-	-		-
Bagian Pemerintah Pertambangan		-	7.819.751	7.819.751	-
Bagian Pemerintah Kehutanan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					
Cukai	-	-	-	-	-
SDA	-	656.397	7.520.633.618	277.056.444	7.233.576.457
Migas		-	139.035.217	139.035.217	
Minyak Bumi 15%			135.469.706	135.469.706	
Minyak Bumi 0,5%			3.565.511	3.565.511	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%		-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-	-	-
Pertambangan			7.381.598.401	137.021.202	7.518.619.603
Kehutanan	-		2.815.807.150	137.021.202	2.778.785.948
Kepariwisataan	-		4.565.791.251		4.565.833.655
Perikanan	-	-	-	-	-
Jenis Produksi		-	-	-	-
Tenaga Kerja					
Pungutan Pajak Daerah Lainnya					
Kehutanan	-	656.397	12.662		12.662
PPh	-	-	-	-	-
PPh 21			-		-
PBHTB		656.397	12.662		12.662
Pertambangan	-				
Grand Total	-	656.397	8.036.417.363	802.821.691	7.233.576.457

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bungku

(dalam rupiah)

JENIS DBH	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)
Pajak	28.794.306.840	-	24.464.839.000	24.930.577.000	5.313.243
PPh	3.086.340.761	-	1.335.667.000	1.750.673.761	-
PPh Pasal 21	2.057.823.105		1.276.990.000	1.051.032.761	
PPh Pasal 25/29	570.925.457		58.677.000	738.700.457	
PBB	25.635.190.079		23.128.972.000	23.179.903.419	5.313.243
Bea Perolehan	1.961.039.998	-	203.070.000	757.970.998	-
Bagian Daerah Migas	141.337.051	-	136.410.795		4.973.736
Bagian Daerah Non Migas	18.924.013.393		1.540.111.000	16.137.807.088	
Bagian Daerah Pasca Bea Perol	-		-	-	
Bagian Daerah Pertambangan	142.142.056		41.160.000	100.987.556	
Bagian Daerah Perkebunan	4.282.856.333	-	651.300.000	3.631.556.333	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	215.259.307	-	6.000.000	209.091.701	
Biaya Pemungutan Migas	1.961.399		5.290.900		331.501
Biaya Pemungutan Non Migas	626.673.166		53.784.300	510.888.866	-
Biaya Pemungutan Pasca Bea		-			-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	3.139.917	-	1.003.800	3.456.117	-
Biaya Pemungutan PPh Lainnya	190.320.024		42.417.000	141.900.024	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.466.094		288.800	1.167.274	-
PBB	331	-	-	331	-
BHTB	26.992.720.003	371.353.145	1.027.170.000	16.932.706.318	1.056.64 [illegible]
Migas	241.790.394		19.123.500	322.870.214	
Minyak Bumi 15%	305.584.954		18.512.500	312.072.454	
Minyak Bumi 0,5%	15.807.302		611.000	10.297.890	-
Minyak Bumi dalam Kondisi Tertentu		-			-
Gas Bumi 30%		-			-
Gas Bumi 0,5%		-	-		
Gas Bumi dalam Kondisi Tertentu	-		-		
Panas Bumi	22.419.054.414	372.053.115	41.553.650	16.005.179.86-	6.727.215
Lainnya	-	372.053.115	478.963.000	-	6.727.215
Pajak Daerah	22.419.054.414		5.888.913.750	16.635.758.661	-
Pajak Hotel		-			-
Pajak Restoran		-	-		-
Pajak Hiburan	-		-	-	
Pajak Reklame	-		-	-	
Pajak Penerangan Jalan	17.075.763	-	6.420.125	52.7.828	-
Pajak Parkir		-			-
Pajak Air Tanah	-		-		
Pajak Sarang Burung Walet	1.648.788		6.426.425	9.211.363	
Pajak BBNKB	150.166.090		310.851.000	-	157.684.090
Grand Total	41.663.423.090	371.353.145	31.027.002.479	41.132.775.375	10.215.826

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Belitung

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2018	Kurang Bayar TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			6.133.177.807	1.306.895.241	4.826.282.566
PPh	-		1.746.415.166		1.746.415.166
PPh Pasal 21	-		381.791.472	-	381.791.472
PPh Pasal 25/29	-	-	1.364.623.694	-	1.364.623.694
PBB		-	4.386.762.701	1.306.895.241	3.079.867.460
Dana Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-		4.386.762.701	1.306.895.241	3.079.867.460
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan		-			
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan	-				-
Bagian Daerah Pertambangan Migas	-	-	7.620.759	-	7.620.759
Bagian Daerah Pertambangan Non Migas		-	224.616.677	-	224.616.677
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan Perikanan	-				-
Bagian Daerah Pertambangan Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Sektor Lainnya		-	-	-	-
DBH CHT					
DBH SDA		374.707	8.915.777.544		8.915.777.544
Migas	-	-	104.429.366	-	104.429.366
Minyak Bumi 15%	-	-	101.033.643	-	101.033.643
Minyak Bumi 0,5%	-	-	3.395.903	-	3.395.903
Minyak Bumi sebesar Jangka Waktu					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-				-
Gas Bumi sebesar Jangka Waktu	-	-	-	-	-
Nonmigas	-	-	8.750.760.759	-	8.750.760.759
Landrent	-	-	2.084.682.856	-	2.084.682.856
Royalti			6.666.077.903		6.666.077.903
Pungutan Pusat					
Iuran Tetap (Landrent)	-		-	-	-
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		374.707	60.587.479		60.587.479
IHPH					
PSDH	-	-	-	-	-
DBHDR	-	374.707	60.587.479	-	60.587.479
Perimbangan					
Grand Total		374.707	15.056.939.111	1.306.895.241	13.750.043.870

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Belitung

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran DBH PMK Sementara TA 2020 (KMA No. 319/KMK.07/2021)	KB TA 2020 yang telah diselesaikan	LB TA 2020 yang telah diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
Tanah	29.145.015.067		2.900.094.000	16.979.667.496	35.715.503
PPh	2.854.306.579		1.157.300.000	567.006.579	-
PPh Pasal 21	2.357.662.857	-	1.234.264.000	328.378.224	
PPh Pasal 22/23	66.612.755	-	123.036.000	339.627.157	
PBB	10.921.710.450		1.445.794.400	15.312.601.042	35.715.503
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.391.920.096		265.650.000	1.126.270.096	
Pungutan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	99.755.349		99.177.000	-	35.447.251
Pungutan Sektor Pertambangan Minyak Bumi	5.858.111.671	-	300.300.000	9.432.305.371	
Pungutan Sektor Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	
Pungutan Sektor Kehutanan					
Pungutan Sektor Perikanan	1.171.931.519		1.016.100.000	3.199.611.119	-
Pungutan Sektor Pertambangan Panas Bumi	214.289.407	-	9.138.000	925.750.407	-
Cukai Hasil Tembakau	2.305.923	-	5.281.200	-	1.270.271
Pajak Rokok	231.411.325		7.105.300	327.149.325	
Dana Reklamasi Pasca Tambang					-
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Pusat Lainnya	196.506.525	-	5.710.700	158.737.325	
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	7.161.621	-	317.100	7.161.521	
DBH	535			535	-
Total	1.356.760.734	17.764.000	2.956.764.975	3.724.436.704	184.229.345
Migas	5.496.644	-	19.223.500	309.370.854	
Minyak Bumi (85%)	320.584.634	-	18.312.500	312.072.454	
Minyak Bumi 0,5%	10.938.890		611.000	10.297.890	
Minyak Bumi dalam Wilayah Offshore					-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Wilayah Offshore		-	-	-	-
Minerba	1.063.074.010	-	2.631.300.000	8.111.005.206	
Landrent	313.821.307		48.508.025	262.262.852	
Royalti	10.729.252.603		2.667.718.125	8.111.905.478	
Panas Bumi				-	-
Biaya Produksi	-	-	-	-	-
Biaya Lelang	-	-	-		
Subsidi Bagian Pemerintah					
Kehutanan		13.721.000	9.771.925		35.599.345
IHPH		-	-	-	-
PSDH	-	-	-	-	
DBHR		13.764.000	9.771.925		20.535.923
Perikanan	129.140.948		310.581.900		127.693.422
Grand Total	1.491.902.295	17.764.000	5.799.814.975	257.510.630	220.344.867

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pangkal Pinang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LP s.d TA 20.0 (PSAK No. 25/PSAK.07/2021)	Penyelesaian s.d TA 2019 (PMK No. 210/PMK.07/2020)	S s.d TA s.d TA 2019 (PMK No. 210/PMK.07/2020)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6=(4)-(5)]
Pusat			2.617.508.541	914.53 .505	1.402.976.946
PPh	-	-	2.517.508.541	914.53 .505	1.602.0 .946
PPh Pasal 2	-	-	428.794.322	428.794.322	
PPh Pasal 21/26	-	-	2.158.714.2 8	365.737.273	1.902.9 .945
PBB					-
Bea Ate					-
Bagian Daerah Migas			-	-	
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Perikanan					-
Bagian Daerah Kehutanan				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Migas	-	-	-		
Bagian Pemerintah Non Migas					-
Bagian Pemerintah Panas Bumi				-	-
Bagian Pemerintah Perikanan	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Kehutanan	-	-			
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					-
Cukai				-	-
SDA		97.201	630.630.109	-	630.020.108
Migas	-	-	84.433.268		104.429.290
Migas Bagian 15%			97.303.303		101.080.097
Migas Jasa 0,5%			3.305.901		3.305.902
Migas Jasa dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%			-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	-	-	7 .601.238		110.215.238
Landrent			6.397.300		6.397.301
Royalti			708.617.938		468.617.938
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Eksplorasi	-	-	-	-	
Iuran Tetap			-	-	
Setoran Bagian Pemerintah					-
Kehutanan		97.201	11.485.905	-	1.485.905
PSDH	-	-	-	-	
DBHI	-	-	-		
PSDH		97.201	11.485.905		11.485.905
Perikanan					-
Grand Total		97.201	3.048.436.750	9 .53 .505	3. 33.909.055

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Pangkal Pinang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Setelahnya TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(9)	(10)=(2)-(9)	(11)
Pajak	19.834.831.370	20.192.807	2.208.257.600	7.626.582.555	38.178.674
PPh	9.512.425.069		2.927.617.000	6.584.807.069	
PPh Pasal 21	5.733.591.691		2.592.094.000	3.141.497.691	
PPh Pasal 22, 23	778.833.307	-	335.523.000	443.310.307	-
PBB	2.305.100.441	20.192.807	280.640.600	2.045.652.648	38.178.674
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.991.976.009	-	265.680.700	1.726.295.309	-
Bagian Daerah Migas	91.268.798		92.257.620		3.306.802
Bagian Daerah Non Migas	-	19.512.001	11.017.480		31.683.751
Bagian Daerah Pajak Rusak	-	-	-		-
Bagian Daerah Perolehan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perseorangan			-	-	
Bagian Daerah Pajak Lainnya	315.199.007	-	8.007.820	306.991.187	
Bagian Pemerintah Migas	2.490.690	-	3.147.220		168.530
Bagian Pemerintah Non Migas	-	678.795	5.340.600	-	1.497.793
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya		-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat Lainnya	-				-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	7.486.224	-	196.560	7.287.664	-
CHT	185	-	-	585	
BHA	9.227.976.921	9.157.430	2.020.386.200	7.207.721.306	168.018.245
Migas	94.498.644		19.123.590	322.510.371	
Minyak Bumi PPh	530.534.054	-	15.513.500	3.120.412.451	-
Minyak Bumi PBB	10.918.610	-	61.202	10.857.896	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi PPh					
Gas Bumi PBB					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Mineral	8.668.708.852	9.157.430	1.980.948.600	6.100.897.027	10.194.245
Landrent	-	9.157.430	1.936.775	-	10.394.245
Royalti	8.668.708.852	-	1.787.711.825	6.700.997.027	-
Panas Bumi					
Iuran Tetap	-	-			
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-	-	-
Kehutanan	18.186.135	-	1.453.120	14.794.335	-
PSDH	-				
DR	15.587.135	-	4.432.160	54.935	-
Perikanan	2.599.000	-	316.581.060	-	157.654.020
Grand Total	20.220.905.371	20.349.374	5.537.073.208	7.907.053.749	207.266.019

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bengkalis Sebagian

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 28/PMK.07/2020)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	4.574.604.085	4.574.604.085	
PPh			141.392.733	141.392.733	
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 23/26	-		141.392.733	141.392.733	-
BPHTB	-	-	4.433.211.352	4.433.211.352	-
Cukai Ada	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas			4.433.211.352	4.433.211.352	
Bagian Daerah Dana Bagi Hasil	-				-
Bagian Daerah Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Rokok		-	-	-	
Bagian Daerah Sisa Lebih Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat Migas	-		166.250.124	166.250.124	-
Bagian Pemerintah Pusat Non Migas	-	-	210.157.267	210.157.267	-
Bagian Pemerintah Pusat Dana Reboisasi		-	-	-	
Bagian Pemerintah Pusat Pertambangan					
Bagian Pemerintah Pusat Kehutanan	-				-
Bagian Pemerintah Pusat Sisa Lebih Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai	-	-	-	-	-
SDA	213.851		22.020.335.071	747.360.135	21.272.974.936
Migas					
Minyak Bumi 15%	-			-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%			-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	-	-	26.009.350.009	744.030.455	25.265.319.554
Iuran Tetap	-	-	7.497.560.719	744.030.455	6.753.530.264
Royalti	-	-	18.511.789.290	-	18.511.789.290
Panas Bumi			-		
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	-			-	
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		213.851	10.923.809	-	10.923.809
DR					
PSDH					
Reboisasi	-	213.85	10.923.809	-	10.923.809
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total		213.851	26.594.073.748	5.319.092.220	21.274.979.189

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bangka Selatan

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB TA 2021 Semesta TA 2021 (KMK No. 276/KMK.07/2021)	TRANSFER 2020 yang telah diselesaikan	LB TA 2020 yang telah diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	21.276.775.027	-	2.270.204.300	18.006.710.425	5.126.636
PPh	1.753.812.097	-	213.[illegible].702	1.031.[illegible].331	-
PPh Pasal 21	1.353.104.302	-	675.[illegible].402	678.0[illegible].900	
PPh Pasal 25/29	366.117.770		37.0[illegible].100	343.097.279	
PBB	19.540.[illegible].311		1.361.022.100	17.[illegible].[illegible].609	5.126.636
Bagi Rata	961.959.938		260.[illegible].700	1.[illegible].[illegible].295	
Bagian Daerah Migas	143.933.542	-	15[illegible].[illegible].400	-	4.905.868
Bagian Daerah Non Migas	15.[illegible].[illegible].453	-	8.[illegible].[illegible].700	14.587.[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Penghasil					
Bagian Daerah Penghasil Lainnya					
Bagian Daerah Penghasil	233.[illegible].297	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Bagian Daerah Bukan Penghasil	233.[illegible].027	-	[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Biaya Pemungutan Migas	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]
Biaya Pemungutan Non Migas	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Perusahaan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perseorangan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Biaya Pemungutan Bukan Penghasil	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
CHT	555	-	-	555	-
SDA	501.[illegible].[illegible]	1.864.627.309	4.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	5.725.617.640
Migas	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Minyak Bumi (15%)	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Minyak Bumi (0,5%)	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible]	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi (30%)	-	-	-	-	-
Gas Bumi (0,5%)		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Nonmigas		1.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Kehutanan	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Royalti	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Provisi Rutin	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap					
Setoran Pegawai Dalam Negeri					
Perikanan	[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
DR	-	-	-	-	-
LLPB			-		
PHT	[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Pertambangan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible]
Jumlah	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bangka Tengah

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KRITA 2019	KRITA 2019	DBH TA 2019 (PMK No. 05/PMK.07/2021)	Penyesuaian DBH TA 2019 (KMK No. 37/KM.7/2021)	Hasil DBH TA 2019 (KMK No. 37/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak			5.012.294.390	2.001.620.926	3.990.673.463
PPh	-		659.952.344	-	659.952.344
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	659.952.344	-	659.952.344
PBB		-	7.515.467.032	1.001.621.928	6.521.842.127
Cukai Hasil Tembakau					
Bagian Daerah Migas			976.672.000	976.672.000	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	6.6-8.641.502	695.637.295	4.965.035.207
Bagian Daerah Pertambangan Batubara	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			81.231.100		81.231.102
Bagian Daerah Pertambangan Minyak			99.1.08.8.860		864.063.858
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi	-	-		-	-
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	37.713.206	-	37.713.206
Bagian Daerah Perikanan			196.116.502		196.116.502
Bagian Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara					
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-		3.125.630	-	3.125.630
Bagian Daerah Pertambangan Minyak	-	-	42.874.835	-	42.874.830
Bagian Daerah Pertambangan Gas Bumi		-	-		-
PPh					-
PBB	-	197.301	2.300.981.861		2.300.981.861
Migas	-	-	104.429.966	-	04.429.966
Minyak Bumi 15%	-	-	101.053.648	-	101.202.303
Minyak Bumi 0,5%		-	3.337.918		3.337.903
Minyak Bumi Sebelum Berlakunya Undang-Undang					
Gas Bumi 30%	-				-
Gas Bumi 0,5%	-		-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Pelaksanaan Otsus	-	-	-	-	-
Sumber	-	-	2.101.23 .624	-	2.101.821.601
Landrent		-	1.835.370.723		1.835.370.723
Royalti			266.260.971		266.260.971
Pajak Lain	-		-		-
Iuran Perikanan	-	-	-	-	-
Iuran lainnya	-	-	-	-	-
Sebelum Undang-Undang		-			
Kehutanan		197.301	11.312.372		11.312.370
DR	-		-		-
PHPB	-	-	-	-	-
PSDH		197.301	11.312.372		11.312.370
Pertambangan			83.183.741		83.182.771
Grand Total	-	197.301	19.313.279.277	3.001.621.928	9.294.894.349

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bangka Tengah

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA Tahun TA 2021	LB Tahun TA 2020	Penyaluran KB DBH Tahun Anggaran TA 2021 (KMK No. 1/KM.7/2021)	KB TA 2021 yang belum Terrealisasi	LB TA 2020 yang belum Terrealisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Total	29.101.922.078		2.137.470.789	27.021.991.375	1.418.197
PPh	3.434.061.101		954.037.060	1.175.138.111	
PPh Pasal 21	2.001.666.320	-	907.062.630	1.091.103.690	-
PPh Pasal 22 & 26	481.357.781	-	90.944.430	390.413.351	-
PBB	26.722.902.839	-	148.539.560	25.876.768.864	4.426.197
Pajak Rokok	1.991.308.998	-	265.690.760	1.720.275.238	
Bagian Daerah Migas	123.427.961		123.617.650		1.245.215
Bagian Daerah Non Migas	2.315.035.165		272.713.450	20.636.206.260	-
Bagian Daerah Pasca Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	577.070.396	-	31.975.420	525.694.961	-
Bagian Daerah Perikanan	1.660.130.141		217.651.220	1.413.725.046	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	515.596.200		8.397.020	276.991.107	
Bunga Pengusahaan Migas	4.205.5[illegible]	-	[illegible]	-	98.[illegible]
Bunga Pengusahaan Non Migas	700.576.185	-	16.879.520	723.490.588	-
Bunga Pengusahaan Pasca Bumi					
Bunga Pengusahaan Pertambangan	20.917.503		850.400	20.067.103	
Bunga Pengusahaan Perikanan	74.705.133	-	5.545.300	65.057.533	-
Bunga Pengusahaan Sektor Lainnya	7.180.021	-	297.300	7.187.724	-
DTH	1.015		-	1.015	
SDA	2.943.842.519		300.970.300	3.021.711.189	1.071.020
Migas	84.493.64[illegible]	-	15.123.500	342.370.371	-
Sumber Daya Air	820.584.084	-	18.513.500	3.[illegible]2.454	-
Sumber Daya Alam	10.[illegible]	-	61.[illegible]	2.257.890	-
Migas Bagi Hasil Dalam Jumlah Utama					
Cukai Hasil Tembakau					
Cukai Hasil Tembakau	-				
Cukai Hasil Tembakau Bagian Daerah	-	-			-
Minerba	5.[illegible]37.769.421	-	2.759.310.025	4.696.457.360	-
Panas Bumi	208.633.081	-	150.413.580	58.221.751	-
Dana Reboisasi	251.127.224	-	2.382.896.025	4.[illegible]7.280.641	
Dana Otsus					
Tunjangan Profesi	-				
Dana Otsus	-	-	-	-	-
Tambahan Dana Otsus		-	-	-	-
Dana Tambahan Infrastruktur	5.[illegible]99.[illegible]		[illegible]58.[illegible]	918.768	
DAK	-				
DAK Fisik	-	-			-
DAK Non Fisik	5.[illegible]99.[illegible]	-	4[illegible]82.[illegible]	918.768	-
Dana Desa	1.[illegible]80.[illegible]		310.281.[illegible]	-	1.[illegible]97.[illegible]
Grand Total	37.[illegible]96.[illegible]		3.[illegible]71.[illegible]	32.[illegible]13.[illegible]	102.[illegible]17

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bangka Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (SMS No. 85/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (SMS No. 2/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (SMS No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak			13.5xx.142.205	2.8xx.xxx.xx2	10.6xx.xxx.xx3
PPh			609.xx.xx.xxx		609.xx2.xxx
PPh Pasal 2	-		616.xxx.xx2		616.xxx.xx2
PPh Pasal 26/26	-	-	190.xxx.xxx	-	190.xxx.xxx
PBB	-	-	12.xxx.xxx.xxx	2.xxx.xxx.xx2	9.xx.xxx.xxx
Dana Bagi Hasil		-	-	-	
Bagian Daerah Hasil Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-		9.xxx.xxx.xxx	2.xxx.xxx.xxx	7.xxx.xxx.xxx
Bagian 26/26 Pasal 4 Ayat 2	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan			2.xxx.xxx.xxx		2.xxx.xxx.xxx
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas	-	-	xx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	xxx.xxx.xxx	-	xxx.xxx.xxx
Bagian Pemerintah Pasal 4 Ayat 2			-		
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Bagian Pemerintah Perkebunan	-	-	xxx.xxx.xxx	-	xxx.xxx.xxx
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
PPN		-	-	-	-
PDRA		261.xxx	15.xxx.xxx.xxx		15.xxx.xxx.xxx
Migas	-		1xx.xxx.xxx		1xx.xxx.xxx
Minyak Bumi 15%	-	-	1xx.xxx.xxx	-	1xx.xxx.xxx
Minyak Bumi 0,5%	-	-	x.xxx.xxx	-	x.xxx.xxx
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Pertambangan	-	-	14.xxx.xxx.xxx	-	14.xxx.xxx.xxx
Kehutanan	-	-	4.xxx.xxx.xxx	-	4.xxx.xxx.xxx
Perikanan		-	10.xxx.xxx.xxx	-	10.xxx.xxx.xxx
Pajak Lainnya					
Bunga Deposito					
Jasa Giro	-	-		-	
Denda Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
Kehutanan		261.xxx	10.xxx.xxx		10.xxx.xxx
DR					
DTPT	-	-			
PSDH	-	261.xxx	10.xxx.xxx	-	10.xxx.xxx
Perikanan			1xx.xxx.xxx	-	1xx.xxx.xxx
Grand Total		261.xxx	28.xxx.xxx.xxx	2.xxx.xxx.xxx	25.xxx.xxx.xxx

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bangka Barat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KU Defisit TA 2020	LB Defisit TA 2020	Penyaluran DBH DBH Sebelum PMK No 67/PMK.07/2021	DBH TA 2020 yang telah dialokasikan	DBH 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Dajak	17.3[illegible]19.5.955	-	4.559.329,00	17.267.119.[illegible]12	4.559.288
PPh	2.044.041.241	-	1.235.176.400	8.[illegible]8.856.036	-
PPh Pasal 21	1.682.667.057	-	1.179.654.000	503.023.537	
PPh Pasal 25/29	361.373.[illegible]19	-	45.520.400	31[illegible]3.636.619	
PPh	15.[illegible]61.[illegible]79.614		3.[illegible]3.110.700	12.[illegible]38.[illegible]52.[illegible]12	4.562.288
Pajak Rokok	1.591.[illegible]64.986		265.599.700	1.[illegible]25.[illegible]70.286	-
Bagian Daerah Migas	138.695.943	-	130.946.200	-	4.343.152
Bagian Daerah Non Migas	5.806.027.258	-	1.302.391.720	7.606.857.086	
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan	241.[illegible]96.227			241.[illegible]96.227	
Bagian Daerah Kehutanan	5.[illegible]02.426.891	-	917.[illegible]72.250	2.[illegible]08.[illegible]55.641	-
Bagian Daerah Perikanan	216.163.307	-	6.178.200	207.903.407	
Biaya Pemungutan Migas	1.[illegible]72.997		1.[illegible]96.000		205.[illegible]00
Biaya Pemungutan Non Migas	103.111.203		36.272.050	237.[illegible]36.050	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-			-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	18.231.716	-	-	18.231.716	
Biaya Pemungutan Perikanan	135.[illegible]72.560		10.[illegible]77.700	92.[illegible]35.166	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.[illegible]06.921		243.800	7.[illegible]22.[illegible]21	-
CHT	535		-	[illegible]35	-
PDA	10.360.[illegible]27.[illegible]33	2.374.917.[illegible]65	3.535.027.650	9.458.[illegible]66.947	3.[illegible]1.[illegible]734.810
Migas	547.403.824	-	[illegible]0.[illegible]25.[illegible]05	322.[illegible]70.341	
Minyak Bumi 15%	330.[illegible]84.034		18.[illegible]12.500	312.[illegible]72.[illegible]41	
Minyak Bumi 3,5%	10.[illegible]08.690		611.[illegible]00	10.297.690	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	9.[illegible]51.[illegible]56.[illegible]28	2.[illegible]3.[illegible]97.463	3.[illegible]19.[illegible]38.[illegible]15	7.[illegible]6.[illegible]96.[illegible]03	2.[illegible]56.[illegible]10.[illegible]15
Landreas		2.262.[illegible]00.[illegible]00	372.[illegible]92.750		2.[illegible]89.[illegible]10.[illegible]15
Royalti	4.[illegible]94.[illegible]95.[illegible]28		3.327.[illegible]09.[illegible]15	7.[illegible]36.[illegible]99.[illegible]00	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran Tetap			-		
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		[illegible]10.[illegible]00	[illegible].[illegible]28.[illegible]75	-	[illegible].[illegible]90.[illegible]75
PSDH			-	-	-
IHPH			-		
PSDH		[illegible].[illegible]10.[illegible]09	[illegible].[illegible]26.[illegible]75		[illegible].[illegible]03.[illegible]19
Perikanan	159.[illegible]06.[illegible]60		[illegible]0.[illegible]6[illegible].[illegible]00		[illegible]57.[illegible]94.[illegible]00
Grand Total	28.[illegible]73.[illegible]93.[illegible]07	2.374.917.[illegible]65	3.[illegible]34.[illegible]56.[illegible]50	20.7[illegible].[illegible]5.[illegible]35.[illegible]46[illegible]	3.[illegible]2.[illegible]87.[illegible]68

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Belitung Timur

(dalam rupiah)

URAIAN 2021	KB TA 2019	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	2.140.418.368	924.260.125	1.205.910.243
PPh	-	-	724.602.509		724.602.509
PPh Pasal 21			478.085.280		478.085.280
PPh Pasal 25/29			246.520.229		246.520.229
PBB			1.415.815.859	924.260.125	491.555.734
Bea BPHTB				-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	51.637.861	51.637.861	
Bagian Daerah Non Migas	-	-	1.201.874.719	952.611.284	249.263.435
Bagian Daerah Pasal 21/26					-
Bagian Daerah Perbatasan			105.068.852	-	105.868.852
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kelebihan Tahun ya	-	-	-		
Biaya Pemungutan Migas			7.443.731		7.443.731
Biaya Pemungutan Non Migas			21.493.027	-	586.027
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	1.134.367		1.134.367
Biaya Pemungutan Perbatasan					-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya				-	-
CHT	-	-	-	-	-
PBB	-	456.915	9.659.457.283		7.202.472.983
Migas			201.852.217		139.925.217
Alokasi Pasal 15%			135.168.102		135.168.102
Alokasi Pasal 22			470.111	-	470.111
Alokasi Pasal 31E(1) Sanksi Admin	-	-	-	-	-
Gas Bumi 1,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba			7.329.691.279		7.026.585.279
Landrent			1.505.690.129	-	635.780.129
Royalti			2.771.004.649	-	2.875.804.849
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Pro/Eks	-	-			
Iuran Tetap					-
Sektor Daerah Pertambangan				-	-
Kehutanan	-	166.915	95.859.163	-	62.832.498
DR	-	-	-	-	
PSDH					-
Reboi		166.915	32.853.760	-	32.869.498
Perikanan			-	-	
Grand Total	-	456.915	9.942.69 .251	924.260. 25	8.109.172.126

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Belitung Timur

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DBH TA 2021 Sesuai PMK Nomor 17/PMK.07/2021	DBH TA 2020 yang Telah Disalurkan	DBH TA 2020 yang Telah Disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10=7)-(9)	(11)
Pajak	3.997.021.745	-	3.421.722.209	249.039.436	27.067.371
PBB	2.102.070.000	-	925.368.300	1.265.881.304	-
PBB Pasal 21	1.791.025.317	-	888.670.103	955.855.747	
PBB Pasal 25/29	707.897.252		34.298.203	360.496.172	
BPHTB	16.093.961.511		2.315.033.903	13.617.391.982	37.067.371
Bagi Rata	1.961.950.943		250.869.107	1.420.210.295	
Bagian Daerah Kaya	30.570.374	-	30.570.100	-	37.979.726
Bagian Daerah Sangat Kaya	9.201.756.494	-	82.158.303	8.339.013.598	-
Bagian Daerah Orang Kaya					
Bagian Daerah Kaya Lainnya	757.705.915		150.139.105	171.237.530	
Bagian Daerah Kaya Lainnya	4.183.369.351	-	1.160.170.907	3.023.721.351	-
Bagian Daerah Kaya Lainnya	215.397.007	-	8.634.508	206.962.727	-
Bagi Pemungutan Migas	2.021.353	-	33.320.308	-	1.287.117
Bagi Pemungutan Non Migas	307.591.342		27.545.190	279.370.212	
Biaya Pemungutan Pajak Sarang	-				-
Biaya Pemungutan Perkebunan	18.776.207	-	3.855.630	8.591.664	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	165.360.050		31.756.230	31.703.821	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.458.024		294.520	7.163.504	
DBHT	555	-	-	555	-
KLHA	15.216.115.153	886.604.912	5.394.964.373	6.550.687.508	1.556.259.680
Migas	871.103.841	-	9.173.320	829.372.344	-
Minyak Bumi 15%	500.581.967		18.312.720	312.872.101	
Minyak Bumi 0,5%	10.605.692		511.000	10.297.892	
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			-
Minerba	13.715.715.629	457.690.998	3.070.000.721	16.028.317.271	1.153.709.176
Tambahan	-	457.690.998	512.678.160		1.100.000.176
Hasil IT	3.755.738.629		2.727.421.373	16.928.317.271	
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Jumlah Alokasi	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil					
Selisih Bagian Daerah (Kurang/Lebih)	-	39.913.914	18.862.530		77.796.707
DR	-	-	-	-	-
DMO		-	-	-	-
PSDH		29.913.914	18.862.530		77.796.707
Koreksi	134.168.960		415.911.020		197.691.020
Grand Total	37.351.391.198	886.604.912	8.958.778.776	21.479.004.774	1.860.127.511

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Gorontalo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG TA 2018	KURANG TA 2019	LEBIH TA 2019 (PMK No. 26/PMK.07/2021)	Proyeksi LEBIH TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LEBIH TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]
Pajak	-	-	1.491.170.552	550.811.865	940.358.687
PPh		-	1.282.651.804	570.811.865	711.840.029
PPh Pasal 21			1.282.651.804	570.811.865	711.840.029
PPh Pasal 25/29					-
PBB	-		208.518.748	-	208.518.748
BPHTB	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			9.187.392		9.187.392
Bagian Daerah Pasal Dalam					-
Bagian Daerah Pertambangan	-			-	-
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Pemerintah Migas					
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	111.068	-	94.568
Bagian Pemerintah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan					
Bagian Pemerintah Perikanan					
Bagian Pemerintah Kehutanan	-			-	-
OPT	-	-	-	-	-
SDA	-	10.290.197	4.010.835.093		1.377.058.093
Migas					
Minyak Bumi (15%)					-
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi (30%)	-	-	-	-	
Gas Bumi (0,5%)					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Panas Bumi			965.197.240		965.197.240
Pertambangan	-	-	965.197.240	-	965.197.240
Royalti	-	-	-	-	-
Pajak Air Permukaan	-	-	-		
Pungutan Perikanan			-		
Pungutan Kehutanan				-	-
Kurang Bayar Pemerintah				-	
Kehutanan	-	10.290.197	3.650.740.853	-	3.650.740.853
DR	-	8.997.907	3.417.106.273		3.417.106.273
PSDH					
DBHPR		1.292.290	233.634.580	-	233.634.580
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	10.290.197	5.501.170.552	570.811.865	4.937.306.750

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Gorontalo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Dan/atau PPTA 2021	LB Tahun TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesteran TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	9.312.077.227	5.078.550	4.058.754.330	4.404.853.15	96.456.772
PBB	7.369.591.021		3.712.498.760	3.552.053.41	-
PPh Pasal 21	1.936.092.367		3.317.096.590	3.308.373.767	
PPh Pasal 25/29	343.493.841	-	197.811.780	345.692.064	
PDP	972.308.159	4.078.550	340.240.900	103.786.132	126.028.772
Bagi Hasil		-	-	-	
Bagian Daerah Migas	61.362.700		107.371.150	-	20.458.305
Bagian Daerah Non Migas	1.037.915		2.372.450		1.344.771
Bagian Daerah Kehutanan	-	-			
Bagian Daerah Perkebunan		4.46.877	741.12.050		78.767.777
Bagian Daerah Pertambangan	502.971.310	-	133.166.150	406.765.240	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	331.137.311		1.810.020	800.818.771	-
Dana Reboisasi	2.760.819		1.791.150		1.731.171
Dana Perimbangan Sumber Daya Alam	42.650	-	94.000		26.272
Dana Perimbangan Panas Bumi		-	-	-	-
Dana Perimbangan Pertambangan		308.182	1.117.250	-	4.876.582
Dana Perimbangan Perkebunan	39.583.003		7.155.450	22.712.302	
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	13.283.303	-	900.700	12.771.200	
CHT	28.817	-	23.589	12.228	-
DBH	369.916.911	113.309.407	245.677.077	76.504.5 6	178. 24.807
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-		
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 0,5%				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Minerba	536.776	24.650.794	25.211.770	398.770	130.089.700
Royalti	-	124.650.794	25.334.170		100.089.700
Royalti	536.770	-	-	536.770	
Pajak Rokok			-	-	-
Dana Alokasi Khusus	-		-	-	-
Dana Otsus					
Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-			
Kehutanan	250.228.060	8.050.615	270.442.550	76.2 .940	48.040.700
DR	369.828.060		181.012.095	72.2 .040	-
PSDH	-				
DBHB	-	8.050.615	89.470.060		16.040.000
Perikanan		-	-		
Grand Total	9.901.991.076	118.723.090	130.441.8 4	4.485.638.577	324.61 .574

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bantaeng

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KP TA 20..9	LB TA 20..9	LB s.d TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 20..9 (PMK No. 3/PM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	700.713.377	80.065.999	620.646.778
PPE			-		
PPh Pasal 21					
PPh Pasal 25/29					-
PBB	-	-	700.713.377	80.065.999	620.646.778
Bea Perolehan	-	-	-	-	-
Dearah Kabupaten Kegiatan		-	-		
Kegiatan Daerah Dan Kegiatan					
Kegiatan Daerah Dan Kegiatan					-
Kegiatan Daerah Dan Kegiatan	-	-	-	-	-
Dearah Daerah Perbatasan	-	-	669.. 25.308	80.065.808	589.059.499
Kegiatan Daerah Kegiatan Lainnya					
Biaya Pemungutan Pajak					
Biaya Pemungutan Dan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pelaksanaan Pajak PBB	-	-	-	-	-
Biaya Pelaksanaan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Perkebunan			81.080.979		81.080.979
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT		-	-	-	-
SDA		575.663	99.916.612		99.916.612
Migas					
Migas Dari PSC	-				-
Migas Dari PSC	-	-	-	-	-
Migas Dari dalam Negeri Other	-	-	-	-	-
Gas Bumi PGN		-	-		
Gas Bumi Lain					
Gas Bumi Dalam Negeri Other					
Minerba	-				-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti		-	-	-	-
Panas Bumi		-			
Panas Produksi					
Iuran Tetap					-
Setoran Bagian Pemerintah	-		-	-	-
Kehutanan	-	575.663	99.0.6.6.2	-	99.046.672
DR					
PSDH					
PSDH	-	575.663	99.9.6.612	-	99.346.672
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total		575.663	800.658.989	80.065.899	720.592.290

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Henderson

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan TA 2020 (KMK No. S-892/MK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	4.112.175.302	-	1.973.059.480	5.137.823.087	214.907.699
PBB	97.835.210		361.193.030	111.633.047	
PPh Pasal 21	205.329.370		411.011.700	205.308.047	
PPh Pasal 25/29	55.209.870		19.193.670	46.125.870	-
PBB	8.-0.388.870	-	490.765.980	3.716.185.189	26.604.950
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.091.175.702	-	265.889.520	726.252.238	
Bagian Daerah Migas	42.803.243		68.803.320		25.775.017
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Dana Reboisasi	-			-	-
Bagian Daerah Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	870.530.236	-	101.163.020	7-3.303.384	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	210.089.307		8.161.300	220.911.007	
Biaya Pemungutan Migas	1.018..56		2.102.100		834.844
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perbendaharaan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Pertambangan	55.8.3.7+7		1.211.100	31.0.9.3+1	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.735.38	-	158.600	6.458.781	-
CHT	2.087	-	-	2.071	-
SDA	193.422.491	5.150.029	373.581.070	215.511	179.42.099
Migas					
Minyak Bumi 15%	-			-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5 %					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	33.5.1		-	205.5.1	-
Iuran 1	-	-	-	-	-
Royalti	285.5.1	-	-	285.5.1	-
Panas Bumi					
Iuran Produksi					
Iuran Tetap	-			-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	5..50.029	16.383.030	-	02.133.079
DR					
PSDH					
Perikanan	-	5.150.029	16.5.6.030	-	32.153.079
Pungutan	150.726.080	-	516.63..202	-	177.60..070
Grand Total	4.271.792.650	5.150.029	1.3'4.816.'70	5.158.058.776	206.'69.058

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gorontalo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KETA 2019	KETA 2020	Data TA 2019 (PMK No. 03/PMK.07/2021)	Penyesuaian LRA TA 2019 (ADK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (ADK No. 3/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]+[5]
Pajak			179.200.280	179.200.280	0.286-(3)
PPh	-		475.9..6.760	475.9..6.760	-
PPh Pasal 21	-	-	475.9..6.760	475.9..6.760	
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	
PBB		-	3.286.480		3.286.480
Dana Reboisasi					
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	5.186.800	-	5.186.800
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	
Dana Bagi Hasil Kehutanan					
Dana Bagi Hasil Perikanan					-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas		-	99.600		99.600
Biaya Pemungutan Panas Bumi					-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	-		-	-	-
Biaya Pemungutan Perikanan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-		
CHT					-
BHA		6.1 .200	978.430.945	1.7 7.270	87 .259.475
Migas	-	-	-	-	-
Migas Bagi 15%	-	-	-	-	
Migas Bagi 0,5%					
Migas Bagi Dana dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%	-		-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Migas Tua	-	-	810.747.052	127.127.273	703.619.769
Lapangan			810.747.052	127.127.273	703.619.769
Lainnya					
Panas Bumi				-	-
Tahun Pajak Lalu	-	-	-	-	-
Tahun Lainnya	-	-	-	-	
Sebagian Bagi ke Pemerintah					
Kehutanan		3 .3 .3	167.630.907		167.630.907
Iuran	-	-		-	-
PSDH	-	-	-	-	-
DBHH		6 .6.3	167.630.907		167.630.907
Perikanan					
Dana Total		6 .6.3	1.2 .6.0 .. .2	1.7 .6.0 .0	87 .6 6.2 5

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Contoh Satu (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Desember TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran TA 2021 Berdasarkan PMK No. 8/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	6.390.432.205		1.361.139.350	5.036.847.238	26.584.977
PPh	2.134.456.402	-	656.572.720	77.268.788	
PPh Pasal 21	3.066.735.502	-	1.017.102.420	1.051.601.120	
PPh Pasal 25/29	186.774.382	-	32.370.800	127.661.663	
PBB	3.030.132.022		526.771.050	2.503.360.972	26.584.925
Bea Jabatan	1.991.209.906		290.189.720	1.726.279.254	-
Bagian Daerah Migas	46.975.794		74.814.350	-	27.838.556
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		
Bagian Daerah Pajak Rokok	-	-	-		
Bantuan Daerah Perbatasan					-
Dampak Daerah Perselisihan	76.026.715		37.609.900	963.031.5	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	315.649.027	-	6.604.303	294.694.707	
Biaya Pengelolaan Migas	1.443.617	-	3.535.700		29.1.889
Biaya Pengelolaan Non Migas					-
Biaya Pengelolaan Pajak Daerah				-	-
Biaya Pengelolaan Pajak Lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pengelolaan Pajak Lainnya	31.700.846	-	6.033.103	2.714.744	
Biaya Pengelolaan Sektor Lainnya	8.737.381		2.653.601	3.468.781	-
CHT	10.997		20.196	10.796	-
SDA	160.364.533	17.197.076	357.163.152	1.177.588	87.733.948
Migas	-	-	-		
Minyak Bumi 15%	-	-			
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%	-		-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Mineba	1.777.532	17.197.076	22.529.173	1.177.532	189.017.825
Iuran Tetap		17.197.076	22.529.173		189.017.825
Royalti	1.177.532			1.177.532	-
Panas Bumi			-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-		
Setoran Modal Pemerintah					-
Kehutanan		3.917.126	17.773.975	-	24.72 .01
PSDH	-	-	-	-	
DBHPS	-	-	-		
PSDH		6.917.126	17.773.975		24.721.901
Perikanan	109.193.090		215.491.020		157.654.922
Grand Total	1.457.797.742	17.197.076	1.539.300.046	3.736.124.791	-61.268.17

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Gorontalo

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR TA 2019	TRANSFER TA 2020 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	PENYESUAIAN TA 2019 (PMK No. 21/PMK.07/2021)	SELISIH TA 2019 (PMK No. 21/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(5)
Pajak	-		335.685.120	135.665.070	200.020.050
PPh	-	-	335.685.720	135.665.070	200.020.650
PPh Pasal 21	-	-	335.685.720	135.665.070	200.020.650
PPh Pasal 25/29		-	-		
PPnBM					
Pajak Parkir					-
Pajak Bahan Bakar Minyak	-	-		-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan		-	-		-
Pajak Alat Berat					
Pajak Reklame	-			-	-
Pajak Hiburan	-	-	-	-	
Pajak Air Permukaan		-	-		-
Pajak Sarang Burung Walet					-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-		-
Pajak Parkir Elektronik					-
Pajak Opsen					-
Pajak Barang dan Jasa Tertentu					-
Pajak Barang Mewah					-
Pajak Lainnya					-
CHT	-			-	-
SDA	-	517.113	93.807.847	-	93.807.847
Migas		-		-	
Minyak Bumi 15%		-			
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dalam Kerja Sama Operasi	-			-	-
Gas Bumi 30%	-			-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	
Gas Bumi dalam Kerja Sama Operasi		-	-	-	
Minerba					
Landrent					-
Royalti	-				-
Panas Bumi	-		-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran tetap		-			
Setoran Modal Pemerintah					
Perikanan	-	517.113	93.807.847		93.807.847
PNBP	-	-	-	-	-
LLAJR		-			
PDLH		517.113	93.807.847		93.807.847
Perikanan	-				-
Cukai Hasil Tembakau	-	517.113	119.993.567	135.665.070	293.315.407

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Gorontalo

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan TA 2020 (PMK 36/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	6.269.829.211		2.147.382.400	4.807.500.207	11.949.104
PPh	4.050.676.050		2.102.870.400	1.947.791.650	-
PPh Pasal 21	3.635.715.450	-	1.900.900.000	1.716.055.170	-
PPh Pasal 25/29	567.660.600	-	195.970.400	371.747.480	-
PBB	2.219.269.682	-	314.650.000	1.939.733.786	14.915.131
Bea BPHTB	1.691.949.908		265.887.000	1.426.275.298	
Bagian Daerah Hasil Migas	24.199.709		35.679.000		14.479.291
Bagian Daerah Non Migas	-	-		-	-
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan		-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	516.589.617		3.011.000	259.091.700	-
Biaya Pemungutan Migas	7.458.607	-	3.113.900	-	460.938
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.727.587	-	366.800	6.468.787	
Cukai	7.373			7.373	
DBH	188.432.497	3.102.470	332.050.975	259.011	176.928.570
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 15%					
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	288.811	-	-	288.811	-
Landrent	-	-	-	-	
Royalti	288.811			288.811	
Panas Bumi					
Iuran Produksi	-			-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan	-	-	-	-	
Kehutanan		3.102.470	15.772.075		19.230.360
DR					
PSDH	-	-	-	-	-
PSDH	-	3.102.470	15.772.075	-	19.230.360
Perikanan	150.180.980		316.881.900		157.074.020
Grand Total	5.409.343.021	3.102.470	2.770.085.150	5.067.971.778	191.377.721

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pohuwato

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KRITA 2018	KRITA 2019	LRA TA 2020 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LRA TA 2020 (KMK No. 317/KM.7/2021)	Sisa LRA TA 2020 (KMK No. 317/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			121.231.805	121.231.805	-
PPh			610.729.592	610.729.592	-
PPh Pasal 21	-	-	366.[illegible].357	366.[illegible].357	-
PPh Pasal 25/29	-	-	5.6[illegible].735	5.6[illegible].735	
PBB	-	-	60.525.714	60.525.714	
Pajak Rokok					-
Pajak Daerah Migas					-
Pajak Daerah Non Migas	-		-	-	-
Pajak Daerah Pajak Bumi	-	-	-	-	
Pajak Daerah Perkebunan		-	-		
Pajak Daerah Hotel/Restoran			18.714.139	18.714.139	
Pajak Daerah Hiburan Lainnya	-			-	-
Pajak Penerangan Migas	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Non Migas		-	1.168.714	1.168.714	
Pajak Penerangan Pajak Bumi					
Pajak Penerangan Perkebunan	-			-	-
Pajak Penerangan Perhotelan	-	-	9.592.581	10.592.581	
Pajak Penerangan Sektor Lainnya		-	-		
CHT					
PNBP		1.0[illegible].3[illegible]	3.[illegible].[illegible]	901.[illegible]	3.[illegible]
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	
Minyak Bumi 0,5%		-	-		
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 69%					-
Gas Bumi 0,5%	-			-	-
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Minerba	-	-	3.478.636.395	401.020.272	3.[illegible]
Batubara		-	3.478.020.395	401.020.272	3.[illegible]
Panas Bumi					
Pungutan Pusat					-
Iuran Tetap (Land Rent)	-	-	-	-	-
Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-		
Kehutanan		1.0[illegible].[illegible]	253.064.235		253.[illegible]
PSDH			-	-	-
DR	-		-	-	-
DBHPH	-	-	-	-	-
DBHDR		1.0[illegible].[illegible]	253.[illegible]		253.064.235
Perikanan					
Cukai (DBH)		1.0[illegible].[illegible]	4.[illegible].[illegible]	9[illegible].[illegible]	3.[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pohuwato

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Perkiraan KB DBH (Lampiran PMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	6.117.690.016		1.298.471.300	2.071.035.212	34.731.108
PPh	1.065.199.091		631.200.300	750.011.191	
PPh Pasal 21	1.269.368.716		518.673.000	697.995.777	-
PPh Pasal 25/29	66.581.018	-	30.654.500	53.918.716	-
PBB	3.781.519.073	-	634.438.800	2.370.088.67	34.784.408
Bagi Rata	1.091.059.038		367.620.700	1.756.070.505	
Bagian Daerah Migas	58.790.689		80.191.600		21.600.911
Bagian Daerah Non Migas	10.368.122		2.157.200	11.720.802	-
Bagian Daerah Hasil Hutan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	323.307.410		217.124.200	273.283.730	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	201.519.037		13.091.900	191.157.257	
Pasca Penangguhan Migas	1.787.623	-	2.378.200	-	(94.597
Pasca Penangguhan Non Migas	53.451	-	67.900	366.30	-
Pasca Penangguhan Hasil Hutan					
Pasca Penangguhan Perikanan					
Pasca Penangguhan Pertambangan	31.681.492	-	10.264.240	11.388.984	-
Pasca Penangguhan Sektor Lainnya	6.151.781	-	450.000	5.553.861	-
CHT	2.251			2.051	
PDRA	243.198.267	101.289.416	103.423.970	21.015.470	310.680.502
Migas	-				-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Wilayah Desa					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 2,5%	-			-	
Gas Bumi dalam Wilayah Desa	-	-		-	-
Minerba	84.630.784	-	33.691.875	81.715.405	-
Landrent	84.375.773	-	33.693.875	81.470.898	-
Royalti	255.511			244.507	
Panas Bumi					
Iuran Tetap (Feed)	-				
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		101.289.416	53.677.100		138.286.341
PSDH					
IHPH	-	-		-	-
PSDH	-	101.289.416	53.647.700	-	158.286.546
Perikanan	170.186.050		36.851.000	-	157.004.920
Grand Total	1.319.791.270	101.289.416	1.141.806.375	3.022.785.022	350.030.591

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bone Bolango

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 73/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
Pajak			890.518.981	2.232.197.779	3.122.716.760
PPh			471.197.341	654.146.738	1.125.344.079
PPh Pasal 21			471.197.341	654.146.738	1.125.344.079
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	22.351.020	-	22.351.020
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Cukai Hasil Tembakau					
Pajak Rokok			21.674.400	-	21.674.400
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Pajak Parkir					
Pajak Air Permukaan					-
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Pajak Alat Berat	-	-	577.200	-	577.200
Pajak Opsen MBLB					-
Pajak Opsen PKB	-	-	-	-	-
Pajak Opsen BBNKB	-	-	-	-	-
CHT					
DBH		216.691	2.111.309.063		3.121.999.063
Pajak	-		-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-			-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	1.039.055.55	-	2.028.035.551
Panas Bumi	-	-	1.039.055.55	-	2.028.035.551
Kurang Penyaluran					
Kurang Salur					
Pajak Daerah					
Kurang Penyaluran				-	-
Kurang Salur	-	-	-	-	-
Sisa Kurang Penyaluran	-	-	-	-	-
Kehutanan		616.891	28.942.312		93.912.312
DP					-
PSDH	-	-	-	-	-
DBH	-	616.891	28.942.312	-	93.912.312
Perikanan					
Grand Total		616.891	2.921.327.731	2.232.197.779	5.259.293.092

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bone Bolango

(dalam rupiah)

PENJELASAN	KB Defisit TA 2020	LB Defisit TA 2020	Pengalokasian KB/LB Setambah TA 2020 (PMK 39/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.610.039.737	2.062.430	1.055.237.301	2.554.015.866	49.026.872
PPh	1.314.720.027	-	670.547.301	644.076.937	-
PPh Pasal 21	1.274.011.075	-	665.343.402	608.667.673	-
PPh Pasal 25/29	40.235.142	-	21.519.703	18.715.142	-
PBB	2.266.947.171	13.082.130	384.689.900	1.929.725.181	19.045.612
Bagi Rata	1.911.950.136	-	256.669.103	1.729.280.299	-
Bagian Daerah Migas	50.117.035	-	60.510.700	-	61.549.657
Bagian Daerah Non Migas		7.774.850	7.530.605	-	17.129.430
Bagian Daerah Dana Bunga					
Bagian Daerah Pajak Tertentu					
Bagian Daerah Pajak Rokok	-	-		-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	275.770.057	-	8.634.203	206.954.737	-
Biaya Pemungutan Migas	1.230.675		2.627.000		987.750
Biaya Pemungutan Non Migas		305.580	229.205		267.990
Biaya Pemungutan Dana Bunga	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perbedaan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.707.561		208.920	8.068.781	
CHT	2.051	-	-	2.051	-
SDA	178.472.481	84.756.653	373.454.660	265.511	584.705.653
Migas			-		
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Dalam Rangka Kerja Sama	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Kerja Sama		-	-		-
Minerba	265.511	333.440.730	76.310.121	265.511	380.770.440
Panas Bumi		304.460.720	76.310.120		268.770.840
Royalti	265.511			265.511	
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Dana Otsus					
Sumber Daya Perikanan					
Kehutanan	-	29.295.260	15.143.175		29.138.758
DR	-	-	-	-	-
IHPH			-		-
PSDH		29.295.260	15.143.175		29.138.758
Pertanian	151.166.960		111.991.030		237.091.025
Grand Total	3.788.511.648	954.936.403	1.440.691.960	2.554.546.175	613.731.525

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Gorontalo Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	SB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Tanpa Koreksi LB s.d TA 2019 (SSK No. 3/KN/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (SSK No. 3/KN/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	1.520.35-.011	205.620.322	1.516.683.790
PPh	-	-	369.059.262	-	369.059.262
PPh Pasal 21	-	-	369.059.262		369.059.262
PPh Pasal 25/29	-	-	-		
PBB	-	-	1.151.294.719	205.620.322	1.016.644.537
Bea Materai	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Migas	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Non Migas	-	-	10.164.869	-	10.164.869
Pajak Daerah Pasca Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-		
Pajak Daerah Pasca Pemotongan PPh Pasal 21	-	-	1.201.229.720	205.620.322	954.397.201
Pajak Daerah Pasca Pemotongan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pemotongan PPh Pasal 26	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pasca Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pasca Pemotongan PPh Pasal 15	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pasca Pemotongan PPh Pasal 22 Impor	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Pasca Pemotongan PPh Pasal 22 Industri Tertentu	-	-	139.450.452	-	139.450.452
Pajak Daerah Pasca Pemotongan PPh Pasal 22 Produsen	-	-	-		
Pajak Daerah Pasca Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26					-
Cukai				-	-
SDA	-	1.773.110	543.634.916	-	543.249.208
Migas	-	-	-		
Migas Bagian 15,5%	-	-	-		
Migas Bagian 0,5%					-
Migas Bagian Untuk dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi Bagian Rangka Otsus	-	-	-		
Minerba	-		321.760.874		321.760.874
Iuran Tetap			321.760.874	-	321.760.874
Royalti			-	-	-
Panas Bumi		-	-	-	
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-		-
Bagian Bagian Pemerintah					-
Kehutanan		1.773.110	219.557.394	-	218.547.394
PSDH	-	-	-	-	-
DBHI	-	-	-		-
PSDH		1.773.110	219.557.394		218.557.394
Perikanan				-	-
Grand Total		1.773 – 0	1.063.912.919	205.620.322	1.860.931.397

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Gorontalo Utara

(dalam rupiah)

URAIAN	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Semesta TA 2021 (PMK No. 8/PMK.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(5)	(6)	(9)	(10) (5)-(9)	(11)
Pajak	2.368.713.494	19.265.861	1.168.835.100	2.513.394.759	356.357.620
PPh	1.320.613.222	-	320.839.200	577.148.607	-
PPh Pasal 21	1.200.200.021	-	304.430.500	553.836.827	-
PPh Pasal 25/29	64.291.961		14.959.900	46.332.107	-
PBB	2.050.705.171	19.265.861	568.453.700	1.939.733.796	356.557.676
Bea Perol.	1.891.191.099		265.680.750	1.740.272.259	
Bagian Daerah: Migas	45.739.827	-	27.772.450	-	26.682.977
Bagian Daerah: Non Migas		-		-	
Bagian Daerah: Pasal 21	-		-		-
Bagian Daerah: Perkebunan	-	18.619.800	396.453.550		3.570.606
Bagian Daerah: Perikanan	6.230.107	-	7.911.100	-	957.093
Bagian Daerah: Sektor Lainnya	213.084.037	-	8.011.300	205.994.707	
Biaya Pemungutan Migas	1.458.955		2.127.900		939.537
Biaya Pemungutan Non Migas	-		-		-
Biaya Pemungutan: Pasal 21		-		-	
Biaya Pemungutan: Perikanan		645.055	3.129.000	-	10.308.950
Biaya Pemungutan: Perkebunan	254.395		291.650		31.569
Biaya Pemungutan: Sektor Lainnya	6.757.581		263.820	6.708.791	-
PDRD	9.110	-	6.090	2.051	
PDRD	249.849.850	1.504.250	235.337.310	55.551.453	170.732.145
Migas	-	-			-
Minyak Bumi 15%	-		-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-		-		-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus		-		-	
Gas Bumi 30%		-		-	-
Gas Bumi 0,5%		-		-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Pertanian	265.511	1.307.250	1.053.675	265.511	10.056.175
Kehutanan	-	11.307.250	1.558.875		8.058.175
Pertambangan	265.511			265.511	
Perikanan	-		-	-	
Industri Pengolahan		-		-	-
Industri Primer	-		-		-
Pertambangan Umum	-		-		-
Kehutanan	90.418.107		37.107.425	90.418.107	-
Lainnya		-		-	-
PDRD	-		-	-	-
PBB-P2	90.418.407		37.107.425	90.418.107	-
Perikanan	159.156.090		2.661.020		157.004.070
Grand Total	3.618.356.382	32.760.111	1.344.350.730	2.570.436.260	527.389.795

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Kepulauan Riau

(dalam rupiah)

URAIAN	KURANG BAYAR DBH TA 2019	LEBIH BAYAR DBH TA 2019	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 20.. (Jika Ada) (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 33/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			9.000.197.699	1.991.840.314	4.008.356.385
PPh	-		9.000.197.699	1.991.840.314	4.008.356.385
PPh Pasal 21	-	-	9.000.305.439	1.991.948.054	4.008.357.385
PPh Pasal 26/26		-	53.151.260	-	53.151.260
PBB			-	-	-
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas	-				
Dasar Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal Dalam		-	-	-	-
Bagian Daerah PPh Pasal			-	-	
Bagian Daerah Pasal					
Bagian Daerah Bantuan Lainnya	-	-			
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pasal Pasal					
Biaya Pemungutan Pasal	-	-			
Biaya Pemungutan Pasal		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sistem Lainnya		-	-	-	-
CHT	-				
SDA	-	28.707.087	4.028.64[illegible]49		1.262.511.449
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba		-	5.362.651.4[illegible]6	-	4.5[illegible]6
Dana Reboisasi			977.614.701	-	977.614.701
Royalti			3.385.020.745		3.385.020.745
Panas Bumi	-				
Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Bagian Daerah		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	-
Kehutanan		28.707.087			
DR	-	26.068.579			
PSDH	-	-	-	-	-
Pungutan		2.638.508	-	-	-
Perikanan					
Grand Total	-	28.707.087	10.028.795.111	1.991.840.314	9.2[illegible]5.367.827

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Kepulauan Riau

(dalam rupiah)

URAIAN	Kb Desember TA 2020	LB Februari TA 2020	Penyaluran KB DBH Setelah Desember TA 2020 (Kolom 4 - Kolom 5)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	93.546.887.753		30.852.760.820	-5.294.057.535	-
PPh	51.545.787.363	-	31.569.168.820	24.259.569.065	
PPh Pasal 21	42.515.997.180	-	26.342.728.420	16.476.478.739	-
PPh Pasal 25/29	9.029.790.183		5.226.440.400	7.803.090.216	
PPN	41.001.382.014		5.373.214.020	15.508.207.991	-
Bea Balik	-				-
Bagian Daerah Migas	15.977.123.513	-	1.305.793.320	15.977.123.513	-
Bagian Daerah Non Migas	1.934.605.997	-	851.760.120	1.082.809.837	
Bagian Daerah Penas Bumi					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Kehutanan	26.63 .692		89.237.420	37.444.252	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	887.474.163	-	36.175.400	836.709.563	-
Biaya Pemungutan Migas	204.540.797		66.743.080	137.797.717	
Biaya Pemungutan Non Migas	34.140.160		28.532.100	26.010.300	
Biaya Pemungutan Penas Bumi	-				-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	3.030.870		3.965.760	1.065.150	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	32.092.632		572.160	31.210.272	
CHT	16.472.794		10.902.220	5.020.574	-
SDA	183.351.458.695	37.867.656.63	2.8 .595.705	183.032.825.556	22.256.2 .0.265
Migas	133.209.731.730	37.202.481.090	1.030. 56.305	182.559.024.573	35.813.356.370
Minyak Bumi 15%		36.847.923.063	1.017.619.200		37.6 .7.5 .0.263
Minyak Bumi 0,5%		1.201.360.027	32.136.105		1.259.1 .3.132
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-		-	-	-
Gas Bumi 69%	185.301.505.152	-	363.954.300	130.936.561.053	-
Gas Bumi 0,5%	2.213.166.607	-	6.158. 00	2.212.243.507	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-		-	-	
Kehutanan		374.211.361	738.674.375		1.312.8 5.9 1.
Lestarsi		182.201.817	151.692.930		314.9 6.3 1
Reysi		59.1 7.9 .4	503.961.135		997.899.705
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap					
Setoran Bagian Pemerintah					
Perikanan	94.1 7. 39		115.412.950	252.696.997	29.760.999
DR	830. 16 .23	-	46.417.135	250.696.397	-
LOPL			-		
PSDH	2.0 0.9 0		32.321.773		29.1 0.9 0
Dr Pemerin					
Grand Total	288.438.94 .450	38.1 6.636.63	53.650.0 4.09	175.365.060.189	-0.356.2 .0.265

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Natuna

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (PMK No. 65/PMK.07/2021)	Penyesuaian LEBIH BAYAR TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)	Sisa LEBIH BAYAR s.d. TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	196.620.353	170.287.613	26.332.740
PPh	-	-	196.620.353	170.287.613	26.332.740
PPh Pasal 21			196.620.353	170.287.613	26.332.740
PPh Pasal 23/26			-	-	-
PBB		-	-		-
Bea Meterai		-	-		-
Daerah Provinsi Migas	-	-			-
Daerah Provinsi Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Provinsi Migas			-	-	
Bagian Daerah Pertambangan		-	-		-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-			-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-			-	
Biaya Pemungutan Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-		-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-			-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-			-	
Biaya Pemungutan Pertambangan			-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-		-
DAK	-	-			-
SDA	-	1.207.036	920.045.702	-	920.045.702
Migas				-	
Minyak Bumi (15%)			-	-	
Minyak Bumi (0,5%)		-	-		-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Bumi (70%)	-	-		-	-
Gas Bumi (0,5%)	-			-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-		-	-	
Pertama			920.045.702	-	920.045.702
Kedua		-	1.101.820		1.101.820
Jumlah		-	919.043.882		919.043.882
Panas Bumi	-	-		-	-
Iuran Produksi	-			-	
Iuran Tetap			-	-	
Pertama dan Kedua		-			-
Kehutanan	-	1.207.036			-
IHH	-	-		-	-
PSDH			-	-	
Reboisasi		1.207.036	-		-
Perikanan		-			-
Grand Total	-	1.207.036	1.116.666.055	171.389.219	945.276.836

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Natuna

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Desember TA 2020	LB Des. TA 2020	Penyaluran KB Des. Ren. TA 2020 (PMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum Rekonsiliasi	LB TA 2020 yang belum Rekonsiliasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	54.679.518.967		7.111.929.736	47.567.589.231	
PPh	5.595.464.934	-	2.107.490.420	3.087.980.514	-
PPh Pasal 21	4.036.755.334	-	1.586.205.420	2.450.553.914	-
PPh Pasal 25/29	774.165.700	-	111.275.000	662.910.700	-
PBB	49.289.719.371		4.504.723.320	44.784.996.051	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.691.308.979		265.039.720	1.426.269.259	
Bagian Daerah dari PPh Migas	45.556.611.347		4.239.683.600	41.316.927.747	-
Bagian Daerah dari PPh Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari PBB Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah dari PBB Perkebunan					
Bagian Daerah dari PBB Kehutanan					
Bagian Daerah dari PBB Pertambangan	315.899.207	-	9.300.000	306.599.207	-
Bagian Pemerintah dari PBB Migas	1.317.060.772	-	46.759.800	1.270.300.972	-
Bagian Pemerintah dari PBB Non Migas					
Bagian Pemerintah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Bagian Pemerintah dari PBB Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah dari PBB Pertambangan		-	-	-	
Bagian Pemerintah dari Sektor Lainnya	7.196.077		280.200	6.915.947	
CHT	2.737.219		1.701.800	1.035.100	
SDA	6.566.434.894	43.149.916.511	2.604.533.970	84.186.029.435	80.441.06.836
Migas	6.507.247.854	43.059.015.057	2.163.613.402	84.186.029.454	80.555.060.557
Minyak Bumi (70%)		16.780.717.868	1.877.625.300	-	18.647.276.0[illegible]
Minyak Bumi (30%)		1.340.362.084	62.560.300		1.611.853.494
Minyak Bumi Bekas Pengolahan Migas					
Gas Bumi (69%)	61.356.452.833		2.150.[illegible].600	59.106.061.233	-
Gas Bumi (0,5%)	550.755.02[illegible]	-	3.647.000	547.148.02[illegible]	-
Gas Bumi dalam Rangka Cross	-	-	-	-	-
Asuransi		105.900.774	183.810.050	-	391.225.776
Deposit					
Pajak		105.900.774	183.810.050		291.225.776
Panas Bumi	-				-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah					
Perikanan		1.990.828	10.777.425		12.768.253
DR	-	-	-		-
LUFI	-	-	-	-	-
BHT		1.990.828	10.777.425		12.768.253
Pertanian	159.180.960		510.941.000		351.760.040
Grand Total	19.941.314.137	43.149.916.511	9.798.822.960	11.[illegible].079.179	80.4[illegible].096.308

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kode Kegiatan/Anak Kegiatan

(dalam ribuan rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KVK No. S-433/PK/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KVK No. S-433/PK/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak			2.117.861.770	608.761.140	1.509.100.630
PPh			2.117.861.770	608.761.140	1.509.100.630
PPh Pasal 21			2.117.861.770	608.761.140	509.100.630
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PPN	-	-	-	-	-
Bea Materai	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah PNBP Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Bagian Pemerintah dari Migas	-		-	-	-
Bagian Pemerintah dari Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah dari Dana Reboisasi		-			
Bagian Pemerintah dari Pertambangan					-
Bagian Pemerintah dari PNBP Kehutanan	-			-	
Bagian Pemerintah dari Sektor Lainnya	-	-	-	-	
CHT		-	-		
SDA		1.207.936	915.943.902		915.943.902
Migas				-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Minerba	-	-	915.943.902	-	915.943.902
Royalti	-	-	-	-	-
Royalti		-	915.943.902		915.943.902
Pajak Daerah					
Jenis Produksi					-
Tarif Lelang	-		-	-	-
Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	-	-	-	
Kehutanan		1.207.936			
DR					-
PSDH	-			-	-
PSDH	-	1.207.936	-	-	-
Penalti	-	-	-		
Grand Total		1.207.936	3.033.805.672	608.761.140	2.425.043.532

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kepulauan Anambas

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DBH DIPA Kemenkeu TA 2020 (KMK No. 9/KM.7/2021)	Alokasi TA 2020 yang seharusnya Disalurkan	Alokasi TA 2020 yang Dapat Disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)-(9)	(11)
Pajak	33.830.319.849	20.470.103	9.807.108.681	24.051.211.054	51.078.202
PPh	6.042.276.261		3.072.846.100	3.199.808.317	
PPh Pasal 21	5.196.136.670		3.057.136.700	2.081.049.970	-
PPh Pasal 22/23	846.139.584	-	15.709.400	830.690.584	-
PBB	28.064.203.644	20.470.103	6.734.474.381	21.358.117.464	51.078.202
Dana Reboisasi	1.061.959.895	-	285.681.700	1.776.278.203	
Pajak Daerah Pilpres	23.951.726.120		1.776.278.200	22.175.447.923	
Pajak Daerah Non Pilpres					-
Pajak Daerah Tahun Baru	-	-	-	-	-
Pajak Daerah Antisipasi	-	-	-		
Dana Pajak Perkebunan		20.216.130	21.187.300		49.374.730
Pajak Daerah Sektor Tertentu	215.699.007		8.621.300	205.977.707	
Biaya Pemungutan Pilpres	207.734.525	-	59.415.300	148.319.267	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Jalan					
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya	-	1.254.000	910.500	-	3.194.501
Biaya Pemungutan Sektor Tertentu	7.166.647	-	2.166.830	5.819.817	-
CHT	2.744.091		1.747.537	1.303.460	
SDA	56.811.312.080	31.020.221.730	1.972.730.625	92.148.803.230	32.252.249.325
Migas	50.150.151.940	21.510.951.930	1.768.497.220	72.892.605.250	32.738.090.425
Minyak Bumi 15%	-	20.494.746.100	1.045.646.220	-	31.740.486.303
Minyak Bumi 0,5%	-	1.016.205.833	41.692.630	-	1.057.897.133
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Gas Bumi 70%	50.902.505.368		165.771.000	51.725.931.084	
Gas Bumi 0,5%	859.721.312		2.700.700	856.992.112	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Mineral	-	105.939.736	105.318.050	-	291.253.776
Landrum	-	-	-	-	-
Iuran Tetap		103.939.736	105.318.050		291.253.776
Panas Bumi					
Pungutan Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Bonus Produksi	-	-	-	-	-
Kehutanan		2.130.428	12.720.555		15.249.203
IHPH					
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	2.130.428	12.720.555	-	15.249.203
Perikanan	190.152.050	-	3.168.850	-	187.034.028
Grand Total	90.641.631.929	31.040.392.158	2.779.490.456	92.035.179.258	83.613.672.128

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kar[illegible]n

(Dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 95/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (PMK No. 37/KM./2022)	Sisa LB s.d. TA 2019 (KMK No. 3/KM./2022)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4] + [5]
Pajak			252.561.053	181.931.729	70.629.324
PPh			252.561.053	181.931.729	70.629.324
PPh Pasal 21	-	-	252.561.053	181.934.729	70.626.324
PPh Pasal 22/26	-	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-
Bea Atas					
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas	-			-	-
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dasiran Daerah Pertambangan		-	-		
Dasiran Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-				-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Pertambangan				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT					
DBH		1.520.496	1.765.786.205		1.536.196.204
Migas	-	-	490.196	-	39.196
Migas Bunga 15%	-	-	39.670	-	39.670
Migas Bunga 0,5%	-	-	1.322	-	1.322
Migas Bunga dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%			50.603		50.603
Gas Bumi 6,5%			1.542	-	513
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	537.404.270	-	1.537.404.270
Royalti	-	-	537.404.270		1.537.404.270
Bonus					
Panas Bumi					
Iuran Produksi				-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Kehutanan		2.020.196	9.245.810		9.245.810
PHT					-
PSDH	-	-	-	-	-
DR	-	2.020.496	9.245.810	-	9.245.810
Perikanan					
Grand Total		1.520.496	1.810.047.291	181.931.729	1.627.115.562

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kaimana

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Alokasi Definitif KB DBH Perubahan TA 2020 (KVR No. 3/KV.7/2021)	KB TA 2020 yang telah diperhitungkan	LB TA 2020 yang telah diperhitungkan
(a)	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5)
Objek	5.576.5[illegible].709	-	8.807.732.036	6.930.100.072	457.346.061
PPh	3.462.847.791		1.928.112.020	914.520.362	356.032.591
PPh Pasal 21	1.324.290.709		1.022.570.270	-	256.140.391
PPh Pasal 25/29	1.138.[illegible].082		203.461.750	914.692.382	
PBB	10.011.439.920	-	3.599.606.820	6.030.176.100	8.043.390
Dbg Rata	1.991.959.998	-	265.667.730	1.726.292.268	-
Tagihan Daerah Migas	209.948.310		211.205.130	-	8.356.800
Bagian Daerah Sda Migas	7.971.650.874		3.324.911.160	3.879.736.744	
Bagian Daerah Panas Bumi			-	-	
Bagian Daerah Perhutanan		-	-		-
Bagian Daerah Pertambangan	165.367.053	-	11.700.360	153.666.693	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	201.340.607		20.045.100	181.482.507	
Bliya Pemungutan Migas	6.692.730		7.049.700	-	356.970
Bliya Pemungutan Non Migas	243.761.121	-	111.475.902	132.285.219	-
Bliya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-		-
Bliya Pemungutan Pertambangan	-			-	
Bliya Pemungutan Kehutanan	7.213.829		1.810.400	5.407.429	
Bliya Pemungutan Sektor Lainnya	6.674.217	-	468.730	6.205.487	-
DAU	5.767.[illegible].4	-	1.723.836	1.501.760	-
DAK	39.437.582.283	12.274.095.231	1.398.791.040	29.040.640.963	3.457.537.519
Migas	20.734.106.163	12.028.211.002	505.361.250	29.063.849.967	12.753.217.300
Minyak Bumi 15%		11.924.100.661	506.397.950	-	12.112.228.561
Minyak Bumi 0,5%	-	354.080.925	16.907.830		437.988.725
Minyak Bumi (Cost Recovery)	-	-			-
Gas Bumi 70%	58.317.680.645	-	705.830.200	28.406.827.168	-
Gas Bumi 0,5%	656.815.618		1.901.200	654.913.618	
Gas Bumi (Cost Recovery)			-	-	
Minerba	127.194.087	95.727.999	673.556.450	-	541.594.749
Landrent	-	81.427.666	265.[illegible].450		346.840.949
Royalti	124.163.587	-	838.092.100		183.692.833
Iuran Tetap	-				-
Iuran Produksi				-	
Iuran Eksplorasi			-	-	
Setoran Bagian Pemerintah			-		-
Kehutanan	-	10.960.685	53.053.075		41.955.710
DR	-			-	-
PSDH			-	-	
Reboi		10.960.685	32.905.675		41.955.710
Perikanan	159.[illegible].585	-	510.981.300		57.994.070
Grand Total	54.964.430.735	12.20[illegible].550.034	10.324.265.961	76.700.994.016	13.794.202.453

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Dalam (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
Pajak	-	-	2,0[illegible]24,217	279,021,057	1,565,060,157
PPh	-	-	2,0[illegible]24,217	279,021,057	565,060,157
PPh Pasal 21	-	-	3,61[illegible],002	279,021,057	329,272,015
PPh Pasal 25/29	-	-	235,617,214	-	235,617,214
PPB			-		-
Reg. Kota			-		-
Bagian Daerah Migas	-	-			-
Bagian Daerah Non Migas	-			-	
Bagian Daerah Pasca Bumi				-	
Bagian Daerah Pertambangan			-		
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-			-	
Bagian Pemerintah Migas	-			-	
Bagian Pemerintah Non Migas			-		
Bagian Pemerintah Pasca Bumi		-	-		
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-		-	
Bagian Pemerintah Perikanan	-			-	
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya			-	-	
CHT		-	-		-
DAK	-	1,383,667	918,[illegible]3,002		918,343,002
Kimia	-			-	
Minyak Bumi 85%			-	-	
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		-
Gas Bumi 30%	-	-			-
Gas Bumi 0,5%	-	-		-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-			-	
Minerba			918,343,902	-	918,343,902
Iuran [illegible]			-		-
Royalti		-	918,343,902		918,343,902
Panas Bumi	-	-			-
Iuran Produksi	-	-		-	
Iuran Tetap	-			-	
Setoran Bagian Pemerintah			-		
Kehutanan		1,383,667	-		-
DR	-	-		-	
PSDH	-			-	
DBHB		1,383,667	-		-
Pertambangan			-		-
Grand Total	-	535,667	1,760,[illegible]10	2,[illegible]1,057,257	[illegible]46,034,059

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Baru ...

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PE TA Tahun TA 2020	LO Tahun TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (KMK No. 8/PMK.7/2021)	KU TA 2020 yang belum disalurkan	LU TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	47.075.906.133	-	21.061.191.005	26.013.270.730	11.377.736
PPh	45.235.411.927		23.171.310.220	21.763.877.720	
PPh Pasal 21	36.600.302.787		22.248.210.120	14.352.268.084	
PPh Pasal 25/29	8.635.109.139		1.402.300.100	7.232.809.036	-
PBB	1.839.584.802	-	595.761.630	1.607.377.701	14.574.543
Bagi Hasil	1.991.978.802	-	748.669.730	1.226.272.238	-
Bagian Daerah Migas	180.970.137		291.770.000		110.749.743
Bagian Daerah Non Migas	12.122.302		31.100	11.108.130	
Bagian Daerah Pasal Tertentu	-				-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan		-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	180.957.200		27.177.200	153.030.307	
Biaya Pemungutan Migas	9.935.945		9.700.350		3.821.635
Biaya Pemungutan Non Migas	404.114	-	17.100	597.3 -	-
Biaya Pemungutan Pasal Tertentu		-		-	
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	6.86 .4-7	-	905.700	5.45 .7-7	-
Cukai	21.890.017	-	13.669.303	8.027.303	-
SDA	30.310.070.089	12.138.226.110	1.119.238.675	39.070.820.069	13.217.672.625
Migas	39.157.196.185	12.128.211.623	931.061.200	38.311.810.983	12.702.211.050
Minyak Bumi 85%	-	11.934.130.641	556.097.300	-	12.0-2 220 561
Minyak Bumi 0,5%	-	194.080.982	5.907.800	-	410 386 702
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	38.317.650.607	-	109.853.700	38.109.877.167	
Gas Bumi 0,5%	839.545.578		1.851.800	838.311.818	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	36.961.570	10.014.729	185.316.050	26.861.636	29.129.076
Iuran Tetap	26.945.470	-	-	26.945.470	-
Royalti	-	10.014.729	185.316.050	-	29.129.076
Panas Bumi			-		
Setoran Produksi					
Iuran Tetap	-			-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-		-	-
Kehutanan	-	4. 05 101	1. 53 - 35	-	15 155.326
DR					
IHPH					
PSDH	-	4 .36 .01	1.4 6-4 5	-	15 135 .70
Perikanan	130. 30.680	-	316.63 .203	-	19 .9 - 1
Grand Total	86.096.7 .224	12.358.070.139	23.010.479.672	87.772.067.690	13.332.247.223

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tanjung Pinang

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2020	KB TA 2019	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 85/PMK.07/2021)	Realisasi LB s.d TA 2019 (KEP-3/KN.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2019 (Kolom 3-Kolom 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-			-	-
PPh				-	-
PPh Pasal 21			-	-	
PPh Pasal 25/29		-	-		
PBB	-	-	-		-
Bagi Rata	-	-			-
Bagian Daerah Migas				-	-
Bagian Daerah Non Migas				-	
Bagian Daerah Pasal 26 ayat 2		-	-		-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		-
Bagian Daerah Pertambangan	-				-
Bagian Daerah Kehutanan				-	
Bagian Pemerintah Migas		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	-		-
Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi					-
Bagian Pemerintah Pertambangan				-	
Bagian Pemerintah Perkebunan		-	-		
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-		-
PPh 21	-	-			-
CHT		1.287.941	47.197.122	324.156.127	123.030.935
Migas			-	-	
Minyak Bumi 15%		-	-		
Minyak Bumi 0,5%	-	-			-
Minyak Bumi dari Wilayah Kerja Khusus	-	-		-	-
Gas Bumi 13,5%	-			-	-
Gas Bumi 0,5%				-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Pertambangan		-	947.197.122	297.156.127	123.030.935
Landrent	-	-	-		-
Royalti	-	-	947.197.122	297.156.127	523.730.985
Panas Bumi	-			-	-
Iuran Produksi			-		
Iuran tetap		-	-		-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-		-
Kehutanan	-	1.287.941			-
DR				-	
IUPHH		-		-	
PSDH	-	1.287.94-	-		-
Perikanan	-	-			-
Grand Total	-	1.287.941	947.197.122	324.156.127	523.353.921

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tanjung Pinang (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester TA 2020 (KMK No. [illegible]/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	11.434.040.536	-	4.519.455.059	6.931.549.192	6.971.576
PPh	9.058.800.037	-	4.071.340.408	4.987.529.131	-
PPh Pasal 21	7.452.237.212	-	3.745.763.600	3.706.473.417	-
PPh Pasal 25/29	1.606.635.169		325.577.600	1.281.057.869	
PBB	2.371.433.537		416.386.000	1.953.016.132	6.971.576
Bag. Rata	591.959.998		266.689.107	1.325.270.299	
Bagian Daerah Migas	136.608.033	-	163.294.106	-	9.686.008
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Panas Bumi			-		
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Perhutanan	-	-			-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	211.645.857	-	1.569.500	202.076.357	-
Biaya Pemungutan Migas	5.107.063	-	5.750.109	-	285.587
Biaya Pemungutan Non Migas	-				
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-			
Biaya Pemungutan Perhutanan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.755.317		152.000	6.070.317	
CHT	3.737.318	-	1.730.355	1.007.463	-
SDA	39.314.362.303	13.834.121.339	146.743.830	39.048.640.463	3.212.544.144
Migas	39.131.106.180	13.728.211.603	635.601.320	39.048.640.083	13.553.217.305
Minyak Bumi 15%		11.834.130.041	509.097.000		12.342.228.581
Minyak Bumi 0,5%	-	391.080.822	10.804.980		410.995.722
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Gas Bumi 30%	38.317.080.565	-	106.653.700	38.408.827.165	-
Gas Bumi 0,5%	626.815.619	-	201.300	555.015.618	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba		105.909.736	185.316.050		291.225.776
Landrent	-				
Royalti	-	105.909.736	185.316.050		291.225.775
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi		-	-	-	-
Iuran Tetap		-		-	
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	678.635		10.895.550		10.206.945
DR	-	-	-	-	-
IIUPH		-		-	
PSDH	778.635		10.895.550		10.206.945
Perikanan	154.185.980		311.661.000		157.691.029
Grand Total	50.747.402.374	13.834.121.339	5.663.205.658	45.985.290.175	3.219.515.659

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lingga

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2020 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2020 (KEP. No. 8/PK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 (PMK No. 8/KM.7/2021)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
Pajak			874.039.710	453.372.938	520.666.772
PPh			902.153.312	445.276.430	520.666.772
PPh Pasal 21			448.153.312	445.276.430	520.666.772
PPh Pasal 25/29					
PBB			10.695.928	10.695.928	
Pajak Kota					
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas			6.468.878	6.468.878	
Biaya Pemungutan Bidang Pajak					
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya					
Biaya Pemungutan Sektor Migas			4.426.950	4.426.950	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
PPnBM					
SDA		5.676.233	1.592.827.109		1.592.831.509
Migas			130.196		130.196
Minyak Bumi 15%			39.679		39.679
Minyak Bumi 0,5%			1.332		1.332
Minyak Bumi Sebelum Otonomi Khusus					
Gas Bumi 30%			90.683		90.683
Gas Bumi 0,5%			1.512		1.512
Gas Bumi Sebelum Otonomi Khusus					
Minerba			1.592.696.913		1.592.696.913
Iuran Tetap					
Royalti			592.653.802		1.592.653.802
Panas Bumi					
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan		5.676.233			
DR					
PSDH					
Perikanan		5.676.233			
Grand Total		5.676.233	2.596.901.132	58.373.292	2.515.483.940

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Lingga

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Perhitungan KB DBH Sebelum TA 2020 (KMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum diperhitungkan	LB TA 2020 yang belum diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	7.391.721.262		2.017.070.038	5.374.651.224	76.282.000
PPh	4.858.942.270		2.309.722.130	2.549.220.140	
PPh Pasal 21	4.192.742.364		2.308.229.030	1.884.513.334	
PPh Pasal 26/26	764.199.186	-	139.156.200	624.043.086	-
PBB	2.905.343.992	-	592.912.830	1.553.358.128	76.282.000
Bagi Rata	1.901.026.909	-	268.880.730	1.236.270.098	-
Bagian Daerah Migas	129.467.961		101.354.700		63.001.713
Bagian Daerah Non Migas	506.736.350		12.900.000	202.952.450	
Bagian Daerah Pemda Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pemerataan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Desentralisasi	221.108.206		25.816.620	294.701.400	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	315.558.207		5.000.000	206.004.707	
Biaya Pemungutan Migas	5.547.285	-	6.500.000		6.040.315
Biaya Pemungutan Non Migas	18.795.617	-	460.400	9.761.322	-
Biaya Pemungutan Pemda Penghasil			-	-	
Biaya Pemungutan Pemerataan					
Biaya Pemungutan Desentralisasi	14.405.536	-	1.211.000	13.197.939	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.780.017	-	1.383.670	6.696.347	-
DBH	2.707.318		1.735.558	1.305.462	-
PBHA	90.796.736.776	12.010.282.115	1.283.117.100	13.233.901.791	14.762.062.790
Migas	89.754.896.488	11.226.211.603	620.051.200	89.010.970.942	12.762.211.036
Alokasi Pusat 15%	-	11.654.130.68	505.047.600	-	13.541.248.56
Alokasi Pusat 0,5%	-	39.080.922	6.927.600	-	415.983.522
Setoran Lebih dalam Rekening Umum			-	-	-
Dan Bagi 84,5%	58.017.690.816		102.833.700	57.702.857.116	
Dan Bagi 0,5%	576.815.016		1.811.800	55.014.816	
Dan Bagi Selain Bagian Daerah	-				
Khusus	1.445.052.313	677.070.652	266.414.638	1.749.163.813	759.196.977
Tambahan	-	677.070.652	93.574.038	-	759.596.477
Reguler	1.445.052.313		195.868.320	1.749.163.813	-
Dana Desa					
Insentif Pemerataan					
Insentif Daerah	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan		10.077.903	42.105.375	-	32.160.435
DR					
PITPE	-	-			
PSDH	-	10.077.903	42.105.375	-	32.160.435
Perikanan	138.148.240		816.581.200	-	137.694.020
Grand Total	96.710.617.329	12.017.282.115	4.020.702.351	65.470.994.231	18.505.963.605

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bintan

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KURANG BAYAR TA 2020	KURANG BAYAR TA 2020	LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 21/PMK.07/2021)	Realisasi LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 33/PMK.07/2021)	Sisa LEBIH BAYAR TA 2020 (PMK No. 33/PMK.07/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]
Pajak		-	734.444.833	315.769.706	418.675.127
PPh	-	-	660.097.833	90.842.706	569.255.127
PPh Pasal 21	-	-	660.097.833	90.842.706	569.255.127
PPh Pasal 25/29					-
PBB			224.417.269	224.417.269	-
Cukai Hasil Tembakau					-
Pajak Daerah	-	-	-	-	
Pajak Daerah Provinsi	-	-	-		
Pajak Daerah Kabupaten/Kota					-
Pajak Daerah Perkebunan					-
Pajak Daerah Perkebunan		-	209.888.563	209.888.563	
Pajak Daerah Provinsi Lainnya	-	-	-		
Biaya Pemungutan Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Non Migas					-
Biaya Pemungutan Pajak Pusat			-		-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Daerah			11.318.368	11.318.368	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
CHT		-	-	-	-
PNBP	-	207.936	266.434.166	-	266.434.166
Migas	-	-			
Minyak Bumi PNBP					-
Minyak Bumi SDA					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					-
Gas Bumi 30%	-	-	-		-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Minerba			266.434.166		266.434.166
Landasan			266.434.166	-	266.434.166
Kehutanan				-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	
Iuran Produksi	-	-	-		
Iuran Tetap	-	-			-
Setoran Bagian Pemerintah					-
Perikanan		1.130.953	-	-	-
IUP	-	-	-	-	
IHPB	-	-			
PNBP		1.207.890			-
Perkebunan				-	-
Grand Total		927.936	1.050.673.068,9	317.969.706	732.675.015

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Bintan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	LB Definitif TA 2021	LB Definitif TA 2020	Pagu DBH Definitif TA 2021 (PMK No. 5/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang Belum Diperhitungkan	LB TA 2021 yang Belum Diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	9.092.517.255	-	4.951.378.756	5.564.905.560	922.071.039
PPh	6.169.271.104		2.459.070.730	3.710.618.004	
PPh Pasal 21	5.591.542.709		3.297.318.280	2.294.224.429	
PPh Pasal 25/29	930.128.359		178.324.030	751.804.379	-
PPN	2.650.410.069	-	2.317.377.970	333.032.099	933.672.039
Pajak Bea	1.94 .351.963	-	365.669.700	726.970.238	-
Pajak Dalam Negeri	714.783.906	-	185.252.620		71.001.894
Pajak Daerah Non Migas	230.242.257		32.877.100	141.006.117	
Pajak Daerah Pajak Dalam					-
Pajak Daerah Pajak Alat			-	-	-
Pajak Daerah Pajak Kendaraan	34.764.746	-	292.831.850	-	236.530.931
Pajak Daerah Sarang Burung	207.870.207		19.500.000	141.506.207	
Pajak Penerangan Migas	3.773.300		6.192.200		3.455.144
Pajak Penerangan Non Migas	5.673.393	-	1.764.900	4.306.093	-
Pajak Penerangan Dana Bagi	-	-	-	-	
Pajak Penerangan Perusahaan					
Pajak Penerangan Perusahaan	1.021.909		12.123.900		10.539.000
Pajak Penerangan Selain Tersebut	3.751.484		650.100	6.055.441	-
CHT	2.573.316	-	737.838	1.055.466	
SDA	39.356.760.074	12.678.770.093	1.090.562.800	38.053.718.968	11.617.052.390
Migas	39.317.790.165	12.278.271.603	681.061.200	38.013.610.968	12.152.271.570
Minyak Bumi 15%		11.911.100.693	308.967.900	-	13.043.203.581
Minyak Bumi 0,5%	-	294.080.910	6.947.600	-	413.988.709
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	38.517.680.867	-	168.855.700	38.108.817.167	
Gas Bumi 0,5%	639.871.298		1.810.900	635.013.418	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Kehutanan		1.121.198.792	305.610.076	-	1.937.0 - 547
Iuran Hasil	-	16.525.969	2.450.476	-	18.970.737
Provisi	-	1.414.973.939	303.059.600	-	1.718.0 -.720
Iuran Izin	-	-			
Iuran Produksi					
Iuran Hasil					-
Setoran Bagian Pemerintah	-		-	-	-
Kelautan	32.895.61	-	10.977.525	1.937.086	
DK					
LOLL					-
DPTC	32.895.61	-	10.976.525	1.937.086	-
Perikanan	159 .86.580	-	316.63 .500	-	137.691.053
Grand Total	47.301.075.599	13.833.7 .0.033	6.320.527.532	44.1 1.857.498	14.977.0 .0.362

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Papua Barat

(dalam rupiah)

Jenis DBH	TA 2018	TA 2019	Realisasi TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyelesaian DBH TA 2019 (KVK No. 1/KM.7/2021)	Sisa Realisasi TA 2019 (KVK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4)-(5)
Pajak			357,787,764	357,787,764	-
PPh			2,628,252	2,628,252	
PPh Pasal 21	-				-
PPh Pasal 25/29	-	-	2,628,252	2,628,252	-
PBB	-	-	354,654,413	354,654,413	-
Bea Bea		-	-	-	
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-		218,810,135	218,810,135	
Bagian Daerah Pasca Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan		-	-	-	
Bagian Daerah Kehutanan Lainnya					
Biaya Pemungutan Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	53,373,974	53,373,974	-
Biaya Pemungutan Pasca Bumi			-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan					
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-			-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai			-	-	
SDA		1,389,195,140	171,103,022,917	15,821,547,807	155,281,475,110
Migas	-		159,102,549,743	15,154,629,624	157,916,919,623
Minyak Bumi 15%	-	-	8,663,549,064	8,663,549,064	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Kerjasama Khusus		-	150,439,000,679	6,490,980,560	143,948,019,559
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Kerjasama Khusus	-				
Panas Bumi	-	-	660,668,687	-	660,668,687
Landaran	-	-	660,668,687	-	660,668,687
Bonus		-	-	-	-
Pertambangan Umum					
Timah Produksi					
Emas Produksi	-	-		-	-
Sewa Lahan Area Pertambangan	-	-	-	-	-
Kehutanan		1,389,195,140	1,667,509,378	1,667,509,378	-
PSDH		851,809,897			
DBHP	-		1,667,509,378	1,667,509,378	
Reboisasi	-	537,685,143	-	-	-
Perikanan		-	-	-	-
Grand Total		1,389,195,140	171,788,240,073	17,178,848,591	154,609,391,482

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi: Papua Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	SK Menkeu TA 2020	LS Oktober TA 2020	Penyaluran KB DBH Sebelumnya TA 2020 (PMK No.8/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum Disalurkan	LB TA 2020 yang belum Disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
Pajak	51.075.358.316	-	18.644.771.020	32.510.787.216	-
PPh	9.964.207.434	-	6.913.659.100	3.050.548.334	-
PPh Pasal 21	8.432.656.715		6.707.108.700	1.725.547.915	-
PPh Pasal 25/29	1.531.661.321		206.550.400	1.325.000.921	
PBB	41.111.150.882		11.730.112.920	29.380.737.962	
Bagi Rata		-	-		
Bagian Daerah Migas	34.485.361.248	-	10.668.587.806	23.816.773.442	-
Bagian Daerah Non Migas	860.570.631		34.535.200	825.035.431	-
Bagian Daerah Pasca Bagi-H				-	
Bagian Daerah Pertambangan	2.262.434.439		978.606.500	1.283.827.939	
Bagian Daerah Perbendaharaan	1.592.162.982	-	323.697.302	1.268.465.682	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	692.917.457	-	53.700.900	639.216.557	-
Bagian Pemerintah Migas	706.271.331		177.981.105	528.290.226	-
Bagian Pemerintah Non Migas	11.371.197		9.308.523	2.062.674	
Bagian Pemerintah Pasca Bagi		-	-		
Bagian Pemerintah Perbendaharaan	22.495.383	-	13.054.000	9.441.383	-
Bagian Pemerintah Pasca Bagi-H	34.348.187		7.270.123	27.078.064	
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	11.348.301		963.120	10.385.301	
DAU	-	-	-		
DAK	582.25 .230.75	1 .54 .741 .75	26.546.301.025	564.019.301.701	124.599.814.405
Migas	534.406.580.786	1 .5 .585.701	10.578.207.320	530.139.297.365	97.461.456.59
Migas Bagi-H 15%		6.017.009.101	3.020.000.000	-	6.359.373.71
Migas Bagi-H 3,5%			-	-	
Migas Bagi-H Sektor Lainnya Otsus	-	1.0 3.3.917.601	6.949.015.200		110.172.902.690
Gas Bumi 69%	69.705.536.436	-	586.783.305	69.118.010.980	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		-
Gas Bumi Bagi-H Sektor Lainnya Otsus	64.723.373.830		3.712.177.100	100.960.776.400	-
Minerba	9.4 6.4 .5 7	22.790.097	93.698.897	9.267.363.60	78.035.162
Landrent		22.790.097	50.248.075	-	7 .035.162
Rewarti	9.0 .3 0.060	-	43.450.825	9.267.363.610	
Pasca Bagi	-	-	-		-
Jangka Panjang	-	-			-
Jangka Pendek				-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya			-	-	
Kehutanan	39.826.736.91	1.077.264.10	9.588.355.635	30.316.270.17	1.0 .1.022.050
DR	35.695.922.281	-	5.875.356.471	29.720.132.80	-
PSDH	-	1.077.369.102	1.713.01 .50	-	.553.302.550
PSDH	4.90 .3 6.6 9		3.267.928.70	258.6 0.67	
Perikanan		-	-		
Grand Total	9 .736.836.97	1 .441.7 .425	39.411. 47.9	60 .3 .776. 7	124.6 6.9 .400

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Fak Fak

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	Alt TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Tanpa Indikasi LB s.d TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	Selisih LB s.d TA 2019 (KMK No. 8/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Total	-	-	1.202.144.081	1.202.144.081	-
PPh	-	-	1.202.144.081	1.202.144.081	-
PPh Pasal 21			1.136.248.274	1.136.248.274	-
PPh Pasal 25/29			65.895.807	65.895.807	-
PBB			-	-	-
Sektor Lain			-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah Non Migas	-	-			-
Bagian Daerah Pasal 21					-
Bagian Daerah Perkebunan				-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	-	-	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-		
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	
Biaya Pemungutan Pasal 21	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pertambangan					-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya				-	-
CHT	-	-	-	-	
SDA	-	343.980.538	4.057.737.538	257.432.702	3.800.304.836
Migas	-		3.210.240.697	274.432.702	2.935.707.995
Migas Pasal 22			2.014.068.041	258.672.702	1.755.395.339
Migas Pasal 0,5%			-	-	-
Migas Pasal 22 dalam Rangka Ekspor	-	-	-	-	
Gas Bumi 30%	-	-	1.168.172.656		1.168.172.656
Gas Bumi 0,5%	-	-			
Gas Bumi dalam Rangka Ekspor	-	-			-
Minyak			2.810.171.139	-	2.810.171.139
Landrent			2.810.350.210	-	2.810.525.210
Dayasa			1.343.019	-	1.343.019
Panas Bumi	-	-	-		
Iuran Produksi	-	-	-		
Iuran Tetap					-
Setoran Bagian Pemerintah				-	-
Pertambangan		343.980.538	59.226.000	-	59.226.000
PR	-	-	-		
PDPH			59.226.000		59.226.000
PSDH		343.980.538		-	-
Perikanan			-	-	
Panas Bumi	-	343.980.538	7.259.835.217	1.457.576.785	5.801.997.132

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Fak Fak

(dalam rupiah)

JENIS DBH	Alokasi Definitif TA 2020	TB DBH TA 2020	Penyaluran DBH Berdasarkan PMK TA 2021 (PMK No. 8/KMK.7/2021)	DBH TA 2020 yang sudah diselesaikan	DBH TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
PPh	10.501.277.648		2.701.721.720	8.575.2[illegible].530	[illegible].302.642
PPN	3.3[illegible].241.891		549.766.670	789.280.251	
PPh Pasal 21	1.205.207.719	-	524.565.930	730.711.349	
PPh Pasal 25/29	190.709.402	-	7.170.750	82.328.742	-
PBB	9.565.096.707	-	1.860.987.120	7.780.301.394	9.[illegible]49.642
Pajak Rokok	1.9[illegible].378.308		208.389.770	1.726.270.294	
Bagian Daerah Hasil Migas	6.[illegible]8.28.285	-	1.327.910.110	5.040.419.185	
Bagian Daerah Hasil Migas	26.021.956	-	1.3.300	23.510.756	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-		-
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	648.43[illegible].496	-	17.876.300	520.456.396	-
Bagian Daerah Perikanan	2.468.580		80.107.300	-	77.06[illegible].770
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.090.007		8.604.300	206.034.707	
Biaya Pemungutan Migas	279.797.076	-	9.657.705	169.099.986	-
Biaya Pemungutan Non Migas	948.067	-	72.00[illegible]	955.057	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-			-	
Biaya Pemungutan Perikanan	27.[illegible].086		5.079.300	97.677.886	
Biaya Pemungutan Perkebunan	133.963	-	4.090.950		3.996.507
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	3.065.178	-	525.930	7.062.5[illegible]	-
CHT				-	
SDA	10.7[illegible].228.471	1.[illegible].[illegible].099	1.565.814.950	15.[illegible].774.[illegible]	1.4[illegible].[illegible].291
Migas	11.215.91[illegible].961	[illegible].[illegible].599	165.813.420	1.[illegible].515.[illegible]	1.152.[illegible].099
Minyak Bumi 15%	-	(9[illegible].[illegible].[illegible]	60.921.420		1.152.402.099
Minyak Bumi 0,5%	-	-		-	-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-			-	
Gas Bumi 30%	1.215.[illegible].[illegible]		95.[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible]	
Gas Bumi 0,5%			-		
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Mineral	[illegible].[illegible].[illegible]	-	8.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Batubara	-	-		-	-
Panas Bumi	[illegible].[illegible].[illegible]		8.221.[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	
Pertambangan Umum				-	
Iuran Produksi			-		
Iuran Tetap	-	-	-		-
Sewa Tanah Negara Penerimaan	-	-			-
Kehutanan	3.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible].[illegible]	2.[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]
PSDH			-	-	
DR	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Luar Negeri	3.[illegible].[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	-
Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible]		210.[illegible].[illegible]	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Grand Total	27.3[illegible].[illegible].[illegible]	1.[illegible].[illegible].[illegible]	3.[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]	[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Manokwari

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	SISA TAHUN [illegible]	KURANG BAYAR TAHUN 2021	LEBIH BAYAR TAHUN 2021 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian LEBIH BAYAR TAHUN 2021 (PMK No. 3/PMK.07/2021)	Sisa LEBIH s.d. TA 2019 (PMK No. 7/PMK.07/2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak		-	5.705.312.212	2.101.931.790	3.276.112.772
PPh		-	176.112.001		1.176.112.001
PPh Pasal 21			-		
PPh Pasal 25/29	-		1.176.112.001	-	1.176.112.001
PBB	-		5.529.932.211	1.405.351.460	4.124.580.751
Bagi Hasil					-
Bagian Daerah Migas		-	1.924.102.117	1.705.931.790	418.238.327
Bagian Daerah Non Migas		-	3.451.455.170		3.451.126.170
Bagian Daerah Pasal 21	-		-	-	-
Bagian Daerah PPh Perseorangan				-	-
Bagian Daerah PPh Perusahaan		-			
Bagian Daerah PBB & Lainnya		-	-		
Dana Pengembangan Migas	-		118.785.080	-	118.585.080
Dana Pengembangan Non Migas	-		129.129.077	-	129.426.954
Dana Pengembangan Daerah Pasca Tambang		-			-
Dana Pengembangan PPh Perseorangan		-	-		
Dana Pengembangan Perusahaan	-		-	-	
Dana Pengembangan Sektor Lainnya	-			-	-
DBH CHT		-			-
DAK		94.260.693	7.257.270.509		7.257.270.509
Migas			5.774.203.153	-	5.774.203.153
Minyak Bumi 15%	-		2.074.079.047	-	2.074.059.047
Minyak Bumi 0,5%	-			-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-			-
Gas Bumi 30%		-	1.700.144.091		1.700.144.091
Gas Bumi 0,5%		-			
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-		-	-	
Minerba	-		3.736.107.123	-	3.736.107.123
Panas Bumi	-		3.733.261.123	-	3.733.261.123
Royalti		-	2.846.000		2.846.000
Pesona Wisata		-			
Dana Prasarana		-	-		
Dana Setup	-		-	-	
Reklamasi dan Pascatambang	-			-	-
Kehutanan		94.260.693	444.960.000		444.960.000
DR		-	-		
PSDH			444.960.000	-	444.960.000
DBHDR	-	94.260.693		-	-
DI Barat	-			-	-
Grand Total		94.260.693	13.962.374.721	3.507.931.490	10.454.442.231

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Manokwari

(dalam rupiah)

JENIS DBH	Alokasi Definitif TA 2020	Alokasi Definitif TA 2020	Pengalokasian DBH Definitif Berdasarkan TA 2020 (KMK No. 393/KMK.07/2020)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	6.606.858.476		3.621.963.300	3.015.894.957	10.715.670
PBB	3.556.730.031	-	1.63 .242.000	4. .54.345.0 1	
PPh Pasal 21	3.497.764.801	-	1.537.098.000	5.807.598.501	
PPh Pasal 25/29	351.496.110	-	47.117.000	397.372.110	
BPHTB	4.320.182.537		901.106.200	3.975.146.015	10.715.670
Bagi Rata	2.263.9 8.796		201.010.300	2.074.110.196	-
Bagian Daerah Migas	471.324.6 6	-	4 0.046.500	-	8.822.542
Bagian Daerah Non Migas	1 3.170.120	-	88.500.300	155.136.620	
Bagian Daerah Pasar Bersama					
Bagian Daerah Tarif Dasar	957.720.018		9 .732.100	867.019.119	-
Bagian Daerah Tambahan	1 03 7 .5.013		130.695.700	864.019.503	-
Bagian Daerah Selisih Lainnya	213.799.027	-	8.604.300	2 1.014.707	
Biaya Pemungutan Pusat	15.123.48		14.520.003		892.119
Biaya Pemungutan Non Migas	8.205.167		1.051.800	9.950.037	-
Biaya Pemungutan Daerah Sendiri	-			-	-
Biaya Pemungutan Perbendaharaan	35.962.274	-	4.304.500	30.037.726	
Biaya Pemungutan Kebebasan	91.737.330		5.633.600	4 .103.730	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	9.795.178		932.500	7 62.6 5	-
DFT	-	-	-	-	-
SDA	15.055.702.140	785.256.200	1.043.839.650	14.786.666.154	990.332.187
Migas	12.9 7.0 0.681	785.256.200	192.7 1.400	13.736.1 1.891	781.909.890
Minyak Bumi 15%		7 5.2 5.200	41.372.600		781.909.890
Minyak Bumi 3,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	13.82 .600.681	-	85 963 300	2 736 681 381	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Minerba	1.037.082.0 0		7 .22. 50	1.330.0 1.300	
Perikanan					
Panas Bumi	1.5 7.0 2.0 5		7 .22. 50	1.3 0.0 4.3 0	-
Pertambangan Umum	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Iuran tetap					
Pertambangan Panas Bumi					
Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pungutan Lainnya	-6 .6 5.46	-	5 .0 5.9 5	-	1 .720 -40
Lainnya	-	-	-	-	-
Hibah					
DBHCT	7 1.2 .4 9		3 .0 7 .9 5		11.3 9.0 3
Pendanaan	2 .9 7.0 0		2 7.0 1.0 6	-	5 .9 0.6 5
Grand Total	25.6 2.145.6 7	785.256.200	5.665 .7 .650	22 .6 .781.141	1 02 .7 -9 62

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sorong (dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d. TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4)-(5)
Pajak			499.571.019	272.331.043	227.240.024
PPh	-	-	-	-	
PPh Pasal 21	-	-	-		
PPh Pasal 25/29	-	-	-		
PBB			499.571.019	272.331.043	227.240.024
Bea Meterai					-
Pungutan Daerah Migas				-	-
Pungutan Daerah Non Migas	-	-	209.867.960	-	209.867.960
Pungutan Daerah Pasir Besi	-	-	-		
Pungutan Daerah Perkebunan					-
Pungutan Daerah Perkehutanan			62.423.000	62.423.000	-
Pungutan Daerah Lain-lainnya	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Non Migas			7.872.044		7.872.044
Biaya Pemungutan Pasir Besi				-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkehutanan	-	-	165.307.712	165.307.712	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					-
DJP				-	-
DJA	-	161.031.298	13.903.227.545	1.023.648.817	12.060.378.728
Migas	-	-	1.839.743.346	1.023.648.817	16.215.894.729
Minyak Bumi 15%	-	-	11.192.792.531	1.023.648.817	10.169.143.714
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dalam rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%			241.950.133	-	241.950.133
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-		
Mineral	-	-	19.784.000		19.784.000
Batubara			19.784.000		19.784.000
Panas Bumi					-
Pajak			-	-	-
Bunga Deposito	-	-	-	-	
Denda Pajak	-	-	-		
Saldo Anggaran Kekurangan					-
Kehutanan		161.031.298	191.400.000	-	45.400.000
PSDH	-	-	-	-	-
DBHPSDH	-	-	191.400.000	-	191.400.000
DBHDR		161.031.298			
Perikanan				-	-
Grand Total		161.031.298	15.512.796.192	1.295.979.860	14.216.816.332

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Serang

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB DBH TA 2020	LB DBH TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan TA 2020 (KEP-[illegible]/PK.07/2021)	DBH TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum dikembalikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	52.110.370.691		10.941.867.700	21.202.181.991	
PPh	3.389.846.593		923.456.443	1.447.091.993	-
PPh Pasal 21	2.983.738.408	-	917.796.500	1.565.942.908	-
PPh Pasal 22/23	196.710.385	-	5.660.060	36.450.285	-
PBB	29.737.017.207	-	9.067.258.360	9.774.788.301	
Pajak Lain	1.961.056.690		215.153.700	1.720.270.208	
Bagian Daerah dari Pajak Migas	20.365.355.501		3.021.997.500	7.780.035.801	-
Bagian Daerah dari Pajak Migas	2.837.034	-	1.030.060	1.677.234	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perikanan					
Bagian Daerah Pertambangan	7.107.360.196		722.367.700	2.384.010.096	
Bagian Daerah Kehutanan Iuran	2.256.927		10.909.807	201.017.507	-
Bagian Pertambangan Migas	873.653.887	-	324.655.800	549.975.087	-
Bagian Pertambangan Non Migas	184.476	-	68.100	70.076	
Bagian Pertambangan Panas Bumi					
Bagian Pertambangan Perikanan	-		-	-	-
Bagian Pertambangan Perhutanan	193.373.731	-	56.136.802	137.236.935	
Bagian Pertambangan Hutan Reboisasi	7.961.076	-	400.000	7.561.076	
CHT					
SDA	15.835.204.955	8.857.127.715	1.832.136.750	12.200.467.270	10.444.515.761
Migas	10.355.301.759	8.778.926.807	1.774.925.500	10.652.975.153	8.378.635.307
Minyak Bumi 15%		8.778.926.807	270.607.500	-	8.508.633.309
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	10.636.201.752		106.330.630	10.529.871.162	-
Gas Bumi 0,5%	-		-	-	-
Gas Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	1.917.716.203	38.835.252	16.470.750	1.556.490.577	41.090.025
Lanjutan		38.835.252	5.245.473		41.090.025
Royalti	1.917.716.203		11.224.125	1.556.490.578	
Panas Bumi	-				-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap		-	-	-	-
Setoran Lainnya Pemerintah		-			
Perikanan		40.315.463	1.013.942.500		1.054.201.909
DR	-		-	-	-
IUPH	-	-	-	-	-
PSDH		678.960.750	1.013.942.500		1.692.724.909
Dana Reboisasi	150.196.990		106.581.000		107.091.020
Grand Total	44.742.071.639	8.957.120.715	12.780.581.450	33.602.649.261	10.444.515.761

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Sorong

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LPSAL TA 2019 (PMK No. 213/PMK.07/2021)	Penyaluran LS s.d TA 2019 (PMK No. 210/PMK.07/2020)	Sisa KB s.d TA 2019 (PMK No. 210/PMK.07/2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-		3.677.420.078	626.461.200	3.121.069.572
PPh	-	-	76.675.868	76.675.868	
PPh Pasal 21	-	-	76.675.868	76.675.868	
PPh Pasal 22/26		-	-		
PBJT			3.130.071.909	626.676.332	2.101.989.577
Dagi Hasil					-
Bagian Daerah Migas	-	-	3.430.644.306	329.575.335	3.101.069.375
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pasal 21		-			
Bagian Daerah Perbendaharaan					-
Bagian Daerah Perkebunan				-	-
Bagian Daerah Pasal Lainnya	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Migas		-	-		
Bagian Pemerintah Non Migas					-
Bagian Pemerintah Pasal 21				-	-
Bagian Pemerintah Perbendaharaan	-	-	-	-	
Bagian Pemerintah Perkebunan		-			
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya					-
PPh	-			-	-
BHT	-	89.614.191	447.291.259	-	1.447.091.259
Migas	-	-	447.291.259		1.447.091.259
Minyak Bumi 15%		-	447.291.259		1.447.091.259
Minyak Bumi 0%					-
Minyak Bumi (bukan Produksi Ladang)	-			-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Ladang	-	-	-		
Panas Bumi		-			
Landrent					-
Bagi Hasil					-
Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Pajak Perdesaan	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-		
Pajak Perdesaan Perkotaan					
Cukai		89.614.191		-	-
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	-	-		
PSDH		89.614.191			
Perikanan					-
Grand Total	-	89.614.191	4.124.711.337	626.461.200	4.349.060.831

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kota Sorong

(dalam rupiah)

[illegible] DBH	KB DI TAHUN TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Sebelum TA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	1.870.414.784	-	(539.436.360)	2.347.315.363	7.810.404
PPh	1.376.775.705	-	2.048.792.100	(672.153.608)	-
PPh Pasal 21	1.272.097.200		2.007.879.700	735.077.300	
PPh Pasal 25/29	604.099.176		90.972.400	513.876.048	
PBB	2.463.638.576		191.340.700	1.909.162.352	7.810.404
Bea Bea	1.051.550.608	-	555.858.700	1.726.370.396	-
Bagian Daerah Migas	150.077.417	-	57.572.961	-	7.476.532
Bagian Daerah Sda Migas	78.112.319		20.607.700	57.604.480	
Bagian Daerah Panas Bumi					
Bagian Daerah Perikanan	-				
Bagian Daerah Kehutanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Lainnya	214.386.607	-	9.567.100	204.820.507	
Biaya Pemungutan Pajak	5.080.304		7.071.100		333.931
Biaya Pemungutan Sda Migas	2.933.868	-	77.000	2.856.868	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perikanan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Kehutanan					
Biaya Pemungutan Pertambangan Lainnya	3.047.173		223.000	2.824.173	
DAU	-	-	-	-	-
DBH	13.147.197.297	1.092.180.089	1.062.467.450	12.703.855.264	1.510.206.109
Pajak	11.276.422.081	1.092.180.089	156.318.450	11.120.103.631	1.152.302.089
Minyak Bumi 15%		1.092.180.089	60.221.100		1.152.302.089
Minyak Bumi 0,5%	-	-			
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	11.218.912.581	-	95.097.050	11.123.815.581	-
Gas Bumi 70%			-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus			-		
Migas	150.392.960		5.229.000	145.163.960	
Panas Bumi	-				
Royalti	651.648.553	-	5.229.000	1.042.639.553	
Pajak Bumi		-	-	-	-
Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Bagian Daerah					
Bagian Bagian Pemerintah					
Kehutanan	717.244.270	-	902.049.000	196.200.000	-
DR	-	-	-	-	-
PSDH					
PSDH	717.244.270		902.049.000	196.200.000	
Pertambangan	150.765.000	-	316.800.000	-	57.899.000
Grand Total	9.479.851.368	1.092.180.089	3.569.436.750	16.048.171.142	1.517.206.533

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Raja Ampat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2019	DB s.d TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021)	Penyaluran DB s.d TA 2019 (KEP-26/PK/2021)	Sisa DB s.d TA 2019 (KEP-26/PK/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	2.849.206.484	2.849.206.484	-
PPh	-	-	1.086.906.865	1.086.906.865	-
PPh Pasal 21		-	1.094.7[illegible].343	1.094.7[illegible].343	
PPh Pasal 25/29			668.180.620	668.180.620	
PBB			1.135.301.629	1.135.301.629	
Bagi Hasil					
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Non Migas		-	277.303.946	277.303.946	-
Bagian Daerah Dana Bagi Hasil			-		
Bagian Daerah Dana Alokasi Umum			79.901.050	79.901.050	
Bagian Daerah Dana Alokasi Khusus	-				-
Bagian Daerah Bantuan Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas		-	34.925.709	34.925.709	
Biaya Pemungutan Non Migas			39.827.425	39.827.425	
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-				-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	3.4[illegible].760	3.4[illegible].760	-
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Kelautan Lainnya					
CHT	-	-			-
BLA	-	90.121.937	9.906.[illegible].740	1.[illegible].937.774	8.7[illegible].270.126
Migas		-	7.867.0[illegible].497	1.[illegible].937.774	6.177.012.928
Migas Pasal 4 (3) - 5%			1.791.[illegible].720.723	1.[illegible].937.774	[illegible].832.449
Migas Pasal 0,5%					
Migas Pasal 4 (3) dalam Rangka Otsus	-	-			-
Gas Pasal 4 (3) 30%	-	-	5.[illegible].[illegible].774	-	5.776.709.77[illegible]
Gas Pasal 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Pasal dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba			2.382.227.935		2.382.227.935
Panas Bumi			2.[illegible].[illegible].930		2.[illegible].[illegible].930
Royalti	-		123.[illegible].[illegible]		123.[illegible].[illegible]
Royalti Batu Bara	-	-	-	-	-
Royalti Produksi	-	-	-	-	-
Royalti Sewa		-	-	-	
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	90.121.937			-
IHPH	-	-	-	-	-
PSDH		-	-	-	
DR		90.121.937			
Pertambangan					
Grand Total	-	90.121.937	12.[illegible].[illegible].[illegible]	3.[illegible].[illegible].[illegible]	8.[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Raja Ampat

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DBH Semester I TA 2020 (PMK No. 37/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	8.978.3[illegible].217	-	737.890.260	[illegible]	-
PBB	983.320.908		426.368.200	568.052.708	
PBB Pasal 21	855.730.971		420.568.200	435.162.771	
PBB Pasal 25/29	19.630.937		5.802.800	13.828.137	-
BPHTB	7.303.058.319		845.521.200	5.456.478.119	-
Pajak Rokok	1.931.050.696	-	655.685.760	1.275.370.936	-
Dampak Daerah Migas	1.715.018.787	-	517.825.200	1.228.173.587	-
Dampak Daerah Non Migas	3.117.080.931		97.210.200	3.019.870.731	-
Bagian Daerah Pajak Rokok					-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-			-	-
Bagian Daerah Perimbangan	-	-	-	-	-
Dampak Daerah Selain Lainnya	213.790.037		8.684.200	205.094.707	
Biaya Pemungutan Migas	60.270.290		19.143.100	41.127.190	
Biaya Pemungutan Non Migas	1.[illegible]27.059	-	3.425.200	1.[illegible]1.959	-
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perikanan		-	-		
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	9.085.178		322.500	8.762.678	-
DBH	-	-	-	-	-
DAU	[illegible].745.770.000	[illegible].175.297.439	[illegible].158.711.735	30.777.355.804	[illegible].175.297.439
Migas	11.211.911.091	[illegible].175.297.439	160.068.000	11.120.815.091	[illegible].175.297.439
Minyak Bumi 15%		[illegible].175.297.439	75.871.000		[illegible].175.297.439
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	[illegible].215.911.091	-	85.197.000	[illegible].120.815.091	
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	19.559.136.482		151.356.700	19.407.779.782	-
Panas Bumi	893.311.400	-	56.035.975	837.275.425	-
Royalti	18.665.975.282	-	95.595.325	18.570.379.957	-
Pajak Bumi		-	-		
Bunga Obligasi					
Deposito					-
Subsidi Bagian Pemerintah	-			-	-
Kehutanan	81.[illegible]76.480	-	349.933.475	341.[illegible]42.005	
DR		-	-		
PSDH					
PSDH	8.1[illegible]76.480	-	349.912.175	58.[illegible]64.005	-
Reboisasi	159.156.020	-	3.[illegible]8.800	-	157.[illegible]4.020
Grand Total	40.[illegible]53.[illegible]2.0	.475.297.439	2.351.623.577	37.736.765.861	[illegible]97.[illegible]2.519

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Sorong Selatan (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (PMK No. 5/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-		1.256.536.746	703.134.889	553.401.857
PPh	-	-	151.134.650	-	151.134.650
PPh Pasal 21	-	-			
PPh Pasal 25/29		-	151.134.650		151.134.650
PBB			1.105.402.096	703.134.889	402.267.207
Cukai				-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah Bunga Bank					-
Bagian Daerah Perkebunan			371.131.030	371.131.030	-
Bagian Daerah Pertambangan			650.169.277	267.202.780	382.966.498
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Migas	-	-			-
Biaya Pemungutan Non Migas				-	-
Biaya Pemungutan Pajak Lainnya			-	-	-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	-	-	16.194.351		16.194.351
Biaya Pemungutan Perkebunan			33.207.767		33.207.767
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya				-	-
Cukai		-	-	-	-
SDA	-	91.550.875	5.734.745.646	-	5.734.745.646
Migas	-	-	1.447.091.252		1.447.091.252
Minyak Bumi 15%			1.447.091.252		1.447.091.252
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-		-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Mineral			119.823.250		119.823.250
Landrent			119.823.250	-	119.823.250
Royalti				-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
Dana Iuran		-			-
Subsidi Listrik Perdesaan					-
Kehutanan		91.550.875	4.247.831.194	-	4.247.831.194
IHH	-	-	-	-	-
PSDH	-		4.247.831.194		4.247.831.194
DBHDR		91.550.875			-
Perikanan				-	-
Grand Total	-	91.550.875	7.091.346.692	703.134.889	6.388.211.803

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sorong Selatan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB DBH TA 2020	LB TA 2020	Dialokasikan KB DBH Semester I TA 2021 (PMK No. 7/PM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)=(2)-(9)	(11)
Pajak	4.067.982.030	-	1.304.557.500	3.076.776.108	10.149.022
PBB	80.477.451		447.474.700	356.992.254	-
PBB Pasal 21	513.85 .342		411.7 .700	272. 10.342	-
PBB Pasal 25/29	90.356.312		3.733.000	94.813.272	-
BPHTB	3.463.552.732	-	889.983.300	3.010.811.312	13.143.112
Bagi Rata	1.091.059.968	-	265.099.700	1.729.270.299	
Bagian Daerah Migas	306.293.796	-	370.827.500	-	12.535.607
Bagian Daerah Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Kurang Bayar	-			-	-
Bagian Daerah Pertambangan	198.020.838	-	1.033.7.520	74.372.393	
Bagian Daerah Dana Reboisasi	1.077.557.073	-	137.870.520	949.027.473	
Bagian Daerah Bukan Pajak	2.5.599.027		8.434.500	205.934.707	-
Biaya Pemungutan Migas	1.422.937		12.0 6.500	-	620.705
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-			
Biaya Pemungutan Panas Bumi		-			
Biaya Pemungutan Pertambangan	8.134.029		1.752.020	3.382.550	-
Biaya Pemungutan Perikanan	53.86 .910		6.391.720	47.471.790	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	2.0 3.178	-	322.020	1.702.078	
CHT		-	-		
DBH	13.179.6 3.252	1.913.12 .389	4.6 .270.450	13.66 .655.034	3.66 .473.419
Migas	12. 59.2.091	1.592.1 .389	155.3 .3.450	11.12 .3 .05	1.37 .09.0 9
Minyak Bumi 15%	-	1.9 6.1 .329	6 .221.4 0	-	1.7 .09.0 9
Minyak Bumi 0,5%	-	-			
Minyak Bumi dari Participating Interest		-	-		
Gas Bumi 30%	11.15.9 .051	-	9 .9 .0 0	1 .20 .5 061	
Gas Bumi 0,5%			-	-	-
Gas Bumi dari Participating Interest	-		-	-	-
Mineral	1.55 .26 .953		9.2 .3 0	1.5 .3.9 .0 3	-
Batubara	-	-			
Panas Bumi	1.5 .3 0.9 3	-	9.229.3 3	1.5 .3.9 .9 1	
Pajak Penghasilan		-	-	-	
Bunga Pinjaman				-	-
Denda Pajak	-			-	-
Kehutanan	2.3 .113.7 0	3 0.0 .8.700	9 5.6 .7 3		1.5 3.0 .2.3 0
PSDH	-	-	-	-	-
DBHDR	-	6 2.9 3.7 0	2 6.3 7.1 0	-	1.1 .6 5.6 0
PSDH	155.41 .450	-	6 9.1 .9.3 0		13 .736.430
Perikanan	13 .1 6.3 0	-	31 6.9 .3 0		1 .3 .0 0
Grand Total	17.9 .3 6.12	1.9 3.12 .389	9.770.627.950	13.04 .30.3 0	3.9 .5 1.12

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tidak Bintuni

(dalam rupiah)

Jenis DBH	SBH TA 2019	KB TA 2019	LB (KB TA 2019) (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian SBH TA 2019 (KMK No. 9/KM.7/2021)	Sisa LB (KB TA 2019) (KMK No. 3/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4] - [5]
Pusat	-	-	971.039.105	501.970.046	469.069.059
PPh	-	-	369.070.074	369.070.074	-
PPh Pasal 21	-	-	139.060.240	139.060.240	-
PPh Pasal 22/23	-	-	61.309.796	61.309.796	-
PBB	-	-	469.069.559	-	469.069.559
Jasa Kota	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbatasan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal 25/29	-	-	447.701.785	-	447.701.785
Bagian Daerah Pasal 4(2) Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pasal 21	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan PPh Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perusahaan	-	-	92.380.071	-	92.380.071
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai	-	-	-	-	-
SDA	-	950.691.971	33.827.305.251	14.220.375.810	19.606.929.441
Migas	-	-	32.763.633.102	14.222.473.810	18.541.159.292
Minyak Bumi 15%	-	-	12.899.710.545	566.907.796	12.332.802.749
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dari Terminasi Blok	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%	-	-	18.535.172.857	13.655.402.014	5.269.714.843
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	2.061.672.151	-	2.061.672.151
Landreat	-	-	2.053.826.103	-	2.053.826.103
Iuran Tetap	-	-	7.846.049	-	7.846.049
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	383.691.971	938.905.000	-	938.905.000
IHH	-	-	-	-	-
PSDH	-	383.691.971	938.905.000	-	938.905.000
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	-	383.691.971	36.303.304.029	14.220.375.810	22.082.928.219

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Teluk Bintuni

(dalam ... rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran (KB - LB) Sampai dengan TA 2020 (Kolom 3 = 1 - 2)	KB TA 2020 yang telah diselesaikan	LB TA 2020 yang telah diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=[2 - 3])	(6)
Pajak	179.073.536.098		35.036.101.302	99.824.601.790	-
PPh	9.890.550.515	-	2.599.765.000	5.950.654.543	-
PPh Pasal 21	8.752.634.197	-	2.590.115.000	6.362.438.297	
PPh Pasal 26/ 26	627.702.396	-	9.650.000	628.103.246	
PPN	1.2.560.229.550		23.436.908.300	69.714.231.230	
Bagi Hasil	1.951.959.698		210.000.000	1.720.270.279	
Bagian Daerah Migas	101.280.736.335	-	20.679.707.100	80.601.029.105	-
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Panas Bumi			-	-	
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	4.311.870.089		1.250.639.100	3.070.091.189	
Bagian Daerah Pasal 4 ayat (2)	845.583.490		177.027.100	739.010.299	-
Bagian Daerah Selisih Lebih Bayar	21.370.027	-	8.624.300	206.934.707	-
Bagian Pemerintah Migas	3.790.413.013	-	776.485.700	3.013.910.815	
Bagian Pemerintah Non Migas	-				
Bagian Pemerintah Pajak Panas Bumi	-				-
Bagian Pemerintah Pasal 4 ayat (2)	183.659.756	-	50.422.600	130.239.936	-
Bagian Pemerintah Pasal 25/29	12.326.263		4.830.500	85.477.765	
Bagian Pemerintah Selisih Lebih Bayar	9.050.178		420.000	6.702.678	
CHT	-				-
SDA	148.536.350.897	6.595.705.223	4.006.059.435	145.830.010.287	7.527.624.218
Migas	139.668.622.702	4.571.274.273	1.471.924.000	38.544.073.123	4.878.070.573
Minyak Bumi 15%		4.571.274.273	1.471.924.000		4.878.070.573
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Sebelum Bonus Produksi	-				-
Gas Bumi 30%	139.668.622.702	-	104.549.500	178.594.073.102	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Bonus Produksi		-	-	-	-
Pinalti	1.021.361.933	-	8.221.000	1.712.539.900	
Pertambangan					
Royalti	1.55 .262.550		9.221.000	1.012.539.900	
Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Bonus Produksi	-	-	-	-	-
Bonus Tetap		-	-		-
Pertambangan Panas Bumi					
Kehutanan	6.677.471.193	1.927.393.950	2.859.729.535	5.010.297.212	2.191.930.435
DR	-	-	-	-	-
PSDH		1.921.382.050	687.800.435	-	2.191.930.435
DBHT	5.677.471.262		1.921.190.000	5.010.297.212	
Perikanan	159.146.960		310.021.000		237.091.020
Grand Total	272.170.886.950	6.595.705.223	29.574.732.735	244.830.013.060	7.527.624.218

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Teluk Wondama

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KETETAPAN	REALISASI	LEBIH BAYAR (PMK No. 95/PMK.07/2021)	Penyesuaian (Kep. No. 3/KM.7/2021)	Kurang Bayar (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			1.437.971.803	1.437.971.803	
PPh	-	-	39.941.115	39.941.115	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29	-	-	338.411.115	338.411.115	-
PBB	-	-	1.874.130.685	1.874.130.685	
Bea Jabatan					
Pajak Penghasilan Migas					-
Pajak Penghasilan Non Migas	-				
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau		-	1.950.863.723	1.950.863.723	
Pajak Rokok					
Pajak Penghasilan Perikanan	-				-
Pajak Penghasilan Migas	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau		-	-	-	
Pajak Penghasilan Non Migas					
Pajak Penghasilan Perikanan			74.764.783	74.764.783	-
Pajak Penghasilan Perikanan	-	-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
PDRI					
SDA		190.991.471	6.958.850.391	70.985.959	6.916.864.505
Migas	-	-	6.913.964.443	70.985.959	6.741.864.506
Minyak Bumi 15%	-	-	1.344.059.047	70.985.959	1.978.072.107
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%			2.768.772.094		2.768.772.094
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	-	389.364.749	-	389.364.749
Landrent		-	577.118.720		577.118.720
Royalti			5.916.029		5.916.029
Panas Bumi					
Tarif Progresif	-				-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Sewaan Wilayah Pertambangan	-	-	-	-	-
Kehutanan		190.991.471	791.040.000		791.040.000
DR					
PSDH	-	-	791.040.000	-	791.040.000
PSDH	-	190.991.471	-	-	-
Perikanan					
Grand Total	-	190.991.471	9.397.862.894	1.579.961.739	8.916.864.505

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kalimantan Barat (dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Triwulan IV TA 2020 (KEP-36/PK/2021)	KB TA 2021 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	6.312.570.966		1.119.719.070	5.192.851.896	6.597.902
PPh	1.054.276.114		348.781.950	705.494.164	-
PPh Pasal 21	69.107.591	-	38.192.800	30.914.791	-
PPh Pasal 25/29	78.156.525	-	8.760.150	69.396.375	
PBB	1.274.170.537		77.768.776	1.196.401.761	6.597.902
Cukai Hasil Tembakau	1.991.939.908		265.160.750	1.726.779.158	
Bagian Daerah Migas	850.450.005		212.611.150		637.401
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan	2.017.578.067	-	430.312.760	2.430.080.707	-
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Kehutanan Iuran	215.089.027		8.691.300	206.984.707	-
Biaya Pemungutan Migas	9.775.530	-	10.336.000	-	560.470
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Daerah					-
Biaya Pemungutan Perkebunan	1.033.963.904		8.683.400	105.043.504	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	2.053.178	-	570.500	1.482.678	-
DTL					-
SDA	24.032.969.124	2.299.072.769	1.491.091.078	22.841.950.074	8.315.862.87-
Migas	17.259.020.061	691.180.691	165.318.400	17.784.882.061	1.537.202.691
Migas Bagian 15%	-	691.180.691	69.862.400	-	1.761.043.091
Migas Bagian 0,5%	-	-	-		
Migas Dana Migas dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 30%	11.315.913.761		95.097.020	11.220.816.781	-
Gas Bumi 0,5%	-		-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	551.565.553	-	8.225.020	1.543.630.533	
Iuran Tetap		-	-		
Royalti	1.051.983.933		8.225.020	1.043.758.913	
Panas Bumi					-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Kehutanan	1.107.310.120	1.301.891.150	2.011.217.775		1.305.107.795
PSDH				-	-
DR	-	1.301.893.150	361.715.502	-	1.565.207.602
PSDH	1.107.346.120	-	1.649.502.275		942.736.198
Perikanan	170.150.050		310.581.200		127.091.020
Grand Total	25.013.053.190	2.299.072.769	2.510.081.170	17.857.769.102	9.929.466.776

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Kaimana

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 75/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB TA 2019 (PMK No. 1/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 3/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			707.450.016	107.117.216	600.332.800
PPh			707.117.216	107.117.216	
PPh Pasal 21	-		707.117.216	107.117.216	
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PBB	-	-	360.838.800	-	360.838.800
Bagi Hasil			-	-	
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas	-		247.314.400		247.314.400
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbendaharaan		-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya					
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-				
Bagi Pemanfaatan Migas	-	-		-	-
Bagi Pemanfaatan Non Migas		-	13.524.400	-	3.024.400
Bagi Pemanfaatan Energi Baru			-		
Bagi Pemanfaatan Perkebunan					
Bagi Pemanfaatan Perkebunan	-	-			-
Bagi Pemanfaatan Sektor Lainnya		-	-	-	-
CHT			-	-	
DAK		329.755.681	6.730.191.113	1.812.330.923	1.968.437.190
Migas	-		1.796.922.496	319.671.201	1.477.251.252
Barang Dari SDA	-	-	1.796.813.196	319.720.543	477.251.252
Barang Dari DAK		-	-	-	-
Kilang Tertinggal dalam Rangka Otsus			-	-	
Gas Bumi 20%			20.110.281	20.110.281	
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi Sisa Rangka Otsus	-				
Minerba	-	-	3.765.019.025	1.492.535.719	2.272.483.306
Landrent		-	3.765.019.025	1.492.535.719	2.272.483.306
Royalti			-	-	
Panas Bumi					
Iuran Produksi	-				
Iuran tetap	-	-	-	-	-
Setoran Jasa Pelayanan			-	-	-
Otsus Umum		420.755.681	1.148.840.032	-	1.148.840.032
DTI					
DOKH	-	-	1.148.840.032		1.148.840.032
PSDH		329.755.68	-	-	-
Perikanan		-	-	-	
Grand Total		329.755.681	7.408.247.129	2.249.471.789	5.258.772.093

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Kaimana

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Jml. di TA 2020	LB Jml. di TA 2020	Penyaluran KB TA Sebelumnya TA 2021 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	9.140.281.918	10.877.829	1.693.999.901	7.516.073.717	43.520.223
PPh	1.135.120.439	-	368.915.880	536.480.559	
PPh Pasal 21	1.032.716.078	-	351.820.202	640.895.876	
PPh Pasal 25/29	102.354.330	-	7.095.100	95.259.230	
PBB	2.011.150.020	10.877.829	1.284.020.208	6.438.691.901	43.520.223
Cukai Rokok	1.991.990.958		200.089.709	1.725.270.299	-
Bagian Daerah Migas	3.3.042.541		329.160.900	-	13.873.830
Bagian Daerah Non Migas	59.454.802	-	-	59.454.802	
Bagian Daerah Panas Bumi	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan	3.022.703.867		327.490.709	1.694.210.067	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	10.260.737	20.892.700	-	30.677.137
Bagian Daerah Faktor Lainnya	150.334.207	-	95.368.430	165.965.907	
Iuran Eksploitasi/Royalti Migas	1.801.203	-	72.800.000		5.801.203
Iuran Eksploitasi/Royalti Non Migas	1.779.359			1.779.359	-
Iuran Eksploitasi/Royalti Panas Bumi				-	-
Iuran Eksploitasi/Royalti Pertambangan	294.366.083	-	22.200.000	701.168.058	
Iuran Eksploitasi/Royalti Perkebunan	-	614.402	15.000.000		13.785.702
Iuran Eksploitasi/Royalti Sektor Lainnya	7.219.979		918.000	6.301.979	-
CHT				-	-
SDA	16.614.476.361	2.050.620.645	2.551.320.690	6.865.437.356	2.663.811.291
Migas	1.315.317.283	1.032.780.693	33.300.000	1.790.515.581	1.152.402.099
Minyak Bumi 15%	-	1.032.780.693	30.300.000		1.152.402.099
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus				-	-
Gas Bumi 30%	1.315.317.283		3.000.000	1.790.515.581	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	
Mineral	1.351.063.053	97.684.850	21.418.000	1.542.430.033	110.979.920
Batubara		97.684.850	13.191.000		110.979.920
Panas Bumi	1.351.063.053		8.227.000	1.542.430.033	-
Perikanan			-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Iuran Hasil Hutan			-		
Sebesar Bagian Pemerintah					
Pertambangan	5.998.096.021	920.302.102	2.496.602.690	4.021.782.832	1.294.836.050
PE	-	-	-	-	-
PDPH	-	665.362.102	356.273.050		1.217.295.050
PSDH	5.998.315.247		1.040.329.640	4.021.782.824	
Perikanan	169.160.960		316.931.000		157.994.020
Grand Total	27.502.729.279	2.084.636.579	4.594.921.791	24.440.510.566	2.703.340.236

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Mayfirut (dalam rupiah)

RINCI DBH	KD TA 2016	KD TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyaluran LB s.d TA 2019 (SMC No. 2/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (PMK No. 2/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-	-	474.909.826	474.909.826	-
PPh					-
PPh Pasal 21					-
PPh Pasal 25/29	-			-	-
PBB	-	-	474.909.826	474.909.826	-
Bea Materai	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					-
Bagian Daerah Non Migas					-
Bagian Daerah Panas Bumi	-			-	-
Bagian Daerah Pertambangan	-	-	238.826.134	238.826.134	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	210.025.562	210.025.562	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas				-	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pertambangan			13.013.167	13.013.167	
Biaya Pemungutan Perkebunan			12.956.676	12.956.676	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
OPD	-	-	-		-
SDA		92.850.226	2.505.710.884	1.426.282.367	1.079.428.517
Migas			1.147.091.252		1.147.091.252
Migas Bagi Hasil 15%		-	1.147.091.252	-	1.147.091.252
Migas Bagi Hasil 0,5%	-	-	-	-	-
Migas Bagi Hasil dalam Rangka Otsus	-	-	-		-
Gas Bumi 30%					-
Gas Bumi 70%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					-
Minyak	-	-	-	-	-
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-		-
Panas Bumi					
Bagi Produksi					
Bagi Setoran				-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	92.850.226	1.148.849.632	316.282.367	832.567.265
IHPH					
PSDH			1.148.849.632	316.282.367	832.567.265
DBHT	-	92.850.226	-	-	-
Perikanan	-	-	-		
Grand Total		92.850.226	3.677.910.710	921.282.213	2.111.996.497

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mayburat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	DBH Tahun TA 2020	LRT Tahun TA 2020	Penyaluran KB DBH Tahun TA 2020 [PMK No. 37/PMK.07/2021]	DBH TA 2020 yang Belum Dialokasikan	LRT TA 2020 yang Belum Dialokasikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pajak	3.021.8[illegible].662	182.027.230	3.079.943.000	2.982.9[illegible].550	240.156.[illegible]
PPh	1.157.61[illegible].941		269.8[illegible].000	887.720.191	-
PPh Pasal 21	1.064.836.470	-	269.11[illegible].000	815.717.870	-
PPh Pasal 21/26	68.376.69[illegible]	-	6.774.000	82.607.691	
PBB	2.764.267.07[illegible]	182.027.230	750.857.000	2.116.234.866	213.139.705
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.091.050.998		267.739.000	1.726.210.208	
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	322.082.[illegible]76		322.900.000		10.563.065
Bagian Daerah Non Migas			-	-	-
Bagian Daerah Dana Reboisasi	-	-	-	-	
Bagian Daerah Pertambangan	-	177.112.430	33.557.000		221.284.220
Bagian Daerah Perkebunan	207.153.027		38.213.100	168.910.027	
Bagian Daerah Sylvikultur Hutanan	115.[illegible]94.077		9.03[illegible].000	205.994.[illegible]77	-
Biaya Pemungutan Migas	1.963.380	-	2.496.500	-	337.610
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Panas Bumi					
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		5.479.200	7.106.000	-	3.582.900
Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan	10.260.056	-	1.911.620	8.206.156	
Biaya Pemungutan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.383.178	-	332.500	7.702.[illegible]78	
SDA	12.[illegible]39.217	[illegible].193.199	[illegible].121.250.970	12.[illegible].[illegible].[illegible]04	2.[illegible]43.384
Migas	[illegible].[illegible]15.[illegible].081	[illegible].[illegible]30.699	[illegible]0 [illegible].[illegible]30.430	[illegible]..[illegible]20.[illegible]15.081	[illegible].[illegible]57.401.203
Minyak Bumi (15%)	-	[illegible].093.[illegible]80.693	46.[illegible]31.[illegible]50	-	[illegible].[illegible]52.[illegible]62.[illegible]09
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-		
Mengolah Sendiri dalam Kawasan Usaha					
Gas Bumi (30%)	[illegible].21[illegible].912.081		95.[illegible]9.[illegible]00	[illegible].[illegible]30.[illegible]15.081	-
Gas Bumi (0,5%)				-	-
Gas Bumi dalam Rangka Gross Split	-	-	-	-	-
Mineral	[illegible].35[illegible].[illegible]62.[illegible]33	-	8.[illegible]24.[illegible]00	[illegible].[illegible]49.[illegible]20.[illegible]55	
Iuran Tetap	-	-	-		
Royalti	[illegible].35[illegible].[illegible]06.[illegible]33		8.[illegible]27.[illegible]00	[illegible].[illegible]12.[illegible]83.[illegible]03	
Panas Bumi					-
Setoran Bagi Hasil				-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti Setelah Pengembalian untuk Kahar	-	-	-		
Kehutanan	58.[illegible]23.230		7[illegible].[illegible]60.[illegible]30		[illegible].[illegible]36.[illegible]73
PSDH					-
DR	-	-	-	-	-
PSDH	53.[illegible]13.230	-	7[illegible].[illegible]60.[illegible]30		[illegible].[illegible]17.[illegible]70
Perikanan	[illegible]6.[illegible]5[illegible].[illegible]50	-	[illegible]'[illegible].[illegible]57.[illegible]30		[illegible].[illegible]91.[illegible]30
Jumlah Total	[illegible].[illegible]98.[illegible].[illegible]76.[illegible]56	[illegible].[illegible]21.[illegible]17.[illegible]99	[illegible].[illegible]77.[illegible]27.[illegible]30	[illegible].[illegible]16.[illegible]29.[illegible]31	[illegible].[illegible]40.[illegible]97.[illegible]94

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Tambrauw

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KEP No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	993.595.970	736.863.358	1.730.459.328
PPh	-	-	272.747.480	272.747.480	-
PPh Pasal 21			-		
PPh Pasal 25/29			272.747.480	272.747.480	
PPN	-		972.778.250	235.012.878	737.765.372
Bagi Hasil	-		-		-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas			-	-	
Bagian Daerah Pajak Dana					
Bagian Daerah Pajak Penghasilan			811.941.769	198.311.328	613.630.441
Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas					
Biaya Pemungutan Non Migas	-				
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan		-	6.032.501	59.328.730	53.296.229
Biaya Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai					
Biaya Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
CHT	-	-	-	-	-
SDA	-	95.503.056	3.555.318.795	104.650.856	3.659.969.651
Migas			2.740.572.744	104.650.856	2.845.223.600
Minyak Bumi (15%)			2.014.059.077	104.650.856	2.118.709.933
Minyak Bumi (0,5%)	-				
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi (70%)	-	-	1.505.313.057	-	1.505.313.057
Gas Bumi (0,5%)		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-		
Minerba			5.813.029		5.813.029
Iuran Tetap	-				
Royalti	-		5.813.029		5.813.029
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi		-	-	-	-
Iuran Tetap					
Setoran Bagian Pemerintah					
Kehutanan	-	50.800.056	-	-	-
DR		-	-	-	-
PSDH		-			
PSDH		92.800.056			
Perikanan	-				-
Grand Total	-	92.800.056	- 35.914.458	436.491.114	- 699.422.772

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tarakan (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Defisit TA 2020	LB Defisit TA 2020	Perubahan KB DBH (setelah LA 2020) (PMK No. 3/KM.7/2021)	LB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang sudah disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	3.651.040.151	109.417.811	1.037.792.702	2.623.725.149	258.271.738
PPh	790.032.060		317.537.203	482.005.303	
PPh Pasal 21	712.130.367		611.832.000	420.295.277	
PPh Pasal 21/26	82.501.531		5.701.000	51.797.191	-
PBB	2.351.407.456	109.417.811	720.256.702	1.941.027.683	258.271.738
Bea Bea	109.110.090.088	-	265.683.702	1.936.970.597	-
Jenis Pajak Lainnya	320.720.110		331.613.100		9.004.937
Bagian Daerah Dari Migas					
Bagian Daerah Dari Pajak Bumi	-				-
Bagian Daerah Perikanan	-	13.982.261	69.805.430	-	701.631.620
Bagian Daerah Pertambangan		3.312.210	9.376.332	-	10.386.410
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.369.007		9.004.930	204.364.937	
Biaya Pemungutan Migas	120.310.160		12.419.030		44.340
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi		-	-	-	
Biaya Pemungutan Pertambangan		5.130.900	3.807.630		9.221.700
Biaya Pemungutan Perikanan	-	166.631	360.930		525.521
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.685.177	-	370.320	7.762.678	-
CHT		-	-		-
SDA	13.292.113.079	1.092.180.039	1.745.930.150	12.023.675.834	1.419.561.611
Migas	1.215.912.081	1.092.180.039	96.218.420	1.120.915.061	1.152.102.059
Minyak Bumi 15%	-	1.092.180.039	96.221.010	-	1.152.402.099
Minyak Bumi 3,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	1.215.912.081		96.097.000	1.790.815.081	
Gas Bumi 6,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Mineral	55.663.953	-	8.241.000	1.612.809.663	-
Landrent	-	-	-	-	-
Royalti	1.551.063.053	-	8.024.000	1.542.830.555	-
Panas Bumi					
Dana Reboisasi					
Iuran Tetap	-				
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	163.053.026	-	705.416.150	-	520.465.104
IR					
PSDH	-				
DBHR	168.930.658	-	705.416.150	-	529.485.404
Perikanan	170.186.982	-	316.861.020	-	157.634.020
Jumlah Total	17.413.173.921	1.220.500.511	2.223.632.450	15.080.772.162	2.387.438.351

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mamuju Utara [dalam rupiah]

Jenis DBH	Kab/Kota 2020	Kab/Kota 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 26/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KEP-[illegible])	Sisa LB s.d TA 2019 (KEP-[illegible])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Total	-	-	-	-	-
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21				-	-
PPh Pasal 25/29				-	-
PBB			-	-	-
Land Area	-	-	-		-
Region Terrestrial Migas	-	-			-
Region Terrestrial Non Migas					-
Region Bumi Laut Bagian Bumi				-	-
Location Diverted Perhitungan				-	-
Location Diverted Perlokasian	-	-	-		-
Region Terrestrial Sisa ke Daerah	-	-			-
Biaya Pemungutan Migas				-	-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	
Biaya Pemungutan Bumi Laut	-	-	-		
Biaya Pemungutan [illegible]	-				-
Biaya Pemungutan Perpajakan				-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-	-	-
PBB	-	-	-		-
SDA	-	95.651.807	2.553.778.790	223.277.690	2.277.871.116
Migas			1.474.094.252	-	1.474.094.252
Minyak Bumi 15%			1.474.094.252	-	1.474.094.252
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	
Minyak Bumi dalam Rangka [illegible]	-	-	-		
Gas Bumi 30%	-	-			-
Gas Bumi 2,5%	-				-
Gas Bumi dalam Rangka [illegible]				-	-
Minerba			-	-	
Landrent		-	-		-
Royalti	-	-	-		-
Panas Bumi	-	-			-
Iuran Tetap	-			-	-
Iuran Eksploitasi				-	-
Bagian Bagian Pemerintah			-	-	
Kehutanan	-	95.651.807	687.684.538	223.277.690	320.060.064
IHH	-	-			-
PSDH			1.092.133.041	223.277.690	320.370.644
DBHI		95.651.807	-	-	
Perikanan		-			
Grand Total	-	95.651.807	2.330.748.790	223.277.690	2.277.871.116

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Manokwari Selatan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (KMK No. 8/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang telah dibayarkan	LB TA 2020 yang telah dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	3.084.717.513		1.413.133.750	2.360.510.320	9.665.907
PPh	910.110.607		207.852.680	641.669.927	-
PPh Pasal 21	864.959.674		296.121.354	568.647.87-	-
PPh Pasal 25/29	58.513.667	-	5.[illegible]8.870	53.795.103	-
PBB	2.741.825.896	-	53.794.100	2.018.867.363	8.842.990
Bagi Hasil	2.238.028.795		731.515.600	2.021.[illegible]10.198	
Bagian Daerah Migas	206.720.610		277.141.200	-	3.420.409
Bagian Daerah Non Migas				-	-
Bagian Daerah Pasca Bagi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-		
Bagian Daerah Pertambangan					
Dana Bagi Hasil Selain Lainnya	2.[illegible]90.077		3.001.200	209.991.707	-
Biaya Pemungutan Migas	9.970.035	-	10.406.400	-	436.377
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pasca Bagi					
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.085.178	-	323.500	7.769.078	
CHT					
SDA	15.187.391.701	735.236.294	1.901.073.000	11.986.279.016	836.709.744
Migas	13.925.802.781	735.236.294	132.511.410	12.736.551.361	731.868.797
Minyak Bumi (15%)	-	735.236.294	46.579.620	-	731.868.797
Minyak Bumi (0,5%)	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 70%	12.922.000.161		85.908.450	12.736.091.251	-
Gas Bumi 0,5%					-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	1.557.683.652	-	7.628.350	1.550.054.302	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	1.557.683.652		7.628.350	1.550.054.302	
Pasca Bagi					-
Pasca Produksi				-	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Sebagian Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
Kehutanan	1.176.374.737		77.027.375	1.02.393.362	
DR					-
IHPH	-	-	-	-	-
PSDH	176.3[illegible]9.737	-	573.07[illegible]5.975	707.303.362	
Perikanan	230.782.330	-	287.894.175		20.450.845
Grand Total	19.272.[illegible]9.014	735.236.294	1.9[illegible].103.050	17.7[illegible]0.160	867.[illegible]2.53[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pegunungan Arfak

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2015	KB TA 2018	LP s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (MK No. 77/MK.7/2021)	Sisa DB s.d TA 2019 (MK No. 8/MK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=[3]-[5])
Pajak					
PBB	-	-		-	-
PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29		-	-	-	-
PBB			-		
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas	-				-
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal Dua		-	-	-	
Bagian Daerah Perbulanan					
Bagian Daerah Tarif Dua					
Bagian Daerah Sektor Tertentu	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Migas	-	-		-	-
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pasal Dua					
Biaya Pemungutan Perbulanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perbendaharaan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
PPh	-				-
PPN	-	99.614.191	1.302.761.012	30.246.101	1.172.514,91
Migas	-	-	1.302.761.012	30.246.101	1.172.514,91
Minyak Bumi 15%		-	1.302.761.012	30.246.101	1.172.514,91
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Tanjung Gas	-				-
Gas Bumi 20%	-				-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Kawasan Khusus	-	-	-	-	-
Mineral		-	-	-	
Landrent					
Royalti					
Panas Bumi	-				-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap		-	-	-	-
Setoran Dalam Pemerintah					
PPh Pasal 22		89.614.191			
Cukai	-		-	-	-
PUPH	-	-	-	-	-
PBUT		89.614.191			
Pajak Lainnya					
Grand Total	-	99.614.191	1.302.761.012	30.246.101	1.172.514,91

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pegunungan Arfak

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DBH Triwulan I Tahun Anggaran 2021 sesuai PMK Nomor 7/PMK.07/2021	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6)
Pajak	4.113.171.074		1.217.356.100	2.872.641.964	90.787.888
PPh	988.326.951	-	294.591.502	658.735.281	-
PPh Pasal 21	980.891.481	-	278.875.200	602.016.791	-
PPh Pasal 25/29	7.435.470		5.716.302	1.719.168	-
PBB	3.124.844.123		922.764.598	2.202.079.842	90.787.888
Bagi Rata	2.339.928.750		234.618.600	2.104.110.150	-
Bagian Daerah Migas	690.553.279	-	71.915.700	-	25.373.421
Bagian Daerah Non Migas		-	-		-
Bagian Daerah Kehutanan Dana Reboisasi		-			-
Bagian Daerah Perkebunan					-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi	-		-	-	-
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	215.505.307	-	3.454.500	206.050.807	-
Bagian Pemerintah Migas	25.002.593	-	27.150.700		1.111.407
Bagian Pemerintah Non Migas					-
Bagian Pemerintah Daerah Panas Bumi	-		-	-	-
Bagian Pemerintah Pertambangan	-	-	-		
Bagian Pemerintah Perkebunan					
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	9.089.178		921.000	7.763.578	-
CHT	-		-	-	-
SDA	13.674.014.544	735.036.795	302.302.100	4.6--3.648.980	838.799.741
Migas	12.872.060.087	735.036.795	137.541.400	12.730.031.881	151.616.999
Minyak Bumi 15%		735.036.299	76.572.900		151.616.999
Minyak Bumi 0,5%				-	-
Minyak Bumi dalam Negeri (DMO)	-		-	-	-
Gas Bumi 15%	2.872.620.63	-	85.568.900	2.786.63 .83	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
Gas Bumi dalam Negeri (DMO)	-	-			
Panas Bumi	1.801.454.454		7.628.300	1.793.054.920	
Landrent				-	-
Royalti	1.801.454.454		7.628.300	1.793.054.920	-
Pertambangan Umum	-	-	-	-	
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran tetap					
Bagian Bagian Pemerintah					-
Perikanan	636.144.993		474.768.118	558.376.705	-
CP	-	-	-	-	
PUPP	-	-	-		
PSDH	1.000.777.980		171.698.173	828.979.105	-
Pertanahan	530.969.700		567.894.175	-	36.960.845
Grand Total	19.794.35.622	735.036.795	2.-30.176.260	7.713.368.759	965.87.032

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sulawesi Barat

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KURANG BAYAR TA 2018	KURANG BAYAR TA 2019	Telah disalurkan s.d. TA 2019 (PMK No. 26/PMK.07/2021)	Penyesuaian s.d. TA 2019 (KEP-3/PK.07/2021)	Sisa Kurang Bayar s.d. TA 2019 (PMK No. 8/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
Pajak	-	-	385.867.023	62.742.040	1.008.109.063
PPh		-	1.259.474.272	102.743.210	1.078.732.062
PPh Pasal 21			1.259.474.272	102.743.210	1.078.732.062
PPh Pasal 25/29					-
PBB	-		43.092.960	-	46.492.864
BPHTB	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas		-	-	-	
Bagian Daerah Non Migas			2.012.400		2.012.400
Pajak Daerah Dana Otsus					-
Bagian Daerah Pertambangan	-		43.754.800	-	46.754.800
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					-
Biaya Pemungutan Migas					-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	28.000	-	28.000
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan			607.600		607.600
Biaya Pemungutan Kehutanan					
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-
SDA		22.798.445	21.535.329		21.535.329
Migas					
Minyak Bumi 15%					-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pertambangan			21.535.329		21.535.329
Panas Bumi	-	-	21.535.329	-	21.535.329
Royalti	-	-	-	-	-
Pungutan Lainnya		-	-		-
Jaminan Reklamasi					
Jaminan Lainnya					-
Pungutan Pengelolaan Perikanan	-	-		-	-
Kehutanan	-	22.798.445	-	-	-
DR		18.410.115	-		
PSDH					
DBHTI	-	4.388.330		-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-
Grand Total		22.798.445	1.027.402.401	102.743.250	1.710.642.161

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Provinsi Sulawesi Barat

(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi Definitif TA 2021	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Berdasarkan PA 2020 (PMK No. 8/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum diselesaikan	LB TA 2020 yang belum diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	7.070.561.558	-	5.063.474.826	4.035.931.82	20.737.068
PPh	3.060.131.087	-	2.396.277.050	2.663.157.074	-
PPh Pasal 21	1.830.735.743	-	1.221.968.400	2.139.147.418	-
PPh Pasal 25/29	231.479.356	-	217.68.600	210.209.736	-
PBB	2.010.636.471	-	667.197.329	1.021.799.777	20.637.068
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas	336.875.185	-	257.455.320	-	20.630.165
Bagian Daerah Non Migas	16.171.369	-	-	16.171.369	-
Bagian Daerah Kurang Bayar	2.620.842	-	-	2.620.842	-
Bagian Daerah PPh Pasal 21	-	-	-	-	-
Bagian Daerah PPh Pasal 25/29	1.401.556.635	-	536.618.451	1.018.738.255	-
Bagian Daerah Sesuai Lokasi	328.576.311	-	17.321.600	310.416.711	-
Jasa Pengelolaan Migas	3.288.398	-	3.588.300	-	329.902
Biaya Pengelolaan Non Migas	421.641	-	-	421.641	-
Biaya Pengelolaan Pasca Bagi	35.08	-	-	35.081	-
Biaya Pengelolaan Perpajakan	-	-	-	-	-
Biaya Pengelolaan Perkebunan	23.310.397	-	6.472.800	16.837.597	-
Biaya Pengelolaan SDA Lainnya	4.491.104	-	179.000	4.312.061	-
CHT	-	-	-	-	-
PBB	75.758.162	5.3 1.954	72.996.325	39.668.617	11.588.500
Migas					
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					-
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%		-	-	-	
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-			
Mineral	79.[illegible].382		6.961.050	72.071.332	
Landrent	21.[illegible].784		6.961.950	14.298.834	-
Royalti	57.696.478		-	57.696.478	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	
Iuran tetap					
Setoran Pajak Penghasilan					-
Kehutanan	27. 2 .530	5 1.1.749	15.334.075	8.018.530	11.538.500
IHPH	27. 2 .530	-	9. 07.600	18.018.930	-
IHPHT					
PSDH		5 1.1.794	6.226.475		11.538.500
Pertambangan	-				-
Grand Total	7.181.872.717	5 1.1.754	3.065.77 .125	4.792 2 .0.433	37.465.681

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Majene

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d. TA 2019 (PMK No. 35/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d. TA 2019 (SVR No. S-3/PK.7/2021)	Sisa LB s.d. TA 2020 (SVR No. S-3/PK.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			79.821.672	7.902.167	71.919.505
PPh			79.821.672	7.902.167	71.919.505
PPh Pasal 21			79.821.672	7.902.167	71.919.505
PPh Pasal 22/23/26	-				-
PBB	-	-	-	-	-
Dari Kita	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas					
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Pajak Kita	-				-
Bagian Daerah Penghasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pengimbang		-	-	-	
Bagian Daerah Lainnya					
Bagi Pemerintah Migas	-				
Bagi Pemerintah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagi Pemerintah Pusat Lain		-	-	-	
Bagi Pemerintah Daerah Lain					
Bagi Pemerintah Daerah Lain	-				-
Bagi Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
CUT	-		-	-	-
SDA		1.752.034			
Migas					
Minyak Bumi 15%	-				-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-	-	
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	-				-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Royalti	-	-	-	-	-
Pasca Tambang		-	-		
Iuran Eksplorasi					
Iuran Eksploitasi					
Bagian Daerah Penghasil	-			-	-
Kehutanan	-	1.752.034	-	-	-
PSDH		-			
DR					
PSDH	-	1.752.034	-	-	-
Perikanan		-	-	-	-
Jumlah Total		1.752.034	79.821.672	7.902.167	71.919.505

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Majene

(dalam rumah)

URAIAN	Alokasi Definitif TA 2020	KB DBH TA 2020	Penyaluran ke DBH Berjalan TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	PB TA 2020 yang telah disalurkan	KB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(6)	(7)	(8)	(10) = (1)-(6)	(11)
Pajak	2.435.505.754		907.750.750	2.508.958.129	1.052.510
PPh	206.708.358	-	530.750.250	565.973.655	-
PPh pasal 21	1.848.602.125	-	530.750.620	524.429.535	-
PPh pasal 25/29	241.106.733	-	12.068.620	41.101.133	-
PBB	2.309.429.896		103.980.750	1.941.023.771	1.052.510
BPHTB	1.394.464.999		200.869.750	1.720.272.256	
Bagian Daerah Migas	111.503.797		121.299.000		4.564.710
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal Pasal		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal Pasal					
Bagian Daerah Pasal Pasal	-				
Bagian Daerah Bidang Perikanan	215.513.207	-	6.564.300	206.664.707	-
Biaya Pemungutan Migas	1.511.125	-	4.752.100	-	230.672
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pasal Pasal					
Biaya Pemungutan Perikanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perikanan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	5.210.000		380.000	7.000.700	
CHT					
SDA	70.38.53	2.257.387	319.610.471	10.991.551	102.466.635
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-				-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Kehutanan	10.051.751	-	-	10.951.751	-
Iuran					
Royalti	10.951.051			10.971.321	
Provisi SDA	-				
Jaminan Reklamasi	-	-	-	-	-
Jaminan lainnya		-	-	-	-
Sumber Daya Alam Pertambangan					
Perikanan		2.257.387	2.351.471		4.702.992
CHT	-		-		-
IHPH	-	-	-	-	-
PSDH		2.257.387	2.585.771	-	4.702.842
Pertanian	159.106.987		310.381.200		127.697.020
Grand Total	2.906.735.795	2.257.387	1.251.906.172	2.217.950.940	161.379.287

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mamuju

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2014	LB TA 2015	LB s.d TA 2019 (PMK No. 257/PMK.07/2017)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	450.707.809	170.714.553	280.993.256
PPh:			58.501.279		58.501.279
PPh Pasal 2					
PPh Pasal 25/29	-		58.501.279		58.501.279
PBB	-	-	392.206.530	170.714.553	177.051.647
Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Migas		-	-	-	
Penerimaan Daerah Non Migas	-		8.050.000		8.050.000
Bagian Daerah Pasal Tertentu	-				-
Bagian Daerah Penambahan	-	-	3.930.994	170.714.553	144.768.28
Bagian Daerah Perkebunan	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya					
Bagian Pemerintah Migas					-
Bagian Pemerintah Non Migas	-	-	1.026.910	-	926.9 .6
Bagian Pemerintah Pasal Tertentu	-	-	-	-	-
Bagian Pemerintah Perkebunan			18.216.130		16.241.760
Bagian Pemerintah Pertambangan					-
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Cukai	-	-	-	-	-
PDRA		6.373.382	170.806.868		170.806.868
Migas					
Migas Bagian 15%	-				-
Migas Bagian 0,5%	-	-	-	-	-
Migas Bagian Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 69%		-	-	-	
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Pertambangan	-		499.606.868		446.868.868
Batubara	-	-	449.772.868	-	4 .760.868
Panas Bumi	-	-	84.240	-	104.000
Pajak Lainnya		-	-	-	-
Jenis Pendidikan					
Jenis Lainnya					
Bagian Pemerintah Pusat (PBB)	-				-
Kehutanan	-	6.373.382	-	-	-
DR			-	-	
PSDH					
DBHP	-	6.373.382		-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total		6.373.382	550.514.767	170.714.553	380.159.814

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Mamuju

(dalam rupiah)

Jenis Dbh	K/L Definitif TA 2020	LR Tahun TA 2020	Penyaluran DJPK DBH Semester I TA 2020 (SMK No. S-633/K.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	KB TA 2020 yang telah disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	6.218.571.245		1.902.733.070	1.502.733.112	145.285.387
SDA	2.634.304.964		1.207.211.500	1.207.093.164	-
PPh Pasal 21	2.634.304.964	-	1.207.211.500	1.615.382.844	-
PPh Pasal 25/29	47.301.276	-	47.684.300	47.301.276	-
PBB	3.210.972.281	-	635.168.300	3.785.670.018	110.285.387
Dbg Pajak	2.117.160.198	-	242.353.430	1.831.910.098	-
Bagian Daerah Migas	38.444.205	-	173.781.000	-	110.036.995
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perbuatan		-	-		
Bagian Daerah Pertambangan	793.092.979		193.196.300	611.896.679	-
Bagian Daerah Pajak Penghasilan	315.699.017		6.001.300	309.697.717	-
Biaya Pemungutan Migas	1.500.926	-	6.646.900	-	5.146.974
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	
Biaya Pemungutan Pajak Bumi					
Biaya Pemungutan Pertambangan	-				-
Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan	41.014.916	-	9.645.900	31.068.408	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	2.234.860	-	528.900	7.001.266	
CHT					
SDA	31.152.175		317.130.375	79.696.599	88.304.010
Migas	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 85%		-	-		
Minyak Bumi Bagian Pemerintah Daerah					
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 70%	-			-	-
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
Mineral	97.676.709	-	17.170.650	79.506.059	-
Landrent	42.013.053	-	17.170.650	24.742.303	
Royalti	55.663.656			54.763.756	
Panas Bumi					
Setoran Produksi	-			-	-
Setoran Uap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan	560.861		4.000.750		3.439.889
PSDH					
DR	-	-	-	-	-
PSDH	560.861	-	4.000.450	-	3.439.589
Perikanan	213.011.530		95.133.775		22.398.713
Grand Total	1.329.419.078		2.219.630.375	1.582.229.110	229.127.109

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Polewali Mandar

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 226/PMK.07/2021)	Penyesuaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 1/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	270.477.924	4.095.525	64.382.399
PPh	-	-	335.477.924	- 4.095.525	64.382.399
PPh Pasal 21	-	-	335.477.924	- 4.095.525	64.382.399
PPh Pasal 25/29	-	-	-	-	-
PPN					
Bagi Rata	-				
Bagian Daerah Migas	-	-		-	-
Bagian Daerah Non Migas		-			
Bagian Daerah Penghasil Migas					
Bagian Daerah Penghasil Non Migas					
Bagian Daerah Perbatasan	-				-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Migas		-	-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	-				-
Biaya Pemungutan Pertambangan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan		-	-		
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT	-				-
SDA	-	752.462	-	-	-
Migas		-	-	-	
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 2,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				-
Gas Bumi 15%	-			-	-
Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba		-	-		-
Batubara					
Panas Bumi					
Kurang Penyaluran	-			-	-
Kurang Bayar	-	-	-	-	-
Kurang Bayar		-	-	-	
Kurang Bayar Pajak Penghasilan					
Perikanan	-	1.752.924			
DR	-	-	-	-	-
JUPIL		-	-	-	-
JHT JL		1.752.924			
Perikanan					
Grand Total	-	2.505.386	335.477.924	4.095.525	64.382.399

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Pekanbaru Provinsi

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB tahun TA 2020	LB tahun TA 2020	Penyaluran KB tahun TA 2021 (PMK No. 57/PMK.07/2021)	KB TA 2020 yang telah dialokasikan	LB TA 2020 yang telah dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.998.353.713	-	1.232.940.700	2.567.967.176	5.404.161
PPh	1.371.281.351	-	795.681.400	575.137.715	-
PPh Pasal 21	1.248.103.218	-	773.834.600	474.268.618	-
PPh Pasal 25/29	123.094.350	-	21.847.200	100.196.718	-
PBB	2.450.705.182	-	437.210.000	2.013.495.023	5.404.161
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	301.950.903	-	200.089.700	1.129.270.298	-
Cukai Hasil Tembakau	171.356.733	-	159.696.900	-	5.138.477
Pajak Rokok	611.098.277	-	-	611.098.277	-
Pajak Air Permukaan	19.103.372	-	-	11.105.372	-
Pajak Alat Berat	-	-			
Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	215.997.007	-	3.651.500	208.996.707	-
Pajak Opsen Pajak Rokok	5.126.917	-	5.012.600	-	265.056
Pajak Penerangan Jalan	3.471.113			2.171.113	
Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah	385.903			385.903	
Pajak Pengambilan Air Permukaan	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan Perdesaan					
Pajak Penerangan Jalan Lainnya	6.734.963		328.300	7.906.366	
DHT	-	-			
SDA	231.987.203	3.501.887	526.524.715	59.774.775	54.413.552
Migas		-	-	-	-
Migas Bagi Hasil PNBP					
Migas Bagi Hasil 0,5%	-				
Migas Bagi Hasil dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 30%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%		-	-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Minerba	10.010.110		6.720.100	60.094.718	
Panas Bumi	64.743.592		6.620.302	58.123.192	
Kehutanan	10.951.551			10.951.551	
Pajak Daerah	-	-	-		-
Pungut Eksplorasi		-	-	-	-
Cukai Hasil Tembakau				-	
Setoran Pajak Penerangan Jalan					
Kelautan dan Perikanan	-	3.501.887	3.020.313		6.726.012
DR		-	-	-	-
DTTT		-	-	-	-
DBHP	-	3.501.887	3.020.313	-	6.726.012
DAK Fisik	154.199.960		218.261.020		137.091.720
Grand Total	4.230.340.876	3.501.887	1.758.726.435	2.627.742.951	196.922.193

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Merauke

(dalam rupiah)

URAIAN (1)	KB TA 2018 (2)	KB TA 2019 (3)	LB s.d TA 2019 (PMK No. 23/PMK.07/2021) (4)	Penyesuaian TA s.d TA 2019 (KMK No. 4/KM.7/2021) (5)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021) (6) = (4) - (5)
Pajak	-		136.126.102	136.126.102	
PBB	-		136.126.102	136.126.102	
PBB Pasal 31	-	-	136.126.102	136.126.102	-
PBB Pasal 25/29	-	-	-	-	-
BPHTB		-	-	-	-
Bagi Rata					
Bagian Daerah Penghasil Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas					
Bagian Daerah Penghasil Dana Alam	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Kehutanan		-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil Perkebunan					
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-				
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Dana Alam					
Biaya Pemungutan Kehutanan	-				
Biaya Pemungutan Perkebunan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya		-	-	-	-
CHT					
SDA	-	2.090.732	1.532.760.792	28.662.887	1.360.278.705
Migas		-			
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi Bagian Pemprov Otsus					
Gas Bumi 30%	-				
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi dalam Wilayah Otsus	-	-	-		
Pertambangan		-	37.693.200	-	137.693.200
Pertambangan		-	37.693.200	-	137.693.200
Royalti					-
Pajak Bumi					
Pajak Perdesaan	-				
Pajak Bersama	-	-	-	-	-
Pajak Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan		2.090.732	1.394.811.592	28.662.887	1.360.278.705
DR	-				
PSDH	-	-	1.394.811.592	28.662.887	1.360.278.705
DR & PSDH		2.090.732	-	-	-
Perikanan				-	-
Grand Total		2.090.732	1.673.459.894	187.088.989	1.486.370.905

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mamasa

(dalam rupiah)

JENIS DBH	Kb Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Perubahan TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB DBH 2020 yang Belum Disalurkan	LB DBH 2020 yang Belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) [7]-[8]	(6)
Pajak	5. 37.430.565		7.603.279.200	2.423.3..8.430	4.096.297
PPh	8-5.69 .919		933.309.300	494.302.320	
PPh Pasal 21	824.064.698	-	952.869.760	418.206.260	-
PPh Pasal 22/23	37.797.790	-	5.65 .300	33.(98.39	-
PBB	2.334.7.4.044	-	418.243.900	1.041. 7 .371	2.096.297
Pajak Rokok	1.9 1.3 4.6 5		265.690.700	1.726.270.209	
Bagian Daerah Migas	35.89 .042		138.3 .2.900		7.487.327
Bagian Daerah Non Migas	-	-			-
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan		-	-	-	-
Bagian Daerah Kehutanan					
Bagian Daerah Sektor Lainnya	315.549,07		9.691.300	305.991.707	
Dana Perimbangan Migas	3.060.710	-	9.39 .490	-	251.450
Dana Perimbangan Non Migas		-	-	-	-
Dana Perimbangan Pertambangan Umum					
Dana Perimbangan Kehutanan	-				
Dana Perimbangan Perkebunan	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan Sektor Lainnya	8.2 4.462	-	378.520	7.965.564	-
CHT			-		
DBH	17. 4.9 .069		32.6 .9 .3 .3	11. 4.211	137.691.082
Migas	-	-			-
Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka 0,5%			-		
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 70%	-				
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-		-	-
Mineral	12.93 .371	-	-	0,95 .551	-
Batubara		-	-	-	-
Kayu	15.9 .1..		-	10.05 .371	
Panas Bumi					
Iuran Eksplorasi	-				
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan	4.281.345		3.818.675	462.668	
PSDH					
DR	-			-	-
JUMLAH	4.281.345	-	3.818.675	462.668	-
Perikanan	1.9 .180.080		3 6.851.080		157.691.082
Grand Total	3.0 1.8 6.662		1.397.279.0 3	2.136.96 .027	3 .2 9.31

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Pasangkayu

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 39/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 5/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak			1.353.384.136	302.034.237	1.051.349.899
PBB	-		1.172.414.638	302.034.237	870.380.401
PBB Pasal 21	-	-	1.172.414.638	302.034.237	870.380.401
PBB Pasal 25/29	-	-	-	-	-
BPHTB		-	180.969.498	-	180.969.498
Sanksi Pajak			-	-	
Bagian Daerah dari Pajak Lainnya					
Bagian Daerah dari Migas	-				
Bagian Daerah Pajak Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Perhutanan		-	175.019.660	-	75.019.660
Bagian Daerah Pertambangan					
Bagian Daerah dari Pajak Lainnya	-				
Biaya Pemungutan Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Sanksi					
Biaya Pemungutan PBB Lainnya			7.900.000		7.900.000
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Bekas Lainnya		-	-	-	-
CHT			-	-	
SDA		1.732.901	139.262.710		140.995.611
Migas	-				
Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%		-	-	-	-
Minyak Bumi Lainnya Bagian Daerah			-	-	-
Gas Bumi 30%					
Gas Bumi 0,5%	-				
Gas Bumi Lainnya Bagian Daerah	-				
Minerba	-	-	159.302.740	-	159.302.740
Landrent		-	159.178.740	-	59.178.740
Royalti			124.000	-	124.000
Panas Bumi					
Dana Produksi	-				
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Setoran Dana Pengembalian		-	-	-	-
Kehutanan		779.027	-	-	-
PSDH					
IHPH	-	-			-
PSDH	-	752.95	-	-	-
Pertambangan		-	-	-	-
Grand Total		1.732.901	1.511.071.194	302.034.237	1.211.736.957

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Pasangkayu

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Salur TA 2020	LB Disalurkan TA 2020	Penyaluran DBH (PMK Nomor 37/PMK.07/2021) sebelumnya TA 2020 (PMK Nomor 37/PMK.07/2021)	LB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[4]	[6]
Pajak	8.061.027.285		3.953.919.950	6.547.166.049	281.705.710
PPh	695.171.313		53.[illegible].950	361.236.043	
PPh Pasal 21	63.[illegible].958		515.941.400	311.[illegible].786	
PPh Pasal 22/29	55.[illegible].357	-	3.070.950	16.139.457	-
PPN	7.076.352.587	-	1.581.026.600	6.186.914.036	47.465.710
Bagi Hasil	1.391.930.008	-	205.090.700	725.270.298	-
Bagian Daerah Migas	136.[illegible].025		182.[illegible].000	-	18.[illegible].483
Bagian Daerah Non Migas			-	-	
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-	-		-
Bagian Daerah Perikanan	-	-	-		-
Bagian Daerah Perkebunan	1.261.111.359		1.053.[illegible].500	- 697.353.559	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	115.[illegible].007		8.604.900	251.084.737	
Biaya Pemungutan Migas	5.[illegible].006		7.[illegible].500		1.87[illegible].324
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-		-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-	-		-	
Biaya Pemungutan Perkebunan				-	
Biaya Pemungutan Pertanggungan	361.[illegible].760		53.[illegible].500	207.[illegible].270	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.234.646		328.300	7.[illegible].350	-
PBB	-	-	-	-	-
SDA	170.[illegible].731	9.[illegible].92	320.[illegible].925	10.03[illegible].551	107.[illegible].597
Migas			-		
Setoran Dana 15%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi 6,5%	-	-	-	-	-
Minyak Bumi dalam Wilayah Offshore	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%				-	-
Gas Bumi 6,5%				-	
Gas Bumi dalam Wilayah Offshore				-	
Minerba	10.[illegible].551	-	-	10.[illegible].551	-
Dana Hasil	-	-			-
Royalti	10.[illegible].551	-		10.[illegible].551	-
Pajak Bumi				-	
Luas Perairan				-	
Jumlah Ikan				-	
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-		-
Kehutanan	-	3.[illegible].769	2.[illegible].920		9.[illegible].877
DR				-	
PSDH				-	
DBHDR	-	5.743.952	2.[illegible].025		9.[illegible].877
Perikanan	179.[illegible].080	-	216.[illegible].000		157.[illegible].000
Grand Total	5.[illegible].[illegible].161	[illegible].[illegible].052	3.[illegible].[illegible].825	6.[illegible].[illegible].[illegible]	215.[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Mamuju Tengah

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Tarif Definitif LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Pajak	-	-	862.060.842	86.200.084	775.860.758
PPh	-	-	-	-	-
PPh Pasal 21		-	-	-	-
PPh Pasal 25/29					
PBB			862.060.842	86.200.084	775.860.758
Bagi Rata	-				-
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Kurang Bayar					
Bagian Daerah Penghasil			862.872.792	86.200.084	517.632.709
Bagian Daerah Penghasil Lainnya	-	-	345.561.941	-	345.561.941
Bagian Daerah Sharing Lainnya		-	-	-	
Biaya Pemungutan Migas			-		-
Biaya Pemungutan Non Migas					
Biaya Pemungutan Kurang Bayar	-			-	-
Biaya Pemungutan Penghasil	-	-	3.581.765	-	51.761.765
Biaya Pemungutan Penghasilan			11.076.04		11.076.04
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya					
CHT	-		-	-	-
SDA	-	7.8.6.73	-	-	-
Migas		-	-	-	
Minyak Bumi 15%					
Minyak Bumi 0,5%					
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-	-	-	-	-
Gas Bumi 0,5%	-		-	-	-
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	
Minerba					
Panas Bumi					
Royalti	-				
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
Cukai Rokok	-	-	-	-	-
Sanksi Rokok		-	-		
Sanksi Pajak Pusat/Daerah					
Kehutanan	-	3.816.473			-
PSDH	-	-	-	-	-
DR		-	-	-	
PSDH		3.816.473			
Perikanan	-				
Grand Total	-	3.816.473	862.060.842	86.200.084	775.860.758

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Mamuju Tengah (dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2020 (TA 2021)	LB Tersedia TA 2020	Pengalokasian KB DBH Semestinya TA 2020 (KMK No. 230/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang Belum Disalurkan	LB TA 2020 yang belum Disalurkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	3.121.210.820	-	877.150.162	2.243.058.661	140.118.218
PPh	707.007.030		271.020.300	436.427.730	
PPh Pasal 21	72.572.016		216.231.306	143.337.970	-
PPh Pasal 22/29	49.351.414		5.011.505	44.089.911	-
PBB	2.543.574.719	-	654.907.601	1.888.667.118	36.518.153
Bagi Rata	2.177.174.838	-	242.530.400	38.640.096	
Daerah Provinsi Asal	131.312.619	-	156.076.400		1.013.781
Daerah Provinsi Non Migas					
Bagian Daerah Penerimaan Migas	-				-
Bagian Daerah Penerimaan Panas Bumi	-	-	-	-	-
Daerah Penghasil Perkebunan	3.073.602	-	151.150.850	-	124.135.698
Daerah Penghasil Sektor Lainnya	275.249.097		2.654.320	206.094.777	
Biaya Pemungutan Migas	4.962.205		2.032.150		939.665
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perkebunan					
Biaya Pemungutan Pertambangan	10.992		6.153.850		5.438.806
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	8.284.868	-	939.040	7.506.366	-
DBH	-	-	-	-	
DAU	223.980.281	15.447.151	302.906.173	10.951.551	105.109.090
Migas					
Minyak Bumi 15%	-			-	-
Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	-
Migas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%		-	-		
Gas Bumi 0,5%					
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	10.951.551			10.951.551	-
Tambang	-	-	-	-	-
Kayu	10.951.551	-	-	10.951.551	-
Pajak Bumi		-	-		
Bunga Pinjaman					
Sumber Daya					-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-		-	-
Additional	-	15.447.151	2.273.320	-	93.270.537
DR					
PDPT					
DAKH	-	15.447.151	2.273.320	-	93.270.537
DAK Fisik	212.08- 552	-	295.153.273	-	82.093.745
Grand Total	3.535.336.202	15.447.151	405.306.371	2.254.010.112	241.337.218

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Kalimantan Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2019	KB TA 2020	LB s.d TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d TA 2020 (PMK No. 9/PMK.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2020 - (KB 2a + 3/(LB 2a + 3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=(4)-(5)
Pajak		-	-	-	-
PPh					-
PPh Pasal 21	-				
PPh Pasal 25/29	-				
PBB	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		-	-	-	-
Bagian Daerah dari Migas			-	-	-
Bagian Daerah dari Non Migas					
Bagian Daerah Pasal 4 ayat (2)	-				
Bagian Daerah Pemotongan	-	-			
Bagian Daerah Pemungut	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Sektor Tertentu					
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-		-
Bagian Daerah dari Cukai Hasil Tembakau		-	-	-	-
Bagian Daerah Pajak Rokok					
Bagian Daerah Pemungutan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
PPh		-	-	-	-
SDA		2.702.933.429	93.336.337.735	18.611.271.551	74.643.066.202
Migas			3.118.193.921		3.118.193.921
Minyak Bumi 15%	-		3.002.211.890		3.002.211.890
Minyak Bumi 0,5%	-	-	103.017.008		103.017.008
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Gas Bumi 15%	-		15.502.023	-	15.502.023
Gas Bumi 0,5%			258.310		258.310
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Minerba	-				
Landrent	-	-	-		
Royalti	-	-	-	-	-
Panas Bumi		-	-	-	-
Iuran Eksplorasi					-
Iuran Tetap	-				
Kekurangan Bagian Pemerintah	-	-			
Kehutanan		2.702.055.429	89.918.91 .282	18.611.271.551	71.306.830.361
PSDH		2.702.721.095	82.358.823.717	18.611.271.551	63.747.034.167
DBHPH			1.300.021.267		1.300.021.267
PSDH	-	253.221.454	4.210.6 1.921		4.210.6 1.921
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total		2.702.055.429	93.336.337.735	18.611 271.551	7 -45.036.700

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Provinsi Kalimantan Utara

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PB Tahun TA 2020	LB Tahun TA 2020	Penyaluran PB DBH sebelum TA 2021 (PMK No. 7/PMK.7/2021)	PB TA 2021 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
Pajak	17,228,702,712	-	9,210,375,900	8,018,326,812	
PPh	11,106,317,072		6,670,071,930	4,436,245,142	
PPh Pasal 21	7,001,090,735		4,470,078,003	2,530,012,932	
PPh Pasal 23/26	1,184,476,917		130,101,900	726,020,017	-
PBB	8,205,475,070	-	2,260,303,200	5,309,353,870	-
Cukai Rokok	-	-	-	-	-
Sharing Dengan Migas	12,733,067,084	-	2,783,791,500	1,837,994,281	
Sharing Dengan Non Migas	1,515,067,152		1,070,710,500	3,161,250,902	
Sharing Dengan Panas Bumi	-				-
Sharing Dengan Perhutanan	1,551,974,685	-	1,113,...,300	455,...,685	-
Sharing Dengan Pertambangan	3,202,193,770	-	1,150,820,700	4,171,362,870	
Sharing Dengan Sektor Lainnya	260,720,230		70,610,300	208,109,930	
Biaya Pemungutan Migas	405,327,313		77,921,200	382,212,913	-
Biaya Pemungutan Non Migas	208,675,04	-	54,96...,200	342,94...,04	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	-	-	-	-	
Biaya Pemungutan Perhutanan	41,050,117		30,071,100	12,108,717	
Biaya Pemungutan Pertambangan	148,178,756		51,962,030	111,...,756	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7,...,...	-	30,620	7,...,...	-
CHT	-	-	-	-	
DAK	5,...,277,...	1,...,15,...,...	26,786,...,...		20,722,...,...
Migas		9,277,...,...	30,...,...		9,...,...
Migas Bumi 15%	-	7,...,...	249,...,...		7,...,...
Migas Bumi 3%	-	950,...,...	1,...,...	-	276,...,...
Migas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 70%		986,...,...	6,...,...		973,...,...
Gas Bumi 30%		16,...,...	100,...		16,...,...
Gas Bumi dalam Rangka Otsus					
Minerba	4,...,...		3,...,...		6,...,...
Landrent	18,...,...	-	1,...,...	-	151,...,...
Royalti	27,...,...	-	3,...,...	-	6,...,...
Panas Bumi		-	-		
Iuran Eksplorasi					
Iuran Tetap	-				-
Bagian dari Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	8,...,...	1,...,...	7,...,...	-	1,...,...
IR	8,...,...		13,...,...		2,...,...
PHTB		1,...,...	1,...,...		2,...,...
PBHB	-	126,...,...	3,...,...	-	3,...,...
Perikanan	-	-	-	-	-
Grand Total	72,...,...	1,...,...	36,...,...	32,...,...	20,...,...

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Bulungan

(dalam rupiah)

URAIAN	KB TA 2018	KB TA 2019	KB s.d. TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyesuaian KB s.d. TA 2019 (KEP-[illegible]/KM.7/2021)	Stlh KB s.d. TA 2019 (KEP-[illegible]/KM.7/2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]
Pajak	-		93.626.[illegible]38	93.626.[illegible]38	-
PPh	-	-	93.626.[illegible]38	93.626.[illegible]38	-
PPh Pasal 21		-	-	-	-
PPh Pasal 25/29		-	93.626.[illegible]38	93.626.[illegible]38	
PPN					
Bagi Rata					
Bagian Daerah Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Non Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pasal Dalam			-	-	
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Pertambangan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Migas		-	-	-	-
Bagian Pertambangan Non Migas					
Bagian Pertambangan Panas Bumi	-				
Bagian Pertambangan Pertanahan	-	-	-	-	-
Bagian Pertambangan Perkebunan			-	-	
Bagian Pertambangan Sektor Lainnya					
CHT	-				
SDA	-	292.620.817	53.469.302.979	15.969.[illegible]35.602	37.479.840.976
Batubara		-	23.[illegible]65.341	15.960.[illegible]61.602	11.132.509.74
Minyak Bumi 15%			23.114.906.278	12.185.[illegible]03.913	6.929.[illegible]02.365
Minyak Bumi 0,5%			770.196.801	784.[illegible]16.277	13.980.054
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 85%	-	-	3.[illegible]94.[illegible]46.037	3.[illegible]76.[illegible]43.050	603.044.200
Gas Bumi 0,5%	-	-	53.059.234	-	53.059.234
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Kehutanan			22.[illegible]69.420.788	-	22.[illegible]69.[illegible]788
Iuran Hasil			12.007.054.990		12.007.054.990
Provisi			9.962.[illegible]61.192		9.962.[illegible]61.192
Panas Bumi	-	-			-
Iuran Eksploitasi	-	-	-	-	-
Iuran tetap		-	-	-	-
Sumber Daya Alam Perikanan					
Kehutanan	-	292.620.817	4.[illegible]36.[illegible]98.197		4.[illegible]36.[illegible]98.197
DR	-	-	-	-	-
IUPHH	-	-	520.[illegible]65.146	-	1.[illegible]20.[illegible]65.146
PSDH		292.620.817	3.[illegible]16.[illegible]32.351		2.[illegible]16.[illegible]32.351
Perikanan					
Grand Total	-	292.620.817	53.[illegible]62.[illegible]89.188	15.969.[illegible]35.602	37.479.840.976

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Sabangau

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran DBH Sumber Dana TA 2020 (SMK No. S-[illegible]/2021)	KB TA 2021 yang belum diselesaikan	LB TA 2021 yang belum diselesaikan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(8)	(11)
Pajak	45.301.096.660		9.070.121.605	52.229.218.055	-
PPh	5.218.401.484		1.069.403.900	3.311.036.144	-
PPh Pasal 21	4.366.134.307	-	1.216.663.610	3.149.470.697	
PPh Pasal 25/29	21.136.347	-	82.730.400	101.535.747	
PBB	45.205.907.151		7.171.028.300	52.077.014.551	
Bagi Rata	1.041.966.994		201.090.700	1.728.270.295	
Bagian Daerah Migas	2.430.534.397	-	2.956.573.600	19.522.090.707	-
Bagian Daerah Non Migas	5.428.243.94-	-	389.741.-00	2.458.302.-44	-
Bagian Daerah Pajak Bumi	-	-	-	-	
Bagian Daerah Perkebunan	1.0.8.891.817		1.216.320.300	2.922.371.317	
Bagian Daerah Pertambangan	7.529.338.307		1.072.172.000	5.503.060.051	-
Bagian Daerah Pajak Lainnya	315.593.307	-	9.504.320	708.964.007	-
Bagian Pemerintah Migas	771.302.985	-	93.653.020	645.269.053	-
Bagian Pemerintah Non Migas	116.968.727	-	31.[illegible].020	41.578.327	
Bagian Pemerintah Daerah Hutan					
Bagian Pemerintah Pertambangan	66.[illegible].301	-	30.979.950	137.5[illegible].-01	-
Bagian Pemerintah Perkebunan	485.687.747	-	76.[illegible].320	286.636.047	
Bagian Pemerintah Sektor Lainnya	7.180.221		209.800	7.147.221	
(12)					
PBB	3.0[illegible].513.650	20.084.523.333	11.490.538.575	-	34.502.345.[illegible]56
Migas	-	2.3[illegible].535.096	459.765.300	-	12.792.820.596
Minyak Bumi 15%	-	11.102.875.000	4.6[illegible].743.900	-	11.[illegible].[illegible]30
Minyak Bumi 0,5%		372.097.057	14.038.300		36.[illegible].927
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 69%		17.652.300	6.[illegible].300		1[illegible].[illegible].753
Gas Bumi 0,5%	-	2.910.578	99.200	-	12.309.778
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	-	10.147.703.725	6.272.[illegible].725	-	[illegible].[illegible].[illegible]
Landrent		1.[illegible].[illegible].392	[illegible].[illegible].200		1.072.141.092
Royalti		9.702.307.133	5.853.[illegible].725		13.[illegible].[illegible].808
Panas Bumi					-
Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
Iuran Tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-		[illegible].[illegible].[illegible]
Kehutanan	1.892.328.492	2.291.102.500	1.721.[illegible].430		2.[illegible].[illegible].570
DR	-	-		-	-
PSDH	-	2.994.[illegible].600	[illegible].[illegible].720	-	3.[illegible].[illegible].820
Pajak	1.[illegible].[illegible].[illegible]		3.[illegible].[illegible].750		1.[illegible].[illegible].[illegible]
Perikanan	[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]		[illegible].[illegible].[illegible]
Grand Total	47.[illegible].[illegible].[illegible]	22.[illegible].[illegible].[illegible]	20.[illegible].[illegible].[illegible]	55.[illegible].[illegible].[illegible]	31.[illegible].[illegible].[illegible]

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Malinau

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	TB s.d TA 2018 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian TB s.d TA 2018 (KMK No. 1/KM.7/2021)	Sisa LB s.d TA 2018 (PMK No. 8/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-		750.911.502	7.772.936	743.138.566
PPh	-	-	7.772.936	7.772.936	
PPh Pasal 21		-	-	-	-
PPh Pasal 25/29		-	7.772.936	7.772.936	-
PBB			482.272.870	-	482.272.870
Bagi Rata	-				
Bagian Daerah Migas	-				
Bagian Daerah Dak Migas		-	-		-
Bagian Daerah Penerimaan Migas		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan			62.062.140	-	467.782.140
Bagian Daerah Perkebunan	-				
Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	-			
Biaya Pemungutan Migas		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Non Migas			-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi	-				
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	19.290.760		19.290.760
Biaya Pemungutan Perkebunan		-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	-
PBHT	-				
SDA	-	201.287.730	13.563.353.759	5.705.271.911	11.416.009.858
Migas		-	1.559.078.186		1.559.078.186
Minyak Bumi 15%		-	1.501.158.073	-	1.501.158.073
Minyak Bumi 0,5%			50.038.504	-	50.038.504
Minyak Bumi Bekas Wilayah Operasi	-				
Gas Bumi 30%	-		7.781.181		7.781.181
Gas Bumi 0,5%	-	-	129.295		129.295
Gas Bumi Bekas Wilayah Operasi		-	-	-	-
Pertambangan		-	5.076.034.507	-	5.076.034.507
Panas Bumi			5.076.034.507	-	5.076.034.507
Kehutanan					
Iuran Produksi	-	-			
Iuran Tetap		-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah			-	-	-
Perikanan	-	201.287.730	11.007.271.016	5.705.271.911	5.302.096.105
DR	-				
PHT	-	-	9.707.964.038	5.705.271.911	4.002.692.127
PNBP		201.287.730	1.299.306.978	-	1.299.306.978
Perikanan				-	-
Grand Total	-	201.287.730	19.073.265.661	5.713.077.007	13.360.281.784

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kab. Malinau

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2020 (KMK No. 37/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (4)	(6)
Pajak	25.610.742.452	-	6.352.353.680	17.270.838.663	1.028.070.329
PPh	2.195.313.373	-	1.309.920.070	1.165.895.673	
PPh Pasal 21	2.018.387.481	-	965.972.150	1.052.341.051	-
PPh Pasal 25/29	176.925.892	-	54.561.120	2.754.350	-
PBB	20.119.123.360	-	5.332.950.120	16.097.142.702	1.028.070.329
Bagi Rata	1.341.966.998		285.690.720	1.726.276.998	
Bagian Daerah Migas	35.565.543		101.970.000		130.349.791
Bagian Daerah Non Migas	16.514.355.704	-	2.636.926.700	13.876.126.704	-
Bagian Daerah Pesisir Utara	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Penghasil	1.010.270.811	-	634.582.320	-	827.063.181
Bagian Daerah Penghasil Lainnya					
Bagian Daerah Sekitar Penghasil	215.599.707		6.000.000	276.691.101	
Biaya Pemungutan Migas	8.901.511	-	14.304.600	-	5.413.781
Biaya Pemungutan Non Migas	86.331.539	-	91.746.000	474.383.553	-
Biaya Pemungutan Pesisir Utara					
Biaya Pemungutan Penghasil	2.266.700		17.267.700		34.984.500
Biaya Pemungutan Pekerjaan	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Sekitar Penghasil	7.120.021	-	398.800	7.177.224	-
CHT					
DAK	171.540.794	4.352.219.050	10.425.070.450		27.313.270.058
Migas	-	4.603.846.503	160.513.000		4.787.068.503
Minyak Bumi 15%	-	2.979.520.320	174.080.900	-	4.153.781.160
Minyak Bumi 0,5%		132.456.857	5.857.700	-	188.191.557
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus					
Gas Bumi 69%		2.217.730.050	3.210.200		160.706.190
Gas Bumi 0,5%	-	9.057.153	51.000		9.111.153
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Panas Bumi	12.703.114	7.203.503.518	3.369.450.600	-	16.756.556.032
Pertambangan	12.703.114	-	86.036.725	-	75.605.111
Kehutanan		7.309.503.518	3.283.354.575	-	16.080.837.907
Pajak Rokok					
Dana Perimbangan	-				
Dana Desa	-	-	-	-	-
Reforma Agraria Pemerintah		-	-	-	-
Kehutanan		23.758.569.985	3.556.101.450		3.014.001.535
DAK	-				
DBHCT	-	2.527.645.302	636.324.050	-	3.243.669.950
PBHTL		1.524.285	2.379.777.800	-	2.461.301.895
Perikanan	139.136.680		316.981.050	-	155.407.020
Grand Total	29.783.531.908	47.012.219.206	40.796.202.920	17.270.838.663	88.114.911.491

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Kab. Nunukan

(dalam rupiah)

Jenis DBH	Kurang Bayar TA 2018	Kurang Bayar TA 2019	Lebih Bayar TA 2019 (PMK No. 25/PMK.07/2021)	Penyelesaian Lebih Bayar TA 2019 (SK DJPK No. 17/KM.7/2021)	Sisa Lebih Bayar TA 2019 (SK DJPK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
Pajak	-		1.152.089.619	1.001.263.479	
PPh	-	-	141.086.221	141.086.221	
PPh Pasal 21		-	-	-	-
PPh Pasal 25/29		-	141.086.221	141.086.221	-
PBB			1.011.003.398	860.177.258	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-				
Bagian Daerah Provinsi		-			
Bagian Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Minyak Bumi			-	-	-
Bagian Daerah Penerimaan Gas Bumi			1.220.261.086	1.220.261.086	-
Bagian Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-	3.119.701.094	3.119.701.094	
Bagian Daerah Sektor Kehutanan		-	-		
Bagian Pemerintah dari Minyak Bumi				-	-
Bagian Pemerintah dari Gas Bumi					
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Panas Bumi	-				
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Mineral dan Batubara		-	5.950.109	5.950.109	
Bagian Pemerintah dari Perikanan			5.585.968	151.536.368	-
Bagian Pemerintah dari Pertambangan Minyak Bumi			-	-	-
Cukai	-				
SDA	-	193.491.795	60.128.401.364	43.752.659.484	45.376.711.880
Migas		-	13.013.949.634	7.074.349.341	6.031.970.385
Minyak Bumi 15%			10.668.737.292	5.086.637.627	5.636.564.573
Minyak Bumi 0,5%			355.142.112	167.858.758	187.653.354
Minyak Bumi Sektor Pertambangan Panas Bumi	-				
Gas Bumi 30%	-	-	2.990.251.771	2.820.194.671	220.151.229
Gas Bumi 0,5%		-	47.437.630	43.768.342	3.669.211
Gas Bumi Bagian Pemerintah Daerah		-	-	-	-
Mineral			38.060.021.447	6.577.260.515	33.482.760.932
Pertambangan			18.066.077.090	6.979.260.713	13.086.717.932
Kehutanan	-		20.023.223.511		20.023.223.511
Perikanan	-	-			
Jaminan Reklamasi	-	-	-	-	
Tambang Lainnya		-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Panas Bumi			-	-	-
Kehutanan	-	193.491.795	7.226.820.070		7.226.820.070
DAK	-	-			
PNBP	-	-	285.440.020	-	1.285.440.020
PPh 21		193.661.795	5.941.380.070	-	5.941.380.070
Perikanan					
Grand Total	-	83.661.795	61.923.761.213	49.416.770.263	45.376.711.880

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH PADA TAHUN 2021

Lampiran Nomor [illegible]

(dalam rupiah)

JENIS DBH	PMK Nomor [illegible] Tahun 2020	Ls Desember TA 2020	Penyaluran PMK [illegible] Sampai dengan TA 2020 (PMK No. [illegible]/KM.7/2021)	PMK TA 2021 yang telah dialokasikan	LB TA 2020 yang telah dialokasikan
[1]	[7]	[8]	[9]	[10] [11]	[14]
Pajak	[illegible].350.430.720	-	[illegible].126.475.409	26.221.504.294	-
PPh	2.323.894.875	-	1.050.654.840	1.273.730.175	-
PPh Pasal 21	2.058.870.709		988.717.405	1.070.50[illegible].350	-
PPh Pasal 22/23	264.588.210		62.172.705	[illegible]3.379.825	-
PBB	22.017.035.324		7.047.511.103	24.969.221.112	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.061.080.696		236.089.100	1.736.270.299	
Bagian Daerah Bukan Penerimaan Migas	7.080.080.708	-	1.[illegible]59.658.100	9.441.[illegible].296	-
Bagian Daerah Penerimaan Migas	4.320.710.667	-	2.818.435.301	6.937.[illegible]74.867	-
Bagian Daerah Penerimaan Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi			-	-	
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi	863.845.697		956.182.700	29.212.997	
Bagian Daerah Penerimaan Pertambangan Gas Bumi	1.[illegible]7.[illegible]64.367	-	2.203.[illegible]1.705	3.[illegible]36.[illegible]47.367	
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.780.007	-	8.634.302	256.694.707	-
Biaya Pemungutan Migas	261.[illegible]94.832		40.[illegible]3.560	253.[illegible]17.267	-
Biaya Pemungutan Non Migas	295.769.936		90.132.705	210.[illegible]26.386	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-			
Biaya Pemungutan Pajak Rokok	3[illegible].810.007	-	25.755.600	1.055.465	-
Biaya Pemungutan PPh Pasal 21	501.559.619		167.310.500	[illegible]67.310.219	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7[illegible]65.07[illegible]		294.500	[illegible].087.221	
DBH	-	-			
SDA	[illegible].[illegible]31.821.024	11.107.659.070	2.765.274.535	[illegible]52.779.[illegible]94	[illegible]5.684.697.065
Migas		[illegible].771.168.054	261.662.[illegible]30	-	6.095.845.35[illegible]
Minyak Bumi 15%		5.[illegible]18.867.080	240.377.400	-	[illegible].196.345.300
Minyak Bumi 0,5%	-	190.295.257	8.[illegible]2.930		220.697.[illegible]97
Setoran Bumi dalam Rangka Otsus	-	-			
Gas Bumi 30%	-	567.557.579	1.907.020	-	57[illegible].494.522
Gas Bumi 0,5%		5.[illegible]33.373	68.220	-	9.534.775
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-		-	-
Pertambangan	196.206.[illegible]87	[illegible].125.221.761	8.[illegible]19.307.775	[illegible]87.[illegible]1.607	[illegible].[illegible]40.[illegible]4.767
Panas Bumi	456.662.294		101.[illegible]93.725	[illegible]87.[illegible]1.607	
Kehutanan	-	5.[illegible]43.[illegible]91.461	9.[illegible]17.922.300		[illegible]1.[illegible]16.[illegible]14.761
Pertambangan Umum	-	-	-	-	
Iuran Eksploitasi		-	-	-	-
Iuran Tetap				-	-
Setoran Bagian Pemerintah Kehutanan	[illegible].08[illegible].66[illegible].[illegible]52	2.[illegible]10.[illegible]58.365	[illegible].[illegible]97.[illegible]21.207	[illegible].[illegible]16.[illegible]87.[illegible]25	9.200.[illegible]10.920
DR	-	-	-	-	-
PSDH	[illegible].[illegible]10.[illegible]35.930		17.[illegible]57.[illegible]25	[illegible].[illegible]97.[illegible]25	-
DBHP		2.[illegible]20.[illegible]16.220	[illegible].[illegible]40.[illegible]38.[illegible]75	-	9.200.[illegible]10.030
Perikanan	159.[illegible]86.980		[illegible]10.[illegible]82.[illegible]90		[illegible]27.[illegible]96.920
Grand Total	36.[illegible]71.[illegible]30.[illegible]28	- 167.[illegible]59.[illegible]70	20.[illegible]9.[illegible]10.725	2[illegible].[illegible]7[illegible].[illegible]96	36.[illegible]94.[illegible]93.[illegible]03

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kolom Tambahan

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	Alokasi KB TA 2019 (PMK No. 27/PMK.07/2021)	Penjelasan Alokasi KB TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)	Total KB TA 2019 (KMK No. 3/KM.7/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
Pajak	-		1.013.795.172	2.020.990.737	1.006.820.041
PPh	-	-	4.970.577.450		1.770.577.450
PPh Pasal 21		-	2.973.939.749	-	2.973.939.749
PPh Pasal 25/29		-	1.840.637.701	-	840.637.701
PPN			2.042.493.393	2.020.990.737	21.502.656
Bagi Rata					
Bagian Daerah Aceh	-				
Bagian Daerah Dan Maras		-	-		-
Bagian Daerah Papua Barat		-	-	-	-
Bagian Daerah Papua			300.838.533	300.838.533	-
Bagian Daerah Perhitungan	-		1.124.491.102	820.154.185	304.336.917
Bagian Daerah Bekas Lapindo	-	-			
Bagian Pemungutan Migas		-	-	-	-
Bagian Pemungutan Non Migas			60.172.150	-	60.172.150
Bagian Pemerintah Pusat Lain	-				
Bagian Pemungutan Pertambangan	-	-	89.972.009		89.833.309
Bagian Pemungutan Perkebunan		-	75.636.112	-	75.636.112
Bagian Pemungutan Sektor Lainnya			-	-	-
OPT	-				
PPh	-	26.810.702	3.139.183.497		3.134.183.807
Migas		-	691.995.689		988.875.107
Minyak Bumi 15%		-	-	-	-
Minyak Bumi 0,5%			-	-	-
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-				
Gas Bumi 30%	-		956.750.509		965.750.609
Gas Bumi 0,5%	-	-	26.121.493		23.121.193
Gas Bumi dalam Rangka Otsus		-	-	-	-
Mineral		-	10.725.307	-	10.725.307
Tambang			-	-	-
Royalti			10.725.307		10.725.307
Pajak Bumi	-				
Cukai Produksi	-	-			
Cukai Hasil		-	-	-	-
Sebagian Bagian Daerah Lain			-	-	-
Kehutanan	-	128.810.702	2.130.085.108		2.130.085.108
PSDH	-	-			
DR PSDH		-	-	-	-
TOTAL		126.810.702	2.130.783.407	-	2.130.587.407
Perikanan					
Grand Total	-	126.810.702	10.149.093.045	2.020.990.737	8.110.980.918

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH
PADA TAHUN 2021

Kota Tarakan

(dalam rupiah)

URAIAN DBH	KB Desember TA 2020	LB Desember TA 2020	Penetapan KB DBH Semester I TA 2021 (KMK No. 647/KMK.07/2021)	KB TA 2020 yang belum dialokasikan	LB TA 2020 yang belum dialokasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6)
Pajak	5.784.468.971		5.719.000.320	65.468.651	
PPh	5.236.741.258		5.191.503.100	45.238.158	
PPh Pasal 21	4.316.708.018		4.198.503.420	118.204.598	
PPh Pasal 25/29	919.944.373		992.999.680	(73.055.307)	
PPN	547.727.713		527.496.820	20.230.893	
Bagi Rata	591.369.969		200.699.700	390.670.269	
Bagian Daerah Migas	2.645.377.571		3.308.051.640	(662.674.069)	
Bagian Daerah Non Migas	-	-	-	-	-
Bagian Daerah Pertambangan Umum		-	-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan					
Bagian Daerah Kehutanan	-				
Bagian Daerah Setoran Langsung	215.593.307	-	9.504.320	206.088.987	-
Bagian Pemerintah Migas	1.189.301.743	-	474.483.720	714.818.023	-
Bagian Pemerintah Non Migas			-		
Bagian Pemerintah Pertambangan Umum	-				
Bagian Pemerintah Perkebunan	-	-			-
Bagian Pemerintah Kehutanan		-	-	-	-
Bagian Pemerintah Setoran Langsung	7.160.225		209.800	7.197.201	
CHT	-				
SDA	172.892.215	3.050.762.606	6.607.721.350		(3.434.066.529)
Migas		2.771.955.736	587.731.100	-	2.184.226.836
Minyak Bumi (85%)		2.702.430.860	8.436.336.300	-	(5.733.905.440)
Minyak Bumi (15%)		223.708.027	17.545.200		287.093.827
Minyak Bumi Sebelum Bangko Offset	-				
Gas Bumi (70%)	-	1.196.011.629	9.736.000		1.268.100.329
Gas Bumi (30%)	-	85.972.786	63.100	-	28.155.686
Gas Bumi sebelum Bangko Offset	-	-	-	-	-
Pertambangan	1.603.339	-	205.096.350	-	(203.492.911)
Kehutanan					
Panas Bumi	1.603.339		1.206.999.300		(1.205.395.961)
Perikanan	-				
Bunga Deposito	-	-	-	-	-
Bunga Bank		-	-	-	-
Pungutan Ekspor Komoditi			-	-	-
Kehutanan		171.294.319	1.111.990.950		(940.696.631)
DR	-	-		-	
IUPHH	-	-	-	-	-
PSDH		171.294.319	1.111.990.950	-	(940.696.631)
Perikanan	55.198.982		316.281.000		(261.082.018)
Grand Total	33.057.202.792	9.010.762.735	14.668.994.350	18.388.208.442	(5.658.231.615)

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR PADA TAHUN 2021

Kab. Tana Tidung

(dalam rupiah)

JENIS PPH	PPH TA 2016	KURANG (LEBIH) BAYAR	Dana Bagi Hasil Pajak TA 2019 (PMK No. 20/PMK.07/2021)	Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak TA 2019 (KEP-[illegible]/PK/2021)	Selisih Dana Bagi Hasil Pajak TA 2019 (PMK No. 57/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)
PPh			1.225.136.195	1.[illegible].375	[illegible].917
PPh		-	102.535.69[illegible]	102.[illegible].531	
PPh Pasal 21	-	-	86.678.5[illegible]	86.[illegible].520	-
PPh Pasal 25/29	-	-	[illegible].[illegible]	[illegible]	-
PPh	-	-	1.11[illegible].00[illegible]	1.[illegible]	[illegible]
Pajak Rokok	-			-	-
Pajak Daerah Migas					
Pajak Daerah Non Migas					
Pajak Daerah Jenis Tarif					
Pajak Daerah Jenis Lainnya			980.079.117	980.079.117	
Pajak Daerah Jenis Pungut			80.[illegible].[illegible]		80.[illegible].[illegible]
Pajak Daerah Belum Terinci			-		
Biaya Pemungutan Migas		-	-	-	
Biaya Pemungutan Non Migas		-	-	-	
Biaya Pemungutan Bumi Dan		-	-	-	
Biaya Pemungutan Perhutanan		-	41.[illegible].[illegible]	41.[illegible]	
Biaya Pemungutan Pertambangan		-	4.178.376	-	4.178.376
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	-	-	-	-	-
CHT	-	-	-	-	-

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR PADA TAHUN 2021

Kab. Tana Tidung

(dalam rupiah)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Penyaluran KB DBH Semester I TA 2022 (KMS No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum dibayarkan	LB TA 2020 yang belum dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	(6)
Pajak	21.770.432.033	-	2.991.085.100	7.764.540.855	-
PPh	1.630.122.881	-	600.000.000	569.044.431	-
PPh Pasal 21	1.575.033.096	-	600.000.000	969.855.045	-
PPh Pasal 25/29	80.539.785		41.321.200	39.218.585	
PBB	[illegible]		2.391.085.700	20.827.270.077	
Bagi Rata	1.551.909.999		255.680.700	1.726.270.298	
Bagian Daerah Migas	2.168.518.870		317.737.600	661.781.273	
Bagian Daerah Non Migas	16.170.927.000		921.753.600	16.139.214.333	-
Bagian Daerah Pajak Daerah			-	-	-
Bagian Daerah Perkebunan	427.171.813	-	410.733.313	17.438.15	-
Bagian Daerah Pertambangan	2.004.066.36	-	691.713.600	418.355.264	-
Bagian Daerah Sektor Lainnya	213.700.357	-	8.856.300	204.99[illegible].737	-
Biaya Pemungutan Migas	40.392.366	-	17.913.400	22.401.888	-
Biaya Pemungutan Non Migas	372.007.431	-	11.240.600	361.916.831	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	17.803.213	-	17.[illegible].100	723.0[illegible]	-
Biaya Pemungutan Pertambangan	101.853.618	-	33.[illegible].900	68.[illegible].918	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	7.[illegible].24	-	56.900	7.[illegible].344	-
CHT	-	-			-

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR PADA TAHUN 2021

Kab. Tana Tidung

(dalam rupiah)

Jenis DBH	KB TA 2018	KB TA 2019	LB s.d TA 2019 (KMK No. 28/PMK.07/2020)	Penyelesaian LB s.d TA 2019 (KMK No. 31/PMK.07/2021)	Sisa LB s.d TA 2019 (KMK No. 31/PMK.07/2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
PPh		198.701.773	3.087.936.651	200.562.027	887.374.624
Pasal 21		-	2.161.222.391	-	2.161.222.391
Pasal 25/29 Orang Pribadi	-	-	1.845.699.959	-	845.699.959
Pasal 25/29 Badan	-	-	91.229.209		91.229.209
Pasal 26	-	-			-
PPh Pasal 26	-		259.891.291		259.891.291
PPh Pasal 4(2)	-		7.315.191		7.315.191
PPh Pasal 15	-			-	
PPh Migas			7.726.770.668	-	7.726.770.668
Perikanan			7.185.751.361	-	7.185.751.361
Pertambangan			10.725.307	-	10.725.307
Kehutanan		-	-	-	-
Panas Bumi		-	-	-	-
Pertambangan Umum		-	-	-	-
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		-	-	-	-
Kehutanan		198.701.773	5.421.934.543	200.562.027	5.221.372.516
Iuran Tetap		-	-	-	-
Iuran Eksploitasi		-	1.612.666.660	200.562.027	1.412.104.633
Provisi		198.701.773	2.016.185.900		2.016.185.900
Perikanan	-	-			-
Grand Total	-	198.701.773	17.397.672.910	1.330.707.285	11.970.965.931

www.jdih.kemenkeu.go.id

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR PADA TAHUN 2021

Kab. Tana Tidung

(dalam rupiah)

JENIS DBH	KB Definitif TA 2020	LB Definitif TA 2020	Penyaluran KB DBH Sementara TA 2020 (KMK No. 3/KM.7/2021)	KB TA 2020 yang belum disalurkan	LB TA 2020 yang belum disalurkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)
SDA	21.099.617.580	8.866.416.785	9.319.065.475	17.489.406.050	12.575.260.730
Migas	-	4.603.845.503	183.213.000	-	4.787.058.503
Minyak Bumi 15%	-	3.979.700.500	174.080.600	-	4.153.781.100
Minyak Bumi 0,5%	-	132.656.857	5.803.700	-	138.459.557
Minyak Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Gas Bumi 30%	-	483.430.990	3.275.200	-	486.706.190
Gas Bumi 0,5%	-	8.057.156	54.500	-	8.111.656
Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-
Minerba	22.940.430.600	-	5.451.024.550	17.489.406.050	-
Landrent	229.964.465	-	58.245.175	171.719.290	-
Royalti	22.710.466.135	-	5.392.779.375	17.317.686.760	-
Panas Bumi	-	-	-	-	-
Iuran Produksi	-	-	-	-	-
Iuran tetap	-	-	-	-	-
Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	4.262.571.282	3.367.936.925	-	7.630.508.207
DR	-	-	-	-	-
IIUPH	-	1.228.715.000	541.673.500	-	1.770.388.500
PSDH	-	3.033.856.282	2.826.263.425	-	5.860.119.707
Perikanan	159.186.980	-	316.881.000	-	157.694.020
Grand Total	47.870.050.535	8.866.416.785	12.305.140.575	39.273.753.905	12.575.260.730

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

www.jdih.kemenkeu.go.id